

Peraturan Bupati Trenggalek
Nomor 16 Tahun 2026 tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2027

RKPD

TAHUN 2027

"Penguatan Peran Komunitas Dan Lintas Sektor Dalam Rangka Mewujudkan Kota Atraktif"

BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah diperlukan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dokumen perencanaan tahunan agar selaras dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah dibutuhkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai landasan operasional;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran program RPJMD Tahun 2025-2029.

(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
b. program prioritas pembangunan Daerah;
c. rencana kerja dan pendanaan;
d. arah kebijakan pembangunan nasional meliputi tema, sasaran pembangunan nasional, prioritas nasional, program prioritas, program hasil terbaik cepat, kegiatan prioritas utama, proyek strategis nasional, dan program kerja prioritas nasional;
e. program strategis nasional; dan
f. kesepakatan rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan Tahun 2026.

(3) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman:
a. penyusunan KUA dan PPAS tahun 2027 sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2027; dan
b. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. bab I berisi tentang pendahuluan;
b. bab II berisi tentang gambaran umum kondisi daerah;
c. bab III berisi tentang kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
d. bab IV berisi tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
e. bab V berisi tentang rencana kerja dan pendanaan daerah;
f. bab VI berisi tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. bab VII berisi tentang penutup.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 6 Juli 2026
BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 6 Juli 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

STEFANUS TRIADI ATMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH SRI MULYANTO
NIP. 197605201996031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai dokumen perencanaan tahunan yang strategis. RKPD ini disusun sebagai pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025–2029, yang memuat arah kebijakan pembangunan tahunan, prioritas pembangunan daerah, serta program perangkat daerah secara terukur dan terarah.

RKPD Tahun 2027 Kabupaten Trenggalek mengusung tema *"Penguatan Peran Komunitas dan Lintas Sektor dalam Rangka Mewujudkan Kota Atraktif"*. Penguatan peran komunitas diwujudkan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat, pelaku usaha lokal, pemuda, perempuan, serta komunitas desa dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis potensi lokal. Sementara itu, pendekatan lintas sektor menekankan pentingnya integrasi peran antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan secara kolaboratif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika perubahan. Konsep "kota atraktif" dalam konteks Kabupaten Trenggalek tidak semata dimaknai sebagai kawasan perkotaan yang maju secara fisik, tetapi lebih pada terwujudnya wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Kota atraktif diartikan sebagai ruang hidup yang mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, menyediakan layanan dasar yang berkualitas, menghadirkan ruang publik yang hidup dan inklusif, serta menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.Melalui tema ini, pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 diarahkan untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang kolaboratif, di mana komunitas menjadi penggerak utama, didukung oleh tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis data, serta infrastruktur yang memadai.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari unsur perangkat daerah, pemangku kepentingan, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat. Besar harapan kami, RKPD Tahun 2027 ini dapat menjadi panduan pelaksanaan pembangunan daerah yang lebih adaptif, inovatif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek.

DAFTAR ISI

BAB I	**PENDAHULUAN**	**I**	**1**
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I	6
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I	10
	1.3.1. Kedudukan dan Fungsi Hierarkis	I	10
	1.3.2. Mekanisme Sinkronisasi dan Harmonisasi	I	11
	1.3.3. Muara Akhir : Keterkaitan dengan Penganggaran	I	11
	1.4 Maksud dan Tujuan	I	13
	1.5 Sistematika Penulisan	I	15
BAB II	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**	**II**	**1**
	2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II	1
	2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II	1
	2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	58
	2.1.3. Aspek Daya Saing	II	92
	2.1.4. Aspek Pelayanan Umum	II	132
	2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II	225
	2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah	II	251
	2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	II	251
	2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II	252
BAB III	**KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**	**III**	**1**
	3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III	1
	3.1.1 Dinamika Perekonomian Global	III	2
	3.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional	III	4
	3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur	III	8
	3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Trenggalek	III	9
	3.1.5 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	III	19
	3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III	21
	3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III	23
	3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III	29
	3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	III	35
	3.2.4. Alternatif Pendanaan/Pembiayaan Pembangunan	III	38
BAB IV	**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN**	**IV**	**1**
	4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV	1
	4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi	IV	5
	4.2.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027	IV	6
	4.2.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027	IV	9
	4.3 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2027	IV	11
	4.3.1 Tema Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2027	IV	13

	4.3.2	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Trenggalek 2027	IV	14
	4.3.3	Rencana Aksi Kabupaten Trenggalek	IV	16
	4.3.4	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV	34
	4.3.5	Program Strategis Jangka Menengah Kabupaten Trenggalek	IV	35
	4.3.6	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan 2027 Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek	IV	56
	4.3.7	Kebijakan Pendukung Capaian SPM	IV	59
	4.3.8	Pendukung Program Nasional	IV	74
	4.3.9	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah	IV	75
BAB V	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**		**V**	**1**
	5.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027	V	1
	5.2	Program Prioritas Daerah	V	5
	5.3	Kontribusi Terhadap Pencapaian Nasional	V	28
	5.4	Rencana Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	V	28
	5.5	Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem	V	29
BAB VI	**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**		**VI**	**1**
	6.1	Indikator Kinerja Makro Pembangunan	VI	1
	6.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI	2
	6.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	VI	3
BAB VII	**PENUTUP**		**VII**	**1**
	7.1.	Kesimpulan	VII	1
	7.2.	Kaidah Pelaksanaan	VII	2

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah Administrasi di Kabupaten Trenggalek Menurut Kecamatan Tahun 2025	II	3
Tabel II.2	Tingkat Kelerengan di Kabupaten Trenggalek	II	4
Tabel II.3	Ketinggian Wilayah (mdpl) di Kabupaten Trenggalek Menurut Kecamatan Tahun 2025	II	5
Tabel II.4	Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Trenggalek Tahun 2025	II	8
Tabel II.5	Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun BMKG di Kabupaten Trenggalek Tahun 2025	II	10
Tabel II.6	Kategori Daya Dukung Lahan Terbangun	II	17
Tabel II.7	Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Trenggalek Tahun 2023	II	17
Tabel II.8	Proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Trenggalek Tahun 2029	II	19
Tabel II.9	Daya Dukung Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2025	II	22
Tabel II.10	Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025	II	23
Tabel II.11	Proyeksi Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029	II	24
Tabel II.12	Perhitungan Ketersediaan Air Kabupaten Trenggalek	II	28
Tabel II.13	Potensi Ketersediaan Air Kabupaten Trenggalek	II	31
Tabel II.14	Potensi Kebutuhan Air Kabupaten Trenggalek	II	32
Tabel II.15	Proyeksi Status Daya Dukung Air	II	34
Tabel II.16	Koefisien Lindung	II	37
Tabel II.17	Koefisien Lindung Kabupaten Trenggalek	II	38
Tabel II.18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	45
Tabel II.19	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Tahun 2023-2025	II	48
Tabel II.20	Kejadian Bencana Alam Kabupaten Trenggalek Tahun 2025	II	50
Tabel II.21	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	53
Tabel II.22	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	53
Tabel II.23	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	54
Tabel II.24	Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	55
Tabel II.25	Rasio Ketergantungan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	56
Tabel II.26	Proyeksi Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029	II	58
Tabel II.27	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	60
Tabel II.28	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	62
Tabel II.29	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Trenggalek (miliar rupiah), 2021–2025	II	63
Tabel II.30	Indikator Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	65

Tabel II.31	Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	74
Tabel II.32	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025	II	76
Tabel II.33	Indikator AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	80
Tabel II.34	Jumlah Kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	84
Tabel II.35	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	86
Tabel II.36	Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	87
Tabel II.37	Capaian Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	90
Tabel II.38	Cagar Budaya Kabupaten Trenggalek	II	91
Tabel II.39	Angka Ketergantungan (Persen) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	93
Tabel II.40	Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025 (%)	II	96
Tabel II.41	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	98
Tabel II.42	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2021-2025	II	99
Tabel II.43	Capaian Perekonomian Sektor Pertanian Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	102
Tabel II.44	Klasifikasi Skor Indeks Ekonomi Hijau	II	103
Tabel II.45	Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	104
Tabel II.46	Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2024	II	106
Tabel II.47	Kondisi Jalan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2025	II	108
Tabel II.48	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh	II	111
Tabel II.49	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2025	II	119
Tabel II.50	Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025 (Milyar Rupiah)	II	126
Tabel II.51	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II	128
Tabel II.52	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Kabupaten Trenggalek 2021-2025	II	131
Tabel II.53	Indeks Zakat Nasional (IZN) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	142
Tabel II.54	Indikator Trantibum, Kebakaran dan Aksi HAM di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	144
Tabel II.55	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2025	II	147
Tabel II.56	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	148
Tabel II.57	Skor Literasi dan Numerasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	150
Tabel II.58	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Trenggalek	II	157
Tabel II.59	Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	159
Tabel II.60	Capaian Indikator Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	161

Tabel II.61	Capaian Indikator Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-20254	II	162
Tabel II.62	Tabel Jumlah Desa / Kelurahan Rawan Pangan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	166
Tabel II.63	Persentase Pengurusan Penggunaan Kawasan Hutan untuk PSN dan PSD	II	169
Tabel II.64	Emisi CO2 (ton CO2) Kabupaten Trenggalek	II	170
Tabel II.65	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	162
Tabel II.66	Jumlah Desa berdasarkan Kategori Desa Tahun 2021-2025 di Kabupaten Trenggalek	II	173
Tabel II.67	Jumlah BUMDes berdasarkan Kategori BUMDes Tahun 2021-2025 di Kabupaten Trenggalek	II	173
Tabel II.68	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO) Kabupaten Trenggalek Tahun 2024-2025	II	182
Tabel II.69	Persentase Budaya yang Dikembangkan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	186
Tabel II.70	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024	II	188
Tabel II.71	Daftar Arsiparis Kabupaten Trenggalek Tahun 2025	II	190
Tabel II.72	Data Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	191
Tabel II.73	Nilai Tukar Petani di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	196
Tabel II.74	NTPT di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	197
Tabel II.75	Persentase Pertumbuhan Ekspor Non-Migas di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 – 2025	II	199
Tabel II.76	Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	200
Tabel II.77	Data Penempatan Transmigran Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	201
Tabel II.78	Persentase Transmigran yang Tidak Meninggalkan Daerah Penempatan	II	202
Tabel II.79	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	209
Tabel II.80	Indeks Sistem Merit Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	209
Tabel II.81	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Tahun 2021-2025	II	210
Tabel II.82	Kajian Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2024	II	211
Tabel II.83	Penerapan Standar pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	216
Tabel II.84	Penerapan Standar pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	217
Tabel II.85	Penerapan Standar pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	220
Tabel II.86	Penerapan Standar pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	221
Tabel II.87	Penerapan Standar pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	222

Tabel II.88	Penerapan Standar pelayanan Minimal pada Bidang Urusan Sosial Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	224
Tabel II.89	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029	II	226
Tabel II.90	Realisasi Belanja Daerah Pergeseran Perubahan APBD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Berdasarkan Urusan Sampai Dengan Triwulan I	II	228
Tabel II.91	Realisasi Belanja Langsung APBD Tahun 2026 Berdasarkan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I	II	234
Tabel II.92	Realisasi Belanja APBD Tahun 2026 Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I	II	239
Tabel II.93	Realisasi Belanja APBD Tahun 2026 Berdasarkan Prioritas RPJMD	II	241
Tabel II.94	Realisasi Belanja Langsung TW I Tahun 2026 Berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026	II	242
Tabel II.95	Realisasi Belanja Langsung TW I Tahun 2026 Berdasarkan Prioritas Nasional Tahun 2026	II	244
Tabel II.96	Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Sampai Dengan Triwulan I	II	247
Tabel III.1	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	III	11
Tabel III.2	Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	III	15
Tabel III.3	Indikator Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	III	17
Tabel III.4	Capaian Indikator Makro Ekonomi Tahun 2023-2025 dan Target Tahun 2026-2027 Kabupaten Trenggalek	III	19
Tabel III.5	Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2027 (Dalam Rupiah)	III	25
Tabel III.6	Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2027 (Dalam Rupiah)	III	30
Tabel III.7	Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2027 (Dalam Rupiah)	III	37
Tabel IV.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029	IV	4
Tabel IV.2	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2027 Provinsi Jawa Timur	IV	10
Tabel IV.3	Relevansi Strategi RPJMD dan Prioritas Pembangunan Tahun 2027	IV	14
Tabel IV.4	Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2027	IV	15
Tabel IV.5	Program Prioritas, Penjabaran Prioritas, dan Rencana Aksi Kabupaten Trenggalek Tahun 2027	IV	17
Tabel IV.6	TGX Ekonomi Karbon	IV	37
Tabel IV.7	TGX Rantai Nilai	IV	38
Tabel IV.8	TGX Halal	IV	40
Tabel IV.9	TGX Kerja	IV	41
Tabel IV.10	TGX Pariwisata	IV	43
Tabel IV.11	TGX.co.id	IV	44
Tabel IV.12	TGX Atraktif	IV	46
Tabel IV.13	TGX Lestari	IV	48
Tabel IV.14	TGX Investasi Hijau	IV	52
Tabel IV.15	TGX Hidup Berkualitas	IV	53

Tabel IV.16	TGX Inklusif	IV	56
Tabel IV.17	Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Kabupaten Trenggalek Tahun 2027	IV	58
Tabel IV.18	Rencana Kegiatan yang bersumber dari Pinjaman Daerah	IV	60
Tabel IV.19	Realisasi SPM Kabupaten Trenggalek	IV	61
Tabel IV.20	Rencana Aksi Pendukung Pencapaian SPM Kabupaten Trenggalek Tahun 2027	IV	64
Tabel V.1	Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Menurut Urusan dan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2027	V	2
Tabel V.2	Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Daerah Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2027	V	3
Tabel V.3	Program Prioritas Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2027	V	5
Tabel VI.1	Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Trenggalek Tahun 2027	VI	2
Tabel VI.2	Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Trenggalek Tahun 2027	VI	2
Tabel VI.3	Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2027	VI	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027	I	5
Gambar I.2	Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I	13
Gambar II.1	Peta Batas Administrasi Kabupaten Trenggalek	II	2
Gambar II.2	Peta Kelerengan Kabupaten Trenggalek	II	5
Gambar II.3	Peta Geologi Kabupaten Trenggalek	II	7
Gambar II.4	Peta Hidrologi Kabupaten Trenggalek	II	9
Gambar II.5	Peta Curah Hujan Kabupaten Trenggalek	II	11
Gambar II.6	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Trenggalek	II	13
Gambar II.7	Peta Status Daya Dukung Lahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023	II	20
Gambar II.8	Peta Status Daya Dukung Lahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2029	II	21
Gambar II.9	Peta Status Daya Dukung Pangan Tahun 2023	II	27
Gambar II.10	Peta Proyeksi Status Daya Dukung Pangan Tahun 2029	II	27
Gambar II.11	Peta Ketersediaan Air Kabupaten Trenggalek	II	30
Gambar II.12	Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Trenggalek	II	37
Gambar II.13	Aspek, Variabel dan Indikator Indeks Inovasi Daerah	II	98
Gambar II.14	Metodologi Pengukuran Indeks Kota Hijau (IKH) Kabupaten Trenggalek	II	115
Gambar II.15	Kerangka Indeks Daya Saing Daerah	II	146
Gambar IV.1	Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2027	IV	8
Gambar IV.2	Konsep Kresna dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Trenggalek	IV	45

DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1	Luas Masing-Masing Penggunaan Lahan (ha)	II	12
Grafik II.2	Ketersediaan dan Jumlah Konsumsi Padi di Kabupaten Trenggalek	II	22
Grafik II.3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	39
Grafik II.4	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	42
Grafik II.5	Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	II	43
Grafik II.6	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	49
Grafik II.7	Indeks Konektivitas Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2025	II	52
Grafik II.8	Piramida Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2025	II	57
Grafik II.9	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2026	II	64
Grafik II.10	Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Trenggalek terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2025	II	65
Grafik II.11	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	67
Grafik II.12	Perbandingan PDB Perkapita Nasional dengan PDRB Perkapita Provinsi Jawa Timur dan PDRB Kabupaten Trenggalek (Juta Rupiah) Tahun 2021-2025	II	68
Grafik II.13	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	70
Grafik II.14	Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	70
Grafik II.15	Indeks Gini Kabupaten Trenggalek, dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2025	II	72
Grafik II.16	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2025	II	75
Grafik II.17	Pencapaian Strata Desa Siaga Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	81
Grafik II.18	Realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024-2025	II	82
Grafik II.19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	97
Grafik II.20	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2021-2025	II	100
Grafik II.21	Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	102
Grafik II.22	Realisasi Investasi (Triliun Rp) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	105
Grafik II.23	Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	109
Grafik II.24	Indeks Pemerataan Infrastruktur (IPIn) Kabupaten Trenggalek Tahun 2024-2025	II	112
Grafik II.25	Indeks Infrastruktur Kabupaten Trenggalek Tahun 2024-2025	II	114
Grafik II.26	Tingkat Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	117
Grafik II.27	Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	120
Grafik II.28	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	122

Grafik II.29	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	123
Grafik II.30	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	125
Grafik II.31	Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025 (Milyar Rupiah)	II	126
Grafik II.32	Incremental *Capital Output Rasio* (ICOR) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	129
Grafik II.33	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Trenggalek 2021-2025 (% PDRB)	II	130
Grafik II.34	Tingkat Kesempatan Kerja Kab. Trenggalek Tahun 2021-2025	II	132
Grafik II.35	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2025	II	134
Grafik II.36	Persentase Penyelesaian Konflik (%) Tahun 2021-2025	II	135
Grafik II.37	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	136
Grafik II.38	Hasil Penilaian *Monitoring Control for Prevention* (MCP) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	138
Grafik II.39	Realisasi Indeks Akses Keuangan Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2022 - 2025	II	139
Grafik II.40	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	141
Grafik II.41	Nilai Rata-Rata Sinergitas Kecamatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	142
Grafik II.42	Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	152
Grafik II.43	Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	153
Grafik II.44	Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	155
Grafik II.45	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	157
Grafik II.46	Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	160
Grafik II.47	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2021-2025	II	163
Grafik II.48	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	164
Grafik II.49	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	165
Grafik II.50	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Pangan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 -2025	II	167
Grafik II.51	Penurunan Emisi GRK kumulatif (tonCO2eq) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	171
Grafik II.52	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	175
Grafik II.53	Indeks Aksesibilitas	II	177
Grafik II.54	Hasil Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024	II	179
Grafik II.55	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	180
Grafik II.56	Realisasi Investasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025 (Triliun Rupiah)	II	181
Grafik II.57	Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Trenggalek Tahun 2024-2025	II	183
Grafik II.58	Nilai Hasil Penilaian Aspek Keamanan SPBE/ Pemerintahan Digital oleh Kementerian PAN RB	II	185
Grafik II.59	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	189

Grafik II.60	Data Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	191
Grafik II.61	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	193
Grafik II.62	Jumlah Wisatawan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	194
Grafik II.63	Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	200
Grafik II.64	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	203
Grafik II.65	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	204
Grafik II.66	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	205
Grafik II.67	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2025	II	206
Grafik II.68	Indeks Integritas (Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI)) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	II	214
Grafik III.1	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	III	12
Grafik III.2	Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	III	13
Grafik III.3	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025	III	14

BAB I

PENDAHULUAN

RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2027

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek tahun 2027 berlandaskan pada pemanfaatan potensi unggulan serta karakteristik khas daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Trenggalek merupakan kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Timur, memiliki kekayaan alam melimpah di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Dengan bentang alam yang terdiri atas pegunungan, pantai, dan kawasan pedesaan yang produktif, Kabupaten Trenggalek memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor agribisnis, ekowisata, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Pembangunan daerah nantinya diharapkan mampu memperkuat fondasi ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi, sekaligus menjawab tantangan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memahami bahwa karakteristik masyarakat Trenggalek yang berbasis budaya lokal dan semangat gotong royong menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sesuai amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan terdiri atas: Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) untuk jangka 20 Tahun, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk jangka 5 Tahunan, dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk jangka tahunan. Secara beruntun RPJPD dilaksanakan melalui RPJMD dalam 4 (empat) tahapan pembangunan tiap 5 Tahun. Begitu juga dengan RPJMD dilaksanakan melalui RKPD dalam 5 (lima) tahap pembangunan tiap 1 (satu) tahun. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas

pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program/Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1) *Teknokratik*, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2) *Partisipatif*, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;
3) *Politis*, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD dengan memperhatikan pula pokok-pokok pikiran yang berasal dari DPRD; dan
4) *Atas-bawah dan bawah-atas*, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan *bottom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas dari desa/kelurahan, kecamatan hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan.

Dengan pendekatan ini maka dalam penyusunan RKPD antara program, kegiatan, dan sub kegiatan dari tiap OPD diharapkan mampu mendukung pencapaian program lain dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Bupati Trenggalek yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045, merujuk pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 – 2029, memedomani RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027, serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang

sinergis dan terpadu anatara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan.

RKPD Kabupaten Trenggalek 2027 merupakan pelaksanaan RPJMD pada tahun ke 2 (dua) dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 yang disusun ditahun 2026. Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilakukan ditahun 2026 yang mana telah disahkannya dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Sehingga dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029. Dengan pelaksanaan pembangunan dan berbagai capaian pembangunan telah dapat dilihat dan dirasakan masyarakat Trenggalek, capaian pembangunan ini menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan di tahun mendatang. Dengan capaian pembangunan saat ini juga dapat menjadi tolak ukur dalam mengevaluasi kinerja, dan sebagai dasar dalam memperbaiki kinerja dan mencapai capaian pembangunan yang ditargetkan. Prioritas pembangunan daerah selaras dengan arah kebijakan nasional melalui Asta Cita Presiden 2025–2029, yang mencakup antara lain: percepatan pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, swasembada pangan, ekonomi berbasis kerakyatan, transformasi digital, serta pembangunan yang berkelanjutan dan adil. Dalam kerangka tersebut, program dan kegiatan tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat peran komunitas dan lintas sektor dalam rangka mewujudkan kota atraktif.

Selain itu, program prioritas daerah seperti penyediaan rumah layak huni untuk MBR, revitalisasi fasilitas kesehatan, pembangunan sekolah rakyat, serta implementasi program makan bergizi gratis menjadi fokus pembangunan Kabupaten Trenggalek yang kreatif, regeneratif, sejahtera, dan rendah emisi karbon. Seluruh kebijakan ini didesain untuk menjawab tantangan pembangunan daerah sekaligus mengakselerasi pencapaian tujuan nasional secara kontekstual dan berdampak nyata di tingkat lokal.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta merespons dinamika dan kebutuhan lokal. Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029 yang mengusung semangat transformasi menuju daerah yang kreatif, regeneratif, sejahtera, dan berkelanjutan. Dalam konteks prioritas nasional, pemerintah menempatkan kedaulatan pangan dan energi, penguatan ekonomi produktif dan inklusif, serta percepatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan sebagai titik berat pembangunan. Hal ini selaras dengan upaya Kabupaten Trenggalek untuk memperkuat peran komunitas dan lintas sektor dalam rangka mewujudkan kota atraktif.

Kebijakan pembangunan tahun 2027 di Kabupaten Trenggalek disusun dengan tema Penguatan Peran Komunitas dan Lintas Sektor dalam rangka

mewujudkan Kota Atraktif. Kota atraktif sebagaimana ditekankan pada tema RKPD 2027 adalah kota yang hidup, dinamis, dan inklusif. Untuk mewujudkannya, diperlukan penguatan peran komunitas dan lintas sektor. Komunitas lokal, pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat harus bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan menarik. Sebagaimana untuk mendukung tema pembangunan dalam RKPD 2027, dijabarkan pada 3 prioritas pembangunan yakni : pembangunan infrastrukktur publik yang partisipatif mendukung kota atraktif dan berkelanjutan, pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan berbasis komunitas, dan tata kelola pemerintahan berbasis ekologi dan data.

Pembangunan infrastruktur publik yang partisipatif merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Pembangunan infastruktur yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, Pengembangan Sistem Transportasi yang Berkelanjutan, Pembangunan Infrastruktur Hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta Pengembangan Infrastruktur Publik yang Inklusif ramah bagi penyandang disabilitas. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pemantauan pembangunan infrastruktur publik. Pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan berbasis komunitas merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah, Pengembangan Industri Kreatif: Kami akan mengembangkan industri kreatif, pengembangan kewirausahaan, pengembangan pasar.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Kami berkomitmen untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis ekologi dan data yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Program Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi didukung oleh pengembagan sistem informasi lingkungan yang dapat memantau dan mengelola kualitas lingkungan secara efektif, pengembangan kebijakan lingkungan yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan peningkatan infrastruktur hijau yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan serta peningkatan pendidikan lingkungan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan. Dengan demikian, kami yakin bahwa program tata kelola pemerintahan berbasis ekologi dan data dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah."

Seiring dengan meningkatnya risiko lingkungan dan krisis iklim, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menjadi isu lintas sektor yang turut

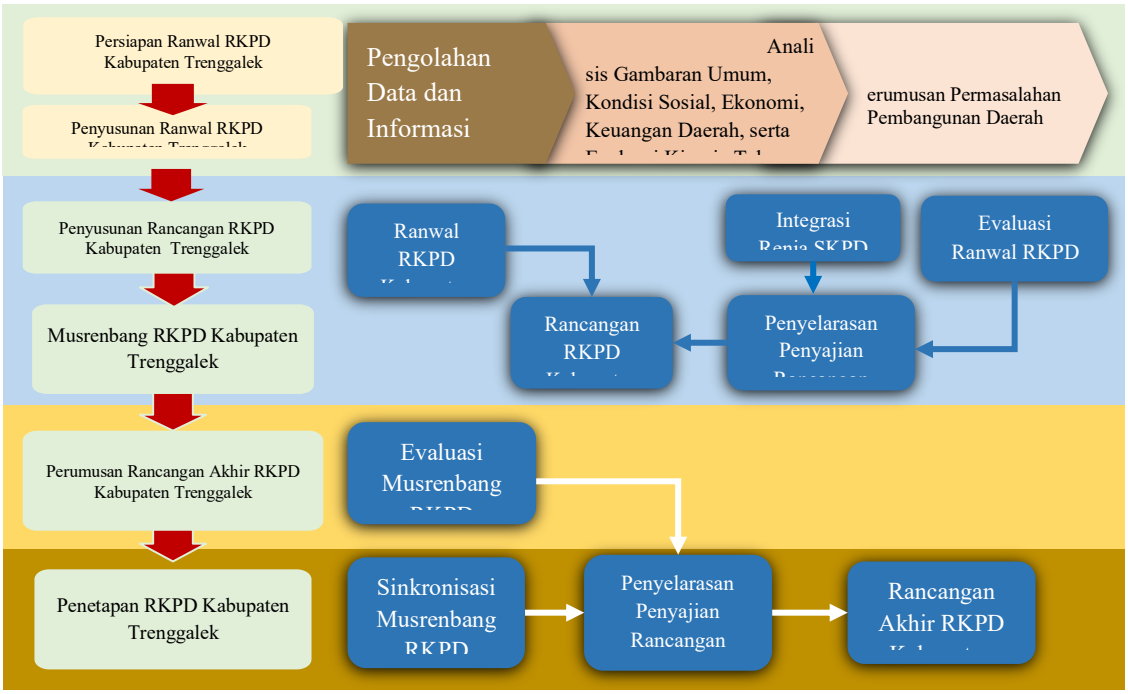
diarusutamakan dalam RKPD 2027. Pemerintah daerah terus memperkuat inisiatif pembangunan rendah karbon melalui tata ruang adaptif, pelestarian lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Di sisi lain, reformasi birokrasi tetap menjadi fondasi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari prioritas nasional yang diadopsi di Kabupaten Trenggalek dalam kerangka peningkatan kualitas SDM dan penurunan angka stunting, khususnya bagi siswa sekolah dasar di wilayah yang sulit dijangkau dan kawasan miskin. Dengan demikian, RKPD 2027 dirancang tidak hanya untuk menjawab tantangan pembangunan lokal, tetapi juga untuk mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 disusun melalui tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan Penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek;
2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Trenggalek;
3) Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Trenggalek;
4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Trenggalek;
5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Trenggalek; dan
6) Penetapan RKPD Kabupaten Trenggalek.

Tahapan penyusunan RKPD tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027



Selanjutnya, rumusan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2027 termasuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2027. Selain itu, RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2027 yang akan dilaksanakan pada tiap akhir tahun. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Trenggalek, RKPD merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (PD). Dengan RKPD 2027 pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan capaian yang optimal dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek secara bertahap dapat segera terwujud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
11. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal ditambahkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik-Bangkalan-Mojokerto, Surabaya-Sidoarjo-Lamongan), Kawasan BTS (Bromo-Tengger-Semeru), serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah ditambahkan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada SPM bidang sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Dasar pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
37. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

38. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 204 Tahun 2024);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
41. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
43. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender ditambahkan (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023- 2043;
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029
49. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026, Nomor 9 Seri E);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032;

51. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045; dan
54. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Kabupaten Trenggalek.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan merupakan rangkaian dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang sinergis antara nasional dan daerah.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional di Indonesia menganut prinsip hierarki, sinergi, dan kesinambungan. Hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka tersebut, dokumen perencanaan pada tingkat Provinsi memiliki hubungan yang bersifat substantif dan fungsional dengan dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten/Kota.

1.3.1. Kedudukan dan Fungsi Hierarkis

a. Dimensi Jangka Waktu

Dimensi Jangka Waktu dapat dijabarkan pada Dokumen Perencanaan Jangka Panjang (RPJP), Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJM), dan Dokumen Perencanaan Tahunan (RKP). RPJPD Provinsi menjadi rujukan utama bagi penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota agar terdapat kesatuan arah pembangunan dalam satu wilayah provinsi. RPJMD menjadi pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam merumuskan RPJMD masing-masing, terutama untuk urusan yang menjadi kewenangan Provinsi dan urusan bersama. RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD dan menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD masing-masing melalui mekanisme sinkronisasi pada forum

Musyawarah Perencanaan Pembangunan berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga provinsi.

b. Dimensi Kewenangan
Pembagian Urusan Pemerintahan berdasarkan asas subsidiaritas, Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi. Provinsi memiliki kewenangan pada urusan pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, berskala provinsi, atau memiliki dampak strategis provinsi. Sementara itu, Kabupaten/Kota menyelenggarakan urusan pemerintahan yang berskala lokal. Oleh karena itu, program dan kegiatan dalam RPJMD dan RKPD Provinsi harus mampu mengisi dan mengintegrasikan kebutuhan pembangunan antardaerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan pembangunan.

1.3.2. Mekanisme Sinkronisasi dan Harmonisasi

Untuk memastikan keselarasan, terdapat beberapa mekanisme Musrenbang Berjenjang yang dilakukan dengan cara mengakomodir usulan pembangunan dari Kabupaten/Kota yang bersifat strategis, lintas wilayah, atau merupakan kewenangan Provinsi yang akan dibahas dan diintegrasikan ke dalam RKPD Provinsi. Sebagai pedoman dan rujukan setiap tingkatan dokumen perencanaan di Kabupaten/Kota wajib berpedoman dan merujuk pada dokumen perencanaan satu tingkat di atasnya di lingkungan Provinsi. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah [RTRW] Provinsi juga menjadi acuan bagi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, sehingga pembangunan fisik dan infrastruktur memiliki keterkaitan spasial yang terintegrasi.

1.3.3. Muara Akhir: Keterkaitan dengan Penganggaran

Seluruh dokumen perencanaan bermuara pada dokumen penganggaran. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya dijabarkan menjadi Rancangan APBD (RAPBD) dan ditetapkan menjadi APBD. Pada tingkat SKPD, RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Strategis SKPD, dan RKPD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja SKPD, RKA-SKPD, hingga DPA-SKPD.

Secara substansi, Kabupaten/Kota memiliki otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, otonomi tersebut dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diharmonisasikan dalam sistem pembangunan Provinsi. Provinsi berperan sebagai fasilitator, koordinator, dan pembina bagi Kabupaten/Kota agar

seluruh proses pembangunan di wilayahnya berjalan secara terpadu, efisien, efektif, dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.

RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, dan arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2027. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan di daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2027 yang terkait dengan program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran pembangunan. Selain itu penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 disusun dengan melakukan penyelarasan, sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

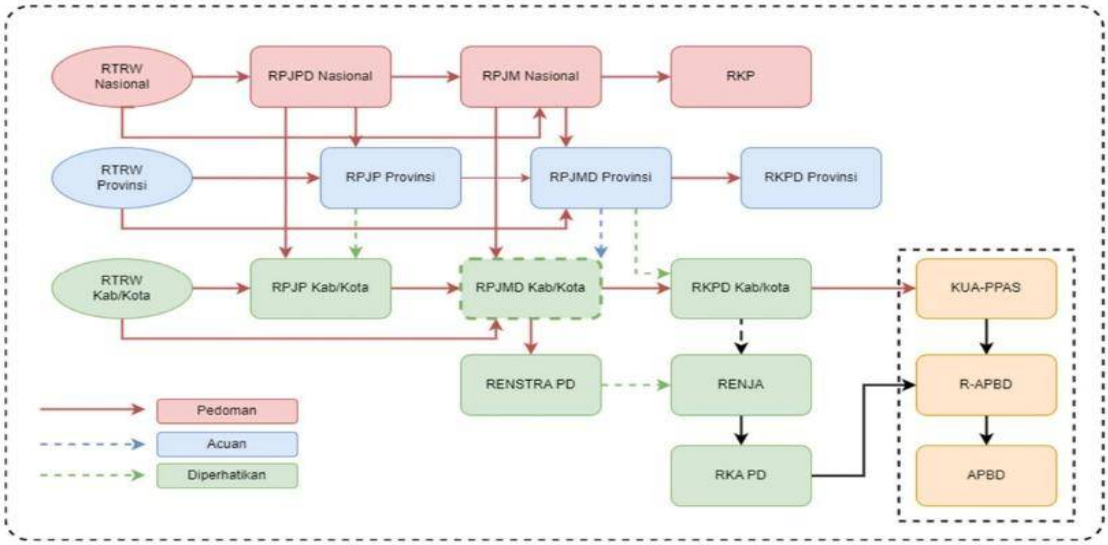
Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran, terutama dengan RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, dan RAPBD. Uraian hubungan antar dokumen perencanaan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; serta
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan daerah selama 20 tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. RKPD juga diselaraskan dengan RKP yang diperoleh dari forum Musrenbang Nasional. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan Renja OPD

dan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Trenggalek.

Gambar I.2 Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diolah

1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 adalah menerjemahkan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam aksi pembangunan tahunan yang konkret, terukur, dan terintegrasi. Dengan berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Timur, diharapkan pembangunan di Kabupaten Trenggalek tidak berjalan parsial, melainkan menjadi bagian yang utuh dari gerak pembangunan Provinsi Jawa Timur menuju Jawa Timur Bangkit. Penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 juga dimaksudkan untuk menjalankan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah di daerah (baik provinsi dan kabupaten/kota). RKPD juga berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana kegiatan tahunan yang terukur dan terarah.

b. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027, yaitu:
   1. Penyesuaian arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan daerah agar selaras dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Baik Kabupaten/Kota dan Provinsi, program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, serta instruksi Presiden tentang efisiensi belanja daerah;
   2. Menjamin Keselarasan dan Sinergitas Pembangunan Vertikal RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 yang disusun untuk memastikan seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional;
   3. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek diarahkan untuk mendukung dan mensukseskan program prioritas Provinsi Jawa Timur, khususnya pada sektor konektivitas, pariwisata, ketahanan pangan, dan pengentasan kemiskinan ekstrem;
   4. Menindaklanjuti Hasil Musrenbang Provinsi Usulan-usulan pembangunan Kabupaten Trenggalek yang bersifat lintas sektoral, lintas wilayah, dan menjadi kewenangan Provinsi telah diintegrasikan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, RKPD menjadi instrumen untuk menjembatani usulan daerah dengan alokasi program Provinsi;
   5. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
   6. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah;
   7. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2027;
   8. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
   9. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
   10. Sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   11. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Trenggalek.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Sub Bab Latar Belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. Pada Sub Bab Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada Sub Bab Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada Sub Bab Maksud dan Tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada Sub Bab Sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah dan Evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta Permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2027.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2027

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan daerah dilaksanakan di berbagai lini kehidupan masyarakat dimana secara umum mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Upaya percepatan pembangunan tersebut masih diperlukan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang kompleks yang bertujuan untuk memandu dan mengelola pertumbuhan serta perkembangan suatu daerah dalam berbagai aspek. Esensi dari perencanaan pembangunan daerah melibatkan berbagai aspek penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai dimensi. Dalam konteks ini, perencanaan memiliki kekuatan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah dengan berdasarkan pada analisis hasil kebijakan pembangunan yang perlu dipahami dan dikaji secara mendalam sebagai gambaran kondisi daerah. Hal ini kemudian menjadi dasar bagi penetapan rumusan kebijakan pembangunan.

Perencanaan pembangunan yang dirumuskan saat ini merupakan dokumen yang dibuat dengan pendekatan yang lebih terfokus pada data dan analisis kuantitatif serta fenomena dan potret hasil pelaksanaan pembangunan selama ini. Dokumen ini akan merumuskan kebijakan dalam bentuk rekomendasi kepada pasangan calon kepala daerah dalam menyusun visi, misi dan program prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek pada pembangunan periode 2025-2029. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan akan tersusun strategi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata di Kabupaten Trenggalek.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki signifikansi strategis, terutama dalam memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi pembangunan daerah. Penguraian aspek geografi akan memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik wilayah Kabupaten Trenggalek, termasuk luas dan batas wilayah, letak geografis, topografi, dan klimatologi. Selain itu, analisis ini akan mencakup berbagai potensi pengembangan wilayah yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Trenggalek.

Analisis aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Trenggalek akan memaparkan ukuran, struktur, serta distribusi/persebaran penduduk, baik dalam konteks *series* maupun kewilayahan. Analisis demografi ini sangat penting mengingat penduduk adalah pelaksana utama pembangunan sekaligus objek pembangunan. Oleh karena itu, keterkaitan antara demografi dan aspek-aspek lain perlu diperhatikan dengan seksama untuk memastikan perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

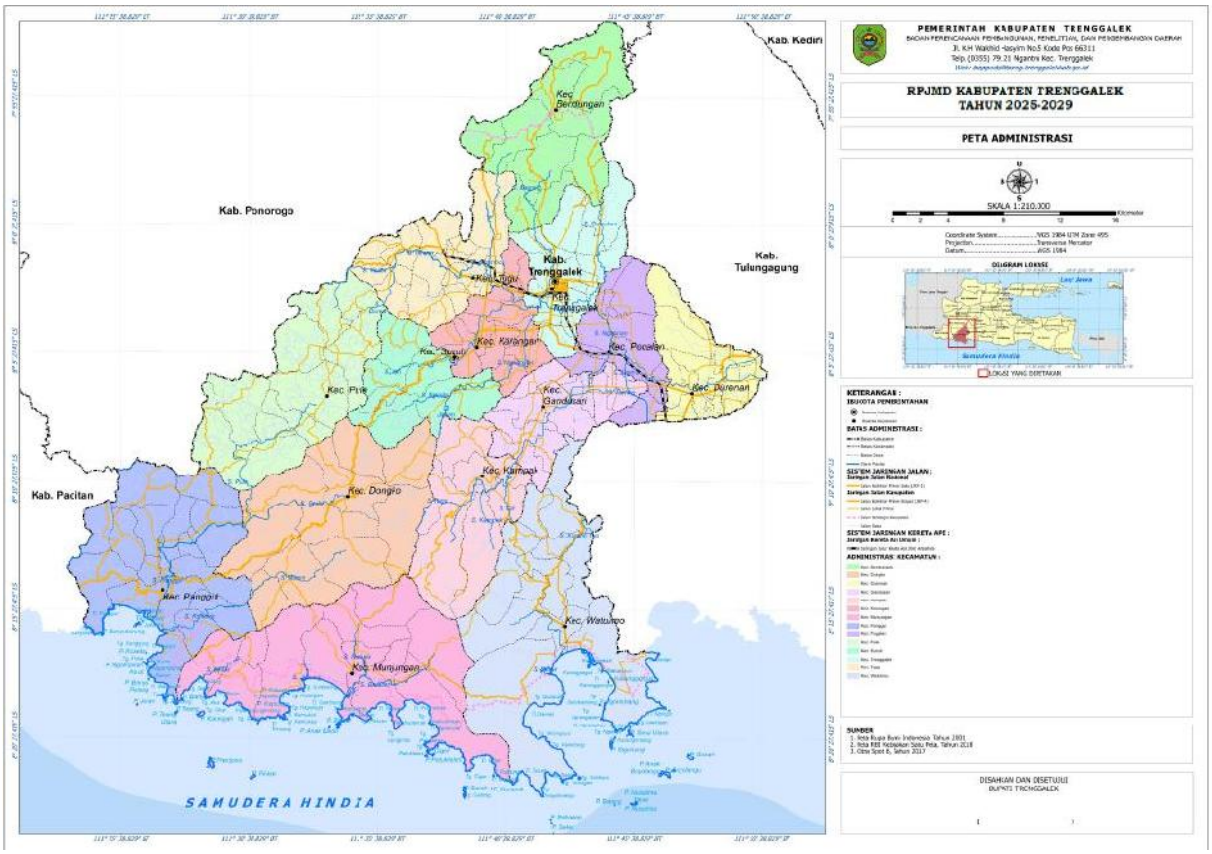
a. Letak Astronomis dan Kondisi Geografi

Secara geografis Kabupaten Trenggalek berada diantara koordinat 111°24- 112°11' Bujur Timur dan 7°53'-8°34' Lintang Selatan. Kabupaten Trenggalek berbatasan langsung dengan beberapa kabupaten tetangga. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Tulungagung;
- Sebelah Selatan : Samudra Hindia;
- Sebelah Timur : Kabupaten Tulungagung;
- Sebelah Barat : Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo;

Gambar II.1

Peta Batas Administrasi Kabupaten Trenggalek



Sumber: Bappedalitbang Kab.Trenggalek, 2025

Secara administratif, Kabupaten Trenggalek memiliki 14 Kecamatan serta 5 Kelurahan dan 152 Desa dengan 540 dusun/lingkungan dan 1.260 rukun warga. Dengan luas wilayah mencapai 1.246,59 km^2 atau sekitar 2,60 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang seluas 48.055,90 km^2. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.1
Luas Wilayah Administrasi di Kabupaten Trenggalek Menurut Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah				Luas Wilayah	
		Desa/ Kelurahan	Dusun/ Lingkungan	RW	RT	Luas (km^2)	Persentase (%)
1.	Panggul	17	66	155	521	131,99	10,59
2.	Munjungan	11	44	66	356	147,86	11,86
3.	Watulimo	12	36	79	336	155,35	12,46
4.	Kampak	7	23	76	251	77,77	6,24
5.	Dongko	10	39	115	459	143,48	11,51
6.	Pule	10	34	93	379	117,48	9,42
7.	Karangan	12	32	71	296	47,13	3,78
8.	Suruh	7	27	41	189	53,19	4,27
9.	Gandusari	11	49	125	328	53,86	4,32
10.	Durenan	14	47	81	313	48,79	3,91
11.	Pogalan	10	36	121	319	47,98	3,85
12.	Trenggalek	13	33	74	244	58,78	4,71
13.	Tugu	15	45	99	324	70,69	5,67
14.	Bendungan	8	29	64	202	92,26	7,40
Kabupaten Trenggalek		**157**	**540**	**1.260**	**4.517**	**1.246,59**	**100**

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026

b. Topografi

Secara topografi, Kabupaten Trenggalek sebagian besar bertopografi Gunung/Pegunungan/bukit/Perbukitan, dimana lebih dari 40% seluas ±28.378,11 ha, 25 – 40% seluas 32.076,13 ha, dan Luas dataran rendah dengan tingkat kemiringan antara 0–2 % adalah ± 24.529,76 ha. Dari 14 Kecamatan hanya 5 Kecamatan yang mayoritas berupa dataran, yaitu Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Karangan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan yang sebagian besar terletak di bagian utara dan tengah wilayah Kabupaten Trenggalek. Sedangkan 9 Kecamatan lainnya mayoritas berupa pegunungan. Kawasan pegunungan terletak pada kabupaten sebelah utara dan tengah yaitu Kecamatan Bendungan, Kecamatan Pule, Kecamatan Kampak dan Kecamatan Dongko.

Sedangkan Kawasan pesisir terletak di Kecamatan Watulimo, Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Panggul.

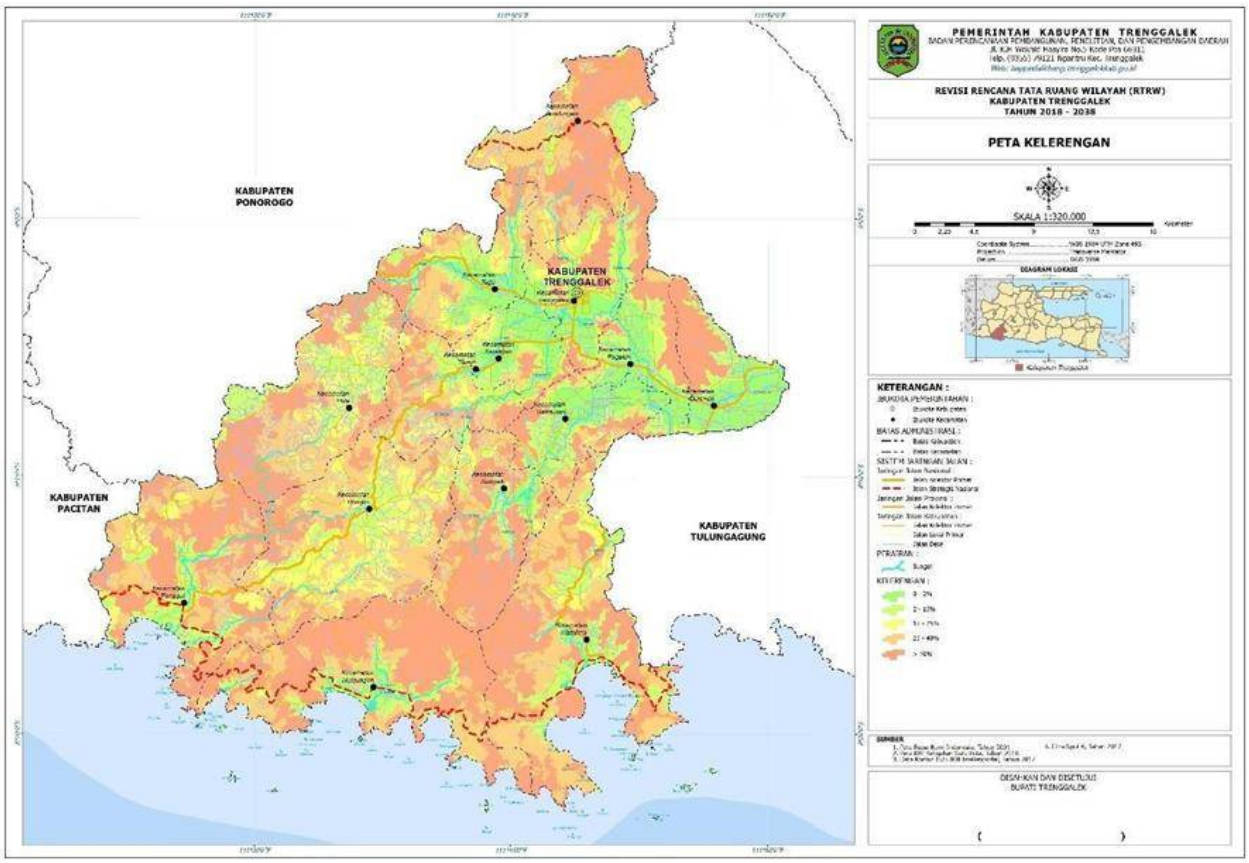
Dua kecamatan yang memiliki luas wilayah yang cukup besar bila dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya yaitu Kecamatan Munjungan dengan luas 15.480 Ha (12,27%) dan Kecamatan Watulimo dengan luas 15.444 Ha (12,24%) yang merupakan kawasan pesisir di Kabupaten Trenggalek. Sedangkan kecamatan dengan ukuran luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pogalan dengan luas 4.180 Ha (3,31%). Selengkapnya mengenai tingkat kelerengan pada Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.2
Tingkat Kelerengan di Kabupaten Trenggalek

No	Tingkat Kelerengan	Klasifikasi	Luas (Ha)	%
1	0 - 2 %	Datar	24.529,76	19,68
2	2 - 15 %	Datar	17.761,62	14,25
3	15 - 25 %	Bukit/Perbukitan	21.926,23	17,59
4	25 - 40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	32.076,13	25,73
5	>40 %	Gunung/Pegunungan dan Bukit/Perbukitan	28.378,11	22,76

Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2019

Gambar II.2
Peta Kelerengan Kabupaten Trenggalek



Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2019

Kecamatan dengan ketinggian wilayah yang cukup rendah adalah Kecamatan Panggul ketinggian hanya mencapai 7 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sedangkan kecamatan dengan ketinggian wilayah yang tertinggi adalah Kecamatan Pule dengan ketinggian 706 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Tabel II.3
Ketinggian Wilayah (mdpl) di Kabupaten Trenggalek
Menurut Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1.	Panggul	7
2.	Munjungan	10
3.	Watulimo	13
4.	Kampak	122
5.	Dongko	527
6.	Pule	706
7.	Karangan	124

No	Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
8.	Suruh	137
9.	Gandusari	107
10.	Durenan	94
11.	Pogalan	99
12.	Trenggalek	110
13.	Tugu	122
14.	Bendungan	692

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026

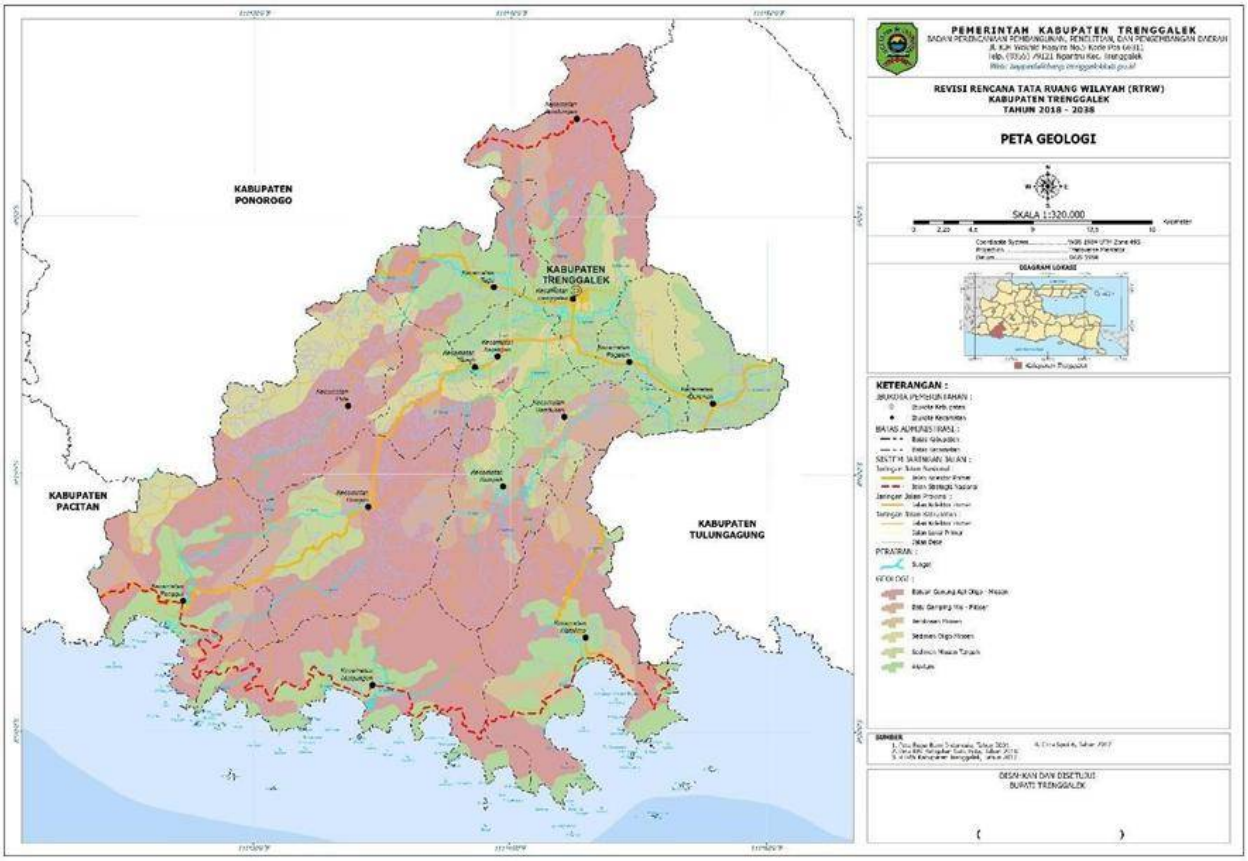
c. Geologi

Secara geologis, Kabupaten Trenggalek memiliki beberapa batuan induk. Jenis batuan induk yang ada di Kabupaten Trenggalek antara lain:

- *Miosenne sedimentary* : di semua kecamatan
- *Miosenne limostone* : Kecamatan Panggul, Watulimo, Dongko dan Karangan
- *Andesit* : Kecamatan Munjungan, Watulimo, Pogalan dan Karangan
- Liat dan Pasir *(alluvium)* : di semua kecamatan kecuali Dongko, Pule dan Bendungan
- *Undifferentioned vulcanic* : di Kecamatan Bendungan

Struktur tanah di Kabupaten Trenggalek meliputi andosol dan latosol di bagian utara. Batuan Mediteran, grumosol dan regusol yang terletak di bagian timur. Batuan mediteran di bagian selatan dan batuan alluvial di bagian barat kabupaten. Susunan explorasi tanah terdiri dari lapisan tanah Andosol dan Latosol, Mediteran, Grumosol dan Regosol, Alluvial dan Mediteran. Lapisan tanah Alluvial terbentang di sepanjang aliran sungai di bagian wilayah timur dan merupakan lapisan tanah yang subur, luasnya berkisar antara 10 % hingga 15 % dari seluruh wilayah. Pada bagian lain, yaitu bagian selatan, barat laut dan utara, tanahnya terdiri dari lapisan Mediteran yang bercampur dengan lapisan Grumosol dan Latosol. Lapisan tanah ini sifatnya kurang daya serapnya terhadap air sehingga menyebabkan lapisan tanah ini kurang subur.

Gambar II.3
Peta Geologi Kabupaten Trenggalek



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2019

d. Hidrologi

Secara hidrologis Kabupaten Trenggalek terdiri 28 sungai dengan panjang antara 2,00 km hingga 41,50 km dengan debit air antara 0,042 M3/detik (Kali Kedungmoro) sampai dengan 5,778 M3/detik (Kali Gedangan). Dengan debit air sungai yang relatif tinggi merupakan indikasi tingkat erosi yang cukup tinggi. Untuk pemanfaatan potensi aliran sungai tersebut baik untuk air bersih maupun irigasi diperlukan pembangunan lebih banyak bangunan penampung air, baik bendungan, embung dan dam.

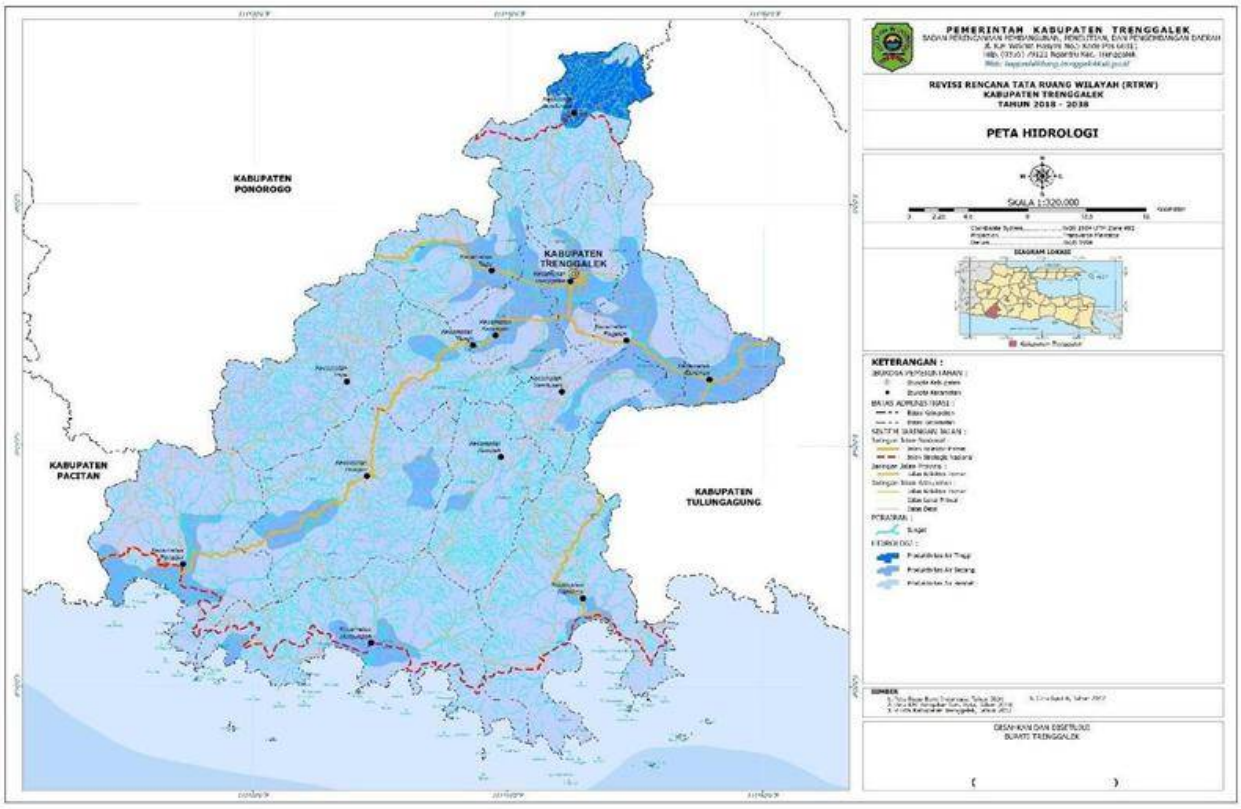
Jumlah mata air yang tersebar di Kabupaten Trenggalek mencapai 66 buah. Namun sebagian besar mata air tersebut sangat tergantung terhadap curah hujan sepanjang tahun. Sumber air di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan baik jumlah maupun debitnya. Sumber-sumber air tersebut perlu mendapatkan perhatian dengan menjaga kelestarian alam, terutama area di sekitar sumber mata air sebagai kawasan lindung. Pada umumnya Kabupaten Trenggalek memiliki dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, yaitu DAS yang arah alirannya menuju ke Kali Brantas dan DAS yang arah alirannya bermuara ke Samudera Hindia.

Tabel II.4
Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar Base (m)	Kedalaman (m)
Bagong	22,50	42,40	40,00	4,00
Sukun	11,00	10,00	8,00	4,00
Prambon	13,50	28,00	21,00	3,50
Kedungmoro	8,50	19,00	15,00	3,50
Klumutan	4,00	12,00	7,00	4,20
Jolok	2,25	11,00	9,00	3,75
Ngasinan	41,50	32,00	20,00	6,80
Klitik	7,25	9,50	7,50	2,40
Munjungan	5,50	30,00	20,00	4,00
Anjok	2,00	17,00	14,05	2,05
Darungan	4,50	8,00	8,00	4,00
Ngepeh	8,00	15,00	12,00	2,80
Duren	7,50	24,00	22,00	4,00
Mlinjon	19,00	34,00	28,00	3,00
Jati	15,00	30,00	24,00	3,40
Tawing	27,00	36,50	30,00	4,70
Gedangan	36,50	27,00	19,00	4,00
Konang	17,00	40,00	30,00	4,00
Ngulung	6,00	18,00	16,00	3,50
Bungur	2,00	45,00	40,00	3,50
Craken	5,00	15,00	11,00	3,30
Tumpak Nongko	14,00	-	-	-
Songo	4,00	25,00	20,00	2,00
Karanggandu	3,50	40,00	30,00	3,00
Bubuk	2,00	16,00	15,00	3,50
Ngemplak	10,50	25,00	15,00	3,00
Sowan	5,50	20,00	15,00	2,00
Dongko	13,50	17,00	15,00	3,60

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026

Gambar II.4
Peta Hidrologi Kabupaten Trenggalek



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2019

e. Klimatologi

Lokasi Kabupaten Trenggalek berada di sekitar garis Khatulistiwa, maka seperti Kabupaten-Kabupaten lainnya di Jawa Timur yang mempunyai dua musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. Bulan September-April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei-Agustus. Namun saat ini terjadi perubahan anomali cuaca, siklus hujan menjadi tidak menentu.

Beberapa wilayah di Kabupaten Trenggalek masih menghadapi risiko bencana hidrometeorologi, seperti kekeringan saat musim kemarau dan banjir saat musim penghujan. Berdasarkan peta sebaran kejadian hingga Oktober 2024, tercatat peningkatan jumlah desa terdampak kekeringan hingga mencapai 61 desa yang tersebar di 13 kecamatan. Untuk mengurangi risiko tersebut, pembangunan infrastruktur pengendali air menjadi langkah strategis yang terus diupayakan. Kehadiran Bendungan Tugu diharapkan mampu meminimalkan risiko banjir di wilayah Trenggalek, dan ke depannya upaya mitigasi bencana akan diperkuat melalui pembangunan Bendungan Bagong yang kini masih dalam tahap konstruksi serta Bendungan Kampak yang masih dalam tahap perencanaan.

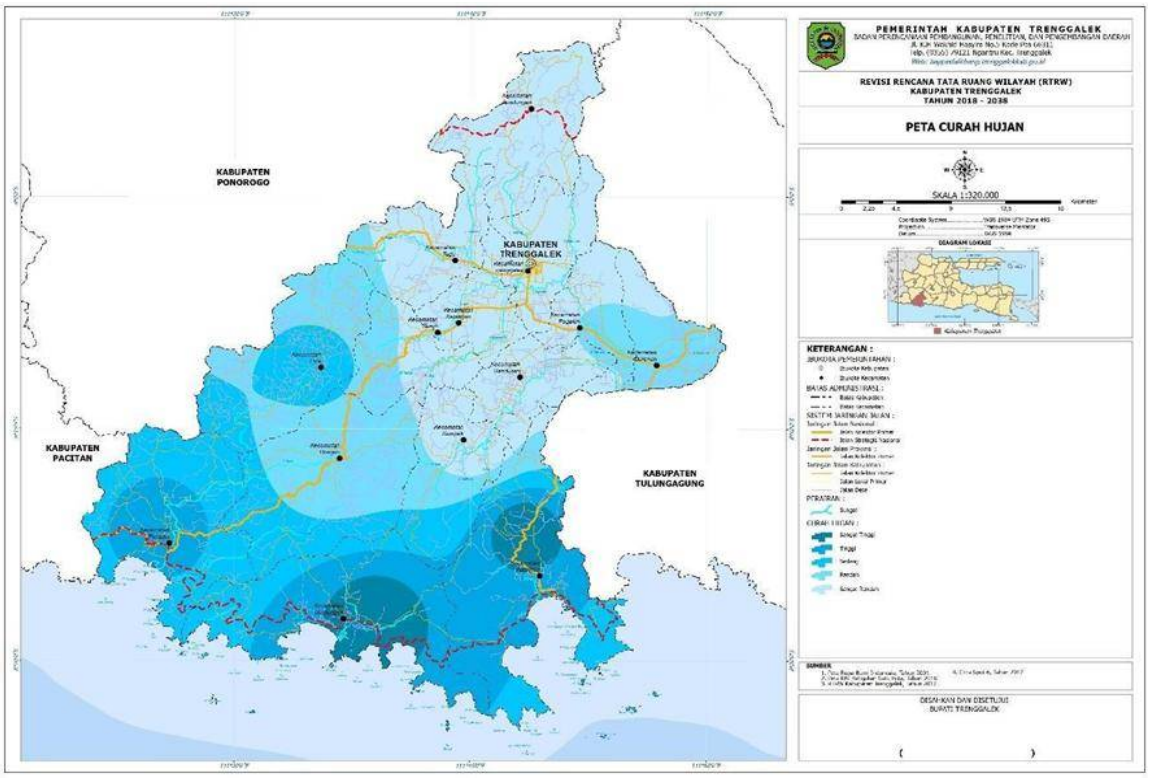
Tabel II.5
Rata-rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Curah Hujan, dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun BMKG di Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

Bulan	Suhu Rata-rata (℃)	Kelembaban Rata-rata (%)	Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (jam)	Kecepatan Angin Rata-rata (Knot)	Tekanan udara Rata-rata (mbar)
Januari	26,67	86,55	444,50	27	3,30	4,07	997,58
Februari	26,88	85,45	211,40	18	4,00	4,85	998,61
Maret	27,14	86,38	476,30	22	4,30	3,83	998,00
April	27,65	79,91	138,50	13	6,50	4,76	999,03
Mei	27,29	84,52	253,60	19	5,80	4,16	998,45
Juni	27,65	77,39	83,20	7	6,50	6,48	1000,01
Juli	26,85	73,76	2,10	1	8,10	9,06	999,93
Agustus	27,36	73,35	91,80	4	8,70	8,26	1000,42
September	27,81	72,92	53,60	3	8,60	8,28	1000,25
Oktober	28,02	77,70	247,90	11	7,50	5,78	999,11
November	26,76	84,77	333,60	19	4,50	4,48	998,40
Desember	27,27	81,29	303,10	16	5,30	4,08	997,33

Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2026

Kecepatan angin yang bergerak melewati Kabupaten Trenggalek cukup stabil selama 2025. Penyinaran matahari di tahun 2025 cukup intens terjadi pada bulan Juli hingga Oktober. Di sisi lain, pada bulan Januari, lama penyinaran matahari sangat rendah, hanya sebesar 3,30 jam. Pada tahun 2025 jumlah curah hujan sebesar 2.639,60 mm dengan jumlah rata rata per bulan sebesar 219,97 mm dan jumlah hari hujan sebanyak 160 hari.

Gambar II.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Trenggalek



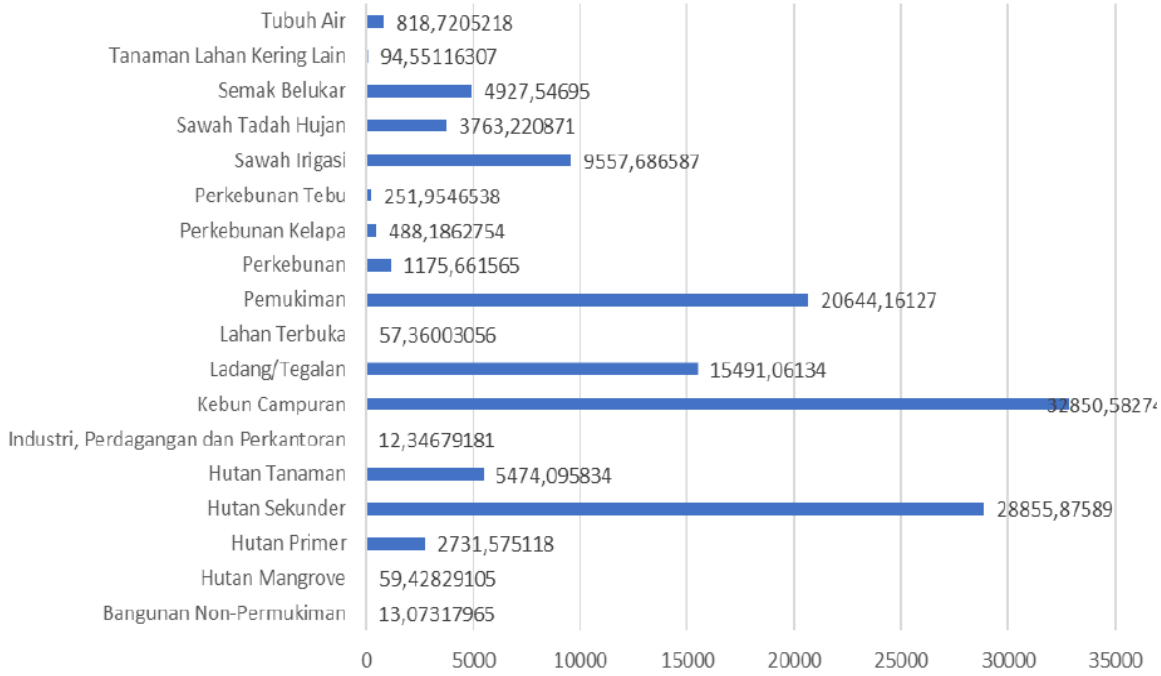
Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2019

f. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan yang paling luas pemanfaatannya di Kabupaten Trenggalek tahun 2023 adalah kebun campuran dengan luasan 32.850,58 ha. Penggunaan lahan jenis ini difungsikan oleh masyarakat untuk budidaya tanaman tahunan dengan kebutuhan pengairan yang terbatas. Hal itu dapat dilihat dari proporsi PDRB Kabupaten sendiri masih didominasi oleh aktivitas pertanian yang membutuhkan lahan untuk budidaya tanaman. Pemanfaatan lahan perkebunan memiliki keunggulan serta kekurangan jika tidak ada kebijakan pengaturan tata guna lahan. Perkebunan mampu menjadi alat ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada lahan untuk pertanian serta dapat menjadi penyerap emisi karbon yang efektif jika ditanami dengan tanaman bervegetasi dengan kerapatan tinggi. Hutan sekunder menduduki peringkat kedua sebagai tutupan lahan terluas dengan total luas sebesar 28.855,87 ha. Dikarenakan hampir sebagian besar kondisi topografi lahan di Kabupaten Trenggalek adalah perbukitan dengan lereng yang memiliki kecuraman tinggi, maka masih banyak terdapat hutan sekunder yang diselingi oleh beberapa hutan produksi milik masyarakat. Fungsi lahan hutan

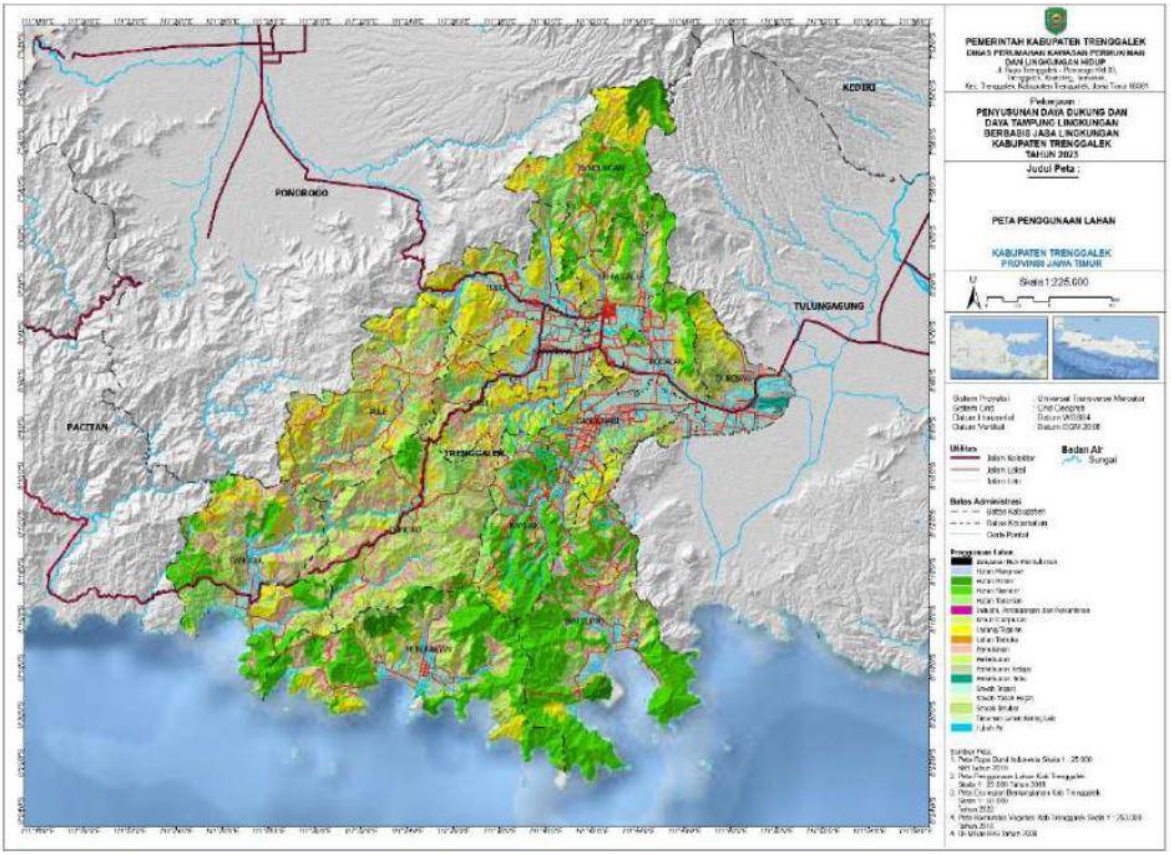
sekunder memiliki banyak jasa ekosistem dimana salah satunya adalah pengaturan iklim, bencana, dan pemurnian air.

Grafik II.1
Luas Masing-Masing Penggunaan Lahan (ha)



Sumber : Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2023

Gambar II.6
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Trenggalek



Sumber : Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2023

g. Peran Strategis Daerah terhadap Wilayah Sekitar

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043, Kabupaten Trenggalek merupakan kawasan strategis Agropolitan Wilis (Lawu-Wilis), sistem Minapolitan Trenggalek-Tulungagung, kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan ekosistem mangrove, kawasan pemanfaatan umum zona pariwisata, kawasan pemanfaatan umum zona perikanan, kawasan konservasi maritim, serta pusat kegiatan wilayah (PKW) di perkotaan Trenggalek.

Pengembangan potensi daerah berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar melalui keterkaitan produksi, perdagangan, dan inspirasi pengembangan usaha lokal. Ketika suatu daerah berhasil mengembangkan produk unggulan dan menembus pasar yang lebih luas, efek positifnya tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga membuka peluang usaha, memperluas rantai pasok, serta mendorong pertumbuhan sektor-sektor pendukung di daerah tetangga.

Kabupaten Trenggalek telah memberikan kontribusi nyata bagi wilayah sekitarnya melalui pengembangan produk lokal berbasis kerajinan bambu

yang kini telah menembus pasar internasional. Produk seperti sedotan, botol minum, alat makan, dan mebel bambu dari Trenggalek tidak hanya meningkatkan permintaan bahan baku dari wilayah sekitar, tetapi juga mendorong daerah lain untuk mengembangkan potensi kerajinannya sendiri. Selain itu, langkah Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mendorong digitalisasi pemasaran, peningkatan kualitas produk, serta penguatan manajemen usaha turut menciptakan efek multiplikasi ekonomi bagi wilayah sekitar. Nilai ekspor Trenggalek yang mencapai lebih dari Rp142,71 miliar pada tahun 2025, terutama dari komoditas seperti minyak atsiri, drum kabel, gumrosin, aster, terpentin, plywood, fillet patin, trimingan, kulit, gelembung ikan, telah memperkuat jaringan usaha antar wilayah. Ini mendorong peningkatan mobilitas tenaga kerja, suplai bahan baku, serta peluang kemitraan usaha lintas daerah, memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi regional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kabupaten Trenggalek juga berperan dalam pengembangan wilayah di Provinsi Jawa Timur, terutama sebagai kawasan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan pariwisata. Kondisi geografis Trenggalek yang berbukit-bukit sangat mendukung pengembangan pertanian dan perkebunan, khususnya dengan keberadaan embung yang berfungsi sebagai sumber air untuk irigasi. Selain sektor pertanian, Trenggalek juga memiliki potensi pariwisata yang cukup kuat dengan garis pantai yang membentang di tiga kecamatan serta objek wisata alam seperti Gua Lowo yang menjadi daya tarik wisata unggulan. Potensi perikanan juga berkembang dengan adanya Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN Prigi), mendukung aktivitas ekonomi kelautan dan perikanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir dan sekitarnya. Keberadaan Jalur Lintas Selatan (JLS) yang melintasi Trenggalek semakin memperkuat peran daerah ini sebagai koridor penting dalam konektivitas dan distribusi barang serta jasa antarwilayah di bagian selatan Pulau Jawa. Dengan demikian, Trenggalek tidak hanya menjadi pusat pengembangan ekonomi lokal, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan nasional melalui sektor unggulan yang dimilikinya.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Trenggalek memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan menjadi penopang utama kegiatan ekonomi masyarakat. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan, dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan ubi kayu yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Selain itu, sektor perkebunan juga cukup berkembang dengan tanaman unggulan seperti cengkeh, kopi, dan kelapa yang tersebar di wilayah

dataran tinggi. Potensi ini diperkuat dengan ketersediaan lahan pertanian yang luas dan kondisi agroklimat yang mendukung. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Trenggalek dalam Kabupaten Trenggalek dalam Angka 2026, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Trenggalek atas dasar harga berlaku tahun 2025.

Selain pertanian dan perkebunan, Trenggalek juga memiliki potensi besar di sektor perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat. Letak geografis Trenggalek yang memiliki garis pantai sepanjang 96 kilometer di pesisir selatan Pulau Jawa memberikan peluang besar dalam pengembangan perikanan tangkap dan budidaya laut. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi menjadi salah satu pusat aktivitas perikanan laut yang strategis di Jawa Timur. Produksi perikanan tangkap laut dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif. Sedangkan produksi perikanan darat berkembang di beberapa kecamatan dengan dukungan sumber daya air yang cukup.

Dari sisi potensi pengembangan wilayah, prioritas diarahkan pada kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis kabupaten merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi di tingkat kabupaten. Penetapan kawasan strategis ini didasarkan pada peran vitalnya dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah. Secara umum, kawasan strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh signifikan terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, pertumbuhan ekonomi, pelestarian sosial budaya, dan/atau kelestarian lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan yang merupakan kawasan strategis Kabupaten Trenggalek terdiri dari sudut kepentingan:

a. Pertumbuhan ekonomi; dan
b. Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri dari:

1) Kawasan strategis agropolitan, berupa kawasan budidaya komoditas pertanian unggulan kabupaten meliputi, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Pule, dan Kecamatan Bendungan.
2) Kawasan strategis minapolitan, berupa kawasan budidaya perikanan meliputi:
   a. budidaya perikanan air tawar berada di Kecamatan Bendungan,

Kecamatan Durenan dan Kecamatan Panggul;

b. kawasan perikanan budidaya air payau dan infrastruktur penunjang kawasan perikanan berada di Kecamatan Munjungan, Kecamatan Watulimo dan Kecamatan Panggul.

3) Kawasan Kawasan Strategis Pariwisata di Kabupaten Trenggalek meliputi:
   a. Kawasan strategis pariwisata Pelang dan sekitarnya;
   b. Kawasan strategis pariwisata Blado dan sekitarnya;
   c. Kawasan strategis pariwisata Prigi dan sekitarnya;
   d. Kawasan strategis pariwisata Bukit Banyon dan sekitarnya;
   e. Kawasan strategis pariwisata Bendungan Tugu dan sekitarnya; dan
   f. Kawasan strategis pariwisata Lereng Wilis dan sekitarnya.
4) Kawasan strategis sekitar bendungan, berupa kawasan pengembangan intensif sekitar bendungan meliputi kawasan sekitar Bendungan Tugu dan kawasan sekitar Bendungan Bagong. Kedua Bendungan ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Perpres No. 56 Tahun 2018.

Sedangkan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup kawasan strategis perlindungan satwa laut berupa airberupa kawasan konservasi penyu di pesisir Pantai Kili-kili di Kecamatan Panggul.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan menyebabkan konsep daya dukung dan daya tampung penting untuk menjadi bagian dari sistem perencanaan agar kondisi lingkungan hidup tetap terjaga. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Daya tampung yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk dapat menyerap zat, energi, dan/atau komponen lainnya yang masuk ke dalam siklus ekosistem lingkungan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Widodo, dkk. (2015) bahwa daya dukung lingkungan adalah perbandingan antara supply (ketersediaan) dan demand (kebutuhan). Selain itu, didukung dengan pernyataan Muta'ali (2012) bahwa dalam pengembangan wilayah, pendekatan konsep ambang batas pada daya dukung lingkungan digunakan untuk mempelajari dampak yang terjadi pada lingkungan akibat pengembangan wilayah dan pertumbuhan penduduk.

Analisis daya dukung dan daya tampung dapat terdiri dari daya dukung lahan terbangun, daya dukung pangan, daya dukung air, dan daya dukung

fungsi lindung. Hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yaitu gambaran dalam ambang batas penggunaan lingkungan dalam memenuhi kebutuhan penduduk dan mendukung pembangunan. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai bahan dalam penyusunan isu strategis dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan skenario pembangunan di Kabupaten Trenggalek.

a. Daya Dukung Lahan Terbangun

1) Daya Dukung Lahan Eksisting

Daya dukung lahan terbangun dipengaruhi oleh koefisien luas lahan terbangun maksimal untuk perkotaan yaitu 70% luas wilayah, dan luas lahan terbangun. Berdasarkan analisis, dapat disimpulkan hampir seluruh wilayah memiliki status daya dukung wilayah lahan terbangun di Kabupaten Trenggalek bernilai sebesar 4,31 yang artinya berkategorikan baik. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kondisi permukiman di Kabupaten Trenggalek berupa pola permukiman tersebar secara kluster di area perbukitan dan linier mengikuti perkembangan jalan pada kawasan di lahan yang datar. Upaya untuk menjaga kualitas daya dukung lahan terbangun diperlukan beberapa terobosan dalam mengatur perkembangan lahan terbangun salah satunya adalah optimalisasi pembangunan bangunan vertikal untuk meminimalisir alih fungsi lahan di Kabupaten Trenggalek.

Tabel II.6
Kategori Daya Dukung Lahan Terbangun

Nilai DDLB	Keterangan
<1	Daya Dukung Lahan Permukiman Terlampaui atau Buruk
1-3	Daya Dukung Lahan Permukiman Bersyarat atau Sedang
>3	Daya Dukung Lahan Permukiman Baik

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

Tabel II.7
Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Trenggalek Tahun 2023

Kecamatan	Luas Kecamatan (ha)	Luas Lahan Terbangun (ha)	DDLB	Keterangan
Bendungan	10.509,13	483,99	15,2	SURPLUS
Dongko	14.422,60	2.946,67	3,43	SURPLUS
Durenan	4.922,51	1.117,04	3,08	SURPLUS
Gandusari	5.414,08	1.479,07	2,56	SURPLUS
Kampak	7.867,36	1.128,61	4,88	SURPLUS
Karangan	4.631,35	995,54	3,26	SURPLUS

Kecamatan	Luas Kecamatan (ha)	Luas Lahan Terbangun (ha)	DDLB	Keterangan
Munjungan	14.774,86	1.451,49	7,13	SURPLUS
Panggul	13.322,39	2.564,05	3,64	SURPLUS
Pogalan	4.869,07	1.159,36	2,94	SURPLUS
Pule	11.742,32	2.164,31	3,8	SURPLUS
Suruh	5.684,06	942,1	4,22	SURPLUS
Trenggalek	6.231,19	1.056,09	4,13	SURPLUS
Tugu	7.162,75	1.131,96	4,43	SURPLUS
Watulimo	15.713,00	2.049,09	5,37	SURPLUS
TOTAL	**124.962**	**20.669,60**	**4,31**	**SURPLUS**

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

2) Daya Dukung Lahan proyeksi Tahun 2029

Proyeksi daya dukung lahan permukiman dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 adalah upaya dalam memastikan bahwa lahan yang tersedia dapat mencukupi kebutuhan permukiman bagi penduduk yang terus berkembang. Proyeksi ini melibatkan analisis data historis dan tren pertumbuhan penduduk, serta evaluasi ketersediaan dan kualitas lahan yang ada. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang hidup yang berkelanjutan, layak huni, dan seimbang dengan lingkungan.

Proyeksi daya dukung lahan permukiman dimulai dengan pengumpulan dan analisis data historis mengenai pertumbuhan penduduk, perubahan penggunaan lahan, dan perkembangan permukiman selama periode sebelumnya. Data ini memberikan gambaran mengenai pola pertumbuhan penduduk, kepadatan permukiman, serta distribusi dan kualitas lahan yang ada. Proyeksi daya dukung lahan permukiman adalah langkah strategis dalam memastikan ketersediaan lahan permukiman yang memadai dan berkelanjutan. Dengan analisis data historis, evaluasi ketersediaan lahan, proyeksi kebutuhan, dan penerapan strategi pengelolaan yang tepat, Kabupaten Trenggalek dapat menciptakan permukiman yang layak huni, seimbang dengan lingkungan, dan mampu mendukung pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang.

Tabel II.8
Proyeksi Daya Dukung Lahan Permukiman Kabupaten Trenggalek Tahun 2029

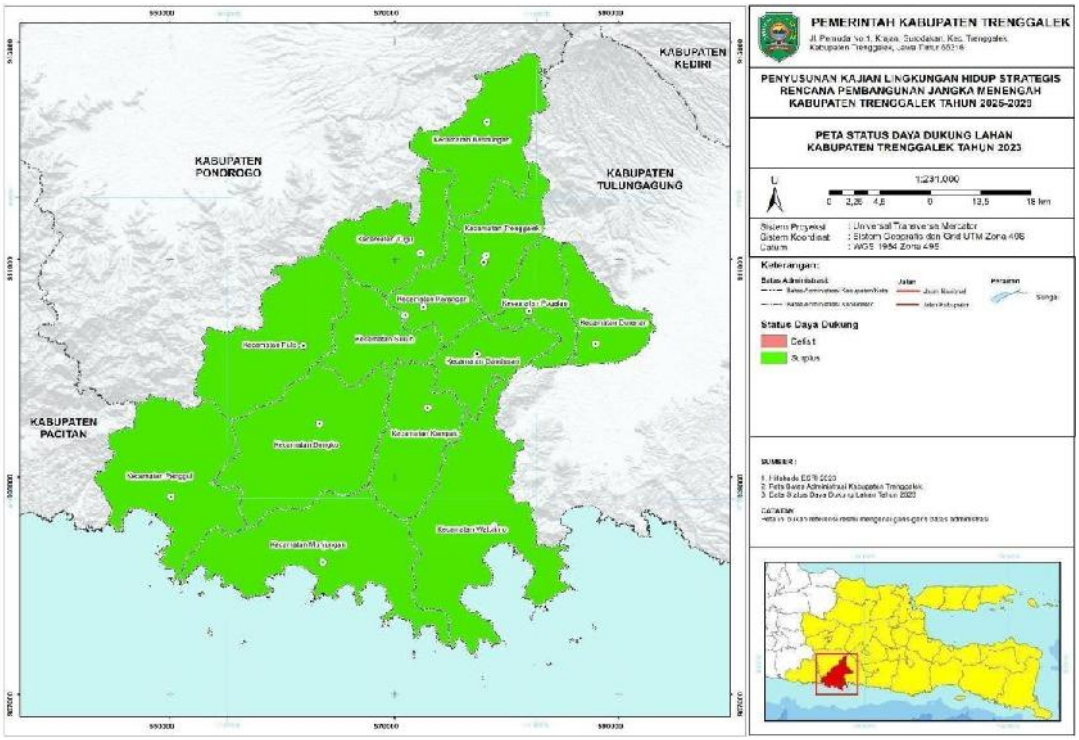
Kecamatan	Luas yang Layak untuk Permukiman (m^2)	Jumlah Penduduk (2029)	Koefisien Luas Kebutuhan ruang (m^2/kapita)	Daya Dukung Permukiman	Keterangan
Bendungan	3.941,70	30.363	130	12,33	SURPLUS
Dongko	6.067,08	71.400	130	3,11	SURPLUS
Durenan	3.058,60	52.911	130	2,75	SURPLUS
Gandusari	3.214,19	55.122	130	2,34	SURPLUS
Kampak	1.789,93	39.365	130	3,5	SURPLUS
Karangan	2.590,81	52.920	130	2,44	SURPLUS
Munjungan	2.376,24	56.236	130	3,25	SURPLUS
Panggul	3.304,48	84.217	130	3,02	SURPLUS
Pogalan	2.747,75	54.358	130	2,56	SURPLUS
Pule	5.096,43	59.837	130	3,56	SURPLUS
Suruh	2.413,22	27.051	130	4,12	SURPLUS
Trenggalek	2.181,29	68.235	130	2,46	SURPLUS
Tugu	3.174,14	52.209	130	4,11	SURPLUS
Watulimo	4.434,74	77.677	130	4,39	SURPLUS
TOTAL	**46.390,61**	**787.188**	**130**	**4,09**	**SURPLUS**

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

Dari hasil perhitungan tabel proyeksi daya dukung lahan permukiman Kabupaten Trenggalek tahun 2029 di atas menunjukkan bahwa secara umum skor hitung t pada tabel diatas memiliki nilai skor 4,09. Angka skor tersebut memiliki skor >1 dengan mengindikasikan bahwa kapasitas wilayah tersebut untuk menampung penduduk lebih besar daripada jumlah penduduk yang ada saat ini sehingga wilayah tersebut memiliki potensi dalam

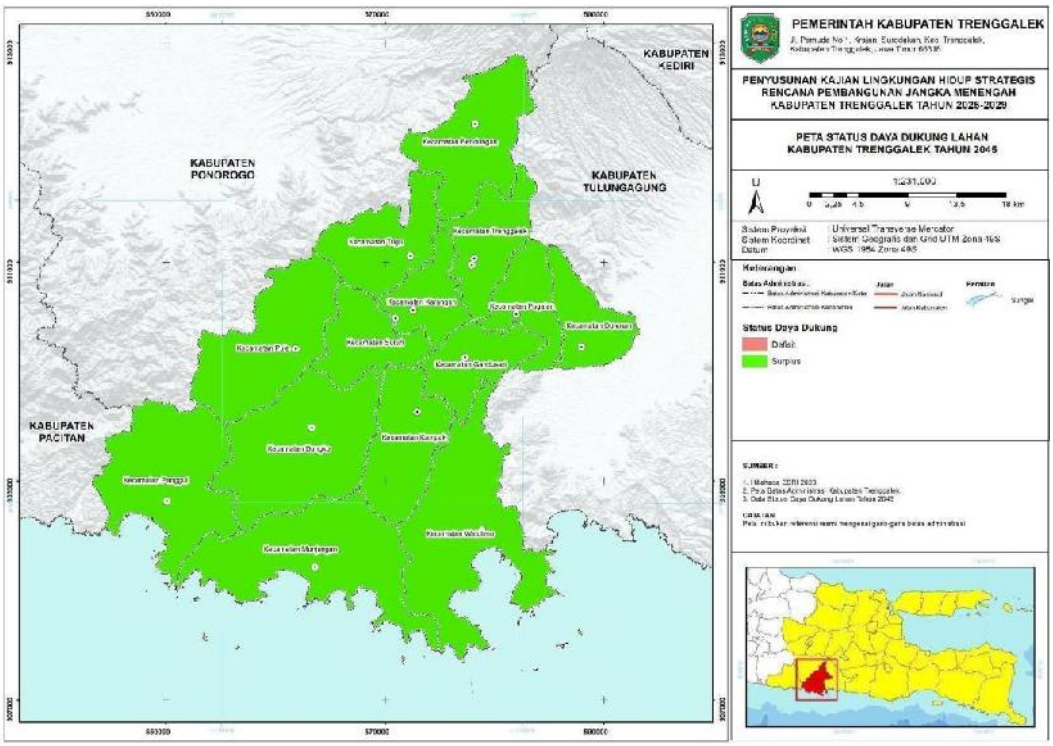
pengembangan permukiman di masa depan. Dari 14 kecamatan, keseluruhan berada pada status surplus yang artinya kecamatan tersebut masih dapat dikembangkan sebagai permukiman dan lahan terbangun lainnya.

Gambar II.7
Peta Status Daya Dukung Lahan Kabupaten Trenggalek Tahun 2023



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

Gambar II.8
Peta Status Daya Dukung Lahan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2029



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

b. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan adalah perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan di suatu daerah (Widodo dkk, 2015). Analisis daya dukung pangan sangat penting karena pertumbuhan dan peningkatan jumlah penduduk menyebabkan permintaan atau kebutuhan terhadap tanaman pangan juga meningkat, sedangkan luas lahan pertanian terus mengalami penurunan. Analisis daya dukung pangan berguna dalam mempersiapkan strategi pemenuhan kebutuhan pangan penduduk di masa kini dan di masa yang akan datang.

Salah satu konsep daya dukung pertanian yaitu berkaitan dengan swasembada pangan yang dikemukakan oleh Odum, Howard, dan Issard. Swasembada pangan adalah usaha memenuhi kebutuhan pangan dengan membudidayakan tanaman pangan secara mandiri (Karsin, 2004). Daya dukung pangan beras dinilai dari komponen kebutuhan dan ketersediaan beras. Daya dukung pangan beras berbanding lurus dengan luas lahan pertanian dan berbanding terbalik dengan jumlah kebutuhan pangan penduduk. Daya dukung pangan juga dapat diidentifikasikan dengan pendekatan spasial dengan menggunakan data kemampuan ekosistem

menyediakan jasa penyediaan bahan pangan dan data tabular terkait jumlah penduduk, produksi padi, dan pola konsumsi beras setiap rumah tangga.

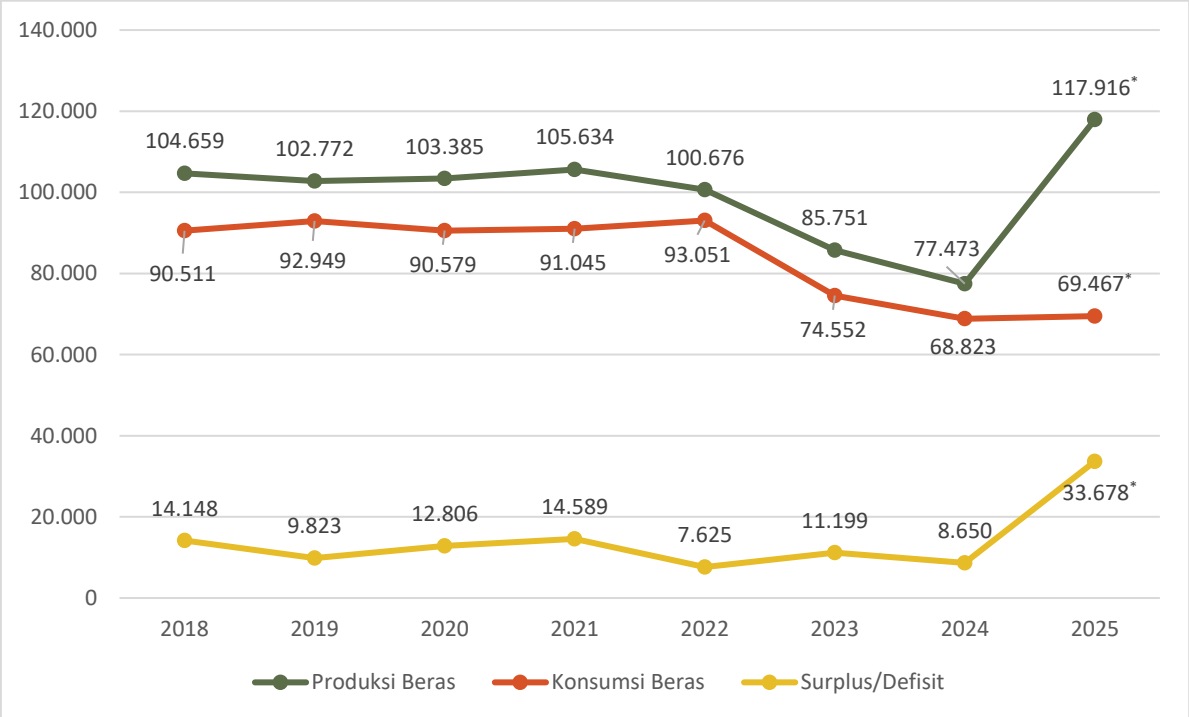
Tabel II.9
Daya Dukung Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2018-2025

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Produksi (ton)	166.815	163.807	164.784	168.368	160.466	153.127	138.345	184.186
Konversi GKG Beras	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%	62,74%	56%	56%	64,02%
Produksi Beras	104.659	102.772	103.385	105.634	100.676	85.751	77.473	117.916

Konsumsi Lokal	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Jumlah Penduduk	730.579	750.251	731.125	734.888	751.079	756.109	753.810	754.257
Tingkat Konsumsi Beras/Tahun	0,12389	0,12389	0,12389	0,12389	0,12389	0,09859	0,09130	0,0986
Konsumsi beras (ton)	90.511	92.949	90.579	91.045	93.051	74.552	68.823	69.467
Surplus/defisit beras	14.148	9.823	12.806	14.589	7.625	11.199	8.650	33.678
Nilai DDP	**1,16**	**1,11**	**1,14**	**1,16**	**1,08**	**1,18**	**1,14**	**1,27**

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)
**Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2026*

Grafik II.2
Ketersediaan dan Jumlah Konsumsi Padi di Kabupaten Trenggalek



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2025 (diolah)
**Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2026*

Berdasarkan tabel di atas, antara tahun 2018 hingga tahun 2024 Kabupaten Trenggalek mengalami surplus beras. Hal ini dapat disimpulkan

bahwa jumlah konsumsi beras oleh masyarakat masih dapat terpenuhi selama 6 tahun tersebut. Namun jika melihat grafik di atas, jumlah surplus dan produksi beras mengalami tren fluktuatif. Adapun, grafik konsumsi beras di Kabupaten Trenggalek selama periode yang sama menunjukkan tren penurunan.

Angka daya dukung pangan/beras di Trenggalek masih memenuhi walaupun begitu isu pangan tetap perlu diprioritaskan. Kebutuhan pangan akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian semakin masif di Trenggalek sehingga luasannya berkurang. Belum adanya pengendalian alih fungsi lahan pertanian akan mengurangi ketersediaan beras. Hal tersebut akan menurunkan tingkat daya dukung pangan di Kabupaten Trenggalek pada masa yang akan datang.

Tabel II.10
Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

No.	Keterangan	Rata-Rata Produksi Padi (ton)	Rata-Rata Produksi Beras (ton)	Jumlah Penduduk Tahun 2024 (jiwa)	Konsumsi Beras (ton)	Daya Dukung Pangan (beras)	Evaluasi
1.	Bendungan	9.422	5.276,32	28.523	2.812	1,68	Surplus
2.	Dongko	10.501	5.880,56	68.012	6.706	0,91	**Defisit**
3.	Durenan	19.712	11.038,72	52.122	5.139	2,04	Surplus
4.	Gandusari	18.987	10.632,72	54.063	5.331	1,69	Surplus
5.	Kampak	5.034	2.819,04	38.261	3.773	0,89	**Defisit**
6.	Karangan	19.354	10.838,24	50.630	4.992	1,91	Surplus
7.	Munjungan	15.155	8.486,80	54.572	5.381	1,55	Surplus
8.	Panggul	19.370	10.847,20	81.244	8.011	1,09	Surplus
9.	Pogalan	15.711	8.798,16	53.692	5.294	1,36	Surplus
10.	Pule	11.108	6.220,48	57.553	5.675	0,75	**Defisit**
11.	Suruh	4.385	2.455,60	26.782	2.641	0,75	**Defisit**
12.	Trenggalek	16.075	9.002,00	66.931	6.599	1,18	Surplus

No.	Keterangan	Rata-Rata Produksi Padi (ton)	Rata-Rata Produksi Beras (ton)	Jumlah Penduduk Tahun 2024 (jiwa)	Konsumsi Beras (ton)	Daya Dukung Pangan (beras)	Evaluasi
13.	Tugu	13.703	7.673,68	49.423	4.873	1,51	Surplus
14.	Watulimo	5.670	3.175,20	72.449	7.143	0,41	**Defisit**
Kabupaten Trenggalek		**184.187**	**103.145**	**754.257**	**74.370**	**1,27**	**Surplus**

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2026

Pada tahun 2025 daya dukung pangan di Kecamatan Dongko, Kampak, Pule, Suruh dan Watulimo nilainya kurang dari 1 (defisit) karena pada lima kecamatan tersebut konsumsi berasnya lebih besar dari pada produksinya. Produksi beras tahun 2025 di lima kecamatan tersebut rendah karena luas baku sawahnya rendah, yakni di Kecamatan Dongko 704,46 ha, Kecamatan Kampak 271,6 ha Kecamatan Pule 843,96 ha, Kecamatan Suruh 309,47 ha dan Kecamatan Watulimo 404,44 ha.

Status daya dukung pangan ditentukan dengan dinamika jumlah penduduk pada suatu wilayah. Dalam memperkirakan status pangan, perhitungan proyeksi penduduk diperlukan untuk menentukan potensi kebutuhan pangan di masa yang akan datang. Berdasarkan data RPJPD Kabupaten Trenggalek, jumlah penduduk tahun 2029 sejumlah 785.297 jiwa atau meningkat 4,1% dibandingkan tahun awal 2023. Berikut ini adalah proyeksi kebutuhan pangan antara awal tahun dan akhir tahun perencanaan adalah sebagai berikut:

Tabel II.11
Proyeksi Status Daya Dukung Pangan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029

Tahun Proyeksi	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan Konsumsi Beras	Rata-rata Produksi Beras	Daya Dukung Pangan	Status Daya Dukung Pangan
2025	Bendungan	29.190	124,89	3.645,59	4.713,56	1,29	Surplus
	Dongko	67.473	124,89	8.426,66	5.619,96	0,66	Defisit
	Durenan	50.370	124,89	6.290,72	9.676,99	1,48	Surplus
	Gandusari	51.389	124,89	6.417,92	9.678,02	1,41	Surplus
	Kampak	52.503	124,89	6.557,05	3.291,08	0,69	Defisit
	Karangan	58.274	124,89	7.277,89	10.194,35	1,59	Surplus
	Munjungan	54.694	124,89	6.830,74	7.998,90	1,15	Surplus
	Panggul	38.110	124,89	4.759,56	11.247,46	1,11	Surplus
	Pogalan	54.841	124,89	6.849,12	7.160,17	1,05	Surplus
	Pule	26.650	124,89	3.328,30	5.598,38	0,77	Defisit

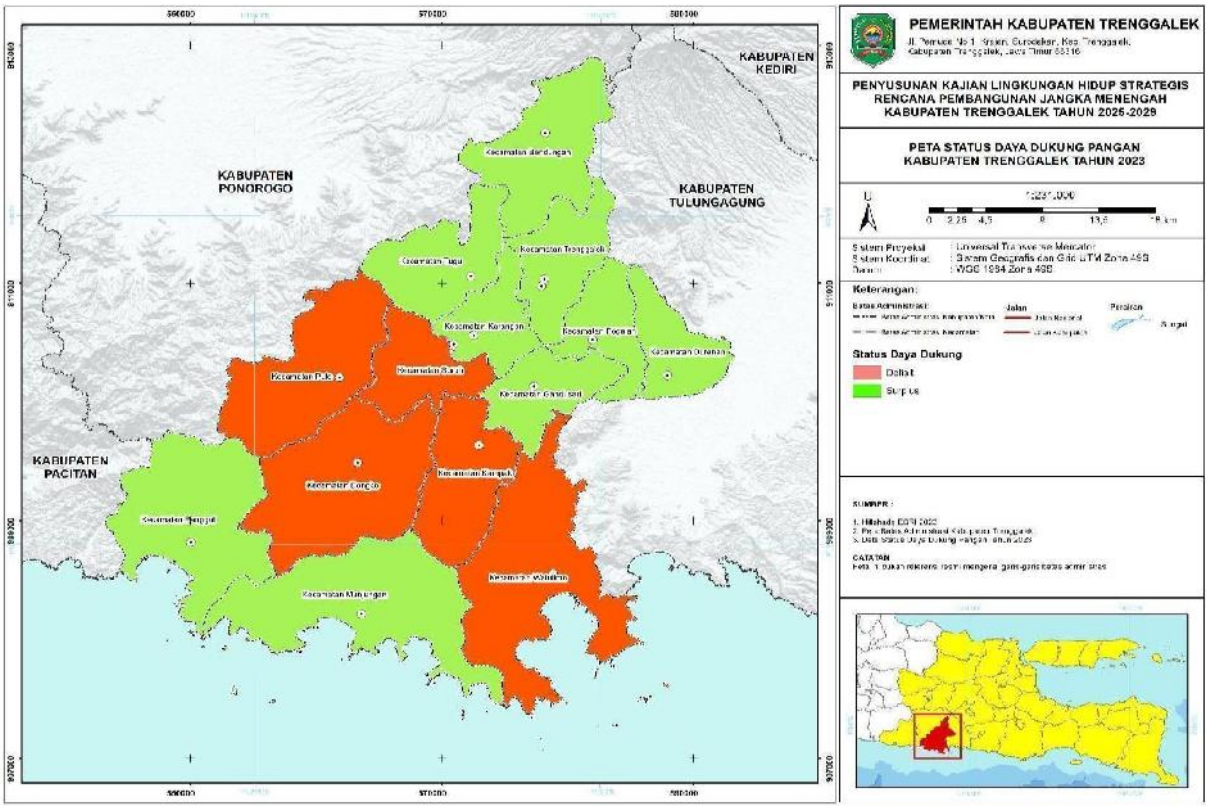
Tahun Proyeksi	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan Konsumsi Beras	Rata-rata Produksi Beras	Daya Dukung Pangan	Status Daya Dukung Pangan
	Suruh	67.863	124,89	8.475,42	2.433,33	0,73	Defisit
	Trenggalek	81.237	124,89	10.145,69	8.907,34	1,06	Surplus
	Tugu	55.636	124,89	6.948,32	8.429,56	1,34	Surplus
	Watulimo	73.999	124,89	9.241,70	3.450,94	0,37	Defisit
	Kabupaten Trenggalek	**762.228**	**124,89**	**95.194,66**	**98.400,04**	**1,03**	**Surplus**
2026	Bendungan	29.196	124,89	3.646,34	4.713,56	1,29	Surplus
	Dongko	69.671	124,89	8.701,17	5.619,96	0,65	Defisit
	Durenan	52.984	124,89	6.617,18	9.676,99	1,46	Surplus
	Gandusari	55.265	124,89	6.902,04	9.678,02	1,40	Surplus
	Kampak	39.152	124,89	4.889,64	3.291,08	0,67	Defisit
	Karangan	51.831	124,89	6.473,23	10.194,35	1,57	Surplus
	Munjungan	55.606	124,89	6.944,64	7.998,90	1,15	Surplus
	Panggul	83.044	124,89	10.371,36	11.247,46	1,08	Surplus
	Pogalan	54.827	124,89	6.847,35	7.160,17	1,05	Surplus
	Pule	58.943	124,89	7.361,36	5.598,38	0,76	Defisit
	Suruh	27.301	124,89	3.409,56	2.433,33	0,71	Defisit
	Trenggalek	68.350	124,89	8.536,24	8.907,34	1,04	Surplus
	Tugu	50.779	124,89	6.341,74	8.429,56	1,33	Surplus
	Watulimo	74.296	124,89	9.278,89	3.450,94	0,37	Defisit
	Kabupaten Trenggalek	**771.245**	**124,89**	**96.320,75**	**98.400,04**	**1,02**	**Surplus**
2027	Bendungan	29.373	124,89	3.668,36	4.713,56	1,28	Surplus
	Dongko	70.091	124,89	8.753,70	5.619,96	0,64	Defisit
	Durenan	53.304	124,89	6.657,13	9.676,99	1,45	Surplus
	Gandusari	55.599	124,89	6.943,70	9.678,02	1,39	Surplus
	Kampak	39.388	124,89	4.919,16	3.291,08	0,67	Defisit
	Karangan	52.144	124,89	6.512,31	10.194,35	1,57	Surplus
	Munjungan	55.942	124,89	6.986,56	7.998,90	1,14	Surplus
	Panggul	83.545	124,89	10.433,98	11.247,46	1,08	Surplus
	Pogalan	55.158	124,89	6.888,69	7.160,17	1,04	Surplus
	Pule	59.299	124,89	7.405,80	5.598,38	0,76	Defisit
	Suruh	27.465	124,89	3.430,14	2.433,33	0,71	Defisit
	Trenggalek	68.763	124,89	8.587,77	8.907,34	1,04	Surplus
	Tugu	51.085	124,89	6.380,03	8.429,56	1,32	Surplus
	Watulimo	74.745	124,89	9.334,90	3.450,94	0,37	Defisit
	Kabupaten Trenggalek	**775.901**	**124,89**	**96.902,23**	**98.400,04**	**1,02**	**Surplus**
2028	Bendungan	29.550	124,89	3.690,50	4.713,56	1,28	Surplus
	Dongko	70.514	124,89	8.806,55	5.619,96	0,64	Defisit
	Durenan	53.626	124,89	6.697,32	9.676,99	1,44	Surplus
	Gandusari	55.934	124,89	6.985,62	9.678,02	1,39	Surplus
	Kampak	39.626	124,89	4.948,86	3.291,08	0,67	Defisit
	Karangan	52.459	124,89	6.551,62	10.194,35	1,56	Surplus
	Munjungan	56.279	124,89	7.028,74	7.998,90	1,14	Surplus
	Panggul	84.050	124,89	10.496,96	11.247,46	1,07	Surplus

Tahun Proyeksi	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan Konsumsi Beras	Rata-rata Produksi Beras	Daya Dukung Pangan	Status Daya Dukung Pangan
	Pogalan	55.491	124,89	6.930,28	7.160,17	1,03	Surplus
	Pule	59.657	124,89	7.450,50	5.598,38	0,75	Defisit
	Suruh	27.631	124,89	3.450,85	2.433,33	0,71	Defisit
	Trenggalek	69.178	124,89	8.639,61	8.907,34	1,03	Surplus
	Tugu	51.394	124,89	6.418,54	8.429,56	1,31	Surplus
	Watulimo	75.196	124,89	9.391,25	3.450,94	0,37	Defisit
	Kabupaten Trenggalek	**780.585**	**124,89**	**97.487,21**	**98.400,04**	**1,01**	**Surplus**
2029	Bendungan	29.728	124,89	3.712,78	4.713,56	1,27	Surplus
	Dongko	70.940	124,89	8.859,71	5.619,96	0,63	Defisit
	Durenan	53.949	124,89	6.737,75	9.676,99	1,44	Surplus
	Gandusari	56.272	124,89	7.027,79	9.678,02	1,38	Surplus
	Kampak	39.865	124,89	4.978,73	3.291,08	0,66	Defisit
	Karangan	52.776	124,89	6.591,18	10.194,35	1,55	Surplus
	Munjungan	56.619	124,89	7.071,17	7.998,90	1,13	Surplus
	Panggul	84.557	124,89	10.560,33	11.247,46	1,07	Surplus
	Pogalan	55.826	124,89	6.972,11	7.160,17	1,03	Surplus
	Pule	60.017	124,89	7.495,48	5.598,38	0,75	Defisit
	Suruh	27.798	124,89	3.471,68	2.433,33	0,70	Defisit
	Trenggalek	69.595	124,89	8.691,77	8.907,34	1,02	Surplus
	Tugu	51.704	124,89	6.457,29	8.429,56	1,31	Surplus
	Watulimo	75.650	124,89	9.447,95	3.450,94	0,37	Defisit
	Kabupaten Trenggalek	**785.297**	**124,89**	**98.075,73**	**98.400,04**	**1,00**	**Surplus**

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024 (Dokumen KLHS RPJMD 2025-2029)

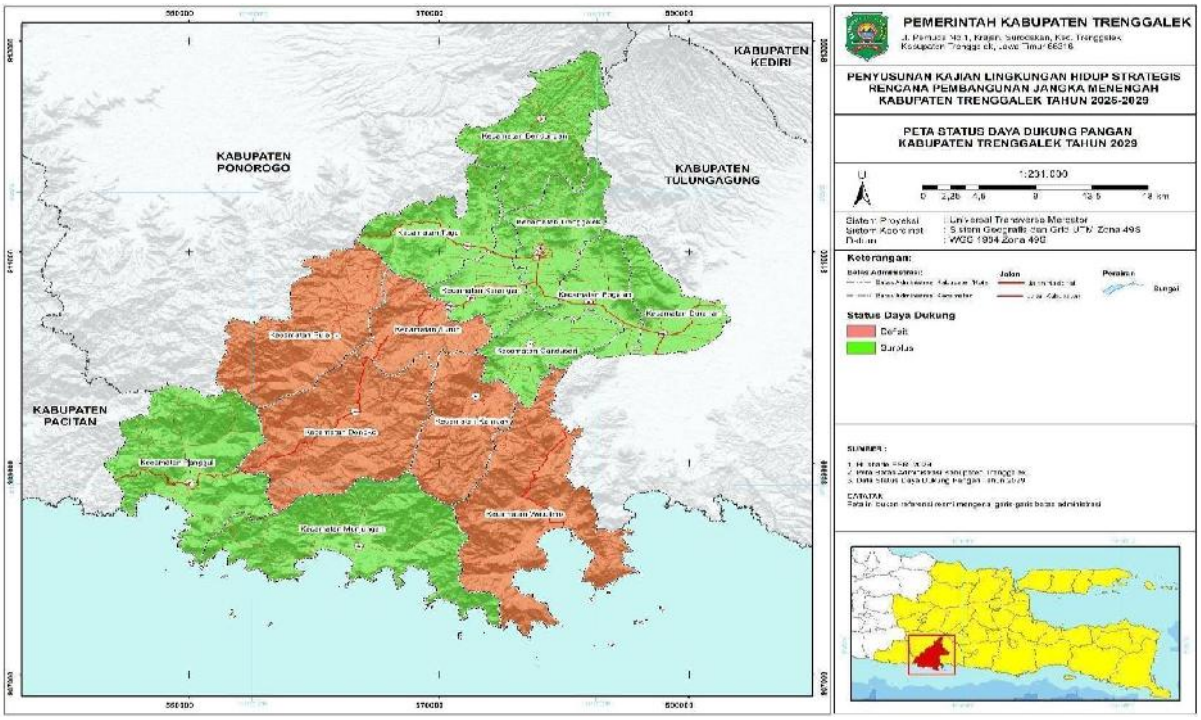
Berdasarkan hasil analisis kondisi status daya dukung pangan pada tahun 2029 sebagai tahun akhir perencanaan dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan angka konsumsi beras sebesar 2.881,07 ton. Hal ini memberikan konsekuensi pada pengurangan nilai daya dukung pangan sebanyak "0,09" poin yang mengurangi nilai daya dukung dengan angka 1,00 poin. Sedangkan tidak ada perubahan status daya dukung pangan pada masing-masing kecamatan kecuali pada Kecamatan Pogalan. Masih terdapat 5 kecamatan yang berada pada status daya dukung pangan "defisit" diantaranya (Kecamatan Dongko, Kecamatan Kampak, Kecamatan Pule, Kecamatan Suruh, dan Kecamatan Watulimo).

Gambar II.9
Peta Status Daya Dukung Pangan Tahun 2023



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2023

Gambar II.10
Peta Proyeksi Status Daya Dukung Pangan Tahun 2029



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

c. Daya Dukung Air

Air adalah komponen yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kelestarian air perlu untuk dijaga karena air sangat peka sebagai media interpretasi kualitas lingkungan. Daya dukung air yaitu kemampuan ekosistem dalam memberikan manfaat berupa ketersediaan air bersih. Daya dukung air dapat dihitung dengan menggunakan sistem grid atau membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhan air. Daya dukung tersebut air tersebut dinilai surplus ketika ketersediaan air mampu mencukupi kebutuhan penduduk. Sementara itu, kondisi daya dukung air defisit menunjukkan bahwa ketersediaan air tidak mampu mencukupi kebutuhan penduduk. Ketersediaan air (SA) dipengaruhi oleh jenis penggunaan lahan pada suatu wilayah. Setiap jenis penggunaan lahan memiliki koefisien limpasan yang berbeda. Selain itu, kondisi ketersediaan air di daerah juga berbeda karena perbedaan nilai curah hujan. Sementara itu, kebutuhan air (DA) didasarkan pada jumlah penduduk dan nilai kebutuhan air untuk kehidupan layak.

1) Ketersediaan Air

Perhitungan ketersediaan air menggunakan rumus koefisien limpasan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang penentuan daya dukung untuk penataan ruang. Tingkat limpasan dicerminkan dari penggunaan lahan. Setiap penggunaan lahan. Setiap penggunaan lahan mempunyai tingkat menyerap air masing-masing. Data lain yang menjadi indikator adalah curah hujan rerata di Trenggalek. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil perhitungan ketersediaan air di Kabupaten Trenggalek.

Tabel II.12
Perhitungan Ketersediaan Air Kabupaten Trenggalek

Penggunaan Lahan	Luasan (A)	Koefisien (CI)	A x CI
Bangunan Non-Permukiman	13,18	0,7	9,22
Hutan Lahan Rendah Primer	959,2	0,1	95,93
Hutan Lahan Rendah Sekunder	11.548,15	0,1	1.154,81
Hutan Lahan Tinggi Primer	660,60	0,1	66,06
Hutan Lahan Tinggi Sekunder	18.415,28	0,1	1.841,53
Hutan Mangrove Sekunder	59,92	0,1	5,99
Hutan Rakyat	873,82	0,1	87,38
Hutan Tanaman	4.647,26	0,1	464,73
Industri, Perdagangan dan Perkantoran	12,43	0,7	8,70
Kebun Campuran	33.113,26	0,2	6.622,65

Penggunaan Lahan	Luasan (A)	Koefisien (CI)	A x CI
Ladang/Tegalan Hortikultura	1.516,80	0,1	151,68
Ladang/Tegalan Palawija	13.414,88	0,1	1.341,49
Lahan Terbuka	57,85	0,1	5,78
Perkebunan Kelapa	492,35	0,2	98,47
Perkebunan Lain	1.184,95	0,2	236,99
Perkebunan Tebu	253,66	0,2	50,73
Permukiman Desa	20.541,73	0,7	14.379,21
Permukiman Kota	262,38	0,7	183,67
Sawah Padi Terus Menerus	9.628,96	0,2	1.925,79
Sawah Padi/Bera	3.792,27	0,2	758,45
Semak	43,09	0,07	3,02
Semak Belukar	4.695,33	0,07	328,67
Tanaman Lahan Kering Lain	95,31	0,2	19,06
Tubuh Air	825,10	0,1	82,51
Total	126.407,85	Total	29.922,54
Koefisien limpasan tertimbang			**0,24**
Rata-rata curah hujan			**2.616,5**
Koefisien resapan			**0,76**
Ketersediaan air tanah			**2.542.853.785,33**
Ketersediaan Air permukaan			**782.923.208,69**
Ketersediaan air total (m3/tahun)			**3.325.776.994,01**

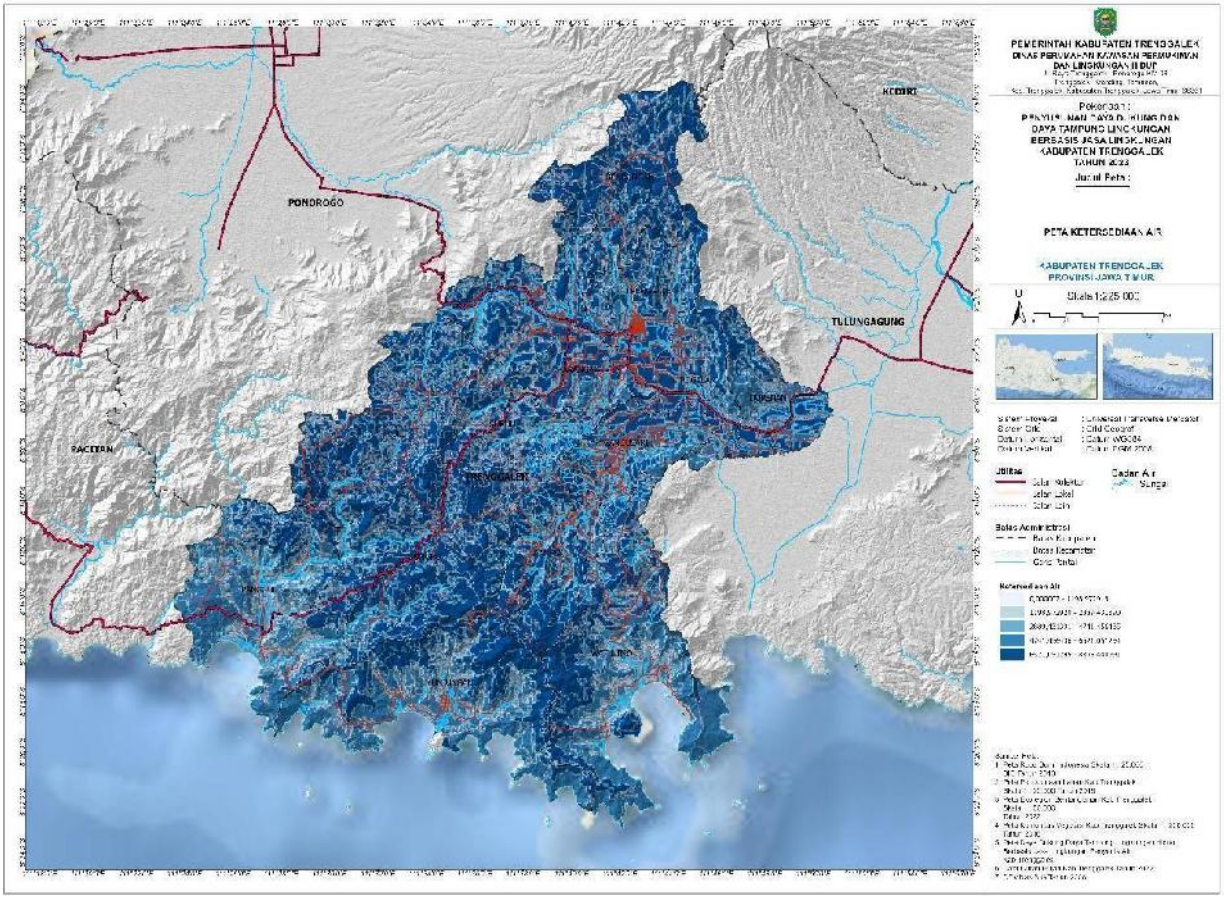
Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

Nilai koefisien bergantung pada kemampuan lahan untuk menyerap air. Hutan mempunyai nilai rendah karena menyerap air lebih banyak dibandingkan perumahan. Koefisien limpasan penggunaan lahan pada tahun 2023 mencapai 0,24 yang artinya bahwa air hujan tidak masuk ke dalam tanah tetapi menjadi air yang mengalir di permukaan sebesar 24% dari total ketersediaan air. Air permukaan tersebut dianggap tidak dapat menjadi sumber air karena langsung masuk ke sistem sungai. Masih banyak penggunaan lahan berupa perkebunan, sawah, hutan di Kabupaten Trenggalek dapat menyerap air secara maksimal.

Curah hujan rerata tahunan di Kabupaten Trenggalek mencapai 2.616,5 mm/tahun. Nilai tersebut dihitung dengan menjumlah curah hujan rata-rata dibagi dengan jumlah stasiun iklim di Kabupaten Trenggalek. Ketersediaan air di Kabupaten Trenggalek mencapai 782.923.208,69 m3/tahun, yang mana akan dibandingkan dengan data kebutuhan untuk mengetahui tingkat daya dukung air. Dapat dilihat peta persebaran ketersediaan air dengan volume tinggi berada pada bagian dataran tinggi dan kerapatan vegetasi tinggi. Sedangkan pada kawasan permukiman dan

dataran rendah secara graudal memiliki ketersediaan air rendah dikarenakan tingginya tingkat konsumsi air untuk kebutuhunan domestik dan pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II.11
Peta Ketersediaan Air Kabupaten Trenggalek



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2023

Tabel II.13
Potensi Ketersediaan Air Kabupaten Trenggalek

No.	Keterangan	CI Embung	CI Hortikultura	CI Hutan	CI Perkebunan	CI Permukiman dan Tempat Kegiatan	CI Sawah	CI Semak Belukar	CI Sungai	CI Total	Koefisien Limpasan	Ketersediaan Air Limpasan
1.	Bendungan	0,00	258,85	513,19	94,62	365,54	263,86	20,21	2,17	1.518,44	0,16	39.730.111
2.	Dongko	0,07	106,64	80,14	1.866,78	1.115,96	484,07	47,77	6,81	2.516,58	0,18	65.846.316
3.	Durenan	0,00	97,57	3,98	62,03	883,79	952,85	66,07	2,29	2.068,57	0,42	54.124.154
4.	Gandusari	0,04	35,59	37,02	284,70	931,91	897,16	37,34	4,58	2.228,34	0,42	58.304.504
5.	Kampak	0,00	0,00	494,29	337,75	571,88	174,98	0,00	6,57	1.585,47	0,20	41.483.715
6.	Karangan	0,00	79,21	23,31	91,51	666,29	1.077,59	36,13	5,11	1.979,15	0,44	51.784.518
7.	Munjungan	0,00	128,16	672,60	587,32	672,36	699,34	116,64	7,81	2.403,33	0,16	62.883.129
8.	Panggul	0,04	361,91	74,26	891,36	1.049,51	840,15	100,73	10,91	2.734,22	0,21	71.540.866
9.	Pogalan	0,00	19,45	91,52	193,02	875,54	902,78	6,64	4,91	2.093,85	0,44	54.785.701
10.	Pule	0,00	326,16	14,42	917,74	1.198,67	571,34	64,59	4,22	2.403,11	0,21	62.877.373
11.	Suruh	0,05	160,42	13,72	404,88	512,55	199,51	56,79	4,49	1.665,33	0,30	43.573.359
12.	Trenggalek	0,00	54,19	138,37	259,30	745,12	784,02	49,36	6,35	2.036,71	0,33	53.290.628
13.	Tugu	0,00	182,55	79,70	171,35	764,18	897,58	86,05	8,79	2.190,20	0,31	57.306.520
14.	Watulimo	0,06	0,00	1.198,62	372,38	1.030,93	256,05	0,17	3,92	2.499,23	0,16	65.392.353
	Kabupaten Trenggalek	0,26	1.810,69	3.435,14	6.534,75	11.384,24	9.001,27	688,49	78,93	29.922,54	0,24	782.923.249

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

2) Kebutuhan Air

Perhitungan kebutuhan air dilakukan untuk mengetahui seberapa besar air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan meliputi kebutuhan air domestik, non domestik, pertanian, dan peternakan. Jumlah kebutuhan air domestik, pertanian, dan peternakan. Jumlah kebutuhan air domestik suatu wilayah diketahui melalui perkalian rata-rata atau asumsi penggunaan air setiap orang dengan jumlah penduduk wilayah kajian. Tabel menunjukkan potensi kebutuhan air di Kabupaten Trenggalek.

Tabel II.14
Potensi Kebutuhan Air Kabupaten Trenggalek

Komponen		Jumlah	Standar Kebutuhan Air (liter/orang/hari)	Kebutuhan Air (m^3/tahun)
Penduduk		757.444	90	24.882.035,40
Kegiatan Non Domestik			30% dari kebutuhan penduduk	7.464.610,62
Komponen		**Jumlah**	**Standar Kebutuhan Air (liter/ekor/hari)**	**Kebutuhan Air (m^3/tahun)**
Ternak Besar		52.681	40	769.142,6
Ternak Kecil		478.076	5	872.488,7
Unggas		2.280.861	0,6	499.508,56
Komponen		**Jumlah**	**Standar Kebutuhan Air (liter/ha/hari)**	**Kebutuhan Air (m^3/tahun)**
Pertanian		63.639,59	19.958,4	463.602.703,5
	Total			**498.294.603,72**

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

Jumlah potensi kebutuhan air Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 adalah sebesar 498.070.675,7 m3 /tahun. Sumbangan terbesar adalah kebutuhan untuk penduduk dengan kategori perkotaan kecil membutuhkan 90 liter/hari. Jumlah tersebut sesuai dengan kebutuhan wilayah dengan penduduk 500.000-1.000.000 berdasarkan SNI 6.728:4 tahun 2015. Kebutuhan non domestik seperti infrastruktur diasumsikan 30% dari kebutuhan penduduk.

Hasil perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air menunjukkan daya dukung di Kabupaten Trenggalek artinya ada ketersediaan air masih melebihi kebutuhan yang sangat besar. Hal itu terlihat dengan nilai Daya Dukung Air bernilai 1,57 sehingga mampu menjamin ketersediaan air untuk kebutuhan konsumsi domestik. Jika ditelaah menjadi setiap kecamatan, terdapat 2 kecamatan dengan status “defisit” diantaranya adalah Kecamatan Dongko dan Kecamatan Pule. Hal itu dikarenakan potensi air ketersediaan air lebih besar dengan estimasi kebutuhan air yang digunakan dalam kecamatan tersebut. Pertanian menjadi sektor dengan kebutuhan air mencakup 90% dari

total kebutuhan air masing-masing kecamatan. Sedangkan proyeksi status daya dukung pangan selama periode tahun 2025-2029 tidak menunjukkan perubahan status daya dukung air.

Tabel II.15
Proyeksi Status Daya Dukung Air

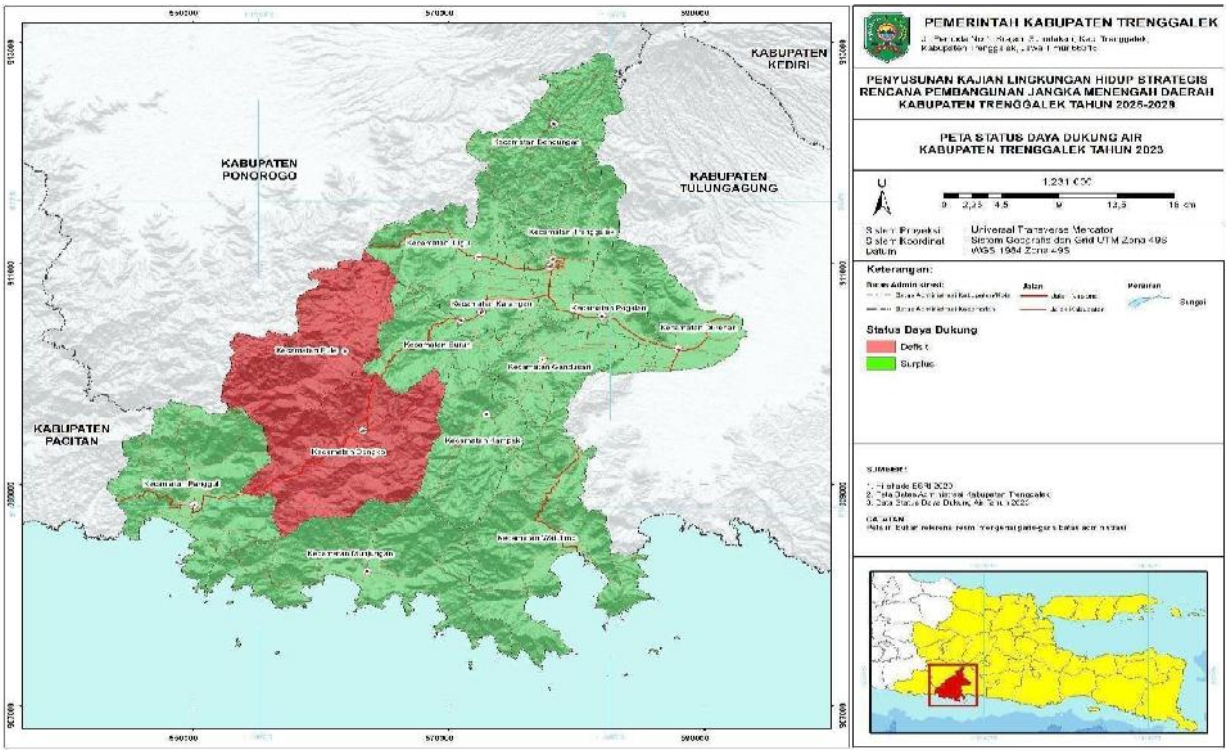
Kecamatan	Populasi	Kebutuhan Penduduk (m3/tahun)	Kegiatan Non-Domestik (m3/tahun)	Ternak Besar (ekor)	Kebutuhan Ternak Besar (m3/tahun)	Ternak Kecil (ekor)	Kebutuhan Ternak Kecil (m3/tahun)	Unggas (ekor)	Kebutuhan Unggas (m3/tahun)	Pertanian (ha)	Kebutuhan Pertanian (m3/tahun)	Total Kebutuhan Air per Tahun (m3/tahun)	Ketersediaan Air	DDA	Status
Tahun 2025															
Bendungan	29.190	958.904	287.671,18	45.557	665.137,64	24.370	44.475,50	73.590	16.116,30	3.438,58	25.049.429	27.021.734	39.730.111	1,47	Surplus
Dongko	67.863	2.229.303	668.791,02	13.952	203.695,10	62.036	113.215,3	90.781	19.881,07	11.091,8	80.802.167	84.037.052	65.846.316	0,78	Defisit
Durenan	52.503	1.724.712	517.413,48	8.150	118.988,61	10.718	19.560,57	371.396	81.335,81	2.647,11	19.283.687	21.745.697	54.124.154	2,49	Surplus
Gandusari	54.841	1.801.534	540.460,11	11.044	161.246,38	10.849	19.798,70	231.527	50.704,30	3.061,05	22299.191	24.872.934	58.304.504	2,34	Surplus
Kampak	38.110	1.251.914	375.574,11	7.220	105.416,77	44.849	81.848,81	209.511	45.882,82	1.938,72	14.123.225	15.983.861	41.483.715	2,60	Surplus
Karangan	51.389	1.688.115	506.434,43	17.162	250.564,95	20.602	37.598,10	91.939	20.134,62	2.789,03	20.317.536	22.820.383	51.784.518	2,27	Surplus
Munjungan	55.636	1.827.628	548.288,30	4.554	66.493,20	42.603	77.750,05	120.019	26.284,11	5.217,22	38.006.477	40.552.920	62.883.129	1,55	Surplus
Panggul	81.237	2.668.634	800.590,34	23.137	337.797,80	70.635	128.908,5	90.331	19.782,41	9.276,12	67.574.820	71.530.533	71.540.866	1,00	Surplus
Pogalan	54.694	1.796.698	539.009,51	12.158	177.506,15	6.287	11.473,95	171.446	37.546,58	2.449,25	17.842.367	20.404.601	54.785.701	2,68	Surplus
Pule	58.274	1.914.313	574.293,89	19.363	282.702,59	79.462	145.018,7	224.893	49.251,59	8.666,46	63.133.598	66.099.178	62.877.373	0,95	Defisit
Suruh	26.650	875.447	262.634,00	8.523	124.437,91	29.439	53.725,72	79.038	17.309,30	3.913,57	28.509.640	29.843.194	43.573.359	1,46	Surplus
Trenggalek	67473	2.216.476	664.942,91	7.305	106.650,57	12.480	22.776,15	115.581	25.312,19	2.958,47	21.551.945	24.588.103	53.290.628	2,17	Surplus
Tugu	50.370	1.654.658	496.397,27	15.861	231.573,19	21.342	38.948,28	260.613	57.074,30	3.964,46	28.880.357	31.359.007	57.306.520	1,83	Surplus
Watulimo	73.999	2.430.857	729.257,09	4.228	61.734,24	21.002	38.329,20	72.947	15.975,38	2.227,68	16.228.247	19.504.399	65.392.353	3,35	Surplus
Kabupaten Trenggalek	**762.228**	**25.039.192**	**7.511.758**	**198.215**	**2.893.945**	**456.673**	**833.428**	**2.203.610**	**482.591,0**	**63.640**	**463.602.684**	**500.363.597**	**782.923.247**	**1,56**	**Surplus**
Tahun 2026															
Bendungan	29.196	959.088	287.726,6	45.832	669.152,98	24.766	45.198	74.035	16.214	3.438,58	25.049.429	27.026.809	39.730.111	1,47	Surplus
Dongko	69.671	2.288.692	686.607,7	14.036	204.924,78	63.043	115.054	91.329	20.001	11.091,8	80.802.167	84.117.447	65.846.316	0,78	Defisit
Durenan	52.984	1.740.524	522.157,3	8.199	119.706,92	10.892	19.878	373.638	81.827	2.647,11	19.283.687	21.767.781	54.124.154	2,49	Surplus
Gandusari	55.265	1.815.455	544.636,6	11.111	162.219,80	11.025	20.120	232.924	51.010	3.061,05	22299.191	24.892.633	58.304.504	2,34	Surplus
Kampak	39.152	1.286.143	385.843,0	7.264	106.053,15	45.577	83.178	210.775	46.160	1.938,72	14.123.225	16.030.602	41.483.715	2,59	Surplus
Karangan	51.831	1.702.648	510.794,5	17.266	252.077,57	20.936	38.209	92.494	20.256	2.789,03	20.317.536	22.841.521	51.784.518	2,27	Surplus
Munjungan	55.606	1.826.657	547.997,1	4.582	66.894,61	43.295	79.013	120.743	26.443	5.217,22	38.006.477	40.553.482	62.883.129	1,55	Surplus
Panggul	83.044	2.727.995	818.398,6	23.277	339.837,04	71.782	131.003	90.876	19.902	9.276,12	67.574.820	71.611.955	71.540.866	1,00	Surplus
Pogalan	54.827	1.801.067	540.320,1	12.231	178.577,73	6.389	11.660	172.481	37.773	2.449,25	17.842.367	20.411.765	54.785.701	2,68	Surplus
Pule	58.943	1.936.278	580.883,3	19.480	284.409,23	80.753	147.374	226.251	49.549	8.666,46	63.133.598	66.132.091	62.877.373	0,95	Defisit

Kecamatan	Populasi	Kebutuhan Penduduk (m3/tahun)	Kegiatan Non-Domestik (m3/tahun)	Ternak Besar (ekor)	Kebutuhan Ternak Besar (m3/tahun)	Ternak Kecil (ekor)	Kebutuhan Ternak Kecil (m3/tahun)	Unggas (ekor)	Kebutuhan Unggas (m3/tahun)	Pertanian (ha)	Kebutuhan Pertanian (m3/tahun)	Total Kebutuhan Air per Tahun (m3/tahun)	Ketersediaan Air	DDA	Status
Suruh	27.301	896.838	269.051,4	8.575	125.189,12	29.917	54.598	79.515	17.414	3.913,57	28.509.640	29.872.731	43.573.359	1,46	Surplus
Trenggalek	68.350	2.245.298	673.589,3	7.349	107.294,40	12.683	23.146	116.279	25.465	2.958,47	21.551.945	24.626.737	53.290.628	2,16	Surplus
Tugu	50.779	1.668.090	500.427,0	15.957	232.971,16	21.688	39.581	262.187	57.419	3.964,46	28.880.357	31.378.845	57.306.520	1,83	Surplus
Watulimo	74.296	2.440.624	732.187,1	4.254	62.106,93	21.343	38.952	73.387	16.072	2.227,68	16.228.247	19.518.188	65.392.353	3,35	Surplus
Kabupaten Trenggalek	**771.245**	**25.335.398**	**7.600.619**	**199.412**	**2.911.415**	**464.091**	**846.966**	**2.216.914**	**485.504,1**	**63.640**	**463.602.684**	**500.782.587**	**782.923.247**	**1,56**	**Surplus**
Tahun 2027															
Bendungan	29.373	964.903	289.470,9	46.109	673.193	25.168	45.932	74.482	16.311	3.438,58	25.049.429	27.039.239	39.730.111	1,47	Surplus
Dongko	70.091	2.302.489	690.746,8	14.121	206.162	64.068	116.923	91.881	20.122	11.091,8	80.802.167	84.138.610	65.846.316	0,78	Defisit
Durenan	53.304	1.751.036	525.310,9	8.249	120.430	11.069	20.201	375.894	82.321	2.647,11	19.283.687	21.782.986	54.124.154	2,48	Surplus
Gandusari	55.599	1.826.427	547.928,1	11.178	163.199	11.204	20.447	234.330	51.318	3.061,05	22299.191	24.908.511	58.304.504	2,34	Surplus
Kampak	39.388	1.293.896	388.168,7	7.308	106.693	46.318	84.529	212.048	46.438	1.938,72	14.123.225	16.042.951	41.483.715	2,59	Surplus
Karangan	52.144	1.712.930	513.879,1	17.370	253.599	21.276	38.829	93.052	20.378	2.789,03	20.317.536	22.857.153	51.784.518	2,27	Surplus
Munjungan	55.942	1.837.695	551.308,4	4.609	67.298	43.998	80.296	121.472	26.602	5.217,22	38.006.477	40.569.677	62.883.129	1,55	Surplus
Panggul	83.545	2.744.453	82.3336	23.417	341.889	72.948	133.131	91.425	20.022	9.276,12	67.574.820	71.637.650	71.540.866	1,00	Surplus
Pogalan	55.158	1.811.940	543.582,1	12.305	179.656	6.493	11.850	173.522	38.001	2.449,25	17.842.367	20.427.396	54.785.701	2,68	Surplus
Pule	59.299	1.947.972	584.391,6	19.598	286.126	82.065	149.768	227.617	49.848	8.666,46	63.133.598	66.151.704	62.877.373	0,95	Defisit
Suruh	27.465	902.225	270.667,6	8.626	125.945	30.403	55.485	79.995	17.519	3.913,57	28.509.640	29.881.482	43.573.359	1,46	Surplus
Trenggalek	68.763	2.258.865	677.659,4	7.393	107.942	12.889	23.522	116.980	25.619	2.958,47	21.551.945	24.645.552	53.290.628	2,16	Surplus
Tugu	51.085	1.678.142	503.442,7	16.053	234.378	22.040	40.224	263.769	57.765	3.964,46	28.880.357	31.394.309	57.306.520	1,83	Surplus
Watulimo	74.745	2.455.373	736.612	4.280	62.482	21.690	39.585	73.830	16.169	2.227,68	16.228.247	19.538.467	65.392.353	3,35	Surplus
Kabupaten Trenggalek	**775.901**	**25.488.348**	**7.646.504**	**200.616**	**2.928.991**	**471.629**	**860.724**	**2.230.297**	**488.435**	**63.640**	**463.602.684**	**501.015.686**	**782.923.247**	**1,56**	**Surplus**
Tahun 2028															
Bendungan	29.550	970.718	291.215,3	46.387	677.257	25.577	46.678	74.931	16410	3.438,58	25.049.429	27.051.706	39.730.111	1,47	Surplus
Dongko	70.514	2.316.385	694.915,5	14.206	207.406	65.108	118.823	92.435	20243	11.091,8	80.802.167	84.159.940	65.846.316	0,78	Defisit
Durenan	53.626	1.761.614	528.484,2	8.298	121.157	11.249	20.529	378.163	82818	2.647,11	19.283.687	21.798.289	54.124.154	2,48	Surplus
Gandusari	55.934	1.837.432	551.229,6	11.246	164.184	11.386	20.779	235.745	51628	3.061,05	22299.191	24.924.444	58.304.504	2,34	Surplus
Kampak	39.626	1.301.714	390.514,2	7.352	107.337	47.070	85.903	213.328	46719	1.938,72	14.123.225	16.055.412	41.483.715	2,58	Surplus
Karangan	52.459	1.723.278	516.983,4	17.475	255.130	21.622	39.460	93.614	20501	2.789,03	20.317.536	22.872.890	51.784.518	2,26	Surplus
Munjungan	56.279	1.848.765	554.629,5	4.637	67.705	44.713	81.601	122.206	26763	5.217,22	38.006.477	40.585.940	62.883.129	1,55	Surplus

Kecamatan	Populasi	Kebutuhan Penduduk (m3/tahun)	Kegiatan Non-Domestik (m3/tahun)	Ternak Besar (ekor)	Kebutuhan Ternak Besar (m3/tahun)	Ternak Kecil (ekor)	Kebutuhan Ternak Kecil (m3/tahun)	Unggas (ekor)	Kebutuhan Unggas (m3/tahun)	Pertanian (ha)	Kebutuhan Pertanian (m3/tahun)	Total Kebutuhan Air per Tahun (m3/tahun)	Ketersediaan Air	DDA	Status
Panggul	84.050	2.761.043	828.312,8	23.558	343.953	74.133	135.293	91.976	20143	9.276,12	67.574.820	71.663.564	71.540.866	1,00	Surplus
Pogalan	55.491	1.822.879	546.863,8	12.379	180.740	6.598	12.042	174.569	38231	2.449,25	17.842.367	20.443.123	54.785.701	2,68	Surplus
Pule	59.657	1.959.732	587.919,7	19.716	287.853	83.398	152.201	228.991	50149	8.666,46	63.133.598	66.171.454	62.877.373	0,95	Defisit
Suruh	27.631	907.678	272.303,5	8.678	126.705	30.897	56.387	80.478	17625	3.913,57	28.509.640	29.890.338	43.573.359	1,46	Surplus
Trenggalek	69.178	2.272.497	681.749,2	7.438	108.594	13.098	23.904	117.687	25773	2.958,47	21.551.945	24.664.463	53.290.628	2,16	Surplus
Tugu	51.394	1.688.293	506.487,9	16.150	235.792	22.399	40.877	265.362	58114	3.964,46	28.880.357	31.409.922	57.306.520	1,82	Surplus
Watulimo	75.196	2.470.189	741.056,6	4.305	62.859	22.042	40.228	74.276	16266	2.227,68	16.228.247	19.558.845	65.392.353	3,34	Surplus
Kabupaten Trenggalek	**780.585**	**25.642.217**	**7.692.665**	**201.827**	**2.946.673**	**479.290**	**874.705**	**2.243.761**	**491383,6**	**63.640**	**463.602.684**	**501.250.328**	**782.923.247**	**1,56**	**Surplus**
Tahun 2029															
Bendungan	29.728	976.564	292.969,4	46.667	681.345	25.993	47.436	75.384	16.509	3.438,58	25.049.429	27.064.254	39.730.111	1,47	Surplus
Dongko	70.940	2.330.379	699.113,7	14.292	208.659	66.166	120.753	92.993	20.366	11.091,8	80.802.167	84.181.436	65.846.316	0,78	Defisit
Durenan	53.949	1.772.225	531.667,4	8.348	121.888	11.432	20.863	380.446	83.318	2.647,11	19.283.687	21.813.648	54.124.154	2,48	Surplus
Gandusari	56.272	1.848.535	554.560,6	11.313	165.175	11.571	21.117	237.168	51.940	3.061,05	22299.191	24.940.519	58.304.504	2,34	Surplus
Kampak	39.865	1.309.565	392.869,6	7.396	107.985	47.834	87.298	214.616	47.001	1.938,72	14.123.225	16.067.944	41.483.715	2,58	Surplus
Karangan	52.776	1.733.692	520.107,5	17.580	256.670	21.973	40.101	94.179	20.625	2.789,03	20.317.536	22.888.732	51.784.518	2,26	Surplus
Munjungan	56.619	1.859.934	557.980,2	4.665	68.113	45.439	82.926	122943	26.925	5.217,22	38.006.477	40.602.356	62.883.129	1,55	Surplus
Panggul	84.557	2.777.697	833.309,2	23.701	346.029	75.337	137.491	92.532	20.264	9.276,12	67.574.820	71.689.611	71.540.866	1,00	Surplus
Pogalan	55.826	1.833.884	550.165,2	12.454	181.831	6.706	12.238	175.623	38.461	2.449,25	17.842.367	20.458.947	54.785.701	2,68	Surplus
Pule	60.017	1.971.558	591.467,5	19.835	289.591	84.753	154.673	230.373	50.452	8.666,46	63.133.598	66.191.340	62.877.373	0,95	Defisit
Suruh	27.798	913.164	273.949,3	8.731	127.470	31.399	57.303	80.964	17.731	3.913,57	28.509.640	29.899.257	43.573.359	1,46	Surplus
Trenggalek	69.595	2.286.196	685.858,7	7.483	109.249	13.311	24.292	118.397	25.929	2.958,47	21.551.945	24.683.470	53.290.628	2,16	Surplus
Tugu	51.704	1.698.476	509.542,9	16.248	237.216	22.762	41.541	266.964	58.465	3.964,46	28.880.357	31.425.599	57.306.520	1,82	Surplus
Watulimo	75.650	2.485.103	745.530,8	4.331	63.239	22.401	40.881	74.724	16.365	2.227,68	16.228.247	19.579.364	65.392.353	3,34	Surplus
Kabupaten Trenggalek	**785.297**	**25.797.006**	**7.739.092**	**203.045**	**2.964.462**	**487.076**	**888.913**	**2.257.306**	**494.350,1**	**63.640**	**463.602.684**	**501.486.508**	**782.923.247**	**1,56**	**Surplus**

***Sumber**: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024*

Gambar II.12
Peta Status Daya Dukung Air Kabupaten Trenggalek



Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2023

d. Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung diketahui dari luas lahan yang memiliki fungsi lindung. Koefisien lindung untuk guna lahan, dan luas wilayah. Nilai daya dukung fungsi lindung berkisar antara 0 hingga 1. Nilai daya dukung fungsi lindung yang mendekati angka 1 berarti fungsi lindung di wilayah tersebut semakin baik. Sementara itu, wilayah dengan nilai daya dukung fungsi lindung mendekati 0 berarti fungsi lindung di wilayah tersebut tergolong rendah atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya

Tabel II.16
Koefisien Lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat rendah	0 – 0,20
Rendah	0,20 – 0,40
Sedang	0,40 – 0,60
Baik	0,60 – 0,80
Sangat Baik	0,80 – 1,00

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

Tabel II.17
Koefisien Lindung Kabupaten Trenggalek

Penggunaan Lahan	Luasan (A)	Koefisien (CI)	A x CI
Bangunan Non-Permukiman	13,07	0,18	2,35
Hutan Mangrove	59,43	1	59,43
Hutan Primer	2.731,58	1	2731,58
Hutan Sekunder	28.855,88	0,68	19622,00
Hutan Tanaman	5.474,10	0,68	3722,39
Industri, Perdagangan dan Perkantoran	12,35	0,18	2,22
Kebun Campuran	32.850,58	0,42	13797,24
Ladang/Tegalan	15.491,06	0,21	3253,12
Lahan Terbuka	57,36	0,01	0,57
Pemukiman	20.644,16	0,18	3715,95
Perkebunan	1.915,80	0,42	804,64
Sawah Irigasi	9.557,69	0,46	4396,54
Sawah Tadah Hujan	3.763,22	0,46	1731,08
Semak Belukar	4.927,55	0,28	1379,71
Tanaman Lahan Kering Lain	94,55	0,37	34,98
Tubuh Air	818,72	0,98	802,35
Total	**124.407,85**	**0,44**	**56.056,15**

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2024

Berdasarkan tabel di atas kondisi daya dukung fungsi lindung Kabupaten Trenggalek adalah sebesar 0,44. Kabupaten Trenggalek memiliki daya dukung fungsi lindung pada tingkat sedang. Fungsi lindung Kabupaten Trenggalek didukung dengan adanya lahan hutan produksi dan beberapa hutan lindung yang cukup besar di kawasan perbukitan dan pegunungan. Sedangkan pada kawasan dataran rendah, penggunaan lahan didominasi oleh budidaya pertanian dan lahan terbangun.

Daya dukung fungsi lindung diketahui dari luas lahan yang memiliki fungsi lindung. Koefisien lindung untuk guna lahan, dan luas wilayah. Nilai daya dukung fungsi lindung berkisar antara 0 hingga 1. Nilai daya dukung fungsi lindung yang mendekati angka 1 berarti fungsi lindung di wilayah tersebut semakin baik. Sementara itu, wilayah dengan nilai daya dukung fungsi lindung mendekati 0 berarti fungsi lindung di wilayah tersebut tergolong rendah atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

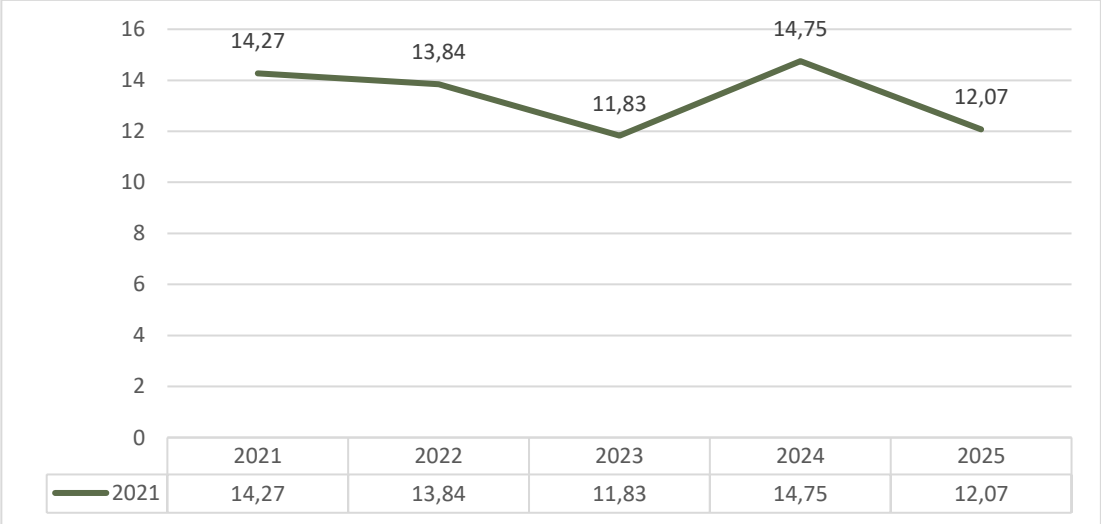
Ketahanan energi, air, dan pangan merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan memegang peran krusial dalam menjamin keberlangsungan

hidup manusia serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketersediaan energi yang andal, akses terhadap air bersih, dan terpenuhinya kebutuhan pangan adalah fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas wilayah. Ketiganya saling memengaruhi—gangguan pada satu aspek dapat berdampak langsung terhadap aspek lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan terpadu dan berkelanjutan atas sumber daya energi, air, dan pangan menjadi strategi kunci dalam mewujudkan kemandirian daerah dan ketahanan nasional di masa depan.

a. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Trenggalek selama periode 2021 hingga 2025 mengalami perubahan dengan angka berturut-turut sebesar 14,27% di 2021 dan 13,84% pada 2022, lalu menurun menjadi 11,83% pada 2023, kembali meningkat menjadi 14,75% pada 2024, dan menurun pada tahun 2025 menjadi 12,07%. Penurunan pada tahun 2023 mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi serta peningkatan efektivitas intervensi program ketahanan pangan, termasuk penguatan akses dan distribusi pangan yang lebih merata. Meski demikian, angka tersebut menunjukkan bahwa masih ada tantangan dalam menjamin kecukupan pangan bagi seluruh penduduk, terutama di wilayah rentan, sehingga perlu terus didorong kebijakan yang mendukung produksi lokal, diversifikasi pangan, dan pemberdayaan masyarakat dan keterjangkauan pangan. Sedangkan capaian pada tahun 2025 sebesar 90,47%, tidak mencapai target yang sebesar 10,92%. Hal ini disebakan karena terdapat 3 daerah rentan pangan dan 13 daerah agak rentan pangan.

Grafik II.3
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2026

b. Konsumsi Listrik per Kapita

Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya konsumsi listrik per kapita, kebutuhan total energi di Kabupaten Trenggalek diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Pada tahun 2023, berdasarkan perencanaan jangka panjang, maka dibutuhkan listrik per kapita mencapai 367,17 kwh/kapita, sedangkan pada tahun 2024 mencapai 391,47 kwh/kapita, dan pada tahun 2025 mencapai 415,12 kwh/kapita. Peningkatan jumlah penduduk secara konsisten ini turut mendorong kenaikan konsumsi listrik secara keseluruhan, baik untuk kebutuhan rumah tangga, fasilitas publik, maupun aktivitas ekonomi yang terus berkembang. Tren ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup, meningkatnya tingkat elektrifikasi, serta peran aktif pemerintah daerah dan penyedia listrik dalam memperluas akses dan keandalan infrastruktur kelistrikan.

Hal ini menuntut perencanaan yang lebih proaktif dalam penyediaan dan pengelolaan energi, khususnya dalam memperkuat kapasitas jaringan distribusi listrik serta memastikan ketersediaan pasokan yang andal dan merata. Dalam konteks ini, pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan mikrohidro perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang, mengingat potensi alamiah Trenggalek yang mendukung pengembangan energi bersih dan berkelanjutan.

Selain itu, penerapan prinsip efisiensi energi menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan konsumsi dan kelestarian sumber daya. Pemerintah daerah dapat mendorong penggunaan peralatan listrik hemat energi, penerapan smart grid, serta kampanye edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan energi secara bijak. Dengan pendekatan ini, Trenggalek tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan listrik warganya yang terus bertambah, tetapi juga menjaga keberlanjutan pembangunan energi secara jangka panjang.

c. Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan

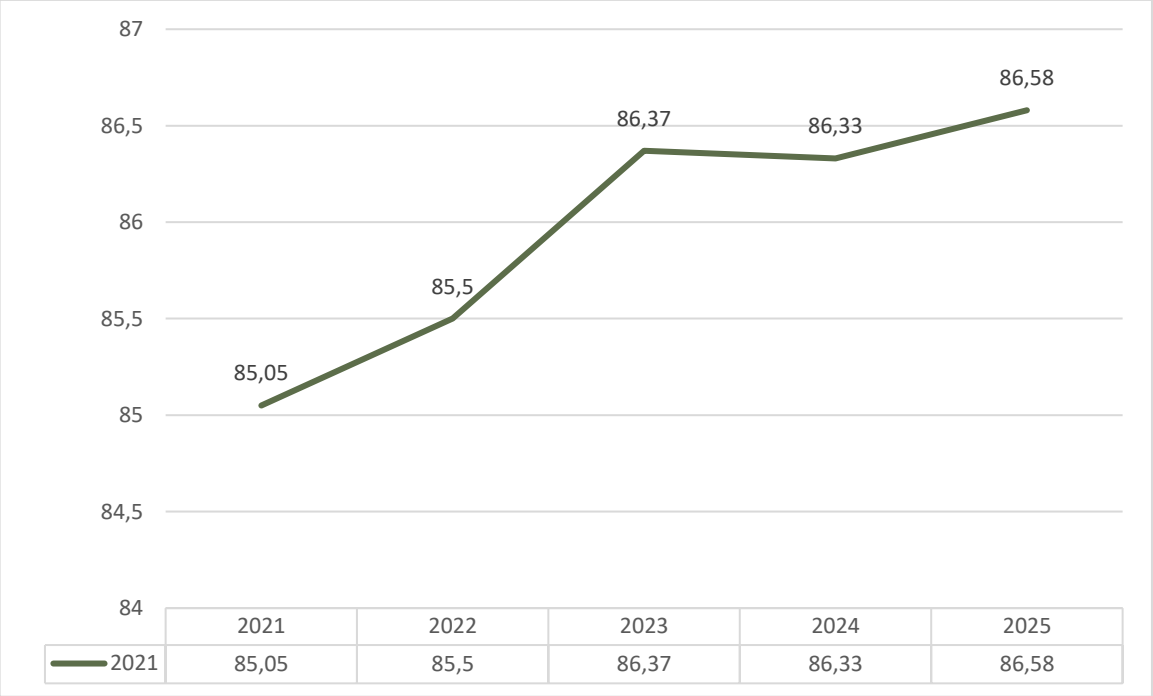
Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan merupakan jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air minum baik melalui jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan. Jaringan perpipaan perkotaan dilayani

oleh PDAM sedangkan pedesaan berasal dari sumber air, sumur dangkal, sumur bor, maupun berasal dari penampungan air hujan. Untuk mengetahui capaian akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum digunakan formula jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan dibandingkan dengan total rumah tangga.

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum di Kabupaten Trenggalek melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan mengalami perubahan selama periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, cakupan akses tercatat 85,05%, tahun 2022 sebesar 85,50%, tahun 2023 meningkat menjadi 86,37%, dan pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan menjadi 86,33%, sedangkan tahun 2025 kembali naik menjadi 86,58%.

Upaya peningkatan akses air minum sudah menunjukkan tren yang positif. Beberapa faktor pendukung pencapaian tersebut diantaranya adalah berjalannya program DAK air minum, Pamsimas, hibah air minum, dan peningkatan jumlah pelanggan PDAM. Namun demikian terdapat beberapa faktor tantangan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan akses air minum kedepan diantaranya adalah pertumbuhan jumlah rumah tangga yang tidak seimbang dengan pembangunan infrastruktur, keterbatasan sumber air baku di wilayah tertentu, serta kerusakan fasilitas SPAM yang belum tertangani secara optimal. Untuk menjamin pemerataan dan keberlanjutan akses air minum, diperlukan langkah-langkah strategis seperti rehabilitasi jaringan perpipaan, pengembangan sumber air baku alternatif, dan penguatan kelembagaan pengelola SPAM yang adaptif terhadap tantangan geografis dan perubahan iklim.

Grafik II.4
Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas PUPR Kab. Trenggalek, 2026

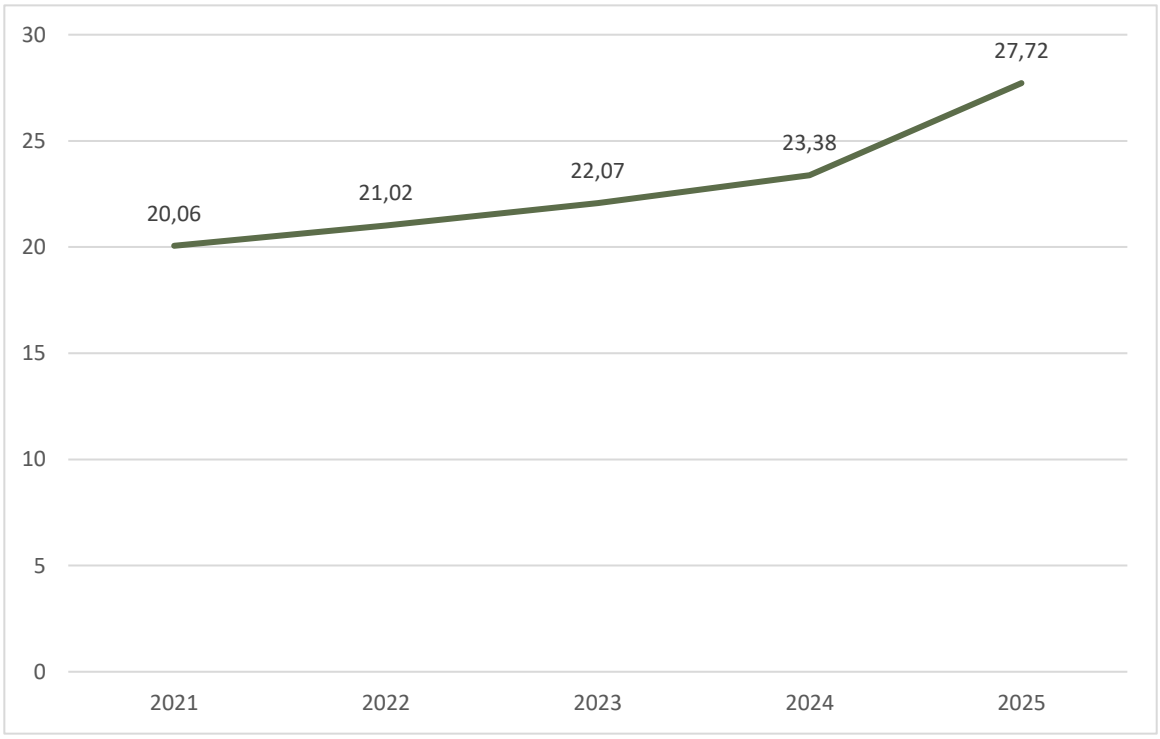
e. Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Ketersediaan air bersih yang memenuhi standar kesehatan sangat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menurunkan beban ekonomi rumah tangga, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya target 6.1 yaitu “menjamin akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau untuk semua”. Formula perhitungannya adalah jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap layanan sambungan

rumah oleh PDAM dibagi dengan jumlah rumah tangga perkotaan seluruhnya.

Pelayanan air siap minum berbasis perpipaan di wilayah perkotaan mencerminkan kemajuan infrastruktur dasar dan tata kelola penyediaan air minum yang andal, efisien, dan berkelanjutan. Sistem perpipaan dinilai sebagai metode distribusi air yang paling efektif dalam menjangkau populasi secara luas, terutama pada kawasan padat penduduk. Namun demikian, pengembangan sistem ini memerlukan dukungan pendanaan, perencanaan teknis yang matang, dan manajemen kelembagaan yang kuat. Hingga tahun 2025, akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan di Kabupaten Trenggalek sebesar 27,72%. Perhitungan ini berdasarkan jumlah penduduk perkotaan yang memiliki akses sambungan rumah oleh PDAM dibandingkan dengan total jumlah penduduk perkotaan di Kabupaten Trenggalek. Adapun perkembangan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik II.5
Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan



Sumber: PDAM Kab. Trenggalek, 2026

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggunakan capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai salah satu indikator pengukur keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian IKLH saat ini mencakup aspek udara, air dan lahan. IKLH dapat memberi sumbangan penting dalam rangka pengkajian risiko lingkungan dan pengelolaan risiko lingkungan karena IKLH mengandung hasil penilaian aktual pada semua besaran penting aspek lingkungan hidup.

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun 2021 hingga 2025, dengan nilai awal sebesar 67,83 pada tahun 2021 dan mencapai 76,91 pada tahun 2025. Analisis terhadap komponen penyusunnya menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Udara (IKU) secara konsisten mencatat skor tertinggi dibandingkan dua komponen lainnya, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Kualitas udara terus meningkat signifikan dari skor 80,18 pada tahun 2020 menjadi 94,84 pada tahun 2024, menjadikannya penyumbang terbesar terhadap capaian IKLH.

Sementara itu, IKA menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, dari 51,56 pada tahun 2021, sempat naik ke 67,30 pada 2022, lalu turun menjadi 49,48 pada 2023, sebelum kembali naik ke 55,50 pada 2024 dan 76,30 pada tahun 2025. Di sisi lain, IKL juga menunjukkan peningkatan yang relatif stabil, dari 68,32 pada tahun 2021 menjadi 74,73 pada 2025. Meskipun secara komposit mengalami kenaikan namun terdapat salah satu indikator pembentuk yang mengalami penurunan secara signifikan dari tahun sebelumnya yakni pada Indeks Kualitas Udara, dimana pada tahun 2025 nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 94,84 poin turun menjadi 78,65 poin. Kondisi tersebut disebabkan karena masih banyaknya pembakaran jerami dan sampah, debu dari aktifitas pertambangan serta bertambahnya volume ritase kendaraan. Selain itu adanya penambahan parameter PM 2,5 dalam perhitungannya. Nilai parameter PM 2,5 di dapatkan dari hasil pemantauan satelit yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI.

Disisi lain, indikator Indeks Kualitas Air mengalami kenaikan secara signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 nilai Indeks Kualitas Air sebesar 55,50 poin naik menjadi 76,30 poin. Kenaikan ini didorong oleh adanya beberapa kegiatan antara lain :

1. Pembangunan tangki septik komunal berdampak pada berkurangnya air limbah domestik yang dibuang langsung di badan air;

2. Gerakan bersih sungai yang dilaksanakan oleh komunitas, instansi pemerintah dan masyarakat mampu mengurangi limbah di badan sungai;
3. Gerakan menanam pohon melalui program donasi pohon bisa meningkatkan tutupan vegetasi.

Tabel II.18
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,83	74,27	69,83	75,27	76,91
	- Indeks Kualitas Air	51,56	67,30	49,48	55,5	76,30
	- Indeks Kualitas Udara	82,66	83,97	86,59	94,84	78,65
	- Indeks Kualitas Lahan	68,32	68,32	73,78	73,05	74,73

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2026

b. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Sampah merupakan salah satu isu lingkungan yang memerlukan perhatian serius karena dapat berdampak luas terhadap kesehatan, kebersihan lingkungan, serta estetika wilayah. Pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Pengolahan sampah dilakukan pada material dan *energy recovery* seperti pengolahan sampah organik, anorganik low value, dan residu menjadi: 1) produk seperti kompos, pakan, perkakas rumah, material konstruksi; dan 2) energi dan/atau bahan bakar lainnya seperti PLTSa, pirolisis, insenerasi, gasifikasi, dan Refuse Derived Fuel (RDF). Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan seperti: TPS 3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), PLTSa, RDF plant atau fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah, swasta, dan/atau lembaga non pemerintah berbadan hukum (koperasi, KSM, dan lainnya).

Di Kabupaten Trenggalek, timbulan sampah pada tahun 2024 tercatat sebesar 302,44 ton per hari berdasarkan jumlah penduduk sebanyak 756.109 jiwa, dengan asumsi rata-rata timbulan sampah per jiwa sebesar 0,0004 ton/hari. Sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga seperti dari kawasan komersial, industri, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, sebagian besar belum terolah secara

optimal. Pengolahan yang diterapkan meliputi pemilahan, daur ulang, pengomposan, pemanfaatan kembali atau teknologi lainnya melalui fasilitas seperti TPS3R, Pusat Daur Ulang (PDU), Bank Sampah, dan lainnya

Dari total timbulan sampah tersebut, hanya sekitar 37,46 ton per hari yang berhasil diolah melalui berbagai sarana pengolahan yang tersedia. Pengolahan ini berasal dari Komposting Skala kecil atau RT/RW di 40 desa peserta Lomba Adipura Desa (7,60 ton/hari), Bank Sampah (1,85 ton/hari), Pengepul / Lapak sampah (21,35 ton/hari), TPS3R (3,96 ton/hari) dan pemanfaatan ulang sampah/reuse (2,95 ton/hari). Bila dihitung berdasarkan total timbulan sampah yang dihasilkan maka persentase timbulan sampah yang berhasil diolah di fasilitas pengolahan hanya mencapai 12,39%. Angka ini menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan telah diimplementasikan dan berfungsi secara efektif di Kabupaten Trenggalek.

Jumlah sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sebanyak 10.730,5 ton dari total timbulan sampah yang sebanyak 110,056.26 ton, sehingga persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah pada tahun 2025 sebesar 18,82%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah yaitu dengan kegiatan komposting di Desa menggunakan lubang cerdas organik.

c. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Layanan pengumpulan sampah merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pengelolaan sampah yang efektif. Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah didefinisikan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu) baik dengan metode pengumpulan tercampur maupun terpilah sesuai jenis sampah, dengan syarat: 1) dari pintu ke pintu (door to door); atau 2) memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m tanpa membuang sampah sembarangan. Layanan pengolahan sampah di Kabupaten Trenggalek dilaksanakan melalui dua skema utama, yaitu pengumpulan langsung dari pintu ke pintu dengan frekuensi minimal dua kali seminggu dan pengumpulan melalui tempat pengumpulan komunal yang berjarak tidak lebih dari 200 meter dari rumah tangga. Pentingnya layanan ini terletak pada upaya mencegah praktik pembuangan sampah sembarangan serta mendukung pemilahan sampah sejak dari sumber, dengan pemisahan ke dalam fraksi basah, daur ulang, dan residu. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah sampah yang masuk ke TPA mencapai sekitar 102 ton per hari.

Dengan perhitungan asumsi satu kepala keluarga terdiri dari empat jiwa, maka diperoleh proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah sebesar 34,84% pada tahun 2023, 35,03% pada tahun 2024, dan sebesar 35,32% pada tahun 2025. Persentase ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar dalam memperluas cakupan layanan pengumpulan sampah yang terstruktur, terutama untuk menjangkau lebih banyak rumah tangga di wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal.

d. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Lingkungan hidup yang berkualitas sangat erat kaitannya dengan tersedianya akses sanitasi yang aman bagi masyarakat. Sanitasi yang memenuhi standar aman tidak hanya berkontribusi pada kesehatan individu dan keluarga, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kebersihan lingkungan serta mencegah penyebaran penyakit menular. Akses sanitasi yang memadai merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga upaya peningkatan kualitas sanitasi rumah tangga menjadi prioritas dalam pembangunan kesehatan dan lingkungan hidup di daerah.

Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Formula perhitungan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman adalah jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T ditambah jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya.

Di Kabupaten Trenggalek, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman sejak tahun 2023-2025 cenderung tetap sebesar 0,19%. Peningkatan yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses sanitasi masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi infrastruktur yang belum merata, perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung praktik sanitasi sehat, maupun keterbatasan layanan dasar yang tersedia. Kondisi ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan intervensi yang lebih efektif dan terintegrasi, guna mendorong peningkatan akses sanitasi yang aman dan berkelanjutan demi kesehatan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Trenggalek.

Tabel II.19
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Tahun 2023-2025

Indikator	Tahun		
	2023	2024	2025
Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman (berdasarkan cakupan layanan IPALD komunal)	540	540	552
Jumlah Rumah Tangga	280.350	283.435	283.435
Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	0,19	0,19	0,19

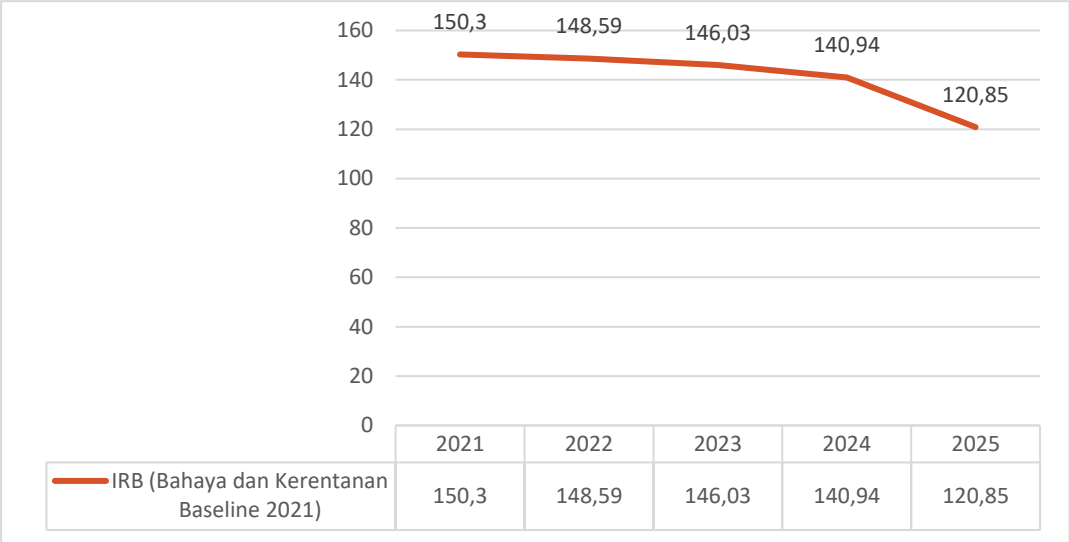
Sumber: Dinas PUPR Kab. Trenggalek, 2026

2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2025, terlihat tren penurunan risiko bencana secara konsisten. Pada tahun 2021, BNPB melakukan Kajian Risiko Bencana (KRB) yang menghasilkan Hazard and Vulnerability (H&V) yang baru sebagai dasar perhitungan dan penetapan target IRB mulai tahun 2025. Berdasarkan H & V 2021, IRB Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 sebesar 150,3; tahun 2022 sebesar 148,59; turun menjadi 146,03 pada tahun 2023, dan menjadi 140,94 pada tahun 2024. Sedangkan IRB tahun 2025 menurun menjadi sebesar 120,85. Peningkatan tersebut merupakan hasil dari upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah antara lain sebagai berikut :

1. Peningkatan indikator ketahanan daerah, persentase desa tangguh bencana, respon penanganan bencana;
2. Pembentukan desa tangguh bencana sebanyak 5 desa di 2025, untuk totalnya 62 desa;
3. Adanya inovasi yang diinisiasi oleh masyarakat berupa ews (early warning system) untuk bencana banjir dan longsor;
4. Adanya nomor aduan pusdalops pb (0822 4474 9096) dan chatbot sibentar yang dapat diakses 24 jam secara gratis.

Grafik II.6
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: BNPB, 2026

Kabupaten Trenggalek merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi, terutama bencana tanah longsor dan banjir. Tingkat kerawanan ini dipengaruhi oleh berbagai aspek fisik dan alam seperti kondisi geologi, hidrologi, klimatologi, topografi yang bergelombang hingga pegunungan, serta tutupan lahan yang semakin berkurang. Selain faktor alam, aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti alih fungsi lahan, pembukaan hutan tanpa konservasi, serta pengelolaan tata ruang yang kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, turut memperbesar risiko bencana.

Bencana tanah longsor umumnya terjadi pada musim penghujan dan seringkali menimbulkan kerugian material hingga korban jiwa. Beberapa kecamatan yang tergolong dalam kategori rawan tinggi terhadap longsor antara lain Kecamatan Panggul, Munjungan, Watulimo, Kampak, Gandusari, dan Bendungan. Daerah-daerah ini memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap pergerakan tanah akibat kondisi geologis dan curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi seperti rehabilitasi lingkungan, penguatan vegetasi di lahan kritis, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya tanah longsor.

Selain tanah longsor, banjir juga menjadi bencana yang kerap melanda wilayah Trenggalek, terutama saat musim hujan. Dalam beberapa tahun terakhir, intensitas banjir meningkat dan menimbulkan kerugian cukup besar, termasuk kerusakan infrastruktur dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Luasan kawasan rawan banjir di Trenggalek dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kawasan rawan tinggi seluas ±4.217 ha yang

tersebar di sembilan kecamatan, kawasan rawan menengah seluas ±43.591 ha di hampir seluruh kecamatan, dan kawasan rawan rendah seluas ±77.455 ha yang tersebar di semua wilayah. Identifikasi ini penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan mitigasi banjir yang berbasis pada pengelolaan ruang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Selain itu, posisi geografis Kabupaten Trenggalek yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia menjadikannya wilayah yang berpotensi terdampak tsunami. Potensi ini muncul akibat aktivitas gempa tektonik di zona subduksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kawasan yang berisiko terdampak tsunami antara lain Kecamatan Watulimo, Munjungan, dan Panggul, dengan total luasan lebih dari 5.500 hektar. Dalam menghadapi potensi ini, dibutuhkan perencanaan mitigasi bencana seperti penyediaan jalur evakuasi, sistem peringatan dini, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat di wilayah pesisir.

Tabel II.20
Kejadian Bencana Alam Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

No.	Kecamatan	Tanah Longsor	Banjir	Angin Puting Beliung	Tanah Bergerak	Gelombang Pasang
1.	Panggul	16	4	2	2	1
2.	Munjungan	12	10	-	1	-
3.	Watulimo	11	5	4	-	1
4.	Kampak	12	-	2	-	-
5.	Dongko	9	-	2	2	-
6.	Pule	9	-	2	1	-
7.	Karangan	-	3	1	-	-
8.	Suruh	4	-	2	5	-
9.	Gandusari	2	4	4	-	-
10.	Durenan	-	2	2	-	-
11.	Pogalan	1	5	2	-	-
12.	Trenggalek	5	11	7	1	-
13.	Tugu	7	1	4	1	-
14.	Bendungan	8	-	2	-	-

No.	Kecamatan	Tanah Longsor	Banjir	Angin Puting Beliung	Tanah Bergerak	Gelombang Pasang
	Total	96	45	36	13	2

Sumber: BPBD Kab. Trenggalek, 2025

Berdasarkan data kejadian bencana alam Kabupaten Trenggalek tahun 2025, tanah longsor terjadi sebanyak 96 kejadian, banjir sebanyak 45 kejadian, angin puting beliung sebanyak 36 kejadian, tanah bergerak sebanyak 13 kejadian dan gelombang pasang sebanyak 2 kejadian. Oleh karena itu, upaya mitigasi bencana di Trenggalek diperlukan untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.

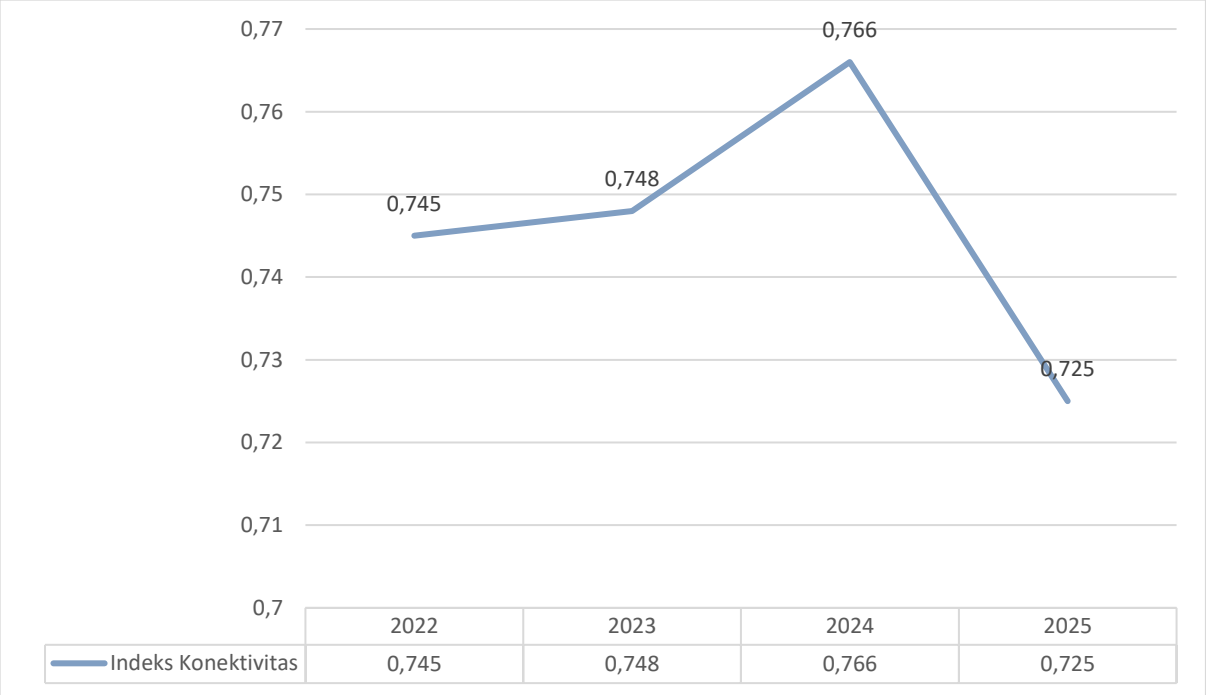
2.1.1.7 Indeks Konektivitas

Konektivitas wilayah adalah keterhubungan antara berbagai wilayah atau daerah yang memungkinkan adanya pertukaran informasi, barang, jasa, atau orang. Konektivitas antar wilayah memberikan dampak yang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Wilayah yang terhubung dengan baik akan mempermudah distribusi barang dari produsen ke konsumen dan lebih menarik bagi investor karena kemudahan akses ke pasar, bahan baku, dan tenaga kerja. Konektivitas wilayah juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena akses masyarakat ke fasilitas umum akan lebih mudah, yang berdampak juga pada pemerataan pembangunan.

Untuk mengukur keterhubungan antar wilayah ini digunakan Indeks Konektivitas. Indeks Konektivitas adalah angka yang mengukur tingkat keterhubungan suatu wilayah melalui jaringan jalan, yang mencerminkan potensi interaksi antarwilayah dalam hal pergerakan manusia, barang, dan jasa. Semakin tinggi indeksnya, semakin baik konektivitas wilayah tersebut, yang ditandai dengan banyaknya jaringan jalan yang menghubungkan berbagai titik dalam wilayah tersebut. Indeks Konektivitas Kabupaten Trenggalek merupakan indikator baru yang diukur dengan komposit yang terdiri dari tiga variabel yaitu (1) jaringan jalan penghubung pusat kecamatan, (2) kemantapan jalan, dan (3) trayek angkutan. Dalam hal ini indeks konektivitas tidak hanya mengukur konektivitas jaringan jalan antar pusat kecamatan, tetapi juga melihat kualitas jalan yang ditunjukkan dengan tingkat kemantapan jalan. Lebih lanjut, indeks konektivitas juga mengukur ketersediaan sarana penghubung yang tergambarkan dalam jumlah trayek angkutan yang aktif beroperasi. Ketiga variabel tersebut kemudian diberikan bobot kepada masing-masing variabel berdasarkan urgensi dan target

layanan yang ditetapkan. Rentang nilai indeks konektivitas adalah 0-1 yang artinya semakin mendekati 1 maka konektivitas antar kawasan di Kabupaten Trenggalek akan semakin baik. Berdasarkan ketiga variabel tersebut, maka indeks konektivitas di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2022 sebesar 0,745 meningkat menjadi 0,748 di tahun 2023, dan menjadi 0,766 pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 menjadi 0,725.

Grafik II.7
Indeks Konektivitas Kabupaten Trenggalek
Tahun 2022-2025



Sumber: Dinas PUPR Kab. Trenggalek, 2026

Dalam upaya meningkatkan indeks konektivitas di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melakukan upaya untuk mengintervensi Indeks Konektivitas antara lain : 1) penyusunan kajian layanan angkutan umum; 2) penyusunan kejian pengembangan mobility hub pasar pon; 3) pelaksanaan program penyelenggaraan jalan kabupaten; 4) peningkatan akses layanan angkutan umum Pasar Pon - stasiun TA - Bandara Dhoho; 5) meningkatkan akses layanan angkutan pelajar.

2.1.1.8 Demografi

a. Kependudukan

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana

pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Tabel II.21
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Panggul	79.060	80.957	81.493	81.264	81.244
2.	Munjungan	53.381	54.159	54.498	54.441	54.572
3.	Watulimo	70.567	57.450	72.855	72.387	72.449
4.	Kampak	37.243	67.663	38.453	38.325	38.261
5.	Dongko	65.964	49.270	68.272	67.927	68.012
6.	Pule	56.168	50.451	57.843	57.585	57.553
7.	Karangan	50.251	38.275	50.853	50.612	50.630
8.	Suruh	26.105	71.927	26.795	26.795	26.782
9.	Gandusari	52.765	28.250	54.167	54.086	54.063
10.	Durenan	51.411	53.976	51.917	52.039	52.122
11.	Pogalan	52.525	66.621	53.737	53.608	53.692
12.	Trenggalek	64.297	53.614	66.887	66.862	66.931
13.	Tugu	47.903	51.722	49.749	49.433	49.423
14.	Bendungan	27.248	26.744	28.591	28.523	28.523
Kabupaten Trenggalek		**734.888**	**751.079**	**756.109**	**753.810**	**754.257**

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2022-2026 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2022-2026)

Pada tahun 2025 Kabupaten Trenggalek memiliki jumlah penduduk sebanyak 754.257 jiwa. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berpenduduk sebanyak 753.810 jiwa. Kecamatan di Kabupaten Trenggalek dengan jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Panggul sebesar 81.244 jiwa.

Tabel II.22
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Luas (Km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa) 2025	Kepadatan (jiwa/Km2)
1.	Panggul	131,99	81.244	615,53
2.	Munjungan	147,86	54.572	369,07
3.	Watulimo	155,35	72.449	466,37
4.	Kampak	77,77	38.261	491,96

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk (jiwa) 2025	Kepadatan (jiwa/Km2)
5.	Dongko	143,48	68.012	474,03
6.	Pule	117,48	57.553	489,89
7.	Karangan	47,13	50.630	1.074,36
8.	Suruh	53,19	26.782	503,54
9.	Gandusari	53,86	54.063	1.003,73
10.	Durenan	48,79	52.122	1.068,34
11.	Pogalan	47,98	53.692	1.119,04
12.	Trenggalek	58,78	66.931	1.138,74
13.	Tugu	70,69	49.423	699,17
14.	Bendungan	92,26	28.523	309,16
2025		**1.246,59**	**754.257**	**605,05**
2024		**1.261,40**	**753.810**	**597.60**
2023		**1.261,40**	**756.109**	**599,42**
2022		**1.261,40**	**751.079**	**586,39**
2021		**1.261,40**	**734.888**	**582,60**

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2022-2026 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2022-2026)

Kabupaten Trenggalek selama lima tahun tidak mengalami pemutakhiran data luasan. Berdasarkan data tersebut, Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi tahun 2025 ada pada Kecamatan Trenggalek yakni sebesar 1.138,74 jiwa per km^2, sedangkan kepadatan terendah adalah Kecamatan Bendungan sebesar 309,16 jiwa per km^2.

Tabel II.23
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Laju Per-tumbuhan Penduduk 2021 (%)	Laju Per-tumbuhan Penduduk 2022 (%)	Laju Per-tumbuhan Penduduk 2023 (%)	Laju Per-tumbuhan Penduduk 2024 (%)	Laju Per-tumbuhan Penduduk 2025 (%)
1.	Panggul	0,91	1,12	0,66	-0,28	-0,02
2.	Munjungan	0,89	1,10	0,63	-0,1	0,24
3.	Watulimo	0,81	1,00	1,29	-0,64	0,09
4.	Kampak	0,11	0,21	0,47	-0,33	-0,17
5.	Dongko	0,70	0,88	0,90	-0,51	0,13
6.	Pule	0,62	0,79	0,68	-0,45	-0,06
7.	Karangan	0,64	0,81	0,80	-0,47	0,04
8.	Suruh	0,30	0,41	0,19	0	-0,05

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk 2021 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2022 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2023 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2024 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk 2025 (%)
9.	Gandusari	0,39	0,52	0,35	-0,15	-0,04
10.	Durenan	0,18	0,28	0,38	0,23	0,16
11.	Pogalan	0,56	0,71	0,23	-0,24	0,16
12.	Trenggalek	0,01	0,06	0,40	-0,04	0,10
13.	Tugu	0,15	0,25	0,97	-0,64	-0,02
14.	Bendungan	0,41	0,55	1,21	-0,51	0,27
Kabupaten Trenggalek		**0,51**	**0,67**	**0,67**	**-0,30**	**0,06**

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2022-2026 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2022-2026)

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas publik dan sebagainya. Pada pertumbuhan penduduk di atas, menggunakan perhitungan dari data Kabupaten Trenggalek dalam Angka. Pada tahun 2025, terjadi kenaikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Trenggalek dimana capaian pada tahun 2024 sebesar -0,30 menjadi 0,06 pada tahun 2025. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam dinamika demografi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor seperti penurunan angka migrasi keluar, kenaikan tingkat kelahiran, atau penurunan angka kematian.

b. Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator *sex ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Tabel II.24
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio
1	2025	378.848	375.409	754.257	100,92
2	2024	373.120	371.400	744.520	100,46

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio
3	2023	371.703	369.474	741.177	100,60
4	2022	371.527	368.142	739.669	100,92
5	2021	369.196	365.692	734.888	100,96

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2022-2026 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2022-2026)

Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 lebih banyak daripada perempuan, dengan *sex ratio* sebesar 100,92. Artinya, terdapat sekitar 100-101 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

c. Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Struktur umur penduduk merujuk pada distribusi usia penduduk dalam suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Adapun salah satu indikator dalam melihat struktur umur adalah melihat rasio ketergantungan *(dependency ratio)*. Angka ketergantungan memperlihatkan seberapa besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh mereka yang bekerja untuk mendukung mereka yang tidak bekerja. Semakin tinggi angka ketergantungan, semakin besar beban ekonomi yang harus ditanggung oleh setiap pekerja. Ini juga dapat memberikan gambaran tentang kebutuhan akan program-program sosial dan kesejahteraan untuk membantu orang-orang yang tidak bekerja.

Tabel II.25
Rasio Ketergantungan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kelompok Umur (Jiwa)	**734,89**	**739,67**	**741,18**	**744,52**	**754,26**
0–14	140,27	139,4	142,27	142,38	127,14
15–64	511,68	513,29	511,08	511,09	522,81
65+	82,94	86,98	87,83	91,06	104,31
***Dependency Ratio* (%)**	**43,62**	**44,1**	**45,02**	**45,67**	**44,27**

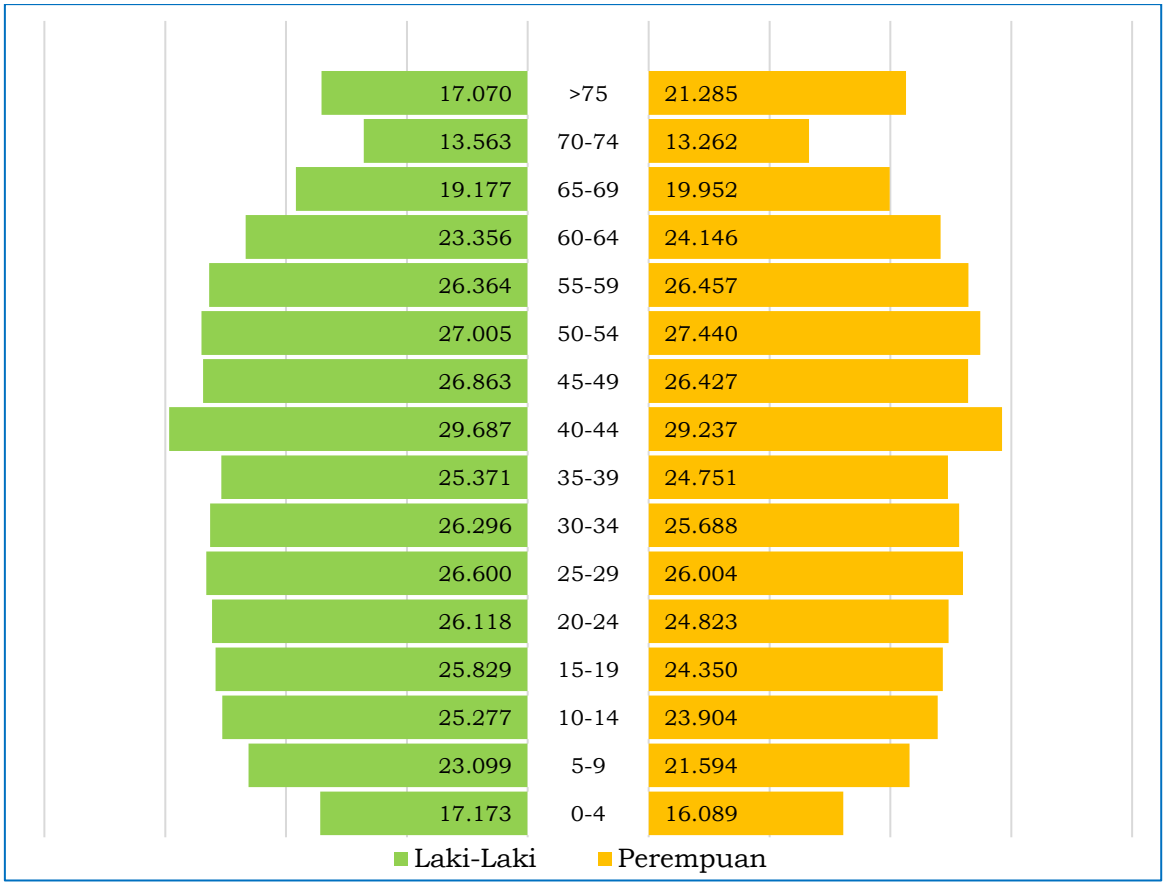
Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2022-2026 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2022-2026)

Tingkat angka ketergantungan yang tinggi dapat menjadi perhatian dalam perencanaan ekonomi dan kebijakan sosial karena dapat menimbulkan tekanan pada sistem keuangan dan sosial. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis angka ketergantungan menjadi hal yang penting dalam mengembangkan strategi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kabupaten Trenggalek telah mencapai angka ketergantungan di bawah 50 pada tahun 2025, yang mengindikasikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir daerah ini memasuki kondisi bonus

demografi, yaitu peluang untuk mempercepat pembangunan jika dimanfaatkan secara optimal. Pada tahun 2025, angka ketergantungan Kabupaten Trenggalek menurun menjadi 44,27.

Dari piramida penduduk Kabupaten Trenggalek didapatkan kondisi secara umum bahwa masyarakat di Trenggalek memiliki cukup banyak penduduk usia muda namun sebagian besar berada pada usia produktif.

Grafik II.8
Piramida Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2025



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2022-2026 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2022-2026), diolah

d. Proyeksi Demografi Kabupaten Trenggalek

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan tentang bagaimana jumlah penduduk suatu wilayah akan berubah dari waktu ke waktu, berdasarkan tren demografis yang ada pada saat ini. Proyeksi penduduk juga merupakan upaya untuk memprediksi bagaimana struktur umur dan ukuran populasi suatu wilayah sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan kebijakan khususnya dalam hal perencanaan kebijakan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan. Proyeksi penduduk di Kabupaten Trenggalek mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun

terakhir pembangunan jangka menengah periode 2025-2030 mencapai jumlah penduduk sebanyak 759,46 ribu jiwa. Kenaikan ini tentu saja menyebabkan kenaikan kepadatan penduduk hingga mencapai 600-601 jiwa/km^2. Dari sisi jenis kelamin, terlihat adanya penurunan rasio jenis kelamin hingga mencapai di bawah 100 yang mengindikasikan bahwa kenaikan jumlah penduduk laki-laki lebih lambat dibandingkan kenaikan jumlah penduduk perempuan hingga jumlah penduduk pada tahun 2029 didominasi oleh penduduk perempuan.

Pada indikator rasio ketergantungan mengalami kenaikan dimana pada tahun 2030 mencapai 49,58. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Secara umum, seluruh kelompok umur mengalami kenaikan dimana penduduk usia muda sebanyak 139,81 ribu jiwa, penduduk usia produktif sebanyak 507,73 ribu jiwa dan penduduk usia tua sebanyak 111,92 ribu jiwa pada tahun 2030.

Tabel II.26
Proyeksi Penduduk Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	747,61	750,48	753,09	755,46	757,46	759,46
Laki-laki	374,39	375,53	376,52	377,39	378,18	378,73
Perempuan	373,23	374,95	376,57	378,07	379,46	380,74
Rasio Jenis Kelamin	100,31	100,15	99,987	99,82	99,663	99,47
Kepadatan Penduduk	592,68	594,96	597,03	598,91	600,49	602,08
Rasio Ketergantungan	46,33	46,98	47,61	48,24	48,89	49,58
Kelompok Umur (Ribu Jiwa)						
0–14	142,33	142,08	141,66	141,09	140,45	139,81
15–64	510,91	510,61	510,18	509,63	508,83	507,73
65+	94,39	97,79	101,24	104,75	108,31	111,92

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kab. Trenggalek, 2024 (diolah)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi mencerminkan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat berdasarkan pendapatan, akses terhadap lapangan kerja, serta daya beli yang stabil. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, kemiskinan, dan distribusi pendapatan. Semakin tinggi

kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat, semakin besar peluang mereka untuk memperoleh kehidupan yang layak dan berkelanjutan.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek dalam lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Trenggalek menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 3,65 persen, kemudian meningkat menjadi 4,52 persen pada 2022, dan 4,92 persen pada 2023. Pertumbuhan ini didorong oleh beberapa sektor utama seperti Industri Pengolahan, Transportasi dan Pergudangan, serta Perdagangan Besar dan Eceran. Sektor Transportasi dan Pergudangan, melonjak hingga 16,93 persen pada 2022. Pertumbuhan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan inisiatif strategis Pemerintah Kabupaten Trenggalek, seperti penyelenggaraan *Trenggalek Innovation Festival* di Pasar Pon yang mendorong semangat kewirausahaan lokal, pelibatan aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi, pemanfaatan platform digital untuk pemasaran UMKM, hingga upaya memperkuat sektor pertanian melalui integrasi hulu-hilir produksi pertanian dan bantuan data serta teknologi. Langkah-langkah tersebut mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi sektor riil sekaligus memperluas basis pertumbuhan baru berbasis inovasi lokal.

Memasuki tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Trenggalek sedikit melambat menjadi 4,71 persen. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh faktor eksternal, yakni kondisi cuaca yang tidak menentu sepanjang tahun yang menyebabkan banyak petani gagal panen atau hanya mampu melakukan satu kali panen dalam setahun. Dampaknya sangat terasa pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang hanya tumbuh sebesar 0,31 persen, jauh melambat dibandingkan pertumbuhan 2,72 persen pada 2023. Meski begitu, terdapat pergeseran menarik di antara sektor-sektor lain yakni sektor Transportasi dan Pergudangan yang tetap tumbuh tinggi di 12,36 persen (naik dibandingkan 10,04 persen di 2023), meskipun tingkat pertumbuhannya cenderung stabil. Sebaliknya, sektor Pengadaan Listrik dan Gas mengalami lonjakan pertumbuhan signifikan dari 4,75 persen pada 2023 menjadi 9,15 persen di 2024, seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi

akibat pertumbuhan populasi dan ekspansi aktivitas ekonomi, terutama di sektor rumah tangga dan industri kecil.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 5,31%. Capaian ini tidak hanya melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi juga mendekati capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 5,33% serta berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional yang sebesar 5,11%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 berada dalam tren yang positif dan semakin kompetitif dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Melihat keseluruhan dinamika ini, prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek ke depan masih cukup menjanjikan, dengan basis pemulihan yang mulai menguat dan semakin terdorong oleh digitalisasi, penguatan sektor industri kecil, dan peningkatan akses energi. Tantangan terbesar ke depan adalah ketahanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim serta kebutuhan untuk mendiversifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada sektor-sektor berbasis cuaca. Peluang besar terbuka melalui pengembangan energi terbarukan, perluasan pasar UMKM berbasis platform digital, serta penguatan konektivitas transportasi dan logistik. Jika pemerintah daerah mampu mengantisipasi tantangan ini dengan inovasi kebijakan yang adaptif dan investasi strategis, pertumbuhan ekonomi Trenggalek ke depan dapat lebih inklusif, berkelanjutan, dan tahan terhadap guncangan eksternal.

Tabel II.27
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

No	Kategori Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,72	-1,46	2,72	0,31	4,00
2	Pertambangan dan Penggalian	1,36	7,88	2,19	2,39	2,79
3	Industri Pengolahan	9,12	6,86	6,93	6,68	7,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,84	7,07	4,75	9,15	6,51
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,74	5,71	2,74	1,91	-0,69
6	Konstruksi	0,24	8,02	3,91	7,03	5,54
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,46	6,85	5,73	4	4,54
8	Transportasi dan Pergudangan	9,48	16,93	10,04	12,36	10,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,36	8,98	8,10	5,76	7,61

No	Kategori Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
10	Informasi dan Komunikasi	5,66	5,91	6,58	7,38	5,85
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,93	1,32	2,29	3,81	2,08
12	Real Estate	2,80	4,95	2,20	3,97	3,11
13	Jasa Perusahaan	2,28	5,48	7,81	7,52	8,76
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,16	0,56	0,88	8,92	1,01
15	Jasa Pendidikan	1,61	1,19	6,68	5,4	6,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,71	2,43	4,08	6,13	5,96
17	Jasa lainnya	3,66	11,13	9,87	8,38	8,76
Produk Domestik Regional Bruto		**3,65**	**4,52**	**4,92**	**4,71**	**5,31**

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2026)

Struktur distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Trenggalek dari tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan pergeseran kontribusi antar lapangan usaha. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan kontribusi paling signifikan, dari 27,00% pada 2021 menjadi 24,83% pada 2025. Di sisi lain, sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan kontribusi dari 17,98% pada 2021 menjadi 19,96% pada 2025, menunjukkan penguatan sektor manufaktur. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran juga mempertahankan kontribusinya dari 15,53% pada 2021 menjadi 15,73% pada 2025. Sementara itu, sektor Transportasi dan Pergudangan serta Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan kontribusi yang cukup berarti, mencerminkan pemulihan mobilitas dan diversifikasi kegiatan ekonomi.

Perubahan struktur distribusi PDRB ini mengindikasikan arah diversifikasi ekonomi Trenggalek yang semakin kuat, dengan mengurangi ketergantungan berlebihan pada sektor primer seperti pertanian. Peralihan menuju penguatan sektor industri, perdagangan, dan jasa berpotensi memperluas basis Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi sektor sekunder dan tersier, serta meningkatkan peluang penyerapan tenaga kerja, khususnya di bidang industri pengolahan, perdagangan, transportasi, dan jasa lainnya. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama untuk memastikan sektor-sektor baru ini cukup inklusif dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan mampu menjaga ketahanan ekonomi daerah terhadap gejolak global.

Tabel II.28
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,00	25,89	25,98	24,86	24,83
B	Pertambangan dan Penggalian	5,82	6,00	5,82	5,56	5,41
C	Industri Pengolahan	17,98	18,31	18,51	19,42	19,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05
F	Konstruksi	6,89	7,20	7,05	7,07	6,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,53	16,05	16,14	15,95	15,73
H	Transportasi dan Pergudangan	1,60	1,83	2,00	2,12	2,16
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,99	2,06	2,11	2,13	2,17
J	Informasi dan Komunikasi	5,85	5,74	5,67	5,73	5,64
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,59	2,54	2,44	2,4	2,30
L	Real Estate	2,12	2,08	1,97	1,93	1,90
M,N	Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,26	0,27	0,28
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,36	4,15	3,98	4,35	4,22
P	Jasa Pendidikan	4,55	4,31	4,34	4,37	4,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,99	0,97	0,96	0,96	0,97
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,39	2,54	2,67	2,79	2,96
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2026)

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Trenggalek dalam nilai miliar rupiah tahun 2021–2025, terjadi pertumbuhan nilai ekonomi secara konsisten dari Rp. 19.198,25 miliar pada 2021 menjadi Rp. 26.249,00 miliar pada 2025. Pertumbuhan ini mencerminkan pergeseran ekonomi Trenggalek ke arah sektor sekunder dan tersier yang lebih produktif dan berkontribusi besar terhadap total PDRB daerah.

Tabel II.29
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Trenggalek (miliar rupiah), 2021–2025

Lapangan Usaha / Industry	2021	2022	2023	2024	2025
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.183,22	5.406,99	5.907,42	6.056,86	6.516,49
B. Pertambangan dan Penggalian	1.116,80	1.253,51	1.323,15	1.355,05	1.421,38
C. Industri Pengolahan	3.452,70	3.822,71	4.208,80	4.731,53	5.240,22
D. Pengadaan Listrik dan Gas	7,18	7,83	8,31	9,08	9,76
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11,05	12,22	12,64	12,97	13,27
F. Konstruksi	1.321,96	1.503,78	1.602,89	1.723,66	1.834,66
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.980,65	3.352,31	3.670,84	3.886,54	4.129,81
H. Transportasi dan Pergudangan	307,4	381,43	454,26	515,73	567,83
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	381,18	429,21	480,7	520,13	569,71
J. Informasi dan Komunikasi	1.122,70	1.197,81	1.289,19	1.394,89	1.479,49
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	497,7	529,52	555,5	585,54	604,36
L. Real Estat	406,13	433,45	448,79	470,7	498,91
M, N. Jasa Perusahaan	49,44	53,86	59,55	65,11	73,22
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	836,77	865,97	905,16	1.061,03	1.107,50
P. Jasa Pendidikan	873,03	899,12	986,79	1.063,86	1.150,85
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	191,02	203,17	218,16	232,89	255,26
R, S, T, U. Jasa Lainnya	459,31	529,43	607,9	679,15	776,28
Produk Domestik Regional Bruto	**19.198,25**	**20.882,31**	**22.740,05**	**24.364,74**	**26.249,00**

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2026)

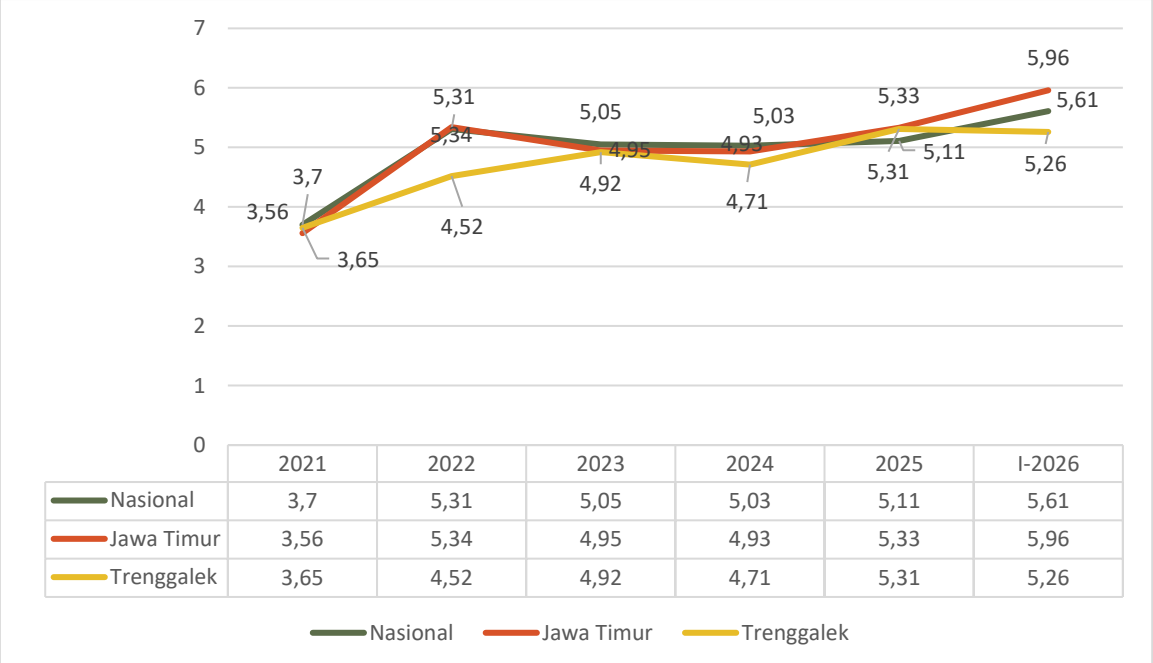
Pertumbuhan ekonomi Indonesia, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Trenggalek menunjukkan pola yang hampir seragam dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 sampai 2022 melalui berbagai kebijakan yang telah dilakukan seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional, ekonomi kembali pulih dengan lonjakan pertumbuhan Nasional mencapai 5,31 pada Tahun 2022, Provinsi Jawa Timur lebih tinggi 5,34 dan Kabupaten Trenggalek 4,52. Tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 pertumbuhan ekonomi relatif

stabil, dengan tren sedikit melambat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek cenderung sedikit dibawah Nasional maupun Provinsi pada tahun 2022-2024.

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 5,31%. Capaian ini tidak hanya melampaui target yang telah ditetapkan, tetapi juga mendekati capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 5,33% serta berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional yang sebesar 5,11%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja perekonomian Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 berada dalam tren yang positif dan semakin kompetitif dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Pada Triwulan I Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek meningkat dibandingkan Triwulan I Tahun 2025 menjadi 5,26%. Sedangkan Provinsi Jawa Timur meningkat sebesar 5,96%, dan Nasional sebesar 5,61%.

Grafik II.9
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Trenggalek dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2026



	2021	2022	2023	2024	2025	I-2026
Nasional	3,7	5,31	5,05	5,03	5,11	5,61
Jawa Timur	3,56	5,34	4,95	4,93	5,33	5,96
Trenggalek	3,65	4,52	4,92	4,71	5,31	5,26

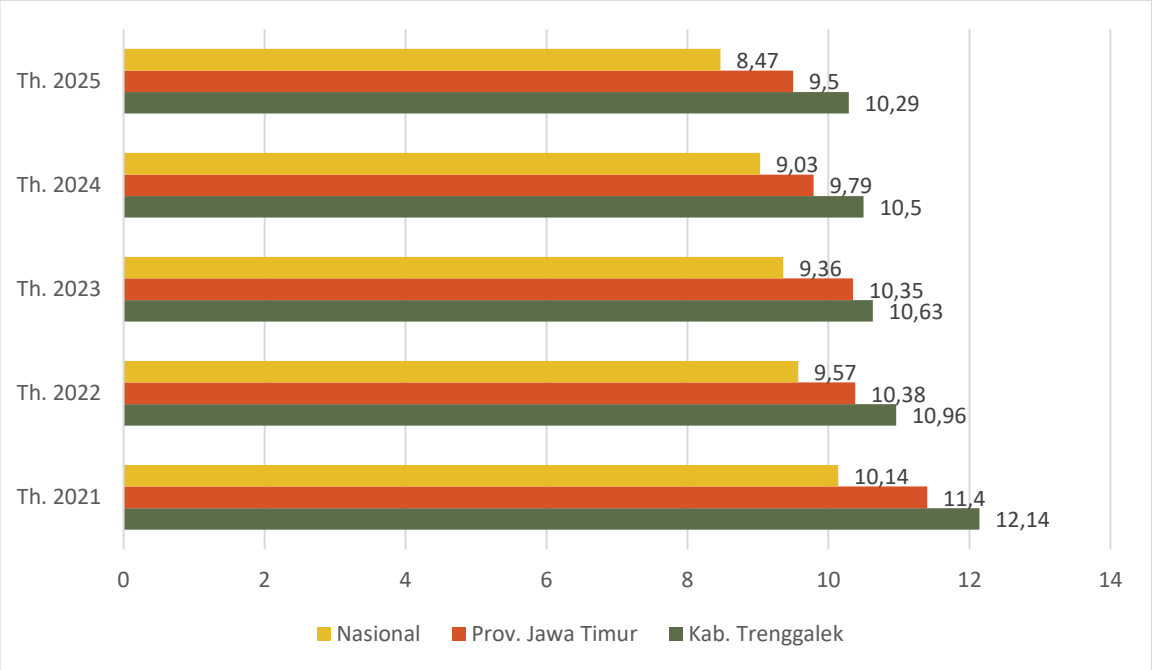
Sumber: BPS Republik Indonesia, 2026
BPS Provinsi Jawa Timur, 2026
BPS Kab. Trenggalek, 2026

b. Tingkat Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan

pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, poin utama dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga perlu menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran konsumsi, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Grafik II.10
Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Trenggalek terhadap Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Republik Indonesia, 2026
BPS Provinsi Jawa Timur, 2026
BPS Kab. Trenggalek, 2026

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Trenggalek sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Pada tahun 2025 tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek sebesar 10,29%. Sementara untuk capaian di tingkat provinsi sebesar 9,5% dan 8,47% pada tingkat nasional.

Tabel II.30
Indikator Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Kemiskinan	**12,14**	**10,96**	**10,63**	**10,50**	**10,29**

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
a. Garis Kemiskinan (Rupiah)	358.831	381.448	411.527	434.146	450.334
b. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	84,89	76,75	74,58	73,75	72,35
c. Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,46	1,38	1,26	1,43	1,09
d. Indeks Keparahan Kemiskinan	0,25	0,28	0,21	0,28	0,20

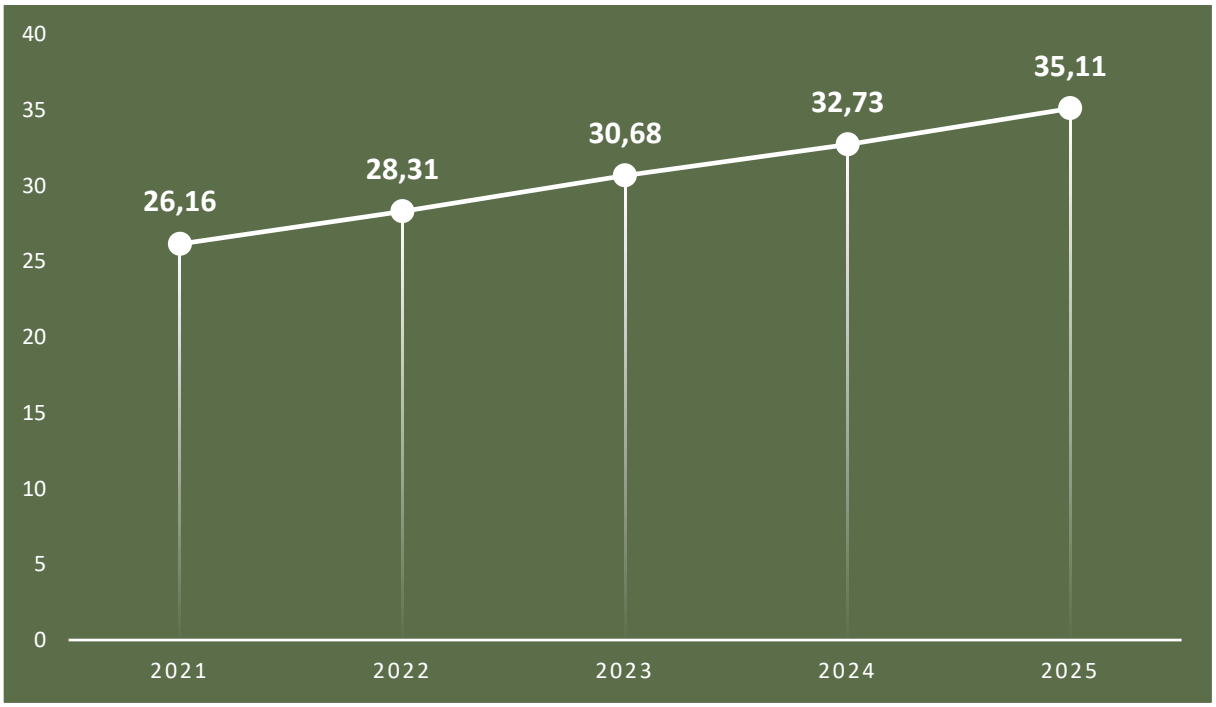
Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026

Pergerakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir, yang mempengaruhi dinamika kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan program dan kegiatan. Selain persentase penduduk miskin, terdapat indikator lain yang penting untuk diperhatikan, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada Maret 2025, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Trenggalek mencapai 1,09, menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,43. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan yang turun dari 0,28 pada tahun 2024 menjadi 0,20 pada Maret 2025.

c. PDRB Per Kapita

Pengukuran kesejahteraan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya dengan menggunakan satu indikator tunggal, melainkan membutuhkan pendekatan multidimensi. Salah satu indikator ekonomi makro yang umum digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) memberikan gambaran rata-rata nilai tambah bruto yang diterima setiap penduduk dalam suatu wilayah, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil per kapita. Di Kabupaten Trenggalek, PDRB per kapita ADHB menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021 hingga 2025, yaitu sebesar Rp26,16 juta pada 2021, Rp28,31 juta pada 2022, Rp30,68 juta pada 2023, mencapai Rp32,73 juta pada 2024 dan pada tahun 2025 mencapai Rp35,11 juta. PDRB per kapita sering dijadikan salah satu acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah, karena nilai ini menggambarkan pendapatan rata-rata per individu dalam suatu wilayah.

Grafik II.11
PDRB Perkapita (Juta Rupiah) Kabupaten Trenggalek
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026

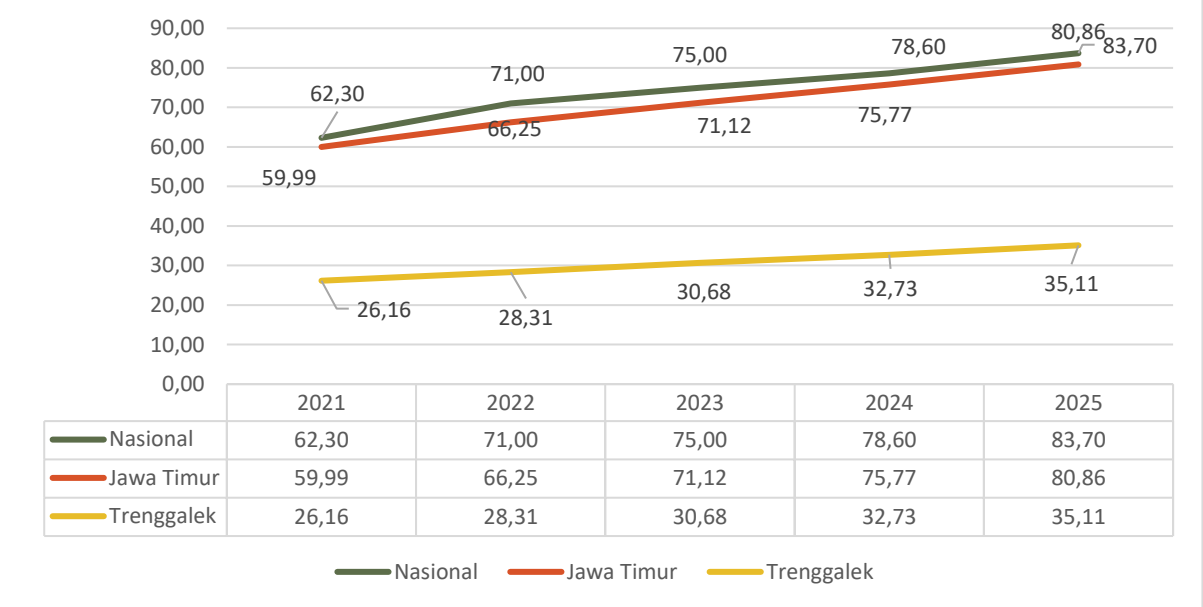
Berdasarkan grafik perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 hingga 2023, menunjukkan tren pertumbuhan positif, yaitu masing-masing sebesar Rp 27,44 juta (2021), Rp28,23 juta (2022), dan melonjak menjadi Rp30,68 juta pada tahun 2023 dan kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar Rp32,73 juta. Pada tahun 2025 nilai PDRB per kapita mencapai Rp35,11 juta, yang merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Trenggalek terus mengalami perkembangan sehingga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan.

Peningkatan PDRB per kapita didorong oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku serta pertumbuhan pada beberapa sektor ekonomi utama seperti sektor perdagangan, jasa, dan pertanian. Selain itu, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan PDRB per kapita. Salah satunya adalah pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif stabil sehingga peningkatan nilai PDRB per kapita sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi riil yang terjadi di daerah.

Dalam rangka mendukung pencapaian target, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan berbagai upaya, antara lain melalui penguatan kegiatan ekonomi produktif berbasis potensi lokal serta

mendorong peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Selanjutnya, upaya peningkatan PDRB per kapita akan terus didorong melalui pengembangan industri berbasis sumber daya lokal serta peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku ekonomi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah

Grafik II.12
Perbandingan PDB Perkapita Nasional dengan PDRB Perkapita Provinsi Jawa Timur dan PDRB Kabupaten Trenggalek (Juta Rupiah) Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Nasional	62,30	71,00	75,00	78,60	83,70
Jawa Timur	59,99	66,25	71,12	75,77	80,86
Trenggalek	26,16	28,31	30,68	32,73	35,11

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026

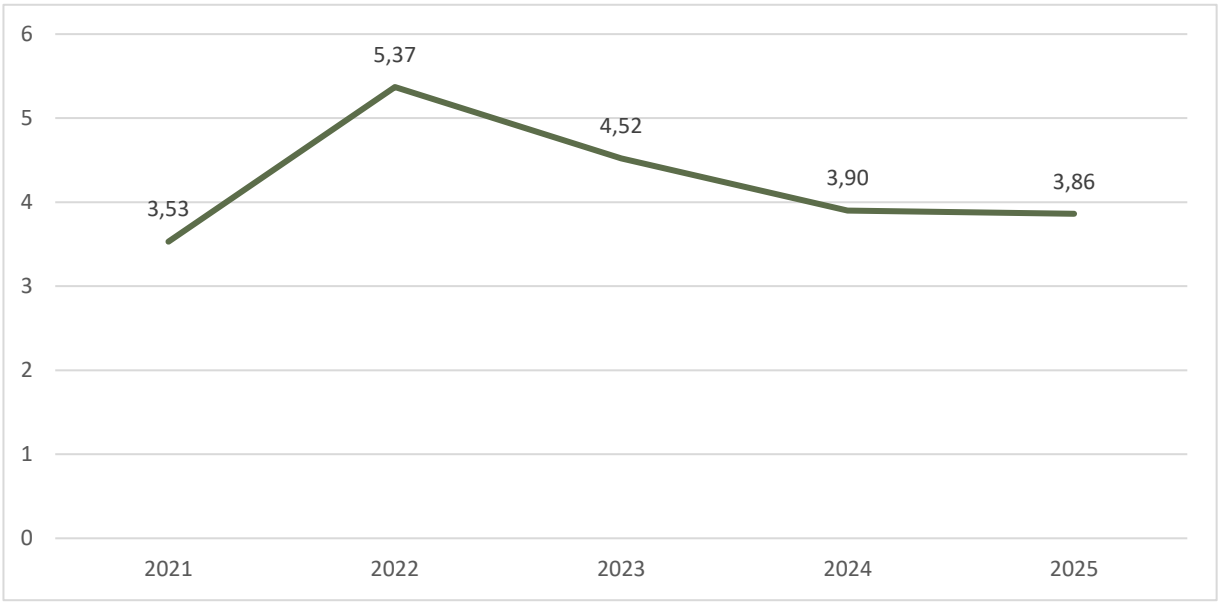
Perbandingan angka PDB/PBRB Per kapita nasional, provinsi dan Kabupaten Trenggalek menunjukkan kesenjangan yang tinggi karena dalam kurun waktu tahun 2021-2025 nilai PDRB per kapita di Kabupaten Trenggalek rata-rata kurang dari separuh PDB nasional dan PDRB Provinsi Jawa Timur. Beberapa hal penting yang bisa menjadi penyebab utama rendahnya PDRB per kapita di Kabupaten Trenggalek diantaranya sektor ekonomi unggulan daerah (pertanian, kehutanan dan perikanan) yang kurang berkembang atau memiliki nilai tambah yang lebih rendah, keterbatasan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, investasi dan infrastruktur yang kurang memadai, serta kualitas pendidikan dan sumber daya manusia yang kurang memadai sehingga mempengaruhi produktivitas dan kemampuan ekonomi masyarakat.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Trenggalek dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Dalam lima tahun terakhir, angka pengangguran mengalami perubahan, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,37 persen. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun-tahun berikutnya, di mana TPT turun menjadi 4,52 persen pada 2023 dan 3,90 persen pada 2024. Menurun kembali pada tahun 2025 menjadi 3,86 persen. Penurunan ini mencerminkan dampak positif dari berbagai program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesempatan kerja serta menguatkan sektor ekonomi lokal.

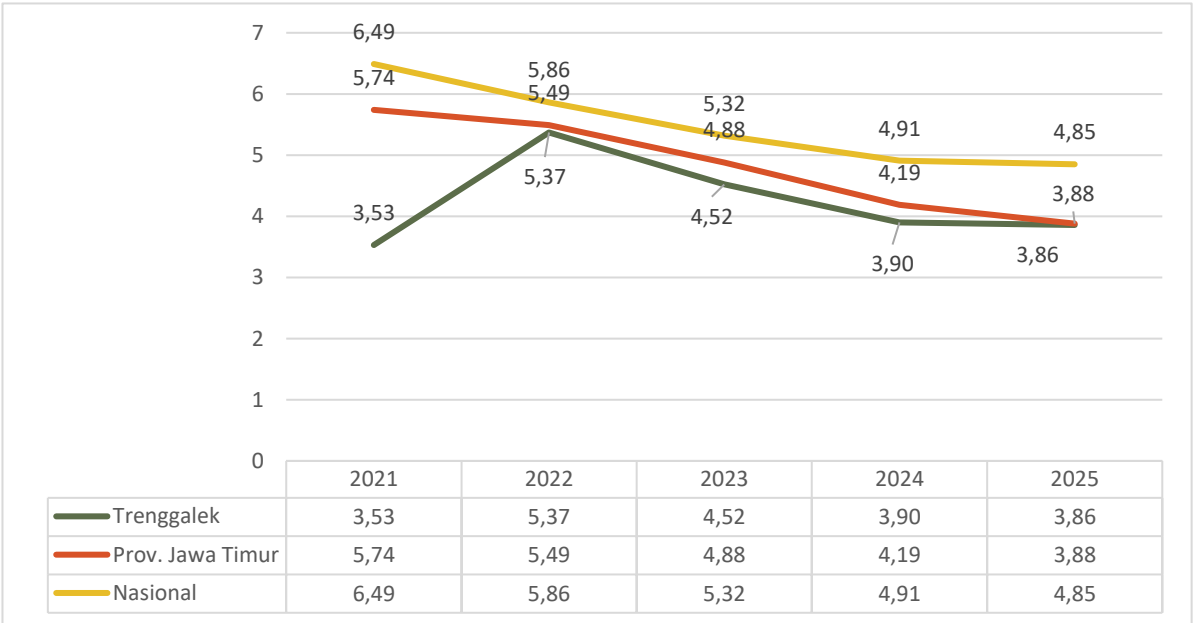
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, angka TPT sebesar 3,90 persen, yang berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 hingga 4 orang yang masih menganggur. Penurunan sebesar 0,62 persen poin dibandingkan tahun 2023 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Trenggalek, serta adanya musim panen cengkeh yang merata di beberapa kecamatan, yang membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Kendati demikian, aspek kompetensi dan keahlian tenaga kerja tetap perlu diperkuat agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga.

Grafik II.13
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026

Grafik II.14
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Trenggalek	3,53	5,37	4,52	3,90	3,86
Prov. Jawa Timur	5,74	5,49	4,88	4,19	3,88
Nasional	6,49	5,86	5,32	4,91	4,85

Sumber: BPS Republik Indonesia, 2026
BPS Provinsi Jawa Timur, 2026
BPS Kab. Trenggalek, 2026

Berdasarkan grafik perbandingan TPT nasional, provinsi dan kabupaten tersebut menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun

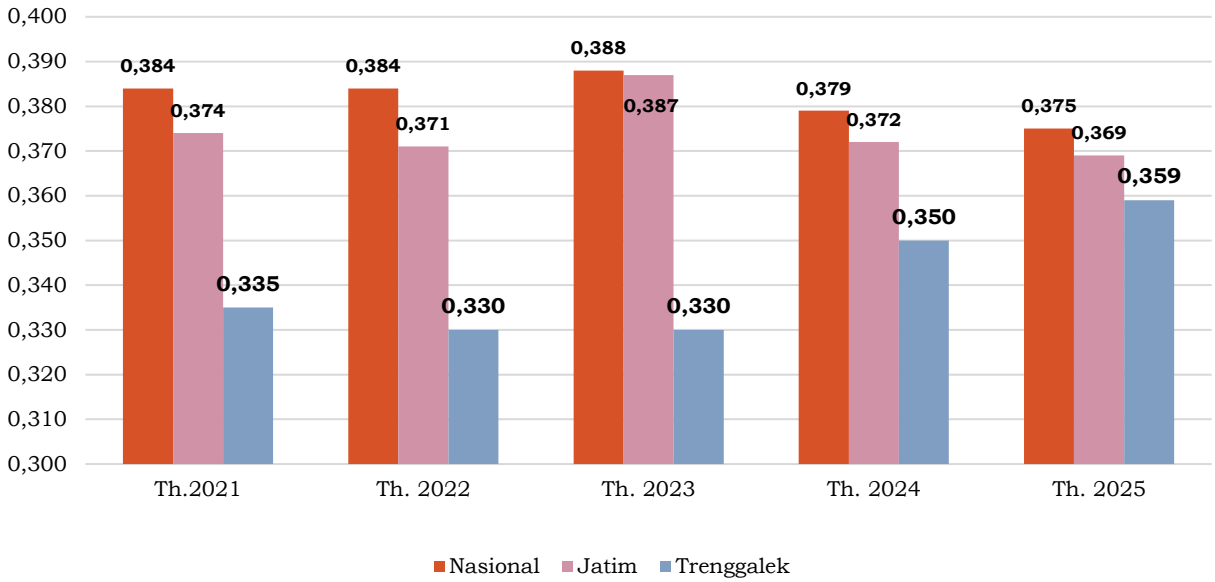
terakhir. Pada tingkat nasional TPT mengalami penurunan signifikan dari 6,49% pada tahun 2021 menjadi 4,85% pada tahun 2025. Ini menandakan perbaikan kondisi pasar tenaga kerja secara nasional. Pada tingkat provinsi Jawa Timur menunjukkan TPT turun dari 5,74% di tahun 2021 menjadi 3,88% pada 2025. Sedangkan pada tingkat kabupaten Trenggalek menunjukkan fluktuasi yang lebih tajam. Setelah turun dari 3,53% (2021) menjadi 3,86% (2025), angka TPT naik cukup tinggi ke 5,37% pada 2022. Namun, kondisi kembali membaik pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 3,90% pada 2024, lebih rendah dibandingkan rata-rata TPT provinsi maupun nasional.

Secara umum, baik nasional, Jawa Timur, maupun Trenggalek berhasil menurunkan tingkat pengangguran sepanjang periode 2021–2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan iklim ketenagakerjaan pasca pandemi, meskipun daerah seperti Trenggalek masih menghadapi dinamika yang lebih fluktuatif dibandingkan provinsi dan nasional.

e. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Trenggalek dapat diukur dengan menggunakan Indeks Gini. Indeks Gini mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, dengan nilai yang semakin tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar. Meskipun PDRB per kapita menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, data Indeks Gini mengungkapkan adanya ketidakmerataan pendapatan. Pada tahun 2022, Indeks Gini Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 0,331, yang menunjukkan adanya penurunan ketimpangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2023, Indeks Gini mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,336, dan diperkirakan akan mencapai 0,35 pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada pemulihan ekonomi, distribusi pendapatan masih belum sepenuhnya merata.

Grafik II.15
Indeks Gini Kabupaten Trenggalek,
dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026
BPS Prov. Jawa Timur, 2026
BPS Republik Indonesia, 2026

Pada tahun 2021, Indeks Gini tercatat sebesar 0,335, turun pada tahun 2022 menjadi 0,331. Pada tahun 2023 sebesar 0,33 dan tahun 2024 meningkat menjadi sebesar 0,35. Sedangkan tahun 2025 meningkat kembali menjadi 0,359, masih berada dalam kategori ketimpangan yang sedang. Capaian Indeks Gini Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian serius. Realisasi tahun 2025 tercatat lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,1 poin, dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar 0,09 poin. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Trenggalek mengalami pelebaran dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dilihat dalam kurun waktu yang lebih panjang, tren realisasi Indeks Gini selama periode 2021-2025 menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dan capaian tahun 2025 merupakan nilai Indeks Gini tertinggi dalam lima tahun terakhir meskipun secara kategori masih tergolong dalam tingkat ketimpangan rendah.

Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat dibandingkan tahun 2025, namun kontribusi sektor primer masih sangat mendominasi, dimana PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp.

6.516,5 milyar merupakan kontribusi dari 172.985 orang pekerja di sektor yang sama. Apabila dihitung kontribusi per penduduk bekerja di sektor pertanian hanya sekitar Rp. 37.670.896,32 per tahun. Disisi lain pada sektor sekunder (manufaktur) nilai PDRB lapangan usaha tersebut sebesar Rp. 7.098 milyar merupakan kontribusi dari 125.488 pekerja sehingga menghasilkan kontribusi sebesar Rp. 56.563.177,36 per tahun. Dari dua sektor ini dapat terlihat gab yang besar. Artinya sektor pertanian sebagai sektor basis di Trenggalek, dimana pekerjanya mencapai lebih dari 38% dari jumlah penduduk bekerja di Trenggalek belum mampu meningkatkan taraf hidup pekerjanya sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan di masyarakat. Dengan demikian diperlukan upaya lebih untuk memperbanyak peluang kerja di sektor sekunder dan tersier. Melihat lebih jauh ke komposisi penduduk bekerja di Trenggalek, bahwa sebesar 67,36% merupakan lulusan SD ke bawah dan SMP. Hal ini berpengaruh kepada besaran upah yang mereka terima. Hal ini mejadi awal mula kesenjangan pendapatan di masyarakat.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang dapat mengukur atau memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia oleh suatu daerah yang dihitung berdasarkan umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, melalui pendekatan rata-rata geometrik dari ketiga dimensi tersebut. Pembangunan kualitas hidup manusia yang dimaksud adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk atau proses agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu daerah dapat meningkatkan potensi daerah tersebut untuk dapat bersaing dengan daerah lain. IPM terbentuk dari tiga dimensi penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia yaitu:

a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat *(a long and healthy life)*, yang diukur oleh usia harapan hidup,
b. Dimensi pengetahuan *(knowledge),* yang diukur oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,
c. Dimensi standar hidup layak *(a decent standard of living),* yang diukur dengan paritas daya beli.

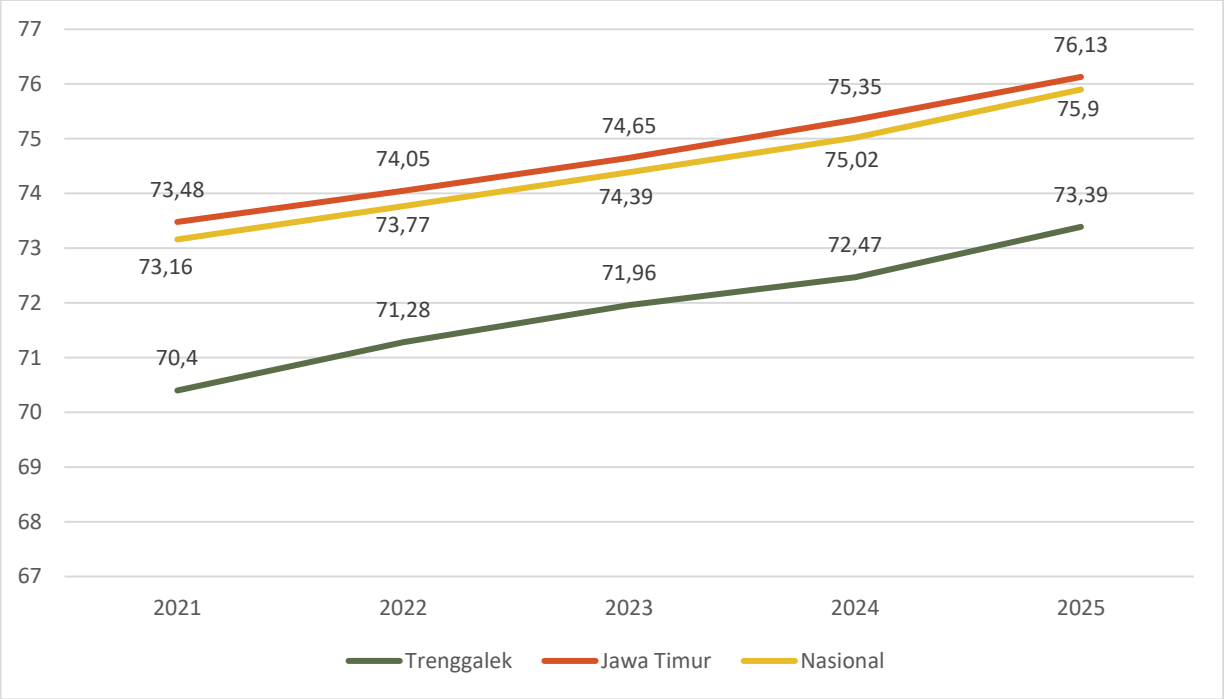
Tabel II.31
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
IPM	-	**70,40***	**71,28***	**71,96***	**72,47***	**73,39**
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,56	7,89	7,90	7,92	8,09
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,47	12,50	12,62	12,63	12,78
Usia Harapan Hidup	Tahun	74,65*	74,91*	75,16*	75,35*	75,63
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah	9.743	10.042	10.465	10.872	11.322

**) Menurut UHH Hasil Long Form SP2020*
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2026 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas, setiap dimensi penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek mengalami kenaikan dari tahun 2021 hingga 2025. Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2021 sebesar 70,40 menjadi 73,39 pada tahun 2025. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan yang menjadi penentu dimensi pengetahuan secara konsisten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 sebesar 7,56 menjadi 8,09 di tahun 2025. Sedangkan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 sebesar 12,47 menjadi 12,78 pada tahun 2025. Pengeluaran riil perkapita dapat menunjukkan besaran kebutuhan per orang dalam satu tahun di suatu daerah. Jika dilihat pada tabel di atas, pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan dari 9.743 ribu rupiah di tahun 2021 menjadi 11.322 ribu rupiah di tahun 2025.

Grafik II.16
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Republik Indonesia, 2026
BPS Provinsi Jawa Timur, 2026
BPS Kab. Trenggalek, 2026

g. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi

Kabupaten Trenggalek memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), kontribusi Trenggalek berkisar antara 0,76% hingga 0,80% selama periode 2019 hingga 2025. Pada tahun 2019, Trenggalek menyumbang 0,78% dari total PDRB provinsi. Kontribusi ini mengalami peningkatan kecil pada tahun 2020 menjadi 0,80%, kemungkinan disebabkan oleh dinamika sektoral atau efek kebijakan pemulihan ekonomi di awal pandemi. Pada tahun 2020, Jawa Timur seperti wilayah lain di Indonesia mengalami perlambatan ekonomi akibat pandemi. Banyak daerah industri besar seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik mengalami penurunan kinerja ekonomi yang lebih tajam, terutama di sektor industri pengolahan, perdagangan, dan transportasi. Dengan kata lain, terjadi kontraksi ekonomi yang lebih besar.

Sedangkan, Trenggalek memiliki basis ekonomi yang cukup kuat di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan -sektor-sektor yang relatif lebih tahan terhadap guncangan pandemi dibanding sektor industri, jasa, dan

perdagangan-. Ketika sektor jasa terpukul keras akibat pembatasan aktivitas, sektor primer seperti pertanian tetap berjalan, bahkan kadang meningkat permintaannya karena kebutuhan pangan tetap tinggi. Ini membuat kontribusi relatif Trenggalek meningkat. Ketika PDRB daerah lain menurun lebih tajam, kontribusi daerah seperti Trenggalek yang lebih bergantung pada sektor pertanian dan sektor primer lainnya secara proporsional tampak meningkat, meskipun secara nilai absolut belum tentu meningkat signifikan. Selain itu, selama pandemi, pemerintah pusat dan daerah meluncurkan berbagai program padat karya dan bantuan sosial, termasuk di wilayah pedesaan dan daerah seperti Trenggalek. Program ini bisa menggerakkan konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi lokal dalam skala kecil hingga sedang, yang cukup untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Namun, setelah itu terjadi penurunan kembali ke 0,78% (2021) dan 0,76% (2022). Pada tahun 2023, 2024 dan 2025 kontribusi stabil di angka 0,77%. Selama tujuh tahun terakhir, kontribusi Trenggalek terhadap PDRB Jawa Timur menunjukkan pola yang cenderung stagnan tanpa adanya lompatan signifikan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan ekonomi daerah, terutama pada sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan potensi sumber daya alam lainnya yang belum tergarap optimal.

Tabel II.32
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2025

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pacitan	0,67	0,69	0,67	0,66	0,66	0,65	0,66**
2	Ponorogo	0,86	0,89	0,87	0,84	0,85	0,85	0,85**
3	Trenggalek	0,78	0,8	0,78	0,76	0,77	0,77	0,77**
4	Tulungagung	1,65	1,66	1,64	1,62	1,62	1,61	1,63**
5	Blitar	1,54	1,56	1,54	1,52	1,52	1,51	1,5**
6	Kediri	1,73	1,76	1,74	1,71	1,71	1,72	1,72**
7	Malang	4,37	4,43	4,36	4,3	4,34	4,36	4,41**
8	Lumajang	1,37	1,39	1,37	1,34	1,36	1,36	1,36**
9	Jember	3,25	3,3	3,3	3,22	3,22	3,24	3,26**
10	Banyuwangi	3,52	3,52	3,5	3,42	3,43	3,43	3,47**
11	Bondowoso	0,84	0,87	0,86	0,84	0,84	0,84	0,84**

No	Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12	Situbondo	0,85	0,87	0,86	0,85	0,85	0,85	0,85**
13	Probolinggo	1,43	1,46	1,45	1,43	1,43	1,44	1,45**
14	Pasuruan	6,14	6,32	6,4	6,32	6,32	6,35	6,42**
15	Sidoarjo	8,6	8,56	8,58	8,98	9,26	9,35	9,37**
16	Mojokerto	3,47	3,56	3,55	3,51	3,53	3,56	3,6**
17	Jombang	1,7	1,73	1,7	1,68	1,69	1,7	1,71**
18	Nganjuk	1,12	1,15	1,14	1,13	1,14	1,14	1,15**
19	Madiun	0,8	0,83	0,82	0,8	0,81	0,81	0,81**
20	Magetan	0,79	0,81	0,8	0,78	0,78	0,77	0,77**
21	Ngawi	0,86	0,88	0,85	0,82	0,82	0,82	0,81**
22	Bojonegoro	3,29	3,05	3,43	3,68	3,31	3,21	3,08**
23	Tuban	2,74	2,71	2,68	2,75	2,77	2,74	2,72**
24	Lamongan	1,67	1,7	1,67	1,66	1,66	1,64	1,65**
25	Gresik	5,85	5,83	5,89	6	5,96	5,94	5,93**
26	Bangkalan	1,04	1,01	1,01	0,99	0,94	0,91	0,90**
27	Sampang	0,83	0,86	0,84	0,84	0,81	0,78	0,77**
28	Pamekasan	0,72	0,73	0,72	0,71	0,71	0,71	0,71**
29	Sumenep	1,4	1,42	1,44	1,47	1,45	1,42	1,43**
30	Kota Kediri	5,87	5,75	5,76	5,6	5,4	5,32	5,14**
31	Kota Blitar	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29**
32	Kota Malang	3,06	3,13	3,12	3,11	3,15	3,15	3,18**
33	Kota Probolinggo	0,48	0,48	0,48	0,47	0,48	0,48	0,48**
34	Kota Pasuruan	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35**
35	Kota Mojokerto	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27	0,27	0,27**
36	Kota Madiun	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58	0,59	0,59**
37	Kota Surabaya	24,45	24,07	24,03	24,01	24,2	24,34	24,38**
38	Kota Batu	0,71	0,69	0,69	0,68	0,69	0,7	0,70**

Sumber: BPS Privinsi Jawa Timur, 2026

Dari 38 kabupaten/kota, posisi Trenggalek berada di kelompok daerah dengan kontribusi rendah, setara dengan kabupaten lain seperti Pacitan, Magetan, dan Bondowoso. Keempat daerah ini adalah kabupaten yang punya

struktur ekonomi serupa dominan di sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan). Mereka memiliki karakteristik geografis dan demografis mirip, seperti wilayah pegunungan, pertanian luas, serta keterbatasan akses transportasi dan industri besar. Trenggalek termasuk dalam kelompok kontribusi rendah, karena kontribusinya di bawah 1% (meski lebih tinggi dari Kota Mojokerto dan Kota Blitar).

2.1.2.2 Kesehatan untuk Semua

a. AIDS, Tuberkulosis, Malaria (ATM)

HIV, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria merupakan tiga penyakit menular yang masih menjadi perhatian serius dalam sistem kesehatan nasional dan global, termasuk di Kabupaten Trenggalek. Penanganan HIV/AIDS di Trenggalek mengadopsi pendekatan "*Three Zero*" (*Zero New Infection, Zero Related Death, dan Zero Discrimination*), dengan fokus pada peningkatan akses tes HIV, pengobatan antiretroviral (ARV), serta upaya supresi viral load bagi Orang dengan HIV/AIDS (ODHIV). Sementara itu, upaya eliminasi TBC difokuskan pada penemuan kasus aktif, pengobatan tuntas, serta keterlibatan komunitas melalui gerakan "TOSS TBC dengan Prestasi". Adapun malaria telah dieliminasi di Trenggalek sejak 2017, dan seluruh kasus yang ditemukan sejak saat itu merupakan kasus impor tanpa penularan lokal (indigenous), sehingga strategi yang diterapkan saat ini adalah tahap pemeliharaan untuk mencegah kembalinya penularan setempat.

Berdasarkan data terbaru tahun 2021–2025, persentase penderita HIV yang mendapatkan terapi ARV di Kabupaten Trenggalek sempat mengalami peningkatan dari 89 persen pada 2021 menjadi 91 persen pada 2022. Namun, terjadi penurunan cukup tajam pada 2024, yakni hanya mencapai 63,2 persen. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya penemuan ODHIV yang berasal dari luar Kabupaten Trenggalek dan enggan menjalani pengobatan. Selain itu, rendahnya pemeriksaan viral load pada ODHIV di tahun 2024 yang hanya sebesar 17 persen, serta rendahnya pemberian pencegahan primer isoniazid (PP INH) pada ODHIV sebesar 2,8 persen, menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pengendalian HIV. Hal ini menekankan pentingnya konsistensi dalam penjangkauan, konseling, serta kemudahan akses pengobatan dan pemeriksaan lanjutan bagi ODHIV. Sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 73,56 persen.

Di sisi lain, penanganan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Trenggalek menunjukkan capaian yang cukup baik meskipun masih terdapat fluktuasi. Treatment Success Rate (TSR) atau tingkat keberhasilan pengobatan TBC sempat menurun dari 85 persen pada 2021 menjadi 80 persen pada 2022, namun kembali meningkat menjadi 88 persen pada 2023. Pada tahun 2024

dan 2025, masing-masing menurun menjadi 86 persen 75,99 persen. Treatment Success Rate (TSR adalah jumlah semua kasus TBC yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan dalam satu tahun. Sementara itu, treatment coverage TBC yang berarti jumlah semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan dan dilaporkan diantara perkiraan jumlah semua kasus Tuberkulosis (insiden) meningkat pesat dari 16 persen pada 2021 menjadi 71,81 persen pada 2025, yang menandakan keberhasilan intervensi penemuan kasus aktif dan penguatan jejaring layanan TBC. Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari 31,99 persen pada 2021 menjadi 100 persen pada 2023, 2024, dan 2025.

Keberhasilan pengendalian TBC ini tidak terlepas dari berbagai upaya seperti bimbingan teknis ke rumah sakit dan klinik pemerintah maupun swasta, validasi data secara rutin, pembinaan kader peduli TBC bersama komunitas (YABHISA), serta monitoring dan evaluasi program secara berkala. Selain itu, perluasan wilayah skrining TBC bersama fasilitas kesehatan, penyiapan layanan TBC Resisten Obat (RO) di RSUD dr. Soedomo, pengadaan logistik TBC seperti cartridge TCM, serta pelatihan TPT bagi petugas di fasyankes menjadi langkah strategis untuk meningkatkan penemuan dan pengobatan kasus TBC. Koordinasi lintas sektor dan pelibatan komunitas juga sangat penting untuk melakukan pelacakan dan pendampingan kasus mangkir, sehingga pasien dapat dimotivasi untuk menyelesaikan pengobatan hingga sembuh.

Sementara itu, jumlah penderita malaria di Kabupaten Trenggalek mengalami dinamika dalam lima tahun terakhir. Setelah sempat menurun dari 34 kasus pada 2020 menjadi 12 kasus pada 2021, angka kasus meningkat tajam menjadi 99 kasus pada 2023, sebelum turun kembali menjadi 53 kasus pada 2024. Seluruh kasus ini merupakan kasus impor, mengingat Trenggalek telah menerima Sertifikat Eliminasi Malaria sejak 2017 dan tidak ditemukan kasus indigenous maupun kematian akibat malaria. Meningkatnya kasus impor ini menegaskan pentingnya penguatan surveilans dan pencegahan melalui edukasi masyarakat serta skrining bagi pelaku perjalanan dari daerah endemis sebagai bagian dari fase pemeliharaan eliminasi malaria. Sedangkan tahun 2025, jumlah penderita malaria meningkat menjadi 66 kasus.

Namun, tantangan pengendalian malaria di Trenggalek masih cukup besar. Pemeriksaan suspek malaria masih rendah, padahal idealnya jumlah suspek yang diperiksa minimal 10 kali jumlah kasus positif. Penduduk migran, khususnya yang pulang dari daerah endemis seperti Papua, Kalimantan, dan luar negeri (misal Gabon), umumnya enggan memeriksakan

diri kecuali jika sudah merasa sakit. Selain itu, pemetaan daerah reseptif (survey jentik malaria) belum merata ke seluruh desa, dan pelaksanaan MoU dengan pihak pengerah tenaga kerja untuk melaporkan penduduk yang pulang dari daerah endemis masih kurang maksimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang diambil antara lain meningkatkan kerjasama lintas sektor, khususnya dengan pemerintah desa, agar penduduk yang pulang dari daerah endemis dapat diperiksa malarianya meskipun tidak merasa sakit. Kerjasama dengan perangkat desa juga perlu ditingkatkan untuk melakukan pemetaan daerah reseptif secara menyeluruh. Selain itu, petugas layanan kesehatan didorong untuk aktif bertanya kepada pihak pengerah tenaga kerja mengenai siapa saja yang baru pulang dari daerah endemis, sehingga dapat segera dilakukan skrining dan pencegahan dini.

Pada aspek pelayanan kesehatan lain, capaian Kabupaten Trenggalek sangat baik. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar mencapai 100% pada 2023, 2024 dan 2025. Capaian ini mencerminkan peningkatan kapasitas layanan serta komitmen pemerintah daerah dalam memastikan deteksi dan penanganan penyakit menular dilakukan secara komprehensif dan sesuai standar nasional.

Tabel II.33
Indikator AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Penderita HIV yang mendapatkan ARV	89	91	84	63,2	73,56
2.	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate/TSR)	85	80	88	86	75,99
3.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	16	38,83	65	51,90	71,81
4.	Jumlah Penderita Malaria	12	40	99	53	66
5.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar	31,99	89,41	100	100	100
6.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	102,2	86,25	100	100	86,82

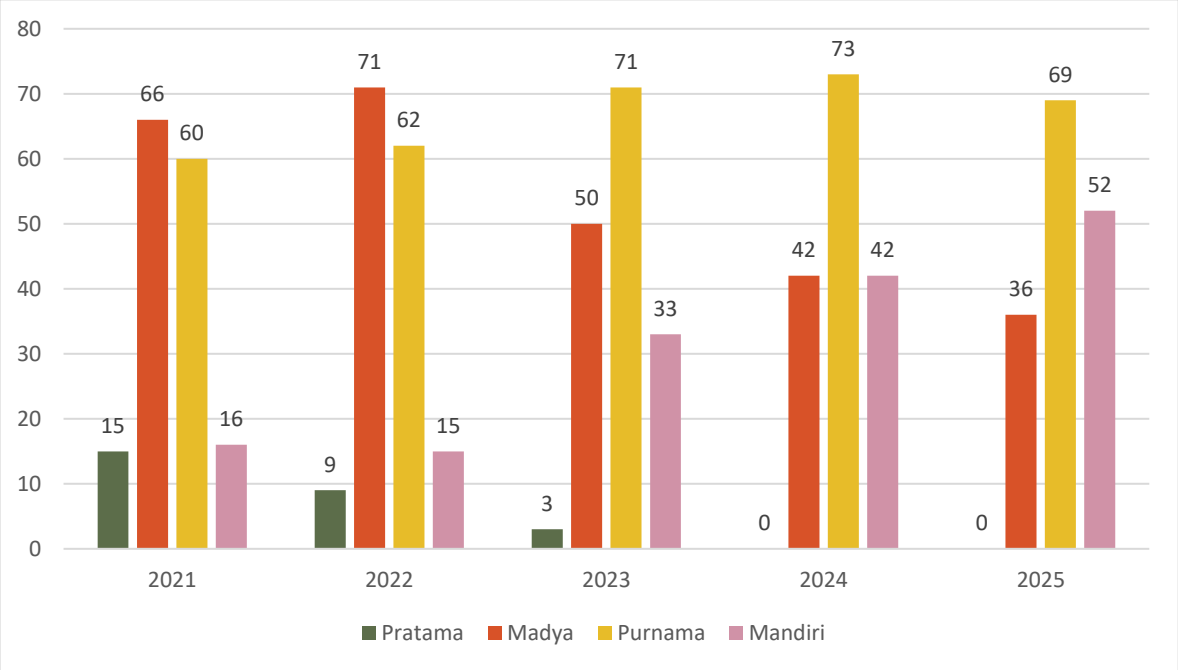
Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2026

b. Cakupan desa siaga aktif

Desa Siaga Aktif di Kabupaten Trenggalek merupakan representasi nyata dari upaya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan dan kebencanaan, serta penyehatan lingkungan sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Adapun pencapaian strata Desa Siaga Kabupaten Trenggalek dari tahun 2021-2025 mengalami kenaikan dan untuk Desa Siaga Aktif kategori pratama sudah bergeser menjadi madya. Di Kabupaten Trenggalek sampai dengan tahun 2025 telah terbentuk Desa Siaga sebanyak 157 Desa/Kelurahan dengan strata sebagaimana grafik berikut :

Grafik II.17.
Pencapaian Strata Desa Siaga Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2026

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

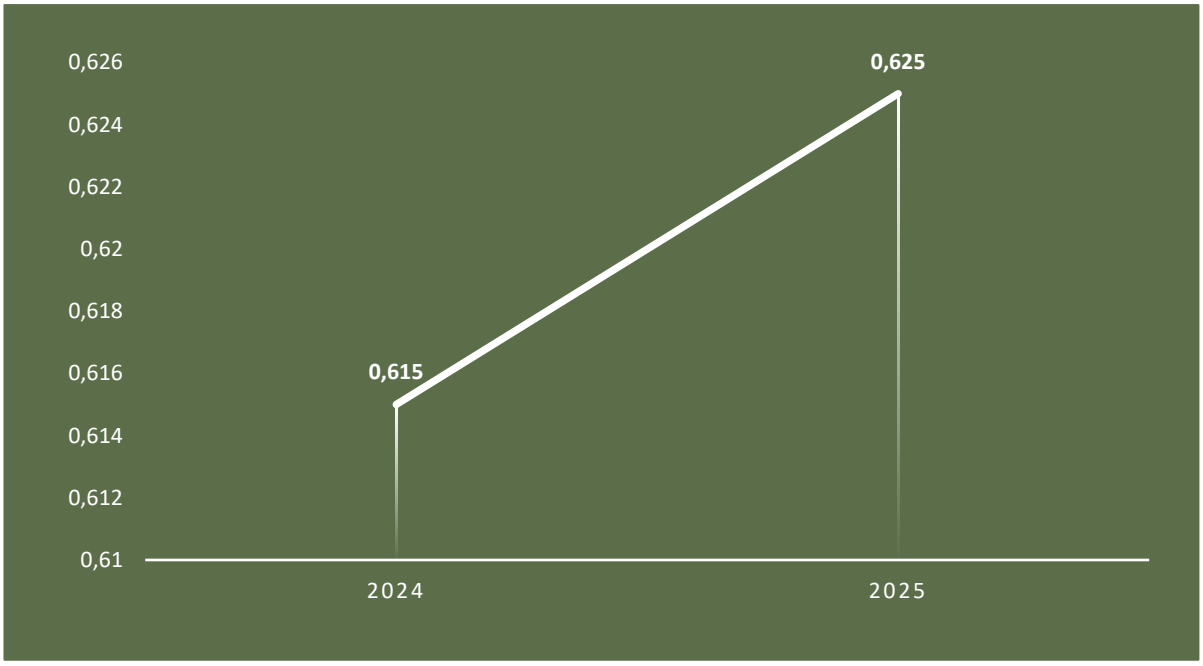
Pendidikan yang berkualitas dan merata memegang peranan sentral dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, karena membuka akses terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan yang lebih luas untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Melalui pendidikan, individu tidak hanya dipersiapkan untuk menghadapi tantangan ekonomi, tetapi juga untuk menjadi warga negara yang berdaya saing, kritis, dan bertanggung jawab. Pemerataan akses pendidikan yang berkualitas menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, investasi dalam sektor pendidikan

merupakan langkah strategis untuk membentuk masyarakat yang cerdas, mandiri, dan bermartabat, serta mewujudkan bangsa yang maju dan berdaya saing di tingkat global.

a. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan indeks yang merepresentasikan tingkat pembangunan di bidang pendidikan pada masing-masing wilayah. Komponen pembentuk dari Indeks Pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Berikut adalah realisasi indeks pendidikan Kabupaten Trenggalek periode tahun 2024-2025 :

Grafik II.18
Realisasi Indeks Pendidikan Kabupaten Trenggalek Tahun 2024-2025



Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2026

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa indeks pendidikan Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan sebesar 0,010. Trend kenaikan indeks pendidikan memberikan gambaran bahwa terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masyarakat Kabupaten Trenggalek. Pada tahun 2025 nilai indeks pendidikan mencapai 0,625 poin dari target yang ditetapkan sebesar 0,62 poin atau memiliki tingkat capaian sebesar 100 persen. Sehingga dengan ini akan mempengaruhi nilai positif pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Trenggalek dimana tingkat pengetahuan penduduk Kabupaten Trenggalek semakin tinggi. Capaian indeks pendidikan didukung oleh peningkatan sarana prasarana sekolah,

kompetensi dan kinerja pendidik (guru), serta aksesibilitas pendidikan (diantaranya : Program Indonesia Pintar Pusat, Beasiswa dan Bantuan Perlengkapan Siswa Miskin Daerah, BOSP, BOS Daerah). Selain itu, motivasi belajar anak, dukungan orang tua, sehingga dapat mendorong rata-rata lama sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) semakin baik/meningkat menjadi penentu utama kualitas pendidikan.

b. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang pendidikan tinggi mencakup: Diploma I-IV S1, S2, S2 Terapan, S3. Proporsi penduduk Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang berkualifikasi tinggi = (Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus/ berijazah pendidikan tinggi di daerah X / Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas di daerah X) X 100%. Tingginya proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik. Pada tahun 2024, angka Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi sebesar 4,65 persen yang akan menjadi baseline untuk perhitungan selanjutnya.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan landasan penting dalam membangun masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berketahanan terhadap berbagai guncangan sosial maupun ekonomi. Sistem perlindungan sosial yang baik tidak hanya memberikan bantuan ketika masyarakat menghadapi risiko seperti kemiskinan, bencana, atau kehilangan pekerjaan, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan dinamika dan kebutuhan yang terus berkembang. Dengan demikian, setiap individu, terutama kelompok rentan, memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh kehidupan yang layak, akses terhadap layanan dasar, serta peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Di Kabupaten Trenggalek, perlindungan sosial terus dikembangkan melalui berbagai program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya mengintegrasikan program pusat dan daerah agar lebih responsif terhadap kondisi lokal, seperti kemiskinan

pedesaan, lansia tanpa penghasilan tetap, serta dampak perubahan iklim terhadap mata pencaharian masyarakat. Upaya ini penting untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal, serta memperkuat daya tahan sosial masyarakat Trenggalek dalam menghadapi ketidakpastian di masa depan.

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja dalam bentuk santunan uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang akibat risiko sosial ekonomi selama bekerja. Hal ini tidak hanya menjadi bentuk perlindungan sosial, tetapi juga sebagai kebijakan yang memperkuat hubungan kerja antara tenaga kerja dan pemberi kerja secara adil dan saling menguntungkan. Pelaksanaan program ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program jaminan sosial, termasuk di daerah seperti Kabupaten Trenggalek.

Jumlah kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek mengalami perubahan signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada 2020, tercatat 19.539 peserta aktif, terdiri dari 13.478 pekerja penerima upah dan 6.061 pekerja bukan penerima upah, namun pada 2021 jumlah ini menurun menjadi 15.334 peserta akibat penurunan peserta bukan penerima upah yang signifikan. Selanjutnya, kepesertaan kembali meningkat menjadi 19.292 pada 2022, kemudian melonjak tajam menjadi 26.077 peserta pada 2023 dengan 15.601 penerima upah dan 10.476 bukan penerima upah. Pada 2024, jumlah peserta aktif mencapai 34.577 orang, terdiri dari 20.601 penerima upah dan 13.976 bukan penerima upah, menunjukkan upaya pemerintah daerah yang efektif dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja formal maupun informal, serta komitmen untuk memberikan perlindungan yang lebih inklusif dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat pekerja di Kabupaten Trenggalek.

Tabel II.34
Jumlah Kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Kepesertaan Aktif		Jumlah
	Penerima Upah	Bukan Penerima Upah	
2020	13.478	6.061	19.539
2021	12.929	2.405	15.334
2022	14.176	5.116	19.292
2023	15.601	10.476	26.077
2024	23.204	11.393	34.597
2025	45.916	13.577	59.493

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kab. Trenggalek, 2026

2.1.2.5 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Peningkatan kualitas individu, keluarga, dan masyarakat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing sebagai penggerak pembangunan. Upaya ini mencakup penguatan ketahanan keluarga, peningkatan peran serta perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, serta penciptaan lingkungan sosial yang inklusif dan setara. Pengarusutamaan gender juga menjadi strategi penting untuk mengurangi ketimpangan, memastikan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang, serta mendorong partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu wilayah atau negara, berdasarkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Membangun kesetaraan dan keadilan gender adalah hal yang sudah diupayakan oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan-kebijakan. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin dalam berbagai program pembangunan. Partisipasi perempuan dalam program tersebut, terutama ditujukan dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi dan sosial. Implementasi program pembangunan tersebut antara lain peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai proses pembangunan, penguatan peran di masyarakat, dan peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya. Namun demikian, berbagai tantangan harus dihadapi dalam implementasinya. Oleh karena itu upaya tersebut belum memperlihatkan hasil yang maksimal, meskipun sudah menunjukkan peningkatan yang berarti dalam pembangunan berbasis gender**.**

Tabel II.35
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Gender (IPG)*	92,56	92,41	93,18	93,20	93,64

Sumber: BPS Republik Indonesia, 2026 (Menggunakan hasil LF SP2020)

Upaya pengarusutamaan gender di Kabupaten Trenggalek diarahkan untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor pembangunan. Langkah ini dilakukan melalui penguatan kapasitas aparatur, penyediaan data terpilah, penyusunan kebijakan responsif gender, serta pemberdayaan masyarakat guna memastikan setiap program pembangunan ramah bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga membentuk jejaring koordinasi antarperangkat daerah, memperkuat peran TP PKK dan lembaga masyarakat, serta meningkatkan komitmen anggaran responsif gender di setiap program kerja. Seluruh upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi setara antara laki-laki dan perempuan, memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial, sekaligus mempercepat pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di bidang kesetaraan gender.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Trenggalek mengalami fluktuasi selama periode 2021 hingga 2025, dengan capaian sebesar 92,56 pada 2021, menurun menjadi 92,41 pada 2022, kemudian kembali meningkat menjadi 93,18 pada 2023 dan 93,2 pada 2024. Sedangkan tahun 2025 sebesar 93,64. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan di tahun-tahun awal, upaya pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kesetaraan gender terus berlanjut, dengan IPG yang semakin mendekati angka 100 menandakan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Peningkatan IPG pada dua tahun terakhir mencerminkan perbaikan dalam berbagai aspek pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender yang perlu terus didorong agar kesetaraan gender di Kabupaten Trenggalek semakin optimal dan inklusif.

b. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam

mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. Persentase cakupan kepesertaan JKN = (Jumlah Peserta JKN/ Jumlah Penduduk) * 100%. Adapun realisasi cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kabupaten Trenggalek tahun 2024 yakni 98,32 persen yang menjadi baseline untuk tahun selanjutnya.

Cakupan kepesertaan aktif JKN Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 sebesar 62,39 yang digunakan sebagai baseline RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029, tahun 2025 sebesar 64,76%. Kepesertaan aktif JKN merujuk pada peserta yang status kepesertaannya aktif, yaitu mereka yang rutin membayar iuran dan masih berhak mendapatkan pelayanan kesehatan melalui JKN.Cakupan kepesertaan aktif JKN menjadi indikator penting karena menunjukkan sejauh mana program JKN benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat. Meningkatkan cakupan kepesertaan aktif JKN bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan, mendapatkan akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Tabel II.36
Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	68,05	72,48	74,78	98,32	98,75
Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	-	-	-	62,39	64,76

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2026

c. Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi kunci dalam menurunkan angka kelahiran, mengendalikan pertumbuhan penduduk, dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Indikator proporsi kebutuhan KB

yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern menggambarkan sejauh mana perempuan usia reproduktif (15–49 tahun) yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan benar-benar menggunakan metode kontrasepsi modern. Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern merupakan persentase pasangan usia subur (PUS) yang memiliki kebutuhan ber- KB (ingin menunda, mengatur jarak, atau menghentikan kelahiran) dan menggunakan metode kontrasepsi modern untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dibandingkan dengan total pasangan usia subur yang memiliki kebutuhan ber-KB pada periode waktu tertentu.

Alat/cara KB modern yang dimaksud meliputi : (1) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) diantaranya IUD (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), implan/susuk, sterilisasi wanita, dan sterilisasi pria. (2) Metode Non-MKJP diantaranya suntikan KB, pil KB, kondom, dan metode modern lainnya (misalnya diafragma atau spermisida modern).

Adapun nilai proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern dimulai penghitungannya di tahun 2024 dengan capaiannya sebesar 89,4% dan tahun 2025 sebesar 90,62%.

d. Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)

Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) / Unintended Pregnancy adalah kehamilan yang terjadi pada saat seorang perempuan atau pasangan tidak menginginkan untuk hamil, baik pada saat itu maupun di masa depan. Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama kehamilan tidak diinginkan (unwanted pregnancy) yang merupakan kehamilan yang terjadi ketika pasangan tidak ingin memiliki anak lagi. Kedua kehamilan tidak tepat waktu (mistimed pregnancy) merupakan kehamilan yang terjadi ketika pasangan ingin memiliki anak, tetapi pada waktu yang belum direncanakan.

Adapun capaian untuk Presentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) tahun 2024 sebesar 12,8% dan tahun 2025 sebesar 23,6%.

e. Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (IPKR)

Peran penting pelibatan orang tua dan pengasuh sebagai mitra kunci dalam menjaga dan mendukung perkembangan remaja yang sehat. Seiring perkembangan remaja menjadi lebih dewasa, orang tua tetap memiliki pengaruh penting atas aspek-aspek penting dalam perkembangan remaja, seperti identitas, kesejahteraan emosional, dan hubungan interpersonal.

Oleh karena itu diperlukan sebuah alat ukur yang digunakan menilai sejauhmana kualitas pengasuhan yang diberikan keluarga kepada anggota keluarga kepada anggota keluarga yang berada pada usia (10-24 tahun) melalui Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (IPKR). IPKR ini menjadi salah

satu indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia, terutama dalam pencegahan perilaku berisiko, penguatan karakter, dan peningkatan kualitas hidup generasi muda.

Adapun Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (IPKR) dimulai penghitungannya di tahun 2024 dengan capaiannya sebesar 84,09% dan tahun 2025 sebesar 87%.

f. Indeks Lansia Berdaya

Indek komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan. Lansia berdaya di Kabupaten Trenggalek saat ini menunjukkan profil yang relatif positif, dengan meningkatnya mandiri secara fungsional, melalui pelatihan caregiver dan bantuan alat bantu. Produktif dan bermakna, melalui Sekolah Orang Tua Hebat dan Lansia Tangguh serta pemberian dukungan ekonomi. Disamping itu lansia di Kabupaten Trenggalek juga terhubung secara sosial, dengan adanya sekolah lansia dan komunitas. Serta penyediaan akses layanan lebih baik, ditopang inovasi kesehatan dan bantuan sosial.

Adapun capaian untuk Indeks Lansia Berdaya di tahun 2024 mencapai 58,06 point sebagai base data awal yang sebelumnya masih belum tersedia dan tahun 2025 tercapai 74%.

g. Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri

Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) yang telah mandiri merupakan satuan wilayah setingkat desa/kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Bangga Kencana) yang telah mencapai tingkat kemandirian. Kabupaten Trenggalek terus berupaya mendorong pembangunan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, salah satu upaya yang dilakukan dengan mencanangkan Kampung Keluarga Berkualitas yang mandiri.

Di Kabupaten Trenggalek tahun 2021 pencapaiannya sebesar 22,22%, hal ini menunjukkan awal implementasi Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri di Trenggalek berjalan cepat pada tahun pertama pelaksanaan, dan mengalami penurunan sampai dengan di tahun 2024, bahwa terdapat indikasi adanya tantangan mempertahankan kemandirian kampung, bisa terkait keberlanjutan program, partisipasi masyarakat, atau pendanaan. Oleh karena itu dibutuhkan upaya penguatan kelembagaan, sumber dana lokal, dan kaderisasi. Sedangkan tahun 2025 naik signifikan menjadi sebesar 54,14%. Capaian Kampung KB di Kabupaten Trenggalek melebihi target

RPJMD karena pelaksanaan program pembangunan keluarga dilakukan secara terintegrasi dan konsisten. Dukungan kebijakan daerah, penguatan peran pemerintah desa, serta kolaborasi lintas sektor mempercepat pembentukan dan pengembangan Kampung KB sebagai instrumen strategis peningkatan kualitas keluarga sesuai arah pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek.

Tabel II.37
Capaian Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persentase	22,22	17,54	16,88	15,92	54,14

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2026

h. Persentase PPKS yang mandiri

PPKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam melaksanakan fungsi sosialnya sehingga membutuhkan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

PPKS yang Mandiri adalah PPKS yang telah mencapai kemandirian, artinya mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya, tanpa terlalu bergantung pada bantuan sosial

PPKS merujuk pada individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan atau perlindungan sosial karena berbagai faktor, seperti kemiskinan, disabilitas, atau masalah sosial lainnya. Kemandirian dalam konteks ini mengacu pada kemampuan PPKS untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, dan berkontribusi pada masyarakat. Kemandirian PPKS merupakan tujuan penting karena dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial, meningkatkan martabat individu, dan memberdayakan mereka untuk berkontribusi pada pembangunan. Adapun realisasi indikator Persentase PPKS yang mandiri Kabupaten Trenggalek pada tahun 2024 yakni sebesar 5,6 persen. Realisasi tersebut merupakan baseline dari dokumen RPJMD Kabupaten Trenggalek periode tahun 2025-2030, sedangkan tahun 2025 realisasinya sebesar 6,87 persen, melebihi target yang sebesar 6,1 persen.

i. Persentase Pelindungan Kebudayaan

Pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan tidak hanya menjadi agenda sektoral, tetapi juga menjadi arus utama pembangunan daerah. Pelindungan Kebudayaan akan terintegrasi dengan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Trenggalek. Hal ini akan mewujudkan pembangunan yang inklusif, berakar pada identitas lokal, sekaligus berdaya saing dalam menghadapi tantangan global.

Pemerintah memiliki peran sentral dalam memajukan kebudayaan, termasuk dalam pelaksanaannya. Upaya pelindungan kebudayaan juga mencakup perlindungan ekspresi budaya tradisional yang merupakan identitas dan jati diri bangsa. Selain itu, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di bidang kebudayaan juga menjadi bagian dari upaya pelestarian warisan budaya. Pada tahun 2024 realisasi persentase pelindungan kebudayaan mencapai 5,6 persen yang menjadi tahun perhitungan pertama dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2025 - 2030. Sedangkan tahun 2025 realisasinya sebesar 6 persen. Pelindungan Kebudayaan adalah Upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelindungan Obyek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya.

Cagar budaya dan objek diduga cagar budaya sejak tahun 2022 meningkat dari 152 objek menjadi 158 objek di tahun 2023. Tahun 2024 meningkat kembali menjadi sebanyak 184 objek, dan secara signifikan di tahun 2025 menjadi 250 objek. Jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2025 sejumlah 10 objek, sisanya dari 250 objek, sebanyak 240 objek berstatus sebagai objek diduga cagar budaya. Berikut 10 objek yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya :

Tabel II.38
Cagar Budaya Kabupaten Trenggalek

NO	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya
1.	Eks Kawedanan Panggul	Desa Wonocoyo Panggul	BANGUNAN
2.	Arca Bima	Joglo Arca Pendopo Manggala Praja	BENDA
3.	Batu Dakon	Joglo Arca Pendopo Manggala Praja	BENDA
4.	Dolmen	Joglo Arca Pendopo Manggala Praja	BENDA
5.	Dwarapala 1	Joglo Arca Pendopo Manggala Praja	BENDA

NO	Nama Cagar Budaya	Alamat	Jenis Cagar Budaya
6.	Dwarapala 2	Joglo Arca Pendopo Manggala Praja	BENDA
7.	Dwarapala 3	Joglo Arca Pendopo Manggala Praja	BENDA
8.	Fragmen perwara Candi	Joglo Arca Pendopo Manggala Praja	BENDA
9.	Situs Gondang	Dusun Krajan Desa Gondang Tugu	STRUKTUR
10.	Candi Brongkah	Desa Kedunglurah Pogalan	STRUKTUR

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2026

2.1.3 Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Daya saing sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perekonomian daerah. SDM yang berkualitas, produktif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar kerja akan memperkuat kapasitas daerah dalam menciptakan nilai tambah, meningkatkan inovasi, serta menarik investasi. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan, keterampilan, dan kesehatan tenaga kerja menjadi strategi penting dalam memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing tinggi.

Angka ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Ini juga dapat memberikan gambaran tentang kebutuhan akan program-program sosial dan kesejahteraan untuk membantu orang-orang yang tidak bekerja.

Semakin besar angka ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Tingkat angka ketergantungan yang tinggi dapat menjadi perhatian dalam perencanaan ekonomi dan kebijakan sosial, karena dapat menimbulkan tekanan pada sistem keuangan dan sosial. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis angka ketergantungan merupakan hal yang penting dalam mengembangkan strategi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Adapun pencapaian angka ketergantungan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 berada di bawah 50 yang mengindikasikan pada beberapa tahun terakhir memasuki kondisi bonus demografi sebagai kondisi dimana merupakan peluang dalam akselerasi pembangunan di suatu wilayah jika dapat dimanfaatkan dengan optimal. Pada tahun 2025, angka ketergantungan Kabupaten Trenggalek kembali naik ke angka 44,27.

Tabel II.39
Angka Ketergantungan (Persen)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah penduduk usia <15 tahun	140,27	139,40	142,27	142,38	127,14
Jumlah penduduk usia >65 tahun	82,94	86,98	87,83	91,06	104,31
Jumlah penduduk usia tidak produktif	223,21	226,38	230,1	233,44	231,45
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	511,68	513,29	511,08	511,09	522,81
Angka Ketergantungan	**43,62**	**44,10**	**45,02**	**45,67**	**44,27**

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2022-2026 (Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2022-2026), diolah

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (Iptek) memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan

berdaya saing. Keberadaan Iptek tidak hanya berfungsi sebagai penunjang efisiensi dan efektivitas proses produksi, tetapi juga sebagai pendorong utama lahirnya solusi inovatif dalam menghadapi tantangan global dan dinamika pasar. Peningkatan kapasitas inovasi daerah akan memperkuat produktivitas sektor-sektor ekonomi utama serta memperkokoh struktur ekonomi dalam jangka panjang, sehingga mampu menciptakan transformasi ekonomi yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kondisi ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Trenggalek secara bertahap mengalami kemajuan. Pemerintah daerah telah menetapkan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2021–2026 dan tengah menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK (RIPJ PID) Tahun 2025–2029 sebagai landasan strategis. Dukungan SDM riset berasal dari Bapperida, perguruan tinggi, serta inovator, meskipun jumlah peneliti, perekayasa dan analis pemanfaatan IPTEK masih terbatas. Infrastruktur riset mulai terbangun melalui rintisan Science Techno Park Atsiri, Taman Teknologi Pertanian Dillem Wilis, Rintisan Kebun Raya Bambu, serta sejumlah laboratorium. Anggaran riset dari APBD menunjukkan tren peningkatan, walaupun skalanya masih relatif kecil, dan upaya perlindungan kekayaan intelektual belum optimal.

Selain itu, kapasitas kelembagaan dan budaya inovasi daerah terus tumbuh melalui kolaborasi riset dengan perguruan tinggi, BRIN, swasta, serta penguatan jejaring pentahelix. Indeks Inovasi Daerah Trenggalek konsisten meningkat dari kategori inovatif pada 2021 menjadi sangat inovatif pada 2025. Berbagai kompetisi inovasi, kampanye, serta pendampingan bagi pelaku usaha turut mendorong tumbuhnya budaya riset. Meskipun kelembagaan riset masih pada level sub-bidang dan klaster inovasi berbasis produk unggulan belum spesifik, potensi besar terlihat dari meningkatnya jumlah riset, inovasi daerah, serta kerja sama internasional. Hal ini menegaskan bahwa Trenggalek memiliki kapasitas untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang mendukung pembangunan daerah secara inklusif dan berkelanjutan.

Dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Trenggalek masih bertumpu pada sektor berbasis sumber daya alam, khususnya pertanian, perikanan, dan kehutanan yang menjadi sektor basis daerah dengan pertumbuhan industri pengolahan yang relatif pesat, namun kontribusinya terhadap PDRB terus menurun. Sebaliknya, sektor industri pengolahan mulai menunjukkan peningkatan meskipun belum menjadi sektor basis. Berdasarkan kajian Penentuan Produk Unggulan Daerah dalam Perspektif Pentahelix (2023), prioritas pengembangan diarahkan pada tanaman pangan, perikanan, dan perkebunan dengan kriteria utama berupa

kontribusi terhadap perekonomian, ketersediaan bahan baku, dan ketersediaan pasar. Permasalahan utama komoditas unggulan adalah masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, sehingga ke depan arah kebijakan pembangunan perlu menitikberatkan pada hilirisasi, industrialisasi, kepastian pasar dan penguatan daya saing produk unggulan daerah secara berkelanjutan.

Selain permasalahan komoditas, permasalahan lain yang menjadi titik fokus riset dan inovasi adalah ekonomi, lingkungan, dan sumber daya manusia (SDM). Pada aspek ekonomi, tantangan yang dihadapi berupa rendahnya daya dorong sektor unggulan terhadap pertumbuhan ekonomi, rendahnya kapasitas fiskal daerah, masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan, serta infrastruktur pembangunan yang belum merata dan tingginya potensi bencana daerah. Pada aspek lingkungan, permasalahan terletak pada meningkatnya kerusakan lingkungan hidup, terbatasnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sementara itu, pada aspek SDM, kendala yang muncul adalah rendahnya daya saing SDM serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan berorientasi pada transformasi. Berdasarkan besarnya kesenjangan (*gap*) antara kondisi awal dengan target 2030 serta dampak sistemik terhadap indikator pembangunan daerah, maka permasalahan prioritas Kabupaten Trenggalek adalah belum optimalnya pengembangan ekonomi kerakyatan yang produktif dan kompetitif, yang menuntut dukungan riset dan inovasi untuk memperkuat daya saing UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Berdasarkan data rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Trenggalek tahun 2021 hingga 2025, terlihat bahwa sektor industri pengolahan mengalami peningkatan yang konsisten dari 17,98% pada tahun 2021 menjadi 19,96% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan kontribusi yang semakin besar dari sektor ini terhadap total PDRB daerah, mencerminkan adanya penguatan kapasitas produksi, peningkatan nilai tambah, dan adanya investasi. Sementara itu, rasio PDRB dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga mengalami pertumbuhan meskipun dalam skala yang lebih kecil, yakni dari 1,99% di tahun 2021 menjadi 2,17% pada tahun 2025, menandakan peningkatan aktivitas ekonomi di sektor pariwisata dan jasa pendukung.

Pertumbuhan kedua sektor ini, terutama industri pengolahan, menunjukkan adanya pergeseran ke arah struktur ekonomi yang lebih

produktif dan bernilai tambah tinggi. Kenaikan rasio PDRB pada sektor-sektor tersebut dapat diartikan sebagai sinyal positif terhadap peningkatan produktivitas ekonomi daerah secara keseluruhan.

Tabel II.40
Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025 (%)

Kontribusi Lapangan Usaha		2021	2022	2023	2024	2025
A	Industri Pengolahan	17,98	18,31	18,51	19,42	19,96
B	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,99	2,06	2,11	2,13	2,17

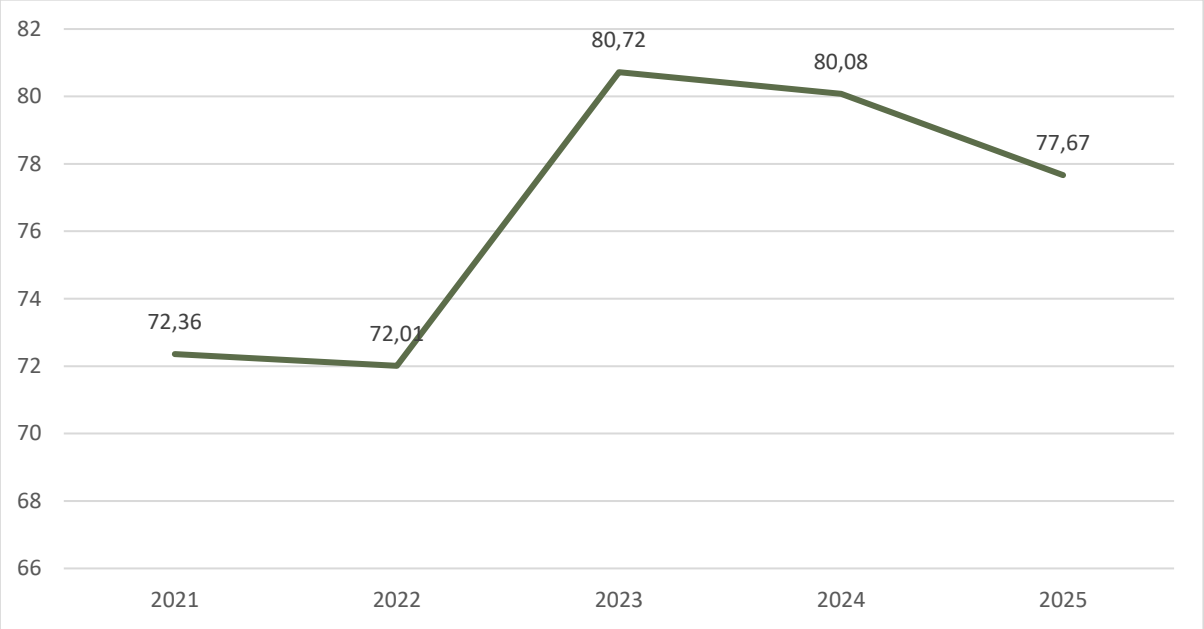
Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Trenggalek tahun 2021 hingga 2025 bergerak fluktuatif. TAPK tahun 2021 sebesar 72,36 persen dan sedikit menurun menjadi 72,01 di tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 8,71 persen menjadi 80,72 persen dan sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 80,08 persen. Kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja yang mengalami peningkatan menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan yang lebih baik sehingga perlu adanya kebijakan stimulus dalam upaya lebih meningkatkan geliat ekonomi masyarakat, khususnya dalam penyerapan angkatan kerja agar tidak menjadi pengangguran. Sedangkan tahun 2025 menurun menjadi 77,67. Penurunan ini disebabkan karena 1) peluang kerja yang tersedia tidak sesuai dengan keahlian tenaga kerja; 2) terbatasnya kesempatan kerja pada sektor formal dikarenakan perusahaan di Trenggalek yang tergolong perusahanan menengah-besar hanya sedikit.

Grafik II.19
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

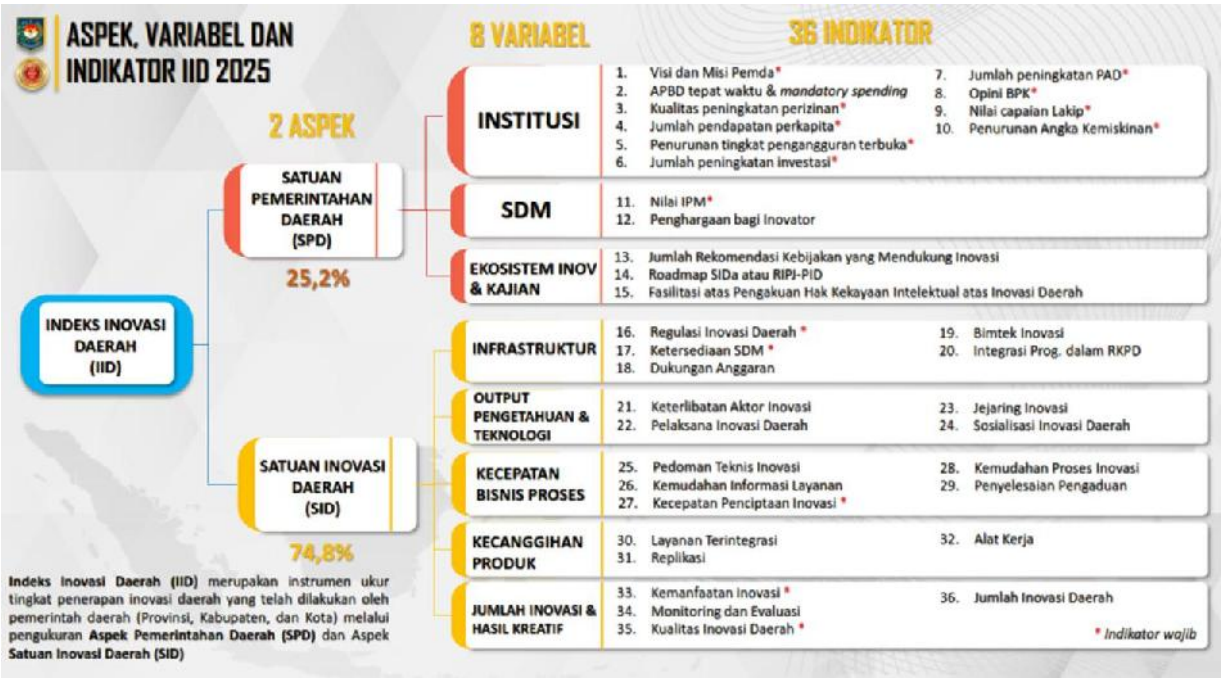


Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026

c. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan instrumen ukur tingkat penerapan inovasi daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten, Kota) melalui pengukuran aspek pemerintahan daerah (SPD) dan Aspek Satuan inovasi daerah (SID). Aspek pemerintahan daerah yang wajib diukur berjumlah 10 indikator yang terdiri atas indikator Visi dan Misi, Kualitas Peningkatan Perizinan,Jumlah Pendapatan Perkapita, Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Peningkatan Investasi, Jumlah Peningkatan PAD, Opini BPK, Nilai Capaian Lakip, Penurunan Angka Kemiskinan, dan Nilai IPM. Sedangkan indikator aspek Inovasi daerah yang wajib diukur berjumlah berjumlah 5 indikator terdiri atas indikator Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kecepatan Penciptaan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, dan Kualitas Inovasi Daerah.

Gambar II.13
Aspek, Variabel dan Indikator Indeks Inovasi Daerah



Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI, 2025

Kabupaten Trenggalek telah mengikuti penilaian Indeks Inovasi Daerah sejak tahun 2018. Pada tahun 2020 (Metode penghitungan lama), nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 3.342 (kategori sangat inovatif) dan masuk peringkat 47. Pada tahun 2021, skor Indeks Inovasi Kabupaten Trenggalek mencapai 55,28 (skala 0-100) dengan kategori inovatif dan menempati peringkat 49 dari 415 kabupaten se-Indonesia. Tahun 2022, skor indeks meningkat menjadi 56,38 dengan kategori inovatif dan berada di peringkat 58. Pada tahun 2023, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek kembali meningkat menjadi 62,76 dengan kategori sangat inovatif, menempati peringkat 24 dari 415 kabupaten se-Indonesia. Terbaru, pada tahun 2024, skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek naik menjadi 69,98 dengan kategori sangat inovatif, menempati peringkat 29 secara nasional. Peningkatan indeks terlihat dari peningkatan jumlah inovasi daerah, tahun 2023 terdapat 51 inovasi, tahun 2024 menjadi 98 inovasi yang dilaporkan, selain itu rata-rata skor kematangan inovasi daerah juga meningkat pada skor 100.

Tabel II.41
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Tahun	Indeks	Kategori	Peringkat
2021	55,28	Inovatif	49

Tahun	Indeks	Kategori	Peringkat
2022	56,38	Inovatif	58
2023	62,76	Sangat inovatif	24
2024	69,98	Sangat inovatif	29
2025	81,4	Sangat inovatif	12

Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI, 2026

Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 mencatatkan skor Indeks Inovasi Daerah (IID) sebesar 81,40 dan menempati peringkat ke-12 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur. Capaian ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025, serta menunjukkan peningkatan dibandingkan capaian sebelumnya 69,98 tahun 2024.

d. Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang jan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

Secara sederhana semakin tinggi rasio volume usaha koperasi maka semakin tinggi pula kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah. Semakin rendah rasio, berarti koperasi belum menjadi aktor ekonomi yang dominan atau signifikan dalam perekonomian daerah tersebut.

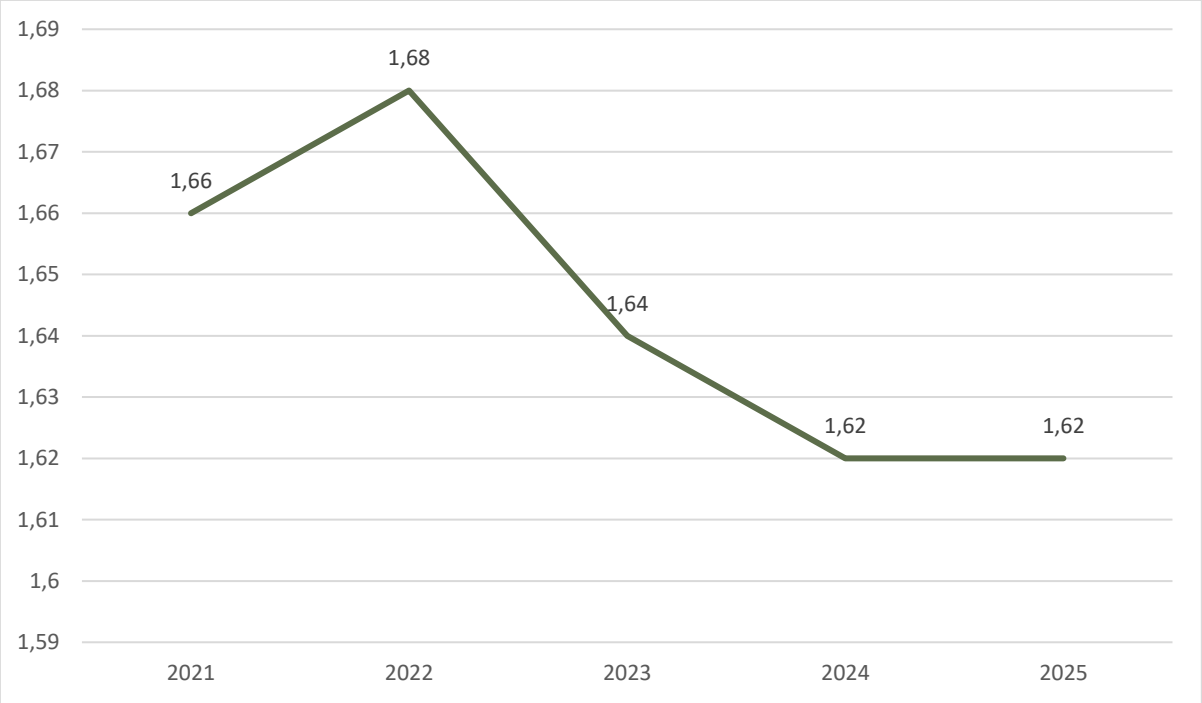
Tabel II.42
Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2021-2025

Tahun	Volume Usaha Koperasi	PDRB ADHB	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)
2021	318.822.097.135	19.198.246.560.000	1,66
2022	351.309.180.889	20.882.311.900.000	1,68
2023	373.901.422.753	22.740.050.560.000	1,64

Tahun	Volume Usaha Koperasi	PDRB ADHB	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB (%)
2024	394.390.151.284	24.364.740.000.000	1,62
2025	424.564.513.169	26.249.000.000.000	1,62

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2026 (diolah)

Grafik II.20
Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2026 (diolah)

Dari data pada tabel dan grafik di atas dapat dianalisa bahwa di Kabupaten Trenggalek Kontribusi Koperasi terhadap perekonomian mengalami kenaikan pada tahun 2021–2022. Pada tahun 2021, rasio berada di 1,66% dan terjadi kenaikan hingga mencapai 1,68% pada tahun 2022. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kontribusi koperasi terhadap PDRB semakin meningkat, yang bisa disebabkan oleh:

- Pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
- Penguatan kelembagaan koperasi .
- Peningkatan volume usaha per koperasi.

Terjadi penurunan ringan pada tahun 2023–2024. Setelah puncaknya di 2022, terjadi penurunan rasio menjadi 1,64% di 2023, turun lagi ke 1,62% di 2024 dan tetap sebesar 1,62% di tahun 2025. Hal ini disebabkan karena beberapa usaha koperasi mengalami penurunan terkait simpan pinjam dan

pertokoan, ini disebabkan adanya persaingan dari pihak perbankan yang memberikan bunga sangat rendah (KUR), partisipasi dan kesadaran anggota masih sangat rendah sehingga lebih memilih bertransaksi di luar koperasi, pengurus kurang berani menambah unit usahanya dikarenakan takut merugi, banyak koperasi beroperasi dan diurus secara sambilan sehingga pertumbuhan bisnisnya juga kurang signifikan.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau

Penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Trenggalek terus diimplementasikan dalam pembangunan perekonomian daerah. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan.

Capaian kinerja pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek juga tercermin dari dinamika sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya pada kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selama periode 2021 hingga 2025, sektor ini mengalami perkembangan yang beragam. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi sektor ini tercatat negatif sebesar -0,72 persen dan sebesar -1,46 persen pada tahun 2022. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2023 dengan pertumbuhan positif sebesar 2,72 persen, meskipun kembali melambat menjadi 0,31 persen pada tahun 2024 dan meningkat sebesar 4,00 persen.

Kondisi tersebut turut mempengaruhi kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap struktur PDRB Kabupaten Trenggalek. Tercatat, kontribusi sektor ini mengalami penurunan secara bertahap dari 27,00 persen pada tahun 2021 menjadi 24,83 persen pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun sektor pertanian masih memiliki peran signifikan, namun kontribusinya terhadap perekonomian daerah cenderung menurun. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi sektor ini secara berkelanjutan agar tetap menjadi pilar penting dalam struktur ekonomi daerah.

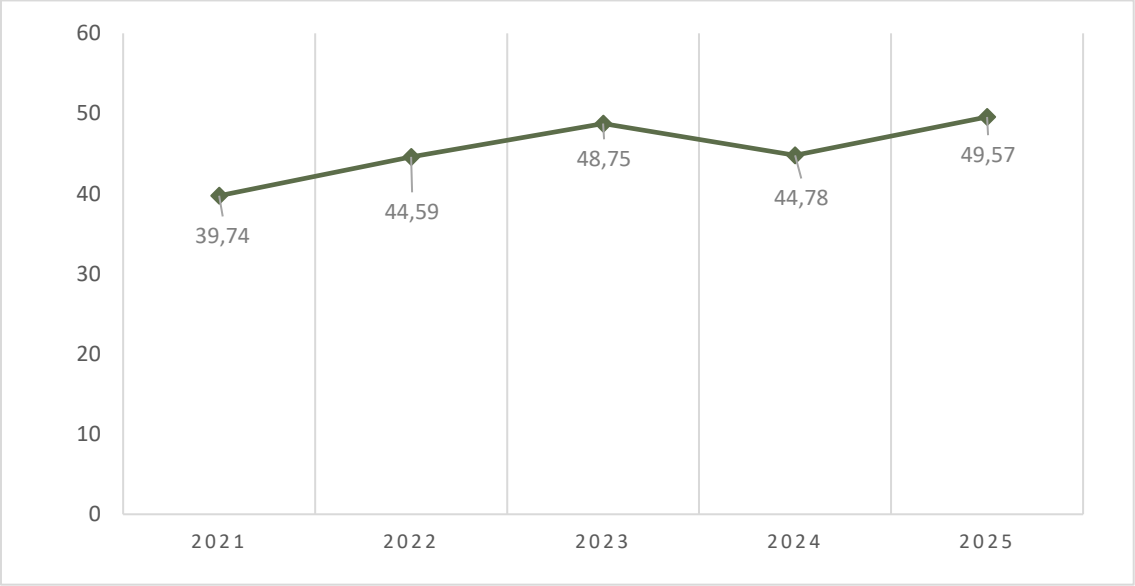
Tabel II.43
Capaian Perekonomian Sektor Pertanian
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,72	-1,46	2,72	0,31	4,00
Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,00	25,89	25,98	24,86	24,83

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026

Terhitung sejak tahun 2021 hingga 2023, Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren positif dengan skor berada pada kategori Sedang Tier 2, yaitu dalam rentang capaian 39–48. Capaian tahun 2023 bahkan hampir menyentuh ambang batas kategori Baik Tier 1 (50,01). Namun, pada tahun 2024 skor mengalami penurunan menjadi 44,78 dan kembali naik pada tahun 2025 menjadi 49,57. Peningkatan capaian ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya implementasi pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam proses pembangunan daerah.

Grafik II.21
Indeks Ekonomi Hijau
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2026

Adapun, ekonomi hijau merupakan model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Penerapan ekonomi hijau diharapkan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Di Indonesia, implementasi ekonomi hijau diukur menggunakan Indeks Ekonomi Hijau, yang merepresentasikan progres dan capaian transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau secara tangible, representatif, dan akurat. Berdasarkan klasifikasi Bappenas, Indeks Ekonomi Hijau terbagi menjadi 6 (enam) kategori sebagai berikut:

Tabel II.44
Klasifikasi Skor Indeks Ekonomi Hijau

Skor Indeks Ekonomi Hijau	Kategori
0,00 - 25,00	Kurang
25,01 - 37,50	Sedang Tier 1
37,51 - 50,00	Sedang Tier 2
50,01 - 62,50	Baik Tier 1
65,51 - 75,00	Baik Tier 2
75,01 - 100,00	Sangat Baik

Sumber : Bappenas, 2024

2.1.3.4 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global dalam pembangunan daerah menjadi pendorong penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah, termasuk dalam memperkuat peran dalam rantai pasok global. Di Kabupaten Trenggalek, arah pembangunan tersebut tercermin dari indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Net Ekspor Barang dan Jasa dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan pengeluaran.

Kinerja PMTB di Trenggalek dalam lima tahun terakhir menunjukkan stabilitas kontribusi terhadap struktur ekonomi daerah, meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Pada tahun 2021, PMTB menyumbang 18,96

persen terhadap PDRB dan tetap berada pada kisaran 18–19 persen hingga tahun 2025. Sementara itu, kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa masih menunjukkan tren negatif, yang mengindikasikan bahwa nilai impor barang dan jasa masih lebih tinggi dibandingkan ekspor. Pada tahun 2025, net ekspor tercatat sebesar -4,85 persen, setelah sebelumnya mencapai angka terendah -1,45 persen di tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penguatan sektor produksi lokal dan strategi hilirisasi untuk meningkatkan daya saing ekspor Kabupaten Trenggalek secara berkelanjutan.

Tabel II.45
Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Ekonomi (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,26	1,35	5,31	5,94	8,65
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Distribusi PDRB (%)					
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	18,96	18,47	18,75	18,94	19,44
b. Net Ekspor Barang dan Jasa	-3,85	-1,45	-4,08	-4,76	-4,85

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026

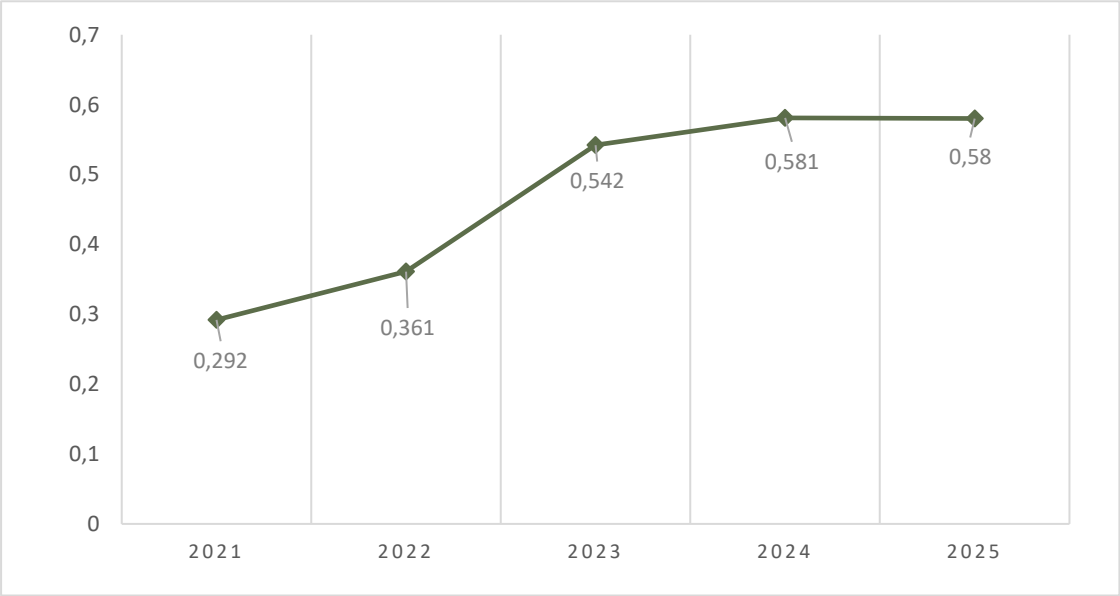
Salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah penanaman modal, termasuk dalam memberikan kemudahan dan mempercepat layanan perizinan usaha. Pada tahun 2020, realisasi peningkatan jumlah izin usaha yang terbit di Kabupaten Trenggalek mencapai 5,38 persen, namun mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 1,22 persen. Tren positif mulai terlihat pada tahun 2022 dengan kenaikan signifikan menjadi 39,3 persen dan berlanjut pada tahun 2023 yang mencapai 50 persen. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan efektivitas pelayanan perizinan.

Dari sisi nilai investasi, tren juga menunjukkan pola fluktuasi. Pada tahun 2021, nilai investasi tercatat sebesar 0,292 triliun. Namun, terjadi kenaikan pada tahun 2022 sebesar Rp 0,361 triliun dan melonjak tajam pada tahun 2023 menjadi Rp 0,542 triliun. Pada tahun 2024, nilai investasi kembali meningkat mencapai Rp 0,581 triliun, dan tahun 2025 sebesar Rp 0,58 triliun. Fluktuasi ini dipengaruhi oleh ketidakpastian makro ekonomi global dan nasional, serta kendala internal berupa tata ruang yang masih perlu direvisi.

Untuk mempercepat pencapaian target investasi, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengoptimalkan dua inovasi utama, yaitu lelang investasi dan program Jemput Bola Layanan (JEMPOL). Lelang investasi

difokuskan pada potensi aset pemerintah, korporasi, dan produk unggulan daerah dengan menyasar calon investor yang telah memiliki jejaring bisnis di Trenggalek. Sementara itu, inovasi JEMPOL diarahkan untuk mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat melalui kegiatan *Meningdeh*, *Meningpas*, dan donasi NIB.

Grafik II.22
Realisasi Investasi (Triliun Rp)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas PMPTSP Kab. Trenggalek, 2026

2.1.3.5 Transformasi Digital

Transformasi digital menjadi elemen kunci dalam mendukung akselerasi pembangunan di berbagai sektor, baik pada tataran nasional maupun daerah. Pemanfaatan teknologi digital tidak hanya mendorong efisiensi dalam birokrasi pemerintahan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang cepat, tepat, dan transparan. Melalui digitalisasi, tata kelola pemerintahan dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan responsif, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

a. Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memetakan kondisi masyarakat digital di seluruh Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota. IMDI mengukur empat pilar utama, yaitu Infrastruktur dan Ekosistem, Keterampilan Digital, Pemberdayaan, dan Pekerjaan, dengan tujuan mendukung visi Indonesia Digital 2045. Infrastruktur digital

merupakan pondasi utama dalam menentukan kualitas ekosistem dan lingkungan dalam masyarakat digital. Pilar ini menggarisbawahi pentingnya kesetaraan akses infrastruktur digital. yang terbentuk dari 3 sub pilar yaitu Akses dan Adopsi Teknologi Digital yang berasal dari data akses dan penggunaan TIK, dan adopsi teknologi yang dilakukan sektor privat/bisnis; Ekosistem Pembelajaran yang berasal dari jumlah sekolah dari tingkat dasar sampai menengah dengan akses internet, serta jumlah pendidikan tinggi bidang TIK; dan Digitalisasi Pemerintah yang berasal dari data Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pengukuran ini dilakukan secara kuantitatif menggunakan data primer dan sekunder untuk memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai perkembangan digital masyarakat di berbagai wilayah. Di Kabupaten Trenggalek, skor IMDI menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 hingga 2025. Pada 2022, skor IMDI Trenggalek tercatat sebesar 37,88, kemudian meningkat menjadi 41,93 pada 2023, mencapai 46,75 pada 2024 dan menurun menjadi 38,54 pada tahun 2025. Pada pilar Infrastruktur dan Ekosistem yang naik dari 42,7 (2022) menjadi 67,81 (2025). Pilar Keterampilan Digital juga menurun dari 58,55 menjadi 35,06 di tahun 2025. Meski demikian, Pilar Pemberdayaan masih menjadi tantangan utama dengan skor yang relatif rendah, meskipun mengalami peningkatan dari 15,45 pada 2022 menjadi 25,83 pada 2024, dan menurun menjadi 15,39 pada 2025. Pilar Pekerjaan juga mengalami fluktuasi, turun pada 2023 tetapi kemudian naik kembali menjadi 43,65 pada 2025.

Tabel II.46
Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2025

Pilar	2022	2023	2024	2025
Pilar Infrastruktur Dan Ekosistem	42,7	61,77	65,39	67,81
Pilar Ketrampilan Digital	52,76	51,77	58,55	35,06
Pilar Pemberdayaan	15,45	24,53	25,83	15,39
Pilar Pekerjaan	42,02	28,79	38,91	43,65
IMDI	**37,88**	**41,93**	**46,75**	**38,54**

Sumber: Badan Pengembangan SDM Komdigi, 2026

Secara keseluruhan, IMDI Kabupaten Trenggalek menandakan bahwa meskipun ada kemajuan pada rentang waktu 2022-2024, tetapi menurun pada tahun 2025, sehingga masih terdapat ruang besar untuk memperkuat setiap pilar dalam IMDI Kabupaten Trenggalek, berupa penyediaan internet gratis di wilayah Kabupaten Trenggalek, fasilitasi pembuatan aplikasi, dan penyediaan perangkat server. Dukungan berkelanjutan dan kolaborasi

multisektor akan menjadi kunci untuk membawa Trenggalek ke kategori yang lebih tinggi dalam IMDI di masa mendatang.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Infrastruktur merupakan semua fasilitas berbentuk fisik maupun non fisik yang dibangun guna mendukung kegiatan masyarakat. Infrastruktur berkaitan dengan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras maupun perangkat lunak. Pembangunan infrastruktur diperlukan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat serta mendukung jaringan struktur dasar agar pembangunan daerah tercapai. Pembangunan infrastruktur berkaitan erat dengan perkembangan daerah otonom terutama dari segi demografi. Kondisi ini akan membawa tantangan tersendiri bagi daerah. Dengan makin banyaknya penduduk yang tinggal di suatu daerah maka tuntutan akan pemenuhan kebutuhan dan pelayanan mendasar juga akan meningkat.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai berkorelasi dengan tingkat perkembangan wilayah. Infrastruktur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas akan menjadi input bagi proses produksi dan memperlancar distribusi barang ke daerah lain. Infrastruktur juga merupakan faktor pertimbangan bagi tumbuhnya investasi di daerah. Semakin besar skala usaha maka kebutuhan akan infrastruktur juga akan semakin besar. Implikasinya, jika pemerintah daerah menginginkan masuknya investor dengan skala usaha besar maka pemerintah harus mampu mempersiapkan skala infrastruktur yang besar guna menunjang kegiatan usaha investor. Ketersediaan infrastruktur di daerah merupakan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

a. Jalan Kondisi Mantab

Berdasarkan data kondisi panjang jalan di Kabupaten Trenggalek tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa terjadi perubahan total panjang jalan. Pada tahun 2020 hingga 2023, total panjang jalan tercatat konstan yaitu sebesar 931,23 km. Namun pada tahun 2024 total panjang jalan menurun menjadi 859,96 km (SK Jalan Nomor 188.45/500/406.001.3/2023). Penurunan panjang jalan ini dipengaruhi karena adanya revisi terhadap SK ruas jalan Kabupaten dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan ketentuan standar jalan yang berlaku .

Jika dilihat lebih rinci, kondisi jalan pada tahun 2020 hingga 2023 didominasi oleh jalan dengan kondisi baik, yaitu sekitar 572,80 km pada 2020 dan 2022, serta sedikit menurun menjadi 569,90 km pada 2021 dan 543,80 pada 2023. Jalan dengan kondisi sedang berkisar antara 110,19 km

hingga 168,68 km, sedangkan kondisi rusak ringan masing-masing berada pada kisaran 20–30 km dan rusak berat sekitar 219 km. Adapun pada tahun 2024 dan 2025, karena total panjang jalan mengalami perubahan maka untuk rincian kondisi jalan juga berubah. Untuk kondisi jalan baik mengalami penurunan yang sangat signifikan, pada tahun 2024 sekitar 393,23 km menjadi 318,43 km pada tahun 2025. Sementara kondisi jalan sedang, rusak ringan, dan rusak berat mengalami peningkatan. Untuk kondisi jalan sedang tahun 2024 sekitar 226,28 km meningkat menjadi 256,79 km pada tahun 2025. Kondisi jalan rusak ringan meningkat dari 118,70 km pada tahun 2024 menjadi 120,05 tahun 2025. Kondisi rusak berat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 121,76 km pada tahun 2024 menjadi 164,69 km pada tahun 2025. Kondisi kerusakan infrastruktur jalan yang terus meningkat salah satunya disebabkan karena meningkatnya intensitas kejadian bencana banjir dan tanah longsor. Untuk itu dalam perencanaan pembangunan jalan kedepan perlu diperhatikan terkait dengan kualitas infrastruktur jalan yang tahan terhadap bencana.

Berdasarkan data persentase jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) selama periode tahun 2020-2023 mengalami kondisi yang fluktuatif yaitu 74,24% (2020), 73,03% (2021), 74,24% (2022), 76,51% (2023), dan pada tahun 2024-2025 cenderung mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana dari 72,18% pada tahun 2024 menjadi 66,89% pada tahun 2025. Kondisi ini berbanding lurus dengan data kondisi jalan yang berarti secara umum tidak terdapat peningkatan signifikan dalam kualitas kemantapan jalan pada rentang waktu tersebut. Penurunan kondisi kemantapan jalan utamanya dikarenakan cuaca ekstrem yang menyebabkan bencana banjir, genangan, dan tanah longsor. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih fokus terhadap perbaikan jalan rusak, terutama untuk menjaga konsistensi kemantapan jalan.

Tabel II.47
Kondisi Jalan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2025

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025*
Jalan dalam kondisi mantap	74,24%	73,03%	74,24%	76,51%	72,04%	66,89%
Kondisi Baik	572,80	569,90	572,80	543,80	393,23	318,43
Kondisi Sedang	118,55	110,19	118,55	168,68	226,28	256,79
Kondisi Rusak Ringan	20,39	29,60	20,39	19,46	118,70	120,05
Kondisi Rusak Berat	219,49	221,54	219,49	199,29	121,76	164,69
Jumlah	**931,23**	**931,23**	**931,23**	**931,23**	**859,96**	**859,96**

**** kondisi jalan tahun 2025 s.d bulan Mei***

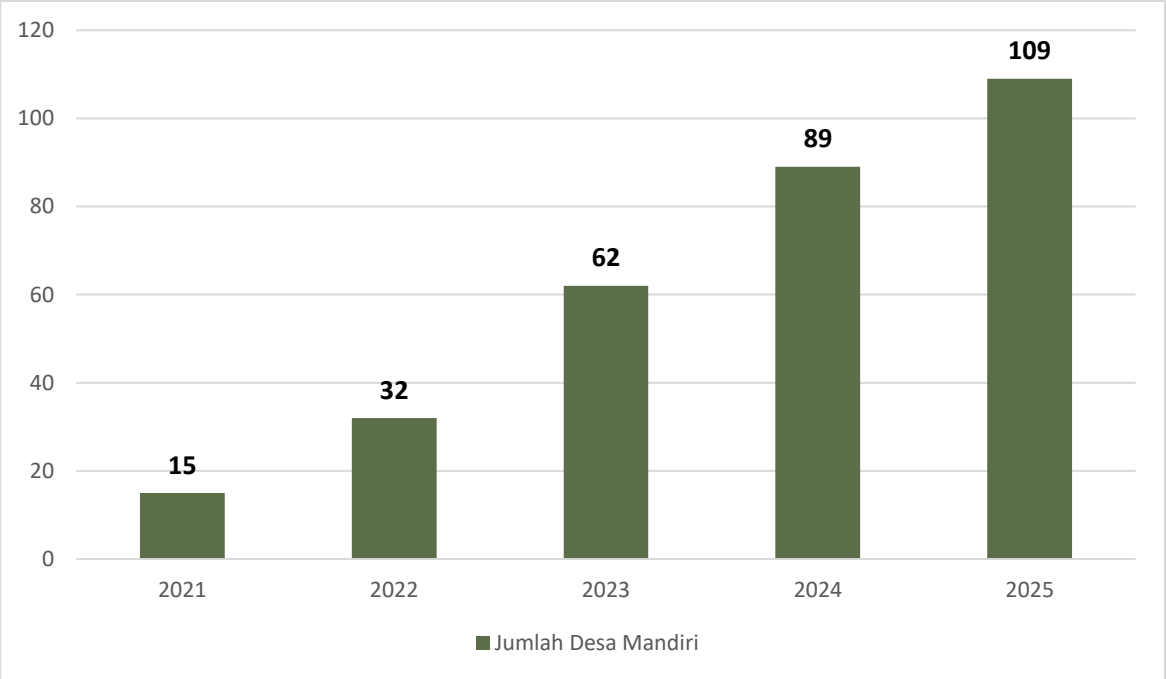
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Trenggalek, 2026

b. Desa Mandiri

Pembangunan desa yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam mewujudkan keseimbangan pertumbuhan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Desa tidak lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal, melainkan sebagai simpul strategis dalam mendukung penguatan ekonomi lokal dan nasional. Jumlah desa mandiri di Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, terdapat 15 desa mandiri atau sebesar 9,87 persen dari total desa berdasarkan Keputusan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2022, dengan total 32 desa mandiri atau 21,05 persen sesuai Keputusan Menteri Desa Nomor 80 Tahun 2022.

Pada tahun 2023, jumlah desa mandiri kembali mengalami lonjakan signifikan menjadi 62 desa atau setara dengan 40,79 persen dari total desa, berdasarkan Keputusan Menteri Desa Nomor 174 Tahun 2023. Sementara itu, pada tahun 2024, persentase desa mandiri terus meningkat mencapai 58,55 persen, dan tahun 2025 kembali meningkat menjadi 71,70. Perkembangan ini mencerminkan efektivitas berbagai program pemberdayaan dan pembangunan desa yang telah dilaksanakan, serta menunjukkan kemajuan dalam kemandirian desa dalam aspek ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.

Grafik II.23
Jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Trenggalek, 2026

Peningkatan jumlah desa mandiri ini mencerminkan keberhasilan program pembangunan desa yang dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek, khususnya dalam upaya mendorong kemandirian desa secara menyeluruh—baik dari aspek ekonomi lokal, kualitas layanan dasar, maupun tata kelola pemerintahan desa. Pertumbuhan yang konsisten ini juga menjadi indikator penting atas peningkatan kapasitas desa dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan. Dengan semakin banyaknya desa yang mandiri, diharapkan ketimpangan pembangunan antar wilayah semakin menurun dan kesejahteraan masyarakat desa semakin meningkat.

Pengukuran Persentase Desa Mandiri menggunakan basis data Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. Indeks Desa bertujuan mengukur tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Desa yang berkelanjutan. Melalui Indeks Desa, pemerintah dapat menyalurkan sumber daya secara tepat guna serta memantau kemajuan pembangunan desa secara berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat dalam berbagai aspek, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Indeks Desa disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa. Keenam Dimensi menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa.

c. Persentase Luasan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani

Permukiman kumuh merupakan kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan hunian, baik dari aspek kepadatan kumuhbangunan, akses infrastruktur dasar, maupun sanitasi lingkungan yang tidak memadai. Keberadaan kawasan kumuh, khususnya yang berada di bawah luasan 10 hektar, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam

mewujudkan lingkungan permukiman yang sehat, layak, dan berkelanjutan. Penanganan kawasan kumuh tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas fisik lingkungan, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkomitmen untuk melakukan penanganan kawasan kumuh secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor serta pelibatan aktif masyarakat. Penanganan kawasan kumuh juga diarahkan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya target 11.1, yaitu memastikan akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau bagi semua.

Pada tahun 2022, kawasan kumuh di bawah 10 hektare di Kabupaten Trenggalek sudah tertangani. Berdasarkan SK penetapan kawasan kumuh tahun 2020 meliputi kecamatan Munjungan dan kecamatan Watulimo serta SK penetapan kawasan kumuh tahun 2021 meliputi Kecamatan Trenggalek dan Kecamatan Durenan, pemerintah daerah sudah melakukan penanganan kawasan kumuh tersebut sehingga capaiannya sebesar 100%. Namun demikian, kawasan kumuh bisa muncul kembali karena berbagai faktor baik dari segi fisik, ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Oleh sebab itu perlu dilakukan identifikasi kembali kawasan kumuh di Kabupaten Trenggalek sebagai bahan penentuan baseline awal perencanaan. Identifikasi tersebut kemudian ditetapkan oleh Bupati Trenggalek. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk penguatan perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan program penataan kawasan permukiman.

Tabel II.48
Pengurangan Luas Kawasan Kumuh

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Pengurangan luasan kawasan kumuh (di bawah 10 Hektar)	99,98	100	100	100	100

Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2026

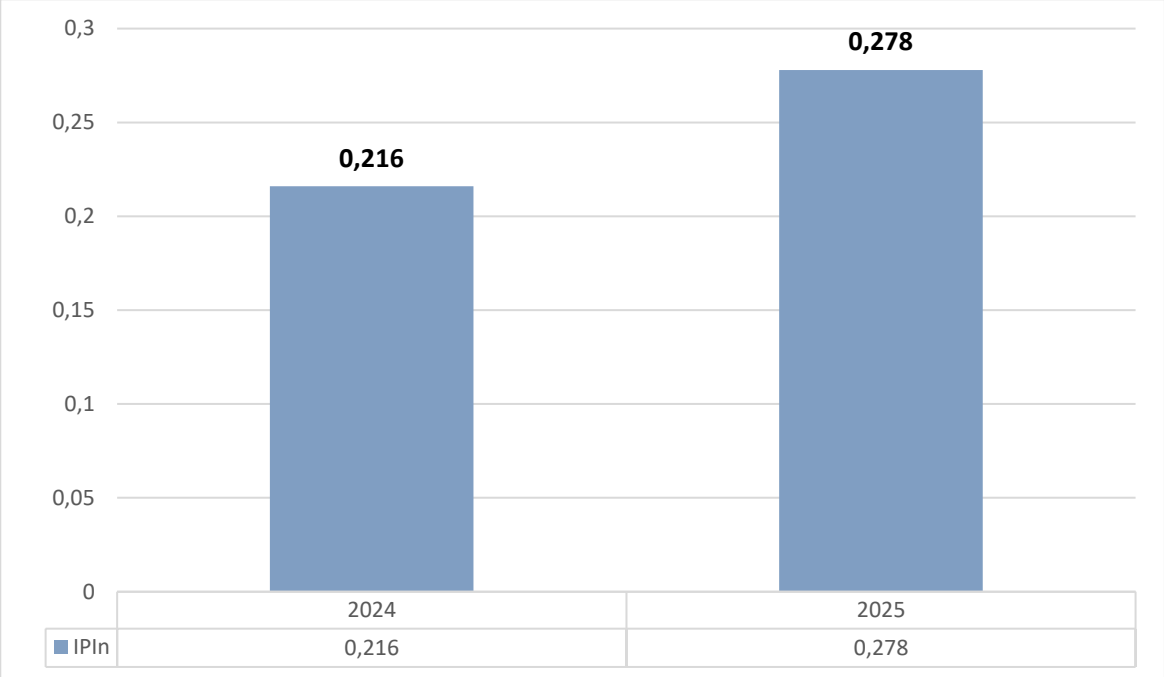
d. Indeks Pemerataan Infrastruktur (IPIn)

Pemerataan infrastruktur merupakan aspek penting dalam memastikan keadilan pembangunan antar kawasan di dalam suatu daerah. Akses yang setara terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, air minum, air limbah, rumah layak huni, dan persampahan sangat menentukan kualitas hidup masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Ketimpangan distribusi infrastruktur dapat memperlebar kesenjangan sosial

dan ekonomi antarwilayah, sehingga perlu ditangani secara terarah dan berkelanjutan.

Indeks Pemerataan Infrastruktur (IPIn) merupakan indikator baru yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan layanan infrastruktur berbasis kewilayahan di Kabupaten Trenggalek. Semakin kecil nilai indeks yang ditunjukkan, maka semakin baik pemerataan infrastruktur di wilayah tersebut. Indeks ini menjadi acuan penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan wilayah yang berkeadilan dan inklusif. Dalam Indeks Pemerataan Infrastruktur disamping memperhatikan nilai IPIn juga perlu memperhatikan nilai rata-rata kinerja setiap sektor infrastruktur, hal ini untuk mengetahui apakah pemerataan infrastruktur ke arah peningkatan kinerja atau penurunan kinerja.

Grafik II.24
Indeks Pemerataan Infrastruktur (IPIn)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024-2025



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Pada tahun 2024, nilai IPIn Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 0,216 poin, yang menjadi baseline awal dalam periode perencanaan pembangunan jangka menengah. Nilai ini menunjukkan bahwa pemerataan infrastruktur masih perlu ditingkatkan untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terpencil, atau kantong kemiskinan, dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata. Selanjutnya pada tahun 2025 realisasi Indeks Pemerataan Infrastruktur mengalami kenaikan secara signifikan

menjadi sebesar 0,278 poin dari target yang ditetapkan sebesar 0,215 poin atau tercapai sebesar 77,34 persen. Kenaikan tersebut mencerminkan adanya fenomena peningkatan ketimpangan infrastruktur antar wilayah di Kabupaten Trenggalek. Beberapa faktor yang menjadi penyebab peningkatan ketimpangan kondisi Infrastruktur antara lain :

1. Tingkat kemantaban jalan tahun 2025 lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2024;
2. Jalan dalam kondisi mantab sebagian besar masih terkonsentrasi di kawasan kutub pertumbuhan;
3. Distribusi fasilitas persampahan seperti TPS dan TPS 3R belum tersebar di semua desa;
4. Meningkatnya kerusakan jaringan irigasi;
5. Menurunnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat.

Sedangkan terdapat beberapa faktor yang menjadi pengungkit antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses dan pemerataan penyediaan RLH;
2. Meningkatnya akses dan pemerataan sanitasi layak;
3. Meningkatnya akses dan pemerataan air bersih.

e. Indeks Infrastruktur

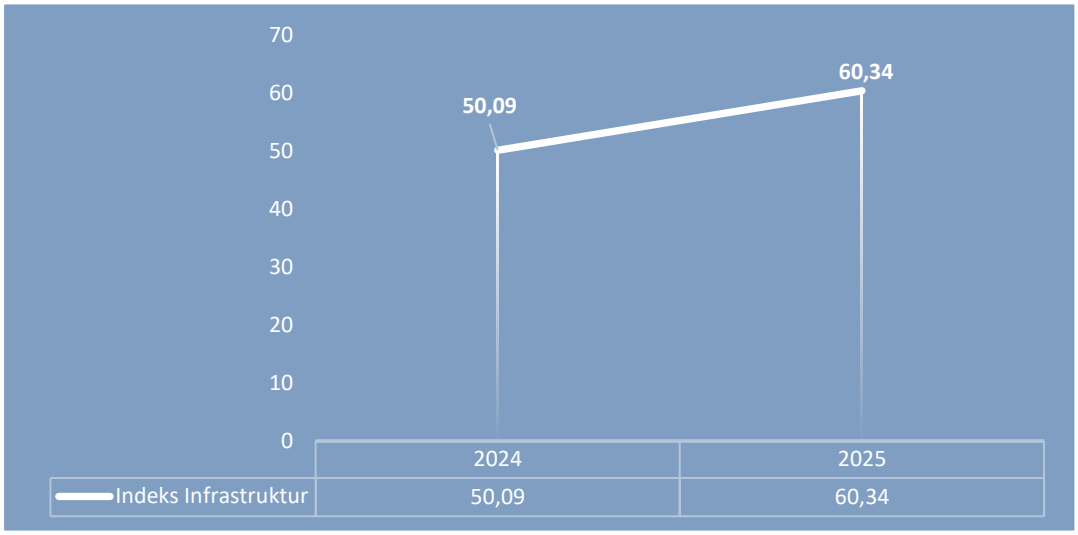
Indeks Layanan Infrastruktur merupakan indikator utama yang mengukur kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar di suatu daerah. Bagi Kabupaten Trenggalek, indikator ini merupakan indikator baru yang mulai diukur sejak tahun 2024. Infrastruktur yang memadai sangat krusial untuk menunjang kelancaran pembangunan daerah, karena tanpa dukungan infrastruktur yang baik, proses pembangunan akan terhambat dan hasilnya tidak optimal. Infrastruktur yang berkualitas juga meningkatkan aksesibilitas antarwilayah, mobilitas ekonomi, serta pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Trenggalek berperan sebagai penyedia layanan yang harus memenuhi harapan masyarakat melalui peningkatan kualitas fasilitas publik yang layak dan sesuai standar.

Indeks Infrastruktur merupakan indikator komposit yang mengukur tingkat ketersediaan dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah, mencakup sektor jalan, jembatan, transportasi, irigasi, drainase, air minum (bersih), sanitasi, persampahan, perumahan, dan bangunan gedung. Nilai indeks yang tinggi mencerminkan cakupan layanan pembangunan infrastruktur yang berkontribusi pada kualitas layanan dasar. Indeks infrastruktur merupakan rata-rata capaian tahunan dari 13 indikator diantaranya:

1. Persentase jalan mantab
2. Persentase jembatan berfungsi baik

3. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
4. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan aman
5. Persentase panjang drainase dalam kondisi baik
6. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
7. Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik
8. Persentase luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani
9. Proporsi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, berkelanjutan
10. Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)
11. Persentase rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah
12. Persentase sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah
13. Indeks aksesibilitas

Grafik II.25
Indeks Infrastruktur
Kabupaten Trenggalek Tahun 2024-2025



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, 2026

Pada tahun 2024, Indeks Infrastruktur Kabupaten Trenggalek berada pada angka 50,09 poin, yang menjadi baseline awal dalam periode perencanaan pembangunan daerah. Angka ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan kualitas infrastruktur di Kabupaten Trenggalek masih berada pada tingkat sedang, namun masih terdapat ruang peningkatan, khususnya dalam menjangkau wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses infrastruktur dasar. Selanjutnya realisasi Indeks Infrastruktur mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2025 yang mencapai 60,34 poin dari target yang ditetapkan sebesar 51,95 poin atau tercapai sebesar 100 persen.

f. Indeks Kota Hijau

Pembangunan kota yang berwawasan lingkungan merupakan pilar penting dalam mewujudkan kawasan perkotaan yang berkelanjutan, sehat, dan layak huni. Dalam konteks ini, Indeks Kota Hijau (IKH) menjadi indikator strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian kota atau kawasan perkotaan yang ramah lingkungan berdasarkan dimensi tata ruang, ruang terbuka hijau, transportasi berkelanjutan, pengelolaan air dan limbah, efisiensi energi, dan partisipasi masyarakat. IKH tidak hanya mencerminkan kondisi lingkungan fisik, tetapi juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di kawasan perkotaan. Peningkatan indeks ini berkontribusi langsung terhadap ketahanan kota dalam menghadapi perubahan iklim, mengurangi risiko bencana lingkungan, serta meningkatkan kualitas hidup penduduk kota.

Untuk menghitung indeks kota hijau, mulai tahun 2024 Kabupaten Trenggalek mengacu pada pengukuran keberlanjutan kota yang dilakukan oleh Universitas Indonesia berupa UI Green City Metric. UI Green City Metric merupakan pemeringkatan bagi kabupaten/kota di Indonesia di bidang keberlanjutan dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2022. UI Green City Metric terdiri dari 6 kategori penilaian, antara lain Penataan Ruang dan Infrastruktur (SI), Energi dan Perubahan Iklim (EC), Tata Kelola Sampah dan Limbah (WS), Tata Kelola Air (WR), Akses dan Mobilitas (TR), serta Tata Pamong/Governance (GV). Adapun metodologi pengukuran Indeks Kota Hijau (IKH) Kabupaten Trenggalek sejak tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar II.14
Metodologi Pengukuran Indeks Kota Hijau (IKH)
Kabupaten Trenggalek



Sumber: Universitas Indonesia, 2025

Pada tahun 2024, Indeks Kota Hijau Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 61,5%, yang menjadi baseline untuk periode perencanaan RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar komponen kota hijau telah mulai diimplementasikan, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam aspek energi dan perubahan iklim, akses dan mobilitas, tata kelola sampah, dan tata kelola air. Selanjutnya realisasi pada tahun 2025 mengalami kenaikan signifikan mencapai 69,33 poin dari target sebesar 61,6 atau tercapai sebesar 100 persen. Adapun upaya yang dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mengintervensi indikator Indeks Kota Hijau antara lain :

1. Melakukan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi;
2. Melakukan aktivitas yang bersifat gerakan terhadap peningkatan kualitas capaian dari target-target kota hijau yang ditetapkan;
3. Melakukan pencarian terhadap alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur;
4. Peningkatan upaya pengolahan limbah dengan memanfaatkan edukasi siswa/siswi melalui program Sangu Sampah;
5. Peningkatan akses dan perluasan layanan transportasi umum.

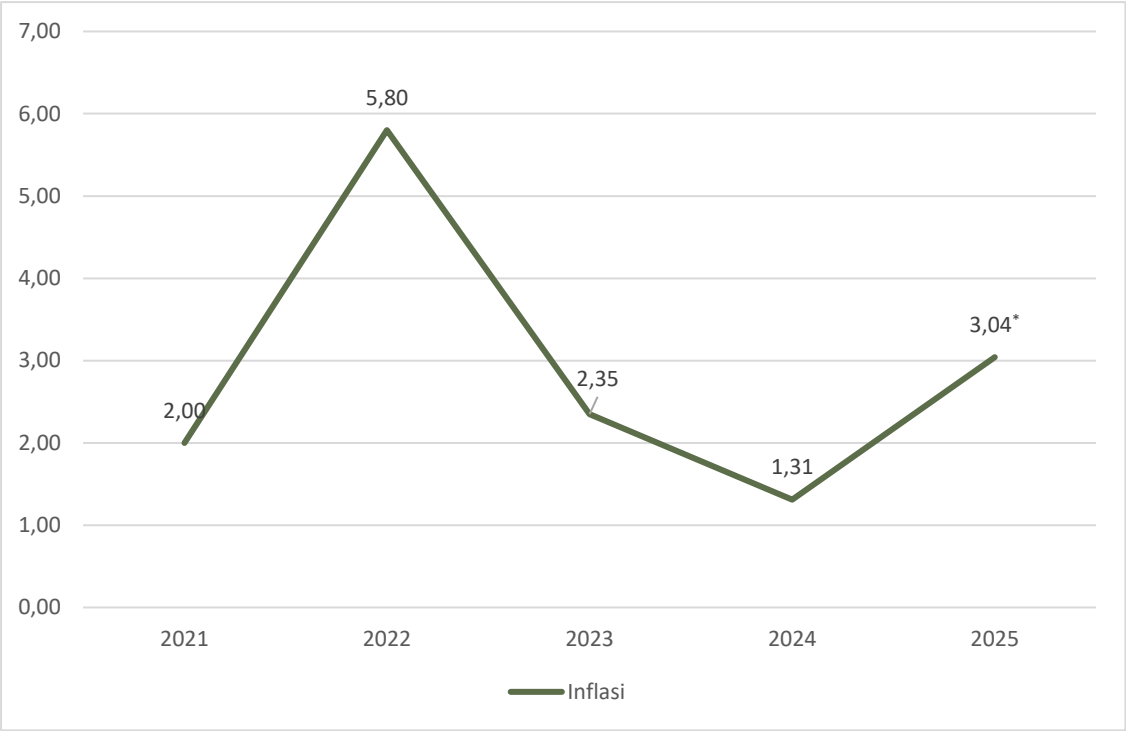
2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Stabilitas ekonomi makro merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional, yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, menjaga stabilitas moneter, serta memperkuat sektor keuangan. Upaya ini dilakukan melalui kebijakan yang bersifat pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan guna menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan inklusif. Dengan stabilitas ekonomi makro yang terjaga, pemerintah dapat memastikan daya tahan ekonomi nasional terhadap tekanan global, sekaligus mendorong peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi kesejahteraan yang lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.

a. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan indikator ekonomi yang menunjukkan persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Di Kabupaten Trenggalek, tingkat inflasi berdasarkan PDRB pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. Hal ini mencerminkan bahwa biaya produksi yang ditanggung oleh pelaku ekonomi berubah-ubah setiap tahunnya, bisa lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tergantung pada berbagai faktor seperti kondisi pasar, kebijakan pemerintah, serta dinamika pasokan dan permintaan.

Grafik II.26
Tingkat Inflasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kota Madiun, 2025
**BPS Kab. Tulungagung, 2026*

Secara rinci, inflasi di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 tercatat sebesar 2,00%. Pada tahun 2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan menjadi 5,80%. Namun tren tersebut berbalik arah di tahun 2023 dengan mulai pulihnya ekonomi yang ditunjukkan dengan inflasi yang turun menjadi 2,35%, terus menurun pada tahun 2024 dengan angka inflasi sebesar 1,31% dan naik kembali menjadi 3,04% di tahun 2025.

b. Indeks Infrastruktur Permukiman pada wilayah kantong kemiskinan

Indeks Infrastruktur Permukiman merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kondisi sarana dan prasarana dasar di suatu wilayah, khususnya dalam mendukung kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur permukiman mencakup ketersediaan dan kualitas fasilitas dasar seperti akses air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, drainase, dan pengelolaan sampah. Keberadaan infrastruktur ini memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin standar pelayanan dasar yang layak. Kondisi infrastruktur di wilayah kantong kemiskinan menjadi perhatian tersendiri, mengingat keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan

masyarakat. Pembangunan infrastruktur permukiman di wilayah tersebut menjadi langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Selain itu, peningkatan infrastruktur permukiman juga mendorong konektivitas sosial dan memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif.

Pada tahun 2024, nilai Indeks Infrastruktur Permukiman di wilayah kantong kemiskinan Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 80,59. Angka ini menjadi titik awal (baseline) yang merefleksikan kondisi eksisting dan menjadi dasar perencanaan pembangunan ke depan. Nilai tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam penyediaan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas, terutama pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Sedangkan pada tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi sebesar 80,98. Capaian ini mencerminkan peningkatanan kualitas infratruktur permukiman pada wilayah kantong kemiskinan yang meliputi layanan Air Minum; Air Limbah Domestik; Kelayakan Tempat Tinggal; Persampahan; dan Jalan.

c. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja tata kelola keuangan pemerintah daerah secara kuantitatif dan objektif. IPKD mencerminkan tingkat kepatuhan, efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance). Indeks ini menjadi alat evaluasi penting dalam mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil. Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik memiliki korelasi langsung terhadap kapasitas fiskal daerah dan pencapaian target pembangunan. Penguatan dalam pengelolaan keuangan akan meningkatkan kepercayaan publik, memperbaiki iklim investasi, serta menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang optimal. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan tepat sasaran juga berperan penting dalam mendukung pemulihan ekonomi dan keberlanjutan program pembangunan.

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD Kabupaten Trenggalek tahun 2020 sebesar 61,93, tahun 2021 sebesar 67,57%, tahun 2022 sebesar 73,03%, tahun 2023 sebesar 74,99%. Pada tahun 2024, nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 74,99%. Nilai ini merupakan capaian kinerja pada tahun 2023 yang akan menjadi baseline perencanaan strategis dalam peningkatan kinerja keuangan di tahun-tahun berikutnya. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum

pengelolaan keuangan daerah telah berada pada kategori cukup baik, namun masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pengawasan internal. Sedangkan pada tahun 2025 terealisasi sebesar 64,13, angka ini merujuk pada website IPKD dan akan diupdate setelah rilis resmi.

Tabel II.49
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek
Tahun 2020-2025

Tahun	Opini BPK Atas Laporan Keuangan
2020	61,93
2021	67,57
2022	73,03
2023	74,99
2024	74,99
2025	64,13*

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kab. Trenggalek, 2026
** didapatkan dari website IPKD (www.ipkd-bskdn.kemendagri.go.id)*

d. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah merupakan persentase kenaikan atau penurunan jumlah PAD dari satu periode waktu tertentu ke periode berikutnya, yang digunakan untuk mengukur laju perkembangan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber asli daerahnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu komponen utama dalam struktur penerimaan daerah yang mencerminkan kemandirian fiskal suatu pemerintah daerah. PAD bersumber dari kemampuan daerah itu sendiri dalam menggali potensi ekonomi lokal melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tingkat pertumbuhan PAD menjadi indikator penting untuk menilai dinamika kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Pertumbuhan PAD yang positif dan berkelanjutan akan memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas cakupan pembangunan infrastruktur, serta mempercepat pemulihan ekonomi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berupaya meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

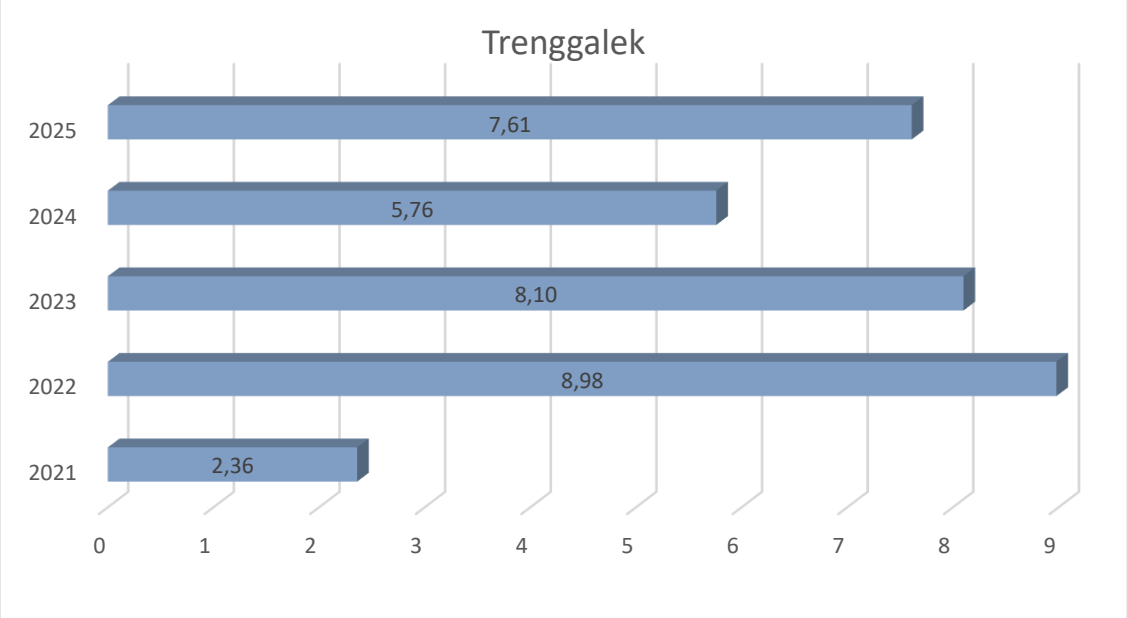
Pada tahun 2024, tingkat pertumbuhan PAD Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 5,26%. Capaian ini menjadi baseline yang merefleksikan

kondisi awal kemampuan daerah dalam mengelola dan meningkatkan pendapatannya. Nilai ini juga mencerminkan adanya tantangan dalam peningkatan penerimaan daerah di tengah dinamika ekonomi nasional maupun lokal, serta adanya kebutuhan untuk memperkuat sistem pemungutan pajak dan retribusi, digitalisasi layanan, dan pembinaan terhadap wajib pajak daerah. Sedangkan tahun 2025 menjadi sebesar 25,41%, dengan capaian 71,06% dari target yang sebesar 35,76%.

e. Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Sektor pariwisata, khususnya sektor penyediaan akomodasi serta makanan dan minuman, merupakan salah satu penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor ini memiliki kontribusi strategis dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas basis penerimaan daerah melalui aktivitas ekonomi yang berbasis potensi lokal. Pengembangan sektor pariwisata juga berdampak ganda *(multiplier effect)* terhadap sektor-sektor lain, seperti transportasi, perdagangan, dan industri kreatif. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi indikator penting untuk mengukur dinamika aktivitas ekonomi pariwisata di daerah. Kinerja sektor ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah wisatawan, daya beli masyarakat, pengembangan destinasi wisata, serta dukungan infrastruktur dan promosi pariwisata yang efektif.

Grafik II.27
Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026 (diolah)

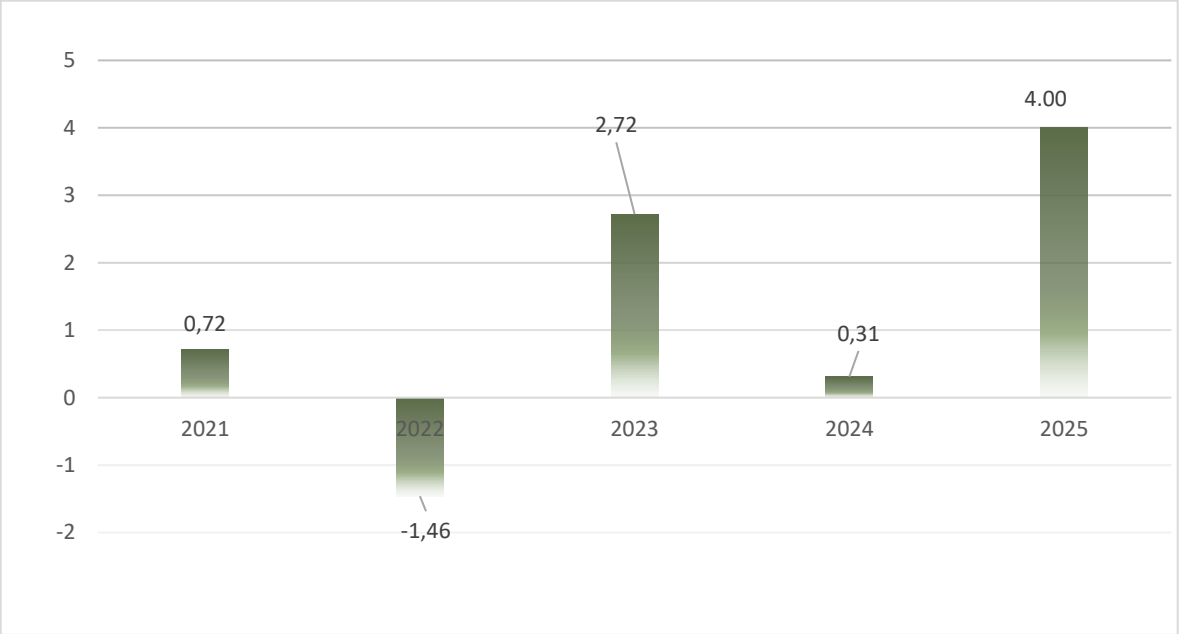
Berdasarkan data yang tersaji pada Grafik tersebut, pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kabupaten Trenggalek selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang relatif positif meskipun mengalami dinamika dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, pada tahun 2025 sektor ini kembali menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 7,61%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum masih memiliki peran yang cukup kuat dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Capaian pertumbuhan sebesar 7,61% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan jasa akomodasi, restoran, rumah makan, kafe, serta usaha kuliner lainnya terus berkembang. Peningkatan ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya kunjungan wisatawan, berkembangnya usaha kuliner lokal, serta semakin banyaknya kegiatan masyarakat yang memanfaatkan jasa penyediaan akomodasi dan makan minum. Kondisi ini juga mencerminkan semakin meningkatnya peran sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Trenggalek.

f. Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan merupakan tulang punggung perekonomian daerah, terutama bagi wilayah yang didominasi oleh aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam. Ketiga subsektor ini tidak hanya menjadi penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, tetapi juga memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan ekonomi masyarakat pedesaan. Dalam konteks pembangunan daerah, pertumbuhan sektor ini menjadi indikator penting yang mencerminkan sejauh mana pemanfaatan potensi agraris daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan. Pertumbuhan PDRB pertanian, perikanan, dan kehutanan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, akses terhadap teknologi pertanian, infrastruktur pendukung, serta kebijakan yang mendorong produktivitas dan daya saing petani, nelayan, serta pelaku usaha kehutanan rakyat. Di tengah tantangan perubahan iklim dan tekanan terhadap lahan produksi, sektor ini dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi.

Grafik II.28
Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026 (diolah)

Perkembangan pertumbuhan PDRB sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan Kabupaten Trenggalek selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2021 sektor ini tumbuh sebesar 0,72%. Pada tahun 2022 terjadi kontraksi dengan pertumbuhan sebesar -1,46%, yang menunjukkan adanya tekanan terhadap kinerja sektor tersebut. Selanjutnya pada tahun 2023 sektor ini kembali mengalami pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 2,72%. Pada tahun 2024 pertumbuhan kembali melambat menjadi 0,31%. Namun pada tahun 2025 sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan sebesar 4%.

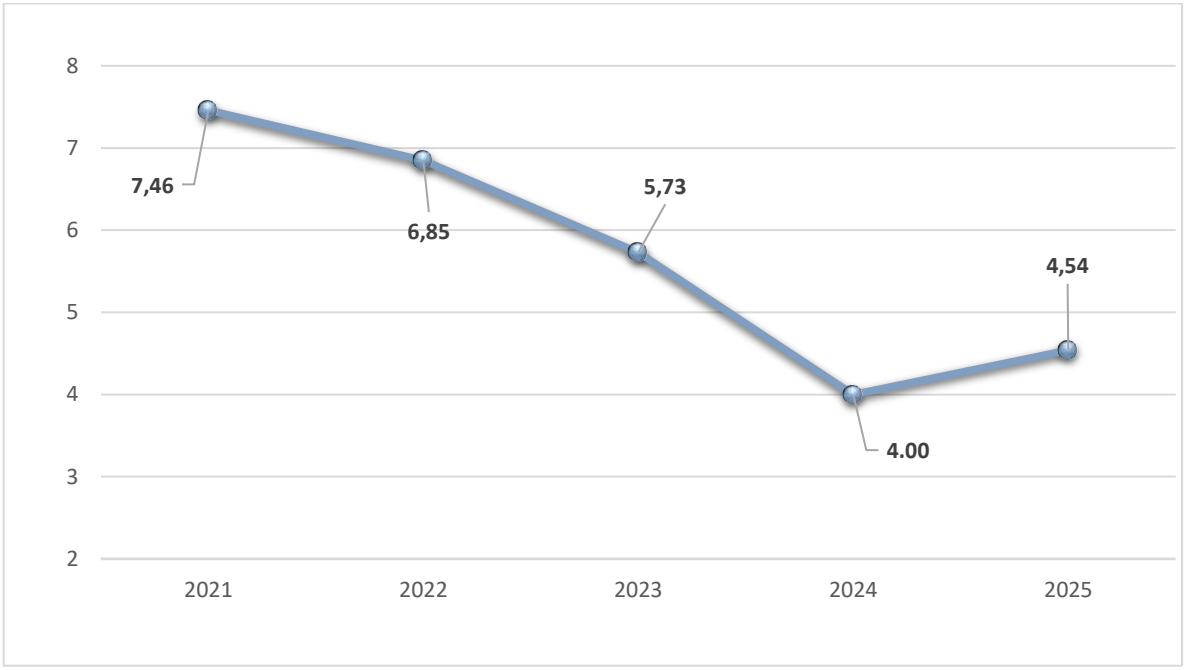
Peningkatan pertumbuhan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan mulai kembali mengalami penguatan setelah mengalami dinamika pada tahun-tahun sebelumnya. Meningkatnya aktivitas produksi di sektor pertanian, perikanan tangkap dan budidaya, serta subsektor peternakan turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja sektor ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan masih memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah dan menjadi salah satu sumber penghidupan utama masyarakat Kabupaten Trenggalek. Capaian pertumbuhan sebesar 4% pada tahun 2025 juga menunjukkan adanya perbaikan kinerja sektor primer yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai program penguatan

sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mulai memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

g. Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, merupakan salah satu sektor strategis dalam struktur perekonomian daerah. Sektor ini berperan penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan jasa, mendukung aktivitas konsumsi masyarakat, serta menjadi penggerak utama dalam perputaran ekonomi lokal. Selain itu, sektor perdagangan juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Pertumbuhan sektor ini mencerminkan tingkat daya beli masyarakat, dinamika konsumsi rumah tangga, serta efisiensi sistem logistik dan distribusi barang. Perdagangan yang berkembang secara sehat dan terorganisir akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor lainnya, termasuk industri pengolahan, pertanian, dan pariwisata, karena saling berkaitan dalam rantai pasok daerah.

Grafik II.29
Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



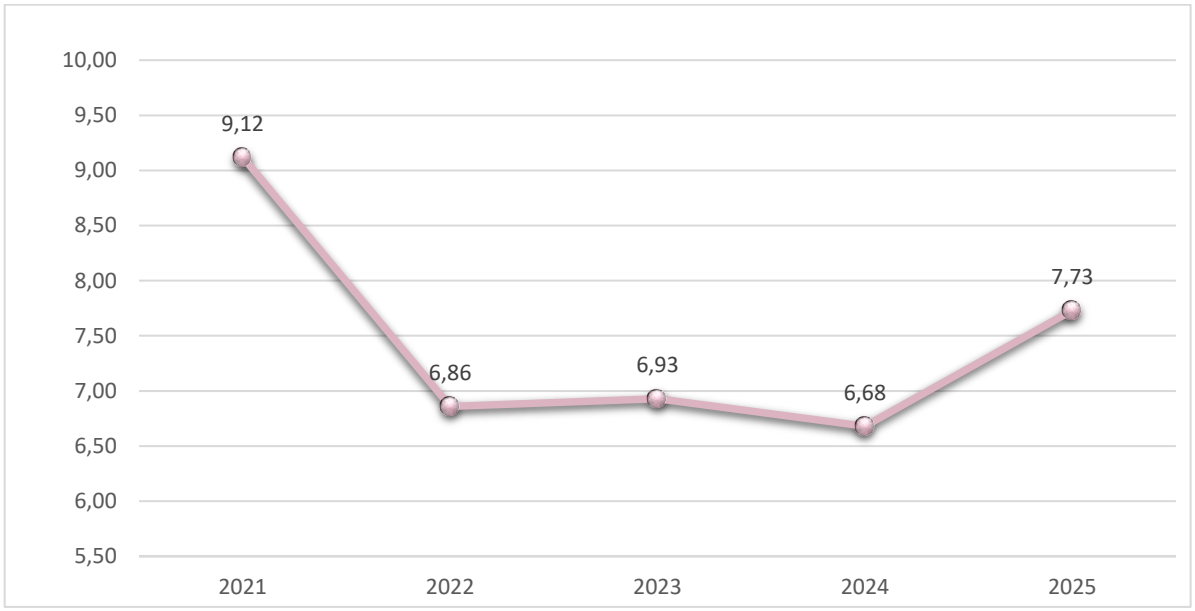
Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026 (diolah)

Pada kurun waktu tahun 2021-2025, pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor di Kabupaten Trenggalek tercatat fluktuatif. Pada tahun 2021pertumbuhan PDRB sebesar 7,46%. Tahun berikutnya lapangan usaha ini tetap tumbuh positif namun sedikit melambat dari 6,85% pada tahun 2022 menjadi 4% pada tahun 2024. Pada tahun 2025 pertumbuhan sektor perdagangan kembali mengalami peningkatan menjadi 4,54%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor perdagangan sempat mengalami perlambatan, namun pada tahun 2025 mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan PDRB perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor di Kabupaten Trenggalek mencerminkan pergerakan ekonomi masyarakat serta adanya potensi peningkatan aktivitas perdagangan dan pemulihan ekonomi daerah. Capaian ini juga menjadi indikasi bahwa sektor perdagangan masih memiliki ruang pertumbuhan yang luas melalui penguatan struktur usaha dan peningkatan kualitas pelayanan.

h. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor kunci dalam mendorong transformasi ekonomi daerah menuju struktur ekonomi yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi. industri pengolahan memainkan peran strategis dalam mengolah bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau barang jadi, yang dapat meningkatkan daya saing komoditas lokal serta memperluas akses pasar domestik maupun ekspor. Selain sebagai motor pertumbuhan ekonomi, sektor ini juga memiliki kontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja, pengembangan teknologi, dan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Pertumbuhan sektor industri pengolahan dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku lokal, infrastruktur pendukung, iklim investasi yang kondusif, serta kemampuan inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Keberhasilan pembangunan sektor ini akan berdampak luas terhadap sektor-sektor lain seperti pertanian, perdagangan, dan jasa, mengingat posisi industri sebagai penghubung dalam rantai pasok (value chain) ekonomi daerah.

Grafik II.30
Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Trenggalek
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026 (diolah)

Pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Trenggalek menunjukkan fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, pertumbuhan industri pengolahan tercatat sebesar 9,12% yang menandakan adanya pemulihan dan penguatan aktivitas industri. Namun, pada tahun 2022 pertumbuhan mengalami perlambatan menjadi 6,86**%** meskipun tetap berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2023, pertumbuhan industri pengolahan kembali meningkat dengan capaian 6,93%. Sementara itu, pada tahun 2024 laju pertumbuhan sedikit melambat menjadi 6,68%, namun tetap mencerminkan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Selanjutnya pada tahun 2025 pertumbuhan sektor industri pengolahan kembali meningkat menjadi 7,73%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami fluktuasi, sektor industri pengolahan tetap menunjukkan kinerja yang positif dan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

i. Nilai Ekspor Non Migas

Ekspor merupakan salah satu komponen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta perluasan pasar bagi produk lokal. Khususnya ekspor non migas, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi sektor-sektor unggulan berbasis sumber daya lokal seperti pertanian, perikanan, kehutanan, kerajinan, dan industri pengolahan. Nilai ekspor non

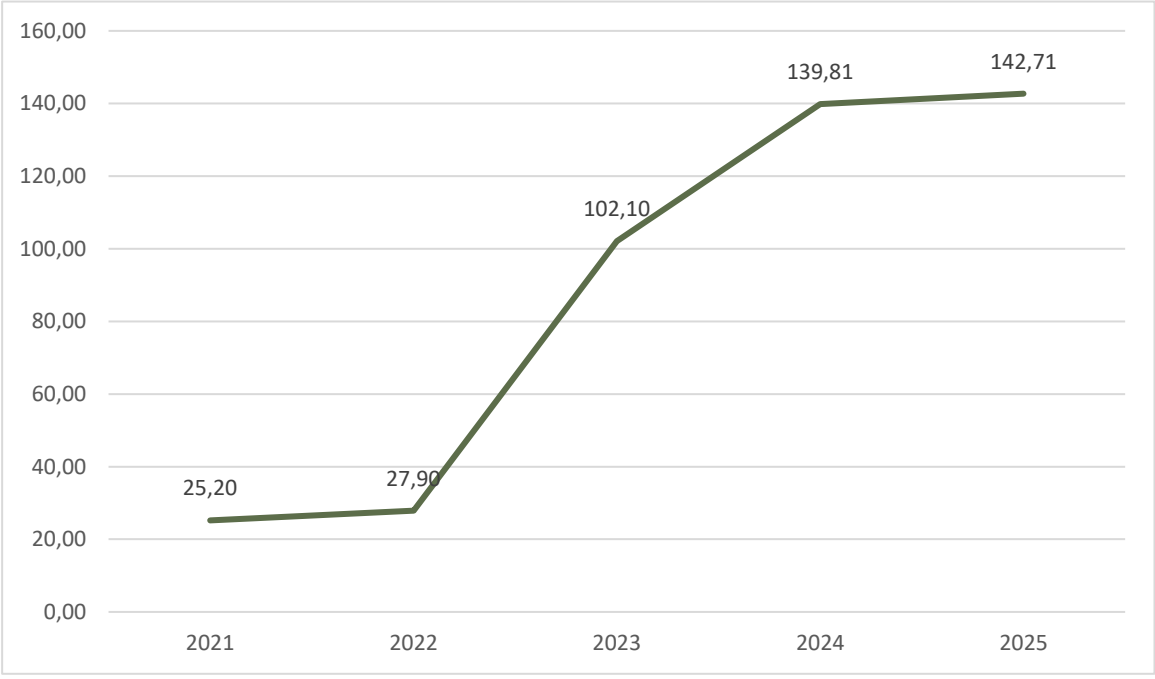
migas tidak hanya menunjukkan daya saing produk daerah di pasar internasional, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan dalam membangun ekosistem produksi dan distribusi yang efisien, inovatif, serta memenuhi standar mutu global. Peningkatan ekspor non migas juga memberikan multiplier effect terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti logistik, transportasi, dan jasa keuangan. Pada tahun 2024, nilai ekspor non migas Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar Rp139,81 miliar, yang menjadi baseline awal dalam periode perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Nilai tersebut merefleksikan kontribusi berbagai komoditas unggulan daerah yang telah mampu menembus pasar luar negeri, meskipun masih terdapat potensi besar yang belum tergarap secara optimal.

Tabel II.50
Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Trenggalek
Tahun 2021-2025 (*Milyar Rupiah*)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Ekspor Non Migas (Milyar Rupiah)	25,2	27,9	102,10	139,81	142,71

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2026

Grafik II.31
Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Trenggalek
Tahun 2021-2025 (Milyar Rupiah)



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2026

Nilai ekspor non migas di Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai ekspor non migas tercatat sebesar Rp25,20 milyar. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan meskipun relatif moderat menjadi Rp27,90 milyar. Selanjutnya, lonjakan signifikan terlihat pada tahun 2023 dengan nilai ekspor non migas mencapai Rp102,10 milyar yang mencerminkan adanya peningkatan daya saing dan kinerja ekspor daerah. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian yang lebih tinggi, yaitu sebesar Rp139,81 milyar. Pada tahun 2025 trend positif berlanjut menjadi sebesar 142,71. Non migas yang diekspor diantaranya minyak atsiri, drum kabel, gumrosin, aster, terpentin, plywood, fillet patin, trimingan, kulit, gelembung ikan. Ekspor tertinggi pada fillet patin, trimingan, kulit, gelembung ikan, kedua yaitu plywood dan ketiga adalah drum kabel. Secara keseluruhan, nilai ekspor non migas di Kabupaten Trenggalek memperlihatkan pertumbuhan yang pesat terutama sejak tahun 2023 yang berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah di Kabupaten Trenggalek.

j. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. TPAK Perempuan merupakan indikator penting untuk melihat potensi tenaga kerja perempuan dan dampaknya pada pembangunan ekonomi suatu negara atau daerah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan) adalah persentase jumlah perempuan dalam usia kerja yang aktif dalam angkatan kerja, baik bekerja maupun mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total jumlah penduduk usia kerja perempuan. TPAK Perempuan berfokus pada kelompok perempuan, mengukur seberapa besar perempuan usia kerja berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Tahun 2021-2025 nilai TPAK Perempuan Kabupaten Trenggalek cenderung fluktuatif, tahun 2023 mencapai 72,45 persen mengalami penurunan sampai dengan tahun 2025 menjadi sebesar 68,78.

Faktor penghambat partisipasi angkatan kerja perempuan yaitu 1) peran gender tradisional dan tanggung jawab mengurus rumah tangga, anak, dan anggota keluarga lainnya; 2) keterbatasan lapangan kerja formal yang fleksibel atau ramah perempuan di daerah, termasuk ketersediaan fasilitas

penitipan anak yang terjangkau, dapat memaksa perempuan keluar dari angkatan kerja; 3) upah yang ditawarkan di pasar kerja lokal tidak sepadan dengan biaya (baik finansial maupun non-finansial) untuk bekerja, perempuan mungkin memilih untuk tidak berpartisipasi dalam angkatan kerja; 4) guncangan ekonomi, krisis, atau perubahan kebijakan nasional/daerah dapat memengaruhi ketersediaan lapangan kerja secara keseluruhan, sehingga berdampak pada TPAK perempuan; dan 5) peluang pasar kerja bagi perempuan lebih sedikit daripada laki-laki, yang dapat menghambat partisipasi penuh perempuan dalam kegiatan ekonomi.

Tabel II.51
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

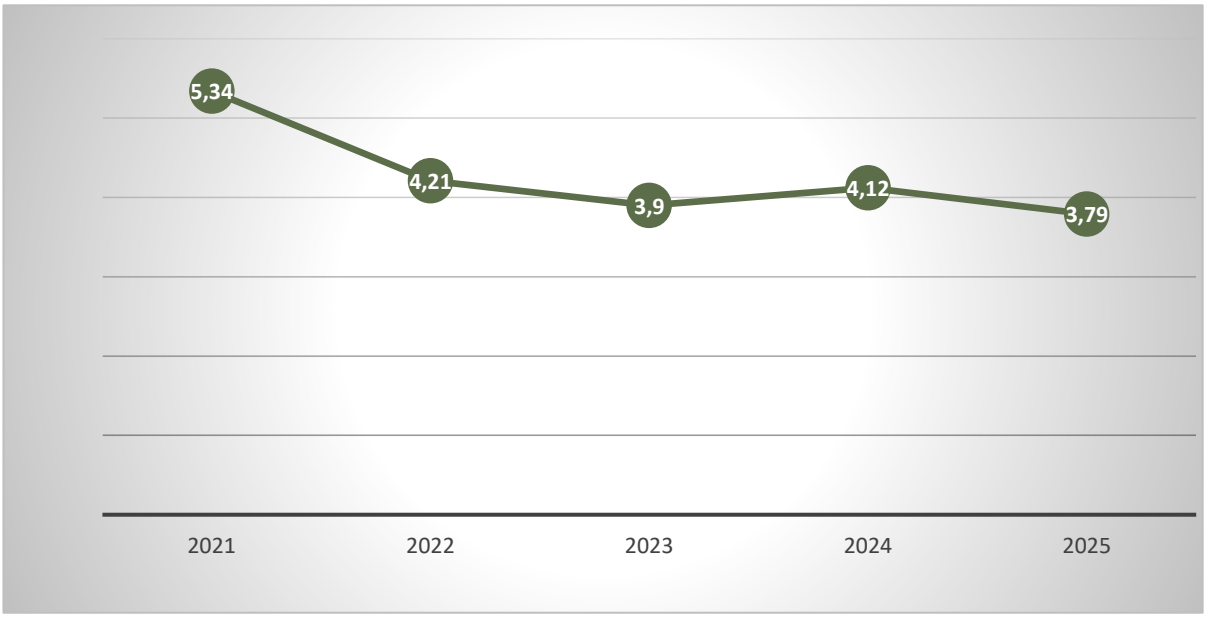
Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	59,32	58,17	72,45	70,27	68,78

Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2026

k. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

Incremental Capital *Output Ratio* (ICOR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter ”Nilai Tambah”. ICOR Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar 5,34. Pada Tahun 2022 ICOR turun menjadi 4,21 dan turun lagi menjadi 3,9 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 ICOR naik lagi menjadi 4,12. Sedangkan tahun 2025, ICOR menurun menjadi 3,79. Sehingga pemerintah daerah tetap berupaya mendorong peningkatan kualitas investasi agar tambahan capital yang masuk mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan produksi barang dan jasa serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Grafik II.32
Incremental *Capital Output Rasio* (ICOR)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2026 (PDRB Kab. Trenggalek menurut Pengeluaran Tahun 2021-2025)
Catatan : Tahun 2024 (angka sementara)
Tahun 2025 (angka sangat sementara)

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

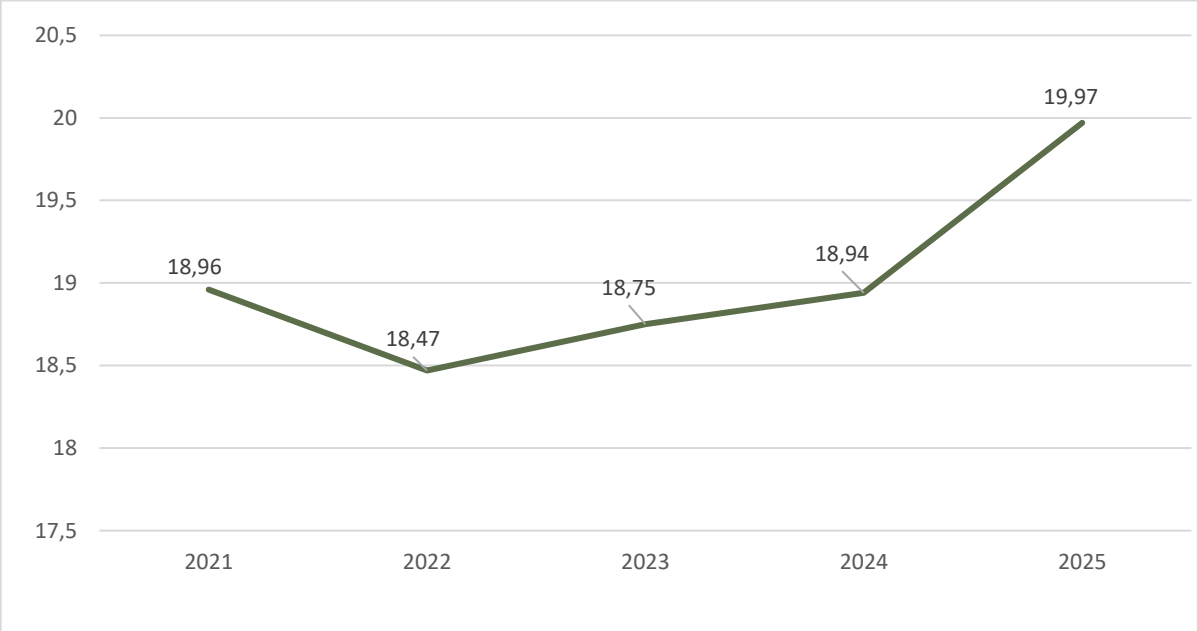
Pembentukan modal tetap bruto digambarkan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli *(financial leasing),* serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (*financial leasing*). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dihitung dengan membandingkan total PMTB ADHK dengan total PDRB ADHK tahun berkenaan. Pada tahun 2021 capaian PMTB Kabupaten Trenggalek sebesar

18,96% kemudian turun menjadi Rp. 18,47% pada tahun 2022 dan naik pada tahun 2023 menjadi 18,75%. Pada tahun 2024 PMTB mengalami kenaikan kembali menjadi 18,94 dan 19,97 pada tahun 2025.

Fluktuasi PMTB Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2025 digambarkan sebagaimana grafik berikut:

Grafik II.33
Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Trenggalek 2021-2025
(% PDRB)



Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2026

Pertumbuhan PMTB yang positif disertai dengan tingkat efisiensi investasi yang tercermin dari ICOR (Incremental Capital Output Ratio) yang rendah dan ideal akan mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Trenggalek.

m. Persentase Koefisien variasi harga antar waktu

Koefisien Variasi (KV) Harga Antar Waktu adalah ukuran dispersi relatif (penyebaran) harga dari waktu ke waktu, yang dihitung dengan membandingkan simpangan baku harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Koefisien variasi harga antar waktu mengukur seberapa besar fluktuasi atau ketidakstabilan harga suatu barang dalam periode waktu tertentu, seperti antar bulan atau antar tahun, dengan membandingkan simpangan baku harga terhadap rata-rata harga dalam bentuk persentase. Nilai koefisien variasi yang tinggi menunjukkan harga yang sangat tidak stabil, sedangkan nilai yang rendah menandakan harga

yang cenderung stabil. Koefisien Variasi (KV) Harga Antar Waktu di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021-2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.52
Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Kabupaten Trenggalek 2021-2025

No	Tahun	KVHAW (%)
1	2021	9,87
2	2022	11,83
3	2023	11,89
4	2024	11,48
5	2025	7,9

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2026 (diolah)

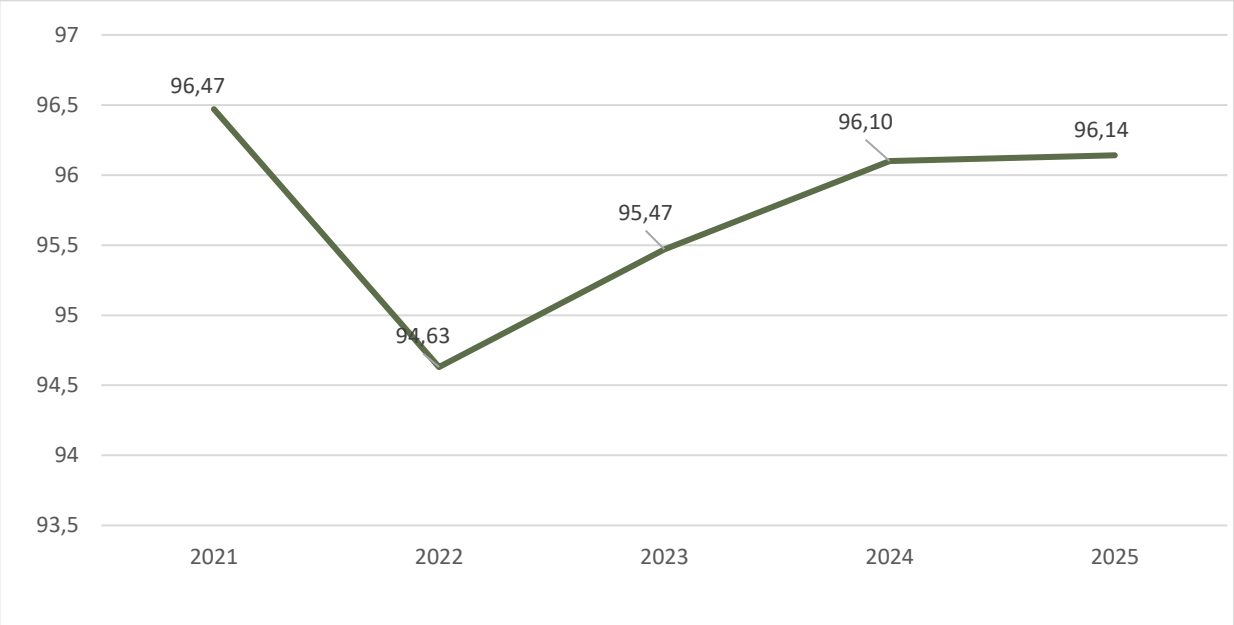
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan variasi harga di Kabupaten Trenggalek cenderung stabil dan tidak ada fluktuasi yang berarti. Pada tahun 2021 nilai koefisien variasi harga antar waktu 9,87%. Pada tahun 2022-2024 koefisien harga antar waktu naik dan stabil di kisaran angka 11%. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pasca pandemi Covid 19, selain itu koefisien variasi harga antar waktu juga berkorelasi dengan tingkat inflasi di kabupaten Trenggalek yang naik cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 5,8%. Sedangkan tahun 2025, menurun signifikan menjadi sebesar 7,90%. Hal ini disebabkan karena beberapa komoditas holtikultura yang memiliki tingkat volatilitas yang tinggi utamanya (contoh: cabai rawit merah) sebagai akibat ketergantungan pada kondisi cuaca serta tingginya tingkat permintaan di waktu-waktu tertentu (hari besar keagamaan, bulan baik menurut budaya jawa untuk melakukan acara) sehingga terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada harga konsumen.

n. Tingkat Kesempatan Kerja

Semakin tinggi Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menunjukkan kesempatan kerja semakin tinggi. Tahun 2021 merupakan tingkat kesempatan kerja tertinggi sepanjang periode 2021-2025 yaitu 96,47%. Tahun 2021 merupakan tahap pemulihan awal setelah perlambatan akibat pandemi COVID-19, dengan aktivitas ekonomi yang mulai kembali berjalan. Dari struktur PDRB Lapangan Usaha, di Kabupaten Trenggalek yang didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan turut membuat TKK pada tahun 2021 meningkat. Hal ini dikarenakan sektor ini lebih tahan dibandingkan dengan sektor lain.

Namun demikian, pada tahun 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 94,63 persen, yang menunjukkan melemahnya daya serap pasar kerja terhadap angkatan kerja. Selanjutnya, pada tahun 2023 TKK kembali meningkat menjadi 95,47 % dan berlanjut naik pada tahun 2024 sebesar 96,10%. Sedangkan tahun 2025 menjadi 96,14%. Kenaikan ini mengindikasikan Pemerintah Kabupaten Trenggalek mampu mendorong penciptaan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Meskipun mengalami pemulihan kondisi ketenagakerjaan serta membaiknya serapan tenaga kerja di Kabupaten Trenggalek, namun TKK pada tahun 2025 masih di bawah TKK pada tahun 2021.

Grafik II.34
Tingkat Kesempatan Kerja Kab. Trenggalek Tahun 2021 - 2025



Sumber : BPS Kab. Trenggalek, 2026

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor publik. Tata kelola ini didasarkan pada sistem pertukaran informasi yang terbuka dan transparan, serta memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan berjalan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Dengan mengutamakan integritas dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika perubahan, tata kelola ini menjadi landasan penting untuk menciptakan pelayanan publik yang responsif, terpercaya, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

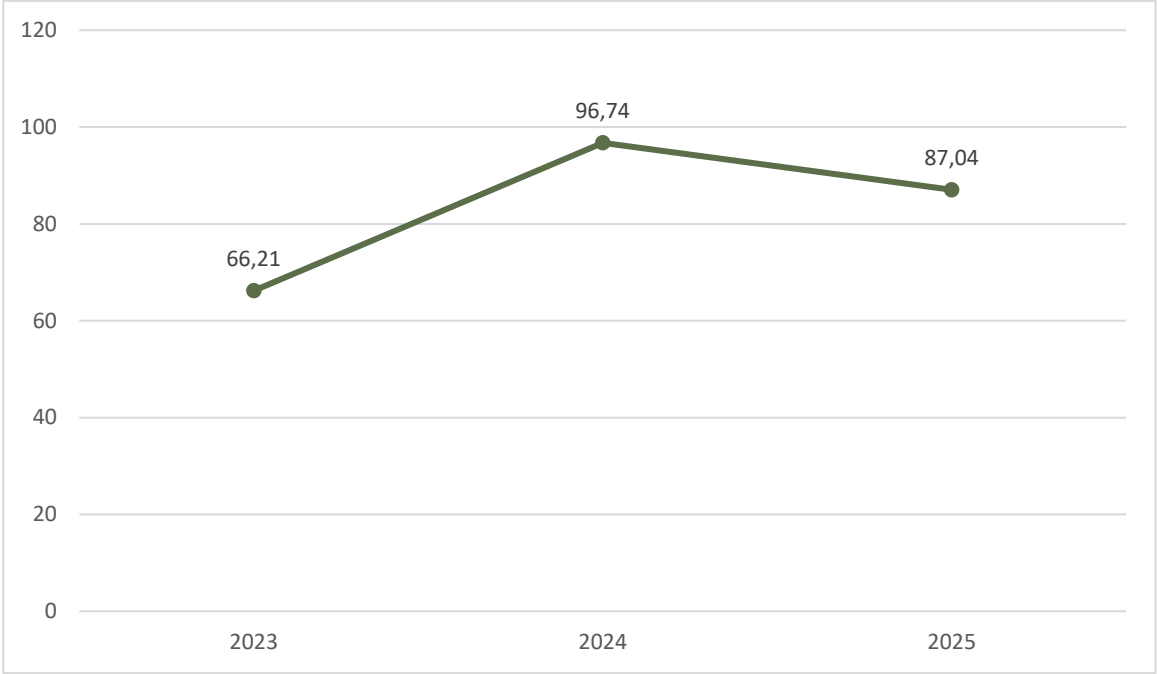
a. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan reformasi hukum, khususnya dalam upaya mewujudkan birokrasi yang kapabel dan profesional sesuai dengan sasaran road map reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Penilaian ini tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur capaian, tetapi juga bertujuan memberikan saran perbaikan yang konstruktif guna meningkatkan kualitas reformasi hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek. Melalui IRH, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperkuat, seperti harmonisasi regulasi, peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dalam penyusunan peraturan, serta penataan sistem dokumentasi regulasi yang lebih terintegrasi. Dengan demikian, IRH menjadi salah satu tolok ukur penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023 memperoleh skor sebesar 66,21 dengan kategori B (Cukup Baik) berdasarkan penilaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Skor tersebut terdiri dari nilai awal sebesar 51,05 yang merupakan akumulasi dari empat variabel utama, yaitu tingkat koordinasi untuk harmonisasi regulasi dengan nilai 13,9; kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) dengan nilai 21,2; kualitas re-regulasi atau deregulasi berdasarkan hasil reviu peraturan perundang-undangan dengan nilai 4,7; serta penataan database peraturan perundang-undangan dengan nilai 11,25. Nilai apresiasi sebesar 15,16 turut menambah capaian IRH tersebut. Meski sudah menunjukkan upaya positif, hasil ini mengindikasikan masih adanya ruang perbaikan terutama pada kualitas substansi regulasi dan tata kelola dokumentasi.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berhasil meningkatkan skor IRH secara signifikan menjadi 96,74 dengan kategori AA (Istimewa). Peningkatan ini didukung oleh capaian yang jauh lebih baik pada keempat variabel utama, yaitu tingkat koordinasi yang naik menjadi 23,6; kompetensi ASN sebagai perancang regulasi meningkat menjadi 25; kualitas re-regulasi atau deregulasi melonjak tajam menjadi 20,1; serta penataan database peraturan yang membaik menjadi 15. Perbaikan ini menunjukkan kemajuan yang substansial dalam harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sistem dokumentasi regulasi yang lebih rapi dan terintegrasi.

Grafik II.35
Indeks Reformasi Hukum
Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2025



Sumber: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2026

Realisasi IRH pada tahun 2025 sebesar 87,04, menurun dibandingkan dengan tahun 2024. Angka tersebut didapatkan dari koordinasi dan harmonisasi regulasi dengan nilai 22,2; kompetensi perancang perundang-undangan (legal drafter) dengan nilai 25; kualitas re-regulasi dan deregulasi dengan nilai 15; dan penataan database peraturan perundang-undangan dengan nilai 13, juga diperhitungkan nilai apresiasi sebesar 11,84.

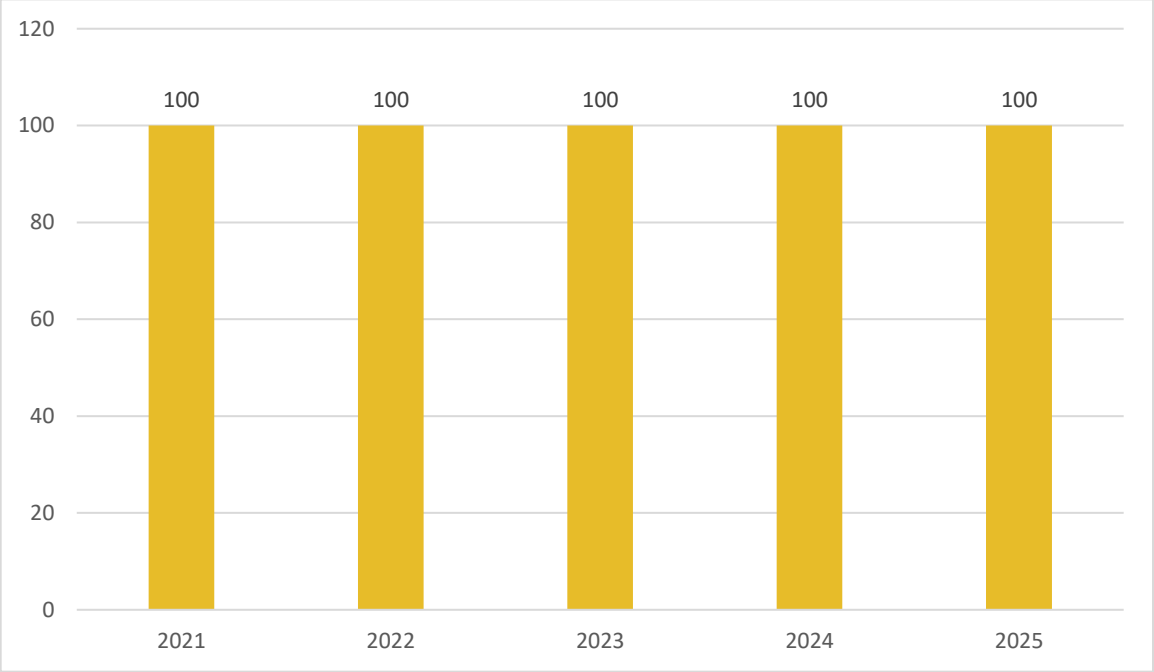
Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi penting untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat tidak hanya sesuai kebutuhan daerah, tetapi juga selaras dengan regulasi di tingkat nasional dan provinsi. Dengan peningkatan kualitas koordinasi antarinstansi, penguatan kompetensi ASN, serta penataan database yang lebih baik, Kabupaten Trenggalek semakin siap mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

b. Persentase Penyelesaian Konflik

Konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat merupakan salah satu penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat dan terkikisnya kearifan lokal. Penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Penyelesaian konflik di

Kabupaten Trenggalek dalam 5 tahun terakhir mencapai 100%. Artinya konflik yang terjadi di Kabupaten Trenggalek selalu dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik. Berikut perkembangan persentase penyelesaian konflik tahun 2021-2025 :

Grafik II.36
Persentase Penyelesaian Konflik (%) Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Trenggalek, 2026

Target penyelesaian konflik sebanyak 5 konflik pada tahun 2025 kegiatan telah tercapai secara optimal. Seluruh konflik yang teridentifikasi dapat ditangani dan diselesaikan secara menyeluruh melalui langkah koordinasi lintas sektor, pendekatan persuasif, serta musyawarah bersama para pihak terkait. Konflik yang terjadi diantaranya yaitu :

1) Konflik ekonomi atas kebijakan pemerintah terkait izin event pasar rakyat
2) Konflik ekonomi atas investasi bodong di Desa Pogalan
3) Masalah tanah egendom di Watulimo
4) Konflik Sosbud terkait tambang PT. Jawani Gunung Abadi
5) Penyerangan kantor Polsek Watulimo

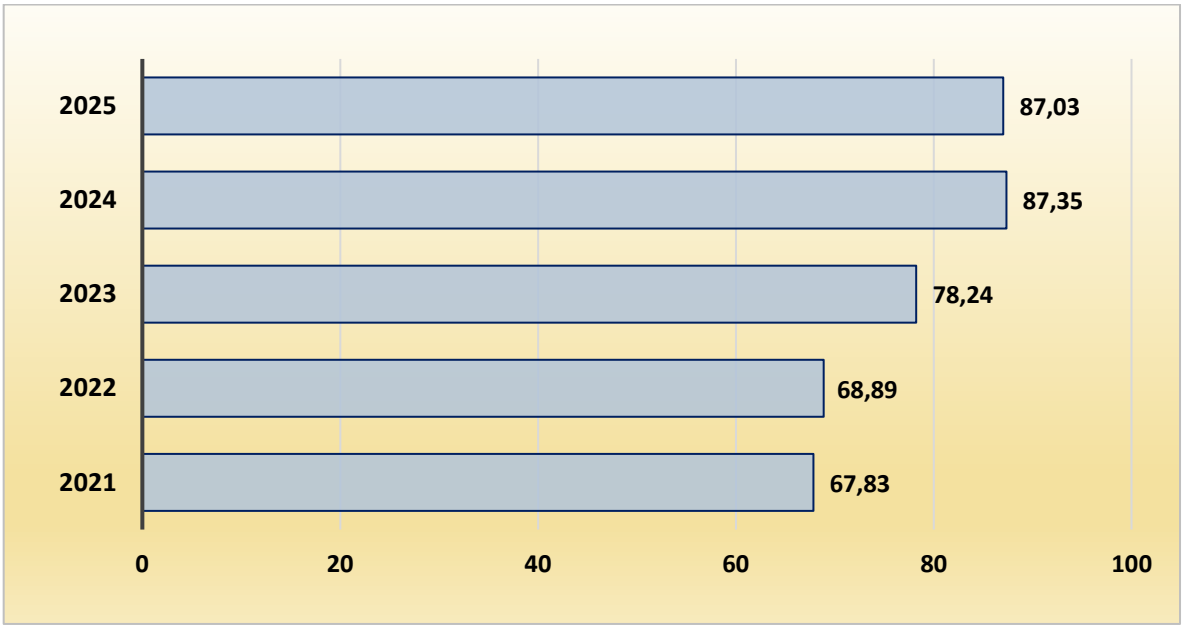
c. Indeks Reformasi Birokrasi

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menuntut efisiensi dan akurasi menjadikan birokrasi yang cepat, murah, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai isu utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi berperan sebagai mesin

pembangunan yang krusial dalam memastikan seluruh agenda dan program pembangunan berjalan sesuai rencana. Oleh karena itu, modernisasi birokrasi menjadi kebutuhan mendesak agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan dinamika global yang terus berubah.

Momentum penting dalam reformasi birokrasi terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menandai upaya modernisasi sistem birokrasi di Indonesia. UU ASN menekankan penataan dan pengelolaan sumber daya manusia di sektor pemerintahan dengan visi mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan SDM diarahkan untuk menggali potensi yang ada sehingga ASN dapat menjadi aset strategis atau modal manusia (human capital) yang mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Grafik II.37
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: KemenPANRB RI, 2026

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat keberhasilan perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilakukan, termasuk dalam hal efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Komitmen reformasi birokrasi terus diperkuat melalui berbagai langkah

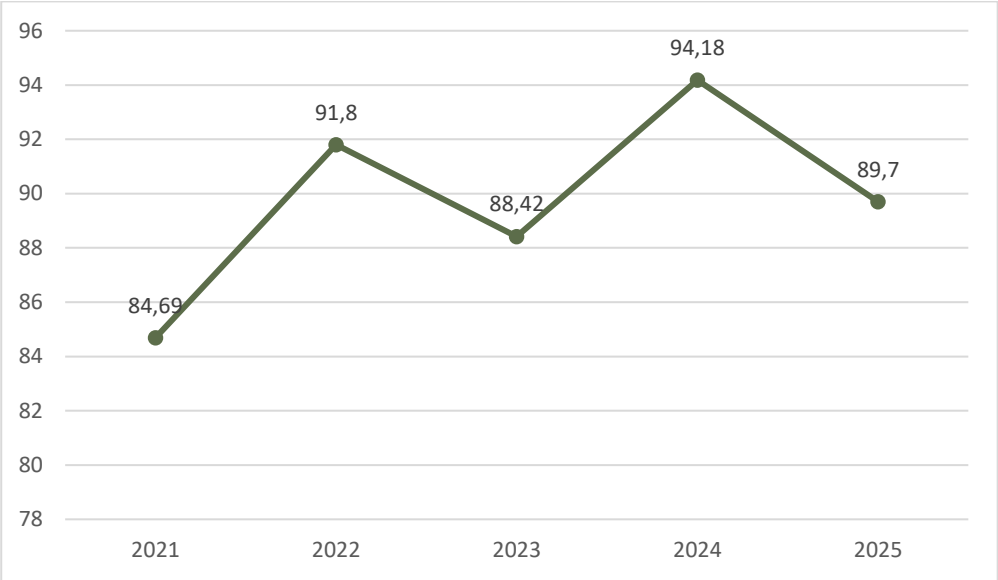
strategis untuk meningkatkan independensi dan netralitas ASN, kompetensi, produktivitas kerja, integritas, kesejahteraan, serta kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengawasan dan akuntabilitas aparatur sipil negara juga menjadi fokus utama agar birokrasi dapat berjalan transparan dan bertanggung jawab. Reformasi birokrasi ini tidak hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga dijadikan indikator penting dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, termasuk di Kabupaten Trenggalek.

Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2021, IRB tercatat sebesar 67,83, dan terus meningkat menjadi 68,89 pada 2022. Lonjakan signifikan terjadi pada 2023 dengan capaian 78,24, dan semakin meningkat menjadi 87,35 pada 2024. Pada tahun 2025, Indeks Reformasi Birokrasi mendapat nilai 87,03 dari yang ditargetkan sebesar 87,4. Sampai dengan saat ini Indeks Reformasi Birokrasi masih dalam tahap banding. Selain itu, adanya perubahan tema baru terutama pada RB Tematik dengan Perangkat Daerah Pengampu yang berbeda, sehingga perlu dilakukan pendalaman lebih dengan waktu yang cukup singkat.

d. *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP)

Upaya pemerintah dalam pencegahan korupsi salah satunya dengan adanya *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP). *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) merupakan sistem yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau, mengendalikan, dan mengawasi upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. MCSP merupakan penyempurnaan dari sistem sebelumnya, yaitu MCP (Monitoring Center for Prevention), dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi melalui penguatan sistem pelaporan dan tata kelola yang baik yang meliputi 8 (delapan) area intervensi yaitu area perencanaan, area penganggaran, area pengadaan barang dan jasa, area pelayanan publik, area manajemen ASN, area pengelolaan barang milik daerah, area optimalisasi penerimaan daerah, dan area penguatan APIP.

Grafik II.38
Hasil Penilaian *Monitoring Control for Prevention* (MCP)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2025

Hasil penilaian MCP Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 sebesar 84,69, kemudian pada tahun 2022 naik signifikan menjadi 91,80. Namun, pada tahun 2023, MCP mengalami penurunan menjadi 88,42, dan pada tahun 2024 naik kembali menjadi 94,18. Sedangkan tahun 2025 menurun kembali menjadi 89,7.

e. Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan TPAKD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (supply side) dan permintaan (demand side) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif.

Tujuan dari IKAD adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat pengambilan keputusan strategis dalam penyusunan dan implementasi program inklusi keuangan di daerah berbasis data dan informasi yang komprehensif;
2. Memperkuat pemantauan kinerja dan efektivitas program TPAKD di tingkat daerah (kabupaten/kota) dan memberi informasi yang berguna

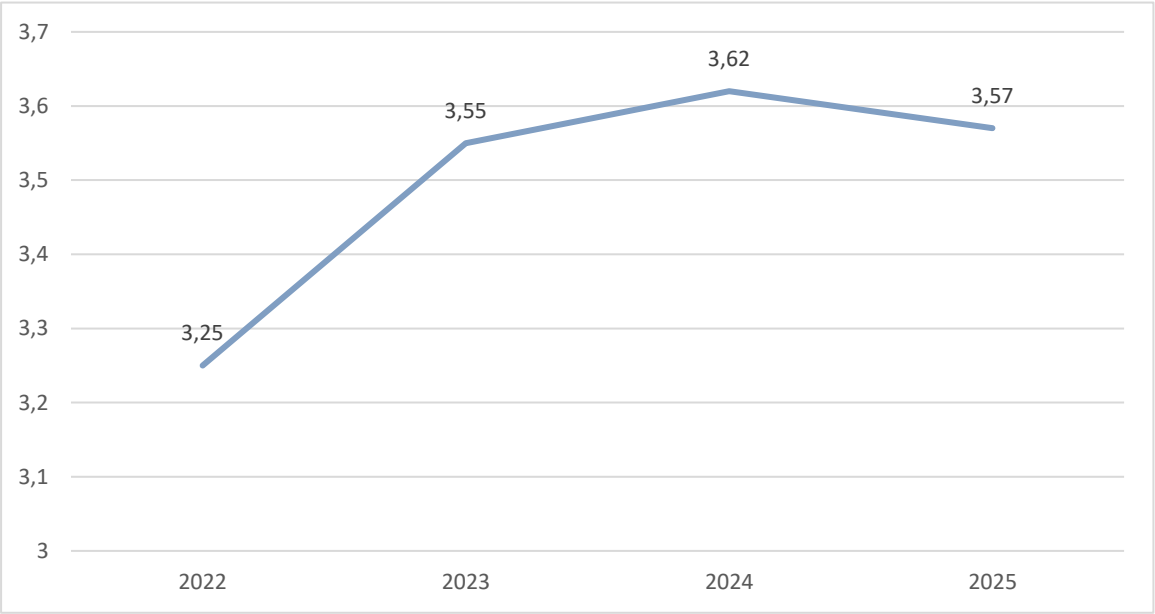
bagi pemangku kepentingan dalam merancang program dan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan akses keuangan yang inklusif;

3. Melengkapi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), memperluas cakupan, serta memberikan potret kondisi inklusi keuangan yang lebih mendalam.

Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data supply dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai IKAD berkisar antara 0-10. Nilai ini menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan.

Penilaian IKAD berasal dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2022, IKAD sebesar 3,25 kemudian naik di tahun 2023 menjadi 3,55 dan tahun 2024 menjadi 3,62. Untuk tahun 2025 nilai IKAD menurun menjadi 3,57. Adapun capaian IKAD Kabupaten Trenggalek dalam 4 tahun terakhir sebagai berikut:

Grafik II.39
Realisasi Indeks Akses Keuangan Daerah Kab. Trenggalek
Tahun 2022-2025



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2026
Bank Indonesia (BI), 2026
Badan Pusat Statistik (BPS) RI, 2026

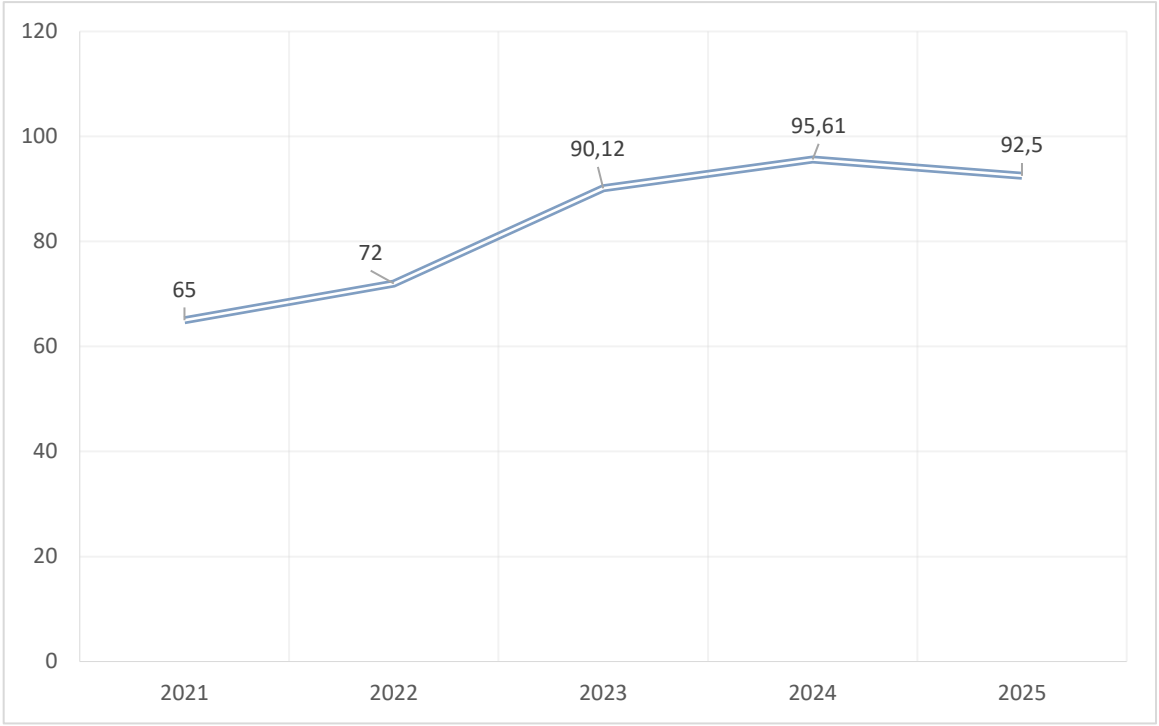
f. Indeks Berakhlak

Indeks berakhlak merupakan alat ukur untuk mengevaluasi penerapan nilai-nilai dasar ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berakhlak, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif pada Aparatur Sipil Negara (ASN) serta tingkat kesehatan budaya organisasi di lingkungan instansi pemerintah. Indeks ini mengukur seberapa baik ASN menerapkan nilai-nilai tersebut dalam perilaku kerja sehari-hari dan sejauh mana nilai-nilai tersebut selaras dengan budaya organisasi. Indeks ini digunakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) untuk mengukur sejauh mana instansi pemerintah telah mengimplementasikan nilai-nilai tersebut. pada tahun 2024, nilai Indeks Berakhlak Kabupaten Trenggalek sebesar 78,9. Sedangkan pada tahun 2025 tidak diadakan survey penilaian berakhlak oleh KEMENPANRB.

g. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut NSPK Manajemen ASN adalah aturan atau ketentuan yang menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen ASN. Implementasi NSPK adalah pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penyelenggaraan Manajemen ASN. Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN adalah angka yang menunjukkan kualitas dan ketaatan dalam pelaksanaan NSPK Manajemen ASN pada instansi pemerintah. Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dari tahun 2021-2025 memiliki tren yang meningkat. Pada tahun 2021 sebesar 65, meningkat menjadi 72 pada tahun 2022, dan terus meningkat menjadi 90,12 pada tahun 2023 dan 95,61 pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025 menurun sebanyak 3,11 menjadi 92,5.

Grafik II.40
Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

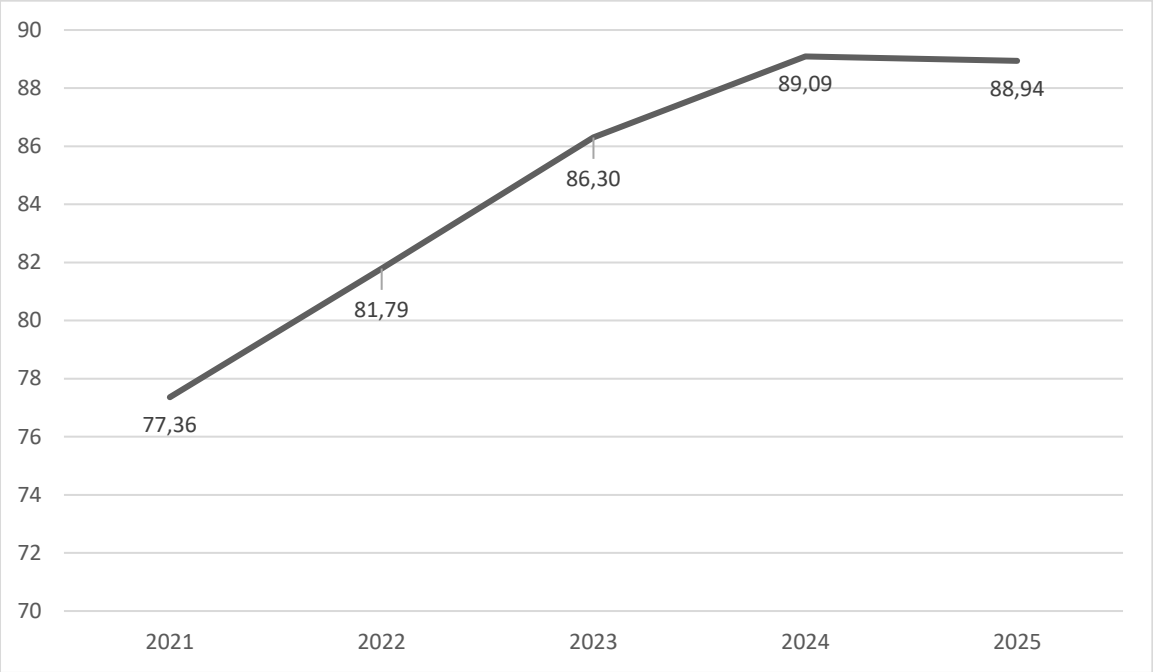


Sumber : BKN RI, 2026

h. Nilai Rata-Rata Sinergitas Kecamatan

Indeks Sinergitas Kecamatan adalah sebuah indeks yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja kecamatan dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Indeks ini berfokus pada sejauh mana kecamatan mampu bersinergi dan berkoordinasi dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di wilayahnya. Indeks Sinergitas Kecamatan diukur berdasarkan Nilai Rata-Rata Sinergitas Kecamatan di Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari 14 Kecamatan.

Grafik II.41
Nilai Rata-Rata Sinergitas Kecamatan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber : Bagian Adm Pemerintahan Setda Kab. Trenggalek, 2026

i. Indeks Zakat Nasional (IZN)

Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik. Adapun nilai Indeks Zakat Nasional masih belum tersedia dan akan dilakukan pengukuran pada saat RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2026 dilaksanakan.

Tabel II.53
Indeks Zakat Nasional (IZN) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Zakat Nasional (IZN)	0,73	0,73	0,62	0,63	0,76

Sumber : Baznas Kab. Trenggalek, 2026

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial merupakan pilar penting dalam mewujudkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadaban. Pembangunan hukum diarahkan untuk menegakkan supremasi hukum yang menjunjung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta berlandaskan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Di sisi lain, pembangunan demokrasi difokuskan pada penguatan demokrasi substansial yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi benar-benar merepresentasikan aspirasi dan amanat rakyat. Dalam kerangka ini, penguatan sistem hukum dan demokrasi berjalan seiring dengan upaya membangun sistem keamanan nasional yang tangguh guna menjaga stabilitas dan keutuhan negara secara berkelanjutan.

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tanpa dikondisikan dengan baik, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tentu tugas ini harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian dan satuan TNI. Upaya penertiban dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dipandang penting, karena dampak pelanggaran berakibat luas terhadap ketidakstabilan kondisi sosial masyarakat. Maka, untuk meminimalisir terhadap pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, pemerintah daerah memprogramkan berbagai kegiatan yang dimaksudkan untuk mengantisipasi serta melakukan tindakan dini secara cepat dan tepat misalnya dengan melakukan operasi penertiban dan tindakan preventif (non yustisi).

Upaya penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat diukur melalui Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas. Indeks ini merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana dengan nilai komposit yang diukur:

1. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dengan aspek penilaian yang meliputi strategi dalam mencapai kinerja Satpol PP dalam menegakkan perda, strategi dalam mencapai kineria Satpol PP dalam penyelenggaraan Tibumtranmas;
2. Indeks Penyelenggaran Manajemen Satlinmas dengan aspek penilaian yang meliputi pelaksanaan fungsi Satlinmas, kebijakan Satlinmas, inovasi peningkatan kapasitas Satlinmas, pemberdayaan Satlinmas,

sarana dan prasarana Satlinmas;

3. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan kebakaran dengan aspek penilaian yang meliputi kelembagaan, perencanaan anggaran, pemenuhan capaian SPM, pemenuhan sarana prasarana, pemenuhan SDM terferivikasi dan pemberdayaan masyarakat,
4. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub urusan bencana dengan aspek penilaian yang meliputi kelembagaan, SDM, kebijakan, pendanaan teknis operasional dan kepemimpinan.

Pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI mulai Tahun 2024. Hasil pengukuran Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 adalah 58,61. Sedangkan pada tahun 2025 masih menunggu rilis resmi dari Kemendagri.

Tabel II.54
Indikator Trantibum, Kebakaran dan Aksi HAM di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	-	-	-	58,61	NA
Persentase Penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase pengendalian kebakaran dan penyelamatan	100%	77,42%	65,06%	93%	98%
Persentase Capaian Aksi HAM	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Trenggalek, 2026
Sekretariat Daerah Kab. Trenggalek, 2026

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) mencapai 100% setiap tahun dari 2021 hingga 2025. Angka ini mencerminkan konsistensi dan komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga kepatuhan terhadap regulasi.

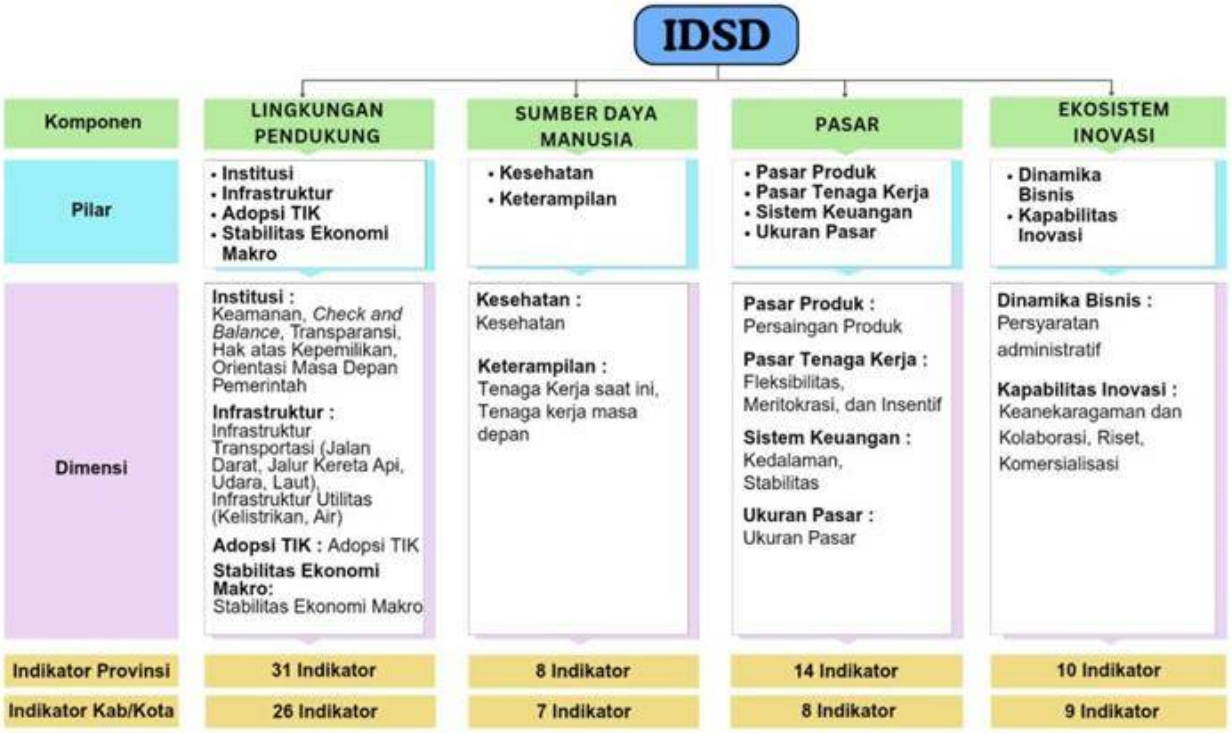
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2021- 2025, Aksi HAM merupakan penjabaran dari RANHAM yang harus dilaksanakan dan dilaporkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota Pelaksanaan Aksi HAM Tahun 2025 untuk Kabupaten/Kota terdapat 5 Aksi yaitu Aksi 1 Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis

bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil. Aksi 2 Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Aksi 3 Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama, Aksi 4 Implementasi pemberian bantuan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya, Aksi Membangun sarana dan prasarana transportasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Permenhub No. 98 Tahun 2017 Pasal (3) dan (4) dalam ruang lingkup kewenangan daerah. Berdasarkaan hasil penilaian dari Kementerian Hak Asasi Manusia RI Capaian Aksi HAM Kabupaten Trenggalek 100. Ini merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM

2.1.4.3 Ketangguhan Pemerintah Daerah

Ketangguhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dari meningkatnya daya saing daerah. Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Indeks daya saing daerah terdiri dari 4 komponen, 12 pilar, 12 dimensi dan 51 indikator. Berkaitan dengan riset dan inovasi, Pilar Kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru.

Gambar II.15
Kerangka Indeks Daya Saing Daerah



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren positif dalam tiga tahun terakhir, meningkat dari 2,84 pada 2022 menjadi 3,13 di 2023, dan mencapai 3,40 di 2024. Kenaikan ini mencerminkan upaya nyata dalam memperkuat daya saing daerah, terutama pada pilar-pilar seperti Adopsi TIK (yang naik dari 3,2 menjadi 4,51) dan Infrastruktur (dari 2,04 menjadi 3,12). Pilar Institusi tetap menjadi kekuatan utama dengan nilai stabil tinggi, menunjukkan tata kelola pemerintahan yang relatif kuat. Namun, tantangan utama masih terlihat pada Pilar Sistem Keuangan dan Pasar Tenaga Kerja, di mana skor tetap rendah, bahkan mengalami penurunan, yang berpotensi menghambat kelancaran investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Sedangkan pada tahun 2025, IDSD sebesar 3,54, kenaikan hampir diseluruh pilar, kecuali pada pilar pasar tenaga kerja yang menurun sebesar 0,17 dan pilar dinamisme bisnis sebesar 0,61. Secara keseluruhan IDSD meningkat dibandingkan tahun 2024, berada di atas nasional (3,50) dan di bawah Provinsi Jawa Timur (3,91).

Tabel II.55
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2025

Nilai Indeks	2022	2023	2024	2025
Pilar Institusi	4,58	4,56	4,88	4,94
Pilar Infrastruktur	2,04	2,38	3,12	3,71
Pilar Adopsi TIK	3,20	4,26	4,51	4,71
Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	2,17	2,82	2,96	3,59
Pilar Kesehatan	4,15	4,17	4,14	4,15
Pilar Keterampilan	2,94	3,24	3,73	4,10
Pilar Pasar Produk	2,96	2,89	3,35	3,38
Pilar Pasar Tenaga Kerja	2,50	2,58	2,35	2,18
Pilar Sistem Keuangan	2,64	1,41	1,57	1,89
Pilar Ukuran Pasar	0,85	4,24	4,26	4,28
Pilar Dinamisme Bisnis	5,0	3,23	3,55	2,94
Pilar Kapabilitas Inovasi	1,04	1,78	2,35	2,56
Indeks Daya Saing Daerah	**2,84**	**3,13**	**3,40**	**3,54**

Sumber: *BRIN, 2026*

Peningkatan IDSD Trenggalek berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pilar Adopsi TIK dan Dinamisme Bisnis yang menguat menjadi motor penting dalam menarik investasi baru dan mendorong inovasi lokal. Namun, dengan masih lemahnya sektor keuangan dan pasar tenaga kerja, ke depan fokus pembangunan perlu diarahkan pada reformasi sistem keuangan lokal, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja secara terukur. Pendekatan fokus pada pilar terlemah ini penting untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Trenggalek.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintah Daerah

Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah merupakan Indikator Kinerja Kunci yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan program pembangunan setiap urusan pemerintahan daerah. Adapun kinerja setiap urusan pemerintahan daerah Kabupaten Trenggalek sebagaimana penjabaran berikut:

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menjadi penentu dimensi pengetahuan Indeks Pembangunan Manusia secara konsisten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah adalah ukuran yang menunjukkan berapa lama (dalam tahun) rata-rata penduduk telah menghabiskan waktu untuk bersekolah. Secara khusus, ini mengacu pada jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya waktu (dalam tahun) yang diharapkan dapat ditempuh oleh seseorang dalam sistem pendidikan formal. Ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan dan kemajuan pembangunan sistem pendidikan di suatu wilayah.

Berdasarkan data BPS, capaian indikator pendidikan di Kabupaten Trenggalek dalam kurun waktu 2021 hingga 2025 menunjukkan tren peningkatan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengalami kenaikan dari 7,56 tahun pada 2021 menjadi 8,09 tahun di 2025. Sementara itu Harapan Lama Sekolah (HLS) juga meningkat dari 12,47 tahun pada 2021 menjadi 12,78 tahun pada 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan akses dan kualitas pendidikan, serta upaya pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Namun capaian RLS menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Trenggalek hanya mengikuti pendidikan selama 7 hingga 8 tahun atau setara dengan kelas 2 sampai 3 SMP. Sehingga penduduk di Kabupaten Trenggalek belum sepenuhnya memenuhi program wajib belajar 12 tahun. Padahal harapan terhadap kesempatan belajar yang dirasakan oleh penduduk Trenggalek berusia 7 tahun ke atas mencapai 12,78 tahun (setara dengan jenjang pendidikan SMA/sederajat). Selisih antara HLS dan RLS menunjukkan bahwa masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan, sehingga diperlukan strategi lanjutan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah lanjutan dan mencegah putus sekolah.

Tabel II.56
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata Lama Sekolah	7,56	7,89	7,90	7,92	8,09
Harapan Lama Sekolah	12,47	12,50	12,62	12,63	12,78

Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026

Pada tahun 2023 dan 2024, jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren peningkatan. Tercatat sebanyak 3.386 anak tidak sekolah pada tahun 2023, dan jumlah ini meningkat menjadi 4.917 anak pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan perlunya perhatian lebih terhadap faktor-faktor yang menyebabkan anak tidak melanjutkan pendidikan, seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan, serta potensi pernikahan dini dan pekerja anak. Sedangkan pada tahun 2025 menurun menjadi 3.750 anak. Upaya intervensi terpadu dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait sangat dibutuhkan untuk menekan angka anak tidak sekolah dan memastikan hak atas pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh anak di Trenggalek.

Skor Literasi dan Skor Numerasi

Skor numerasi adalah ukuran kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika dasar untuk memecahkan masalah sehari-hari dalam berbagai konteks. Ini melibatkan pemahaman konsep, prosedur, dan fakta matematika, serta kemampuan menganalisis informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk seperti grafik, tabel, dan diagram, sedangkan Skor literasi adalah ukuran kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pengetahuan dan potensi diri, serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang mencakup kemampuan untuk memahami informasi tertulis, menganalisisnya, dan menerapkannya dalam berbagai konteks. Kemampuan literasi dan numerasi penting bagi murid di lingkungan sekolah dan masyarakat sebagai dasar pengetahuan, mengembangkan keterampilan berpikir logis, kritis dan analitis, serta bekal daya saing di era globalisasi dan teknologi. Kemampuan literasi adalah kemampuan murid memahami dan memanfaatkan berbagai jenis bacaan untuk memecahkan masalah, mengembangkan diri, dan berkontribusi di masyarakat. Sedangkan kemampuan numerasi adalah kemampuan murid menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kompetensi minimum ini mencakup kemampuan untuk berpikir logis, bernalar menggunakan pengetahuan matematika, dan menganalisis informasi dalam berbagai bentuk untuk memecahkan masalah praktis. Data skor literasi dan numerasi berasal dari hasil Asesmen Nasional (AN) melalui alat ukur penilaian Asesmen Kompetensi Minimum yang dipublikasi dalam Rapor Pendidikan. Berikut capaian skor literasi dan numerasi Kabupaten Trenggalek:

Tabel II.57
Skor Literasi dan Numerasi Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional*	Nilai	1,68	1,88	85,73	70,07	65,28
Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional*	Nilai	1,52	1,58	69,75	60,55	55,03
Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional*	Nilai	1,89	1,91	77,63	76,71	78,98
Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional*	Nilai	1,7	1,74	54,92	67,17	68,98
Skor Literasi*	Nilai	1,79	1,90	81,68	73,40	81,19
Skor Numerasi*	Nilai	1,61	1,66	62,34	63,86	75,62
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi	%	-	50,00	54,84	89,84	91,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabu. Trenggalek, 2026
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Trenggalek, 2026
*Catatan: *mulai tahun 2023 penghitungan menggunakan konversi ke angka 100*

Skor Literasi di Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan pada tahun 2025 menjadi sebesar 81,19, setelah sebelumnya menurun pada tahun 2024 sebesar 8,28 angka. Pada tahun 2023 skor literasi Kabupaten Trenggalek sebesar 81,68, sedangkan pada tahun 2024 menurun menjadi 73,40 dan naik di tahun 2025 menjadi 81,19. Pada tahun 2023, Rata-rata kemampuan Literasi SD sebesar 85,73 menurun menjadi 70,07 pada tahun 2024 dan 65,28 pada tahun 2025. Rata-rata kemampuan Literasi SMP sebesar 77,63 pada tahun 2023 menjadi 76,71 pada tahun 2024 dan menjadi 78,98 pada tahun 2025.

Sementara itu Skor Numerasi Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 sebesar 75,62. Pada tahun 2024 skor Numerasi Kabupaten sebesar 63,86. Angka ini meningkat sebesar 1,52 dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar 62,34. Peningkatan ini ditopang oleh peningkatan Rata-rata kemampuan Numerasi SMP. Pada tahun 2023 Rata-rata kemampuan Numerasi SMP sebesar 54,92 yang meningkat

menjadi 67,17 pada tahun 2024 dan 68,98 pada tahun 2025. Meskipun demikian, Rata-rata kemampuan Numerasi SD justru mengalami penurunan. Rata-rata kemampuan Numerasi SD menurun sebesar 9,2 angka dari 69,75 di tahun 2023 menjadi 60,55 di tahun 2024 dan 55,03 di tahun 2025.

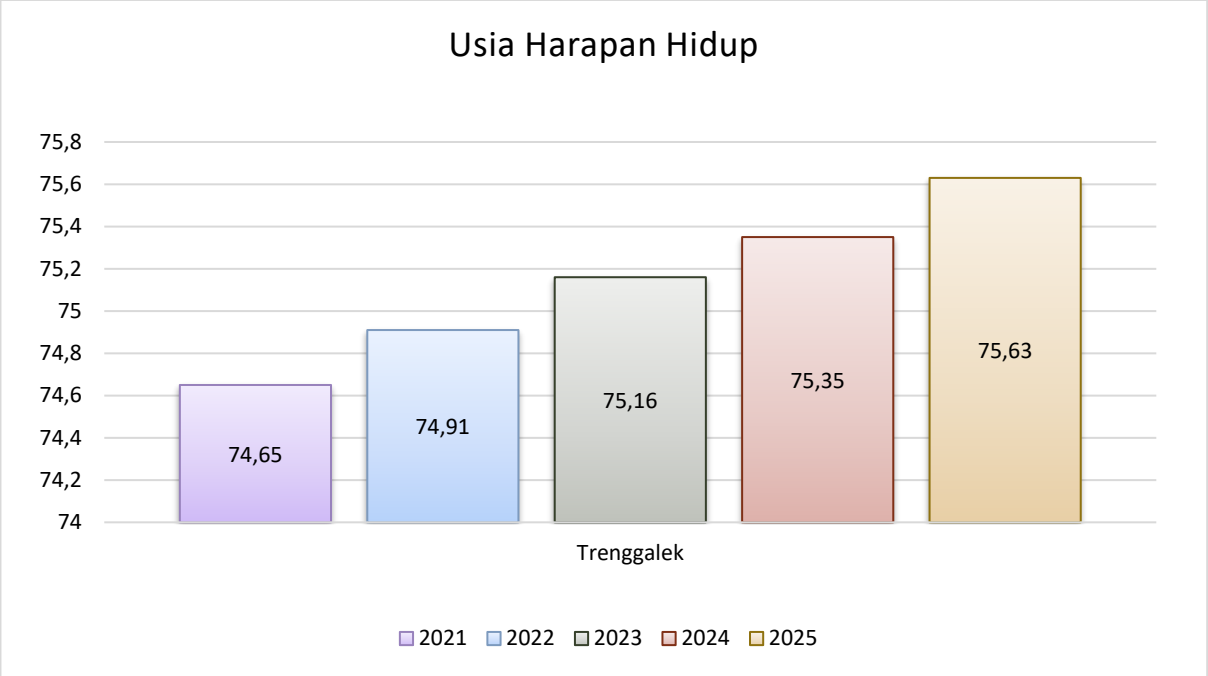
Pada tingkat satuan pendidikan, persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi meningkat setiap tahunnya. Indikator ini menghasilkan gambaran satuan pendidikan yang memiliki hasil AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) di atas atau mencapai batas kompetensi minimum yang ditetapkan. AKM sendiri mengukur kemampuan mendasar peserta didik dalam literasi membaca dan numerasi, serta survei karakter dan lingkungan belajar. Capaian Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi tahun 2022 sebesar 50%, meningkat menjadi 54,84% pada tahun 2023 dan kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2024 yaitu sebesar 89,84%. Sedangkan pada tahun 2025 naik menjadi 91,45%.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir, dengan asumsi bahwa pola tingkat kematian pada saat itu tetap berlaku sepanjang hidupnya. Berdasarkan data dari BPS Jawa Timur, Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Trenggalek menunjukkan peningkatan konsisten selama periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, UHH tercatat sebesar 74,65 tahun, meningkat menjadi 74,91 tahun di tahun 2022. Pada tahun 2023 mencapai 75,16 tahun, meningkat kembali menjadi 75,35 tahun pada tahun 2024, dan tahun 2025 mencapai 75,63 tahun. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan dalam aspek kesehatan masyarakat diantaranya yaitu peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penanganan stunting dan gizi buruk, pemerataan akses kesehatan, dan berbagai inovasi terkait pelayanan kesehatan. Secara keseluruhan, tren ini menjadi indikator positif terhadap kualitas hidup masyarakat Trenggalek yang semakin membaik dari tahun ke tahun.

Grafik II.42
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

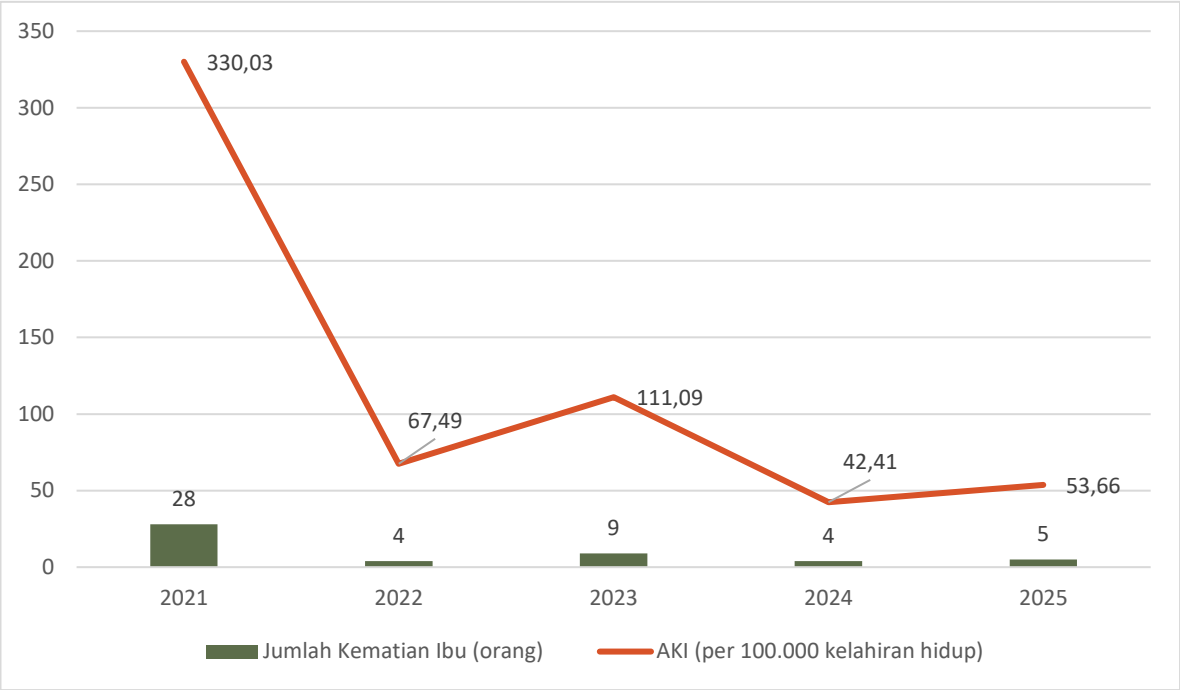


Sumber: BPS Prov. Jawa Timur, 2026
**) Menurut UHH Hasil Long Form SP2020*

Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian perempuan saat hamil, melahirkan, atau dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi indikator penting untuk mengukur kesehatan ibu dan akses layanan kesehatan yang memadai. AKI memberikan gambaran tentang kesehatan ibu dan anak, serta kualitas pelayanan kesehatan yang tersedia.

Grafik II.43
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2026

Peningkatan AKI menunjukkan adanya masalah dalam pelayanan kesehatan ibu, termasuk akses dan kualitasnya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sesuai dengan harapan dari 111,09 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 42,41 per 100.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian ibu 9 orang tahun 2023 menjadi 4 orang pada tahun 2024. Sedangkan pada tahun 2025, jumlah kematian ibu sebanyak 5 orang dengan AKI sebesar 53,66 per 100.000 kelahiran hidup.

Prevalensi Stunting

Upaya percepatan penurunan angka prevalensi stunting menjadi salah satu program prioritas nasional, termasuk di Kabupaten Trenggalek. Pemerintah daerah telah mengadopsi berbagai kebijakan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah, untuk memastikan program percepatan penurunan stunting berjalan secara terintegrasi. Melalui kolaborasi lintas sektor dan pelaksanaan aksi konvergensi, Kabupaten Trenggalek berkomitmen untuk menurunkan angka stunting sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

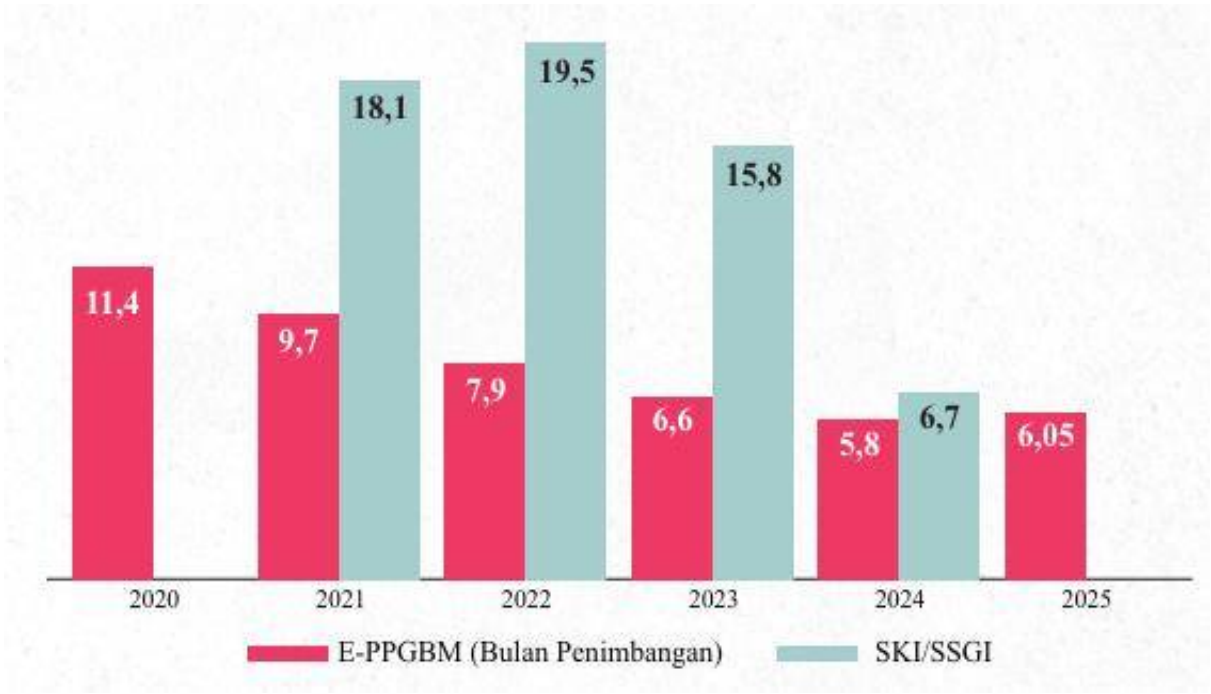
Prevalensi Stunting adalah Persentase balita (anak usia 0–59 bulan) yang mengalami tumbuh pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang/tinggi badan menurut umur, dibandingkan dengan standar pertumbuhan anak dari WHO. Berdasarkan data yang dihimpun dari dua

sumber utama, yaitu Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), prevalensi balita stunting di Kabupaten Trenggalek mengalami fluktuasi namun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Prevalensi stunting di Kabupaten Trenggalek dari hasil SSGBI Tahun 2019 tercatat 26,8% menurun pada SSGI Tahun 2021 menjadi 18,1%. Untuk Tahun 2020 karena pandemi COVID pada SSGI tidak dilakukan pengukuran status gizi balita. Pada SSGI Tahun 2022, prevalensi stunting mengalami peningkatan menjadi 19,5 berikutnya menurun menjadi 15,8% pada SKI Tahun 2023 dan menunjukkan tren penurunan sesuai harapan pada SSGI tahun 2024 yaitu 6,7%. Sedangkan tren prevalensi stunting dari bulan Penimbangan yang dilaporkan melalui E-PPGBM sejak tahun 2019 mengalami penurunan yaitu 13,4% di tahun 2019, 11,4 di tahun 2020, 9,7% di tahun 2021, 7,9% di tahun 2022, 6,6% di tahun 2023 dan 5,8% di tahun 2024. Pada tahun 2025 sedikit mengalami kenaikan yaitu menjadi 6,05%

Penurunan prevalensi ini mencerminkan keberhasilan program dalam meningkatkan status gizi dan kesehatan masyarakat di seluruh perangkat daerah dan lintas sektor di Kabupaten Trenggalek. Berbagai intervensi telah dilakukan, mulai dari pengukuran terstandar, skrining penyakit infeksi, hingga pemberian rujukan bagi kelompok sasaran prioritas seperti calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca salin, baduta, dan balita. Selain itu, penentuan lokus desa stunting juga dilakukan secara selektif berdasarkan ambang batas prevalensi dan kondisi keuangan daerah, sehingga intervensi dapat lebih terarah dan efektif.

Pemerintah daerah terus memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan cakupan intervensi, serta melakukan inovasi seperti program “Adipura Desa” untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung penurunan stunting secara berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat dan komitmen bersama, diharapkan angka stunting di Kabupaten Trenggalek dapat terus ditekan sesuai target yang telah ditetapkan.

Grafik II.44
Prevalensi Balita Stunting
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2026

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak merujuk pada ketersediaan fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, seperti kloset dengan leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinja yang aman (tangki septik atau IPAL). Fasilitas ini digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama beberapa rumah tangga lain, dan memastikan pembuangan limbah manusia yang aman. Sanitasi layak adalah hak dasar manusia, bukan hanya fasilitas, yang berdampak besar pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan lingkungan. Fasilitas sanitasi yang baik mengurangi risiko penyakit, mencegah pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup. Sanitasi yang layak juga terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya akses terhadap air bersih dan sanitasi untuk semua. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak menggunakan formula jumlah tumah tangga yang memiliki sanitasi layak dibandingkan dengan total rumah tangga. Realisasi Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak pada tahun 2025 sebesar 84,85. Adapun capaian akses sanitasi layak pada tahun 2021 sebesar 65,38 persen, meningkat menjadi 82,6 persen tahun

2022, dan 83,05 persen tahun 2023. Sedangkan tahun 2024 sebesar 84,66 persen yang menjadi baseline perhitungan pada tahun berikutnya.

Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik

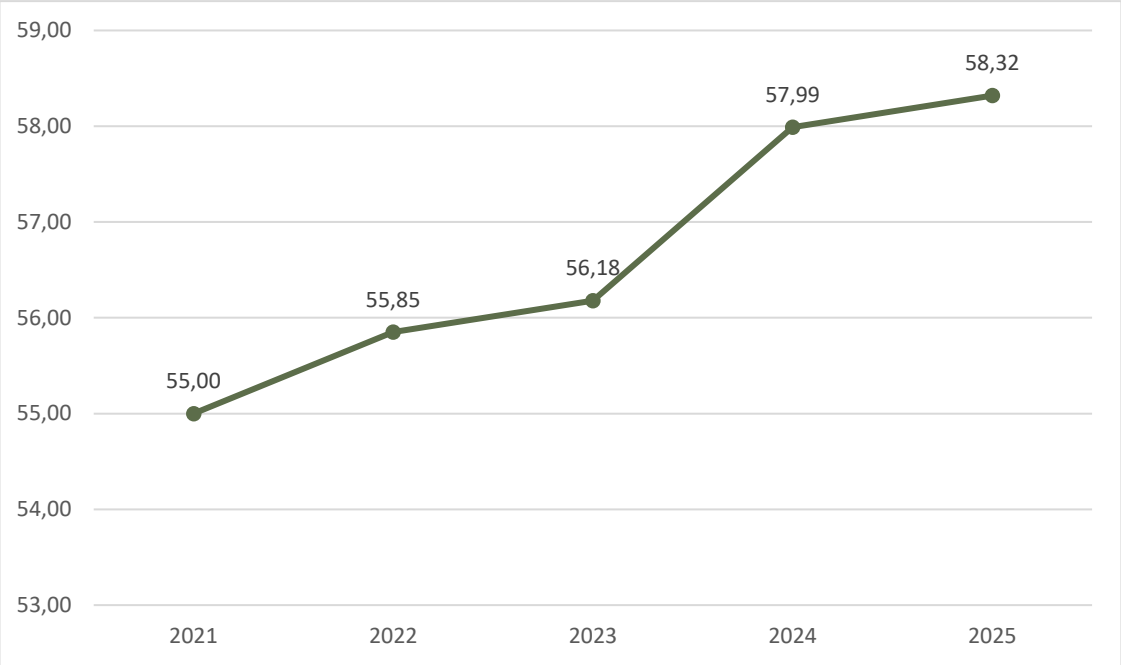
Salah satu infrastruktur yang penting untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan adalah sistem irigasi. Sistem irigasi yang baik sangat mempengaruhi keberlanjutan sektor pertanian dan memainkan peran penting dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Namun infrastruktur irigasi juga sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti perubahan curah hujan, frekuensi kekeringan, banjir, maupun dampak perubahan iklim lainnya.

Curah hujan yang polanya mengalami perubahan serta terjadinya peningkatan suhu permukaan akan mempengaruhi ketersediaan air untuk pertanian. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengoptimalkan produktivitas lahan melalui modernisasi praktik pertanian dan penggunaan teknologi serta meningkatkan investasi dalam sistem irigasi yang dapat memastikan akses yang merata bagi seluruh petani di Kabupaten Trenggalek.

Lebih lanjut, sistem irigasi yang memadai juga dapat menghindari terjadinya banjir di daerah dengan curah hujan yang tinggi. Dengan pengelolaan aliran air serta drainase yang efisien, sistem irigasi dapat mengurangi risiko penggenangan serta erosi tanah yang dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen.

Adapun kondisi jaringan di Kabupaten Trenggalek cukup memprihatinkan. Pada tahun 2024, sebesar 40 persen jaringan irigasi mengalami kerusakan. Bahkan pada tahun 2020, Kabupaten Trenggalek mengalami tingkat kerusakan jaringan irigasi yang lebih parah sebesar 45 persen. Namun, dengan bertambahnya persentase jaringan irigasi dalan kondisi baik dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Trenggalek terus berkomitmen untuk melakukan pemerataan akses petani terhadap jaringan irigasi.

Grafik II.45
Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas PUPR Kab. Trenggalek, 2026

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTR

Untuk mewujudkan penataan ruang yang aman, nyaman. produktif, dan berkelanjutan maka diperlukan kesesuaian pemanfaatan ruang. Kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan konsep dalam penataan ruang yang memastikan bahwa kegiatan pemanfaatan ruang seperti pembangunan dan kegiatan usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang. Kesesuaian pemanfaatan ruang akan menjadi persyaratan dasar dalam perizinan berusaha, memastikan keselarasan antara rencana kegiatan dengan rencana tata ruang yang berlaku. Formula perhitungan indikator kesesuaian pemanfaatan ruang diperoleh dengan cara membandingkan luas kawasan pemanfaatan ruang yang direkomendasikan dibanding luas kawasan peruntukan rencana tata ruang yang diajukan. Adapun capaian kinerja indikatornya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.58
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Trenggalek

No	Indikator	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase kesesuaian pemanfataan ruang dengan rencana tata ruang	49%	82%	96%	95%	94,9%

Sumber: Dinas PUPR Kab. Trenggalek, 2026

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan merupakan hak dasar setiap warga negara serta menjadi elemen penting dalam mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Akses terhadap hunian yang memenuhi syarat kelayakan fisik, keamanan, keterjangkauan, serta keberlanjutan lingkungan tidak hanya berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendukung stabilitas sosial dan pembangunan daerah yang inklusif. Pemenuhan kebutuhan hunian layak merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah daerah berperan penting dalam menciptakan ekosistem perumahan yang sehat melalui penguatan regulasi, perencanaan tata ruang, penyediaan lahan, dan fasilitasi pembiayaan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Upaya tersebut juga diarahkan untuk menjawab tantangan urbanisasi, keterbatasan lahan, dan peningkatan kebutuhan rumah setiap tahunnya.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah kayak huni, terjangkau, dan berkelanjutan harus memenuhi: 1) Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 2) Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dapat diukur dengan menggunakan proksi yaitu memenuhi 4 kriteria sebagai berikut: 1) ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding, dan lantai rumah memenuhi syarat; 2) Kecukupan luas tempat tinggal yaitu luas lantai perkapita >7,2 m; 3) Memiliki akses air minum layak; dan 4) Memiliki akses sanitasi layak.

Dalam periode 2021 hingga 2025, persentase hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak sebesar 68,26 persen pada 2021 kemudian menurun menjadi 67,3 persen di tahun 2024, dan naik kembali di tahun 2025 menjadi 77,20 persen. Angka ini menunjukkan bahwa penyediaan akses hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek belum sebanding dengan perkembangan jumlah penduduk. Oleh karena itu masih diperlukan program-program perbaikan infrastruktur, bantuan perumahan dari pemerintah, serta peningkatan peran serta swasta dan masyarakat.

Tabel II.59
Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman Kabupaten Trenggalek
Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah rumah layak, terjangkau, berkelanjutan	189.120	189.529	190.220	190.752	218.813
Jumlah Kepala Keluarga (KK)	277.050	279.212	280.350	283.435*	283.435*
Akses hunian layak, terjangkau, berkelanjutan (%)	68,26	67,88	67,85	67,3	77,20

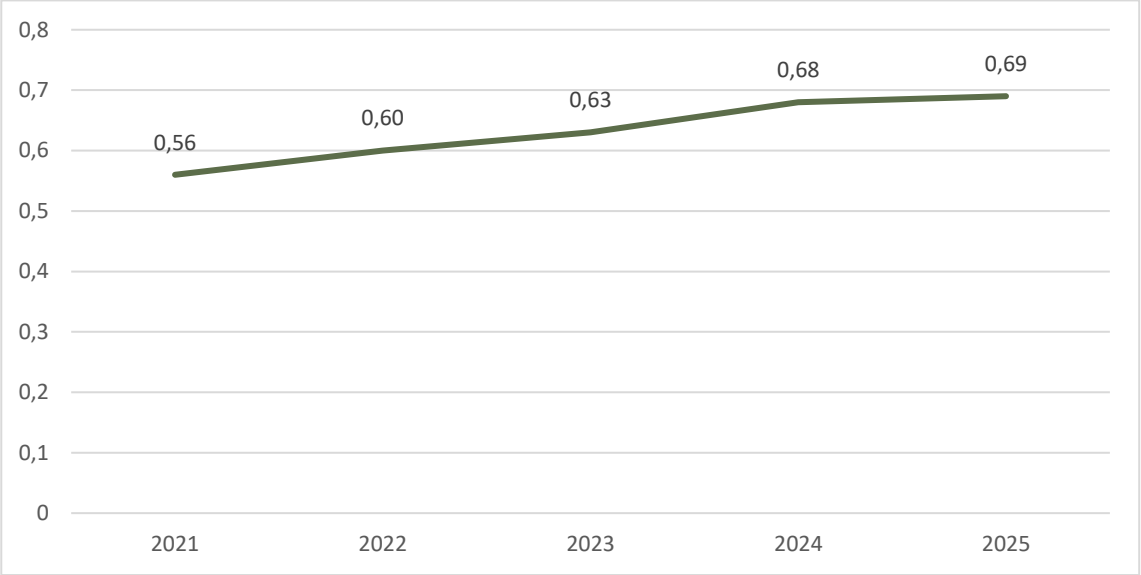
Sumber: Dinas PKPLH Kab. Trenggalek, 2026
Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Trenggalek, 2026
*Keterangan : *sebagai penyebut (angka konstan) pada penghitungan indikator Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan sesuai dengan periode RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2025-2029*

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Indeks Ketahanan Daerah

Pengukuran tingkat resiliensi daerah merupakan integrasi dari pengkajian risiko dan status kesiapan daerah untuk menghadapi berbagai ancaman bencana. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) menjadi komponen kapasitas dalam menghasilkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) serta diperlukan untuk menjadi acuan pemantauan dan evaluasi pembangunan resiliensi daerah (BNPB, 2023). IKD Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2022 sebesar 0,60, pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,63, dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 0,68. Tahun 2025 kembali meningkat menjadi 0,69. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penguatan ketahanan daerah melalui 7 (tujuh) prioritas telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan oleh BPBD Kabupaten Trenggalek.

Grafik II.46
Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Trenggalek, 2026

Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tanpa dikondisikan dengan baik, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat akan mengganggu jalannya penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Tugas ini harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak kepolisian dan TNI. Upaya penertiban dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dipandang penting, karena dampak pelanggaran berakibat luas terhadap ketidakstabilan kondisi sosial masyarakat. Untuk mengantisipasi serta melakukan tindakan dini secara cepat dan tepat dengan melakukan operasi penertiban dan tindakan preventif (non yustisi). Upaya Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tidak mudah. Hal itu dapat dilihat pada saat melaksanakan tugasnya baik dalam penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat, tidak selalu mendapat sambutan positif dari masyarakat. Ada banyak pihak yang kurang setuju bahkan menolaknya dengan keras. Selain penolakan karena tidak disukai juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat tertentu. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dihitung dengan formula (Jumlah gangguan ketentraman

dan ketertiban umum yang ditangani / Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum) x100%.

Tabel II.60
Capaian Indikator Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Trenggalek, 2026

Persentase Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan

Pengendalian Kebakaran dan penyelamatan adalah Pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh kebakaran, kelalaian manusia maupun faktor lain, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda serta dampak psikologis. Upaya yang telah dilakukan di Bidang Urusan ini dalam rangka pengendalian kebakaran dan penyelamatan dengan pembentukan relawan kebakaran di desa-desa, peningkatan kapasitas SDM, penyusunan SOP dan pemenuhan sarana prasarana penunjang. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja bidang urusan ini yaitu persentase pengendalian kebakaran dan penyelamatan, dimana Persentase Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan merupakan ukuran yang menggambarkan Penyelenggaraan Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan sebagai upaya pelayanan kepada masyarakat dalam situasi dan kondisi kedaruratan kebakaran. Persentase pengendalian kebakaran dan penyelamatan dihitung dengan formula (Jumlah pengendalian kebakaran dan penyelamatan yang ditangani / Jumlah laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan) x100%.

Tabel II.61
Capaian Indikator Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	100%	77,42%	65,06%	93%	98%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Trenggalek, 2026

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Indeks Kesejahteraan Sosial

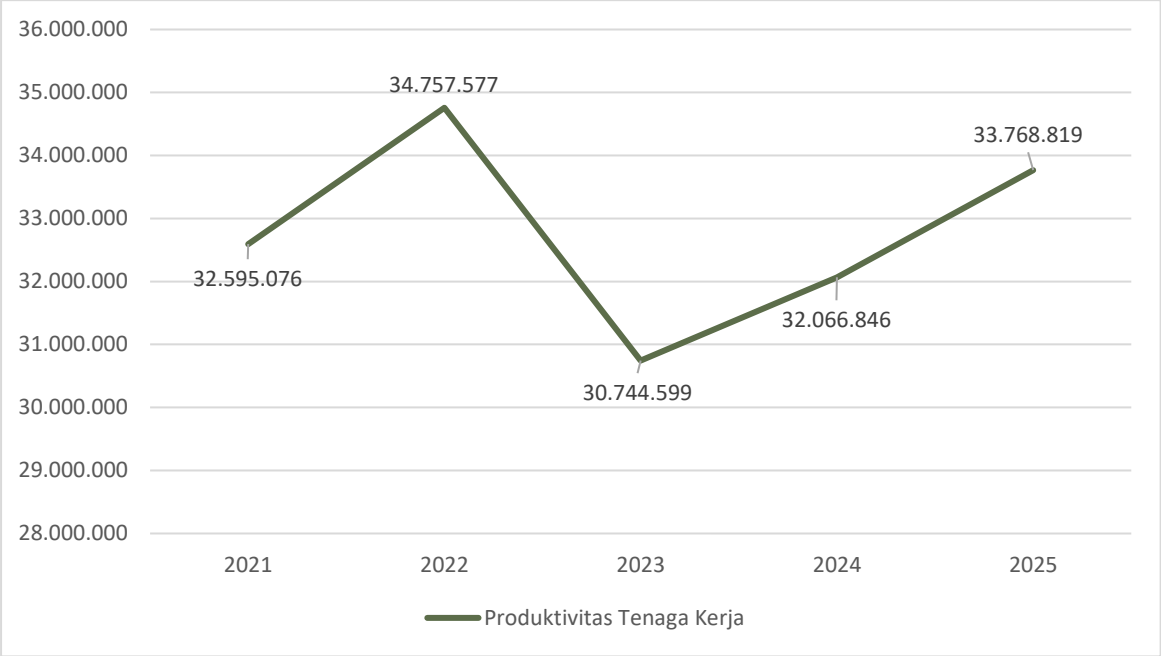
Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, baik secara objektif maupun subjektif. IKS bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi sosial masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar, kualitas hidup, dan pembangunan manusia. Pentingnya Indikator Kesejahteraan Sosial yakni membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam merencanakan program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; menjadi acuan bagi masyarakat untuk memahami kondisi sosial mereka dan berpartisipasi dalam Pembangunan dan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Adapun nilai Indeks Kesejahteraan pada tahun 2024 sebesar 56,85 dan tahun 2025 sebesar 64,89.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah ukuran seberapa efektif tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa. Produktivitas yang tinggi menunjukkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks makro, produktivitas tenaga kerja sering diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per tenaga kerja. Produktivitas juga dapat dilihat dari kemampuan tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan terus meningkatkan hasil yang dicapai.

Grafik II.47
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Perinaker Kab. Trenggalek, 2026 (diolah)

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada tahun 2021-2023 naik secara signifikan dari Rp. 32.595.076,00 per orang menjadi Rp. 34.757.577,00 per orang pada tahun 2022. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan teknologi dan infrastruktur serta peningkatan output yang lebih tinggi sehingga pendapatan perusahaan naik. Tetapi pada tahun 2023 terjadi penurunan tingkat produktivitas yang cukup signifikan menjadi Rp. 30.744.599,00 per orang, dan meningkat tipis pada tahun 2024 sebesar Rp. 32.066.846,00 per orang. Realisasi pada tahun 2024 merupakan baseline dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 – 2030. Sedangkan tahun 2025, naik kembali menjadi Rp. 33.768.819,00.

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Indeks Perlindungan Anak

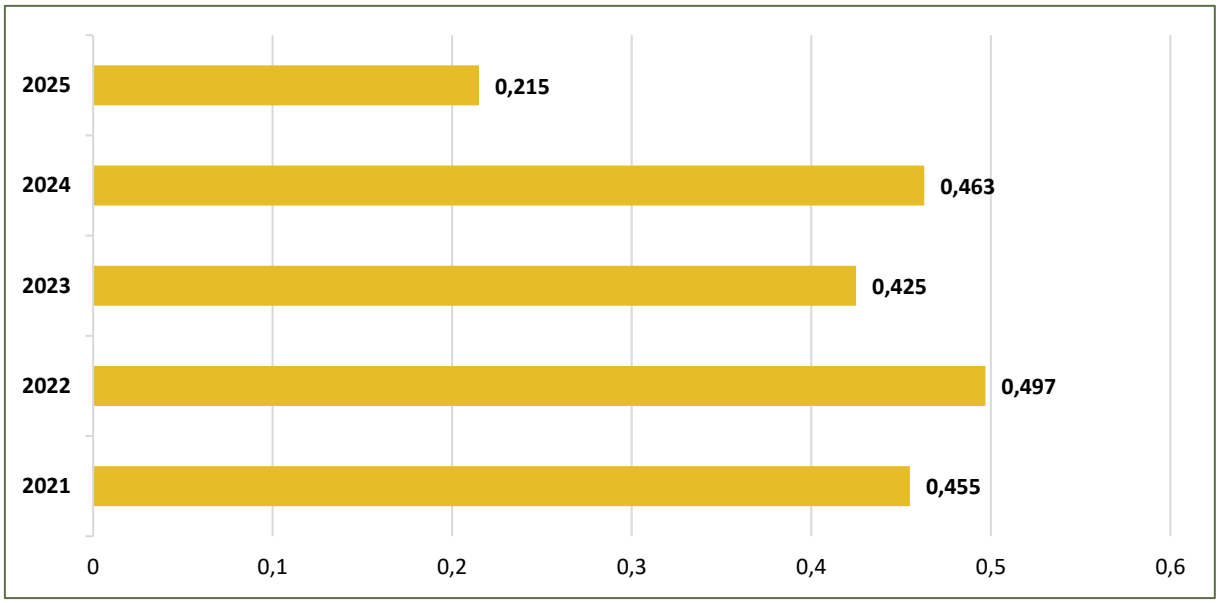
Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah Indikator yang menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak. IPA disusun berdasarkan 5 klaster hak anak, yaitu: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan perlindungan khusus. Pada tahun 2024 Indeks Perlindungan anak sebesar 66,27, angka ini digunakan sebagai

baseline RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2030. Sedangkan tahun 2025, Indeks Perlindungan Anak masih menunggu rilis resmi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender yang dilihat dari tiga aspek Pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Pada capaian Indeks Ketimpangan Gender dalam kurun waktu 2021 hingga tahun 2025, dapat terlihat capaian tahun 2021 menunjukkan angka 0,455 dan naik di tahun 2022 mencapai angka 0,497, dan menurun kembali di tahun 2023 menjadi 0,425. Pada tahun 2024, indeks kembali meningkat menjadi 0,463. Kondisi kenaikan pada beberapa tahun perlu menjadi perhatian khusus dalam upaya pengarusutamaan gender karena ketimpangan gender yang semakin melebar pada tahun tertentu. Tahun 2025, IKG menurun secara signifikan menjadi 0,215. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan di Kabupaten Trenggalek semakin rendah. Capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025 sebagaimana grafik berikut:

Grafik II.48
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



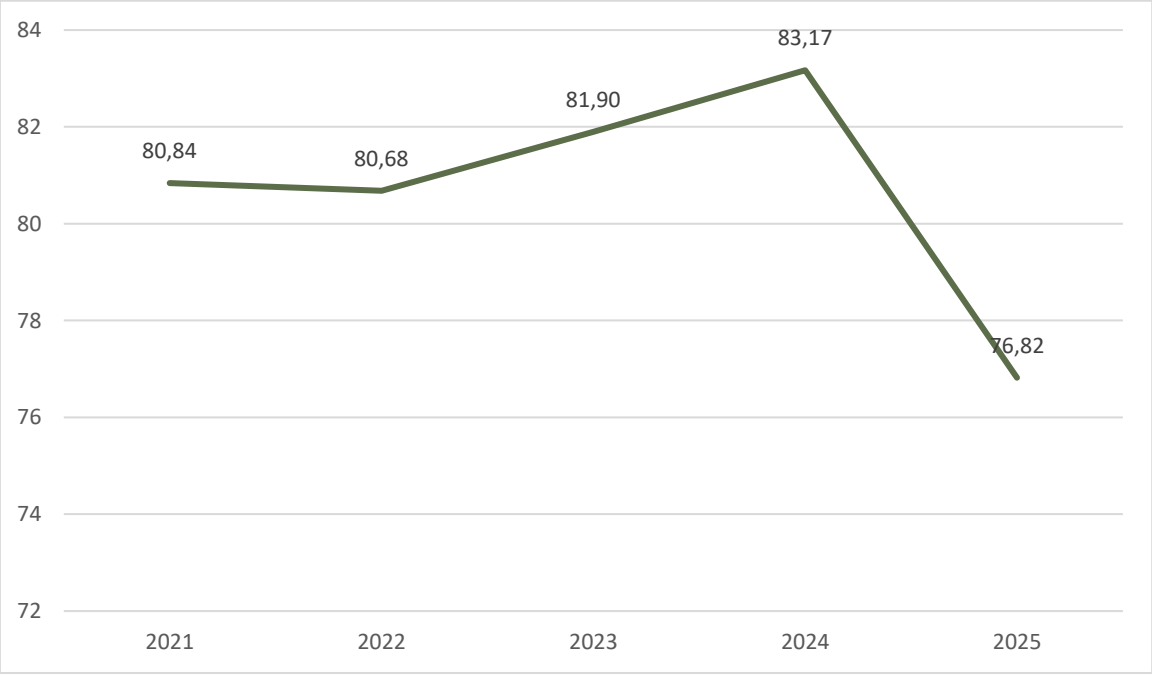
Sumber: BPS Prov. Jawa Timur, 2026

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek menunjukkan capaian yang fluktuatif dari tahun 2021 hingga 2025, dengan nilai berturut-turut sebesar 80,84 pada 2021, 80,68 pada 2022, 81,90 pada 2023, dan mencapai 83,17 pada 2024. Sedangkan tahun 2025 sebesar 76,82. Pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan pada tahun 2022 disebabkan Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan pada aspek keterjangkauan dan pemanfaatan. Pada tahun 2022 Kabupaten Trenggalek mengalami bencana banjir pada beberapa kecamatan pada bulan Oktober dan November dan terjadi dinamika harga yang sangat tinggi di tahun tersebut. Kenaikan pada tahun-tahun berikutnya mencerminkan perbaikan yang konsisten dalam aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan di daerah. Meningkatnya indeks ini dapat diasosiasikan dengan penguatan program pertanian, distribusi pangan yang lebih merata, serta peningkatan kesadaran gizi masyarakat. Penurunan IKP pada tahun 2025 disebabkan adanya perubahan metode perhitungan yang terbaru dari Bapanas. Pada tahun 2024 menggunakan metode lama dengan 6 indikator sedangkan untuk tahun 2025 menggunakan metode baru dengan 11 indikator.

Grafik II.49
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2026

Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Trenggalek tergambarkan juga di dalam Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA. Dokumen tersebut merupakan penerjemahan amanat Pasal 114 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan yang terintegrasi. Adapun Sistem informasi dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilitas pasokan dan harga pangan serta sistem peringatan dini terhadap masalah pangan serta kerawanan pangan dan gizi".

FSVA merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah desa. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah desa.

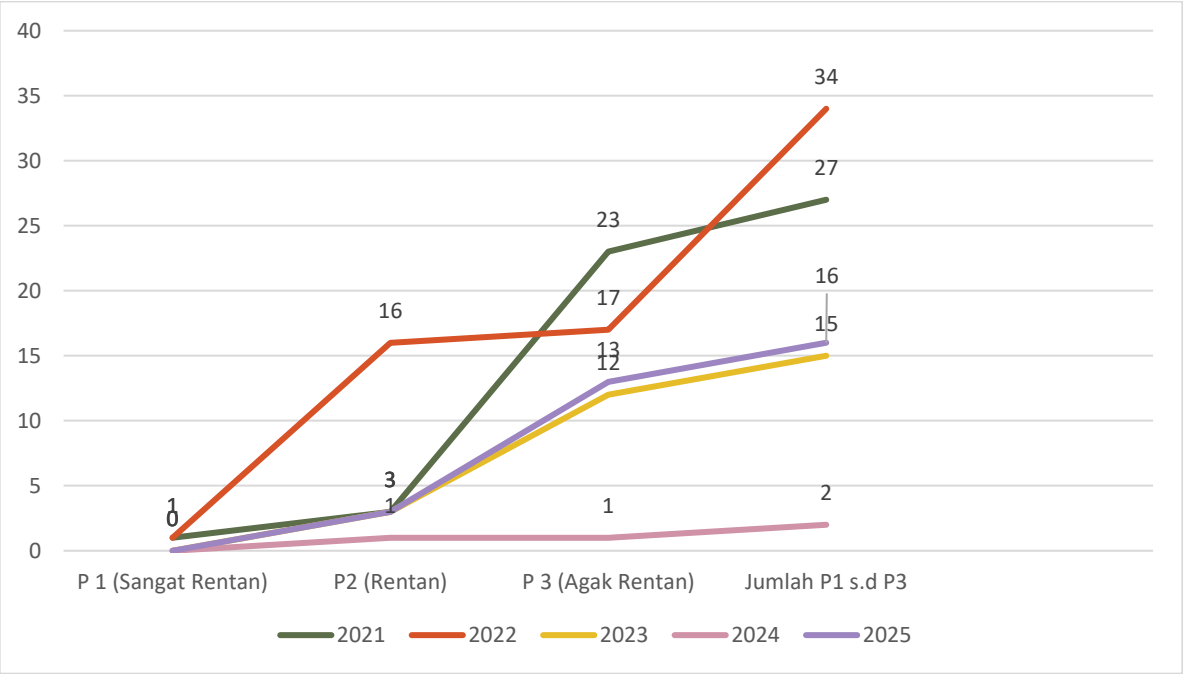
Aspek ketersediaan pangan terdiri dari 2 indikator: Rasio luas baku lahan sawah terhadap jumlah penduduk; dan Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Aspek akses terhadap pangan terdiri dari 2 indikator yaitu Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk; dan Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara. Sedangkan Aspek Pemanfaatan Pangan terdiri dari indikator: Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

Tabel II.62
Tabel Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Pangan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Prioritas (P)	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
P 1 (Sangat Rentan)	1	1	0	0	0
P2 (Rentan)	3	16	3	1	3
P 3 (Agak Rentan)	23	17	12	1	13
Jumlah P1 s.d P3	**27**	**34**	**15**	**2**	**16**

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2026 (diolah)

Grafik II.50
Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Pangan
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2026 (diolah)

Berdasarkan periode pengukuran tahun 2021 sampai dengan 2025, dari 157 desa/kelurahan yang tersebar di 14 kecamatan, jumlah desa/kelurahan rawan pangan mencapai puncak pada 2022 (34 desa/kelurahan), kemudian menurun tajam menjadi 15 desa (2023) dan hanya 2 desa (2024). Sedangkan tahun 2025, naik menjadi 16 desa. Desa dengan kondisi P1 (Sangat Rentan) mulai teridentifikasi pada pengukuran tahun 2021 dan 2022 dengan jumlah 1 (satu desa) kemudian menghilang sejak 2023. Selanjutnya, desa dengan kondisi P2 (Rentan) mengalami lonjakan tajam pada tahun 2022 (16 desa) yang awalnya hanya berjumlah 3 desa di tahun 2021. Namun, kondisi tersebut kembali menurun drastis menjadi 3 desa (2023), dan hanya tersisa 1 (satu) desa pada tahun 2024. Lonjakan 2022 bisa disebabkan dampak lanjutan pandemi terhadap ekonomi dan pangan, serta peningkatan kualitas pendataan. Terakhir, desa dengan kondisi P3 (Agak Rentan) sepanjang periode pengukuran menjadi kelompok dengan jumlah terbesar yaitu 23 desa (2021), 17 desa (2022), 12 desa (2023), dan tersisa 1 desa (2024). Meski awalnya mendominasi, desa dengan kondisi P3 ini konsisten menurun setiap tahun.

Sedangkan tahun 2025, secara rinci berdasarkan analisis komposit dari 152 desa dan 5 kelurahan yang ada di Kabupaten Trenggalek maka didapatkan hasil sudah tidak ada desa yang masuk dalam prioritas 1 (sangat rentan). Sementara itu, terdapat 3 desa (Prioritas 2), 13 desa (Prioritas 3), 40

desa (Prioritas 4), 37 desa (Prioritas 5), dan 64 (Prioritas 6). Wilayah yang paling tahan pangan adalah Desa Panggungsari, Kecamatan Durenan.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Persentase Pengurusan Penggunaan Kawasan Hutan untuk PSN dan PSD

Penggunaan Kawasan Hutan untuk proyek strategis nasional dan strategis daerah di kabupaten Trenggalek memiliki mekanisme khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum rujukannya adalah PP nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kehutanan dan Permen LHK nomor 7 Tahun 2021 tentang perencanaan kehutanan, perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan.

Di Kabupaten Trenggalek terdapat 2 proyek strategis nasional yaitu pembangunan Jalan Lintas Selatan dan Pembangunan Bendungan Bagong. Pada proyek strategis nasional tersebut Pemkab trenggalek mempunyai tugas melaksanakan penyediaan lahan pada kawasan hutan. Pada tahun 2020 pemerintah kabupaten Trenggalek menguruskan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan bendungan bagong seluas 141 Ha. Pada Tahun 2021 Pemkab Trenggalek melaksanakan penataan batas dan inventarisasi tegakan pada area pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan bendungan bagong. Pada Tahun 2022 pemkab trenggalek dan BBWS Brantas mengajukan rencana tebang untuk area penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan bendungan bagong seluas 70 Ha.

Pada proyek strategis nasional untuk pembangunan Jalan Lintas selatan, Pemkab Trenggalek mengajukan perubahan persetujuan penggunaan kawasan hutan karena ada beberapa trase yang berubah. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapatkan rekomendasi Gubernur Jawa Timur untuk perubahan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan JLS seluas 300 Ha. Pada tahun 2025 Pengurusan Penggunaan Kawasan Hutan untuk PSN dan PSD bendungan Bagong 3 seluas 50 Ha, JLS Tahap I 22 Ha (Munjungan, Watulimo) dan Huntara tanah gerak Ngrandu 1,7 Ha.

Pengurusan penggunaan kawasan hutan untuk proyek strategis daerah adalah penggunaan kawasan hutan untuk Tempat Pembuangan Akhir Sampah, Penggunaan Kawasan Hutan untuk ruas jalan kabupaten dan Pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan kota maritim baru Prigi.

Pada tahun 2020 telah keluar SK Menteri Kehutanan tentang penggunaan kawasan hutan untuk 12 ruas jalan kabupaten, pada tahun 2022 telah keluar penetapan areal kerja untuk 10 ruas jalan kabupaten dan persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan kota maritim

prigi seluas 36 ha. Pada tahun 2022 telah terbit SK Menteri LHK tentang penetapan batas areal kerja untuk Tempat Pembuangan Sampah Srabah, Panggul dan Watulimo seluas 16 Ha.

Tabel II.63
Persentase Pengurusan Penggunaan Kawasan Hutan untuk PSN dan PSD

INDIKATOR	Baseline				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Pengurusan Penggunaan Kawasan Hutan untuk PSN dan PSD	6,6	12,4	19	28,02	41,31

Sumber: Dinas PUPR Kab. Trenggalek, 2026

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Penurunan Emisi GRK kumulatif

Salah satu sektor penting yang menyumbang emisi terbesar di Kabupaten Trenggalek adalah sektor energi sebesar 42% dan sektor pertanian sebesar 40% dari total emisi karbon. Penyumbang emisi CO2 dari sektor energi berasal dari konsumsi listrik yang masih bertumpu pada bahan bakar fosil serta emisi yang berasal dari sektor transportasi. Lebih lanjut emisi sektor pertanian sebagian besar berasal dari praktik pertanian yang belum ramah lingkungan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan sektor tersebut diatas yang mengedepankan prinsip kelestarian menjadi kunci penting dalam strategi penurunan emisi. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mulai mendorong penerapan praktik pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, menjaga daya dukung sumber daya alam, serta melindungi kawasan konservasi dari tekanan eksploitasi. Kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan untuk membangun sistem bisnis pertanian yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkontribusi terhadap penurunan emisi dan perlindungan lingkungan jangka panjang. Lebih lanjut, kebijakan sektor energi juga harus dikedepankan melalui peningkatan bauran energi terbarukan untuk menggantikan bahan bakar fosil di sub sektor energi listrik dan transportasi.

Sejak tahun 2018, Kabupaten Trenggalek mengalami net positif yaitu 198,48 ton CO2 pada tahun 2018 dan sebesar 115,12 ton CO2 pada tahun 2022. Untuk mencapai net zero emission, maka diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengurangi emisi dan menambah sekuestrasi. Sejak tahun 2018, Kabupaten Trenggalek senantiasa melakukan upaya aksi mitigasi untuk mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Upaya tersebut terdokumentasi dalam platform AKSARA yang dikembangkan Bappenas. Pada umumnya, penurunan emisi CO2 secara kumulatif meningkat setiap

tahunnya. Pada tahun 2020 sebesar 162.312 ton CO2 dan meningkat menjadi 816.291 ton CO2 pada tahun 2025. Sementara itu, dalam kurun waktu 5 tahun, penurunan emisi CO2 tahunan di Kabupaten Trenggalek mengalami fluktuatif. Fluktuasi ini mencerminkan belum konsistennya upaya mitigasi emisi, terutama dari sektor-sektor penyumbang emisi utama (energi dan pertanian) yang memerlukan pendekatan lebih sistematis dan berkelanjutan.

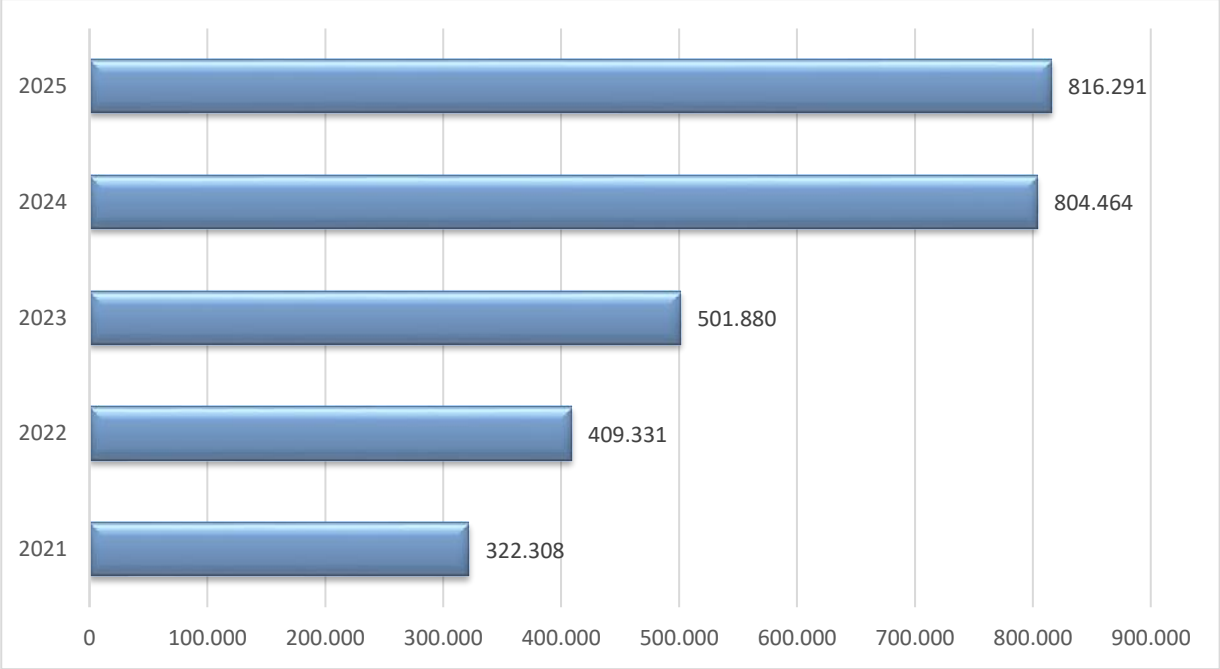
Tabel II.64
Emisi CO2 (ton CO2) Kabupaten Trenggalek

No	Sektor	Emisi (Gg CO2)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Energi	447,64	463,68	463,27	479,48	493,99
	1A1a1. Electricity Consumption	172,20	185,17	213,67	214,97	215,60
	1A2. Manufacturing Industries and Construction	10,62	13,27	10,06	9,5	9,5
	1A3. Transport	208,47	208,78	179,16	195,39	197,92
	1A4b. Residential	56,35	56,46	60,38	59,62	70,97
2	IPPU	3,14	3,15	3,15	3,16	3,17
	2H2. Food and Beverages Industry	3,14	3,15	3,15	3,16	3,17
3	Pertanian	402	392,38	387,92	414,46	460,49
	3A1. Enteric Fermentation	77,58	79,98	82,64	84,12	85,67
	3A2.a (CH4) From Manure Management	4,58	4,8	5,09	5,39	5,34
	3A2.b Direct N2O From Manure Management	39,29	40,39	40,8	41,64	41,6
	3C1.a Biomass Burning Cropland	2,33	2,27	2,31	2,4	2,35
	3C1.b Biomass Burning Grassland	0,31	0,32	0,3	0,28	0,19
	3C2. Liming	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12
	3C3. Urea Fertilization	8,03	8,07	8,07	8,02	7,9
	3C4. Direct N2O Emissions from Managed Soils	86,68	85,28	78,75	93,29	132
	3C5. Indirect N2O Emissions from Managed Soils	20,82	20,18	18,97	21,86	29,23
	3C6. Indirect N2O Emissions from Manure Management	5,45	4,57	4,69	6,15	4,87
	3C7. Rice Cultivations	156,78	146,38	146,17	151,18	151,22
4	FOLU	-1225,31	-970,95	-978,22	-1026,98	-1033,92
	3B. Forest and Other Land Use					
	3B1a. Forest Remaining Forest	-1167,25	-885,22	-891,96	-949,41	-957,73
	3B2a. Cropland Remaining Cropland	-60,05	-85,84	-86,26	-77,57	-76,19
	3C1a. Biomass Burning in Forest Land	1,99	0,11	0	0	0
5	Limbah	174,05	178,07	178,61	188,15	191,39
	4A. Pembuangan Akhir Sampah Padat	13,99	14,43	14,8	15,11	15,62
	4B. Pengolahan Limbah Padat secara Biologi	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
	4C. Pembakaran Sampah melalui Insinerator dan Pembakaran Sampah secara Terbuka	23,36	23,41	23,45	24,71	24,87
	4D1. Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga	98,41	98,78	98,77	103,17	103,07
	4D2. Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah Industri	38,22	41,38	41,52	45,08	47,75
Total		- 198,48	66,33	54,73	58,27	115,12

Sumber: Traction Energy Asia, 2024

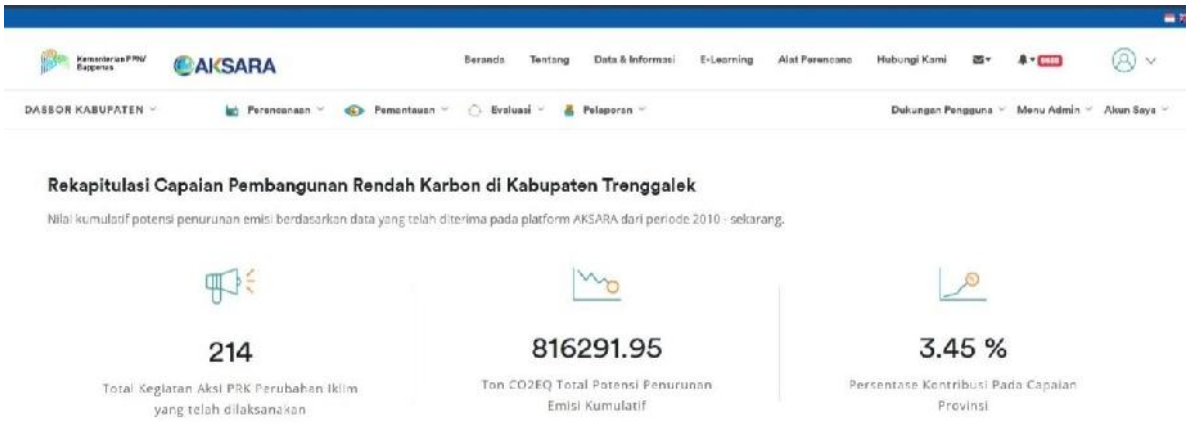
Pada tahun 2025 realisasi Penurunan Emisi GRK Kabupaten Trenggalek sebesar 816.291 Ton CO2 Eq dari target yang ditetapkan sebesar 854.464 Ton CO2 Eq atau tercapai sebesar 95,53 persen. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan masih terdapat pembakaran sampah dan penggunaan kendaraan bermotor mayoritas masih menggunakan bahan bakar fosil. Sedangkan faktor yang mendorong capaian indikator Penurunan Emisi GRK yakni Gencarnya gerakan penanaman pohon, banyaknya kendaraan yang memenuhi baku mutu emisi, pengolahan sampah di TPS3R, pemanfaatan PJU tenaga surya.

Grafik II.51
Penurunan Emisi GRK kumulatif (tonCO2eq) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Bappenas, 2026

Gambar II.16
Rekapitulasi Capaian Pembangunan Rendah Karbon di Kabupaten Trenggalek



Sumber: Website AKSARA, 2026

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dengan jumlah penduduk hasil registrasi tahun 2024 hasil Data Konsolidasi Bersih sebanyak 753.810 jiwa. Penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan catatan sipil menjadi sangat penting untuk dapat dikelola secara baik, dalam hal penerapan KTP Nasional berbasis NIK, khusus untuk Kabupaten Trenggalek baru mulai terlaksana tahun 2012. Kabupaten Trenggalek saat ini telah menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) yang merupakan sistem administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi komunikasi secara online. Tabel di bawah ini adalah gambaran capaian kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

Tabel II.65
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

No	Uraian	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	B(87,87)	B{85,53)	A(98,85)	A(99,58)	A(99,48)

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Trenggalek, 2026

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Persentase Desa Cepat Klasifikasi Cepat Berkembang

Desa cepat berkembang adalah desa yang memiliki tingkat kemajuan dan potensi untuk terus berkembang lebih pesat, ditandai dengan peningkatan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat, serta perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik. Desa ini biasanya sudah mencapai tahap swasembada atau mendekati, dengan masyarakat yang mulai meninggalkan ketergantungan pada sektor pertanian dan mulai mengembangkan potensi lokal serta memiliki akses yang baik ke berbagai fasilitas dan layanan. Capaian desa cepat berkembang di Kabupaten Trenggalek dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.66
Jumlah Desa berdasarkan Kategori Desa Tahun 2021-2025
di Kabupaten Trenggalek

Kategori	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Cepat Berkembang	69	74	76	90	120
Berkembang	59	56	62	31	32
Kurang Berkembang	24	22	14	8	0
Jumlah	152	152	152	152	152

Sumber : Dinas PMD Kab. Trenggalek, 2026

Persentase desa klasifikasi cepat berkembang pada tahun 2021 sebesar 45,39 persen, tahun 2022 sebesar 48,68 persen, dan tahun 2023 naik mencapai angka 50 persen. Sedangkan tahun 2024 dan 2025 naik signifikan menjadi 59,21 persen dan 78,9 persen.

Persentase BUMDES Kategori Maju

BUMDes kategori maju adalah Badan Usaha Milik Desa yang memiliki kinerja dan dampak yang signifikan terhadap perekonomian desa dan masyarakat. Kategori ini menunjukkan bahwa BUMDes tersebut telah mencapai kemandirian usaha, memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), dan memiliki dampak positif yang luas bagi kesejahteraan masyarakat desa

Jumlah BUMDES berdasarkan kategori BUMDES dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.67
Jumlah BUMDes berdasarkan Kategori BUMDes
Tahun 2021-2025 di Kabupaten Trenggalek

Kategori	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Maju	4	5	5	6	10
Berkembang	20	23	23	25	30
Pemula	61	61	59	57	51
Perintis	67	63	65	64	61
Jumlah	152	152	152	152	152

Sumber : Dinas PMD Kab. Trenggalek, 2026

Persentase BUMDes kategori maju pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 2,63 persen, tahun 2022 dan 2023 sebesar 3,29 persen, dan tahun 2024 naik menjadi sebesar 3,95 persen. Sedangkan tahun 2025 naik kembali menjadi sebesar 6,58 persen.

Kemajuan BUMDes sangat bergantung pada beberapa faktor, termasuk:

- **Potensi desa:** Potensi desa yang ada harus dikelola dan dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- **Peran pemerintah desa:** Pemerintah desa yang serius dan mendukung akan memperkuat BUMDes.
- **Partisipasi masyarakat:** Partisipasi aktif masyarakat dan pihak swasta juga sangat penting untuk kemajuan BUMDes.

BUMDes yang dikategorikan maju di Trenggalek adalah BUMDes Maju Jaya Masaran, yang berfokus pada pengembangan usaha di bidang penyewaan alat dan desa wisata, serta BUMDes Bangkit Prima, yang juga masuk kategori BUMDes baik di Kabupaten Trenggalek. Selain itu, BUMDes Sumbreng Prima di Desa Munjungan juga memiliki potensi usaha yang menjanjikan dan didukung oleh Pemerintah Desa, menurut BUMDes Sumbreng Prima.

Beberapa BUMDes lain yang juga disebutkan dalam konteks potensi kemajuan di Trenggalek, meskipun tidak secara eksplisit dikategorikan "maju", adalah:

1. **BUMDes Maju Jaya Makmur (MJM) :** Bergerak di bidang pengelolaan sampah, layanan kuliner, dan fasilitas parkir.
2. **BUMDes di Desa Wonocoyo :** Bergerak di bidang simpan pinjam dan pelayanan jasa fotocopy serta menjual ATK, dengan potensi di bidang pariwisata seperti Pantai Kili-Kili dan Pantai Pelang.

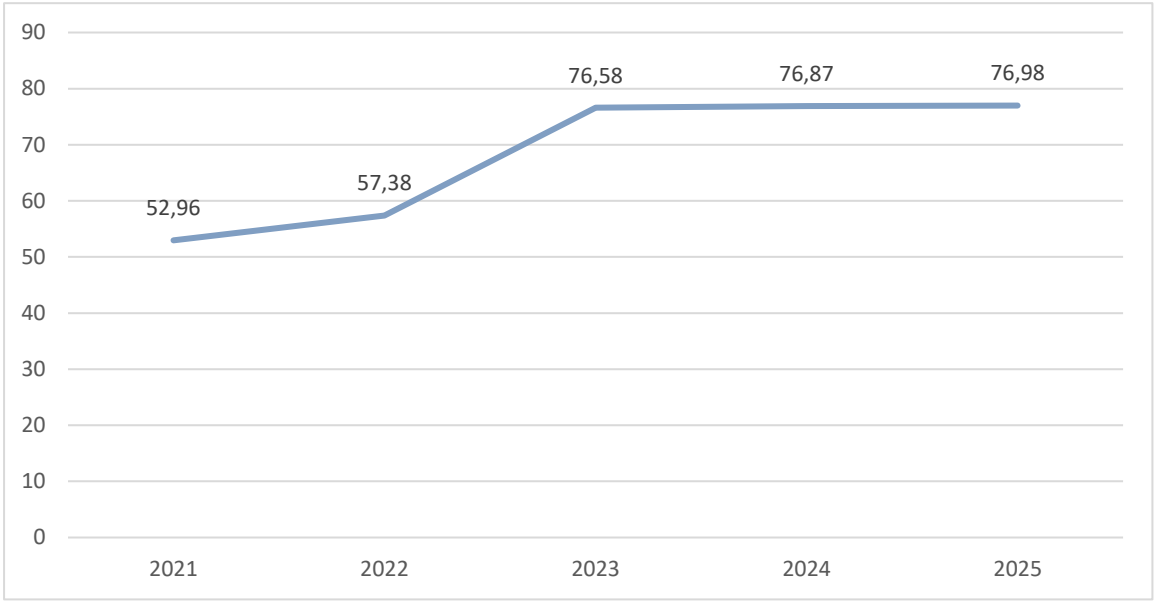
N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Keluarga merupakan penopang dasar perkembangan individu dalam masyarakat. Semua aspek kehidupan berawal dari keluarga. Unggul dan kuatnya individu dalam masyarakat pada awalnya selalu ditopang oleh institusi keluarga yang baik. Keluarga yang bahagia dan sejahtera akan membentuk masyarakat Kabupaten Trenggalek yang saling asih, bergotong royong dan terdorong untuk maju. Pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga menggunakan indikator

Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA). Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) adalah indikator keberhasilan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang ditentukan berdasarkan 3 dimensi yakni dimensi ketentraman, dimensi kemandirian, dan dimensi kebahagiaan keluarga.

Grafik II.52
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Trenggalek, 2026

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, iBangga tercatat sebesar 52,96 dengan kategori berkembang, kemudian meningkat menjadi 57,38 pada tahun 2022. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2023 mencapai 76,58. Pada tahun 2024 naik sedikit menjadi 76,87, dan tahun 2025 menjadi 76,98.

Peningkatan luar biasa ini menunjukkan bahwa unsur ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga di Trenggalek semakin optimal. Pada tahun 2025, iBangga mencapai kategori Tangguh, mencerminkan keberhasilan berbagai upaya komprehensif yang telah dilakukan. Program seperti pendampingan keluarga, pembentukan Kampung KB, serta optimalisasi peran penyuluh KB berkontribusi besar dalam menciptakan keluarga yang lebih sejahtera dan mandiri.

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai sejauh mana pembangunan daerah

telah memperhatikan aspek kependudukan sebagai titik sentral perencanaan pembangunan. IPBK disusun untuk mengukur tingkat integrasi kebijakan kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini bahwa Kabupaten Trenggalek mampu mengarahkan program dan kebijakan yang relevan dengan dinamika kependudukan, seperti pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia, pengendalian mobilitas penduduk, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Dengan adanya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) perencanaan pembangunan daerah lebih komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan. Karena seluruh aspek pembangunan disusun dengan memperhatikan struktur, komposisi, distribusi, serta karakteristik penduduk. Adapun nilai Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di tahun 2024 sebesar 61,8 meskipun IPBK baru terhitung capaiannya di Tahun 2024 yang sebelumnya belum terdapat indeks dimaksud. Sedangkan pada tahun 2025 sebesar 67,6 (kategori sedang).

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

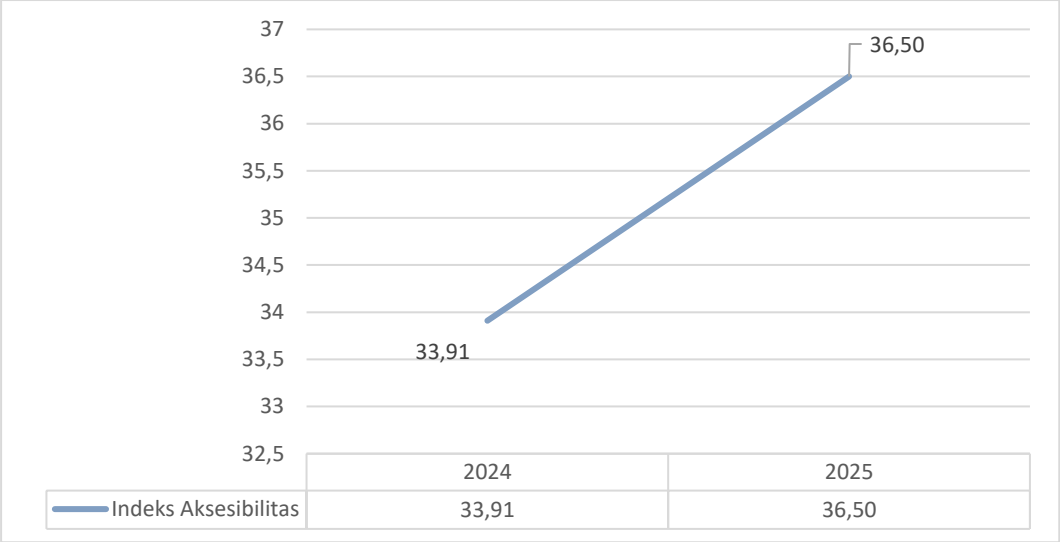
Indeks Aksesibilitas

Penerapan Indeks Aksesibilitas tidak hanya menjadi bagian dari pengukuran kinerja pembangunan, tetapi juga menjadi arah kebijakan strategis Kabupaten Trenggalek dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang inklusif, berkeadilan, dan rendah karbon. Indeks ini mencerminkan tingkat kemudahan akses masyarakat terhadap layanan transportasi umum dan sarana berjalan kaki, berdasarkan dimensi jarak, moda, dan kualitas infrastruktur. Dari sisi sosial dan demografi, Kabupaten Trenggalek memiliki karakteristik kependudukan yang tersebar di wilayah perbukitan, pesisir, dan dataran rendah, dengan aksesibilitas yang tidak merata antarwilayah. Ketimpangan ini dapat menyebabkan keterbatasan akses ke layanan dasar, terutama di wilayah terpencil. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan Indeks Aksesibilitas menjadi bentuk afirmasi terhadap kelompok marjinal seperti pelajar dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, dan masyarakat desa terpencil.

Secara ekonomi, konektivitas dan mobilitas yang lebih inklusif dan efisien akan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini mendorong partisipasi pelaku UMKM, meningkatkan akses ke pasar dan jasa, serta mengurangi biaya logistik dan transportasi. Transportasi yang mudah diakses dan terjangkau juga akan memperkuat basis ekonomi regeneratif yang sedang dibangun dalam Pilar Ekonomi Inklusif dan Regeneratif RPJMD Trenggalek. Dalam pengukuran indeks ini, indikator teknis yang dipertimbangkan

mencakup tiga dimensi utama yakni (1) Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia,; (2) Persentase layanan angkutan darat; (3) Persentase fasilitas prasarana angkutan darat layak fungsi.

Grafik II.53
Indeks Aksesibilitas



Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Trenggalek, 2026

Aksesibilitas yang baik tentunya juga harus didukung dengan ketersediaan prasarana pendukung kelengkapan jalan seperti PJU, rambu, marka, guardrail, separator dan prasarana pendukung lainnya. Prasarana tersebut juga berperan penting dalam peningkatan aspek keselamatan lalu-lintas. Pemerintah Kabupaten Trenggalek juga terus berupaya dalam penyediaan prasarana pendukung kelengkapan jalan tersebut.

Manfaat jangka panjang dari Indeks Aksesibilitas tidak hanya dalam konteks pelayanan transportasi, tetapi juga dalam mendukung penurunan emisi karbon, penguatan keadilan spasial, serta percepatan pencapaian target SDGs. Secara spesifik, indeks ini berkontribusi pada SDG 10 (pengurangan ketimpangan), SDG 11 (kota dan permukiman berkelanjutan), dan SDG 13 (penanganan perubahan iklim). Pada tahun 2024, realisasi Indeks Aksesibilitas Kabupaten Trenggalek sebesar 33,91 persen yang sekaligus merupakan pertama kali dihitungnya indikator Indeks Aksesibilitas. Adapun faktor penghambat untuk mencapai target di masa mendatang antara lain: 1) penurunan jumlah pengguna angkutan umum; 2) Keterbatasan pengguna angkutan umum; 3) Keterbatasan prasarana pelengkap jalan. Sedangkan faktor pendorongnya antara lain: 1) Komitmen pemerintah dalam dokumen perencanaan; 2) Meningkatnya tren gaya hidup hijau dimasa mendatang; 3) Peluang penyediaan akses ke kawasan pariwisata. Sedangkan pada tahun 2025 Indeks Aksesibilitas mencapai 36,5.

Pencapaian realisasi tersebut berasal dari 3 (tiga) komposit indikator, meliputi pencapaian presentase kebutuhan prasarana kelengkapan jalan yang tersedia tercapai sebesar 24,94%, kemudian untuk cakupan layanan angkutan darat sebesar 43,92%, serta presentase fasilitas prasarana angkutan darat layak fungsi sebesar 40%.

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

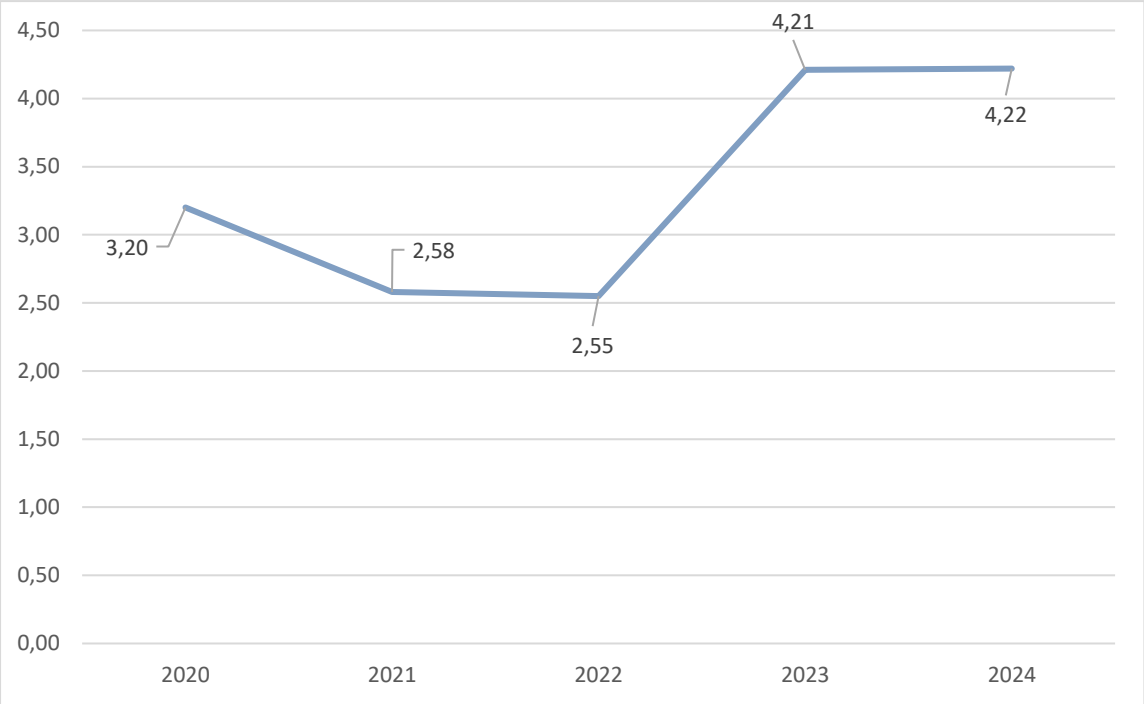
Dari sisi peningkatan digitalisasi pemerintahan dapat terlihat dari capaian Indeks SPBE (Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Indeks SPBE diukur menggunakan sejumlah indikator yang memiliki bobot nilai tertentu dengan range nilai dari 1 - 5. Hasil kumulatif dari penilaian setiap indikator tersebut akan menghasilkan skor akhir Indeks SPBE yang diklasifikasikan ke dalam predikat sebagai berikut:

- Kurang: Indeks SPBE < 1,8
- Cukup: Indeks SPBE 1,8 s.d < 2,6
- Baik: Indeks SPBE 2,6 s.d < 3,5
- Sangat Baik: Indeks SPBE 3,5 s.d < 4,2
- Memuaskan: Indeks SPBE 4,2 s.d 5,0

SPBE merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun capaian Indeks SPBE Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 mencapai 3,2. Sedangkan pada tahun 2021, indeks mengalami penurunan menjadi 2,58, dan kembali turun pada tahun 2022 menjadi 2,55. Namun, pada tahun 2023, terjadi kenaikan yang cukup signifikan hingga mencapai 4,21. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, dengan Indeks SPBE meningkat sedikit menjadi 4,22, yang mengindikasikan terus berkembangnya digitalisasi dalam pengelolaan pembangunan, khususnya pada pelayanan publik kepada masyarakat Trenggalek.

Khusus tahun 2025 Kabupaten Trenggalek tidak masuk dalam daftar pelaksanaa evaluasi dan penilaian Indeks SPBE karena lokus pemantauan dan evaluasi SPBE di fokuskan pada daerah kabupaten/kota yang capaian indeksnya masih dibawah 2,6 dengan demikian target dan capaian indeks SPBE Kabupaten Trenggalek tahun 2025 tetap menggunakan target dan capaian tahun 2024.

Grafik II.54
Hasil Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2020-2024



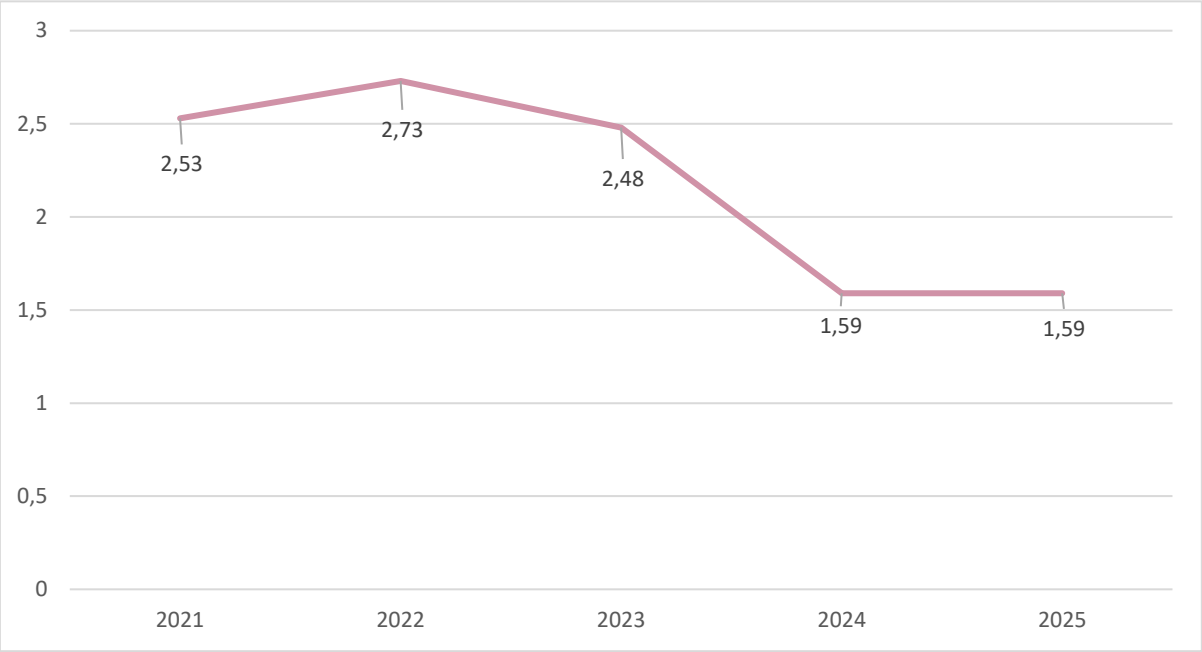
Sumber: KemenPANRB, 2025

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan Kabupaten Trenggalek menunjukkan perkembangan yang positif selama periode 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, rasio kewirausahaan tercatat sebesar 2,53 persen. Rasio ini kembali meningkat pada tahun 2022 sebesar 2,73 persen, sayangnya pada tahun 2023 hingga 2024, kembali terjadi penurunan menjadi 2,48 persen, dan 1,59 persen.

Grafik II.55
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2026

Kenaikan rasio kewirausahaan pada tahun 2022 mengindikasikan pemulihan dan pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah di Trenggalek. Hal ini tidak lepas dari dukungan program pemerintah daerah dalam mendorong ekosistem kewirausahaan, termasuk fasilitasi permodalan, pelatihan keterampilan wirausaha, dan pembukaan akses pasar melalui digitalisasi UMKM. Namun penurunan rasio kewirausahaan pada tahun 2023 dan 2024 perlu diwaspadai dan memerlukan upaya lebih dari pemerintah untuk menumbuhkan minat masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadi pelaku usaha sebagai bagian dari strategi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kemandirian ekonomi lokal. Kondisi rasio kewirausahaan tahun 2025 tetap dibandingkan tahun 2024, tetapi belum memenuhi target tahun 2025 yang sebesar 1,6 persen. Kurangnya modal, pengetahuan manajemen usaha, pemasaran, pengelolaan keuangan, dan pemanfaatan teknologi yang menyebabkan sulitnya memulai usaha, usaha sulit berkembang, dan usaha tidak berkelanjutan, sehingga menyebabkan belum tercapainya target tahun 2025.

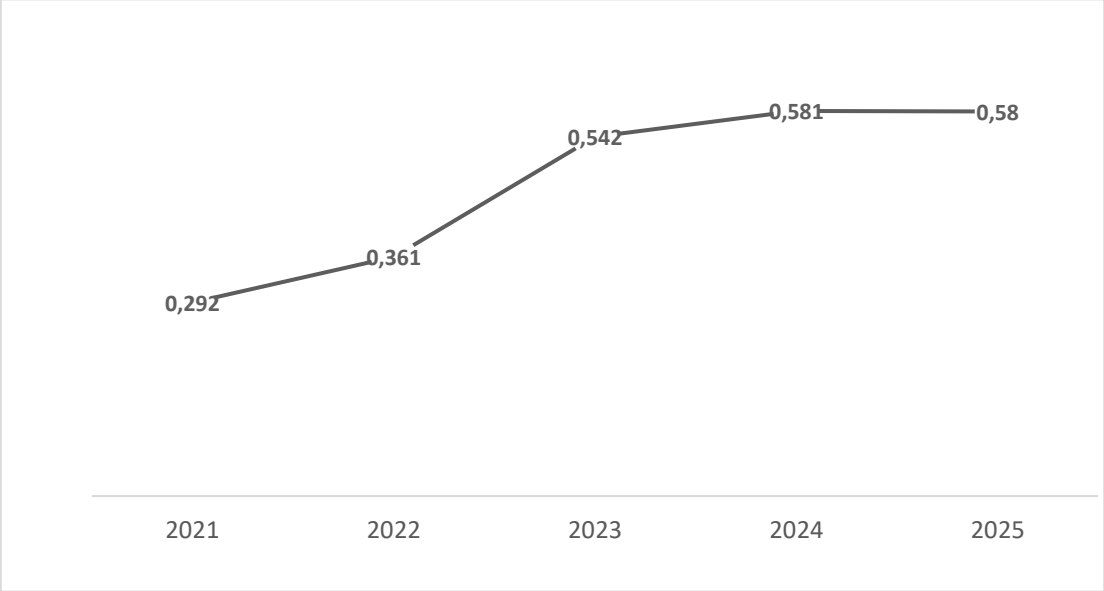
R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Realisasi Investasi (*Triliun Rupiah*)

Perkembangan investasi di suatu daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi

yang dilakukan secara tepat dapat mengungkit pertumbuhan ekonomi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi dan kebijakan daerah dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi menjadi salah satu faktor penting bagi investor dalam pengambilan keputusan penanaman modal. Semakin tinggi realisasi investasi menunjukkan semakin tingginya minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Trenggalek. Realisasi investasi di Kabupaten Trenggalek pada kurun 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik II.56
Realisasi Investasi
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025 (Triliun Rupiah)



Sumber: Dinas PMPTSP Kab. Trenggalek, 2026
BPS Kab. Trenggalek, 2026

Berdasarkan grafik tersebut menunjukkan bahwa realisasi investasi di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 tercapai sebesar Rp. 0,375 triliun dan kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 0,292 triliun dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 realisasi investasi mulai mengalami pemulihan menjadi sebesar Rp. 0,361 triliun dan kemudian cenderung naik sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2023 realisasi investasi menjadi Rp 0,542 triliun dan tahun 2024 realisasi Investasi mencapai angka tertinggi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni sebesar Rp 0,581 triliun.

Kenaikan realisasi investasi ini menunjukkan adanya efektivitas strategi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan daya tarik bagi investor. Berdasarkan penjelasan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek

dan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten, kenaikan tersebut didorong oleh adanya peningkatan kapasitas usaha dari pengusaha eksisting. Untuk mempertahankan capaian pada tahun 2024, beberapa hal yang akan dilaksanakan antara lain: melanjutkan dan terus memperbaharui SP dan SOP, inovasi jemput bola layanan, pengawasan terpadu, *business matching* dan investor gathering.

S. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)

Indeks Partisipasi Olahraga yang selanjutnya disingkat IPO adalah indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan keolahragaan. Indeks Partisipasi Olahraga adalah bagian dari Sport Development Index (SDI) yang mengukur seberapa aktif masyarakat dalam berolahraga. Di Indonesia, SDI digunakan untuk memantau kemajuan pembangunan olahraga dan mengukur berbagai aspek, termasuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif berolahraga dan meraih manfaat optimal dari kegiatan olahraga. Dalam Permenpora Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengukuran Sport Development Index (SDI/IPO), IPO digunakan untuk memotret pembangunan olahraga secara nasional. Melalui sembilan dimensi pengukuran yang meliputi; SDM olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi dan performa, IPO memiliki peran yang sangat krusial dalam menyediakan data dukung sebagai dasar penyusunan kebijakan keolahragaan. Pada tahun 2024 realisasi IPO sebesar 68,95 poin yang menjadi tahun perhitungan pertama pada RPJMD Periode Tahun 2025-2030, dan tahun 2025 meningkat menjadi 69,45.

Tabel II.68
Indeks Partisipasi Olahraga (IPO) Kabupaten Trenggalek Tahun 2024-2025

No	Uraian	Satuan	2024	2025
1	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	Poin	68,95	69,45

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Trenggalek, 2026

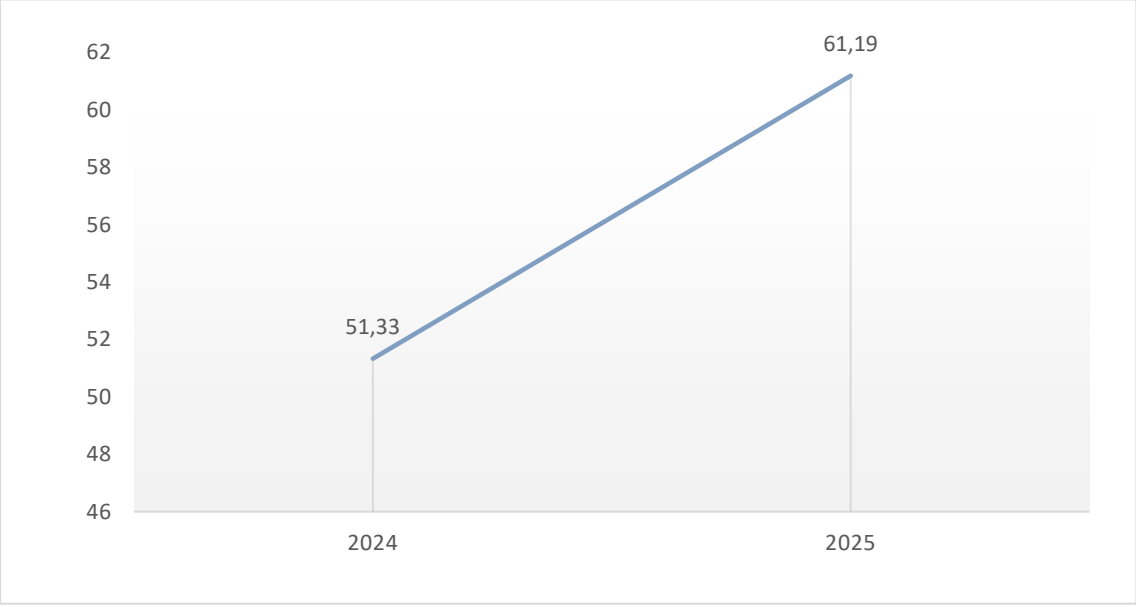
Indeks Pembangunan Pemuda

Pada tahun 2024, Kabupaten Trenggalek mencatat realisasi Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar 51,33, yang sekaligus menjadi tahun pertama dilakukannya penghitungan IPP di daerah ini. Capaian awal ini menjadi landasan penting untuk mengevaluasi arah pembangunan

kepemudaan yang berkontribusi pada terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Pada tahun 2025, IPP meningkat menjadi 61,19. Faktor yang mendorong capaian tersebut yaitu 1) meningkatnya kesadaran pemuda dalam hidup sehat; 2) meningkatnya peran pemuda dalam berorganisasi; dan 3) meningkatnya kerjasama dengan Lembaga pelatihan kerja.

Peningkatan IPP ke depan perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkuat partisipasi dan kapasitas pemuda, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap pemuda, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta ruang-ruang partisipasi sosial yang mendorong tumbuhnya generasi yang tangguh dan inklusif.Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sendiri merupakan indikator komposit yang mencerminkan kondisi dan perkembangan pemuda dalam lima domain utama, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan peluang kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Kelima domain ini saling terkait dan menjadi ukuran menyeluruh terhadap kualitas hidup pemuda serta keterlibatannya dalam pembangunan. Dengan memantau IPP secara periodik, pemerintah daerah dapat menyusun intervensi yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan pemuda, sehingga mampu mendukung transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Trenggalek.

Grafik II.57
Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Trenggalek Tahun 2024-2025



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Trenggalek, 2026

T. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kematangan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral, yang diharapkan dapat mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Nilai IPS diperoleh dari nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS). Penilaian ini menggunakan tingkatan kematangan, dari Rintisan hingga Optimum, dengan kategori hasil seperti Kurang, Cukup, Baik, Sangat Baik, dan Memuaskan. Semakin tinggi nilai IPS, semakin baik kualitas dan integrasi data yang dimiliki, sehingga keputusan yang diambil pemerintah akan lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Pada periode 2021 hingga 2022, data Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Trenggalek belum tersedia (N/A). IPS mulai terukur pada tahun 2023 dengan nilai 2,18 dan meningkat menjadi 2,59 pada tahun 2024. Nilai tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan data masih perlu ditingkatkan untuk menghasilkan data yang lebih terstandar, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data di Kabupaten Trenggalek.

Khusus tahun 2025 berdasarkan surat dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur No. B-434/35000/TS.160/2025 tanggal 14 Mei 2025 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan EPSS Tahun 2025 di Pemerintah Daerah tidak dilaksanakan evaluasi dan penilaian penyelenggaraan statistik sektoral demikian target dan capaian tetap menggunakan target dan capaian tahun 2024.

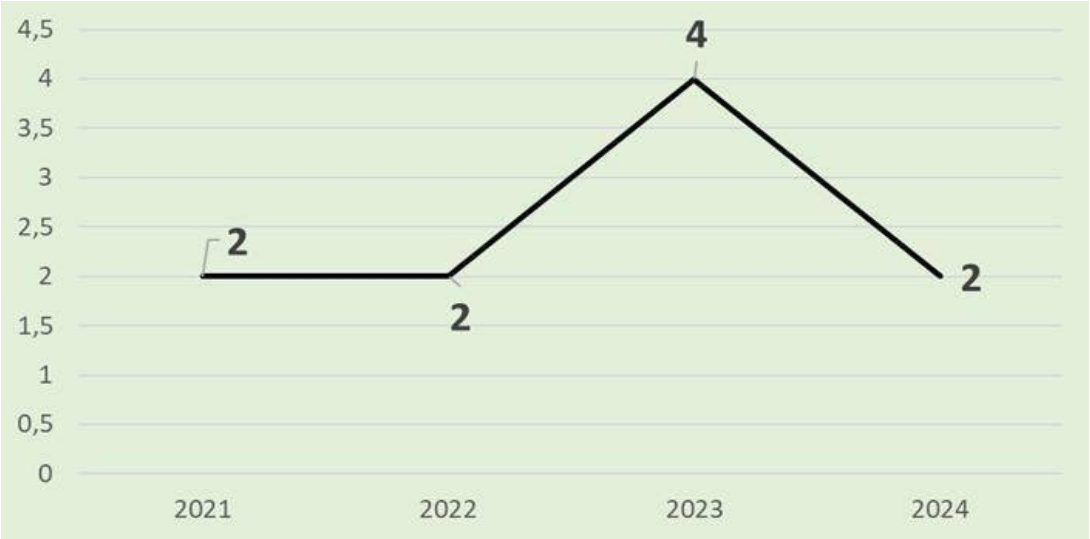
U. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Nilai Aspek Keamanan SPBE

Nilai Aspek Keamanan SPBE merupakan skor yang mencerminkan seberapa matang sebuah instansi pemerintah menerapkan keamanan dalam sistem digitalnya. Penilaian ini mencakup pengelolaan risiko, penerapan standar keamanan, dan perlindungan data dari ancaman siber. Pengukuran dilakukan melalui evaluasi pada beberapa indikator kunci, antara lain manajemen keamanan informasi, penerapan standar teknis dan prosedur keamanan, serta pemenuhan lima aspek esensial keamanan informasi yang mencakup kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non-repudiation*). Skor yang dihasilkan dalam penilaian dikategorikan dalam tingkat kematangan, mulai dari Rintisan hingga

Optimum (Level 1-5), yang mencerminkan perkembangan dan konsistensi penerapan keamanan di suatu instansi. Semakin tinggi nilai aspek keamanan, semakin baik pula kemampuan instansi dalam mencegah kebocoran data, melindungi sistem dari gangguan, dan menjaga keberlangsungan layanan publik berbasis elektronik.

Grafik II.58
Nilai Hasil Penilaian Aspek Keamanan SPBE/ Pemerintahan Digital oleh Kementerian PAN RB



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Trenggalek, 2025

Berdasarkan data Nilai Aspek Keamanan SPBE Kabupaten Trenggalek periode 2020–2024, terlihat adanya perkembangan yang bersifat fluktuatif. Pada tahun 2020, nilai belum tersedia (N/A). Memasuki tahun 2021 dan 2022, nilai aspek keamanan berada pada angka 2, menunjukkan tingkat kematangan yang masih awal. Tahun 2023 terjadi lonjakan signifikan menjadi 4, yang mencerminkan peningkatan penerapan keamanan informasi secara lebih baik. Namun, pada tahun 2024 nilai kembali turun menjadi 2, mengindikasikan adanya penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya. Perubahan nilai ini menunjukkan bahwa penerapan keamanan SPBE di Kabupaten Trenggalek masih memerlukan penguatan yang konsisten agar capaian positif dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Khusus tahun 2025 tidak adak evaluasi dan penilaian Indeks SPBE karena lokus pemantauan dan evaluasi SPBE di fokuskan pada daerah kabupaten/kota yang capaian indeksnya dibawah 2,6 dengan demikian target dan capaian indeks SPBE Kabupaten Trenggalek tahun 2025 tetap menggunakan target dan capaian tahun 2024 karena nilai aspek keamanan ini bagian dari aspek aspek lain di dalam penilaian penyelenggaraan SPBE.

V. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Persentase budaya yang dikembangkan

Persentase budaya yang dikembangkan merupakan indikator kinerja pembangunan bidang kebudayaan. Indikator ini dipakai untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengembangkan, melestarikan, memanfaatkan potensi budaya lokal dan untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan memperluas Kebudayaan. Persentase budaya yang dikembangkan merupakan indikator kinerja yang menunjukkan perbandingan antara jumlah unsur/jenis budaya yang berhasil dikembangkan dengan jumlah total unsur/jenis budaya yang ada di suatu daerah, yang dihitung dalam bentuk persentase.

Tabel II.69
Persentase Budaya yang Dikembangkan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase budaya yang dikembangkan	Persentase	11,11	16,30	22,22	7,59	15,18

Sumber : Dinas Paribud Kab. Trenggalek, 2026

Persentase pengembangan kebudayaan menunjukan tren fluktuaktif di Kabupaten Trenggalek dari tahun 2021 hingga 2025, dengan penurunan signifikan pada tahun 2024 yang di pengaruhi oleh adanya pemutakhiran data PPKD pada tahun tersebut sampai dengan tahun 2025 sehingga data pembanding kebudayaan (obyek pamajuan kebudayaan) yang ada bertambah secara signifikan lebih dari 200% dari data tahun sebelumnya yang memakai data dari PPKD tahun 2018 sehingga adanya pemutakhiran ini berpengaruh terhadap realiasi prosentasi kebudayaan pada tahun 2024. Peningkatan signifikan pada tahun 2025 menjadi 15,18, didukung dengan :

- Proses penetapan ODCB menjadi CB di Kabupaten Trenggalek dengan meminjam tenaga ahli dari Kabupaten Tulungagung
- Menyelenggarakan event kebudayaan seperti Gelar Seni Budaya Ambyaran Neng Pelang, Pesisir Run di Pantai Prigi, Pawai Budaya, Festival Jaranan Terbuka, dsb
- Fasilitasi pembinaan ruang ekspresi budaya kepada komunitas dan lembaga seni
- Fasilitasi upacara adat
- Pelatihan kesenian tradisional jaranan

W. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat merupakan indikator penting dalam mengukur kemajuan budaya literasi di daerah. Indeks Pembangunan Literasi merupakan peningkatan budaya literasi masyarakat melalui pemanfaatan layanan perpustakaan, pemerataan koleksi perpustakaan, pemerataan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan pemustaka, perpustakaan yang sudah ber SNP, keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan dan jumlah pemustaka sedangkan Tingkat Kegemaran Membaca mengukur tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Kedua indikator ini saling berkaitan erat dalam mendukung penguatan sumber daya manusia di Kabupaten Trenggalek. Penguatan literasi menjadi landasan strategis dalam membangun masyarakat yang cerdas, adaptif, dan produktif.

Berdasarkan data, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 tercatat sebesar 44,46, kemudian pada tahun 2022 menjadi 70,87 dan menjadi 84,17 di tahun 2023, sebelum sedikit turun di tahun 2024 menjadi 80,34 dan tahun 2025 menjadi 14,06. Sementara itu, Tingkat Kegemaran Membaca juga menunjukkan tren serupa, dari 2,53 pada tahun 2021 sedikit naik ke 2,67 di tahun 2022, lalu melonjak ke 66,9 pada tahun 2023, terus meningkat ke 74,88 pada tahun 2024, dan menurun di tahun 2025 menjadi 57,54. Penurunan pada tahun 2025 disebabkan karena metodologi perhitungan yang berbeda berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengembangan SDM Perpusnas RI nomor B.11351/2/APB.00.02/XII.2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Edaran Penyesuaian Target IKK Daerah Urusan Perpustakaan Terkait Perubahan Penghitungan IPLM dan TKM dalam hal metodologi, dimensi, indikator, serta bobot penghitungan.

Menghadapi berbagai tantangan dalam membangun literasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melakukan berbagai upaya strategis untuk mendorong perbaikan literasi masyarakat. Pendataan terhadap perpustakaan sekolah dan desa dilakukan untuk memperkuat komponen pendukung Tingkat Kegemaran Membaca, seperti jumlah bahan pustaka, pustakawan, pengunjung, dan anggota perpustakaan. Selain itu, sosialisasi gerakan gemar membaca, pelayanan mobil perpustakaan keliling ke sekolah dan desa, partisipasi aktif dalam kegiatan Car Free Day (CFD) melalui Pojok Baca, serta penempatan Pojok Baca Digital (Pocadi) di Mal

Pelayanan Publik. Ke depan, kesinambungan upaya ini penting untuk mempertahankan dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Trenggalek secara lebih merata dan berkelanjutan.

Tabel II.70
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	44,46	70,87	84,17	80,34	14,06
Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	Nilai	63,25	66,75	67,25	74,88	57,54

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek, 2026

X. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah

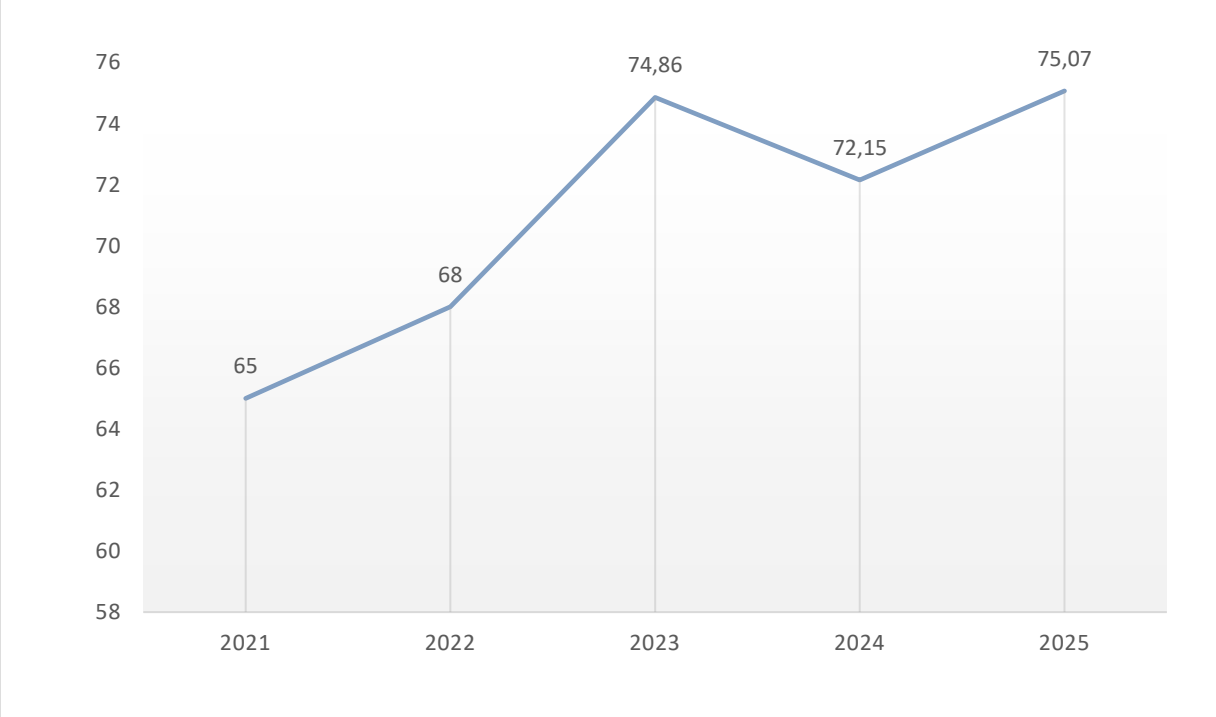
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan arsip di instansi pemerintah daerah. Indeks ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan efektivitas pengelolaan arsip, baik secara internal maupun eksternal, serta tingkat digitalisasi arsip. Hasil pengawasan ini menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan arsip di masa mendatang. Pengawasan Kearsipan pada lingkup pemerintahan daerah dilakukan secara berkala oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan/atau dinas kearsipan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun realisasi Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah pada tahun 2024 sebesar 72,15 dengan kategori BB, dan tahun 2025 meningkat menjadi 75,07 dengan kategori BB.

Peningkatan capaian Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah pada tahun 2025 didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain penguatan kebijakan dan regulasi kearsipan, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah, serta pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kearsipan secara berkesinambungan. Selain itu, optimalisasi pengelolaan arsip dinamis, baik arsip aktif maupun inaktif, telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah kearsipan dan standar yang berlaku.

Pelaksanaan pengawasan internal terhadap pengelolaan arsip juga semakin efektif, ditandai dengan meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam pengelolaan arsip serta tertib administrasi kearsipan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip turut mendukung peningkatan kualitas layanan kearsipan, khususnya dalam aspek temu kembali arsip dan pengamanan informasi. Selain itu didukung adanya pengelolaan arsip statis yang sesuai dengan aturan kearsipan telah terlaksana.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan, antara lain pemerataan kompetensi sumber daya manusia kearsipan dan konsistensi penerapan tata kelola arsip pada seluruh perangkat daerah. Hal ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan pada periode selanjutnya. Secara keseluruhan, capaian Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2025 menunjukkan arah yang positif dan mencerminkan upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang tertib, akuntabel, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Grafik II.59
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia, 2026

Pencapaian Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah ditunjang oleh tersedianya arsiparis di daerah. Secara umum, tugas arsiparis di lingkungan pemerintah daerah adalah memastikan pengelolaan arsip berjalan tertib, mulai dari penciptaan, penataan,

penyimpanan, hingga pelayanan penggunaan arsip. Arsiparis juga bertanggung jawab menjaga autentisitas, keamanan, dan kemudahan akses arsip, baik arsip aktif, inaktif, vital, maupun statis. Dengan pengelolaan arsip yang profesional, arsiparis berperan penting dalam meningkatkan Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan dan mendukung akuntabilitas pemerintahan. Pada tahun 2025 Kabupaten Trenggalek memiliki 9 orang arsiparis sebagai berikut:

Tabel II.71
Daftar Arsiparis Kabupaten Trenggalek Tahun 2025

Perangkat Daerah	Jabatan	Jumlah Arsiparis
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Arsiparis Ahli Muda	1
	Arsiparis Ahli Pertama	3
	Arsiparis Terampil	3
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Arsiparis Ahli Pertama	1
Sekretariat DPRD	Arsiparis Ahli Muda	1
Total		**9**

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek, 2026

Y. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan secara relatif. Oleh karena indikator tersebut juga merupakan ukuran kemampuan keluarga nelayan untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya NTN ini juga disebut sebagai Nilai Tukar Subsisten (Subsistence Terms of Trade). Secara konsep, NTN menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan nelayan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi perikanan. Adapun definisi Nilai Tukar Nelayan (NTN) tersebut adalah rasio total pendapatan terhadap total pengeluaran rumah tangga nelayan selama periode waktu tertentu. Formulasi penghitungan NTN adalah sebagai berikut:

NTN = Yt/Et
Dimana :
Yt = total pendapatan keluarga nelayan periode t (harga bulan berlaku)
Et = total pengeluaran keluarga nelayan periode t
t = periode waktu (bulan, tahun, dll)

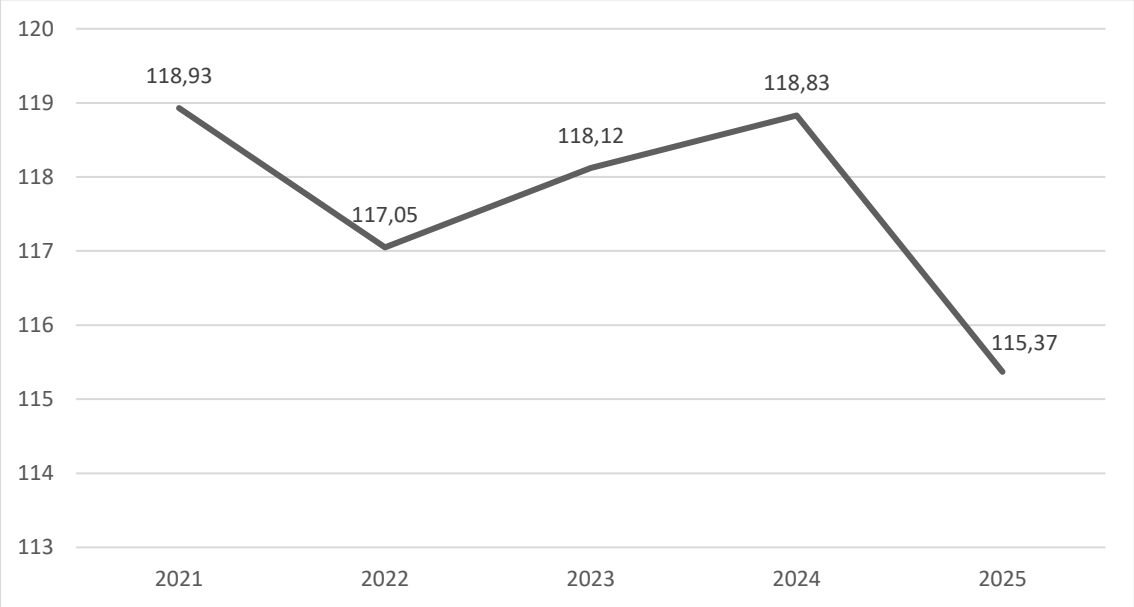
NTN > 100 berarti nelayan mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya. Dengan kata lain rumah tangga nelayan yang bersangkutan mempunyai tingkat kesejahteraan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan lainnya atau menabung. NTN = 100 berarti nelayan mengalami impas.dengan kata lain rumah tangga nelayan yang bersangkutan hanya mampu mencukupi kebutuhan konsumsi dan produksi/operasionalnya saja Sedangkan NTN < 100 berarti nelayan mengalami defisit, pendapatan nelayan turun, lebih kecil dari pengeluaran. rumah tangga nelayan yang bersangkutan mempunyai tingkat kesejahteraan rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumsi dan produksi/operasional serta mempunyai potensi mengalami defisit anggaran rumah tangganya.

Tabel II.72
Data Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025
	118,93	117,05	118,12	118,83	115,37

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Trenggalek 2026 (diolah)

Grafik II.60
Data Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Perikanan Kab. Trenggalek, 2026 (diolah)

Nilai Tukar Nelayan (NTN) di Kabupaten Trenggalek berdasarkan tabel dan grafik diatas pada tahun 2021 hingga tahun 2025 mengalami fluktuasi, akan tetapi masih di angka > 100. Pada tahun 2021 diperoleh NTN sebesar 118,93. Di tahun 2022 NTN mengalami penurunan signifikan hingga diperoleh NTN sebesar 117,05, hal ini menunjukkan bahwa adanya penurunan harga jual serta kenaikan biaya produksi seperti nelayan kesulitan mendapatkan BBM yang merupakan faktor produksi utama pada usaha penangkapan ikan. di tahun 2023 angka NTN kembali naik di angka 118,12, dan terus meningkat di tahun 2024 di angka 118,83 karena adanya fasilitasi bantuan sarana penangkapan bagi nelayan. Sedangkan tahun 2025 menurun menjadi 115,37, tetapi masih mencapai target yang sebesar 115.

Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)

NTPi adalah Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan. Ini adalah indikator yang digunakan untuk mengukur daya beli pembudidaya ikan, yang menggambarkan perbandingan antara harga yang diterima pembudidaya ikan dengan harga yang mereka bayar. Dengan kata lain, NTPi menunjukkan seberapa baik kondisi ekonomi pembudidaya ikan di Kabupaten Trenggalek dalam hal kemampuan mereka untuk membeli barang dan jasa dari hasil panen mereka. Secara konsep, NTPi menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan pembudidaya ikan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi perikanan.

Tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan secara utuh perlu dilihat dari sisi lain yaitu perkembangan jumlah pengeluaran/pembelanjaan mereka, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi. Dalam hal ini pembudidaya ikan sebagai produsen dan juga konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya, yaitu :

1. Memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup pembudidaya ikan beserta keluarganya;
2. Pengeluaran untuk produksi/budidaya pembudidaya ikan yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal.

Perhitungan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) pada dasarnya mengikuti konsep nilai tukar petani versi subsektor perikanan budidaya yang digunakan BPS. Rumus umumnya adalah:

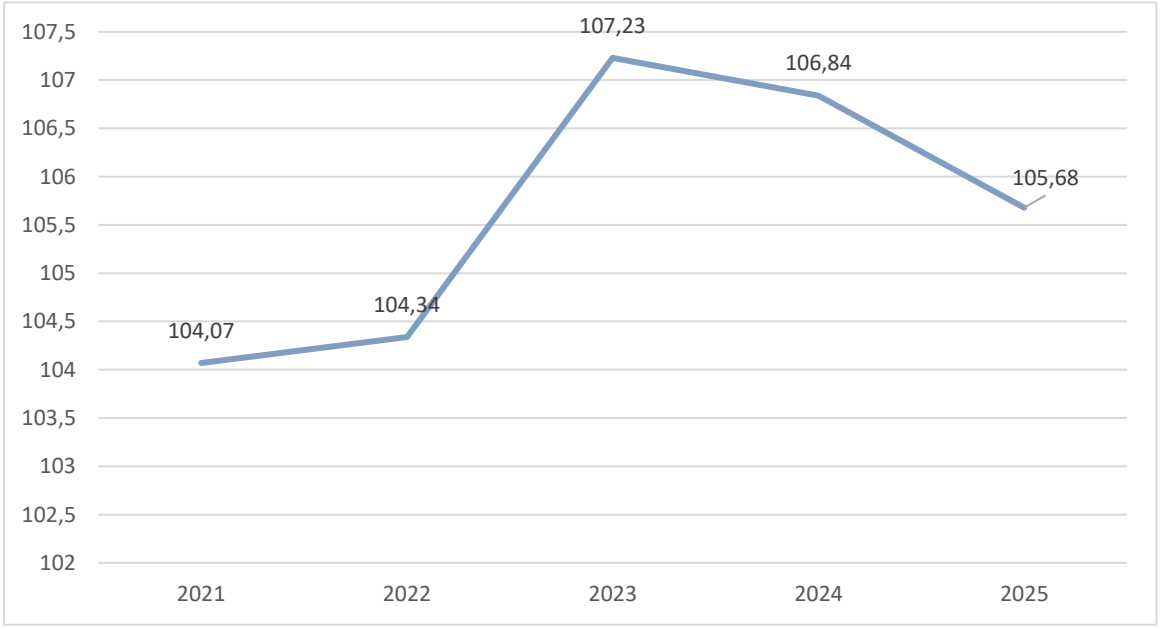
$$NTPi = \frac{It}{Ib} \times 100$$

Keterangan :

- **It** = *Indeks harga yang diterima pembudidaya ikan* → menggambarkan harga rata-rata produk hasil budidaya yang dijual.
- **Ib** = *Indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan* → mencakup harga barang dan jasa untuk konsumsi rumah tangga serta biaya produksi/budidaya (input, pakan, benih, obat, peralatan).
- **100** = angka dasar (jika NTPi = 100 berarti pendapatan sama dengan pengeluaran).

Jika NTPi di atas 100, berarti rumah tangga pembudidaya ikan yang bersangkutan mempunyai tingkat kesejahteraan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan primer dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan non primernya atau menabung. Jika NTPi berada di kisaran 100 atau sama dengan 100, berarti rumah tangga pembudidaya ikan yang bersangkutan hanya mampu mencukupi kebutuhan primernya saja. Jika NTPi berada di bawah 100, berarti rumah tangga pembudidaya ikan yang bersangkutan mempunyai tingkat kesejahteraan rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan primernya serta mempunyai potensi mengalami defisit anggaran rumah tangganya.

Grafik II.61
Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Perikanan Kab. Trenggalek, 2026

Berdasarkan grafik di atas dapat diuraikan sebagai berikut : Nilai NTPi 105,68 menunjukkan bahwa kesejahteraan pembudidaya ikan masih relatif

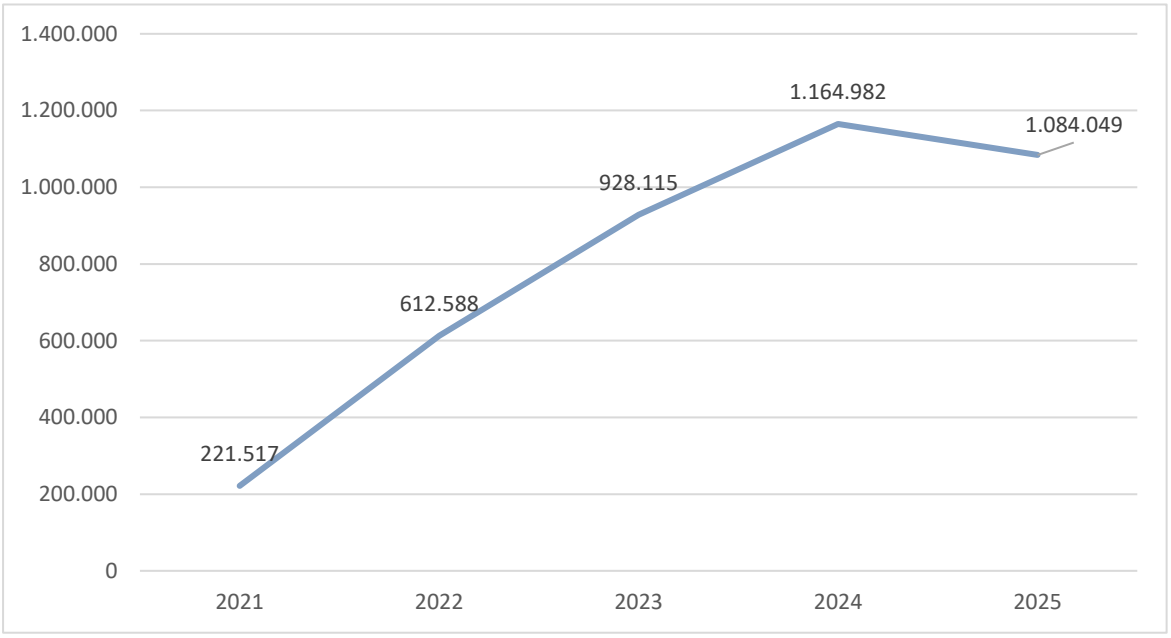
baik karena nilai berada di atas 100. Secara agregat Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan 1,15 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum kondisi penurunan nilai tukar pembudidaya ikan disebabkan oleh beberapa faktor teknis yang mempengaruhi budidaya perikanan. Kondisi capaian nilai tukar pembudidaya ikan secara agregat mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun jika dibandingkan secara regional capaian NTPi Kabupaten Trenggalek masih dalam kondisi baik atau berada di atas capaian NTPi di tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Z. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Jumlah Wisatawan

Jumlah wisatawan adalah indikator yang menunjukkan jumlah wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dari tahun ke tahun. Jumlah wisatawan sangat dipengaruhi oleh atraksi, aksesibilitas dan amenitas pariwisata, ekosistem industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompetitif serta pemasaran pariwisata. Jumlah wisatawan merupakan variabel penting dalam sektor pariwisata Kabupaten Trenggalek karena semakin banyak wisatawan yang berkunjung dapat mengungkit dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sektor lainnya di Kabupaten Trenggalek. Adapun perkembangan jumlah wisatawan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021–2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik II.62
Jumlah Wisatawan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Trenggalek, 2026

Pada tahun 2025, jumlah wisatawan tercatat sebanyak 1.084.049 orang, menurun dibandingkan tahun 2024 yang sebanyak 1.164.982 orang. Perununan jumlah wisatawan pada tahun 2025 disebabkan karena : 1) anomali iklim dan cuaca sehingga terjadi musim hujan sepanjang tahun 2025; 2) persaingan pasar destinasi sangat ketat yang ditandai dengan munculnya destinasi-destinasi wisata baru di luar Kabupaten Trenggalek; 3) terbatasnya lahan parkir di destinasi wisata yang paling banyak diminati wisatawan sehingga banyak wisatawan yang pindah ke destinasi wisata lainnya.

Pada tahun 2023 jumlah wisatawan sebanyak 928.115 orang, tahun 2022 sebanyak 612.588 orang, tahun 2021 sebanyak 221.517 orang dan tahun 2020 sebesar 420.817 orang. Pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi penurunan jumlah wisatawan akibat terjadinya pandemi COVID-19 dimana diberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat. Namun secara umum dari tahun 2021 sampai dengan 2024 terus mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah wisatawan pada periode tahun tersebut disebabkan antara lain antusiasme masyarakat untuk melakukan kegiatan wisata mulai meningkat signifikan sejak tahun 2022 ketika pembatasan aktivitas sosial mulai dilonggarkan. Secara lebih khusus kenaikan jumlah wisatawan secara signifikan juga terjadi di pertengahan tahun 2023 karena jalur JLS Tulungagung-Trenggalek mulai dibuka. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan tren berwisata di alam (*outdoor)* dan *staycation* yang menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat.

Pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata pada tahun 2021 sejumlah Rp. 2.431.694.714 atau berkontribusi sebesar 0,95 % dari total pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek yang sejumlah Rp. 256.928.432.907. Pada tahun 2022 sektor Pariwisata mencapai nilai Rp. 6.010.550.210 yang berarti berkontribusi sebesar 1,42% dari total PAD Kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 422.488.717.357,63. Pada Tahun 2023 Rp. 8.407.885.246 berkontribusi sebesar 3,14 % dari total PAD Kabupaten Trenggalek sebesar Rp. 267.026.881.946,08. Tahun 2024 sebesar Rp. 7.672.065.306 berkontribusi sebesar 2,73% dari total PAD yang sebesar Rp. 281.233.905.461. Sedangkan tahun 2025, PAD sektor pariwisata sebesar Rp. 6.549.450.883 dan berkontribusi 1,85% dari total PAD Rp. 353.170.216.491,01.

AA. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani (komoditas Tanaman hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan). NTP bisa di artikan sebagai tolak ukur untuk melihat kemampuan keluarga petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan harga yang diterima petani (IT) dengan harga yang dibayar petani (IB). Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Trenggalek merupakan rata-rata keseluruhan nilai Tukar petani pada sektor Tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang menjadi nilai akhir perhitungan NTP.

NTP dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NTP = \frac{[T}{[B} \times 100$$

Dimana:
IT : Indeks harga yang diterima petani
IB : Indeks harga yang dibayar petani

NTP > 100 mempunyai arti petani mengalami surplus yaitu hasil produksi lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Nilai ini menggambarkan bahwa rumah tangga petani mempunyai tingkat kesejahteraan cukup, dan mempunyai kesempatan untuk menabung. Untuk nilai NTP= 100 mempunyai arti bahwa petani mengalami impas, dimana harga produksi dan tingkat konsumsi kurang lebih sama, sehingga didapati kesimpulan bahwa keluarga petani hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya saja. Sedangkan NTP<100 mempunyai arti bahwa petani mengalami defisit dimana harga produksi lebih kecil dibandingkan tingkat konsumsinya, sehingga tingkat kesejahteraan rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan.

Tabel II.73
Nilai Tukar Petani di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Nilai Tukar Petani (NTP)	2021	2022	2023	2024	2025
	102,57	102,40	103,58	103,65	114,06

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Trenggalek, 2026

Perhitungan NTP pada tahun 2021 menggunakan 4 sektor yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, namun mulai

tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 hanya menggunakan 3 sektor meliputi tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan karena sektor peternakan dihitung secara terpisah dan dilaksanakan oleh instansi terkait (Dinas Peternakan).

Nilai Tukar Petani dalam kurun waktu tahun 2021-2025 relatif meningkat, kecuali pada tahun 2022 menurun sebanyak 0,17 poin dibandingkan tahun 2021 yang diantaranya disebabkan oleh 1) perubahan jumlah sektor, 2) Kenaikan harga bahan bakar minyak sehingga pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan modal produksi mengalami peningkatan, sedangkan harga jual produk tetap (stagnan) dan cenderung turun, 3) perubahan kebijakan pupuk bersubsidi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 yang awalnya dialokasikan untuk 69 komoditas menjadi 9 komoditas sehingga petani yang melakukan budidaya diluar 9 komoditas tersebut mengalami peningkatan biaya produksi.

Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)

Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat petani (sektor komoditas peternakan) secara relatif. Oleh karena indikator tersebut juga merupakan ukuran untuk melihat kemampuan keluarga peternak untuk memenuhi kebutuhan subsistensinya. Nilai NTPT didefinisikan sebagai nisbah antara harga yang diterima peternak (HT) dengan harga yang dibayar peternak (HB). Adapun, NTPT di Kabupaten Trenggalek merupakan rata-rata keseluruhan nilai tukar petani peternakan pada subsektor Ternak Besar, Ternak Kecil, Unggas, dan Aneka Ternak, yang menjadi nilai akhir atau kesimpulan dari seluruh perhitungan NTPT.

Tabel II.74
NTPT di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	2021	2022	2023	2024	2025
	101,88	101,45	101,89	101,95	102,07

Sumber: Dinas Peternakan Kab. Trenggalek, 2026 (diolah)

Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, NTPT menunjukkan tren yang fluktuatif dengan nilai NTPT > 100. Pada tahun 2021 nilai NTPT sebesar 101,88. Namun, pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan menjadi 101,45 yang dapat mengindikasikan adanya kenaikan biaya produksi atau penurunan harga jual hasil ternak pada periode tersebut. Memasuki tahun 2023, NTPT kembali naik menjadi 101,89 dan terus mengalami peningkatan tipis pada tahun 2024 menjadi 101,95. Sedangkan tahun 2025 naik kembali

menjadi 102,07. Kenaikan yang cenderung lambat pada dua tahun terakhir menunjukkan bahwa perbaikan kesejahteraan peternak berjalan positif, namun masih terbatas. Secara keseluruhan, meskipun kondisi peternak berada dalam posisi surplus, margin keuntungan relatif tipis (sekitar 1–2%), sehingga masih rentan terhadap gejolak harga pakan, bibit, maupun fluktuasi harga jual hasil ternak.

Adapun secara teori, NTPT > 100 berarti peternak mengalami surplus yang mana harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Begitu juga pendapatan peternak naik lebih besar dari pengeluarannya. Nilai ini memberikan gambaran rumah tangga peternak yang bersangkutan mempunyai tingkat kesejahteraan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempunyai potensi untuk mengkonsumsi kebutuhan lainnya atau menabung.

Apabila NTPT = 100 berarti peternak mengalami impas yaitu kenaikan/ penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang yang dikonsumsi. NTPT =100, menggambarkan rumah tangga peternak yang bersangkutan hanya mampu mencukupi kebutuhan konsumsi dan produksi/operasionalnya saja. Sedangkan, NTPT < 100 berarti peternak mengalami defisit yang artinya kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan kenaikan harga barang konsumsinya. Selain itu pendapatan peternak lebih kecil dibandingkan pengeluarannya. Gambarannya, jika NTPT berada di bawah 100, berarti rumah tangga peternak yang bersangkutan mempunyai tingkat kesejahteraan rendah dan tidak mampu mencukupi kebutuhan konsumsi dan produksi/operasional serta mempunyai potensi mengalami defisit anggaran rumah tangganya.

BB. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Persentase Pertumbuhan Ekspor Non Migas

Persentase pertumbuhan ekspor non-migas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan nilai ekspor komoditas non-migas dari suatu periode ke periode berikutnya. Perhitungan indikator ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai ekspor non-migas pada periode berjalan terhadap nilai ekspor non-migas pada periode sebelumnya, kemudian hasilnya dinyatakan dalam bentuk persentase. Apabila persentase yang diperoleh menunjukkan nilai positif, maka hal tersebut mencerminkan adanya peningkatan kinerja ekspor non-migas. Sebaliknya, apabila persentasenya bernilai negatif, maka menunjukkan adanya penurunan aktivitas ekspor non-migas dibandingkan periode sebelumnya. Indikator ini memiliki signifikansi strategis karena dapat digunakan untuk menilai

dinamika perdagangan internasional, mengevaluasi daya saing produk nasional di pasar global, serta menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi dan perdagangan. Persentase Pertumbuhan Ekspor Non-Migas dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase Pertumbuhan Ekspor Non-Migas (%) = (nilai ekspor pada tahun berkenaan (n)-nilai ekspor tahun sebelumnya (n-1)/nilai ekspor tahun dasar)*100

Tabel II.75
Persentase Pertumbuhan Ekspor Non-Migas
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Persentase Pertumbuhan Ekspor Non-Migas	2021	2022	2023	2024	2025
	NA	10,71	265,95	36,93	2,07

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Trenggalek, 2026 (diolah)

Pertumbuhan ekspor non-migas Kabupaten Trenggalek menunjukkan dinamika yang signifikan. Setelah mulai tumbuh sebesar 10,71% pada 2022, ekspor melonjak tajam hingga 265,95% pada 2023, menandai akselerasi luar biasa dalam kinerja perdagangan luar negeri. Memasuki tahun 2024, pertumbuhan melambat menjadi 36,93%, namun tetap menunjukkan tren positif dengan basis nilai ekspor yang semakin besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa ekspor non-migas Trenggalek berada pada jalur peningkatan yang menjanjikan, meskipun diperlukan langkah strategis untuk menjaga konsistensi pertumbuhan di tahun-tahun mendatang.

Pada tahun 2025 pertumbuhan menjadi sebesar 2,07 dengan capaian 100% dari target yang sebesar 0,14. Non migas yang diekspor diantaranya minyak atsiri, drum kabel, gumrosin, aster, terpentin, plywood, fillet patin, trimingan, kulit, gelembung ikan.

CC. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Rasio PDRB Industri Pengolahan

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan

unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

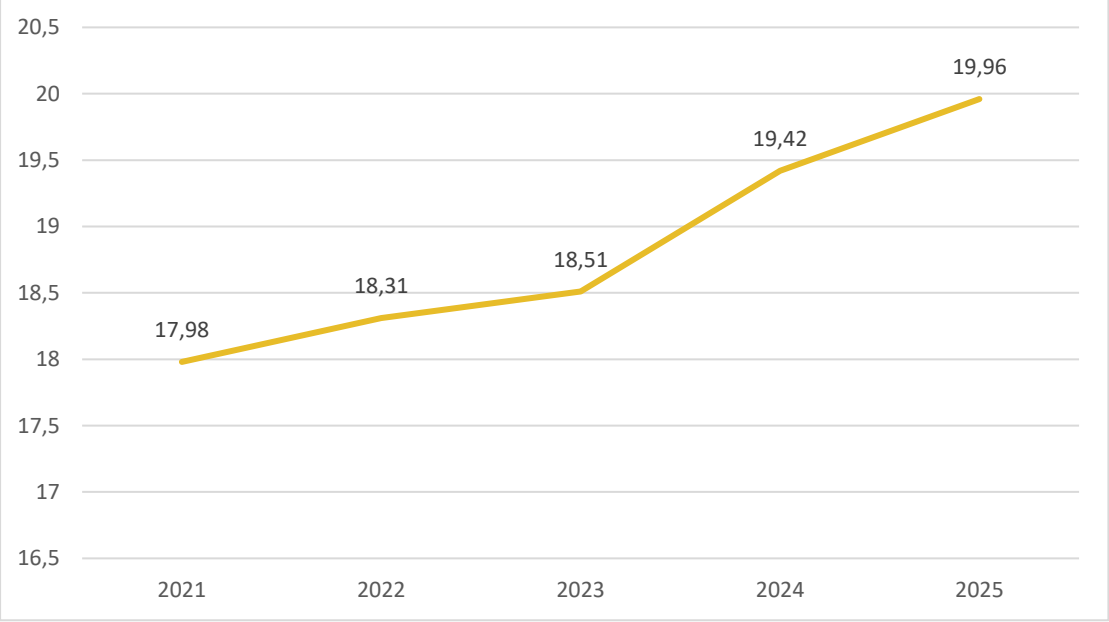
Realisasi rasio PDRB Industri Pengolahan pada tahun 2021-2025 memiliki tren meningkat, yaitu berturut-turut sebesar 17,98 pada tahun 2021, 18,31 pada tahun 2022, 18,51 pada tahun 2023, 19,42 pada tahun 2024, dan 19,96 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa peran lapangan usaha industri pengolahan terhadap perekonomian di Kabupaten Trenggalek cukup besar dan memiliki pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Selama 3 tahun terakhir, industri pengolahan juga menjadi 3 besar lapangan usaha yang mensupport perekonomian Trenggalek. Beberapa program yang diidentifikasi mendukung pengembangan industri antara lain Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional; dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri. Berikut adalah grafik pertumbuhan sektor industri pengolahan Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut :

Tabel II.76
Rasio PDRB Industri Pengolahan
di Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Rasio PDRB Industri Pengolahan	2021	2022	2023	2024	2025
	17,98	18,31	18,51	19,42	19,96

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2026 (diolah)

Grafik II.63
Rasio PDRB Industri Pengolahan di Kabupaten Trenggalek
Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2026 (diolah)

DD. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Persentase Transmigran yang Tidak Meninggalkan Daerah Penempatan

Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi. Penempatan transmigran merupakan upaya dalam rangka menyukseskan program transmigrasi. Beberapa hal yang menyebabkan warga Kabupaten Trenggalek tertarik untuk mengikuti transmigrasi antara lain karena calon transmigran tidak memiliki lahan usaha (bertani) maupun tempat tinggal serta sulit mencari lapangan pekerjaan dan juga didorong keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Sebenarnya animo masyarakat cukup tinggi untuk mengikuti program transmigrasi tetapi alokasi dari pemerintah masih rendah dan belum sesuai dengan animo masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kuota penempatan transmigrasi dibanding jumlah calon transmigran, kurangnya informasi potensi lokasi transmigrasi yang akan dituju serta lokasi tujuan transmigrasi yang ditentukan berbeda dengan lokasi yang diminati oleh pendaftar transmigrasi.

Sejak tahun 2021-2025 jumlah transmigran dari Kabupaten Trenggalek yang telah ditempatkan sebanyak 20 KK. Lokasi penempatan berada di beberapa daerah di Sulawesi sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.77
Data Penempatan Transmigran Kabupaten Trenggalek
Tahun 2021-2025

NO	TAHUN	JUMLAH KUOTA	TUJUAN	JUMLAH PENEMPATAN
1	2021	8 KK	UPT Salulisu Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat	8 KK
2	2022	7 KK	- UPT Mahalona Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan - UPT Raimuna Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara	5 KK 2 KK
3	2023	2 KK	UPT Wala Lagading Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan	2 KK
4	2024	2 KK	UPT Torire Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah	2 KK
5	2025	1 KK	UPT Wala Lagading Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan	1 KK
JUMLAH		**20 KK**		**20 KK**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2026

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah transmigran yang ditempatkan terpenuhi 100% sesuai dengan jumlah kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tingkat keberhasilan berdasarkan indikator persentase transmigran yang tidak meninggalkan lokasi penempatan juga menunjukkan angka 100% dimana sampai dengan saat ini tidak ada transmigran yang meninggalkan lokasi penempatan.

Tabel II.78
Persentase Transmigran yang Tidak Meninggalkan Daerah Penempatan

Indikator kinerja	REALISASI				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan	100	100	100	100	100

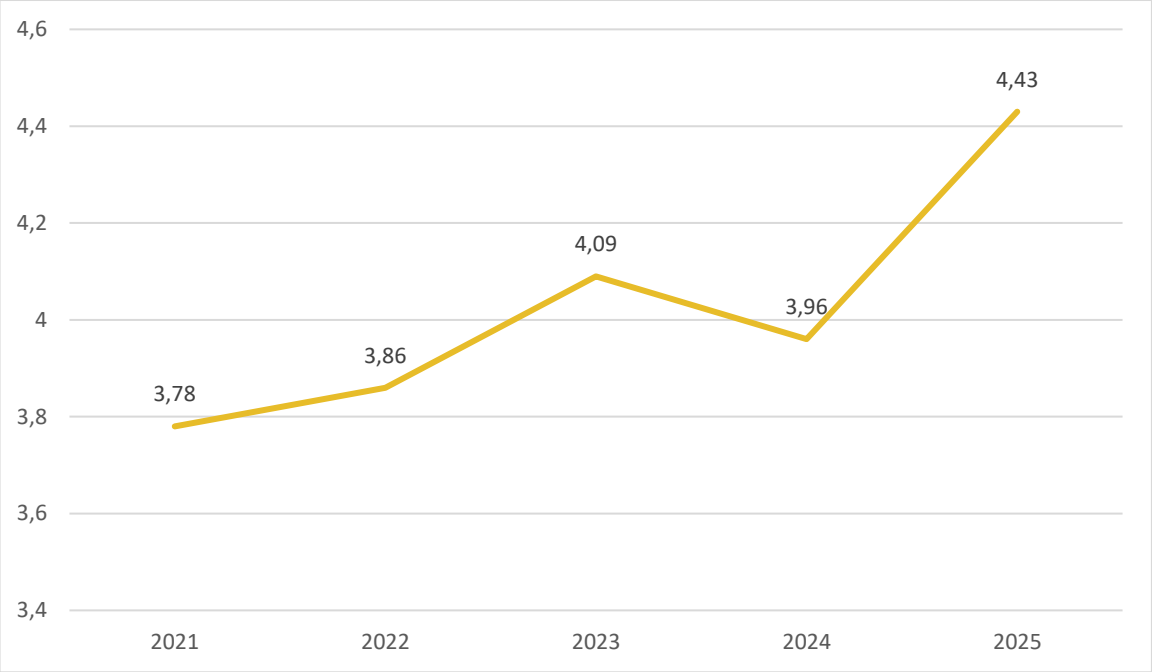
Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Trenggalek, 2026

EE. SEKRETARIAT DAERAH

Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penting yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpanrb) Nomor 4 Tahun 2023, IPP dirancang sebagai tolok ukur evaluasi dan peningkatan kualitas layanan publik dengan mengacu pada beberapa komponen utama seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi, konsultasi pengaduan, serta inovasi pelayanan. Penilaian IPP dilakukan secara sistematis melalui survei kepuasan masyarakat dan evaluasi internal yang menghasilkan skor indeks, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan, sehingga pemerintah dapat merumuskan strategi perbaikan yang berkelanjutan. Dengan demikian, IPP berperan penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik demi memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara efektif dan efisien.

Grafik II.64
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

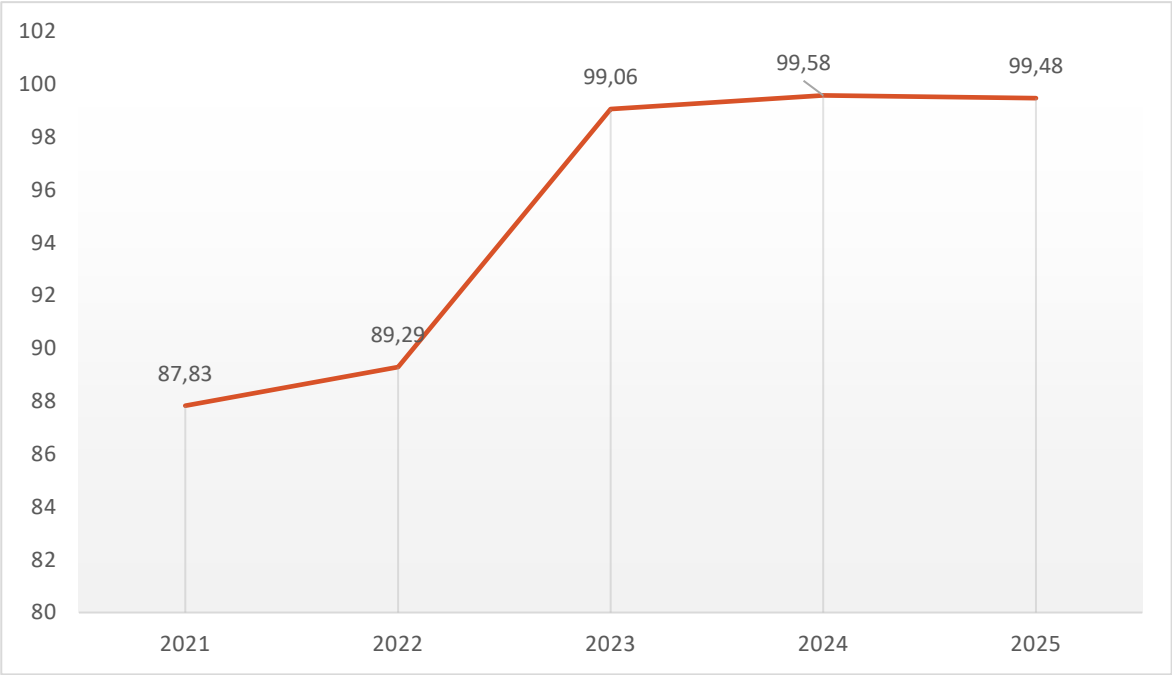


Sumber: KemenPANRB, 2026

Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Trenggalek menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun 2021 hingga 2023, dengan nilai yang sempat naik dari 3,78 pada 2021 menjadi puncaknya 4,09 pada 2023. Pada tahun 2024, meskipun terjadi sedikit penurunan menjadi 3,96, dikarenakan adanya penambahan penilaian melalui google review yang dialami pada RSUD dr. Soedomo, capaian ini tetap berada dalam kategori "Baik" menurut standar penilaian pelayanan publik. Sedangkan tahun 2025, kembali meningkat secara signifikan menjadi sebesar 4,43, masuk dalam kategori "Sangat Baik". Hasil ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam memperkuat kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dengan prinsip-prinsip keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, serta aksesibilitas yang terus dioptimalkan.

Peningkatan IPP ini didukung oleh berbagai langkah strategis, seperti pelaksanaan survei kepuasan masyarakat oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang aktif membuka kanal komunikasi publik melalui media sosial. Selain itu, keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi wujud transformasi layanan yang mempercepat integrasi layanan lintas sektor dan mempermudah proses berusaha bagi masyarakat. Selain itu, dalam rangka meningkatkan IPP dilaksanakan 1) Pembinaan Pelayanan Publik; 2) Monev dan evaluasi pelayanan public; 3) Desk Evaluation indikator pada Penilaian Pelayanan Publik; 4) Pengelolaan Keluhan dan Umpan Balik.

Grafik II.65
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kab. Trenggalek, 2026 (diolah)

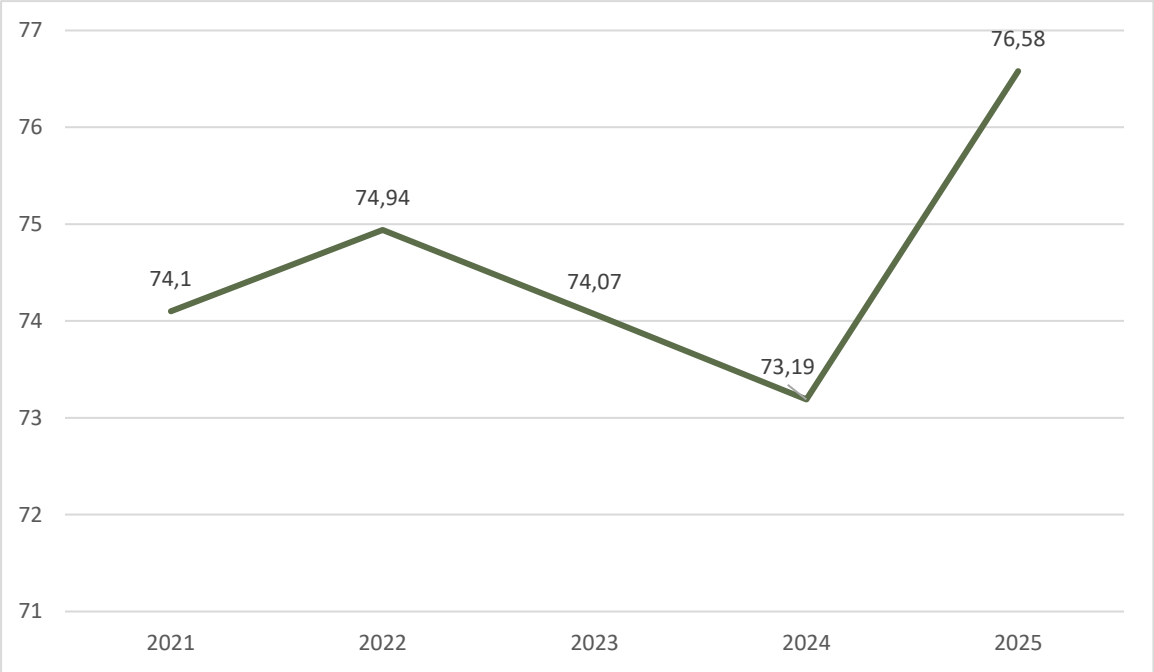
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar 87,83. Pada tahun 2022, IKM mengalami kenaikan sebesar 1,46 menjadi 89,29, dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 99,06. Tahun 2024, IKM naik signifikan menjadi 99,58 dan pada tahun 2025 mengalami peningkatan lagi menjadi 99,48.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Selain itu, dalam rangka mengukur kinerja instansi pemerintah, ditetapkan aturan terkait dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Nilai SAKIP adalah hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di suatu instansi pemerintah, yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan kinerja instansi tersebut. Nilai SAKIP diberikan berdasarkan skala tertentu, dan predikat yang lebih tinggi menunjukkan

kinerja yang lebih baik dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Grafik II.66
Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: KemenPANRB, 2026

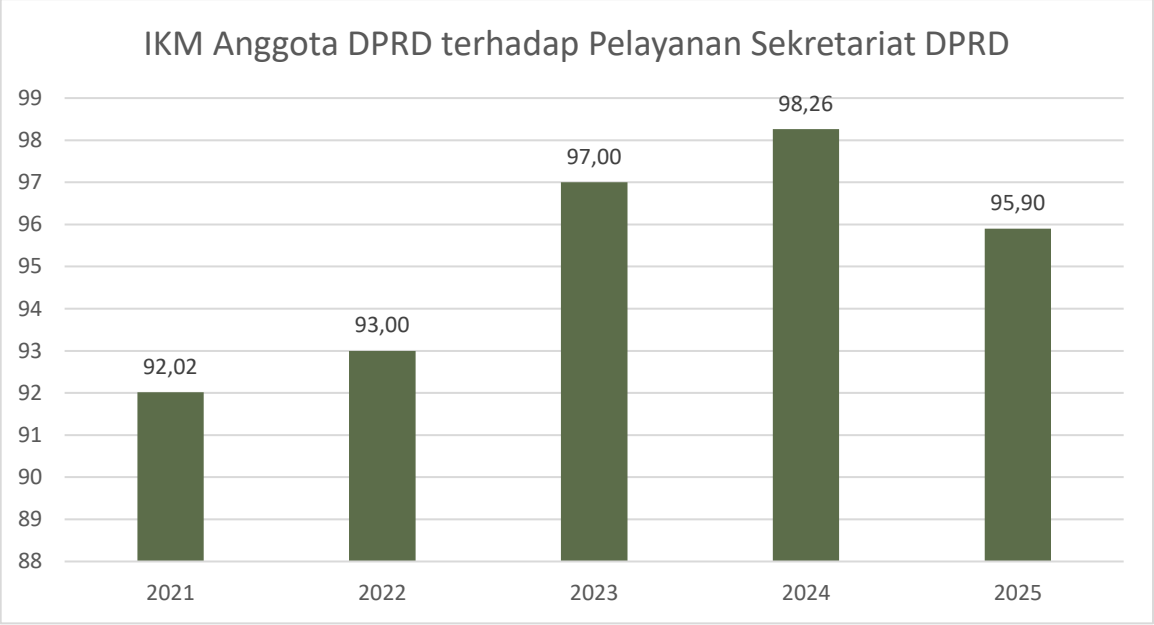
Laporan kinerja menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Hasil penilaian akuntabilitas kinerja Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 sebesar 74,10. Sedangkan pada tahun 2022, meningkat sebesar 0,84 menjadi 74,94. Namun, pada tahun 2023, nilai mengalami sedikit penurunan menjadi 74,07, dan pada tahun 2024 kembali turun menjadi 73,19. Tahun 2025 naik Kembali secara signifikan menjadi 76,58. Meskipun mengalami penurunan dalam kurun waktu tahun 2022-2024 tetapi implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi. Pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan berfokus pada pengukuran program, kegiatan, serta anggaran.

FF. SEKRETARIAT DPRD

Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Hubungan kerja yang harmonis antara DPRD dengan eksekutif dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan. Sehingga pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD harus meningkat kualitasnya. Nilai kepuasan Anggota DPRD merupakan angka yang diperoleh dari hasil Survey Kepuasan yang disampaikan dan diisi oleh Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD. Mulai tahun 2021, kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa layanan Sekretariat DPRD yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD semakin baik. Persentase kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Gambaran perkembangan pelaksanaan urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Trenggalek sebagaimana pada grafik berikut ini:

Grafik II.67
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2025



Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Trenggalek, 2026

GG. PERENCANAAN

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi RKPD dan RPJMD yang ditentukan dengan indikator Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan

yang dirumuskan berdasarkan jumlah program pada Perubahan RKPD yang selaras dengan program RPJMD pada tahun berkenaan dibandingkan dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun berkenaan, keselarasan RKPD dengan Renja OPD serta keselarasan RKPD dengan DPA OPD. Persentase keselarasan dokumen perencanaan pada tahun 2021-2022 terealisasi 100% dan pada tahun 2023-2024 terealisasi sebesar 99,89%, dikarenakan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat terkait kewenangan pelaksanaan program pembangunan. Program Pengelolaan Izin Lokasi pada urusan pertanahan, mulai tahun 2022 menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sehingga mulai tahun 2022 program tersebut tidak digunakan pada penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek.

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) Kabupaten Trenggalek pada RPJMD Tahun 2025-2029 akan tetap dihitung namun dengan formula yang berbeda dibandingkan perhitungan tahun-tahun sebelumnya. IPPD tersebut dirumuskan dengan mengacu pada pola perhitungan Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) yang dihitung oleh BAPPENAS. Dimana IPPN digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Provinsi, belum sampai level kabupaten/ kota, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. IPPD Kabupaten Trenggalek diukur melalui 3 Aspek yakni sinergi, kualitas perencanaan, dan keterhubungan perencanaan. Adapun pada tahun 2024, Indeks Perencanaan sebesar 84, dan tahun 2025 naik menjadi sebesar 85,01 dengan capaian 100%. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan

HH. KEUANGAN

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat, terutama dalam bentuk dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana suatu daerah mampu membiayai belanja pemerintahannya secara mandiri melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tingkat ketergantungan yang tinggi menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah, yang dapat berdampak

pada terbatasnya ruang fiskal untuk merancang kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu fokus dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, guna mendorong kemandirian dan daya tahan fiskal dalam jangka panjang.

Rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 sd 2023 berturut-turut tahun 2021 sebesar 65,73%, tahun 2022 sebesar 63,56%, tahun 2023 sebesar 65,92%. Pada tahun 2024, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek tercatat sebesar 66,82%. Sedangkan pada tahun 2025, tercatat sebesar 65,71%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini mencerminkan adanya tantangan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dan perlunya strategi komprehensif untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui penguatan PAD, efisiensi belanja, dan inovasi pembiayaan daerah

Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan indikator yang menilai pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang berkomitmen untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa kriteria yaitu:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures)
3. Kepatuhan terhadap praturan perundang-undangan
4. Efektivitas sistem pengendalian intern

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK yakni:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

3. Opini Tidak Wajar yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
4. Menolak memberikan opini (disclaimer) yang menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Tabel II.79
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Tahun	Opini BPK Atas Laporan Keuangan
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2025	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: Inspektorat Kab. Trenggalek, 2026

II. KEPEGAWAIAN

Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instansi pemerintah menerapkan prinsip-prinsip sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) ASN. Sistem merit itu sendiri merujuk pada sistem yang menekankan pada kompetensi, kualifikasi, dan prestasi sebagai dasar dalam penempatan, pengangkatan, pengembangan karier, serta pemberhentian ASN.

Penggunaan Indeks Sistem Merit memiliki berbagai manfaat, diantaranya untuk meningkatkan profesionalisme ASN karena penilaian dan pengembangan karier didasarkan pada kompetensi dan kinerja, menjamin pemerataan kesempatan bagi ASN dalam pengembangan karier, tanpa terhalang oleh faktor-faktor eksternal seperti hubungan pribadi atau politis. Serta memperkuat integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan ASN di instansi pemerintahan.

Tabel II.80
Indeks Sistem Merit Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Sistem Merit	162,5	256	283	283	283

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek, 2026

Capaian realisasi tahun 2024 dan 2025 merupakan capaian realisasi tahun 2023, dikarenakan mulai tahun 2024 dan 2025 tidak ada penilaian sistem merit dari BKN. Hal ini disebabkan adanya perubahan regulasi dari PAN-RB terkait evaluasi pelaksanaan sistem merit.

jj. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dimensi Kompetensi merupakan alat ukur penting untuk menilai sejauh mana kualitas, kinerja, dan perilaku ASN sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu dimensi utama dalam pengukuran indeks ini adalah dimensi kompetensi, yang menilai kemampuan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya secara efektif. Dalam kerangka pembangunan daerah, peningkatan kompetensi ASN menjadi krusial untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan, termasuk implementasi kebijakan yang berbasis data, transparansi birokrasi, serta inovasi pelayanan. Adapun capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dimensi Kompetensi Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 sebesar 26,21, sedangkan tahun 2025 sebesar 32,17. Adapun realisasi Indeks Profesionalitas ASN dimensi kompetensi tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.81
Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	33,45	40,83	58,60	26,21	32,17

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Trenggalek, 2026

Berdasarkan data di atas, penurunan Indeks tahun 2024 disebabkan karena adanya perubahan instrumen penilaian IP ASN, yang sebelumnya dilakukan penghitungan secara mandiri mulai tahun 2024, penghitungan IP ASN menggunakan aplikasi SIASN yang dihitung berdasarkan data pada SI ASN, sehingga terdapat perbedaan hasil penilaian, berkenaan dengan kondisi data ASN.

JJ. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Penggunaan bukti dalam pengambilan kebijakan (evidence based policy) dewasa ini semakin dinilai sangat penting dan menjadi tuntutan. Salah satu dasar bukti kebijakan yang mampu mengilmiahkan kebijakan adalah hasil penelitian. Penggunaan hasil penelitian yang tidak akurat dalam

pengambilan kebijakan dapat menyebabkan kegagalan kebijakan. Perubahan paradigma dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti membuka peluang besar bagi para peneliti untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan melalui kerjasama dengan para pengambil kebijakan, namun demikian masih diperlukan upaya untuk memastikan agar penelitian dapat diakses oleh para pembuat kebijakan sehingga hasil penelitiannya dapat digunakan secara lebih efektif.

Demikian halnya di Pemerintah Kabupaten Trenggalek, dalam proses perencanaan Pembangunan daerah diupayakan didukung dengan adanya kajian-kajian sebagai dasar penentuan kebijakan daerah. Dalam kurun waktu tahun 2021-2025 telah dihasilkan beberapa kajian dan telah menjadi dasar dalam proses perencanaan hingga penentuan kebijakan daerah, diantaranya sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.82
Kajian Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

No	Judul Kajian	Tahun Penyusunan
1	Studi Kelayakan Pengembangan Panggul Little Jogja	2021
2	Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Dongko Culture Heritage	2022
3	Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Durenan	2022
4	Keberdayaan Gender di Sektor Wisata: Solusi Feminisasi Kemiskinan?	2022
5	Prediksi Dampak Pengembangan Rumah Sakit Terhadap Aspek Ekonomi Dan Kinerja Pelayanan Kesehatan	2022
6	Studi pada Pengembangan RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek	2022
7	Naskah Akademik RPJPD 2025-2045	2023
8	Penentuan Produk Unggulan Daerah Dalam Perspektif Penta Helix Di Kabupaten Trenggalek	2023
9	Kompilasi hasil pelaksanaan fasilitasi penyusunan indeks-indeks pendukung pembangunan daerah	2023
10	Profil Inovasi Daerah : Collaborate to Innovate Tahun 2023	2023
11	Naskah Akademik RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2029	2024
12	Rancangan Teknokratik Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Kab. Trenggalek Tahun 2025-2029	2024
13	Profil Indeks Pemerintah Daerah	2024

No	Judul Kajian	Tahun Penyusunan
14	Profil Inovasi Daerah 2024 : Innovation as a Solution	2024
15	Kajian Monitoring Dan Evaluasi Inovasi Bidang Kesehatan Kabupaten Trenggalek	2024
16	Kajian Monitoring dan Evaluasi Inovasi Bidang Pendidikan di Kabupaten Trenggalek	2024
17	Kajian Monitoring dan Evaluasi Inovasi Perangkat Daerah di Kabupaten Trenggalek	2024
18	Background Study RPJMD Tahun 2025-2029 Lingkup Ekosda	2024
19	Naskah akademik RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029	2024
20	Background Study RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029 Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2024
21	Background Study RPJMD Kabupaten Trenggalek 2025-2029 Bidang Infraswil	2024
22	Profil Riset Trenggalek 2025 : Optimalisasi Aset Daerah untuk Peningkatan PAD Inovasi Kebencanaan Berbasis Masyarakat Akselerasi Industri Pengolahan Daerah Transformasi kawasan Hutan Daerah Trenggalek Lestari Pariwisata Hijau dan Ramah Lingkungan Pasar Daerah Berpendapatan Tinggi Kabupaten Trenggalek Berpendapatan Tinggi Pendidikan Lestari Trenggalek Berseri Pengairan Cerdas untuk Masa Depan Pengolahan Berkelanjutan untuk Trenggalek Lestari Smart Mobility Menuju Kota Atraktif Perikanan Berkelanjutan, Emas Biru Tenggalek Pertanian Hijau Berkelanjutan Hilirisasi Peternakan Berbasis Sumber Daya Alam Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Akselerasi Pembangunan Daerah	2025
23	Peraturan Bupati Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Kab. Trenggalek Tahun 2025-2029	2025
24	Profil Indeks Kabupaten Trenggalek : Indeks Inovasi Dan Daya Saing Daerah Tahun 2025-2030	2025
25	Profil Inovasi Daerah Tahun 2025: Future Starts With Innovation	2025

No	Judul Kajian	Tahun Penyusunan
26	Feasibility Study Pembangunan Jalan Kabupaten Trenggalek Melalui Pinjaman Daerah	2025
27	Feasibility Study Pengembangan Olahraga Kabupaten Trenggalek Melalui Pinjaman Daerah	2025
28	Feasibility Study Kota Atraktif Kabupaten Trenggalek Melalui Pinjaman Daerah	2025
29	Feasibility Study Pengembangan Pariwisata Kabupaten Trenggalek Melalui Pinjaman Daerah	2025

Sumber : Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2026

KK. INSPEKTORAT DAERAH

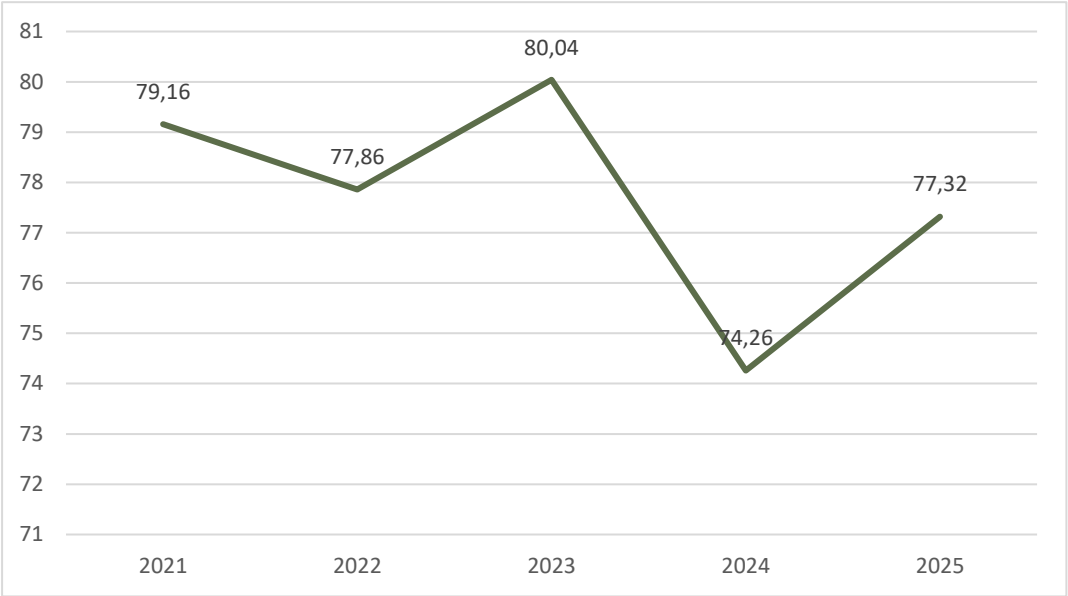
Indeks Integritas

Indeks integritas dan transparansi dalam pemerintahan serta pelayanan publik merupakan ukuran penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Indikator ini mencakup berbagai aspek, seperti kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Peningkatan dalam indikator ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang lebih baik dan bebas dari praktik korupsi.

Indeks Integritas merupakan indeks yang dihasilkan dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yaitu ukuran yang digunakan untuk memetakan risiko korupsi dan menilai upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat kementerian/lembaga maupun daerah. Pengukurannya mencakup pengukuran persepsi dan pengalaman masyarakat (pengguna layanan), pegawai, serta ahli mengenai integritas instansi tersebut dalam berbagai aspek, seperti pelayanan, manajemen sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan.

Indeks Integritas diperoleh dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). Program SPI diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bagian dari upaya nasional dalam menekan risiko korupsi dan meningkatkan integritas serta kualitas layanan publik. Dengan melibatkan pegawai pemerintah, masyarakat pengguna layanan, dan para pakar yang terampil dalam evaluasi kinerja instansi pemerintah, SPI diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat integritas dan potensi risiko korupsi pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Grafik II.68
Indeks Integritas (Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI))
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2026

Data terkait tingkat integritas dan transparansi Pemerintah Kabupaten Trenggalek dari tahun 2021 hingga tahun 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Hasil menunjukkan nilai berturut-turut sebesar 79,16 di tahun 2021, sedikit menurun menjadi 77,86 pada 2022, meningkat menjadi 80,04 pada 2023, dan kembali menurun menjadi 74,26 pada 2024. Penurunan yang terjadi pada 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya respon dari beberapa pihak dalam sampel SPI, baik dari sisi pemahaman responden maupun ketepatan waktu pengisian/pengiriman survei. Nilai capaian Indeks Integritas Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,06 dibandingkan tahun sebelumnya dan masuk pada kategori waspada. Terdapat tiga komponen penilaian: 1) komponen internal dengan skor 82,02, 2) komponen eksternal dengan skor 91,52 dan 3) komponen ekspert dengan skor 70,38.

LL. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Indeks Harmoni Indonesia (IHI)

Indeks Harmoni Indonesia (IHI) adalah sebuah metrik komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat keharmonisan dan kerukunan dalam masyarakat Indonesia, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, budaya, dan keberagamaan. Indeks ini juga sering digunakan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi situasi sosial, serta sebagai dasar

untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dalam mempromosikan harmoni dan persatuan di tengah keragaman masyarakat. Perhitungan Indeks Harmoni dimulai tahun 2025 oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Berdasarkan hasil survey yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dari 4 Demensi yaitu Ekonomi, Sosial, Budaya dan Keberadaan Agama. Nilai dari masing-masing demensi yaitu : 1) demensi ekonomi dengan skor 6,89 (Baik); 2) demensi sosial dengan skor 7,03 (Sangat Baik); 3) demensi budaya skor 7,04 (Sangat Baik): 4) demensi keberagaman skor 7,27 (Sangat Baik). Sehingga Indeks Harmoni Indonesia pada Tahun 2025 sebesar 7,05.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam Pasal 18 ayat (3) maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pada Pasal 298 (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan Sosial. Sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 2 Ayat (2), Posyandu tidak hanya fokus pada kesehatan, tetapi juga mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk mendukung transformasi ini, seluruh perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap SPM perlu terlibat aktif dalam pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pelaksanaan Posyandu di wilayah masing-masing. Tujuan utama dari transformasi ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, tidak hanya terbatas pada kesehatan ibu dan anak.

1. Pendidikan

Berdasarkan Permendagri nomor 59 Tahun 2021 dan Permendikbudristek RI nomor 32 tahun 2022, indikator SPM Pendidikan digunakan pemerintah daerah sebagai referensi perumusan kegiatan dan anggaran bagi peningkatan kualitas pendidikan. Standar Pelayanan Minimal atau SPM Pendidikan adalah jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Oleh sebab itu, visi besar Transformasi Pendidikan Indonesia akan tercapai dengan terpenuhinya SPM Pendidikan di daerah. Transformasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pendidikan berfokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah kepada semua warga negara, yang menjadi fokus dalam transformasi SPM di pendidikan meliputi : Akses Pendidikan, Fasilitas dan Infrastruktur, Partisipasi sekolah, Kualitas Pengajaran, Kualitas lingkungan sekolah, dan kualitas pendidik. Dengan fokus pada aspek-aspek tersebut, transformasi SPM pendidikan bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan inklusif, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan. Melalui perwujudan SPM, pemerintah daerah dituntut untuk tidak lagi sekadar menyediakan layanan, tetapi menjamin mutu dan pemerataan layanan dasar. Ini adalah transformasi besar dari orientasi birokrasi administratif menuju birokrasi yang responsif, inklusif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat paling mendasar. Berikut capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025.

Tabel II.83
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	93,83	93,24	94,94%	99,20 %	99,72 %
	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum	100	100	87,23%	92,91 %	95,64 %

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
		menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam Pendidikan kesataraan					
	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	99,38	99,30	91,14%	96,99 %	99,73 %

Sumber: Bidang PPM Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2026
(Laporan Penerapan SPM Kab. Trenggalek 2025)

2. Kesehatan

Operasionalisasi SPM Bidang Kesehatan berlandaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. SPM Bidang Urusan Kesehatan untuk Kabupaten/Kota ada 12 (dua belas) jenis layanan. Berikut capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025.

Tabel II.84
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	89,06 %	86%	94,04%	100%	82,79 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	98,18 %	92%	91,32%	100%	95,33 %

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	100,16%	97%	95,36%	100%	93,52 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	88,58 %	103%	99,93%	100%	93,77 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	95,03 %	106%	96,67%	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	80,41 %	99%	100%	100%	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	78,37 %	95%	100%	100%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	123,26%	77%	87,48%	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	117,94%	104%	100%	100%	100%

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100%	101%	100%	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	31,99 %	79%	100%	100%	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima Layanan kesehatan	102,20%	86%	98,16%	100%	86,82 %

Sumber: Bidang PPM Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2026
(Laporan Penerapan SPM Kab. Trenggalek 2025)

3. Pekerjaan Umum

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Pekerjaan Umum didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023. Jenis pelayanan Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Pekerjaan Umum kewenangan Kabupaten Kota terdiri atas Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik. Capaian penerapan SPM Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari yang diukur dengan indikator jumlah warga negara yang terlayani serta jumlah mutu barang/jasa dari ukuran kuantitas dan kualitas. Upaya pemenuhan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari melalui jaringan perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan. Sedangkan capaian penerapan SPM Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik juga diukur dengan indikator jumlah warga negara yang terlayani serta jumlah mutu barang/jasa dari ukuran kuantitas dan kualitas. Upaya pemenuhan Kualitas Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

(SPALD-S). Berikut capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025.

Tabel II.85
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari- hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok- pokok air minum sehari-hari	100%	100%	100%	100%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bidang PPM Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2026
(Laporan Penerapan SPM Kab. Trenggalek 2025)

4. Perumahan Rakyat

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Pekerjaan Umum didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2023. Jenis pelayanan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Perumahan Rakyat kewenangan Kabupaten/Kota terdiri atas penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dengan indikator jumlah warga negara yang harus dilayani serta jumlah mutu barang/ jasa/ sumber daya manusia seperti rehabilitasi/ pembangunan/ permukiman kembali/ bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah warga negara yang harus dilayani serta jumlah mutu barang/ jasa/ sumber daya manusia seperti fasilitasi penggantian hak atas tanah/ bangunan, bantuan akses rumah sewa layak huni. Berikut capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025.

Tabel II.86
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Persentase Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah	Persentase warga Kabupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bidang PPM Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2026
(Laporan Penerapan SPM Kab. Trenggalek 2025)

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Berikut capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungnan Masyarakat Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025.

Tabel II.87
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	0%	0%	99,42%	100%	100%
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	96%	100%	100%	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	20%	100%	100%	100%

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	100%	100%	99,13%	98,81%

Sumber: Bidang PPM Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2026
(Laporan Penerapan SPM Kab. Trenggalek 2025)

6. Sosial

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang Sosial sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota, Bab III Pasal 26 SPM Bidang Sosial tersebut mencakup 5 (lima) jenis pelayanan dasar yaitu:

1) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
2) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
3) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
4) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
5) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota

Berikut capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025.

Tabel II.88
Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

No.	Jenis Layanan SPM	Indikator	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar Panti	Jumlah warga kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	78,59%	100%	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah warga kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah warga kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat dan pasca	100%	100%	96,67%	100%	100%

Sumber: Bidang PPM Bappedalitbang Kab. Trenggalek, 2026
(Laporan Penerapan SPM Kab. Trenggalek 2025)

2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dimana Penetapan Indikator Kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sehingga pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode Tahun 2025-2029 akan tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran RPJMD merupakan rencana pembangunan yang dijabarkan melalui kebijakan, program dan kegiatan tahunan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan yang dimiliki daerah, serta tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang diimplementasikan dalam RKPD dilakukan melalui proses evaluasi kinerja pembangunan daerah dengan melihat capaian Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Adapun capaian Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2025-2029 sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.89
Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029

INDIKATOR		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2025			2026	2027	2028	2029
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Target	Target	Target
1	Indeks Kota Hijau	61,6	61,6	69,33	100,00%	62,1	62,6	63,1	63,6
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,78	73,78	73,39	99,47%	73,92	74,27	74,61	74,95
3	Indeks Infrastruktur	51,95	51,95	60,34	100,00%	52,95	55,56	58,17	60,78
4	Tingkat Kemiskinan	9,65	9,65	10,29	93,78%	9,35	8,94	8,63	8,11
5	Pertumbuhan Ekonomi	4,72	4,72	5,31	100,00%	4,73	4,74	4,75	4,76
6	Indeks Reformasi Birokrasi	87,4	87,4	88,63	100,00%	87,45	87,50	87,55	87,6
7	PDRB Perkapita (Juta Rp / Kapita)	32,74	32,74	35,11	100,00%	33,76	34,23	35,09	35,76
8	Indeks Gini	0,349	0,349	0,359	97,21%	0,348	0,347	0,345	0,339
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,6	93,6	93,64	100,00%	93,78	93,94	94,12	94,28
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,87	3,87	3,86	100,00%	3,85	3,83	3,81	3,79
11	Indeks Risiko Bencana	138,59	138,59	120,85	100,00%	135,21	131,99	128,92	126

Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek Tahun 2025-2029, BPS Kab. Trenggalek dan Bappedalitbang Kab. Trenggalek Tahun 2025

Selanjutnya dalam proses evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2025 berikut disampaikan realisasi capaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I sebagaimana digambarkan pada tabel berikut :

Tabel II.90
Realisasi Belanja Daerah Pergeseran Perubahan APBD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Berdasarkan Urusan Sampai Dengan Triwulan I

No	Urusan	Jumlah Anggaran			Realisasi TW I	Prosentase realisasi anggaran thdp RKPD (%)	Realisasi Kinerja TW I
		RKPD	APBD	Selisih			
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1	PENDIDIKAN	641.865.881.239,00	630.701.903.025,00	11.163.978.214,00	51.832.059.586,00	8,08%	2,76
2	KESEHATAN	479.919.436.597,00	488.335.034.669,00	8.415.598.072,00	65.882.819.633,00	13,73%	36,38
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	125.544.381.640,00	90.120.501.696,00	35.423.879.944,00	1.114.101.337,00	0,8%	23,48
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	29.317.500.000,00	33.201.527.689,00	3.884.027.689,00	6.725.911.584,00	11,73%	0
5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.524.416.605,00	15.324.918.022,00	1.199.498.583,00	1.892.954.544,00	12,35%	51,25
6	SOSIAL	14.977.292.363,40	12.104.712.517,40	2.872.579.846,00	1.144.122.405,00	9,45%	58,91

No	Urusan	Jumlah Anggaran			Realisasi TW I	Prosentase realisasi anggaran thdp RKPD (%)	Realisasi Kinerja TW I
		RKPD	APBD	Selisih			
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						
1	TENAGA KERJA	6.897.050.360,00	8.760.862.190,00	1.863.811.830,00	1.455.369.829,00	21,1%	3,67
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	512.346.800,00	554.510.837,00	42.164.037,00	4.010.000,00	0,78%	60
3	PANGAN	571.074.738,00	571.074.738,00	0,00	14.929.500,00	2,61%	12,50
4	PERTANAHAN	1.525.000.000,00	7.086.864.585,00	5.561.864.585,00	0,00	0	0
5	LINGKUNGAN HIDUP	18.975.478.500,00	19.614.467.732,00	638.989.232,00	1.357.221.272,00	7,15%	12,79
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.593.718.255,00	9.345.462.369,00	751.744.114,00	598.811.001,00	6,97%	70,11
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.443.602.046,00	9.513.365.386,00	930.236.660,00	1.147.906.998,00	10,99%	46,47

No	Urusan	Jumlah Anggaran			Realisasi TW I	Prosentase realisasi anggaran thdp RKPD (%)	Realisasi Kinerja TW I
		RKPD	APBD	Selisih			
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4.817.275.000,00	10.690.933.470,00	5.873.658.470,00	0	0%	0
9	PERHUBUNGAN	36.953.409.641,00	34.972.961.527,00	1.980.448.114,00	21.591.144,00	0,45%	44,47
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.031.222.744,00	12.025.476.000,00	994.253.256,00	364.187.200,00	4,08%	49,06
11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	11.406.645.451,00	11.874.153.838,00	467.508.387,00	410.147.345,00	3,72%	33,95
12	PENANAMAN MODAL	4.651.550.097,00	5.004.244.631,00	352.694.534,00	757.446.577,00	6,64%	92,74
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	7.428.293.554,00	12.717.270.126,00	5.288.976.572,00	1.028.682.984,00	22,11%	0
14	STATISTIK	107.965.695,00	130.000.000,00	22.034.305,00	478.152.079,00	6,44%	0
15	PERSANDIAN	71.000.000,00	85.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0	0
16	KEBUDAYAAN	539.500.000,00	475.000.000,00	64.500.000,00	0,00	0	50,79
17	PERPUSTAKAAN	647.958.366,00	847.958.365,00	199.999.999,00	21.536.000,00	3,92%	0
18	KEARSIPAN	3.798.025.150,00	4.026.159.743,00	228.134.593,00	8.641.890,00	1,32%	13,87
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						

No	Urusan	Jumlah Anggaran			Realisasi TW I	Prosentase realisasi anggaran thdp RKPD (%)	Realisasi Kinerja TW I
		RKPD	APBD	Selisih			
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	15.142.753.076,00	16.344.099.648,00	1.201.346.572,00	6.653.474,00	0,61%	13,48
2	PARIWISATA	30.582.219.514,00	25.040.531.832,00	5.541.687.682,00	862.064.241,00	2,82%	31,10
3	PERTANIAN	33.399.713.720,00	41.735.239.900,00	8.335.526.180,00	3.642.454.636,00	7,71%	25,14
4	PERDAGANGAN	1.647.076.486,00	2.362.230.386,00	715.153.900,00	111.456.000,00	6,77%	3,41
5	PERINDUSTRIAN	605.000.000,00	515.000.000,00	90.000.000,00	4.110.000,00	0,68%	5,65
6	TRANSMIGRASI	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0	0
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						
1	SEKRETARIAT DAERAH	27.679.393.599,00	29.000.236.145,00	1.320.842.546,00	5.894.857.536,00	21%	23,83
2	SEKRETARIAT DPRD	45.808.104.818,00	50.075.676.273,00	4.267.571.455,00	11.679.007.563,00	25%	33,33
V	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						
1	PERENCANAAN	8.001.801.487,00	8.565.895.758,00	564.094.271,00	1.819.944.947,00	22,74%	16,04
2	KEUANGAN	289.999.159.142,00	315.437.721.782,00	25.438.562.640,00	55.919.072.060,00	19,28%	77,95
3	KEPEGAWAIAN	6.308.880.492,00	7.022.518.336,00	713.637.844,00	1.444.331.814,00	22,57%	37,47

No	Urusan	Jumlah Anggaran			Realisasi TW I	Prosentase realisasi anggaran thdp RKPD (%)	Realisasi Kinerja TW I
		RKPD	APBD	Selisih			
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	396.817.500,00	532.000.000,00	135.182.500,00	14.185.000,00	4,63%	9,95
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	487.071.000,00	545.000.000,00	57.929.000,00	21.088.500,00	4,33%	0
VI	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						
1	INSPEKTORAT DAERAH	11.089.078.895,00	12.759.121.119,00	1.670.042.224,00	752.909.287,00	6,79%	50,97
VII	**UNSUR KEWILAYAHAN**						
1	KECAMATAN	37.107.697.278,00	39.891.446.407,00	2.783.749.129,00	4.054.266.893,00	10,93%	43,83
VIII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.947.150.885,00	9.542.180.224,00	595.029.339,00	915.179.323,00	10,23%	17,58
	JUMLAH	**1.964.002.618.306**	**2.003.958.719.980**	**39.956.101.674,00**	**215.044.211.496,00**		**32,86**

Sumber : Data diolah dari Aplikasi SIPD E-Dalev

Upaya pencapaian target pembangunan daerah tidak terlepas dari dukungan pendanaan/ keuangan yang dalam hal ini terkait pembiayaan Pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap belanja langsung pada masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Trenggalek. Perlu pemahaman dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan terhadap konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga target sasaran dan program di RPJMD dan RKPD dapat tercapai serta perlunya pencermatan Perangkat Daerah dalam menentukan target kegiatan dan sub kegiatan untuk memaksimalkan capaian kinerja serta perubahan dalam menentukan target kinerja sub kegiatan dan kegiatan terkait perubahan dokumen perencanaan (Perubahan Renja dan Perubahan RKPD).

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan per OPD yang dalam hal ini sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, digambarkan pada tabel berikut:

Tabel II.91

Realisasi Belanja Langsung APBD Tahun 2026 Berdasarkan Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I

No	OPD	Pagu RKPD	Pagu APBD	Realisasi Keuangan Triwulan I	Persentase Keuangan APBD TW I	Persentase Keuangan RKPD TW I	Realisasi Kinerja
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.554.518.336	6.705.697.992	1.458.516.814,00	21,75	21,75	28,30
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9.542.180.224	8.947.150.885	915.179.323,00	10,23	10,23	17,58
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.389.718.778	4.937.130.193	1.042.420.596,00	21,11	21,11	60,97
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	315.437.721.782	289.999.159.142	55.919.072.060,00	19,28	18,61	77,95
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	9.110.895.758	8.488.872.487	1.841.033.447,00	21,69	21,69	12,03
6	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.874.118.108	4.445.983.516	866.546.986,00	19,49	19,48	9,25
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.345.462.369	8.593.718.255	598.811.001,00	6,97	21,59	70,11
8	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN	499.025.968.139	484.736.711.597	12.446.715.936,00	2,57	17,20	22,74

No	OPD	Pagu RKPD	Pagu APBD	Realisasi Keuangan Triwulan I	Persentase Keuangan APBD TW I	Persentase Keuangan RKPD TW I	Realisasi Kinerja
	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.240.476.000	11.210.188.439	410.147.345,00	3,66	12,25	29,43
10	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	14.236.384.224	13.053.721.937	868.902.577,00	6,66	19,11	22,20
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21.531.766.563	19.161.283.500	1.359.861.272,00	7,10	19,41	11,63
12	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	25.515.531.832	31.121.719.514	883.600.241,00	2,84	8,18	38,49
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	97.207.366.281	127.069.381.640	1.101.683.837,00	0,87	2,92	16,77
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9.513.365.386	10.443.602.046	1.147.906.998,00	10,99	10,94	46,47
15	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	12.717.270.126	7.428.293.554	478.152.079,00	6,44	6,44	0,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.004.244.631	4.651.550.097	1.028.682.984,00	22,11	22,11	92,74
17	DINAS PENDIDIKAN	630.701.903.025	641.865.881.239	51.832.059.586,00	8,08	16,63	2,76
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN	9.390.862.190	7.617.050.360	1.459.479.829,00	19,16	16,47	3,95

No	OPD	Pagu RKPD	Pagu APBD	Realisasi Keuangan Triwulan I	Persentase Keuangan APBD TW I	Persentase Keuangan RKPD TW I	Realisasi Kinerja
	TENAGA KERJA						
19	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	38.567.829.026	31.596.565.858	2.685.238.583,00	8,50	8,58	24,55
20	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	90.492.869.802	79.908.663.641	7.099.876.284,00	8,88	8,88	11,12
21	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	18.165.286.429	17.331.170.676	894.344.353,00	5,16	18,49	15,34
22	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15.531.803.200	12.617.059.317	1.148.132.405,00	9,10	16,07	59,37
23	INSPEKTORAT	12.759.121.119	11.089.078.895	752.909.287,00	6,79	20,64	50,97
24	KECAMATAN BENDUNGAN	2.178.167.836	2.028.199.082	131.050.686,00	6,46	19,98	29,90
25	KECAMATAN DONGKO	2.490.377.575	2.309.915.185	555.365.086,00	24,04	24,04	47,91
26	KECAMATAN DURENAN	2.243.196.432	2.085.678.339	142.435.789,00	6,83	20,86	44,82
27	KECAMATAN GANDUSARI	2.041.411.918	1.906.478.180	122.673.795,00	6,43	22,09	58,87
28	KECAMATAN KAMPAK	2.581.646.619	2.411.068.390	117.584.471,00	4,88	11,94	36,84
29	KECAMATAN KARANGAN	2.784.371.386	2.601.699.673	170.663.880,00	6,56	24,91	47,12

No	OPD	Pagu RKPD	Pagu APBD	Realisasi Keuangan Triwulan I	Persentase Keuangan APBD TW I	Persentase Keuangan RKPD TW I	Realisasi Kinerja
30	KECAMATAN MUNJUNGAN	2.315.224.710	2.162.343.223	490.822.038,00	22,70	22,70	41,28
31	KECAMATAN PANGGUL	2.831.179.113	2.673.954.379	176.634.698,00	6,61	22,12	27,87
32	KECAMATAN POGALAN	2.049.063.498	1.914.774.057	487.671.007,00	25,47	25,47	46,09
33	KECAMATAN PULE	1.899.413.923	1.762.574.564	128.979.745,00	7,32	22,48	58,43
34	KECAMATAN SURUH	2.166.692.808	2.027.900.219	140.211.472,00	6,91	23,36	24,77
35	KECAMATAN TRENGGALEK	9.158.919.985	8.447.393.013	370.078.584,00	4,38	18,15	53,99
36	KECAMATAN TUGU	2.372.858.353	2.215.736.199	477.454.747,00	21,55	21,55	41,30
37	KECAMATAN WATULIMO	2.778.922.251	2.559.982.774	410.372.708,00	16,03	15,74	54,49
38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	11.134.697.827	10.387.787.829	850.533.948,00	8,19	8,81	44,77
39	SEKRETARIAT DAERAH	29.000.236.145	27.679.393.599	2.026.109.270,00	7,32	21,30	23,83
40	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	50.075.676.273	45.808.104.818	6.331.878.047,00	13,82	25,50	33,33
	TOTAL	**2.003.958.719.980**	**1.964.002.618.303**	**161.369.793.794**	**8,22**	**8,05**	**36,01**

Sumber : Data diolah dari Aplikasi SIPD E-Dalev

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan pagu anggaran antara RKPD Tahun 2026 dan Pagu APBD Tahun 2026. Hal tersebut memperlihatkan dinamisnya proses perencanaan penganggaran dengan tetap memperhatikan kaidah/ pedoman dan konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam proses perencanaan penganggaran. Selisih pagu antara RKPD dan APBD Tahun 2026 adalah sebesar **Rp. -39.956.101.674 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah)**.

Gambaran capaian serapan anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan rata-rata capaian kinerja program. Dimana pada seluruh Perangkat Daerah terlihat untuk rata-rata persentase capaian kinerja program lebih besar dibandingkan rata-rata persentase penyerapan anggaran.

Dari data realisasi keuangan Belanja Perangkat Daerah Tahun 2026 sampai dengan akhir bulan Maret 2026 (Triwulan I) secara keseluruhan dari target pagu RKPD 2026 sebesar **Rp. 2.003.958.719.980** terealisasi sebesar **Rp. 161.369.793.794** atau **8,05 %**.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat pada draf Review RPJMD pada tahun rencana.

Prioritas pembangunan daerah adalah agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara menuju sasaran 5 (lima) tahunan RPJMD. Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya meliputi program program unggulan SKPD yang paling tinggi realisasinya bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Prioritas pembangunan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya.

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

Berikut adalah realisasi program prioritas daerah, prioritas RPJMD, dan prioritas propinsi dan nasional:

Tabel II.92
Realisasi Belanja APBD Tahun 2026 Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I

No	Uraian	Pagu RKPD Th. 2026	Pagu APBD Th. 2026	Realisasi Anggaran s.d TW I Th. 2026	Capaian Keuangan (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	16.642.337.207,00	13.800.676.943,55	2.394.289.793,00	17,35	33,62
2	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	256.254.865.485,00	278.973.611.490,58	20.809.044.966,00	7,46	20,59
3	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	58.650.414.286,00	49.113.541.534,05	5.920.259.668,00	12,05	19,09
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	9.628.365.386,00	10.558.602.045,97	1.143.006.998,00	10,83	38,73
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	15.531.803.200,00	12.617.059.316,71	2.028.057.764,00	16,07	59,37

No	Uraian	Pagu RKPD Th. 2026	Pagu APBD Th. 2026	Realisasi Anggaran s.d TW I Th. 2026	Capaian Keuangan (%)	Capaian Kinerja (%)
6	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.147.319.259.398,00	1.138.476.869.906,60	191.483.627.107,34	16,82	10,58
7	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	26.541.596.829,00	24.811.568.906,55	2.893.763.427,00	11,66	36,72
8	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	473.390.078.189,00	435.650.688.161,99	86.602.043.604,00	19,88	43,28
	Total	**2.003.958.719.980,00**	**1.964.002.618.306,00**	**313.274.093.327,34**	**15,95**	**32,86**

Sumber : Data diolah dari Aplikasi SIPD E-Dalev

Dari realisasi keuangan dalam mendukung prioritas pembangunan tahun 2025 dapat dilihat bahwa capaian terendah terhadap APBD adalah pada prioritas ke-1 (Infrastruktur Berwawasan Lingkungan dalam rangka Adaptasi Perubahan Iklim) sebesar 5,15%. Hal ini dikarenakan pada Triwulan I kegiatan fisik belum dilaksanakan, dan masih dalam tahap persiapan. Sedangkan penyerapan tertinggi terhadap pagu APBD adalah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota/kegiatan rutin yakni sebesar Rp. 156.069.914.439,00 atau sebesar

44,20%.

Tabel II.93
Realisasi Belanja APBD Tahun 2026 Berdasarkan Prioritas RPJMD

No	Uraian	Pagu RKPD Th. 2026	Pagu APBD Th. 2026	Realisasi Anggaran s.d TW I Th. 2026	Capaian Keuangan (%)	Capaian Kinerja (%)
1	Ekonomi Regeneratif dan Inklusif dalam rangka Penghapusan Kemiskinan	84.921.116.879,00	73.472.820.523,57	9.457.556.459,00	12,87	28,12
2	Pembangunan Infrastruktur Berorientasi Kota Atraktif dan Berwawasan Lingkungan Terintegrasi	256.254.865.485,00	278.973.611.490,58	20.809.044.966,00	7,46	20,59
3	Pembangunan Manusia Berdaya Saing dan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis	1.662.782.737.616,00	1.611.556.186.291,85	283.007.491.902,34	17,56	38,60
	Total	**2.003.958.719.980,00**	**1.964.002.618.306,00**	**313.274.093.327,34**	**15,95**	**32,86**

Sumber : Data diolah dari Aplikasi SIPD E-Dalev

Adapun dukungan pada prioritas daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029, dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran terendah pada prioritas ke-1 yakni, Ekonomi Regeneratif dan Inklusif dalam rangka Penghapusan Kemiskinan sebesar 12,87%. Hal ini dikarenakan pada Triwulan I kegiatan fisik belum dilaksanakan, dan masih dalam tahap persiapan.

Tabel II.94
Realisasi Belanja Langsung TW I Tahun 2026 Berdasarkan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026

No	Uraian	Pagu RKPD Th. 2026	Pagu APBD Th. 2026	Realisasi Anggaran s.d TW I Th. 2026	Capaian Keuangan (%)	Capaian Kinerja (%)
1	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	58.650.414.286,00	49.113.541.534,05	5.920.259.668,00	12,05	19,09
2	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	199.725.712.083,00	218.009.268.025,87	12.186.063.553,00	5,59	17,77
3	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	477.904.443.575,00	441.628.532.507,96	87.661.359.615,00	19,85	44,89
4	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	649.845.291.259,00	655.163.546.809,37	108.167.061.730,00	16,51	11,16
5	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis	20.676.878.051,00	19.334.938.713,32	1.829.806.831,00	9,46	26,64

No	Uraian	Pagu RKPD Th. 2026	Pagu APBD Th. 2026	Realisasi Anggaran s.d TW I Th. 2026	Capaian Keuangan (%)	Capaian Kinerja (%)
	dan Inklusif					
6	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	54.770.022.877,00	56.766.903.908,61	7.312.425.417,00	12,88	32,26
7	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	25.004.186.510,00	23.912.608.692,88	4.758.208.062,00	19,90	20,82
8	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	499.025.968.139,00	484.736.711.597,23	83.373.374.877,34	17,20	22,74
9	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	18.355.803.200,00	15.336.566.516,71	2.065.533.574,00	13,47	52,52
	Total	**2.003.958.719.980,00**	**1.964.002.618.306,00**	**313.274.093.327,34**	**15,95**	**32,86**

Sumber : Data diolah dari Aplikasi SIPD E-Dalev

Demikian halnya gambaran penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I dalam mendukung prioritas Provinsi Jawa Timur tahun 2026, dimana penyerapan rendah terhadap pagu APBD dialami program kegiatan yang mendukung pada prioritas ke-2 yaitu JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan dengan capaian sebesar 5,59% dengan realisasi anggaran Rp. 12.186.063.553,00. Sedangkan penyerapan tertinggi adalah pada Prioritas 3 yaitu JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif dengan capaian sebesar 19,85%

terhadap pagu APBD selain Program Penunjang.

Tabel II.95
Realisasi Belanja Langsung TW I Tahun 2026 Berdasarkan Prioritas Nasional Tahun 2026

No	Uraian	Pagu RKPD Th. 2026	Pagu APBD Th. 2026	Realisasi Anggaran s/d TW I Th. 2026	Capaian (%) Anggaran RKPD	Capaian (%) Anggaran APBD	Capaian (%) Kinerja s/d TW I Th. 2026
1	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	360.000.000,00	289.567.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	187.051.901.414,00	181.697.862.678,00	872.649.909,00	0,47	0,48	15,82
3	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan,	23.665.906.800,00	20.997.805.687,00	370.718.750,00	1,57	1,77	0,00

No	Uraian	Pagu RKPD Th. 2026	Pagu APBD Th. 2026	Realisasi Anggaran s/d TW I Th. 2026	Capaian (%) Anggaran RKPD	Capaian (%) Anggaran APBD	Capaian (%) Kinerja s/d TW I Th. 2026
	Energi, Air, Ekonomi Syariah,Ekonomi Digital,Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru						
4	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	4.697.860.000,00	4.871.555.100,00	534.287.556,00	11,37	10,97	31,95
5	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	7.785.544.000,00	7.229.437.199,00	289.551.075,00	3,72	4,01	80,00
6	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	239.671.280.317,00	232.584.934.318,00	2.495.922.261,00	1,04	1,07	30,07
7	Memperkuat Penyelarasa	3.799.583.800,00	3.087.700.675,00	92.109.000,00	2,42	2,98	30,07

No	Uraian	Pagu RKPD Th. 2026	Pagu APBD Th. 2026	Realisasi Anggaran s/d TW I Th. 2026	Capaian (%) Anggaran RKPD	Capaian (%) Anggaran APBD	Capaian (%) Kinerja s/d TW I Th. 2026
	n Kehidupan yang harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur						
8	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	344.941.431.275,00	346.683.139.604,00	62.202.394.479,00	18,03	17,94	45,29
	Grand Total	**1.946.783.455.644**	**2.002.291.772.651**	**222.927.547.469**	**11,45**	**11,13**	**30,82**

Sumber : Data diolah dari Aplikasi SIPD E-Dalev

Dari realisasi keuangan dalam mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2026 dapat dilihat bahwa capaian terendah pada priotas ke-1 (Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri) sebesar 0%. Sedangkan realisasi keuangan sampai dengan Triwulan I tertinggi pada program prioritas ke 8 yakni Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan dengan prosentase penyerapan anggaran sebesar 17,94%.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melaksanakan program pembangunan sebanyak 235 program, terdiri dari program rutin/ penunjang dan program teknis yang tersebar pada 40 Perangkat Daerah.

Tabel II.96
Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Sampai Dengan Triwulan I

No	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	8	30	87
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	11	25	62
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	3	15	37
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	12	25
5	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12	27	100
6	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	9	17	36
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	15	42
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	12	39
9	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	12	37
10	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	13	21	45
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	12	26
12	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	8	21	59
13	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	6	20	61
14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	8	15	36
15	SEKRETARIAT DAERAH	3	20	65
16	INSPEKTORAT	3	12	44
17	KECAMATAN TRENGGALEK	5	14	33
18	KECAMATAN PANGGUL	5	12	24
19	KECAMATAN SURUH	5	14	29
20	KECAMATAN DURENAN	5	15	30
21	KECAMATAN POGALAN	5	12	26
22	KECAMATAN WATULIMO	5	13	30
23	KECAMATAN TUGU	5	15	30
24	KECAMATAN DONGKO	5	13	29
25	KECAMATAN KAMPAK	5	13	30

No	OPD	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
26	KECAMATAN MUNJUNGAN	5	15	33
27	KECAMATAN PULE	5	15	33
28	KECAMATAN GANDUSARI	5	15	29
29	KECAMATAN BENDUNGAN	5	13	24
30	KECAMATAN KARANGAN	5	13	29
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	13	35
32	DINAS PENDIDIKAN	6	17	106
33	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	11	20	47
34	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	10	22	41
35	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4	16	45
36	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	8	28	63
37	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	2	17	50
38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	4	15	39
39	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	4	14	51
40	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	14	42
	TOTAL	**235**	**654**	**1729**

Sumber : Data diolah dari Aplikasi SIPD E-Dalev

Selanjutnya gambaran evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I secara lengkap disajikan dalam tabel sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku ini.

Permasalahan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan diatas berdasarkan sasaran pembangunan daerah, lebih lanjut diidentifikasi berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Adapun uraian permasalahan daerah Tahun 2026 sampai dengan Triwulan I dapat diuraikan sebagai berikut:

Faktor Pendorong :

- Terdapat banyak program yang diberikan oleh pemerintah pusat memberikan dampak yang positif dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah dan pemenuhan pelayanan dasar bagi Masyarakat;
- Integrasi Sistem Informasi / Aplikasi dari sisi Perencanaan yang telah difasilitasi oleh pemerintah Pusat melalui SIPD dan aplikasi pendukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek (Nggalek Plan) telah berjalan dengan baik sehingga proses Perencanaan dan Penganggaran telah selaras dan mengurangi potensi perbedaan data.
- Terdapat sarana kontrol dan penilaian pada seluruh Aparatur Sipil Negara dan Organisasi Perangkat daerah oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sehingga berpotensi meningkatkan pelayanan, kedisiplinan dan kinerja seluruh pegawai dan OPD.

Faktor Penghambat:

- Keterlambatan sinkronisasi Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh Pemerintah Pusat sehingga diperlukan proses sinkronisasi Standart Satuan Harga dan Pergeseran mendahului Perubahan APBD Tahun 2026 terlebih dahulu sebelum organisasi perangkat daerah mengeksekusi program dan kegiatan;
- Banyaknya posisi pejabat fungsional yang sebelumnya Eselon IV yang belum dapat terisi karena kendala regulasi. Staf struktural maupun fungsional ahli pertama tidak dapat mengisi jabatan tersebut apabila Angka Kredit belum terpenuhi atau mengikuti ujian kompetensi. Kendala tersebut berpotensi mengurangi ritme kerja Pemerintahan Daerah sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap Masyarakat menjadi tidak optimal;

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:

1. Penyiapan dokumen kontrak pada kegiatan yang telah disesuaikan dengan petunjuk teknis Pemerintah Pusat melalui mekanisme pergeseran mendahului Perubahan APBD Tahun 2026;

2. Pelaksanaan kegiatan pada kegiatan yang dilaksanakan kontraknya pada Triwulan I Tahun 2026;
3. Identifikasi kegiatan pada perangkat daerah yang perlu dilaksanakan penyesuaian pada tahapan Perubahan RKPD dan Perubahan APBD Tahun 2026;
4. Eksekusi kegiatan yang bersumber dari Pinjaman Daerah.

Tindak Lanjut yang diperlukan dalam RKPD Berikutnya:

1. Mencermati target kinerja yang tidak tercapai maupun melebihi capaian untuk menentukan target yang akan ditetapkan berikutnya;
2. Mencermati antara kebutuhan anggaran dengan banyaknya target kinerja Perangkat Daerah agar lebih selaras dan seimbang;
3. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Fisik yang menjadi prioritas daerah. Proses Pengadaan Barang dan Jasa harus dimulai sejal awal tahun pelaksanaan APBD;
4. Menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja perangkat daerah dan mempertahankan serta meningkatkan potensi-potensi yang menjadi faktor pendorong pencapaian kinerja perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah.

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Trenggalek diidentifikasi berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi baik pada skala lokal kota, regional maupun global.

Permasalahan mendesak dalam RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2026 adalah hasil kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihimpun dari penjaringan aspirasi masyarakat mulai dari Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten serta keterkaitannya dengan permasalahan tingkat provinsi dan tingkat nasional.

2.3.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Isu strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 berpijak pada permasalahan pembangunan daerah dan mengakomodasi isu strategis internasional, nasional, dan regional dan diperkirakan masih akan berlanjut pada pembangunan tahunan 2027 adalah sebagai berikut :

1) Masih terdapat masyarakat yang belum mendapatkan akses dan kualitas infrastruktur yang memadai
2) Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani
3) Meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup
4) Pengembangan ekonomi kerakyatan yang produktif dan kompetitif di Kabupaten Trenggalek belum optimal
5) Belum optimalnya daya saing SDM yang sehat, cerdas dan sejahtera
6) Belum optimalnya pengentasan kemiskinan secara efektif dan berkesinambungan

Berangkat dari isu strategis RPJMD sebagaimana tersebut diatas, disinkronisasikan dengan perkembangan Indikator makro Kabupaten Trenggalek sebagai representasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Trenggalek yang menggambarkan tingkat capaian seluruh bidang pembangunan.

Keberhasilan pencapaian Indikator makro bukan semata-mata intervensi dari program maupun kegiatan yang dilakukan dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten, akan tetapi juga dipengaruhi oleh semua program maupun kegiatan yang dilakukan dan didanai oleh berbagai level

Pemerintahan, baik itu Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan daerah yang diuraikan berdasarkan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah adalah sebagaimana berikut :

1. Nilai Indeks Pembangunan Manusia masih belum optimal karena pada salah satu omposit pembentuk yakni nilai Rata – Rata Lama Sekolah masih pada angka 8,09 Tahun atau setara akelas 8 SMP;
2. Angka Kemiskinan masih berada pada posisi double digit yakni sebesar 10,29 persen. Angka tersebut telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 10,50 persen namun dinilai masih belum optimal;
3. Indeks Gini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mengindikasikan terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan antar golongan Masyarakat. Ketimpangan tersebut diprediksi karena adanya kontrasksi ekonomi yang menyebabkan potensi pendapatan tidak dapat didapatkan secara optimal. Penurunan aktifitas ekonomi sebagai respon pengetatan belanja pemerintah menyebabkan peredaran uang pada sektor tertentu menjadi lebih ketat;
4. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi masih belum mampu mencapai target yang ditetapkan, namun masih dalam tahap perbaikan pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan diatas berdasarkan sasaran pembangunan daerah, lebih lanjut diidentifikasi berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Adapun uraian permasalahan daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No.	Permasalahan
1.	**Pendidikan**
	1. Realisasi Kinerja pada Program belum dapat disajikan, sampai dengan Triwulan 1 masih menunggu rilis Rapor Pendidikan Tahun 2026 2. Kekurangan guru berkualitas yang merata pada Sekolah Negeri, dampak dari Purna Tugas, dan belum terdapat pengangkatan, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran siswa 3. Masih terdapat kualifikasi pendidik (guru) PAUD belum S-1
2.	**Kesehatan**
	1. Masih banyaknya perbedaan target antara RKPD dengan target real terdapat subkegiatan sehingga akan muncul perbedaan realisasi 2. Target yang dipakai acuan adalah target tahun 2025 sehingga muncul kemungkinan akan terjadi perbedaan target. Untuk target 2026 akan muncul setelah data update SUPAS (Survei Penduduk Antar Sensus) sekitar bulan oktober sehingga lebih dulu jadwal P RKPD. 3. Belum optimalnya realisasi anggaran pada Triwulan I, salah satunya disebabkan karena belum tersedianya SSH yang dibutuhkan sehingga belum bisa melaksanakan kegiatan.
3.	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
	1. Memerlukan waktu persiapan dan SDM terkait Mini Kompetisi pada Katalog Elektronik LKPP versi 6 2. Penetapan lokasi pengadaan tanah JLS trase Munjungan - Prigi terkendala kawasan LP2B sesuai peta sebaran LP2B seluas kurang lebih 35947 m2 dan masuk dalam kawasan LSD 3. Penyusunan HPS ulang, mereview hps karena perubahan harga pasar
4.	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**
	1. Dalam tahap penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, dikarenakan jumlah satuan barang yang digunakan cukup

No.	Permasalahan
	banyak sehingga memerlukan waktu cukup lama untuk melaksanakan survei harga. 2. Terkait masalah kewenangan sampai dengan hari ini masih belum final, apakah masuk kewenangan Desa atau kewenangan Pemerintah Daerah
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
	1. Kurangnya jumlah aparatur SatpolPPK 2. Kurangnya kapasitas kemampuan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) 3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan 4. Kurangnya jumlah aparatur SatpolPPK, dan aparatur yang memiliki sertifikasi PPNS 5. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana operasional Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
6.	**Sosial**
	1. Serapan belanja gaji dan tunjangan ASN masih dibawah target karena pada TW I terdapat anggaran gaji untuk Kepala Dinas dan Kabid yang mana saat ini masih belum ada pejabat definitif sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran. 2. Belanja natura dan pakan natura belum dibelanjakan karena masih tersedia cukup bufffer stock 3. Jumlah klien pada shelter menyesuaikan dengan kondisi di lapangan sehingga mempengaruhi serapan anggaran makanan dan minuman aktivitas lapangan 4. Belanja barang untuk diberikan kepada masyarakat (BLT DBHCHT) belum bisa terlaksana karena masih dilakukan verifikasi dan validasi calon penerima. 5. Bantuan sosial yang diberikan kepada individu yaitu disabilitas dan lansia masih dalam tahap validasi BNBA penerima manfaat sehingga ada keterlambatan dalam realisasi penyaluran. 6. Bantuan sosial kepada keluarga terdampak bendungan bagong dapat direalisasikan apabila calon penerima bansos sudah relokasi ke tempat hunian yang baru dan untuk rencana penyaluran di semester 2

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No.	Permasalahan
1.	**Tenaga Kerja**
	1. Belum relevannya antara keahlian/ketrampilan yang dibutuhkan Dunia usaha dan Dunia Industri dengan pencaker yang tersedia. 2. Adanya ketimpangan antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja. 3. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan 4. Terbatasnya lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi pencari kerja, 5. masih rendahnya pendidikan dan Ketrampilan Tenaga kerja yang tidak memenuhi pasar, 6. Hambatan Budaya yang membuat pencari kerja enggan ditempatkan di lokasi yang kurang menguntungkan 7. Kesempatan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja 8. Bahwa peluang kerja yang tersedia tidak sesuai dengan keahlian tenaga kerja 9. Terbatasnya kesempatan kerja pada sektor formal dikarenakan perusahaan di Trenggalek yang tergolong perusahanan menengah - besar hanya sedikit
2.	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
	1. Belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat, belanja barang yang diperuntukan untuk pemulihan korban kekerasan perempuan dan anak, menyesuaikan saat adanya kasus. 2. Jasa tenaga penanganan sosial, untuk jasa pendamping sosial korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menyesuaikan adanya kasus. 3. Jasa ketersediaan layanan (availibility payment) insfrastruktur kesehatan untuk layanan kesehatan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menyesuaikan adanya klien yang ditangani
3.	**Pangan**

No.	Permasalahan
	1. Karena intensitas hujan tinggi, menyebabkan produksi bawang merah kurang optimal 2. Perubahan subkegiatan (diseminasi) menyebabkan kegiatan yang seharusnya sudah dilaksanakan menjadi tertunda karena perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu di SIPD
4.	**Pertanahan**
	1. Beberapa pekerjaan masih dalam tahap masa pelaksanaan Perencanaan Teknis, sehingga pekerjaan fisik belum bisa dilaksanakan
5.	**Lingkungan Hidup**
	1. Sebagian data dan infomasi pembangunan belum tersedia secara akurat, realtime dan terstruktur
6.	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**
	1. Kurangnya ketersediaan infrastruktur pelayanan 2. Belum semua penduduk memiliki KTP-el 3. Belum semua Wajib KTP melakukan perekaman Biometrik KTP-el 4. Belum semua penduduk memiliki akte kelahiran 5. Belum semua anak 0-17 tahun kurang 1 hari memiliki KIA 6. Masih perlu ditingkatkannya proses digitalisasi arsip 7. Kurang maksimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna; Belum ada PKS dengan Lembaga/OPD yang sesuai dengan Permendagri Nomor 102 Tahun 2019 8. Belum adanya gedung /depo arsip kependudukan dan pencatatan sipil yang representatif sesuai standar 9. Masih kurangnya SDM di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 10. Masih kurangnya SDM di UPT 11. Rendahnya cakupan IKD (Identitas Kependudukan Digital)
7.	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
	1. Capaian kartu skor desa dalam konvergensi stunting yang di input website e-HDW sampai dengan saat ini

No.	Permasalahan
	masih 82,13% (68 Desa), sehingga perlu mengintensifkan pembinaan kepada pemerintah desa dan kader pembangunan manusia agar tercapai desa bekinerja baik dalam konvergensi stunting 2. Produk unggulan desa belum terkelola dengan baik 3. Masyarakat miskin usia produktif belum memiliki ketrampilan usaha 4. Belum optimalnya cakupan dan capaian SDG's Desa 5. legalitas Badan Hukum BUMDesa belum optimal, sejumlah 147 BUMDesa berbadan Hukum, 3 BUMDesa (Ngulankulon Pgl, Salamrejo Krg, Besuko Mjg) Perbaikan Dokumen dan 2 BUMDesa (Banaran Tugu, Jajar Gandusari) Proses Pendaftaran 6. Administrasi Pemerintah Desa belum optimal 7. SDM Aparatur Pemerintah Desa dan BPD perlu ditingkatkan 8. Updating data pada profil Desa kurang Optimal 9. Updating Evaluasi Perkembangan Desa belum optimal
8.	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**
	1. Masih banyaknya perbedaan target antara RKPD dengan target real terdapat subkegiatan sehingga akan muncul perbedaan realisasi 2. Belum optimalnya realisasi anggaran pada Triwulan I, salah satunya disebabkan karena belum tersedianya SSH yang dibutuhkan sehingga belum bisa melaksanakan kegiatan.
9.	**Perhubungan**
	1. Beberapa pekerjaan masih dalam tahap masa pelaksanaan Perencanaan Teknis, sehingga pekerjaan fisik belum bisa dilaksanakan. 2. Optimalisasi operasional Pelabuhan yang sampai saat ini masih terus diusahakan , yaitu dengan menarik minat Pasar masuk dalam sistem logistik Kepelabuhanan.
10.	**Komunikasi Dan Informatika**
	1. Belum optimalnya admin pengaduan perangkat Daerah dalam merespon dan menindak lanjuti aduan

No.	Permasalahan
	masyarakat yang masuk 2. Admin PPID sering ganti sehingga sering berpengaruh terhadap update pengisian DIP 3. Tidak berimbangnya anggaran dengan jumlah media yang mengajukan tawaran kerjasama 4. Kurangnya ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi jaringan intra pemerintah daerah
11.	**Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**
	1. Adanya koperasi yang tidak aktif 2. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat 3. Masih rendahnya kualitas SDM dan kelembagaan koperasi 4. Ada beberapa Koperasi yang mengalami penurunan volume usaha 5. Masih rendahnya kualitas SDM UM 6. Masih rendahnya akses pemasaran produk, jejaring, dan kemitraan UM 7. Kurangnya kesiapan pelaku UM dalam menghadapi pasar global 8. Masih banyak usaha mikro yang belum berizin 9. Database UM yang masih belum terintegrasi
12.	**Penanaman Modal**
	1. Iklim/kebijakan penanaman Modal yang belum sepenuhnya mengantisipasi perkembangan kebutuhan (Raperda RTRW Perubahan, RDTR dan RUPM). 2. Pemetaan potensi dan promosi penanaman modal belum sepenuhnya mengantisipasi perkembangan prioritas investasi. 3. Tata kelola perizinan melalui integrasi sistem digital belum optimal. 4. Kesadaran mengurus izin dan pelaporan investasi para investor/pelaku usaha masih rendah. 5. Belum optimalnya sinkronisasi persyaratan perizinan
13.	**Kepemudaan dan Olahraga**
	1. Program Penunjang Pemerintahan Daerah/Kota masih banyaknya rekening yang belum sesuai sehingga

No.	Permasalahan
	belum dapat dilaksanakan 2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan membutuhkan perubahan rekening sehingga pelaksanaannya menunggu PAK 3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahrgaan kegiatan Hibah menunggu SK Bupati turun dan untuk kegiatan teknis dilaksanakan sesudah ada event 4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan kegiatan Hibah menunggu SK Bupati turun
14.	**Statistik**
	1. Kurang aktifnya OPD selaku produsen data dalam entry data dan update data di portal satudata.trenggalekkab.go.id 2. Kurangnya pemahaman dalam pengisian data belum sesuai dengan periode yang telah ditentukan
15.	**Persandian**
	Kurangnya SDM untuk menindaklanjuti Insiden Keamanan Informasi
16.	**Kebudayaan**
	1. Belum Optimalnya Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan 2. masih minimnya sarana dan prasarana kebudayaan 3. Minimnya digitalisasi terhadap obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya 4. Masih Minimnya Obyek pemajuan Kebudayaan dan cagar Budaya yang dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata 5. Kurang Optimalnya Pembinaan SDM Kebudayaan
17.	**Perpustakaan**
	1. Sebagian data dan informasi perpustakaan baik desa maupun sekolah belum tersedia secara akurat, realtime dan terstruktur 2. Anggaran DAKNF belum tersalur pada TW I jadi Bidang Perpustakaan tidak berani untuk melaksanakan kegiatan
18.	**Kearsipan**

No.	Permasalahan
	1. Karena anggaran minim maka kegiatan akan dilaksanakan secara bersamaan 2. Depo Arsip yang belum ada sehingga pelaksanaan pengolahan arsip statis kurang maksimal

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

No.	Permasalahan
1.	**Kelautan Dan Perikanan**
	1. Belum optimalnya fungsi pelayanan Tempat Pelelangan ikan (TPI) 2. Belum optimalnya peningkatan kualitas masyarakat pesisir dalam pengelolaan potensi sumberdaya ikan dan pesisir 3. Masih rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha perikanan dan kelembagaan perikanan yang meliputi KUB, Pokdakan, Poklahsar dan Pokmaswas. 4. Belum optimalnya usaha pengolahan hasil perikanan, budidaya ikan dan penangkapan ikan yang berwawasan lingkungan 5. Belum optimalnya pemanfaatan aset BMD bidang perikanan untuk meningkatkan PAD 6. Belum tertatanya lokasi usaha budidaya tambak dan pengolahan hasil perikanan 7. Belum optimalnya penggunaan sarana prasarana dan teknologi dalam meningkatkan produktivitas penangkapan ikan
2.	**Pariwisata**
	1. Belum tersedianya creative hub (ruang kreatif) untuk mendukung kreativitas pelaku ekraf 2. Lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pemahaman KI masih rendah 3. Keterbatasan kuantitas dan kualitas pelaku kreatif dalam hal keahlian teknis maupun kemampuan manajemen usaha

No.	Permasalahan
	4. Lemahnya pemasaran, kesulitan menembus pasar yang lebih luas dan persaingan global yang ketat 5. Persaingan produk yang semakin ketat; 6. Perkembangan produk pariwisata cenderung stagnan 7. Terbatasnya anggaran pengelolaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung destinasi pariwisata yang dikelola pemerintah. 8. Kurangnya papan informasi dan rambu pendukung informasi. 9. Belum adanya identitas/signage destinasi wisata di destinasi wisata pantai pelang karena sudah rusak. 10. Terbatasnya pengetahuan dan kurang sadarnya pelaku usaha di destinasi wisata dalam pengelolaan usahanya (belum adanya informasi harga yang terpampang di setiap kios) perlu adanya pelatihan higienis produk makanan di pelaku usaha warung dan bakaran ikan asap. 11. Kurangnya lahan parkir pada destinasi wisata pantai karangongso dan hutan kota 12. Masih rendahnya kualitas pengelolaan sampah destinasi wisata 13. Kurang maksimalnya kesadaran pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. 14. Ekosistim usaha pariwisata belum terbangun dengan baik
3.	**Pertanian**
	1. Mutu hijaunan pakan ternak yang masih kurang 2. Sistem peternakan dimasyarakat yang masih konvensional 3. Tidak tersedianya akses transportasi pemasaran, dari lahan HPT ke peternak dan beralihnya lahan pangan untuk perumahan dan kegiatan kemasyarakatan 4. Belum optimalnya upaya peningkatan populasi ternak (Inseminasi buatan, penanganan gangguan reproduksi dan pengendalian pemotongan betina produktif); 5. belum tersedianya data statistik peternakan yang representative 6. Berkurangnya potensi plasma nutfah asli Kabupaten Trenggalek 7. Belum optimalnya penerapan standard hygiene sanitasi dan penerapan kesejahteraan hewan pada pelaku

No.	Permasalahan
	usaha produk asal hewan 8. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan usaha peternakan yang dijalankan 9. Hasil produk peternakan yang ada di masyarakat masih terkendala di pemasarannya karena kualitasnya belum optimal, jaringan pasar belum kuat dan masih dipasarkan secara tradisional
4.	**Perdagangan**
	1. Sarana dan Prasarana pasar yang belum memadai 2. Belum optimalnya konsistensi kepatuhan toko modern berjejaring terhadap peraturan perundang-undangan; 3. Belum belum Optimalnya Penerimaan Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha 4. Masih rendahnya pelaku ekspor langsung 5. Masih rendahnya kesadaran pemilik UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) dalam menera ulang peralatannya;
5.	**Perindustrian**
	Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, permohonan perizinan berusaha pada sektor perindustrian menunjukkan kecenderungan penurunan secara bertahap. Kondisi ini mencerminkan adanya dinamika yang memengaruhi minat dan kesiapan pelaku usaha dalam mengajukan legalitas usahanya. Penurunan tersebut tidak serta-merta menggambarkan melemahnya sektor industri secara keseluruhan, melainkan lebih mengindikasikan adanya fase penyesuaian yang tengah berlangsung, baik dari sisi pelaku usaha maupun dari lingkungan usaha yang melingkupinya. Beberapa faktor yang diduga turut berkontribusi antara lain perubahan kebijakan dan mekanisme perizinan, penyesuaian terhadap sistem perizinan berbasis risiko, serta kehati-hatian pelaku usaha dalam merencanakan ekspansi atau pendirian usaha baru. Selain itu, kondisi perekonomian yang relatif dinamis mendorong sebagian pelaku industri untuk menunda pengurusan perizinan hingga tercipta kepastian usaha yang lebih kondusif
6.	**Transmigrasi**
	1. Penetapan jenis perizinan lingkungan berbasis KBLI dan tingkat risiko pada OSS belum sepenuhnya selaras

No.	Permasalahan
	dengan kapasitas IKM berskala kecil, khususnya IKM pengolahan susu 2. Kewajiban penyusunan UKL-UPL bagi IKM susu pada KBLI tertentu menimbulkan beban biaya karena harus melibatkan konsultan/vendor lingkungan 3. Rendahnya kepatuhan perizinan lingkungan, keterbatasan legalitas usaha, serta terbatasnya akses IKM terhadap program pembinaan dan fasilitasi pemerintah daerah 4. Bahwa animo masyarakat Kabupaten Trenggalek untuk bertransmigrasi termasuk tinggi tetapi alokasi dari Pemerintah masih rendah tidak sesuai dengan animo masyarakat

D. Urusan Pemerintahan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Unsur Kewilayahan

No.	Permasalahan
1.	**Sekretariat Daerah**
	1. Kurang meratanya pembagian SDM dalam Tim Kerja, antara ketersediaan tenaga dengan kebutuhan masih perlu dikaji lebih lanjut 2. Kurangnya SDM yang menguasai Teknologi Informasi (IT) 3. Kurangnya waktu dalam berkoordinasi , berkomunikasi dalam hal pembahasan permintaan/penghimpunan data dan usulan kegiatan 4. Pada awal tahun anggaran pelaksanaan kegiatan sering mengalami keterlambatan karena proses pengesahan APBD yang belum sepenuhnya efektif sehingga berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan yang bersifat teknis dan operasional 5. Adanya perlambatan realisasi belanja APBD menyebabkan pelaksanaan kegiatan, khususnya pekerjaan fisik konstruksi, masih dalam tahap perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan

No.	Permasalahan
	6. Pada Triwulan I, pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pekerjaan fisik konstruksi belum terlaksana. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu sebagian besar masih dalam tahap persiapan pelaksanaan pekerjaan. 7. Beberapa kegiatan tertunda karena seluruh SDM diprioritaskan pelaksanaan kegiatan selama Ramadan dan Idul Fitri (Februari - Maret). Oleh karena itu, kegiatan lain dijadwalkan ulang di Tri Wulan II 8. Kurang optimalnya kinerja dan profitabilitas BUMD yg diharapkan mampu memberikan kontribusi deviden yang lebih optimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Trenggalek 9. Investasi terhambat karena ketidaksesuaian tata ruang 10. Banyak kerusakan jalan sehingga menghambat aksesbilitas dan distribusi ekonomi 11. Sarana dan prasarana kurang memadai (ATK, Komputer, Printer, Laptop, Scanner yang kondisinya jauh dari ideal 12. Grand Design Reformasi Birokrasi berdasarkan perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 beserta paraturan turunannya sudah tidak berlaku dan belum ada petunjuk teknis di tahun berikutnya untuk pelaksanaan reformasi birokrasi 13. Hasil harmonisasi perbup dengan kanwil hukum adalah membuat perbup baru dan menggabungkan seluruh perbup SOTK UPTD sehingga membutuhkan waktu lagi
2.	**Sekretariat DPRD**
	1. Terbatasnya ruang arsip untuk penyimpanan dokumen – dokumen penting 2. Perbedaan sudut pandang antara Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan pelayanan Setwan dari segi Administrasi dan tata kelola kesekretariatan sedangkan Anggota DPRD dari segi politis
3.	**Pengawasan**
	1. Keterbatasan sumberdaya Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Dengan adanya penambahan pegawai dari CPNS sebanyak 7 CPNS Auditor, 11 CPNS PPUPD, 1 CPNS Pranata Komputer, 3 PPPK pelaksana, serta penambahan pegawai mutasi sebanyak 1 PNS pelaksana dan 1 PNS PPUPD Ahli Madya mampu

No.	Permasalahan
	mendukung kinerja pembinaan dan Belum optimalnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dikarenakan belum optimalnya pengendalian risiko di tingkat Kabupaten sebagaimana amanat Peraturan Bupati Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Pengendalilan risiko tingkat Kabupaten didasarkan pada dokumen Manajemen Risiko Kabupaten Trenggalek yang seharusnya dibuat oleh unit pengendali risiko Kabupaten yang mengacu pada risiko strategis pemerintah daerah, dimana hingga saat ini dokumen Manajemen Risiko Kabupaten belum disusun. Penyusunan dokumen Manajemen Risiko Kabupaten Trenggalek pada tingkat risiko strategis pemerintah daerah dan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen Manajemen Risiko tingkat perangkat daerah pada tingkat operasional/teknis.pengawasan Inspektorat. 2. Masih lemahnya hasil evaluasi AKIP Internal yang dilakukan APIP kepada Perangkat Daerah yang disebabkan karena : a. kemampuan individu APIP yang belum merata dalam pemahaman evaluasi AKIP internal. b. sistem evaluasi AKIP internal yang belum terintegrasi dengan perencanaan, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. 3. Monitoring hasil pengawasan internal dan eksternal yang belum selesai ditindaklanjuti oleh obyek pengawasan pada tahun berjalan berdampak pada temuan yang berulang serta dapat meningkatkan risiko baik pada keuangan/kerugian negara maupun administratif/tata kelola. 4. Rendahnya tingkat kepercayaan responden dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK melalaui aplikasi pesan (Whatssapp) yang beranggapan jika pesan tersebut adalah hoaks.
4.	**Perencanaan**
	1. Terdapat ketidak sesuaian rekening belanja dengan rencana pelaksanaan belanja sehingga memerlukan pergeseran rekening belanja 2. Belum terdapatnya kesepahaman para perencana terhadap alur entry usulan pada aplikasi SIPD 3. Belum semuanya usulan dari masyarakat sesuai dengan kamus usulan pada aplikasi SIPD

No.	Permasalahan
	4. Belum optimalnya sinkronisasi dan validitas data antar perangkat daerah sehingga sering terjadi perbedaan data dalam proses penyusunan laporan perencanaan dan evaluasi pembangunan. 5. Keterlambatan penyampaian data dari OPD menghambat proses pengolahan, verifikasi, dan input data pada aplikasi monitoring serta pelaporan daerah. 6. Masih terbatasnya kapasitas SDM pengelola data dalam pengoperasian aplikasi, pengolahan data statistik, dan pemahaman indikator kinerja pembangunan daerah. 7. Belum tertatanya pengelolaan arsip dan basis data secara terintegrasi sehingga pencarian, pembaruan, dan pemanfaatan data membutuhkan waktu yang lebih lama.
5.	**Keuangan**
	1. Terdapat potensi objek-objek pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak sehingga proses pendataan perlu dilaksanakan dengan lebih optimal. 2. Belum terintegrasinya data pajak daerah dengan sistem OSS atau sistem perizinan lainnya 3. Terdapat data objek pajak yang kurang akurat sehingga petugas kesulitan menemukan wajib pajak karena alamat yang tidak jelas atau kepemilikan objek pajak berpindah 4. Masih banyak wajib pajak yang tidak menggunakan tapping box secara optimal 5. Pembayaran sewa oleh penyewa obyek BMD terkadang ada keterlambatan pembayaran, sdh di layangkan surat tagihan dan berbagai metode pendekatan tp hasilnya ada yang melakukan pembayaran, ada yang nihil 6. Pensertipikatan Tanah kendalanya di BPN, berkas yang sudah masuk untuk didaftarkan banyak yang belum ada penyelesaian, ditambah dengan pergantian personil yang hampir keseluruhan di BPN yang membuat proses pensertipikatan semakin lama. Kemudian proses peyerahan tanah dari desa ke pemda yang digunakan untuk fasum sejak tahun 1970an, beberapa perangkat desa sulit di hubungi. Tanda tangan dari pihak-pihak yang terkait penyerahan tanah juga menjadi kendala karena sulit untuk menemui ahli waris. Lelang KPKNL kendalanya adalah web yang gampang down saat upload berkas/dokumen kelengkapan kendaraan maupun dokumen/berkas persyaratan

No.	Permasalahan
6.	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**
	1. Belum Optimalnya Proses inventarisir dan verifikasi data Manajemen talenta 2. Lemahnya fungsi atasan langsung dalam pembinaan Kinerja 3. Belum ditetapkannya regulasi yang merupakan petunjuk teknis dari pelaksanaan manajemen talenta 4. Belum tersusunnya kebutuhan kompetensi atasan langsung 5. Belum tersusunnya seluruh kamus kompetensi ASN
7.	**Penelitian dan Pengembangan**
	-

E. Urusan Pemerintahan Unsur Pemerintahan Umum

No.	Permasalahan
1.	**Kesatuan Bangsa Dan Politik**
	1. Belum Optimalnya penyelenggaraan Pendidikan Politik yang menjangkau seluruh lapisan Masyarakat dan memanfaatkan metode inovatif 2. Belum Optimalnya pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dalam perannya mendukung pembangunan 3. Data terkait politik dan ormas belum terkelola secara terpadu dan memadai 4. Kurangnya pemahaman pada generasi muda terhadap nilai-nilai kebangsaan , yang berpotensi memicu terjadinya intoleransi 5. Kurangnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dilingkungan masyarakat, khususnya pada generasi muda. 6. Memudarnya rasa cinta tanah air pada generasi muda, munculnya sikap intoleran, dan berkurangnya apresiasi budaya lokal akibat pengaruh budaya asing. 7. Kurang Maksimalnya Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka dikarenakan adanya efisiensi anggaran

No.	Permasalahan
	8. Masih banyaknya penyalahgunaan Narkoba dilingkungan generasi muda 9. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial , Budaya dan agama 10. Masih Terjadinya Konflik di Masyarakat 11. Kurangnya Deteksi Dini Potensi Konflik di wilayah 12. Kurangnya Pemahaman Masyarakat terkait dengan Radikalisme dan Terorisme

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

RKPD

KABUPATEN TRENGGALEK

TAHUN 2027

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan perekonomian merupakan faktor utama dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam menentukan kebijakan ekonomi, langkah yang diambil tidak mudah karena perlu mengenali karakter ekonomi, sosial, fisik daerah serta interaksi dengan daerah sekitar. Menentukan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perlu mengkaji pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai aspek sehingga membentuk kerangka ekonomi. Selain itu juga melihat kemampuan keuangan daerah yang didalamnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan perlu optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan besaran anggaran yang telah direncanakan.

Penataan 'besaran keuangan' berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Kegiatan tersebut merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan suatu daerah secara menyeluruh.

Guna melihat arah kebijakan perekonomian yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, analisis ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan pada tahapan pembangunan daerah. Analisis ekonomi melalui indikator makro ekonomi daerah dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah, apakah sudah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah atau belum sepenuhnya terlaksana. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang perlu dilaksanakan sesuai dengan kebijakan kepala daerah. Guna menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Kabupaten Trenggalek Tahun 2027

diupayakan harus sejalan, sinkron dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2027. Sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah merupakan hal penting dalam mencapai efektifitas pembangunan serta sinkronisasi rencana pembangunan dan pertimbangan/asumsi yang menjadi landasan penyusunan perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat dan daerah provinsi menjadi faktor penting untuk dijadikan pedoman.

Berikut diuraikan arah kebijakan ekonomi tahun 2027, di tingkat Pemerintah Pusat (Nasional), Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

3.1.1 Dinamika Perekonomian Global

Berdasarkan data *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),* pertumbuhan PDB global diperkirakan akan bertahan di angka 2,9% pada tahun 2026 dan akan mengalami sedikit peningkatan menjadi 3,0% pada tahun 2027, didorong oleh investasi teknologi yang kuat dan pelonggaran tarif. Namun, konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah terus membebani pertumbuhan dan menimbulkan ketidakpastian, dengan proyeksi yang mengasumsikan gangguan sementara di pasar energi dan penurunan harga mulai pertengahan tahun 2026. Perkiraan inflasi direvisi naik, dengan negara-negara maju G20 menghadapi inflasi utama sebesar 4,0% pada tahun 2026, 1,2 poin persentase lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya, sebelum mereda menjadi 2,7% pada tahun 2027. Pertumbuhan ekonomi China diperkirakan melambat menjadi 4,4% pada tahun 2026 dan 4,3% pada tahun 2027, sementara kawasan Eropa menghadapi pertumbuhan yang lambat sebesar 0,8% pada tahun 2026 sebelum pulih menjadi 1,2% pada tahun 2027 Sementara pertumbuhan ekonomi Jepang tetap moderat, yaitu sebesar 0,9% pada tahun 2026 dan tahun 2027.

Ekonomi global masih menghadapi tantangan utamanya berasal dari sisi geopolitik. Selain Kebijakan pemerintah AS terkait dengan perang dagang, kondisi konflik di Timur Tengah juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi global. Ketergantungan sumber energi terutama minyak dunia dari Timur Tengah yang merupakan salah satu unsur dalam rantai produksi tentu akan bedampak terhadap perekonomian secara global. Kebijakan pemerintah Amerika Serikat sebelumnya dengan menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang yang memiliki surplus perdagangan dengan AS, seperti Tiongkok, Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut telah merespon kebijakan Amerika Serikat dengan melakukan retaliasi atas tarif impor produk AS, sehingga berpotensi menurunkan volume perdagangan bilateral dan global. Mengingat Indonesia

memiliki surplus perdagangan terhadap USA, dampak eskalasi perang dagang ini perlu segera dimitigasi. Pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 ditopang aktivitas perdagangan global yang meningkat, tercermin dari kenaikan rata-rata *Baltic Dry Index* ke level 1.742,66 dari 1.393,56 pada tahun 2023. Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan kinerja perdagangan di negara berkembang seperti Tiongkok dan India, penguatan perdagangan jasa, serta praktik *frontloading*, yaitu peningkatan perdagangan sebelum kenaikan tarif impor oleh USA. Namun, kinerja perdagangan global pada tahun 2026 diperkirakan masih akan diliputi dengan ketidakpastian, terutama akibat konflik di timur Tengah yang sedang berlangsung dan kebijakan tarif yang diberlakukan secara luas oleh USA terhadap seluruh negara mitra dagang. Kebijakan ini telah memicu berbagai respons dari negara-negara lain, menciptakan dinamika perdagangan yang tidak menentu. Sejumlah lembaga internasional memproyeksikan pelemahan permintaan global, termasuk USA dan Tiongkok, yang berdampak pada melambatnya aktivitas perdagangan.

Di sisi lain, pergerakan harga komoditas pada tahun 2025 bervariasi dibanding tahun 2024. Harga batu bara, minyak mentah, mengalami tren penurunan karena ada peningkatan pasokan dari OPEC, harga pangan pada tahun 2025 mengalami peningkatan disebabkan karena faktor cuaca dan kondisi geopolitik. Harga logam dasar mengalami kenaikan di tahun 2025 seiring pemulihan industri, sementara emas tetap tinggi di 2024-2025 sebagai aset *safe haven*. Kondisi ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah saat ini berlangsung kebijakan perang dagang sangat berpengaruh terhadap harga komoditas pada tahun 2026 ini. Pada bulan Maret tahun 2026 harga beberapa komoditas mengalami peningkatan minyak mentah Brent US$/Bbl 109,754, Gandum USD/Bu 590,72, Batu Bara USD/T 139.70, *Crude Palm Oil* (CPO) US$/MT 1.550.

Pada tahun 2025, inflasi di beberapa negara, seperti AS (2,7 persen), Inggris (3,4 persen), dan Kawasan Eropa (2,0 - 2,2 persen). Rata-rata inflasi global sebesar 4,2 persen. Namun demikian, inflasi global diproyeksikan cenderung menurun pada tahun 2027 seiring normalisasi harga komoditas dan kebijakan suku bunga yang lebih akomodatif di berbagai negara. Penurunan tekanan inflasi membuka peluang bagi bank sentral untuk mulai melonggarkan kebijakan moneter guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Meski demikian, tingginya utang publik di banyak negara serta melemahnya ruang fiskal tetap menjadi perhatian utama karena dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam memberikan stimulus ekonomi apabila terjadi perlambatan global.

3.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Ekonomi Indonesia mengalami sedikit peningkatan sebesar 5,11 pada tahun 2025 dibanding tahun 2024 sebesar 5,03 persen. Capaian ini mencerminkan ketangguhan ekonomi Indonesia serta kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding beberapa negara lain dan menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, terutama di antara negara-negara G20. Kinerja ini melebihi Tiongkok (5,0%), Arab Saudi (4,5%), Singapura (4,4%), serta jauh di atas negara-negara Eropa seperti Spanyol (2,8%) dan Belanda (1,9%). Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi, *Gross National Income* (GNI) per kapita diperkirakan meningkat dari US$4.870 pada tahun 2024 menjadi US$ 5.410 pada tahun 2025, sehingga mempertahankan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (*upper middle-income country*).

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 relatif kuat di tengah gejolak global. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,03 persen; diikuti komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 5,13 persen; komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,09 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 4,98 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 2,50 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut Pengeluaran) tumbuh sebesar 4,77 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 53,88 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 28,77 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 22,85 persen; Komponen PK-P sebesar 7,53 persen; Komponen Perubahan Inventori sebesar 1,85 persen; dan Komponen PK-LNPRT sebesar 1,35 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB Pengeluaran memiliki peran sebesar 20,54 persen.

Dari sisi lapangan usaha, seluruh sektor kembali mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun 2024. Tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi meliputi sektor jasa lainnya (9,80 persen); transportasi dan pergudangan (8,69 persen); serta penyediaan akomodasi dan makan minum (8,56 persen). Pertumbuhan sektor jasa lainnya didorong oleh peningkatan aktivitas rekreasi serta berbagai event olahraga dan hiburan. Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh seiring peningkatan mobilitas, jumlah penumpang, dan volume barang. Sementara itu, sektor akomodasi dan makan minum didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat serta

aktivitas pemerintah dan swasta. Adapun sektor pertanian, yang memberikan kontribusi sebesar 12,61 persen terhadap perekonomian Indonesia, tetap tumbuh positif sebesar 0,67 persen.

Sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan 5,30 persen pada tahun 2025. Subsektor industri logam dasar mencatat pertumbuhan kuat sebesar 13,34 persen, didorong oleh program hilirisasi nikel yang meningkatkan ekspor baja tahan karat. Sejumlah proyek industri strategis yang telah selesai konstruksi, seperti smelter di NTB, smelter di Gresik, dan proyek Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 di Mempawah, diharapkan dapat memperkuat industri logam dasar nasional. Industri makanan dan minuman, yang berperan dominan, tumbuh 5,90 persen seiring meningkatnya permintaan domestik untuk konsumsi dan bahan baku industri serta permintaan luar negeri. Sementara itu, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik tumbuh 6,16 persen, didorong oleh ekspor barang logam komponen elektronik dan peralatan listrik.

Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang pada tahun 2025 mengalami fluktuasi per bulannya. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, IKI Januari 2025 tercatat di level 53,10 dan naik tipis pada Februari menjadi 53,15. Pada bulan Maret, IKI turun ke level 52,98, lalu turun kembali pada April menjadi 51,90. Pada Mei, kepercayaan pelaku industri sempat membaik dengan IKI naik ke level 52,11. Tren positif berlanjut pada Juni dengan IKI mencapai 52,50 dan kembali meningkat pada Juli ke level 52,95. Puncak optimisme pelaku industri terjadi pada Agustus 2025, saat IKI menyentuh level tertinggi tahun ini di angka 53,55. Namun, setelah itu kepercayaan industri kembali melemah. Pada September, IKI turun ke level 53,20, kemudian naik pada Oktober menjadi 53,50. Pada dua bulan terakhir IKI pada November 2025 tercatat di level 53,45, dan akhirnya turun pada Desember menjadi 51,90. Penurunan dari November ke Desember mencapai 1,55 poin, mencerminkan sikap hati-hati pelaku industri menjelang pergantian tahun.

Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang terkontraksi sebesar 0,66 persen. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Jasa Lainnya sebesar 9,93 persen; diikuti oleh Jasa Perusahaan sebesar 9,10 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,78 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan terhadap perekonomian Indonesia masing-masing tumbuh sebesar 5,30 persen dan 5,49 persen

Pada Desember 2025, secara nasional tercatat bahwa inflasi tahunan (*year on year/y-on-y*) sebesar 2,92 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di level 109,92. Angka ini menunjukkan bahwa secara nasional, tekanan harga masih terkendali dalam rentang target pemerintah, meskipun mulai menunjukkan kenaikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Namun, di balik angka nasional yang moderat, terjadi disparitas yang cukup signifikan antar daerah. Provinsi Aceh menjadi wilayah dengan inflasi *y-on-y* tertinggi di tingkat provinsi, mencapai 6,71 persen (IHK 114,40). Lonjakan ini mengindikasikan adanya gejolak harga yang cukup serius di ujung barat Indonesia. Sebaliknya, Provinsi Sulawesi Utara menjadi provinsi dengan inflasi terendah, hanya 1,23 persen (IHK 108,60), menandakan stabilitas harga yang baik di kawasan utara Sulawesi. Jika melihat hingga tingkat kabupaten/kota, kontrasnya semakin tajam. Kota Gunungsitoli (Sumatera Utara) mengalami inflasi y-on-y tertinggi di tingkat nasional, yaitu sebesar 10,84 persen (IHK 119,24). Angka dua digit ini merupakan sinyal bahaya bagi daya beli masyarakat setempat, yang kemungkinan besar dipicu oleh kenaikan harga pangan atau biaya distribusi yang ekstrem. Di kutub sebaliknya, Maumere (Nusa Tenggara Timur) dan Kabupaten Minahasa Utara (Sulawesi Utara) mencatat inflasi terendah, masing-masing hanya 0,38 persen (IHK 109,62 dan 111,03), menandakan hampir tidak ada perubahan harga signifikan di kedua wilayah tersebut. Penyebab Utama: Lonjakan perawatan pribadi dan makanan. Secara struktural, inflasi Desember 2025 didorong oleh kenaikan hampir seluruh kelompok pengeluaran. Pemicu utama (pendorong tertinggi) adalah Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya yang melonjak drastis hingga 13,33 persen. Kenaikan ini jauh di atas rata-rata nasional, kemungkinan besar dipicu oleh kenaikan harga produk kosmetik, alat rambut, atau jasa perawatan tubuh pasca pelonggaran impor bahan baku atau kenaikan tarif layanan. Selain itu, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau juga memberikan kontribusi besar dengan inflasi sebesar 4,58 persen. Ini merupakan penyumbang utama tradisional inflasi, dipengaruhi oleh faktor cuaca, panen, dan harga komoditas tembakau yang naik.

Beberapa kelompok lain yang ikut mendorong inflasi antara lain: Kesehatan: 1,83%; Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah Tangga: 1,62%; Restoran: 1,46%; Transportasi: 1,23%; Pendidikan: 2%; Rekreasi & Budaya: 1,17%; Pakaian & Alas Kaki: 0,66%; Perlengkapan Rumah Tangga: 0,20%; Satu-satunya penekan inflasi (deflator) adalah Kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yang mengalami penurunan indeks sebesar 0,28 persen. Hal ini sejalan dengan tren penurunan biaya paket data internet, pulsa telepon, dan biaya administrasi perbankan yang terus terjadi akibat kompetisi digital.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program pembangunan nasional tahun 2027 lebih konkrit, terintegrasi, terukur dan berdampak, Pemerintah menyusun Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang dirumuskan dalam rancangan awal RKP Tahun 2027. PKPN terdiri dari 8 klaster prioritas yaitu : Kedaulatan Pangan; Kemandirian Energi dan Air; Pendidikan; Kesehatan; Hilisasi dan Industrialisasi; Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana; Ekonomi Kerakyatan dan Desa ; PenurunanKemiskinan.



3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2027 merupakan sintesis dari keberhasilan kinerja tahun 2025 dan antisipasi tantangan ke depan. Dengan fokus pada stabilitas (pangan dan inflasi), akselerasi (infrastruktur dan ekspor), serta inklusivitas (KUKM dan ekonomi perdesaan), Jawa Timur tidak hanya menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi, tetapi juga pertumbuhan yang berkualitas, berkelanjutan, dan merata di seluruh 38 kabupaten/kota. Optimisme yang terbangun harus dirawat dan diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan seluruh masyarakat Jawa Timur.

Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat menggembirakan dengan pertumbuhan mencapai 5,33 persen (*c-to-c*). Angka ini tidak hanya menandai pemulihan yang solid pasca kontraksi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 (-2,33 persen), tetapi juga menegaskan posisi Jawa Timur sebagai motor utama ekonomi nasional. Dengan kontribusi sebesar 14,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 25,29 persen terhadap ekonomi Pulau Jawa, Jawa Timur merupakan pilar krusial bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Struktur ekonomi Jawa Timur yang kokoh ditopang oleh tiga sektor utama: Industri Pengolahan (31,32 persen), Perdagangan (18,55 persen), dan Pertanian (10,74 persen). Dinamika pertumbuhan juga merata, dengan 12 kabupaten/kota berhasil mencatatkan laju pertumbuhan di atas rata-rata provinsi, dipimpin oleh Kabupaten Pacitan (6,35 persen), Kabupaten Malang (5,92 persen), dan Kota Malang (5,92 persen), serta Kota Surabaya (5,87 persen) sebagai pusat ekonomi utama.

Memasuki tahun 2027, kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur tidak lagi semata-mata difokuskan pada pemulihan, melainkan pada akselerasi transformasi ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Capaian tahun 2025 menjadi fondasi untuk melompat lebih tinggi dengan merumuskan sepuluh arah kebijakan strategis sebagai berikut.

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebagai berikut :

1. Akselerasi pembangunan infrastruktur aksesibilitas dan konektivitas kawasan untuk mendukung aktivitas ekonomi, pertumbuhan pusat ekonomi baru serta kawasan ekonomi khusus
2. Menjaga keseimbangan inflasi melalui optimalisasi anggaran belanja dan konsumsi pemerintah untuk mendukungstabilitas harga kebutuhan pokok serta daya beli Masyarakat
3. Mendorong ekspor dan optimalisasi produksi komoditas ekspor unggulan baik agro maupun non agro

4. Peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui standardisasi dan desain produk
5. Meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan
6. Penguatan sektor riil bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) melalui peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM (Sumber Daya Manusia) KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta perluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi
7. Penguatan daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang didukung SDM berkualitas, produk-produk pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandar menuju pariwisata berkelanjutan.
8. Menjaga iklim investasi melalui melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, promosi investasi serta pendampinganrealisasi investasi.
9. Mendorong pertumbuhan ekonomi hijau/green economy dan ekonomi biru/blue economy dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
10. Penguatan ekonomi lokal melalui upaya kolaboratif, inklusif dan berkelanjutan melalui penciptaan wirausaha baru di perdesaan

3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Perekonomian daerah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh perekonomian global, nasional dan regional serta faktor-faktor perekonomian yang mempengaruhinya. Sebagian dari faktor perekonomian tersebut ada yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter maupun sektor riil serta pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, konflik antar negara di dunia, nilai tukar mata uang asing dan pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada adanya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menetapkan tahun 2027 sebagai momentum akselerasi menuju Trenggalek Kota Atraktif, dengan tiga pilar utama pembangunan: ekonomi inklusif dan regeneratif, SDM kreatif dan inovatif, serta penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk kelestarian lingkungan hidup yang berkualitas. Tema ini menjadi kelanjutan dari tahun 2026 yang difokuskan pada penuntasan infrastruktur pendukung, sehingga pada 2027 ruang-ruang kota yang telah dibangun benar-benar dihidupkan oleh aktivitas masyarakat dan komunitas. Pengembangan ekonomi akan berbasis pada penguatan potensi komoditas lokal unggulan seperti produk pertanian, perikanan dan kehutanan seperti padi, nilam, tuna, cakalang, patin serta didukung oleh optimalisasi pariwisata berbasis geopark yang

tengah diinisasi pada tahun 2026. Hal ini menjadi instrumen penting untuk mendongkrak pariwisata dan PAD sekaligus menjaga kelestarian geologi dan lingkungan . Arah kebijakan ini sejalan dengan target kinerja 2027 yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan peningkatan kualitas hidup masyarakat (IPM) dan keberlanjutan lingkungan yang berkualitas Untuk memperkuat fondasi fiskal, pemerintah berupaya mengoptimalkan aset daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan, termasuk melalui penertiban pajak restoran dan hotel.

Peran generasi muda dan komunitas diperkuat melalui pemisahan Dinas Pemuda dan Olahraga agar lebih fokus mendorong keterlibatan anak muda dalam mengisi ruang publik . Pemberdayaan ekonomi kreatif dilakukan secara konkret.

Komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan terintegrasi dalam visi jangka panjang Trenggalek sebagai daerah Net Zero Carbon . Pada 2027, kebijakan lingkungan diarahkan pada penguatan aksi-aksi penurunan emisi GRK melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan diantaranya yang telah dilaksanakan dan tetap menjadi program unggulan adalah : donasi pohon oleh ASN, BUMN/BUMD, kelompok Masyarakat, program “Sangu Sampah” yang telah dilaksanakan mulai tahun 2025.

Adapun capaian indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek tahun pada tahun 2021-2025 sebagai dasar arah kebijakan ekonomi daerah sebagai berikut :

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator makro yang digunakan untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Memasuki tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Trenggalek meningkat menjadi 5,31 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4,71 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini jika dilihat dari sisi produksi struktur PDRB didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 24,83 persen sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 72,99 persen.

Tabel III.1
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

No	Kategori Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,72	-1,46	2,72	0,31	4,00
2	Pertambangan dan Penggalian	1,36	7,88	2,19	2,39	2,79
3	Industri Pengolahan	9,12	6,86	6,93	6,68	7,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2,84	7,07	4,75	9,15	6.51
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,74	5,71	2,74	1,91	-0,69
6	Konstruksi	0,24	8,02	3,91	7,03	5,54
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,46	6,85	5,73	4	4,54
8	Transportasi dan Pergudangan	9,48	16,93	10,04	12,36	10,04
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,36	8,98	8,10	5,76	7,61
10	Informasi dan Komunikasi	5,66	5,91	6,58	7,38	5,85
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,93	1,32	2,29	3,81	2,08
12	Real Estate	2,80	4,95	2,20	3,97	3,11
13	Jasa Perusahaan	2,28	5,48	7,81	7,52	8,76
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,16	0,56	0,88	8,92	1,01
15	Jasa Pendidikan	1,61	1,19	6,68	5,4	6,35
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,71	2,43	4,08	6,13	5,96
17	Jasa lainnya	3,66	11,13	9,87	8,38	8,76
Produk Domestik Regional Bruto		**3,65**	**4,52**	**4,92**	**4,71**	**5,31**

Sumber: *Kabupaten Trenggalek dalam Angka, 2026*

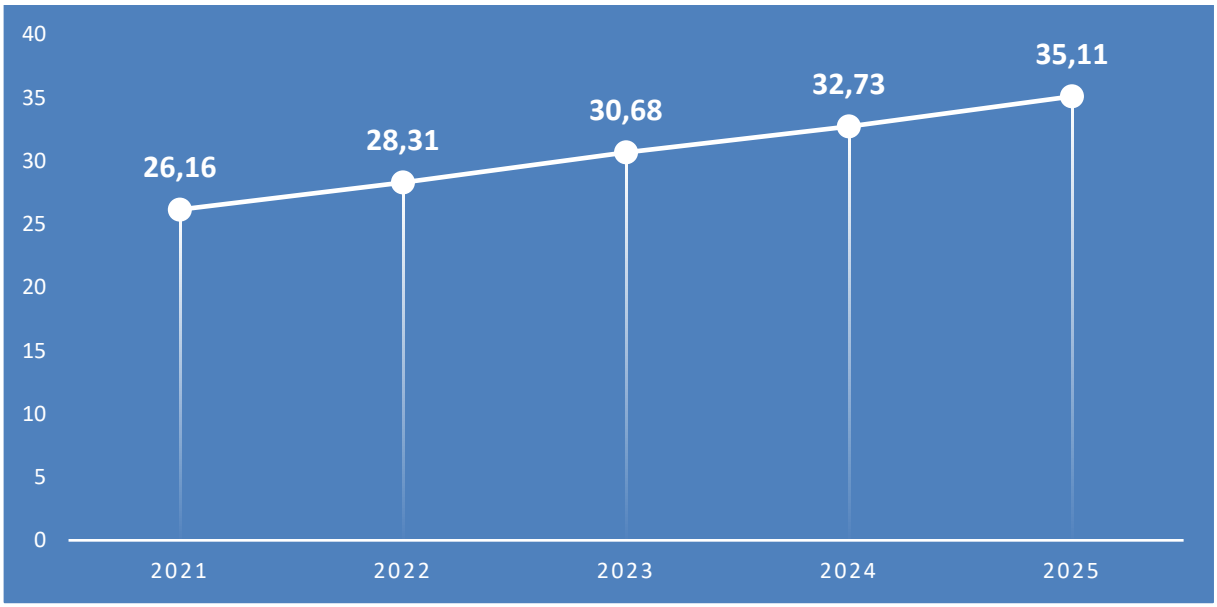
b. PDRB per Kapita

PDRB per kapita yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per satu kepala/penduduk, sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan

per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

Grafik III.1
PDRB Perkapita (Juta Rupiah) Kabupaten Trenggalek
Tahun 2021-2025



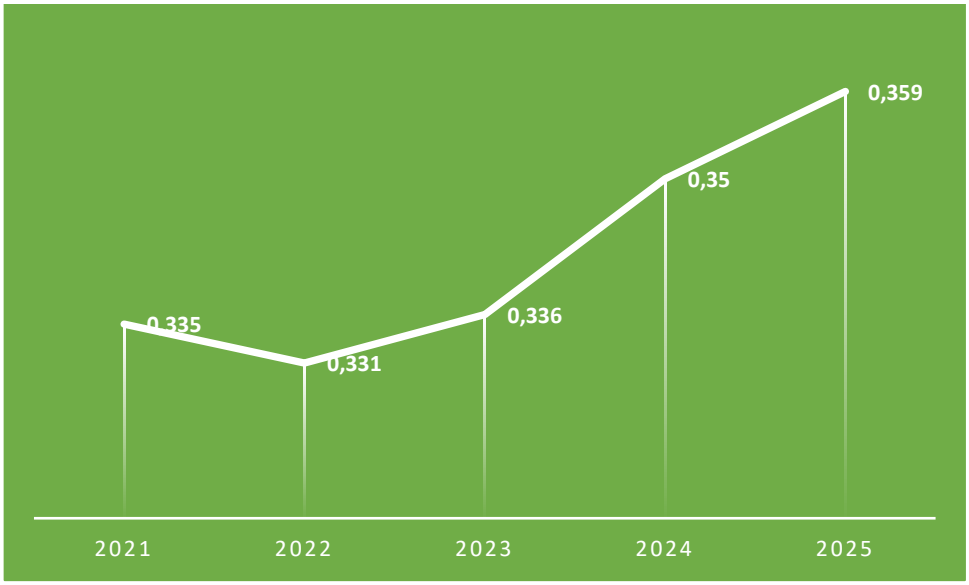
Sumber: *BPS Kabupaten Trenggalek, 2026*

Di Kabupaten Trenggalek, PDRB per kapita ADHB menunjukkan tren peningkatan selama periode 2021 hingga 2025, yaitu sebesar Rp26,16 juta pada 2021, naik menjadi Rp 28,31 juta pada 2022, Rp30,68 juta pada 2023, Rp32,73juta pada 2024, dan mencapai Rp35,11 juta pada 2025. PDRB per kapita sering dijadikan salah satu acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan suatu daerah, karena nilai ini menggambarkan pendapatan rata-rata per individu dalam suatu wilayah.

c. Indeks Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Trenggalek adalah sulitnya kondisi geografis wilayah.

Grafik III.2
Indeks Gini Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: *BPS Kabupaten Trenggalek, 2025*

Pada tahun 2021, Indeks Gini tercatat sebesar 0,335, kemudian menurun pada tahun 2022 menjadi 0,331 dan naik pada tahun 2023 menjadi 0,335. Dan mengalami kenaikan berturut-turut menjadi tahun 2024 dan tahun 2025 menjadi 0,350 dan 0,359. Meskipun terjadi kenaikan dalam dua tahun terakhir, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Trenggalek masih berada dalam kategori sedang. Nilai Indeks Gini pada tahun 2025 yang sebesar 0,359 masih memenuhi target nasional yang ditetapkan, yaitu di bawah 0,36. Capaian tahun 2025 ini menjadi tantangan tahun berikutnya karena sudah mendaketi ambang batas kategori sedang dan perlu perhatian lebih lanjut agar ketimpangan dapat menurun. Diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan tren penurunan ketimpangan guna mencapai pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

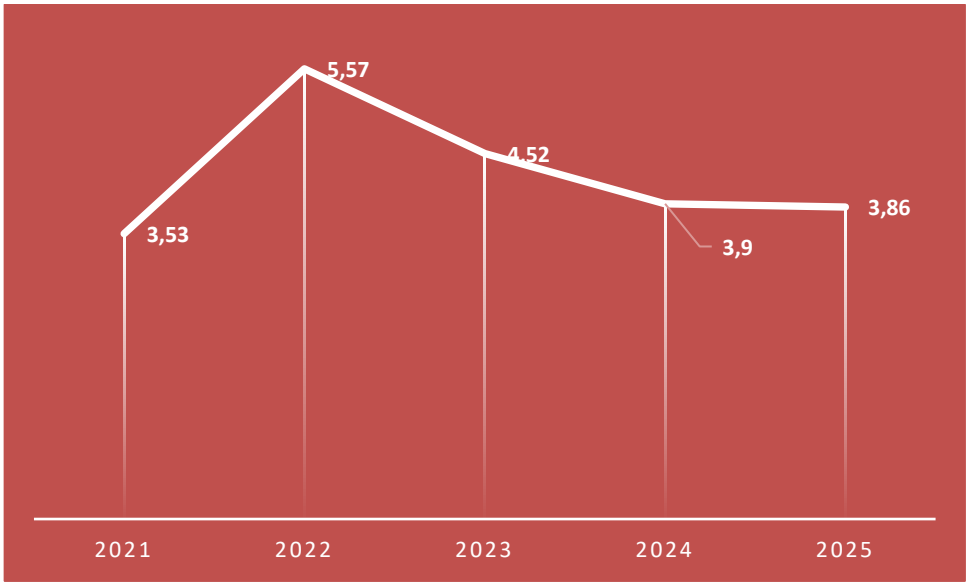
d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Trenggalek dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Dalam lima tahun terakhir, angka pengangguran mengalami perubahan, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2022 sebesar 5,37 persen. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun-tahun berikutnya, di mana TPT turun menjadi 4,52

persen pada 2023, kemudian turun 3,90 persen pada 2024, dan turun kembali 3,86 persen pada tahun 2025. Penurunan ini mencerminkan dampak positif dari berbagai program pemerintah daerah dalam meningkatkan kesempatan kerja serta menguatkan sektor ekonomi lokal.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2025, angka TPT sebesar 3,86 persen, yang berarti dari setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 hingga 4 orang yang masih menganggur. Penurunan sebesar 0,04 persen poin dibandingkan tahun 2024 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Trenggalek, serta adanya musim panen cengkeh yang merata di beberapa kecamatan, yang membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Kendati demikian, aspek kompetensi dan keahlian tenaga kerja tetap perlu diperkuat agar produktivitas meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga.

Grafik III.3
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025



Sumber: *BPS Provinsi Jawa Timur, 2025*

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang dapat mengukur atau memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang dilakukan oleh suatu daerah. Pembangunan kualitas hidup manusia yang dimaksud adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk atau proses agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di

suatu daerah dapat meningkatkan potensi daerah tersebut untuk dapat bersaing dengan daerah lain.

Tabel III.2
Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
IPM	**-**	**70,40**	**71,28**	**71,96**	**72,47**	**73,39**
Indeks Pendidikan	-	59,84	61,02	61,39	61,48	0,625
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,56	7,89	7,90	7,92	8,09
Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,47	12,50	12,62	12,63	12,78
Umur Harapan Hidup	Tahun	74,65	74,91	75,16	75,35	75,63
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah	9.743	10.042	10.465	10.872	11,322

Sumber: *BPS Provinsi Jawa Timur, 2026 (diolah)*

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan masing-masing dimensi penyusun IPM Kabupaten Trenggalek sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dapat diamati lebih mendalam sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan kualitas hidup manusia di Kabupaten Trenggalek. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Trenggalek memiliki kesempatan hidup yang lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai AHH penduduk Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 adalah 75 tahun. Artinya, seorang bayi yang lahir di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 dapat bertahan hidup rata-rata sampai dengan umur 75 tahun.

Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menjadi penentu dimensi pengetahuan secara konsisten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2025 sebesar 12,78 tahun yang dapat diartikan bahwa peluang menikmati sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk Trenggalek berusia 7 tahun ke atas mencapai 12,78 tahun (setara dengan jenjang pendidikan SMA/sederajat). Namun, jika dilihat dari Rata-rata lama

sekolah, penduduk di Kabupaten Trenggalek belum memenuhi program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2025 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Trenggalek adalah 8,09 tahun yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Trenggalek hanya mengikuti pendidikan selama 8 tahun atau setara dengan kelas 2 sampai 3 SMP.

Pengeluaran riil perkapita dapat menunjukkan besaran kebutuhan per orang dalam satu tahun di suatu daerah. Jika dilihat pada tabel di atas, pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 nilai pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Trenggalek adalah sebesar 11.322.000 rupiah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Trenggalek terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan perbaikan dalam berbagai dimensi penyusunnya. Pada tahun 2025, capaian IPM mencapai 73,39, dengan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM menunjukkan peningkatan, terutama pada standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun. Pada 2025, indikator ini meningkat sebesar Rp450 ribu (4,14 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, menandakan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, seluruh komponen IPM masih perlu terus diperkuat untuk memastikan pembangunan manusia yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

f. Angka Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, poin utama dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah masyarakat miskin tetapi juga perlu menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran konsumsi, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Tabel III.3
Indikator Kemiskinan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Kemiskinan	**12,14**	**10,96**	**10,63**	**10,50**	**10,29**
a. Garis Kemiskinan (Rupiah)	358.831	381.448	411.527	434.146	450,334
b. Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	84,89	76,75	74,58	73,75	72,35

Sumber: *BPS Kabupaten Trenggalek, 2025*

Pergerakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Trenggalek mengalami perubahan dalam lima tahun terakhir, yang mempengaruhi dinamika kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan program dan kegiatan. Tahun 2021 mencatat tingkat kemiskinan tertinggi sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Namun, pada Maret 2025, terjadi kembali penurunan tingkat kemiskinan, yang mencerminkan perkembangan positif dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Trenggalek.

Kerangka pembangunan di Kabupaten Trenggalek mengikuti paradigma pertumbuhan yang disertai dengan upaya pemberdayaan masyarakat dan pemerintah. Dalam kerangka tersebut fokus perhatian bukan hanya ditujukan untuk mencapai tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, melainkan telah bergeser kepada pertumbuhan yang diikuti pemerataan yang optimal. Pembangunan yang dilaksanakan harus berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Keadaan dan prospek ekonomi Kabupaten Trenggalek di tahun-tahun mendatang diperkirakan akan tetap mengalami pertumbuhan yang positif, namun tidak dapat terlepas dari perkembangan ekonomi tahun-tahun sebelumnya, program kerja yang akan dilakukan dan pengaruh perekonomian Provinsi Jawa Timur maupun perekonomian Nasional dan Global.

Dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2027, nantinya tidak mengesampingkan akan adanya beragam tantangan yang harus disikapi secara komprehensif dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya saing daerah dengan peningkatan kualitas fasilitas wilayah/infrastruktur, peningkatan kemampuan ekonomi daerah, iklim investasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Pemulihan ekonomi daerah pasca COVID-19 dengan meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan utamanya yang

memiliki keunikan dan kekhasan daerah yaitu pertanian (utamanya yang berbasis organik, pariwisata (termasuk desa-desa wisata) dan industri (termasuk industri kreatif);

3. Pengentasan Kemiskinan dengan optimalisasi implementasi Program GERTAK (Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan) secara konsisten;
4. Pengurangan Kesenjangan antar pendapatan masyarakat dengan mengimplementasikan program-program yang berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah;
5. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, dengan swasta (*public-private partnership*) serta mendorong pembiayaan pembangunan melalui CSR. Upaya ini penting dalam rangka efisiensi pendanaan pembangunan karena terbatasnya kemampuan keuangan daerah;
6. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi seperti pasar, gerai-gerai UMKM, anjungan cerdas, rest area dan toko modern berbasis koperasi untuk mendukung kegiatan bisnis di Kabupaten Trenggalek;
7. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang bisa diandalkan;
8. Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan kemandirian masyarakat dengan mengembangkan program-program bagi Usaha Mikro melalui penumbuhan fasilitasi akses permodalan, peningkatan daya saing produk, promosi, jaringan pemasaran, dan peningkatan kualitas SDM pelaku Usaha Mikro;
9. Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat;
10. Pembuatan paket-paket wisata yang terintegrasi dari hulu dan hilir, dengan mengedepankan kemudahan wisatawan dalam melakukan pemesanan sampai alokasi anggaran wisata; dan
11. Penguatan ekonomi sektor pertanian guna mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan daerah maupun dukungan terhadap nasional.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini, proyeksi perekonomian nasional maupun provinsi Jawa Timur pada tahun 2026-2027, maka prospek perekonomian Kabupaten Trenggalek untuk periode tahun 2026-2027 sebagaimana Indikator Makro Pembangunan Daerah yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2025-2029 dengan merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka indikator kinerja Makro diproyeksikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel III.4
Capaian Indikator Makro Ekonomi Tahun 2023-2025 dan Target Tahun 2026-2027 Kabupaten Trenggalek

No.	Indikator Kinerja Daerah	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,96	72,47	73,39	73,92	74,27
2	Tingkat Kemiskinan (%)	10,63	10,5	10,29	9,35	8,94
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,52	3,96	3,86	3,85	3,83 - 3,26
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,92	4,71	5,31	4,73	4,43 - 4,74
5	PDRB PerKapita (Juta Rp.)	30,68	32,73	35,11	33,76	34,23
6	Indeks Gini (Gini Ratio)	0,336	0,350	0,359	0,348	0,312 – 0,352

3.1.5 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2027 mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2027 merupakan perencanaan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada 3 kata kunci utama, yaitu Produktivitas, Investasi dan Industri. Tema ini mencerminkan upaya Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia

Dalam rangka mewujudkan tema RKP Tahun 2027, pemerintah menetapkan berbagai Program Prioritas Nasional serta Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Tahun 2027 menjadi momentum penting bagi kita dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya cepat, tetapi juga berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan. Melalui sinergi tiga pilar utama yaitu : Produktivitas, Investasi, dan Industri transformasi ekonomi nasional

1. Pilar Produktivitas
   Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi utama. Melalui program Makan Bergizi Gratis, Revitalisasi Sekolah, serta Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul, terjadi peningkatan status gizi dan capaian belajar anak-anak Indonesia secara nasional. Layanan kesehatan gratis yang berkualitas dan digitalisasi pendidikan semakin memperluas akses masyarakat. Program Kartu Kesejahteraan dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berhasil meningkatkan daya beli sekaligus menghidupkan ekonomi lokal. Di sisi lain, digitalisasi dan efisiensi tata kelola melalui Satu Data Sosial Ekonomi (DTSEN) dan layanan digital terintegrasi mempercepat respons kebijakan dan penanganan bencana. Diplomasi tangguh dan integritas pemerintahan turut memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
2. Pilar Investasi
   Investasi tidak lagi dipandang sekadar nilai nominal, tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Melalui program Investasi Hijau, Instalasi PSEL (pengelolaan sampah menjadi energi listrik), dan kemudahan perizinan, iklim investasi yang ramah lingkungan tercipta. Infrastruktur dasar dan konektivitas logistik yang merata, termasuk di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, berhasil menekan kesenjangan ekonomi. Inovasi pembiayaan melalui Danantara dan peran BUMN, serta skema keuangan syariah dan konvensional, membiayai proyek-proyek strategis nasional. Kawasan industri, KEK, dan destinasi pariwisata prioritas tumbuh pesat, mendorong ekspor dan devisa.
3. Pilar Industri
   Industri nasional menunjukkan lompatan signifikan. Industri besar strategis seperti pengembangan Mobil Nasional dan industri pengolahan sampel berhasil mengurangi ketergantungan impor sekaligus membuka lapangan kerja. Hilirisasi sumber daya alam berjalan masif: dari kelautan dan perikanan (industri garam dan produk laut), perkebunan (hilirisasi kelapa sawit), hingga mineral, migas, dan kehutanan. Nilai tambah ekspor melonjak drastis. Pencapaian paling strategis adalah Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Program KSPP (Kawasan Sentra Pangan dan Peternakan) menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia. Swasembada energi melalui transisi energi terbarukan dan *Giant Sea Wall* menjamin ketahanan air nasional sekaligus perlindungan wilayah pesisir

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Salah satu aspek dari Pemerintahan Daerah yang harus dilaksanakan adalah pengelolaan keuangan daerah yang dalam wujud konkretnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan arahan/pedoman Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk perencanaan pendanaan dan program kerja untuk periode satu tahun anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah sebagai upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa :

a. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan daerah terdiri atas : pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah;
b. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup. Pengeluaran daerah terdiri atas: belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah;
c. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

   Pendapatan daerah terdiri atas :

   - Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah; retribusi daerah; hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah)

- Pendapatan Transfer (transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah)
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Hibah; Dana Darurat; dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).

d. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah terdiri atas :

- Belanja operasi: merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.
- Belanja modal: merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- Belanja tidak terduga: merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Belanja transfer: merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

e. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri atas :

- Penerimaan pembiayaan, bersumber dari SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan Pinjaman Daerah, penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengeluaran pembiayaan, dapat digunakan untuk pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan Dana Cadangan, Pemberian Pinjaman

Daerah dan/atau pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Sejalan dengan proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah, baik perencanaan tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan. Hal tersebut berkaitan erat dengan penetapan rencana program/kegiatan yang akan ditetapkan sebagai prioritas untuk dilaksanakan pada setiap tahun anggaran. Daya dukung aspek keuangan daerah sangat berpengaruh terhadap probabilitas maupun prospek keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang ditetapkan.

Suatu proyeksi kebijakan pendapatan tidak terlepas dari realisasi penerimaan pendapatan yang diterima beberapa tahun sebelumnya. Ini merupakan landasan dalam pelaksanaan analisis dalam menentukan target penerimaan pendapatan yang akan dicapai, selain faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan seperti perkembangan perekonomian daerah, perkembangan jumlah penduduk daerah dan lain-lain.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan daerah Kabupaten Trenggalek adalah dari Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer, baik transfer dari Pemerintah Pusat maupun transfer dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini sebagai pertimbangan bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Pendapatan Transfer.

Kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 adalah mengoptimalkan seluruh pendapatan untuk dijadikan sumber belanja dan dicatat menurut nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Kebijakan umum tersebut dijabarkan dalam kebijakan yang bersifat operasional antara lain :

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi;
b. Optimalisasi Pemanfaatan & Pengelolaan Pendapatan;
c. Peningkatan Pelayanan Publik;
d. Pendayagunaan Kekayaan Daerah;
e. Mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi pajak-pajak pusat dan provinsi;

f. Mengupayakan pendanaan dari pemerintah pusat dan provinsi diluar pajak;

g. Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost-sharing* antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD serta swasta;

h. Meningkatkan pemanfaatan dana hibah terutama dari sumber *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN/BUMD;

i. Melaksanakan penyehatan manajemen Perusahaan Daerah/BUMD dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah;

j. Melaksanakan kebijakan insentif, disinsentif pajak, retribusi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai basis pajak dan retribusi daerah;

k. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga; dan

l. Mencari sumber-sumber pendapatan daerah baru yang tidak membebani masyarakat dan dunia usaha.

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam RKPD Tahun 2027 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya serta memperhatikan realisasi anggaran di tahun 2023- 2025.

Adapun realisasi dan proyeksi pendapatan daerah APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut :

Tabel III.5
Pendapatan Daerah APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2027 (Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi			APBD	Proyeksi	Proyeksi
	2023	2024	2025	2026	RKPD 2027	2028
PENDAPATAN	**1.879.855.240.414**	**1.976.717.300.282**	**1.933.948.656.619**	**1.867.829.270.075**	**1.777.645.978.550**	**1.830.534.378.917**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**267.177.163.229**	**281.233.905.461**	**353.170.216.491**	**387.585.753.575**	**383.872.187.050**	**407.589.590.275**
Pendapatan Pajak Daerah	55.434.711.327	58.999.202.750	116.852.275.901	121.745.000.000	125.265.250.000	132.300.000.000
Pendapatan Retribusi Daerah	19.683.753.888	20.879.239.578	188.061.732.146 *	248.858.829.975	246.680.602.971	261.356.662.810
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.401.239.576	6.365.697.366	6.442.140.915,67	6.375.127.000	6.475.000.000	8.100.000.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	186.657.458.438	194.989.765.767	41.814.067.528 *	10.606.796.600	5.451.334.079	5.832.927.465
PENDAPATAN TRANSFER	**1.606.107.926.790**	**1.695.418.448.426**	**1.566.836.990.357**	**1.480.243.516.500**	**1.393.773.791.500**	**1.422.944.788.643**
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	**1.447.094.222.990**	**1.528.881.982.876**	**1.456.565.931.507**	**1.379.577.746.000**	**1.293.108.021.000**	**1.317.019.453.744**
Dana Perimbangan	**1.239.200.413.990**	**1.320.785.110.876**	**1.270.197.425.209**	**1.240.708.117.000**	**1.239.797.113.000**	**1.263.708.545.744**
Dana Bagi Hasil Pajak	60.823.498.969	51.463.501.000	91.672.600.000	42.930.581.000	42.019.577.000	57.944.061.350
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	35.315.338.000	44.709.152.000				30.914.607.000
Dana Alokasi Umum	862.496.722.805	921.619.169.751	917.783.873.917	904.524.354.000	904.524.354.000	905.438.760.394
Dana Alokasi Khusus	280.564.854.216	302.993.288.125	260.740.951.292	293.253.182.000	293.253.182.000	269.411.117.000
Dana Insentif Daerah	**42.011.238.000**	**40.333.727.000**	**31.726.484.000**		-	-
Dana Desa	**165.882.571.000**	**167.763.145.000**	**154.642.022.298**	**138.869.629.000**	**53.310.908.000**	**53.310.908.000**

Uraian	Realisasi			APBD	Proyeksi	Proyeksi
	2023	2024	2025	2026	RKPD 2027	2028
TRANSFER ANTAR DAERAH	**159.013.703.800**	**166.536.465.550**	**110.271.058.850**	**100.665.770.500**	**100.665.770.500**	**105.925.334.899**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	**152.298.834.600**	150.573.341.050	104.388.871.850	95.789.983.500	95.789.983.500,00	101.049.547.899
Bantuan Keuangan	**6.714.869.200**	**15.963.124.500**	**5.882.187.000,00**	**4.875.787.000**	**4.875.787.000**	**4.875.787.000**
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	6.714.869.200	15.963.124.500	5.882.187.000,00	4.875.787.000	4.875.787.000,00	4.875.787.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**6.570.150.395**	**64.946.395**	**13.941.449.770**	**-**	**-**	**-**
Pendapatan Hibah	**6.557.280.395**	-		-	-	-
Pendapatan Lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	**12.870.000**	64.946.395	13.941.449.770		-	-

Sumber: BPKPD Kab. Trenggalek (Data Diolah)

*rekonsiliasi reklasifikasi pendapatan BLUD/pelayanan kesehatan

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk proyeksi anggaran tahun 2027 sumber pendapatan utama Kabupaten Trenggalek berasal dari pendapatan transfer dengan kontribusi sebesar 78,41 persen. Pendapatan asli daerah hanya berkontribusi sebesar 19,56 persen dari total pendapatan, sementara lain-lain pendapatan yang sah untuk perencanaan pendapatan tahun 2027 tidak dianggarkan pendapatannya. Komponen terbesar pada pendapatan transfer yakni pada pos pendapatan transfer pemerintah pusat yang didalamnya terdapat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal tersebut memberikan gambaran bahwa kondisi fiskal Kabupaten Trenggalek masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Adapun kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2027 meliputi:

❖ ***Pendapatan Asli Daerah,*** melalui :

1) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan menekankan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi diantaranya dengan penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah serta penggalian potensi-potensi baru;
2) Pemberian hibah aplikasi penerimaan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran pembayaran pajaknya;
3) Optimalisasi pemanfaatan aset untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4) Penjualan aset daerah yang umur ekonomisnya telah terlampaui secara selektif;
5) Optimalisasi pemungutan dan penagihan aktif pajak daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang;
6) Optimalisasi pelaksanaan peraturan daerah yang mengatur tentang objek Pendapatan Asli Daerah (PAD);
7) Divestasi perusahaan daerah yang tidak memiliki prospek ekonomi;
8) Pemeliharaan serta pemutakhiran data objek pajak PBB P2 selaras dengan pertumbuhan Kawasan;
9) Pembentukan basis data PBB P2 dan pemeliharaan serta pemutakhiran objek pajak PBB P2 pada kawasan cepat tumbuh.

❖ ***Pendapatan Transfer,*** *melalui :*

1) Optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumber daya alam;
2) Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa dianggarkan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada

tahun berkenaan, dan apabila peraturan yang mengatur mengenai alokasi DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa pada tahun berkenaan tersebut belum ditetapkan maka dasar perhitungannya mempertimbangkan dan memperhatikan:

- Realisasi besaran DBH, DAU, DAK, DID dan Dana Desa tahun-tahun sebelumnya;
- informasi resmi dari Pemerintah Pusat mengenai daftar alokasi transfer ke daerah pada tahun berkenaan.

3) Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil yang diterima dari Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi tahun berkenaan, dan apabila belum ada penetapan alokasi bagi hasil yang diterima tersebut maka penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran sebelumnya dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun-tahun sebelumnya;
4) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan dalam APBD, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

❖ ***Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah***, melalui :

1) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian
2) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat dan dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya penetapan dari Pemerintah Pusat.

Sebagai tindak lanjut dalam upaya mendukung peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, maka strategi kebijakan di bidang pendapatan pada tahun 2027 diarahkan pada upaya sebagai berikut :

1) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak daerah dan retribusi daerah;
2) Meningkatkan peran dan fungsi perangkat daerah dalam peningkatan

pelayanan dan pendapatan;
3) Peningkatan kualitas koordinasi dan kerjasama dengan pihak/instansi terkait;
4) Meningkatkan/optimalisasi pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5) Meningkatkan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyempurnaan sistem administrasi dan kemudahan pembayaran pajak serta efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6) Penegakan peraturan bidang pendapatan daerah;
7) Meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima;
8) Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN);
9) Meningkatkan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat dalam rangka akurasi data potensi pajak dan optimalisasi pemungutannya;
10) Meningkatkan akurasi data pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, urusan penunjang pemerintahan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Besarnya alokasi anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya alokasi anggaran pendapatan. Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun dalam penyusunan APBD juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus yang implementasinya akan menjadi balance karena adanya anggaran pembiayaan. Adapun realisasi, target dan proyeksi belanja APBD Kabupaten Trenggalek tahun 2023-2027 sebagai berikut :

Tabel III.6

Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2027 (Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi			APBD	Proyeksi	Proyeksi
	2023	2024	2025	2026	RKPD 2027	2028
BELANJA	**1.939.016.718.971**	**2.003.314.373.217**	**1.851.580.404.005**	**1.936.652.223.306**	**1.794.172.445.366**	**1.979.658.575.836**
BELANJA OPERASI	**1.456.285.575.058**	**1.558.060.006.464**	**1.473.423.411.491,76**	**1.509.173.321.454**	**1.456.540.960.832**	**1.558.174.592.389**
Belanja Pegawai	784.401.105.804	930.273.344.451	953.394.953.389	977.880.747.250	952.734.260.835	1.066.138.021.564
Belanja Barang dan Jasa	582.568.082.145	519.929.748.405	460.923.623.712	482.911.533.104	458.130.406.997	452.703.659.575
Belanja Bunga	11.531.763.757	7.945.396.170	4.844.109.049	8.504.748.100	3.800.000.000	3.400.000.000
Belanja Subsidi	-	-				
Belanja Hibah	75.769.248.352	97.835.627.439	51.835.033.092	37.622.545.000	39.622.545.000	33.679.163.250
Belanja Bantuan Sosial	2.015.375.000	2.075.890.000	2.425.692.250	2.253.748.000	2.253.748.000	2.253.748.000
Belanja keuangan		-				
BELANJA MODAL	**191.370.867.048**	**162.562.434.552**	**103.859.013.145**	**164.472.246.048**	**152.392.246.048**	**138.932.755.022**
Belanja Modal (Tanah)	4.223.481.345	270.463.367	-	100.000.000	100.000.000	382.060.000
Belanja Peralatan dan Mesin	69.378.223.671	38.067.324.757	30.819.256.637	29.363.081.829	29.363.081.829	30.000.000.000
Belanja Bangunan dan Gedung	48.112.256.131	31.735.693.254	24.204.796.033	39.814.490.781	39.814.490.781	24.204.796.033

Uraian	Realisasi			APBD	Proyeksi	Proyeksi
	2023	2024	2025	2026	RKPD 2027	2028
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.194.811.822	91.226.711.566	47.379.434.495	94.061.486.988	81.981.486.988	82.562.844.941
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.159.777.580	782.268.679	1.004.066.999	970.986.450	970.986.450	1.105.039.894
Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	302.316.500	479.972.930	451.458.980	162.200.000	162.200.000	678.014.153
BELANJA TAK TERDUGA	**7.984.181.165**	**645.313.800**	**752.666.570**	**6.829.499.241**	**8.469.499.241**	**6.781.524.986**
Belanja Tak Terduga	7.984.181.165	645.313.800	752.666.570	6.829.499.241	8.469.499.241	6.781.524.986
BELANJA TRANSFER	**283.376.095.700**	**282.046.618.400**	**273.545.312.798**	**256.177.156.562**	**176.769.739.245**	**275.769.703.439**
Belanja Transfer Bagi Hasil	7.396.142.100	7.645.391.200	13.608.122.500	14.859.597.562	15.069.581.245	15.832.513.141
Bagi Hasil Pajak	7.396.142.100	7.645.391.200	13.608.122.500	14.859.597.562	15.069.581.245	13.230.000.000
Bagi Hasil Retribusi		-				2.602.513.141
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	275.979.953.600	274.401.227.200	259.937.190.298	241.317.559.000	161.700.158.000	259.937.190.298
Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	275.979.953.600	274.401.227.200	259.937.190.298	241.317.559.000	161.700.158.000,00	259.937.190.298
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (PARPOL)		-				
SURPLUS / (DEFISIT)	(59.161.478.557)	(26.597.072.935)	82.368.252.614	(68.822.953.231)	(16.526.466.816)	(149.126.095.570)

Sumber: BPKPD Kab. Trenggalek (Data Diolah) dan LKPD Audited 2023- 2025

Belanja daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun anggaran 2027 diproyeksikan sebesar Rp. 1,794 trilyun rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan pada 4 (empat) pos belanja yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Proyeksi untuk belanja tahun 2027 tersebut lebih rendah dibandingkan realisasi APBD tahun 2025.

Proyeksi alokasi terbesar berada pada belanja operasi yakni sebesar 81,18 persen dari keseluruhan belanja daerah. Kemudian pada belanja transfer sebesar 9,85 persen; belanja modal sebesar 8,49 persen; dan belanja tak terduga sebesar 0,47 persen.

Kerangka kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2027 dengan arahan sebagai berikut :

1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja pembangunan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran
2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib (baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar), Urusan Pemerintahan Pilihan dan untuk melaksanakan Layanan/Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah;
3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS/ASN, Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
4) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk fasilitas bantuan keuangan ke desa, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial;
5) Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik dan program prioritas pembangunan, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengutamakan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai prioritas, sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah; dan
6) Efisiensi anggaran sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Pengalokasian anggaran untuk mendanai belanja daerah disesuaikan dengan besaran kekuatan anggaran Kabupaten Trenggalek berdasarkan penerimaan daerah dan sumber pendanaan yang harus

dikeluarkan belanjanya sesuai peruntukan darimana dana/anggaran diperoleh. Pengeluaran belanja sesuai sumber pendanaan tersebut khususnya belanja yang bersumber dari *specific grant* misalnya kegiatan yang bersumber dari DAU yang ditentukan penggunaannya, DAK, DID, DBHCHT, Pajak Rokok, BLUD dan Bantuan Keuangan Provinsi dengan berpedoman dan memperhatikan petunjuk teknis masing-masing sumber pendanaan tersebut. Pengalokasian belanja daerah juga diusahakan tetap terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran/belanja.

Kebijakan Belanja Operasi

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Operasi Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai yang pengalokasiannya telah memperhitungkan:
   a) pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, kenaikan gaji pokok, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* 0,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan serta gaji dan tunjangan CPNSD/Calon ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K/PPPK);
   b) tunjangan badan/alat kelengkapan DPRD dan belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   c) penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD/ASN;
   d) insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
   e) tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD;
   f) tambahan penghasilan PNSD/ASN.
2. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk :
   a) pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
   b) pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian sasaran prioritas Daerah.
3. Belanja Bunga atas pinjaman daerah
4. Belanja Hibah yang diberikan kepada badan/lembaga/organisasi pemerintah, kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan kepada kelompok/anggota masyarakat serta hibah pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Trenggalek, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku

5. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada individu/keluarga, kepada masyarakat dan kepada lembaga non pemerintahan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan.

Kebijakan Belanja Modal

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Modal Tahun 2027 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai
2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2027 dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2027, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan Belanja Transfer

Kebijakan perencanaan penggunaan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2027 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dialokasikan untuk Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebesar 10% dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dilaksanakan untuk pemberian Bantuan Keuangan kepada Desa yang diantaranya meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi DAK, Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Belanja Bantuan untuk kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2027, Belanja Bantuan Keuangan Lainnya kepada Desa. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) juga dialokasikan untuk mendukung pencapaian program pembangunan daerah.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pos anggaran yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau dalam rangka untuk memanfaatkan surplus anggaran yang diperoleh dari tahun sebelumnya. Adapun pos anggaran Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp 53,20 milyar rupiah yang disumbang oleh Pos Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp 30 milyar, penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 23 milyar yang direncanakan digunakan untuk sektor Pariwisata, infrastruktur perkotaan, sektor pertanian sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah dan mewujudkan kota atraktif dan pos penerimaan kembali pemberian pinjaman diproyeksikan sebesar Rp 202,95 juta rupiah.

Komponen selanjutnya yakni Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang pada tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp 36,67 milyar rupiah. Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut dialokasikan pada pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp 11,68 milyar rupiah, penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp 5 milyar dan pembentukan dana Cadangan Pilkada tahun 2029 sebesar Rp 20 milyar

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1) Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran Tahun berjalan;
2) Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan melakukan rasionalisasi belanja;
3) Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD memungkinkan ditutup dengan dana pinjaman.

Tabel III.7

Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023-2027 (Dalam Rupiah)

Uraian	Realisasi			APBD	Proyeksi	Proyeksi
	2023	2024	2025	2026	RKPD 2027	2028
PEMBIAYAAN	**189.632.011.258**	**109.930.009.060**	**26.965.565.325**	**68.822.953.231**	**16.526.466.816**	**(31.918.233.764)**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**284.667.121.921**	**164.793.172.469**	**83.414.702.361**	**125.322.953.231**	**53.202.953.231**	**29.081.766.236**
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	284.527.314.136	130.470.532.702	83.332.936.125	55.120.000.000	30.000.000.000	29.000.000.000
Pencairan Dana Cadangan	-	29.000.000.000				
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	5.000.000.000		70.000.000.000	23.000.000.000	
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	322.639.767	81.766.236	202.953.231	202.953.231	81.766.236
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perutndang-undangan.	139.807.785	-				
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**95.035.110.663**	**54.863.163.409**	**56.449.137.036**	**56.500.000.000**	**36.676.486.415**	**61.000.000.000**
Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	63.035.110.663	54.863.163.409	56.449.137.036	56.500.000.000	11.676.486.415	38.500.000.000
Penyertaan modal daerah;	3.000.000.000	-			5.000.000.000	2.500.000.000
Pembentukan Dana Cadangan;	29.000.000.000	-			20.000.000.000	20.000.000.000
PEMBIAYAAN NETTO	**189.632.011.258**	**109.930.009.060**	**26.965.565.325**	**68.822.953.231**	**16.526.466.816**	**(31.918.233.764)**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	130.470.532.702	83.332.936.125	109.333.817.939	-	0	- 181.044.329.334

Sumber: BPKPD Kab. Trenggalek (Data Diolah)

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2027 lebih diarahkan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, Sisa penghematan Belanja atau Akibat Lainnya, Sisa Belanja Dana-dana Spesifik, penerimaan dari pinjaman daerah serta pengoptimalan penerimaan kembali investasi pemerintah daerah. Dalam mewujudkan kota atraktif dan peningkatan pendapatan daerah, pada tahun 2027 direncanakan ada penerimaan pinjaman daerah dari PT SMI sebesar Rp 23 milyar yang akan digunakan untuk peningkatan destinasi wisata, perbaikan sarana prasarana wisata, penataan kota, penataan sektor pertanian di Ndilem Wilis Kecamatan Bendungan

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah. Kebijakan pengelolaan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2027 diarahkan pada pembayaran cicilan utang Pemerintah Kabupaten Trenggalek atas pinjaman daerah sebesar Rp 11,68 milyar rupiah, penyertaan modal ke BUMD sebesar Rp 5 milyar serta pembentukan dana cadangan untuk Pilkada serentak tahun 2029 sebesar Rp 20,00 milyar.

3.2.4. Alternatif Pendanaan/Pembiayaan Pembangunan

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah yang mempertimbangkan minimnya kekuatan APBD Kabupaten Trenggalek dari tahun-tahun yang sangat mengandalkan dana transfer dari pusat, maka diperlukan alternatif dukungan pendanaan diluar kekuatan APBD.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat melakukan inovasi pembiayaan melalui berbagai alternatif strategis sumber pembiayaan yang dapat menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Beberapa kebijakan pendanaan pembangunan daerah tersebut antara lain dilaksanakan melalui :

a. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk

membayar kembali. Adapun pinjaman daerah dapat bersumber dari Pemerintah Pusat, Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat. Adapun dasar dalam melakukan pinjaman daerah adalah :

1) Pasal 5 ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
5) Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah.

b. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

KPBU didefinisikan sebagai kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur bertujuan untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/BUMN/BUMD, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternatif pembiayaan pembangunan KPBU diharapkan akan mendorong percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1) Proyek KPBU merupakan proyek infrastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha;
2) Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha;
3) Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggung jawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU;
4) Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha; dan

5) Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.

Kriteria dan jenis infrastruktur prioritas yang dapat dibiayai melalui pendanaan KPBU terdiri:

1) Memiliki kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
2) Memiliki kesesuaian dengan rencana tata ruang dan wilayah;
3) Memiliki keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
4) Memiliki peran strategis terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, pertahanan dan keamanan nasional; dan/atau
5) Membutuhkan dukungan pemerintah dan/atau jaminan pemerintah, dalam penyediaan infrastruktur prioritas kerja sama pemerintah dan swasta.

c. Tanggung Jawab Sosial atau *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Pada dasarnya, CSR tidak hanya terbatas pada pemberian dana kepada masyarakat dan lingkungan sosial saja, tetapi juga meliputi menjaga hubungan jangka panjang yang baik dengan para pihak yang terkait dengan perusahaan.

Ditinjau dari Undang-Undang Perseroan No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara umum fungsi CSR adalah sebagai bentuk tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pihak yang terlibat dan terdampak, baik secara langsung atau tidak langsung atas aktivitas perusahaan. Pihak yang berkepentingan contohnya seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas juga lingkungan dalam segala aspek operasional melingkupi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Sejalan dengan Tujuan Pembangun Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG's) bahwa Perusahaan tidak lagi hanya dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single *bottom line* (SBL) atau nilai perusahaan (*corporate value*) dilihat dari segi kondisi ekonominya (*financial*) saja. Tapi lebih berpijak pada *triple bottom line* (TBL) yaitu sinergi tiga elemen yang meliputi ekonomi, sosial, dan lingkungan atau lebih dikenal dengan 3P (*Profit, People dan Planet*). Karena kondisi

keuangan saja tidak cukup menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Kabupaten Trenggalek selain bersumber dari APBD, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah di Kabupaten Trenggalek.

e. Kolaborasi APBDesa

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kabupaten Trenggalek dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBDesa. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan kabupaten sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah desa, sehingga antara kabupaten dan desa dapat bekerja sama di dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan *sharing* pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

RKPD

KABUPATEN TRENGGALEK

TAHUN 2027

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Dalam RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027, kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029. Dalam menyusun perencanaan tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan rumusan perencanaan pembangunan jangka menengah sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2027 yang tertuang dalam RPJMD. Prioritas pembangunan Kabupaten Trenggalek menjadi fokus pembangunan yang bersifat strategis untuk mencapai sasaran dan pencapaian visi misi Kepala Daerah di Kabupaten Trenggalek. Kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 adalah sebagai berikut.

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Selaras dengan prioritas pembangunan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan provinsi dan nasional;
3. Memedomani dan mendukung pelaksanaan program strategis nasional;
4. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan pada tahun 2027; serta
5. Pengembangan sektor atau bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahap kedua dari RPJMD Tahun 2025-2029. Dengan ini, pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun 2027 memedomani visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan periode sebelumnya, serta potensi, kondisi, permasalahan, isu, tantangan, dan peluang di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2027. Visi yang hendak dicapai pada periode 2025-2029 adalah:

TERWUJUDNYA KABUPATEN TRENGGALEK
YANG ADIL DAN MAKMUR

Dalam rangka mewujudkan visi, maka misi sesuai dokumen RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

MISI 1 : **Memantapkan Trenggalek sebagai kota atraktif dengan infrastruktur yang berkualitas yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim**

Misi ini bertujuan untuk memperkuat daya tarik Kabupaten Trenggalek sebagai kawasan yang layak huni, produktif, dan terhubung secara baik antarkawasan. Pengembangan infrastruktur yang merata, berkualitas, dan berwawasan lingkungan menjadi landasan penting dalam meningkatkan aksesibilitas layanan dasar, memperkuat konektivitas wilayah, serta mendukung mobilitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pembangunan diarahkan untuk tidak hanya menyentuh pusat kota, tetapi juga menjangkau desa dan kawasan pinggiran, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan infrastruktur terhadap perubahan iklim. Lebih dari sekadar menciptakan kenyamanan bagi penduduk, misi ini menempatkan Kabupaten Trenggalek sebagai kota atraktif yang mampu menarik kehadiran wisatawan, pelajar, pekerja, hingga investor untuk datang, tinggal, dan beraktivitas di wilayah ini. Dengan pendekatan yang inklusif dan berorientasi jangka panjang, Kabupaten Trenggalek diharapkan tumbuh sebagai simpul pertumbuhan yang dinamis dan kompetitif di tingkat regional.

MISI 2 : **Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, produktif, dan regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan**

Misi ini menitikberatkan pada penciptaan sistem ekonomi yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Kabupaten Trenggalek akan mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan pendekatan regeneratif, yaitu pengelolaan sumber daya alam secara berimbang antara eksploitasi dan pelestarian. Ekonomi inklusif berarti tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal, sementara pendekatan regeneratif memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak merusak daya dukung lingkungan, tetapi justru memperkuatnya.

MISI 3 : **Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang adil melalui kota lestari yang harmonis dan ramah lingkungan**

Misi ini mencerminkan komitmen Kabupaten Trenggalek dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan degradasi

lingkungan dengan memperkuat daya dukung ekologis wilayah. Kota lestari diwujudkan melalui penerapan kebijakan pembangunan rendah karbon, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, konservasi lingkungan, serta tata ruang yang berbasis mitigasi dan adaptasi bencana. Kabupaten Trenggalek diarahkan menjadi daerah yang tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga harmonis dengan alam dan memiliki ketahanan jangka panjang terhadap krisis iklim.

MISI 4 : **Mengoptimalkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang sehat, berbudaya, kreatif, dan terlindungi**

Misi ini bertujuan untuk memperkuat modal manusia sebagai inti dari kemajuan daerah. Peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui perbaikan layanan kesehatan, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan masa depan, serta penguatan pelatihan dan inovasi berbasis teknologi. SDM Kabupaten Trenggalek didorong untuk menjadi pribadi yang sehat secara fisik dan mental, kreatif dalam berkarya, serta mampu bersaing di tingkat regional, nasional, maupun global. Misi ini juga selaras dengan upaya mendorong inklusi sosial dan mobilitas vertikal masyarakat miskin dan rentan

MISI 5 : **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, kolaboratif, dan melayani ditopang digitalisasi untuk memastikan inklusifitas pelayanan**

Misi ini menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan penguatan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif. Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, responsif, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Selain itu, penguatan integritas dan efisiensi birokrasi akan didorong melalui digitalisasi pelayanan dan pengawasan kinerja yang objektif. Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam menciptakan kepercayaan publik dan mempercepat keberhasilan pembangunan daerah.

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan maka diperlukan rumusan tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategi yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran dapat diterjemahkan sebagai sasaran tahunan melalui arah kebijakan yang menjadi pedoman

dalam penyusunan prioritas dan sasaran tahunan (prioritas dan sasaran pembangunan RKPD).

Sesuai dengan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran dalam pembangunan Kabupaten Trenggalek tahun 2027. Berikut dijabarkan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan target indikator dan target pembangunan pada tahun 2027, yang ditampilkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2025	TARGET RPJMD 2027	TARGET RKPD 2027
Visi :						
Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Adil dan Makmur						
Memantapkan Trenggalek sebagai Kota Atraktif dengan Infrastruktur berkualitas yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur (poin)	60,34	55,56	60,35
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur daerah	Indeks Pemerataan Infrastruktur (IPIn) (Poin)	0,278	0,213	0,213
		Meningkatnya konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas (Poin)	0,725	0,783	0,783
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,31	4,74	4,74 – 5,31
			PDRB Perkapita (Juta Rp / Kapita)	35,11	34,23	34,23 – 35,11
			Indeks Ekonomi Hijau (Angka)	49,57	48,5	48,5 – 49,57
		Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Strategis Potensial	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	7,73	6,71	6,71 – 7,73
			Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	4,54	4,15	4,15 – 4,54
			Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (%)	4	0,31	0,31 - 4
			Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	7,61	5,85	5,85 – 7,61
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (Poin)	3,79	4,07	4,07
			Realisasi Investasi (triliun rupiah)	0,58	0,49	0,49 – 0,58
		Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	71,7	86,40	86,40
Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang adil	Meningkatnya Keberlanjutan Lingkungan Kabupaten		Indeks Kota Hijau (poin)	69,33	62,6	69,5
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	76,91	75,13	76,92

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	CAPAIAN 2025	TARGET RPJMD 2027	TARGET RKPD 2027
melalui kota lestari yang harmonis dan ramah lingkungan		Hidup dan Ketahanan terhadap perubahan iklim	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TON CO_2 EQ)	816.291	954.464	954.464
		Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	120,85	131,99	118
Mengoptimalkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang sehat, berbudaya, kreatif, dan terlindungi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan ((%))	10,29	8,94	8,94
			Indeks Gini (Poin)	0,349	0,347	0,312 - 0,352
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,86	3,83	3,83 - 3,26
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah/Kapita)	33.768.819	32.210.046	32.210.046 – 33.768.819
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Ribu. Rp/ Kapita) ()	11,322	11.369	11.369
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	64,89	58,85	64,89
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	73,39	74,27	74,27
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	93,64	93,94	93,94
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,63	76,01	76,01
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan (poin)	0,625	0,626	0,626
		Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,215	0,383	0,215
		Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	61,19	52,53	61,25
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, kolaboratif, dan melayani ditopang digitalisasi untuk memastikan inklusifitas pelayanan	Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	88,63	87,5	87,5
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif dan Akuntabel	Nilai SAKIP (poin)	76,58	76	76,6
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani	Indeks Integritas (Poin)	77,32	75,76	77,32
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,43	4,1	4,53

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi

Penelaahan dokumen lainnya terutama dokumen perencanaan nasional dan provinsi dimaksudkan untuk mendukung keselarasan perencanaan pusat dan daerah. Pembangunan Kabupaten Trenggalek dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan provinsi adalah sebagai berikut.

4.2.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027

Rencana Kerja Pembangunan Nasional merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Memahami bahwa RKP 2027 merupakan bagian dari RPJMN 2025-2029 yang memiliki Visi sebagai berikut:

“ Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 “

Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN periode tahun 2025 - 2029 yang dijabarkan dalam 8 Misi sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan Sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat adil dan Makmur.

Dengan Visi dan Misi RPJMN diatas, maka pembangunan tahun 2027 (RKP 2027) menetapkan sasaran strategis, prioritas pembangunan, serta alokasi sumber daya guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif,

pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun tema pembangunan Nasional (RKP 2027) yaitu:

"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri"

Tema pembangunan tersebut menjadi arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2027 dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pembangunan nasional Tahun 2027 diarahkan pada penguatan produktivitas di berbagai sektor strategis melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan inovasi dan teknologi, pengembangan industri nasional, serta peningkatan efisiensi investasi. Selain itu, pembangunan juga difokuskan pada percepatan hilirisasi sumber daya alam, penguatan konektivitas dan infrastruktur, pengembangan ekonomi kerakyatan dan desa, serta transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital dan data.

Adapun sasaran pembangunan nasional Tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan industrialisasi, dengan tetap memperhatikan aspek pemerataan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Target-target pembangunan tersebut menjadi bagian dari tahapan akselerasi menuju pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada Tahun 2029 sebagaimana arah RPJMN Tahun 2025–2029. Secara rinci sasaran pembangunan RKP Tahun 2027 disajikan pada gambar berikut.

Gambar IV.1
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2027



Sasaran pembangunan RKP Tahun 2027 diarahkan pada fase akselerasi pertumbuhan ekonomi sebagai jembatan menuju target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada Tahun 2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2025–2029. Dalam kerangka tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2027 ditargetkan berada pada kisaran 6,3–7,5 persen, meningkat dibanding target Tahun 2026 sebesar 5,4 persen. Peningkatan tersebut didorong melalui penguatan produktivitas, investasi, dan industrialisasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, RKP Tahun 2027 juga menekankan prinsip pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan melalui target peningkatan pendapatan nasional bruto per kapita (*GNI per capita*) menjadi sekitar US$ 5.980–6.050, peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 76,84, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebagai bagian dari komitmen pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan.

Di bidang sosial, sasaran pembangunan Tahun 2027 diarahkan pada percepatan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0–6,5 persen, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0 persen. Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka ditargetkan turun pada kisaran 4,30–4,87 persen dengan didukung peningkatan penciptaan lapangan kerja formal hingga 40,81 persen. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kesejahteraan petani yang tercermin dari peningkatan Indeks Kesejahteraan Petani menjadi 0,8038. Sementara itu, pembangunan sumber daya manusia terus diperkuat melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan produktivitas masyarakat

yang tercermin dari target peningkatan Indeks Modal Manusia menjadi 0,58 pada Tahun 2027. Dengan sasaran tersebut, pembangunan nasional Tahun 2027 diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing nasional secara berkelanjutan

4.2.2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat provinsi, dengan berfokus pada Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas. RKPD ini disusun berdasarkan prioritas pembangunan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur, sehingga mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan di seluruh kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Trenggalek. Melalui RKPD, pemerintah provinsi berperan dalam mengkoordinasikan dan mengarahkan pembangunan daerah agar lebih efektif dan selaras dengan visi pembangunan yang lebih luas. Adapun tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 ini dijabarkan sebagai berikut:

Tema Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2027

“Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertubuhan Ekonomi yang Berkualitas”

Tema pembangunan tersebut merupakan arah strategis pembangunan yang difokuskan pada penguatan kualitas pelayanan dasar masyarakat sebagai fondasi utama dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema tersebut selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029 yang menempatkan Tahun 2027 sebagai fase penguatan pelayanan dasar guna memperkokoh fondasi pembangunan daerah pada tahun-tahun berikutnya.

Penguatan pelayanan dasar diarahkan melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, layanan kesehatan yang berkualitas, perlindungan sosial yang adaptif, penguatan infrastruktur konektivitas wilayah, peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang melayani dan berintegritas. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mendukung pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kesempatan kerja dan kewirausahaan, penguatan masyarakat yang harmonis dan inklusif, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Melalui arah pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata dan berkeadilan. Selanjutnya, dengan tema pembangunan diatas, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dijabarkan sebagai berikut:

- **Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 1**
  Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan.
- **Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 2**
  Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas.
- **Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 3**
  Jatim Akses, Memperkuat Infrastuktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan.
- **Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 4**
  Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan.
- **Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 5**
  Jatim Cerdas, Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan.
- **Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 6**
  Jatim Sehat, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan.
- **Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 7**
  Jatim Berkah-Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
- **Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 8**
  Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.
- **Prioritas Pembangunan Provinsi (PP) 9**
  Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

Tabel IV.2.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2027 Provinsi Jawa Timur

NO	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027
TERWUJUDNYA PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN KETIMPANGAN			
1	Terwujudnya perlindungan sosial yang Adaptif	Jumlah penduduk yang menerima bantuan perlingan sosial	84.379
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian pedesaan	Presentase desa mandiri(%)	40,46
TERWUJUDNYA KETAHANAN EKONOMI YANG BERKUALITAS			
3	Meningkatnya kesempatan kerja dan kewirausahaan daerah	Rasio kewirausahaan(%)	3,05-3,19
		Tingkat partisipasi angkatan kerja	75,32

NO	TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2027
		Proporsi PDRB ekonomi kreatif terhadap PDB ekonomi kreatif nasional	22,73
4	Meningkatnya pembangunam infrastruktur konektivitas wilayah	indeks konektivitas transportasi	78,14
		indeks kinerja jalan	0,647
5	Meningkatnya kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan	nilai tukar petani	110,5-103
		Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan (prevolence of undernourishment) (%)	8,12-5,12
MENINGKATNYA SDM YANG BERKUALITAS			
6	Meningkatnya pemerataan akses dan mutu pendidikan	Harapan lama sekolah	13,68
		Presentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tibgkat nasional untuk : literasi membaca	76,32
		Presentase kab/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tibgkat nasional untuk :numerasi	41,45
		Presentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : literasi membaca	62,13
		Presentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk : numerasi	55,98
7	Meningkatnya akses layanan kesehatan yang berkualitas	Usia harapan hidup (UHH) (tahun)	75,72
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG ADAPTIF			
8	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yag melayani dan berintegrasi	Indeks pelayanan publik	4,15-4,60
		Indeks integritas pemerintah Prov.Jawa Timur	74
9	Terwujudnya masyarakat yang humoris dan toleran	Indeks demokrasi indonesia	Tinggi
		Presentase penanganan kesejahteraan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	87
10	Meningkatnya pemajuan seni,budaya dan prestasi olahraga	Indeks pembangunan kebudayaan(IPK)	61,88-61,96
		Indeks pembangunan olahraga(IPO)	0,427
11	Terwujudnya masyarakat yang inklusif	Indeks keimpangan gender(IKG)	0,305-0,322
		Indeks pembangunan pemuda(IPP)	62,50
TERWUJUDNYA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN			
12	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Penurunan emisi GRK kumulatif(%)	6,73
13	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Indeks risiko bencana (IRB)	112,35-109,74

4.3 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2027

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2027 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dengan mengimplementasi pada sasaran dan arah kebijakan yang berfokus pada agenda pembangunan pada tahun 2027. Merujuk hal tersebut, RKPD Tahun 2027 memiliki arah pembangunan berdasarkan arahan pembangunan jangka menengah pada tema/fokus di tahun 2027 pada pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2027 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri". Untuk mewujudkan keselarasan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, maka penentuan prioritas kabupaten Trenggalek untuk mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan provinsi. Adapun rincian prioritas pembangunan nasional meliputi Asta Cita yang diarahkan pada penguatan ideologi, demokrasi dan hak asasi manusia, penguatan pertahanan dan keamanan negara, kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru, pengembangan sumber daya manusia, hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi, serta penguatan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Selanjutnya, arah pembangunan Provinsi Jawa Timur dituangkan dalam prioritas pembangunan daerah melalui Nawa Bhakti Satya yang menekankan penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan ekonomi inklusif berbasis potensi wilayah, penguatan konektivitas dan infrastruktur, ketahanan lingkungan hidup dan kebencanaan, pengentasan kemiskinan, transformasi pelayanan publik berbasis digital, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

Keselarasan antara prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur, dan arah pembangunan Kabupaten Trenggalek menjadi penting untuk memastikan efektivitas pencapaian target pembangunan secara terpadu dan berkelanjutan. Sinkronisasi tersebut dilakukan melalui penyelarasan sasaran, program prioritas, serta fokus pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan karakteristik, potensi, dan permasalahan strategis daerah. Sejalan dengan hal tersebut, tema pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 adalah *"Penguatan Peran Komunitas dan Lintas Sektor dalam Rangka Mewujudkan Kota Atraktif."* Tema tersebut mencerminkan komitmen daerah dalam mendorong pembangunan yang partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui penguatan peran masyarakat serta sinergi antar pemangku kepentingan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengembangkan ekonomi berbasis potensi lokal, serta menciptakan ruang hidup yang nyaman, produktif, dan berwawasan lingkungan.

4.3.1 Tema Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2027

Berdasarkan tahapan pada tiap tema pembangunan Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029, maka tema pembangunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 adalah sebagai berikut.

"Penguatan Peran Komunitas dan Lintas Sektor dalam Rangka Mewujudkan Kota Atraktif"

Mewujudkan Kota Atraktif melalui Penguatan Peran Komunitas dan Lintas Sektor mencerminkan upaya strategis daerah dalam mendorong transformasi pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada peran pemerintah, tetapi juga mengedepankan partisipasi aktif masyarakat serta sinergi antar pemangku kepentingan.

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional melalui Asta Cita serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam Nawa Bhakti Satya, penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Dalam konteks ini, komunitas diposisikan sebagai aktor utama pembangunan yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan potensi lokal, memperkuat kohesi sosial, serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Penguatan peran komunitas diwujudkan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat, pelaku usaha lokal, pemuda, perempuan, serta komunitas desa dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya ekonomi kreatif, pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis potensi lokal. Sementara itu, pendekatan lintas sektor menekankan pentingnya integrasi peran antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan program pembangunan secara kolaboratif, adaptif, dan responsif terhadap dinamika perubahan.

Konsep "kota atraktif" dalam konteks Kabupaten Trenggalek tidak semata dimaknai sebagai kawasan perkotaan yang maju secara fisik, tetapi lebih pada terwujudnya wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Kota atraktif diartikan sebagai ruang hidup yang mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, menyediakan layanan dasar yang berkualitas, menghadirkan ruang publik yang hidup dan inklusif, serta menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Melalui tema ini, pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 diarahkan untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang kolaboratif, di mana komunitas menjadi penggerak utama, didukung oleh tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berbasis data, serta infrastruktur yang memadai. Dengan demikian, diharapkan terwujud peningkatan kualitas

hidup masyarakat secara merata, penguatan daya saing daerah, serta percepatan pencapaian visi *"Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang Adil dan Makmur."*

4.3.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Trenggalek 2027

Dengan memedomani penahapan pembangunan tahun 2027 dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Trenggalek, maka sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2027 dirumuskan dengan merujuk pada tahapan strategi RPJMD Tahun 2027 yang disajikan perumusannya pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.3.
Relevansi Strategi RPJMD dan Prioritas Pembangunan Tahun 2027

Strategi RPJMD Th. 2027	Prioritas Pembangunan 2027
1) Pengembangan Kawasan Kabupaten Trenggalek menuju Kota Atraktif	√ Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
2) Integrasi transportasi publik yang efisien dan terjangkau	
3) Pemenuhan infrastruktur dasar berkualitas, pengembangan mitigasi risiko bencana dan penguatan resiliensi berkelanjutan	
4) Pengolahan sampah dan limbah terintegrasi dan partisipatif untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan	
5) Ekonomi regeneratif dan inklusif berbasis hilirisasi dan industrialisasi agro-maritim serta perluasan kesempatan kerja	√ Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
6) Penguatan sekuestrasi karbon melalui pemulihan ekosistem dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan	√ Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
7) Pemenuhan pelayanan dasar Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	√ Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
8) Pemberdayaan komunitas masyarakat desa dalam rangka monetisasi sektor perhutanan sosial dan pesisir	

Strategi RPJMD Th. 2027	Prioritas Pembangunan 2027
9) Pembangunan manusia yang berdaya saing dan berbudaya melalui penguatan karakter bangsa	

Dengan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029 Kabupaten Trenggalek sesuai rumusan tujuan dan sasaran serta strategi/prioritas pembangunan maka rumusan prioritas dan sasaran Pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.4.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Trenggalek Tahun 2027

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2027
Memantapkan Trenggalek sebagai Kota Atraktif dengan Infrastruktur berkualitas yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap perubahan iklim	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah		Indeks Infrastruktur (poin)	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur daerah	Indeks Pemerataan Infrastruktur (IPIn) (Poin)	
		Meningkatnya konektivitas wilayah	Indeks Konektivitas (Poin)	
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Produktif, dan Regeneratif berbasis sumber daya lokal unggulan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan		Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
			PDRB Perkapita (Juta Rp / Kapita) ()	
			Indeks Ekonomi Hijau (Angka)	
		Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Strategis Potensial	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	
			Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	
			Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (%)	
			Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (Poin)	
			Realisasi Investasi (triliun rupiah)	
		Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa	Persentase Desa Mandiri (%)	
			Indeks Kota Hijau (poin)	

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2027
Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang adil melalui kota lestari yang harmonis dan ramah lingkungan	Meningkatnya Keberlanjutan Lingkungan Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
			Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TON CO2 EQ)	
		Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	
Mengoptimalkan transformasi sosial melalui pembangunan manusia yang sehat, berbudaya, kreatif, dan terlindungi	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Tingkat Kemiskinan ((%))	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
			Indeks Gini (Poin)	
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah/Kapita)	
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Ribu. Rp/ Kapita) ()	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan (poin)	
		Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	
		Meningkatnya Daya Saing Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, kolaboratif, dan melayani ditopang digitalisasi untuk memastikan inklusifitas pelayanan	Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif dan Akuntabel	Nilai SAKIP (poin)	
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani	Indeks Integritas (Poin)	
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	

4.3.3 Rencana Aksi Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan program prioritas yang dijabarkan melalui penjabaran prioritas pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek pada tahun 2027, berikut rencana aksi yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek:

Tabel IV.5
Program Prioritas, Penjabaran Prioritas, dan Rencana Aksi Kabupaten Trenggalek Tahun 2027

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
1	**Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas**	**Penguatan ekonomi kreatif berbasis komunitas melalui peningkatan kapasitas dan aktivasi ruang publik secara kolaboratif;**	Peningkatan partisipasi pemuda berbasis kreatifitas dan ekonomi	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Pelatihan pembuatan maskot khas Trenggalek	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pelatihan Makeup karakter	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Fasilitasi pelaku ekraf dengan aktivasi ruang publik, dengan kegiatan pasar kreatif (gebyar ekraf) dengan kolaborasi sub sektor ekraf yang ada dan berkembang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pengembangan sentra ekonomi berbasis potensi unggulan daerah dan pemberdayaan komunitas;	Pengadaan Bed Dryer	Dinas Pertanian dan Pangan
			Melaksanakan Pengujian Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (Uji Kelas Mutu Beras dan Uji Laboratorium Kandungan Pestisida)	Dinas Pertanian dan Pangan
			Pengadaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah (Pengadaan Pestisida Test Kit)	Dinas Pertanian dan Pangan
			Menyediakan bantuan Sarana Produksi Tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Pengadaan Alat Mesin Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
			Pembangunan Jalan Produksi	Dinas Pertanian dan Pangan
			Melaksanakan Insentif LP2B (Benih Padi)	Dinas Pertanian dan Pangan
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Pangan
			Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani	Dinas Pertanian dan Pangan
			Melaksanakan Sekolah Lapang OPT Tanaman Pangan dan Horti; Penjagaan Pestisida	Dinas Pertanian dan Pangan
			Fasilitasi AUTP	Dinas Pertanian dan Pangan
			Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Dinas Pertanian dan Pangan
			Pelayanan Monitoring Kualitas Air Kolam, OIKB (Obat Ikan Kimia Berbahaya) dan Hama Penyakit Ikan (MAS KOKI)	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Bimtek bagi pembudidaya ikan	Dinas Peternakan dan Perikanan

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
			Pemberian sarana penangkapan ikan	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Kegiatan SOBO PARAN	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Pemeliharaan IPAL Sentra pemindangan Bengkorok, Pembinaan Pemindang, Bimtek Pengolahan	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Pembinaan Pemasar Ikan	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Pelestarian sapi Galekan untuk menambah populasi	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Pemberian Bantuan ternak kambing	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Pembinaan dan pelayanan kesehatan hewan ternak kepada kelompok ternak	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Penerbitan surat keterangan layak bibit	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Pembinaan, pemberian bantuan, fasilitasi pengajuan bantuan APBD Provinsi dan APBN kepada kelompok ternak	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Pemberian rekomendasi pra NKV	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Vaksinasi kepada sapi, kambing, domba	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Penyediaan vaksin, desinfektan untuk unggas	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA)	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Pengawasan peredaran hewan ternak	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Antemortem dan Post mortem pada hewan kurban	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Pemberian bantuan produk hewan dan olahannya kepada balita stunting	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Fasilitasi Penyelenggaraan kontes hewan	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Diversifikasi Produk Susu Hewani dan Non Hewani	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Fasilitasi pendaftaran perizinan IKM produk susu	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Pelatihan, pendampingan kelompok usaha frozen food dan menjahit.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
			Promosi, Pemasaran (penyelenggaraan car free day, perluasan kerja sama dengan pihak ketiga, pameran).	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Pameran dagang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Misi dagang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Tera/tera ulang UTTP	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Pengawasan, penyuluhan metrologi legal	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas untuk pengelola wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pelaksanaan pelestarian adat budaya (upacara adat)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pelaksanaan Festival/event budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pelatihan dan pembinaan pelaku seni	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		Pemberdayaan pemuda dan perempuan dalam kewirausahaan ;	Penumbuhan dan pelatihan petani milenial	Dinas Pertanian dan Pangan
			Pemberdayaan KWT melalui kegiatan Lomba Cipta Menu dan Lomba Cipta Kreasi Tingkat Kabupaten	Dinas Pertanian dan Pangan
			Pelatihan Wira Usaha Baru (WUB)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Pelatihan, pendampingan kepada pemuda dan perempuan usaha makanan olahan.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Pelatihan kerajinan untuk perempuan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan kepada Perempuan Kepala Keluarga	Dinas Sosial dan PPPA
			Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan komunitas pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha;	Pelatihan berbasis kompetensi	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Memperluas kerjasama dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja)	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
			Pembinaan Bursa Kerja Khusus di SMK	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Penguatan sumber - sumber Pendapatan Asli daerah berbasis ekonomi lokal;	Penambahan prasarana Agropark dan Dillem Wilis	Dinas Pertanian dan Pangan
			Pembelian pakan untuk sapi perah	Dinas Pertanian dan Pangan
			Pengadaan sarana Dillem Wilis dan Agropark	Dinas Pertanian dan Pangan
			- Pemeliharaan Sarpras - Pengadaan keranjang ikan untuk disewakan kepada pengguna TPI - FGD kepada nelayan untuk meningkatkan kesadaran	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Pemeliharaan sarpras BBI, pembelian indukan ikan, pembelian pakan dan obat-obatan	Dinas Peternakan dan Perikanan
			Pengolahan dan pemasaran produk susu	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Revitalisasi sarana dan prasarana distribusi perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Pengelolaan dan pemeliharaan sarana distribusi perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Perubahan mekanisme pembayaran dari tarif retribusi pelayanan pasar dari harian dan bulanan menjadi tarif tahunan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Penerbitan regulasi pemanfaatan objek retribusi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Pemanfaatan Pasar grosir, pertokoan dan usaha lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana prasarana pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Promosi pariwisata melalui media sosial dan media berbayar	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Menjalin kerjasama dengan biro perjalanan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Penyebarluasan informasi kebijakan pajak daerah melalui media cetak, elektronik, dan digital.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
			Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah, Optimalisasi penagihan dan pemeriksaan kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Pembinaan, pengawasan dan rekonsiliasi pengelolaan pajak daerah serta retribusi daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat;	Sosialisasi dan pendampingan literasi keuangan kepada pelaku usaha mikro	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Fasilitasi business/investment matching	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
			Bimtek literasi keuangan kepada pelaku usaha	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
		Penguatan ekonomi desa berbasis komunitas melalui pengembangan BUMDes dan Koperasi Desa;	Penguatan kapasitas SDM Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Penguatan kapasitas SDM Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih dan Pameran produk koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat yang akan membentuk koperasi baru	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Menghubungkan atau memitrakan koperasi dengan koperasi lainya atau dengan Offtaker	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Fasilitasi dan pendampingan desa wisata pada kegiatan jambore pokdarwis jatim, festival dewi cemara, wonderful indonesia award, Pembinaan pengelola daya tarik wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan komunitas pemuda	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Pembinaan, penguatan kelembagaan, pengelolaan usaha dan penyusunan laporan keuangan BUMDesa/BUMDesMa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Pelatihan Olahan Makanan, Kerajinan bambu dan Pemasaran Online	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Pengembangan hilirisasi produk lokal berbasis industri pengolahan melalui pemberdayaan komunitas.	Pelatihan Olahan Pangan Berbahan Baku Lokal	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
2	**Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan**	**Penataan kawasan pusat kota yang "hidup";**	Penataan ruang publik (aloon-aloon, taman kota/RTH, ruang kreatif) yang inklusif	Dinas Lingkungan Hidup
			Pembangunan Pedestrian, Jogging track, dan jalur sepeda yang terintegrasi	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
			Integrasi estetika kota (urban design, signage, street furniture)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Pengembangan sistem transportasi publik lokal yang terintegrasi dan terjangkau;	Optimalisasi Angkutan Pemadu Moda TGX-Mobility Hub	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
			Rehabilitasi Terminal Tipe C	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
			Peningkatan kualitas layanan angkutan pelajar dan angkutan wisata	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
			Inisiasi dan perluasan gerakan bike to work, run to work, CFD	Dinas Lingkungan Hidup
		Pembangunan infrastruktur dasar universal yang berkelanjutan dan tangguh bencana;	Peningkatan kualitas jalan kabupaten dan jalan non kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Digitalisasi monitoring kualitas layanan infrastruktur	Dinas Komuikasi dan Informatika BPBD
			Penyediaan cakupan layanan air bersih dan sanitasi (layak dan aman)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
			Penyediaan penerangan jalan umum (PJU) hemat energi	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
			Penguatan jaminan partisipasi musrenbang berbasis data	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
			Pembangunan dan pemeliharaan eco drainase (sustainable drainage system)	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
			Penguatan infrastruktur mitigasi bencana	BPBD

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
			Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi pendukung ketahanan pangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Penyediaan hunian yang layak, terjangkau dan berkelanjutan	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
			Identifikasi kawasan kumuh	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan
		Pengelolaan sampah dan limbah terintegrasi berbasis komunitas dan masyarakat;	Peningkatan pengawasan bagi pelaku usaha yang menghasilkan limbah	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengelolaan sampah berbasis 3R yang diutamakan di hulu	Dinas Lingkungan Hidup
			Peningkatan akses pemasaran sampah terolah dan terpilah	Dinas Lingkungan Hidup
			Optimalisasi dan peningkatan keberfungsian bank sampah, TPS dan TPS 3R	Dinas Lingkungan Hidup
			Pembentukan kelompok masyaralat (komunitas) konservasi pemelihara infrastruktur	Dinas Lingkungan Hidup
			Rehabilitasi lahan kritis berbasis komunitas	Dinas Lingkungan Hidup
			Edukasi, Pelatihan Pemanfaatan dan Pengelolaan Sampah Keluarga	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Peningkatan Partisipasi Publik dalam mewujudkan kelestarian lingkungan.	Peningkatan sekuestrasi karbon melalui penanaman pohon	Dinas Lingkungan Hidup
			Pemberian penghargaan (dan insentif) kepada desa / masyarakat / komunitas / swasta yang berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup
			Pelatihan dan pemberian alat untuk penanganan/Pengolahan Limbah SPPG	Dinas Pertanian dan Pangan
			Monitoring Kali Bersih sebagai Sumber Protein dan Bersih (KINASIH)	Dinas Peternakan dan perikanan
3	**Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data**	**Pemenuhan Akses Pendidikan dan Kesehatan bagi seluruh masyarakat;**	Pembangunan MCK, TPB, Pagar Sekolah dan Pavingisasi	Dinas Pendidikan
			Pengadaan Meja/Kursi siswa, Papan Tulis	Dinas Pendidikan
			Pembinaan dan pelaksanaan ajang talenta peserta didik (OSN, O2N, FLS2N dan Festival Seni Tradisi Khas)	Dinas Pendidikan

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
			Pelaksanaan Program Nasional berupa pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di satuan pendidikan SD (DAK Non Fisik)	Dinas Pendidikan
			1) Fasilitasi Pelaksanaan ProASN Reviltalisasi Satuan Pendidikan (Pendataan/usulan, pelaksanaan program, evaluasi/pelaporan); 2) Fasilitasi pelaksanaan Program MBG (Evaluasi sekolah sasaran, koordinasi dan kunsolidasi); 3) Adovokasi Pelaksanaan Wajib Bejar 13 tahun dan atau peningkatan Partisipasi Sekolah/ Penaganan ATS	Dinas Pendidikan
			1) Pendampingan/ asesment pada Peserta Didik Penyandang Desabilitas; 2) Penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN)	Dinas Pendidikan
			Bantuan perlengkapan sekolah kepada masyarakat Miskin bagi siswa yang memenuhi syarat (DTSEN)	Dinas Pendidikan
			Rehabilitasi Sedang/Berat MCK, TPB, Pagar Sekolah dan Pavingisasi	Dinas Pendidikan
			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas sesuai SNP	Dinas Pendidikan
			1) Pemberian Bantuan/ Beasiswa Miskin bagi siswa yang memenuhi syarat (DTSEN) dan belum menerima bantuan dari Pusat; 2) Pemberian Bantuan/ Beasiswa PDPD dalam rangka menuhan peralatan/ alat bantu pembelajaran desabilitas	Dinas Pendidikan
			Pembangunan MCK, TPB, Pagar Sekolah dan Pavingisasi SMP	Dinas Pendidikan
			Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas sesuai SNP	Dinas Pendidikan
			Rehabilitasi Sedang/Berat MCK, TPB, Pagar Sekolah dan Pavingisasi SMP	Dinas Pendidikan
			Penyediaan Meja/ Kursi Siswa Satuan Pendidikan SMP	Dinas Pendidikan
			1) Pemberian Bantuan/ Beasiswa Miskin bagi siswa yang memenuhi syarat (DTSEN) dan belum menerima bantuan dari Pusat; 2) Pemberian Bantuan/ Beasiswa PDPD dalam rangka menuhan peralatan/ alat bantu pembelajaran desabilitas	Dinas Pendidikan
			Fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan ajang talenta peserta didik (OSN, O2N, FLS2N dan Festival Seni Tradisi Khas)	Dinas Pendidikan
			Pelaksanaan Program Nasional berupa pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di satuan pendidikan SMP (DAK Non Fisik)	Dinas Pendidikan

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
			1) Fasilitasi Pelaksanaan ProASN Reviltalisasi Satuan Pendidikan (Pendataan/usulan, pelaksanaan program, evaluasi/pelaporan); 2) Fasilitasi pelaksanaan Program MBG (Evaluasi sekolah sasaran, koordinasi dan kunsolidasi); 3) Adovokasi Pelaksanaan Wajib Bejar 13 tahun dan atau peningkatan Partisipasi Sekolah/ Penaganan ATS	Dinas Pendidikan
			1)Pendampingan/asesment pada Peserta Didik Penyandang Desabilitas; 2) Penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN)	Dinas Pendidikan
			Bantuan perlengkapan sekolah kepada masyarakat Miskin bagi siswa yang memenuhi syarat (DTSEN)	Dinas Pendidikan
			Pembangunan MCK; Tembok Pengaman Bangunan, Pagar Sekolah	Dinas Pendidikan
			pengadaan Meja/Kursi Siswa PAUD, Loker (Penyimpanan Perlengkapan Invidu) siswa PAUD	Dinas Pendidikan
			Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/ BOP PAUD) di satuan pendidikan PAUD (DAK Non Fisik)	Dinas Pendidikan
			1) Fasilitasi Pelaksanaan ProASN Reviltalisasi Satuan Pendidikan (Pendataan/usulan, pelaksanaan program, evaluasi/pelaporan); 2) Fasilitasi pelaksanaan Program MBG (Evaluasi sekolah sasaran, koordinasi dan kunsolidasi); 3) Adovokasi Pelaksanaan Wajib Bejar 1 Tahun Pra SD dan atau peningkatan Partisipasi Sekolah/ Kesiapan Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun Pra SD	Dinas Pendidikan
			Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) PAUD sesuai SNP bagi Satuan PAUD Swasta yang memenuhi Swasta	Dinas Pendidikan
			1) Pendampingan/asesment pada Peserta Didik Penyandang Desabilitas; 2) Penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN)	Dinas Pendidikan
			Penyediaan alat pembejaran peserta didik PAUD (Buku Gambar/Mewarna; ATK; Kerta lipat) diutamakan pada Peserta didik tidak mampu	Dinas Pendidikan
			Rehabilitasi MCK; Tembok Pengaman Bangunan, Pagar Sekolah yang memadahi	Dinas Pendidikan
			Rehabilitasi Ruang Kelas Satuan PAUD sebagai upaya perluasan akase dan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah PAUD	Dinas Pendidikan

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
			Pemberian Bantuan/ Beasiswa Miskin bagi siswa yang memenuhi syarat (DTSEN) dan belum menerima bantuan dari Pusat sebagai Program Aksi Penanganan ATS melalui Pendidikan Non Formal/ Keseteraan (PAKET A, B dan C)	Dinas Pendidikan
			1) Pelaksanaan Program Nasional berupa pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/ BOP PNF) di satuan pendidikan Non Formal/ Keseteraan (DAK Non Fisik); 2) Pemberian Bantuan BOP MADIN yang bersumber dari BK Provinsi dan Sharing Kabupaten; 3) Penyediaan BOSDA Satuan Pendidikan Non Formal (PKBM dan SKB)	Dinas Pendidikan
			Adovokasi Pelaksanaan Wajib Bejar 13 tahun dan atau peningkatan Partisipasi Sekolah/ Penanganan ATS melalui pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C)	Dinas Pendidikan
			Pembangunan Ruang Kelas Satuan Non Formal (termasuk MADIN) sebagai upaya perluasan akase dan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah PAUD	Dinas Pendidikan
			Rehabilitasi Ruang Kelas Satuan Non Formal (termasuk MADIN) sebagai upaya perluasan akase dan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah PAUD	Dinas Pendidikan
			1) Peningkatan Kompetensi dan Kepemimpinan Guru/ Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah PAUD, SD dan SMP) (2) Fasilitasi Peningkatan Kualifikasi Guru khususnya Guru PAUD (RPL); 3) Fasilitasi Sertifikasi Guru (PPG Guru tertentu)	Dinas Pendidikan
			1) Pemberian tambahan Penghasilan Guru Swasta (SD/MI, SMP/MTs); 2) Pemberian tambahan penghasilan Guru PAUD	Dinas Pendidikan
			1.Rehabilitasi puskesmas Bodag 2.Pengadaan Air Bersih Puskesmas Slawe,Ngulankulon dan Panggul 3.Pengadaan IPAL di Puskesmas Suruh 4.Pengadaan Pusling Perairan Puskesmas Munjungan,Watulimo dan Panggul 5.Pengadaan Pusling roda 4 Puskesmas Panggul,Bodag,Watulimo,Slawe,Kampak,Pule,Karangan,Gandusari,Durenan,Baruharjo,Pogalan,Ngulankulon,Tugudan Bendungan	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
			1.Rehab Pustu Masaran 2.Rehab Pustu Sukorame 3.Rehab pustu Karangturi 4.Karangtengah 5.Wonanti 6.Depok 7.Gading 8.Buluagung 9.Senden 10.Pakel 11.Watuagung 11.Tasikmadu 12.Masaran 13.Dompyong 14.Karangturi 15.Penambahan ruang LABKESMAS	
			Rehab puskesmas Dongko	
			Pengadan alat kesehatan Puskesmas	
			Pengadaan/Pembelian Obat, BMHP PKD untuk 22 Puskesmas dan BMHP CKG, Obat tindak lanjut hasil pemeriksaan CKG	
			1. Pengadaan Pangan diet khusus (PDK) untuk balita bermasalah gizi dan bumil 2. Pengadaan Pangan olahan keperluan medis khusus (PKMK) untuk balita stunting 3. Pelaksanaan PMT Lokal 4. Bimtek Program Gizi 5. Monev pelayanan program gizi 6. Pelaksanaan Buka Tudung saji 7. Bimtek Pengelolaan Makanan pada Ahli Gizi di SPPG	
			Pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran Peserta PBPU & BP Pemda dan Pembayaran Jasa Klaim Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin	
			Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	
			Insentif Keluarga Sehat Yang Beruntung	
			Peningkatan kapasitas Kader Posyandu, Poskestren, Desa Siaga,dan SBH (Saka Bakti Husada)	
		Penguatan sistem perlindungan sosial adaptif berbasis Satu Data	Pengelolaan Data Kemiskinan	Dinas Sosial dan PPPA
			Pengelolaan dan penguatan portal Satu Data Trenggalek	Dinas Komunikasi dan Informatika
			1. Pembangunan sistem pertukaran data/integrasi data menggunakan API 2. Peningkatan Kapasitas Admin Perangkat Daerah untuk memperkuat SDM dalam pengelolaan data statistik sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program beasiswa pendidikan tinggi (STEM dan Bidikmisi)	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
		Optimalisasi Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja & Lingkungan serta inovasi pembiayaan;	Penyusunan KUA dan PPAS	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Penyusunan dan penetapan APBD dan Perkada Penjabaran APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Penyusunan rancangan Perda dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Fasilitasi penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, pendampingan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD untuk meningkatkan akuntabilitas dan opini BPK.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Penatausahaan BMD	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
			Identifikasi status dan kondisi Barang Milik Daerah BMD serta pengamanan administrasi untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum atas Barang Milik Daerah.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		Penguatan Kapasitas ASN & Aparatur Pemerintah Desa;	Membangun sistem pemutakhiran data mandiri terintegrasi untuk mendorong percepatan ASN menjadi smart ASN yang adaptif terhadap teknologi informasi dan mahir mengoperasikan platform digital	Badan Kepegawaian Daerah
			Penguatan sistem informasi kepegawaian ASN dengan berfokus pada integrasi data akurat, peningkatan efisiensi layanan administrasi kepegawaian dan pengolahan data real time untuk pengambilan kebijakan dalam bidang kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah
			Akuisisi dan retensi talenta	Badan Kepegawaian Daerah
			Pemberian bantuan beasiswa tugas belajar PNS	Badan Kepegawaian Daerah
			Pengembangan Kompetensi ASN melalui Corporate University	Badan Kepegawaian Daerah
			Pembinaan / peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes / BPD (yang Baru) dan Operator Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Reformasi perizinan dan perluasan perlindungan kekayaan intelektual;	Fasilitasi Pendaftaran Merk	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
			Sertifikasi halal non budgeter	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
			Rekomendasi ijin Usaha Simpan Pinjam	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Fasilitasi NIB	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Rekomendasi ijin usaha perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan
			Sosialisasi KI kepada pelaku ekraf kerjasama dengan kemenkumham	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Fasiitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual serta pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku ekonomi kreatif seperti Hak Cipta (lagu, deain grafis, motif batik), merek dagang (kuliner, fashion, kriya), KI komunal (turonggo yakso, lodho, batik khas trenggalek)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Pelayanan perizinan secara elektronik dan terintegrasi, jemput bola perizinan dan layanan di Mal pelayanan Publik (MPP)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
			1. Fasilitasi IGA / IID a. Melaksanakan Evaluasi Hasil Indeks-Indeks Inovasi b. Menyusun SK Pendamping dan Pengelola Inovasi Daerah c. Melaksanakan Bimtek dan Pendampingan Inovasi Daerah (Penyusunan Proposal dan Bukti Dukung Inovasi) d. Melaksanakan Desk, kunjungan dan Pendampingan Pelaporan Inovasi e. Melaksanakan Fasilitasi IID/IGA lainnya (Presentasi, kunjungan, Penghargaan)) 2. Melaksanakan Fasilitasi Pembinaan Inovasi Daerah a. Penerbitan Hak cipta Inovasi b. Kunjungan dan Penyusunan PKS Replikasi Inovasi untuk 3 Kab/Kota c. Penyusunan Peraturan bupati Terkait Penerapan Inovasi d. Promosi dan kampanye Inovasi melalui publikasi Inovasi di Media Online e. Penyusunan Laporan Monev Inovasi Kerjasama dengan ABCGM f. Integrasi Inovasi Digital melalui Pameran Inovasi atau website Integrasi Inovasi g. Pembuatan Bukti Dukung Bersama untuk IGA 2027 (Bimtek, Monev, Regulasi, Replikasi, Publikasi, Integrasi) h. Penyusunan Laporan Fasilitasi Pembinaan Inovasi 3. Melaksanakan Fasilitasi Kompetisi Inovasi di Provinsi a. Pemilihan Inovasi yang akan dikirimkan ke kompetisi b. Fasilitasi Pengiriman Proposal dan Bukti Dukung Inovasi yang akan dikirimkan ke kompetisi c. Fasilitasi Tahapan kompetisi inovasi (Presentasi, Kunjungan Lapangan, Penghargaan dan lainnya) 4. Melaksanakan Fasilitasi Kompetisi Inovasi di Kabupaten a. Penyusunan Pedoman b. Penyusunan SK Juri c. Sosialisasi dan Promosi Lomba d. Bimtek Penyusunan Proposal dan Bukti Dukung Inovasi e. Penjaringan Inovasi per kategori (Pendidikan, Kesehatan, OPD, Kecamatan) f. Penilaian Administrasi / Indeks Inovasi Lembaga g. Penilaian Presentasi Inovasi h. Penilaian Kunjungan lapangan Inovasi i. Penyerahan Hadiah (uang pembinaan, Piala, Sertifikat, Hak Cipta, dll)	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
		Penguatan Tata Kelola Perencanaan Berbasis Riset dan Data;	Melaksanakan Forum Konsultasi Publik	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Melaksanakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Melaksanakan Musrenbang Kabupaten	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Mengkoordinir Koordinasi Bahan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Mengkoordinir dan Menyusun Penetapan Dokumen Perkada RKPD 2028 dan Perubahan RKPD 2027	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
			Mengkoordinir dan Menyusun Laporan Pengendalian Evaluasi Berkala atas Pelakasanaan RPJMD, RKPD, Dana Alokasi Khusus	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Mengkoordinir Koordinasi Bahan Pelaksanaan Musrena Keren Kecamatan	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Melaksanakan Musrena Keren Kabupaten	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Evaluasi Renja Perangkat Daerah Per Triwulan lingkup bidang PPM	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Monitoring evaluasi hasil Musrenbang dan Musrena Keren	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			FGD Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah lingkup bidang PPM	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Verifikasi dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup bidang PPM	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Menyusun Rencana Aksi Tahunan Kemiskinan	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan daerah (LP2KD)	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Menyusun Jurnal Kemiskinan	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Menyusun Laporan OPPKE (Optimalisasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem)	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Menyusun Laporan RB Tematik Kemiskinan	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Per Triwulan	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Menyusun Rencana Aksi Tahunan Program Penurunan Stunting	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Keterisian aksi web Bangda konvergensi stunting	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Evaluasi Program Penurunan Stunting Per Triwulan	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
			Menyusun Laporan Germas	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Evaluasi Pelaksanaan GERMAS per semester	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			- Menyusun RAD PGBPSDL (Rencana Aksi daerah Pangan dan Gizi Berbasis Sumber Daya Lokal) tahun 2026-2029;- Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi guna sinergitas program RAD PGBPSDL tahun 2026-2029	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			- Fasilitasi menu musrenbang dan pokir; - Verifikasi usulan musrenbang dan pokir; - Fasilitasi usulan program/ kegiatan dalam forum Musrenbangprov; - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RKPD tiap Triwulan; - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bersumber dana Pajak Rokok dan DBHCHT; - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan usulan prioritas Musrenbang lingkup bidang perekonomian dan SDA; - Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan dengan pemerintah pusat dan provinsi	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 3 pilar pembangunan ekonomi hijau yang tertuang dalam dokumen Peta Jalan Ekonomi Hijau Kabupaten Trenggalek; - Fasilitasi perhitungan Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Trenggalek. - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program prioritas RPJMD lingkup perekonomian dan SDA	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			- Fasilitasi usulan program/ kegiatan Peti Koin Bermantra kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur; - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Peti Koin Bermantra dan APP; - Pendampingan kelompok sasaran Program Peti Koin Bermantra oleh fasilitator;	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			- Fasilitasi Forum TSP/ CSR; - Fasilitasi dan koordinasi guna mensinergikan kegiatan perangkat daerah dengan Forum TSP/ CSR; - Fasilitasi pelaporan TSP/ CSR kepada Bappeda Provinsi Jawa Timur; - Pendampingan pelaksanaan teknis program CSR.	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Penyusunan dokumen Inventarisasi Emisi GRK 2018-2025	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Penyusunan dokumen roadmap Perwujudan Program Prioritas RPJMD sektor lingkungan hidup dan sumber daya air	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
			Inventariasi data dan analisis pembentukan kebun raya daerah	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Fasilitasi identifikasi kawasan kumuh kewenangan kabupaten	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan tahunan (RKPD)	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Penyusunan dokumen roadmap Perwujudan Program Prioritas RPJMD sektor keciptakaryaan, prasarana wilayah dan perhubungan, kebencanaan	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Monitoring pelaksanaan pembangunan daerah sektor lingkungan hidup dan sumber daya air	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Evaluasi capaian penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Trenggalek	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Penyusunan dokumen Evaluasi Akhir RKPD 2025 sektor lingkungan hidup dan sumber daya air	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Penyusunan dokumen Implementasi Penurunan Emisi GRK berbasis AKSARA	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Monitoring pelaksanaan pembangunan daerah sektor keciptakaryaan, prasarana wilayah dan perhubungan, kebencanaan	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Penyusunan dokumen Evaluasi Akhir RKPD 2025 sektor keciptakaryaan, prasarana wilayah, dan perhubungan, kebencanaan	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota atraktif di sektor keberlanjutan lingkungan	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Fasilitasi pelaksanaan SSK 2025-2029	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Fasilitasi sinkronisasi RPJMD, RKPD, dan Renja PD	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kota atraktif di sektor prasarana kota dan kebencanaan	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
			1. Melaksanakan Penyusunan 3 naskah kebijakan berbasis hasil riset (geopark, PUD, Sustainable City) : a. Menyusun Administrasi Riset (KAK, HPS, dll) b. Melaksanakan FGD Pendahuluan : Pemaparan Laporan Awal Riset c. Melaksanakan Desk data dan kunjungan lapangan terkait Topik Riset d. Melaksanakan FGD Antara : Pemaparan Laporan Perkembangan Riset e. Melaksanakan FGD Akhir : Pemaparan Laporan Akhir Riset f. Melaksanakan Penyusunan & Cetak Dokumen Riset g. Melaksanakan Publikasi Riset h. Menyusun Proposal Riset Tahun + 1	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			1. Melaksanakan Fasilitasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan : a. Melaksanakan Analisis IDSD Trenggalek b. Melaksanakan Bimtek Akses hibah riset dan publikasi jurnal ilmiah c. Melaksanakan MoU/PKS Sinergi Riset dan Inovasi d. Melaksanakan Fasilitasi litbangjirab lainnya (Penelitian eksternal, Pemakalah di pertemuan ilmiah, Monev Galaksi, Kompetisi Riset, dll	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
			Pemanfaatan Aplikasi berbasis data statistic dan spasial	Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah
		Peningkatan Pelayanan Publik yang Modern, Inovatif dan berbasis digital;	1. Penilaian Mandiri dan Fasilitasi Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2. Evaluasi dan Fasilitasi pelaksanaan SKM online 3. Fasilitasi pelaksanaan lomba inovasi pelayanan publik tingkat nasional (KIPP)	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
			Pemeliharaan aplikasi e link	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
			Jemput bola pendataan dan perekaman biometrik KTPel bagi ODGJ, sakit menahun, jompo, terlantar, disabilitas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Perekaman WKTP pemula di luar kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			- KIA go to school - Pelayanan KK, KTPel dan aktivasi IKD di luar kantor	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program Prioritas	Penjabaran Prioritas	Aksi	OPD
			- Pelayanan Jemput bola penerbitan akta kelahiran dan kematian - Kemitraan pelayanan akta kelahiran dengan Faskes (Pekka Tali) - Kemitraan pelayanan akta kematian dengan Desa/Kelurahan (Lyontin)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			- Jemput bola penertiban status perkawinan dan perceraian - Kemitraan dengan Pengadilan Agama (Kemasan Paduka Retak)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Jaringan Internet pada Perangkat Daerah dan UPTD Layanan Kesehatan	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Fasilitasi Pembuatan dan Pengembangan Aplikasi Layanan Publik sesuai dengan Arsitektur SPBE	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Evaluasi E-Government melalui penilaian Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Penyediaan lisensi pengelolaan dan keamanan website guna mendukung pelaksanaan layanan publik	Dinas Komunikasi dan Informatika

4.3.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD memiliki peran strategis dalam penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 sebagai salah satu wujud nyata pelaksanaan prinsip demokrasi dan aspiratif dalam proses pembangunan daerah. Pokir DPRD merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses dan jaring aspirasi, yang kemudian dirumuskan secara sistematis untuk disampaikan sebagai masukan resmi ke dalam perencanaan tahunan daerah. Kehadiran Pokir mencerminkan sinergi antara fungsi legislatif dan eksekutif dalam menyusun program yang benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, terutama di sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur dasar, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta perbaikan lingkungan permukiman. Lebih dari sekadar daftar usulan, Pokir DPRD menjadi instrumen penting untuk memperkuat legitimasi dan keterwakilan masyarakat dalam pembangunan. Dalam konteks RKPD 2027, keberadaan Pokir membantu mengisi celah perencanaan teknokratis dengan perspektif sosiopolitik yang lebih mendalam, khususnya dalam mengatasi ketimpangan antarwilayah dan kelompok sosial. Integrasi Pokir dengan prioritas pembangunan daerah juga mendorong penyusunan program yang lebih kontekstual, adil, dan inklusif. Oleh karena

itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek menempatkan Pokir sebagai bagian integral dalam proses perencanaan, sejalan dengan semangat kolaboratif dan partisipatif untuk mewujudkan pembangunan yang responsif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Menindaklanjuti hal tersebut maka hasil pokok-pokok pikiran DPRD disajikan pada **Lampiran II.**

4.3.5 Program Strategis Jangka Menengah Kabupaten Trenggalek

Sebagai bentuk inovasi dalam perencanaan, Kabupaten Trenggalek menetapkan 11 icon program prioritas sebagai induk dari proyek-proyek strategis kepala daerah. Icon ini tidak hanya menjadi simbol unggulan pembangunan, tetapi juga sarana konsolidasi lintas sektor untuk mendorong transformasi daerah secara menyeluruh. Kesebelas icon tersebut tersebar dalam tiga pilar utama pembangunan: Pilar Ekonomi Inklusif dan Regeneratif, Pilar Net Zero Carbon, dan Pilar SDM Kreatif dan Inovatif, yang secara bersama-sama memayungi berbagai intervensi pembangunan guna menjawab tantangan daerah serta mendukung agenda nasional dan global. Lebih dari sekadar program teknokratis, keberadaan 11 icon ini mengandung filosofi mendalam. Angka 11 melambangkan sinergi antara 1 visi besar dan 10 jari yang bekerja serempak, menggambarkan semangat gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Trenggalek yang adil dan makmur.

1. TGX Ekonomi Karbon

TGX Ekonomi Karbon merupakan ikon program prioritas Kabupaten Trenggalek yang menjadi komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mewujudkan pembangunan rendah emisi dan ketahanan terhadap perubahan iklim. TGX Ekonomi Karbon mencakup pendekatan integratif melalui pembangunan pertanian rendah karbon, pemanfaatan energi alternatif dari limbah ternak (biogas), konservasi sumber daya pesisir dan laut untuk mendukung blue carbon, serta pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat dalam skema Integrated Area Development (IAD).

Arah kebijakan TGX Ekonomi Karbon juga mencakup sektor transportasi ramah lingkungan melalui pembangunan jalur pedestrian, sepeda, dan sistem angkutan umum terpadu, serta pengolahan sampah menjadi energi atau bahan baku ekonomi sirkular. Dalam aspek kelembagaan sosial, TGX Ekonomi Karbon melibatkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan adat sebagai subjek dalam tata kelola karbon berbasis wilayah. Keseluruhan pendekatan ini sejalan dengan target-target SDG's seperti "Tanpa Kelaparan", "Energi Bersih dan Terjangkau", "Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan", "Ekosistem Daratan dan Laut", hingga

"Penanganan Perubahan Iklim". Dengan TGX Ekonomi Karbon, Trenggalek menempatkan setiap aktivitas pembangunan sebagai peluang untuk menurunkan emisi, memperkuat resiliensi daerah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau yang berkeadilan dan inklusi sosial.

Tabel IV.6. TGX Ekonomi Karbon

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Ekonomi Karbon	Percepatan penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon (NEK)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertanian	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 6 Energi Bersih dan Terjangkau Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Tujuan 14 Ekosistem Lautan Tujuan 15 Ekosistem Daratan
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Masyarakat	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perhubungan	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup	
	Pengembangan energi alternatif biogas dari kotoran ternak	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pertanian	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

2. TGX Rantai Nilai

TGX Rantai Nilai merupakan ikon program pembangunan ekonomi Kabupaten Trenggalek yang menjadi induk berbagai program lintas sektor

dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal secara holistik. Ikon ini mengembangkan sistem rantai nilai secara menyeluruh, dari produksi hingga hilirisasi, untuk komoditas unggulan daerah seperti porang, patin, kayu, tembakau, bambu, kopi, kakao, cengkeh, dan produk peternakan seperti daging, telur, dan susu. Integrasi ini mencakup penyediaan sarana produksi pertanian, perlindungan dari risiko bencana sektor pangan, pengolahan dan pemasaran hasil, serta penguatan ekosistem industri lokal melalui penyediaan infrastruktur seperti Rumah Pemotongan Hewan (RPH), Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU), Rice Milling Unit (RMU) , bed dryer, vertikal dryer, cold storage, hingga revitalisasi sentra industri dan kawasan industri Watulimo.

Arah kebijakan TGX Rantai Nilai didesain untuk memastikan bahwa kebutuhan dan permintaan masyarakat Kabupaten Trenggalek dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan ekspansi pasar ke luar daerah. Model ini menjamin kemandirian pangan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis lokal dengan pendekatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Komoditas atau usaha yang bersifat ekstraktif akan dikelola dan diupayakan menuju sistem regeneratif, selaras dengan prinsip Nature-based Solutions (NBS). Pemerintah juga akan menciptakan intervensi baru bila permintaan strategis belum dapat dipenuhi dari sumber lokal. Dukungan kelembagaan seperti BUMDes, koperasi desa, serta BUMD menjadi penggerak utama dalam hilirisasi dan distribusi produk unggulan. Dengan demikian, TGX Rantai Nilai menjadi fondasi utama dalam memperkuat kedaulatan pangan, memperluas kesempatan kerja, dan membangun ekonomi daerah yang inklusif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Tabel IV.7. TGX Rantai Nilai

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Rantai Nilai	Optimalisasi produksi pertanian, peternakan dan perikanan untuk swasembada pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 14 Ekosistem Lautan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertanian	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pangan	

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
	Hilirisasi produk pertanian, peternakan, perikanan	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	koperasi, usaha kecil dan menengah	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab Tujuan 14 Ekosistem Lautan Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	koperasi, usaha kecil dan menengah	
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pertanian	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Pangan	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perindustrian	
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Keuangan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pekerjaan Umum	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kelautan dan Perikanan	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah	

3. TGX Halal

TGX Halal merupakan ikon program strategis Kabupaten Trenggalek yang diarahkan untuk membangun ekosistem produk dan layanan halal yang higienis, menguntungkan, berbasis lokal, dan memiliki sertifikasi lengkap. Ikon ini bertujuan menciptakan kepercayaan pasar terhadap produk Trenggalek dengan standar mutu dan kehalalan yang terjamin, sekaligus membuka peluang pasar domestik maupun global melalui penguatan sektor pangan, perdagangan, kesehatan, dan investasi. TGX Halal mengintegrasikan

berbagai intervensi lintas sektor untuk memastikan rantai pasok halal, mulai dari hulu hingga hilir, dapat tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan.

Ikon program ini memberikan pedoman arah kebijakan yang mendorong pemetaan kebutuhan pasar untuk menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, peningkatan kapasitas Juru Sembelih Halal (Juleha) dan optimalisasi fungsi Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) serta Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) sebagai simpul utama jaminan kehalalan dan kebersihan. Dalam aspek perdagangan dan industri, dilakukan pemetaan kebutuhan pasar serta fasilitasi sertifikasi halal, PIRT, NIB, dan BPOM bagi pelaku UMKM. Optimalisasi ternak lokal juga dipadukan dengan penguatan ekosistem penanaman modal dan penyediaan farmasi serta makanan minuman yang aman dan berkualitas. Dengan pendekatan menyeluruh ini, TGX Halal memperkuat posisi Kabupaten Trenggalek sebagai pusat produksi halal yang tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga mendukung konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan SDG's.

Tabel IV.8. TGX Halal

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Halal	Higienis, Menguntungkan, Produk Lokal, Bersertifikasi Lengkap	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Perdagangan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pertanian	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, usaha kecil dan menengah	
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kesehatan	
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal	
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perindustrian	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian	

4. TGX Kerja

TGX Kerja merupakan ikon program strategis Kabupaten Trenggalek yang mengedepankan transformasi sektor ketenagakerjaan dan perlindungan sosial untuk mewujudkan masyarakat yang produktif, sehat, dan berdaya saing. Ikon ini dirancang untuk menjawab tantangan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan akses kerja melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor yang terintegrasi dalam sistem jaminan sosial dan peningkatan kapasitas angkatan kerja. TGX Kerja memfokuskan pada perluasan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebagai fondasi perlindungan dasar, terutama bagi pekerja informal dan keluarga miskin.

Di sisi lain, program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi, siap ditempatkan di sektor formal maupun melalui skema kerja ke luar negeri tanpa biaya (program 0 Rupiah). Pendekatan padat karya dan matching demand-supply tenaga kerja berbasis perencanaan ketenagakerjaan menjadi pengungkit lapangan kerja baru yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Melalui pemberdayaan sosial, TGX Kerja juga menyasar generasi muda dari keluarga miskin (second generation) untuk terlibat dalam kerja nyata berbasis keterampilan dan wirausaha. Dengan skema menyeluruh ini, TGX Kerja menjadi tulang punggung pengentasan kemiskinan dan penguatan pekerjaan layak secara sistemik, sejalan dengan tujuan SDG's untuk "Tanpa Kemiskinan", "Kehidupan Sehat dan Sejahtera", serta "Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi".

Tabel IV.9. TGX Kerja

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Kerja	Peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tenaga Kerja	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial	
	Perluasan kesempatan kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tenaga Kerja	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tenaga Kerja	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tenaga Kerja	
	Pengentasan kemiskinan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sosial	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sosial	

5. TGX Pariwisata

TGX Pariwisata merupakan ikon strategis pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Trenggalek yang berorientasi pada pariwisata kolaboratif, inklusif, dan berbasis kearifan lokal. Ikon ini menempatkan pariwisata tidak hanya sebagai sektor ekonomi semata, tetapi sebagai motor integratif yang mendorong pelestarian kebudayaan, pemberdayaan ekonomi kreatif, pengembangan infrastruktur, dan perlindungan lingkungan. Melalui program-program prioritas seperti pelestarian dan pengelolaan kebudayaan serta pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, TGX Pariwisata mendorong kebudayaan lokal menjadi daya tarik wisata unggulan yang memperkuat identitas daerah sekaligus menciptakan nilai ekonomi.

Transformasi ini ditopang oleh pengembangan Super Apps pariwisata terintegrasi, kalender event daerah, sistem tiket terpadu (One Ticket All), serta peningkatan amenitas dan aksesibilitas destinasi, termasuk perbaikan jalan menuju kawasan wisata. Selain itu, sektor ini juga dipadukan dengan pengelolaan persampahan di destinasi serta didukung oleh penyebarluasan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses melalui program pengelolaan informasi dan komunikasi publik agar menciptakan lingkungan wisata yang bersih dan berkelanjutan. TGX Pariwisata juga menjadi agregator pertumbuhan UMKM, IKM, dan pelaku ekonomi kreatif lokal, menjadikan pariwisata sebagai wahana tumbuh bersama berbagai sektor. Keberhasilannya diukur melalui peningkatan PAD dari pariwisata, peningkatan kunjungan wisatawan, dan peningkatan rata-rata pengeluaran wisatawan. Ikon ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian SDG's, khususnya tujuan Industri, Inovasi dan Infrastruktur, serta Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

Tabel IV.10. TGX Pariwisata

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Pariwisata	Pariwisata Kolaboratif	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Kebudayaan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur Tujuan 11 Kota dan permukiman yang berkelanjutan Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab Tujuan 15 Ekosistem Daratan Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pariwisata dan ekonomi kreatif	
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pariwisata	
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pariwisata	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi dan Informatika	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup	

6. TGX.go.id

TGX.go.id merupakan ikon program transformasi digital Kabupaten Trenggalek yang berfokus pada optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, efisien, dan terintegrasi. Ikon ini menjadi landasan penguatan ekosistem digital pemerintahan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengelolaan aplikasi informatika dan informasi komunikasi publik. Melalui program pengelolaan aplikasi informatika, Pemerintah Kabupaten Trenggalek memperkuat sistem aplikasi terintegrasi (Super Apps) yang menghubungkan berbagai layanan lintas sektor ke dalam satu platform digital, serta menyediakan layanan Call Center yang responsif dan ramah masyarakat. Selain itu, digitalisasi ini didukung oleh penyebarluasan informasi publik

yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses melalui program pengelolaan informasi dan komunikasi publik. TGX.go.id merupakan tulang punggung modernisasi pelayanan daerah dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), terutama pada aspek Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Tabel IV.11. TGX.co.id

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX.go.id	Optimalisasi digitalisasi pelayanan publik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika	Kemitraan untuk mencapai tujuan
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Komunikasi dan Informatika	

7. TGX Atraktif

TGX Atraktif merupakan salah satu icon program prioritas yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur daerah untuk menciptakan kawasan yang layak huni, rendah karbon, dan berkelanjutan. Program ini mencakup pembangunan sistem drainase yang baik, penyediaan ruang terbuka hijau, pemenuhan infrastruktur dasar permukiman, hingga tata ruang yang mendukung gaya hidup ramah lingkungan (low carbon livelihood). Untuk itu, pembangunan Kabupaten Trenggalek sebagai kota atraktif juga akan didukung dengan pembangunan sarana-prasarana angkutan umum, pedestrian, jalur sepeda, dan sarpras non-car sebagai upaya mendukung mobility-hub. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat daya saing dan pendapatan daerah melalui pengelolaan ruang yang tertata dan estetis. Lebih dari sekadar membangun fisik kota, program ini juga dimulai dari penguatan kelembagaan dan penganggaran yang visioner dan konsisten, serta dilandasi oleh Konsep KRESNA filosofi lokal yang terinspirasi dari tokoh pewayangan Kresna, pemimpin yang jujur, adil, dan bijaksana.

Konsep ini tidak hanya bermakna simbolik, tetapi juga memiliki dasar geografis, karena bentuk wilayah Kabupaten Trenggalek menyerupai mahkota Kresna sebagai sumbu filosofis imajiner. Dengan semangat ngawula marang kawulane gusti mengabdi kepada rakyat sebagai amanah Tuhan, konsep ini menjadi arah moral dan kultural bagi pemerintahan dan pembangunan kota yang tidak hanya fungsional dan estetis, tetapi juga berakar pada nilai kebijaksanaan lokal dan keadilan sosial.

Gambar IV.2
Konsep Kresna dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Trenggalek



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Trenggalek, 2025

Makna KRESNA dalam pembangunan Kota Atraktif Trenggalek semakin kuat ketika dikaitkan dengan empat pusaran filosofis dan geografis yang membentuk orientasi dan identitas ruang daerah: Masjid, Gunung Wilis, Alun-alun, dan Segara Kidul. Masing-masing titik merepresentasikan dimensi fundamental dalam pembangunan: Masjid sebagai pusat spiritual dan moralitas publik; Gunung Wilis sebagai simbol kekuatan alam dan kearifan ekologis; Alun-alun sebagai ruang demokrasi dan kebersamaan sosial; serta Segara Kidul sebagai lambang keterbukaan terhadap perubahan, budaya maritim, dan relasi global. Dalam kerangka Kota Atraktif, keempat pusaran ini membentuk sumbu pembangunan yang tidak hanya fungsional tetapi juga filosofis, mempertemukan nilai langit (spiritualitas), bumi (ekologi), manusia (sosial), dan air (keterbukaan dan keberlanjutan). Gagasan besar ini kemudian diwujudkan secara konkret melalui icon program Kabupaten Trenggalek Kota Atraktif, yang tidak hanya membangun kota dalam arti fisik, tetapi juga menanamkan nilai dan makna dalam setiap ruang yang diciptakan mewujudkan Trenggalek sebagai kota yang bernafas dari akar budayanya, hidup dari kearifan lokalnya, dan tumbuh untuk masa depan yang lestari. Secara lebih lanjut telah dipetakan icon Kabupaten Trenggalek Kota Atraktif dengan program prioritas pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.12. TGX Atraktif

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Atraktif	Penanganan Banjir/Genangan Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Peningkatan aksesibilitas kawasan perkotaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
	Pembangunan dan Preservasi Jalan Antar Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
	Pembangunan Kota Atraktif	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional terintegrasi	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Perhubungan	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
	Pengembangan Mobility Hub	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Perhubungan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Penyediaan Rumah Layak Huni untuk Korban Bencana dan MBR	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Penanganan Kawasan Kumuh	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Pengadaan Tanah Jalan Lintas Selatan (JLS)	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Pertanahan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 5 Kesetaraan Gender

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
				Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
	Pemenuhan Persyaratan Kesehatan pada SPAM untuk Air Minum Aman Perkotaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Pengembangan dan revitalisasi jaringan irigasi pendukung swasembada pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Digitalisasi berbasis user experience (UX)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Komunikasi dan Informatika	Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan
	Early Warning System (EWS) dan dashboard bencana trace-able	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Trantibum	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

8. TGX Lestari

TGX Lestari merupakan ikon pembangunan Kabupaten Trenggalek yang mengusung prinsip keberlanjutan lingkungan, pelestarian ruang hidup, serta penguatan ketahanan ekologi melalui pendekatan multisektor. Ikon ini diarahkan untuk menjawab tantangan penurunan daya dukung lingkungan, keterbatasan ruang hidup layak, serta risiko bencana akibat perubahan iklim dan degradasi ekosistem. TGX Lestari hadir sebagai kerangka pembangunan yang memadukan pengelolaan lingkungan, konservasi ruang dan biodiversitas, serta penguatan kearifan lokal. Ruang lingkup program TGX Lestari mencakup penguatan sistem sanitasi aman melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), pengembangan Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional, serta sistem pengelolaan sampah berbasis desa yang terintegrasi. Penataan ruang disempurnakan melalui percepatan penyusunan RTRW dan RDTR sebagai arah pembangunan yang adaptif dan resisten terhadap tekanan ekologi. Di sisi lain, konservasi sumber daya alam dilakukan melalui pelestarian hutan, mikro forest, mata air, sempadan sungai, serta pembentukan kebun raya. Pendekatan ini didukung oleh program riset, inovasi, dan identifikasi geosite sebagai landasan pembentukan geo-park serta penguatan identitas ekologis daerah.

Selain itu, TGX Lestari juga mengintegrasikan aspek sosial-budaya melalui pelestarian situs prasejarah, gotong royong dan ritual adat, hingga pengembangan wisata berbasis keanekaragaman hayati seperti Sapi Nggalekan. Dengan sinergi antara sektor lingkungan hidup, pertanian, kebudayaan, riset dan infrastruktur, TGX Lestari menjadi pilar utama dalam mewujudkan Trenggalek sebagai kabupaten yang tangguh iklim, ramah lingkungan, dan berbasis warisan budaya. Ikon ini turut mendukung pencapaian SDGs terutama dalam penanganan perubahan iklim, keberlanjutan permukiman, ekosistem daratan, serta konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Tabel IV.13. TGX Lestari

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Lestari	Pembangunan IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) untuk Sanitasi Aman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Trantibum	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
	Penguatan pengelolaan sampah desa	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
				Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Tujuan 15 Ekosistem Daratan
	Pembangunan TPST	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Pengelolaan sampah	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan Tujuan 15 Ekosistem Daratan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup	
	Penyelesaian Penyusunan RTRW dan RDTR	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	MICRO FOREST (RTH)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Lingkungan Hidup	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Tujuan 15 Ekosistem Daratan
	Program penghargaan LH untuk masyarakat dengan andalan adipura desa / RT / RW	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Lingkungan Hidup	Tujuan 15 Ekosistem Daratan
	Konservasi hutan dan perluasan sekuestrasi	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Tujuan 15 Ekosistem Daratan
	Konservasi situs prasejarah dan sejarah	PROGRAM PELESTARIAN DAN	Kebudayaan	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
		PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Konservasi sumber mata air	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Lingkungan Hidup	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Tujuan 15 Ekosistem Daratan
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup	
	Konservasi sungai dan sempadan sungai	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang
	Pembentukan hutan raya / kebun raya	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Lingkungan Hidup	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Tujuan 15 Ekosistem Daratan
	Konservasi kekayaan hayati dan biodiversity sampai terbitnya Indikasi Geografis (IG)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Lingkungan Hidup	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim Tujuan 15 Ekosistem Daratan
	Identifikasi geosite dan proses pembentukan geo-park	PROGRAM RISET DAN INOVASI	Penelitian dan Pengembangan	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
	Gotong royong dan ritual adat	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kebudayaan	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
	Pelestarian Sapi Galekan dengan konsep wisata	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pertanian	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

9. TGX Investasi Hijau

TGX Investasi Hijau merupakan ikon pembangunan Kabupaten Trenggalek yang mengedepankan model investasi berorientasi hijau dan inklusif melalui pemanfaatan aset publik, fasilitasi iklim usaha yang kondusif, serta inovasi dalam skema penanaman modal. Ikon ini bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan dan keadilan sosial.

Strategi utama TGX Investasi Hijau meliputi optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), di mana aset-aset publik dikelola secara produktif untuk mendukung kegiatan ekonomi dan layanan publik. Di sisi lain, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) didorong menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi lokal melalui bisnis strategis dan tata kelola yang profesional. Upaya ini diperkuat oleh program peningkatan kualitas pasar daerah sebagai pusat distribusi ekonomi masyarakat.

Salah satu inovasi dalam mengakselerasi investasi di Kabupaten Trenggalek adalah lelang investasi. Skema ini merupakan promosi investasi yang menawarkan aset/produk unggulan di daerah. Selain basis aset pemerintah, produk unggulan daerah, dapat pula berbentuk entitas bisnis/usaha yang sudah ada untuk mendapatkan dukungan investor dalam bentuk aksi korporasi (akuisisi, partnership, crowdfunding, dan sebagainya). Hal ini dapat mendorong konsolidasi sektor-sektor usaha di Kabupaten Trenggalek, pertama lebih kokoh dalam hal struktur kepemilikan usaha dan mencegah “economic overheat” karena banyaknya pelaku usaha yang sama di sektor yang sejenis. Kedua, konsolidasi terhadap mata rantai pengelolaan sektor usaha dari hulu hingga hilir.

TGX Investasi Hijau menciptakan sinergi antar-sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tangguh, ramah lingkungan, dan berpihak pada pelaku usaha lokal – sekaligus menjadi pilar penting dalam pencapaian SDGs terkait pekerjaan layak, inovasi industri, dan pengurangan kesenjangan.

Tabel IV.14. TGX Investasi Hijau

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Investasi Hijau	Optimalisasi PAD melalui Kerjasama Pemanfaatan dalam penggunaan aset daerah	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Keuangan	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Perdagangan	
	Peningkatan investasi melalui inovasi Lelang Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAl		
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Fasilitasi perijinan berusaha pertanian, perikanan, dan peternakan di OSS	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Perdagangan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kelautan	
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Perindustrian	

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan	

10. TGX Hidup Berkualitas

TGX Hidup Berkualitas adalah ikon pembangunan Kabupaten Trenggalek yang mencerminkan komitmen daerah untuk menjamin hak dasar masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik yang setara serta berkualitas. Ikon ini menjadi kerangka strategis untuk memastikan bahwa setiap individu di Trenggalek memiliki akses terhadap layanan dasar yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan mandat SDG's.

Di sektor pendidikan, TGX Hidup Berkualitas difokuskan pada fasilitasi Sekolah Rakyat, peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan melalui pembangunan SLB, perguruan tinggi, serta penguatan pendidikan vokasi seperti SMK Panggul. Fasilitasi Program Makan Bergizi (MBG) juga menjadi upaya untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan sehat. Pada sektor kesehatan, ikon ini mendorong peningkatan pelayanan primer dan rumah sakit daerah (RSUD Watulimo dan RSUD Panggul), termasuk integrasi layanan primer untuk menciptakan sistem kesehatan yang merata dan tanggap.

Selain itu, ikon ini juga mencakup penguatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi kelembagaan, peningkatan transparansi keuangan, dan pengawasan yang akuntabel—menjadi fondasi kelembagaan yang mendukung kualitas hidup masyarakat. Tak kalah penting, pengembangan inovasi daerah melalui riset, data, dan kolaborasi lintas sektor menjadi elemen kunci untuk mendorong layanan publik yang adaptif dan partisipatif. Dengan semangat kolaborasi, keberpihakan, dan transformasi, TGX Hidup Berkualitas menjadi pilar utama dalam membentuk Trenggalek sebagai daerah yang sehat, cerdas, adil, dan berdaya.

Tabel IV.15. TGX Hidup Berkualitas

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Hidup Berkualitas	Peningkatan aksesibilitas kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
	-Pembangunan / peningkatan RSUD Panggul, RSUD Watulimo (rumah sakit wisata), Puskesmas Suruh	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
	-Integrasi Layanan Primer kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
	Peningkatan aksesibilitas pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
	Peningkatan kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pendidikan	
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pendidikan	
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Pendidikan	
	-Fasilitasi Pembangunan / peningkatan SLB Panggul dan perguruan tinggi, SMK Panggul	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
	Fasilitasi Program MBG	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Kesehatan	

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
	Optimalisasi tata kelola pemerintahan	PROGRAM PENATAAN DESA	Pemberdayaan Desa	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 5 Kesetaraan Gender Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah	
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Kepegawaian	
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Keuangan	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah	
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		
	Pengembangan Inovasi Daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI	Penelitian dan Pengembangan	Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

11. TGX Inklusif

TGX Inklusif merupakan ikon transformasi sosial Kabupaten Trenggalek yang bertujuan menciptakan pembangunan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin. Ikon ini merepresentasikan visi daerah untuk mengatasi kemiskinan secara sistematis, menjamin kesetaraan hak, dan mendorong inklusi sosial sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Dalam hal pengentasan kemiskinan, TGX Inklusif mendorong sinergi program-program rehabilitasi sosial dan penguatan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) sebagai pendekatan berbasis komunitas dan empati sosial. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan kolaborasi antarsektor untuk menjangkau warga yang tersisih dari sistem kesejahteraan.

Ikon ini juga menekankan pada pengarusutamaan gender dan perlindungan hak kelompok rentan melalui berbagai layanan pendampingan kelompok rentan dan pemberdayaan perempuan. Pemajuan kebudayaan dan pengembangan kapasitas generasi muda melalui olahraga dan seni juga menjadi bagian dari strategi TGX Inklusif, guna menciptakan ruang tumbuh yang adil dan kreatif bagi semua kalangan.

Tabel IV.16. TGX Inklusif

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
TGX Inklusif	Pengentasan kemiskinan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sosial	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan Tujuan 5 Kesetaraan Gender Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial	
	Fasilitasi Sekolah Rakyat	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sosial	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan	
	Penguatan kesetaraan gender; perlindungan hak perempuan, anak dan disabilitas	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
	Optimalisasi Layanan Terapi Tumbuh Kembang Anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	kesehatan	
	Pemajuan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Kebudayaan	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Tujuan 11 Kota dan permukiman yang berkelanjutan
	Peningkatan generasi muda berprestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Kepemudaan dan Olahraga	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

ICON	PROYEK STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS	BIDANG URUSAN	KETERKAITAN DENGAN SDG's
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		

4.3.6 Sinkronisasi Prioritas Pembangunan 2027 Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek

Sinkronisasi tema dan prioritas pembangunan tahun 2027 antara pemerintah nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Trenggalek menjadi langkah strategis dalam memastikan kesinambungan arah pembangunan. Pemerintah pusat menetapkan tema pembangunan yang menitikberatkan pada Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri. Sejalan dengan itu, Provinsi Jawa Timur mengarahkan prioritas pembangunan pada Penguatan Pelayanan Dasar untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas. Kabupaten Trenggalek sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah perlu mengadaptasi kebijakan ini dengan tetap memperhatikan potensi lokal, seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata berbasis ekowisata melalui peran komunitas dan lintas sektor, guna mewujudkan Kota Atraktif.

Dalam konteks implementasi di Kabupaten Trenggalek, tema pembangunan tahun 2027 akan diselaraskan dengan prioritas nasional dan provinsi, dengan tetap mengedepankan menitikberatkan pada penguatan peran komunitas dan kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kota yang atraktif, inklusif, dan berkelanjutan**.** Pengembangan ekonomi kreatif dan kewirausahaan berbasis komunitas diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi lokal melalui optimalisasi potensi unggulan daerah, pemberdayaan pelaku usaha lokal, serta penguatan ekosistem ekonomi yang produktif dan inovatif. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur publik yang partisipatif menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas ruang hidup masyarakat melalui penguatan konektivitas wilayah, penyediaan infrastruktur dasar yang merata, penataan kawasan pusat yang hidup, serta pengembangan ruang publik yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya, penguatan tata kelola pemerintahan berbasis ekologi dan data menjadi landasan dalam menciptakan pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan responsif terhadap dinamika pembangunan, sekaligus memastikan pembangunan berjalan secara efektif, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, upaya pelestarian lingkungan hidup dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pembangunan daerah. Pendekatan ini diwujudkan melalui peningkatan partisipasi publik dalam pengelolaan lingkungan, pembangunan infrastruktur yang tangguh terhadap risiko bencana, serta penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi. Dengan terbangunnya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan Kabupaten Trenggalek mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Timur, sekaligus mempercepat terwujudnya visi Kabupaten Trenggalek yang adil, makmur, dan berdaya saing. Sinkronisasi prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Trenggalek disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.17.
Keterkaitan antara Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Kabupaten Trenggalek Tahun 2027

PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PRIORITAS PROV JATIM 2027	PRIORITAS KAB.TRENGGALEK 2027
PN 1 - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)	PP 8 — Jatim Harmoni PP 7 — Jatim Berkah-Amanah	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
PN 2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PP 2 — Jatim Kerja PP 4 — Jatim Agro PP 9 — Jatim Lestari	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
PN 3 - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	PP 2 — Jatim Kerja PP 3 — Jatim Akses	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif

PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PRIORITAS PROV JATIM 2027	PRIORITAS KAB.TRENGGALEK 2027
sentra produksi melalui peran aktif koperasi		Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
PN 4 - Memperkuat pembangunan Sumber daya manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas	PP 1 — Jatim Sejahtera PP 5 — Jatim Cerdas PP 6 — Jatim Sehat PP 8 — Jatim Harmoni	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
PN 5 - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PP 4 — Jatim Agro PP 9 — Jatim Lestari	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
PN 6 - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	PP 1 — Jatim Sejahtera PP 2 — Jatim Kerja	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
PN 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PP 7 — Jatim Berkah-Amanah PP 8 — Jatim Harmoni	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
PN 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai	PP 8 — Jatim Harmoni PP 9 — Jatim Lestari	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data

PRIORITAS NASIONAL (ASTA CITA)	PRIORITAS PROV JATIM 2027	PRIORITAS KAB.TRENGGALEK 2027
Masyarakat adil dan Makmur		

Adapun pemetaan dukungan program pada prioritas nasional (asta cita), Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Trenggalek dijabarkan pada **Lampiran III** yang tidak terpisahkan dari dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027. Dalam rangka percepatan perbaikan infrastruktur dan peningkatan aktifitas perekonomian Masyarakat Kabupaten Trenggalek melalui pemajuan bidang pariwisata, maka Kabupaten Trenggalek juga merencanakan Pembangunan daerah yang memanfaatkan sarana pinjaman dari pihak ketiga. Percepatan tersebut selain untuk kemajuan darah juga selaras dengan Asta Cita Pemerintah Pusat. Adapun rencana kegiatan yang ditetapkan yakni sebagai berikut :

Tabel IV.18.
Rencana Kegiatan yang bersumber dari Pinjaman Daerah

Bidang	Kegiatan
Pariwisata	1. Rehabilitasi Pantai Prigi 2. Rehabilitasi Hotel Prigi 3. Rehabilitasi Pantai Karanggongso 4. Rehabilitasi Goa Lowo 5. Penataan Hutan Kota
Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Pembangunan Saluran Drainase di Kawasan Perkotaan 2. Pembangunan Pedestrian dan Prasarana Perlengkapan Jalan di Kawasan Perkotaan
Pertanian	1. Pengembangan / Revitalisasi Dilem Willis

Sumber : RPJMD Kab. Trenggalek 2025 - 2029

4.3.7 Kebijakan Pendukung Capaian SPM

SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. SPM diterapkan pada urusan wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, Daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja. Salah satu bentuk upaya yang nyata dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang excellent, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan setiap

instansi pemerintah menyusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan urusan wajib yang menjadi tanggung jawabnya dan mewajibkan pemerintah daerah di Indonesia untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi potensi dan permasalahan setempat. Kebijakan ini dimanifestasikan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun realisasi capain SPM Kabupaten Trenggalek adalah sebagai berikut:

Tabel IV.19. Realisasi SPM Kabupaten Trenggalek

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2021	2022	2023	2024	2025
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Bidang Pendidikan							
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	93,83	93,24	94,94%	99,20%	99,72%
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan	100	100	87,23%	92,91%	95,64%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	99,38	99,30	91,14%	96,99%	99,73%
Bidang Kesehatan							
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	89,06%	86%	94,04%	100%	82,79%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	98,18%	92%	91,32%	100%	95,33%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	100,16%	97%	95,36%	100%	93,52%

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2021	2022	2023	2024	2025
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	88,58%	103%	99,93%	100%	93,77%
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	95,03%	106%	96,67%	100%	100%
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	80,41%	99%	100%	100%	100%
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	78,37%	95%	100%	100%	100%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	123,26%	77%	87,48%	100%	100%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	117,94%	104%	100%	100%	100%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100%	101%	100%	100%	100%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberculosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	31,99%	79%	100%	100%	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	102,20%	86%	98,16%	100%	86,82%
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok-pokok air minum sehari – hari	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	100%	100%	100%	100%
Bidang Ketrentaman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat							
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	0%	0%	99,42%	100%	100%

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2021	2022	2023	2024	2025
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
2.	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	96%	100%	100%	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	20%	100%	100%	100%
5.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%	100%	100%	99,13%	98,81%
Bidang Perumahan dan Permukiman							
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Persentase Warga Kabupaten korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kabupaten	Persentase warga Kbaupaten yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	100%	100%	100%
Bidang Sosial							
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar Panti	Jumlah warga kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	78,59%	100%	100%	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar Panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar Panti	Jumlah warga kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2021	2022	2023	2024	2025
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar Panti	Jumlah warga kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana	Jumlah korban bencana skala kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat dan pasca	100%	100%	96,67%	100%	100%

Sumber : Bappedalitbang, 2025

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/ petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun rencana aksi untuk mendukung pencapaian SPM pada Tahun 2027 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel IV.20.
Rencana Aksi Pendukung Pencapaian SPM
Kabupaten Trenggalek Tahun 2027

No	Bidang Urusan	Aksi (Layanan)	OPD
1	**Pendidikan**	**Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	
		Penyediaan Sarana, Prasarana pada Satuan PAUD yang Nyaman dan Aman (MCK, Sanitasi yang memadahi) dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Sekolah PAUD	Dinas Pendidikan
		1) Fasilitasi Pelaksanaan Akreditasi PAUD dalam rangka menuju PAUD Berkualitas/ Bermutu, 2) Fasilitasi/ Advokasi Sekolah Sehat (GSS)/ Konvergensi Stunting; 3) Penguatan POKJA Bunda PAUD Desa/ Kecematan; 4) Penguatan tata kelola Data Pokok Pendidikan (DAPODIK PAUD);	Dinas Pendidikan
		Penyediaan Bantuan Operasional Penyelenggaran (BOP) PAUD	Dinas Pendidikan

No	Bidang Urusan	Aksi (Layanan)	OPD
		1) Fasilitasi Pelaksanaan ProASN Reviltalisasi Satuan Pendidikan (Pendataan/usulan, pelaksanaan program, evaluasi/pelaporan); 2) Fasilitasi pelaksanaan Program MBG (Evaluasi sekolah sasaran, koordinasi dan kunsolidasi); 3) Adovokasi Pelaksanaan Wajib Bejar 1 Tahun Pra SD dan atau peningkatan Partisipasi Sekolah/ Kesiapan Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun Pra SD	Dinas Pendidikan
		Penyediaan Ruang Kelas Baru (RKB) Satuan PAUD sebagai upaya perluasan akases/ Peningkatan Daya Tampung dan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah PAUD	Dinas Pendidikan
		Penyediaan alat pembejaran peserta didik PAUD (Buku Gambar/Mewarna; ATK; Kerta lipat) diutamakan pada Peserta didik tidak mampu	Dinas Pendidikan
		Revitalisasi Sarana, Prasarana pada Satuan PAUD yang Nyaman dan Aman (MCK, Sanitasi yang memadahi) dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Sekolah PAUD	Dinas Pendidikan
		Penyedian APE dan Sarana Pembelajaran Digital (Laptop) Satuan Pendidikan PAUD	Dinas Pendidikan
		Rehabilitasi Ruang Kelas Satuan PAUD sebagai upaya perluasan akase dan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah PAUD	Dinas Pendidikan
		Pendidikan Sekolah Dasar (SD)	
		Penyediaan Sarana, Prasarana pada Satuan SD yang Nyaman dan Aman (MCK, Sanitasi yang memadahi) dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Sekolah SD	Dinas Pendidikan
		Reviltasi sedang/ Berat Ruang Perpustakaan dalam rangka peningkatan kualitasi pembelajaran yang berdampak pada capaian Literasi dan Numerasi siswa minimal baik	Dinas Pendidikan
		Fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan ajang talenta peserta didik (OSN, O2N, FLS2N dan Festival Seni Tradisi Khas) dalam rangka peningkatan kualitasi pembelajaran yang berdampak pada capaian Literasi dan Numerasi siswa minimal baik	Dinas Pendidikan
		Penyediaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dalam rangka penyelenggaraan dan mendukung pembelajaran pada SD	Dinas Pendidikan
		Penyediaan Ruang Kelas Baru (RKB) Satuan SD sebagai upaya perluasan akases/ Peningkatan Daya Tampung dan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah SD (penyediaan akses)	Dinas Pendidikan

No	Bidang Urusan	Aksi (Layanan)	OPD
		Reviltalisasi Sarana, Prasarana pada Satuan SD yang Nyaman dan Aman (MCK, Sanitasi yang memadahi) dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Sekolah SD	Dinas Pendidikan
		Revitalisasi/perbaikan Ruang Kelas Satuan SD sebagai upaya perluasan akases/ Peningkatan Daya Tampung dan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah SD (penyediaan akses yang memadahi)	Dinas Pendidikan
		1) Fasilitasi Pelaksanaan ProASN Reviltalisasi Satuan Pendidikan (Pendataan/usulan, pelaksanaan program, evaluasi/pelaporan); 2) Fasilitasi pelaksanaan Program MBG (Evaluasi sekolah sasaran, koordinasi dan kunsolidasi); 3) Adovokasi Pelaksanaan Wajib Bejar 1 Tahun Pra SD dan atau peningkatan Partisipasi Sekolah/ Kesiapan Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun Pra SD	Dinas Pendidikan
		1) Pendampingan/asesment pada Peserta Didik Penyandang Desabilitas; 2) Penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) (Peningkatan Iklim Keamanan, Inklusifitas dan Kebhinekaan)	Dinas Pendidikan
		1) Fasilitasi Pelaksanaan Akreditaso Sekolah, 2) Fasilitasi/ Advokasi Sekolah Sehat, Sekolah Adiwiyata, Konvergensi Stunting; dan 3) Penguatan tata kelola Data Pokok Pendidikan (DAPODIK SD)	Dinas Pendidikan
		1) Fasilitasi Pelaksanaan Pembelajaran (Penguatan PMM dan Koding serta impletasi penggunaan media pembelajaran/ digitalisasi pembelajaran melalui IFP); 2) Fasilitasi pelaksanaan penilian pembelajaran siswa : Sumatif kelas 1-6, SAS, Ujian Satuan Pendidikan kelas 6, TKA dan/Sulingjar; 3) Penguatan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Penguatan Karakter PD (Peningkatan Literasi dan Numerasi)	Dinas Pendidikan
		1) Pemberian Bantuan/ Beasiswa Miskin bagi siswa yang memenuhi syarat (DTSEN) dan belum menerima bantuan dari Pusat; 2) Pemberian Bantuan/ Beasiswa PDPD dalam rangka menuhan peralatan/ alat bantu pembelajaran desabilitas	Dinas Pendidikan
		Bantuan perlengkapan sekolah (TAS, Kaos Kaki, ATK) kepada Beasiswa Miskin bagi siswa yang memenuhi syarat (DTSEN)	Dinas Pendidikan
		Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)	
		Penyediaan Sarana, Prasarana pada Satuan SMP yang Nyaman dan Aman (MCK, Sanitasi yang memadahi) dalam rangka peningkatan Angka Partisipasi Sekolah SMP	Dinas Pendidikan

No	Bidang Urusan	Aksi (Layanan)	OPD
		Penyediaan Meja/ Kursi Siswa Satuan Pendidikan SMP	Dinas Pendidikan
		Fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan ajang talenta peserta didik (OSN, O2N, FLS2N dan Festival Seni Tradisi Khas)	Dinas Pendidikan
		Penyediaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dalam rangka penyelenggaraan dan mendukung pembelajaran pada SMP	Dinas Pendidikan
		Penyediaan Alat Pembelajaran Digital (Laptop/ LCD)	Dinas Pendidikan
		1) Fasilitasi Pelaksanaan ProASN Reviltalisasi Satuan Pendidikan (Pendataan/usulan, pelaksanaan program, evaluasi/pelaporan); 2) Fasilitasi pelaksanaan Program MBG (Evaluasi sekolah sasaran, koordinasi dan kunsolidasi); 3) Adovokasi Pelaksanaan Wajib Bejar 13 tahun dan atau peningkatan Partisipasi Sekolah/ Penaganan ATS	Dinas Pendidikan
		1) Pendampingan/asesment pada Peserta Didik Penyandang Desabilitas; 2) Penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) (Peningkatan Iklim Keamanan, Inklusifitas dan Kebhinekaan)	Dinas Pendidikan
		1) Fasilitasi Pelaksanaan Pembelajaran (Penguatan PMM dan Koding serta impletasi penggunaan media pembelajaran/ digitalisasi pembelajaran melalui IFP); 2) Fasilitasi pelaksanaan penilian pembelajaran siswa : Sumatif kelas &-9, SAS, Ujian Satuan Pendidikan kelas 9, TKA dan/Sulingjar; 3) Penguatan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat dan Penguatan Karakter PD (Peningkatan Literasi dan Numerasi)	Dinas Pendidikan
		Revitalisasi/perbaikan Ruang Kelas (RKB) Satuan SMP sebagai upaya perluasan akases/ Peningkatan Daya Tampung dan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah SMP (penyediaan akses yang memadahi)	Dinas Pendidikan
		1) Pemberian Bantuan/ Beasiswa Miskin bagi siswa yang memenuhi syarat (DTSEN) dan belum menerima bantuan dari Pusat; 2) Pemberian Bantuan/ Beasiswa PDPD dalam rangka menuhan peralatan/ alat bantu pembelajaran desabilitas	Dinas Pendidikan
		Bantuan perlengkapan sekolah (TAS, Kaos Kaki, ATK) kepada Beasiswa Miskin bagi siswa yang memenuhi syarat (DTSEN)	Dinas Pendidikan
		Pendidikan Kesetaraan	

No	Bidang Urusan	Aksi (Layanan)	OPD
		1) Pelaksanaan Program Nasional berupa pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/ BOP PNF) di satuan pendidikan Non Formal/ Keseteraan (DAK Non Fisik); 2) Pemberian Bantuan BOP MADIN yang bersumber dari BK Provinsi dan Sharing Kabupaten; 3) Penyediaan BOSDA Satuan Pendidikan Non Formal (PKBM dan SKB)	Dinas Pendidikan
		1) Fasilitasi Pelaksanaan Pembelajaran (Penguatan PM dan Koding serta impletasi penggunaan media pembelajaran/ digitalisasi pembelajaran melalui IFP); 2) Fasilitasi pelaksanaan penilian pembelajaran siswa : Suimatif, Ujian Pendidikan Keseteraan, SAS, TKA dan/Sulingjar	Dinas Pendidikan
		Revitalisasi/perbaikan Ruang Kelas Satuan Non Formal sebagai upaya perluasan akases/ Peningkatan Daya Tampung dan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah Non Formal (penyediaan akses yang memadahi)	Dinas Pendidikan
		Non Jenjang	
		1) Peningkatan Kompetensi dan Kepemimpinan Guru/ Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah PAUD, SD dan SMP) (2) Fasilitasi Peningkatan Kualifikasi Guru khususnya Guru PAUD (RPL); 3) Fasilitasi Sertifikasi Guru (PPG Guru tertentu)	Dinas Pendidikan
		1) Pemberian tambahan Penghasilan Guru Swasta (SD/MI, SMP/MTs); 2) Pemberian tambahan penghasilan Guru PAUD Swasta	Dinas Pendidikan
2	**Kesehatan**	**Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**	
		Pengadaan Buku KIA	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Bimtek pelayanan kesehatan Ibu bagi Petugas/ kader	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Bimbingan dan Monitoring ke FKTP dalam rangka penurunan AKI dan AKB	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Implementasi jejaring dan Supervisi fasilitatif layanan dan program Gizi KIA Kespro kasus kegawatdaruratan Ibu dan anak FKTP ke RS	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pendampingan Ibu Hamil Resiko Tinggi	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	

No	Bidang Urusan	Aksi (Layanan)	OPD
		Pengkajian kasus kematian ibu	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Orientasi Gadar Maternal bagi Petugas	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelacakan Kasus kematian Ibu	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pendampingan SpOG/SpA ke FKTP dalam rangka penurunan AKI &AKB	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
		Orientasi Neonatal Esensial Bagi Petugas	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Orientasi pelayanan bayi Baru Lahir bagi Bidan	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelacakan Kasus kematian Bayi	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Bimtek Pelayanan MTBM (Manajemen Terpadu Bayi Muda)/MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit) bagi Petugas di FKTP	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelayanan Kesehatan Balita	
		Orientasi Pelayanan SDIDTK (Stimulasi,Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang) Bagi Petugas / Kader	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelacakan Kasus Balita dengan Masalah kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Rapat koordinasi pelayanan SDIDTK dengan lintas program dan lintas sektor terkait	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Monev terpadu pelayanan balita di Posynadu	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	
		Pelaksanaan Penjaringan Kesehatan	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Lomba Penanganan Anemia di Sekolah	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Orientasi Pelayanan Disabilitas	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelaksanaan Sekolah Sehat	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB

No	Bidang Urusan	Aksi (Layanan)	OPD
		Bimtek Puskesmas PKPR (Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	
		Skrining kanker leher rahim bagi petugas	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Deteksi dini PTM pada usia produktif	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	
		Pelatihan PJP Lansia / Caregiver bagi Nakes, Kader, Keluarga	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Bimtek Pelayanan Geriatri	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Lomba Kader Caregiver	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelaksanaan PJP Lansia	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
		Tatalaksana penderita hipertensi bagi petugas	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Workshop layanan UBM (Upaya Berhenti Merokok)	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Sosialisasi implementasi KTR (Kawasan Tanpa Rokok)	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
		Tatalaksana penderita DM bagi petugas	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		monev program P2PTM	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	
		Tatalaksana pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelayanan Kesehatan Jiwa	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	
		Penemuan kasus aktif dan pemantauan pengobatan TBC (Investigasi kontak TBC	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB

No	Bidang Urusan	Aksi (Layanan)	OPD
		pelacakan kasus TBC mangkir dan Pemantauan menelan obat TBC	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		pemberian terapi pencegahan TBC	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		penemuan kasus ILTB (Infeksi Laten Tuberkulosis)	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	
		Mobile klinik ke titik hotspot	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Sosialisasi HIV ke populasi rawan	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pertemuan SUFA (Strategi use for ARV)	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
		Pelayanan HIV	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
		Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
		Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
5	**Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat,**	**Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarkat**	Satpol PPK
		Koordinasi Trantibum dengan Pemerintah Desa dan Kecamatan	Satpol PPK
		Pembinaan dan Pendampingan Satlinmas Desa	Satpol PPK
		MoU dengan stakeholder terkait Trantibum	Satpol PPK
		Deteksi Dini Cegah Dini terhadap gangguan Trantibum	Satpol PPK
		Pembinaan dan Penyuluhan terkait Trantibum	Satpol PPK

No	Bidang Urusan	Aksi (Layanan)	OPD
		Patroli dan Pengawalan Pengamanan Trantibum	Satpol PPK
		Pengamanan unjuk rasa	Satpol PPK
		Ganti Rugi Material dampak Penanganan Perda/Perkada	Satpol PPK
		Ganti Rugi Pengobatan dampak Penegakan Perda/Perkda	Satpol PPK
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada masyarakat	Satpol PPK
		Pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran Perda/Perkada	Satpol PPK
		Pengumpulan informasi atas kepatuhan Perda/Perkada	Satpol PPK
		Fasilitasi kegiatan bagi PPNS	Satpol PPK
		Pemadaman Kebakaran	Satpol PPK
		Penyelamatan korban kebakaran dan non kebakaran	Satpol PPK
		Evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Satpol PPK
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Satpol PPK
		Pendataan sarana dan prasarana ke instansi pemerintah, vertikal dan swasta	Satpol PPK
		Sosialisasi dan Edukasi pemadam kebakaran kepada masyarakat	Satpol PPK
		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Damkar	Satpol PPK
		Operasi Pencarian dan Pertolongan, termasuk evakuasi hewan berbahaya yang mengancam keselamatan manusia	Satpol PPK
		Pelayanan informasi rawan bencana	BPBD
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BPBD
6	**Sosial**	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti**	
		Penyediaan Permakanan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Penyediaan Sandang kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Penyediaan Alat Bantu kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA

No	Bidang Urusan	Aksi (Layanan)	OPD
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Layanan Kedaruratan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial dan /atau bantuan sosial uang kepada penyandang disabilitas terlantar	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Layanan Rujukan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	
		Verifikasi, Validasi, dan Penyaluran Bantuan Permakanan kepada Anak dalam Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Penyediaan Sandang kepada Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga kepada Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial kepada Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kepada Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan kepada Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Layanan Kedaruratan kepada Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga kepada Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Layanan Rujukan kepada Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA

No	Bidang Urusan	Aksi (Layanan)	OPD
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	
		Penyediaan Permakanan kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Penyediaan Sandang kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Penyediaan Alat Bantu kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Layanan Kedaruratan kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial (bantuan sosial uang kepada penyandang lanjut usia terlantar)	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Layanan Rujukan kepada Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	
		Penyediaan Permakanan kepada Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial (termasuk di shelter PMKS)	Dinas Sosial dan PPPA
		Penyediaan Sandang kepada Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial (termasuk di shelter PMKS)	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga kepada Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial kepada Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial (termasuk di shelter PMKS)	Dinas Sosial dan PPPA

No	Bidang Urusan	Aksi (Layanan)	OPD
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar kepada Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan kepada Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Layanan Kedaruratan kepada Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga kepada Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Pemberian Layanan Rujukan kepada Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Makanan bagi korban bencana alam dan sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Penyediaan Sandang bagi korban bencana alam dan sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan bagi korban bencana alam dan sosial (anak, ibu hamil dan lanjut usia)	Dinas Sosial dan PPPA
		Pelayanan Dukungan Psikososial bagi korban bencana alam dan sosial	Dinas Sosial dan PPPA
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi bagi korban bencana alam dan sosial	Dinas Sosial dan PPPA

4.3.8 Pendukung Program Nasional

Program Strategis Nasional merupakan program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP yang mencakup Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Proyek Prioritas, dan Proyek Strategis Nasional yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang

berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, ProSN menjadi acuan penting bagi Pemerintah Daerah dalam menyelaraskan kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan agar mendukung agenda strategis nasional secara terpadu dan berkelanjutan.

Pelaksanaan ProSN diarahkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah. Dalam hal ini, keterpaduan antara program pusat dan daerah menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan infrastruktur, peningkatan daya saing wilayah, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi di seluruh Indonesia. Selain aspek ekonomi, ProSN juga memuat dimensi strategis dalam menjaga stabilitas nasional, khususnya melalui programprogram yang mendukung ketahanan energi, pangan, dan pertahanan negara. Pemerintah Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam mendukung program-program tersebut melalui penguatan kapasitas wilayah dan sinergi lintas sektor, demi menciptakan lingkungan yang aman, tangguh, dan resilien. Pada akhirnya, seluruh inisiatif dalam Program Strategis Nasional bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pelaksanaan ProSN yang terarah dan terkoordinasi dengan baik, diharapkan tercipta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

4.3.9 Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah

Sebagai upaya memperkuat daya saing daerah berbasis inovasi dan ilmu pengetahuan teknologi, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Tahun 2025–2029. Dokumen RIPJPID menjadi pedoman dalam pengembangan riset, inovasi, dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis potensi lokal.

Arah pengembangan RIPJPID Kabupaten Trenggalek difokuskan pada penguatan sektor-sektor unggulan daerah, antara lain pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan pengembangan UMKM. Beberapa komoditas prioritas yang menjadi fokus pengembangan meliputi porang, ikan patin, ikan asap, kopi, kakao, cengkeh, bambu, tembakau, serta produk peternakan. Pengembangan komoditas unggulan tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah melalui inovasi, hilirisasi produk, dan penguatan daya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut,

Program Riset dan Inovasi Kabupaten Trenggalek 2025–2029 mengusung tema prioritas “Transformasi Riset dan Inovasi Trenggalek : Memperkuat Ekonomi Inklusif dan Regeneratif, Mewujudkan Net Zero Carbon, dan Meningkatkan SDM Kreatif dan Inovatif”. Program ini dirancang sebagai pengungkit strategis untuk mengatasi tantangan multidimensi yang dihadapi daerah, mulai dari krisis iklim hingga ketimpangan sosial-ekonomi. Melalui pendekatan ilmiah dan teknologi terapan, riset akan diarahkan untuk menghasilkan solusi berbasis bukti yang kontekstual, berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam implementasinya, RIPJPID menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dalam membangun ekosistem riset dan inovasi daerah. Selain itu, pemanfaatan hasil riset dan inovasi juga diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi lokal, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa poin penting mencakup penguatan kebijakan riset, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan kemitraan riset, serta integrasi riset dengan produk unggulan daerah. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan pada ketersediaan infrastruktur, perlindungan kekayaan intelektual, serta adaptasi dengan perkembangan global yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Melalui RIPJPID Tahun 2025–2029, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkomitmen menjadikan inovasi dan pemajuan IPTEK sebagai salah satu instrumen utama dalam mendukung pembangunan daerah yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPD

KABUPATEN TRENGGALEK

TAHUN 2027

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terencana dengan baik merupakan elemen kunci dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek Tahun 2027. Dokumen RKPD tidak hanya berfungsi sebagai panduan pembangunan tahunan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan tercapainya visi dan misi daerah secara efektif. Dalam konteks ini, program dan kegiatan yang dirancang harus didasarkan pada hasil analisis kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta tantangan yang dihadapi untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan yang berkelanjutan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi instrumen konkret untuk merealisasikan target pembangunan melalui alokasi sumber daya yang efisien dan akuntabel. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Trenggalek 2027 harus merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 – 2029 sehingga RKPD 2027 mampu mengimplementasikan seluruh program yang telah direncanakan dalam RPJMD.

5.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

Rencana kerja dan pendanaan daerah diimplementasikan pada program prioritas pembangunan daerah oleh Perangkat Daerah yang dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagu indikatif. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya.

Adapun rekapitulasi pagu indikatif belanja daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 berdasarkan Urusan dan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah (Tabel V.1) dan berdasarkan Perangkat Daerah (Tabel V.2) sebagai berikut :

Tabel V.1 Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Menurut Urusan dan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2027

URUSAN / BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**1.259.845.124.939,39**
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	596.265.258.213,00
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	474.012.655.897,00
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	131.211.681.487,39
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	30.128.783.173,00
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.424.287.706,00
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	11.802.458.463,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**105.314.198.336,61**
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.459.843.475,00
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	635.000.000,00
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	442.345.500,00
2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3.071.222.874,61
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	18.222.333.963,00
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.173.616.192,00
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.841.706.745,00
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	5.687.675.000,00
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	10.194.703.465,00
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.424.750.951,00
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.408.449.198,00
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.747.829.579,00
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.650.469.048,00
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	107.965.695,00
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	86.000.000,00
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	602.000.000,00
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	868.500.001,00
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.689.786.650,00
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	**67.003.924.706,00**
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.290.407.021,00
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	23.978.224.787,00
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	38.879.724.774,00

URUSAN / BIDANG URUSAN	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.344.368.124,00
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	396.200.000,00
3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	115.000.000,00
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	**78.413.117.170,00**
4.01 SEKRETARIAT DAERAH	32.445.397.547,00
4.02 SEKRETARIAT DPRD	45.967.719.623,00
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**225.822.379.720,00**
5.01 PERENCANAAN	8.553.416.165,00
5.02 KEUANGAN	209.657.884.834,00
5.03 KEPEGAWAIAN	6.741.830.221,00
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	382.177.500,00
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	487.071.000,00
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	**11.753.305.309,00**
6.01 INSPEKTORAT DAERAH	11.753.305.309,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN	**37.538.131.879,00**
7.01 KECAMATAN	37.538.131.879,00
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	**8.482.263.306,00**
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.482.263.306,00
TOTAL	**1.794.172.445.366,00**

Sumber : SIPD RI, diolah

Tabel V.2 Rekapitulasi Pagu Indikatif Belanja Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2027

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027
1	DINAS PENDIDIKAN	596.265.258.213,00
2	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	479.700.330.897,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	124.644.379.362,00
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	47.896.206.638,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	11.369.056.273,00
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	5.055.231.433,00
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.437.458.463,00
8	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	24.250.111.241,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	20.288.138.963,00
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.173.616.192,00
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	8.841.706.745,00
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.618.716.646,00
13	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	12.752.817.322,00
14	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4.747.829.579,00
15	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	10.650.469.048,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF TAHUN 2027
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	24.580.224.787,00
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	4.558.286.651,00
18	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	16.362.366.054,00
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	7.971.043.475,00
20	SEKRETARIAT DAERAH	32.445.397.547,00
21	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	45.967.719.623,00
22	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	9.040.487.165,00
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	209.657.884.834,00
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	7.124.007.721,00
25	INSPEKTORAT	11.753.305.309,00
26	KECAMATAN TRENGGALEK	8.496.801.568,00
27	KECAMATAN PANGGUL	2.669.089.213,00
28	KECAMATAN SURUH	2.127.651.445,00
29	KECAMATAN DURENAN	2.181.080.260,00
30	KECAMATAN POGALAN	1.924.389.391,00
31	KECAMATAN WATULIMO	2.565.604.438,00
32	KECAMATAN TUGU	2.262.903.779,00
33	KECAMATAN DONGKO	2.405.294.215,00
34	KECAMATAN KAMPAK	2.365.441.158,00
35	KECAMATAN MUNJUNGAN	1.984.561.802,00
36	KECAMATAN PULE	1.809.115.856,00
37	KECAMATAN GANDUSARI	1.933.274.767,00
38	KECAMATAN BENDUNGAN	2.200.014.709,00
39	KECAMATAN KARANGAN	2.612.909.278,00
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.482.263.306,00
TOTAL		**1.794.172.445.366,00**

Sumber : SIPD RI, diolah

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 disusun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri. Secara rinci Rencana Program, Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 tercantum sebagaimana dalam **Lampiran IV**. Usulan Aspirasi dari Desa/Kelurahan di Kabupaten Trenggalek hasil musyawarah perencanaan pembangunan disajikan dalam Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan (DURKP) Kecamatan Tahun 2027 sebagaimana pada **Lampiran V.** Adapun usulan aspirasi yang berasal dari Masyarakat/ Lembaga tercantum sebagaimana pada **Lampiran VI.**

Dengan terbatasnya kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Trenggalek sedangkan kegiatan prioritas lainnya sebagian besar belum terdanai, maka kegiatan prioritas lainnya tersebut diusulkan pendanaannya

bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan CSR. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) diusulkan ke Bappenas dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencaanan dan Informasi Kinerja Anggaran). Adapun usulan ke APBD Provinsi Jawa Timur pengusulannya melalui mekanisme proses penyusunan perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat. Usulan kegiatan Tahun 2027 dengan sumber pendanaan APBD Provinsi Jawa Timur tercantum sebagaimana dalam **Lampiran VII**.

5.2 Program Prioritas Daerah

Tabel V.3 Program Prioritas Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2027

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah			Indeks Infrastruktur(poin)	
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur daerah		Indeks Pemerataan Infrastruktur (IPIn) (Poin)	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase luas genangan perkotaan yang tertangani (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
				Persentase panjang drainase dalam kondisi baik (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
			Meningkatnya penanganan pengurangan kawasan kumuh	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
					PERMUKIMAN KUMUH
				Persentase Perbaikan RTLH (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
				Persentase Pembangunan/ Pemeliharaan/Per kuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		Meningkatnya konektivitas wilayah		Indeks Konektivitas (Poin)	
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan mantab (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				Persentase jembatan berfungsi baik (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Integrasi Antar Moda (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Cakupan layanan angkutan darat (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				Tingkat Kinerja Ruas Jalan (Rasio)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				Persentase fasilitas prasarana angkutan darat layak fungsi (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				Persentase peningkatan pengguna angkutan umum (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				Tingkat kepatuhan operator dan awak angkutan sesuai SOP (%)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Persentase kegiatan promosi dan penjajakan kerja sama pengoperasian pelabuhan (%)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Aspek Teknologi SPBE (Nilai)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan			Pertumbuhan Ekonomi(%)	
				Indeks Ekonomi Hijau(Angka)	

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				PDRB Perkapita (Juta Rp / Kapita)()	
		Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Unggulan Strategis Potensial		Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	
				Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan (%)	
				Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	
				Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (%)	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase daya tarik destinasi dan usaha pariwisata yang terkelola (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan	Persentase prasarana yang digunakan dan berfungsi dengan baik (meliputi semua non japrod yang di kelola dinas peternakan) (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Hortikultura (Durian) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Tembakau) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Manggis) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Kedelai) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Kakao) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Bawang Merah) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Alpukat) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Jahe) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Jagung) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
					SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ubi Kayu) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Kopi) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Hortikultura (Cabai) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Cengkeh) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Perkebunan (Nilam) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Daging) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Susu) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Telur) (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase pangsa pasar pariwisata Kabupaten Trenggalek (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Pelaku Usaha)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan lklim Terhadap Pertanian (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah Unit Usaha pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Unit)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
				Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
			Meningkatnya produksi perikanan budidava	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
		Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah		Realisasi Investasi (triliun rupiah)	
				Incremental Capital Output Ratio (ICOR) (Poin)	
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Investor di Sektor Unggulan Daerah (%)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase masyarakat dan / atau investor yang memperoleh insentif dan / atau kemudahan investasi (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat Kematangan UKPBJ (Level)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan lnformasi Penanaman Modal (%)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Indeks Pengelolaan Aset (Indeks)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
		Meningkatnya Kemandirian Ekonomi Desa		Persentase Desa Mandiri (%)	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
				Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (poin)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
				Persentase warga miskin usia produktif yang menjadi pelaku usaha baru (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA
				Persentase Pengesahan Batas Desa (%)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan desa	Persentase Administrasi Desa yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase infrastruktur dan sarana pendukung kemandirian pangan yang diadakan dan dimanfaatkan dengan baik (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
3	Meningkatnya Keberlanjutan Lingkungan Kabupaten			Indeks Kota Hijau(poin)	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap perubahan iklim		Penurunan Emisi GRK Kumulatif (TON CO2 EQ)	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
				Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat (%)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
			Meningkatnya layanan persampahan Kabupaten	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST (%)	1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
		Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana (Indeks)	
			Meningkatnya kualitas layanan dan penanganan pada pra, saat dan pasca bencana	% desa tangguh bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
				Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
				Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
				Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
4	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat			Indeks Gini(Poin)	
				Tingkat Kemiskinan((%))	

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Rupiah/Kapita)	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Pelaku Usaha)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial ()	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi pada tahun n (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat		Pengeluaran Per Kapita (Ribu. Rp/ Kapita) ()	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Pelaku Usaha)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
				Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				Persentase Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
5	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)(Poin)	
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)(Poin)	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
				Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang memenuhi persyaratan perizinan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
				Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
				oleh Pemerintah Daerah (%)	
				Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
				Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Cakupan penemuan kasus TB (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
					KESEHATAN MASYARAKAT
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Prevalensi Obesitas > 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
					KESEHATAN MASYARAKAT
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan		Indeks Pendidikan (poin)	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
				Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 (%)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
				Indeks Pemerataan Guru (poin)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 7-18 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan Non Formal (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Keamanan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
				Iklim Kebinekaan SD (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Keamanan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD (APS) (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
		Meningkatnya pengarusutamaan gender		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran , perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
		Meningkatnya Daya Saing Pemuda		Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase atlet yang masuk Pelatda dan Pelatnas (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase budaya yang dikembangkan (%)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
6	Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas			Indeks Reformasi Birokrasi(Poin)	
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif dan Akuntabel		Nilai SAKIP (poin)	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)
		Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Melayani		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	
				Indeks Integritas (Poin)	
			Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
			Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Nilai)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Indeks Manajemen Risiko (Skor)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Skor)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Aspek Teknologi SPBE (Nilai)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
			Meningkatnya kualitas produk hukum yang difasilitasi	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN

NO	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*
					KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
				Persentase Rekomendasi Pengawasan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

5.3 Kontribusi Terhadap Pencapaian Nasional

Penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 dilaksanakan dengan memperhatikan keterpaduan antara pembangunan daerah, pembangunan Provinsi Jawa Timur, dan pembangunan nasional. Arah kebijakan, sasaran, program, serta pendanaan pembangunan daerah disusun tidak hanya untuk menjawab kebutuhan pembangunan di Kabupaten Trenggalek, tetapi juga untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional sesuai kewenangan daerah.

Penyelarasan tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan perencanaan, antara lain pembahasan dalam Rakor Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang), Desk Urusan, serta forum koordinasi lainnya yang menjadi bagian dari proses sinkronisasi perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten. Melalui proses tersebut, rencana kerja dan pendanaan daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran RKP Tahun 2027, implementasi Asta Cita, tema pembangunan nasional, Program Strategis Nasional (PSN), serta prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur yang menjadi kewenangan Kabupaten Trenggalek.

5.4 Rencana Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang menjadi urusan pemerintahan wajib

yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya Pelayanan Dasar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hadirnya SPM menjadi jaminan adanya pelayanan dasar yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah daerah. Melalui penerapan SPM diharapkan kuantitas dan kualitas minimal pelayanan publik dapat terpenuhi sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan.

Penerapan SPM memiliki nilai yang strategis, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan. Keberadaan SPM dapat dijadikan acuan terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan publik sebagaimana tercantum pada **Lampiran VIII.**

5.5 Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Penanggulangan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu fokus pembangunan yang memerlukan dukungan lintas sektor dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan daerah. Rencana kerja dan pendanaan untuk strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem disusun sebagai upaya mengarahkan berbagai intervensi pembangunan agar lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan mampu mempercepat penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Trenggalek.

Penyusunan rencana kerja dan pendanaan dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah, kebijakan pemerintah pusat, serta hasil koordinasi dan sinergi dengan pemerintah provinsi, perangkat daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui penyelarasan tersebut, pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu saling mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas akses terhadap pelayanan dasar, mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan masyarakat sasaran, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Upaya penanggulangan kemiskinan ektrem dilaksanakan melalui upaya khusus berupa *multiple intervension*. Upaya tersebut dilakukan dengan dua pendekatan utama yaitu:

1. Mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui berbagai program perlindungan sosial dan subsidi.
2. Melakukan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi atau pendapatan.

Upaya percepatan dilakukan di wilayah yang memiliki kantong-kantong kemiskinan, mengingat kemiskinan ekstrim banyak terdapat di wilayah tersebut. Pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah menjangkau Rumah Tangga miskin ekstrem yang belum mendapatkan sama sekali program baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendekatan berikutnya yang dilakukan adalah memastikan masyarakat miskin ekstrem masuk dalam DTSEN dan mendapatkan program-program dari Pemerintah Pusat, seperti PKH, BPNT, KIP, PBI JKN, dan lain-lain.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2027

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar peran pemerintah daerah dapat menyentuh kehidupan masyarakat. Peran pemerintah tersebut menjadi pusat layanan bagi berbagai keperluan masyarakat. Pelayanan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sebagian besar mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan hasil yang dicapai atas penyelenggaraan pelayanan tersebut menunjukkan tingkat peradaban masyarakatnya. Dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Trenggalek yang terus berkembang maka hal ini juga akan menuntut pemerintah daerah harus mampu mengikuti perkembangan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Trenggalek. Kondisi ini berimplikasi pada kompleksitas layanan jasa yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan kompleksitas layanan yang semakin tinggi maka hal ini harus diiringi oleh peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Untuk dapat melihat keberhasilan dan kegagalan kinerja maka perlu adanya alat ukur capaian pembangunan daerah yang dinyatakan dalam Indikator kinerja daerah.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik outcome ataupun output pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keberhasilannya akan tercermin dari capaian indikator kinerja makro pembangunan daerah yang ditetapkan. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

6.1. Indikator Kinerja Makro Pembangunan

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara makro/umum. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret

pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Adapun target indikator kinerja makro pada tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel VI.1
Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Trenggalek Tahun 2027

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Target 2027
				Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,71	4,72	5,31	4,74 - 5,31
2	PDRB Perkapita (Juta Rp / Kapita)	Juta Rp / Kapita	32,73	32,74	35,11	34,23 - 35,11
3	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	%	0,77	0,77	0,78	0,77
4	Tingkat Kemiskinan	(%)	10,5	9,65	10,29	8,94
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,90	3,87	3,86	3,83 - 3,26
6	Indeks Gini	Poin	0,350	0,349	0,359	0,312 - 0,352
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,47	73,78	73,39	74,27
8	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TON CO2 EQ	804.464	854.464	816.291	954.464
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	75,27	74,97	76,91	76,92

6.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel VI.2
Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Trenggalek Tahun 2027

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Target RPJMD 2025 - 2029 (Periode 2027)	Target RKPD 2027
				Target	Realisasi		
1	Indeks Kota Hijau	poin	61,5	61,6	69,33	62,6	69,5
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,47	73,78	73,39	74,27	74,27

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Target RPJMD 2025 - 2029 (Periode 2027)	Target RKPD 2027
				Target	Realisasi		
3	Indeks Infrastruktur	poin	50,09	51,95	60,34	55,56	60,5
4	Tingkat Kemiskinan	(%)	10,5	9,65	10,29	8,94	8,94
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,71	4,72	5,31	4,74	4,74 - 5,31
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	87,35	87,40	88,63	87,50	87,50
7	PDRB Perkapita (Juta Rp / Kapita)	Juta Rp / Kapita	32,73	32,74	35,11	34,23	34,23 - 35,11
8	Indeks Gini	Poin	0,350	0,349	0,359	0,347	0,312 - 0,352
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	93,20	93,60	93,64	93,94	93,94
10	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,90	3,87	3,86	3,83	3,83 - 3,26
11	Indeks Risiko Bencana	Indeks	140,94	138,59	120,85	131,99	118

6.3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Dalam rangka mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah, maka diperlukan penetapan Indikator Kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Daerah. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting, dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara umum, Indikator Kinerja merupakan indikator yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintah dan kewenangan pemerintahan daerah. Indikator ini merupakan adalah indikator *outcome* yang dicapai melalui program sebagai akumulasi dari beberapa kegiatan dalam program tersebut. Secara rinci, penetapan target indikator kinerja merupakan target yang akan dicapai pada tahun 2027 dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya. Penetapan

indikator kinerja daerah dalam dokumen RKPD diuraikan tabel sebagai berikut:

Tabel VI.3
Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2027

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Target RPJMD 2025 - 2029 (Periode 2027)	Target RKPD 2027	Keterangan
				Target	Realisasi			
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	75,27	74,97	76,91	75,13	76,92	
2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	140,94	138,59	120,85	131,99	118	
3	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	%	86,33	86,56	86,58	87,04	87,04	
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	0,19	7,99	0,19	9,68	9,68	
5	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	14,75	10,92	12,07	10,05	10,05	
6	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	35,03	35,23	35,32	35,63	35,63	
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	12,39	12,88	18,82	13,87	13,87	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Target RPJMD 2025 - 2029 (Periode 2027)	Target RKPD 2027	Keterangan
				Target	Realisasi			
8	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	(%)	23,38	26,35	27,72	34,34	34,34	
9	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	391,47	408,98	415,12	443,49	443,49	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,47	73,78	73,39	74,27	74,27	
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,71	4,72	5,31	4,74	4,74 - 5,31	
3	Tingkat Kemiskinan	(%)	10,5	9,65	10,29	8,94	8,94	
4	PDRB Perkapita (Juta Rp / Kapita)	Juta Rp / Kapita	32,73	32,74	35,11	34,23	34,23 - 35,11	
5	Indeks Gini	Poin	0,350	0,349	0,359	0,347	0,312 - 0,352	
6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	93,20	93,60	93,64	93,94	93,94	
7	Indeks Pendidikan	poin	0,615	0,620	0,625	0,626	0,626	
8	Pengeluaran Per Kapita (Ribu. Rp/ Kapita)		10.872	11.038	11.322	11.369	11.369	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,90	3,87	3,86	3,83	3,83 - 3,26	
10	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap Provinsi	%	0,77	0,77	0,78	0,77	0,77	
11	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	62,39	63,39	64,76	65,39	65,39	
12	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke	(%)	4,65	6,38	6,49	6,51	6,51	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Target RPJMD 2025 - 2029 (Periode 2027)	Target RKPD 2027	Keterangan
				Target	Realisasi			
	Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi							
13	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	Persentase	15,92	26,11	54,14	42,68	42,68	
14	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	(%)	51,9	55	71,81	70	70	
15	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	58,06	59,37	74	60,39	60,39	
16	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98,32	98,42	98,75	98,62	98,62	
17	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	86	87	75	89	89	
18	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	Persentase	12,8	12,41	23,6	11,68	11,68	
19	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Persentase	89,4	89,87	90,62	90,72	90,72	
20	Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja	Poin	84,09	85,31	87	87,48	87,48	
21	Persentase PPKS yang mandiri	%	5,6	6,1	6,87	7,1	7,1	
22	Persentase Pelindungan Kebudayaan	%	5,6	6,0	6	9,6	9,6	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Target RPJMD 2025 - 2029 (Periode 2027)	Target RKPD 2027	Keterangan
				Target	Realisasi			
23	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	poin	46,75	46,95	38,54	47,35	47,35	
24	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	23,14	28,79	19,09	32,45	32,45	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							
1	Indeks Kota Hijau	poin	61,5	61,6	69,33	62,6	69,5	
2	Indeks Infrastruktur	poin	50,09	51,95	60,34	55,56	60,5	
3	Indeks Ekonomi Hijau	Angka	44,78	45,00	49,57	48,50	48,50 - 49-57	
4	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	6,68	6,69	7,73	6,71	6,71 - 7,73	
5	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Poin	4,12	4,11	3,79	4,07	4,07	
6	Indeks Konektivitas	Poin	0,766	0,772	0,725	0,783	0,783	
7	Indeks Pemerataan Infrastruktur (IPIn)	Poin	0,216	0,215	0,278	0,213	0,213	
8	Persentase Desa Mandiri	%	58,55	71,7	71,7	86,4	86,4	
9	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	4	4,05	4,54	4,15	4,15 - 4,54	
10	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	%	0,31	0,31	4	0,31	0,31 - 4	
11	Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	5,76	5,79	7,61	5,85	5,85 - 7,61	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Target RPJMD 2025 - 2029 (Periode 2027)	Target RKPD 2027	Keterangan
				Target	Realisasi			
12	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Poin	74,99	75,5	64,13	76,5	76,5	
13	Tingkat Inflasi	(%)	1,31	3,0	2,36	2,8	2,8	
14	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,40	3,41	3,54	3,43	3,43	
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	70,27	70,77	68,78	71,77	71,77	
16	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	18,94	18,95	19,97	18,97	18,97	
17	Indeks Inovasi Daerah	Angka	69,98	70,68	81,4	72,12	72,12	
18	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	2,13	2,19	2,17	2,27	2,27	
19	Persentase Luasan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani	%	100	100	100	40	40	
20	Persentase Koefisien variasi harga antar waktu	%	11,48	11,79	7,9	11,69	11,69	
21	Nilai Ekspor Non Migas	Milyar Rupiah	139,81	140	142,71	141,50	141,50	
22	Nilai PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	Milyar Rupiah	6.056,86	6.511,7	6.516,50	7.027,83	7.027,83	
23	Indeks Infrastruktur Permukiman pada	Poin	80,59	80,69	80,98	80,89	80,89	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Target RPJMD 2025 - 2029 (Periode 2027)	Target RKPD 2027	Keterangan
				Target	Realisasi			
	wilayah kantong kemiskinan.							
24	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,62	1,64	1,62	1,74	1,74	
25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	80,08	80,24	77,67	80,56	80,56	
26	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	5,26	35,76	25,41	6,77	6,77	
27	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	96,1	96,13	96,14	96,17	96,17	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	87,35	87,40	88,63	87,50	87,50	
2	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks	95,61	95,65	92,5	95,8	95,8	
3	Indeks Berakhlak	Poin	78,9	78,95	N/A	79,05	79,05	Realisasi Tahun 2025 masih dalam proses perhitungan
4	MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) KPK	Poin	94,18	94,30	89,7	94,60	94,60	
5	Persentase Penyelesaian Konflik	Persentase	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Target RPJMD 2025 - 2029 (Periode 2027)	Target RKPD 2027	Keterangan
				Target	Realisasi			
6	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,62	3,69	3,57	3,76	3,76	
7	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	58,61	62,37	N/A	69,88	69,88	Realisasi Tahun 2025 masih dalam proses perhitungan
8	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,63	0,65	0,76	0,69	0,69	
9	Nilai rata-rata Sinergitas Kecamatan	Nilai	89,09	89,58	88,94	90,07	90,07	
10	Indeks Reformasi Hukum	poin	96,74	96,74	87,04	97	97	
11	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**							
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,92	7,94	8,09	7,98	7,98	
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63	12,78	12,78	12,95	12,95	
3	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi	Persentase	89,84	90,09	91,45	90,59	90,59	
4	Skor Literasi	Nilai	73,40	75,20	81,19	78,80	78,80	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Target RPJMD 2025 - 2029 (Periode 2027)	Target RKPD 2027	Keterangan
				Target	Realisasi			
5	Skor Numerasi	Nilai	63,86	66,06	75,62	70,46	70,46	
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	75,35	75,49	75,63	76,01	76,01	
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	42,41	42	53,66	41,80	41,80	
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	6,70	6,60	6,05	6,40	6,40	
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							
1	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR	%	95	95,2	94,9	95,6	95,6	
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	%	84,66	84,83	84,85	85,23	85,23	
3	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	57,99	58,27	58,32	58,83	58,83	
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							
1	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	67,30	68,8	77,20	71,64	77,3	
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							
1	Persentase Penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta	%	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Target RPJMD 2025 - 2029 (Periode 2027)	Target RKPD 2027	Keterangan
				Target	Realisasi			
	perlindungan masyarakat							
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,68	0,69	0,69	0,71	0,71	
3	Persentase Pengendalian Kebakaran dan Penyelamatan	%	93	93,5	98	94,5	94,5	
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	56,85	57,85	64,89	58,85	64,89	
AG	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/Kapita	32.066.846,38	32.176.221	33.768.819	32.210.046	32.210.046 - 33.768.819	
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,463	0,417	0,215	0,383	0,215	
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66,27	66,77	N/A	67,77	67,77	Realisasi Tahun 2025 masih dalam proses perhitungan
AI	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							
1	Indeks Ketahanan Pangan	poin	83,17	83,37	76,82	83,77	83,07	
AJ	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Target RPJMD 2025 - 2029 (Periode 2027)	Target RKPD 2027	Keterangan
				Target	Realisasi			
1	Persentase Pengurusan Penggunaan Kawasan Hutan untuk PSN dan PSD	%	28,02	39,61	41,31	55,88	55,88	
AK	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							
1	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TON CO2 EQ	804.464	854.464	816.291	954.464	954.464	
AL	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks	99,58	99,59	99,48	99,61	99,61	
AM	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							
1	Persentase Desa Klasifikasi Cepat berkembang	%	59,21	65,79	78,9	76,32	79	
2	Persentase Bumdes Kategori Maju	%	3,95	6,58	6,58	11,84	11,84	
AN	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	76,87	76,89	76,98	76,91	76,91	
2	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	61,8	63,5	67,6	66,8	73,64	
AO	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							
1	Indeks Aksesibilitas	Poin	33,91	36,29	36,5	38,97	38,97	
AP	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Target RPJMD 2025 - 2029 (Periode 2027)	Target RKPD 2027	Keterangan
				Target	Realisasi			
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4,22	4,22	4,22	1,93	1,93	
AQ	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							
1	Rasio Kewirausahaan	%	1,59	1,60	1,59	1,62	1,62	
AR	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							
1	Realisasi Investasi	triliun rupiah	0,581	0,41	0,58	0,49	0,49 - 0,58	
AS	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							
1	Indeks Partisipasi Olahraga		68,95	69,45	69,45	70,45	70,45	
2	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	51,33	51,93	61,19	52,53	61,25	
AT	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,59	2,59	2,59	2,80	2,80	
AU	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							
1	Nilai Aspek Keamanan SPBE	Angka	2,00	2,00	2	1,67	1,67	
AV	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							
1	Persentase budaya yang dikembangkan	%	7,59	15,18	15,18	27,11	27,11	
AW	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	80,34	80,4	14,06	80,6	80,6	
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	74,88	75,00	57,54	75,40	75,40	
AX	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Target RPJMD 2025 - 2029 (Periode 2027)	Target RKPD 2027	Keterangan
				Target	Realisasi			
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah		72,15	73	75,07	75	75	
AY	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							
1	Nilai Tukar Nelayan (NTN)		118,83	115	115,37	116	116	
2	Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)		106,84	105,5	105,68	105,9	105,9	
AZ	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							
1	Jumlah wisatawan	Orang	1.164.982	1.223.231	1.000.585	1.348.612	1.348.612	
BA	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	103,65	104,15	114,06	105,15	105,15	
2	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	Indeks	101,95	101,96	102,07	102,16	102,16	
BB	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							
1	Persentase pertumbuhan ekspor non migas	%	36,93	0,14	2,07	1,21	1,21	
BC	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	19,42	19,43	19,96	19,46	19,46	
BD	**3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							
1	Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan	%	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Target RPJMD 2025 - 2029 (Periode 2027)	Target RKPD 2027	Keterangan
				Target	Realisasi			
BE	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**							
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,96	4	4,43	4,1	4,53	
2	Nilai SAKIP	poin	73,19	74	76,58	76	76,6	
BF	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**							
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	98,26	90,5	95,9	91,5	91,5	
BG	**5.01 - PERENCANAAN**							
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	84	85	85,01	88	88	
BH	**5.02 - KEUANGAN**							
1	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	%	66,82	65,76	65,71	64,14	64,14	
BI	**5.03 - KEPEGAWAIAN**							
1	Indeks Sistem Merit	Indeks	283	290	283	315	315	
BJ	**5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							
1	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi		26,21	29	32,17	32	33	
BK	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							
1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase	100	100	100	100	100	
BL	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**							
1	Indeks Integritas	Poin	74,26	74,76	77,32	75,76	77,32	
BM	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Tahun 2025		Target RPJMD 2025 - 2029 (Periode 2027)	Target RKPD 2027	Keterangan
				Target	Realisasi			
1	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	7	7,05	7,05	7,15	7,15	

BAB VII

PENUTUP

RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2027

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 dengan tema *"Penguatan Komunitas dan Lintas Sektor dalam rangka Mewujudkan Kota Atraktif"* merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam merancang pembangunan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan. RKPD ini diharapkan menjadi pedoman strategis untuk mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional, sehingga visi besar pembangunan daerah dapat tercapai.

Melalui dokumen ini, Kabupaten Trenggalek bertekad untuk *Membangun Kabupaten Trenggalek dengan Penguatan Komunitas dan Lintas Sektor dalam rangka Mewujudkan Kota Atraktif* menjadi arahan dan fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan daya saing daerah. Pembangunan Tahun 2027 ini diarahkan dengan 3 (tiga) prioritas yaitu prioritas pertama, pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan berkelanjutan; prioritas kedua pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas; prioritas ketiga Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data. Dengan pendekatan kolaboratif, RKPD akan mengutamakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendorong kemandirian daerah dalam menghadapi tantangan global dan lokal.

7.1. Kesimpulan

Dokumen RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 menjadi acuan resmi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan pada setiap bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 diharapkan dapat menjadi pondasi bagi kesinambungan dan terintegrasinya pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan rencana kerja pembangunan ini, berbagai program dan kegiatan yang telah dirumuskan akan dilaksanakan dengan konsisten oleh *stakeholders* sehingga target kinerja sebagai indikator pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat terealisasi dan terlaksana secara optimal.

7.2. Kaidah Pelaksanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam RKPD Tahun 2027. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu OPD dan antar-OPD dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Tahun 2027 ini merupakan acuan bagi pemerintah daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Pelaksanaan RKPD Tahun 2027 juga memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target akhir pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2027 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subjek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Seluruh perangkat daerah dan pelaku pembangunan daerah di Kabupaten Trenggalek berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2027 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2025-2029.
2. Bagi pemerintah daerah dan lembaga daerah, RKPD Tahun 2027 merupakan langkah awal penyusunan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027 (hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Trenggalek).
3. Dalam rangka koordinasi perencanaan guna mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, integrasi, sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan setiap kebijakan, program dan kegiatan, masing-masing perangkat daerah harus membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2027 yang menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2027 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya) sebagai berikut:

a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2027, merupakan anggaran program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup);
b. Uraian tentang rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2027, merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, sebagai tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat; serta
d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dari masing-masing Perangkat Daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah.

4. Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan, kemudian mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subjek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Setiap Kepala Perangkat Daerah pada akhir tahun 2027 wajib melakukan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan- peraturan lainnya.
7. Bupati, melalui Bapperida Kabupaten Trenggalek, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap satuan kerja pemerintah Kabupaten Trenggalek secara

berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2027 sebagai tahun awal pada periode pembangunan jangka menengah saat ini.

8. Kepala Bapperida menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Kabupaten Trenggalek Tahun 2027.
9. RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2027. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Trenggalek tahun 2027, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek.

BUPATI TRENGGALEK

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH SRI MULYANTO
NIP. 197605201996031003

LAMPIRAN I

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN

RKPD

KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2027

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2026 s/d TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		100	7.554.518.336,00		0,00	100	6.705.697.992,39		1.458.516.814,00	25,05	21,75	25.05	1.458.516.814,00	25,05	19,31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
1.1	5.03	KEPEGAWAIAN		100	7.022.518.336,00		0,00	100	6.308.880.492,39		1.444.331.814,00	27,47	22,89	27.47	1.444.331.814,00	27,47	20,57	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
1.1.1	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	6.107.711.666,00		0,00	100 %	5.830.670.292,39	21.64 %	1.441.411.614,00	21,64	24,72	21.64 %	1.441.411.614,00	21,64	23,60	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Average dari capaian (Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah) =(24,64 + 31,33 + 5,58 + 25) / 4 = 21,64%
1.1.2			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %				100 %		22.22 %		22,22		22.22 %		22,22		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	=Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang disusun oleh perangkat daerah/ Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang seharusnya disusun oleh perangkat daerah x 100 = (28,57 + 15,87)/2 = 22,22%
1.1.3			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	92 %				92 %		91.24 %		99,17		91.24 %		99,17		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	=Nilai Perolehan aset dalam kondisi baik/ Nilai Perolehan total aset x 100 = 8.687.880.478/9.522.492.763 x 100 = 91,24
1.1.4	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	80,00 %	914.806.670,00		0,00	80 %	478.210.200,00	88.53 %	2.920.200,00	110,66	0,61	88.53 %	2.920.200,00	100,00	0,32	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	= Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi/ Total ASN yang akan dikembangkan kompetensinya x 100 = 2585/2920 x 100 = 88,53
1.1.5			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	3 Persentase				3 Persentase		0 Persentase		0,00		0 Persentase		0,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Saat ini masih dalam tahap pengumpulan pelaporan kinerja 2025
1.1.6			Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	80 %				80 %		0 %		0,00		0 %		0,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penghitungan dilaksanakan pada akhir tahun 2026
1.1.7			Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	100 Persentase				100 Persentase		0 Persentase		0,00		0 Persentase		0,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Penetapan formasi dilaksanakan pada akhir tahun 2026
1.2	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		100	532.000.000,00		0,00	100	396.817.500,00		14.185.000,00	15,63	3,57	15.63	14.185.000,00	15,63	2,67	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
1.2.1	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		532.000.000,00		0,00	50 %	396.817.500,00	0 %	14.185.000,00	0,00	3,57	0 %	14.185.000,00	0,00	2,67	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Mekanisme pelaporan sertifikasi ASN masih dalam tahap pembahasan
1.2.2			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	45 %				45 %		10.19 %		22,64		10.19 %		22,64		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	= Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional/ Jumlah ASN yang seharusnya mengikuti pengembangan kompetensi x 100 = 724/7104 x 100 = 10,19
1.2.3			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	65 %				65 %		11.16 %		17,17		11.16 %		17,17		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	= Jumlah ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis/ Jumlah Seluruh ASN yang seharusnya mengikuti pengembangan kompetensi teknis x 100 = 355/3182 x 100 = 11,16
1.2.4			Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	50 Persentase				50 Persentase		0 Persentase		0,00		0 Persentase		0,00		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pada triwulan I masih dilakukan perumusan perencanaan pengembangan kompetensi ASN

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2026 s/d TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		100	9.542.180.224,00	63,32	8.084.878.361,00	100	8.947.150.884,75		914.999.323,00	17,79	10,23	81.11	8.999.877.684,00	81,11	94,32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.1	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		100	9.542.180.224,00	63,32	8.084.878.361,00	100	8.947.150.884,75		914.999.323,00	17,79	10,23	81.11	8.999.877.684,00	81,11	94,32	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
1.1.1	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	3.728.626.843,00	100 %	3.331.827.304,00	100 %	3.574.527.064,75	19.44 %	847.580.873,00	19,44	23,71	119.44 %	4.179.408.177,00	100,00	100,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	((∑ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun Perangkat Daerah) / (∑ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang seharusnya Perangkat Daerah) x 100 =14/72*100%=19,44%
1.1.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	96 %		96.02 %		96 %		95.99 %		99,99		192.01 %		100,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	((∑ rupiah aset dalam kondisi baik/jumlah rupiah total aset) x 100 ==1955577186/2037343936*100=95,99%
1.1.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		24.11 %		24,11		100 %		100,00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis jasa administrasi perkantoran pada masing-masing kegiatan =((35,86+21,3+14,29+25)/4)*100%=24,11%
1.1.4	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %	959.688.381,00		0,00	100 %	641.300.000,00	0 %	3.245.000,00	0,00	0,51	0 %	3.245.000,00	0,00	0,34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(Jumlah Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa yang dilaksanakan / Jumlah Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Bangsa yang direncanakan) X 100% (dilaksanakan pada TW berikutnya)
1.1.5	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		1.892.504.000,00		0,00	21 %	1.828.212.700,00	0 %	1.614.000,00	0,00	0,09	0 %	1.614.000,00	0,00	0,09	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(Jumlah Kader Partai Politik yang mengikuti Pendidikan Politik/Jumlah Seluruh Kader Partai Politik yang ada) x 100% (dilaksanakan pada TW berikutnya)
1.1.6	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	40 Persentase	835.000.000,00		0,00	40 Persentase	808.869.300,00	44.39 Persentase	0,00	110,98	0,00	44.39 Persentase	0,00	100,00	0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Yang Aktif /Jumlah Keseluruhan Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar) X 100% =91/205*100%=44,39%
1.1.7	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan didaerah yang dilaksanakan		500.000.000,00		0,00	100 %	531.564.500,00	14.29 %	10.789.250,00	14,29	2,03	14.29 %	10.789.250,00	0,00	2,16	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(Jumlah kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan didaerah yang dilaksanakan/ jumlah kebijakan di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama, dan penghayat kepercayaan didaerah yang direncanakan)*100%=1/7*100%=14,29% (1 Kebijakan Pelaksanaan Tim FKUB)
1.1.8	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik sosial yang diselesaikan	100 %	1.626.361.000,00		0,00	100 %	1.562.677.320,00	33.33 %	51.770.200,00	33,33	3,31	33.33 %	51.770.200,00	33,33	3,18	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	(Jumlah Konflik yang diselesaikan /Jumlah Keseluruhan Konflik yang Terjadi) X 100% =1/3*100%=33,33 satu konflik sudah terselesaikan yaitu Aksi Solidaritas GMNI mengawal kasus penganiayaan guru SMP 1 Trenggalek, masih dua yang belum selesai yaitu KSPSS Madani karena masih menunggu penyelesaian dari Kementerian Koperasi dan Tambang PT. Djawani Ngentrong karena masih terkendala izin pertambangan dari provinsi

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		100	5.389.718.778,00	71,51	4.759.770.708,00	100	4.937.130.193,23		1.042.420.596,00	20,39	21,11	91.9	5.802.191.304,00	91,90	100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.1	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100	5.389.718.778,00	71,51	4.759.770.708,00	100	4.937.130.193,23		1.042.420.596,00	20,39	21,11	91.9	5.802.191.304,00	91,90	100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1.1.1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	5.163.287.006,00	100 %	4.149.429.661,00	100 %	4.797.083.421,23	29.17 %	1.028.387.196,00	29,17	21,44	100 %	5.177.816.857,00	100,00	100,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi penghitungan : (62,50+25+25+29,17)/4
1.1.2			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		41.67 %		41,67		100 %		100,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(∑ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun Perangkat Daerah) / (∑ Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang seharusnya Perangkat Daerah) x 100% penghitungan : (5/12)*100
1.1.3			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	96 %		98.28 %		100 %		94.95 %		94,95		100 %		100,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(∑ rupah aset dalam kondisi baik/jumlah rupiah total aset) x 100% penghitungan : (12354674197/13011189694)*100
1.1.4	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase penanganan pasca bencana	100 %	226.431.772,00		0,00	100 %	140.046.772,00	100 %	14.033.400,00	100,00	10,02	100 %	14.033.400,00	100,00	6,20	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(kejadian bencana yang menyebabkan kerusakan sarpras yang tertangani / jumlah kejadian bencana menyebabkan kerusakan sarpras yang terlaporkan x 100) penghitungan : 5/5 2 jembatan dan 3 rumah akibat bencana banjir longsor
1.1.5			Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %				100 %		100 %		100,00		100 %		100,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	(kejadian bencana yang tertangani / jumlah kejadian bencana x 100) penghitungan : 10/10 Update data Kejadian Bencana Kab. Trenggalek Tahun 2026 1Januari s/d 31 Maret 2026 Total :10 Banjir :2 Tanah Longsor : 3 gempa bumi : 2 Cuaca Ekstrem : 3
1.1.6			% Desa tangguh bencana	39,49 %				39.49 %		39.49 %		100,00		39.49 %		100,00		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	39,39% merupakan capaian sampai dengan tahun 2025 (62 desa) dengan penghitungan: (62/157)*100 untuk tahun 2026 rencana realisasi kegiatan di tw 3

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)								Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I		Tahun 2026 s/d TW II		Tahun 2026 s/d TW III		Tahun 2026 s/d TW IV									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		8		8		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		100	315.437.721.782,00		0,00	100	289.999.159.141,81		53.979.037.368,00		0,00		0,00		0,00	29,64	18,61	29.64	53.979.037.368,00	29,64	17,11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
1.1	5.02	KEUANGAN		100	315.437.721.782,00		0,00	100	289.999.159.141,81		53.979.037.368,00		0,00		0,00		0,00	29,64	18,61	29.64	53.979.037.368,00	29,64	17,11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
1.1.1	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	15.568.325.020,00		0,00	100 %	14.012.525.279,41	20.71 %	2.172.838.254,00		0,00		0,00		0,00	20,71	15,51	20.71 %	2.172.838.254,00	20,71	13,96	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	((Realisasi / Target - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) + (Realisasi / Target - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD)) * 100 % ((1/10) + (3/28)) * 100%
1.1.2			Persentase Nilai Aset dalam Kondisi Baik	90 %				90 %		90.03 %						0,00	100,03		90.03 %		100,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
1.1.3			Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang Difasilitasi	100 %				100 %		5.56 %						0,00	5,56		5.56 %		5,56		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	((0/5) + (0/1) + (0/1) + (0/1) + (0/1) + (0/2) + (0/12) + (3/12) + (3/12) + (0/12) / 9
1.1.4	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	30 %	296.613.359.949,00		0,00	30 %	272.771.376.103,35	29.25 %	51.636.653.079,00		0,00		0,00		0,00	97,50	18,93	29.25 %	51.636.653.079,00	97,50	17,41	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
1.1.5			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	46 %				46 %		42.26 %						0,00	91,87		42.26 %		91,87		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
1.1.6			Persentase laporan keuangan tepat waktu	100 Persentase				100 Persentase		12.57 Persentase						0,00	12,57		12.57 Persentase		12,57		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1472/11706
1.1.7			Persentase Penurunan SILPA	40 Persentase				40 Persentase		40 Persentase						0,00	100,00		40 Persentase		100,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
1.1.8			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	96,45 Persentase				96,45 Persentase		44.84 Persentase						0,00	46,49		44.84 Persentase		46,71		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
1.1.9	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	3,6 %	1.000.000.000,00		0,00	3.6 %	884.869.000,00	3.6 %	139.116.050,00		0,00		0,00		0,00	100,00	15,72	3.6 %	139.116.050,00	100,00	13,91	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
1.1.10	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100 Persentase	2.256.036.813,00		0,00	100 Persentase	2.330.388.759,05	100 Persentase	30.429.985,00		0,00		0,00		0,00	100,00	1,31	100 Persentase	30.429.985,00	100,00	1,35	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
1.1.11			Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	100 Persentase				100 Persentase		100 Persentase						0,00	100,00		100 Persentase		100,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-
1.1.12			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	21,29 %				21.29 %		21.29 %						0,00	100,00		21.29 %		100,00		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	-

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		100	9.110.895.758,00		0,00	100	8.488.872.487,17		1.841.033.447,00	12,52	21,69	12.52	1.841.033.447,00	12,52	20,21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
1.1	5.01	PERENCANAAN		100	8.565.895.758,00		0,00	100	8.001.801.487,17		1.819.944.947,00	19,16	22,74	19.16	1.819.944.947,00	19,16	21,25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
1.1.1	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	7.035.253.562,00		0,00	100 %	6.633.852.891,17	5.98 %	1.659.735.673,00	5,98	25,02	5.98 %	1.659.735.673,00	5,98	23,59	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	0,235294 + 0 + 0,001354 + 0,002436 / 4 = 5,98%
1.1.2			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %				100 %		25 %		25,00		25 %		25,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	(26/104)*100= 25%
1.1.3			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	91,58 %				91.58 %		89.75 %		98,00		89.75 %		98,63		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	((Rp7.815.410.926,00/ Rp8.707.783.988,00)*100%)=89,75 %
1.1.4	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD	100 %	545.642.196,00		0,00	95 %	487.645.396,00	0 %	71.405.400,00	0,00	14,64	0 %	71.405.400,00	0,00	13,09	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Indikator dapat dihitung di Triwulan IV
1.1.5			Persentase Keselarasan RPJMD dan Renstra Perangkat daerah	100 %				95 %		0 %		0,00		0 %		0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Indikator dapat dihitung di Triwulan IV
1.1.6	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		985.000.000,00		0,00	95 %	880.303.200,00	0 %	88.803.874,00	0,00	10,09	0 %	88.803.874,00	0,00	9,02	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Kinerja dapat dihitung di TW IV
1.1.7			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA					95 %		0 %		0,00		0 %		0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Kinerja dapat dihitung di TW IV
1.1.8			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					95 %		0 %		0,00		0 %		0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Kinerja dapat dihitung di TW IV
1.2	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		100	545.000.000,00		0,00	100	487.071.000,00		21.088.500,00	0,00	4,33	0	21.088.500,00	0,00	3,87	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
1.2.1	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan daerah		545.000.000,00		0,00	95 %	487.071.000,00	0 %	21.088.500,00	0,00	4,33	0 %	21.088.500,00	0,00	3,87	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Indikator dapat dihitung di Triwulan IV
1.2.2			Persentase Produk Inovasi berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan daerah dan penyelesaian permasalahan daerah					95 %		0 %		0,00		0 %		0,00		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Indikator dapat dihitung di Triwulan IV

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		100	4.874.118.108,00	58,7	4.177.046.454,00	100	4.445.983.516,42		866.292.986,00	13,80	19,48	72.5	5.043.339.440,00	72,50	100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
1.1	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		100	847.958.365,00	57,42	801.446.130,00	100	647.958.366,00		8.387.890,00	6,09	1,29	63.51	809.834.020,00	63,51	95,50	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
1.1.1	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	75,20 Nilai	755.458.365,00		0,00	75.20 Nilai	583.958.366,00	0 Nilai	5.279.890,00	0,00	0,90	0 Nilai	5.279.890,00	0,00	0,70	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca muncul pada akhir tahun
1.1.2	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	100 %	92.500.000,00		0,00	100 %	64.000.000,00	0 %	3.108.000,00	0,00	4,86	0 %	3.108.000,00	0,00	3,36	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Belum ada realisasi, Pengembangan koleksi budaya etnis masih dalam Tahap Penelusuran dan seleksi
1.2	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		100	4.026.159.743,00	59,11	3.375.600.324,00	100	3.798.025.150,42		857.905.096,00	16,36	22,59	75.47	4.233.505.420,00	75,47	100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
1.2.1	2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	90 %	3.937.017.377,00	89.89 %	3.266.878.941,00	90 %	3.743.667.515,42	89.89 %	851.597.096,00	99,88	22,75	100 %	4.118.476.037,00	100,00	100,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	3.110.688.336 / 3.460.338.336 = 89,89
1.2.2			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		30.77 %		30,77		100 %		100,00		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Administrasi keuangan + Administrasi Kepegawaian + Penyediaan Jasa=((39,12+33,96+25+25)/4)= 30,77
1.2.3			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		20.4 %		20,40		100 %		100,00		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	KAK, Perjanjian Kinerja, DPA, RKA, Pohon Kinerja, Rencana Aksi, Dialog Kinerja = 7 dokumen LPPD, Lapdu 3 dokumen, Evaluasi Renja 1 laporan, LKJIP, LKPJ, SKM 3 dokumen, laporan keuangan bulanan 3 dokumen, evaluasi dialog kinerja 1 dokumen = 14 dokumen =((7/16)+(14/37))/4*100 = 20,4%
1.2.4	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat Ketersediaan Arsip	63 Persentase	72.755.256,00		0,00	63 Persentase	47.360.435,00	0 Persentase	6.308.000,00	0,00	13,32	0 Persentase	6.308.000,00	0,00	8,67	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Penrhitungan dilakukan pada akhir tahun
1.2.5	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	86,00 %	14.387.110,00		0,00	86.00 %	5.972.200,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Perhitungan dilakukan pada akhir tahun
1.2.6	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	100 %	2.000.000,00		0,00	100 %	1.025.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Perhitungan dilakukan pada akhir tahun

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		100	9.345.462.369,00	75,18	9.067.902.418,00	100	8.593.718.255,29		1.855.058.633,00	24,42	21,59	99.6	10.922.961.051,00	99,60	100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1.1	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		100	9.345.462.369,00	75,18	9.067.902.418,00	100	8.593.718.255,29		1.855.058.633,00	24,42	21,59	99.6	10.922.961.051,00	99,60	100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1.1.1	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	8.935.013.169,00	126.42 %	8.677.631.203,00	100 %	8.423.636.455,29	43.68 %	1.853.758.633,00	43,68	22,01	170.1 %	10.531.389.836,00	100,00	100,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	=((6/15)+(18/38))*100/2
1.1.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95 %		98.45 %		99 %		98.45 %		99,44		196.9 %		100,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	=15073134751/15309811811*100 Sumberdata Rekon TW IV tahun 2025
1.1.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		25.79 %		25,79		100 %		100,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	=((40,49)+(29,73)+(10,71)+(22,22))/4
1.1.4	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	5 %	236.555.400,00		0,00	5 %	64.060.000,00	4.32 %	1.300.000,00	86,40	2,03	4.32 %	1.300.000,00	86,40	0,55	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	=25830/597713*100 Sumberdata : Bangduk kemendagri per 31 maret 2026
1.1.5			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	100 %				100 %		78.79 %		78,79		78.79 %		78,79		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	=117685/149365*100 Sumberdata : Bangduk kemendagri per 31 maret 2026
1.1.6	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	99,60 %	78.260.000,00		0,00	99.60 %	55.000.000,00	99.98 %	0,00	100,38	0,00	99.98 %	0,00	100,00	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	=161860/161894*100 Sumber data DKB smt 2 tahun 25
1.1.7			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %				100 %		100 %		100,00		100 %		100,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	=6/6*100
1.1.8			Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %				100 %		100 %		100,00		100 %		100,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	=4/4*100
1.1.9			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %				100 %		100 %		100,00		100 %		100,00		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	=1135/1135*100
1.1.10	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100 %	75.257.800,00		0,00	100 %	42.997.800,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	0,00	100,00	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	=178/178*100 - Konfirmasi data/NIK= 24 dok - Konsolidasi/Sinkronisasi data kependudukan= 127 dok - Kecukupan permintaan data agregat = 27 dok
1.1.11	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 %	20.376.000,00		0,00	100 %	8.024.000,00	23.17 %	0,00	23,17	0,00	23.17 %	0,00	23,17	0,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	=(95+0)+(408+2)*100

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		100	197.536.480.344,00	65,59	172.853.606.948,71	100	173.869.771.694,98		30.208.779.645,00	30,35	17,37	95.94	203.062.386.593,71	95,94	100,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	186.845.546.874,00	67,59	163.073.256.204,71	100	169.052.496.694,98		30.208.779.645,00	32,56	17,87	100	193.282.035.849,71	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	128.773.832.555,00	100 %	106.003.473.469,00	100 %	126.546.917.344,98	27.08 %	30.067.129.362,00	27,08	23,76	100 %	136.070.602.831,00	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Juml. capaian dok Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah+Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/target ok Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah+Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD x 100% =13 (4+9) /48 (7+41)*100%=27,08%
1.1.2			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		25 %		25,00		100 %		100,00		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Pelayanan administrasi perkantoran yang difasilitasi meliputi a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Umum Perangkat Daerah c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah e. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah =24/96*100%=25%
1.1.3			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95,82 %		94.76 %		99.35 %		95.68 %		96,31		100 %		100,00		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	=884137109864/ 924021502166*100% =95,68%
1.1.4	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %	52.226.762.319,00		0,00	84 %	36.602.327.350,00	20.10 %	106.714.983,00	23,93	0,29	20.1 %	106.714.983,00	23,93	0,20	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	=7894/37605*100%=20,10
1.1.5			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				75 %		23.24 %		30,99		23.24 %		30,99		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1587/6829*100%
1.1.6			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				70 %		23.44 %		33,49		23.44 %		33,49		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1599/6823*100%=23,44
1.1.7			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		38.38 %		38,38		38.38 %		38,38		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	=608/1584*100%=38,38
1.1.8			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya					95 %		26.75 %		28,16		26.75 %		0,00		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	=1931/7220*100%
1.1.9			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		19.33 %		19,33		19.33 %		19,33		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	=1346/6965*100
1.1.10			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		17.44 %		17,44		17.44 %		17,44		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	=14823/84983*100%
1.1.11			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		22.32 %		22,32		22.32 %		22,32		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	=100156/448634*100
1.1.12			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		42.45 %		42,45		42.45 %		42,45		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	=4298/10125*100
1.1.13			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		24.55 %		24,55		24.55 %		24,55		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	=13355/54395*100
1.1.14			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		22.84 %		22,84		22.84 %		22,84		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	=1498/6560*100%
1.1.15			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		9.60 %		9,60		9.6 %		9,60		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	=43085/448634*100%
1.1.16	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100 %	737.068.000,00		0,00	100 %	1.126.876.000,00	0 %	1.170.000,00	0,00	0,10	0 %	1.170.000,00	0,00	0,16	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Jadwal Pengembangan Kompetensi dimulai pada TW II (menyesuaikan jadwal UPT Latkesmas Murnajati)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.1.17	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang memenuhi persyaratan perizinan	88 %	721.916.000,00		0,00	88 %	629.416.000,00	87.98 %	26.288.200,00	99,98	4,18	87.98 %	26.288.200,00	99,98	3,64	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	=1910/2171*100% =87,98
1.1.18	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	66 %	4.385.968.000,00		0,00	46 %	4.146.960.000,00	16.53 %	7.477.100,00	35,93	0,18	16.53 %	7.477.100,00	25,05	0,17	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	=8300/50205*100%
1.2	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		100	10.690.933.470,00	60,51	9.780.350.744,00	100	4.817.275.000,00		0,00	22,91	0,00	83.42	9.780.350.744,00	83,42	91,48	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1.2.1	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15- 19)		407.020.879,00		0,00	20.7	196.400.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Ada Realisasi
1.2.2	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	8,2 %	6.303.712.591,00	6.96 %	5.420.392.987,00	8.2 %	905.075.000,00	6.79 %	0,00	82,80	0,00	13.75 %	5.420.392.987,00	100,00	85,99	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Unmednet/PUS*100 7698/113300*100
1.2.3			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	72,5 %				72.5 %		71.42 %		98,51		71.42 %		99,19		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	80.924/113300*100 mCPR/PUS*100
1.2.4			Peserta Aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	20 %				20 %		20.71 %		103,55		20.71 %		100,00		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	16845/81325*100 Peserta KB Aktif MKJP/Peserta KB Aktif Semua Metode*100
1.2.5	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	65,23 %	3.980.200.000,00		0,00	65.23 %	3.715.800.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Belum Ada Realisasi
2		PUSKESMAS SURUH		100	3.657.730.700,00	64,78	3.430.327.300,00	100	3.670.246.000,00		0,00	28,71	0,00	93.49	3.430.327.300,00	93,49	93,78	PUSKESMAS SURUH	
2.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	3.657.730.700,00	64,78	3.430.327.300,00	100	3.670.246.000,00		0,00	28,71	0,00	93.49	3.430.327.300,00	93,49	93,78	PUSKESMAS SURUH	
2.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	3.000.000.000,00		0,00	100 %	3.000.000.000,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	0,00	100,00	0,00	PUSKESMAS SURUH	3/3*100 = 100%, Realisasi Kinerja Persentase BLUD menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan sebelum tanggal 5 bulan selanjutnya
2.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	84 %	650.114.700,00		0,00	85 %	554.365.000,00	20 %	0,00	23,53	0,00	20 %	0,00	23,81	0,00	PUSKESMAS SURUH	258 / 1290 * 100 = 20 %
2.1.3			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		20.85 %		20,85		20.85 %		20,85		PUSKESMAS SURUH	44 / 211 * 100 = 20,85%
2.1.4			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya					95 %		27.69 %		29,15		27.69 %		0,00		PUSKESMAS SURUH	67/242 * 100 = 27,69 %
2.1.5			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		47.06 %		47,06		47.06 %		47,06		PUSKESMAS SURUH	96/204*100 = 47.06%
2.1.6			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		0 %		0,00		0 %		0,00		PUSKESMAS SURUH	0/2901*100 = 0%
2.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		28.17 %		28,17		28.17 %		28,17		PUSKESMAS SURUH	3415 / 12122 * 100 = 28,17 %
2.1.8			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		34.79 %		34,79		34.79 %		34,79		PUSKESMAS SURUH	127 / 365 * 1 00 = 34,79 %
2.1.9			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		33.82 %		33,82		33.82 %		33,82		PUSKESMAS SURUH	2542 / 7516 * 100 = 33,82 %
2.1.10			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				80 %		23.47 %		29,34		23.47 %		31,29		PUSKESMAS SURUH	50 / 213 * 100 = 23,47 %
2.1.11			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				78 %		23.11 %		29,63		23.11 %		33,01		PUSKESMAS SURUH	49 / 212 * 100 = 23,11 %
2.1.12			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		50.94 %		50,94		50.94 %		50,94		PUSKESMAS SURUH	27 / 53 *100 = 50,94 %
2.1.13			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		41.11 %		41,11		41.11 %		41,11		PUSKESMAS SURUH	583/1418 *100 = 41,11 %
2.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan		7.616.000,00		0,00	46 Persentase	115.881.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS SURUH	0/8507*100%=0
3		PUSKESMAS PUCANGANAK		100	2.345.394.980,00	66,48	2.070.696.371,00	100	2.408.206.000,00		181.419.184,00	39,76	7,53	100	2.252.115.555,00	100,00	96,02	PUSKESMAS PUCANGANAK	
3.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	2.345.394.980,00	66,48	2.070.696.371,00	100	2.408.206.000,00		181.419.184,00	39,76	7,53	100	2.252.115.555,00	100,00	96,02	PUSKESMAS PUCANGANAK	
3.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	1.900.000.000,00	100 %	1.712.779.349,00	100 %	1.900.000.000,00	100 %	181.419.184,00	100,00	9,55	100 %	1.894.198.533,00	100,00	99,69	PUSKESMAS PUCANGANAK	3/3*100 (Puskesmas Pucanganak)
3.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %	437.778.980,00		0,00	82 %	441.187.000,00	20.17 %	0,00	24,60	0,00	20.17 %	0,00	24,01	0,00	PUSKESMAS PUCANGANAK	171/848*100
3.1.3			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				87 %		19.38 %		22,28		19.38 %		25,84		PUSKESMAS PUCANGANAK	25/129*100
3.1.4			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %				73 %		24.03 %		32,92		24.03 %		24,03		PUSKESMAS PUCANGANAK	31/129*100
3.1.5			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		20.71 %		20,71		20.71 %		20,71		PUSKESMAS PUCANGANAK	29/140*100
3.1.6			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		17.65 %		17,65		17.65 %		17,65		PUSKESMAS PUCANGANAK	9/51*100
3.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya					95 %		42.03 %		44,24		42.03 %		0,00		PUSKESMAS PUCANGANAK	58/138*100
3.1.8			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		18.88 %		18,88		18.88 %		18,88		PUSKESMAS PUCANGANAK	27/143*100
3.1.9			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		0 %		0,00		0 %		0,00		PUSKESMAS PUCANGANAK	0/1883*100
3.1.10			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		26.1 %		26,10		26.1 %		26,10		PUSKESMAS PUCANGANAK	2880/11036*100

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
3.1.11			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		36.27 %		36,27		36.27 %		36,27		PUSKESMAS PUCANGANAK	111/306*100
3.1.12			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		30.23 %		30,23		30.23 %		30,23		PUSKESMAS PUCANGANAK	360/1191*100
3.1.13			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		24 %		24,00		24 %		24,00		PUSKESMAS PUCANGANAK	958/3992*100
3.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	84 Persentase	7.616.000,00		0,00	46 Persentase	67.019.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PUCANGANAK	0/6435*100
4		PUSKESMAS REJOWINANGUN		100	2.275.947.420,00	61,91	2.002.807.378,00	100	2.426.114.000,00		0,00	27,56	0,00	89.47	2.002.807.378,00	89,47	88,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN	
4.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	2.275.947.420,00	61,91	2.002.807.378,00	100	2.426.114.000,00		0,00	27,56	0,00	89.47	2.002.807.378,00	89,47	88,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN	
4.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	1.700.000.000,00	91.07 %	1.490.459.975,00	100 %	1.700.000.000,00	25 %	0,00	25,00	0,00	100 %	1.490.459.975,00	100,00	87,67	PUSKESMAS REJOWINANGUN	3/12x10=25%
4.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %	568.332.180,00		0,00	82 %	611.716.500,00	27.08 %	0,00	33,02	0,00	27.08 %	0,00	32,24	0,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN	Kinerja TW 1 : 404 / 1492 X 100% = 27,08
4.1.3			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				81 %		18.18 %		22,44		18.18 %		24,24		PUSKESMAS REJOWINANGUN	Kinerja TW 1 : 64 / 352 X 100% = 18,18
4.1.4			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				68 %		16.98 %		24,97		16.98 %		24,26		PUSKESMAS REJOWINANGUN	Kinerja TW 1 : 64 / 377 X 100% = 16,98
4.1.5			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		28 %		28,00		28 %		28,00		PUSKESMAS REJOWINANGUN	Kinerja TW 1 : 21 / 75X 100% = 28
4.1.6			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya					95 %		16.20 %		17,05		16.2 %		0,00		PUSKESMAS REJOWINANGUN	Kinerja TW 1 : 116 / 716 X 100% = 16,20
4.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		21.18 %		21,18		21.18 %		21,18		PUSKESMAS REJOWINANGUN	Kinerja TW 1 : 61 / 288 X 100% = 21,18
4.1.8			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		28.12 %		28,12		28.12 %		28,12		PUSKESMAS REJOWINANGUN	Kinerja TW 1 : 5772 / 20524 X 100% = 28,12
4.1.9			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		22.61 %		22,61		22.61 %		22,61		PUSKESMAS REJOWINANGUN	Kinerja TW 1 : 410 / 1813 X 100% = 22,61
4.1.10			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		20.67 %		20,67		20.67 %		20,67		PUSKESMAS REJOWINANGUN	Kinerja TW 1 : 62 / 300 X 100%=20,67
4.1.11			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		0 %		0,00		0 %		0,00		PUSKESMAS REJOWINANGUN	Kinerja TW 1 : 0 / 5525 X 100% = 0 (jadwal kegiatan pada tahun ajaran baru)
4.1.12			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		67.60 %		67,60		67.6 %		67,60		PUSKESMAS REJOWINANGUN	Kinerja TW 1 : 315 / 466 X 100% = 67,60
4.1.13			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		16.68 %		16,68		16.68 %		16,68		PUSKESMAS REJOWINANGUN	Kinerja TW 1 : 1264/7577 X 100% = 16,68
4.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	76 Persentase	7.615.240,00		0,00	46 Persentase	114.397.500,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN	Kinerja TW 1 : 0/10393*100%=0
5		PUSKESMAS BENDUNGAN		100	3.301.083.832,00	50,17	2.545.734.140,00	100	3.273.788.000,00		0,00	33,26	0,00	83.43	2.545.734.140,00	83,43	77,12	PUSKESMAS BENDUNGAN	
5.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	3.301.083.832,00	50,17	2.545.734.140,00	100	3.273.788.000,00		0,00	33,26	0,00	83.43	2.545.734.140,00	83,43	77,12	PUSKESMAS BENDUNGAN	
5.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.500.000.000,00		0,00	100 %	2.500.000.000,00	25 %	0,00	25,00	0,00	25 %	0,00	25,00	0,00	PUSKESMAS BENDUNGAN	adminstrasi perkantoran di puskesmas : umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan = 3/12 x 100 % = 25 %
5.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %	794.183.832,00		0,00	100 %	685.897.500,00	39.66 %	0,00	39,66	0,00	39.66 %	0,00	39,66	0,00	PUSKESMAS BENDUNGAN	23/58 *100% = 39,66%
5.1.3			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		35.52 %		35,52		35.52 %		35,52		PUSKESMAS BENDUNGAN	65/183 x 100% = 35,52%
5.1.4			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		21.09 %		21,09		21.09 %		21,09		PUSKESMAS BENDUNGAN	3886/18424 x 100% = 21,09 %
5.1.5			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		151.98 %		100,00		100 %		100,00		PUSKESMAS BENDUNGAN	3795/2497 x 100% = 151,98 %
5.1.6			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				87 %		19.51 %		22,43		19.51 %		26,01		PUSKESMAS BENDUNGAN	64/328 x 100% = 19,51 %
5.1.7			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				80 %		17.93 %		22,41		17.93 %		25,61		PUSKESMAS BENDUNGAN	64/ 357 x 100% = 17,93 %
5.1.8			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %				95 %		21.09 %		22,20		21.09 %		21,09		PUSKESMAS BENDUNGAN	85/403 x 100 % = 21,09 %
5.1.9			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		4.14 %		4,14		4.14 %		4,14		PUSKESMAS BENDUNGAN	113/ 2729 x 100% = 4,14 %
5.1.10			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		28.95 %		28,95		28.95 %		28,95		PUSKESMAS BENDUNGAN	130 / 449 x 100% = 28,95 %
5.1.11			Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	88 %				88 %		23.72 %		26,95		23.72 %		26,95		PUSKESMAS BENDUNGAN	376 / 1585 x 100 % = 23, 72%
5.1.12			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		24.12 %		24,12		24.12 %		24,12		PUSKESMAS BENDUNGAN	62/257 x 100% = 24,12 %
5.1.13			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		23.11 %		23,11		23.11 %		23,11		PUSKESMAS BENDUNGAN	404 / 1748 x 100% = 23,11 %
5.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	84 Persentase	6.900.000,00		0,00	46 Persentase	87.890.500,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BENDUNGAN	0/8549 x 100=0%
6		PUSKESMAS DONGKO		100	4.022.598.764,00	71,35	3.468.117.409,00	100	4.232.061.000,00		0,00	45,81	0,00	100	3.468.117.409,00	100,00	86,22	PUSKESMAS DONGKO	
6.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	4.022.598.764,00	71,35	3.468.117.409,00	100	4.232.061.000,00		0,00	45,81	0,00	100	3.468.117.409,00	100,00	86,22	PUSKESMAS DONGKO	
6.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	3.350.000.000,00		0,00	100 %	3.350.000.000,00	25 %	0,00	25,00	0,00	25 %	0,00	25,00	0,00	PUSKESMAS DONGKO	3/12 x 100 =25 ketersediaan dokumen perencanaan,pengangaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
6.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %	664.982.764,00		0,00	94 %	790.711.000,00	27.85 %	0,00	29,63	0,00	27.85 %	0,00	33,15	0,00	PUSKESMAS DONGKO	388/1393*100%= 27,85 % Realisasi masih sampai Maret
6.1.3			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				69 %		29.93 %		43,38		29.93 %		39,91		PUSKESMAS DONGKO	88/294*100% = 29,93 % Realisasi sampai Maret
6.1.4			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		70.59 %		70,59		70.59 %		70,59		PUSKESMAS DONGKO	48/68*100%=70,59 % realisasi sampai Maret
6.1.5			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		17.53 %		17,53		17.53 %		17,53		PUSKESMAS DONGKO	61/348*100%= 17,53% realisasi sampai Bulan Maret
6.1.6			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		15.87 %		15,87		15.87 %		15,87		PUSKESMAS DONGKO	613/3863*100%=15,87 % realisasi sampai Maret
6.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		24.93 %		24,93		24.93 %		24,93		PUSKESMAS DONGKO	5740/23023*100%=24,93 % Realisasi Sampai Dengan Maret
6.1.8			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		56.35 %		56,35		56.35 %		56,35		PUSKESMAS DONGKO	275/488/100%=56,35 % Realisasi Sampai Bulan Maret
6.1.9			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		26 %		26,00		26 %		26,00		PUSKESMAS DONGKO	1900/7307*100%=26 % Realisasi sampai dengan Maret
6.1.10			Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	70 %				69 %		29.83 %		43,23		29.83 %		42,61		PUSKESMAS DONGKO	88/295*100% = 29,83 % Realiasasi Sampai Bulan Maret
6.1.11			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		29.13 %		29,13		29.13 %		29,13		PUSKESMAS DONGKO	74/254*100%= 29,13 % Realisasi Sampai Bulan Maret
6.1.12			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %				95 %		20.26 %		21,33		20.26 %		20,26		PUSKESMAS DONGKO	77/380*100%= 20,26 % Realisasi sampai TW 1 (Jan-Mar)
6.1.13			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		51.11 %		51,11		51.11 %		51,11		PUSKESMAS DONGKO	969/1896*100%= 51,11 % Realisasi Sampai Bulan Maret
6.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	82 Persentase	7.616.000,00		0,00	46 Persentase	91.350.000,00	14.95 Persentase	0,00	32,50	0,00	14.95 Persentase	0,00	18,23	0,00	PUSKESMAS DONGKO	14,95 Realiasi sampai bulan Maret
7		PUSKESMAS DURENAN		100	3.424.873.340,00	71,86	3.056.575.016,00	100	3.436.329.000,00		44.992.726,00	37,84	1,31	100	3.101.567.742,00	100,00	90,56	PUSKESMAS DURENAN	
7.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	3.424.873.340,00	71,86	3.056.575.016,00	100	3.436.329.000,00		44.992.726,00	37,84	1,31	100	3.101.567.742,00	100,00	90,56	PUSKESMAS DURENAN	
7.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.800.000.000,00	86.93 %	2.473.666.346,00	100 %	2.800.000.000,00	25 %	44.992.726,00	25,00	1,61	100 %	2.518.659.072,00	100,00	89,95	PUSKESMAS DURENAN	3 Dokumen Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian = 3 / 12 Dokumen dalam setahun x 100 = 25%
7.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %	617.257.340,00		0,00	75 %	562.176.000,00	33.47 %	0,00	44,63	0,00	33.47 %	0,00	44,63	0,00	PUSKESMAS DURENAN	Realisasi tw 1 = 82 bayi / target sesuai SPM 245 x 100 = 33,47 %
7.1.3			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				73 %		30.17 %		41,33		30.17 %		43,10		PUSKESMAS DURENAN	Realisasi tw 1 = 73 ibu / Target sesuai SPM 242 x 100 = 30,17 %
7.1.4			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %				95 %		25.19 %		26,52		25.19 %		25,19		PUSKESMAS DURENAN	Realisasi tw 1 = 66 orang / Target sesuai SPM 262 x 100 = 25,19 %
7.1.5			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		7.07 %		7,07		7.07 %		7,07		PUSKESMAS DURENAN	Realisasi tw 1 = 22 / target sesuai SIPD 311 x 100 = 7,07% Target SIPD = 311 Orang, target SPM = 227 orang
7.1.6			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		44.59 %		44,59		44.59 %		44,59		PUSKESMAS DURENAN	Realisasi tw 1 = 1286 orang / target sesuai SIPD 2884 x 100 = 44,59% Target SIPD = 2884 Orang, target SPM = 3091
7.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		18.31 %		18,31		18.31 %		18,31		PUSKESMAS DURENAN	Realiasi tw 1 = 2929 orang / target sesuai SPM 15999 x 100 = 18,31%
7.1.8			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		61.64 %		61,64		61.64 %		61,64		PUSKESMAS DURENAN	Realisasi tw 1 = 241 orang / target sesuai SPM 391 x 100 = 61,64%
7.1.9			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		28.63 %		28,63		28.63 %		28,63		PUSKESMAS DURENAN	Realiasi tw 1 = 440 / target sesuai SPM 1537 x 100 = 28,63%
7.1.10			Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %				92 %		25.92 %		28,17		25.92 %		30,86		PUSKESMAS DURENAN	Realiasi tw 1 = 325 balita / target sesuai SPM 1254 x 100 = 25,92%
7.1.11			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		30.08 %		30,08		30.08 %		30,08		PUSKESMAS DURENAN	Realiasi tw 1 = 71 bumil / target sesuai SIPD 236 x 100 = 30,08% Target sesuai SIPD = 236 orang, target SPM = 240 orang
7.1.12			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		56.96 %		56,96		56.96 %		56,96		PUSKESMAS DURENAN	Realiasi tw 1 = 45 orang / target sesuai SIPD 79 x 100 = 56,96% Target SIPD = 79 orang, target SPM = 78 orang
7.1.13			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		37.18 %		37,18		37.18 %		37,18		PUSKESMAS DURENAN	Realisasi tw 1 = 1899 orang / target sesuai SPM 5108 x 100 = 37,18%
7.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	52 Persentase	7.616.000,00		0,00	46 Persentase	74.153.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS DURENAN	diisi tw 2
8		PUSKESMAS GANDUSARI		100	3.295.442.420,00	67,15	2.427.932.539,00	100	3.271.661.500,00		0,00	25,15	0,00	92.3	2.427.932.539,00	92,30	73,68	PUSKESMAS GANDUSARI	
8.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	3.295.442.420,00	67,15	2.427.932.539,00	100	3.271.661.500,00		0,00	25,15	0,00	92.3	2.427.932.539,00	92,30	73,68	PUSKESMAS GANDUSARI	
8.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.709.400.000,00	100 %	1.915.795.694,00	100 %	2.709.400.000,00	25 %	0,00	25,00	0,00	100 %	1.915.795.694,00	100,00	70,71	PUSKESMAS GANDUSARI	Rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis jasa administrasi perkantoran 25% dengan penghitungan 3/12*100% = 25%
8.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %	578.426.420,00		0,00	80 %	465.910.000,00	21.82 %	0,00	27,28	0,00	21.82 %	0,00	29,09	0,00	PUSKESMAS GANDUSARI	Penghitungan 67/307*100% = 21,82%
8.1.3			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				77 %		22.15 %		28,77		22.15 %		31,64		PUSKESMAS GANDUSARI	Penghitungan 68/307*100% = 22,15%
8.1.4			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %				95 %		24.80 %		26,11		24.8 %		24,80		PUSKESMAS GANDUSARI	92/371*100% = 24,80%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
8.1.5			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		23.68 %		23,68		23.68 %		23,68		PUSKESMAS GANDUSARI	63/266*100% = 23,68%
8.1.6			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		0 %		0,00		0 %		0,00		PUSKESMAS GANDUSARI	0/2448*100% = 0 (Kegiatan dilaksanakan mulai ajaran baru)
8.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		18.62 %		18,62		18.62 %		18,62		PUSKESMAS GANDUSARI	4338/23293*100% = 18,62%
8.1.8			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		34.44 %		34,44		34.44 %		34,44		PUSKESMAS GANDUSARI	177/514*100% = 34,44%
8.1.9			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		29.66 %		29,66		29.66 %		29,66		PUSKESMAS GANDUSARI	593/1999*100% = 29,66%
8.1.10			Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %				82 %		23.33 %		28,45		23.33 %		27,77		PUSKESMAS GANDUSARI	383/1642*100% = 23,33%
8.1.11			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		20.19 %		20,19		20.19 %		20,19		PUSKESMAS GANDUSARI	64/317*100% = 20,19%
8.1.12			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		25 %		25,00		25 %		25,00		PUSKESMAS GANDUSARI	25% = 33/132*100%
8.1.13			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		22.80 %		22,80		22.8 %		22,80		PUSKESMAS GANDUSARI	1663/7295*100% = 22,80%
8.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	20 Persentase	7.616.000,00		0,00	46 Persentase	96.351.500,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS GANDUSARI	Kegiatan survey dilaksanakan di TB II dengan penghitungan 0/13120*100%
9		PUSKESMAS KARANGANYAR		100	2.471.483.680,00	64,98	2.298.801.765,00	100	2.525.343.000,00		8.700,00	24,10	0,00	89.08	2.298.810.465,00	89,08	93,01	PUSKESMAS KARANGANYAR	
9.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	2.471.483.680,00	64,98	2.298.801.765,00	100	2.525.343.000,00		8.700,00	24,10	0,00	89.08	2.298.810.465,00	89,08	93,01	PUSKESMAS KARANGANYAR	
9.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.000.000.000,00		0,00	100 %	2.000.000.000,00	25 %	8.700,00	25,00	0,00	25 %	8.700,00	25,00	0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR	Administrasi Perkantoran Administrasi Pendapatan Administrasi Kepegawaian Administrasi Umum Pelayanan BLUD
9.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %	463.867.680,00		0,00	100 %	407.178.000,00	61.11 %	0,00	61,11	0,00	61.11 %	0,00	61,11	0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR	Realisasi Kinerja TW I : 44/72 X 100% = 61,11%
9.1.3			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		0 %		0,00		0 %		0,00		PUSKESMAS KARANGANYAR	Realisasi Kinerja TW I :0/2070X 100% = 0 Karena Kegiatan Belum Berjalan
9.1.4			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		24.72 %		24,72		24.72 %		24,72		PUSKESMAS KARANGANYAR	Realisasi Kinerja TW I : 3088/12492 X 100% = 24,72 %
9.1.5			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		25.08 %		25,08		25.08 %		25,08		PUSKESMAS KARANGANYAR	Realisasi Kinerja TW I : 76/303 X 100% = 25,08%
9.1.6			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		25.57 %		25,57		25.57 %		25,57		PUSKESMAS KARANGANYAR	Realisasi Kinerja TW I : 301/1177 X 100% = 25,57%
9.1.7			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		33.30 %		33,30		33.3 %		33,30		PUSKESMAS KARANGANYAR	Realisasi Kinerja TW I : 675/2027 X 100% = 33,30 %
9.1.8			Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %				82 %		20.34 %		24,80		20.34 %		24,21		PUSKESMAS KARANGANYAR	Realisasi Kinerja TW I : 189/929 X 100% = 20,34%
9.1.9			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				69 %		30.97 %		44,88		30.97 %		41,29		PUSKESMAS KARANGANYAR	Realisasi Kinerja TW I : 48/155 X 100% = 30,97%
9.1.10			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				67 %		19.36 %		28,90		19.36 %		27,66		PUSKESMAS KARANGANYAR	Realisasi Kinerja TW I : 48/248 X 100% = 19,36%
9.1.11			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		34.44 %		34,44		34.44 %		34,44		PUSKESMAS KARANGANYAR	Realisasi Kinerja TW I : 62/180 X 100% = 34,44%
9.1.12			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya					95 %		33.33 %		35,08		33.33 %		0,00		PUSKESMAS KARANGANYAR	Realisasi Kinerja TW I : 57/171 X 100% = 33,33 %
9.1.13			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		12.96 %		12,96		12.96 %		12,96		PUSKESMAS KARANGANYAR	Realisasi Kinerja TW I : 28/216 X 100% = 12,96%
9.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	66 Persentase	7.616.000,00		0,00	46 Persentase	118.165.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KARANGANYAR	Realisasi Kinerja TW I : Jumlah yang dikaji/Jumlah KK (0/5765=0)
10		PUSKESMAS PANDEAN		100	3.378.080.144,00	60,26	2.970.117.796,00	100	3.451.260.000,00		14.500,00	36,11	0,00	96.37	2.970.132.296,00	96,37	87,92	PUSKESMAS PANDEAN	
10.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	3.378.080.144,00	60,26	2.970.117.796,00	100	3.451.260.000,00		14.500,00	36,11	0,00	96.37	2.970.132.296,00	96,37	87,92	PUSKESMAS PANDEAN	
10.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Yang Di Fasilitasi	100 %	2.800.000.000,00	100 %	2.400.793.669,00	100 %	2.800.000.000,00	25 %	14.500,00	25,00	0,00	100 %	2.400.808.169,00	100,00	85,74	PUSKESMAS PANDEAN	3/12 x 100 =25 ketersediaan dokumen perencanaan,pengangaran,dan evaluasi kinerja perangkat daerah
10.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %	565.396.786,00		0,00	79 %	586.175.000,00	19.32 %	0,00	24,46	0,00	19.32 %	0,00	25,76	0,00	PUSKESMAS PANDEAN	57/295*100=19,32%
10.1.3			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				76 %		22.71 %		29,88		22.71 %		32,44		PUSKESMAS PANDEAN	67/295x100=22,71%
10.1.4			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya					95 %		19.36 %		20,38		19.36 %		0,00		PUSKESMAS PANDEAN	67/346X100=19,36
10.1.5			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		33.33 %		33,33		33.33 %		33,33		PUSKESMAS PANDEAN	52/156x100= 33,33%
10.1.6			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		22.86 %		22,86		22.86 %		22,86		PUSKESMAS PANDEAN	651/2848 x 100 = 22,86%
10.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		21.19 %		21,19		21.19 %		21,19		PUSKESMAS PANDEAN	4519/21322x100= 21,19%
10.1.8			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		40.82 %		40,82		40.82 %		40,82		PUSKESMAS PANDEAN	238/583x100= 40,82%
10.1.9			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		36.51 %		36,51		36.51 %		36,51		PUSKESMAS PANDEAN	836/2290x100=36,51
10.1.10			Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %				75 %		31.83 %		42,44		31.83 %		37,89		PUSKESMAS PANDEAN	430/1351x100= 31,83%
10.1.11			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		22.91 %		22,91		22.91 %		22,91		PUSKESMAS PANDEAN	63/275x100=22,91%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
10.1.12			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		14.29 %		14,29		14.29 %		14,29		PUSKESMAS PANDEAN	10/70X100=14,29%
10.1.13			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		18.90 %		18,90		18.9 %		18,90		PUSKESMAS PANDEAN	1225/6481X100=18,90%
10.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	72 Persentase	12.683.358,00		0,00	46 Persentase	65.085.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PANDEAN	Kegiatan dilaksanakan di TB 2
11		PUSKESMAS BARUHARJO		100	3.192.988.000,00	49,87	2.769.463.871,00	100	3.351.012.500,00		300.209.202,00	32,84	8,96	82.71	3.069.673.073,00	82,71	96,14	PUSKESMAS BARUHARJO	
11.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	3.192.988.000,00	49,87	2.769.463.871,00	100	3.351.012.500,00		300.209.202,00	32,84	8,96	82.71	3.069.673.073,00	82,71	96,14	PUSKESMAS BARUHARJO	
11.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.700.000.000,00		0,00	100 %	2.700.000.000,00	25 %	300.209.202,00	25,00	11,12	25 %	300.209.202,00	25,00	11,12	PUSKESMAS BARUHARJO	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi = 3/12x100%= 25% terdiri dari perencanaan, kepegawaian, penganggaran
11.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %	483.347.000,00		0,00	100 %	583.787.500,00	21.15 %	0,00	21,15	0,00	21.15 %	0,00	21,15	0,00	PUSKESMAS BARUHARJO	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar yang tervalidasi = 738/3490x100%= 21,15%
11.1.3			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		24.16 %		24,16		24.16 %		24,16		PUSKESMAS BARUHARJO	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar yang tervalidasi= 309/1279x100%=24,16%
11.1.4			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				68 %		24.77 %		36,43		24.77 %		33,03		PUSKESMAS BARUHARJO	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar yang tervalidasi= 54/218x100%=24,77%
11.1.5			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		55.26 %		55,26		55.26 %		55,26		PUSKESMAS BARUHARJO	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar yang tervalidasi= 42/76x100%=55,26%
11.1.6			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		17.15 %		17,15		17.15 %		17,15		PUSKESMAS BARUHARJO	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar yang tervalidasi= 47/274x100%=17,15%
11.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		27.55 %		27,55		27.55 %		27,55		PUSKESMAS BARUHARJO	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar yang tervalidasi= 4001/14524x100%=27,55%
11.1.8			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		23.37 %		23,37		23.37 %		23,37		PUSKESMAS BARUHARJO	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang tervalidasi= 1445/6182x100%=23,37%
11.1.9			Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %				94 %		23.01 %		24,48		23.01 %		27,39		PUSKESMAS BARUHARJO	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar yang tervalidasi= 292/1269x100%=23,01
11.1.10			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				67 %		27.06 %		40,39		27.06 %		38,66		PUSKESMAS BARUHARJO	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar yang tervalidasi= 59/218x100%=27,06%
11.1.11			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		13.78 %		13,78		13.78 %		13,78		PUSKESMAS BARUHARJO	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar yang tervalidasi= 35/254x100%=13,78%
11.1.12			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya					95 %		18.18 %		19,14		18.18 %		0,00		PUSKESMAS BARUHARJO	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya yang tervalidasi= 46/253x100%=18,18%
11.1.13			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		34.04 %		34,04		34.04 %		34,04		PUSKESMAS BARUHARJO	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar yang tervalidasi= 112/329x100%=34,04%
11.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	42 Persentase	9.641.000,00		0,00	46 Persentase	67.225.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BARUHARJO	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan yang tervalidasi = 0/8871x100%=0%
12		PUSKESMAS KAMPAK		100	3.690.116.564,00	68,99	3.215.123.485,00	100	3.687.873.600,00		308.430.711,00	22,99	8,36	91.98	3.523.554.196,00	91,98	95,49	PUSKESMAS KAMPAK	
12.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	3.690.116.564,00	68,99	3.215.123.485,00	100	3.687.873.600,00		308.430.711,00	22,99	8,36	91.98	3.523.554.196,00	91,98	95,49	PUSKESMAS KAMPAK	
12.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.900.000.000,00	100 %	2.496.197.004,00	100 %	2.900.000.000,00	25 %	308.430.711,00	25,00	10,64	100 %	2.804.627.715,00	100,00	96,71	PUSKESMAS KAMPAK	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi adalah 25 % a. Administrasi Perkantoran, b. Administrasi Pendapatan, c. Administrasi Kepegawaian, d. Administrasi Umum, e. Pelayanan BLUD
12.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %	779.350.564,00		0,00	66 %	726.631.100,00	24.26 %	0,00	36,76	0,00	24.26 %	0,00	28,88	0,00	PUSKESMAS KAMPAK	= 378/1558 x 100
12.1.3			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				72 %		30.89 %		42,90		30.89 %		41,19		PUSKESMAS KAMPAK	= 97/314 x 100
12.1.4			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				64 %		33 %		51,56		33 %		47,14		PUSKESMAS KAMPAK	= 99/300 x 100
12.1.5			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		48.75 %		48,75		48.75 %		48,75		PUSKESMAS KAMPAK	= 39/80x 100
12.1.6			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya					95 %		19.64 %		20,67		19.64 %		0,00		PUSKESMAS KAMPAK	= 76/387 x 100
12.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		25.48 %		25,48		25.48 %		25,48		PUSKESMAS KAMPAK	= 92/361x 100
12.1.8			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		28.86 %		28,86		28.86 %		28,86		PUSKESMAS KAMPAK	= 6779/23490 x 100
12.1.9			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		36.11 %		36,11		36.11 %		36,11		PUSKESMAS KAMPAK	= 772/2138 x 100 sesuai target dan realisasi SPM
12.1.10			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		25.05 %		25,05		25.05 %		25,05		PUSKESMAS KAMPAK	= 1789/7143 x 100
12.1.11			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		29.59 %		29,59		29.59 %		29,59		PUSKESMAS KAMPAK	= 87/294x 100

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
12.1.12			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		0 %		0,00		0 %		0,00		PUSKESMAS KAMPAK	= 0/4983x 100
12.1.13			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		30.11 %		30,11		30.11 %		30,11		PUSKESMAS KAMPAK	= 165/548 x 100
12.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	90 Persentase	10.766.000,00		0,00	46 Persentase	61.242.500,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS KAMPAK	Jumlah rumah tangga yang dikaji / jumlah seluruh KKx 100%
13		PUSKESMAS KARANGAN		100	4.695.624.400,00	59,41	4.286.738.995,15	100	4.789.417.400,00		0,00	33,66	0,00	93.07	4.286.738.995,15	93,07	91,29	PUSKESMAS KARANGAN	
13.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	4.695.624.400,00	59,41	4.286.738.995,15	100	4.789.417.400,00		0,00	33,66	0,00	93.07	4.286.738.995,15	93,07	91,29	PUSKESMAS KARANGAN	
13.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	3.597.578.400,00	100 %	3.265.534.580,15	100 %	3.597.578.400,00	25 %	0,00	25,00	0,00	100 %	3.265.534.580,15	100,00	90,77	PUSKESMAS KARANGAN	Rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis jasa administrasi perkantoran pada masing-masing kegiatan pada triwulan I adalah 100 % dengan perhitungan 3/12 *100 yaitu laporan perencanaan, laporan keuangan tahunan serta laporan keuangan bulanan
13.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %	1.095.046.000,00		0,00	74 %	1.049.999.000,00	17.10 %	0,00	23,11	0,00	17.1 %	0,00	22,80	0,00	PUSKESMAS KARANGAN	99 / 579 x 100 = 17,10 pelayanan sudah berjalan dengan baik
13.1.3			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				69 %		17.41 %		25,23		17.41 %		24,87		PUSKESMAS KARANGAN	101 / 580 x 100 = 17,41 pelayanan sudah berjalan dengan baik
13.1.4			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya					95 %		28.60 %		30,11		28.6 %		0,00		PUSKESMAS KARANGAN	131 / 458 x 100 = 28,60 tercapai sesuai target
13.1.5			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		8.16 %		8,16		8.16 %		8,16		PUSKESMAS KARANGAN	40/490 (target simonev) x 100 = 8,16 pelayanan sudah berjalan dengan baik
13.1.6			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		23.84 %		23,84		23.84 %		23,84		PUSKESMAS KARANGAN	1211 / 5080 (target simonev) x 100 = 23,84. target sudah tercapai
13.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		26.31 %		26,31		26.31 %		26,31		PUSKESMAS KARANGAN	8224 / 31253 x 100 = 26,31 pelayanan sudah berjalan dengan baik
13.1.8			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		50.28 %		50,28		50.28 %		50,28		PUSKESMAS KARANGAN	358 / 712 x 100 = 50,28 target bulanan sudah tercapa
13.1.9			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		30.35 %		30,35		30.35 %		30,35		PUSKESMAS KARANGAN	851 / 2804 x 100 = 30,35 target sudah tercapai, pelayanan sudah berjalan dengan baik
13.1.10			Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %				79 %		19.23 %		24,34		19.23 %		22,89		PUSKESMAS KARANGAN	468 / 2434 x 100 = 19,23 pelayanan sudah berjalan dengan baik
13.1.11			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		18.38 %		18,38		18.38 %		18,38		PUSKESMAS KARANGAN	86 / 468 (target simonev) x 100 = 18,38 pelayanan sudah berjalan dengan baik
13.1.12			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		32.98 %		32,98		32.98 %		32,98		PUSKESMAS KARANGAN	31 / 94 (target simonev) x 100 = 32,98. pelayanan sudah berjalan dengan baik
13.1.13			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		45.84 %		45,84		45.84 %		45,84		PUSKESMAS KARANGAN	2609 / 5692 x 100 = 45,84 sudah tercapai target bulanan, pelayanan sudah berjalan dengan baik
13.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	54 Persentase	3.000.000,00		0,00	46 Persentase	141.840.000,00	15.82 Persentase	0,00	34,39	0,00	15.82 Persentase	0,00	29,30	0,00	PUSKESMAS KARANGAN	Jumlah Dikaji / Jumlah Rumah Tangga x 100% = 2507/15852 x 100% = 15,82
14		PUSKESMAS MUNJUNGAN		100	5.506.288.500,00	65,1	5.014.708.578,00	100	5.515.776.000,00		548.193.232,00	43,28	9,94	100	5.562.901.810,00	100,00	100,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN	
14.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	5.506.288.500,00	65,1	5.014.708.578,00	100	5.515.776.000,00		548.193.232,00	43,28	9,94	100	5.562.901.810,00	100,00	100,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN	
14.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	4.700.000.000,00		0,00	100 %	4.700.000.000,00	25 %	548.193.232,00	25,00	11,66	25 %	548.193.232,00	25,00	11,66	PUSKESMAS MUNJUNGAN	Rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis jasa administrasi perkantoran pada masing-masing kegiatan pada tribulan I adalah 25 % dengan perhutungan 3/12 *100 yaitu laporan perencanaan, laporan keuangan tahunan serta laporan keuangan bulanan
14.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %	798.672.500,00		0,00	100 %	762.133.500,00	23.19 %	0,00	23,19	0,00	23.19 %	0,00	23,19	0,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN	112 orang ibu hamil / 483 orang target ibu hamil sesuai SPM * 100
14.1.3			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		66.00 %		66,00		66 %		66,00		PUSKESMAS MUNJUNGAN	66 Orang Jiwa Berat / 100 Orang target Jiwa Berat sesuai SPM * 100
14.1.4			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		28.27 %		28,27		28.27 %		28,27		PUSKESMAS MUNJUNGAN	108 Orang Tuberkulosis x 382 orang target sesuai SPM x 100
14.1.5			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		0 %		0,00		0 %		0,00		PUSKESMAS MUNJUNGAN	belum ada realisasi Kegiatan karena kegiatan akan di lakukan di tahun ajaran baru
14.1.6			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		67.11 %		67,11		67.11 %		67,11		PUSKESMAS MUNJUNGAN	406 orang dengan DM X 605 orang target SPM x 100
14.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		42.46 %		42,46		42.46 %		42,46		PUSKESMAS MUNJUNGAN	1031 orang dengan hipertensi x 2428 orang target SPM x 100
14.1.8			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		33.84 %		33,84		33.84 %		33,84		PUSKESMAS MUNJUNGAN	3958 orang / 11695 orang target SPM X 100
14.1.9			Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %				80 %		21.83 %		27,29		21.83 %		25,99		PUSKESMAS MUNJUNGAN	564 balita / 2584 balita dari target SPM x 100
14.1.10			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				71 %		24.95 %		35,14		24.95 %		33,27		PUSKESMAS MUNJUNGAN	119 bayi x 477 bayi dari target SPM x 100
14.1.11			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				63 %		24.21 %		38,43		24.21 %		34,59		PUSKESMAS MUNJUNGAN	115 ibu bersalin / 475 ibu bersalin dari target SPM x 100
14.1.12			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya					95 %		19.63 %		20,66		19.63 %		0,00		PUSKESMAS MUNJUNGAN	157 orang / 800 orang dari target SPM x 100
14.1.13			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		1.30 %		1,30		1.3 %		1,30		PUSKESMAS MUNJUNGAN	415 orang / 31989 orang dari target SPM x 100
14.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	88 Persentase	7.616.000,00		0,00	46 Persentase	53.642.500,00	16.59 Persentase	0,00	36,07	0,00	16.59 Persentase	0,00	18,85	0,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan adalah 13 %

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2026 s/d TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
15		PUSKESMAS PANGGUL		100	3.614.942.000,00	68	3.402.321.054,00	100	4.059.763.800,00		350.413.500,00	29,69	8,63	97.69	3.752.734.554,00	97,69	100,00	PUSKESMAS PANGGUL	
15.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	3.614.942.000,00	68	3.402.321.054,00	100	4.059.763.800,00		350.413.500,00	29,69	8,63	97.69	3.752.734.554,00	97,69	100,00	PUSKESMAS PANGGUL	
15.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.900.000.000,00	76.84 %	2.702.275.862,00	100 %	2.900.000.000,00	25 %	350.413.500,00	25,00	12,08	101.84 %	3.052.689.362,00	100,00	100,00	PUSKESMAS PANGGUL	Realisasi cakupan TB 1 = 100/4 x 100% = 25%
15.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya		707.326.000,00		0,00	95 %	1.111.901.800,00	15.92 %	0,00	16,76	0,00	15.92 %	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PANGGUL	Capaian TB 1 = 85 orang Prosentase pada TB 1 = 85/534 x 100% = 15,92%
15.1.3			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		31.80 %		31,80		31.8 %		31,80		PUSKESMAS PANGGUL	Capaian TB 1 = 1810 orang Prosentase pada TB 1 = 1810/5692 x 100% = 31,80%
15.1.4			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				66 %		14.78 %		22,39		14.78 %		19,71		PUSKESMAS PANGGUL	Capaian TB 1 = 86 Prosentase bayi baru lahir mendapatkan layanan kesehatan sesuai standart pada TB 1 = 86/582 x 100% = 14,78%
15.1.5			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		16.05 %		16,05		16.05 %		16,05		PUSKESMAS PANGGUL	Capaian TB 1 = 13 orang Prosentase ODGJ berat terlayani kesehatan sesuai standart pada TB 1 = 13/81 x 100% = 16,05%
15.1.6			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		65.94 %		65,94		65.94 %		65,94		PUSKESMAS PANGGUL	Capaian TB 1 = 1605 anak Prosentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan standart = 1605/2434 x 100% = 65,94%
15.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		19.23 %		19,23		19.23 %		19,23		PUSKESMAS PANGGUL	Capaian TB 1 = 5970 orang Persentase warga negara usia produktif mendapatkan layanan kesehatan pada TB 1 = 5970/31049 x 100% = 19,23%
15.1.8			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		27.55 %		27,55		27.55 %		27,55		PUSKESMAS PANGGUL	Capaian TB 1 = 200 orang Persentase penderita DM mendapatkan layanan kesehatan standart pada TB 1 = 200/726 x 100% = 27,55%
15.1.9			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		39.49 %		39,49		39.49 %		39,49		PUSKESMAS PANGGUL	Capaian TB 1 = 1116 orang Persentase penderita hipertensi mendapatkan layanan kesehatan standart pada TB 1 = 1116/2826 x 100% = 39,49%
15.1.10			Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %				84 %		15.34 %		18,26		15.34 %		18,26		PUSKESMAS PANGGUL	Capaian TB 1 = 463 balita Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan standart pada TB 1 = 463/3019 x 100% = 15,34%
15.1.11			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				66 %		14.04 %		21,27		14.04 %		20,06		PUSKESMAS PANGGUL	Capaian TB 1 = 90 bulin Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan standart pada TB 1 = 90/641 x 100% = 14,04%
15.1.12			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		23.54 %		23,54		23.54 %		23,54		PUSKESMAS PANGGUL	Capaian TB 1 = 89 bumil Persentase ibu hamil mendapat pelayanan antenatal sesuai standart pada TB 1 = 89/378 x 100% = 23,54%
15.1.13			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		12.09 %		12,09		12.09 %		12,09		PUSKESMAS PANGGUL	Capaian TB 1 = 59 orang Persentase warga terduga tuberculosisi yang mendapatkan layanan kesehatan standart pada TB 1 = 59/488 x 100% = 12,09%
15.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	76 Persentase	7.616.000,00		0,00	46 Persentase	47.862.000,00	18.02 Persentase	0,00	39,17	0,00	18.02 Persentase	0,00	23,71	0,00	PUSKESMAS PANGGUL	Capaian TB 1 = 3.204 Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan pada TB 1 = 3.204/17.780 x 100% = 18,02%
16		PUSKESMAS BODAG		100	3.192.603.328,00	33,91	2.713.867.369,00	100	3.361.496.000,00		168.970.890,00	31,39	5,03	65.3	2.882.838.259,00	65,30	90,30	PUSKESMAS BODAG	
16.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	3.192.603.328,00	33,91	2.713.867.369,00	100	3.361.496.000,00		168.970.890,00	31,39	5,03	65.3	2.882.838.259,00	65,30	90,30	PUSKESMAS BODAG	
16.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.592.000.000,00		0,00	100 %	2.592.000.000,00	25 %	168.970.890,00	25,00	6,52	25 %	168.970.890,00	25,00	6,52	PUSKESMAS BODAG	Dari target Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi sebesar 100%, tercapai 25% (RPK Tribulan I, Laporan Kinerja Tribulan I, Laporan Kepegawaian Tribulan I, Laporan Keuangan Tribulan I)
16.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %	592.987.328,00		0,00	63 %	704.218.000,00	24.45 %	0,00	38,81	0,00	24.45 %	0,00	29,11	0,00	PUSKESMAS BODAG	Dari target Persentase Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar sebesar 63%, tercapai 24,45% (392/1603)
16.1.3			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %				68 %		19.43 %		28,57		19.43 %		19,43		PUSKESMAS BODAG	Dari target Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar sebesar 68%, tercapai 19,43% (75/386)
16.1.4			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		25.85 %		25,85		25.85 %		25,85		PUSKESMAS BODAG	Dari target Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar sebesar 100%, tercapai 28,85% (15/52)
16.1.5			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %				95 %		16.94 %		17,83		16.94 %		16,94		PUSKESMAS BODAG	Dari target Persentase Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan sebesar 95%, tercapai 16,94% (72/425)
16.1.6			Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		16.44 %		16,44		16.44 %		16,44		PUSKESMAS BODAG	Dari target Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar sebesar 100%, tercapai 16,44% (48/292)

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2026 s/d TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
16.1.7			Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		14.98 %		14,98		14.98 %		14,98		PUSKESMAS BODAG	Dari target Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar sebesar 100%, tercapai 14,98% (638/4258)
16.1.8			Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		15.77 %		15,77		15.77 %		15,77		PUSKESMAS BODAG	Dari target Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar sebesar 100%, tercapai 15,77% (2489/15784)
16.1.9			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		26.53 %		26,53		26.53 %		26,53		PUSKESMAS BODAG	Dari target Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 100%, tercapai 26,53% (1469/5537)
16.1.10			Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				69 %		22.26 %		32,26		22.26 %		29,68		PUSKESMAS BODAG	Dari target Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar sebesar 69%, tercapai 22,26% (75/337)
16.1.11			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		21.86 %		21,86		21.86 %		21,86		PUSKESMAS BODAG	Dari target Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar sebesar 100%, tercapai 21,86% (61/279)
16.1.12			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		25.72 %		25,72		25.72 %		25,72		PUSKESMAS BODAG	Dari target Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar sebesar 100%, tercapai 25,72% (107/416)
16.1.13			Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		25.66 %		25,66		25.66 %		25,66		PUSKESMAS BODAG	Dari target Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar sebesar 100%, tercapai 25,66% (415/1617)
16.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	72 Persentase	7.616.000,00		0,00	46 Persentase	65.278.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS BODAG	Dari target Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan sebesar 46%, tercapai 0% (belum dilaksanakan pengkajian PHBS)
17		PUSKESMAS POGALAN		100	3.256.907.444,00	62,43	2.636.553.809,00	100	3.420.365.000,00		331.126.066,00	36,79	9,68	99.22	2.967.679.875,00	99,22	91,12	PUSKESMAS POGALAN	
17.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	3.256.907.444,00	62,43	2.636.553.809,00	100	3.420.365.000,00		331.126.066,00	36,79	9,68	99.22	2.967.679.875,00	99,22	91,12	PUSKESMAS POGALAN	
17.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.600.000.000,00		0,00	100 %	2.600.000.000,00	25 %	331.126.066,00	25,00	12,74	25 %	331.126.066,00	25,00	12,74	PUSKESMAS POGALAN	3 bulan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang sudah difasilitasi / 12 bulan jumlah pelayayan administrasi perkantoran yg harus difasilitasi dlm 1 tahun X 100 % = 25 %
17.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %	648.541.444,00		0,00	83 %	737.030.000,00	24.14 %	0,00	29,08	0,00	24.14 %	0,00	28,74	0,00	PUSKESMAS POGALAN	414 (Jumlah cakupan TW 1) / 1715 (Target sasran th 2026) x 100 % = 24,14 %
17.1.3			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				58 %		22.28 %		38,41		22.28 %		29,71		PUSKESMAS POGALAN	84 (jml cakupan TW 1) / 377 (target sasaran dlm 1 th) X 100 % = 22,28 %
17.1.4			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				58 %		23.14 %		39,90		23.14 %		33,06		PUSKESMAS POGALAN	87 (jml cakupan TW 1) / 376 (target sasaran dlm 1 th) X 100 % = 23,14 %
17.1.5			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		18.60 %		18,60		18.6 %		18,60		PUSKESMAS POGALAN	69 (Jml cakupan TW 1) / 371 (target sasaran dlm 1 th) X 100 % = 18,60 %
17.1.6			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		10.61 %		10,61		10.61 %		10,61		PUSKESMAS POGALAN	7 (jml cakupan TW 1) / 66 (target sasaran dlm 1 th) X 100 % = 10, 61 %
17.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %				95 %		21.16 %		22,27		21.16 %		21,16		PUSKESMAS POGALAN	91 (jml capaian TW 1) / 430 (target sasaran dlm 1 th) X 100 % = 21,16 %
17.1.8			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		19.39 %		19,39		19.39 %		19,39		PUSKESMAS POGALAN	51 (jml capaian TW 1) / 263 (Target sasaran dlm 1 th) X 100 % = 19,39 %
17.1.9			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		100 %		100,00		100 %		100,00		PUSKESMAS POGALAN	4302 (jml capaian TW 1) / 4302 (Target sasaran dlm 1 th) X 100 % = 100 %
17.1.10			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		32.06 %		32,06		32.06 %		32,06		PUSKESMAS POGALAN	6635 (jml capaian TW 1) / 20698 (target sasaran dlm 1 th) X 100 % = 32,06 %
17.1.11			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		35.77 %		35,77		35.77 %		35,77		PUSKESMAS POGALAN	196 (jml capaian TW 1) / 548 (target sasaran dlm 1 th) X 100 % = 35,77 %
17.1.12			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		29.26 %		29,26		29.26 %		29,26		PUSKESMAS POGALAN	623 (jml capaian TW 1) / 2129 (target sasaran dlm 1 th) X 100 % = 29,26 %
17.1.13			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		40.12 %		40,12		40.12 %		40,12		PUSKESMAS POGALAN	1644 (jml capaian TW 1) / 4098 (target sasaran dlm 1 th) X 100 % = 40,12 %
17.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	56 Persentase	8.366.000,00		0,00	46 Persentase	83.335.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS POGALAN	0 (jmlh KK yg dikaji) /12.858 (jml KK) X 100 % = 0 %
18		PUSKESMAS NGULANKULON		100	1.928.659.236,00	68,13	1.766.134.908,00	100	2.118.785.500,00		156.747.586,00	34,17	7,40	100	1.922.882.494,00	100,00	99,70	PUSKESMAS NGULANKULON	
18.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	1.928.659.236,00	68,13	1.766.134.908,00	100	2.118.785.500,00		156.747.586,00	34,17	7,40	100	1.922.882.494,00	100,00	99,70	PUSKESMAS NGULANKULON	
18.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	1.600.000.000,00	100 %	1.477.256.537,00	100 %	1.600.000.000,00	25 %	156.747.586,00	25,00	9,80	100 %	1.634.004.123,00	100,00	100,00	PUSKESMAS NGULANKULON	3 Dokumen yang meliputi dokumen perencanaan, kepegawaian dan keuangan) 3/12 dokumen x 100 = 25%
18.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %	316.543.236,00		0,00	92 %	439.497.000,00	16.78 %	0,00	18,24	0,00	16.78 %	0,00	19,98	0,00	PUSKESMAS NGULANKULON	Jumlah kesehatan Balita TW I / sasaran pelayanan kesehatan balita TW I = 150/ 894 X 100% = 16,78% Target di SIPD 92 % target di SPM 100%
18.1.3			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				73 %		21.52 %		29,48		21.52 %		28,69		PUSKESMAS NGULANKULON	Jumlah Pelayanan kesehatan bayi baru lahir TW I / Jumlah sasaran pelayanan kesehatan bayi baru lahir TW I = 34 / 158 X 100% = 21,52% Target di SIPD 73% dan target di SPM 100%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
18.1.4			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				68 %		20.13 %		29,60		20.13 %		28,76		PUSKESMAS NGULANKULON	Jumlah pelayanan kesehatan ibu bersalin TW I / Sasaran pelayanan kesehatan ibu bersalin TW 1 = 32 / 159 X 100% = 20,13%
18.1.5			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		19.39 %		19,39		19.39 %		19,39		PUSKESMAS NGULANKULON	Jumlah pelayanan kesehatan ibu hamil TW I / Jumlah sasaran pelayanan kesehatan Ibu Hamil TW 1 = 32/ 165 X 100 = 19.39%)
18.1.6			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		68.29 %		68,29		68.29 %		68,29		PUSKESMAS NGULANKULON	Jumlah pelayanan kesehatan orang dengan ganguan jiwa (ODGJ) berat TW 1 / Jumlah Sasaran pelayanan kesehatan orang dengan ganguan jiwa (ODGJ) berat TW 1 x 100 % = 28/ 41 x 100% = 68,29%
18.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %				95 %		15.14 %		15,94		15.14 %		15,14		PUSKESMAS NGULANKULON	Jumlah pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tuhub manusia (HIV) TW 1 / Jumlah Sasaran pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tuhub manusia (HIV) TW 1 = 28/185 x 100% = 15,14
18.1.8			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		49.65 %		49,65		49.65 %		49,65		PUSKESMAS NGULANKULON	Jumlah pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis TW I / jumlah sasaran pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis TW I= 71 / 143 x 100% = 49,65%
18.1.9			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		300 %		100,00		100 %		100,00		PUSKESMAS NGULANKULON	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar TW 1 / Sasaran pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar TW 1 x 100% = 3666 / 1222 x 100 = 300 (dilakukan satu kali dalam setahun)
18.1.10			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		24.93 %		24,93		24.93 %		24,93		PUSKESMAS NGULANKULON	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia produktif TW 1 / Sasaran pelayanan kesehatan pada usia produktif TW 1 x 100% = 3054 / 12251 x 100% = 24,93%
18.1.11			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		66.25 %		66,25		66.25 %		66,25		PUSKESMAS NGULANKULON	Jumlah pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus TW I / Sasaran pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus TW I = 214 / 323 X 100% = 66,25%
18.1.12			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		37.34 %		37,34		37.34 %		37,34		PUSKESMAS NGULANKULON	Jumlah pelayaan kesehatan penderita hipertensi TW 1 / Sasaran pelayaan kesehatan penderita hipertensi TW 1 x 100% = 469/1256 x 100% = 37,34%
18.1.13			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		45.75 %		45,75		45.75 %		45,75		PUSKESMAS NGULANKULON	Jumlah pelayanan kesehatan pada usia lanjut TW 1 / Sasaran pelayanan kesehatan pada usia lanjut TW 1 x 100% = 1748/ 3821 X 100% = 45,75%
18.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	46 Persentase	12.116.000,00		0,00	46 Persentase	79.288.500,00	13 Persentase	0,00	28,26	0,00	13 Persentase	0,00	28,26	0,00	PUSKESMAS NGULANKULON	Realisasi Kinerja TW I : Jumlah Rumah Tangga Sehat/Jumlah Rumah Tangga yang Dikaji (868/6857x100%=13%)
19		PUSKESMAS PULE		100	6.454.763.620,00	62,63	6.123.796.297,00	100	6.388.637.600,00		14.631.927,00	26,05	0,23	88.68	6.138.428.224,00	88,68	95,10	PUSKESMAS PULE	
19.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	6.454.763.620,00	62,63	6.123.796.297,00	100	6.388.637.600,00		14.631.927,00	26,05	0,23	88.68	6.138.428.224,00	88,68	95,10	PUSKESMAS PULE	
19.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	5.500.000.000,00		0,00	100 %	5.500.000.000,00	25 %	14.631.927,00	25,00	0,27	25 %	14.631.927,00	25,00	0,27	PUSKESMAS PULE	Realisasi Kinerja diperoleh dengan cara Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang difasilitasi dibagi Total Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran dikali 100% yaitu 3/ 12 x 100% = 25%. Semua Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran di Puskesmas Pule telah difasilitasi.
19.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %	945.910.633,00		0,00	83 %	769.645.600,00	16.48 %	0,00	19,86	0,00	16.48 %	0,00	19,62	0,00	PUSKESMAS PULE	Capaian SPM 2026 548/3326= 16,48 %. Capaian tidak tercapai karena target adalah SUPAS dan realisasinya semua balita sudah dilayani sesuai standar
19.1.3			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				72 %		16.91 %		23,49		16.91 %		22,55		PUSKESMAS PULE	Capaian SPM 2026 106/627 = 16,91 % Capaian tidak tercapai karena target adalah SUPAS dan realisasinya semua bayi baru lahir sudah dilayani sesuai standar
19.1.4			Persentase Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				67 %		16.83 %		25,12		16.83 %		24,04		PUSKESMAS PULE	Capaian SPM 2026 106/630= 16,83 %. Capaian tidak tercapai karena target adalah SUPAS dan realisasinya semua ibu bersalin sudah dilayani sesuai standar
19.1.5			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		0 %		0,00		0 %		0,00		PUSKESMAS PULE	Belum ada penjaringan karena menunggu tahun ajaran baru tahun 2026
19.1.6			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		16.37 %		16,37		16.37 %		16,37		PUSKESMAS PULE	Capaian SPM 2026 = 5822/ 35.575 x 100% = 16,37 %.
19.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		43.89 %		43,89		43.89 %		43,89		PUSKESMAS PULE	Capaian SPM 2026 = 43,89 %. Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan standar/ jumlah estimasi penderita hipertensi x 100 : (1490/3395*100= 43,89%)
19.1.8			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		21.77 %		21,77		21.77 %		21,77		PUSKESMAS PULE	Capaian SPM 2026 96/441= 21,77 %. Capaian tidak tercapai karena target adalah SUPAS dan realisasinya semua ibu hamil sudah dilayani sesuai standar

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
19.1.9			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		40.38 %		40,38		40.38 %		40,38		PUSKESMAS PULE	Capaian SPM 2026 42/104 = 40,38 % . Capaian tidak tercapai karena target adalah SUPAS dan realisasinya semua ODGJ sudah dilayani sesuai standar
19.1.10			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya					95 %		17.97 %		18,92		17.97 %		0,00		PUSKESMAS PULE	Capaian SPM 2026 99/551= 17,97 %. Capaian tidak tercapai karena target adalah SUPAS dan realisasinya Orang dengan Resiko HIV sudah dilayani sesuai standar
19.1.11			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		16.46 %		16,46		16.46 %		16,46		PUSKESMAS PULE	Capaian SPM 2026 = 67/407*100 = 16,46 %. Capaian tidak tercapai karena target adalah SUPAS dan realisasinya semua terduga TB yang ditemukan sudah dilayani sesuai standar
19.1.12			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		28.90 %		28,90		28.9 %		28,90		PUSKESMAS PULE	Capaian SPM 2026 252/872 x 100= 28,90 % Jumlah Pasien DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan TB III dibagi Jumlah Sasaran (SUPAS) Pasien DM dalam setahun dikali 100%
19.1.13			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		29.54 %		29,54		29.54 %		29,54		PUSKESMAS PULE	Capaian SPM 2026 = 3161/10701x100%= 29,54 %. Semua sasaran usia 60 tahun yang datang ke faskes dan dikunjungi oleh nakes sudah diskrining sesuai standar.
19.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	78 Persentase	8.852.987,00		0,00	46 Persentase	118.992.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS PULE	Realisasi Kinerja TB I dihitung dengan Jumlah keluarga yang dikaji atau diintervensi dibagi dengan jumlah total keluarga dalam kurun waktu tertentu dikali 100 = 0 / 21.806*100= 0,00 %
20		PUSKESMAS TRENGGALEK		100	2.820.901.420,00	57,6	2.659.131.508,75	100	3.053.668.000,00		69.964.222,00	28,34	2,29	85.94	2.729.095.730,75	85,94	96,75	PUSKESMAS TRENGGALEK	
20.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	2.820.901.420,00	57,6	2.659.131.508,75	100	3.053.668.000,00		69.964.222,00	28,34	2,29	85.94	2.729.095.730,75	85,94	96,75	PUSKESMAS TRENGGALEK	
20.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.100.000.000,00		0,00	100 %	2.100.000.000,00	25 %	69.964.222,00	25,00	3,33	25 %	69.964.222,00	25,00	3,33	PUSKESMAS TRENGGALEK	sebanyak 25% Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang di fasilitasi yang terlaporkan dan tervalidasi pada TW 1
20.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %	713.409.250,00		0,00	100 %	842.438.000,00	45.65 %	0,00	45,65	0,00	45.65 %	0,00	45,65	0,00	PUSKESMAS TRENGGALEK	21 Orang dengan Gangguan Jiwa Berat / 46 Sasaran dari target si monev x 100 = 100 %
20.1.3			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		41.15 %		41,15		41.15 %		41,15		PUSKESMAS TRENGGALEK	107 orang terduga tuberkulosis dibagi 260 target sasaran orang terduga tuberkulosis x 100 (107/260x100%)
20.1.4			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		0 %		0,00		0 %		0,00		PUSKESMAS TRENGGALEK	Belujm ada kegiatan Pelayanan Kesehatan Pada Anak Usia Pendidikan Dasar
20.1.5			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		21.22 %		21,22		21.22 %		21,22		PUSKESMAS TRENGGALEK	4321 Jumlah Usia Produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar / 20361 target sasaran Usia Produktif x 100%
20.1.6			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		21.6 %		21,60		21.6 %		21,60		PUSKESMAS TRENGGALEK	108 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar/ 500 penderita diabetes melitus x 100%
20.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		23.52 %		23,52		23.52 %		23,52		PUSKESMAS TRENGGALEK	457 Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar/1943 target sasaran Penderita Hipertensi x 100%
20.1.8			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		31.20 %		31,20		31.2 %		31,20		PUSKESMAS TRENGGALEK	1875 warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapat pelayanan / 6008 jumlah sasaran warga negara usia 60 tahun x 100 %
20.1.9			Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %				81 %		19.89 %		24,56		19.89 %		23,68		PUSKESMAS TRENGGALEK	327 Balita yang mendapat pelayanan kesehatan/1644 jumlah sasaran balita x 100%
20.1.10			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				92 %		21.89 %		23,79		21.89 %		29,19		PUSKESMAS TRENGGALEK	60 Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan ssesuai standar/ 274 jumlah target sasaran bayi baru lahir x 100 %
20.1.11			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				76 %		20.74 %		27,29		20.74 %		29,63		PUSKESMAS TRENGGALEK	61 Jumlah Ibu bersalin yang mendapat pelayanan sesuai standar/ 294 Jumlah target sasaran ibu bersalin x 100 %
20.1.12			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		21.33 %		21,33		21.33 %		21,33		PUSKESMAS TRENGGALEK	67 Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan / 314 target sasaran ibu hamil x 100%
20.1.13			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya					95 %		35.27 %		37,13		35.27 %		0,00		PUSKESMAS TRENGGALEK	127 Jumlah Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi virus / 360 target sasaran Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi virus
20.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	38 Persentase	7.492.170,00		0,00	46 Persentase	111.230.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TRENGGALEK	0 Jumlah yang dikaji pada tribulan I dari target 12472 jumlah KK
21		PUSKESMAS TUGU		100	3.768.308.608,00	64,94	3.275.860.673,00	100	3.869.448.000,00		359.390.344,00	26,97	9,29	91.91	3.635.251.017,00	91,91	96,47	PUSKESMAS TUGU	
21.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	3.768.308.608,00	64,94	3.275.860.673,00	100	3.869.448.000,00		359.390.344,00	26,97	9,29	91.91	3.635.251.017,00	91,91	96,47	PUSKESMAS TUGU	
21.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.900.000.000,00	87.2 %	2.491.513.809,00	100 %	2.900.000.000,00	12.39 %	359.390.344,00	12,39	12,39	99.59 %	2.850.904.153,00	99,59	98,31	PUSKESMAS TUGU	Realisasi Belanja BLUD : 359.390.344 / 2.900.000.000 X 100% = 12,39 %
21.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %	863.215.320,00		0,00	100 %	840.083.500,00	24.70 %	0,00	24,70	0,00	24.7 %	0,00	29,40	0,00	PUSKESMAS TUGU	Kinerja TW 1 : 366 / 1482 X 100% = 24,70
21.1.3			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		23.25 %		23,25		23.25 %		23,25		PUSKESMAS TUGU	Kinerja TW 1 : 4.509 / 19395 X 100% = 23,25
21.1.4			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		28.69 %		28,69		28.69 %		28,69		PUSKESMAS TUGU	Kinerja TW 1 : 2090 / 7285 X 100% = 28,69

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
21.1.5			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				73 %		30.86 %		42,27		30.86 %		41,15		PUSKESMAS TUGU	Kinerja TW 1 : 75 / 243 X 100% = 30,86
21.1.6			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				65 %		30.86 %		47,48		30.86 %		44,09		PUSKESMAS TUGU	Kinerja TW 1 : 75 / 243 X 100% = 30,86
21.1.7			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		30 %		30,00		30 %		30,00		PUSKESMAS TUGU	Kinerja TW 1 : 75 / 250 X 100% = 30
21.1.8			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		1.30 %		1,30		1.3 %		1,30		PUSKESMAS TUGU	Kinerja TW 1 : 1 / 77 X 100% = 1,30
21.1.9			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya					95 %		28.37 %		29,86		28.37 %		0,00		PUSKESMAS TUGU	Kinerja TW 1 : 103 / 363 X 100% = 28,37
21.1.10			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		9.51 %		9,51		9.51 %		9,51		PUSKESMAS TUGU	Kinerja TW 1 : 29 / 305 X 100% = 9,51
21.1.11			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		0 %		0,00		0 %		0,00		PUSKESMAS TUGU	Kinerja TW 1 : 0 / 3357 X 100% = 0
21.1.12			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		88.62 %		88,62		88.62 %		88,62		PUSKESMAS TUGU	Kinerja TW 1 : 397 / 448 X 100% = 88,62
21.1.13			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		21.22 %		21,22		21.22 %		21,22		PUSKESMAS TUGU	Kinerja TW 1 : 358/ 1687 X 100% = 21,22
21.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	50 Persentase	5.093.288,00		0,00	46 Persentase	129.364.500,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS TUGU	Kinerja TW 1 : 0% belum dilaksanakan kegiatan PHBS Jumlah di kaji / Jumlah Rumah Tangga * 100% =
22		PUSKESMAS WATULIMO		100	3.491.637.000,00	65,07	3.119.438.325,17	100	3.656.510.500,00		20.300,00	34,31	0,00	99.38	3.119.458.625,17	99,38	89,34	PUSKESMAS WATULIMO	
22.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	3.491.637.000,00	65,07	3.119.438.325,17	100	3.656.510.500,00		20.300,00	34,31	0,00	99.38	3.119.458.625,17	99,38	89,34	PUSKESMAS WATULIMO	
22.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.800.000.000,00	100 %	2.440.702.350,17	100 %	2.800.000.000,00	25 %	20.300,00	25,00	0,00	100 %	2.440.722.650,17	100,00	87,17	PUSKESMAS WATULIMO	25/100*100 = 25% Pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi sebesar 25%
22.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %	684.021.000,00		0,00	82 %	821.763.000,00	25.60 %	0,00	31,22	0,00	25.6 %	0,00	34,13	0,00	PUSKESMAS WATULIMO	85/332*100 = 25,60% Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dibagi jumlah seluruh bayi baru lahir*100
22.1.3			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				80 %		25.76 %		32,20		25.76 %		36,80		PUSKESMAS WATULIMO	85/330*100= 25,76 Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai stadart dibagi seluruh ibu bersalin *100
22.1.4			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya					95 %		37.60 %		39,58		37.6 %		0,00		PUSKESMAS WATULIMO	188/500 *100= 37,60% Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya *100
22.1.5			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		20.59 %		20,59		20.59 %		20,59		PUSKESMAS WATULIMO	76/369 *100 = 20,59% Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar sebanyak 20,59% dan Realisasi 76 Orang Target Sebenarnya 311 Tahun 2026
22.1.6			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		0 %		0,00		0 %		0,00		PUSKESMAS WATULIMO	0/5233 *100 = 0% Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar belum dilaksanakan sebanyak 0% dan belum ada Realisasi Target Sebenarnya 4743 Tahun 2026
22.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		13.22 %		13,22		13.22 %		13,22		PUSKESMAS WATULIMO	3449/26093*100 =13,22% Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar*100 sebanyak 13,22% dan Realisasi 3449Orang
22.1.8			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		15.99 %		15,99		15.99 %		15,99		PUSKESMAS WATULIMO	94/588*100=15,99% Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar *100
22.1.9			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		10.02 %		10,02		10.02 %		10,02		PUSKESMAS WATULIMO	229/2285*100=10,02% Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar *100,
22.1.10			Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %				81 %		18.14 %		22,40		18.14 %		21,60		PUSKESMAS WATULIMO	375/2067*100 = 18,14% Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar *100
22.1.11			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		22.45 %		22,45		22.45 %		22,45		PUSKESMAS WATULIMO	99/441*100 = 22,45 Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar *100
22.1.12			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		23.81 %		23,81		23.81 %		23,81		PUSKESMAS WATULIMO	20/84*100= 23,81% Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar *100 sebanyak 23,81% dan Realisasi 20 Orang Target Sebenarnya 78 Tahun 2026
22.1.13			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		23.94 %		23,94		23.94 %		23,94		PUSKESMAS WATULIMO	1515/6328*100 = 23,94% Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
22.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	80 Persentase	7.616.000,00		0,00	46 Persentase	34.747.500,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS WATULIMO	0/11987*100 = 0% Belum terdapat Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan
23		PUSKESMAS SLAWE		100	3.528.192.000,00	72,96	3.255.530.040,00	100	3.535.295.000,00		331.957.944,00	27,14	9,39	100	3.587.487.984,00	100,00	100,00	PUSKESMAS SLAWE	
23.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	3.528.192.000,00	72,96	3.255.530.040,00	100	3.535.295.000,00		331.957.944,00	27,14	9,39	100	3.587.487.984,00	100,00	100,00	PUSKESMAS SLAWE	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
23.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.800.000.000,00	100 %	2.575.528.096,00	100 %	2.800.000.000,00	25 %	331.957.944,00	25,00	11,86	100 %	2.907.486.040,00	100,00	100,00	PUSKESMAS SLAWE	Rata-rata capaian realisasi terhadap target jenis jasa administrasi perkantoran pada masing-masing kegiatan pada tribulan I adalah 25 % dengan perhutungan 3/12 *100 yaitu laporan perencanaan, laporan keuangan tahunan serta laporan keuangan bulanan
23.1.2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %	720.576.000,00		0,00	100 %	696.192.500,00	14.43 %	0,00	14,43	0,00	14.43 %	0,00	17,18	0,00	PUSKESMAS SLAWE	Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar yang sudah divalidasi sesuai ketentuan pada tribulan I adalah 14,43% dengan perhitungan 211/1462*100
23.1.3			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		44.26 %		44,26		44.26 %		44,26		PUSKESMAS SLAWE	Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan standar yang sudah divalidasi sesuai ketentuan pada tribulan I adalah 44,26 % dengan perhitungan 27/61*100
23.1.4			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		31.93 %		31,93		31.93 %		31,93		PUSKESMAS SLAWE	Persentase Warga Negara Terduga Tuberculosis Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada tribulan I adalah 31,93 % dengan perhitungan 76/238*100
23.1.5			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		0 %		0,00		0 %		0,00		PUSKESMAS SLAWE	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang sudah divalidasi sesuai ketentuan pada tribulan I adalah 0 % dengan perhitungan 0/2801*100
23.1.6			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		21.09 %		21,09		21.09 %		21,09		PUSKESMAS SLAWE	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan standar yang sudah divalidasi sesuai ketentuan pada tribulan I adalah 21,09 % dengan perhitungan 4185/19843*100
23.1.7			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		18.43 %		18,43		18.43 %		18,43		PUSKESMAS SLAWE	Persentase Warga Negara Penderita Diabetes Mellitus Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada tribulan I adalah 18,43 % dengan perhitungan 103/559*100
23.1.8			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		15.59 %		15,59		15.59 %		15,59		PUSKESMAS SLAWE	Persentase Warga Negara Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada tribulan I adalah dengan 15,59 % perhitungan 339/2175*100
23.1.9			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		32.34 %		32,34		32.34 %		32,34		PUSKESMAS SLAWE	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar yang sudah divalidasi sesuai ketentuan pada tribulan I adalah 32,34 % dengan perhitungan 2785/8612*100
23.1.10			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				73 %		20 %		27,40		20 %		26,67		PUSKESMAS SLAWE	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar yang sudah divalidasi sesuai ketentuan pada tribulan I adalah 20% dengan perhitungan 63/315*100
23.1.11			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				68 %		19.62 %		28,85		19.62 %		28,03		PUSKESMAS SLAWE	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar yang sudah divalidasi sesuai ketentuan pada tribulan I adalah 19,62% dengan perhitungan 62/316*100
23.1.12			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		17.88 %		17,88		17.88 %		17,88		PUSKESMAS SLAWE	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang sudah divalidasi sesuai ketentuan pada tribulan I adalah 17,88% dengan perhitungan 59/330*100
23.1.13			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya					95 %		38.89 %		40,94		38.89 %		0,00		PUSKESMAS SLAWE	Persentase Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada tribulan I adalah 38,89% dengan perhitungan 56/144*100
23.1.14	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	82 Persentase	7.616.000,00		0,00	46 Persentase	39.102.500,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	PUSKESMAS SLAWE	Jumlah rumah tangga yang dikaji/Jumlah rumah tangga seluruh KK*100 pada tribulan I yaitu 0% dengan perhitungan 0/8853*100
24		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL		100	23.527.077.022,00	72,28	18.553.067.403,54	100	22.085.297.641,12		3.760.610.474,40	49,95	17,03	100	22.313.677.877,94	100,00	94,84	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL	
24.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	23.527.077.022,00	72,28	18.553.067.403,54	100	22.085.297.641,12		3.760.610.474,40	49,95	17,03	100	22.313.677.877,94	100,00	94,84	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2026 s/d TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
24.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	17.661.577.022,00	91.5 %	11.159.934.066,43	100 %	17.343.547.641,12	35 %	3.306.721.586,40	35,00	19,07	126.5 %	14.466.655.652,83	100,00	81,91	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL	=Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disusun Perangkat Daerah / Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang seharusnya Perangkat Daerah x 100% =13 dokumen / 37 dokumen * 100 % = 35 % 1. RBA Murni 2026 2. DPA Induk 2026 3. Evaluasi SDG's TW IV 2025 4. RKA 2026 5. Renja 2027 6. Laporan Pajak Rokok TW IV 2025 7. Laporan Evaluasi renja TW IV 2025 8. LKJIP tahun 2025 9. Laporan penanggulangan kemiskinan TW IV 2025 10. Laporan DBHCHT semester 2 tahun 2025 11. Isian IKU renaksi tahun 2026 12. RBA Pergeseran 1 tahun 2026 13.Laporan keuangan audited 2025
24.1.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %		99.71 %		100 %		99.98 %		99,98		199.69 %		100,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL	=(31131057375.95-6800594)/ 31131057375.95 =99,98%
24.1.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		98.85 %		98,85		100 %		100,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL	=(85/87*100% + 1/1*100%)/2 =(97,70 % + 100 %) / 2 =197,70 % /2 =98,85 %
24.1.4	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang dilaksanakan	93 %	5.590.500.000,00	100 %	7.197.870.269,11	93 %	4.466.742.440,00	100 %	453.888.888,00	107,53	10,16	100 %	7.651.759.157,11	100,00	100,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL	=29/29 *100 = 100% 29 jenis pelayanan 1. PELAYANAN MEDIK UMUM 3 DASAR GILUT KIA/KB 2. PELAYANAN GAWAT DARURAT 24 JAM 1 3. PELAYANAN MEDIK DASAR MIN 2 SPESIALIS DASAR 4 SPESIALIS OBGYN SPESIALIS DALAM SPESIALIS BEDAH SPESIALIS ANAK 4. PELAYANAN SPESIALIS PENUNJANG MEDIK 2 SPESIALIS RADIOLOGI SPESIALIS PATOLOGI KLINIK 5. PELAYANAN KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN 2 ASUHAN KEPERAWATAN ASUHAN KEBIDANAN 6. PELAYANAN PENUNJANG KLINIK 6 HCU PELAYANAN DARAH GIZI FARMASI STERIL INSTRUMEN REKAM MEDIK 7. PELAYANAN PENUNJANG NON KLINIK 11 LAUNDRY/LINEN DAPUR IPS RS PENGELOLAAN LIMBAH GUDANG AMBULANCE INFORMASI KOMUNIKASI KAMAR JENAZAH PEMADAM KEBAKARAN PENGELOLAAN GAS MEDIK PENAMPUNGAN AIR BERSIH
24.1.5	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	95 Persentase	275.000.000,00		0,00	95 Persentase	275.007.560,00	94 Persentase	0,00	98,95	0,00	94 Persentase	0,00	98,95	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL	=151/159 = 94 % Jumlah SDM yang ada 159 Jumlah SDM yang tidak sesuai kompetensi karena SIP nya mati = 8 orang
25		UPT INSTALASI FARMASI		100	350.000.000,00	75,51	237.595.293,00	100	286.608.650,00		49.611.987,94	25,75	17,31	100	287.207.280,94	100,00	82,06	UPT INSTALASI FARMASI	
25.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	350.000.000,00	75,51	237.595.293,00	100	286.608.650,00		49.611.987,94	25,75	17,31	100	287.207.280,94	100,00	82,06	UPT INSTALASI FARMASI	
25.1.1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %	350.000.000,00		0,00	84 %	286.608.650,00	20.10 %	49.611.987,94	23,93	17,31	20.1 %	49.611.987,94	23,93	14,17	UPT INSTALASI FARMASI	=7894/37605*100%=20,10
25.1.2			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				75 %		23.24 %		30,99		23.24 %		30,99		UPT INSTALASI FARMASI	1587/6829*100%
25.1.3			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				70 %		23.44 %		33,49		23.44 %		33,49		UPT INSTALASI FARMASI	1599/6823*100%=23,44
25.1.4			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		38.38 %		38,38		38.38 %		38,38		UPT INSTALASI FARMASI	=608/1584*100%=38,38
25.1.5			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		19.33 %		19,33		19.33 %		19,33		UPT INSTALASI FARMASI	=1346/6965*100
25.1.6			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		17.44 %		17,44		17.44 %		17,44		UPT INSTALASI FARMASI	=14823/84983*100%
25.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		22.32 %		22,32		22.32 %		22,32		UPT INSTALASI FARMASI	=100156/448634*100

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2026 s/d TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
25.1.8			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		42.45 %		42,45		42.45 %		42,45		UPT INSTALASI FARMASI	=4298/10125*100
25.1.9			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		24.55 %		24,55		24.55 %		24,55		UPT INSTALASI FARMASI	=13355/54395*100
25.1.10			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		22.84 %		22,84		22.84 %		22,84		UPT INSTALASI FARMASI	=1498/6560*100%
25.1.11			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya					95 %		26.75 %		28,16		26.75 %		0,00		UPT INSTALASI FARMASI	=1931/7220*100%
25.1.12			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		9.60 %		9,60		9.6 %		9,60		UPT INSTALASI FARMASI	=43085/448634*100%
26		UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH		100	1.000.000.000,00	80,21	892.820.305,00	100	1.180.000.000,00		98.524.326,00	18,64	8,35	98.85	991.344.631,00	98,85	99,13	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	
26.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	1.000.000.000,00	80,21	892.820.305,00	100	1.180.000.000,00		98.524.326,00	18,64	8,35	98.85	991.344.631,00	98,85	99,13	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	
26.1.1	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	84 %	1.000.000.000,00		0,00	84 %	1.180.000.000,00	20.10 %	98.524.326,00	23,93	8,35	20.1 %	98.524.326,00	23,93	9,85	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	=7894/37605*100%=20,10
26.1.2			Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	75 %				75 %		23.24 %		30,99		23.24 %		30,99		UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	1587/6829*100%
26.1.3			Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	70 %				70 %		23.44 %		33,49		23.44 %		33,49		UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	1599/6823*100%=23,44
26.1.4			Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %				100 %		38.38 %		38,38		38.38 %		38,38		UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	=608/1584*100%=38,38
26.1.5			Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %				100 %		19.33 %		19,33		19.33 %		19,33		UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	=1346/6965*100
26.1.6			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %				100 %		17.44 %		17,44		17.44 %		17,44		UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	=14823/84983*100%
26.1.7			Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %				100 %		19.33 %		19,33		19.33 %		19,33		UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	=1346/6965*100
26.1.8			Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %				100 %		42.45 %		42,45		42.45 %		42,45		UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	=4298/10125*100
26.1.9			Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %				100 %		24.55 %		24,55		24.55 %		24,55		UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	=13355/54395*100
26.1.10			Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %				100 %		22.84 %		22,84		22.84 %		22,84		UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	=1498/6560*100%
26.1.11			Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya					95 %		26.75 %		28,16		26.75 %		0,00		UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	=1931/7220*100%
26.1.12			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %				100 %		9.60 %		9,60		9.6 %		9,60		UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	=43085/448634*100%
26.1.13	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan		0,00		0,00	100 %	0,00	25 %	0,00	25,00	0,00	25 %	0,00	0,00	0,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	1 dokumen Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan/4 target Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan x 100%=25%
27		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO		100	199.297.843.373,00	67,47	180.149.183.261,00	100	207.811.976.211,13		46.089.357.410,00	62,54	22,18	100	226.238.540.671,00	100,00	100,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	
27.1	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100	199.297.843.373,00	67,47	180.149.183.261,00	100	207.811.976.211,13		46.089.357.410,00	62,54	22,18	100	226.238.540.671,00	100,00	100,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	
27.1.1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	196.462.827.773,00	100 %	178.487.602.419,00	100 %	204.029.676.211,13	25 %	46.089.357.410,00	25,00	22,59	125 %	224.576.959.829,00	100,00	100,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	Telah terselesaikan RBA, RKA, DPA, Laporan Kinerja RS dan LKjIP di triwulan 1 2026, dengan capaian 5/20x100% = 25%
27.1.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98 %		99.24 %		98 %		97.96 %		99,96		197.2 %		100,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	=Nilai rupiah total aset baik / Nilai rupiah total keseluruhan aset =548.836.418.137/560.214.601.464 = 0,97968*100% =97,96%
27.1.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	80 %		72.07 %		80 %		98.96 %		123,70		100 %		100,00		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	Realisasi kinerja diperoleh dari rata - rata capaian sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan dan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD = ((Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN/target) + (Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan/Target))/2*100%= ((800/817) + (1/1))/2*100% = 98,96%
27.1.4	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang dilaksanakan	100 %	2.652.715.600,00	100 %	1.661.580.842,00	100 %	3.600.000.000,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	1.661.580.842,00	100,00	62,64	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	Dari 21 pelayanan dan penunjang pelayanan (rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, bedah, persalinan dan perinatologi, intensif, radiologi, laboratorium, rehab medik, farmasi, gizi, transfusi darah, gakin, rekam medis, pengelolaan limbah, administrasi dan manajemen, ambulans, pemulasaraan jenazah, pemeliharaan sarpras RS, laundry dan PPI) telah terlaksana secara keseluruhan.
27.1.5	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	60 Persentase	182.300.000,00		0,00	60 Persentase	182.300.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO	-

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100	12.240.476.000,00	63,4	11.786.184.245,00	100	11.210.188.438,97		1.373.394.946,00	22,33	12,25	85.73	13.159.579.191,00	85,73	100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1.1	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100	12.025.476.000,00	61,5	11.611.374.489,00	100	11.031.222.744,02		1.373.394.946,00	21,71	12,45	83.21	12.984.769.435,00	83,21	100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1.1.1	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98,79 %	7.306.876.000,00	99.04 %	6.441.522.338,00	98.79 %	6.888.897.234,62	98.57 %	1.354.702.946,00	99,78	19,67	100 %	7.796.225.284,00	100,00	100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	penghitungannya : 423.513.787/429.643.000 x 100 = 98,57
1.1.2			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		18.26 %		18,26		100 %		100,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	--- >=(((39,38/100)+(0/100)+(25,32/100)+(8,33/100))/4)*100 = 18,26
1.1.3			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		21.76 %		21,76		100 %		100,00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	penghitungannya ---> (((2/10)+(4/17))/2*100% = 21,76%
1.1.4	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	90 %	1.835.000.000,00		0,00	90 %	1.505.085.509,40	95.19 %	10.052.000,00	105,77	0,67	95.19 %	10.052.000,00	100,00	0,55	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nilai SKM terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah ---> 51.978,89/546 = 95,19
1.1.5	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Aspek Teknologi SPBE	2,4 Nilai	2.883.600.000,00		0,00	2.4 Nilai	2.637.240.000,00	0 Nilai	8.640.000,00	0,00	0,33	0 Nilai	8.640.000,00	0,00	0,30	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	belum ada realisasi karena penilaian dilaksanakan di TW 3, dan nilai release di TW 4
1.2	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		100	130.000.000,00	100	124.432.116,00	100	107.965.694,95		0,00	33,33	0,00	100	124.432.116,00	100,00	95,72	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1.2.1	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan penyelenggaraan statistik sektoral secara digital	92 %	130.000.000,00		0,00	92 %	107.965.694,95	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	data ini diambil dari daftar data yang pengitungannya dilaksaksanakan di TW 4
1.3	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		100	85.000.000,00	66,67	50.377.640,00	100	71.000.000,00		0,00	33,33	0,00	100	50.377.640,00	100,00	59,27	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1.3.1	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	42,7 %	85.000.000,00		0,00	42.70 %	71.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Penilaian indeks Kami dilaksanakan di TW 4

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2026 s/d TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN		100	14.236.384.224,00	73,8	12.531.565.193,68	100	13.053.721.936,61		2.494.429.339,00	35,84	19,11	100	15.025.994.532,68	100,00	100,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
1.1	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		100	11.874.153.838,00	71,41	10.552.859.253,00	100	11.406.645.450,61		2.382.973.339,00	38,64	20,89	100	12.935.832.592,00	100,00	100,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
1.1.1	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	11.202.395.046,00	100 %	9.981.320.869,00	100 %	10.696.886.658,61	30.56 %	2.370.082.589,00	30,56	22,16	130.56 %	12.351.403.458,00	100,00	100,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	=11/36*100=30,56%
1.1.2			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		48.33 %		48,33		100 %		100,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	=((109/77)+(1/4)+(0/50)+(1/1) +(1/1) +(1/1) +(1/1)+(1/4)+(0/1)+(0/1)+(0/3)+(1/4) + (1/4)+ (1/4))/15*100=48,33%
1.1.3			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98,33 %		98.35 %		98.33 %		98.35 %		100,02		100 %		100,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	=180386704085/183414003029*100 =98,35%
1.1.4	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0,35 Persentase	1.906.800,00		0,00	0.35 Persentase	1.906.800,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	=(122724108-424564513169)/ 424564513169*100=0%
1.1.5	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	33,14 %	28.900.000,00		0,00	33.14 %	23.900.000,00	9.59 %	0,00	28,94	0,00	9.59 %	0,00	29,06	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	=68/709*100=9,59
1.1.6	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	3,44 %	7.816.000,00		0,00	3.44 %	7.816.000,00	1.02 %	0,00	29,65	0,00	1.02 %	0,00	34,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	=6/589*100=1,02
1.1.7	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	10,31 %	35.000.000,00		0,00	10.31 %	35.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	program pelatihan akan dilaksanakan di TW II
1.1.8	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	16,84 %	180.700.000,00		0,00	16.84 %	145.700.000,00	4.98 %	0,00	29,57	0,00	4.98 %	0,00	31,13	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	=29/(425+157)*100=4,98%
1.1.9	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	0,21 %	172.435.992,00		0,00	0.21 %	152.435.992,00	0.08 %	2.200.000,00	38,10	1,44	0.08 %	2.200.000,00	0,00	1,28	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	=110/143975*100= 0,08%
1.1.10			Pertumbuhan Wirausaha	60 Pelaku Usaha				60 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha		0,00		0 Pelaku Usaha		0,00		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Akan dilaksanakan di TW II dan IV
1.1.11	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	0,70 Persentase	245.000.000,00		0,00	0.70 Persentase	343.000.000,00	0.81 Persentase	10.690.750,00	115,71	3,12	0.81 Persentase	10.690.750,00	0,00	4,36	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	=210/25800*100=0.81%
1.2	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		100	2.362.230.386,00	80,19	1.978.705.940,68	100	1.647.076.486,00		111.456.000,00	26,10	6,77	100	2.090.161.940,68	100,00	88,48	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	
1.2.1	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	7,32 Persentase	3.420.000,00		0,00	7.32 Persentase	2.420.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	0
1.2.2	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	4,35 Persentase	1.970.000.000,00		0,00	4.35 Persentase	1.465.846.100,00	0 Persentase	111.456.000,00	0,00	7,60	0 Persentase	111.456.000,00	0,00	5,66	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Rencana Revitalisasi penataan pelataran dan Los Pasar Dongko (rencana dilaksanakan perencanaan April-mei) Rencana Revitalisasi pelataran dan Los Pasar Bendo (rencana dilaksanakan perencanaan April-mei)
1.2.3	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	11,74 Persentase	210.047.186,00		0,00	11.74 Persentase	20.047.186,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Akan dihitung di setiap semester
1.2.4	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Barang (Milyar Rupiah)		57.800.000,00		0,00	140.50	37.800.000,00	5.00	0,00	3,56	0,00	5	0,00	0,00	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	4.998.469.079,871
1.2.5	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku Usaha Teredukasi Metrologi Legal	73,94 %	120.963.200,00		0,00	73.94 %	120.963.200,00	11.77 %	0,00	15,92	0,00	11.77 %	0,00	16,12	0,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	=(296+13+27+46)/(1746+1500)*100

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2026 s/d TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		DINAS LINGKUNGAN HIDUP		100	90.461.869.802,00		0,00	100	19.161.283.499,65		3.718.427.466,00	11,94	19,41	11.94	3.718.427.466,00	11,94	4,11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
1.1	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		100	22.318.380.586,00		0,00	100	185.805.000,00		2.640.000,00	0,00	1,42	0	2.640.000,00	0,00	0,01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
1.1.1	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST		0,00		0,00	31.51 %	185.805.000,00	0 %	2.640.000,00	0,00	1,42	0 %	2.640.000,00	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
1.2	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		100	0,00		0,00	100	18.975.478.499,65		3.715.787.466,00	12,73	19,58	12.73	3.715.787.466,00	12,73	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
1.2.1	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	29.256.961.527,00		0,00	100 %	14.642.207.870,65	30 %	3.415.738.690,00	30,00	23,33	30 %	3.415.738.690,00	30,00	11,67	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
1.2.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98,50 %				100 %		21.73 %		21,73		21.73 %		22,17		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rata-rata capaian kegiatan
1.2.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %				100 %		31.97 %		31,97		31.97 %		31,97		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rata-rata capaian kegiatan
1.2.4	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti		0,00		0,00	100 %	75.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
1.2.5	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		0,00		0,00	32.80 %	496.235.923,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
1.2.6	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase tutupan lahan hijau		0,00		0,00	57.74 %	1.975.000.000,00	0 %	51.345.282,00	0,00	2,60	0 %	51.345.282,00	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
1.2.7			Persentase RTH					3.20 %		0 %		0,00		0 %		0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
1.2.8	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola		0,00		0,00	100 %	7.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
1.2.9	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat terhadap persetujuan Lingkungan		0,00		0,00	49 %	46.264.077,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
1.2.10	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		0,00		0,00	26.35 %	61.000.000,00	0 %	7.725.000,00	0,00	12,66	0 %	7.725.000,00	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
1.2.11			Persentase Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan kepada masyarakat					49.68 %		0 %		0,00		0 %		0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
1.2.12	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat		0,00		0,00	23.48 %	126.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
1.2.13	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan lingkungan hidup		0,00		0,00	100 %	7.500.000,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	0,00	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti/total jumlah pengaduan x 100%n (4/4 x 100% = 100%)
1.2.14	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah		0,00		0,00	42.30 POIN	1.539.270.629,00	0 POIN	240.978.494,00	0,00	15,66	0 POIN	240.978.494,00	0,00	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
1.2.15			Persentase sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah					13.37 %		0 %		0,00		0 %		0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-
1.2.16			Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah					35.43 %		0 %		0,00		0 %		0,00		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		100	25.515.531.832,00	70,45	14.064.698.525,45	100	31.121.719.514,45		2.545.756.608,00	20,63	8,18	91.08	16.610.455.133,45	91,08	65,10	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
1.1	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		100	475.000.000,00	82,08	851.670.447,00	100	539.500.000,00		21.536.000,00	22,78	3,99	100	873.206.447,00	100,00	100,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
1.1.1	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase budaya yang dikembangkan	31,11 %	215.000.000,00		0,00	31.11 %	298.900.000,00	16.296 %	2.920.000,00	52,38	0,98	16.296 %	2.920.000,00	52,57	1,36	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	=22/135*100
1.1.2	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	25,36 %	185.000.000,00		0,00	25.36 %	125.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	pelaksanaan di tw 2 dan 3
1.1.3	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	18,48 %	75.000.000,00		0,00	18.48 %	115.600.000,00	18.48 %	18.616.000,00	100,00	16,10	18.48 %	18.616.000,00	100,00	24,82	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Honorarium Juru Pelihara Cagar Budaya, obyek Diduga Cagar Budaya dan situs bersejarah serta monitoring Odcb dan CB
1.2	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		100	25.040.531.832,00	68,28	13.213.028.078,45	100	30.582.219.514,45		2.524.220.608,00	20,31	8,25	88.59	15.737.248.686,45	88,59	62,85	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
1.2.1	3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	13.440.531.832,00	100 %	11.866.874.555,00	100 %	12.197.219.514,45	36.61 %	2.490.771.608,00	36,61	20,42	136.61 %	14.357.646.163,00	100,00	100,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Rata 2 tersedianya dokumen Dokumen perencamaan 39,89 % Dokumen evaluasi dan pelporan 33,33%
1.2.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	93,25 %		89.62 %		93.25 %		89.62 %		96,11		179.24 %		100,00		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Hasil Rekon Tw 4 tahun 2025
1.2.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		20 %		20,00		100 %		100,00		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	6 kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6 = /6 X 100%
1.2.4	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase daya tarik destinasi dan usaha pariwisata yang terkelola	18,9 %	11.170.000.000,00		0,00	18.9 %	18.025.000.000,00	6.95 %	27.389.000,00	36,77	0,15	6.95 %	27.389.000,00	38,61	0,25	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	(10+6+5)/(116+36+150)*x100%
1.2.5	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pangsa pasar pariwisata Kabupaten Trenggalek	1,61 %	200.000.000,00		0,00	1.61 %	115.000.000,00	1.1 %	2.060.000,00	68,32	1,79	1.1 %	2.060.000,00	100,00	1,03	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	kunjungan wisatawan regional jawa timur sejumlah 10.035.990
1.2.6	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	50 Persentase	120.000.000,00		0,00	50 Persentase	167.500.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	Pelaksanaan kegiatan di tribulan ke 3 dan 4
1.2.7	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	32,61 Persentase	110.000.000,00		0,00	35.55 Persentase	77.500.000,00	0 Persentase	4.000.000,00	0,00	5,16	0 Persentase	4.000.000,00	0,00	3,64	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	pelaksanaan di tribulan ke 2

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		100	97.207.366.281,00	63,09	94.217.670.421,47	100	127.069.381.640,36		3.712.792.323,00	9,15	2,92	72.24	97.930.462.744,47	72,24	100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.1	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		100	90.120.501.696,00	61	92.932.611.985,47	100	125.544.381.640,36		3.712.792.323,00	10,68	2,96	71.68	96.645.404.308,47	71,68	100,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1.1.1	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	20.231.473.938,00	100 %	14.803.048.156,00	100 %	20.987.741.388,16	0 %	3.712.792.323,00	0,00	17,69	100 %	18.515.840.479,00	100,00	91,52	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dalam Tahap proses awal pelayanan jasa administrasi perkantoran
1.1.2			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		40 %		40,00		140 %		100,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	4 dokumen pernc dan pelapran telah disusun dan target 10 dok perenc dan pelaporan
1.1.3			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99,71 %		100 %		100 %		0 %		0,00		100 %		100,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tahap identifikasi aset
1.1.4	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	58,55 %	7.081.864.585,00	58.327 %	6.636.762.620,00	58.55 %	4.444.106.753,09	0 %	0,00	0,00	0,00	58.327 %	6.636.762.620,00	100,00	93,71	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Ada Realisasi Fisik Maupun Keuangan Untuk Pekerjaan Konsultansi Pekerjaan Fisik akan dimulai pada bulan April
1.1.5			Persentase Pembangunan/ Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	34,73 %		34.36 %		37.14 %		0 %		0,00		34.36 %		100,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Ada Realisasi Fisik Maupun Keuangan Untuk Pekerjaan Konsultansi Pekerjaan Fisik akan dimulai pada bulan April
1.1.6	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan		0,00		0,00	90.8 %	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	sub kegiatan sudah tidak ada di dinas PUPR
1.1.7	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		0,00		0,00	0.71 %	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pindah Ke OPD lain
1.1.8			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak					85.03 %		0 %		0,00		0 %		0,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pindah Ke OPD lain
1.1.9	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik		0,00		0,00	6.41 %	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pindah Ke OPD lain
1.1.10	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	60 %	4.711.864.585,00		0,00	60 %	2.962.601.620,18	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	masih dalam tahap asistensi perencanaan rehabilitasi kecamatan dongko
1.1.11			Persentase jumlah SLF yang diterbitkan	40 %				40 %		100 %		250,00		100 %		100,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2 dokumen dibagi 2 dokumen dikali 100% = 100% 2 dokumen terdiri dari : > 1 dokumen berisi 26 SPSST penerbitan PBG > 1 dokumen berisi 14 SPSST penerbitan SLF
1.1.12	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	40 %	200.000.000,00		0,00	40 %	100.000.000,00	17 %	0,00	42,50	0,00	17 %	0,00	42,50	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	RTBL yg telah disusun di tahun-tahun sebelumnya sejumlah 1 RTBL RTBL yg direncanakan disusun sejumlah 6 RTBL jadi, 1/6 x 100% = 17%
1.1.13	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan mantab	73,00 %	56.520.298.588,00		0,00	73 %	95.824.931.878,93	67.07 %	0,00	91,88	0,00	67.07 %	0,00	91,88	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap yaitu 577,03 Km Panjang jalan Kabupaten keseluruan yaitu 860,34 Km Jadi prosentase Kemantaban Jalan Kabupaten yaitu ((577,03))/860,34) x 100% = 67,07% Panjang jalan Kabupaten keseluruhan mengalami perubahan panjang karena adanya pembaruhan Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten
1.1.14			Persentase jembatan berfungsi baik	98,19 %		99.457 %		98.19 %		97.58 %		99,38		100 %		100,00		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	masih terdapat 8 jembatan belum berfungsi baik yaitu 1. Jembatan Podang (Jembatan Beli) 2. Jembatan Mukus (Jembatan Beli) 3. Jembatan Dung Buceng (Jembatan Beli) 4. Jembatan Kembangsore (Jembatan Kecil) 5. Jembatan Kalitengah (Jembatan Patah) 6. Jembatan Nglebeng - Bendogolor (Abutmen Rusak) 7. Jembatan Sukorame (Jembatan Sempit sehingga lalu lintas bergantian) 8. Jembatan Banaran 1 (Jembatan Sempit dan Abutmen Rusak) Jadi prosentase jembatan berfungsi baik yaitu (323/331) x 100% = 97,58%
1.1.15	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase fasilitasi penyelenggaraan jasa konstruksi	20 %	250.000.000,00		0,00	20 %	250.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Belum Ada Realiasai pada TW I
1.1.16	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR	95,4 %	1.125.000.000,00		0,00	95.4 %	975.000.000,00	8 %	0,00	8,39	0,00	8 %	0,00	8,42	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	KKPR -> terlaksana 3 layanan pada TW 1 Penilaian KKPR -> dilaksanakan pada TW 3-4 RTR -> dalam proses penyusunan *bobot tiap indikator 32% dibagi dalam 4 periode triwulan sehingga diperoleh 8% untuk pelaksanaan KKPR
1.2	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		100	7.086.864.585,00	71,11	1.285.058.436,00	100	1.525.000.000,00		0,00	0,00	0,00	71.11	1.285.058.436,00	71,11	18,13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.2.1	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	64,29 %	586.864.585,00		0,00	64.29 %	350.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Proses Inventarisasi permasalahan aset tanah untuk lahan kompensasi JLS
1.2.2	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 %	4.500.000.000,00		0,00	100 %	375.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masih proses perencaan penyusunan permohonan penetapan lokasi pengadaan tanah
1.2.3	2.10.08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Luas Tanah Kosong, Tanah Timbul, Tanah Negara dan Tanah Aset Pemerintah yang bersertifikat hak	50,00 %	1.000.000.000,00		0,00	50 %	300.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Proses penyusunan dokumen sebagai bahan dasar pelaksanaan kegiatan dan koordinasi lintas sektor serta inventarisasi pengumpulan data di lapangan
1.2.4	2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengurusan Penggunaan Kawasan Hutan untuk PSN dan PSD	55,88 %	1.000.000.000,00		0,00	62.58 %	500.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Masih Proses untuk memperoleh Penetapan Batas Areal Kerja Penggunaan Kawasan Hutan < 5 Ha Pembangunan Non Fasilitas Umum Yang Bersifat Non-Komersial Untuk Penampungan Sementara Korban Bencana Tanah Longsor / Gerak di Desa Ngrandu Kecamatan Suruh

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		100	9.513.365.386,00	63,65	9.355.726.887,56	100	10.443.602.045,97		1.143.006.998,00	22,96	10,94	86.61	10.498.733.885,56	86,61	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
1.1	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		100	9.513.365.386,00	63,65	9.355.726.887,56	100	10.443.602.045,97		1.143.006.998,00	22,96	10,94	86.61	10.498.733.885,56	86,61	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
1.1.1	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	5.451.085.386,00	100 %	4.894.867.393,56	100 %	5.132.832.931,91	26.01 %	1.015.851.208,00	26,01	19,79	126.01 %	5.910.718.601,56	100,00	100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Jumlah Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Tiap Kegiatan / Jumlah Target Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran Tiap Kegiatan x 100% (43,33+10,00+25,71+25,00)/4*100 =26,01
1.1.2			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		32.56 %		32,56		100 %		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Jumlah target Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah X 100% 6+8)/(15+28)*100 =32,56
1.1.3			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	90,25 %		91.82 %		90.25 %		95.79 %		106,14		100 %		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	943.248.500 :984.678.960
1.1.4	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Pengesahan Batas Desa	30,92 %	80.000.000,00		0,00	30.92 %	70.000.000,00	0 %	4.987.000,00	0,00	7,12	0 %	4.987.000,00	0,00	6,23	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	masih Berproses
1.1.5			Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100 Persentase				100 Persentase		100 Persentase		100,00		100 Persentase		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	semua desa se Kab Trenggalek
1.1.6	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100 %	50.000.000,00		0,00	100 %	45.000.000,00	0 %	3.759.000,00	0,00	8,35	0 %	3.759.000,00	0,00	7,52	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Masih dalam proses
1.1.7	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100 %	3.432.280.000,00		0,00	100 %	4.595.769.114,06	100 %	77.915.790,00	100,00	1,70	100 %	77.915.790,00	100,00	2,27	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
1.1.8			Persentase administrasi Desa yang disusun dan ditetapkan Tepat Waktu	100 %				100 %		100 %		100,00		100 %		100,00		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-
1.1.9	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	50,66 %	500.000.000,00		0,00	50.66 %	600.000.000,00	16.67 %	40.494.000,00	32,91	6,75	16.67 %	40.494.000,00	33,34	8,10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-LKD terdiri dari RT, RW, Karang Taruna, PKK, Posyandu dan LPM) Jumlah LKD yang difasilitasi / Jumlah LKD kali 100% 1 / 6 X 100% = 16,67 %

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		100	12.717.270.126,00		0,00	100	7.428.293.554,36		478.152.079,00	9,72	6,44	9.72	478.152.079,00	9,72	3,76	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.1	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		100	12.717.270.126,00		0,00	100	7.428.293.554,36		478.152.079,00	9,72	6,44	9.72	478.152.079,00	9,72	3,76	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	
1.1.1	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.523.960.943,00		0,00	100 %	5.238.136.515,23	0 %	478.152.079,00	0,00	9,13	0 %	478.152.079,00	0,00	8,66	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
1.1.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	81,67 %				84.57 %		0 %		0,00		0 %		0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	pada TW 1 kegiatan rekon aset dengan BPKPD belum ada
1.1.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %				100 %		0 %		0,00		0 %		0,00		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
1.1.4	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rasio Wirausaha Pemuda	2,22 Persentase	1.142.500.000,00		0,00	2.22 Persentase	20.000.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
1.1.5	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase atlet yang masuk Pelatda dan Pelatnas	0,3 %	5.340.809.183,00		0,00	0.3 %	2.070.157.039,13	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
1.1.6	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	53 Persentase	710.000.000,00		0,00	53.00 Persentase	100.000.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Kegiatan dilaksanakan pada TW 2 dan TW3

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		100	5.004.244.631,00	70,67	4.623.604.926,00	100	4.651.550.097,09		1.028.682.984,00	31,45	22,11	100	5.652.287.910,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
1.1	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		100	5.004.244.631,00	70,67	4.623.604.926,00	100	4.651.550.097,09		1.028.682.984,00	31,45	22,11	100	5.652.287.910,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
1.1.1	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	4.643.244.631,00	100 %	4.254.018.890,00	100 %	4.419.550.097,09	30.35 %	1.014.397.046,00	30,35	22,95	130.35 %	5.268.415.936,00	100,00	100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	realisasi dok perencanaan tw 1 : 17 target dok perencanaan : 56 17 / 56 x 100 %= 30,35 %
1.1.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	96,26 %		96.20 %		96.26 %		96.15 %		99,89		192.35 %		100,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	perhitungan aset baik / total aset x 100 % = 10.801.287.183 / 11.234.216.892 = 96,15 %
1.1.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		98.14 %		100 %		39.06 %		39,06		100 %		100,00		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	rata2 dari kegiatan pembentuk adalah -administrasi keuangan : (((37/37) + (0/12))/2x 100% = 75,51 % -administrasi umum : ((1/4) + (3/12)+(3/12)+(3/12)+(3/12))/5 x 100% = 25% -penyediaan jasa penunjang : ((3/12) + (3/12) + (0/12))/3 x 100% = 16,67 % Rata - rata dari kegiatan pembentuk = (75,51+25+16,67)/3=39,06 %
1.1.4	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase masyarakat dan / atau investor yang memperoleh insentif dan / atau kemudahan investasi	82 %	27.000.000,00		0,00	82 %	31.000.000,00	88 %	1.310.000,00	107,32	4,23	88 %	1.310.000,00	100,00	4,85	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	masyarakat atau investor yang memperoleh insentif atau kemudahan/ pemohon yang memenuhi ketentuan x 100% = 2066/2335 x 100% = 88 %
1.1.5	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Investor di Sektor Unggulan Daerah	40 %	175.000.000,00		0,00	40 %	76.000.000,00	83.17 %	2.624.000,00	207,93	3,45	83.17 %	2.624.000,00	100,00	1,50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	jumlah investor sektor unggulan / jumlah seluruh investor x 100 % = 1384 / 1664 x 100% = 83,17 %
1.1.6	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 %	67.000.000,00		0,00	100 %	51.000.000,00	100 %	6.821.938,00	100,00	13,38	100 %	6.821.938,00	100,00	10,18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(jumlah seluruh penerima izin tahun berkenaan / pemohon izin) X 100% = 2335 / 2335 * 100 % = 100 % Izin terbit tw 1 = 2335 dokumen
1.1.7	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100 %	84.500.000,00		0,00	100 %	71.000.000,00	100 %	3.530.000,00	100,00	4,97	100 %	3.530.000,00	100,00	4,18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(Jumlah penyelesaian permasalahan / jumlah permasalahan yang dihadapi pelaku usaha) X 100% = 8 / 8 * 100% = 100%
1.1.8	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 %	7.500.000,00		0,00	100 %	3.000.000,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	0,00	100,00	0,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	(jumlah permintaan data yang dicukupi/jumlah permintaan data) X 100% = 14/14*100%=100%

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		DINAS PENDIDIKAN		100	630.701.903.025,00		0,00	100	641.865.881.238,59		106.765.807.165,00	5,23	16,63	5.23	106.765.807.165,00	5,23	16,93	DINAS PENDIDIKAN	
1.1	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		100	630.701.903.025,00		0,00	100	641.865.881.238,59		106.765.807.165,00	5,23	16,63	5.23	106.765.807.165,00	5,23	16,93	DINAS PENDIDIKAN	
1.1.1	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	517.651.784.955,00		0,00	100 %	551.949.080.038,59	28.86 %	106.765.807.165,00	28,86	19,34	28.86 %	106.765.807.165,00	28,86	20,63	DINAS PENDIDIKAN	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 112,67 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 21,33 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 28,95 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 25,00 5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25,00 7 Penyediaan Bahan Logistik Kantor - 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25,00 9 Penyediaan Bahan/Material 33,33 10 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25,00 11 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25,00 12 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25,00
1.1.2			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %				100 %		20.89 %		20,89		20.89 %		20,89		DINAS PENDIDIKAN	1) 35,00 2) 27,66
1.1.3			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	83,07 %				84.57 %		0 %		0,00		0 %		0,00		DINAS PENDIDIKAN	-
1.1.4	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Iklim Inklusivitas SMP	62,91 Nilai	104.804.393.470,00		0,00	62.91 Nilai	85.365.450.000,00	0 Nilai	0,00	0,00	0,00	0 Nilai	0,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN	Menunggu rilis RAPOR PENDIDIKAN 2026
1.1.5			Iklim Keamanan SD	79,58 Nilai				79.58 Nilai		0 Nilai		0,00		0 Nilai		0,00		DINAS PENDIDIKAN	Menunggu rilis RAPOR PENDIDIKAN 2026
1.1.6			Iklim Kebinekaan SD	76,16 Nilai				76.16 Nilai		0 Nilai		0,00		0 Nilai		0,00		DINAS PENDIDIKAN	Menunggu rilis RAPOR PENDIDIKAN 2026
1.1.7			Iklim Kebinekaan SMP	72,40 Nilai				72.40 Nilai		0 Nilai		0,00		0 Nilai		0,00		DINAS PENDIDIKAN	Menunggu rilis RAPOR PENDIDIKAN 2026
1.1.8			Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD (APS)	85,15 %				85.15 %		0 %		0,00		0 %		0,00		DINAS PENDIDIKAN	Menunggu perhitungan data (tahun pelajaran baru 2026/2027
1.1.9			Persentase anak usia 7-18 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan Non Formal (APS)	18,07 %				18.07 %		0 %		0,00		0 %		0,00		DINAS PENDIDIKAN	Menunggu perhitungan data (tahun pelajaran baru 2026/2027
1.1.10			Iklim Inklusivitas SD	66,63 Nilai				66.63 Nilai		0 Nilai		0,00		0 Nilai		0,00		DINAS PENDIDIKAN	Menunggu rilis RAPOR PENDIDIKAN 2026
1.1.11			Iklim Keamanan SMP	73,73 Nilai				73.73 Nilai		0 Nilai		0,00		0 Nilai		0,00		DINAS PENDIDIKAN	Menunggu rilis RAPOR PENDIDIKAN 2026
1.1.12			Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	99,74 %				99.74 %		0 %		0,00		0 %		0,00		DINAS PENDIDIKAN	Menunggu perhitungan data (tahun pelajaran baru 2026/2027
1.1.13	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	74,52 Persentase	325.000.000,00		0,00	74.52 Persentase	30.000.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN	Perhitungan cut off pada bulan Oktober 2026
1.1.14	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	0,61 poin	7.470.724.600,00		0,00	0.61 Poin	4.482.890.000,00	0 Poin	0,00	0,00	0,00	0 Poin	0,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN	Menunggu rilis RAPOR PENDIDIKAN
1.1.15			Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	62,66 %				62.66 %		0 %		0,00		0 %		0,00		DINAS PENDIDIKAN	Perhitunagn cut off pada bulan November 2026
1.1.16	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Usulan Izin/ Rekomendasi Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui	99,48 %	175.000.000,00		0,00	99.48 %	20.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN	Perhitungan cut off pada bulan November 2026
1.1.17	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	68,14 Persentase	275.000.000,00		0,00	68.14 Persentase	18.461.200,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	DINAS PENDIDIKAN	Perhitungan cut off pada bulan Oktober 2026

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA		100	9.390.862.190,00	60,45	8.770.899.620,00	100	7.617.050.360,46		1.254.150.809,00	12,99	16,47	73.44	10.025.050.429,00	73,44	100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
1.1	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		100	8.760.862.190,00	58,29	8.317.003.584,00	100	6.897.050.360,46		1.241.513.780,00	15,78	18,00	74.07	9.558.517.364,00	74,07	100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
1.1.1	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	5.419.206.190,00	100 %	5.095.387.883,00	100 %	5.136.550.360,46	21 %	1.232.413.280,00	21,00	23,99	121 %	6.327.801.163,00	100,00	100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	=8/39*100 DPA induk, PK Induk, Rencana Aksi Lap. Keuangan, LKJIP, LPPD, Lapdu 3 bulan
1.1.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98 %		99.77 %		98 %		0 %		0,00		99.77 %		100,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Belum ada rekon aset untuk TW I
1.1.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		23 %		23,00		100 %		100,00		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	22/96*100
1.1.4	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Rencana Tenaga Kerja yang dapat disusun	0 %	0,00		0,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Program tidak ada pada Renja 2026
1.1.5	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi pada tahun n	0,069 %	941.656.000,00		0,00	0.069 %	547.500.000,00	0 %	9.100.500,00	0,00	1,66	0 %	9.100.500,00	0,00	0,97	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Pelaksanaan pelatihan bahasa korea dan bahasa jepang menyesuaikan jadwal ujian JLPT dan Topik 2 di semester 2
1.1.6	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	45 Persentase	175.000.000,00		0,00	45 Persentase	143.000.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Masih proses rekap
1.1.7	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	1.000	2.225.000.000,00		0,00	1000	1.070.000.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Masih menunggu data dari BPJS Ketenagakerjaan
1.2	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		100	515.000.000,00	77,88	388.262.860,00	100	605.000.000,00		12.637.029,00	3,54	2,09	81.42	400.899.889,00	81,42	77,84	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
1.2.1	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	16,76 Persentase	390.000.000,00		0,00	16.76 Persentase	380.000.000,00	2.84 Persentase	4.110.000,00	16,95	1,08	2.84 Persentase	4.110.000,00	17,75	1,05	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	=11.631/410*100 Berdasarkan data realisasi investasi sd bulan Pebruari. Untuk bulan Maret, DPMPTSP belum mempublikasi data realisasi investasi
1.2.2	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	0,5 Persentase	75.000.000,00		0,00	0.5 Persentase	175.000.000,00	0 Persentase	8.527.029,00	0,00	4,87	0 Persentase	8.527.029,00	0,00	11,37	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Belum ada verifikasi teknis IKM ndaa....
1.2.3	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	40 Persentase	50.000.000,00		0,00	40 Persentase	50.000.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Masih Proses Rekap data
1.3	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI		100	115.000.000,00	55,38	65.633.176,00	100	115.000.000,00		0,00	0,00	0,00	55.38	65.633.176,00	55,38	57,07	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
1.3.1	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan	100 %	115.000.000,00		0,00	100 %	115.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Belum ada informasi penempatan transmigrasi

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN		100	38.238.861.588,00	78,07	33.798.611.912,51	100	30.166.348.420,46		2.685.238.583,00	20,30	8,90	98.37	36.483.850.495,51	98,37	95,41	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
1.1	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		100	571.074.738,00	78,32	600.199.119,69	100	571.074.738,00		14.929.500,00	11,84	2,61	90.16	615.128.619,69	90,16	100,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
1.1.1	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase infrastruktur dan sarana pendukung kemandirian pangan yang diadakan dan dimanfaatkan dengan baik	100 %	165.045.238,00		0,00	100 %	165.045.238,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-
1.1.2	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	100 Persentase	307.300.800,00		0,00	100 Persentase	317.300.800,00	218.85 Persentase	14.929.500,00	218,85	4,71	218.85 Persentase	14.929.500,00	100,00	4,86	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	=(100,122/45,75)*100% = 218,85 %. Note : pada saat menyusun renstra, yang dipakai dasar perhitungan target lama. Awal tahun 2026, dinas menerima surat penetapan target sebesar 45,75 Ton (mengacu pada perhitungan cadangan beras pemerintah daerah berdasarkan pada peraturan badan pangan RI no.3 tahun 2025 tentang tata cara perhitungn jumlah CBPD yang mencabut peraturan sebelumnya no.500.1.3.3/610/110.5/2024 sebesar 81,29 Ton
1.1.3			Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,75 poin				88.75 Poin		0 Poin		0,00		0 Poin		0,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	skor pph konsumsi di akhir tahun . data dari bapanas
1.1.4	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	1,27 %	53.975.500,00		0,00	1.27 %	43.975.500,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	0/157 target (mei/juni)
1.1.5	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	86,67 Persentase	44.753.200,00		0,00	86.67 Persentase	44.753.200,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	alat uji habis. masih akan pengadaan
1.2	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		100	37.667.786.850,00	77,96	33.198.412.792,82	100	29.595.273.682,46		2.670.309.083,00	23,69	9,02	100	35.868.721.875,82	100,00	95,22	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
1.2.1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	23.632.304.288,00	100 %	22.250.429.604,22	100 %	14.972.167.120,46	21.25 %	2.615.937.393,00	21,25	17,47	121.25 %	24.866.366.997,22	100,00	100,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	=((1/8)+(3/10))/2 *100= 21.25%. (PK, LKJIP, Lapkhir,LPPD)
1.2.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	54 %		99.99 %		54 %		99.96 %		185,11		199.95 %		100,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	=(70633548477/(70633548477+27838354))*100% = 99,96 %
1.2.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		29.70 %		29,70		100 %		100,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	(1.983.998.364/14.059.649.081,86)*100%)+(3/12*100%)+(3/6)*100%))/3=29,70% ((realisasi gaji dan tunjangan ASN yang disalurkan / pagu gaji dan tunjangan ASN)*100% + (realisasi jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan per bulan / laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan per bulan * 100%) + (realisasi jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara/jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara*100%)) / 3
1.2.4	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Hortikultura (Alpukat)	3.424,89 Ton	1.681.650.000,00		0,00	3424.89 Ton	961.380.000,00	998.83 Ton	45.086.090,00	29,16	4,69	998.83 Ton	45.086.090,00	100,00	2,68	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-
1.2.5			Peningkatan Produksi Hortikultura (Bawang Merah)	476,62 Ton				476.62 Ton		17.84 Ton		3,74		17.84 Ton		3,75		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-
1.2.6			Peningkatan Produksi Hortikultura (Cabai)	803 Ton				803 Ton		287.39 Ton		35,79		287.39 Ton		35,79		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-
1.2.7			Peningkatan Produksi Hortikultura (Durian)	11.892,97 Ton				11892.97 Ton		1535.6 Ton		12,91		1535.6 Ton		100,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-
1.2.8			Peningkatan Produksi Hortikultura (Jahe)	1.429,12 Ton				1429.12 Ton		1316.02 Ton		92,09		1316.02 Ton		100,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-
1.2.9			Peningkatan Produksi Hortikultura (Manggis)	2.953,44 Ton				2953.44 Ton		31.74 Ton		1,07		31.74 Ton		100,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-
1.2.10			Peningkatan Produksi Perkebunan (Cengkeh)	309,45 Ton				309.45 Ton		18 Ton		5,82		18 Ton		5,83		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-
1.2.11			Peningkatan Produksi Perkebunan (Kakao)	1.074,67 Ton				1074.67 Ton		125.4 Ton		11,67		125.4 Ton		100,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-
1.2.12			Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa)	8.438,23 Ton				8438.23 Ton		2097.4 Ton		24,86		2097.4 Ton		100,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-
1.2.13			Peningkatan Produksi Perkebunan (Kopi)	618,06 Ton				618.06 Ton		2.5 Ton		0,40		2.5 Ton		0,40		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-
1.2.14			Peningkatan Produksi Perkebunan (Nilam)	1.262,47 Ton				1262.47 Ton		37 Ton		2,93		37 Ton		100,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-
1.2.15			Peningkatan Produksi Perkebunan (Tembakau)	180,80 Ton				180.80 Ton		0 Ton		0,00		0 Ton		0,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	belum panen
1.2.16			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Jagung)	117.983,86 Ton				117983.86 Ton		50088 Ton		42,45		50088 Ton		100,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-
1.2.17			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Kedelai)	1.714,08 Ton				1714.08 Ton		0 Ton		0,00		0 Ton		0,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	belum panen
1.2.18			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi)	141.124,95 Ton				141124.95 Ton		61343 Ton		43,47		61343 Ton		100,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-
1.2.19			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ubi Kayu)	183.370,31 Ton				183370.31 Ton		8190 Ton		4,47		8190 Ton		100,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-
1.2.20	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	12.785 Ha	11.021.275.262,00		0,00	12785 Ha	13.037.675.262,00	12785 Ha	9.285.600,00	100,00	0,07	12785 Ha	9.285.600,00	100,00	0,08	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-
1.2.21	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian		149.051.300,00		0,00	100 %	129.051.300,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Lahan sawah umur tanaman 40 HST (hari setelah tanam) terdampak banjir seluas 2,4 Ha (2 Ha Kecamatan Craken Munjungan, 0,4 ha Karangtengah Kecamatan Panggul) ditangani dengan penanaman ulang . (2,4/2,4) *100% = 100%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.2.22			Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100 %				100 %		100 %		100,00		100 %		100,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	=414,05 Ha/414,05 Ha * 100% =100 % (luas lahan terdampak OPT yang tertangani/luas lahan yang terdampak OPT)
1.2.23	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	1,91 Persentase	1.183.506.000,00		0,00	1.91 Persentase	495.000.000,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	0 Persentase	0,00	0,00	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	-
1.2.24			Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	100 Persentase				100 Persentase		0 Persentase		0,00		0 Persentase		0,00		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	rencana di TW 2, 3 4
2		UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN		100	328.967.438,00	74,7	459.456.901,00	100	1.430.217.438,00		27.317.400,00	27,64	1,91	100	486.774.301,00	100,00	100,00	UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN	
2.1	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		100	328.967.438,00	74,7	459.456.901,00	100	1.430.217.438,00		27.317.400,00	27,64	1,91	100	486.774.301,00	100,00	100,00	UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN	
2.1.1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	54 %	21.894.053,00		0,00	54 %	21.894.053,00	99.96 %	7.896.900,00	185,11	36,07	99.96 %	7.896.900,00	100,00	36,07	UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN	=(70633548477/ (70633548477+27838354))*100% = 99,96 %
2.1.2			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		43.33 %		43,33		100 %		100,00		UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN	=(((4/6)+(1/5))/2) *100% = 43,33
2.1.3	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Perkebunan (Cengkeh)	309,45 Ton	307.073.385,00		0,00	309.45 Ton	1.408.323.385,00	18 Ton	19.420.500,00	5,82	1,38	18 Ton	19.420.500,00	5,83	6,32	UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN	-
2.1.4			Peningkatan Produksi Perkebunan (Kakao)	1.074,67 Ton				1074.67 Ton		125.4 Ton		11,67		125.4 Ton		100,00		UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN	-
2.1.5			Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa)	8.438,23 Ton				8438.23 Ton		2097.4 Ton		24,86		2097.4 Ton		100,00		UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN	-
2.1.6			Peningkatan Produksi Perkebunan (Kopi)	618,06 Ton				618.06 Ton		2.5 Ton		0,40		2.5 Ton		0,40		UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN	-
2.1.7			Peningkatan Produksi Perkebunan (Nilam)	1.262,47 Ton				1262.47 Ton		37 Ton		2,93		37 Ton		100,00		UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN	-
2.1.8			Peningkatan Produksi Perkebunan (Tembakau)	180,80 Ton				180.80 Ton		0 Ton		0,00		0 Ton		0,00		UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN	belum panen

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN		100	21.531.766.563,00		0,00	100	79.875.138.641,49		7.099.876.284,00	13,27	8,89	13.27	7.099.876.284,00	13,27	32,97	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
1.1	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		100	1.917.298.831,00		0,00	100	13.637.754.000,00		9.777.500,00	6,17	0,07	6.17	9.777.500,00	6,17	0,51	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
1.1.1	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan		0,00		0,00	90.8 %	4.515.803.658,00	89.63 %	0,00	98,71	0,00	89.63 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum pada tahun 2025 =244.942 jumlah proyeksi rumah tangga di kabupaten pada th 2025 = 273.274 jumlah rumah tangga yang mendapat akses air minum pada tahun 2025/jumlah proyeksi rumah tangga di kabupaten pada th 2025=244.942/273.274=89,63% tahun 2026 masih dalam tahap perencanaan teknis
1.1.2	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		0,00		0,00	0.8 %	1.142.129.200,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	Kabupaten Trenggalek belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
1.1.3			Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak					85.03 %		0 %		0,00		0 %		0,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	Belum terlaksananya pekerjaan fisik Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik, dalam tahap perencanaan teknis
1.1.4	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik		0,00		0,00	6.41 %	7.979.821.142,00	0 %	9.777.500,00	0,00	0,12	0 %	9.777.500,00	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	Belum terlaksananya pekerjaan fisik Pembangunan Drainase Perkotaan dan Lingkungan, dalam tahap perencanaan teknis
1.1.5			Persentase luas genangan perkotaan yang tertangani					36.90 %		0 %		0,00		0 %		0,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	Belum terlaksananya pekerjaan fisik Pembangunan Drainase Perkotaan dan Lingkungan, dalam tahap perencanaan teknis
1.2	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100	0,00		0,00	100	57.345.172.561,49		6.725.911.584,00	12,84	11,73	12.84	6.725.911.584,00	12,84	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
1.2.1	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	15.172.467.732,00		0,00	100 %	28.027.672.561,49	25.00 %	6.725.911.584,00	25,00	24,00	25 %	6.725.911.584,00	25,00	44,33	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	Rata-rata capaian Kegiatan perencanaan (25,00%)
1.2.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %				100 %		100 %		100,00		100 %		100,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	(Jumlah Aset dalam kondisi baik/jumlah total aset) x 100%=(78.267.570.311/78.267.570.311)x100%
1.2.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %				100 %		28.30 %		28,30		28.3 %		28,30		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (69,04%+0,00%+19,17%+25,00)/4=28,30%
1.2.4	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Warga Negara Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten yang Memperoleh Rumah Layak Huni		0,00		0,00	25 %	75.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	masih melakukan verifikasi di lapangan
1.2.5	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Luasan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani		0,00		0,00	18.34 %	50.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	proses verifikasi lapangan
1.2.6	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Perbaikan RTLH		0,00		0,00	98.16 %	325.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	sudah proses pelaksanaan pembangunan rumah tidak layak huni di desa sukorejo kec gandusari
1.2.7			Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan					69.95 %		0 %		0,00		0 %		0,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	masih proses spj
1.2.8	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)		0,00		0,00	65 %	28.867.500.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	tahap perencanaan sudah selesai
1.3	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		100	0,00		0,00	100	8.892.212.080,00		364.187.200,00	17,97	4,10	17.97	364.187.200,00	17,97	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
1.3.1	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Integrasi Antar Moda		0,00		0,00	33.33 %	8.882.212.080,00	0 %	362.437.200,00	0,00	4,08	0 %	362.437.200,00	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	(jumlah integrasi moda yang dilaksanakan/jumlah integrasi moda yang direncanakan pada tahun berkenaan) x 100%=0/3x100%
1.3.2			Persentase fasilitas prasarana angkutan darat layak fungsi					42.86 %		40 %		93,33		40 %		0,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	(Jumlah Prasarana Angkutan darat yang dikembangkan/dioptimalkan / jumlah kebutuhan prasarana angkutan darat tahun berkenaan) x 100%=14/35x100%
1.3.3			Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia					27.03 %		24.94 %		92,27		24.94 %		0,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	(Jumlah rambu yang tersedia pada tahun berkenaan/ Jumlah rambu yang dibutuhkan) x 100%=(850+103+120+0)/4302
1.3.4			Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir					97 %		21.98 %		22,66		21.98 %		0,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	(Jumlah kendaraan wajib uji yang melakukan uji kir / Jumlah kendaraan wajib uji tahun berkenaan) x 100 %=((548+458+370))/6259*100
1.3.5			Persentase layanan angkutan darat					54.90 %		15.43 %		28,11		15.43 %		0,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	(Jumlah MPU yang tertib dalam mengurus ijin trayek pada tahun n / Jumlah MPU yang terdaftar pada tahun n) x 100 %=52/337x100%

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1) Tahun 2026 s/d TW I		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.3.6			Persentase peningkatan pengguna angkutan umum					22.37 %		4.45 %		19,89		4.45 %		0,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	(jumlah penumpang terminal tw I+angel tw I/base line 2024)xtarget 2026 (9290+0)/ 469.353x 22,37% = 4,45%
1.3.7			Tingkat kepatuhan operator dan awak angkutan sesuai SOP					79 %		36 %		45,57		36 %		0,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	jumlah kendaraan yang di ramp cekx100%=36x100%
1.3.8			Tingkat Kinerja Ruas Jalan					0.356 %		0.32 %		89,89		0.32 %		0,00		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	volume kendaraan / kapasitas=877/2764,34
1.3.9	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase kegiatan promosi dan penjajakan kerja sama pengoperasian pelabuhan		0,00		0,00	100 %	10.000.000,00	33.33 %	1.750.000,00	33,33	17,50	33.33 %	1.750.000,00	0,00	0,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	jumlah koordinasi fasilitasi tim percepatan pengoperasionalan pelabuhan niaga prigi/target fasilitasi tim percepatan pengoperasionalan pelabuhan x 100%=2/6*100%
2		UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR		100	220.907.813,00		0,00	100	33.525.000,00		0,00	2,52	0,00	2.52	0,00	2,52	0,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	
2.1	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		100	0,00		0,00	100	33.525.000,00		0,00	2,52	0,00	2.52	0,00	2,52	0,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	
2.1.1	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase nilai aset dalam kondisi baik		0,00		0,00		0,00	100	0,00	0,00	0,00	100	0,00	0,00	0,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	(Jumlah Aset dalam kondisi baik/jumlah total aset) x 100%=(78.267.570.311/78.267.570.311)x100%
2.1.2			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi					0 %		28.30 %		0,00		28.3 %		0,00		UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Rata-rata capaian kinerja kegiatan (69,04%+0,00%+19,17%+25,00)/4=28,30%
2.1.3	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan Uji Kir		0,00		0,00	97 %	33.525.000,00	21.98 %	0,00	22,66	0,00	21.98 %	0,00	0,00	0,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	(Jumlah kendaraan wajib uji yang melakukan uji kir / Jumlah kendaraan wajib uji tahun berkenaan) x 100 %=((548+458+370))/6259*100

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN		100	17.625.474.735,00		0,00	100	16.856.170.675,59		3.147.926.411,00	10,85	18,68	10.85	3.147.926.411,00	10,85	17,86	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		100	1.109.513.448,00		0,00	100	994.000.000,00		0,00	0,89	0,00	0.89	0,00	0,89	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.1.1	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	22.858,80 Ton	206.000.000,00		0,00	22858.80 Ton	319.800.000,00	166.81 Ton	0,00	0,73	0,00	166.81 Ton	0,00	100,00	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Produksi Perikanan Tangkap Laut ditambah Produksi Perikanan Perairan Umum Daratan (PUD) Bulan Januari-Februari
1.1.2	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	5.091,46 Ton	577.052.816,00		0,00	5091.46 Ton	325.000.000,00	764.38 Ton	0,00	15,01	0,00	764.38 Ton	0,00	100,00	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya Bulan Januari-Februari
1.1.3	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Luasan Kawasan Konservasi	82,5 Ha	70.757.492,00		0,00	82.5 Ha	145.200.000,00	0 Ha	0,00	0,00	0,00	0 Ha	0,00	0,00	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Realiasi Kinerja di TW IV
1.1.4	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	42 Kg/KAP/TH	255.703.140,00		0,00	42 Kg/KAP/TH	204.000.000,00	0 Kg/KAP/TH	0,00	0,00	0,00	0 Kg/KAP/TH	0,00	0,00	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Realisasi Kinerja di TW IV
1.2	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		100	16.515.961.287,00		0,00	100	15.862.170.675,59		3.147.926.411,00	16,65	19,85	16.65	3.147.926.411,00	16,65	19,06	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
1.2.1	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	15.013.678.387,00		0,00	100 %	14.053.753.075,59	22 %	3.147.926.411,00	22,00	22,40	22 %	3.147.926.411,00	22,00	20,97	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Realisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah + Administrasi Umum Perangkat Daerah + Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah / Target = 20 + 38 + 6 / 66 + 198 + 24 = 64 / 289 x 100% = 22%
1.2.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95 %				95 %		97.56 %		102,69		97.56 %		100,00		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Berdasarkan hasil rekonsiliasi aset TW IV 2025
1.2.3			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %				100 %		33 %		33,00		33 %		33,00		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Realisasi Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah / Target = 12 / 36 x 100% = 33%
1.2.4	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Susu)	3.796,41 Ton	1.068.091.000,00		0,00	3796.41 Ton	856.153.200,00	5063.49 Ton	0,00	133,38	0,00	5063.49 Ton	0,00	100,00	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Produksi Susu
1.2.5			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Daging)	1.896,51 Ton				1896.51 Ton		371.13 Ton		19,57		371.13 Ton		100,00		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Produksi Daging bulan Januari-Maret
1.2.6			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Telur)	18.802,35 Ton				18802.35 Ton		1667.22 Ton		8,87		1667.22 Ton		100,00		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Produksi telur bulan Januari-Maret
1.2.7	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase prasarana yang digunakan dan berfungsi dengan baik (meliputi semua non japrod yang di kelola dinas peternakan)	100 %	283.167.600,00		0,00	100 %	781.167.600,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Pelaksanaan kegiatan di TW II, TW III dan TW IV
1.2.8	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Unit Usaha pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV	3 Unit	151.024.300,00		0,00	3 Unit	171.096.800,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Pelaksanaan di TW II, TW III, dan TW IV
1.2.9			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100 %				100 %		93.78 %		93,78		93.78 %		93,78		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	Tingkat Pengendalian : (106,63/106,63)/106,63 x 100% Tingkat Pengendalian : 93,78%
2		UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN		100	31.000.000,00		0,00	100	95.000.000,00		6.653.474,00	12,86	7,00	12.86	6.653.474,00	12,86	21,46	UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN	
2.1	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		100	0,00		0,00	100	95.000.000,00		6.653.474,00	12,86	7,00	12.86	6.653.474,00	12,86	0,00	UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN	
2.1.1	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap		0,00		0,00	22858.80 Ton	95.000.000,00	166.81 Ton	6.653.474,00	0,73	7,00	166.81 Ton	6.653.474,00	0,00	0,00	UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN	Produksi Perikanan Tangkap Laut dan Produksi Perikanan Perairan Umum Daratan (PUD) bulan Januari-Februari
3		UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN		100	300.000.000,00		0,00	100	280.000.000,00		50.483.800,00	38,36	18,03	38.36	50.483.800,00	38,36	16,83	UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	
3.1	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		100	300.000.000,00		0,00	100	280.000.000,00		50.483.800,00	38,36	18,03	38.36	50.483.800,00	38,36	16,83	UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	
3.1.1	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Daging)	1.896,51 Ton	300.000.000,00		0,00	1896.51 Ton	280.000.000,00	371.13 Ton	50.483.800,00	19,57	18,03	371.13 Ton	50.483.800,00	100,00	16,83	UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	Produksi Daging
3.1.2			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Susu)	3.796,41 Ton				3796.41 Ton		5063.49 Ton		133,38		5063.49 Ton		100,00		UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	Produksi Susu
3.1.3			Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Telur)	18.802,35 Ton				18802.35 Ton		1667.22 Ton		8,87		1667.22 Ton		100,00		UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	Produksi Telur
4		UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN		100	18.903.881,00		0,00	100	100.000.000,00		0,00	39,59	0,00	39.59	0,00	39,59	0,00	UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN	
4.1	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		100	18.903.881,00		0,00	100	100.000.000,00		0,00	39,59	0,00	39.59	0,00	39,59	0,00	UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN	
4.1.1	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Jumlah Unit Usaha pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV	3 Unit	18.903.881,00		0,00	3 Unit	100.000.000,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN	Pelaksanaan di TW II, TW III dan TW IV
4.1.2			Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100 %				100 %		93.78 %		93,78		93.78 %		93,78		UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN	Tingkat Pengendalian : (106,63/106,63)/106,63 x 100% Tingkat Pengendalian : 93,78%

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		100	15.531.803.200,00	75,86	15.171.530.568,00	100	12.617.059.316,71		2.028.057.764,00	26,19	16,07	100	17.199.588.332,00	100,00	100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.1	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		100	14.977.292.363,00	70,76	14.598.477.592,00	100	12.104.712.516,71		2.024.047.764,00	27,66	16,72	98.42	16.622.525.356,00	98,42	100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.1.1	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	6.361.062.363,00	100 %	5.750.212.375,00	100 %	6.101.100.416,71	20.36 %	1.312.897.082,00	20,36	21,52	120.36 %	7.063.109.457,00	100,00	100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	jumlah layanan administrasi perkantoran yang dilakukan =(33,87+16,67+15,73+15,19)/4*100 =20,36
1.1.2			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		24.32 %		24,32		124.32 %		100,00		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	=dokumen perencanaan dan pelaporan yang telah disusun (9) / dokumen perencanaan pelaporan yang harus disusun (37) * 100
1.1.3			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95,97 %		100 %		95.97 %		0 %		0,00		100 %		100,00		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	belum ada realisasi
1.1.4	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	100 %	291.350.000,00		0,00	100 %	161.166.000,00	100 %	5.330.000,00	100,00	3,31	100 %	5.330.000,00	100,00	1,83	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	=jumlah relawan kebencanaan yang melaksanakan penanganan bencana (90) / Jumlah tenaga kesejahteraan sosial, atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana (90) *100
1.1.5			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	28,44 %				28.44 %		2.84 %		9,99		2.84 %		10,14		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	=Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya (40)/Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial (1410) x 100 %
1.1.6	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100 %	1.860.000,00	100 %	1.190.000,00	100 %	640.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	100 %	1.190.000,00	100,00	63,98	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	belum ada realisasi
1.1.7	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %	2.853.020.000,00		0,00	100 %	2.845.382.900,00	100 %	598.981.278,00	100,00	21,05	100 %	598.981.278,00	100,00	20,99	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	=jumlah anak terlantar yang dilayani pada tw 1 (496)/jumlah anak terlantar yang harus ditangani pada tw 1 (496)*100
1.1.8			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %				100 %		100 %		100,00		100 %		100,00		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	=jumlah lansia terlantar yang dilayani pada tw 1 (2) / jumlah lansia terlantar yang harus dilayani di tw 1 (2) *100
1.1.9			Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	92,7 %				92.7 %		100 %		107,87		100 %		100,00		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPKS yang ditangani klien adopsi : 6 orang ABH : 2 orang kelompok rentan pengguna rumah singgah : 571 orang =579/579* 100% (jumlah ppks lainnya yang ditangani/jumlah ppks yang dilaporkan dan harus ditangani)
1.1.10			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %				100 %		100 %		100,00		100 %		100,00		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	=jumlah disabilitas yang ditangani pada tw 1 (56)/jumlah disabilitas yang harus ditangani pada tw 1 (56)*100
1.1.11			Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %				100 %		100 %		100,00		100 %		100,00		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	=jumlah gepeng yang harus ditangani pada tw 1 (22) / jumlah gepeng yang harus ditangani pada tw 1 (22) *100
1.1.12	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	5,73 %	4.950.000.000,00		0,00	5.73 %	2.529.825.000,00	0.28 %	65.379.404,00	4,89	2,58	0.28 %	65.379.404,00	5,60	1,32	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	= jumlah keluarga tergraduasi dari kemiskinan tw 1 (88 orang) / Jumlah keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial berbasis keluarga (31.120) *100
1.1.13			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	87,78 %				87.78 %		0 %		0,00		0 %		0,00		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	belum ada realisasi
1.1.14			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	99,55 %				99.55 %		58.66 %		58,93		58.66 %		59,25		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar (68.824)/ Populasi masyarakat miskin, fakir miksin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten (117.331) x 100%
1.1.15			Persentase Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	84,75 %				84.75 %		84.77 %		100,02		84.77 %		100,00		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Data keluarga desil 1-4 pada DTSEN : 117.354 keluarga Target pendataan 138.439 keluarga
1.1.16	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %	495.000.000,00		0,00	100 %	441.598.200,00	100 %	41.460.000,00	100,00	9,39	100 %	41.460.000,00	100,00	8,38	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	orang korban bencana yang ditangani pada tribulan 1 (66 orang) / jumlah korban bencana yang harus ditangani di tribulan 1 (66 orang)
1.1.17			Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100 %				100 %		100 %		100,00		100 %		100,00		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	orang korban bencana yang ditangani pada tribulan 1 (66 orang) / jumlah korban bencana yang harus ditangani di tribulan 1 (66 orang)
1.1.18	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100 %	25.000.000,00		0,00	100 %	25.000.000,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	0,00	100,00	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	pengelolaan 1 taman makam pahlawan (fasilitasi ziarah, fasilitasi kebersihan TMP) =1 TMP yang dikelola / 1 TMP yang harus dikelola *100
1.2	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		100	554.510.837,00	95,04	573.052.976,00	100	512.346.800,00		4.010.000,00	17,79	0,78	100	577.062.976,00	100,00	100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		100	15.531.803.200,00	75,86	15.171.530.568,00	100	12.617.059.316,71		2.028.057.764,00	26,19	16,07	100	17.199.588.332,00	100,00	100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
1.2.1	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	7,16 %	60.000.000,00		0,00	7.16 %	41.939.800,00	0 %	2.960.000,00	0,00	7,06	0 %	2.960.000,00	0,00	4,93	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	belum ada realisasi
1.2.2			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	71,27 %				71.27 %		0 %		0,00		0 %		0,00		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	belum ada realisasi
1.2.3	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	166.942.267,00		0,00	100 %	161.405.550,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	0,00	100,00	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	=perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan (6) / perempuan korban kekerasan yang harus dilayani (6) x 100%
1.2.4	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	100 %	10.000.000,00		0,00	100 %	6.501.200,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	0,00	100,00	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	pelaksanaan konseling calon pengantin di bawah umur januari 3 orang, februari 7 orang, maret 3 orang =catin dibawah umur yang melakukan konseling (13)/catin dibawah umur yang harus dilayani (13)*100
1.2.5	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	810 poin	40.000.000,00		0,00	810 poin	21.798.300,00	0 poin	1.050.000,00	0,00	4,82	0 poin	1.050.000,00	0,00	2,63	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	belum ada realisasi
1.2.6	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %	277.568.570,00		0,00	100 %	280.701.950,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	0,00	100,00	0,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	=anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan (26) / anak korban kekerasan yang harus dilayani (26) x 100%

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		INSPEKTORAT		100	12.759.121.119,00	64,35	11.762.654.894,00	100	11.089.078.895,17		2.288.255.626,00	16,16	20,64	80.51	14.050.910.520,00	80,51	100,00	INSPEKTORAT	
1.1	6.01	INSPEKTORAT DAERAH		100	12.759.121.119,00	64,35	11.762.654.894,00	100	11.089.078.895,17		2.288.255.626,00	16,16	20,64	80.51	14.050.910.520,00	80,51	100,00	INSPEKTORAT	
1.1.1	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	11.226.404.988,00	100 %	10.171.847.544,00	100 %	9.886.362.764,17	9.09 %	2.201.243.706,00	9,09	22,27	109.09 %	12.373.091.250,00	100,00	100,00	INSPEKTORAT	= (total Realisasi / total target)*100 = (0+8+1+0+1+0+0+3+3+1+9+0+0)/(77+32+77+4+6+6+8+5+12+4+36+6+13)* 100= 9,09 %
1.1.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	93,25 %		94.20 %		93.25 %		94.20 %		101,02		188.4 %		100,00		INSPEKTORAT	=(nilai aset baik/total nilai aset)*100= (5.266.019.585/5.590.523.363)*100
1.1.3			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		21.62 %		21,62		100 %		100,00		INSPEKTORAT	=(8/37)*100=21,62%
1.1.4	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		762.000.000,00		0,00	92.77 %	602.000.000,00	93.65 %	34.899.500,00	100,95	5,80	93.65 %	34.899.500,00	0,00	4,58	INSPEKTORAT	=(796/850)*100=93,65%
1.1.5	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		770.716.131,00		0,00	100 Level	600.716.131,00	0 Level	52.112.420,00	0,00	8,68	0 Level	52.112.420,00	0,00	6,76	INSPEKTORAT	Penilaian dilaksanakan pada TW selanjutnya

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		KECAMATAN BENDUNGAN		100	2.178.167.836,00	60,21	1.890.205.467,00	100	2.028.199.081,97		405.200.300,00	29,43	19,98	89.64	2.295.405.767,00	89,64	100,00	KECAMATAN BENDUNGAN	
1.1	7.01	KECAMATAN		100	2.178.167.836,00	60,21	1.890.205.467,00	100	2.028.199.081,97		405.200.300,00	29,43	19,98	89.64	2.295.405.767,00	89,64	100,00	KECAMATAN BENDUNGAN	
1.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.099.826.205,00	100 %	1.789.029.127,00	100 %	1.976.909.081,97	30 %	387.148.600,00	30,00	19,58	130 %	2.176.177.727,00	100,00	100,00	KECAMATAN BENDUNGAN	6/20x100= 30 %
1.1.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98,26 %		98.26 %		98.26 %		95.61 %		97,30		193.87 %		100,00		KECAMATAN BENDUNGAN	2644318499/2765591834*100=95,61
1.1.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		22.40 %		22,40		100 %		100,00		KECAMATAN BENDUNGAN	((25/100)+(17,22/100)+(25/100))/3*100=22,40
1.1.4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	51.750.631,00	100 %	71.552.440,00	100 %	34.607.000,00	30.77 %	18.051.700,00	30,77	52,16	100 %	89.604.140,00	100,00	100,00	KECAMATAN BENDUNGAN	(8/26)=30,77
1.1.5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	5.588.000,00	100 %	7.427.600,00	100 %	3.005.000,00	25 %	0,00	25,00	0,00	100 %	7.427.600,00	100,00	100,00	KECAMATAN BENDUNGAN	3/12*100=25%
1.1.6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	10.207.400,00	100 %	12.027.200,00	100 %	5.034.000,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	12.027.200,00	100,00	100,00	KECAMATAN BENDUNGAN	(tidak ada konflik nila 100%)
1.1.7	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	10.795.600,00	100 %	10.169.100,00	100 %	8.644.000,00	25 %	0,00	25,00	0,00	100 %	10.169.100,00	100,00	94,20	KECAMATAN BENDUNGAN	6/24*100=25%

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		KECAMATAN DONGKO		100	2.490.377.575,00	66,77	2.405.943.749,00	100	2.309.915.184,55		555.365.086,00	35,07	24,04	100	2.961.308.835,00	100,00	100,00	KECAMATAN DONGKO	
1.1	7.01	KECAMATAN		100	2.490.377.575,00	66,77	2.405.943.749,00	100	2.309.915.184,55		555.365.086,00	35,07	24,04	100	2.961.308.835,00	100,00	100,00	KECAMATAN DONGKO	
1.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.428.566.794,00	100 %	2.307.354.046,00	100 %	2.254.510.903,55	24.97 %	542.032.336,00	24,97	24,04	100 %	2.849.386.382,00	100,00	100,00	KECAMATAN DONGKO	=(21,86+28+25+25)/4 =(jumlah rata-rata persentase cakupan layanan administrasi perkantoran)x100%
1.1.2			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		31.15 %		31,15		100 %		100,00		KECAMATAN DONGKO	=(19/61)*100 (Jumlah capaian ketersediaan dokumen/target ketersediaan dokumen)x100%
1.1.3			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99,11 %		100 %		99.11 %		99.11 %		100,00		100 %		100,00		KECAMATAN DONGKO	=(5725358734/5776601384)*100 =(Aset baik/Jumlah aset)x100%
1.1.4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	32.000.000,00	100 %	52.333.103,00	100 %	28.597.000,00	62.50 %	10.365.500,00	62,50	36,25	100 %	62.698.603,00	100,00	100,00	KECAMATAN DONGKO	=((2/2)+(3/12))/2*100 =(Jumlah Realisasi/ Target) x 100
1.1.5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	5.000.000,00	100 %	7.877.100,00	100 %	5.000.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	100 %	7.877.100,00	100,00	100,00	KECAMATAN DONGKO	NIHIL
1.1.6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	17.000.000,00	100 %	27.087.900,00	100 %	13.996.500,00	100 %	2.967.250,00	100,00	21,20	100 %	30.055.150,00	100,00	100,00	KECAMATAN DONGKO	Isu konflik di TW I ada 2 (Tanah Longsor di Desa Siki dan Tanah Longsor di Desa Petung) dan semua isu konflik tersebut sudah ditindaklanjuti (100%).
1.1.7	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	7.810.781,00	100 %	11.291.600,00	100 %	7.810.781,00	25 %	0,00	25,00	0,00	100 %	11.291.600,00	100,00	100,00	KECAMATAN DONGKO	=((3/12)+(3/12))/2*100 =(Jumlah Realisasi/ Target)*100

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		KECAMATAN DURENAN		100	2.243.196.432,00	71,22	2.077.317.105,00	100	2.085.678.339,48		434.983.601,00	22,60	20,86	93.82	2.512.300.706,00	93,82	100,00	KECAMATAN DURENAN	
1.1	7.01	KECAMATAN		100	2.243.196.432,00	71,22	2.077.317.105,00	100	2.085.678.339,48		434.983.601,00	22,60	20,86	93.82	2.512.300.706,00	93,82	100,00	KECAMATAN DURENAN	
1.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.186.356.030,00	100 %	1.985.119.743,00	100 %	2.046.657.939,48	27.87 %	425.666.701,00	27,87	20,80	127.87 %	2.410.786.444,00	100,00	100,00	KECAMATAN DURENAN	(realisasi kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ target kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)*100 = (17/61)*100
1.1.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	96,85 %		99.68 %		96.85 %		99.68 %		102,92		199.36 %		100,00		KECAMATAN DURENAN	(aset dalam kondisi baik /jumlah keseluruhan aset) (5457952859/5475266209)*100
1.1.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		19.44 %		19,44		100 %		100,00		KECAMATAN DURENAN	((((realisasi kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ target kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)+(realisasi kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah/target kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah)+(realisasi kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/target kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)))))/4)*100= (((((33,33/100)+(12,50/100)+(12,50/100))/3)*100
1.1.4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	33.511.912,00	100 %	61.351.862,00	100 %	22.879.500,00	50 %	7.785.900,00	50,00	34,03	100 %	69.137.762,00	100,00	100,00	KECAMATAN DURENAN	((realisasi kinerja Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait/target kinerja Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait)+(realisasi kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat/ target kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat)+(realisasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat perangkat daerah yang ada di kecamatan/ target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat perangkat daerah yang ada di kecamatan))/3)*100 = ((2/2)+(3/12)+(3/12))/3*100
1.1.5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	10.781.910,00	100 %	13.170.000,00	100 %	3.668.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	100 %	13.170.000,00	100,00	100,00	KECAMATAN DURENAN	(realisasi kinerja kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan/ target kinerja kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan)*100 = (0/2)*100
1.1.6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	6.072.182,00	100 %	8.510.000,00	100 %	6.043.000,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	8.510.000,00	100,00	100,00	KECAMATAN DURENAN	(jumlah konflik yang ditindaklanjuti/ jumlah konflik yang dilaporkan)*100 = (0/0)*100
1.1.7	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	6.474.398,00	100 %	9.165.500,00	100 %	6.429.900,00	25 %	1.531.000,00	25,00	23,81	100 %	10.696.500,00	100,00	100,00	KECAMATAN DURENAN	(realisasi kinerja Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/ target kinerja Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)*100 = (6/24)*100

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		KECAMATAN GANDUSARI		100	2.041.411.918,00	68,54	1.870.019.665,00	100	1.906.478.180,43		421.129.334,00	19,59	22,09	88.13	2.291.148.999,00	88,13	100,00	KECAMATAN GANDUSARI	
1.1	7.01	KECAMATAN		100	2.041.411.918,00	68,54	1.870.019.665,00	100	1.906.478.180,43		421.129.334,00	19,59	22,09	88.13	2.291.148.999,00	88,13	100,00	KECAMATAN GANDUSARI	
1.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	1.991.184.158,00	100 %	1.801.724.785,00	100 %	1.871.018.825,43	6.11 %	410.812.934,00	6,11	21,96	100 %	2.212.537.719,00	100,00	100,00	KECAMATAN GANDUSARI	((((realisasi kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ target kinerja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)+(realisasi kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah/target kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah)+(realisasi kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/target kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah))))/4)*100= (((((1,34/100)+(0/100)+(17/100)/3* 100
1.1.2			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		27 %		27,00		100 %		100,00		KECAMATAN GANDUSARI	(realisasi kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ target kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)*100 = (17/64)*100
1.1.3			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98,45 %		98.45 %		98.45 %		98.45 %		100,00		100 %		100,00		KECAMATAN GANDUSARI	(aset dalam kondisi baik /jumlah keseluruhan aset) (6396885699/6496959299)*100
1.1.4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	27.000.000,00	100 %	54.052.580,00	100 %	23.900.000,00	50 %	10.316.400,00	50,00	43,16	100 %	64.368.980,00	100,00	100,00	KECAMATAN GANDUSARI	((realisasi kinerja Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait/target kinerja Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait)+(realisasi kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat/ target kinerja Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat)+ (realisasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat perangkat daerah yang ada di kecamatan/ target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat perangkat daerah yang ada di kecamatan))/3)*100 = ((2/2)+(3/12)+(3/12))/3*100
1.1.5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	8.000.000,00	100 %	2.932.500,00	100 %	2.500.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	100 %	2.932.500,00	100,00	36,66	KECAMATAN GANDUSARI	(realisasi kinerja kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan/ target kinerja kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan)*100 = (0/2)*100
1.1.6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindak lanjuti	100 %	7.227.760,00	100 %	6.632.800,00	100 %	5.059.355,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	6.632.800,00	100,00	91,77	KECAMATAN GANDUSARI	(jumlah konflik yang ditindaklanjuti/ jumlah konflik yang dilaporkan)*100 = (0/0)*100
1.1.7	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	8.000.000,00	100 %	4.677.000,00	100 %	4.000.000,00	25 %	0,00	25,00	0,00	100 %	4.677.000,00	100,00	58,46	KECAMATAN GANDUSARI	(realisasi kinerja Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/ target kinerja Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)*100 = (6/24)*100

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		KECAMATAN KAMPAK		100	2.581.646.619,00	68,1	1.697.482.258,00	100	2.411.068.390,36		287.914.387,00	25,46	11,94	93.56	1.985.396.645,00	93,56	76,90	KECAMATAN KAMPAK	
1.1	7.01	KECAMATAN		100	2.581.646.619,00	68,1	1.697.482.258,00	100	2.411.068.390,36		287.914.387,00	25,46	11,94	93.56	1.985.396.645,00	93,56	76,90	KECAMATAN KAMPAK	
1.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.529.207.074,00	100 %	1.621.861.258,00	100 %	2.391.768.090,36	23.44 %	277.677.387,00	23,44	11,61	123.44 %	1.899.538.645,00	100,00	75,10	KECAMATAN KAMPAK	=Realisasi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/Target Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah=((15/64)*100
1.1.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98,17 %		100 %		98.17 %		103.17 %		105,09		203.17 %		100,00		KECAMATAN KAMPAK	=2243698575/2174841099
1.1.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		85.21 %		85,21		100 %		100,00		KECAMATAN KAMPAK	=((Realisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/Target Administrasi Keuangan Perangkat Daerah) (Realisasi Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah/Target Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah) (Realisasi Administrasi Umum Perangkat Daerah/Target Administrasi Umum Perangkat Daerah) (Realisasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Target Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah))/4*100=(22,33)+(32,43)+(25,00)+(21,79)/4
1.1.4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	37.276.545,00	100 %	58.586.500,00	100 %	11.907.800,00	35.71 %	10.237.000,00	35,71	85,97	100 %	68.823.500,00	100,00	100,00	KECAMATAN KAMPAK	(5/14)*100
1.1.5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	2.039.200,00	100 %	2.031.000,00	100 %	1.875.500,00	0 %	0,00	0,00	0,00	100 %	2.031.000,00	100,00	99,60	KECAMATAN KAMPAK	Akan dilaksanakan pada TW II
1.1.6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	6.431.800,00	100 %	6.371.500,00	100 %	2.302.500,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	6.371.500,00	100,00	99,06	KECAMATAN KAMPAK	(0/0)*100=100 (tidak ada konflik yang terjadi)
1.1.7	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	6.692.000,00	100 %	8.632.000,00	100 %	3.214.500,00	25 %	0,00	25,00	0,00	100 %	8.632.000,00	100,00	100,00	KECAMATAN KAMPAK	=(6/24)*100

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		KECAMATAN KARANGAN		100	2.784.371.386,00	70,45	2.408.179.493,00	100	2.601.699.673,30		648.066.073,00	21,57	24,91	92.02	3.056.245.566,00	92,02	100,00	KECAMATAN KARANGAN	
1.1	7.01	KECAMATAN		100	2.784.371.386,00	70,45	2.408.179.493,00	100	2.601.699.673,30		648.066.073,00	21,57	24,91	92.02	3.056.245.566,00	92,02	100,00	KECAMATAN KARANGAN	
1.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.730.628.107,00	100 %	2.336.108.458,00	100 %	2.560.382.773,30	18.06 %	634.066.073,00	18,06	24,76	100 %	2.970.174.531,00	100,00	100,00	KECAMATAN KARANGAN	Realisasi Kinerja TW 1 : ((realisasi kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ target kinerja Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)+(Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah/target kinerja Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah)+ (realisasi kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/target kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah))/3*100 ((25/100)+(4,17/100)+(25/100))/ 3*100=18,06
1.1.2			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		27.87 %		27,87		100 %		100,00		KECAMATAN KARANGAN	Realisasi Kinerja Triwulan I : (realisasi kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah/ target kinerja Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah)*100 (17/61)*100=27,87
1.1.3			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98 %		98 %		98 %		98 %		100,00		100 %		100,00		KECAMATAN KARANGAN	Realisasi Kinerja Triwulan I : (Jumlah nilai aset dalam kondisi baik/Jumlah nilai aset yang ada) X 100 (7302102800/7451125306)*100=98
1.1.4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	31.497.600,00	100 %	31.499.000,00	100 %	19.514.000,00	62.50 %	12.750.000,00	62,50	65,34	100 %	44.249.000,00	100,00	100,00	KECAMATAN KARANGAN	Realisasi kinerja triwulan I : ((realisasi kinerja kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait/target kinerja kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait) (realisasi kinerja kegiata Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat/ target kinerja kegiata Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat))/2)*100 ((2/2)+(25/100))/2*100=62,50
1.1.5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	3.800.000,00	100 %	10.162.000,00	100 %	2.218.200,00	0 %	0,00	0,00	0,00	100 %	10.162.000,00	100,00	100,00	KECAMATAN KARANGAN	Realisasi kinerja triwulan I : (Jumlah realisasi capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan/Jumlah target capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan) X100 (0/2)*100=0
1.1.6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	6.896.479,00	100 %	19.120.035,00	100 %	8.229.700,00	100 %	1.250.000,00	100,00	15,19	100 %	20.370.035,00	100,00	100,00	KECAMATAN KARANGAN	Realisasi Kinerja Triwulan I : (Jumlah Konflik yang terjadi /Persentase Konflik yang ditindaklanjuti) X 100 (0/0)*100=100
1.1.7	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	11.549.200,00	100 %	11.290.000,00	100 %	11.355.000,00	25 %	0,00	25,00	0,00	100 %	11.290.000,00	100,00	97,76	KECAMATAN KARANGAN	Realisasi Kinerja Triwulan I : (realisasi kinerja Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/ target kinerja Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa)*100 (6/24)*100=25

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		KECAMATAN MUNJUNGAN		100	2.315.224.710,00	70,49	2.120.202.020,00	100	2.162.343.222,71		490.822.038,00	24,99	22,70	95.48	2.611.024.058,00	95,48	100,00	KECAMATAN MUNJUNGAN	
1.1	7.01	KECAMATAN		100	2.315.224.710,00	70,49	2.120.202.020,00	100	2.162.343.222,71		490.822.038,00	24,99	22,70	95.48	2.611.024.058,00	95,48	100,00	KECAMATAN MUNJUNGAN	
1.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.244.661.210,00	100 %	2.006.949.621,00	100 %	2.095.268.372,71	31.68 %	473.810.538,00	31,68	22,61	100 %	2.480.760.159,00	100,00	100,00	KECAMATAN MUNJUNGAN	=(36,11+21,43+37,5)/3 =31,68
1.1.2			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		25.81 %		25,81		100 %		100,00		KECAMATAN MUNJUNGAN	=((4+12)/(16+46))*100 =(16/62)*100 =25,81
1.1.3			Persentase Nilai Aset dalam kondisi baik	93,92 %		95.86 %		93.92 %		95.86 %		102,07		100 %		100,00		KECAMATAN MUNJUNGAN	= (nilai aset dalam kondisi baik/nilai aset yang di kelola perangkat daerah)*100 = (2.425.906.799/2.530.644.349)*100 =95,86
1.1.4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	48.271.100,00	100 %	85.551.199,00	100 %	46.596.050,00	30.77 %	14.849.500,00	30,77	31,87	100 %	100.400.699,00	100,00	100,00	KECAMATAN MUNJUNGAN	=((2+3+3)/(2+12+12))*100 =(8/26)*100 =30,77
1.1.5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	4.154.500,00	100 %	3.120.000,00	100 %	2.579.500,00	0 %	0,00	0,00	0,00	100 %	3.120.000,00	100,00	75,10	KECAMATAN MUNJUNGAN	belum ada realisasi di TW 1
1.1.6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	9.886.300,00	100 %	14.465.000,00	100 %	9.722.900,00	100 %	2.162.000,00	100,00	22,24	100 %	16.627.000,00	100,00	100,00	KECAMATAN MUNJUNGAN	Penyelesaian laporan terkait permasalahan pelajar/ pelajar bolos pada jam pelajaran (penertiban di warung kopi) =(1/1)*100 =100
1.1.7	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	8.251.600,00	100 %	10.116.200,00	100 %	8.176.400,00	25 %	0,00	25,00	0,00	100 %	10.116.200,00	100,00	100,00	KECAMATAN MUNJUNGAN	=(6/24)*100 =25

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		KECAMATAN PANGGUL		100	2.831.179.113,00	70,45	2.279.500.456,00	100	2.673.954.378,77		591.593.227,00	21,95	22,12	92.4	2.871.093.683,00	92,40	100,00	KECAMATAN PANGGUL	
1.1	7.01	KECAMATAN		100	2.831.179.113,00	70,45	2.279.500.456,00	100	2.673.954.378,77		591.593.227,00	21,95	22,12	92.4	2.871.093.683,00	92,40	100,00	KECAMATAN PANGGUL	
1.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.773.996.113,00	100 %	2.194.133.057,00	100 %	2.634.776.378,77	25 %	578.218.227,00	25,00	21,95	125 %	2.772.351.284,00	100,00	99,94	KECAMATAN PANGGUL	=(24/96)*100 =25.00
1.1.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98,14 %		98.14 %		98.14 %		98.15 %		100,01		196.29 %		100,00		KECAMATAN PANGGUL	=(Aset Dalam Kondisi Baik / Jumlah Total Aset) * 100 =(5.849.305.503/5.959.698.503)*100 =98,15
1.1.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		30.48 %		30,48		100 %		100,00		KECAMATAN PANGGUL	=((Adm. Keuangan) + (Adm. Umum) + (Penyediaan Jasa Penunjang))/3 =(((((23/29)+(9/36))/2)*100)+ ((((1/4)+(0/4)+(0/4)+(1/4)+(0/4)+(3/12)+(3/12))/7)*100)+ ((6/24)*100))/3 =(52,16+14,29+25,00)/3 =30,48
1.1.4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	36.913.000,00	100 %	63.727.899,00	100 %	26.708.000,00	50 %	12.000.000,00	50,00	44,93	100 %	75.727.899,00	100,00	100,00	KECAMATAN PANGGUL	=(((2/2)+(3/12)+(3/12))/3)*100 =50,00
1.1.5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	6.540.000,00	100 %	6.509.500,00	100 %	3.165.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	100 %	6.509.500,00	100,00	99,53	KECAMATAN PANGGUL	=(0/1)*100 =0
1.1.6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	9.910.000,00	100 %	9.860.000,00	100 %	6.915.000,00	12.5 %	1.375.000,00	12,50	19,88	100 %	11.235.000,00	100,00	100,00	KECAMATAN PANGGUL	=(((3/12)+(0/1))/2)*100 =12,5
1.1.7	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	3.820.000,00	100 %	5.270.000,00	100 %	2.390.000,00	25 %	0,00	25,00	0,00	100 %	5.270.000,00	100,00	100,00	KECAMATAN PANGGUL	=(((3/12)+(3/12))/2)*100 =25

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		KECAMATAN POGALAN		100	2.049.063.498,00	70,9	2.348.054.106,00	100	1.914.774.057,30		487.671.007,00	25,46	25,47	96.36	2.835.725.113,00	96,36	100,00	KECAMATAN POGALAN	
1.1	7.01	KECAMATAN		100	2.049.063.498,00	70,9	2.348.054.106,00	100	1.914.774.057,30		487.671.007,00	25,46	25,47	96.36	2.835.725.113,00	96,36	100,00	KECAMATAN POGALAN	
1.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.010.247.498,00	100 %	2.298.836.006,00	100 %	1.888.890.257,30	27.14 %	482.380.507,00	27,14	25,54	127.14 %	2.781.216.513,00	100,00	100,00	KECAMATAN POGALAN	(19/70) x 100 (Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang telah disusun) / (Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang wajib disusun sesuai ketentuan pada tahun berkenaan)x100%
1.1.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97,04 %		97.04 %		97.04 %		97.04 %		100,00		194.08 %		100,00		KECAMATAN POGALAN	(4.187.045.089/4.314.672.814)x100 % (nilai aset baik/jumlah total aset)x100%
1.1.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		39.17 %		39,17		100 %		100,00		KECAMATAN POGALAN	(65,00+25,00+27,50)/3 rata-rata capaian dari masing-masing kegiatan yang mendukung capaian indikator program/jumlah kegiatan
1.1.4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	18.668.500,00	100 %	21.585.600,00	100 %	9.795.700,00	50 %	5.290.500,00	50,00	54,01	100 %	26.876.100,00	100,00	100,00	KECAMATAN POGALAN	(100+25+25)/3 Rata-rata capaian kinerja dari kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan dan kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
1.1.5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	1.709.000,00	100 %	1.950.000,00	100 %	1.605.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	100 %	1.950.000,00	100,00	100,00	KECAMATAN POGALAN	akan dilaksanakan pada semester II
1.1.6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	11.438.500,00	100 %	15.933.000,00	100 %	10.141.000,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	15.933.000,00	100,00	100,00	KECAMATAN POGALAN	tidak terpadat konflik yang terjadi di masyarakat
1.1.7	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	7.000.000,00	100 %	9.749.500,00	100 %	4.342.100,00	25 %	0,00	25,00	0,00	100 %	9.749.500,00	100,00	100,00	KECAMATAN POGALAN	(6/24)*100% Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun/target laporan yang disusun

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		KECAMATAN PULE		100	1.899.413.923,00	68,43	1.495.806.962,00	100	1.762.574.564,02		396.212.377,00	20,27	22,48	88.7	1.892.019.339,00	88,70	99,61	KECAMATAN PULE	
1.1	7.01	KECAMATAN		100	1.899.413.923,00	68,43	1.495.806.962,00	100	1.762.574.564,02		396.212.377,00	20,27	22,48	88.7	1.892.019.339,00	88,70	99,61	KECAMATAN PULE	
1.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	1.845.279.010,00	100 %	1.460.273.462,00	100 %	1.698.439.651,02	25.18 %	392.362.377,00	25,18	23,10	100 %	1.852.635.839,00	100,00	100,00	KECAMATAN PULE	((25/100)+(25/100)+(100/100)+(25/100)/4)*100 = 25,18
1.1.2			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		26.22 %		26,22		100 %		100,00		KECAMATAN PULE	(16/61)*100 = 26,22
1.1.3			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	94 %		100 %		94 %		94 %		100,00		100 %		100,00		KECAMATAN PULE	aset baik/aset keseluruhan*100 atau ((1443081825+1500000+11750000)/(106750000 + 1442081825))*100=94
1.1.4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	26.048.513,00	100 %	20.979.000,00	100 %	36.048.513,00	30.77 %	3.850.000,00	30,77	10,68	100 %	24.829.000,00	100,00	95,32	KECAMATAN PULE	(8/26)*100 = 30,77
1.1.5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	7.556.700,00	100 %	2.475.000,00	100 %	7.556.700,00	16.67 %	0,00	16,67	0,00	100 %	2.475.000,00	100,00	32,75	KECAMATAN PULE	((0/2)+(15/45)/2)*100 = 16,67
1.1.6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	9.546.200,00	100 %	4.602.500,00	100 %	9.546.200,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	4.602.500,00	100,00	48,21	KECAMATAN PULE	Tidak ada Kasus Konflik
1.1.7	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	10.983.500,00	100 %	7.477.000,00	100 %	10.983.500,00	25 %	0,00	25,00	0,00	100 %	7.477.000,00	100,00	68,07	KECAMATAN PULE	(6/24*100)=25

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		KECAMATAN SURUH		100	2.166.692.808,00	70,44	2.136.026.244,00	100	2.027.900.219,48		473.794.563,00	22,29	23,36	92.73	2.609.820.807,00	92,73	100,00	KECAMATAN SURUH	
1.1	7.01	KECAMATAN		100	2.166.692.808,00	70,44	2.136.026.244,00	100	2.027.900.219,48		473.794.563,00	22,29	23,36	92.73	2.609.820.807,00	92,73	100,00	KECAMATAN SURUH	
1.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.116.657.852,00	100 %	2.062.999.514,00	100 %	1.993.188.619,48	20.90 %	463.041.263,00	20,90	23,23	100 %	2.526.040.777,00	100,00	100,00	KECAMATAN SURUH	(0+13+0+1+1+1+0+3+9)/(14+52+4+4+4+4+4+12+36)*100=20,90
1.1.2			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		24.59 %		24,59		100 %		100,00		KECAMATAN SURUH	15/61x100= 24,59
1.1.3			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	96,06 %		95.77 %		96.06 %		95.77 %		99,70		100 %		100,00		KECAMATAN SURUH	2744318478/2865591834*100=95,77
1.1.4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	39.667.271,00	100 %	62.928.730,00	100 %	23.895.800,00	30.77 %	10.753.300,00	30,77	45,00	100 %	73.682.030,00	100,00	100,00	KECAMATAN SURUH	8/26*100=30,77
1.1.5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	2.624.985,00	100 %	1.150.000,00	100 %	3.177.300,00	0 %	0,00	0,00	0,00	100 %	1.150.000,00	100,00	43,81	KECAMATAN SURUH	Pada TW 1 belum ada realisasi
1.1.6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	5.356.350,00	100 %	4.749.000,00	100 %	5.321.000,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	4.749.000,00	100,00	88,66	KECAMATAN SURUH	Tidak ada konflik yang terjadi
1.1.7	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	2.386.350,00	100 %	4.199.000,00	100 %	2.317.500,00	25 %	0,00	25,00	0,00	100 %	4.199.000,00	100,00	100,00	KECAMATAN SURUH	6/24*100=25%

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		KECAMATAN TRENGGALEK		100	6.824.113.749,00	63,36	5.264.853.457,00	100	6.472.586.783,50		1.427.148.804,00	25,24	22,05	88.6	6.692.002.261,00	88,60	98,06	KECAMATAN TRENGGALEK	
1.1	7.01	KECAMATAN		100	6.824.113.749,00	63,36	5.264.853.457,00	100	6.472.586.783,50		1.427.148.804,00	25,24	22,05	88.6	6.692.002.261,00	88,60	98,06	KECAMATAN TRENGGALEK	
1.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	6.540.906.949,00	100 %	5.038.326.877,00	100 %	6.228.665.983,50	22.95 %	1.390.156.304,00	22,95	22,32	100 %	6.428.483.181,00	100,00	98,28	KECAMATAN TRENGGALEK	(14/61) x 100
1.1.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97,84 %		97.88 %		97.84 %		97.88 %		100,04		100 %		100,00		KECAMATAN TRENGGALEK	Aset Baik : 97,88 Aset Baik/Jumlah Aset x 100% (8.454.746.145/8.637.501.760)*100%
1.1.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		23.12 %		23,12		100 %		100,00		KECAMATAN TRENGGALEK	(((37,92+22,22+23+20+12,50)/
1.1.4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	185.226.000,00	100 %	109.035.380,00	100 %	158.665.000,00	30.77 %	19.959.000,00	30,77	12,58	100 %	128.994.380,00	100,00	69,64	KECAMATAN TRENGGALEK	((2+3+3)/26 x 100%))
1.1.5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	15.116.000,00	100 %	10.022.500,00	100 %	15.116.000,00	50 %	10.269.500,00	50,00	67,94	100 %	20.292.000,00	100,00	100,00	KECAMATAN TRENGGALEK	(1/2 x 100%)
1.1.6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	37.504.800,00	100 %	63.650.900,00	100 %	33.164.800,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	63.650.900,00	100,00	100,00	KECAMATAN TRENGGALEK	Laporan konflik antar warga terkait kegiatan penambangan galian C (Urugan) di Desa Ngares yang telah difasiltasi dan telah berhasil diselesaikan
1.1.7	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	45.360.000,00	99.99 %	43.817.800,00	100 %	36.975.000,00	25 %	6.764.000,00	25,00	18,29	100 %	50.581.800,00	100,00	100,00	KECAMATAN TRENGGALEK	((((3/12)+(3/12)/2 x100%))))
2		KELURAHAN SURODAKAN		100	471.324.207,00	69,37	596.997.600,05	100	396.324.207,00		6.045.178,00	26,87	1,53	96.24	603.042.778,05	96,24	100,00	KELURAHAN SURODAKAN	
2.1	7.01	KECAMATAN		100	471.324.207,00	69,37	596.997.600,05	100	396.324.207,00		6.045.178,00	26,87	1,53	96.24	603.042.778,05	96,24	100,00	KELURAHAN SURODAKAN	
2.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	97.186.000,00	95.46 %	116.472.642,00	100 %	88.494.500,00	2.5 %	6.045.178,00	2,50	6,83	97.96 %	122.517.820,00	97,96	100,00	KELURAHAN SURODAKAN	((0+0+12,5+0+0)/5 x 100%))
2.1.2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	335.494.547,00	95 %	452.975.958,05	100 %	277.829.707,00	25 %	0,00	25,00	0,00	100 %	452.975.958,05	100,00	100,00	KELURAHAN SURODAKAN	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan
2.1.3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	38.643.660,00	100 %	27.549.000,00	100 %	30.000.000,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	27.549.000,00	100,00	71,29	KELURAHAN SURODAKAN	Laporan konflik antar warga yang telah difasiltasi dan telah berhasil diselesaikan
3		KELURAHAN SUMBERGEDONG		100	473.236.207,00	68,84	610.355.855,35	100	413.236.200,00		37.629.945,00	34,65	9,11	100	647.985.800,35	100,00	100,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG	
3.1	7.01	KECAMATAN		100	473.236.207,00	68,84	610.355.855,35	100	413.236.200,00		37.629.945,00	34,65	9,11	100	647.985.800,35	100,00	100,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG	
3.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	99.098.000,00	98.19 %	136.374.654,00	100 %	98.024.500,00	14.83 %	6.032.195,00	14,83	6,15	100 %	142.406.849,00	100,00	100,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG	((0+20+12,5+25+16,66)/5*100%
3.1.2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	335.494.547,00	97 %	454.460.151,35	100 %	285.211.700,00	25 %	31.597.750,00	25,00	11,08	100 %	486.057.901,35	100,00	100,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan
3.1.3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	38.643.660,00	100 %	19.521.050,00	100 %	30.000.000,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	19.521.050,00	100,00	50,52	KELURAHAN SUMBERGEDONG	Laporan konflik antar warga yang telah difasiltasi dan telah berhasil diselesaikan
4		KELURAHAN NGANTRU		100	443.517.207,00	65,86	599.832.953,75	100	368.517.207,00		14.572.578,00	26,89	3,95	92.75	614.405.531,75	92,75	100,00	KELURAHAN NGANTRU	
4.1	7.01	KECAMATAN		100	443.517.207,00	65,86	599.832.953,75	100	368.517.207,00		14.572.578,00	26,89	3,95	92.75	614.405.531,75	92,75	100,00	KELURAHAN NGANTRU	
4.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	69.379.000,00	89.41 %	100.188.435,00	100 %	58.517.207,00	6.5 %	5.988.578,00	6,50	10,23	95.91 %	106.177.013,00	95,91	100,00	KELURAHAN NGANTRU	((0+20+12,5+0+0)/5 x 100%))
4.1.2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	335.494.547,00	85.66 %	473.077.018,75	100 %	280.000.000,00	25 %	8.584.000,00	25,00	3,07	100 %	481.661.018,75	100,00	100,00	KELURAHAN NGANTRU	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan
4.1.3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	38.643.660,00	100 %	26.567.500,00	100 %	30.000.000,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	26.567.500,00	100,00	68,75	KELURAHAN NGANTRU	Laporan konflik antar warga yang telah difasiltasi dan telah berhasil diselesaikan
5		KELURAHAN TAMANAN		100	473.465.207,00	69,9	620.664.991,72	100	398.465.207,00		15.113.093,00	29,88	3,79	99.78	635.778.084,72	99,78	100,00	KELURAHAN TAMANAN	
5.1	7.01	KECAMATAN		100	473.465.207,00	69,9	620.664.991,72	100	398.465.207,00		15.113.093,00	29,88	3,79	99.78	635.778.084,72	99,78	100,00	KELURAHAN TAMANAN	
5.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	99.327.000,00	95.78 %	124.233.316,00	100 %	98.247.000,00	11.50 %	1.431.593,00	11,50	1,46	100 %	125.664.909,00	100,00	100,00	KELURAHAN TAMANAN	((0+20+12,5+25+0)/5 x 100%
5.1.2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	335.494.547,00	87 %	482.094.975,72	100 %	270.218.207,00	25 %	13.681.500,00	25,00	5,06	100 %	495.776.475,72	100,00	100,00	KELURAHAN TAMANAN	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan
5.1.3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	38.643.660,00	100 %	14.336.700,00	100 %	30.000.000,00	100 %	0,00	100,00	0,00	100 %	14.336.700,00	100,00	37,10	KELURAHAN TAMANAN	Laporan konflik antar warga yang telah difasiltasi dan telah berhasil diselesaikan
6		KELURAHAN KELUTAN		100	473.263.408,00	69,85	611.913.846,10	100	398.263.408,00		32.522.571,00	30,11	8,17	99.96	644.436.417,10	99,96	100,00	KELURAHAN KELUTAN	
6.1	7.01	KECAMATAN		100	473.263.408,00	69,85	611.913.846,10	100	398.263.408,00		32.522.571,00	30,11	8,17	99.96	644.436.417,10	99,96	100,00	KELURAHAN KELUTAN	
6.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	99.125.200,00	95 %	157.166.347,00	100 %	93.768.200,00	15.37 %	8.772.371,00	15,37	9,36	100 %	165.938.718,00	100,00	100,00	KELURAHAN KELUTAN	((25+11,50+25+0)/4*100%))
6.1.2	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	335.494.548,00	98.4 %	432.987.999,10	100 %	266.351.548,00	25 %	18.900.700,00	25,00	7,10	100 %	451.888.699,10	100,00	100,00	KELURAHAN KELUTAN	Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan di Kelurahan yang dilaksanakan
6.1.3	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	38.643.660,00	100 %	21.759.500,00	100 %	38.143.660,00	100 %	4.849.500,00	100,00	12,71	100 %	26.609.000,00	100,00	68,86	KELURAHAN KELUTAN	Laporan konflik antar warga yang telah difasiltasi dan telah berhasil diselesaikan

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		KECAMATAN TUGU		100	2.372.858.353,00	71,33	2.095.158.569,00	100	2.215.736.198,62		477.454.747,00	22,80	21,55	94.13	2.572.613.316,00	94,13	100,00	KECAMATAN TUGU	
1.1	7.01	KECAMATAN		100	2.372.858.353,00	71,33	2.095.158.569,00	100	2.215.736.198,62		477.454.747,00	22,80	21,55	94.13	2.572.613.316,00	94,13	100,00	KECAMATAN TUGU	
1.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	2.322.591.160,00	100 %	2.019.380.619,00	100 %	2.172.923.298,62	26.02 %	462.924.247,00	26,02	21,30	100 %	2.482.304.866,00	100,00	100,00	KECAMATAN TUGU	=((15/4)+10+0+0+1+1+1+3+12)/(15+38+2+3+4+3+4+12+41)*100 =(31,75/122)*100 =26,02
1.1.2			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		26.23 %		26,23		100 %		100,00		KECAMATAN TUGU	=((4+12)/(15+46))*100 =(16/61)*100 =26,23
1.1.3			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98,27 %		98.34 %		98.27 %		98.27 %		100,00		100 %		100,00		KECAMATAN TUGU	=5681192786/5781050286*100
1.1.4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	29.022.016,00	100 %	38.324.500,00	100 %	25.205.900,00	30.77 %	12.165.500,00	30,77	48,26	100 %	50.490.000,00	100,00	100,00	KECAMATAN TUGU	=((2+3+3)/(2+12+12))*100 =(8/26)*100 =30,77
1.1.5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Capaian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100 %	4.981.792,00		0,00	100 %	2.357.000,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	KECAMATAN TUGU	Program Akan dilaksanakan di TW II
1.1.6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	5.495.255,00	100 %	9.939.800,00	100 %	5.785.000,00	100 %	2.365.000,00	100,00	40,88	100 %	12.304.800,00	100,00	100,00	KECAMATAN TUGU	Tidak adanya konflik yang dilaporkan (Realisasi Kinerja Bukan Akumulasi)
1.1.7	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase laporan hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan		0,00	100 %	17.219.500,00	100 %	0,00	0 %	0,00	0,00	0,00	100 %	17.219.500,00	0,00	0,00	KECAMATAN TUGU	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sudah tidak ada di Renstra 2025-2029
1.1.8	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	10.768.130,00	100 %	10.294.150,00	100 %	9.465.000,00	25 %	0,00	25,00	0,00	100 %	10.294.150,00	100,00	95,60	KECAMATAN TUGU	=(6/24)*100 =25

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		KECAMATAN WATULIMO		100	2.778.922.251,00	69,04	2.298.087.139,00	100	2.559.982.774,16		403.037.708,00	31,34	15,74	100	2.701.124.847,00	100,00	97,20	KECAMATAN WATULIMO	
1.1	7.01	KECAMATAN		100	2.778.922.251,00	69,04	2.298.087.139,00	100	2.559.982.774,16		403.037.708,00	31,34	15,74	100	2.701.124.847,00	100,00	97,20	KECAMATAN WATULIMO	
1.1.1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.674.265.823,00	100 %	2.138.969.139,00	100 %	2.494.405.574,16	21.5 %	373.703.458,00	21,50	14,98	100 %	2.512.672.597,00	100,00	93,96	KECAMATAN WATULIMO	= ((3/15)+(7/30))/2*100% = 21,5%
1.1.2			Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98,88 %		100 %		98.88 %		98.88 %		100,00		100 %		100,00		KECAMATAN WATULIMO	= (4077196949 / 4123275490)*100% = 98,88% Nilai aset dalam Kondisi baik / Keseluruhan Aset
1.1.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		39.30 %		39,30		100 %		100,00		KECAMATAN WATULIMO	= (Adm Keuangan + Adm Kepeg + Adm Umum + Jasa Penunjang) / 4*100% = ((36,48)+(35,29)+(60,42)+(25))/4*100% =39,30%
1.1.4	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	44.064.393,00	100 %	70.546.000,00	100 %	31.771.200,00	50 %	17.712.250,00	50,00	55,75	100 %	88.258.250,00	100,00	100,00	KECAMATAN WATULIMO	= ((3/12)+(3/12))+(2/2))/3*100% = 50%
1.1.5	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	16.430.846,00		0,00	100 %	8.180.000,00	50 %	4.650.000,00	50,00	56,85	50 %	4.650.000,00	50,00	28,30	KECAMATAN WATULIMO	= (1/2)*100% = 50%
1.1.6	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	32.565.795,00	100 %	69.507.000,00	100 %	20.182.000,00	100 %	6.972.000,00	100,00	34,55	100 %	76.479.000,00	100,00	100,00	KECAMATAN WATULIMO	Jumlah Laporan yang ditindak lanjuti / Jumlah Laporan yang masuk: (2/2)*100% = 100% Laporan ODGJ, Pohon Tumbang Semua ditindaklanjuti
1.1.7	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	11.595.394,00	100 %	19.065.000,00	100 %	5.444.000,00	25 %	0,00	25,00	0,00	100 %	19.065.000,00	100,00	100,00	KECAMATAN WATULIMO	=((3/12)+(3/12))/2*100% = 25%

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN		100	11.134.697.827,00	67,2	10.541.241.933,00	100	10.387.787.828,57		914.807.508,00	23,12	8,81	90.32	11.456.049.441,00	90,32	100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
1.1	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100	11.134.697.827,00	67,2	10.541.241.933,00	100	10.387.787.828,57		914.807.508,00	23,12	8,81	90.32	11.456.049.441,00	90,32	100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	
1.1.1	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	9.246.336.939,00	116.07 %	9.216.931.585,00	100 %	8.829.830.940,57	31.25 %	851.462.388,00	31,25	9,64	147.32 %	10.068.393.973,00	100,00	100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	=5/16*100 RKA DPA 2026 PK RKA DPA Pergeseran 1
1.1.2			Persentase Nilai Aset Dalam Kondisi Baik	86,60 %		98.83 %		86.6 %		99 %		114,32		197.83 %		100,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	=(Saldo Akhir Aset Tetap/ Saldo Awal Aset Tetap*100 (2.171.590.337,50/ 2.193.522.512,50)*100)
1.1.3			Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		8.33 %		8,33		100 %		100,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	=(Adm Keuangan PD+Adm Kepegawaian PD+Administrasi Umum Perangkat Daerah+Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah)/4*100% =(8,33+0+16,67+8,33)/4)*100% =8,33
1.1.4	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100 Persentase	1.788.360.888,00		0,00	75 Persentase	1.278.360.888,00	0 Persentase	63.345.120,00	0,00	4,96	0 Persentase	63.345.120,00	0,00	3,54	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	Belum ada realisasi semesteran
1.1.5			Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	60,00 %				60 %		30 %		50,00		30 %		50,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	=3/10*100% Perda Trantibum Perda Reklame Perda Retribusi Daerah
1.1.6			Persentase penyelenggaraan Trantibum yang dilaksanakan oleh Satpol PP	100 %				100 %		25 %		25,00		25 %		25,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	=3/12*100% 3 Laporan Bulan Januari, Februari, Maret Deteksi dini 0 Kali Patroli 180 Kali Pam Aset (Piket) 121 Kali Pam Kegiatan 29 Kali Pam Pos Kotis 84 Kali Walpam 0 Kali
1.1.7	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	100.000.000,00		0,00	100 %	279.596.000,00	50 %	0,00	50,00	0,00	50 %	0,00	50,00	0,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	=1/2*100%
1.1.8			Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	47,77 %				47.77 %		53.62 %		112,25		53.62 %		100,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	=2681/5000*100%
1.1.9			Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %		100 %		100 %		25 %		25,00		100 %		100,00		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	=3/12*100%

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		SEKRETARIAT DAERAH		100	29.000.236.145,00	66,58	31.276.539.030,55	100	27.679.393.599,23		5.894.857.536,00	27,99	21,30	94.57	37.171.396.566,55	94,57	100,00	SEKRETARIAT DAERAH	
1.1	4.01	SEKRETARIAT DAERAH		100	29.000.236.145,00	66,58	31.276.539.030,55	100	27.679.393.599,23		5.894.857.536,00	27,99	21,30	94.57	37.171.396.566,55	94,57	100,00	SEKRETARIAT DAERAH	
1.1.1	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase nilai aset dalam kondisi baik	61 %	25.078.236.145,00	73 %	26.261.044.841,00	69 %	24.097.524.399,23	57.64 %	5.846.440.049,00	83,54	24,26	130.64 %	32.107.484.890,00	100,00	100,00	SEKRETARIAT DAERAH	=((32728196428+7842835150+461000)/(62421337268+7960340983))*100
1.1.2			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %		100 %		25.8 %		25,80		125.8 %		100,00		SEKRETARIAT DAERAH	=(16/62)*100
1.1.3			Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %		100 %		36.6 %		36,60		100 %		100,00		SEKRETARIAT DAERAH	=(45,6+12,5+60,5+25+39,5)/5
1.1.4	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Efektivitas Kerja Sama Daerah	91 Persentase	2.709.000.000,00		0,00	91 Persentase	2.604.507.200,00	0 Persentase	37.475.810,00	0,00	1,44	0 Persentase	37.475.810,00	0,00	1,38	SEKRETARIAT DAERAH	Realisasi bisa diketahui pada TW IV
1.1.5			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 Persentase				100 Persentase		0 Persentase		0,00		0 Persentase		0,00		SEKRETARIAT DAERAH	Realisasi dapat diketahui di TW IV
1.1.6			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	3,62 Nilai				3.62 nilai		0 nilai		0,00		0 nilai		0,00		SEKRETARIAT DAERAH	Telah disusun dokumen LPPD, nilai belum turun
1.1.7			Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	93 %				93 %		85 %		91,40		85 %		91,40		SEKRETARIAT DAERAH	185/216x100%=85%
1.1.8	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100 %	1.213.000.000,00		0,00	100 %	977.362.000,00	0 %	10.941.677,00	0,00	1,12	0 %	10.941.677,00	0,00	0,90	SEKRETARIAT DAERAH	realisasi dapat diketahui pada TW IV
1.1.9			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100 %				100 %		0 %		0,00		0 %		0,00		SEKRETARIAT DAERAH	Realisasi diketahui pada TW IV
1.1.10			Tingkat Kematangan UKPBJ	Pro Aktif Level				100 Level		0 Level		0,00		0 Level		0,00		SEKRETARIAT DAERAH	Proaktif

Tabel TC.19
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten/Kota Trenggalek
Tahun 2026

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaian Kinerja RPJMD pada Akhir Periode RPJMD		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu (n-2) (2025)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun n-1) (2026)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1 (Tahun 2026 s/d TW I)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%) (Tahun 2026 s/d TW I)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
										Tahun 2026 s/d TW I									Triwulan I
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 X 100%		10 =6+8		11=10/5 x100%		12	13
				Target	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		100	50.075.676.273,00		0,00	100	45.808.104.818,33		11.679.007.563,00	19,96	25,50	19.96	11.679.007.563,00	19,96	23,32	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
1.1	4.02	SEKRETARIAT DPRD		100	50.075.676.273,00		0,00	100	45.808.104.818,33		11.679.007.563,00	19,96	25,50	19.96	11.679.007.563,00	19,96	23,32	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
1.1.1	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran yang difasilitasi	100 %	30.725.981.290,00		0,00	100 %	30.359.430.918,33	39.93 %	7.176.563.391,00	39,93	23,64	39.93 %	7.176.563.391,00	39,93	23,36	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Realisasi kinerja pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi = =((65,23/100)+(63,33/100)+(29,76/100)+(18,75/100)+(33,33/100)+(29,17/100))/6*100% = 39,93%
1.1.2			Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %				100 %		28.43 %		28,43		28.43 %		28,43		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Realisasi kinerja ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah =29/102*100 = 28,43%
1.1.3			Persentase Nilai Aset Dalam Kondisi Baik	98,84 %				96 %		99.00 %		103,13		99 %		100,00		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Realisasi Persentase nilai aset dalam kondisi baik, Nilai aset baik/total aset kali 100 = Nilai aset baik 14.281.952.815/14.425.580.950*100 = 99,00%
1.1.4	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100 Persentase	19.349.694.983,00		0,00	100 Persentase	15.448.673.900,00	0.00 Persentase	4.502.444.172,00	0,00	29,14	0 Persentase	4.502.444.172,00	0,00	23,27	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Realisasi Penetapan Perda APBD Tahun N =((0/4)+(0/2)+(0/1))/3*100% = 0,00%
1.1.5			Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	67,50 Persentase				67.50 Persentase		12.50 Persentase		18,52		12.5 Persentase		18,66		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Realisasi Penetapan Ranperda Tahun N =((1/2)+(0/3)+(0/1)+(0/5))/4*100% = 12,50%
1.1.6			Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %				100 %		12.50 %		12,50		12.5 %		12,50		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Realisasi persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan =((12/48)+(0/1))/2*100% = 12,50%

LAMPIRAN II

HASIL PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2027

RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2027

Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Dalam Rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
1	H. HIDAYAT NURHASIM, S.H	Bantuan Pengadaan Mebel Sekolah SD/Sederajat	Peralatan Mebel MI Nurul Ulum Parakan kurang memadai dan tidak sebanding dengan jumlah murid serta kebutuhan operasional sekolah. Sehingga proses pembelajaran siswa kurang lacar. Maka itu dibutuhkan bantuan pengadaan mebel sekolah sebagai penunjang proses belajar mengajar di MI Nurul Ulum Parakan	Jalan Mastrip Dusun Krajan RT 12 RW 05 Desa Parakan Kecamatan Trenggalek, Kab. Trenggalek	2	PAKET	DINAS PENDIDIKAN
2	H. HIDAYAT NURHASIM, S.H	Hibah kepada masjid atau pondok pesantren untuk kegiatan yang bermanfaat	Tempat wudhu dan MCK Masjid Sunan Kalijaga kurang mamadai dan membutuhkan rehab agar kapasitasnya lebih besar dan depan masjid mrmbutuhkan bangunan Teras atau Galvalum agar jama'ah tidak kepanasan ketika melaksanakan ibadah.	Dusun Krajan RT 016 RW 006 Desa Parakan Kecamatan Trenggalek, Kab. Trenggalek	318	M3	SEKRETARIAT DAERAH
3	H. HIDAYAT NURHASIM, S.H	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Jalan Lingkungan perumahan membutuhkan penerangan jalan agar tidak gelap saat malam hari dan mempermudah akses pengguna jalan sehingga dibutuhkan Lampu Penerangan Jalan	DUSUN KRAJAN RT 11 RW 04 DAN DUSUN TLASEH RT 05 RW 02 Gang Lima Sebelas Desa Parakan Kecamatan Trenggalek, Kab. Trenggalek	12	Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
4	H. HIDAYAT NURHASIM, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan pemukiman perumahan akses ke pemakaman umum sudah rusak dan sangat memprihatinkan maka dari itu diperlukan pengkerasan ulang berupa paving untuk memperlancar akses pengguna jalan	Dusun Krajan RT 17 dan RT 18 - RW 06 Desa Parakan Kecamatan Trenggalek, Kab. Trenggalek	910	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
5	H. HIDAYAT NURHASIM, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan pemukiman perumahan sangat memprihatinkan dan mulai rusak, maka dari itu diperlukan pengkerasan ulang berupa paving untuk memperlancar akses pengguna jalan	Dusun Krajan RT 11 RW 04 Desa Parakan Kecamatan Trenggalek, Kab. Trenggalek	275	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
6	H. HIDAYAT NURHASIM, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Kelurahan dan Perumahan Formal	Kondisi jalan pemukiman perumahan sangat memprihatinkan karena masih berupa tanah dan cor tengah sehingga becek serta licin ketika musim hujan sehingga membahayakan pengguna jalan tersebut. Untuk itu butuh pavingisasi	Lingkungan Kelutan RT 11 RW 04 Gang Sambi Kelurahan Kelutan Kecamatan Trenggalek, Kab. Trenggalek	400	M2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
7	H. HIDAYAT NURHASIM, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Kelurahan dan Perumahan Formal	Kondisi jalan pemukiman perumahan sangat memprihatinkan dan mulai rusak, maka dari itu diperlukan pengkerasan ulang berupa paving untuk memperlancar akses pengguna jalan	Lingkungan Ngantru RT 03 RW 01 Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek, Kab. Trenggalek	250	M2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
8	Hj. ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Jalan saat malam gelap, banyak jalan berlubang, kondisi jalan sempit dan membahayakan pengendara yang lewat pada malam hari	RT 01 dan 02 RW 01 Desa Sumurup (jalan poros kecamatan), Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
9	Hj. ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Jika musim penghujan air mengalir di badan jalan, disertai dengan lumpur, bebatuan kecil, belum ada Drainase/Saluran air, Badan jalan mudah terkikis air dan rusak	Jalan raya Bendungan Rt 02 Rw 01 Desa Srabah Kecamatan Bendungan, Kab. Trenggalek	200	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Sebagian jalan desa mengalami kerusakan dan sebagian belum di paving sehingga menghambat kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat maka perlu dilakukan perbaikan. Sementara itu, besaran biaya dan volume pekerjaan yang dibutuhkan tidak sebanding dengan kemampuan keuangan	Rt.41 Rw.07 Dsn.Selorejo Ds.Mlinjon Kec.Suruh, Kab. Trenggalek	1200	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
11	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rabat beton hasil swadaya mayarakat mengalami kerusakan sehingga menghambat kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat, maka perlu dilakukan perbaikan. Sementara itu, besaran biaya dan volume pekerjaan yang dibutuhkan tidak sebanding dengan kemampuan keuangan desa.	Dsn.Gempolan Ds.Gamping Kec.Suruh, Kab. Trenggalek	1650	m2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
12	H. HIDAYAT NURHASIM, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Akses jalan masih berupa tanah dan sulit buat pengguna jalan , kalau musim hujan sangat licin dan membahayakan pengguna jalan. Maka di butuhkan Rabat beton atau Paving jalan.	Dusun Dawuhan RT 005 RW 002 Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek , Kab. Trenggalek	500	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
13	JOKO HADI SISWANTO, S.T.	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Jalan belum ada lampu penerangan jalan umum sehingga pada malam hari membahayakan keselamatan masyarakat dan pengguna jalan	Dusun Ponggok RT. 21-24 Desa Ngepeh Kec. Tugu, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
14	SUGIANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak berlobang dan kalau hujan tergenang air dan sangat membahayakan pengendara jalan.	Dusun Jedung RT.004 dan RT.005 RW. 002 Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	1592,5	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
15	SUGIANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi Jalan Lingkungan yang rusak dan berlubang dan apabila musim hujan licin	Dusun Belik RT.016 RW.005 Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	1255	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
16	SUGIANTO	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai (Talud, Bronjong)	Pada saat hujan air meluap dan banjir ke jalan sehingga merusak jalan dan mengakibatkan banjir.untuk volume tinggi 1 meter , panjang 200 meter,Tebal 0.60 meter	Dusun Kedegan RT.009 RW.004 Desa Wonoanti Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	200	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
17	H. SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tebing rawan longsor dan mengancam ikut terbawa longsor yang mengakibatkan rusaknya badan jalan dan bangunan dibawahnya untuk itu perlu bangun Bangunan Pelengkap Jalan berupa Tembok Penahan Jalan yang berada di Ruas Jalan Kabupaten pada ruas Pakis - Gador di Dusun Pingit RT 21 RW 05 Desa Gador Kecamatan Durenan dengan Volume Panjang 150m, Tebal 0,5m, Tinggi 3m	Dusun Pingit RT 21 RW 05 Desa Gador Kecamatan Durenan, Kab. Trenggalek	225	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
18	H. SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Rusaknya badan jalan akibat genangan air karena tidak adanya Drainase Jalan (Saluran Air) sebagai pengaman badan jalan sehingga tidak mendukung progam visi misi RPJMD Trenggalek 2025 -2029 untuk itu perlu dibangun Drainase Jalan (Saluran Air) yang berada di Ruas Jalan Kabupaten pada ruas Karanganom - Kendalrejo RT 14 RW 06 Dusun Ngrandu Desa kendalrejo Kecamatan Durenan dengan Volume 200m	RT 14 RW 06 Dusun Ngrandu Desa kendalrejo Kecamatan Durenan, Kab. Trenggalek	200	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	H. SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi jalan eksisting pada RT 16-17 RW 04 Desa Gador Kecamatan Durenan rusak parah,Karena merupakan jalan akses utama untuk menunjang sarana prasarana transportasi sekaligus akses perekonomian dan pendidikan, untuk itu perlu Bangun Perkerasan Jalan (Pavingisasi) yang berada di ruas Jalan Kabupaten deangan Volume panjang 200 m * lebar 3 m	RT 16 - 17 RW 04 Desa Gador Kecamatan Durenan, Kab. Trenggalek	200	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
20	H. SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Rusaknya badan jalan akibat genangan air karena tidak adanya Drainase Jalan (Saluran Air) sebagai pengaman badan jalan sehingga tidak mendukung progam visi misi RPJMD Trenggalek 2025 -2029 untuk itu perlu dibangun Drainase Jalan (Saluran Air) yang berada di Ruas Jalan Kabupaten pada ruas Kednglurah - Brongkah Lor RT 06 – 07 RW 02 Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan dengan Volume 200m	RT 06 – 07 RW 02 Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan, Kab. Trenggalek	200	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21	H. SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Rusaknya badan jalan akibat genangan air karena tidak adanya Drainase Jalan (Saluran Air) sebagai pengaman badan jalan sehingga tidak mendukung progam visi misi RPJMD Trenggalek 2025 -2029 untuk itu perlu dibangun Drainase Jalan (Saluran Air) yang berada di Ruas Jalan Kabupaten pada ruas Bendo - Krandekan RT 08 RW 04 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan dengan Volume 250m	RT 08 RW 04 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan, Kab. Trenggalek	250	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
22	H. SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Rusaknya badan jalan akibat genangan air karena tidak adanya Drainase Jalan (Saluran Air) sebagai pengaman badan jalan sehingga tidak mendukung progam visi misi RPJMD Trenggalek 2025 -2029 untuk itu perlu dibangun Drainase Jalan (Saluran Air) yang berada di Ruas Jalan Kabupaten pada ruas Malasan RT 28 RW 07 Desa Malasan Kecamatan Durenan dengan Volume 200m	RT 28 RW 07 Desa Malasan Kecamatan Durenan, Kab. Trenggalek	200	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
23	H. SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Rusaknya badan jalan akibat genangan air karena tidak adanya Drainase Jalan (Saluran Air) sebagai pengaman badan jalan sehingga tidak mendukung progam visi misi RPJMD Trenggalek 2025 -2029 untuk itu perlu dibangun Drainase Jalan (Saluran Air) yang berada di Ruas Jalan Kabupaten pada ruas Kedunglurah - Ngadirejo Dusun Gebang RT 34 – 36 RW 14 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan dengan Volume 250m	Dusun Gebang RT 34 – 36 RW 14 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan, Kab. Trenggalek	250	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	H. SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tebing rawan longsor dan mengancam ikut terbawa longsor yang mengakibatkan rusaknya badan jalan untuk itu perlu bangun Bangunan Pelengkap Jalan berupa Tembok Penahan Jalan yang berada di Ruas Jalan Kabupaten pada ruas Ngadirejo di RT 35 – 37 RW 14 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan dengan Volume Panjang 200m, Tebal 0,5m, Tinggi 3m	RT 35 – 37 RW 14 Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan, Kab. Trenggalek	300	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
25	H. SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Rusaknya badan jalan akibat genangan air karena tidak adanya Drainase Jalan (Saluran Air) sebagai pengaman badan jalan sehingga tidak mendukung progam visi misi RPJMD Trenggalek 2025 -2029 untuk itu perlu dibangun Drainase Jalan (Saluran Air) yang berada di Ruas Jalan Kabupaten pada ruas Durenan - Ngadisuko RT 08 – 10 RW 03 Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan dengan Volume 200m	RT 08 – 10 RW 03 Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan, Kab. Trenggalek	200	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26	SUGIANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi Jalan saat ini masih belum ada pengerasan dan jalan mudah rusak pada saat hujan air tergenang dan licin.	Dusun Kebon RT.012 dan RT.013 RW 004 Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	600	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
27	JOKO HADI SISWANTO, S.T.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan Desa rusak sehingga menghambat aktivitas perekonomian warga p=68 m l=2,5 m	RT. 09 RW. 02 Desa Gondang Kec. Tugu, Kab. Trenggalek	168,5	m2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
28	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Kelurahan dan Perumahan Formal	PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN (PAVING)	RT 20 DUSUN SIDOMULYO KELURAHAN SUMBERGEDONG, Kab. Trenggalek	400	M2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
29	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Kelurahan dan Perumahan Formal	PERBAIKAN JALAN LINGKUNGAN (PAVING)	RT 001 RW 001 KELURAHAN NGANTRU KECAMATAN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	600	M2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
30	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI	RT 001 RW 001 KELURAHAN NGANTRU KECAMATAN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	100	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31	SUGIANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Bangunan Jalan yang lama sudah rusak dan berlubang waktu hujan licin dan tergenang	Dusun Pundensari RT.047 RW.014 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari , Kab. Trenggalek	1200	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
32	SUGIANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Pada saat ini Jalan rusak parah dan berlubang pada hujan tergenang air dan sering membuat pengendara sepeda motor pada saat hujan kesulitan melewati karena tergenang air.	Dusun Pundesari RT.045 RW.014 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	300	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
33	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	BELUM ADANYA PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN	RT 09, 10 RW 04 LINGKUNGAN KRANDING KELURAHAN TAMANAN KECAMATAN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	20	TITIK	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
34	SUGIANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi Jalan rusak parah pada saat hujan tergenang air	Dusun Geneng Sanan RT.056 RW.026 Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	1295	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
35	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	PERMOHONAN JALAN PAVING DIKARENAKAN KONDISI JALAN LAMA YANG RUSAK PERLU DIPERBAIKI GUNA MEMPERLANCAR ARUS LALU LINTAS KARENA MERUPAKAN JALAN POROS DI DESA KARANGSOKO	RT 022 DESA KARANGSOKO KEC. TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	600	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
36	JOKO HADI SISWANTO, S.T.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan berupa jalan tanah sehingga saat hujan membahayakan pengguna jalan dan menghambat perekonomkian warga	RT. 03 Dusun Krajan Desa Ngepeh Kec. Tugu, Kab. Trenggalek	500	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
37	JOKO HADI SISWANTO, S.T.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan tidak layak/becek di musim hujan sehingga menghambat aktivitas warga p=122 m dan l=2,5 m	RT. 12 RW. 03 Desa Gondang Kec. Tugu, Kab. Trenggalek	229,05	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
38	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Jalan belum ada tembok penahan jalan sehingga tebing jalan rawan ambrol	RT. 02 RW. 01 Desa Barang Ruas Jalan Kertosono-Banteng Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	300	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
39	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Jalan rawan ambrol sehingga perlu tebing penahan jalan	RT. 12 RW. 02 Desa Banjar Ruas Jalan Banjar-Ngrambingan Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	450	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
40	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	Jaringan Irigasi berupa tanah sehingga di musim hujan air meluap ke jalan dan aliran air kurang lancar di musim kemarau	RT. 02 RW. 01 Desa Sawahan Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	200	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
41	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Jaringan irigasi sudah rusak sehingga pada musim hujan air meluap ke jalan	RT. 14 RW. 03 Desa Panggul Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	400	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
42	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai (Talud, Bronjong)	Tebing sungai rawan/mudah ambrol dikarenakan arus banjir sehingga perlu talud/bronjong	RT. 02 RW. 01 Desa Barang Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	500	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
43	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	Jaringan irigasi masih berupa tanah sehingga mengakibatkan aliran air kurang lancar dan mengakibatkan warga kekurangan air serta di musim hujan air meluap ke jalan	RT. 03 RW. 01 Desa Gayam Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	500	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
44	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	Jaringan irigasi berupa tanah sehingga pada musim hujan air meluap ke jalan	Desa Wonocoyo Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	600	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
45	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Jaringan irigasi sudah rusak sehingga irigasi tidak berfungsi dengan maksimal	RT. 05 RW. 02 Desa Barang Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	400	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
46	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tebing jalan rawan ambrol sehingga perlu dibuatkan tembok penahan jalan	RT. 05 RW. 01 Desa Manggis Ruas Jalan Banteng-Prapatan Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	750	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
47	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Jalan belum memiliki drainase sehingga air hujan meluap di jalan dan mengakibatkan aspal jalan mudah rusak	RT. 02 RW. 01 Desa Sawahan Ruas Jalan Kertosono-Banteng Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	750	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
48	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd	Bangunan Pelengkap Jalan (Gorong-gorong)	Jalan belum ada gorong-gorong sehingga jalan mudah ambles dan pada musim hujan air meluap ke jalan	RT. 08 RW. 02 Desa Manggis Ruas Jalan Kertosono-Banteng Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	6	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
49	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai (Talud, Bronjong)	Tebing sungai rawan ambrol oleh derasnya arus sehingga perlu perkuatan tebing sungai	Desa Barang Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	750	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
50	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Jaringan irigasi sudah rusak sehingga perlu rehabilitasi jaringan irigasi agar air tidak meluap ke jalan	RT. 03 RW. 01 Desa Gayam Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	400	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
51	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tebing jalan rawan ambrol/longsor sehinga perlu tembok penahan jalan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan	RT. 23 RW. 06 Desa Manggis Ruas jalan Siki-Banteng, Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	750	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
52	H. KHOLIS WIDODO, S.Pd	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tebing jalan rawan longsor/ambrol sehingga perlu tembok penahan jalan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan	RT. 06 RW. 02 Desa Barang Ruas Jalan Kertosono-Banteng, Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	750	m3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
53	BAMBANG SUTOPO, S.E.	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Jalan belum ada lampu penerangan jalan umum sehingga pada malam hari kondisi jalan gelap dan membahayakan keselamatan pengguna jalan serta rawan gangguna kamtibmas	RT. 24 RW. 02 Dusun Kojur Desa Gemaharjo Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
54	BAMBANG SUTOPO, S.E.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Bahu jalan rawan ambrol sehingga membahayakan keselamatan warga dan merusak struktur jalan	RT. 28 RW. 02 Desa Gemaharjo Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek	50	m	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
55	BAMBANG SUTOPO, S.E.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak berdampak pada keselamatan pengguna jalan dan menghambat aktivitas warga	Dusun Sambi Desa Watuagung Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek	900	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
56	BAMBANG SUTOPO, S.E.	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Jalan belum ada lampu penerangaan jalan umum sehingga pada malam hari gelap dan rawan gangguan kamtibmas	RT. 10 RW. 03 Dusun Krajan Desa Dukuh Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
57	BAMBANG SUTOPO, S.E.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan belum ada tpj sehingga jalan rawan ambrol/longsor dan membahayakan pengguna jalan	RT. 17 RW. 05 Dusun Kajar Desa Dukuh Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek	150	m	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
58	BAMBANG SUTOPO, S.E.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak sehingga aktivitas warga kurang lancar dan membahayakan keselamatan pengguna jalan	RT. 17 RW. 06 Dusun Ngrancah Desa Sawahan Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek	800	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
59	BAMBANG SUTOPO, S.E.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rawan ambrol/longsor sehingga perlu TPJ untuk memperkuat tebing jalan	RT. 28 RW. 02 Dusun Kojur Desa Gemaharjo Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek	50	m	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
60	BAMBANG SUTOPO, S.E.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Tebing jalan rawan longsor dan membahayakan keselamatan pengguna jalan sehingga perlu diperkuat/dibangun TPJ	RT. 05 RW. 02 Dusun Tumbal Desa Slawe Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek	350	m	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
61	SUGIANTO	Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Kondisi jaringan irigasi sudah rusak air banyak yang bocor dan tidak maksimal manfaat untuk petani.	Dusun Gumelar RT.015 RW.017 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	200	M1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
62	KRISNA GANDHA SAPUTRA, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak sehingga aktivitas dan mobilitas warga untuk mendukung perekonomian warga tidak maksimal/lancar	RT. 68 Dusun Kojan Desa Jombok Kec. Pule, Kab. Trenggalek	1250	m2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
63	KRISNA GANDHA SAPUTRA, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak dan membahayakan pengguna jalan serta menghambat aktivitas/mobilitas warga	RT. 42 Dusun Bakalan Desa Jombok Kec. Pule, Kab. Trenggalek	1250	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
64	KRISNA GANDHA SAPUTRA, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan dalam keadaan rusak sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat aktivitas/mobilitas warga	RT. 19 Dusun Gading Desa Jombok Kec. Pule, Kab. Trenggalek	1250	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
65	KRISNA GANDHA SAPUTRA, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	alan dalam keadaan rusak sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat aktivitas/mobilitas warga	RT. 64 Dusun Sidem Desa Jombok Kec. Pule, Kab. Trenggalek	1250	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
66	KRISNA GANDHA SAPUTRA, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	alan dalam keadaan rusak sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat aktivitas/mobilitas warga	RT. 27 Dusun Depok Desa Pule Kec. Pule, Kab. Trenggalek	1250	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
67	KRISNA GANDHA SAPUTRA, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rawan longsor/ambrol sehingga perlu diperkuat/dibangung tembok penahan jalan,,LOKASI SESUAI DENGAN TITIK KOORDINAT PROPOSAL	RT. 26 Dusun Jombok Desa Jombok Kec. Pule, Kab. Trenggalek	1250	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
68	KRISNA GANDHA SAPUTRA, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan desa rusak sehingga membahayaka pengguna jalan dan menghambat aktivitas/mobilitas warga	Dusun Sendang Desa Puyung Kec. Pule, Kab. Trenggalek	1250	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
69	KRISNA GANDHA SAPUTRA, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat aktivitas/mobilitas warga	RT. 06 Desa Karanganyar Kec. Pule, Kab. Trenggalek	1250	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
70	SUGIANTO	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Penerangan jalan yang belum ada dan lokasi rawan kecelakaan dan tindak kriminal	Dusun Kebon RT 011 RW.003 Desa Wonorejo kecamatan Gandusari Kab Trenggalek , Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
71	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan desa yang digunakan untuk mobilitas warga mengalami kerusakan. Sangat licin ketika hujan dan sangat terjal ketika musim kemarau maka perlu dilakukan perbaikan. Sementara itu, besaran biaya dan volume pekerjaan yang dibutuhkan tidak sebanding dengan kemampuan keuangan desa.	Dusun Depok, Desa Ngrandu, Kec.Suruh, Kab. Trenggalek	1500	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
72	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan desa yang digunakan untuk mobilitas warga mengalami kerusakan. Sangat licin ketika hujan dan sangat terjal ketika musim kemarau maka perlu dilakukan perbaikan. Sementara itu, besaran biaya dan volume pekerjaan yang dibutuhkan tidak sebanding dengan kemampuan keuangan desa.	Dsn. Babadan Ds.Ngrandu Kec.Suruh, Kab. Trenggalek	1107,5	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
73	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan yang menghubungkan antar desa Puru - Wonokerto mengalami kerusakan berat dan amblas sehingga membutuhkan Pengerasan jalan guna mencegah kerusakan semakin parah dan mengurangi resiko kecelakaan. Namun karena keterbatasan alokasi dana yang tersedia, pemerintah desa Puru dan masyarakat sepakat untuk mengajukan permohonan Bantuan Pembangunan Jalan Kepada Bapak Bupati Trenggalek	Ds.Puru Kec.Suruh, Kab. Trenggalek	1015	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
74	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan di dusun Cetok Desa Karangan saat ini masih berpa jalan tanah/batu yang pada musim hujan menjadi licin dan sulit untuk dilalui maka perlu diperbaiki. Namun karena keterbatasan alokasi biaya maka pemerintah desa karangan berinisiatif mengajukan bantuan pembangunan jalan ke Bapak Bupati	Dsn.Cetok Ds.Karangan Kec.Karangan, Kab. Trenggalek	900	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
75	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan desa di Rt.17 yang semula sudah dibangun saat ini sudah rusak dan perlu dilakukan perbaikan. Namun karena keterbatasan biaya maka pemerintah desa sepakat mengajukan bantuan ke Bapak Bupati demi kelancaran pengangkutan hasil produksi pertanian di Desa Jati.	Rt.17 Rw.05 Dsn.Ponggok Ds.Jati Kec.Karangan, Kab. Trenggalek	450	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
76	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan di Rt.04 Dusun Jati belum tersentuh pembangunan karena keterbatasan anggaran dari pemerintah. Demi kelancaran pengangkutan hasil pertanian maka kami pemerintah desa sepakat mengajukan bantuan kepada Bupati Trenggalek	Rt.04 Rw.01 Dsn.Jati Ds.Jati Kec.Karangan, Kab. Trenggalek	500	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
77	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan menuju SMAN 2 Karangan saat ini rusak parah dan berlubang. Kondisi tersebut menghambat mobilitas siswa, tenaga pendidik dan masyarakat sekitar. Pemerintah desa Karangan berencana memperbaiki namun karena keterbatasan alokasi biaya maka pemerintah desa bersepakat mengajukan bantuan ke Bapak Bupati Trenggalek	Jalan Menuju SMAN 2 Karangan Ds.Karangan Kec.Karangan, Kab. Trenggalek	300	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
78	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan yang menghubungkan antara desa Kedungsigit dengan desa Jati kec.Karangan mengalami kerusakan dan susak diakses ketika hujan. Karena jalan tembus tersebut sangat penting untuk mobilitas warga menuju pasar dan antar desa maka kami pemerintah desa sepakat mengajukan bantuan kepada Bupati Trenggalek	Ds.Kedungsigit Kec.Karangan, Kab. Trenggalek	350	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
79	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Mengingat di lingkungan Rt.07 dan Rt.12 sering tergenang air hujan karena tidak tersedianya saluran pembuangan maka kami pemerintah desa sumberingin sepakat untuk mengajukan bantuan pembangunan saluran drainase untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat	Rt.07 dan Rt/12 Dsn.Nglongah Ds.Sumberingin Kec.Karangan, Kab. Trenggalek	250	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
80	SUGIANTO	Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Kondisi Jaringan irigasi sudah rusak parah air tidak mengalir maksimal karena bocor ,perlu adanya perbaikan air ke area sawah	Dusun Suwaru RT.010 RW.005 Desa Krandegan Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	200	M1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
81	SUGIANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi Jalan rusak berat, mengelupas dan banyak lubang dan kalau musim hujan berlumpur dan licin	Dusun Gandu RT.005 RW.002 Desa Gandusari Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	625	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
82	SUGIANTO	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Penerangan jalan yang belum standar dan rawan kecelakaan serta tindak kriminal	Dusun Kedegan RT.012 RW.005 Desa Wonoanti Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
83	JOKO HADI SISWANTO, S.T.	Bantuan Pengadaan Irigasi Air Tanah Tenaga Surya (IAT GAYA)	Pada musim kemarau petani kesulitan air sehingga perlu pengadaan irigasi air tanah	Kelompok Tani Pampang Indah Desa Ngepeh Kec. Tugu, Kab. Trenggalek	2	Unit	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
84	MURKAM, S.T	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan eksisting pada RT 12 RW 03 Dusun Krajan Desa Dukuh Kecamatan watulimo rusak parah karena merupakan jalan akses utama untuk menunjang sarana transportasi sekaligus akses perekonomian dan pendidikan untuk itu perlu di Bangun Perkerasan Jalan (Pavingisasi) dengan Volume Panjang 400m dan Lebar 2,5m	RT 12 RW 03 Dusun Krajan Desa Dukuh Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	1000	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
85	MURKAM, S.T	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan eksisting pada RT 22 RW 08 Dusun Gandu Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo rusak parah karena merupakan jalan akses utama untuk menunjang sarana transportasi sekaligus akses perekonomian dan pendidikan untuk itu perlu di Bangun Perkerasan Jalan (Pavingisasi) dengan Volume Panjang 400m dan Lebar 2,5m	RT 22 RW 08 Dusun Gandu Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	1000	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
86	MURKAM, S.T	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan eksisting pada RT 31 RW 07 Dusun Prigi Desa Prigi Kecamatan Watulimo rusak parah karena merupakan jalan akses utama untuk menunjang sarana transportasi sekaligus akses perekonomian dan pendidikan untuk itu perlu di Bangun Perkerasan Jalan (Pavingisasi) dengan Volume Panjang 200m dan Lebar 2,5m	RT 31 RW 07 Dusun Prigi Desa Prigi Kecamatan Watulimo , Kab. Trenggalek	500	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
87	MURKAM, S.T	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan eksisting pada RT 19 RW 05 Dusun Krajan Desa Watuagung Kecamatan Watulimo rusak parah karena merupakan jalan akses utama untuk menunjang sarana transportasi sekaligus akses perekonomian dan pendidikan untuk itu perlu di Bangun Perkerasan Jalan (Pavingisasi) dengan Volume Panjang 300m dan Lebar 3m	RT 19 RW 05 Dusun Krajan Desa Watuagung Kecamatan Watulimo , Kab. Trenggalek	900	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
88	MURKAM, S.T	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tebing sudah longsor yang mengakibatkan badan jalan tinggal separuh dan bangunan rumah terbawa longsor untuk itu perlu dibangun Tembok Penahan Tebing / Jalan untuk mengamankan bangunan diatas tebing dan jalan dibawahnya, sementara perlu juga dibangun Tembok Penahan Jalan untuk mengamankan badan jalan dan bangunan di bawahnya yang berada di Ruas Jalan Kabupaten pada Ruas Senden-Pakel di RT 9 Desa Pakel Kecamatan Watulimo dengan Volume Panjang 60m, Tebal 0.6m, Tinggi 4m	Ruas Senden-Pakel di RT 9 Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	60	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
89	MURKAM, S.T	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tembok Penahan jalan ambrol yang mengakibatkan rusaknya badan jalan dan bangunan di bawahnya untuk itu perlu di bangun Bangunan Pelengkap Jalan berupa Tembok Penahan Jalan yang berada di Ruas Jalan Kabupaten pada Ruas Pakel-Sebo di RT 18 Desa Pakel Kecamatan Watulimo dengan Volume Panjang 20m, Tebal 0.6m, Tinggi 2m	Ruas Pakel-Sebo di RT 18 Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	24	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
90	MURKAM, S.T	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Rusaknya badan jalan akibat genangan air karena tidak adanya Drainase Jalan (Saluran Air) sebagai pengaman badan jalan sehingga tidak mendukung visi misi RPJMD Trenggalek 2025-2029 untuk itu perlu dibangun Drainase Jalan (Saluran Air) yang berada di Ruas Jalan Kabupaten pada Ruas Pakel-Sebo di RT 18-20 Desa Pakel Kecamatan Watulimo dengan Volume Panjang 60m	Ruas Pakel-Sebo RT 18-20 Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	60	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
91	MURKAM, S.T	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tembok Penahan jalan atau tebing ambrol yang mengakibatkan rusaknya badan jalan disekitarnya untuk itu perlu di bangun Bangunan Pelengkap Jalan berupa Tembok Penahan Jalan atau Tebing untuk melindungi ancaman longsor dan bangunan disekitarnya yang berada di Ruas Jalan Kabupaten pada Ruas Dukuh-Slawe di RT 07 RW 02 Desa Slawe Kecamatan Watulimo dengan Volume Panjang 50m, Tinggi 5 m	Ruas Jalan Dukuh- Slawe RT 07 RW 02 Desa Slawe Kecamatan Watulimo , Kab. Trenggalek	50	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
92	MURKAM, S.T	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Rusaknya badan jalan akibat genangan air karena tidak adanya Drainase Jalan (Saluran Air) sebagai pengaman badan jalan sehingga perlu perlu dibangun Drainase Jalan (Saluran Air) yang berada di Ruas Jalan Kabupaten pada di Ruas Jalan Senden-Pakel di RT 08-09 Desa Pakel Kecamatan Watulimo dengan Volume Panjang 60m	Ruas Jalan Senden-Pakel di RT 08-09 Desa Pakel Kecamatan Watulimo , Kab. Trenggalek	60	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
93	MURKAM, S.T	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Rusaknya badan jalan akibat genangan air karena tidak adanya Drainase Jalan (Saluran Air) sebagai pengaman badan jalan sehingga perlu perlu dibangun Drainase Jalan (Saluran Air) yang berada di Ruas Jalan Kabupaten pada di Ruas Jalan Pakel-Sebo di RT01-02 Desa Pakel Kecamatan Watulimo dengan Volume Panjang 100m	Ruas Jalan Pakel-Sebo di RT 01-02 Desa Pakel Kecamatan Watulimo dengan Volume Panjang 100m , Kab. Trenggalek	100	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
94	MURKAM, S.T	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Rusaknya badan jalan akibat genangan air karena tidak adanya Drainase Jalan (Saluran Air) sebagai pengaman badan jalan sehingga perlu perlu dibangun Drainase Jalan (Saluran Air) yang berada di Ruas Jalan Kabupaten pada di Ruas Jalan Pakel-Sebo di RT 20 Desa Pakel Kecamatan Watulimo dengan Volume Panjang 60m	Ruas Pakel-Sebo RT 20 Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	60	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
95	MURKAM, S.T	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Kondisi ruas jalan kabupaten yang berada di batas desa Pakel dan Gemaharjo belum ada penerangan jalan dan rawan kecelakaan sehingga perlu di pasang penerangan jalan umum pada Ruas Jalan Pakel-Sebo dimulai dari RT 20 Desa Pakel sampai RT 10 Desa Gemaharjo sepanjang 1500m	Ruas Jalan Pakel-Sebo dimulai dari RT 20 Desa Pakel sampai RT 10 Desa Gemaharjo , Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
96	JAYENG BAYU WINEDAR, S.H	Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD/Sederajat	SD Islam Fajar Insani merupakan sekolah pendidikan yang di bangun pada thn 2007. Dengan kapasitas Murit yang semakin banyak setiap tahunya tetapi sekolah ini belum memiliki pembatas sekolahan yang memadai. Sehingga banyak siswa yang sering berkeliaran di pemukiman sekitar yang mana sekolahan kehilangan kendali atas keamanan anak didik. Dari permasalahan tersebut maka kami perlu di bangunkan sebuat pagar pembatas sekolah sehingga siswa mudah di kontrol.	SD Islam Fajar Insani RT.02 RW. 01 Dusun Dawuhan Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	1	paket	DINAS PENDIDIKAN
97	PUGUH PURNOMO, S.E.	Hibah kepada masjid atau pondok pesantren untuk kegiatan yang bermanfaat	Kondisi Masjid Al-Badar saat ini belum memadai, baik kondisi bangunan, daya tampung dan kenyamanan sehingga perlu dilakukan pembangunan masjid yang representatif, kokoh, luas dan estetik.	RT. 10/RW. 02 Dusun Tenggar, Desa Prambon, Kab. Trenggalek	1	paket	SEKRETARIAT DAERAH
98	PUGUH PURNOMO, S.E.	Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD/Sederajat	Belum adanya Tembok Penahan Bangunan (TPB) sehingga mengancam keamanan bangunan dan lingkungan sekolah pada SDN 5 Prambon sehingga perlu dibangun TPB dengan volume: P= 60 m, T= 2 m.	RT. 49/RW. 10 Dusun Sooko, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	1	paket	DINAS PENDIDIKAN
99	PUGUH PURNOMO, S.E.	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi jalan rusak yang membayakan pengguna jalan serta mengganggu kelancaran mobilitas masyarakat sehingga perlu dilakukan peningkatan jalan berupa hotmix (lanjutan) pada ruas Nglongsor-Prambon dengan volume: P= 250 m.	RT. 44-45 Dusun Sooko, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	250	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
100	PUGUH PURNOMO, S.E.	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Belum adanya penerangan jalan umum di Dusun Sooko, Dusun Glagahombo dan Dusun Gebang sehingga perlu dipasang penerangan jalan umum sebanyak 75 titik yang tersebar di tiga dusun.	Dusun Sooko, Dusun Glagahombo dan Dusun Gebang, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
101	PUGUH PURNOMO, S.E.	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Drainase masih berbentuk saluran tanah tanpa dinding beton yang menyebabkan genangan di jalan raya sehingga perlu dibangun drainase jalan ruas Sukorejo-Ngepeh dengan panjang 400 m.	RT. 17/RW. 07 Dusun Mojokidul, Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	400	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
102	PUGUH PURNOMO, S.E.	Hibah kepada masjid atau pondok pesantren untuk kegiatan yang bermanfaat	Belum adanya kubah masjid yang permanen karena keterbatasan dana sehingga perlu mengajukan permohonan bantuan kubah yang kokoh, estetis dan modern pada Masjid "Miftakhul Khoir" dengan volume: diamater bawah 352 cm, tinggi 250 cm.	RT. 15/RW. 06 Dusun Klampisan, Desa Pucanganak, Kab. Trenggalek	1	unit	SEKRETARIAT DAERAH
103	PUGUH PURNOMO, S.E.	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Belum adanya penerangan jalan umum di Dusun Mojo Kidul Desa Jambu sehingga perlu dipasang penerangan jalan umum sebanyak 50 titik.	RT. 22-23/RW. 08 Dusun Mojo Kidul, Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
104	PUGUH PURNOMO, S.E.	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Drainase masih berbentuk saluran tanah tanpa dinding beton yang menyebabkan genangan di jalan raya sehingga perlu dibangun drainase jalan ruas Nglongsor-Prambon dengan panjang 300 m.	RT. 35-37 Dusun Gebang & RT. 30-31 Dusun Klampok Desa Prambon, Kab. Trenggalek	300	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
105	PUGUH PURNOMO, S.E.	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Pembangunan jalan ruas Nggaren-Tempuran belum selesai sehingga perlu dilakukan pavingisasi (lanjutan) dengan volume: P= 200 m, L= 3.5 m.	RT. 12/RW. 04 Dusun Tompe, Desa Tegaren, Kab. Trenggalek	200	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
106	SUBADIANTO	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai (Talud, Bronjong)	Permasalahan erosi dan longsoran di tebing sekitar jembatan RT 02 Nglongsor mengancam keselamatan warga, sehingga pembangunan tembok penahan 3x100 m mendukung pengendalian banjir, ketahanan bencana, dan program pengelolaan SDA Trenggalek.	RT 02 Nglongsor , Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	300	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
107	SUBADIANTO	Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Permasalahan akses lahan pertanian RT 01 Nglongsor yang sulit dan rawan longsor menghambat distribusi hasil panen, sehingga JUT 600 m2 mendukung produktivitas, efisiensi logistik, dan ketahanan lahan tani.	JUT RT 01 Nglongsor, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	317	M	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
108	SUBADIANTO	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Permasalahan jalan poros RT 02 RW 01 Dusun Gajah Desa Duren rusak berat mengganggu konektivitas dan akses ekonomi, sehingga pavingisasi 250x4 m mendukung peningkatan infrastruktur, ketahanan wilayah, dan misi Kota Atraktif Trenggalek.	Ruas Jalan 35-3-69 Pucanganak - Duren. RT. 2 RW. 1, Dusun Gajah, Desa Duren, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	250	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
109	PUGUH PURNOMO, S.E.	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi jalan rusak yang membayakan pengguna jalan serta mengganggu kelancaran mobilitas masyarakat sehingga perlu dilakukan peningkatan jalan berupa hotmix pada ruas Dermosari-Tumpak Pelem (Ponorogo) dengan volume: P= 200 m.	RT. 04/RW.01 Dusun Bonsari, Desa Dermosari, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	200	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
110	SUBADIANTO	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Permasalahan longsor tebing RT 52 jalan poros Prambon mengancam keselamatan pengguna jalan, sehingga pembangunan TPJ 4x100 m mendukung ketahanan infrastruktur, mitigasi bencana, dan misi Kota Atraktif Trenggalek	Ruas Jalan 35-3-78 Prambon - Masaran, RT. 52 Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	100	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
111	SUBADIANTO	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Permasalahan minimnya penerangan PJU di Mloko Prambon mengurangi keamanan malam hari, sehingga pengadaan 60 titik PJU solar cell mendukung infrastruktur dasar berkualitas, energi bersih, dan misi Kota Atraktif Trenggalek.	Ruas Jalan 35-3-78 Prambon - Masaran, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	60	unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
112	SUBADIANTO	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Permasalahan longsor tebing RT 04 Dusun Pacar jalan poros Desa Nglinggis mengancam keselamatan pengguna jalan, sehingga TPT 50x2 m mendukung ketahanan infrastruktur, mitigasi bencana, dan misi Kota Atraktif Trenggalek.	Ruas Jalan 35-3-76 Nglinggis -Simpang 5 Kasrepan, Rt 04 Dusun Pacar, Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	50	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
113	SUBADIANTO	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai (Talud, Bronjong)	Permasalahan erosi tebing sungai di sekitar jembatan RT 07 Santren Desa Rejowinangun mengancam keselamatan warga, sehingga plensengan/bronjong 3x50 m mendukung pengelolaan SDA, ketahanan bencana, dan infrastruktur ramah lingkungan Trenggalek.	Ruas Jalan 35-3-187/188K Abdurahman Saleh/Kanjeng Jimat, Keluarahan RT 07 Santren, Desa Rejowinangun, Kecamatan Trenggalek, Kab. Trenggalek	100	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
114	PUGUH PURNOMO, S.E.	Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD/Sederajat	Jumlah ruang kelas pada MI Mojo Desa Jambu saat ini belum sesuai dengan jumlah rombongan belajar sehingga perlu dibangun ruang kelas baru pada lantai II MI Mojo dalam rangka memenuhi kekurangan ruang kelas sesuai dengan jumlah rombongan belajar.	MI Mojo, RT. 18 RW. 07 Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	1	paket	DINAS PENDIDIKAN
115	PUGUH PURNOMO, S.E.	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai (Talud, Bronjong)	Belum bangunnya talud sehingga perlu dilakukan pembangunan talud agar permukiman/lahan masyarakat dan jalan terlindungi dari longsor dan gerusan air, volume: P= 15 m, T= 4.2 m (lanjutan).	Dusun Tenggar, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	15	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
116	PUGUH PURNOMO, S.E.	Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/Sederajat	Kondisi 3 (tiga) ruang kelas pada SDN 4 Prambon rusak sehingga perlu dilakukan rehabilitasi.	RT. 56/RW. 12 Dusun Mloko, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	2	ruang kelas	DINAS PENDIDIKAN
117	PUGUH PURNOMO, S.E.	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Belum adanya penerangan jalan umum di Dusun Ponggok dan Dusun Kidul Gunung sehingga perlu dipasang penerangan jalan umum sebanyak 50 titik yang tersebar di 2 (dua) dusun.	Dusun Ponggok dan Dusun Kidul Gunung, Desa Ngepeh, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
118	SUBADIANTO	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Permasalahan drainase depan Balai Desa Prambon yang buruk menyebabkan genangan banjir, sehingga pembangunan saluran 200m mendukung infrastruktur dasar berkualitas, pengendalian banjir, dan misi Kota Atraktif Trenggalek.	Ruas Jalan 35-3-77 Nglongsor - Prambon, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	200	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
119	SUBADIANTO	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Permasalahan drainase jalan poros RT 10 Tegaren Tugu yang buruk menyebabkan genangan air, sehingga pembangunan saluran 150m mendukung infrastruktur dasar berkualitas, pengendalian banjir, dan misi Kota Atraktif Trenggalek.	Ruas Jalan 35-3-89 Nggaren - Tempuran, RT.10 , Desa Tegaren, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	150	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
120	SUBADIANTO	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Permasalahan longsor tebing RT 02 jalan poros Desa Pucanganak Tugu mengancam keselamatan pengguna jalan, sehingga TPJ Tinggi 3 meter dan panjang 200 m mendukung ketahanan infrastruktur, mitigasi bencana, dan misi kabupaten Trenggalek.	Ruas Jalan 35-3-69 Pucanganak - Duren. RT. 2 RW. 1, Dusun Pakel, Desa Pucanganak, Kecamatan Tugu , Kab. Trenggalek	200	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
121	SUBADIANTO	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Permasalahan longsor tebing jalan poros Depok Bendungan mengancam keselamatan pengguna jalan, sehingga TPJ 6x30 m mendukung ketahanan infrastruktur, mitigasi bencana, dan misi Kota Atraktif Trenggalek.	Ruas Jalan 35-3-164 Srabah - Depok, Desa Depok, Kecamatan Bendungan , Kab. Trenggalek	30	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
122	SUBADIANTO	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Permasalahan longsor tebing jalan poros Dusun Bamaran Dermosari mengancam keselamatan warga, sehingga TPJ 3x150 m mendukung ketahanan infrastruktur, mitigasi bencana, dan misi Kota Atraktif Trenggalek.	Ruas Jalan 35-3-73 Dermosari - Tumpakpelem (Batas Ponorogo), Dusun Bamaran, Desa Dermosari, Kecamatan Tugu , Kab. Trenggalek	150	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
123	SUBADIANTO	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Permasalahan drainase jalan poros Desa Nglinggis yang buruk menyebabkan genangan banjir, sehingga pembangunan saluran drainase mendukung infrastruktur dasar berkualitas, pengendalian banjir, dan misi Kota Atraktif Trenggalek.	Ruas Jalan 35-3-76 Nglinggis - Simpang 5 Kasrepan, Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu , Kab. Trenggalek	300	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
124	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan yang berada di wilayah Rt.09 Rw.04 Dsn.Jatirejo Ds.Suruh dalam keadaan rusak parah, kondisinya becek dan licin saat musim penghujan maka perlu perbaikan. Namun Karena alokasi dana yang kurang memadai maka Pemerintah Desa Suruh sepakat mengajukan bantuan paving jalan supaya ketimpangan aksen transportasi bisa teratasi	Rt.09 Rw.04 Dsn.Jatirejo Ds.Suruh Kec.Suruh, Kab. Trenggalek	275	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
125	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Ruas jalan Rt.05 rw.02 Dsn.Talun adalah jalan beton penghubung antara Desa Buluagung dan Salamrejo namun sekarang kondisi jalan tersebut hancur, ambles dan mulai berlubang sehingga membahayakan pengguna jalan maka perlu perbaikan. Karena keterbatasan alokasi dana maka pemerintah desa Buluagung mengajukan bantuan kepada Bupati Trenggalek supaya masalah bisa segera teratasi	Rt.05 rw.02 Dsn.Talun Ds.Buluagung Kec.Karangan, Kab. Trenggalek	952	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
126	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Pada musim hujan wilayah lingkungan Rt.23 Rw.03 Dsn.Krandon Ds.Kerjo selalu mengalami masalah banjir. Sehingga menyebabkan lingkungan menjadi kumuh dan kotor. Genangan air juga menyebabkan kerusakan aspal setiap tahunnya maka perlu dibangun drainase. Namun karena keterbatasan biaya maka pemerintah desa sepakat mengajukan bantuan ke Bupati Trenggalek supaya masalah bisa segera teratasi.	Rt.23 Rw.03 Dsn.Krandon Ds.Kerjo Kec.Karangan, Kab. Trenggalek	300	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
127	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tembok Penahan Jalan yang berada di Rt.14 Rw.05 Dsn Jatirejo Ds.Suruh dalam keadaan rusak parah dan akses jalan Daerah Suruh - Pule dalam keadaan longsor. Hal itu mengakibatkan kondisi tanah yang longsor potensi berdampak ke pemukiman warga maka TPJ perlu diperbaiki. Namun karena keterbatasan alokasi biaya maka kami pemerintah desa sepakat mengajukan permohonan bantuan ke Bupati Trenggalek supaya masalah segera teratasi	Rt.14 Rw.05 Dsn Jatirejo Ds.Suruh Kec.Suruh, Kab. Trenggalek	35	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
128	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Kurangnya penerangan di Lingkungan Rt.24 - Rt.29 Dsn.Kedungwaru Ds.Kedungsigit berdampak pada kenyamanan pengguna jalan. Demi mengatasi masalah tersebut maka perlu diadakan penerangan lampu jalan yang memadai. Namun karena kuranganya alokasi dana maka pemerintah desa mengajukan bantuan ke bupati Trenggalek supaya msalah bisa segera teratasi	Rt.24 - Rt.29 Dsn.Kedungwaru Ds.Kedungsigit Kec.Karangan, Kab. Trenggalek	1	paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
129	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Bantuan sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Lele)	Keterbatasan modal dan sarpras budidaya ikan pada Pokdakan Sentra Aquafarm Mandiri menyebabkan tidak optimalnya produksi perikanan yang dihasilkan	(Sentra Aquafarm Mandiri) Rt.23 Rw.06 Dsn.Cetok Ds.Karangan Kec.Karangan, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
130	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Bantuan sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Lele)	Keterbatasan modal dan sarpras budidaya ikan pada Pokdakan Widoro Fish Garden menyebabkan tidak optimalnya produksi perikanan yang dihasilkan	Widoro Fish Garden Dsn. Tambakboyo Ds.Widoro Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
131	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Bantuan sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Lele)	Keterbatasan modal dan sarpras budidaya ikan pada Pokdakan Peternak Mandiri Jaya menyebabkan tidak optimalnya produksi perikanan yang dihasilkan	(Peternak Mandiri Jaya) Rt.01 Rw.01 Dsn.Karangan Ds.Karangan Kec.Karangan, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
132	SUKARDI	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan akses jalan lingkungan Dusun Krajan masih rusak menghambat konektivitas warga dan layanan dasar, sehingga pavingisasi mendukung misi Kota Atraktif dan peningkatan kualitas infrastruktur berkeadilan.	RT.03, RW.01 DUSUN KRAJAN, DESA SAWAHAN, KECAMATAN WATULIMO, Kab. Trenggalek	875	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
133	SUKARDI	Bantuan bibit ternak kambing PE	Permasalahan lemahnya usaha produktif anggota Pokmas Kojur Makmur Sejahtera menghambat kemandirian ekonomi desa, sehingga bantuan bibit kambing PE sejalan dengan penguatan peternakan rakyat, swasembada pangan, dan peningkatan pendapatan lokal.	Pokmas Kojur Makmur Sejahtera, Desa Gemaharjo, Kecamatan Watulimo, Kab. Trenggalek	20	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
134	SUKARDI	Bantuan bibit ternak kambing PE	Permasalahan minimnya aset ternak produktif Kelompok Ternak Damar Wulan melemahkan ekonomi anggota, sehingga bantuan bibit kambing PE mendukung penguatan peternakan rakyat, swasembada pangan, dan peningkatan pendapatan desa.	Kelompok Ternak Damar Wulan, Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kab. Trenggalek	50	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
135	SUKARDI	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Permasalahan ruas Jalan 35-3-122 Ngadimulyo–Besuki di RT.04 RW.01 yang rusak berat mengganggu mobilitas dan membahayakan warga, sehingga pavingisasi mendukung konektivitas, keselamatan, dan prioritas perbaikan infrastruktur jalan Trenggalek.	Ruas Jalan 35-3-122 Ngadimulyo - Besuki RT.04, RW.01 Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak , Kab. Trenggalek	200	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
136	SUKARDI	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Permasalahan jalan kabupaten Desa Ngembel yang rusak mengganggu mobilitas warga, sehingga pavingisasi mendukung pemerataan infrastruktur, peningkatan konektivitas desa, dan kualitas permukiman sesuai misi Kota Atraktif Trenggalek.	Ruas Jalan 35-3-174 Ruas Jajar-Ngembel , Desa Ngembel, Kecamatan Watulimo, Kab. Trenggalek	1200	m2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
137	SUKARDI	Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD/Sederajat	Permasalahan halaman tanah KB ARRAHMAN yang becek saat hujan mengganggu kenyamanan dan keamanan belajar anak, sehingga pavingisasi 700 m² mendukung lingkungan belajar sehat dan layak sesuai peningkatan mutu sarpras pendidikan.	KB ARRAHMAN RT. 25/RW. 04, Desa/Kelurahan Tasikmadu, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN
138	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	JALAN RUSAK BERAT	RT 17 DAN RT 16 DUSUN KRAPYAK DESA BOTOPUTIH KECAMATAN BENDUNGAN, Kab. Trenggalek	1500	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
139	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	JALAN MENUJU LOKASI PERTANIAN SULIT DIJANGKAU OLEH KENDARAAN TERUTAMA KETIKA MUSIM HUJAN,HAL INI MEJADI KENDALA BAGI PETANI SAAT MENGANGKUT PUPUK DAN HASIL PANEN	RT 04 RW 02 DUSUN JAMBE DESA BOTOPUTIH KEC. BENDUNGAN, Kab. Trenggalek	350	M2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
140	GUNAWAN, S.T	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan terlalu menanjak dan curam, kanan kiri tebing sehingga akan dilakukan penurunan/pengerukan jalan supaya tidak membahayakan pengendara saat melintasi jalan alternatif tersebut	Ruas Jalan Desa Sukorejo - Desa Pucanganak, Desa Jambu, Kecamatan Tugu, RT. 016 RW. 006 dengan rincian Panjang = 300 meter dan Lebar = 3,5 meter (Paving), Kab. Trenggalek	300	meter'	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
141	GUNAWAN, S.T	Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Sebagian besar jalan menuju lahan pertanian di Desa Karangsoko masih berupa tanah. Pada musim hujan, jalan menjadi becek dan licin sehingga sulit dilalui kendaraan pengangkut hasil pertanian. Kondisi ini menghambat mobilitas petani dalam mengelola lahan serta distribusi sarana produksi pertanian.	Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek, Dusun Sukobanteng RT. 012 RW. 003 dengan rincian Panjang = 250 meter dan Lebar = 2,5 meter (Paving), Kab. Trenggalek	250	M	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
142	GUNAWAN, S.T	Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Sebagian besar jalan menuju lahan pertanian di Kelurahan Kelutan masih berupa tanah. Pada musim hujan, jalan menjadi becek dan licin sehingga sulit dilalui kendaraan pengangkut hasil pertanian. Kondisi ini menghambat mobilitas petani dalam mengelola lahan serta distribusi sarana produksi pertanian.	Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, RT. 004 RW. 002 dengan rincian Panjang = 500 meter dan Lebar = 2 meter (Paving), Kab. Trenggalek	400	M	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
143	RIRIK WAHYUMAWATI	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	1. merupakan jalur utama aktifitas warga, 2. untuk mengamankan tebing karena rawan terjadinya longsor Panjang: 100 meter; Tinggi: 2.50 meter; Lebar: 0,40 meter	Dusun Tengahan RT/RW: 10/02 Desa Ngulungwetan Kecamatan Munjungan , Kab. Trenggalek	100	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
144	GUNAWAN, S.T	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Kelurahan dan Perumahan Formal	Sebagian ruas jalan lingkungan di wilayah permukiman masih berupa tanah dan belum memiliki perkerasan yang memadai. Pada musim hujan, jalan menjadi becek dan berlumpur, sedangkan pada musim kemarau menimbulkan debu yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga.	Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, RT. 016 RW. 005 dengan rincian Panjang = 80 meter dan Lebar = 1,5 meter; RT. 021 RW. 007 dengan rincian Lokasi 1 Panjang = 120 meter dan Lebar = 2,5 meter, Lokasi 2 Panjang = 65 meter dan Lebar = 3 meter (Paving), Kab. Trenggalek	615	meter2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
145	GUNAWAN, S.T	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Kelurahan dan Perumahan Formal	Sebagian ruas jalan lingkungan di wilayah permukiman masih berupa tanah dan belum memiliki perkerasan yang memadai. Pada musim hujan, jalan menjadi becek dan berlumpur, sedangkan pada musim kemarau menimbulkan debu yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga.	Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, RT. 011 RW. 004 dengan rincian Panjang = 135 meter dan Lebar = 2,5 meter (Paving), Kab. Trenggalek	338	meter2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
146	GUNAWAN, S.T	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tidak adanya tembok penahan jalan dapat menyebabkan badan jalan mudah amblas, retak, dan mengalami penurunan kualitas. Kerusakan tersebut berdampak pada kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, baik kendaraan maupun pejalan kaki	Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu, Dusun Pacar RT. 006 RW. 002 dengan rincian Panjang = 40 meter dan Tinggi = 2 meter (TPJ), Kab. Trenggalek	40	meter'	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
147	GUNAWAN, S.T	Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD/Sederajat	Belum adanya pagar permanen membuat aset sekolah rentan terhadap tindak kriminalitas pencurian pada malam hari. Masyarakat umum atau hewan liar dapat keluar-masuk area sekolah dengan bebas, yang mengganggu konsentrasi belajar dan kebersihan lingkungan sekolah.	SD Negeri 2 Kelutan, Jl. Soekarno Hatta Gg. Apel No. 170, RT. 008 RW. 003 Dusun Gebangan, Kelurahan Kelutan, Kecamatan Trenggalek, Kab. Trenggalek	180	meter'	DINAS PENDIDIKAN
148	RIRIK WAHYUMAWATI	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	1. jalan masih bebatuan (makadam), 2. jalan berlumpur dan berlubang mengganggu aktifitas warga Panjang: 200 meter; Lebar: 2,50 meter	Dusun pagergunung, RT/RW: 10/02 Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan , Kab. Trenggalek	500	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
149	RIRIK WAHYUMAWATI	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	1. jalan beton sudah rusak dan berlubang, 2. terjadi genangan air di saat hujan mengganggu aktifitas warga Panjang: 500 meter; Lebar: 3 meter	Dusun Ngrampal, RT/RW: 27/04 Desa Bangun Kecamatan Munjungan , Kab. Trenggalek	1500	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
150	RIRIK WAHYUMAWATI	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	1. jalan masih bebatuan, 2. jalan berlumpur dan berlubang sehingga mengganggu pengguna jalan Panjang: 250 m; Lebar: 2,50 m	Dusun Ngondo RT/RW:01 dan 14/ 01 Desa Sobo Kecamatan Munjungan , Kab. Trenggalek	625	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
151	RIRIK WAHYUMAWATI	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	1. jalan masih dalam kondisi tanah, 2. jalan ketika turun hujan berlumpur dan becek, 3. Merupakan akses utama jalan Dusun Panjang: 250 m; Lebar: 2,50 m	Dusun Kajang RT: 32,33 RW:07 Desa Masaran Kecamatan Munjungan , Kab. Trenggalek	625	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
152	SUGIANTO	Bantuan Alat Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan Ekonomi	Saat ini sudah ada pengrajin reyeng kelompok masyarakat (Pokmas Guyup Lestari)yang mana dalam membuat reyeng bambu secara manual untuk mengalami kendala di alat pendukung, sehingga sangat diperlukan bantuan alat serut bambu tersebut.	Desa Ngrayung Dusun Plagen RT.001 RW.001 Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	10	Paket	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
153	DIYAN ARIFIN	Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Permasalahan irigasi RT 13 RW 6 Dusun Sumber Desa Ngulanwetan Pogalan yang terbatas menghambat produktivitas lahan tani, sehingga JITUT 60/50 mendukung swasembada pangan, hilirisasi pertanian, dan misi ekonomi inklusif Trenggalek.	RT 13 RW 6 Dusun Sumber, Desa Ngulanwetan , Kecamatan Pogalan, Kab. Trenggalek	250	M1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
154	DIYAN ARIFIN	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Permasalahan drainase ruas jalan 35-3-205 Ngadirenggo yang buruk menyebabkan genangan banjir, sehingga pembangunan saluran 40/50 panjang 400 m mendukung infrastruktur dasar berkualitas, pengendalian banjir, dan misi Kota Atraktif Trenggalek.	Ruas Jalan 35-3-205 Kelutan - Ngadirenggo, Desa Ngadirenggo, Kecamatan Pogalan, Kab. Trenggalek	400	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
155	DIYAN ARIFIN	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Permasalahan drainase Desa Bendorejo Pogalan yang buruk menyebabkan genangan banjir, sehingga pembangunan saluran 40/40 sepanjang 75m mendukung infrastruktur dasar berkualitas, pengendalian banjir, dan misi Kota Atraktif Trenggalek.	Ruas Jalan 35-3-287 Gembleb - Kedunglurah, Desa Bendorejo, Kecamatan Pogalan, Kab. Trenggalek	75	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
156	DIYAN ARIFIN	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Permasalahan longsor tebing ruas jalan 35-3-298 Duwet Melis Desa Wonocoyo Pogalan mengancam keselamatan warga, sehingga TPJ 300m mendukung ketahanan infrastruktur, mitigasi bencana, dan misi Kota Atraktif Trenggalek.	Ruas Jalan 35-3-298 Duwet Melis, Desa Wonocoyo, Kecamatan Pogalan, Kab. Trenggalek	300	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
157	DIYAN ARIFIN	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 32 RW 13 dan RT 27 RW 12 Dusun Tenggong belum layak dan mengganggu kualitas permukiman, sehingga pavingisasi PSU meningkatkan akses dasar, keselamatan warga, dan kenyamanan lingkungan desa.	RT 32 RW 13 dan RT 27 RW 12 Dusun Tenggong , Bendorejo, Pogalan, Kab. Trenggalek	549	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
158	GUNAWAN, S.T	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Kelurahan dan Perumahan Formal	Sebagian ruas jalan lingkungan di wilayah permukiman masih berupa tanah dan belum memiliki perkerasan yang memadai. Pada musim hujan, jalan menjadi becek dan berlumpur, sedangkan pada musim kemarau menimbulkan debu yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga.	Kelurahan Sumbergedong, Kecamatan Trenggalek, Lokasi 1 : RT. 004 RW. 002 dengan rincian Panjang = 105 meter dan Lebar = 2 meter, Lokasi 2 : RT. 005 RW. 002 dengan rincian Panjang = 100 meter dan Lebar = 1,5 meter (Paving), Kab. Trenggalek	360	meter2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
159	GUNARYANTO, S.Pd., M.Agr	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan Masih tanah dan bebatuan saat hujan jalan licin membahayakan pengendara motor yang lewat	Rt 32/07 Dsn Kajang Desa Masaran Kec Munjungan, Kab. Trenggalek	550	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
160	DIYAN ARIFIN	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 18 RW 8 Dusun Wadi yang belum layak mengganggu kualitas permukiman, sehingga pavingisasi meningkatkan akses dasar, keselamatan warga, dan kenyamanan lingkungan desa.	RT.18 RW 8 Dusun Wadi, Ngadirenggo, Pogalan, Kab. Trenggalek	450	m2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
161	DIYAN ARIFIN	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 27 RW 8 Dusun Gambang yang belum layak mengganggu akses dan kualitas permukiman, sehingga pavingisasi PL 300x3,5 m meningkatkan layanan dasar, keselamatan warga, dan kenyamanan lingkungan desa.	RT.27 RW 8 Dusun Gambang, Ngadirejo, Pogalan, Kab. Trenggalek	1050	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
162	DIYAN ARIFIN	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 28 RW 8 Dusun Tawing yang belum layak mengganggu akses dan kualitas permukiman, sehingga pavingisasi PL 270x2,5 m meningkatkan layanan dasar, keselamatan warga, dan kenyamanan lingkungan desa.	RT.28 RW 8 Dusun Tawing, Ngadisuko, Durenan, Kab. Trenggalek	675	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
163	DIYAN ARIFIN	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 23 Kamulan yang belum layak mengganggu akses dan kualitas permukiman, sehingga pavingisasi PL 186x3,5 m meningkatkan layanan dasar, keselamatan warga, dan kenyamanan lingkungan desa.	RT.23 Kamulan, Durenan, Kab. Trenggalek	651	m2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
164	GUNAWAN, S.T	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Jaringan irigasi yang rusak mengakibatkan volume air berkurang/hilang, hal tersebut mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan air di petani sehingga terjadi kekurangan air pada tanaman.	Kelurahan Surondakan, Kecamatan Trenggalek, Saluran Irigasi Redimenggalan DI Bagong, RT. 024 RW. 007, Kab. Trenggalek	200	meter'	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
165	GUNARYANTO, S.Pd., M.Agr	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan masih bebatuan dan perlu adanya paving jalan	Rt 07/02 Dsn Krajan Ds Masaran Kec Munjungan, Kab. Trenggalek	950	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
166	DIYAN ARIFIN	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Permasalahan longsor tebing ruas jalan kabupaten 35-3-321 Pingit-Gador RT 13 mengancam keselamatan warga, sehingga TPJ 50m+13m mendukung ketahanan infrastruktur, mitigasi bencana, dan misi Kota Atraktif Trenggalek.	Ruas Jalan Kabupaten 35-3-321: Pingit - Gador , RT.13 Gador , Durenan, Kab. Trenggalek	63	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
167	GUNAWAN, S.T	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Jaringan irigasi yang rusak mengakibatkan volume air berkurang/hilang, hal tersebut mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan air di petani sehingga terjadi kekurangan air pada tanaman.	Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Saluran irigasi DI Kedungmoro, Dusun Sooko RT. 044 RW. 009, Kab. Trenggalek	200	meter'	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
168	DIYAN ARIFIN	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 5 Malasan yang belum layak mengganggu akses dan kualitas permukiman, sehingga pavingisasi PSU 200x2,5m meningkatkan layanan dasar, keselamatan warga, dan kenyamanan lingkungan desa.	RT.5 Malasan, Durenan, Kab. Trenggalek	500	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
169	DIYAN ARIFIN	Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Permasalahan irigasi RT 19 Desa Karanganom Durenan yang kurang memadai, endapan lumpur tinggi, longsor beberapa titik menghambat produktivitas lahan tani, sehingga JITUT 70/50 sepanjang 300 meter mendukung swasembada pangan, hilirisasi pertanian, dan misi ekonomi inklusif Trenggalek.	RT 19 Desa Karanganom, Kecamatan Durenan , Kab. Trenggalek	300	M1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
170	DIYAN ARIFIN	Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Permasalahan jalan usaha tani RT.14 RW.3 Dusun Talok, Pandean yang rusak menghambat akses petani, sehingga pavingisasi 156m x 1,75m mendukung produktivitas pertanian, swasembada pangan, dan program strategis RPJMD Trenggalek 2025-2026.	RT.14 RW.3 Dusun Talok, Pandean , Durenan, Kab. Trenggalek	156	M	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
171	DIYAN ARIFIN	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Permasalahan drainase ruas jalan 35-3-328 Kendalrejo-Jembatan Ngandu yang buruk menyebabkan genangan banjir, sehingga pembangunan 220m mendukung infrastruktur aman, kenyamanan warga, dan program strategis RPJMD Trenggalek 2025-2026.	Ruas jalan 35-3-328 Kendalrejo - Jembatan Ngrandu, Kendalrejo, Durenan, Kab. Trenggalek	220	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
172	Hj. ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Jika hujan air dari pegunungan mengalir dan merusak ke badan jalan, menggenang di badan jalan disertai pasir dan lumpur tertinggal di badan jalan mengakibatkan pengguna jalan terganggu	Rt 13-11 Desa Ngares Kec Trenggalek, Kab. Trenggalek	200	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
173	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Kapasitas saluran irigasi pada lahan usaha tani Kelompok Tani SIDO MEKAR II di Desa Jati masih terbatas dan belum mampu mendukung distribusi air secara optimal, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas pertanian dan penguatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dengan volume ±500 meter (P 500 m × L 1 m × T 1,2 m) guna mendukung ketahanan pangan & pembangunan infrastruktur pertanian yang berkelanjutan.	RT 10 RW 03 DUSUN JATI DESA JATI KEC. KARANGAN, Kab. Trenggalek	510	M1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
174	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Terdapat degradasi tanah pada Ruas Jalan Kabupaten Ngumplengan-Mlinjon (nomor 110) yang mengancam stabilitas badan jalan dan keselamatan pengguna. Pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ) menjadi penting untuk memitigasi risiko kerusakan infrastruktur guna mendukung visi pembangunan publik yang berkelanjutan, dengan Volume ± 189 Meter.	RT 27 RW 05 DUSUN NGEGONG DESA JATIPRAHU KEC. KARANGAN, Kab. Trenggalek	189	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
175	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Terdapat degradasi tanah pada Ruas Jalan Kabupaten Kartikaruh (nomor 101) yang mengancam stabilitas badan jalan dan keselamatan pengguna. Pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ) menjadi penting untuk memitigasi risiko kerusakan infrastruktur guna mendukung visi pembangunan publik yang berkelanjutan, dengan Volume ± 133 Meter.	RT 01 RW 01 DESA KAYEN KEC. KARANGAN, Kab. Trenggalek	133	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
176	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Terdapat degradasi tanah pada Ruas Jalan Kabupaten (Pinggirsari - Kedungsigit, nomor 098) yang mengancam stabilitas badan jalan dan keselamatan pengguna. Pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ) menjadi penting untuk memitigasi risiko kerusakan infrastruktur guna mendukung visi pembangunan publik yang berkelanjutan, dengan Volume ± 156 Meter.	RT 21 RW 04 DESA KEDUNGSIGIT KEC. KARANGAN, Kab. Trenggalek	156	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
177	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Kapasitas saluran irigasi pada lahan usaha tani Kelompok Tani MAKMUR di Desa Kerjo masih terbatas dan belum mampu mendukung distribusi air secara optimal, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas pertanian dan penguatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dengan volume ±200 meter (P 200 m × L 0,5 m × T 0,70 m) guna mendukung ketahanan pangan & pembangunan infrastruktur pertanian yang berkelanjutan.	RT 13 RW 02 DUSUN KRAJAN DESA KERJO KEC. KARANGAN, Kab. Trenggalek	200	M3	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
178	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Kapasitas saluran irigasi pada lahan usaha tani Kelompok Tani MAWAR MELATI di Desa Sumberingin masih terbatas dan belum mampu mendukung distribusi air secara optimal, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas pertanian dan penguatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dengan volume ±235 meter (P 235 m × L 0,5 m × T 0,70 m) guna mendukung ketahanan pangan & pembangunan infrastruktur pertanian yang berkelanjutan.	Dusun Cangkring Desa Sumberingin Kec. Karangan, Kab. Trenggalek	187	M3	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
179	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Belum tersedianya Bangunan Pelengkap Jalan berupa Tembok Penahan Tebing pada Ruas Jalan Kabupaten; Ngumplengan - Mlinjon (No. 110) di sekitar Sungai Jembatan Lambang kuning mengakibatkan ketidakstabilan tebing akibat erosi sungai, sehingga meningkatkan potensi longsor dan mengganggu fungsi serta keselamatan pengguna jalan, Untuk menjaga stabilitas tebing dan keberlanjutan fungsi jalan, diperlukan pembangunan Tembok Penahan Tebing dengan Volume ± 122 meter.	RT 47 RW 03 DESA MLINJON KEC. SURUH, Kab. Trenggalek	122	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
180	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Terdapat degradasi tanah pada Ruas Jalan (Sukowetan - Mlinjon, nomor 094) yang mengancam stabilitas badan jalan dan keselamatan pengguna. Pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ) menjadi penting untuk memitigasi risiko kerusakan infrastruktur guna mendukung visi pembangunan publik yang berkelanjutan, dengan Volume ± 156 Meter.	RT 05-06 RW 02 DUSUN SOHO DESA MLINJON KEC. SURUH, Kab. Trenggalek	156	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
181	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Terdapat degradasi tanah pada Ruas Jalan (Kartikaruh, nomor 101) yang mengancam stabilitas badan jalan dan keselamatan pengguna. Pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ) menjadi penting untuk memitigasi risiko kerusakan infrastruktur guna mendukung visi pembangunan publik yang berkelanjutan, dengan Volume ± 161 Meter.	RT 09 RW 04 DESA SURUH KEC. SURUH, Kab. Trenggalek	161	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
182	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan lingkungan di Rt.09 Rw.04 Dsn.Ngegong Jatiprahu saat ini masih rabat 2 sisi sehingga permukaan tidak rata, selah sambungan dan perbedaan ketinggian dengan bahu jalan dapat membahayakan pengendara, maka perlu dilakukan pavingisasi supaya masalah teratasi, Namun karena alokasi dana kurang memadai maka pemerintah desa Jatiprahu sepakat untuk mengajukan bantuan ke Bupati Trenggalek	Rt.09 Rw.04 Dsn.Ngegong Ds.Jatiprahu Kec.Karangan, Kab. Trenggalek	1050	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
183	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan di lingkungan Rt.01 Rt.03 Dsn.jampi Ds.Ngentrong sudah tidak memadai dan membuat pengguna jalan kurang nyaman. Karena itu perlu diperbaiki, namun karena keterbatasan biaya maka pemerintah ds.ngentrong sepakat untuk mengajukan bantuan perbaikan jalan	Rt.01 - Rt.03 Dsn.Jampi Ds.Ngentrong Kec. Karangan, Kab. Trenggalek	750	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
184	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan di lingkungan Dsn.Tamtu Ds.Sukowetan masih berupa jalan tanah yang susah dilewati ketika hujan. Maka perlu peningkatan jalan supaya masyarakat nyaman. Namun karena keterbatasan biaya maka pemerintah desa sepakat mengajukan bantuan untuk pavingisasi jalan	Rt.27 Rw.12 Dsn.Tamtu Ds.Sukowetan Kec.Karangan, Kab. Trenggalek	650	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
185	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan di lingkungan Rt.20 Dusun Soho Desa Mlinjon sudah mulai rusak dan ada yang belum di paving. Masyarakat desa menginginkan peningkatan sarana prasarana menjadi lebih baik. Namun besarnya biaya dan volume tidak sebanding dengan keuangan desa maka pemerintah desa sepakat mengajukan bantuan	Rt.20 Rw.04 Dsn.Soho Ds.Mlinjon Kec.Suruh, Kab. Trenggalek	390	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
186	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Ruas Jalan Belum Dilengkapi dengan Tembok Penahan Jalan sehingga berpotensi terjadi longsor saat hujan, warga mengusulkan adanya TPJ untuk menghindari terjadinya longsor sekaligus memberi jaminan aman kepada warga , P : 150m x L : 2m x T : 2 M	Jl. Karangtengah - Depok Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	150	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
187	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Ruas Jalan Utama Belum Dilengkapi dengan Tembok Penahan Jalan Sehingga Rawan Longsor, P= 2 m dan t = 60 m	Jl. Kertosono - Banteng Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	200	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
188	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	saat hujan, warga mengusulkan adanya TPJ untuk menghindari terjadinya longsor sekaligus memberi jaminan aman kepada warga dengan ukuran P = 2,5 m dan t = 80 m	Jl. Besuki - Karangtengah Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	80	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
189	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	saat hujan, warga mengusulkan adanya TPJ untuk menghindari terjadinya longsor sekaligus memberi jaminan aman kepada warga , dengan ukuran P = 1,5 m dan t = 110 m	Jl. Banjar - Ngrambingan Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	110	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
190	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Jalan belum dilengkapi TPJ sehingga rawan longsor dimusim hujan, ukuran P = 2,5 m dan t = 90 m	Jl. Kertosono - Depok Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	90	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
191	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Jalan yang dilalui warga belum dilengkapi dengan tembok penahan jalan, dengan ukuran P = 1,5 m dan t = 150 m	Jl. Karangtengah - Klepu Kecamatan Panggul, Kab. Trenggalek	150	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
192	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Ruas Jalan Yang di lalui warga rusak berat sulit diakses	Jl. Sukorejo - Pantai Joketro Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	300	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
193	DR. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, S.H., M.H., C.L.A	Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Akses jalan yang ada masih berupa jalan tanah yang sempit dan becek saat musim hujan. Potensi pertanian terkendala oleh minimnya infrastuktur jalan menuju area persawahan/perkebunan sehingga biaya angkut hasil panen menjadi tinggi dan alat mesin pertanian sulit masuk ke lokasi lahan.	Dusun Bendo RT 12 Wilayah Kelompok Tani TRUBUS MANDIRI, Kab. Trenggalek	326	M2	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
194	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Tanpa PJU dimalam hari jalan ini gelap gulita, sehingga cukup menganggu aktivitas warga yg melintas, warga sekitar mengusulkan adanya PJU untuk menerangi jalan di malam hari sehingga merasa aman saat beraktivitas di malam hari. NOMOR IDPL : 45103746702	Konang dusun Sukerejo Desa Nglebeng Kecamatan Panggul, Kab. Trenggalek	10	Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
195	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Tanpa PJU dimalam hari jalan ini gelap gulita, sehingga cukup menganggu aktivitas warga yg melintas, warga sekitar mengusulkan adanya PJU untuk menerangi jalan di malam hari sehingga merasa aman saat beraktivitas di malam hari	RT 23-24 Dusun Warakan Desa Depok Kecamatan Panggul, Kab. Trenggalek	30	Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
196	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Tanpa PJU dimalam hari jalan ini gelap gulita, sehingga cukup menganggu aktivitas warga yg melintas, warga sekitar mengusulkan adanya PJU untuk menerangi jalan di malam hari sehingga merasa aman saat beraktivitas di malam hari	RT 16 RW 8 Dusun Pager Desa Sawahan Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	40	Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
197	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Tanpa PJU dimalam hari jalan ini gelap gulita, sehingga cukup menganggu aktivitas warga yg melintas, warga sekitar mengusulkan adanya PJU untuk menerangi jalan di malam hari sehingga merasa aman saat beraktivitas di malam hari	Dusun Ngadisari Desa Nglebeng Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	30	Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
198	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Tanpa PJU dimalam hari jalan ini gelap gulita, sehingga cukup menganggu aktivitas warga yg melintas, warga sekitar mengusulkan adanya PJU untuk menerangi jalan di malam hari sehingga merasa aman saat beraktivitas di malam hari	RT 20 Dusun Krajan Desa Ngrambingan Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	40	Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
199	H. MUGIANTO, S.Pd., M.H.	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Jalan gelap dimalam hari karena tidak ada penerangan sama sekali sehingga membuat warga berbahaya beraktifitas di malam hari warga mengusulkan untuk adanya PJU sehingga aktivitas di malam hari tidak terganggu	Dusun Banaran Desa Terbis Kec. Panggul, Kab. Trenggalek	10	Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
200	IQMAL EABY MUGY MAHAWIDYA, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan masih tanah berbahaya untuk aktivitas warga saat hujan, warga mengusulkan untuk di paving demi keamanan dan kenyamanan warga	RT 39 RW 07 Dsn. Crabak Desa Sumberbening Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	1000	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
201	IQMAL EABY MUGY MAHAWIDYA, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan yang sudah ada rawan longsor karena tidak ada TPJ untuk, mencegah hal tersebut warga mengusulkan TPJ untuk pencegahan	Dsn Bonsari Desa Pandean Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	50	M	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
202	IQMAL EABY MUGY MAHAWIDYA, S.H	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Lampu jalan belum standart sehingga malam hari, lampu yg tersedia masih terasa gelap, untuk itu warga mengusulkan standarisasi lampu jalan Agara aktivitas malam hari aman dan nyaman nomor IDPEL : 515432004057	RT 47 Dusun Juron Desa Cakul Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
203	IQMAL EABY MUGY MAHAWIDYA, S.H	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Jalan belum memiliki PJU sehingga aktivitas malam hari warga terganggu, sehingga warga mengusulkan PJU untuk membuat aktivitas malam mereka aman	Rt 02 Rw 01 Dsn. Bangunsari Desa Bangun Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek	40	Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
204	IQMAL EABY MUGY MAHAWIDYA, S.H	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Penerangan Jalan Umum yang Dilalui Warga Belum sesuai Standar Masih Menggunakan Lampu Gantung dan tidak merata sepanjang jalan, sehingga pencahayaan masih kurang, untuk itu warga mengusulkan standarisasi PJU dengan nomor IDPEL : 50906027847	Dusun Ngalaran Desa Cakul Kecamatan Dongko, Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
205	IQMAL EABY MUGY MAHAWIDYA, S.H	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Drainase jalan belum ada sehingga hujan selalu membuat jalan menjadi tergenang dan membuat aktivitas warga terganggu, warga mengusul pembuatan drainase	Ruas Jln. Ngulungwetan - Ngulungkulon Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek	400	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
206	IQMAL EABY MUGY MAHAWIDYA, S.H	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Lampu yang tersedia masih jauh dari standar, beberapa titik masih gelap dan menganggu aktivitas warga di malam hari, warga mengusulkan untuk standarisasi lampu jalan	Dsn. Klandri Desa Cakul Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
207	SUGIANTO	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai (Talud, Bronjong)	Pada saat hujan air sering meluap ke jalan dan ke permukiman warga maka perlu adanya peningkatan talud bangunan pasangan batu.	Dusun Kedegan RT 13 RW. 14 Desa Wonoanti Kecamatan Gandusari , Kab. Trenggalek	200	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
208	JOKO HADI SISWANTO, S.T.	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Drainase jalan sudah rusak sehingga air meluap ke jalan dan membahayakan pengguna jalan	Jalan Tumpuk-Pule, Desa Tumpuk Kec. Tugu, Kab. Trenggalek	500	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
209	BINA ROHMAWATI	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Penerangan di kawasan RT 15 RW 5 Desa Bulu agung Karangan masih sangat minim sehingga perlu adanya PJU tenaga surya	RT 15 RW 5 Dusun Buret, Desa Buluagung Kecamatan Karangan Trenggalek , Kab. Trenggalek	10	Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
210	BINA ROHMAWATI	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Lampu penerang jalan masih sangat jarang di kawasan RT 16 RW 6 Desa Bulu agung Karangan, perlu penambahan PJU untuk keamanan aktivitas warga	RT 16 RW 6 Dusun Buret Desa Buluagung Kecamatan Karangan, Kab. Trenggalek	20	Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
211	BINA ROHMAWATI	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Penerangan di Kawasan RT 17 RW 6 Dusun Buret Desa Buluagung masih sangat kurang,sehingga perlu adanya PJU, agar aktivitas warga di malah hari lebih aman	RT 17 RW 6 Dusun Buret Desa Buluagung Kecamatan Karangan , Kab. Trenggalek	20	Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
212	BINA ROHMAWATI	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Trafficlight, Flashinglight dan Pelican Crossing)	Belum adanya pemberi isyarat lalu lintas membuat resiko kecelakaan di kawasan pustu wonoati, dengan pemberian alat pemberi isyarat lali lintas membuat masyarakat lebih aman dalam beraktifitas	RT 006/RW 002, Dusun Wonoanti, Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari, Kab. Trenggalek	1	Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
213	H. SAMSUL ANAM, S.H., M.M., M.Hum.	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Rusaknya badan jalan akibat genangan air karena tidak adanya Drainase Jalan (Saluran Air) sebagai pengaman badan jalan sehingga tidak mendukung progam visi misi RPJMD Trenggalek 2025 -2029 untuk itu perlu dibangun Drainase Jalan (Saluran Air) yang berada di Ruas Jalan Kabupaten pada ruas Sumbergayam - Semarum RT 01 RW 01 Desa Semarum Kecamatan Durenan dengan Volume 200m	RT 01 RW 01 Desa Semarum Kecamatan Durenan, Kab. Trenggalek	200	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
214	MURKAM, S.T	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Belum ada Tembok Penahan jalan atau tebing sementara tebing longsor/ambrol yang mengakibatkan rusaknya badan jalan disekitarnya untuk itu perlu di bangun Bangunan Pelengkap Jalan berupa Tembok Penahan Jalan atau Tebing untuk melindungi ancaman longsor dan rusaknya bangunan disekitarnya (jembatan) yang berada di Ruas Jalan Kabupaten pada Ruas Pakel-Sebo di RT 20 Desa Pakel Kecamatan Watulimo dengan volume Panjang 50m dan Tinggi 2,5m	Ruas Jalan Pakel-Sebo RT 20 Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	50	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
215	MURKAM, S.T	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Kondisi jalan lingkungan belum ada penerangan jalan yang mengakibatkan rawan kecelakaan di malam hari, sehingga perlu dipasang penerangan jalan umum pada jalan lingkungan RT 12 RW 03 Dusun Krajan Desa Dukuh Kecamatan Watulimo sepanjang 1500m	RT 12 RW 03 Dusun Krajan Desa Dukuh Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
216	DR. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, S.H., M.H., C.L.A	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Jalan di ruas 316 widoyoko - sendang kamulyan, belum tersedianya saluran drainase sehingga pada saat hujan terus menerus menyebabkan adanya genangan air yang hingga menimbulkan banjir. Maka perlu adanya saluran drainase supaya berfungsi menyalurkan air hujan agar tidak menggenang di jalan, permukiman, dan lahan pertanian.	RT.006 RW.002 Dusun Guyang Gajah, Desa Kamulan, Durenan. Ruas 316 widoyoko - sendang kamulyan, Kab. Trenggalek	300	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
217	DODING RAHMADI, S.T., M.H	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Di lingkungan Rt.25 Rw.06 dusun Cetok Karangan masih minim penerangan. Demi kenyamanan dan keselamatan aktivitas warga terutama pada malam hari maka pemerintah desa karangan bersepakat mengajukan Bantuan Penerangan Jalan untuk lingkungan Rt.25 Ds.Jati	Rt.25 Rw.06 Dsn.Cetok Ds.Karangan Kec.Karangan, Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
218	DR. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, S.H., M.H., C.L.A	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Saat ini ruas jalan di Dusun Kranding RT 41 sepanjang 243 meter massih berupa tanah/makadam yang kondisinya memprihatinkan. Pada musim hujan jalan menjadi becek dan berlumpur, pada musim kemarau menjadi sangat berdebu. Hal ini sangat mengganggu kenyamanan dan membahayakan keselamatan warga.	Dusun Kranding RT 41 RW 17 Bendorejo, Pogalan , Kab. Trenggalek	729	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
219	DR. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, S.H., M.H., C.L.A	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Akibat cuaca panas tinggi dan hujan terus menerus menyebabkan pemuaian hingga penyusutan yang memicu retakan pada jalan, sehingga akses di sekitar jalan tersebut menjadi terganggu.	Desa Semarum, Kecamatan Durenan, Kab. Trenggalek	500	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
220	DR. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, S.H., M.H., C.L.A	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Perlu adanya penambahan pemasangan tiang listrik untuk pemasangan lampu jalan demi keselamatan dan keamanan lingkungan. Listrik memadai dibutuhkan untuk usaha, pendidikan, layanan kesehatan, dan aktivitas masyarakat.	RT 01 RW 01 Dusun Karangnongko, Kamulan, Durenan, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
221	MURKAM, S.T	Bantuan bibit ternak kambing PE	Mayoritas penduduk/ kelompok tani mayoritas miskin yang bermata pencaharian sebagai petani/peternak dengan kepemilikan ternak yang sangat minim, untuk meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan serta memberdayakan petani/kelompok tani diperlukan bantuan bibit ternak kambing PE kepada Kelompok Tani "Sumber Tani" di RT 10 RW 03 Dusun Ampelgading Desa Ngembel Kecamatan Watulimo	Kelompok Tani "Sumber Tani" RT 10 RW 03 Dusun Ampelgading Desa Ngembel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	32	Ekor	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
222	WAHYUDI ANTO, S.E	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga perlu diperbaiki/paving agar memperlancar transportasi dan perekonomian masyarakat	RT. 07 Dusun Krajan Desa Watuagung Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	625	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
223	WAHYUDI ANTO, S.E	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga perlu diperbaiki/dipaving untuk memperlancar aktivitas dan perekonomian masyarakat	RT. 13-RT. 17 Dusun Ngleban Desa Watuagung Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	837,5	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
224	WAHYUDI ANTO, S.E	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga perlu diperbaiki/dipaving untuk memperlancar aktivitas dan perekonomian masyarakat	RT. 14-RW.15 Desa Ngleban Desa Watuagung Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	1125	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
225	WAHYUDI ANTO, S.E	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga perlu diperbaiki/dipaving untuk memperlancar aktivitas dan perekonomian masyarakat	RT. 21 Dusun Ngleban Desa Watuagung Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	625	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
226	WAHYUDI ANTO, S.E	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga perlu diperbaiki/dipaving untuk memperlancar aktivitas dan perekonomian masyarakat	RT. 38 RW. 15 Dusun Sambi Desa Pandean Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	475	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
227	WAHYUDI ANTO, S.E	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga perlu diperbaiki/dipaving untuk memperlancar aktivitas dan perekonomian masyarakat	RT. 05 RW. 02 Dusun Jogadi Desa Pandean Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	750	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
228	WAHYUDI ANTO, S.E	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga perlu diperbaiki/dipaving untuk memperlancar aktivitas dan perekonomian masyarakat	RT. 15 dan RT. 16 RW. 06 Dusun Krajan Desa Pandean Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	625	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
229	WAHYUDI ANTO, S.E	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga perlu diperbaiki/dipaving untuk memperlancar aktivitas dan perekonomian masyarakat	RT. 33 RW. 13 Dusun Sambi Desa Pandean Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	750	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
230	Hj. ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan masih tanah dan jika hujan sangat licin	RT 8 RW 4 Desa Gading Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	1200	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
231	GUNARYANTO, S.Pd., M.Agr	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan masih bebatuan dan membahayakan pengendara yang lewat	rt 54/11 Dsn Gembes Ds Masaran Kec Munjungan, Kab. Trenggalek	450	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
232	Hj. ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan masih tanah, jika hujan sangat licin dan bisa membahayakan pengguna jalan	RT 25 Dusun Kasihan desa Ngepeh Kec. Tugu, Kab. Trenggalek	700	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
233	GUNARYANTO, S.Pd., M.Agr	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan rusak dan banyak bebatuan kecil sehingga membahayakan pengendara motor yang lewat	rt 45 dan rt 46 dsn gunung kembar Ds Tawing kec Munjungan, Kab. Trenggalek	675	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
234	Hj. ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.	Pembangunan sistem Drainase Perkotaan dan peningkatan saluran drainase perkotaan (pada Kelurahan)	air mengalir pada badan jalan dan merusak badan jalan, disertai lumpur jika hujan deras	RT 19 Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek (ruas jalan 232 / hayam wuruk), Kab. Trenggalek	200	meter	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
235	Hj. ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Lokasi rawan longsor karena jalan di atas tebing, jika hujan jalan juga sangat licin yang membahayakan pengguna jalan	RT 34 Desa Sumurup Kecamatan Bendungan, Kab. Trenggalek	50	meter	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
236	GUNARYANTO, S.Pd., M.Agr	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan masih tanah dan perlu adanya perkerasan jalan	Rt 14/03 ds bendoroto kec munjungan, Kab. Trenggalek	2100	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
237	WAHYUDI ANTO, S.E	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga perlu diperbaiki.dipaving agar memperlancar aktivitas dan perekonomian masyarakat	RT. 43 RW. 16 Dusun Sambi Desa Pandean Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	600	m2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
238	WAHYUDI ANTO, S.E	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga perlu diperbaiki.dipaving agar memperlancar aktivitas dan perekonomian masyarakat	RT. 49 RW. 18 Dusun Talun Desa Pandean Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	480	m2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
239	WAHYUDI ANTO, S.E	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga perlu diperbaiki.dipaving agar memperlancar aktivitas dan perekonomian masyarakat	RT. 42 RW. 16 Dusun Sambi Desa Pandean Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	500	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
240	WAHYUDI ANTO, S.E	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga perlu diperbaiki.dipaving agar memperlancar aktivitas dan perekonomian masyarakat	RT. 024 RW. 09 Dusun Bonsari Desa Pandean Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	500	m2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
241	WAHYUDI ANTO, S.E	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga perlu diperbaiki.dipaving agar memperlancar aktivitas dan perekonomian masyarakat	RT.039 RW. 15 Dusun Sambi Desa Pandean Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	500	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
242	Hj. ARIK SRI WAHYUNI, S.E., M.M.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Badan jalan rawan longsor	RT 02 RW 01 Desa Gading Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	100	meter	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
243	WAHYUDI ANTO, S.E	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga perlu diperbaiki.dipaving agar memperlancar aktivitas dan perekonomian masyarakat	RT. 045 RW. 17 Dusun Talun Desa Pandean Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	1000	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
244	MURKAM, S.T	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Belum ada Tembok Penahan jalan Sementara bahu jalan longsor/ambrol yang mengakibatkan rusaknya badan jalan disekitarnya untuk itu perlu di bangun Bangunan Pelengkap Jalan berupa Tembok Penahan Jalan untuk melindungi ancaman longsor dan rusaknya bangunan disekitarnya yang berada di Jalan Lingkungan RT 48 RW 15 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak dengan Panjang 80m, Tebal 0,40 meter dan Tinggi 2m	RT 48 RW 15 Dusun Pesu Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	80	Meter	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
245	WAHYUDI ANTO, S.E	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan rusak berat sehingga membahayakan pengguna jalan dan menghambat mobilitas warga	Ruas Jalan Pandean-Cakul Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	1000	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
246	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat perekonomian masyarakat	RT. 08 RW. 04 Dusun Krajan Desa Bogoran Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	160	meter	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
247	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat perekonomian masyarakat	RT.09 RW. 05 Dusun Wates dan RT. 11 RW. 11dan RT. 12 RW. 11 Dusun Karangsono Desa Sugihan Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	785	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
248	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat perekonomian masyarakat	RT. 01 RW. 01 dan RT. 02 RW. 01 Dusun Karangsono Desa Sugihan Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	565	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
249	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Jalan belum memiliki drainase jalan sehingga pada musim hujan air meluap ke jalan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan	Ruas jalan Desa Karangrejo Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	500	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
250	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Tepi jalan rawan ambrol/longsor sehingga perli diperkuat/dibangun tembok penahan jalan agar tidak membahayakan keselamatan warga	RT. 43 RW. 13 Desa Karangrejo Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	30	meter	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
251	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Infrastruktur/jalan rusak sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat perekonomian masyarakat	RT. 16 RW. 06 Desa Karangrejo Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	440	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
252	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Jalan belum semua terpasang lampu penerangan jalan umum sehingga pada malam hari gelap dan membahayakan keselamatan pengguna jalan dan rawan gangguan kamtibmas	Dusun Wates Desa Sugihan Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
253	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rawan ambles/longsor dan membahayakan keselamatan warga sehingga perlu diperkuat/dibangun tembok penahan jalan	RT. 25 RW. 07 Dusun Genuk Desa Timahan Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	50	meter	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
254	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rawan ambrol/longsor dan membahayakan keselamatan warga sehingga perlu diperkuat/dibangun tembok penahan jalan	RT. 13 RW. 02 Dusun Tanjung Desa Ngadimulyo Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	60	meter	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
255	KHOIRI, S.Pd.I	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Pada jalan tersebut belum ada tembok penahan jalan sehingga saat ini sudah mulai terkikis mendekati jalan utama. Dengan Ukuran : Panjang : 50 m Tinggi : 3 m	Rt. 28 Rw. 13 Dsn . Balang Ds. Senden Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	50	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
256	KHOIRI, S.Pd.I	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Pada musim penghujan tumpahan air dari selokan keluar ke badan jalan sehingga jalan sering rusak karena belum ada Drainase Jalan	Rt. 09 dan 10 Rw. 05 Ds. Senden Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	500	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
257	KHOIRI, S.Pd.I	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Pada jalan tersebut belum ada tembok penahan jalan sehingga saat ini sudah mulai terkikis mendekati jalan utama. Dengan Ukuran : Panjang : 66 m Tinggi : 3 m	Rt. 16 Rw. 05 Ds. Bendoagung Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	66	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
258	KHOIRI, S.Pd.I	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Pada jalan tersebut belum ada tembok penahan jalan sehingga saat ini sudah mulai terkikis mendekati jalan utama. Dengan Ukuran : Panjang : 50 m Tinggi : 3 m	Rt. 02 Rw. 01 Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	50	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
259	KHOIRI, S.Pd.I	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Pada jalan tersebut belum ada tembok penahan jalan sehingga saat ini sudah mulai terkikis mendekati jalan utama. Dengan Ukuran : Panjang : 50 m Tinggi : 3 m	Rt. 01 Rw. 01 Des. Ngadimulyo Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	50	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
260	KHOIRI, S.Pd.I	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Pada jalan tersebut belum ada tembok penahan jalan sehingga saat ini sudah mulai terkikis mendekati jalan utama. Dengan Ukuran : Panjang : 33 m Tinggi : 3 m	Rt. 05 Rw. 01 Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	40	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
261	KHOIRI, S.Pd.I	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Pada jalan tersebut belum ada tembok penahan jalan sehingga saat ini sudah mulai terkikis mendekati jalan utamaDengan Ukuran : Panjang : 40 m Tinggi : 2,5 m	Rt. 21 Rw. 10 Ds. Senden Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	40	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
262	KHOIRI, S.Pd.I	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Pada musim penghujan tumpahan air dari selokan keluar ke badan jalan sehingga jalan sering rusak karena belum ada Drainase Jalan	Rt. 03 Rw. 02 Ds. Senden Kec.Kampak, Kab. Trenggalek	200	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
263	KHOIRI, S.Pd.I	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Pada musim penghujan tumpahan air dari selokan keluar ke badan jalan sehingga jalan sering rusak karena belum ada Drainase Jalan	Rt. 07 Rw. 04 Ds. Senden Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	300	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
264	KHOIRI, S.Pd.I	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	kondisi jalan saat ini sulit dilalui warga karena rusak berat sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat dan akses menuju sarana pendidikan	Rt. 17 Rw. 08 Ds.Sugihan Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	135	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
265	JAYENG BAYU WINEDAR, S.H	Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD/Sederajat	Kondisi KB Fajar Insani setiap tahunya mengalami peningkatan dalam mendapatkan siswa untuk menimba ilmu, banyak siswa yang mengeluh karena MCK yang ada di KB Fajar Insani terlalu sedikit oleh karena itu kami membutuhkan fasilitas pembangunan MCK dengan lahan yang ada di sekitar KB Fajar Insani. Selain hal tersebut KB Fajar Insani memerlukan Pagar sebagai pembatas lingkungan sekolah.	KB Fajar Insani RT.02 RW. 01 Dusun Dawuhan Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	1	paket	DINAS PENDIDIKAN
266	JAYENG BAYU WINEDAR, S.H	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Jalan ini perupakan pembatas antar Sawah satu dan lainya dan juga merupakan jalan Kabupaten. Jika saat musim penghujan sering sekali sawah yang ada di sekitar situ selalu mengenanh sehingga tembok penahan jalan atau tebing ambrol yang mengakibatkan rusaknya badan jalan untuk itu perlu di bangun Bangunan Pelengkap Jalan berupa Tembok Penahan Jalan untuk melindungi longsor yang berada disekitar ruas jalan Ruas Jalan Raya Bendo - Krandegan	Jalan Raya Bendo - Krandegan RT.13 RW. 06 Dsn. Banaran Desa Krandegan Kec. Gandusari , Kab. Trenggalek	300	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
267	JAYENG BAYU WINEDAR, S.H	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Kondisi Ruas jalan Kabupaten yang berada di Krandegan menuju Bendorejo belum ada penerangan jalan dan jalan tersebut sangat rawan akan hal kecelakaan karena terlalu gelap oleh sebab itu perlu di pasang penerangan jalan umum pada Ruas jalan tepatnya Jalan Raya Bendo - Krandegan RT.13 RW. 06 Dsn. Banaran Desa Krandegan Kec. Gandusari	Jalan Raya Bendo - Krandegan RT.13 RW. 06 Dsn. Banaran Desa Krandegan Kec. Gandusari , Kab. Trenggalek	1	paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
268	TULAS WITLAITIK	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan masih berupa jalan tanah sehingga perlu dipaving untuk memperlancar perekonomian warga dan menjaga kontruksi jalan dari degradasi air hujan	RT. 16 RW. 06 Dusun Donosari Desa Sidomulyo Kec. Pule, Kab. Trenggalek	310	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
269	TULAS WITLAITIK	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan masih berupa jalan tanah sehingga perlu dipaving untuk memperlancar perekonomian warga dan menjaga kontruksi jalan dari degradasi air hujan	RT. 28 RW. 11 Dusun Ngepring Desa Sidomulyo Kec. Pule, Kab. Trenggalek	395	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
270	TULAS WITLAITIK	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan masih berupa jalan tanah sehingga perlu dipaving untuk memperlancar perekonomian warga dan menjaga kontruksi jalan dari degradasi air hujan	RT. 38 RW. 16 Dusun Karangrejo Desa Sidomulyo Kec. Pule, Kab. Trenggalek	290	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
271	TULAS WITLAITIK	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan masih berupa jalan tanah sehingga perlu dipaving untuk memperlancar perekonomian warga dan menjaga kontruksi jalan dari degradasi air hujan	RT. 37 RW. 16 Dusun Karangrejo Desa Sidomulyo Kec. Pule, Kab. Trenggalek	375	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
272	TULAS WITLAITIK	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan masih sudah rusak sehingga perlu dipaving untuk memperlancar perekonomian warga dan menjaga kontruksi jalan dari degradasi air hujan	RT. 06 RW. 03 Dusun Krajan Desa Sidomulyo Kec. Pule, Kab. Trenggalek	438	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
273	TULAS WITLAITIK	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak sehingga perlu dipaving untuk memperlancar perekonomian warga dan menjaga kontruksi jalan dari degradasi air hujan	RT. 36 RW. 15 Dusun Karangrejo Desa Sidomulyo Kec. Pule, Kab. Trenggalek	320	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
274	SUKARDI	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan tebing RT 6 RW 2 Desa Karangrejo Kampak rawan longsor mengancam keselamatan warga, sehingga pembangunan tembok penahan melalui PSU BK Khusus Desa mendukung stabilitas permukiman dan program strategis RPJMD Trenggalek.	RT 6 RW 2 Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak , Kab. Trenggalek	150	meter	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
275	TULAS WITLAITIK	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tepi jalan rawan ambrol/longsor dan membahayakan keselamatan warga sehingga perlu diperkuat/dibangun tembok penahan jalan	RT. 30 RW. 12 Dusun Karangrejo Desa Sidomulyo Kec. Pule, Kab. Trenggalek	25	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
276	TULAS WITLAITIK	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Tepi jalan rawan ambrol/longsor dan membahayakan keselamatan warga sehingga perlu diperkuat/dibangun tembok penahan jalan	RT. 30 RW. 12 Dusun Karangrejo Desa Sidomulyo Kec. Pule, Kab. Trenggalek	12	meter	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
277	TULAS WITLAITIK	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tepi jalan rawan ambrol/longsor dan membahayakan keselamatan warga sehingga perlu diperkuat/dibangun tembok penahan jalan	RT. 32 Dusun Karangrejo Desa Sidomulyo Kec. Pule, Kab. Trenggalek	50	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
278	TULAS WITLAITIK	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tepi jalan rawan ambrol/longsor dan membahayakan keselamatan warga sehingga perlu diperkuat/dibangun tembok penahan jalan	RT. 13 RW. 05 Dusun Donosari Desa Sidomulyo Kec. Pule, Kab. Trenggalek	25	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
279	NUR EFENDI	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Permasalahan penurunan kualitas dan kapasitas Ruas Jalan Kabupaten Karangsoko 1 menghambat konektivitas dan distribusi ekonomi, sehingga peningkatan ruas jalan mendukung misi Kota Atraktif, efisiensi logistik, dan pemerataan pembangunan wilayah.	Ruas Jalan Kabupaten 35-3-253 Karangsoko 1 , Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek , Kab. Trenggalek	400	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
280	NUR EFENDI	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Permasalahan kondisi rusak Ruas Jalan Dadaptulis-Karanggayam menghambat konektivitas wilayah dan logistik ekonomi, sehingga peningkatan mendukung strategi jaringan infrastruktur, pemerataan akses, dan misi Kota Atraktif Trenggalek.	Ruas Jalan Kabupaten 32-3-252 Dadaptulis - Karanggayam, Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek , Kab. Trenggalek	1200	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
281	NUR EFENDI	Bantuan bibit ternak kambing PE	Permasalahan keterbatasan modal usaha Kelompok ternak Damar Wulan membatasi produktivitas ternak kambing, sehingga bantuan bibit PE mendukung ekonomi kerakyatan inklusif, kemandirian desa, dan regenerasi sektor peternakan lokal.	Pokmas Damar Wulan, Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek , Kab. Trenggalek	50	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
282	NUR EFENDI	Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Permasalahan Jalan Usaha Tani Dusun Karanggayam Desa Karangsoko yang rusak menghambat akses petani ke lahan, sehingga JUT mendukung produktivitas pertanian, swasembada pangan, dan program strategis RPJMD Trenggalek .	Dusun Karanggayam Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek , Kab. Trenggalek	300	M	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
283	NUR EFENDI	Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Permasalahan Jalan Usaha Tani Desa Surenlor yang rusak menghambat distribusi hasil panen, sehingga JUT mendukung produktivitas pertanian, swasembada pangan, dan program strategis RPJMD Trenggalek 2025-2029.	RT.01 dan RT. 18 Desa Surenlor, Kecamatan Bendungan , Kab. Trenggalek	200	M	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
284	NUR EFENDI	Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Permasalahan Jalan Usaha Tani Dusun Sukorejo Desa Karangsoko yang rusak menghambat akses petani, sehingga JUT mendukung produktivitas pertanian, swasembada pangan, dan program strategis RPJMD Trenggalek.	Dusun Sukorejo, Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek , Kab. Trenggalek	150	M	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
285	NUR EFENDI	Pengadaan Mesin Pencacah Sampah	Permasalahan pengolahan sampah organik di Desa Karangsoko yang manual dan tidak efisien menghambat produksi pupuk kompos, sehingga pengadaan mesin mendukung pengelolaan lingkungan sehat, pertanian berkelanjutan, dan program strategis RPJMD Trenggalek 2025-2026.	Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek , Kab. Trenggalek	1	unit	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
286	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan rusak dan amblas sehingga membutuhkan pengerasan jalan guna mencegah kerusakan yang semakin parah	rt 06/02 desa wonokerto kec suruh, Kab. Trenggalek	330	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
287	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan rusak,retak dan amblas hingga mrmbahayakan pengguna jalan	rt 04/02 desa puru kec suruh, Kab. Trenggalek	375	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
288	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan rusak dan masih ada yang tanah saat hujan jalan licin membahayakan pengendara jalan yang lewat	rt 01/01 dsn panjen ds suruh kec suruh, Kab. Trenggalek	240	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
289	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan rusak saat hujan jalan licin membahayakan pengendara jalan yang lewat	rt 13/03 ds nglebo kec suruh, Kab. Trenggalek	585	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
290	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan rusak dan masih ada yang tanah saat hujan jalan licin membahayakan pengendara jalan yang lewat	rt 16/04 ds nglebo kec suruh, Kab. Trenggalek	579	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
291	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan rusak dan ada bebatuan kecil, saat hujan jalan licin membahayakan pengendara jalan yang lewat	rt 27/10 ds suruh kec suruh, Kab. Trenggalek	375	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
292	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan rusak dan ada bebatuan kecil, saat hujan jalan licin membahayakan pengendara jalan yang lewat	RT 11/02 Ds Wonokerto Kec Suruh, Kab. Trenggalek	330	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
293	IMAM BASUKI, S.Sos.	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai (Talud, Bronjong)	SAAT MUSIM PENGHUJAN, TEBING SUNGAI BERPOTENSI LONGSOR, SEHINGGA DIPERLUKAN BRONJONG P=100M, T=1.5M	RT. 21 RW. 03 DUSUN GARES DESA TASIKMADU KECAMATAN WATULIMO, Kab. Trenggalek	150	M2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
294	PRANOTO, S.H., M.H	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Banyaknya daerah perdesaan yang sangat kurang penerangan maka dari itu PJU sangat di butuhkan	RT 14 RW 06 DUSUN KASIHAN DESA NGRENCAK KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
295	IMAM BASUKI, S.Sos.	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Sungai (Talud, Bronjong)	SAAT MUSIM PENGHUJAN, TEBING SUNGAI BERPOTENSI LONGSOR, SEHINGGA DIPERLUKAN PLENGSENG/TALUD P=50M, T=3M	RT. 14 RW. 02 DUSUN MARGO DESA MARGOMULYO KECAMATAN WATULIMO, Kab. Trenggalek	150	M2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
296	RAHMANU ARIK BHAHTIYAR	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 17 RW 05 Desa Wonorejo Gandusari yang rusak berat menghambat akses warga, sehingga pavingisasi PSU melalui BK Khusus Desa mendukung kenyamanan permukiman, mobilitas aman, dan program strategis RPJMD Trenggalek 2025-2026.	RT 17 RW 5 Desa Wonorejo, Kecamatan Gandusari , Kab. Trenggalek	600	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
297	RAHMANU ARIK BHAHTIYAR	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 2 RW 1 Desa Wonorejo Gandusari yang rusak mengganggu akses warga, sehingga pavingisasi PSU melalui BK Khusus Desa mendukung mobilitas aman, kenyamanan permukiman, dan program strategis RPJMD Trenggalek.	RT 2 RW 1 Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari , Kab. Trenggalek	700	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
298	RAHMANU ARIK BHAHTIYAR	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 21 RW 6 Desa Wonorejo Gandusari yang rusak mengganggu akses warga, sehingga pavingisasi PSU melalui BK Khusus Desa mendukung mobilitas aman, kenyamanan permukiman, dan program strategis RPJMD Trenggalek .	RT 21 RW 6 Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari , Kab. Trenggalek	700	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
299	RAHMANU ARIK BHAHTIYAR	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 8 RW 4 Desa Ngrayung Gandusari yang rusak mengganggu akses warga, sehingga pavingisasi PSU melalui BK Khusus Desa mendukung mobilitas aman, kenyamanan permukiman, dan program strategis RPJMD Trenggalek .	RT 8 RW 4 Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari , Kab. Trenggalek	600	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
300	RAHMANU ARIK BHAHTIYAR	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 1 Dusun Plagen Desa Ngrayung Gandusari yang rusak mengganggu akses warga, sehingga pavingisasi PSU melalui BK Khusus Desa mendukung infrastruktur ramah lingkungan, konektivitas wilayah, dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek.	RT 1 Dusun Plagen, Desa Ngrayung, Kecamatan Gandusari , Kab. Trenggalek	300	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
301	JAYENG BAYU WINEDAR, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan saat ini di Dusun Ngelo Desa Sukorame tepatnya RT 16 RW 08 mengalami Kerusakan parah Karena terkikisnya waktu dan juga merupakan akses jalan yang sering dilewati warga sekitar, dimana jalan tersebut merupakan jalan utama warga sebagai akses mencari nafkah dan juga sebagai jalan untuk menimba ilmu bagi Anak - anak sekitar. Dari permasalahan itu kami perlu di Bangun perkerasan jalan (Pavingisasi) dengan Panjang 90 Meter	RT.16 RW.08 Dusun Ngelo Desa Sukorame Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek (Jalan Menuju Kemasjid dan MI), Kab. Trenggalek	270	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
302	RAHMANU ARIK BHAHTIYAR	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 18 RW 8 Dusun Krajan Desa Ngrayung Gandusari yang rusak menghambat akses warga, sehingga pavingisasi PSU melalui BK Khusus Desa mendukung infrastruktur ramah lingkungan, konektivitas wilayah, dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek .	RT 18 RW 8 Dusun Krajan Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari , Kab. Trenggalek	600	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
303	RAHMANU ARIK BHAHTIYAR	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 19 RW 9 Dusun Banaran Desa Krandekan Gandusari yang rusak parah mengganggu akses warga, sehingga pavingisasi PSU melalui BK Khusus Desa mendukung konektivitas wilayah, kenyamanan permukiman, dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek.	RT 19 RW 9 Dusun Banaran, Desa Krandekan, Kecamatan Gandusari , Kab. Trenggalek	200	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
304	RAHMANU ARIK BHAHTIYAR	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT/RW 007/004 Dusun Dawuhan Pule Desa Sukorejo Gandusari rawan banjir mengganggu akses warga, sehingga pavingisasi 200m melalui PSU BK Khusus Desa mendukung konektivitas wilayah dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek 2025-2026.	RT/RW 007/004 Dusun Dawuhan Pule Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari , Kab. Trenggalek	600	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
305	EDY PURWANTO, S.Pd. I	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan masih tanah dan banyak bebatuan saat hujan jalan licin membahayakan pengendara yang lewat	Dusun sembon desa Barang kec panggul, Kab. Trenggalek	1050	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
306	EDY PURWANTO, S.Pd. I	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan rusak dan banyak bebatuan kecil	Dsn Tompe Ds Barang Kec Panggul, Kab. Trenggalek	950	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
307	SURYANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 07 RW 04 Desa Depok yang rusak berat menghambat akses warga, sehingga pavingisasi 250m x 2,50m melalui PSU BK Khusus Desa mendukung konektivitas wilayah dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek.	Rt 07 Rw 04 Ds. Depok, Kecamatan Panggul , Kab. Trenggalek	625	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
308	SURYANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan Dusun Pegat Desa Depok rawan longsor mengancam keselamatan warga, sehingga TPJ 15m x 3m melalui PSU BK Khusus Desa mendukung stabilitas infrastruktur dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek.	Dsn. Pegat Ds. Depok, Kecamatan Panggul , Kab. Trenggalek	45	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
309	SURYANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 19 RW 06 Desa Karangtengah yang rusak mengganggu akses warga, sehingga pavingisasi 200m x 2,50m melalui PSU BK Khusus Desa mendukung konektivitas wilayah dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek 2025-2026.	Rt 19 Rw 06 Ds.Karangtengah, Kecamatan Panggul , Kab. Trenggalek	500	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
310	SURYANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 17 RW 05 Desa Karangtengah yang rusak berat menghambat akses warga, sehingga pavingisasi 150m x 3,00m melalui PSU BK Khusus Desa mendukung konektivitas wilayah dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek.	Rt 17 Rw 05 Ds.Karangtengah, Kecamatan Panggul , Kab. Trenggalek	450	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
311	EDY PURWANTO, S.Pd. I	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan masih tanah dan bebebatuan perlu paving panjang 300 m lebar 2,50 m	rt 36/05 ds banjar kec panggul, Kab. Trenggalek	750	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
312	SURYANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 33 RW 10 Desa Karangtengah rawan longsor mengancam keselamatan warga, sehingga TPJ 50m x 3m melalui PSU BK Khusus Desa mendukung stabilitas infrastruktur dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek.	Rt 33 Rw 10 Ds.Karangtengah, Kecamatan Panggul , Kab. Trenggalek	150	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
313	SURYANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 19 RW 09 Desa Terbis rawan longsor mengancam keselamatan warga, sehingga TPJ 50m x 3m melalui PSU BK Khusus Desa mendukung stabilitas infrastruktur dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek .	Rt 19 Rw 09 Ds Terbis, Kecamatan Panggul , Kab. Trenggalek	150	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
314	SURYANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan Dusun Belang Desa Tangkil yang rusak berat menghambat akses warga, sehingga pavingisasi 500m x 3,00m melalui PSU BK Khusus Desa mendukung konektivitas wilayah dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek 2025-2026.	Dsn. Belang Ds. Tangkil, Kecamatan Panggul , Kab. Trenggalek	1500	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
315	SURYANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan Dusun Pagerwatu Desa Manggis rawan longsor mengganggu akses warga, sehingga pavingisasi 500m x 3,00m melalui PSU BK Khusus Desa mendukung konektivitas wilayah dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek 2025-2026.	Dsn. Pagerwatu Ds.Manggis, Kecamatan Panggul , Kab. Trenggalek	1500	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
316	SURYANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 25 RW 07 Desa Wonocoyo rawan longsor mengancam keselamatan warga, sehingga TPJ 50m x 3m melalui PSU BK Khusus Desa mendukung stabilitas infrastruktur dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek .	Rt 25 Rw 07 Ds. Wonocoyo, Kecamatan Panggul , Kab. Trenggalek	150	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
317	SURYANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan Dusun Gebang Desa Kertosono yang rusak parah menghambat akses warga, sehingga pavingisasi 300m x 3m melalui PSU BK Khusus Desa mendukung konektivitas wilayah dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek.	Dusun Gebang Ds. Kertosono, Kecamatan Panggul , Kab. Trenggalek	900	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
318	SURYANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 29 RW 09 Dusun Kuyam Desa Karangtengah rawan longsor mengganggu akses warga, sehingga pavingisasi 350m x 2,5m melalui PSU BK Khusus Desa mendukung konektivitas wilayah dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek	Rt 29 Rw 09 Dsn. Kuyam Ds. Karangtengah, Kecamatan Panggul , Kab. Trenggalek	875	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
319	SURYANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 22 RW 07 Desa Tangkil yang rusak berat menghambat akses warga, sehingga pavingisasi 500m x 2,5m melalui PSU BK Khusus Desa mendukung konektivitas wilayah dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek .	Rt 22 Rw 07 Desa Tangkil, Kecamatan Panggul , Kab. Trenggalek	1250	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
320	EDY PURWANTO, S.Pd. I	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	jalan saat malam gelap dan perlu adanya penerangan jalan	dsn karangtangah ds karangtengah kec panggul, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
321	DHANI WAHYU KARUNIAWAN, S.AP	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan masih tanah dan bebatuan	rt 10/04 ds gembleb kec pogalan, Kab. Trenggalek	390	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
322	DHANI WAHYU KARUNIAWAN, S.AP	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	arus transportasi kurang lancar sehingga menghambat perekonomian warga masyarakat ds wonocoyo	rt 19/08 dsn bendil ds wonocoyo kec pogalan , Kab. Trenggalek	305	meter	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
323	IMAM BASUKI, S.Sos.	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	DRAINASE YANG ADA TIDAK MAKSIMAL (BUNTU) SEHINGGA ALIRAN TERGANGGU, DIPERLUKAN PERBAIKAN DRAINASE L=0.8M, P=40M, T=80M	RT. 16 RW. 03 DUSUN GARES DESA TASIKMADU KECAMATAN WATULIMO, Kab. Trenggalek	40	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
324	IMAM BASUKI, S.Sos.	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	KONDISI JALAN SANGAT GELAP BERPOTENSI KECELAKAAN DIBUTUH PJU P=500M	RT. 14 RW. 06 DUSUN KOJUR DESA GEMAHARJO KECAMATAN WATULIMO, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
325	HAJAR SULISTIYONO, S.E	Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Jaringan irigasi rusak sehingga aliran air hujan meluap ke jalan dan menyebabkan komtruksi jalan ambrol	RT. 14 RW. 03 Desa Panggul Kec. Paanggul, Kab. Trenggalek	200	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
326	IMAM BASUKI, S.Sos.	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	SAAT MUSIM PENGHUJAN, JALAN BERPOTENSI AMBROL/LONGSOR, SEHINGGA DIPERLUKAN TPJ P=50M, T=2M	RT. 17 RW. 02 DUSUN KOCOR DESA GEMAHARJO KECAMATAN WATULIMO, Kab. Trenggalek	50	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
327	PRANOTO, S.H., M.H	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.Banyaknya daerah perdesaan yang sangat kurang penerangan maka dari itu PJU sangat dibutuhkan	RT 16 RW 05 DUSUN KEBONDUREN DESA BESUKI KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	1	PAKET	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
328	PRANOTO, S.H., M.H	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Banyaknya daerah perdesaan yang sangat kurang penerangan maka dari itu PJU sangat dibutuhkan	RT 02 RW 01 DUSUN KRAJAN DESA TANGKIL KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	1	PAKET	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
329	FEMI DWI INDRA PALUPI, S.Pd	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	JALAN TIDAK LAYAK/BECEK DIMUSIM HUJAN SEHINGGA MENGHAMBAT AKTIVITAS WARGA, PAVING P=200M dan L=2,5M	RT. 12 RW. 04 DUSUN BANARAN DESA TIMAHAN KECAMATAN KAMPAK, Kab. Trenggalek	200	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
330	PRANOTO, S.H., M.H	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Banyaknya daerah perdesaan yang sangat kurang penerangan maka dari itu PJU sangat dibutuhkan	RT 07 RW 02 DUSUN KRAJAN DESA BODAG KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	1	PAKET	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
331	FEMI DWI INDRA PALUPI, S.Pd	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	JALAN TIDAK LAYAK/BECEK DIMUSIM HUJAN SEHINGGA MENGHAMBAT AKTIVITAS WARGA, PAVING P=500M dan L=2,6M	RT. 03 RW. 01 DUSUN BANARAN DESA TIMAHAN KECAMATAN KAMPAK, Kab. Trenggalek	1300	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
332	FEMI DWI INDRA PALUPI, S.Pd	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	JALAN TIDAK LAYAK/BECEK DIMUSIM HUJAN SEHINGGA MENGHAMBAT AKTIVITAS WARGA, PAVING P=200M dan L=2,4M	RT. 16 RW. 05 DUSUN BANARAN DESA TIMAHAN KECAMATAN KAMPAK, Kab. Trenggalek	480	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
333	PRANOTO, S.H., M.H	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Banyaknya daerah perdesaan yang sangat kurang penerangan maka dari itu PJU sangat dibutuhkan	RT 10 RW 04 DUSUN BANARAN DESA TERBIS KECAMATAN PANGGUL KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	1	PAKET	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
334	FEMI DWI INDRA PALUPI, S.Pd	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	JALAN TIDAK LAYAK/BECEK DIMUSIM HUJAN SEHINGGA MENGHAMBAT AKTIVITAS WARGA, PAVING P=500M dan L=2,4M	RT. 19 RW. 06 DUSUN GENUK DESA TIMAHAN KECAMATAN KAMPAK, Kab. Trenggalek	1200	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
335	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Badan jalan rawan longsor sehingga, bisa mengakibatkan kecelakaan pada pengguna jalan selain itu posisi jalan yang menikung	rt 12/03 desa ngrandu kec suruh (ruas jalan puru-picis), Kab. Trenggalek	100	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
336	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	kondisi jalan bergelombang, jika hujan licin mengakibatkan pengguna jalan rawan kecelakaan dan rawan terhadap kamtibmas	rt 10/03 ds ngrandu kec suruh, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
337	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	kondisi TPJ sudah amblas atau longsor, jika tidak segera ditangani menyebabkan badan jalan ikut longsor sehingga merugikan pengguna jalan, arus transportasi terkendala, Maka perlu bangunan TPJ P: 100 m x : 2,5 m	desa nglebo kec suruh (ruas jalan wonokerto-jombok/jalan kabupaten), Kab. Trenggalek	100	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
338	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	jika hujan kondisi jalan gelap dan licin sangat berbahaya bagi pengguna jalan terhadap laka lantas maupun gangguan kamtibmas	desa puru kec suruh (ruas jalan puru-picis), Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
339	ADIB PATONI, S.Pd., S.Sos	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	JALAN TIDAK LAYAK/BECEK DI MUSIM HUJAN SEHINGGA MENGHAMBAT AKTIVITAS WARGA, PAVING P=210M DAN L=2,8 M	RT. 12 RW. 06 DUSUN BANARAN DESA KRANDEGAN KECAMATAN GANDUSARI, Kab. Trenggalek	588	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
340	ADIB PATONI, S.Pd., S.Sos	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	JALAN TIDAK LAYAK/BECEK DI MUSIM HUJAN SEHINGGA MENGHAMBAT AKTIVITAS WARGA PAVING P=250M DAN L=2,5 M	RT. 17 RW. 08 DUSUN BANARAN DESA KRANDEGAN KECAMATAN GANDUSARI, Kab. Trenggalek	625	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
341	MISNI, S.Sos	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	kondisi jalan yang masih berlubang dan kondisi jalan gelap pada malam hari sehingga perlu membutuhkan penerangan kjalan	Dusun Njeruk Desa Srabah, Kab. Trenggalek	1	paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
342	IMAM BASUKI, S.Sos.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	JALAN TIDAK LAYAK/BECEK DI MUSIM HUJAN SEHINGGA MENGHAMBAT AKTIVITAS WARGA P=150 M DAN L=3 M	RT. 32 RW. 05 DUSUN GARES DESA TASIKMADU KECAMATAN WATULIMO, Kab. Trenggalek	450	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
343	ADIB PATONI, S.Pd., S.Sos	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	JALAN TIDAK LAYAK/BECEK DI MUSIM HUJAN SEHINGGA MENGHAMBAT AKTIVITAS WARGA, PAVING P=200M DAN L=2,50 M	RT. 22 RW. 11 DUSUN KARANGTENGAH DESA SUKORAME KECAMATAN GANDUSARI, Kab. Trenggalek	500	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
344	DASIRAN, S.Pd	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tepi jalan rawan ambrol/longsor dan membahayakan keselamatan warga sehingga perlu diperkuat/dibangun tembok penahan jalan,,dengan P=32 m dan tinggi tepi=3 m dan tinggi tengah=4,5 m	Dusun Krajan Desa Siki Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	32	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
345	DASIRAN, S.Pd	Bangunan Pelengkap Jalan (Gorong-gorong)	Saluran air dibawah jalan/gorong-gorong tidak ada dan mengakibatkan air hujan meluap sehingga menggerus jalan	Dusun Banar Desa Petung Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	6	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
346	DASIRAN, S.Pd	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tepi jalan rawan ambrol/longsor dan membahayakan keselamatan warga serta merusak struktur jalan dengan p=22 m dan t=2 m	Dusun Gondang Desa Siki Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	50	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
347	ADIB PATONI, S.Pd., S.Sos	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	JALAN BELUM ADA TPJ, BERPOTENSI AMBROL SEHINGGA BISA MENGHAMBAT AKTIVITAS WARGA TPJ P=1000M, T=1.5M	RT. 12 RW 04 DUSUN BANARAN DESA KRANDEGAN KECAMATAN GANDUSARI, Kab. Trenggalek	1000	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
348	ADIB PATONI, S.Pd., S.Sos	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	JALAN TIDAK LAYAK/BECEK DI MUSIM HUJAN SEHINGGA MENGHAMBAT AKTIVITAS WARGA PAVING P=350M DAN L=3 M	RT. 20, 21 RW. 06 DUSUN SUGIHAN DESA SUMBERINGIN KECAMATAN KARANGAN, Kab. Trenggalek	1050	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
349	ADIB PATONI, S.Pd., S.Sos	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	DRAINASE RUSAK SEHINGGA SAAT HUJAN, AIR MENGGENANG MENGANGGU PERUMAHAN WARGA SEKITAR. DRAINASE P=112 L=0.4M T=0.3M	RT. 42 RW. 06 DUSUN MLINJON DESA MLINJON KECAMATAN SURUH, Kab. Trenggalek	112	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
350	JOKO HADI SISWANTO, S.T.	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan rusak dan membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat mobilitas perekonomian warga	Jalan penghubung Desa Tumpuk- Desa Sukorejo dan Desa Ngepeh Kec. Tugu, Kab. Trenggalek	1000	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
351	ADIB PATONI, S.Pd., S.Sos	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	JALAN TIDAK LAYAK/BECEK DI MUSIM HUJAN SEHINGGA MENGHAMBAT AKTIVITAS WARGA PAVING P=200M DAN L=2.6 M	RT. 22 RW. 05 DUSUN MLINJON DESA MLINJON KECAMATAN SURUH, Kab. Trenggalek	520	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
352	ADIB PATONI, S.Pd., S.Sos	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	JALAN TIDAK LAYAK/BECEK DI MUSIM HUJAN SEHINGGA MENGHAMBAT AKTIVITAS WARGA PAVING P=180M DAN L=3M	RT. 24 RW.05 DUSUN SOHO DESA MLINJON KECAMATAN SURUH, Kab. Trenggalek	540	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
353	GUNAWAN, S.T	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Kurangnya penerangan jalan membatasi mobilitas warga pada malam hari, termasuk akses menuju sarana ibadah dan fasilitas umum. Instalasi kabel pada lokasi yang sudah ada seringkali tidak tertata rapi (semrawut) dan tidak menggunakan kabel standar luar ruangan (seperti kabel NYM yang dipaksakan untuk outdoor). Risiko arus pendek (korsleting) yang tinggi dan potensi kebakaran, terutama pada sambungan-sambungan kabel yang tidak kedap air.	Desa Botoputih, Kecamatan Bendungan, Dusun Jambe RT. 005 RW. 002., Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
354	GUNAWAN, S.T	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Kurangnya penerangan jalan membatasi mobilitas warga pada malam hari, termasuk akses menuju sarana ibadah dan fasilitas umum. Instalasi kabel pada lokasi yang sudah ada seringkali tidak tertata rapi (semrawut) dan tidak menggunakan kabel standar luar ruangan (seperti kabel NYM yang dipaksakan untuk outdoor). Risiko arus pendek (korsleting) yang tinggi dan potensi kebakaran, terutama pada sambungan-sambungan kabel yang tidak kedap air.	Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Dusun Krajan RT. 021 RW. 004, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
355	FEMI DWI INDRA PALUPI, S.Pd	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	JALAN TIDAK LAYAK/BECEK DIMUSIM HUJAN SEHINGGA MENGHAMBAT AKTIVITAS WARGA, PAVING P=240M dan L=2,4M	RT. 09, RT. 37 DUSUN BRANJANG DESA BOGORAN KECAMATAN KAMPAK, Kab. Trenggalek	576	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
356	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	MINIMNYA LAMPU PENERANGAN JALAN DIWILAYAH RT 13 RW 06 DUSUN MOJO DESA SUMBERDADI	RT 013 RW 006 DUSUN MOJO DESA SUMBERDADI, Kab. Trenggalek	30	TITIK	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
357	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	BELUM ADANYA LAMPU PENERANGAN JALAN DI WILAYAH RT 07 RW 07 DUSUN KRAJAN DESA DERMOSARI KEC. TUGU	RT 07 RW 07 DUSUN KRAJAN DESA DERMOSARI KEC. TUGU, Kab. Trenggalek	25	TITIK	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
358	IMAM BASUKI, S.Sos.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	JALAN TIDAK LAYAK/BECEK DIMUSIM HUJAN SEHINGGA MENGHAMBAT AKTIVITAS WARGA, PAVING P=238M dan L=2.5M	RT. 51 RW. 10 DUSUN SUMBER DESA PRIGI KECAMATAN WATULIMO, Kab. Trenggalek	595	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
359	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	PERLUNYA PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN JALAN SEBAGAI PENGAMAN AKSES JALAN AGAR SUPAYA BAHU JALAN TIDAK TERJADI LONGSOR	RT 08 RW 03 DUSUN PACAR DESA NGLINGGIS KEC. TUGU, Kab. Trenggalek	50	M	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
360	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD/Sederajat	PERLU PEMBANGUNAN TEMBOK PENAHAN TANAH DIKARENAKAN LOKASI SEKOLAH YANG BERADA DIKAWASAN TEBING DAN KONTUR TANAH YANG LABIL SANGAT BERISIKO MENGALAMI LONGSOR	MI MUHAMADIYAH DERMOSARI RT 07 RW 03 DESA DERMOSARI KEC. TUGU, Kab. Trenggalek	180	M3	DINAS PENDIDIKAN
361	BINA ROHMAWATI	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan licin dan berbahaya terdapat banyak kerusakan sehingga tidak aman dilalui, usulan warga untuk dilakukan pavingisasi	RT 16 RW 5 Dusun Ngelo, Desa Puru Kecamatan Suruh, Kab. Trenggalek	1800	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
362	BINA ROHMAWATI	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Jalan tidak memiliki penerangan sama sekali, perlu PJU Panel Surya untuk mempermudah aktivitas warga di malam hari	Jalan Desa RT 004/RW 002 – RT 007/RW 003, Dusun Wonoanti, Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari, Kab. Trenggalek	5	Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
363	BINA ROHMAWATI	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Trafficlight, Flashinglight dan Pelican Crossing)	Tidak lampu isyarat lali lintas sehingga jalur rawan, warga mengusulkan lampu isyarat untuk membuat warga melintas lebih hati-hati	RT 021/RW 008, Dusun Krebet, Desa Wonoanti, Kecamatan Gandusari , Kab. Trenggalek	1	Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
364	IMAM MUSLICH HUDDIN, S.E.	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	BELUM ADANYA DRAINASE JALAN YANG MENGAKIBATKAN AIR MELUAP RUMAH WARGA KETIKA HUJAN	NO RUAS 35 3 159 NAMA RUAS SENGON NGARES. DESA NGARES KEC. TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	200	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
365	SUGIANTO	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	TPJ belum ada dan jalan mudah longsor dan mengakibatkan jalan mudah rusak sehingga akses jalan bisa terganggu , untuk volume TPJ tinggi 1 meter ,Panjang 200,lebar 0.60 meter diruas Jalan Kedekan-Krebet sesuai SK status Jalan Kabupaten	Dusun Krebet RT .025 RW.010 Desa Wonoanti Kecamatan Gandusari Ruas Jalan Kedekan - Krebet sesuai Lampiran SK status Jalan Kabupaten., Kab. Trenggalek	200	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
366	Drs. M. HADI	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Belom ada drainase sehingga air tidak bisa mengalir secara terarah dan menimbulkan tergenang nya bahu jalan	Jalan Poros Besuki - Bungur Kode Ruas Jalan 033, Kab. Trenggalek	40	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
367	Drs. M. HADI	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	jalan rawan amblas karena belom ada tembok penahan jalannya, dimensi tinggi 2 meter panjang 80 meter	Jalan Menuju SMAN 1 Munjungan Kode Ruas 035, Kab. Trenggalek	80	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
368	Drs. M. HADI	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Belom ada drainase sehingga air tidak bisa mengalir secara terarah dan menimbulkan tergenangnya bahu jalan	Jalan Poros Pandean - Munjungan Kode Ruas 061, Kab. Trenggalek	125	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
369	Drs. M. HADI	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Belom ada drainase sehingga air tidak bisa mengalir secara terarah dan menimbulkan tergenangnya bahu jalan	Jalan Pantai Blado Kode Ruas 030, Kab. Trenggalek	120	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
370	Drs. M. HADI	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Banyak aspal yang mengelupas dan berlubang sehingga membahayakan bagi pengendara yang melewati jalan tersebut	Jalan Pantai Blado Kode Ruas 030, Kab. Trenggalek	400	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
371	Drs. M. HADI	Pembangunan MCK / SPALD	- Masyarakat masih menggunakan sungai untuk mandi, mencuci dan buang air besar. - Kondisi lingkungan sangat kumuh.	Desa Ngulungkulon RT 09 RW 03 Kecamatan Munjungan, Kab. Trenggalek	20	m2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
372	Drs. M. HADI	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Kondisi jalan sangat gelap di malam hari sehingga dibutuhkan Lampu Penerangan Jalan	Desa Craken - Ngulungkulon Kode Ruas 023, Kab. Trenggalek	20	Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
373	WAWAN SETYAWAN, S.Pd	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Jalan lingkungan belum ada lampu penerangan jalan umum yang sesuai standar (kabel non SR)	Desa Ngadirejo Dusun Bendo RT. 13, 14, 15, 15 RW. 04 dan RW. 05 Kec. Pogalan, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
374	Drs. M. HADI	Bantuan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan/Sederajat	- Siswa/murid tidak konsentrasi dalam menerima materi pelajaran dari ustadz/guru. - Sistem pembelajaran salafiyah kurang diminati siswa/murid.	MADIN BAITUL MUTTAQIN RT 16 RW 03 Dusun Ponggok Desa Besuki Kecamatan Munjungan, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN
375	WAWAN SETYAWAN, S.Pd	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Jalan lingkungan belum ada lampu penerangan jalan umum sehingga pada malam hari membahayakan pengguna jalan dan rawan gangguan kamtibmas	RT. 13-17 Desa Pakis Kec. Durenan, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
376	Drs. M. HADI	Bantuan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan/Sederajat	- Siswa/murid tidak konsentrasi dalam menerima materi pelajaran dari ustadz/guru. - Sistem pembelajaran salafiyah kurang diminati siswa/murid.	MADIN Nurul Burhan RT 17 RW 04 Desa Karangtuwo Kecamatan Munjungan, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
377	Drs. M. HADI	Bantuan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan/Sederajat	- Siswa/murid tidak konsentrasi dalam menerima materi pelajaran dari ustadz/guru. - Sistem pembelajaran salafiyah kurang diminati siswa/murid.	MADIN Qomarul Hidayah RT 48 RW 10 Dusun Gunung Kembar Desa Tawing Kecamatan Munjungan, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PENDIDIKAN
378	WAWAN SETYAWAN, S.Pd	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Jalan belum dilengkapi drainase sehingga pada musim hujan air meluap ke jalan dan membahayakan pengguna jalan	RT. 02 Dusun Ngrandu Desa Kendalrejo Kec. Durenan, Kab. Trenggalek	600	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
379	WAWAN SETYAWAN, S.Pd	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Jalan belum dilengkapi drainase sehingga pada musim hujan air meluap ke jalan dan membahayakan pengguna jalan	Dusun Krajan RT. 04-05 RW, 02 Desa Ngadisuko Kec. Durenan, Kab. Trenggalek	500	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
380	WAWAN SETYAWAN, S.Pd	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Deainase di ruas Jalan Kabupaten rusak sehingga pada musim hujan air meluap ke jalan dan membahayakan pengguna jalan	RT. 07 RW. 03 Desa Ngetal Kec. Pogalan, Kab. Trenggalek	600	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
381	WAWAN SETYAWAN, S.Pd	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan cor beton rusak parah sehingga mengganggu akses perekonomian, debu di musim kemarau dan lumpur/genangan air di musim hujan	RT. 32 RW. 13 Dusun Tenggong Desa Bendorejo Kec. Pogalan, Kab. Trenggalek	587	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
382	Drs. M. HADI	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan lingkungan perlu adanya perbaikan guna memperlancar arus perekonomian	Desa Tawing Kecamatan Munjungan, Kab. Trenggalek	1035	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
383	WAWAN SETYAWAN, S.Pd	Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SD/Sederajat	Ruang guru SDN 5 Bendorejo mengalami kerusakan dan membahayakan keselamatan warga sekolah	SDN 5 Bendorejo, RT. 33 RW. 14 Desa Bendorejo Kec. Pogalan, Kab. Trenggalek	1	ruang	DINAS PENDIDIKAN
384	WAWAN SETYAWAN, S.Pd	Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/Sederajat	Ruang kelas mengalami kerusakan sehingga membahayakan warga sekolah dan mengganggu proses belajar	SDN 1 Ngadirenggo , RT. 15 RW. 06 Desa Ngadirenggo, Kec. Pogalan, Kab. Trenggalek	1	ruang	DINAS PENDIDIKAN
385	WAWAN SETYAWAN, S.Pd	Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD/Sederajat	Halaman sekolah berupa tanah sehingga mengurangi kenyamanan proses belajar mengajar/pada musim hujan becek dan pada musim kemarau berdebu	MI RIYADLATUL ULUM RT. 20 RW. 09 Dusun Bendil Desa Wonocoyo Kec. Pogalan, Kab. Trenggalek	360	m2	DINAS PENDIDIKAN
386	JAYENG BAYU WINEDAR, S.H	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Kondisi Ruas jalan Desa/ Lingkungan pada RT.13-RT.14 RW.05 Dusun Soko Tengah Desa Karanganyar Kec.Gandusari belum ada penerangan jalan dan rawan tindak kriminal sehingga perlu di pasang penerangan jalan umum pada ruas jalan RT.13-RT.14 RW.05 Dusun Soko Tengah Desa Karanganyar Kec.Gandusari sepanjang 1100 Meter.	RT.13-RT.14 RW.05 Dusun Soko Tengah Desa Karanganyar Kec.Gandusari , Kab. Trenggalek	1	paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
387	JAYENG BAYU WINEDAR, S.H	Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Pada lingkungan RT. 22 RW. 11 Dusun Dawuhanpule Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari sering terjadinya air meluap saat musim penghujan setelah di bangunya jalan dikarenakan drainase yang di buat terlalu kecil sehingga drainase tidak bisa menampung debit air. Dari permasalahan itu kami perlu di Bangunkan Drainase yang mumpuni.	RT. 22 RW. 11 Dusun Dawuhanpule Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari, Kab. Trenggalek	200	Meter	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
388	KRISNA GANDHA SAPUTRA, S.H	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Penerangan jalan umum masih terbatas sehingga pada malam hari rawan gangguan kamtibmas dan membahayakan pengguna jalan	RT. 62-64 Dusun Sidem Desa Jombok Kec. Pule, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
389	KRISNA GANDHA SAPUTRA, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Tepi jalan rawan ambrol/longsor sehingga membahayakan keselamatan warga	RT. 45 Dusun Bakalan Desa Jombok Kec. Pule, Kab. Trenggalek	100	m	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
390	TULAS WITLAITIK	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat mobilitas warga	RT. 15 RW. 05 Desa Joho Kec. Pule, Kab. Trenggalek	393	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
391	TULAS WITLAITIK	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Bahu jalan/tepian jalan rawan ambrol/longsor sehingga membahayakan keselamatan warga	RT. 30 RW. 12 Dusun Karangrejo Desa Sidomulyo Kec. Pule, Kab. Trenggalek	6	m	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
392	TULAS WITLAITIK	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Bahu jalan rawan ambrol/longsor sehingga membahayakan keselamatan warga	RT. 32 RW. 13 Dusun Karangrejo Desa Sidomulyo Kec. Pule, Kab. Trenggalek	50	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
393	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Ruas jalan lingkungan belum ada lampu penerangan jalan umum sehingga pada malam hari gelap dan membahayakan pengguna jalan serta menimbulkan gangguan kamtibmas	RT. 01 dan RT. 02 Dusun Kademangan Desa Bendoagung Kec. Lampak, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
394	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan rusak sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat mobilitas perekonomian warga	RT. 30 dan RT. 35 Dusun Kedungdowo, RT. 23. RT. 25 dan RT. 28 Dusun Kemiri, RT. 10 dan RT. 12 Dusun Kademangan Desa Bendoagung Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	1539	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
395	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat mobilitas warga	RT. 06 Desa Senden Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	216	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
396	ZAENAL FANANI, S.ST., M.MT.	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Bahu jalan rawan ambrol/longsor sehingga membahayakan keselamatan warga	RT. 03 Dusun Tenggar Desa Senden Kec. Ksmpsk, Kab. Trenggalek	60	meter	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
397	NUR EFENDI	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 11-12 RW 04 Dusun Winong Desa Sumurup Bendungan yang rusak parah menghambat akses warga, sehingga pavingisasi 3x300m melalui PSU BK Khusus Desa mendukung konektivitas wilayah dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek 2025-2026.	RT 11 RW 04 – RT 12 RW 04 Dusun Winong Desa Sumurup Kecamatan Bendungan , Kab. Trenggalek	900	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
398	NUR EFENDI	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 17 RW 06 Dusun Pule Desa Sumurup Bendungan yang rusak parah menghambat akses warga, sehingga pavingisasi 3x320m melalui PSU BK Khusus Desa mendukung konektivitas wilayah dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek 2025-2026.	RT 17 RW 06 Dusun Pule Desa Sumurup Kecamatan Bendungan , Kab. Trenggalek	960	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
399	NUR EFENDI	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Permasalahan jalan lingkungan RT 19-23 RW 06-07 Dusun Pule Desa Sumurup Bendungan yang rusak parah menghambat akses warga, sehingga pavingisasi 3x320m melalui PSU BK Khusus Desa mendukung konektivitas wilayah dan misi Kota Atraktif RPJMD Trenggalek 2025-2026.	RT 19 RW 06 – RT 23 RW 07 Dusun Pule Desa Sumurup Kecamatan Bendungan , Kab. Trenggalek	960	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
400	DHANI WAHYU KARUNIAWAN, S.AP	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan masih tanah dan banyak bebatuan kecil saat hujan mengakibatkan pengguna jalan saat lewat terganggu	Dsn Gondangrejo rt 27 dan rt 29 desa ngadirenggo kec pogalan, Kab. Trenggalek	783	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
401	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	badan jalan rawan longsor, apabila longsor maka arus transportasi terputus berakibat kegiatan masyarakat terganggu maka perlu TPJ P : 85 m x T : 3,5 m	desa mlinjon kec suruh (ruas jalan mlinjon-picis), Kab. Trenggalek	85	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
402	MISNI, S.Sos	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	dikarenakan belum ada penerangan jalan dan juga kondisi jalan yang rusak sedang untuk menghindari kecelakaan di malam hari	dusun mloko desa prambon, Kab. Trenggalek	1	paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
403	JAYENG BAYU WINEDAR, S.H	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Kondisi Ruas jalan Desa/ Lingkungan pada RT 24 RW 95 dan RT 13 RW 03 Dsn Mlinjon dan Kedungmaron Desa Mlinjon Kec. Suruh belum ada penerangan jalan dan rawan tindak kriminal sehingga perlu di pasang penerangan jalan umum pada ruas jalan RT 24 RW 95 dan RT 13 RW 03 Dsn Mlinjon dan Kedungmaron Desa Mlinjon Kec. Suruh sepanjang 500 Meter atau 20 paket	RT 24 RW95 dan RT 13 RW 03 Dsn Mlinjon dan Kedungmaron Desa Mlinjon Kec. Suruh, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
404	SUGIANTO	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi saat ini jalan sudah mengelupas dan berlubang dan tergerus air sehingga sangat menggangu pengguna jalan ,sedangkan volumenya lebar 3 meter panjang 200 meter diruas Jalan Kabupaten Ruas Jalan Jajar- Ngembel sesuai Lampiran SK Kabupaten Trenggalek	Dusun Kebon RT .020 RW 02 Desa Jajar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek Ruas jalan Kabupaten Jajar - Ngembel, Kab. Trenggalek	200	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
405	MISNI, S.Sos	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	kondisi jalan yang rusak dan juga kalu musim penghuja sangat licin untuk menghindari jatonya kendaraan sehingga di perlukan penerangan jalan	dusun krapyak desa botoputih kecamatan bendungan kabupaten trenggalek, Kab. Trenggalek	1	paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
406	MISNI, S.Sos	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	kondisi jalan yang rusak dan juga kalu musim penghuja sangat licin untuk menghindari jatonya kendaraan sehingga di perlukan penerangan jalan	dusun barupetak desa botoputih kecamatan bendungan, Kab. Trenggalek	1	paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
407	MISNI, S.Sos	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	kondisi jalan yang rusak dan juga kalu musim penghuja sangat licin untuk menghindari jatonya kendaraan sehingga di perlukan penerangan jalan	dusun mangkujayan desa botoputih kecamatan bendungan, Kab. Trenggalek	1	paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
408	JAYENG BAYU WINEDAR, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan eksisting pada RT 20 RW 04 Dusun Soho Desa Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek dengan kondisi rusak karena merupakan jalan akses utama untuk menunjang sarana trasportasi sekaligus akses perekonomian dan pendidikan untuk itu perlu di bangunya perkerasan jalan (Pavingisasi) dengan jarang di kisaran Volum panjang 150 Meter dengan lebar 3 Meter	RT 20 RW 04 Dusun Soho Desa Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	390	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
409	JAYENG BAYU WINEDAR, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan eksisting pada RT 16 RW 04 Dusun Mlinjon Desa Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek dengan kondisi rusak karena merupakan jalan akses utama untuk menunjang sarana trasportasi sekaligus akses perekonomian dan pendidikan untuk itu perlu di bangunya perkerasan jalan (Pavingisasi) dengan jarang di kisaran Volum panjang 100 Meter dengan lebar 3 Meter	RT 16 RW 04 Dusun Mlinjon Desa Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	300	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
410	IQMAL EABY MUGY MAHAWIDYA, S.H	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan lingkungan rusak belum terpasang paving	RT 17- 18 RW 04 Dsn Pelem, Desa Sumberbening Kecamatan Dongko, Kab. Trenggalek	585	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
411	JAYENG BAYU WINEDAR, S.H	Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Pada lingkungan RT 20 RW 04 Dusun Soho Desa Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek sering terjadinya air meluap saat musim penghujan setelah di bangunya jalan dikarenakan belum adanya Drainase. Dari permasalahan itu kami perlu di Bangunkan Drainase yang mumpuni sepanjang jalan tersebut di kisaran 110 Meter	RT 20 RW 04 Dusun Soho Desa Mlinjon Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	110	Meter	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
412	MISNI, S.Sos	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	daerah rawan longsor karena fostur tanah yang sangat lunak sehingga membutuhkan tembok penahan jalan	Rt 09 Dusun Njerok Desa Srabah Kecamatan Bendungan, Kab. Trenggalek	40	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
413	MISNI, S.Sos	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Curah hujan yang sanggat tinggi dan mengakibatkan tanah yang sangat lunah sehingga rawan longsor dan butuh penahan jalan	Rt06 dusun njeruk desa srabah kecamatan bendungan, Kab. Trenggalek	60	M	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
414	MISNI, S.Sos	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	belum ada penerangan jalan dan jalan yang begitu licin dikarenakan intensitas hujan yang sangat tinggi	dusun pule desa sumurup kecamatan bendungan, Kab. Trenggalek	1	paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
415	ADIB PATONI, S.Pd., S.Sos	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	JALAN TIDAK LAYAK/BECEK DI MUSIM HUJAN SEHINGGA MENGHAMBAT AKTIVITAS WARGA PAVING P=200M DAN L=3.5M	RT. 07 RW. 04 DUSUN PLAGEN DESA NGRAYUNG KECAMATAN GANDUSARI, Kab. Trenggalek	700	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
416	MISNI, S.Sos	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	karena jalan licin dengan intensitas hujan yang sangat tinggi butuh penerangan lampu jalan dan jalan yang begitu rusak	dusun mloko desa prambon kecamatan tugu, Kab. Trenggalek	1	paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
417	IQMAL EABY MUGY MAHAWIDYA, S.H	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Lampu jalan belum memadai di kawasan tersebut masih banyak area gelap gulita, membuat aktivitas warga tidak nyaman dan aman, untuk itu warga mengusulkan PJU Panel Surya	RT 31 RW 07 Dsn Picis Desa Pringapus Kecamatan Dongko, Kab. Trenggalek	15	Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
418	MISNI, S.Sos	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	karena tanah lunak dan hujan yang sangat tinggi sehingga rawan longsor	dusun krajan desa prambon kecamatan tugu, Kab. Trenggalek	150	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
419	MISNI, S.Sos	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	karena tanah lunak dan hujan yang sangat tinggi sehingga rawan longsor	dusun pakel desa dompyong kecamatan bendungan, Kab. Trenggalek	150	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
420	MISNI, S.Sos	Bangunan Pelengkap Jalan (Gorong-gorong)	karena sudah terkikis dengan banjir dan di guyur hujan yang sangat lebat	dusun tumpakaren desa dompyong kecamatan bendungan, Kab. Trenggalek	6	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
421	PUGUH PURNOMO, S.E.	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Belum adanya Tembok Penahan Jalan (TPJ) pada jalan ruan Nggaren-Tempuran berpotensi menyebabkan longsor dan erosi serta mengurani umur layanan jalan yang sudah ada sehingga perlu dibangun TPJ dengan volume: P= 85 m, T= 1,25 m.	RT. 11/RW. 04 Desa Tegaren, Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	85	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
422	MOH. ALI GUFRON	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak dan membahayakan pengguna jalan serta menghambat mobilitas perekonomian warga	RT. 40 RW. 03 Dusun Gejagan Desa Pringapus Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	450	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
423	MOH. ALI GUFRON	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak dan membahayakan pengguna jalan serta menghambat mobilitas perekonomian warga	RT. 39 RW. 09 Dusun Kasihan Desa Dongko Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	1500	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
424	MOH. ALI GUFRON	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak dan membahayakan pengguna jalan serta menghambat mobilitas perekonomian warga	RT. 13 RW. 03 Dusun Pelem Desa Sumberbening Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	750	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
425	MOH. ALI GUFRON	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat mobilitas warga	RT. 15 RW. 03 Dusun Blimbing Desa Dongko Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	900	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
426	MOH. ALI GUFRON	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak dan membahayakan pengguna jalan serta menghambat mobilitas perekonomian warga	RT. 03 RW. 01 DUSUN KRAJAN DESA SUMBERBENING KEC. DONGKO, Kab. Trenggalek	750	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
427	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Kondisi drainase pada Ruas Jalan Kabupaten Gandusari - Trenggalek belum memadai dan tidak berfungsi optimal, sehingga menyebabkan genangan air, mempercepat kerusakan perkerasan jalan, serta mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Ketiadaan saluran drainase yang layak sepanjang ± 120 meter menurunkan kualitas layanan infrastruktur jalan, sehingga perlu segera dilakukan pembangunan drainase guna mendukung terwujudnya infrastruktur publik yang andal, aman, dan berkelanjutan.	RT 19 RW 02 DESA JATIPRAHU KEC. KARANGAN, Kab. Trenggalek	120	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
428	MURKAM, S.T	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Belum ada Tembok Penahan jalan Sementara bahu jalan longsor/ambrol yang mengakibatkan rusaknya badan jalan disekitarnya untuk itu perlu di bangun Bangunan Pelengkap Jalan berupa Tembok Penahan Jalan untuk melindungi ancaman longsor dan rusaknya bangunan disekitarnya yang berada di Jalan Lingkungan RT 48 RW 15 Dusun Pesu Desa Karangrejo Kecamatan Kampak dengan Panjang 80m, Tebal 0,40 meter dan Tinggi 2m	RT 48 RW 15 Dusun Pesu Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	80	Meter	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
429	Drs. H. SUKARODIN, M.Ag.	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Kondisi drainase pada Ruas Jalan Kabupaten Kelutan–Banger (No. 245) belum memadai dan tidak berfungsi optimal, sehingga menyebabkan genangan air, mempercepat kerusakan perkerasan jalan, serta mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Ketiadaan saluran drainase yang layak sepanjang ±145 meter menurunkan kualitas layanan infrastruktur jalan, sehingga perlu segera dilakukan pembangunan drainase guna mendukung terwujudnya infrastruktur publik yang andal, aman, dan berkelanjutan.	RT 24-25 RW 09 DUSUN PUNJUNG DESA SALMREJO KEC. KARANGAN, Kab. Trenggalek	145	Meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
430	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Kondisi jalan gelap jikia hujan sangan licin dan tepi jalan jurang, hal ini membahayakan pengguna jalan serta rawan kamtibmas	Dusun miri desa Mlinjon kec. Suruh, Kab. Trenggalek	1	P	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
431	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Badan Jalan rawan longsor, tepi jalan sangat curam jika longsor sangat merugikan pengguna jalan karena arus transportasi masyarakat terganggu maka perlu TPJ P: 100 m x T : 3 m	Desa Nglebo (jalan Kabupaten Wonokerto - Jombok) , Kab. Trenggalek	50	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
432	MOH. ALI GUFRON	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak dan membahayakan keselamatan pengguna jalan serta menghambat mobilitas warga	RT. 69 RW. 04 Dusun Blimbing Desa Dongko Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	900	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
433	MOH. ALI GUFRON	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak dan membahayakan keselamatan pengguna jalan serta menghambat mobilitas warga	RT. 43 RW. 10 Dusun Kasihan Desa Dongko Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	450	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
434	MOH. ALI GUFRON	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Bahu jalan longsor sehingga membahayakan keselamatan warga dan merusak struktur jalan	RT. 25 RW. 06 Dusun Klangsur Desa Dongko Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	25	M	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
435	MOH. ALI GUFRON	Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Jalan belum dilengkapi saluran air/drainase sehingga pada musim hujan air meluap ke jalan	RT. 08 RW. 02 Dusun Krajan Desa Dongko Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	52	meter	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
436	MOH. ALI GUFRON	Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Lapangan dongko belum ada drainase sehingga air hujan meluap dan menggenang	Lapangan Dongko Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	500	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
437	MOH. ALI GUFRON	Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Jalan berlubang sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan	Jalan Desa Dongko Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	4000	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
438	MISNI, S.Sos	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	konstur tanah yang sangat lunak sehingga rawan longsor	dusun pakel desa prambon kecamatan tugu, Kab. Trenggalek	50	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
439	MOH. ALI GUFRON	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan rusak dan berlubang sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan	Jalan Dusun Senuli Desa Siki Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	2000	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
440	GUSWANTO	Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Saluran air/drainase sudah rusak/ambrol sehingga menghambat aliran air ke persawahan dan pada musim hujan air meluap ke jalan	RT. 40 RW. 10 Dusun Lotekol Desa Malasan Kec. Durenan, Kab. Trenggalek	205	meter	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
441	GUSWANTO	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak dan membahayakan keselamatan pengguna jalan	RT. 20 RW. 09 Dusun Wadi Lor Desa Ngadirenggo Kec. Pogalan, Kab. Trenggalek	990	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
442	DASIRAN, S.Pd	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak dan membahayakan keselamatan pengguna jalan sehingga perlu dipaving	RT. 12 RW. 03 Dusun Gondang Desa Siki Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	900	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
443	DASIRAN, S.Pd	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rusak dan rawan longsor sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat mobilitas warga	RT. 20 RW. 05 Dusun Kojan Desa Siki Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	300	M2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
444	TULAS WITLAITIK	Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD/Sederajat	Pagar gedung sekolah rawan ambrol sehingga perlu diperkuat TPJ untuk menghindari robohnya gedung sekolah	SDN 4 Sidomulyo RT. 12 RW. 09 Desa Sidomulyo Kec. Pule, Kab. Trenggalek	300	m	DINAS PENDIDIKAN
445	TULAS WITLAITIK	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Bahu jalan rawan ambrol/longsor dan membahayakan keselamatan pengguna jalan serta struktur jalan	RT. 32 Desa Sidomulyo Kec. Pule, Kab. Trenggalek	50	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
446	TULAS WITLAITIK	Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Bahu jalan rawan ambles sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan	RT. 13 Precet Desa Sidomulyo Kec. Pule, Kab. Trenggalek	25	m	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	VOLUME	SATUAN	PERANGKAT DAERAH
447	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Jalan lingkungan belum ada lampu penerangan jalan umum sehingga malam hari gelap dan membahayakan keselamatan pengguna jalan serta rawan gangguan kamtibmas	Dusun Selorejo Desa Mlinjon Kec. Suruh, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
448	NURWAHYUDI, S.Pd., M.M	Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Jalan lingkungan belum ada lampu penerangan jalan umum sehingga malam hari gelap dan membahayakan keselamatan pengguna jalan serta rawan gangguan kamtibmas	Dusun Tawang Desa Nglebo Kec. Suruh, Kab. Trenggalek	1	Paket	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
449	MOH. ALI GUFRON	Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan rawan ambrol/longsor dan membahayakan keselamatan warga sehingga perlu diperkuat/dibangun tembok penahan jalan dengan ukuran P = 110 m dan t = 2 m	RT. 39 RW. 11 Dusun Kori Desa Salamwates Kec. Dongko, Kab. Trenggalek	110	Meter	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
450	NUR EFENDI	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Permasalahan penurunan kualitas dan kapasitas Ruas Jalan Kabupaten Karangsoko 1 menghambat konektivitas dan distribusi ekonomi, sehingga peningkatan ruas jalan mendukung misi Kota Atraktif, efisiensi logistik, dan pemerataan pembangunan wilayah.	Ruas Jalan Kabupaten 35-3-253 Karangsoko 1 (Sebelah SPBU Karangsoko), Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek , Kab. Trenggalek	400	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
451	NUR EFENDI	Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Permasalahan kondisi rusak Ruas Jalan Dadaptulis-Karanggayam menghambat konektivitas wilayah dan logistik ekonomi, sehingga peningkatan mendukung strategi jaringan infrastruktur, pemerataan akses, dan misi Kota Atraktif Trenggalek.	Ruas Jalan Kabupaten 32-3-252 Dadaptulis - Karanggayam (Jalan Depan SMK Karyadharma), Desa Karangsoko, Kecamatan Trenggalek , Kab. Trenggalek	1200	meter	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LAMPIRAN III

PEMETAAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL, PROVINSI DAN KABUPATEN

RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2027

Pemetaan Program Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM LESTARI Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM SEHAT Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM AKSES Memperkuat infrastuktur konektivitas antar wilayah dan intra aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu, dan berkeadilan	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2.24.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif Mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	JATIM KERJA Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH			
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM AGRO Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
4.02 - SEKRETARIAT DPRD			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
5.01 - PERENCANAAN			
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
5.02 - KEUANGAN			
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
5.03 - KEPEGAWAIAN			
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH			
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM CERDAS Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
7.01 - KECAMATAN			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM SEJAHTERA Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	JATIM HARMONI Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas

LAMPIRAN IV

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2027

RKPD

KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2027

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. TRENGGALEK
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		DINAS PENDIDIKAN						**596.265.258.213,00**							**628.129.180.604,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**596.265.258.213,00**							**628.129.180.604,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**596.265.258.213,00**							**628.129.180.604,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**507.877.419.568,00**							**526.901.009.487,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***507.747.419.568,00***							***526.826.009.487,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	507.747.419.568,00						100 %	526.826.009.487,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	507.747.419.568,00						100 %	526.826.009.487,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	86.07 %		83.07 %	83.57 %	507.747.419.568,00						84.57 %	526.826.009.487,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						185.000.000,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua dan keluarga peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		200.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Realisasi Kinerja urusan Penunjang Pendidikan Sesuai Ketentuan						185.000.000,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua dan keluarga peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		200.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	75.000.000,00						1 Data	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	60.000.000,00						20 Dokumen	70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47 Laporan		47 Laporan	47 Laporan	50.000.000,00						47 Laporan	50.000.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						60.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		20 Dokumen	70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47 Laporan		47 Laporan	47 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		47 Laporan	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	75.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Data	80.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						506.451.151.423,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		523.213.437.487,00	
		Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan penunjang urusan Pendidikan Sesuai Ketentuan						506.451.151.423,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		523.213.437.487,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen		75 Dokumen	75 Dokumen	70.000.000,00						75 Dokumen	193.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4592 Orang/bulan		4592 Orang/bulan	4592 Orang/bulan	506.381.151.423,00						4592 Orang/bulan	523.019.637.487,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						506.381.151.423,00							523.019.637.487,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4592 Orang/bulan		4592 Orang/bulan	4.592 Orang/bulan	506.381.151.423,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4592 Orang/bulan	523.019.637.487,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						70.000.000,00							193.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen		75 Dokumen	75 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		75 Dokumen	193.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						100.000.000,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		1.338.635.000,00	
		Terlaksananya Layanan Administrasi BMD penunjang urusan Pendidikan Sesuai Ketentuan						100.000.000,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		1.338.635.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	100.000.000,00						27 Laporan	1.338.635.000,00	
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						100.000.000,00							1.338.635.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		27 Laporan	1.338.635.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						35.000.000,00					Pendidik dan tenaga kependidikan;Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal		85.000.000,00	
		Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian penunjang urusan Pendidikan Sesuai Ketentuan						35.000.000,00					Pendidik dan tenaga kependidikan;Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal		85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	76 Dokumen		76 Dokumen	76 Dokumen	10.000.000,00						76 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	25.000.000,00						50 Orang	75.000.000,00	
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	76 Dokumen		76 Dokumen	76 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		76 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						25.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		50 Orang	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						385.000.000,00					Pendidik dan tenaga kependidikan;Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal		992.029.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Layanan Administrasi Umum penunjang urusan Pendidikan Sesuai Ketentuan						385.000.000,00					Pendidik dan tenaga kependidikan;Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal		992.029.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10000 Dokumen		10000 Dokumen	10000 Dokumen	20.000.000,00						10000 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00						12 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00						12 Laporan	282.456.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	5.000.000,00						5 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	110.000.000,00						8 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	50.000.000,00						8 Paket	170.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	25.000.000,00						6 Paket	44.293.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	40.000.000,00						4 Paket	95.278.700,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						25.000.000,00							44.293.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	44.293.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.000.000,00							95.278.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	40.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	95.278.700,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Paket	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							170.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		8 Paket	170.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						110.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	110.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		8 Paket	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						130.000.000,00							282.456.800,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	282.456.800,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10000 Dokumen		10000 Dokumen	10000 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10000 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						371.268.145,00					Pendidik dan tenaga kependidikan;Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal		440.000.000,00	
		Terlaksananya Layanan Jasa penunjang urusan Pendidikan Sesuai Ketentuan						371.268.145,00					Pendidik dan tenaga kependidikan;Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal		440.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	356.268.145,00						72 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00						12 Laporan	40.000.000,00	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						356.268.145,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	356.268.145,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		72 Laporan	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						15.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						350.000.000,00					Pendidik dan tenaga kependidikan;Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal		631.908.000,00	
		Terlaksananya Layanan pemelihaan BMD penunjang urusan Pendidikan Sesuai Standar						350.000.000,00					Pendidik dan tenaga kependidikan;Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal		631.908.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	120.000.000,00						30 Unit	194.900.500,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		100 Unit	100 Unit	50.000.000,00						100 Unit	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit		14 Unit	14 Unit	180.000.000,00						14 Unit	337.007.500,00	
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						120.000.000,00							194.900.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	120.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		30 Unit	194.900.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		100 Unit	100 Unit	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		100 Unit	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						180.000.000,00							337.007.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit		14 Unit	10 Unit	180.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		14 Unit	337.007.500,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**84.618.588.645,00**							**97.368.921.117,00**	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***84.058.588.645,00***							***96.963.921.117,00***	
			1.Iklim Inklusivitas SD	76.63 Nilai		66.63 Nilai	69.13 Nilai	84.058.588.645,00						71.63 Nilai	96.963.921.117,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Iklim Inklusivitas SMP	72.51 Nilai		62.91 Nilai	65.31 Nilai	84.058.588.645,00						67.71 Nilai	96.963.921.117,00	
			3.Iklim Keamanan SD	83.18 Nilai		79.58 Nilai	80.48 Nilai	84.058.588.645,00						81.38 Nilai	96.963.921.117,00	
			4.Iklim Keamanan SMP	79.73 Nilai		73.73 Nilai	75.23 Nilai	84.058.588.645,00						76.73 Nilai	96.963.921.117,00	
			5.Iklim Kebinekaan SMP	76.40 Nilai		72.40 Nilai	73.40 Nilai	84.058.588.645,00						74.40 Nilai	96.963.921.117,00	
			999.Iklim Kebinekaan SD	80.16 Nilai		76.16 Nilai	77.16 Nilai	84.058.588.645,00						78.16 Nilai	96.963.921.117,00	
			999.Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD (APS)	90.95 %		85.15 %	86.6 %	84.058.588.645,00						88.05 %	96.963.921.117,00	
			999.Persentase Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (APS)	100 %		99.74 %	100 %	84.058.588.645,00						100 %	96.963.921.117,00	
			999.Persentase anak usia 7-18 tahun berpartisipasi dalam Pendidikan Non Formal (APS)	23.07 %		18.07 %	19.32 %	84.058.588.645,00						20.57 %	96.963.921.117,00	
			999.Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	91.74 %		84.67 %	86.01 %	84.058.588.645,00						87.7 %	96.963.921.117,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						39.775.350.000,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua dan keluarga peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		45.836.596.982,00	
		Terlaksananya Layanan Peserta Didik, Manajemen dan Pembelajaran pada Sekolah Dasar Sesuai Ketentuan						39.775.350.000,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua dan keluarga peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		45.836.596.982,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	359.310.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	40.000.000,00						8 Dokumen	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	30.000.000,00						2 Kegiatan	50.000.000,00	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	3 Paket	160.000.000,00						3 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	310.000.000,00						1 Ruang	125.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	15.000.000,00						1 Ruang	210.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 Ruang		16 Ruang	16 Ruang	700.000.000,00						16 Ruang	2.340.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	24 Unit		24 Unit	24 Unit	951.500.000,00						24 Unit	2.254.814.984,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit		9 Unit	8 Unit	15.000.000,00						8 Unit	785.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	438 Satuan Pendidikan		438 Satuan Pendidikan	438 Satuan Pendidikan	40.000.000,00						438 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	438 Satuan Pendidikan		438 Satuan Pendidikan	438 Satuan Pendidikan	20.000.000,00						438 Satuan Pendidikan	83.071.998,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	438 Satuan Pendidikan		438 Satuan Pendidikan	438 Satuan Pendidikan	37.288.850.000,00						438 Satuan Pendidikan	39.194.400.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik		300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	125.000.000,00						300 Peserta Didik	150.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar Sesuai Standar						39.775.350.000,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua dan keluarga peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		45.836.596.982,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	359.310.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	40.000.000,00						8 Dokumen	75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	30.000.000,00						2 Kegiatan	50.000.000,00	
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	3 Paket	160.000.000,00						3 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	310.000.000,00						1 Ruang	125.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	15.000.000,00						1 Ruang	210.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 Ruang		16 Ruang	16 Ruang	700.000.000,00						16 Ruang	2.340.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	24 Unit		24 Unit	24 Unit	951.500.000,00						24 Unit	2.254.814.984,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit		9 Unit	8 Unit	15.000.000,00						8 Unit	785.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	438 Satuan Pendidikan		438 Satuan Pendidikan	438 Satuan Pendidikan	40.000.000,00						438 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	438 Satuan Pendidikan		438 Satuan Pendidikan	438 Satuan Pendidikan	20.000.000,00						438 Satuan Pendidikan	83.071.998,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	438 Satuan Pendidikan		438 Satuan Pendidikan	438 Satuan Pendidikan	37.288.850.000,00						438 Satuan Pendidikan	39.194.400.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik		300 Peserta Didik	300 Peserta Didik	125.000.000,00						300 Peserta Didik	150.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						951.500.000,00							2.254.814.984,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	24 Unit		24 Unit	11 Unit	951.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Pringapus || 1 || Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Jajar || 1 || Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0 || Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Mlinjon || 1 || Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Karangturi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		24 Unit	2.254.814.984,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						310.000.000,00							125.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	2 Ruang	310.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Widoro || 1 || Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Ruang	125.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah						160.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	1 Paket	160.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Parakan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Paket	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						125.000.000,00							150.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik		300 Peserta Didik	200 Peserta Didik	125.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		300 Peserta Didik	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						20.000.000,00							83.071.998,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	438 Satuan Pendidikan		438 Satuan Pendidikan	438 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		438 Satuan Pendidikan	83.071.998,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						37.288.850.000,00							39.194.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	438 Satuan Pendidikan		438 Satuan Pendidikan	438 Satuan Pendidikan	37.288.850.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		438 Satuan Pendidikan	39.194.400.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						40.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		8 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		8 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Kegiatan	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						15.000.000,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Jambu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Ruang	210.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						15.000.000,00							785.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Unit		9 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Joho || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		8 Unit	785.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						40.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	438 Satuan Pendidikan		438 Satuan Pendidikan	438 Satuan Pendidikan	40.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		438 Satuan Pendidikan	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						700.000.000,00							2.340.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	16 Ruang		16 Ruang	5 Ruang	700.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Prambon || 1 || Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pogalan || Desa Ngadirejo || 1 || Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Ngerdani || 1 || Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Siki || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		16 Ruang	2.340.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						50.000.000,00							359.310.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Paket	359.310.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		Terlaksananya Layanan Peserta Didik, Manajemen dan Pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Sesuai Ketentuan						26.579.998.038,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		29.679.124.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00						1 Paket	236.224.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000,00						8 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	25.000.000,00						2 Kegiatan	50.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	83 Satuan Pendidikan		83 Satuan Pendidikan	83 Satuan Pendidikan	29.098.038,00						83 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	125.000.000,00						3 Ruang	600.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Unit		7 Unit	7 Unit	140.000.000,00						7 Unit	1.589.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	83 Satuan Pendidikan		83 Satuan Pendidikan	83 Satuan Pendidikan	25.000.000,00						83 Satuan Pendidikan	45.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	83 Satuan Pendidikan		83 Satuan Pendidikan	83 Satuan Pendidikan	26.055.900.000,00						83 Satuan Pendidikan	26.888.100.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik		250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	90.000.000,00						250 Peserta Didik	100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sesuai Standar						26.579.998.038,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		29.679.124.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00						1 Paket	236.224.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000,00						8 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	25.000.000,00						2 Kegiatan	50.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	83 Satuan Pendidikan		83 Satuan Pendidikan	83 Satuan Pendidikan	29.098.038,00						83 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	125.000.000,00						3 Ruang	600.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Unit		7 Unit	7 Unit	140.000.000,00						7 Unit	1.589.800.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	83 Satuan Pendidikan		83 Satuan Pendidikan	83 Satuan Pendidikan	25.000.000,00						83 Satuan Pendidikan	45.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	83 Satuan Pendidikan		83 Satuan Pendidikan	83 Satuan Pendidikan	26.055.900.000,00						83 Satuan Pendidikan	26.888.100.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik		250 Peserta Didik	250 Peserta Didik	90.000.000,00						250 Peserta Didik	100.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						125.000.000,00							600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang		3 Ruang	1 Ruang	125.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Ruang	600.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						140.000.000,00							1.589.800.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	7 Unit		7 Unit	1 Unit	140.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Kampak || Desa Karangrejo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		7 Unit	1.589.800.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						90.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik		250 Peserta Didik	200 Peserta Didik	90.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		250 Peserta Didik	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						25.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	83 Satuan Pendidikan		83 Satuan Pendidikan	83 Satuan Pendidikan	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		83 Satuan Pendidikan	45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						26.055.900.000,00							26.888.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	83 Satuan Pendidikan		83 Satuan Pendidikan	83 Satuan Pendidikan	26.055.900.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		83 Satuan Pendidikan	26.888.100.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						30.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		8 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		8 Dokumen	45.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						25.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Kegiatan	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						29.098.038,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	83 Satuan Pendidikan		83 Satuan Pendidikan	83 Satuan Pendidikan	29.098.038,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		83 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						35.000.000,00							236.224.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Paket	236.224.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						10.774.009.407,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		13.119.473.135,00	
		Terlaksananya Layanan Peserta Didik, Manajemen dan Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini Sesuai Ketentuan						10.774.009.407,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		13.119.473.135,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	9 Paket		9 Paket	9 Paket	7.939.407,00						9 Paket	494.542.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	40.000.000,00						8 Dokumen	99.848.460,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	25.000.000,00						2 Kegiatan	50.000.000,00	
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	6 Paket		6 Paket	6 Paket	20.000.000,00						6 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	450 Satuan Pendidikan		450 Satuan Pendidikan	450 Satuan Pendidikan	30.000.000,00						450 Satuan Pendidikan	82.074.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	617 Satuan Pendidikan		617 Satuan Pendidikan	617 Satuan Pendidikan	10.078.570.000,00						617 Satuan Pendidikan	9.993.930.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	617 Satuan Pendidikan		617 Satuan Pendidikan	617 Satuan Pendidikan	30.000.000,00						617 Satuan Pendidikan	44.643.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang		6 Ruang	6 Ruang	170.000.000,00						6 Ruang	1.587.243.175,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang		6 Ruang	6 Ruang	150.000.000,00						6 Ruang	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	8 Unit		8 Unit	8 Unit	87.500.000,00						8 Unit	622.192.500,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		3 Unit	3 Unit	80.000.000,00						3 Unit	0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Sesuai Standar						10.774.009.407,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		13.119.473.135,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	9 Paket		9 Paket	9 Paket	7.939.407,00						9 Paket	494.542.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	40.000.000,00						8 Dokumen	99.848.460,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	25.000.000,00						2 Kegiatan	50.000.000,00	
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	6 Paket		6 Paket	6 Paket	20.000.000,00						6 Paket	120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	450 Satuan Pendidikan		450 Satuan Pendidikan	450 Satuan Pendidikan	30.000.000,00						450 Satuan Pendidikan	82.074.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	617 Satuan Pendidikan		617 Satuan Pendidikan	617 Satuan Pendidikan	10.078.570.000,00						617 Satuan Pendidikan	9.993.930.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	617 Satuan Pendidikan		617 Satuan Pendidikan	617 Satuan Pendidikan	30.000.000,00						617 Satuan Pendidikan	44.643.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang		6 Ruang	6 Ruang	170.000.000,00						6 Ruang	1.587.243.175,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang		6 Ruang	6 Ruang	150.000.000,00						6 Ruang	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	8 Unit		8 Unit	8 Unit	87.500.000,00						8 Unit	622.192.500,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		3 Unit	3 Unit	80.000.000,00						3 Unit	0,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						87.500.000,00							622.192.500,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	8 Unit		8 Unit	2 Unit	87.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Bendoroto || 1 || Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pogalan || Desa Ngulangkulon || 1	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		8 Unit	622.192.500,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD						20.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	6 Paket		6 Paket	2 Paket	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pakel || 1 || Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Tanggaran || 1	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		6 Paket	120.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						30.000.000,00							82.074.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	450 Satuan Pendidikan		450 Satuan Pendidikan	140 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		450 Satuan Pendidikan	82.074.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						10.078.570.000,00							9.993.930.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	617 Satuan Pendidikan		617 Satuan Pendidikan	612 Satuan Pendidikan	10.078.570.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		617 Satuan Pendidikan	9.993.930.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						40.000.000,00							99.848.460,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		8 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		8 Dokumen	99.848.460,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru						170.000.000,00							1.587.243.175,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang		6 Ruang	1 Ruang	170.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Dukuh || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		6 Ruang	1.587.243.175,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Kegiatan	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						80.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Unit		3 Unit	1 Unit	80.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Unit	0,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						7.939.407,00							494.542.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	9 Paket		9 Paket	1 Paket	7.939.407,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		9 Paket	494.542.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						30.000.000,00							44.643.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	617 Satuan Pendidikan		617 Satuan Pendidikan	612 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		617 Satuan Pendidikan	44.643.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						150.000.000,00							0,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6 Ruang		6 Ruang	1 Ruang	150.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Gayam || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		6 Ruang	0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						7.489.231.200,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		8.733.727.000,00	
		Terlaksananya Layanan Peserta Didik, Manajemen dan Pembelajaran pada Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Sesuai Ketentuan						7.489.231.200,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		8.733.727.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00						1 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	25.000.000,00						8 Dokumen	62.446.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	10.000.000,00						1 Ruang	138.270.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1241 Peserta Didik		1241 Peserta Didik	1241 Peserta Didik	257.774.200,00						1241 Peserta Didik	90.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan		14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	15.000.000,00						14 Satuan Pendidikan	15.151.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	322 Satuan Pendidikan		322 Satuan Pendidikan	322 Satuan Pendidikan	7.151.457.000,00						322 Satuan Pendidikan	8.397.860.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sesuai Standar						7.489.231.200,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		8.733.727.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00						1 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	25.000.000,00						8 Dokumen	62.446.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	10.000.000,00						1 Ruang	138.270.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1241 Peserta Didik		1241 Peserta Didik	1241 Peserta Didik	257.774.200,00						1241 Peserta Didik	90.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan		14 Satuan Pendidikan	14 Satuan Pendidikan	15.000.000,00						14 Satuan Pendidikan	15.151.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	322 Satuan Pendidikan		322 Satuan Pendidikan	322 Satuan Pendidikan	7.151.457.000,00						322 Satuan Pendidikan	8.397.860.000,00	
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						15.000.000,00							15.151.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan		14 Satuan Pendidikan	34 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		14 Satuan Pendidikan	15.151.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						7.151.457.000,00							8.397.860.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	322 Satuan Pendidikan		322 Satuan Pendidikan	322 Satuan Pendidikan	7.151.457.000,00	Kab. Trenggalek	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		322 Satuan Pendidikan	8.397.860.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						25.000.000,00							62.446.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	8 Dokumen		8 Dokumen	4 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		8 Dokumen	62.446.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru						10.000.000,00							138.270.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Masaran || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Ruang	138.270.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						257.774.200,00							90.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1241 Peserta Didik		1241 Peserta Didik	12 (1241) Peserta Didik	257.774.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1241 Peserta Didik	90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Paket	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		Terlaksananya Layanan Peserta Didik, Manajemen dan Pembelajaran pada Sekolah Dasar Sesuai Ketentuan						39.775.350.000,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua dan keluarga peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		45.836.596.982,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar Sesuai Standar						39.775.350.000,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua dan keluarga peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		45.836.596.982,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	140 Orang	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	30.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						26.579.998.038,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		29.679.124.000,00	
		Terlaksananya Layanan Peserta Didik, Manajemen dan Pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama Sesuai Ketentuan						26.579.998.038,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		29.679.124.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sesuai Standar						26.579.998.038,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		29.679.124.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	83 Orang	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		Terlaksananya Layanan Peserta Didik, Manajemen dan Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini Sesuai Ketentuan						10.774.009.407,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		13.119.473.135,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Sesuai Standar						10.774.009.407,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		13.119.473.135,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	30.000.000,00						-	0,00	
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	-		-	100 Orang	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	210 Orang	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	0,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Layanan Peserta Didik, Manajemen dan Pembelajaran pada Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan Sesuai Ketentuan						7.489.231.200,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		8.733.727.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Sesuai Standar						7.489.231.200,00					Peserta didik; Pendidik dan tenaga kependidikan; Orang tua da peserta didik; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal; Anak-anak dari kelompok rentan		8.733.727.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-		-	22 Orang	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	15.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**105.000.000,00**							**115.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan						***65.000.000,00***							***115.000.000,00***	
			999.Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	94.52 Persentase		74.52 Persentase	79.52 Persentase	65.000.000,00						84.52 Persentase	115.000.000,00	
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						65.000.000,00					Pendidik dan tenaga kependidikan		65.000.000,00	
		Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar sesuai ketentuan						65.000.000,00					Pendidik dan tenaga kependidikan		65.000.000,00	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	2700 Buku		6900 Buku	2700 Buku	25.000.000,00						2700 Buku	25.000.000,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	521 Orang		560 Orang	521 Orang	40.000.000,00						521 Orang	40.000.000,00	
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						25.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	2700 Buku		6900 Buku	2700 Buku	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2700 Buku	25.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	521 Orang		560 Orang	521 Orang	40.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		521 Orang	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						40.000.000,00					Pendidik dan tenaga kependidikan		50.000.000,00	
		Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sesuai ketentuan						40.000.000,00					Pendidik dan tenaga kependidikan		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	10 Dokumen		0 Dokumen	10 Dokumen	40.000.000,00						10 Dokumen	50.000.000,00	
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	10 Dokumen		0 Dokumen	10 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		10 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**3.544.250.000,00**							**3.419.250.000,00**	
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan						***3.544.250.000,00***							***3.419.250.000,00***	
			999.Indeks Pemerataan Guru	0.81 poin		0.61 poin	0.66 poin	3.544.250.000,00						0.71 poin	3.419.250.000,00	
			999.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	92.66 %		62.66 %	70.16 %	3.544.250.000,00						77.66 %	3.419.250.000,00	
			999.Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	86.78 %		84.78 %	85.28 %	3.544.250.000,00						85.78 %	3.419.250.000,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						3.544.250.000,00					Pendidik dan tenaga kependidikan; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal		3.419.250.000,00	
		Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan sesuai ketentuan						3.544.250.000,00					Pendidik dan tenaga kependidikan; Lembaga pendidikan dan satuan pendidikan nonformal		3.419.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	225.000.000,00						12 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.319.250.000,00						12 Laporan	3.319.250.000,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						225.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	225.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						3.319.250.000,00							3.319.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.319.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Laporan	3.319.250.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						**40.000.000,00**							**175.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan						***20.000.000,00***							***175.000.000,00***	
			999.Persentase Usulan Izin/ Rekomendasi Satuan Pendidikan yang diterbitkan/ diperbaharui	99.68 %		99.48 %	99.53 %	20.000.000,00						99.58 %	175.000.000,00	
	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						20.000.000,00					Lembaga pendidikan/ Satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal		75.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai ketentuan						20.000.000,00					Lembaga pendidikan/ Satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00						4 Dokumen	75.000.000,00	
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						20.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						20.000.000,00					Lembaga pendidikan/ Satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal		100.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai ketentuan						20.000.000,00					Lembaga pendidikan/ Satuan Pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00						4 Dokumen	100.000.000,00	
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						20.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
6.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**						**80.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah						***40.000.000,00***							***75.000.000,00***	
			999.Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	84.14 Persentase		68.14 Persentase	72.14 Persentase	40.000.000,00						76.14 Persentase	75.000.000,00	
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						80.000.000,00					Pendidik dan tenaga kependidikan		150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten sesuai ketentuan						80.000.000,00					Pendidik dan tenaga kependidikan		150.000.000,00	
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	40.000.000,00						18 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota	300 Orang		300 Orang	300 Orang	40.000.000,00						300 Orang	75.000.000,00	
	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota						40.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	18 Dokumen		18 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		18 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.06.2.01.0010	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota						40.000.000,00							75.000.000,00	
		Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di kab/kota	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota	300 Orang		300 Orang	100 Orang	40.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		300 Orang	75.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						**171.597.088.183,00**							**170.272.316.188,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**165.909.413.183,00**							**164.584.641.188,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**165.909.413.183,00**							**164.584.641.188,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
7.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**126.114.259.183,00**							**103.531.600.994,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***126.114.259.183,00***							***103.471.600.994,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	126.114.259.183,00						100 %	103.471.600.994,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	126.114.259.183,00						100 %	103.471.600.994,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95.95 %		95.82 %	95.85 %	126.114.259.183,00						95.87 %	103.471.600.994,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						54.189.000,00					Masyarakat		100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun						54.189.000,00					Masyarakat		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	20.000.000,00						15 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79 Laporan		79 Laporan	79 Laporan	34.189.000,00						79 Laporan	50.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						34.189.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	79 Laporan		79 Laporan	79 Laporan	34.189.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		79 Laporan	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						125.146.716.010,00					Masyarakat		102.692.825.803,00	
		Tercapainya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan						125.146.716.010,00					Masyarakat		102.692.825.803,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73 Dokumen		73 Dokumen	73 Dokumen	289.920.000,00						73 Dokumen	286.836.827,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4104 Dokumen		4104 Dokumen	4104 Dokumen	41.832.483,00						4104 Dokumen	34.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85 Laporan		85 Laporan	85 Laporan	50.435.500,00						85 Laporan	59.825.982,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1815 Orang/bulan		1600 Orang/bulan	1850 Orang/bulan	124.764.528.027,00						1810 Orang/bulan	102.312.162.994,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						124.764.528.027,00							102.312.162.994,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1815 Orang/bulan		1600 Orang/bulan	1850 Orang/bulan	124.764.528.027,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1810 Orang/bulan	102.312.162.994,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						289.920.000,00							286.836.827,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73 Dokumen		73 Dokumen	73 Dokumen	289.920.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		73 Dokumen	286.836.827,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						41.832.483,00							34.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4104 Dokumen		4104 Dokumen	4104 Dokumen	41.832.483,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4104 Dokumen	34.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						50.435.500,00							59.825.982,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	85 Laporan		85 Laporan	85 Laporan	50.435.500,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		85 Laporan	59.825.982,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					Masyarakat		10.000.000,00	
		Tercapainya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan						10.000.000,00					Masyarakat		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4090 Dokumen		4090 Dokumen	4090 Dokumen	10.000.000,00						4090 Dokumen	10.000.000,00	
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4090 Dokumen		4090 Dokumen	4090 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4090 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						455.000.000,00					Masyarakat		279.406.952,00	
		Tercapainnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan						455.000.000,00					Masyarakat		279.406.952,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	396 Laporan		396 Laporan	396 Laporan	256.000.000,00						396 Laporan	92.266.927,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	65.000.000,00						1 Paket	62.325.517,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	108 Paket		108 Paket	108 Paket	134.000.000,00						108 Paket	124.814.508,00	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						134.000.000,00							124.814.508,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	108 Paket		108 Paket	108 Paket	134.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		108 Paket	124.814.508,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						65.000.000,00							62.325.517,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	65.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Paket	62.325.517,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						256.000.000,00							92.266.927,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	396 Laporan		396 Laporan	396 Laporan	256.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		396 Laporan	92.266.927,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5.000.000,00					Masyarakat		10.000.000,00	
		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5.000.000,00					Masyarakat		10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		30 Unit	30 Unit	5.000.000,00						20 Unit	10.000.000,00	
	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		30 Unit	30 Unit	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		20 Unit	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						253.917.840,00					Masyarakat		238.917.840,00	
		Terselenggaranya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						253.917.840,00					Masyarakat		238.917.840,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	253.917.840,00						60 Laporan	238.917.840,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						253.917.840,00							238.917.840,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	253.917.840,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		60 Laporan	238.917.840,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						189.436.333,00					Masyarakat		200.450.399,00	
		Terpeliharannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						189.436.333,00					Masyarakat		200.450.399,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	45.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	133.960.333,00						15 Unit	124.971.919,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		45 Unit	45 Unit	30.476.000,00						45 Unit	30.478.480,00	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						133.960.333,00							124.971.919,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	133.960.333,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Unit	124.971.919,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.476.000,00							30.478.480,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		45 Unit	45 Unit	30.476.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		45 Unit	30.478.480,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	45.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**36.878.040.400,00**							**56.619.429.879,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***34.918.040.400,00***							***53.909.429.879,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	95 Persentase		85 Persentase	90 Persentase	34.918.040.400,00						93 Persentase	53.909.429.879,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		60 %	70 %	34.918.040.400,00						80 %	53.909.429.879,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	75 %		46 %	55 %	34.918.040.400,00						61 %	53.909.429.879,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	80 %		47 %	54 %	34.918.040.400,00						61 %	53.909.429.879,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	34.918.040.400,00						100 %	53.909.429.879,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	85 %		65 %	70 %	34.918.040.400,00						75 %	53.909.429.879,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	34.918.040.400,00						100 %	53.909.429.879,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	92 %		89 %	90 %	34.918.040.400,00						90.5 %	53.909.429.879,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		12 %	12 %	34.918.040.400,00						11 %	53.909.429.879,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	34.918.040.400,00						100 %	53.909.429.879,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	34.918.040.400,00						100 %	53.909.429.879,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	34.918.040.400,00						100 %	53.909.429.879,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	34.918.040.400,00						100 %	53.909.429.879,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	34.918.040.400,00						100 %	53.909.429.879,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	34.918.040.400,00						100 %	53.909.429.879,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	34.918.040.400,00						100 %	53.909.429.879,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	34.918.040.400,00						100 %	53.909.429.879,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	34.918.040.400,00						100 %	53.909.429.879,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	34.918.040.400,00						100 %	53.909.429.879,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	34.918.040.400,00						100 %	53.909.429.879,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	34.918.040.400,00						100 %	53.909.429.879,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	34.918.040.400,00						0.67 %	53.909.429.879,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	10.40 %		10.80 %	10.70 %	34.918.040.400,00						10.60 %	53.909.429.879,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	94.60 %		94.20 %	94.30 %	34.918.040.400,00						94.40 %	53.909.429.879,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						5.476.057.400,00					Masyarakat		14.498.501.445,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						5.476.057.400,00					Masyarakat		14.498.501.445,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	250 Unit		0 Unit	250 Unit	150.000.000,00						250 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	116.608.650,00						22 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	4.230.454.350,00						20 Paket	5.021.117.823,00	
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		22 Unit	10 Unit	731.536.400,00						6 Unit	7.677.383.622,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		5 Unit	3 Unit	197.458.000,00						3 Unit	700.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas						731.536.400,00							7.677.383.622,00	
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		22 Unit	2 Unit	731.536.400,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		6 Unit	7.677.383.622,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						197.458.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		5 Unit	2 Unit	197.458.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Unit	700.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						50.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Unit	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						150.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	250 Unit		0 Unit	250 Unit	150.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		250 Unit	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						4.230.454.350,00							5.021.117.823,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	4.230.454.350,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		20 Paket	5.021.117.823,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						116.608.650,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	116.608.650,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		22 Paket	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						31.092.805.000,00					Masyarakat		41.012.990.205,00	
		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						31.092.805.000,00					Masyarakat		41.012.990.205,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85.023 Orang		84.983 Orang	84.993 Orang	10.000.000,00						85.003 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37.625 Orang		37.605 Orang	37.610 Orang	10.000.000,00						37.615 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.849 Orang		6.829 Orang	6.834 Orang	827.300.000,00						6.839 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	26.318.859.000,00						12 Dokumen	34.134.527.455,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	53.000.000,00						15 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00						4 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	210.000.000,00						68 Dokumen	1.390.258.750,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	410.000.000,00						12 Dokumen	410.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	10.000.000,00						16 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00						12 Dokumen	180.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	89.396.000,00						12 Dokumen	850.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00						12 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.820.000.000,00						3 Dokumen	1.773.857.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	51 Unit		49 Unit	51 Unit	10.000.000,00						51 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.843 Orang		6.823 Orang	6.828 Orang	110.000.000,00						6.833 Orang	138.022.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.580 Orang		6.560 Orang	6.565 Orang	60.000.000,00						6.570 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	526 Orang		321 Orang	357 Orang	10.000.000,00						402 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	719 Orang		1164 Orang	998 Orang	10.000.000,00						879 Orang	80.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7.260 Orang		7.220 Orang	7.230 Orang	10.000.000,00						7.240 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.493 Orang		5.659 Orang	4.851 Orang	659.250.000,00						4.274 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	55 Orang		35 Orang	30 Orang	10.000.000,00						25 Orang	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.624 Orang		1.584 Orang	1.594 Orang	10.000.000,00						1.604 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.165 Orang		10.125 Orang	10.135 Orang	10.000.000,00						10.145 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54.435 Orang		54.395 Orang	54.405 Orang	10.000.000,00						54.415 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137.851 Orang		137.811 Orang	137.821 Orang	10.000.000,00						137.831 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	448.674 Orang		448.634 Orang	448.644 Orang	10.000.000,00						448.654 Orang	100.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						60.000.000,00							100.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.580 Orang		6.560 Orang	6565 Orang	60.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		6.570 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						110.000.000,00							138.022.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.843 Orang		6.823 Orang	6828 Orang	110.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		6.833 Orang	138.022.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						827.300.000,00							100.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6.849 Orang		6.829 Orang	6834 Orang	827.300.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		6.839 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						10.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	37.625 Orang		37.605 Orang	37610 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		37.615 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	85.023 Orang		84.983 Orang	84993 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		85.003 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						10.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	448.674 Orang		448.634 Orang	448644 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		448.654 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	137.851 Orang		137.811 Orang	137821 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		137.831 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						10.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54.435 Orang		54.395 Orang	54405 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		54.415 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.165 Orang		10.125 Orang	10135 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		10.145 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						10.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1.624 Orang		1.584 Orang	1594 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1.604 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						659.250.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3.493 Orang		5.659 Orang	4851 Orang	659.250.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4.274 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						10.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7.260 Orang		7.220 Orang	7230 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		7.240 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						210.000.000,00							1.390.258.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	210.000.000,00	Kab. Trenggalek	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		68 Dokumen	1.390.258.750,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						410.000.000,00							410.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	410.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	410.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		16 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						70.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	180.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan						10.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						26.318.859.000,00							34.134.527.455,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	26.318.859.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	34.134.527.455,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						25.000.000,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	90.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						150.000.000,00							423.857.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Dokumen	423.857.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	51 Unit		49 Unit	51 Unit	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		51 Unit	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						10.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	719 Orang		1164 Orang	998 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		879 Orang	80.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						10.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	526 Orang		321 Orang	357 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		402 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	55 Orang		35 Orang	30 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		25 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						89.396.000,00							850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	89.396.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	850.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						53.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	53.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		15 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						20.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						76.940.000,00					Masyarakat		200.000.000,00	
		Terselenggarannya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						76.940.000,00					Masyarakat		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	76.940.000,00						8 Dokumen	200.000.000,00	
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						76.940.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	76.940.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		8 Dokumen	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						232.238.000,00					Masyarakat		907.938.229,00	
		Tercapainya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						232.238.000,00					Masyarakat		907.938.229,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	116.888.000,00						12 Dokumen	607.431.976,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	51 Unit		51 Unit	51 Unit	115.350.000,00						51 Unit	300.506.253,00	
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						115.350.000,00							300.506.253,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	51 Unit		51 Unit	51 Unit	115.350.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		51 Unit	300.506.253,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan						116.888.000,00							607.431.976,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	116.888.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	607.431.976,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						31.092.805.000,00					Masyarakat		41.012.990.205,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	100.000.000,00						-	252.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	75.000.000,00						-	168.000.000,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	80.000.000,00						-	52.975.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	15.000.000,00						-	48.350.000,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						80.000.000,00							52.975.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	30 Paket	80.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	52.975.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						15.000.000,00							48.350.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	24 Laporan	15.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	48.350.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						100.000.000,00							252.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	252.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						75.000.000,00							168.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	168.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**510.000.000,00**							**550.000.000,00**	
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan						***510.000.000,00***							***500.000.000,00***	
			999.Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	100 %		100 %	100 %	510.000.000,00						100 %	500.000.000,00	
			999.Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	100 %		100 %	100 %	510.000.000,00						100 %	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	510.000.000,00						100 %	500.000.000,00	
			999.Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	2.175 %		2.160 %	2.165 %	510.000.000,00						2.168 %	500.000.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						10.000.000,00					Masyarakat		50.000.000,00	
		Terpenuhinya tenaga kesehatan yang berpraktik dan ber-SIP						10.000.000,00					Masyarakat		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00						12 Dokumen	50.000.000,00	
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						450.000.000,00					Masyarakat		450.000.000,00	
		Terlaksananya kredensial/ rekredensial tenaga kesehatan						450.000.000,00					Masyarakat		450.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	55 Orang		35 Orang	40 Orang	450.000.000,00						45 Orang	450.000.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						450.000.000,00							450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	55 Orang		35 Orang	40 Orang	450.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		45 Orang	450.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Masyarakat		50.000.000,00	
		Terencananya Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Masyarakat		50.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	2670 Orang	50.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
10.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**634.416.000,00**							**721.916.000,00**	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman						***634.416.000,00***							***681.916.000,00***	
			999.Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	99 %		98.6 %	98.7 %	634.416.000,00						98.8 %	681.916.000,00	
			999.Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang memenuhi persyaratan perizinan	92 %		88 %	89 %	634.416.000,00						90 %	681.916.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	634.416.000,00						100 %	681.916.000,00	
			999.Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu	89 %		87.90 %	88 %	634.416.000,00						88.30 %	681.916.000,00	
			999.Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPPIRT sesuai standar	89 %		87.90 %	88 %	634.416.000,00						88.30 %	681.916.000,00	
			999.Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	100 %		100 %	100 %	634.416.000,00						100 %	681.916.000,00	
			999.Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	96 %		92 %	93 %	634.416.000,00						94 %	681.916.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	77 %		73 %	74 %	634.416.000,00						75 %	681.916.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						73.758.000,00					Masyarakat		101.534.000,00	
		Tercapainya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						73.758.000,00					Masyarakat		101.534.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	130 Dokumen		126 Dokumen	126 Dokumen	73.758.000,00						128 Dokumen	101.534.000,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						73.758.000,00							101.534.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	130 Dokumen		126 Dokumen	126 Dokumen	73.758.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		128 Dokumen	101.534.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						272.207.000,00					Masyarakat		316.869.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						272.207.000,00					Masyarakat		316.869.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	130 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	272.207.000,00						125 Dokumen	316.869.000,00	
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						272.207.000,00							316.869.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	130 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	272.207.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		125 Dokumen	316.869.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						20.000.000,00					Masyarakat		40.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						20.000.000,00					Masyarakat		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000,00						100 Dokumen	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						20.000.000,00								40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		100 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						15.000.000,00					Masyarakat		40.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						15.000.000,00					Masyarakat		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	150 Dokumen		150 Dokumen	150 Dokumen	15.000.000,00						150 Dokumen	40.000.000,00	
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						15.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	150 Dokumen		150 Dokumen	150 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		150 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						253.451.000,00					Masyarakat		223.513.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						253.451.000,00					Masyarakat		223.513.000,00	
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	200 Unit		192 Unit	197 Unit	253.451.000,00						197 Unit	223.513.000,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						253.451.000,00							223.513.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	200 Unit		192 Unit	197 Unit	253.451.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		197 Unit	223.513.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
11.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**3.442.697.600,00**							**4.511.694.315,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***3.442.697.600,00***							***4.511.694.315,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	74 %		66 %	68 %	3.442.697.600,00						70 %	4.511.694.315,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		11 %	15 %	3.442.697.600,00						20 %	4.511.694.315,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00					Masyarakat		97.418.000,00	
		Terselenggaranya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00					Masyarakat		97.418.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00						12 Dokumen	97.418.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						75.000.000,00							97.418.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	97.418.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						275.680.000,00					Masyarakat		900.000.000,00	
		Meningkatnya Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih Dan Sehat						275.680.000,00					Masyarakat		900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	275.680.000,00						24 Dokumen	900.000.000,00	
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat						275.680.000,00							900.000.000,00	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	275.680.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		24 Dokumen	900.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						3.092.017.600,00					Masyarakat		3.514.276.315,00	
		Terpenuhinya UKBM Yang Dibina						3.092.017.600,00					Masyarakat		3.514.276.315,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	3.092.017.600,00						16 Dokumen	3.514.276.315,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						3.092.017.600,00							3.514.276.315,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	3.092.017.600,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		16 Dokumen	3.514.276.315,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.687.675.000,00**							**5.687.675.000,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**5.687.675.000,00**							**5.687.675.000,00**	
12.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**273.400.000,00**							**273.400.000,00**	
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk						***263.400.000,00***							***263.400.000,00***	
			999.Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15- 19)	20		20.7	20.5	263.400.000,00						20.3	263.400.000,00	
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						206.400.000,00					Masyarakat		206.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya Cakupan dan kualitas pengelolaan data dan informasi melalui teknologi (SIGA)						206.400.000,00					Masyarakat		206.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	5.000.000,00						14 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	10.000.000,00	
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Laporan	10.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.02.0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mealui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		14 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						67.000.000,00					Masyarakat		67.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)						67.000.000,00					Masyarakat		67.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	7.000.000,00						-	7.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi Mandiri	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0042	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	14 Kelompok	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0043	Fasilitasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terwujudnya Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi Mandiri	-		-	157 Kampung KB	50.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0053	Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota						7.000.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Pemanfaatan (PJPK) dan Rencana Aksi Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	7.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.02.2.01.0055	Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SD/sederajat dan SMP/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD kabupaten/ serta Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) di Kampung KB/Ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat.	-		-	4 Laporan / Dokumen	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Terkendalinya Cakupan dan kualitas pengelolaan data dan informasi melalui teknologi (SIGA)						206.400.000,00					Masyarakat		206.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	-	191.400.000,00						-	191.400.000,00	
	2.14.02.2.02.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						191.400.000,00							191.400.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	12 Laporan	191.400.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		-	191.400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
13.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**1.434.075.000,00**							**1.434.075.000,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)						***1.334.075.000,00***							***1.334.075.000,00***	
			999.Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	72.9 %		72.5 %	72.6 %	1.334.075.000,00						72.7 %	1.334.075.000,00	
			999.Persentase KB Pasca persalinan (KBPP)	34.08 %		33.88 %	33.93 %	1.334.075.000,00						33.98 %	1.334.075.000,00	
			999.Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	8 %		8.2 %	8.15 %	1.334.075.000,00						8.1 %	1.334.075.000,00	
			999.Peserta Aktif MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)	20.25 %		20 %	20.10 %	1.334.075.000,00						20.15 %	1.334.075.000,00	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						880.520.000,00					Masyarakat		880.520.000,00	
		Meningkatnya Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sesuai Kearifan Lokal						880.520.000,00					Masyarakat		880.520.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	25 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	125.000.000,00						25 Dokumen	125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	168 Laporan		168 Laporan	168 Laporan	455.520.000,00						168 Laporan	455.520.000,00	
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	140 Laporan		140 Laporan	140 Laporan	100.000.000,00						140 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	7 Organisasi		7 Organisasi	7 Organisasi	200.000.000,00						7 Organisasi	200.000.000,00	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana						455.520.000,00							455.520.000,00	
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	168 Laporan		168 Laporan	168 Laporan	455.520.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-BOKB-KB Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		168 Laporan	455.520.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	140 Laporan		140 Laporan	140 Laporan	100.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		140 Laporan	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						125.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	25 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		25 Dokumen	125.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						200.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	7 Organisasi		7 Organisasi	7 Organisasi	200.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		7 Organisasi	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						152.750.000,00					Masyarakat		152.750.000,00	
		Meningkatnya Cakupan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						152.750.000,00					Masyarakat		152.750.000,00	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1128 Orang		1128 Orang	1128 Orang	117.750.000,00						1128 Orang	117.750.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	14 Unit		14 Unit	14 Unit	15.000.000,00						14 Unit	15.000.000,00	
	2.14.03.2.02.0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	14 Unit		14 Unit	14 Unit	15.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		14 Unit	15.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						117.750.000,00							117.750.000,00	
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1128 Orang		1128 Orang	1128 Orang	117.750.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1128 Orang	117.750.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)						20.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Laporan	20.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						400.805.000,00					Masayarakat		400.805.000,00	
		Meningkatnya Cakupan Faskes Pelayanan KB yang memperoleh alat dan obat kontrasepsi (Alokon) sesuai kebutuhan						400.805.000,00					Masayarakat		400.805.000,00	
			Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	3 Orang		3 Orang	3 Orang	5.000.000,00						3 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16963 Orang		16896 Orang	16912 Orang	166.305.000,00						16929 Orang	166.305.000,00	
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0 Orang		0 Orang	5 Orang	50.000.000,00						0 Orang	50.000.000,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						166.305.000,00							166.305.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	16963 Orang		16896 Orang	16912 Orang	166.305.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-BOKB-KB Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		16929 Orang	166.305.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Laporan	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0 Orang		0 Orang	5 Orang	50.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		0 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	3 Orang		3 Orang	3 Orang	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Orang	5.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningkatnya Cakupan Faskes Pelayanan KB yang memperoleh alat dan obat kontrasepsi (Alokon) sesuai kebutuhan						400.805.000,00					Masayarakat		400.805.000,00	
			Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dan Jumlah Gerak Pelayanan bergerak/MUYAN	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	49.500.000,00						-	49.500.000,00	
	2.14.03.2.03.0028	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Tim Pelayanan KB Bergerak dan atau Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN))						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya dukungan operasional pelayanan KB Bergerak (Tim pelayanan KB Bergerak dan atau Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN))	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak dan Jumlah Gerak Pelayanan bergerak/MUYAN	-		-	4 Layanan	30.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		-	30.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						49.500.000,00							49.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	12 Laporan	49.500.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	49.500.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
14.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**3.980.200.000,00**							**3.980.200.000,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)						***3.980.200.000,00***							***3.980.200.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	65.35 %		65.23 %	65.26 %	3.980.200.000,00						65.29 %	3.980.200.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						264.400.000,00					Masyarakat		264.400.000,00	
		Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)						264.400.000,00					Masyarakat		264.400.000,00	
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit		10 Unit	10 Unit	130.000.000,00						10 Unit	130.000.000,00	
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)						130.000.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 Unit		10 Unit	10 Unit	130.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		10 Unit	130.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						3.715.800.000,00					Masyarakat		3.715.800.000,00	
		Meningkatnya Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang berperan serta dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						3.715.800.000,00					Masyarakat		3.715.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan		10 laporan	10 laporan	1.689.000.000,00						10 laporan	1.689.000.000,00	
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						1.689.000.000,00							1.689.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	10 laporan		10 laporan	10 laporan	1.689.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		10 laporan	1.689.000.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)						264.400.000,00					Masyarakat		264.400.000,00	
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	-	134.400.000,00						-	134.400.000,00	
	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)						134.400.000,00							134.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	4 Laporan / Dokumen	134.400.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	134.400.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Meningkatnya Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang berperan serta dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						3.715.800.000,00					Masyarakat		3.715.800.000,00	
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	-	2.026.800.000,00						-	2.026.800.000,00	
	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						2.026.800.000,00							2.026.800.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	6756 Keluarga	2.026.800.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	2.026.800.000,00	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		PUSKESMAS SURUH						**3.672.246.000,00**							**3.672.246.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.672.246.000,00**							**3.672.246.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.672.246.000,00**							**3.672.246.000,00**	
15.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.002.000.000,00**							**3.002.000.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Suruh						***3.002.000.000,00***							***3.002.000.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	3.002.000.000,00						100 %	3.002.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						3.002.000.000,00					-		3.002.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						3.002.000.000,00					-		3.002.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.002.000.000,00						1 Unit Kerja	3.002.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.002.000.000,00							3.002.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.002.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	3.002.000.000,00	PUSKESMAS SURUH
16.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**603.940.000,00**							**603.940.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Suruh						***561.752.500,00***							***561.752.500,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	561.752.500,00						100 Persentase	561.752.500,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		50 %	70 %	561.752.500,00						80 %	561.752.500,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	100 %		71 %	80 %	561.752.500,00						86 %	561.752.500,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	71 %		43 %	43 %	561.752.500,00						57 %	561.752.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	561.752.500,00						100 %	561.752.500,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	85 %		65 %	70 %	561.752.500,00						75 %	561.752.500,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	561.752.500,00						100 %	561.752.500,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	90.3 %		90.3 %	90.3 %	561.752.500,00						90.3 %	561.752.500,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	561.752.500,00						11 %	561.752.500,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	561.752.500,00						100 %	561.752.500,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	561.752.500,00						100 %	561.752.500,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	561.752.500,00						100 %	561.752.500,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	561.752.500,00						100 %	561.752.500,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	561.752.500,00						100 %	561.752.500,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	561.752.500,00						100 %	561.752.500,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	561.752.500,00						100 %	561.752.500,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	561.752.500,00						100 %	561.752.500,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	561.752.500,00						100 %	561.752.500,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	561.752.500,00						100 %	561.752.500,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	561.752.500,00						100 %	561.752.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	561.752.500,00						100 %	561.752.500,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	561.752.500,00						0.67 %	561.752.500,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	6.84 %		6.88 %	6.87 %	561.752.500,00						6.86 %	561.752.500,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	92.5 %		91.7 %	91.75 %	561.752.500,00						92 %	561.752.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2351 Orang		2350 Orang	2350 Orang	9.150.000,00						2350 Orang	9.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000,00						12 Dokumen	13.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	218.541.000,00						12 Dokumen	218.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.925.000,00						12 Dokumen	35.925.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	156.910.000,00						12 Dokumen	156.910.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang		200 Orang	200 Orang	19.824.000,00						201 Orang	19.824.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		303 Orang	303 Orang	34.650.000,00						303 Orang	34.650.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang		91 Orang	91 Orang	16.200.000,00						91 Orang	16.200.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2351 Orang		2350 Orang	2350 Orang	9.150.000,00						2350 Orang	9.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000,00						12 Dokumen	13.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	218.541.000,00						12 Dokumen	218.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.925.000,00						12 Dokumen	35.925.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	156.910.000,00						12 Dokumen	156.910.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang		200 Orang	200 Orang	19.824.000,00						201 Orang	19.824.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		303 Orang	303 Orang	34.650.000,00						303 Orang	34.650.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang		91 Orang	91 Orang	16.200.000,00						91 Orang	16.200.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2351 Orang		2350 Orang	2350 Orang	9.150.000,00						2350 Orang	9.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000,00						12 Dokumen	13.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	218.541.000,00						12 Dokumen	218.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.925.000,00						12 Dokumen	35.925.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	156.910.000,00						12 Dokumen	156.910.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang		200 Orang	200 Orang	19.824.000,00						201 Orang	19.824.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		303 Orang	303 Orang	34.650.000,00						303 Orang	34.650.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang		91 Orang	91 Orang	16.200.000,00						91 Orang	16.200.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2351 Orang		2350 Orang	2350 Orang	9.150.000,00						2350 Orang	9.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000,00						12 Dokumen	13.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	218.541.000,00						12 Dokumen	218.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.925.000,00						12 Dokumen	35.925.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	156.910.000,00						12 Dokumen	156.910.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang		200 Orang	200 Orang	19.824.000,00						201 Orang	19.824.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		303 Orang	303 Orang	34.650.000,00						303 Orang	34.650.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang		91 Orang	91 Orang	16.200.000,00						91 Orang	16.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2351 Orang		2350 Orang	2350 Orang	9.150.000,00						2350 Orang	9.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000,00						12 Dokumen	13.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	218.541.000,00						12 Dokumen	218.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.925.000,00						12 Dokumen	35.925.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	156.910.000,00						12 Dokumen	156.910.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang		200 Orang	200 Orang	19.824.000,00						201 Orang	19.824.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		303 Orang	303 Orang	34.650.000,00						303 Orang	34.650.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang		91 Orang	91 Orang	16.200.000,00						91 Orang	16.200.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2351 Orang		2350 Orang	2350 Orang	9.150.000,00						2350 Orang	9.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000,00						12 Dokumen	13.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	218.541.000,00						12 Dokumen	218.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.925.000,00						12 Dokumen	35.925.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	156.910.000,00						12 Dokumen	156.910.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang		200 Orang	200 Orang	19.824.000,00						201 Orang	19.824.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		303 Orang	303 Orang	34.650.000,00						303 Orang	34.650.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang		91 Orang	91 Orang	16.200.000,00						91 Orang	16.200.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2351 Orang		2350 Orang	2350 Orang	9.150.000,00						2350 Orang	9.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000,00						12 Dokumen	13.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	218.541.000,00						12 Dokumen	218.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.925.000,00						12 Dokumen	35.925.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	156.910.000,00						12 Dokumen	156.910.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang		200 Orang	200 Orang	19.824.000,00						201 Orang	19.824.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		303 Orang	303 Orang	34.650.000,00						303 Orang	34.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang		91 Orang	91 Orang	16.200.000,00						91 Orang	16.200.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2351 Orang		2350 Orang	2350 Orang	9.150.000,00						2350 Orang	9.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000,00						12 Dokumen	13.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	218.541.000,00						12 Dokumen	218.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.925.000,00						12 Dokumen	35.925.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	156.910.000,00						12 Dokumen	156.910.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang		200 Orang	200 Orang	19.824.000,00						201 Orang	19.824.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		303 Orang	303 Orang	34.650.000,00						303 Orang	34.650.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang		91 Orang	91 Orang	16.200.000,00						91 Orang	16.200.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2351 Orang		2350 Orang	2350 Orang	9.150.000,00						2350 Orang	9.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000,00						12 Dokumen	13.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	218.541.000,00						12 Dokumen	218.541.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.925.000,00						12 Dokumen	35.925.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	156.910.000,00						12 Dokumen	156.910.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang		200 Orang	200 Orang	19.824.000,00						201 Orang	19.824.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		303 Orang	303 Orang	34.650.000,00						303 Orang	34.650.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang		91 Orang	91 Orang	16.200.000,00						91 Orang	16.200.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2351 Orang		2350 Orang	2350 Orang	9.150.000,00						2350 Orang	9.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000,00						12 Dokumen	13.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	218.541.000,00						12 Dokumen	218.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.925.000,00						12 Dokumen	35.925.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	156.910.000,00						12 Dokumen	156.910.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang		200 Orang	200 Orang	19.824.000,00						201 Orang	19.824.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		303 Orang	303 Orang	34.650.000,00						303 Orang	34.650.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang		91 Orang	91 Orang	16.200.000,00						91 Orang	16.200.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2351 Orang		2350 Orang	2350 Orang	9.150.000,00						2350 Orang	9.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000,00						12 Dokumen	13.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	218.541.000,00						12 Dokumen	218.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.925.000,00						12 Dokumen	35.925.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	156.910.000,00						12 Dokumen	156.910.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang		200 Orang	200 Orang	19.824.000,00						201 Orang	19.824.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		303 Orang	303 Orang	34.650.000,00						303 Orang	34.650.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang		91 Orang	91 Orang	16.200.000,00						91 Orang	16.200.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2351 Orang		2350 Orang	2350 Orang	9.150.000,00						2350 Orang	9.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000,00						12 Dokumen	13.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	218.541.000,00						12 Dokumen	218.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.925.000,00						12 Dokumen	35.925.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	156.910.000,00						12 Dokumen	156.910.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang		200 Orang	200 Orang	19.824.000,00						201 Orang	19.824.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		303 Orang	303 Orang	34.650.000,00						303 Orang	34.650.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang		91 Orang	91 Orang	16.200.000,00						91 Orang	16.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						19.824.000,00							19.824.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	201 Orang		200 Orang	211 Orang	19.824.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		201 Orang	19.824.000,00	PUSKESMAS SURUH
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						9.150.000,00							9.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2351 Orang		2350 Orang	2901 Orang	9.150.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2350 Orang	9.150.000,00	PUSKESMAS SURUH
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						16.200.000,00							16.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	92 Orang		91 Orang	53 Orang	16.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		91 Orang	16.200.000,00	PUSKESMAS SURUH
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						34.650.000,00							34.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		303 Orang	204 Orang	34.650.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		303 Orang	34.650.000,00	PUSKESMAS SURUH
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						218.541.000,00							218.541.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	218.541.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	218.541.000,00	PUSKESMAS SURUH
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						2.250.000,00							2.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	2.250.000,00	PUSKESMAS SURUH
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						35.925.000,00							35.925.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.925.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	35.925.000,00	PUSKESMAS SURUH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						156.910.000,00							156.910.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	156.910.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	156.910.000,00	PUSKESMAS SURUH
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						300.000,00							300.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	300.000,00	PUSKESMAS SURUH
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						13.500.000,00							13.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	13.500.000,00	PUSKESMAS SURUH
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	12.315.000,00						-	12.315.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	12.315.000,00						-	12.315.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai						603.940.000,00					-		603.940.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	12.315.000,00						-	12.315.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	12.315.000,00						-	12.315.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	12.315.000,00						-	12.315.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	12.315.000,00						-	12.315.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	12.315.000,00						-	12.315.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	12.315.000,00						-	12.315.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	12.315.000,00						-	12.315.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	12.315.000,00						-	12.315.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	12.315.000,00						-	12.315.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						603.940.000,00					-		603.940.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.187.500,00						-	42.187.500,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	12.315.000,00						-	12.315.000,00	
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						12.315.000,00							12.315.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	91 Orang	12.315.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	12.315.000,00	PUSKESMAS SURUH
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						42.187.500,00							42.187.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	42.187.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	42.187.500,00	PUSKESMAS SURUH
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						42.187.500,00							42.187.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	42.187.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	42.187.500,00	PUSKESMAS SURUH
17.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**66.306.000,00**							**66.306.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Suruh						***66.306.000,00***							***66.306.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	86 Persentase		78 Persentase	80 Persentase	66.306.000,00						82 Persentase	66.306.000,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		22 %	25 %	66.306.000,00						28 %	66.306.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						66.306.000,00					-		66.306.000,00	
		Tercapainya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						66.306.000,00					-		66.306.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	66.306.000,00						12 Dokumen	66.306.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						66.306.000,00							66.306.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	66.306.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	66.306.000,00	PUSKESMAS SURUH
		PUSKESMAS PUCANGANAK						**2.458.706.000,00**							**2.296.016.496,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.458.706.000,00**							**2.296.016.496,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.458.706.000,00**							**2.296.016.496,00**	
18.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.950.500.000,00**							**1.950.500.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Pucanganak						***1.950.500.000,00***							***1.950.500.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	1.950.500.000,00						100 %	1.950.500.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.950.500.000,00					-		1.950.500.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						1.950.500.000,00					-		1.950.500.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja		100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	1.950.500.000,00						100 Unit Kerja	1.950.500.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.950.500.000,00							1.950.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja		100 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.950.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Pucanganak || 1	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		100 Unit Kerja	1.950.500.000,00	PUSKESMAS PUCANGANAK
19.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**465.912.000,00**							**337.900.496,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Pucanganak						***465.912.000,00***							***337.900.496,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	86 Persentase		75 Persentase	78 Persentase	465.912.000,00						80 Persentase	337.900.496,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		55 %	75 %	465.912.000,00						80 %	337.900.496,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	78 %		49 %	58 %	465.912.000,00						64 %	337.900.496,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	71 %		43 %	57 %	465.912.000,00						57 %	337.900.496,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	465.912.000,00						100 %	337.900.496,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	93 %		81.5 %	82 %	465.912.000,00						85 %	337.900.496,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	465.912.000,00						100 %	337.900.496,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	92.2 %		92.2 %	92.2 %	465.912.000,00						92.2 %	337.900.496,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	465.912.000,00						11 %	337.900.496,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	465.912.000,00						100 %	337.900.496,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	465.912.000,00						100 %	337.900.496,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		100 %	100 %	465.912.000,00						100 %	337.900.496,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	465.912.000,00						100 %	337.900.496,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	465.912.000,00						100 %	337.900.496,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	465.912.000,00						100 %	337.900.496,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	465.912.000,00						100 %	337.900.496,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	465.912.000,00						100 %	337.900.496,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	465.912.000,00						100 %	337.900.496,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	465.912.000,00						100 %	337.900.496,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	465.912.000,00						100 %	337.900.496,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	465.912.000,00						100 %	337.900.496,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	465.912.000,00						0.67 %	337.900.496,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	10.8 %		11.2 %	11.1 %	465.912.000,00						11 %	337.900.496,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	96.07 %		96.03 %	96.04 %	465.912.000,00						96.05 %	337.900.496,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1885 Orang		1883 Orang	1883 Orang	12.000.000,00						1884 Orang	15.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.700.000,00						12 Dokumen	3.075.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	175.731.000,00						12 Dokumen	108.532.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	17.100.000,00						12 Dokumen	4.403.612,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	129.800.000,00						16 Dokumen	131.692.980,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang		140 Orang	141 Orang	19.824.000,00						142 Orang	37.704.366,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang		143 Orang	144 Orang	5.850.000,00						144 Orang	4.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang		51 Orang	51 Orang	22.050.000,00						52 Orang	10.800.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1885 Orang		1883 Orang	1883 Orang	12.000.000,00						1884 Orang	15.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.700.000,00						12 Dokumen	3.075.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	175.731.000,00						12 Dokumen	108.532.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	17.100.000,00						12 Dokumen	4.403.612,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	129.800.000,00						16 Dokumen	131.692.980,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang		140 Orang	141 Orang	19.824.000,00						142 Orang	37.704.366,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang		143 Orang	144 Orang	5.850.000,00						144 Orang	4.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang		51 Orang	51 Orang	22.050.000,00						52 Orang	10.800.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1885 Orang		1883 Orang	1883 Orang	12.000.000,00						1884 Orang	15.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.700.000,00						12 Dokumen	3.075.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	175.731.000,00						12 Dokumen	108.532.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	17.100.000,00						12 Dokumen	4.403.612,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	129.800.000,00						16 Dokumen	131.692.980,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang		140 Orang	141 Orang	19.824.000,00						142 Orang	37.704.366,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang		143 Orang	144 Orang	5.850.000,00						144 Orang	4.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang		51 Orang	51 Orang	22.050.000,00						52 Orang	10.800.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1885 Orang		1883 Orang	1883 Orang	12.000.000,00						1884 Orang	15.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.700.000,00						12 Dokumen	3.075.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	175.731.000,00						12 Dokumen	108.532.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	17.100.000,00						12 Dokumen	4.403.612,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	129.800.000,00						16 Dokumen	131.692.980,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang		140 Orang	141 Orang	19.824.000,00						142 Orang	37.704.366,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang		143 Orang	144 Orang	5.850.000,00						144 Orang	4.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang		51 Orang	51 Orang	22.050.000,00						52 Orang	10.800.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1885 Orang		1883 Orang	1883 Orang	12.000.000,00						1884 Orang	15.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.700.000,00						12 Dokumen	3.075.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	175.731.000,00						12 Dokumen	108.532.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	17.100.000,00						12 Dokumen	4.403.612,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	129.800.000,00						16 Dokumen	131.692.980,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang		140 Orang	141 Orang	19.824.000,00						142 Orang	37.704.366,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang		143 Orang	144 Orang	5.850.000,00						144 Orang	4.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang		51 Orang	51 Orang	22.050.000,00						52 Orang	10.800.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1885 Orang		1883 Orang	1883 Orang	12.000.000,00						1884 Orang	15.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.700.000,00						12 Dokumen	3.075.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	175.731.000,00						12 Dokumen	108.532.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	17.100.000,00						12 Dokumen	4.403.612,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	129.800.000,00						16 Dokumen	131.692.980,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang		140 Orang	141 Orang	19.824.000,00						142 Orang	37.704.366,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang		143 Orang	144 Orang	5.850.000,00						144 Orang	4.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang		51 Orang	51 Orang	22.050.000,00						52 Orang	10.800.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1885 Orang		1883 Orang	1883 Orang	12.000.000,00						1884 Orang	15.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.700.000,00						12 Dokumen	3.075.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	175.731.000,00						12 Dokumen	108.532.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	17.100.000,00						12 Dokumen	4.403.612,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	129.800.000,00						16 Dokumen	131.692.980,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang		140 Orang	141 Orang	19.824.000,00						142 Orang	37.704.366,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang		143 Orang	144 Orang	5.850.000,00						144 Orang	4.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang		51 Orang	51 Orang	22.050.000,00						52 Orang	10.800.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1885 Orang		1883 Orang	1883 Orang	12.000.000,00						1884 Orang	15.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.700.000,00						12 Dokumen	3.075.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	175.731.000,00						12 Dokumen	108.532.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	17.100.000,00						12 Dokumen	4.403.612,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	129.800.000,00						16 Dokumen	131.692.980,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang		140 Orang	141 Orang	19.824.000,00						142 Orang	37.704.366,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang		143 Orang	144 Orang	5.850.000,00						144 Orang	4.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang		51 Orang	51 Orang	22.050.000,00						52 Orang	10.800.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1885 Orang		1883 Orang	1883 Orang	12.000.000,00						1884 Orang	15.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.700.000,00						12 Dokumen	3.075.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	175.731.000,00						12 Dokumen	108.532.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	17.100.000,00						12 Dokumen	4.403.612,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	129.800.000,00						16 Dokumen	131.692.980,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang		140 Orang	141 Orang	19.824.000,00						142 Orang	37.704.366,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang		143 Orang	144 Orang	5.850.000,00						144 Orang	4.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang		51 Orang	51 Orang	22.050.000,00						52 Orang	10.800.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1885 Orang		1883 Orang	1883 Orang	12.000.000,00						1884 Orang	15.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.700.000,00						12 Dokumen	3.075.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	175.731.000,00						12 Dokumen	108.532.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	17.100.000,00						12 Dokumen	4.403.612,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	129.800.000,00						16 Dokumen	131.692.980,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang		140 Orang	141 Orang	19.824.000,00						142 Orang	37.704.366,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang		143 Orang	144 Orang	5.850.000,00						144 Orang	4.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang		51 Orang	51 Orang	22.050.000,00						52 Orang	10.800.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1885 Orang		1883 Orang	1883 Orang	12.000.000,00						1884 Orang	15.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.700.000,00						12 Dokumen	3.075.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	175.731.000,00						12 Dokumen	108.532.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	17.100.000,00						12 Dokumen	4.403.612,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	129.800.000,00						16 Dokumen	131.692.980,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang		140 Orang	141 Orang	19.824.000,00						142 Orang	37.704.366,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang		143 Orang	144 Orang	5.850.000,00						144 Orang	4.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang		51 Orang	51 Orang	22.050.000,00						52 Orang	10.800.000,00	
		Terselenggaranya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1885 Orang		1883 Orang	1883 Orang	12.000.000,00						1884 Orang	15.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.700.000,00						12 Dokumen	3.075.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	175.731.000,00						12 Dokumen	108.532.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	17.100.000,00						12 Dokumen	4.403.612,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	129.800.000,00						16 Dokumen	131.692.980,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang		140 Orang	141 Orang	19.824.000,00						142 Orang	37.704.366,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang		143 Orang	144 Orang	5.850.000,00						144 Orang	4.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang		51 Orang	51 Orang	22.050.000,00						52 Orang	10.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						19.824.000,00							37.704.366,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	142 Orang		140 Orang	130 Orang	19.824.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Pucanganak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		142 Orang	37.704.366,00	PUSKESMAS PUCANGANAK
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						12.000.000,00							15.900.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1885 Orang		1883 Orang	1770 Orang	12.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Pucanganak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1884 Orang	15.900.000,00	PUSKESMAS PUCANGANAK
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						22.050.000,00							10.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	55 Orang		51 Orang	48 Orang	22.050.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Pucanganak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		52 Orang	10.800.000,00	PUSKESMAS PUCANGANAK
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						5.850.000,00							4.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	145 Orang		143 Orang	157 Orang	5.850.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Pucanganak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		144 Orang	4.200.000,00	PUSKESMAS PUCANGANAK
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						175.731.000,00							108.532.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	175.731.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Pucanganak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	108.532.200,00	PUSKESMAS PUCANGANAK
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						3.750.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Pucanganak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	3.600.000,00	PUSKESMAS PUCANGANAK
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						17.100.000,00							4.403.612,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	17.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Pucanganak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	4.403.612,00	PUSKESMAS PUCANGANAK
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						129.800.000,00							131.692.980,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	129.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Pucanganak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		16 Dokumen	131.692.980,00	PUSKESMAS PUCANGANAK
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						600.000,00							300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Pucanganak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	300.000,00	PUSKESMAS PUCANGANAK
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						12.700.000,00							3.075.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Pucanganak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	3.075.000,00	PUSKESMAS PUCANGANAK
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	63.550.000,00						-	14.678.694,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.957.000,00						-	3.013.644,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	63.550.000,00						-	14.678.694,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.957.000,00						-	3.013.644,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	63.550.000,00						-	14.678.694,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.957.000,00						-	3.013.644,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	63.550.000,00						-	14.678.694,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.957.000,00						-	3.013.644,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	63.550.000,00						-	14.678.694,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.957.000,00						-	3.013.644,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	63.550.000,00						-	14.678.694,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.957.000,00						-	3.013.644,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	63.550.000,00						-	14.678.694,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.957.000,00						-	3.013.644,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	63.550.000,00						-	14.678.694,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.957.000,00						-	3.013.644,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	63.550.000,00						-	14.678.694,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.957.000,00						-	3.013.644,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	63.550.000,00						-	14.678.694,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.957.000,00						-	3.013.644,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	63.550.000,00						-	14.678.694,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.957.000,00						-	3.013.644,00	
		Terselenggaranya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						465.912.000,00					-		337.900.496,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	63.550.000,00						-	14.678.694,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.957.000,00						-	3.013.644,00	
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						2.957.000,00							3.013.644,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	48 Orang	2.957.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Pucanganak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	3.013.644,00	PUSKESMAS PUCANGANAK
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						63.550.000,00							14.678.694,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	63.550.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Pucanganak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	14.678.694,00	PUSKESMAS PUCANGANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
20.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**42.294.000,00**							**7.616.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Pucanganak						***42.294.000,00***							***7.616.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	92 Persentase		84 Persentase	86 Persentase	42.294.000,00						88 Persentase	7.616.000,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		13 %	17 %	42.294.000,00						22 %	7.616.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.294.000,00					-		7.616.000,00	
		Tercapainya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						42.294.000,00					-		7.616.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	42.294.000,00						12 Dokumen	7.616.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						42.294.000,00							7.616.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	42.294.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Pucanganak || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	7.616.000,00	PUSKESMAS PUCANGANAK
		PUSKESMAS REJOWINANGUN						**2.436.114.000,00**							**2.436.114.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.436.114.000,00**							**2.436.114.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.436.114.000,00**							**2.436.114.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
21.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.710.000.000,00**							**1.710.000.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Rejowinangun						***1.710.000.000,00***							***1.710.000.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	1.710.000.000,00						100 %	1.710.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.710.000.000,00					-		1.710.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						1.710.000.000,00					-		1.710.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.710.000.000,00						1 Unit Kerja	1.710.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.710.000.000,00							1.710.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.710.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	1.710.000.000,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN
22.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**657.110.000,00**							**657.110.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Rejowinangun						***657.110.000,00***							***657.110.000,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	90 Persentase		75 Persentase	80 Persentase	657.110.000,00						85 Persentase	657.110.000,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		55 %	70 %	657.110.000,00						80 %	657.110.000,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	83 %		54 %	63 %	657.110.000,00						69 %	657.110.000,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	57 %		42 %	42 %	657.110.000,00						42 %	657.110.000,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	657.110.000,00						100 %	657.110.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	80 %		60 %	65 %	657.110.000,00						70 %	657.110.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	657.110.000,00						100 %	657.110.000,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	90.1 %		86.7 %	90.1 %	657.110.000,00						90.1 %	657.110.000,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	657.110.000,00						11 %	657.110.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	657.110.000,00						100 %	657.110.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	657.110.000,00						100 %	657.110.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	657.110.000,00						100 %	657.110.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	657.110.000,00						100 %	657.110.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	657.110.000,00						100 %	657.110.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	657.110.000,00						100 %	657.110.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	657.110.000,00						100 %	657.110.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	657.110.000,00						100 %	657.110.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	657.110.000,00						100 %	657.110.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	657.110.000,00						100 %	657.110.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	657.110.000,00						100 %	657.110.000,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	657.110.000,00						100 %	657.110.000,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	657.110.000,00						0.67 %	657.110.000,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	12.70 %		13.10 %	13.00 %	657.110.000,00						12.90 %	657.110.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	98.6 %		98.1 %	98.2 %	657.110.000,00						98.4 %	657.110.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5350 Orang		5311 Orang	5320 Orang	22.425.000,00						5330 Orang	22.425.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.350.000,00						12 Dokumen	25.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	237.672.500,00						12 Dokumen	237.672.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.668.500,00						12 Dokumen	33.668.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	188.100.000,00						16 Dokumen	188.100.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang		300 Orang	300 Orang	15.820.000,00						301 Orang	15.820.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	341 Orang		338 Orang	341 Orang	6.150.000,00						341 Orang	6.150.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		75 Orang	75 Orang	9.000.000,00						76 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5350 Orang		5311 Orang	5320 Orang	22.425.000,00						5330 Orang	22.425.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.350.000,00						12 Dokumen	25.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	237.672.500,00						12 Dokumen	237.672.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.668.500,00						12 Dokumen	33.668.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	188.100.000,00						16 Dokumen	188.100.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang		300 Orang	300 Orang	15.820.000,00						301 Orang	15.820.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	341 Orang		338 Orang	341 Orang	6.150.000,00						341 Orang	6.150.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		75 Orang	75 Orang	9.000.000,00						76 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5350 Orang		5311 Orang	5320 Orang	22.425.000,00						5330 Orang	22.425.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.350.000,00						12 Dokumen	25.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	237.672.500,00						12 Dokumen	237.672.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.668.500,00						12 Dokumen	33.668.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	188.100.000,00						16 Dokumen	188.100.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang		300 Orang	300 Orang	15.820.000,00						301 Orang	15.820.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	341 Orang		338 Orang	341 Orang	6.150.000,00						341 Orang	6.150.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		75 Orang	75 Orang	9.000.000,00						76 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5350 Orang		5311 Orang	5320 Orang	22.425.000,00						5330 Orang	22.425.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.350.000,00						12 Dokumen	25.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	237.672.500,00						12 Dokumen	237.672.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.668.500,00						12 Dokumen	33.668.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	188.100.000,00						16 Dokumen	188.100.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang		300 Orang	300 Orang	15.820.000,00						301 Orang	15.820.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	341 Orang		338 Orang	341 Orang	6.150.000,00						341 Orang	6.150.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		75 Orang	75 Orang	9.000.000,00						76 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5350 Orang		5311 Orang	5320 Orang	22.425.000,00						5330 Orang	22.425.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.350.000,00						12 Dokumen	25.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	237.672.500,00						12 Dokumen	237.672.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.668.500,00						12 Dokumen	33.668.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	188.100.000,00						16 Dokumen	188.100.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang		300 Orang	300 Orang	15.820.000,00						301 Orang	15.820.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	341 Orang		338 Orang	341 Orang	6.150.000,00						341 Orang	6.150.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		75 Orang	75 Orang	9.000.000,00						76 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5350 Orang		5311 Orang	5320 Orang	22.425.000,00						5330 Orang	22.425.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.350.000,00						12 Dokumen	25.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	237.672.500,00						12 Dokumen	237.672.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.668.500,00						12 Dokumen	33.668.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	188.100.000,00						16 Dokumen	188.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang		300 Orang	300 Orang	15.820.000,00						301 Orang	15.820.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	341 Orang		338 Orang	341 Orang	6.150.000,00						341 Orang	6.150.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		75 Orang	75 Orang	9.000.000,00						76 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5350 Orang		5311 Orang	5320 Orang	22.425.000,00						5330 Orang	22.425.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.350.000,00						12 Dokumen	25.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	237.672.500,00						12 Dokumen	237.672.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.668.500,00						12 Dokumen	33.668.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	188.100.000,00						16 Dokumen	188.100.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang		300 Orang	300 Orang	15.820.000,00						301 Orang	15.820.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	341 Orang		338 Orang	341 Orang	6.150.000,00						341 Orang	6.150.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		75 Orang	75 Orang	9.000.000,00						76 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5350 Orang		5311 Orang	5320 Orang	22.425.000,00						5330 Orang	22.425.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.350.000,00						12 Dokumen	25.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	237.672.500,00						12 Dokumen	237.672.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.668.500,00						12 Dokumen	33.668.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	188.100.000,00						16 Dokumen	188.100.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang		300 Orang	300 Orang	15.820.000,00						301 Orang	15.820.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	341 Orang		338 Orang	341 Orang	6.150.000,00						341 Orang	6.150.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		75 Orang	75 Orang	9.000.000,00						76 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5350 Orang		5311 Orang	5320 Orang	22.425.000,00						5330 Orang	22.425.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.350.000,00						12 Dokumen	25.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	237.672.500,00						12 Dokumen	237.672.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.668.500,00						12 Dokumen	33.668.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	188.100.000,00						16 Dokumen	188.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang		300 Orang	300 Orang	15.820.000,00						301 Orang	15.820.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	341 Orang		338 Orang	341 Orang	6.150.000,00						341 Orang	6.150.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		75 Orang	75 Orang	9.000.000,00						76 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5350 Orang		5311 Orang	5320 Orang	22.425.000,00						5330 Orang	22.425.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.350.000,00						12 Dokumen	25.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	237.672.500,00						12 Dokumen	237.672.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.668.500,00						12 Dokumen	33.668.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	188.100.000,00						16 Dokumen	188.100.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang		300 Orang	300 Orang	15.820.000,00						301 Orang	15.820.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	341 Orang		338 Orang	341 Orang	6.150.000,00						341 Orang	6.150.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		75 Orang	75 Orang	9.000.000,00						76 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5350 Orang		5311 Orang	5320 Orang	22.425.000,00						5330 Orang	22.425.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.350.000,00						12 Dokumen	25.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	237.672.500,00						12 Dokumen	237.672.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.668.500,00						12 Dokumen	33.668.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	188.100.000,00						16 Dokumen	188.100.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang		300 Orang	300 Orang	15.820.000,00						301 Orang	15.820.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	341 Orang		338 Orang	341 Orang	6.150.000,00						341 Orang	6.150.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		75 Orang	75 Orang	9.000.000,00						76 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5350 Orang		5311 Orang	5320 Orang	22.425.000,00						5330 Orang	22.425.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.350.000,00						12 Dokumen	25.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	237.672.500,00						12 Dokumen	237.672.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.668.500,00						12 Dokumen	33.668.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	188.100.000,00						16 Dokumen	188.100.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang		300 Orang	300 Orang	15.820.000,00						301 Orang	15.820.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	341 Orang		338 Orang	341 Orang	6.150.000,00						341 Orang	6.150.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		75 Orang	75 Orang	9.000.000,00						76 Orang	9.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						15.820.000,00							15.820.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	301 Orang		300 Orang	296 Orang	15.820.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		301 Orang	15.820.000,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						22.425.000,00							22.425.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5350 Orang		5311 Orang	5525 Orang	22.425.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		5330 Orang	22.425.000,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		75 Orang	62 Orang	9.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		76 Orang	9.000.000,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						6.150.000,00							6.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	341 Orang		338 Orang	288 Orang	6.150.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		341 Orang	6.150.000,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						237.672.500,00							237.672.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	237.672.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	237.672.500,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						3.750.000,00							3.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	3.750.000,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						33.668.500,00							33.668.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.668.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	33.668.500,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						188.100.000,00							188.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	188.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		16 Dokumen	188.100.000,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						600.000,00							600.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	600.000,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						25.350.000,00							25.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.350.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	25.350.000,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	7.350.000,00						-	7.350.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	90.600.000,00						-	90.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	16.624.000,00						-	16.624.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	7.350.000,00						-	7.350.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	90.600.000,00						-	90.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	16.624.000,00						-	16.624.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	7.350.000,00						-	7.350.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	90.600.000,00						-	90.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	16.624.000,00						-	16.624.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	7.350.000,00						-	7.350.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	90.600.000,00						-	90.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	16.624.000,00						-	16.624.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	7.350.000,00						-	7.350.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	90.600.000,00						-	90.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	16.624.000,00						-	16.624.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	7.350.000,00						-	7.350.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	90.600.000,00						-	90.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	16.624.000,00						-	16.624.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	7.350.000,00						-	7.350.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	90.600.000,00						-	90.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	16.624.000,00						-	16.624.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	7.350.000,00						-	7.350.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	90.600.000,00						-	90.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	16.624.000,00						-	16.624.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	7.350.000,00						-	7.350.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	90.600.000,00						-	90.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	16.624.000,00						-	16.624.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	7.350.000,00						-	7.350.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	90.600.000,00						-	90.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	16.624.000,00						-	16.624.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	7.350.000,00						-	7.350.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	90.600.000,00						-	90.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	16.624.000,00						-	16.624.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						657.110.000,00					-		657.110.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	7.350.000,00						-	7.350.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	90.600.000,00						-	90.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	16.624.000,00						-	16.624.000,00	
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						16.624.000,00							16.624.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	3412 Orang	16.624.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	16.624.000,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						7.350.000,00							7.350.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	7.350.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	7.350.000,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						90.600.000,00							90.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	90.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	90.600.000,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN
23.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**69.004.000,00**							**69.004.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Rejowinangun						***69.004.000,00***							***69.004.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	84 Persentase		76 Persentase	78 Persentase	69.004.000,00						80 Persentase	69.004.000,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		10 %	14 %	69.004.000,00						18 %	69.004.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						69.004.000,00					-		69.004.000,00	
		Tercapainya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						69.004.000,00					-		69.004.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	69.004.000,00						12 Dokumen	69.004.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						69.004.000,00							69.004.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	69.004.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	69.004.000,00	PUSKESMAS REJOWINANGUN
		PUSKESMAS BENDUNGAN						**3.313.788.000,00**							**3.180.847.720,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.313.788.000,00**							**3.180.847.720,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.313.788.000,00**							**3.180.847.720,00**	
24.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.540.000.000,00**							**2.540.000.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Bendungan						***2.540.000.000,00***							***2.540.000.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.540.000.000,00						100 %	2.540.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.540.000.000,00					-		2.540.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						2.540.000.000,00					-		2.540.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.540.000.000,00						1 Unit Kerja	2.540.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.540.000.000,00							2.540.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.540.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	2.540.000.000,00	PUSKESMAS BENDUNGAN
25.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**716.168.000,00**							**613.751.720,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Bendungan						***716.168.000,00***							***604.151.720,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	90 Persentase		76 Persentase	80 Persentase	716.168.000,00						85 Persentase	604.151.720,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		60 %	70 %	716.168.000,00						80 %	604.151.720,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	74 %		45 %	54 %	716.168.000,00						60 %	604.151.720,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	75 %		50 %	62 %	716.168.000,00						62 %	604.151.720,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	716.168.000,00						100 %	604.151.720,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	85 %		69 %	70 %	716.168.000,00						75 %	604.151.720,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	716.168.000,00						100 %	604.151.720,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	93.1 %		85.7 %	90.1 %	716.168.000,00						90.1 %	604.151.720,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	716.168.000,00						11 %	604.151.720,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		88 %	100 %	716.168.000,00						100 %	604.151.720,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	716.168.000,00						100 %	604.151.720,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	716.168.000,00						100 %	604.151.720,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	716.168.000,00						100 %	604.151.720,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	716.168.000,00						100 %	604.151.720,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	716.168.000,00						100 %	604.151.720,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	716.168.000,00						100 %	604.151.720,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	716.168.000,00						100 %	604.151.720,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	716.168.000,00						100 %	604.151.720,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	716.168.000,00						100 %	604.151.720,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	716.168.000,00						100 %	604.151.720,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	716.168.000,00						100 %	604.151.720,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	716.168.000,00						0.67 %	604.151.720,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	14.00 %		15.30 %	15.00 %	716.168.000,00						14.80 %	604.151.720,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	95 %		94.4 %	94.55 %	716.168.000,00						94.65 %	604.151.720,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2731 Orang		2729 Orang	2729 Orang	13.950.000,00						2730 Orang	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	14.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	208.648.000,00						12 Dokumen	186.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	31.950.000,00						12 Dokumen	56.459.248,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00						12 Dokumen	582.368,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	257.930.000,00						12 Dokumen	148.913.512,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		257 Orang	260 Orang	38.720.000,00						261 Orang	38.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 Orang		183 Orang	183 Orang	10.050.000,00						183 Orang	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang		58 Orang	60 Orang	5.400.000,00						60 Orang	6.750.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2731 Orang		2729 Orang	2729 Orang	13.950.000,00						2730 Orang	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	14.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	208.648.000,00						12 Dokumen	186.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	31.950.000,00						12 Dokumen	56.459.248,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00						12 Dokumen	582.368,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	257.930.000,00						12 Dokumen	148.913.512,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		257 Orang	260 Orang	38.720.000,00						261 Orang	38.720.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 Orang		183 Orang	183 Orang	10.050.000,00						183 Orang	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang		58 Orang	60 Orang	5.400.000,00						60 Orang	6.750.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2731 Orang		2729 Orang	2729 Orang	13.950.000,00						2730 Orang	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	14.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	208.648.000,00						12 Dokumen	186.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	31.950.000,00						12 Dokumen	56.459.248,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00						12 Dokumen	582.368,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	257.930.000,00						12 Dokumen	148.913.512,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		257 Orang	260 Orang	38.720.000,00						261 Orang	38.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 Orang		183 Orang	183 Orang	10.050.000,00						183 Orang	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang		58 Orang	60 Orang	5.400.000,00						60 Orang	6.750.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2731 Orang		2729 Orang	2729 Orang	13.950.000,00						2730 Orang	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	14.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	208.648.000,00						12 Dokumen	186.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	31.950.000,00						12 Dokumen	56.459.248,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00						12 Dokumen	582.368,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	257.930.000,00						12 Dokumen	148.913.512,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		257 Orang	260 Orang	38.720.000,00						261 Orang	38.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 Orang		183 Orang	183 Orang	10.050.000,00						183 Orang	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang		58 Orang	60 Orang	5.400.000,00						60 Orang	6.750.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2731 Orang		2729 Orang	2729 Orang	13.950.000,00						2730 Orang	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	14.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	208.648.000,00						12 Dokumen	186.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	31.950.000,00						12 Dokumen	56.459.248,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00						12 Dokumen	582.368,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	257.930.000,00						12 Dokumen	148.913.512,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		257 Orang	260 Orang	38.720.000,00						261 Orang	38.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 Orang		183 Orang	183 Orang	10.050.000,00						183 Orang	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang		58 Orang	60 Orang	5.400.000,00						60 Orang	6.750.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2731 Orang		2729 Orang	2729 Orang	13.950.000,00						2730 Orang	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	14.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	208.648.000,00						12 Dokumen	186.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	31.950.000,00						12 Dokumen	56.459.248,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00						12 Dokumen	582.368,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	257.930.000,00						12 Dokumen	148.913.512,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		257 Orang	260 Orang	38.720.000,00						261 Orang	38.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 Orang		183 Orang	183 Orang	10.050.000,00						183 Orang	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang		58 Orang	60 Orang	5.400.000,00						60 Orang	6.750.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2731 Orang		2729 Orang	2729 Orang	13.950.000,00						2730 Orang	9.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	14.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	208.648.000,00						12 Dokumen	186.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	31.950.000,00						12 Dokumen	56.459.248,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00						12 Dokumen	582.368,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	257.930.000,00						12 Dokumen	148.913.512,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		257 Orang	260 Orang	38.720.000,00						261 Orang	38.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 Orang		183 Orang	183 Orang	10.050.000,00						183 Orang	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang		58 Orang	60 Orang	5.400.000,00						60 Orang	6.750.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2731 Orang		2729 Orang	2729 Orang	13.950.000,00						2730 Orang	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	14.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	208.648.000,00						12 Dokumen	186.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	31.950.000,00						12 Dokumen	56.459.248,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00						12 Dokumen	582.368,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	257.930.000,00						12 Dokumen	148.913.512,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		257 Orang	260 Orang	38.720.000,00						261 Orang	38.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 Orang		183 Orang	183 Orang	10.050.000,00						183 Orang	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang		58 Orang	60 Orang	5.400.000,00						60 Orang	6.750.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2731 Orang		2729 Orang	2729 Orang	13.950.000,00						2730 Orang	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	14.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	208.648.000,00						12 Dokumen	186.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	31.950.000,00						12 Dokumen	56.459.248,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00						12 Dokumen	582.368,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	257.930.000,00						12 Dokumen	148.913.512,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		257 Orang	260 Orang	38.720.000,00						261 Orang	38.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 Orang		183 Orang	183 Orang	10.050.000,00						183 Orang	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang		58 Orang	60 Orang	5.400.000,00						60 Orang	6.750.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standart						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2731 Orang		2729 Orang	2729 Orang	13.950.000,00						2730 Orang	9.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	14.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	208.648.000,00						12 Dokumen	186.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	31.950.000,00						12 Dokumen	56.459.248,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00						12 Dokumen	582.368,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	257.930.000,00						12 Dokumen	148.913.512,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		257 Orang	260 Orang	38.720.000,00						261 Orang	38.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 Orang		183 Orang	183 Orang	10.050.000,00						183 Orang	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang		58 Orang	60 Orang	5.400.000,00						60 Orang	6.750.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2731 Orang		2729 Orang	2729 Orang	13.950.000,00						2730 Orang	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	14.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	208.648.000,00						12 Dokumen	186.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	31.950.000,00						12 Dokumen	56.459.248,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00						12 Dokumen	582.368,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	257.930.000,00						12 Dokumen	148.913.512,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		257 Orang	260 Orang	38.720.000,00						261 Orang	38.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 Orang		183 Orang	183 Orang	10.050.000,00						183 Orang	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang		58 Orang	60 Orang	5.400.000,00						60 Orang	6.750.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2731 Orang		2729 Orang	2729 Orang	13.950.000,00						2730 Orang	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	14.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	208.648.000,00						12 Dokumen	186.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	31.950.000,00						12 Dokumen	56.459.248,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00						12 Dokumen	582.368,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	257.930.000,00						12 Dokumen	148.913.512,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		257 Orang	260 Orang	38.720.000,00						261 Orang	38.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 Orang		183 Orang	183 Orang	10.050.000,00						183 Orang	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang		58 Orang	60 Orang	5.400.000,00						60 Orang	6.750.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						38.720.000,00							38.720.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	261 Orang		257 Orang	279 Orang	38.720.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		261 Orang	38.720.000,00	PUSKESMAS BENDUNGAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						13.950.000,00							9.600.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2731 Orang		2729 Orang	2511 Orang	13.950.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2730 Orang	9.600.000,00	PUSKESMAS BENDUNGAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						5.400.000,00							6.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	62 Orang		58 Orang	55 Orang	5.400.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		60 Orang	6.750.000,00	PUSKESMAS BENDUNGAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						10.050.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	185 Orang		183 Orang	215 Orang	10.050.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		183 Orang	3.000.000,00	PUSKESMAS BENDUNGAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						208.648.000,00							186.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	208.648.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	186.900.000,00	PUSKESMAS BENDUNGAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						9.600.000,00							9.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	9.600.000,00	PUSKESMAS BENDUNGAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						31.950.000,00							56.459.248,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	31.950.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	56.459.248,00	PUSKESMAS BENDUNGAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						257.930.000,00							148.913.512,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	257.930.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	148.913.512,00	PUSKESMAS BENDUNGAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.500.000,00							582.368,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	582.368,00	PUSKESMAS BENDUNGAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						13.200.000,00							14.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	14.100.000,00	PUSKESMAS BENDUNGAN
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	113.400.000,00						-	127.306.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.820.000,00						-	11.820.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	113.400.000,00						-	127.306.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.820.000,00						-	11.820.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	113.400.000,00						-	127.306.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.820.000,00						-	11.820.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	113.400.000,00						-	127.306.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.820.000,00						-	11.820.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	113.400.000,00						-	127.306.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.820.000,00						-	11.820.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	113.400.000,00						-	127.306.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.820.000,00						-	11.820.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	113.400.000,00						-	127.306.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.820.000,00						-	11.820.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	113.400.000,00						-	127.306.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.820.000,00						-	11.820.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	113.400.000,00						-	127.306.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.820.000,00						-	11.820.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standart						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	113.400.000,00						-	127.306.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.820.000,00						-	11.820.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	113.400.000,00						-	127.306.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.820.000,00						-	11.820.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						716.168.000,00					-		613.751.720,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	113.400.000,00						-	127.306.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.820.000,00						-	11.820.000,00	
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						11.820.000,00							11.820.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	55 Orang	11.820.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	11.820.000,00	PUSKESMAS BENDUNGAN
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						113.400.000,00							127.306.592,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	113.400.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	127.306.592,00	PUSKESMAS BENDUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
26.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**57.620.000,00**							**27.096.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Bendungan						***38.140.000,00***							***7.616.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	92 Persentase		84 Persentase	86 Persentase	38.140.000,00						88 Persentase	7.616.000,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		22 %	25 %	38.140.000,00						28 %	7.616.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						38.140.000,00					-		7.616.000,00	
		Tercapainya UKBM Yang Dibina						38.140.000,00					-		7.616.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	38.140.000,00						12 Dokumen	7.616.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						38.140.000,00							7.616.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	38.140.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	7.616.000,00	PUSKESMAS BENDUNGAN
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	-		-	27 %	19.480.000,00						-	19.480.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						19.480.000,00					-		19.480.000,00	
		-						19.480.000,00					-		19.480.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	19.480.000,00						-	19.480.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						19.480.000,00							19.480.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	12 Dokumen	19.480.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		-	19.480.000,00	PUSKESMAS BENDUNGAN
		PUSKESMAS DONGKO						**4.282.061.000,00**							**3.958.266.764,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.282.061.000,00**							**3.958.266.764,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.282.061.000,00**							**3.958.266.764,00**	
27.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.400.000.000,00**							**3.350.000.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Dongko						***3.400.000.000,00***							***3.350.000.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	3.400.000.000,00						100 %	3.350.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						3.400.000.000,00					-		3.350.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						3.400.000.000,00					-		3.350.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja		100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	3.400.000.000,00						100 Unit Kerja	3.350.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.400.000.000,00							3.350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja		100 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.400.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Dongko || 1	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		100 Unit Kerja	3.350.000.000,00	PUSKESMAS DONGKO
28.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**863.045.000,00**							**600.650.764,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Dongko						***863.045.000,00***							***600.650.764,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	70 Persentase		50 Persentase	55 Persentase	863.045.000,00						60 Persentase	600.650.764,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		60 %	70 %	863.045.000,00						80 %	600.650.764,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	82 %		53 %	62 %	863.045.000,00						68 %	600.650.764,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	80 %		60 %	80 %	863.045.000,00						80 %	600.650.764,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	863.045.000,00						100 %	600.650.764,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		70 %	75 %	863.045.000,00						80 %	600.650.764,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	863.045.000,00						100 %	600.650.764,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	90.8 %		90.8 %	90.8 %	863.045.000,00						90.8 %	600.650.764,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.3 %	863.045.000,00						11 %	600.650.764,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	863.045.000,00						100 %	600.650.764,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	863.045.000,00						100 %	600.650.764,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	863.045.000,00						100 %	600.650.764,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	863.045.000,00						100 %	600.650.764,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	863.045.000,00						100 %	600.650.764,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	863.045.000,00						100 %	600.650.764,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	863.045.000,00						100 %	600.650.764,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	863.045.000,00						100 %	600.650.764,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	863.045.000,00						100 %	600.650.764,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	863.045.000,00						100 %	600.650.764,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	863.045.000,00						100 %	600.650.764,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	863.045.000,00						100 %	600.650.764,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	863.045.000,00						0.67 %	600.650.764,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	10.40 %		10.80 %	10.70 %	863.045.000,00						10.60 %	600.650.764,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	96 %		95.90 %	95.91 %	863.045.000,00						95.94 %	600.650.764,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	28.650.000,00						100 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.000.000,00						12 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	206.567.105,00						12 Dokumen	158.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	323.075.000,00						16 Dokumen	176.089.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang		295 Orang	295 Orang	1.000.000,00						295 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang		254 Orang	255 Orang	24.300.000,00						256 Orang	17.482.869,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	348 Orang		348 Orang	348 Orang	9.500.000,00						348 Orang	4.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang		68 Orang	70 Orang	24.000.000,00						70 Orang	24.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11325 Orang		11324 Orang	11324 Orang	10.000.000,00						11325 Orang	10.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	28.650.000,00						100 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.000.000,00						12 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	206.567.105,00						12 Dokumen	158.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	323.075.000,00						16 Dokumen	176.089.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang		295 Orang	295 Orang	1.000.000,00						295 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang		254 Orang	255 Orang	24.300.000,00						256 Orang	17.482.869,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	348 Orang		348 Orang	348 Orang	9.500.000,00						348 Orang	4.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang		68 Orang	70 Orang	24.000.000,00						70 Orang	24.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11325 Orang		11324 Orang	11324 Orang	10.000.000,00						11325 Orang	10.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	28.650.000,00						100 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.000.000,00						12 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	206.567.105,00						12 Dokumen	158.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	323.075.000,00						16 Dokumen	176.089.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang		295 Orang	295 Orang	1.000.000,00						295 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang		254 Orang	255 Orang	24.300.000,00						256 Orang	17.482.869,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	348 Orang		348 Orang	348 Orang	9.500.000,00						348 Orang	4.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang		68 Orang	70 Orang	24.000.000,00						70 Orang	24.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11325 Orang		11324 Orang	11324 Orang	10.000.000,00						11325 Orang	10.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	28.650.000,00						100 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.000.000,00						12 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	206.567.105,00						12 Dokumen	158.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	323.075.000,00						16 Dokumen	176.089.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang		295 Orang	295 Orang	1.000.000,00						295 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang		254 Orang	255 Orang	24.300.000,00						256 Orang	17.482.869,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	348 Orang		348 Orang	348 Orang	9.500.000,00						348 Orang	4.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang		68 Orang	70 Orang	24.000.000,00						70 Orang	24.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11325 Orang		11324 Orang	11324 Orang	10.000.000,00						11325 Orang	10.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	28.650.000,00						100 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.000.000,00						12 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	206.567.105,00						12 Dokumen	158.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	323.075.000,00						16 Dokumen	176.089.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang		295 Orang	295 Orang	1.000.000,00						295 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang		254 Orang	255 Orang	24.300.000,00						256 Orang	17.482.869,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	348 Orang		348 Orang	348 Orang	9.500.000,00						348 Orang	4.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang		68 Orang	70 Orang	24.000.000,00						70 Orang	24.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11325 Orang		11324 Orang	11324 Orang	10.000.000,00						11325 Orang	10.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	28.650.000,00						100 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.000.000,00						12 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	206.567.105,00						12 Dokumen	158.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	323.075.000,00						16 Dokumen	176.089.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang		295 Orang	295 Orang	1.000.000,00						295 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang		254 Orang	255 Orang	24.300.000,00						256 Orang	17.482.869,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	348 Orang		348 Orang	348 Orang	9.500.000,00						348 Orang	4.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang		68 Orang	70 Orang	24.000.000,00						70 Orang	24.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11325 Orang		11324 Orang	11324 Orang	10.000.000,00						11325 Orang	10.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	28.650.000,00						100 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.000.000,00						12 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	206.567.105,00						12 Dokumen	158.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	323.075.000,00						16 Dokumen	176.089.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang		295 Orang	295 Orang	1.000.000,00						295 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang		254 Orang	255 Orang	24.300.000,00						256 Orang	17.482.869,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	348 Orang		348 Orang	348 Orang	9.500.000,00						348 Orang	4.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang		68 Orang	70 Orang	24.000.000,00						70 Orang	24.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11325 Orang		11324 Orang	11324 Orang	10.000.000,00						11325 Orang	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	28.650.000,00						100 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.000.000,00						12 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	206.567.105,00						12 Dokumen	158.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	323.075.000,00						16 Dokumen	176.089.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang		295 Orang	295 Orang	1.000.000,00						295 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang		254 Orang	255 Orang	24.300.000,00						256 Orang	17.482.869,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	348 Orang		348 Orang	348 Orang	9.500.000,00						348 Orang	4.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang		68 Orang	70 Orang	24.000.000,00						70 Orang	24.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11325 Orang		11324 Orang	11324 Orang	10.000.000,00						11325 Orang	10.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	28.650.000,00						100 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.000.000,00						12 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	206.567.105,00						12 Dokumen	158.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	323.075.000,00						16 Dokumen	176.089.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang		295 Orang	295 Orang	1.000.000,00						295 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang		254 Orang	255 Orang	24.300.000,00						256 Orang	17.482.869,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	348 Orang		348 Orang	348 Orang	9.500.000,00						348 Orang	4.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang		68 Orang	70 Orang	24.000.000,00						70 Orang	24.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11325 Orang		11324 Orang	11324 Orang	10.000.000,00						11325 Orang	10.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	28.650.000,00						100 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.000.000,00						12 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	206.567.105,00						12 Dokumen	158.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	323.075.000,00						16 Dokumen	176.089.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang		295 Orang	295 Orang	1.000.000,00						295 Orang	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang		254 Orang	255 Orang	24.300.000,00						256 Orang	17.482.869,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	348 Orang		348 Orang	348 Orang	9.500.000,00						348 Orang	4.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang		68 Orang	70 Orang	24.000.000,00						70 Orang	24.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11325 Orang		11324 Orang	11324 Orang	10.000.000,00						11325 Orang	10.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	28.650.000,00						100 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.000.000,00						12 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	206.567.105,00						12 Dokumen	158.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	323.075.000,00						16 Dokumen	176.089.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang		295 Orang	295 Orang	1.000.000,00						295 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang		254 Orang	255 Orang	24.300.000,00						256 Orang	17.482.869,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	348 Orang		348 Orang	348 Orang	9.500.000,00						348 Orang	4.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang		68 Orang	70 Orang	24.000.000,00						70 Orang	24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11325 Orang		11324 Orang	11324 Orang	10.000.000,00						11325 Orang	10.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	28.650.000,00						100 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.000.000,00						12 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	206.567.105,00						12 Dokumen	158.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	323.075.000,00						16 Dokumen	176.089.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang		295 Orang	295 Orang	1.000.000,00						295 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang		254 Orang	255 Orang	24.300.000,00						256 Orang	17.482.869,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	348 Orang		348 Orang	348 Orang	9.500.000,00						348 Orang	4.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang		68 Orang	70 Orang	24.000.000,00						70 Orang	24.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11325 Orang		11324 Orang	11324 Orang	10.000.000,00						11325 Orang	10.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						24.300.000,00							17.482.869,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	256 Orang		254 Orang	326 Orang	24.300.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Dongko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		256 Orang	17.482.869,00	PUSKESMAS DONGKO
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	295 Orang		295 Orang	292 Orang	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Dongko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		295 Orang	1.000.000,00	PUSKESMAS DONGKO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						28.650.000,00							11.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	4458 Orang	28.650.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Dongko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		100 Orang	11.400.000,00	PUSKESMAS DONGKO
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11325 Orang		11324 Orang	7307 Orang	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Dongko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		11325 Orang	10.000.000,00	PUSKESMAS DONGKO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						24.000.000,00							24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	72 Orang		68 Orang	64 Orang	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Dongko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		70 Orang	24.000.000,00	PUSKESMAS DONGKO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						9.500.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	348 Orang		348 Orang	255 Orang	9.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Dongko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		348 Orang	4.500.000,00	PUSKESMAS DONGKO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						206.567.105,00							158.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	206.567.105,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Dongko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	158.000.000,00	PUSKESMAS DONGKO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.800.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Dongko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	3.000.000,00	PUSKESMAS DONGKO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						5.400.000,00							3.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.400.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Dongko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	3.900.000,00	PUSKESMAS DONGKO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						323.075.000,00							176.089.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	323.075.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Dongko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		16 Dokumen	176.089.000,00	PUSKESMAS DONGKO
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						13.000.000,00							13.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Dongko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	13.000.000,00	PUSKESMAS DONGKO
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	212.752.895,00						-	178.278.895,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	212.752.895,00						-	178.278.895,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	212.752.895,00						-	178.278.895,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	212.752.895,00						-	178.278.895,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	212.752.895,00						-	178.278.895,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	212.752.895,00						-	178.278.895,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	212.752.895,00						-	178.278.895,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	212.752.895,00						-	178.278.895,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	212.752.895,00						-	178.278.895,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	212.752.895,00						-	178.278.895,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	212.752.895,00						-	178.278.895,00	
		Terselenggaranya pelayanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						863.045.000,00					-		600.650.764,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	212.752.895,00						-	178.278.895,00	
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						212.752.895,00							178.278.895,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	212.752.895,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Dongko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	178.278.895,00	PUSKESMAS DONGKO
29.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**19.016.000,00**							**7.616.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Dongko						***19.016.000,00***							***7.616.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	90 Persentase		82 Persentase	84 Persentase	19.016.000,00						86 Persentase	7.616.000,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		8 %	12 %	19.016.000,00						18 %	7.616.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						19.016.000,00					-		7.616.000,00	
		Tercapainya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						19.016.000,00					-		7.616.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	19.016.000,00						12 Dokumen	7.616.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						19.016.000,00							7.616.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	19.016.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Dongko || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	7.616.000,00	PUSKESMAS DONGKO
		PUSKESMAS DURENAN						**3.495.554.000,00**							**3.495.554.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.495.554.000,00**							**3.495.554.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.495.554.000,00**							**3.495.554.000,00**	
30.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.859.225.000,00**							**2.859.225.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Durenan						***2.859.225.000,00***							***2.859.225.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.859.225.000,00						100 %	2.859.225.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.859.225.000,00					-		2.859.225.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						2.859.225.000,00					-		2.859.225.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.859.225.000,00						1 Unit Kerja	2.859.225.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.859.225.000,00							2.859.225.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.859.225.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	2.859.225.000,00	PUSKESMAS DURENAN
31.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**557.298.335,00**							**557.298.335,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Durenan						***494.777.651,00***							***494.777.651,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	95 Persentase		85 Persentase	88 Persentase	494.777.651,00						90 Persentase	494.777.651,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		60 %	70 %	494.777.651,00						80 %	494.777.651,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	94 %		65 %	74 %	494.777.651,00						80 %	494.777.651,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	71 %		43 %	57 %	494.777.651,00						57 %	494.777.651,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	494.777.651,00						100 %	494.777.651,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	80 %		60 %	65 %	494.777.651,00						70 %	494.777.651,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	494.777.651,00						100 %	494.777.651,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	94.2 %		93.1 %	94.2 %	494.777.651,00						94.2 %	494.777.651,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	494.777.651,00						11 %	494.777.651,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	494.777.651,00						100 %	494.777.651,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	494.777.651,00						100 %	494.777.651,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	494.777.651,00						100 %	494.777.651,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	494.777.651,00						100 %	494.777.651,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	494.777.651,00						100 %	494.777.651,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	494.777.651,00						100 %	494.777.651,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	494.777.651,00						100 %	494.777.651,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	494.777.651,00						100 %	494.777.651,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	494.777.651,00						100 %	494.777.651,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	494.777.651,00						100 %	494.777.651,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	494.777.651,00						100 %	494.777.651,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	494.777.651,00						100 %	494.777.651,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	494.777.651,00						0.67 %	494.777.651,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	9.44 %		9.48 %	9.47 %	494.777.651,00						9.46 %	494.777.651,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	97.5 %		97.1 %	97.2 %	494.777.651,00						97.4 %	494.777.651,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2887 Orang		2884 Orang	2884 Orang	12.000.000,00						2885 Orang	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.600.000,00						12 Dokumen	24.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	170.585.632,00						12 Dokumen	170.585.632,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.425.000,00						12 Dokumen	25.425.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	147.720.340,00						14 Dokumen	147.720.340,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236 Orang		236 Orang	236 Orang	40.000.995,00						236 Orang	40.000.995,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	312 Orang		311 Orang	311 Orang	5.325.000,00						311 Orang	5.325.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang		79 Orang	80 Orang	4.500.000,00						80 Orang	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2887 Orang		2884 Orang	2884 Orang	12.000.000,00						2885 Orang	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.600.000,00						12 Dokumen	24.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	170.585.632,00						12 Dokumen	170.585.632,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.425.000,00						12 Dokumen	25.425.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	147.720.340,00						14 Dokumen	147.720.340,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236 Orang		236 Orang	236 Orang	40.000.995,00						236 Orang	40.000.995,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	312 Orang		311 Orang	311 Orang	5.325.000,00						311 Orang	5.325.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang		79 Orang	80 Orang	4.500.000,00						80 Orang	4.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2887 Orang		2884 Orang	2884 Orang	12.000.000,00						2885 Orang	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.600.000,00						12 Dokumen	24.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	170.585.632,00						12 Dokumen	170.585.632,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.425.000,00						12 Dokumen	25.425.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	147.720.340,00						14 Dokumen	147.720.340,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236 Orang		236 Orang	236 Orang	40.000.995,00						236 Orang	40.000.995,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	312 Orang		311 Orang	311 Orang	5.325.000,00						311 Orang	5.325.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang		79 Orang	80 Orang	4.500.000,00						80 Orang	4.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2887 Orang		2884 Orang	2884 Orang	12.000.000,00						2885 Orang	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.600.000,00						12 Dokumen	24.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	170.585.632,00						12 Dokumen	170.585.632,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.425.000,00						12 Dokumen	25.425.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	147.720.340,00						14 Dokumen	147.720.340,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236 Orang		236 Orang	236 Orang	40.000.995,00						236 Orang	40.000.995,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	312 Orang		311 Orang	311 Orang	5.325.000,00						311 Orang	5.325.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang		79 Orang	80 Orang	4.500.000,00						80 Orang	4.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2887 Orang		2884 Orang	2884 Orang	12.000.000,00						2885 Orang	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.600.000,00						12 Dokumen	24.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	170.585.632,00						12 Dokumen	170.585.632,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.425.000,00						12 Dokumen	25.425.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	147.720.340,00						14 Dokumen	147.720.340,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236 Orang		236 Orang	236 Orang	40.000.995,00						236 Orang	40.000.995,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	312 Orang		311 Orang	311 Orang	5.325.000,00						311 Orang	5.325.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang		79 Orang	80 Orang	4.500.000,00						80 Orang	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2887 Orang		2884 Orang	2884 Orang	12.000.000,00						2885 Orang	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.600.000,00						12 Dokumen	24.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	170.585.632,00						12 Dokumen	170.585.632,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.425.000,00						12 Dokumen	25.425.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	147.720.340,00						14 Dokumen	147.720.340,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236 Orang		236 Orang	236 Orang	40.000.995,00						236 Orang	40.000.995,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	312 Orang		311 Orang	311 Orang	5.325.000,00						311 Orang	5.325.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang		79 Orang	80 Orang	4.500.000,00						80 Orang	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2887 Orang		2884 Orang	2884 Orang	12.000.000,00						2885 Orang	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.600.000,00						12 Dokumen	24.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	170.585.632,00						12 Dokumen	170.585.632,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.425.000,00						12 Dokumen	25.425.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	147.720.340,00						14 Dokumen	147.720.340,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236 Orang		236 Orang	236 Orang	40.000.995,00						236 Orang	40.000.995,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	312 Orang		311 Orang	311 Orang	5.325.000,00						311 Orang	5.325.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang		79 Orang	80 Orang	4.500.000,00						80 Orang	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2887 Orang		2884 Orang	2884 Orang	12.000.000,00						2885 Orang	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.600.000,00						12 Dokumen	24.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	170.585.632,00						12 Dokumen	170.585.632,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.425.000,00						12 Dokumen	25.425.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	147.720.340,00						14 Dokumen	147.720.340,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236 Orang		236 Orang	236 Orang	40.000.995,00						236 Orang	40.000.995,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	312 Orang		311 Orang	311 Orang	5.325.000,00						311 Orang	5.325.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang		79 Orang	80 Orang	4.500.000,00						80 Orang	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2887 Orang		2884 Orang	2884 Orang	12.000.000,00						2885 Orang	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.600.000,00						12 Dokumen	24.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	170.585.632,00						12 Dokumen	170.585.632,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.425.000,00						12 Dokumen	25.425.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	147.720.340,00						14 Dokumen	147.720.340,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236 Orang		236 Orang	236 Orang	40.000.995,00						236 Orang	40.000.995,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	312 Orang		311 Orang	311 Orang	5.325.000,00						311 Orang	5.325.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang		79 Orang	80 Orang	4.500.000,00						80 Orang	4.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2887 Orang		2884 Orang	2884 Orang	12.000.000,00						2885 Orang	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.600.000,00						12 Dokumen	24.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	170.585.632,00						12 Dokumen	170.585.632,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.425.000,00						12 Dokumen	25.425.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	147.720.340,00						14 Dokumen	147.720.340,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236 Orang		236 Orang	236 Orang	40.000.995,00						236 Orang	40.000.995,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	312 Orang		311 Orang	311 Orang	5.325.000,00						311 Orang	5.325.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang		79 Orang	80 Orang	4.500.000,00						80 Orang	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2887 Orang		2884 Orang	2884 Orang	12.000.000,00						2885 Orang	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.600.000,00						12 Dokumen	24.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	170.585.632,00						12 Dokumen	170.585.632,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.425.000,00						12 Dokumen	25.425.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	147.720.340,00						14 Dokumen	147.720.340,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236 Orang		236 Orang	236 Orang	40.000.995,00						236 Orang	40.000.995,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	312 Orang		311 Orang	311 Orang	5.325.000,00						311 Orang	5.325.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang		79 Orang	80 Orang	4.500.000,00						80 Orang	4.500.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2887 Orang		2884 Orang	2884 Orang	12.000.000,00						2885 Orang	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.600.000,00						12 Dokumen	24.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	170.585.632,00						12 Dokumen	170.585.632,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00						12 Dokumen	3.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.425.000,00						12 Dokumen	25.425.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	147.720.340,00						14 Dokumen	147.720.340,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236 Orang		236 Orang	236 Orang	40.000.995,00						236 Orang	40.000.995,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	312 Orang		311 Orang	311 Orang	5.325.000,00						311 Orang	5.325.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang		79 Orang	80 Orang	4.500.000,00						80 Orang	4.500.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						40.000.995,00							40.000.995,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	236 Orang		236 Orang	236 Orang	40.000.995,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		236 Orang	40.000.995,00	PUSKESMAS DURENAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2887 Orang		2884 Orang	2884 Orang	12.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2885 Orang	12.000.000,00	PUSKESMAS DURENAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						4.500.000,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	82 Orang		79 Orang	80 Orang	4.500.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		80 Orang	4.500.000,00	PUSKESMAS DURENAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						5.325.000,00							5.325.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	312 Orang		311 Orang	311 Orang	5.325.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		311 Orang	5.325.000,00	PUSKESMAS DURENAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						170.585.632,00							170.585.632,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	170.585.632,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	170.585.632,00	PUSKESMAS DURENAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						3.600.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	3.600.000,00	PUSKESMAS DURENAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						25.425.000,00							25.425.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.425.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	25.425.000,00	PUSKESMAS DURENAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						147.720.340,00							147.720.340,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	14 Dokumen		14 Dokumen	16 Dokumen	147.720.340,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		14 Dokumen	147.720.340,00	PUSKESMAS DURENAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						3.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	3.000.000,00	PUSKESMAS DURENAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						24.600.000,00							24.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.600.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	24.600.000,00	PUSKESMAS DURENAN
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						557.298.335,00					-		557.298.335,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	58.020.684,00						-	58.020.684,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.500.000,00						-	4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						4.500.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	2093 Orang	4.500.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	4.500.000,00	PUSKESMAS DURENAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						58.020.684,00							58.020.684,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	58.020.684,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	58.020.684,00	PUSKESMAS DURENAN
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						58.020.684,00							58.020.684,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	58.020.684,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	58.020.684,00	PUSKESMAS DURENAN
32.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**79.030.665,00**							**79.030.665,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Durenan						***79.030.665,00***							***79.030.665,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	60 Persentase		52 Persentase	54 Persentase	79.030.665,00						56 Persentase	79.030.665,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		9 %	13 %	79.030.665,00						18 %	79.030.665,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						79.030.665,00					-		79.030.665,00	
		Terselenggaranya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						79.030.665,00					-		79.030.665,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	79.030.665,00						14 Dokumen	79.030.665,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						79.030.665,00							79.030.665,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14 Dokumen		14 Dokumen	12 Dokumen	79.030.665,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		14 Dokumen	79.030.665,00	PUSKESMAS DURENAN
		PUSKESMAS GANDUSARI						**3.322.261.500,00**							**3.322.261.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.322.261.500,00**							**3.322.261.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.322.261.500,00**							**3.322.261.500,00**	
33.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.760.000.000,00**							**2.760.000.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Gandusari						***2.760.000.000,00***							***2.760.000.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.760.000.000,00						100 %	2.760.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.760.000.000,00					-		2.760.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						2.760.000.000,00					-		2.760.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.760.000.000,00						1 Unit Kerja	2.760.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.760.000.000,00							2.760.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.760.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Gandusari || 1	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	2.760.000.000,00	PUSKESMAS GANDUSARI
34.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**499.589.500,00**							**499.589.500,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Gandusari						***469.163.200,00***							***469.163.200,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	80 Persentase		60 Persentase	65 Persentase	469.163.200,00						70 Persentase	469.163.200,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		60 %	70 %	469.163.200,00						80 %	469.163.200,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	70 %		41 %	50 %	469.163.200,00						56 %	469.163.200,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	66 %		33 %	50 %	469.163.200,00						66 %	469.163.200,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	469.163.200,00						100 %	469.163.200,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	80 %		60 %	65 %	469.163.200,00						70 %	469.163.200,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	469.163.200,00						100 %	469.163.200,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	90.8 %		87.7 %	87.7 %	469.163.200,00						90.3 %	469.163.200,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	469.163.200,00						11 %	469.163.200,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	469.163.200,00						100 %	469.163.200,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	469.163.200,00						100 %	469.163.200,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	469.163.200,00						100 %	469.163.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	469.163.200,00						100 %	469.163.200,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	469.163.200,00						100 %	469.163.200,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	469.163.200,00						100 %	469.163.200,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	469.163.200,00						100 %	469.163.200,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	469.163.200,00						100 %	469.163.200,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	469.163.200,00						100 %	469.163.200,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	469.163.200,00						100 %	469.163.200,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	469.163.200,00						100 %	469.163.200,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	469.163.200,00						100 %	469.163.200,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	469.163.200,00						0.67 %	469.163.200,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	7.44 %		7.48 %	7.47 %	469.163.200,00						7.46 %	469.163.200,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	96.9 %		96.5 %	96.6 %	469.163.200,00						96.7 %	469.163.200,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2764 Orang		2764 Orang	2764 Orang	16.146.000,00						2764 Orang	16.146.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.352.000,00						1 Dokumen	14.352.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	158.350.000,00						12 Dokumen	158.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.160.800,00						12 Dokumen	12.160.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.104.400,00						12 Dokumen	21.104.400,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.076.400,00						12 Dokumen	1.076.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.952.700,00						1 Dokumen	143.952.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	326 Orang		326 Orang	326 Orang	14.467.200,00						326 Orang	14.467.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	311 Orang		311 Orang	311 Orang	22.116.000,00						311 Orang	22.116.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang		65 Orang	65 Orang	9.846.000,00						65 Orang	9.846.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2764 Orang		2764 Orang	2764 Orang	16.146.000,00						2764 Orang	16.146.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.352.000,00						1 Dokumen	14.352.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	158.350.000,00						12 Dokumen	158.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.160.800,00						12 Dokumen	12.160.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.104.400,00						12 Dokumen	21.104.400,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.076.400,00						12 Dokumen	1.076.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.952.700,00						1 Dokumen	143.952.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	326 Orang		326 Orang	326 Orang	14.467.200,00						326 Orang	14.467.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	311 Orang		311 Orang	311 Orang	22.116.000,00						311 Orang	22.116.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang		65 Orang	65 Orang	9.846.000,00						65 Orang	9.846.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2764 Orang		2764 Orang	2764 Orang	16.146.000,00						2764 Orang	16.146.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.352.000,00						1 Dokumen	14.352.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	158.350.000,00						12 Dokumen	158.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.160.800,00						12 Dokumen	12.160.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.104.400,00						12 Dokumen	21.104.400,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.076.400,00						12 Dokumen	1.076.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.952.700,00						1 Dokumen	143.952.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	326 Orang		326 Orang	326 Orang	14.467.200,00						326 Orang	14.467.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	311 Orang		311 Orang	311 Orang	22.116.000,00						311 Orang	22.116.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang		65 Orang	65 Orang	9.846.000,00						65 Orang	9.846.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2764 Orang		2764 Orang	2764 Orang	16.146.000,00						2764 Orang	16.146.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.352.000,00						1 Dokumen	14.352.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	158.350.000,00						12 Dokumen	158.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.160.800,00						12 Dokumen	12.160.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.104.400,00						12 Dokumen	21.104.400,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.076.400,00						12 Dokumen	1.076.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.952.700,00						1 Dokumen	143.952.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	326 Orang		326 Orang	326 Orang	14.467.200,00						326 Orang	14.467.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	311 Orang		311 Orang	311 Orang	22.116.000,00						311 Orang	22.116.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang		65 Orang	65 Orang	9.846.000,00						65 Orang	9.846.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2764 Orang		2764 Orang	2764 Orang	16.146.000,00						2764 Orang	16.146.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.352.000,00						1 Dokumen	14.352.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	158.350.000,00						12 Dokumen	158.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.160.800,00						12 Dokumen	12.160.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.104.400,00						12 Dokumen	21.104.400,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.076.400,00						12 Dokumen	1.076.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.952.700,00						1 Dokumen	143.952.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	326 Orang		326 Orang	326 Orang	14.467.200,00						326 Orang	14.467.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	311 Orang		311 Orang	311 Orang	22.116.000,00						311 Orang	22.116.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang		65 Orang	65 Orang	9.846.000,00						65 Orang	9.846.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2764 Orang		2764 Orang	2764 Orang	16.146.000,00						2764 Orang	16.146.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.352.000,00						1 Dokumen	14.352.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	158.350.000,00						12 Dokumen	158.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.160.800,00						12 Dokumen	12.160.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.104.400,00						12 Dokumen	21.104.400,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.076.400,00						12 Dokumen	1.076.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.952.700,00						1 Dokumen	143.952.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	326 Orang		326 Orang	326 Orang	14.467.200,00						326 Orang	14.467.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	311 Orang		311 Orang	311 Orang	22.116.000,00						311 Orang	22.116.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang		65 Orang	65 Orang	9.846.000,00						65 Orang	9.846.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2764 Orang		2764 Orang	2764 Orang	16.146.000,00						2764 Orang	16.146.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.352.000,00						1 Dokumen	14.352.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	158.350.000,00						12 Dokumen	158.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.160.800,00						12 Dokumen	12.160.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.104.400,00						12 Dokumen	21.104.400,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.076.400,00						12 Dokumen	1.076.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.952.700,00						1 Dokumen	143.952.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	326 Orang		326 Orang	326 Orang	14.467.200,00						326 Orang	14.467.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	311 Orang		311 Orang	311 Orang	22.116.000,00						311 Orang	22.116.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang		65 Orang	65 Orang	9.846.000,00						65 Orang	9.846.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2764 Orang		2764 Orang	2764 Orang	16.146.000,00						2764 Orang	16.146.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.352.000,00						1 Dokumen	14.352.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	158.350.000,00						12 Dokumen	158.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.160.800,00						12 Dokumen	12.160.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.104.400,00						12 Dokumen	21.104.400,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.076.400,00						12 Dokumen	1.076.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.952.700,00						1 Dokumen	143.952.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	326 Orang		326 Orang	326 Orang	14.467.200,00						326 Orang	14.467.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	311 Orang		311 Orang	311 Orang	22.116.000,00						311 Orang	22.116.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang		65 Orang	65 Orang	9.846.000,00						65 Orang	9.846.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2764 Orang		2764 Orang	2764 Orang	16.146.000,00						2764 Orang	16.146.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.352.000,00						1 Dokumen	14.352.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	158.350.000,00						12 Dokumen	158.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.160.800,00						12 Dokumen	12.160.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.104.400,00						12 Dokumen	21.104.400,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.076.400,00						12 Dokumen	1.076.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.952.700,00						1 Dokumen	143.952.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	326 Orang		326 Orang	326 Orang	14.467.200,00						326 Orang	14.467.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	311 Orang		311 Orang	311 Orang	22.116.000,00						311 Orang	22.116.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang		65 Orang	65 Orang	9.846.000,00						65 Orang	9.846.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2764 Orang		2764 Orang	2764 Orang	16.146.000,00						2764 Orang	16.146.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.352.000,00						1 Dokumen	14.352.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	158.350.000,00						12 Dokumen	158.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.160.800,00						12 Dokumen	12.160.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.104.400,00						12 Dokumen	21.104.400,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.076.400,00						12 Dokumen	1.076.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.952.700,00						1 Dokumen	143.952.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	326 Orang		326 Orang	326 Orang	14.467.200,00						326 Orang	14.467.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	311 Orang		311 Orang	311 Orang	22.116.000,00						311 Orang	22.116.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang		65 Orang	65 Orang	9.846.000,00						65 Orang	9.846.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2764 Orang		2764 Orang	2764 Orang	16.146.000,00						2764 Orang	16.146.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.352.000,00						1 Dokumen	14.352.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	158.350.000,00						12 Dokumen	158.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.160.800,00						12 Dokumen	12.160.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.104.400,00						12 Dokumen	21.104.400,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.076.400,00						12 Dokumen	1.076.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.952.700,00						1 Dokumen	143.952.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	326 Orang		326 Orang	326 Orang	14.467.200,00						326 Orang	14.467.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	311 Orang		311 Orang	311 Orang	22.116.000,00						311 Orang	22.116.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang		65 Orang	65 Orang	9.846.000,00						65 Orang	9.846.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2764 Orang		2764 Orang	2764 Orang	16.146.000,00						2764 Orang	16.146.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.352.000,00						1 Dokumen	14.352.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	158.350.000,00						12 Dokumen	158.350.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.160.800,00						12 Dokumen	12.160.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.104.400,00						12 Dokumen	21.104.400,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.076.400,00						12 Dokumen	1.076.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.952.700,00						1 Dokumen	143.952.700,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	326 Orang		326 Orang	326 Orang	14.467.200,00						326 Orang	14.467.200,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	311 Orang		311 Orang	311 Orang	22.116.000,00						311 Orang	22.116.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang		65 Orang	65 Orang	9.846.000,00						65 Orang	9.846.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						14.467.200,00							14.467.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	326 Orang		326 Orang	317 Orang	14.467.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Gandusari || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		326 Orang	14.467.200,00	PUSKESMAS GANDUSARI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						16.146.000,00							16.146.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2764 Orang		2764 Orang	2448 Orang	16.146.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Gandusari || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2764 Orang	16.146.000,00	PUSKESMAS GANDUSARI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.846.000,00							9.846.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	65 Orang		65 Orang	132 Orang	9.846.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Gandusari || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		65 Orang	9.846.000,00	PUSKESMAS GANDUSARI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						22.116.000,00							22.116.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	311 Orang		311 Orang	371 Orang	22.116.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Gandusari || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		311 Orang	22.116.000,00	PUSKESMAS GANDUSARI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						158.350.000,00							158.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	1642 Dokumen	158.350.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Gandusari || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	158.350.000,00	PUSKESMAS GANDUSARI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						12.160.800,00							12.160.800,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.160.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Gandusari || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	12.160.800,00	PUSKESMAS GANDUSARI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						21.104.400,00							21.104.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.104.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Gandusari || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	21.104.400,00	PUSKESMAS GANDUSARI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						143.952.700,00							143.952.700,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	143.952.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Gandusari || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	143.952.700,00	PUSKESMAS GANDUSARI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.076.400,00							1.076.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.076.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Gandusari || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	1.076.400,00	PUSKESMAS GANDUSARI
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						14.352.000,00							14.352.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.352.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Gandusari || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	14.352.000,00	PUSKESMAS GANDUSARI
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.165.400,00						-	25.165.400,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.165.400,00						-	25.165.400,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.165.400,00						-	25.165.400,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.165.400,00						-	25.165.400,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.165.400,00						-	25.165.400,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.165.400,00						-	25.165.400,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.165.400,00						-	25.165.400,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.165.400,00						-	25.165.400,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.165.400,00						-	25.165.400,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.165.400,00						-	25.165.400,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.165.400,00						-	25.165.400,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						499.589.500,00					-		499.589.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	30.426.300,00						-	30.426.300,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.165.400,00						-	25.165.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						25.165.400,00							25.165.400,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	132 Orang	25.165.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Gandusari || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		-	25.165.400,00	PUSKESMAS GANDUSARI
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						30.426.300,00							30.426.300,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	5 Laporan	30.426.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Gandusari || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		-	30.426.300,00	PUSKESMAS GANDUSARI
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						30.426.300,00							30.426.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	6 Laporan	30.426.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Gandusari || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	30.426.300,00	PUSKESMAS GANDUSARI
35.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**62.672.000,00**							**62.672.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Gandusari						***62.672.000,00***							***62.672.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	28 Persentase		20 Persentase	22 Persentase	62.672.000,00						24 Persentase	62.672.000,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		9 %	13 %	62.672.000,00						18 %	62.672.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						62.672.000,00					-		62.672.000,00	
		Tercapainya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						62.672.000,00					-		62.672.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	62.672.000,00						7 Dokumen	62.672.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						62.672.000,00							62.672.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	62.672.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Gandusari || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		7 Dokumen	62.672.000,00	PUSKESMAS GANDUSARI
		PUSKESMAS KARANGANYAR						**2.525.343.000,00**							**2.300.638.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.525.343.000,00**							**2.300.638.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.525.343.000,00**							**2.300.638.000,00**	
36.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.000.000.000,00**							**1.800.000.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Karanganyar						***2.000.000.000,00***							***1.800.000.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.000.000.000,00						100 %	1.800.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.000.000.000,00					-		1.800.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						2.000.000.000,00					-		1.800.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.000.000.000,00						1 Unit Kerja	1.800.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.000.000.000,00							1.800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.000.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Karanganyar || 1	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	1.800.000.000,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
37.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**482.821.375,00**							**458.116.375,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Karanganyar						***472.021.375,00***							***447.316.375,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	90 Persentase		75 Persentase	80 Persentase	472.021.375,00						85 Persentase	447.316.375,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		60 %	70 %	472.021.375,00						80 %	447.316.375,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	66 %		37 %	46 %	472.021.375,00						52 %	447.316.375,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	80 %		60 %	60 %	472.021.375,00						60 %	447.316.375,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	472.021.375,00						100 %	447.316.375,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	80 %		62 %	65 %	472.021.375,00						70 %	447.316.375,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	472.021.375,00						100 %	447.316.375,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	92.1 %		91.1 %	92.1 %	472.021.375,00						92.1 %	447.316.375,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	472.021.375,00						11 %	447.316.375,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	472.021.375,00						100 %	447.316.375,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	472.021.375,00						100 %	447.316.375,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	472.021.375,00						100 %	447.316.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	472.021.375,00						100 %	447.316.375,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	472.021.375,00						100 %	447.316.375,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	472.021.375,00						100 %	447.316.375,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	472.021.375,00						100 %	447.316.375,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	472.021.375,00						100 %	447.316.375,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	472.021.375,00						100 %	447.316.375,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	472.021.375,00						100 %	447.316.375,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	472.021.375,00						100 %	447.316.375,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	472.021.375,00						100 %	447.316.375,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	472.021.375,00						0.67 %	447.316.375,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	8.34 %		8.38 %	8.37 %	472.021.375,00						8.36 %	447.316.375,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	97.5 %		97.2 %	97.3 %	472.021.375,00						97.4 %	447.316.375,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2073 Orang		2070 Orang	2070 Orang	10.800.000,00						2071 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.143.375,00						12 Dokumen	8.143.375,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	186.283.000,00						12 Dokumen	186.283.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.200.000,00						12 Dokumen	34.200.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	121.630.000,00						16 Dokumen	121.630.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang		180 Orang	180 Orang	12.490.000,00						180 Orang	12.490.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang		216 Orang	216 Orang	10.800.000,00						216 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang		216 Orang	216 Orang	8.100.000,00						72 Orang	8.100.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2073 Orang		2070 Orang	2070 Orang	10.800.000,00						2071 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.143.375,00						12 Dokumen	8.143.375,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	186.283.000,00						12 Dokumen	186.283.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.200.000,00						12 Dokumen	34.200.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	121.630.000,00						16 Dokumen	121.630.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang		180 Orang	180 Orang	12.490.000,00						180 Orang	12.490.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang		216 Orang	216 Orang	10.800.000,00						216 Orang	10.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang		216 Orang	216 Orang	8.100.000,00						72 Orang	8.100.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2073 Orang		2070 Orang	2070 Orang	10.800.000,00						2071 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.143.375,00						12 Dokumen	8.143.375,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	186.283.000,00						12 Dokumen	186.283.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.200.000,00						12 Dokumen	34.200.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	121.630.000,00						16 Dokumen	121.630.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang		180 Orang	180 Orang	12.490.000,00						180 Orang	12.490.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang		216 Orang	216 Orang	10.800.000,00						216 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang		216 Orang	216 Orang	8.100.000,00						72 Orang	8.100.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2073 Orang		2070 Orang	2070 Orang	10.800.000,00						2071 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.143.375,00						12 Dokumen	8.143.375,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	186.283.000,00						12 Dokumen	186.283.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.200.000,00						12 Dokumen	34.200.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	121.630.000,00						16 Dokumen	121.630.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang		180 Orang	180 Orang	12.490.000,00						180 Orang	12.490.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang		216 Orang	216 Orang	10.800.000,00						216 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang		216 Orang	216 Orang	8.100.000,00						72 Orang	8.100.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2073 Orang		2070 Orang	2070 Orang	10.800.000,00						2071 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.143.375,00						12 Dokumen	8.143.375,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	186.283.000,00						12 Dokumen	186.283.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.200.000,00						12 Dokumen	34.200.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	121.630.000,00						16 Dokumen	121.630.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang		180 Orang	180 Orang	12.490.000,00						180 Orang	12.490.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang		216 Orang	216 Orang	10.800.000,00						216 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang		216 Orang	216 Orang	8.100.000,00						72 Orang	8.100.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2073 Orang		2070 Orang	2070 Orang	10.800.000,00						2071 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.143.375,00						12 Dokumen	8.143.375,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	186.283.000,00						12 Dokumen	186.283.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.200.000,00						12 Dokumen	34.200.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	121.630.000,00						16 Dokumen	121.630.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang		180 Orang	180 Orang	12.490.000,00						180 Orang	12.490.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang		216 Orang	216 Orang	10.800.000,00						216 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang		216 Orang	216 Orang	8.100.000,00						72 Orang	8.100.000,00	
		Tercapainya Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2073 Orang		2070 Orang	2070 Orang	10.800.000,00						2071 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.143.375,00						12 Dokumen	8.143.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	186.283.000,00						12 Dokumen	186.283.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.200.000,00						12 Dokumen	34.200.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	121.630.000,00						16 Dokumen	121.630.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang		180 Orang	180 Orang	12.490.000,00						180 Orang	12.490.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang		216 Orang	216 Orang	10.800.000,00						216 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang		216 Orang	216 Orang	8.100.000,00						72 Orang	8.100.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2073 Orang		2070 Orang	2070 Orang	10.800.000,00						2071 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.143.375,00						12 Dokumen	8.143.375,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	186.283.000,00						12 Dokumen	186.283.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.200.000,00						12 Dokumen	34.200.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	121.630.000,00						16 Dokumen	121.630.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang		180 Orang	180 Orang	12.490.000,00						180 Orang	12.490.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang		216 Orang	216 Orang	10.800.000,00						216 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang		216 Orang	216 Orang	8.100.000,00						72 Orang	8.100.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2073 Orang		2070 Orang	2070 Orang	10.800.000,00						2071 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.143.375,00						12 Dokumen	8.143.375,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	186.283.000,00						12 Dokumen	186.283.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.200.000,00						12 Dokumen	34.200.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	121.630.000,00						16 Dokumen	121.630.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang		180 Orang	180 Orang	12.490.000,00						180 Orang	12.490.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang		216 Orang	216 Orang	10.800.000,00						216 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang		216 Orang	216 Orang	8.100.000,00						72 Orang	8.100.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2073 Orang		2070 Orang	2070 Orang	10.800.000,00						2071 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.143.375,00						12 Dokumen	8.143.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	186.283.000,00						12 Dokumen	186.283.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.200.000,00						12 Dokumen	34.200.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	121.630.000,00						16 Dokumen	121.630.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang		180 Orang	180 Orang	12.490.000,00						180 Orang	12.490.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang		216 Orang	216 Orang	10.800.000,00						216 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang		216 Orang	216 Orang	8.100.000,00						72 Orang	8.100.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2073 Orang		2070 Orang	2070 Orang	10.800.000,00						2071 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.143.375,00						12 Dokumen	8.143.375,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	186.283.000,00						12 Dokumen	186.283.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.200.000,00						12 Dokumen	34.200.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	121.630.000,00						16 Dokumen	121.630.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang		180 Orang	180 Orang	12.490.000,00						180 Orang	12.490.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang		216 Orang	216 Orang	10.800.000,00						216 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang		216 Orang	216 Orang	8.100.000,00						72 Orang	8.100.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2073 Orang		2070 Orang	2070 Orang	10.800.000,00						2071 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.143.375,00						12 Dokumen	8.143.375,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	186.283.000,00						12 Dokumen	186.283.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.200.000,00						12 Dokumen	34.200.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00						12 Dokumen	750.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	121.630.000,00						16 Dokumen	121.630.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang		180 Orang	180 Orang	12.490.000,00						180 Orang	12.490.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang		216 Orang	216 Orang	10.800.000,00						216 Orang	10.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang		216 Orang	216 Orang	8.100.000,00						72 Orang	8.100.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						12.490.000,00							12.490.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	180 Orang		180 Orang	192 Orang	12.490.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Karanganyar || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		180 Orang	12.490.000,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						10.800.000,00							10.800.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2073 Orang		2070 Orang	2313 Orang	10.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Karanganyar || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2071 Orang	10.800.000,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						8.100.000,00							8.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	74 Orang		216 Orang	65 Orang	8.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Karanganyar || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		72 Orang	8.100.000,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						10.800.000,00							10.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	216 Orang		216 Orang	233 Orang	10.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Karanganyar || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		216 Orang	10.800.000,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						186.283.000,00							186.283.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	186.283.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Karanganyar || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	186.283.000,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						3.750.000,00							3.750.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Karanganyar || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	3.750.000,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						34.200.000,00							34.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Karanganyar || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	34.200.000,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						121.630.000,00							121.630.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	121.630.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Karanganyar || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		16 Dokumen	121.630.000,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						750.000,00							750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	750.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Karanganyar || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	750.000,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						8.143.375,00							8.143.375,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.143.375,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Karanganyar || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	8.143.375,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	27.450.000,00						-	2.745.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	49.725.000,00						-	49.725.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	8.700.000,00						-	8.700.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	27.450.000,00						-	2.745.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	49.725.000,00						-	49.725.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	8.700.000,00						-	8.700.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	27.450.000,00						-	2.745.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	49.725.000,00						-	49.725.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	8.700.000,00						-	8.700.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	27.450.000,00						-	2.745.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	49.725.000,00						-	49.725.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	8.700.000,00						-	8.700.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	27.450.000,00						-	2.745.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	49.725.000,00						-	49.725.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	8.700.000,00						-	8.700.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	27.450.000,00						-	2.745.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	49.725.000,00						-	49.725.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	8.700.000,00						-	8.700.000,00	
		Tercapainya Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	27.450.000,00						-	2.745.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	49.725.000,00						-	49.725.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	8.700.000,00						-	8.700.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	27.450.000,00						-	2.745.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	49.725.000,00						-	49.725.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	8.700.000,00						-	8.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	27.450.000,00						-	2.745.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	49.725.000,00						-	49.725.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	8.700.000,00						-	8.700.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	27.450.000,00						-	2.745.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	49.725.000,00						-	49.725.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	8.700.000,00						-	8.700.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	27.450.000,00						-	2.745.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	49.725.000,00						-	49.725.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	8.700.000,00						-	8.700.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						482.821.375,00					-		458.116.375,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	27.450.000,00						-	2.745.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	49.725.000,00						-	49.725.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	8.700.000,00						-	8.700.000,00	
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						8.700.000,00							8.700.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	2843 Orang	8.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Karanganyar || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	8.700.000,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						27.450.000,00							2.745.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	27.450.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Karanganyar || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	2.745.000,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						49.725.000,00							49.725.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	49.725.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Karanganyar || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	49.725.000,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
38.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**42.521.625,00**							**42.521.625,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Karanganyar						***42.521.625,00***							***42.521.625,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	74 Persentase		66 Persentase	68 Persentase	42.521.625,00						70 Persentase	42.521.625,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		9 %	13 %	42.521.625,00						20 %	42.521.625,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						42.521.625,00					-		42.521.625,00	
		Tercapainya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						42.521.625,00					-		42.521.625,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	42.521.625,00						12 Dokumen	42.521.625,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						42.521.625,00							42.521.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	42.521.625,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Gandusari || Desa Karanganyar || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	42.521.625,00	PUSKESMAS KARANGANYAR
		PUSKESMAS PANDEAN						**3.472.009.450,00**							**3.451.260.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.472.009.450,00**							**3.451.260.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.472.009.450,00**							**3.451.260.000,00**	
39.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.820.749.450,00**							**2.800.000.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Pandean						***2.820.749.450,00***							***2.800.000.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.820.749.450,00						100 %	2.800.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.820.749.450,00					-		2.800.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						2.820.749.450,00					-		2.800.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.820.749.450,00						1 Unit Kerja	2.800.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.820.749.450,00							2.800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.820.749.450,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Dongko || Desa Pandean || 1	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	2.800.000.000,00	PUSKESMAS PANDEAN
40.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**643.644.000,00**							**643.644.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Pandean						***640.644.000,00***							***640.644.000,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	90 Persentase		80 Persentase	82 Persentase	640.644.000,00						86 Persentase	640.644.000,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		60 %	70 %	640.644.000,00						80 %	640.644.000,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	82 %		53 %	62 %	640.644.000,00						68 %	640.644.000,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	80 %		40 %	40 %	640.644.000,00						40 %	640.644.000,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	640.644.000,00						100 %	640.644.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	85 %		65 %	70 %	640.644.000,00						75 %	640.644.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	640.644.000,00						100 %	640.644.000,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	95.6 %		94.2 %	94.2 %	640.644.000,00						95.6 %	640.644.000,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	640.644.000,00						11 %	640.644.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	640.644.000,00						100 %	640.644.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	640.644.000,00						100 %	640.644.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	640.644.000,00						100 %	640.644.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	640.644.000,00						100 %	640.644.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	640.644.000,00						100 %	640.644.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	640.644.000,00						100 %	640.644.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	640.644.000,00						100 %	640.644.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	640.644.000,00						100 %	640.644.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	640.644.000,00						100 %	640.644.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	640.644.000,00						100 %	640.644.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	640.644.000,00						100 %	640.644.000,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	640.644.000,00						100 %	640.644.000,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	640.644.000,00						0.67 %	640.644.000,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	3.44 %		3.48 %	3.47 %	640.644.000,00						3.46 %	640.644.000,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	98.15 %		97.7 %	98.13 %	640.644.000,00						98.15 %	640.644.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2851 Orang		2848 Orang	2848 Orang	9.000.000,00						2849 Orang	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	1.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	248.300.000,00						12 Dokumen	248.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.550.000,00						12 Dokumen	2.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.204.450,00						12 Dokumen	18.204.450,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	125.519.816,00						12 Dokumen	125.519.816,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275 Orang		275 Orang	275 Orang	21.695.550,00						275 Orang	21.695.550,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	157 Orang		156 Orang	157 Orang	2.250.000,00						157 Orang	2.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang		70 Orang	71 Orang	750.000,00						71 Orang	750.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2851 Orang		2848 Orang	2848 Orang	9.000.000,00						2849 Orang	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	1.050.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	248.300.000,00						12 Dokumen	248.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.550.000,00						12 Dokumen	2.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.204.450,00						12 Dokumen	18.204.450,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	125.519.816,00						12 Dokumen	125.519.816,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275 Orang		275 Orang	275 Orang	21.695.550,00						275 Orang	21.695.550,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	157 Orang		156 Orang	157 Orang	2.250.000,00						157 Orang	2.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang		70 Orang	71 Orang	750.000,00						71 Orang	750.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2851 Orang		2848 Orang	2848 Orang	9.000.000,00						2849 Orang	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	1.050.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	248.300.000,00						12 Dokumen	248.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.550.000,00						12 Dokumen	2.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.204.450,00						12 Dokumen	18.204.450,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	125.519.816,00						12 Dokumen	125.519.816,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275 Orang		275 Orang	275 Orang	21.695.550,00						275 Orang	21.695.550,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	157 Orang		156 Orang	157 Orang	2.250.000,00						157 Orang	2.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang		70 Orang	71 Orang	750.000,00						71 Orang	750.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2851 Orang		2848 Orang	2848 Orang	9.000.000,00						2849 Orang	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	1.050.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	248.300.000,00						12 Dokumen	248.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.550.000,00						12 Dokumen	2.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.204.450,00						12 Dokumen	18.204.450,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	125.519.816,00						12 Dokumen	125.519.816,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275 Orang		275 Orang	275 Orang	21.695.550,00						275 Orang	21.695.550,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	157 Orang		156 Orang	157 Orang	2.250.000,00						157 Orang	2.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang		70 Orang	71 Orang	750.000,00						71 Orang	750.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2851 Orang		2848 Orang	2848 Orang	9.000.000,00						2849 Orang	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	1.050.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	248.300.000,00						12 Dokumen	248.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.550.000,00						12 Dokumen	2.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.204.450,00						12 Dokumen	18.204.450,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	125.519.816,00						12 Dokumen	125.519.816,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275 Orang		275 Orang	275 Orang	21.695.550,00						275 Orang	21.695.550,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	157 Orang		156 Orang	157 Orang	2.250.000,00						157 Orang	2.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang		70 Orang	71 Orang	750.000,00						71 Orang	750.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2851 Orang		2848 Orang	2848 Orang	9.000.000,00						2849 Orang	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	1.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	248.300.000,00						12 Dokumen	248.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.550.000,00						12 Dokumen	2.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.204.450,00						12 Dokumen	18.204.450,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	125.519.816,00						12 Dokumen	125.519.816,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275 Orang		275 Orang	275 Orang	21.695.550,00						275 Orang	21.695.550,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	157 Orang		156 Orang	157 Orang	2.250.000,00						157 Orang	2.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang		70 Orang	71 Orang	750.000,00						71 Orang	750.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2851 Orang		2848 Orang	2848 Orang	9.000.000,00						2849 Orang	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	1.050.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	248.300.000,00						12 Dokumen	248.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.550.000,00						12 Dokumen	2.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.204.450,00						12 Dokumen	18.204.450,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	125.519.816,00						12 Dokumen	125.519.816,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275 Orang		275 Orang	275 Orang	21.695.550,00						275 Orang	21.695.550,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	157 Orang		156 Orang	157 Orang	2.250.000,00						157 Orang	2.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang		70 Orang	71 Orang	750.000,00						71 Orang	750.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2851 Orang		2848 Orang	2848 Orang	9.000.000,00						2849 Orang	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	1.050.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	248.300.000,00						12 Dokumen	248.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.550.000,00						12 Dokumen	2.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.204.450,00						12 Dokumen	18.204.450,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	125.519.816,00						12 Dokumen	125.519.816,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275 Orang		275 Orang	275 Orang	21.695.550,00						275 Orang	21.695.550,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	157 Orang		156 Orang	157 Orang	2.250.000,00						157 Orang	2.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang		70 Orang	71 Orang	750.000,00						71 Orang	750.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2851 Orang		2848 Orang	2848 Orang	9.000.000,00						2849 Orang	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	1.050.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	248.300.000,00						12 Dokumen	248.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.550.000,00						12 Dokumen	2.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.204.450,00						12 Dokumen	18.204.450,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	125.519.816,00						12 Dokumen	125.519.816,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275 Orang		275 Orang	275 Orang	21.695.550,00						275 Orang	21.695.550,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	157 Orang		156 Orang	157 Orang	2.250.000,00						157 Orang	2.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang		70 Orang	71 Orang	750.000,00						71 Orang	750.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2851 Orang		2848 Orang	2848 Orang	9.000.000,00						2849 Orang	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	1.050.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	248.300.000,00						12 Dokumen	248.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.550.000,00						12 Dokumen	2.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.204.450,00						12 Dokumen	18.204.450,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	125.519.816,00						12 Dokumen	125.519.816,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275 Orang		275 Orang	275 Orang	21.695.550,00						275 Orang	21.695.550,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	157 Orang		156 Orang	157 Orang	2.250.000,00						157 Orang	2.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang		70 Orang	71 Orang	750.000,00						71 Orang	750.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2851 Orang		2848 Orang	2848 Orang	9.000.000,00						2849 Orang	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	1.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	248.300.000,00						12 Dokumen	248.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.550.000,00						12 Dokumen	2.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.204.450,00						12 Dokumen	18.204.450,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	125.519.816,00						12 Dokumen	125.519.816,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275 Orang		275 Orang	275 Orang	21.695.550,00						275 Orang	21.695.550,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	157 Orang		156 Orang	157 Orang	2.250.000,00						157 Orang	2.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang		70 Orang	71 Orang	750.000,00						71 Orang	750.000,00	
		Terselenggaranya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2851 Orang		2848 Orang	2848 Orang	9.000.000,00						2849 Orang	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.750.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	1.050.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	248.300.000,00						12 Dokumen	248.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.550.000,00						12 Dokumen	2.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.204.450,00						12 Dokumen	18.204.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00						12 Dokumen	2.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00						12 Dokumen	3.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	125.519.816,00						12 Dokumen	125.519.816,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275 Orang		275 Orang	275 Orang	21.695.550,00						275 Orang	21.695.550,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	157 Orang		156 Orang	157 Orang	2.250.000,00						157 Orang	2.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang		70 Orang	71 Orang	750.000,00						71 Orang	750.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						21.695.550,00							21.695.550,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	275 Orang		275 Orang	295 Orang	21.695.550,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		275 Orang	21.695.550,00	PUSKESMAS PANDEAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						9.000.000,00							9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2851 Orang		2848 Orang	2604 Orang	9.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2849 Orang	9.000.000,00	PUSKESMAS PANDEAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						750.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	73 Orang		70 Orang	65 Orang	750.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		71 Orang	750.000,00	PUSKESMAS PANDEAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						2.250.000,00							2.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	157 Orang		156 Orang	260 Orang	2.250.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		157 Orang	2.250.000,00	PUSKESMAS PANDEAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						248.300.000,00							248.300.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	248.300.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	248.300.000,00	PUSKESMAS PANDEAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						2.550.000,00							2.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.550.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	2.550.000,00	PUSKESMAS PANDEAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						2.250.000,00							2.250.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.250.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	2.250.000,00	PUSKESMAS PANDEAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						125.519.816,00							125.519.816,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	125.519.816,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	125.519.816,00	PUSKESMAS PANDEAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						18.204.450,00							18.204.450,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.204.450,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	18.204.450,00	PUSKESMAS PANDEAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						3.900.000,00							3.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.900.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	3.900.000,00	PUSKESMAS PANDEAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						1.050.000,00							1.050.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	1.050.000,00	PUSKESMAS PANDEAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						3.750.000,00							3.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	3.750.000,00	PUSKESMAS PANDEAN
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	142.474.184,00						-	142.474.184,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.200.000,00						-	1.200.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	750.000,00						-	750.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	142.474.184,00						-	142.474.184,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.200.000,00						-	1.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	750.000,00						-	750.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	142.474.184,00						-	142.474.184,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.200.000,00						-	1.200.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	750.000,00						-	750.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	142.474.184,00						-	142.474.184,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.200.000,00						-	1.200.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	750.000,00						-	750.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	142.474.184,00						-	142.474.184,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.200.000,00						-	1.200.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	750.000,00						-	750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	142.474.184,00						-	142.474.184,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.200.000,00						-	1.200.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	750.000,00						-	750.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	142.474.184,00						-	142.474.184,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.200.000,00						-	1.200.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	750.000,00						-	750.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	142.474.184,00						-	142.474.184,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.200.000,00						-	1.200.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	750.000,00						-	750.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	142.474.184,00						-	142.474.184,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.200.000,00						-	1.200.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	750.000,00						-	750.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	142.474.184,00						-	142.474.184,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.200.000,00						-	1.200.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	750.000,00						-	750.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	142.474.184,00						-	142.474.184,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.200.000,00						-	1.200.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	750.000,00						-	750.000,00	
		Terselenggaranya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						643.644.000,00					-		643.644.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	142.474.184,00						-	142.474.184,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.200.000,00						-	1.200.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	750.000,00						-	750.000,00	
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						750.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	12 Laporan	750.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	750.000,00	PUSKESMAS PANDEAN
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						1.200.000,00							1.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	3465 Orang	1.200.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	1.200.000,00	PUSKESMAS PANDEAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						142.474.184,00							142.474.184,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	142.474.184,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	142.474.184,00	PUSKESMAS PANDEAN
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						60.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	60.000.000,00	PUSKESMAS PANDEAN
41.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**7.616.000,00**							**7.616.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Pandean						***7.616.000,00***							***7.616.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	80 Persentase		72 Persentase	74 Persentase	7.616.000,00						76 Persentase	7.616.000,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		10 %	13 %	7.616.000,00						18 %	7.616.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						7.616.000,00					-		7.616.000,00	
		Terselenggaranya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						7.616.000,00					-		7.616.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.616.000,00						12 Dokumen	7.616.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						7.616.000,00							7.616.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.616.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	7.616.000,00	PUSKESMAS PANDEAN
		PUSKESMAS BARUHARJO						**3.434.512.500,00**							**3.434.182.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.434.512.500,00**							**3.434.182.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.434.512.500,00**							**3.434.182.500,00**	
42.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.783.500.000,00**							**2.783.500.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Baruharjo						***2.783.500.000,00***							***2.783.500.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.783.500.000,00						100 %	2.783.500.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.783.500.000,00					-		2.783.500.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						2.783.500.000,00					-		2.783.500.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.783.500.000,00						1 Unit Kerja	2.783.500.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.783.500.000,00							2.783.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.783.500.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	2.783.500.000,00	PUSKESMAS BARUHARJO
43.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**613.338.000,00**							**613.008.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Baruharjo						***603.888.000,00***							***603.558.000,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	90 Persentase		80 Persentase	83 Persentase	603.888.000,00						85 Persentase	603.558.000,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		55 %	70 %	603.888.000,00						80 %	603.558.000,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	67 %		38 %	47 %	603.888.000,00						53 %	603.558.000,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	43 %		14 %	29 %	603.888.000,00						29 %	603.558.000,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	603.888.000,00						100 %	603.558.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	85 %		65 %	70 %	603.888.000,00						75 %	603.558.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	603.888.000,00						100 %	603.558.000,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	90.2 %		88.5 %	90.2 %	603.888.000,00						90.2 %	603.558.000,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	603.888.000,00						11 %	603.558.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	603.888.000,00						100 %	603.558.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	603.888.000,00						100 %	603.558.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	603.888.000,00						100 %	603.558.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	603.888.000,00						100 %	603.558.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	603.888.000,00						100 %	603.558.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	603.888.000,00						100 %	603.558.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	603.888.000,00						100 %	603.558.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	603.888.000,00						100 %	603.558.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	603.888.000,00						100 %	603.558.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	603.888.000,00						100 %	603.558.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	603.888.000,00						100 %	603.558.000,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	603.888.000,00						100 %	603.558.000,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	603.888.000,00						0.67 %	603.558.000,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	18.50 %		20.50 %	20 %	603.888.000,00						19.50 %	603.558.000,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	92.65 %		92.61 %	92.62 %	603.888.000,00						92.63 %	603.558.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3494 Orang		3490 Orang	3491 Orang	23.100.000,00						3493 Orang	23.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.250.000,00						12 Dokumen	8.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	254.083.500,00						12 Dokumen	254.083.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.875.500,00						12 Dokumen	16.875.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	197.194.000,00						12 Dokumen	197.194.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang		254 Orang	254 Orang	22.680.000,00						254 Orang	22.680.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	276 Orang		274 Orang	274 Orang	9.450.000,00						275 Orang	9.450.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		76 Orang	77 Orang	9.450.000,00						77 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3494 Orang		3490 Orang	3491 Orang	23.100.000,00						3493 Orang	23.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.250.000,00						12 Dokumen	8.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	254.083.500,00						12 Dokumen	254.083.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.875.500,00						12 Dokumen	16.875.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	197.194.000,00						12 Dokumen	197.194.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang		254 Orang	254 Orang	22.680.000,00						254 Orang	22.680.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	276 Orang		274 Orang	274 Orang	9.450.000,00						275 Orang	9.450.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		76 Orang	77 Orang	9.450.000,00						77 Orang	9.450.000,00	
		tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3494 Orang		3490 Orang	3491 Orang	23.100.000,00						3493 Orang	23.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.250.000,00						12 Dokumen	8.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	254.083.500,00						12 Dokumen	254.083.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.875.500,00						12 Dokumen	16.875.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	197.194.000,00						12 Dokumen	197.194.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang		254 Orang	254 Orang	22.680.000,00						254 Orang	22.680.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	276 Orang		274 Orang	274 Orang	9.450.000,00						275 Orang	9.450.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		76 Orang	77 Orang	9.450.000,00						77 Orang	9.450.000,00	
		tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3494 Orang		3490 Orang	3491 Orang	23.100.000,00						3493 Orang	23.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.250.000,00						12 Dokumen	8.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	254.083.500,00						12 Dokumen	254.083.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.875.500,00						12 Dokumen	16.875.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	197.194.000,00						12 Dokumen	197.194.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang		254 Orang	254 Orang	22.680.000,00						254 Orang	22.680.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	276 Orang		274 Orang	274 Orang	9.450.000,00						275 Orang	9.450.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		76 Orang	77 Orang	9.450.000,00						77 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3494 Orang		3490 Orang	3491 Orang	23.100.000,00						3493 Orang	23.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.250.000,00						12 Dokumen	8.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	254.083.500,00						12 Dokumen	254.083.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.875.500,00						12 Dokumen	16.875.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	197.194.000,00						12 Dokumen	197.194.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang		254 Orang	254 Orang	22.680.000,00						254 Orang	22.680.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	276 Orang		274 Orang	274 Orang	9.450.000,00						275 Orang	9.450.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		76 Orang	77 Orang	9.450.000,00						77 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3494 Orang		3490 Orang	3491 Orang	23.100.000,00						3493 Orang	23.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.250.000,00						12 Dokumen	8.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	254.083.500,00						12 Dokumen	254.083.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.875.500,00						12 Dokumen	16.875.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	197.194.000,00						12 Dokumen	197.194.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang		254 Orang	254 Orang	22.680.000,00						254 Orang	22.680.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	276 Orang		274 Orang	274 Orang	9.450.000,00						275 Orang	9.450.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		76 Orang	77 Orang	9.450.000,00						77 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3494 Orang		3490 Orang	3491 Orang	23.100.000,00						3493 Orang	23.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.250.000,00						12 Dokumen	8.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	254.083.500,00						12 Dokumen	254.083.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.875.500,00						12 Dokumen	16.875.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	197.194.000,00						12 Dokumen	197.194.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang		254 Orang	254 Orang	22.680.000,00						254 Orang	22.680.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	276 Orang		274 Orang	274 Orang	9.450.000,00						275 Orang	9.450.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		76 Orang	77 Orang	9.450.000,00						77 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3494 Orang		3490 Orang	3491 Orang	23.100.000,00						3493 Orang	23.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.250.000,00						12 Dokumen	8.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	254.083.500,00						12 Dokumen	254.083.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.875.500,00						12 Dokumen	16.875.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	197.194.000,00						12 Dokumen	197.194.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang		254 Orang	254 Orang	22.680.000,00						254 Orang	22.680.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	276 Orang		274 Orang	274 Orang	9.450.000,00						275 Orang	9.450.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		76 Orang	77 Orang	9.450.000,00						77 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3494 Orang		3490 Orang	3491 Orang	23.100.000,00						3493 Orang	23.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.250.000,00						12 Dokumen	8.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	254.083.500,00						12 Dokumen	254.083.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.875.500,00						12 Dokumen	16.875.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	197.194.000,00						12 Dokumen	197.194.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang		254 Orang	254 Orang	22.680.000,00						254 Orang	22.680.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	276 Orang		274 Orang	274 Orang	9.450.000,00						275 Orang	9.450.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		76 Orang	77 Orang	9.450.000,00						77 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3494 Orang		3490 Orang	3491 Orang	23.100.000,00						3493 Orang	23.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.250.000,00						12 Dokumen	8.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	254.083.500,00						12 Dokumen	254.083.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.875.500,00						12 Dokumen	16.875.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	197.194.000,00						12 Dokumen	197.194.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang		254 Orang	254 Orang	22.680.000,00						254 Orang	22.680.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	276 Orang		274 Orang	274 Orang	9.450.000,00						275 Orang	9.450.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		76 Orang	77 Orang	9.450.000,00						77 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3494 Orang		3490 Orang	3491 Orang	23.100.000,00						3493 Orang	23.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.250.000,00						12 Dokumen	8.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	254.083.500,00						12 Dokumen	254.083.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.875.500,00						12 Dokumen	16.875.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	197.194.000,00						12 Dokumen	197.194.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang		254 Orang	254 Orang	22.680.000,00						254 Orang	22.680.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	276 Orang		274 Orang	274 Orang	9.450.000,00						275 Orang	9.450.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		76 Orang	77 Orang	9.450.000,00						77 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3494 Orang		3490 Orang	3491 Orang	23.100.000,00						3493 Orang	23.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.250.000,00						12 Dokumen	8.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	254.083.500,00						12 Dokumen	254.083.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.875.500,00						12 Dokumen	16.875.500,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	197.194.000,00						12 Dokumen	197.194.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang		254 Orang	254 Orang	22.680.000,00						254 Orang	22.680.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	276 Orang		274 Orang	274 Orang	9.450.000,00						275 Orang	9.450.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		76 Orang	77 Orang	9.450.000,00						77 Orang	9.450.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						22.680.000,00							22.680.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	254 Orang		254 Orang	239 Orang	22.680.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		254 Orang	22.680.000,00	PUSKESMAS BARUHARJO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						23.100.000,00							23.100.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3494 Orang		3490 Orang	2952 Orang	23.100.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3493 Orang	23.100.000,00	PUSKESMAS BARUHARJO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.450.000,00							9.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	78 Orang		76 Orang	76 Orang	9.450.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		77 Orang	9.450.000,00	PUSKESMAS BARUHARJO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						9.450.000,00							9.450.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	276 Orang		274 Orang	291 Orang	9.450.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		275 Orang	9.450.000,00	PUSKESMAS BARUHARJO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						254.083.500,00							254.083.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	254.083.500,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	254.083.500,00	PUSKESMAS BARUHARJO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	3.000.000,00	PUSKESMAS BARUHARJO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						16.875.500,00							16.875.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.875.500,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	16.875.500,00	PUSKESMAS BARUHARJO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						197.194.000,00							197.194.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	16 Dokumen	197.194.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	197.194.000,00	PUSKESMAS BARUHARJO
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						150.000,00							150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	150.000,00	PUSKESMAS BARUHARJO
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						8.250.000,00							8.250.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.250.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	8.250.000,00	PUSKESMAS BARUHARJO
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	8.625.000,00						-	8.625.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	55.650.000,00						-	55.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.830.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	8.625.000,00						-	8.625.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	55.650.000,00						-	55.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.830.000,00						-	4.500.000,00	
		tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	8.625.000,00						-	8.625.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	55.650.000,00						-	55.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.830.000,00						-	4.500.000,00	
		tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	8.625.000,00						-	8.625.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	55.650.000,00						-	55.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.830.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	8.625.000,00						-	8.625.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	55.650.000,00						-	55.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.830.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	8.625.000,00						-	8.625.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	55.650.000,00						-	55.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.830.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	8.625.000,00						-	8.625.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	55.650.000,00						-	55.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.830.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	8.625.000,00						-	8.625.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	55.650.000,00						-	55.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.830.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	8.625.000,00						-	8.625.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	55.650.000,00						-	55.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.830.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	8.625.000,00						-	8.625.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	55.650.000,00						-	55.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.830.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	8.625.000,00						-	8.625.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	55.650.000,00						-	55.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.830.000,00						-	4.500.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						613.338.000,00					-		613.008.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	8.625.000,00						-	8.625.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	55.650.000,00						-	55.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	4.830.000,00						-	4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						4.830.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	802 Orang	4.830.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	4.500.000,00	PUSKESMAS BARUHARJO
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						8.625.000,00							8.625.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	8.625.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	8.625.000,00	PUSKESMAS BARUHARJO
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						55.650.000,00							55.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	55.650.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	55.650.000,00	PUSKESMAS BARUHARJO
44.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**37.674.500,00**							**37.674.500,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Baruharjo						***20.629.500,00***							***20.629.500,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	50 Persentase		42 Persentase	44 Persentase	20.629.500,00						46 Persentase	20.629.500,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		8 %	13 %	20.629.500,00						17 %	20.629.500,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20.629.500,00					-		20.629.500,00	
		Tercapainya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						20.629.500,00					-		20.629.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.629.500,00						12 Dokumen	20.629.500,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						20.629.500,00							20.629.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.629.500,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	20.629.500,00	PUSKESMAS BARUHARJO
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan	-		-	30 %	17.045.000,00						-	17.045.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						17.045.000,00					-		17.045.000,00	
		-						17.045.000,00					-		17.045.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	17.045.000,00						-	17.045.000,00	
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						17.045.000,00							17.045.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	12 Dokumen	17.045.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	17.045.000,00	PUSKESMAS BARUHARJO
		PUSKESMAS KAMPAK						**3.687.873.600,00**							**3.639.531.100,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.687.873.600,00**							**3.639.531.100,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.687.873.600,00**							**3.639.531.100,00**	
45.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.900.000.000,00**							**2.900.000.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Kampak						***2.900.000.000,00***							***2.900.000.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.900.000.000,00						100 %	2.900.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.900.000.000,00					-		2.900.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						2.900.000.000,00					-		2.900.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.900.000.000,00						1 Unit Kerja	2.900.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.900.000.000,00							2.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.900.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Kampak || Desa Bendoagung || 1	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	2.900.000.000,00	PUSKESMAS KAMPAK
46.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**744.031.100,00**							**739.531.100,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Kampak						***719.656.100,00***							***715.156.100,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	90 Persentase		78 Persentase	80 Persentase	719.656.100,00						84 Persentase	715.156.100,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		60 %	70 %	719.656.100,00						80 %	715.156.100,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	71 %		42 %	51 %	719.656.100,00						57 %	715.156.100,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	71 %		42 %	42 %	719.656.100,00						42 %	715.156.100,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	719.656.100,00						100 %	715.156.100,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	95 %		77 %	80 %	719.656.100,00						85 %	715.156.100,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	719.656.100,00						100 %	715.156.100,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	95.4 %		92.6 %	94.5 %	719.656.100,00						94.6 %	715.156.100,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	719.656.100,00						11 %	715.156.100,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	719.656.100,00						100 %	715.156.100,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	719.656.100,00						100 %	715.156.100,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	719.656.100,00						100 %	715.156.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	719.656.100,00						100 %	715.156.100,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	719.656.100,00						100 %	715.156.100,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	719.656.100,00						100 %	715.156.100,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	719.656.100,00						100 %	715.156.100,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	719.656.100,00						100 %	715.156.100,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	719.656.100,00						100 %	715.156.100,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	719.656.100,00						100 %	715.156.100,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	719.656.100,00						100 %	715.156.100,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	719.656.100,00						100 %	715.156.100,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	719.656.100,00						0.67 %	715.156.100,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	5.44 %		5.48 %	5.47 %	719.656.100,00						5.46 %	715.156.100,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	92.2 %		92 %	92.1 %	719.656.100,00						92.15 %	715.156.100,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
		Terlaksananya Pelayanan Bayi Baru Lahir sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4986 Orang		4983 Orang	4984 Orang	10.950.000,00						4985 Orang	10.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00						12 Dokumen	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	312.597.000,00						12 Dokumen	312.597.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.150.000,00						12 Dokumen	6.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.250.000,00						12 Dokumen	14.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	276.357.000,00						16 Dokumen	276.357.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang		294 Orang	294 Orang	22.204.000,00						294 Orang	22.204.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 Orang		361 Orang	362 Orang	4.500.000,00						362 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang		80 Orang	80 Orang	5.400.000,00						80 Orang	5.400.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4986 Orang		4983 Orang	4984 Orang	10.950.000,00						4985 Orang	10.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00						12 Dokumen	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	312.597.000,00						12 Dokumen	312.597.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.150.000,00						12 Dokumen	6.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.250.000,00						12 Dokumen	14.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	276.357.000,00						16 Dokumen	276.357.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang		294 Orang	294 Orang	22.204.000,00						294 Orang	22.204.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 Orang		361 Orang	362 Orang	4.500.000,00						362 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang		80 Orang	80 Orang	5.400.000,00						80 Orang	5.400.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4986 Orang		4983 Orang	4984 Orang	10.950.000,00						4985 Orang	10.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00						12 Dokumen	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	312.597.000,00						12 Dokumen	312.597.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.150.000,00						12 Dokumen	6.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.250.000,00						12 Dokumen	14.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	276.357.000,00						16 Dokumen	276.357.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang		294 Orang	294 Orang	22.204.000,00						294 Orang	22.204.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 Orang		361 Orang	362 Orang	4.500.000,00						362 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang		80 Orang	80 Orang	5.400.000,00						80 Orang	5.400.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4986 Orang		4983 Orang	4984 Orang	10.950.000,00						4985 Orang	10.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00						12 Dokumen	14.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	312.597.000,00						12 Dokumen	312.597.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.150.000,00						12 Dokumen	6.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.250.000,00						12 Dokumen	14.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	276.357.000,00						16 Dokumen	276.357.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang		294 Orang	294 Orang	22.204.000,00						294 Orang	22.204.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 Orang		361 Orang	362 Orang	4.500.000,00						362 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang		80 Orang	80 Orang	5.400.000,00						80 Orang	5.400.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4986 Orang		4983 Orang	4984 Orang	10.950.000,00						4985 Orang	10.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00						12 Dokumen	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	312.597.000,00						12 Dokumen	312.597.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.150.000,00						12 Dokumen	6.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.250.000,00						12 Dokumen	14.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	276.357.000,00						16 Dokumen	276.357.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang		294 Orang	294 Orang	22.204.000,00						294 Orang	22.204.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 Orang		361 Orang	362 Orang	4.500.000,00						362 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang		80 Orang	80 Orang	5.400.000,00						80 Orang	5.400.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4986 Orang		4983 Orang	4984 Orang	10.950.000,00						4985 Orang	10.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00						12 Dokumen	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	312.597.000,00						12 Dokumen	312.597.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.150.000,00						12 Dokumen	6.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.250.000,00						12 Dokumen	14.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	276.357.000,00						16 Dokumen	276.357.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang		294 Orang	294 Orang	22.204.000,00						294 Orang	22.204.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 Orang		361 Orang	362 Orang	4.500.000,00						362 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang		80 Orang	80 Orang	5.400.000,00						80 Orang	5.400.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4986 Orang		4983 Orang	4984 Orang	10.950.000,00						4985 Orang	10.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00						12 Dokumen	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	312.597.000,00						12 Dokumen	312.597.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.150.000,00						12 Dokumen	6.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.250.000,00						12 Dokumen	14.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	276.357.000,00						16 Dokumen	276.357.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang		294 Orang	294 Orang	22.204.000,00						294 Orang	22.204.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 Orang		361 Orang	362 Orang	4.500.000,00						362 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang		80 Orang	80 Orang	5.400.000,00						80 Orang	5.400.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4986 Orang		4983 Orang	4984 Orang	10.950.000,00						4985 Orang	10.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00						12 Dokumen	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	312.597.000,00						12 Dokumen	312.597.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.150.000,00						12 Dokumen	6.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.250.000,00						12 Dokumen	14.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	276.357.000,00						16 Dokumen	276.357.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang		294 Orang	294 Orang	22.204.000,00						294 Orang	22.204.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 Orang		361 Orang	362 Orang	4.500.000,00						362 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang		80 Orang	80 Orang	5.400.000,00						80 Orang	5.400.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4986 Orang		4983 Orang	4984 Orang	10.950.000,00						4985 Orang	10.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00						12 Dokumen	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	312.597.000,00						12 Dokumen	312.597.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.150.000,00						12 Dokumen	6.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.250.000,00						12 Dokumen	14.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	276.357.000,00						16 Dokumen	276.357.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang		294 Orang	294 Orang	22.204.000,00						294 Orang	22.204.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 Orang		361 Orang	362 Orang	4.500.000,00						362 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang		80 Orang	80 Orang	5.400.000,00						80 Orang	5.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4986 Orang		4983 Orang	4984 Orang	10.950.000,00						4985 Orang	10.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00						12 Dokumen	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	312.597.000,00						12 Dokumen	312.597.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.150.000,00						12 Dokumen	6.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.250.000,00						12 Dokumen	14.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	276.357.000,00						16 Dokumen	276.357.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang		294 Orang	294 Orang	22.204.000,00						294 Orang	22.204.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 Orang		361 Orang	362 Orang	4.500.000,00						362 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang		80 Orang	80 Orang	5.400.000,00						80 Orang	5.400.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4986 Orang		4983 Orang	4984 Orang	10.950.000,00						4985 Orang	10.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00						12 Dokumen	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	312.597.000,00						12 Dokumen	312.597.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.150.000,00						12 Dokumen	6.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.250.000,00						12 Dokumen	14.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	276.357.000,00						16 Dokumen	276.357.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang		294 Orang	294 Orang	22.204.000,00						294 Orang	22.204.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 Orang		361 Orang	362 Orang	4.500.000,00						362 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang		80 Orang	80 Orang	5.400.000,00						80 Orang	5.400.000,00	
		Terlaksananya Warga Negara Usia 60 tahun ke atas mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4986 Orang		4983 Orang	4984 Orang	10.950.000,00						4985 Orang	10.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00						12 Dokumen	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	312.597.000,00						12 Dokumen	312.597.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.150.000,00						12 Dokumen	6.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.250.000,00						12 Dokumen	14.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	150.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	276.357.000,00						16 Dokumen	276.357.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang		294 Orang	294 Orang	22.204.000,00						294 Orang	22.204.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 Orang		361 Orang	362 Orang	4.500.000,00						362 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang		80 Orang	80 Orang	5.400.000,00						80 Orang	5.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						22.204.000,00							22.204.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	294 Orang		294 Orang	354 Orang	22.204.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Kampak || Desa Bendoagung || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		294 Orang	22.204.000,00	PUSKESMAS KAMPAK
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						10.950.000,00							10.950.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4986 Orang		4983 Orang	4644 Orang	10.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Kampak || Desa Bendoagung || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4985 Orang	10.950.000,00	PUSKESMAS KAMPAK
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						5.400.000,00							5.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	80 Orang		80 Orang	114 Orang	5.400.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Kampak || Desa Bendoagung || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		80 Orang	5.400.000,00	PUSKESMAS KAMPAK
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						4.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	362 Orang		361 Orang	320 Orang	4.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Kampak || Desa Bendoagung || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		362 Orang	0,00	PUSKESMAS KAMPAK
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						312.597.000,00							312.597.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	312.597.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Kampak || Desa Bendoagung || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	312.597.000,00	PUSKESMAS KAMPAK
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						6.150.000,00							6.150.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.150.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Kampak || Desa Bendoagung || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	6.150.000,00	PUSKESMAS KAMPAK
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						14.250.000,00							14.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Kampak || Desa Bendoagung || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	14.250.000,00	PUSKESMAS KAMPAK
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						276.357.000,00							276.357.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	276.357.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Kampak || Desa Bendoagung || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		16 Dokumen	276.357.000,00	PUSKESMAS KAMPAK
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						150.000,00							150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Kampak || Desa Bendoagung || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	150.000,00	PUSKESMAS KAMPAK
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						14.400.000,00							14.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.400.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Kampak || Desa Bendoagung || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	14.400.000,00	PUSKESMAS KAMPAK
		Terlaksananya Pelayanan Bayi Baru Lahir sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	28.323.100,00						-	28.323.100,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	28.323.100,00						-	28.323.100,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	28.323.100,00						-	28.323.100,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	28.323.100,00						-	28.323.100,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	28.323.100,00						-	28.323.100,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	28.323.100,00						-	28.323.100,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	28.323.100,00						-	28.323.100,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	28.323.100,00						-	28.323.100,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	28.323.100,00						-	28.323.100,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	28.323.100,00						-	28.323.100,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	28.323.100,00						-	28.323.100,00	
		Terlaksananya Warga Negara Usia 60 tahun ke atas mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar						744.031.100,00					-		739.531.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	24.375.000,00						-	24.375.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	28.323.100,00						-	28.323.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						28.323.100,00							28.323.100,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	4791 Orang	28.323.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Kampak || Desa Bendoagung || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		-	28.323.100,00	PUSKESMAS KAMPAK
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						24.375.000,00							24.375.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	24.375.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Kampak || Desa Bendoagung || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		-	24.375.000,00	PUSKESMAS KAMPAK
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						24.375.000,00							24.375.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	24.375.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Kampak || Desa Bendoagung || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	24.375.000,00	PUSKESMAS KAMPAK
47.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**43.842.500,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Kampak						***43.842.500,00***							***0,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	98 Persentase		90 Persentase	92 Persentase	43.842.500,00						94 Persentase	0,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		9 %	13 %	43.842.500,00						19 %	0,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						43.842.500,00					-		0,00	
		Tercapainya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						43.842.500,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	43.842.500,00						12 Dokumen	0,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						43.842.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	43.842.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Kampak || Desa Bendoagung || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	0,00	PUSKESMAS KAMPAK
		PUSKESMAS KARANGAN						**4.878.489.000,00**							**4.789.417.400,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.878.489.000,00**							**4.789.417.400,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.878.489.000,00**							**4.789.417.400,00**	
48.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.686.650.000,00**							**3.597.578.400,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Karangan						***3.686.650.000,00***							***3.597.578.400,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	3.686.650.000,00						100 %	3.597.578.400,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						3.686.650.000,00					-		3.597.578.400,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						3.686.650.000,00					-		3.597.578.400,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.686.650.000,00						1 Unit Kerja	3.597.578.400,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.686.650.000,00							3.597.578.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.686.650.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	3.597.578.400,00	PUSKESMAS KARANGAN
49.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1.117.649.000,00**							**1.117.649.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Karangan						***1.047.149.000,00***							***1.047.149.000,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	95 Persentase		86 Persentase	88 Persentase	1.047.149.000,00						90 Persentase	1.047.149.000,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		60 %	70 %	1.047.149.000,00						80 %	1.047.149.000,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	77 %		48 %	57 %	1.047.149.000,00						63 %	1.047.149.000,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	50 %		33 %	33 %	1.047.149.000,00						42 %	1.047.149.000,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	1.047.149.000,00						100 %	1.047.149.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	85 %		67 %	70 %	1.047.149.000,00						70 %	1.047.149.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	1.047.149.000,00						100 %	1.047.149.000,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	90.2 %		89.9 %	89.9 %	1.047.149.000,00						90.2 %	1.047.149.000,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	1.047.149.000,00						11 %	1.047.149.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	1.047.149.000,00						100 %	1.047.149.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	1.047.149.000,00						100 %	1.047.149.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	1.047.149.000,00						100 %	1.047.149.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.047.149.000,00						100 %	1.047.149.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.047.149.000,00						100 %	1.047.149.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	1.047.149.000,00						100 %	1.047.149.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.047.149.000,00						100 %	1.047.149.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.047.149.000,00						100 %	1.047.149.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.047.149.000,00						100 %	1.047.149.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.047.149.000,00						100 %	1.047.149.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.047.149.000,00						100 %	1.047.149.000,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.047.149.000,00						100 %	1.047.149.000,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	1.047.149.000,00						0.67 %	1.047.149.000,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	8.14 %		8.18 %	8.17 %	1.047.149.000,00						8.16 %	1.047.149.000,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	94.20 %		94.16 %	94.17 %	1.047.149.000,00						94.18 %	1.047.149.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5082 Orang		5080 Orang	5081 Orang	18.450.000,00						5081 Orang	18.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	21.900.000,00						36 Dokumen	21.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.760.000,00						12 Dokumen	442.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00						60 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	116 Dokumen		116 Dokumen	116 Dokumen	35.400.000,00						116 Dokumen	35.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	375.647.000,00						16 Dokumen	375.647.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	468 Orang		468 Orang	468 Orang	42.144.000,00						468 Orang	42.144.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	494 Orang		490 Orang	492 Orang	13.500.000,00						493 Orang	13.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang		94 Orang	95 Orang	13.500.000,00						95 Orang	13.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5082 Orang		5080 Orang	5081 Orang	18.450.000,00						5081 Orang	18.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	21.900.000,00						36 Dokumen	21.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.760.000,00						12 Dokumen	442.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00						60 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	116 Dokumen		116 Dokumen	116 Dokumen	35.400.000,00						116 Dokumen	35.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	375.647.000,00						16 Dokumen	375.647.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	468 Orang		468 Orang	468 Orang	42.144.000,00						468 Orang	42.144.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	494 Orang		490 Orang	492 Orang	13.500.000,00						493 Orang	13.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang		94 Orang	95 Orang	13.500.000,00						95 Orang	13.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5082 Orang		5080 Orang	5081 Orang	18.450.000,00						5081 Orang	18.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	21.900.000,00						36 Dokumen	21.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.760.000,00						12 Dokumen	442.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00						60 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	116 Dokumen		116 Dokumen	116 Dokumen	35.400.000,00						116 Dokumen	35.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	375.647.000,00						16 Dokumen	375.647.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	468 Orang		468 Orang	468 Orang	42.144.000,00						468 Orang	42.144.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	494 Orang		490 Orang	492 Orang	13.500.000,00						493 Orang	13.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang		94 Orang	95 Orang	13.500.000,00						95 Orang	13.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5082 Orang		5080 Orang	5081 Orang	18.450.000,00						5081 Orang	18.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	21.900.000,00						36 Dokumen	21.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.760.000,00						12 Dokumen	442.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00						60 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	116 Dokumen		116 Dokumen	116 Dokumen	35.400.000,00						116 Dokumen	35.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	375.647.000,00						16 Dokumen	375.647.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	468 Orang		468 Orang	468 Orang	42.144.000,00						468 Orang	42.144.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	494 Orang		490 Orang	492 Orang	13.500.000,00						493 Orang	13.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang		94 Orang	95 Orang	13.500.000,00						95 Orang	13.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5082 Orang		5080 Orang	5081 Orang	18.450.000,00						5081 Orang	18.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	21.900.000,00						36 Dokumen	21.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.760.000,00						12 Dokumen	442.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00						60 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	116 Dokumen		116 Dokumen	116 Dokumen	35.400.000,00						116 Dokumen	35.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	375.647.000,00						16 Dokumen	375.647.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	468 Orang		468 Orang	468 Orang	42.144.000,00						468 Orang	42.144.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	494 Orang		490 Orang	492 Orang	13.500.000,00						493 Orang	13.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang		94 Orang	95 Orang	13.500.000,00						95 Orang	13.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5082 Orang		5080 Orang	5081 Orang	18.450.000,00						5081 Orang	18.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	21.900.000,00						36 Dokumen	21.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.760.000,00						12 Dokumen	442.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00						60 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	116 Dokumen		116 Dokumen	116 Dokumen	35.400.000,00						116 Dokumen	35.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	375.647.000,00						16 Dokumen	375.647.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	468 Orang		468 Orang	468 Orang	42.144.000,00						468 Orang	42.144.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	494 Orang		490 Orang	492 Orang	13.500.000,00						493 Orang	13.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang		94 Orang	95 Orang	13.500.000,00						95 Orang	13.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5082 Orang		5080 Orang	5081 Orang	18.450.000,00						5081 Orang	18.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	21.900.000,00						36 Dokumen	21.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.760.000,00						12 Dokumen	442.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00						60 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	116 Dokumen		116 Dokumen	116 Dokumen	35.400.000,00						116 Dokumen	35.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	375.647.000,00						16 Dokumen	375.647.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	468 Orang		468 Orang	468 Orang	42.144.000,00						468 Orang	42.144.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	494 Orang		490 Orang	492 Orang	13.500.000,00						493 Orang	13.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang		94 Orang	95 Orang	13.500.000,00						95 Orang	13.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5082 Orang		5080 Orang	5081 Orang	18.450.000,00						5081 Orang	18.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	21.900.000,00						36 Dokumen	21.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.760.000,00						12 Dokumen	442.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00						60 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	116 Dokumen		116 Dokumen	116 Dokumen	35.400.000,00						116 Dokumen	35.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	375.647.000,00						16 Dokumen	375.647.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	468 Orang		468 Orang	468 Orang	42.144.000,00						468 Orang	42.144.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	494 Orang		490 Orang	492 Orang	13.500.000,00						493 Orang	13.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang		94 Orang	95 Orang	13.500.000,00						95 Orang	13.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5082 Orang		5080 Orang	5081 Orang	18.450.000,00						5081 Orang	18.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	21.900.000,00						36 Dokumen	21.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.760.000,00						12 Dokumen	442.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00						60 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	116 Dokumen		116 Dokumen	116 Dokumen	35.400.000,00						116 Dokumen	35.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	375.647.000,00						16 Dokumen	375.647.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	468 Orang		468 Orang	468 Orang	42.144.000,00						468 Orang	42.144.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	494 Orang		490 Orang	492 Orang	13.500.000,00						493 Orang	13.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang		94 Orang	95 Orang	13.500.000,00						95 Orang	13.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5082 Orang		5080 Orang	5081 Orang	18.450.000,00						5081 Orang	18.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	21.900.000,00						36 Dokumen	21.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.760.000,00						12 Dokumen	442.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00						60 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	116 Dokumen		116 Dokumen	116 Dokumen	35.400.000,00						116 Dokumen	35.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	375.647.000,00						16 Dokumen	375.647.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	468 Orang		468 Orang	468 Orang	42.144.000,00						468 Orang	42.144.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	494 Orang		490 Orang	492 Orang	13.500.000,00						493 Orang	13.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang		94 Orang	95 Orang	13.500.000,00						95 Orang	13.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5082 Orang		5080 Orang	5081 Orang	18.450.000,00						5081 Orang	18.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	21.900.000,00						36 Dokumen	21.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.760.000,00						12 Dokumen	442.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00						60 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	116 Dokumen		116 Dokumen	116 Dokumen	35.400.000,00						116 Dokumen	35.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	375.647.000,00						16 Dokumen	375.647.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	468 Orang		468 Orang	468 Orang	42.144.000,00						468 Orang	42.144.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	494 Orang		490 Orang	492 Orang	13.500.000,00						493 Orang	13.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang		94 Orang	95 Orang	13.500.000,00						95 Orang	13.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5082 Orang		5080 Orang	5081 Orang	18.450.000,00						5081 Orang	18.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	21.900.000,00						36 Dokumen	21.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.760.000,00						12 Dokumen	442.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00						60 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	116 Dokumen		116 Dokumen	116 Dokumen	35.400.000,00						116 Dokumen	35.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	375.647.000,00						16 Dokumen	375.647.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	468 Orang		468 Orang	468 Orang	42.144.000,00						468 Orang	42.144.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	494 Orang		490 Orang	492 Orang	13.500.000,00						493 Orang	13.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang		94 Orang	95 Orang	13.500.000,00						95 Orang	13.500.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						42.144.000,00							42.144.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	468 Orang		468 Orang	453 Orang	42.144.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		468 Orang	42.144.000,00	PUSKESMAS KARANGAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						18.450.000,00							18.450.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5082 Orang		5080 Orang	4848 Orang	18.450.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		5081 Orang	18.450.000,00	PUSKESMAS KARANGAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						13.500.000,00							13.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	96 Orang		94 Orang	97 Orang	13.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		95 Orang	13.500.000,00	PUSKESMAS KARANGAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						13.500.000,00							13.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	494 Orang		490 Orang	423 Orang	13.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		493 Orang	13.500.000,00	PUSKESMAS KARANGAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						442.760.000,00							442.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.760.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	442.760.000,00	PUSKESMAS KARANGAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						7.500.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	60 Dokumen		60 Dokumen	60 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		60 Dokumen	7.500.000,00	PUSKESMAS KARANGAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						35.400.000,00							35.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	116 Dokumen		116 Dokumen	116 Dokumen	35.400.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		116 Dokumen	35.400.000,00	PUSKESMAS KARANGAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						375.647.000,00							375.647.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	375.647.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		16 Dokumen	375.647.000,00	PUSKESMAS KARANGAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						600.000,00							600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	600.000,00	PUSKESMAS KARANGAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						21.900.000,00							21.900.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	21.900.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		36 Dokumen	21.900.000,00	PUSKESMAS KARANGAN
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	32.248.000,00						-	32.248.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	32.248.000,00						-	32.248.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	32.248.000,00						-	32.248.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	32.248.000,00						-	32.248.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	32.248.000,00						-	32.248.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	32.248.000,00						-	32.248.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	32.248.000,00						-	32.248.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	32.248.000,00						-	32.248.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	32.248.000,00						-	32.248.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	32.248.000,00						-	32.248.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	32.248.000,00						-	32.248.000,00	
		Tercapainya pelayanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						1.117.649.000,00					-		1.117.649.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	57.000.000,00						-	57.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	32.248.000,00						-	32.248.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						32.248.000,00							32.248.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	97 Orang	32.248.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	32.248.000,00	PUSKESMAS KARANGAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						57.000.000,00							57.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	144 Laporan	57.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	57.000.000,00	PUSKESMAS KARANGAN
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						57.000.000,00							57.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	144 Laporan	57.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	57.000.000,00	PUSKESMAS KARANGAN
50.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**74.190.000,00**							**74.190.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Karangan						***74.190.000,00***							***74.190.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	62 Persentase		54 Persentase	56 Persentase	74.190.000,00						58 Persentase	74.190.000,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		14 %	17 %	74.190.000,00						23 %	74.190.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						74.190.000,00					-		74.190.000,00	
		Tercapainya Pelayanan Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						74.190.000,00					-		74.190.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	74.190.000,00						16 Dokumen	74.190.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						74.190.000,00							74.190.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	74.190.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		16 Dokumen	74.190.000,00	PUSKESMAS KARANGAN
		PUSKESMAS MUNJUNGAN						**5.525.773.000,00**							**5.525.773.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.525.773.000,00**							**5.525.773.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**5.525.773.000,00**							**5.525.773.000,00**	
51.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.709.997.000,00**							**4.709.997.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Munjungan						***4.709.997.000,00***							***4.709.997.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	4.709.997.000,00						100 %	4.709.997.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						4.709.997.000,00					-		4.709.997.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						4.709.997.000,00					-		4.709.997.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja		100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	4.709.997.000,00						100 Unit Kerja	4.709.997.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						4.709.997.000,00							4.709.997.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja		100 Unit Kerja	1 Unit Kerja	4.709.997.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		100 Unit Kerja	4.709.997.000,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN
52.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**769.021.250,00**							**769.021.250,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Munjungan						***752.521.250,00***							***752.521.250,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	88 Persentase		75 Persentase	78 Persentase	752.521.250,00						80 Persentase	752.521.250,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		50 %	70 %	752.521.250,00						80 %	752.521.250,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	60 %		31 %	40 %	752.521.250,00						46 %	752.521.250,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	45 %		36 %	36 %	752.521.250,00						36 %	752.521.250,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	752.521.250,00						100 %	752.521.250,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	80 %		60.5 %	65 %	752.521.250,00						70 %	752.521.250,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	752.521.250,00						100 %	752.521.250,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	92.3 %		91.3 %	91.3 %	752.521.250,00						92.3 %	752.521.250,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	752.521.250,00						11 %	752.521.250,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	752.521.250,00						100 %	752.521.250,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	752.521.250,00						100 %	752.521.250,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	752.521.250,00						100 %	752.521.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	752.521.250,00						100 %	752.521.250,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	752.521.250,00						100 %	752.521.250,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	752.521.250,00						100 %	752.521.250,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	752.521.250,00						100 %	752.521.250,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	752.521.250,00						100 %	752.521.250,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	752.521.250,00						100 %	752.521.250,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	752.521.250,00						100 %	752.521.250,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	752.521.250,00						100 %	752.521.250,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	752.521.250,00						100 %	752.521.250,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	752.521.250,00						0.67 %	752.521.250,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	9.64 %		9.68 %	9.67 %	752.521.250,00						9.66 %	752.521.250,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90.4 %		90 %	90.1 %	752.521.250,00						90.2 %	752.521.250,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4644 Orang		4640 Orang	4641 Orang	16.500.000,00						4641 Orang	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.500.000,00						12 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	377.487.500,00						12 Dokumen	377.487.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.950.000,00						12 Dokumen	4.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.450.000,00						12 Dokumen	12.450.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	152.400,00						12 Dokumen	152.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	229.237.000,00						12 Dokumen	229.237.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang		434 Orang	434 Orang	31.152.000,00						434 Orang	31.152.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang		475 Orang	475 Orang	9.662.750,00						480 Orang	9.662.750,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	9.450.000,00						100 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4644 Orang		4640 Orang	4641 Orang	16.500.000,00						4641 Orang	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.500.000,00						12 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	377.487.500,00						12 Dokumen	377.487.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.950.000,00						12 Dokumen	4.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.450.000,00						12 Dokumen	12.450.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	152.400,00						12 Dokumen	152.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	229.237.000,00						12 Dokumen	229.237.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang		434 Orang	434 Orang	31.152.000,00						434 Orang	31.152.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang		475 Orang	475 Orang	9.662.750,00						480 Orang	9.662.750,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	9.450.000,00						100 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4644 Orang		4640 Orang	4641 Orang	16.500.000,00						4641 Orang	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.500.000,00						12 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	377.487.500,00						12 Dokumen	377.487.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.950.000,00						12 Dokumen	4.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.450.000,00						12 Dokumen	12.450.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	152.400,00						12 Dokumen	152.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	229.237.000,00						12 Dokumen	229.237.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang		434 Orang	434 Orang	31.152.000,00						434 Orang	31.152.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang		475 Orang	475 Orang	9.662.750,00						480 Orang	9.662.750,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	9.450.000,00						100 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4644 Orang		4640 Orang	4641 Orang	16.500.000,00						4641 Orang	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.500.000,00						12 Dokumen	16.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	377.487.500,00						12 Dokumen	377.487.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.950.000,00						12 Dokumen	4.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.450.000,00						12 Dokumen	12.450.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	152.400,00						12 Dokumen	152.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	229.237.000,00						12 Dokumen	229.237.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang		434 Orang	434 Orang	31.152.000,00						434 Orang	31.152.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang		475 Orang	475 Orang	9.662.750,00						480 Orang	9.662.750,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	9.450.000,00						100 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4644 Orang		4640 Orang	4641 Orang	16.500.000,00						4641 Orang	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.500.000,00						12 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	377.487.500,00						12 Dokumen	377.487.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.950.000,00						12 Dokumen	4.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.450.000,00						12 Dokumen	12.450.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	152.400,00						12 Dokumen	152.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	229.237.000,00						12 Dokumen	229.237.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang		434 Orang	434 Orang	31.152.000,00						434 Orang	31.152.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang		475 Orang	475 Orang	9.662.750,00						480 Orang	9.662.750,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	9.450.000,00						100 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4644 Orang		4640 Orang	4641 Orang	16.500.000,00						4641 Orang	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.500.000,00						12 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	377.487.500,00						12 Dokumen	377.487.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.950.000,00						12 Dokumen	4.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.450.000,00						12 Dokumen	12.450.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	152.400,00						12 Dokumen	152.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	229.237.000,00						12 Dokumen	229.237.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang		434 Orang	434 Orang	31.152.000,00						434 Orang	31.152.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang		475 Orang	475 Orang	9.662.750,00						480 Orang	9.662.750,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	9.450.000,00						100 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4644 Orang		4640 Orang	4641 Orang	16.500.000,00						4641 Orang	16.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.500.000,00						12 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	377.487.500,00						12 Dokumen	377.487.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.950.000,00						12 Dokumen	4.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.450.000,00						12 Dokumen	12.450.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	152.400,00						12 Dokumen	152.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	229.237.000,00						12 Dokumen	229.237.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang		434 Orang	434 Orang	31.152.000,00						434 Orang	31.152.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang		475 Orang	475 Orang	9.662.750,00						480 Orang	9.662.750,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	9.450.000,00						100 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4644 Orang		4640 Orang	4641 Orang	16.500.000,00						4641 Orang	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.500.000,00						12 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	377.487.500,00						12 Dokumen	377.487.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.950.000,00						12 Dokumen	4.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.450.000,00						12 Dokumen	12.450.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	152.400,00						12 Dokumen	152.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	229.237.000,00						12 Dokumen	229.237.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang		434 Orang	434 Orang	31.152.000,00						434 Orang	31.152.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang		475 Orang	475 Orang	9.662.750,00						480 Orang	9.662.750,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	9.450.000,00						100 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4644 Orang		4640 Orang	4641 Orang	16.500.000,00						4641 Orang	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.500.000,00						12 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	377.487.500,00						12 Dokumen	377.487.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.950.000,00						12 Dokumen	4.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.450.000,00						12 Dokumen	12.450.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	152.400,00						12 Dokumen	152.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	229.237.000,00						12 Dokumen	229.237.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang		434 Orang	434 Orang	31.152.000,00						434 Orang	31.152.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang		475 Orang	475 Orang	9.662.750,00						480 Orang	9.662.750,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	9.450.000,00						100 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4644 Orang		4640 Orang	4641 Orang	16.500.000,00						4641 Orang	16.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.500.000,00						12 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	377.487.500,00						12 Dokumen	377.487.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.950.000,00						12 Dokumen	4.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.450.000,00						12 Dokumen	12.450.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	152.400,00						12 Dokumen	152.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	229.237.000,00						12 Dokumen	229.237.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang		434 Orang	434 Orang	31.152.000,00						434 Orang	31.152.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang		475 Orang	475 Orang	9.662.750,00						480 Orang	9.662.750,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	9.450.000,00						100 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4644 Orang		4640 Orang	4641 Orang	16.500.000,00						4641 Orang	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.500.000,00						12 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	377.487.500,00						12 Dokumen	377.487.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.950.000,00						12 Dokumen	4.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.450.000,00						12 Dokumen	12.450.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	152.400,00						12 Dokumen	152.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	229.237.000,00						12 Dokumen	229.237.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang		434 Orang	434 Orang	31.152.000,00						434 Orang	31.152.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang		475 Orang	475 Orang	9.662.750,00						480 Orang	9.662.750,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	9.450.000,00						100 Orang	9.450.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4644 Orang		4640 Orang	4641 Orang	16.500.000,00						4641 Orang	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.500.000,00						12 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	377.487.500,00						12 Dokumen	377.487.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.950.000,00						12 Dokumen	4.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.450.000,00						12 Dokumen	12.450.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	152.400,00						12 Dokumen	152.400,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	229.237.000,00						12 Dokumen	229.237.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang		434 Orang	434 Orang	31.152.000,00						434 Orang	31.152.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang		475 Orang	475 Orang	9.662.750,00						480 Orang	9.662.750,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	9.450.000,00						100 Orang	9.450.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						31.152.000,00							31.152.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	434 Orang		434 Orang	483 Orang	31.152.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		434 Orang	31.152.000,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						16.500.000,00							16.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4644 Orang		4640 Orang	6014 Orang	16.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4641 Orang	16.500.000,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.450.000,00							9.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100 Orang		100 Orang	100 Orang	9.450.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		100 Orang	9.450.000,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						9.662.750,00							9.662.750,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	482 Orang		475 Orang	382 Orang	9.662.750,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		480 Orang	9.662.750,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						377.487.500,00							377.487.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	377.487.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	377.487.500,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						4.950.000,00							4.950.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	4.950.000,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						12.450.000,00							12.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.450.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	12.450.000,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						229.237.000,00							229.237.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	229.237.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	229.237.000,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						152.400,00							152.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	152.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	152.400,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						16.500.000,00							16.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	16.500.000,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.600.000,00						-	42.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	3.879.600,00						-	3.879.600,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.600.000,00						-	42.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	3.879.600,00						-	3.879.600,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.600.000,00						-	42.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	3.879.600,00						-	3.879.600,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.600.000,00						-	42.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	3.879.600,00						-	3.879.600,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.600.000,00						-	42.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	3.879.600,00						-	3.879.600,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.600.000,00						-	42.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	3.879.600,00						-	3.879.600,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.600.000,00						-	42.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	3.879.600,00						-	3.879.600,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.600.000,00						-	42.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	3.879.600,00						-	3.879.600,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.600.000,00						-	42.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	3.879.600,00						-	3.879.600,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.600.000,00						-	42.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	3.879.600,00						-	3.879.600,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.600.000,00						-	42.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	3.879.600,00						-	3.879.600,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						769.021.250,00					-		769.021.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	42.600.000,00						-	42.600.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	3.879.600,00						-	3.879.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						3.879.600,00							3.879.600,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	100 Orang	3.879.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		-	3.879.600,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		-	15.000.000,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						42.600.000,00							42.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	42.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	42.600.000,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN
53.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**46.754.750,00**							**46.754.750,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Munjungan						***46.754.750,00***							***46.754.750,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	96 Persentase		88 Persentase	90 Persentase	46.754.750,00						92 Persentase	46.754.750,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		8 %	12 %	46.754.750,00						19 %	46.754.750,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						46.754.750,00					-		46.754.750,00	
		Tercapainya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						46.754.750,00					-		46.754.750,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	46.754.750,00						12 Dokumen	46.754.750,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						46.754.750,00							46.754.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	46.754.750,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	46.754.750,00	PUSKESMAS MUNJUNGAN
		PUSKESMAS PANGGUL						**4.169.763.800,00**							**4.169.763.800,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.169.763.800,00**							**4.169.763.800,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**4.169.763.800,00**							**4.169.763.800,00**	
54.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.010.000.000,00**							**3.010.000.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Panggul						***3.010.000.000,00***							***3.010.000.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	3.010.000.000,00						100 %	3.010.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						3.010.000.000,00					-		3.010.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						3.010.000.000,00					-		3.010.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja		100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	3.010.000.000,00						100 Unit Kerja	3.010.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						3.010.000.000,00							3.010.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja		100 Unit Kerja	1 Unit Kerja	3.010.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		100 Unit Kerja	3.010.000.000,00	PUSKESMAS PANGGUL
55.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**1.114.614.300,00**							**1.114.614.300,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Panggul						***1.114.614.300,00***							***1.114.614.300,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	84 Persentase		80 Persentase	81 Persentase	1.114.614.300,00						82 Persentase	1.114.614.300,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		60 %	70 %	1.114.614.300,00						80 %	1.114.614.300,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	61 %		32 %	41 %	1.114.614.300,00						47 %	1.114.614.300,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	60 %		40 %	40 %	1.114.614.300,00						50 %	1.114.614.300,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	1.114.614.300,00						100 %	1.114.614.300,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	80 %		63 %	65 %	1.114.614.300,00						70 %	1.114.614.300,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	1.114.614.300,00						100 %	1.114.614.300,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	92.2 %		88.8 %	89.7 %	1.114.614.300,00						90.4 %	1.114.614.300,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	1.114.614.300,00						11 %	1.114.614.300,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	1.114.614.300,00						100 %	1.114.614.300,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	1.114.614.300,00						100 %	1.114.614.300,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	1.114.614.300,00						100 %	1.114.614.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.114.614.300,00						100 %	1.114.614.300,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.114.614.300,00						100 %	1.114.614.300,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	1.114.614.300,00						100 %	1.114.614.300,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.114.614.300,00						100 %	1.114.614.300,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.114.614.300,00						100 %	1.114.614.300,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.114.614.300,00						100 %	1.114.614.300,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.114.614.300,00						100 %	1.114.614.300,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.114.614.300,00						100 %	1.114.614.300,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.114.614.300,00						100 %	1.114.614.300,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	1.114.614.300,00						0.67 %	1.114.614.300,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	3.04 %		3.08 %	3.07 %	1.114.614.300,00						3.06 %	1.114.614.300,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 %		89.76 %	89.77 %	1.114.614.300,00						89.78 %	1.114.614.300,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
		Tercapainya Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6120 Orang		6119 Orang	6120 Orang	14.400.000,00						6120 Orang	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.965.500,00						12 Dokumen	16.965.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	541.351.800,00						12 Dokumen	541.351.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00						12 Dokumen	7.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	371.677.000,00						16 Dokumen	371.677.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		378 Orang	378 Orang	31.720.000,00						378 Orang	31.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	443 Orang		443 Orang	443 Orang	11.250.000,00						443 Orang	11.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	86 Orang		81 Orang	83 Orang	9.000.000,00						85 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6120 Orang		6119 Orang	6120 Orang	14.400.000,00						6120 Orang	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.965.500,00						12 Dokumen	16.965.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	541.351.800,00						12 Dokumen	541.351.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00						12 Dokumen	7.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	371.677.000,00						16 Dokumen	371.677.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		378 Orang	378 Orang	31.720.000,00						378 Orang	31.720.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	443 Orang		443 Orang	443 Orang	11.250.000,00						443 Orang	11.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	86 Orang		81 Orang	83 Orang	9.000.000,00						85 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6120 Orang		6119 Orang	6120 Orang	14.400.000,00						6120 Orang	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.965.500,00						12 Dokumen	16.965.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	541.351.800,00						12 Dokumen	541.351.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00						12 Dokumen	7.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	371.677.000,00						16 Dokumen	371.677.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		378 Orang	378 Orang	31.720.000,00						378 Orang	31.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	443 Orang		443 Orang	443 Orang	11.250.000,00						443 Orang	11.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	86 Orang		81 Orang	83 Orang	9.000.000,00						85 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6120 Orang		6119 Orang	6120 Orang	14.400.000,00						6120 Orang	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.965.500,00						12 Dokumen	16.965.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	541.351.800,00						12 Dokumen	541.351.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00						12 Dokumen	7.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	371.677.000,00						16 Dokumen	371.677.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		378 Orang	378 Orang	31.720.000,00						378 Orang	31.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	443 Orang		443 Orang	443 Orang	11.250.000,00						443 Orang	11.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	86 Orang		81 Orang	83 Orang	9.000.000,00						85 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6120 Orang		6119 Orang	6120 Orang	14.400.000,00						6120 Orang	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.965.500,00						12 Dokumen	16.965.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	541.351.800,00						12 Dokumen	541.351.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00						12 Dokumen	7.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	371.677.000,00						16 Dokumen	371.677.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		378 Orang	378 Orang	31.720.000,00						378 Orang	31.720.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	443 Orang		443 Orang	443 Orang	11.250.000,00						443 Orang	11.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	86 Orang		81 Orang	83 Orang	9.000.000,00						85 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6120 Orang		6119 Orang	6120 Orang	14.400.000,00						6120 Orang	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.965.500,00						12 Dokumen	16.965.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	541.351.800,00						12 Dokumen	541.351.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00						12 Dokumen	7.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	371.677.000,00						16 Dokumen	371.677.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		378 Orang	378 Orang	31.720.000,00						378 Orang	31.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	443 Orang		443 Orang	443 Orang	11.250.000,00						443 Orang	11.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	86 Orang		81 Orang	83 Orang	9.000.000,00						85 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6120 Orang		6119 Orang	6120 Orang	14.400.000,00						6120 Orang	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.965.500,00						12 Dokumen	16.965.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	541.351.800,00						12 Dokumen	541.351.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00						12 Dokumen	7.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	371.677.000,00						16 Dokumen	371.677.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		378 Orang	378 Orang	31.720.000,00						378 Orang	31.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	443 Orang		443 Orang	443 Orang	11.250.000,00						443 Orang	11.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	86 Orang		81 Orang	83 Orang	9.000.000,00						85 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6120 Orang		6119 Orang	6120 Orang	14.400.000,00						6120 Orang	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.965.500,00						12 Dokumen	16.965.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	541.351.800,00						12 Dokumen	541.351.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00						12 Dokumen	7.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	371.677.000,00						16 Dokumen	371.677.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		378 Orang	378 Orang	31.720.000,00						378 Orang	31.720.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	443 Orang		443 Orang	443 Orang	11.250.000,00						443 Orang	11.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	86 Orang		81 Orang	83 Orang	9.000.000,00						85 Orang	9.000.000,00	
		TercapainyaPelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6120 Orang		6119 Orang	6120 Orang	14.400.000,00						6120 Orang	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.965.500,00						12 Dokumen	16.965.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	541.351.800,00						12 Dokumen	541.351.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00						12 Dokumen	7.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	371.677.000,00						16 Dokumen	371.677.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		378 Orang	378 Orang	31.720.000,00						378 Orang	31.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	443 Orang		443 Orang	443 Orang	11.250.000,00						443 Orang	11.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	86 Orang		81 Orang	83 Orang	9.000.000,00						85 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6120 Orang		6119 Orang	6120 Orang	14.400.000,00						6120 Orang	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.965.500,00						12 Dokumen	16.965.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	541.351.800,00						12 Dokumen	541.351.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00						12 Dokumen	7.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	371.677.000,00						16 Dokumen	371.677.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		378 Orang	378 Orang	31.720.000,00						378 Orang	31.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	443 Orang		443 Orang	443 Orang	11.250.000,00						443 Orang	11.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	86 Orang		81 Orang	83 Orang	9.000.000,00						85 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6120 Orang		6119 Orang	6120 Orang	14.400.000,00						6120 Orang	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.965.500,00						12 Dokumen	16.965.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	541.351.800,00						12 Dokumen	541.351.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00						12 Dokumen	7.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	371.677.000,00						16 Dokumen	371.677.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		378 Orang	378 Orang	31.720.000,00						378 Orang	31.720.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	443 Orang		443 Orang	443 Orang	11.250.000,00						443 Orang	11.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	86 Orang		81 Orang	83 Orang	9.000.000,00						85 Orang	9.000.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6120 Orang		6119 Orang	6120 Orang	14.400.000,00						6120 Orang	14.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.965.500,00						12 Dokumen	16.965.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	541.351.800,00						12 Dokumen	541.351.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00						12 Dokumen	7.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00						12 Dokumen	600.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	371.677.000,00						16 Dokumen	371.677.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		378 Orang	378 Orang	31.720.000,00						378 Orang	31.720.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	443 Orang		443 Orang	443 Orang	11.250.000,00						443 Orang	11.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	86 Orang		81 Orang	83 Orang	9.000.000,00						85 Orang	9.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						31.720.000,00							31.720.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		378 Orang	445 Orang	31.720.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Nglebeng || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		378 Orang	31.720.000,00	PUSKESMAS PANGGUL
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						14.400.000,00							14.400.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6120 Orang		6119 Orang	5981 Orang	14.400.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Nglebeng || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		6120 Orang	14.400.000,00	PUSKESMAS PANGGUL
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.000.000,00							9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	86 Orang		81 Orang	110 Orang	9.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Nglebeng || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		85 Orang	9.000.000,00	PUSKESMAS PANGGUL
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						11.250.000,00							11.250.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	443 Orang		443 Orang	356 Orang	11.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Panggul || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		443 Orang	11.250.000,00	PUSKESMAS PANGGUL
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						541.351.800,00							541.351.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	541.351.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Nglebeng || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	541.351.800,00	PUSKESMAS PANGGUL
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						7.200.000,00							7.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Nglebeng || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	7.200.000,00	PUSKESMAS PANGGUL
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Nglebeng || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	15.000.000,00	PUSKESMAS PANGGUL
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						371.677.000,00							371.677.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	12 Dokumen	371.677.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Nglebeng || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		16 Dokumen	371.677.000,00	PUSKESMAS PANGGUL
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						600.000,00							600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Nglebeng || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	600.000,00	PUSKESMAS PANGGUL
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						16.965.500,00							16.965.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	16.965.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Nglebeng || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	16.965.500,00	PUSKESMAS PANGGUL
		Tercapainya Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	28.050.000,00						-	28.050.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	43.800.000,00						-	43.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	23.600.000,00						-	23.600.000,00	
		Tercapainya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	28.050.000,00						-	28.050.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	43.800.000,00						-	43.800.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	23.600.000,00						-	23.600.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	28.050.000,00						-	28.050.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	43.800.000,00						-	43.800.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	23.600.000,00						-	23.600.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	28.050.000,00						-	28.050.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	43.800.000,00						-	43.800.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	23.600.000,00						-	23.600.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	28.050.000,00						-	28.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	43.800.000,00						-	43.800.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	23.600.000,00						-	23.600.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	28.050.000,00						-	28.050.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	43.800.000,00						-	43.800.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	23.600.000,00						-	23.600.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	28.050.000,00						-	28.050.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	43.800.000,00						-	43.800.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	23.600.000,00						-	23.600.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	28.050.000,00						-	28.050.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	43.800.000,00						-	43.800.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	23.600.000,00						-	23.600.000,00	
		TercapainyaPelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	28.050.000,00						-	28.050.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	43.800.000,00						-	43.800.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	23.600.000,00						-	23.600.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	28.050.000,00						-	28.050.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	43.800.000,00						-	43.800.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	23.600.000,00						-	23.600.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	28.050.000,00						-	28.050.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	43.800.000,00						-	43.800.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	23.600.000,00						-	23.600.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						1.114.614.300,00					-		1.114.614.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	28.050.000,00						-	28.050.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	43.800.000,00						-	43.800.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	23.600.000,00						-	23.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						23.600.000,00							23.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	9730 Orang	23.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Nglebeng || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		-	23.600.000,00	PUSKESMAS PANGGUL
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						28.050.000,00							28.050.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	28.050.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Nglebeng || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		-	28.050.000,00	PUSKESMAS PANGGUL
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						43.800.000,00							43.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	43.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Nglebeng || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	43.800.000,00	PUSKESMAS PANGGUL
56.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**45.149.500,00**							**45.149.500,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Panggul						***45.149.500,00***							***45.149.500,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	84 Persentase		76 Persentase	78 Persentase	45.149.500,00						80 Persentase	45.149.500,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		9 %	16 %	45.149.500,00						19 %	45.149.500,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						45.149.500,00					-		45.149.500,00	
		Tercapainya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						45.149.500,00					-		45.149.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.149.500,00						12 Dokumen	45.149.500,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						45.149.500,00							45.149.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.149.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Nglebeng || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	45.149.500,00	PUSKESMAS PANGGUL
		PUSKESMAS BODAG						**3.398.796.000,00**							**3.185.680.682,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.398.796.000,00**							**3.185.680.682,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.398.796.000,00**							**3.185.680.682,00**	
57.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.629.300.000,00**							**2.629.300.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Bodag						***2.629.300.000,00***							***2.629.300.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.629.300.000,00						100 %	2.629.300.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.629.300.000,00					-		2.629.300.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						2.629.300.000,00					-		2.629.300.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja		100 Unit Kerja	100 Unit Kerja	2.629.300.000,00						100 Unit Kerja	2.629.300.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.629.300.000,00							2.629.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja		100 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.629.300.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Bodag || 1	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		100 Unit Kerja	2.629.300.000,00	PUSKESMAS BODAG
58.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**746.912.000,00**							**548.764.682,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Bodag						***746.912.000,00***							***548.764.682,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	90 Persentase		80 Persentase	83 Persentase	746.912.000,00						85 Persentase	548.764.682,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		60 %	70 %	746.912.000,00						80 %	548.764.682,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	72 %		43 %	52 %	746.912.000,00						58 %	548.764.682,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	57 %		42 %	42 %	746.912.000,00						57 %	548.764.682,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	746.912.000,00						100 %	548.764.682,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	85 %		65 %	70 %	746.912.000,00						75 %	548.764.682,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	746.912.000,00						100 %	548.764.682,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	91.1 %		89.9 %	90.1 %	746.912.000,00						91.1 %	548.764.682,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	746.912.000,00						11 %	548.764.682,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	746.912.000,00						100 %	548.764.682,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	746.912.000,00						100 %	548.764.682,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		100 %	100 %	746.912.000,00						100 %	548.764.682,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	746.912.000,00						100 %	548.764.682,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	746.912.000,00						100 %	548.764.682,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	746.912.000,00						100 %	548.764.682,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	746.912.000,00						100 %	548.764.682,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	746.912.000,00						100 %	548.764.682,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	746.912.000,00						100 %	548.764.682,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	746.912.000,00						100 %	548.764.682,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	746.912.000,00						100 %	548.764.682,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	746.912.000,00						100 %	548.764.682,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	746.912.000,00						0.67 %	548.764.682,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	30.00 %		32.00 %	31.50 %	746.912.000,00						31.00 %	548.764.682,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	88.97 %		88.93 %	88.94 %	746.912.000,00						88.95 %	548.764.682,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4259 Orang		4258 Orang	4259 Orang	11.700.000,00						4259 Orang	19.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.700.000,00						12 Dokumen	7.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	309.756.800,00						12 Dokumen	160.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.850.000,00						12 Dokumen	20.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00						12 Dokumen	4.575.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	607.200,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	292.490.000,00						1 Dokumen	143.357.328,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang		279 Orang	279 Orang	22.204.000,00						279 Orang	34.452.354,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang		50 Orang	50 Orang	15.075.000,00						51 Orang	15.300.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4259 Orang		4258 Orang	4259 Orang	11.700.000,00						4259 Orang	19.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.700.000,00						12 Dokumen	7.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	309.756.800,00						12 Dokumen	160.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.850.000,00						12 Dokumen	20.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00						12 Dokumen	4.575.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	607.200,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	292.490.000,00						1 Dokumen	143.357.328,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang		279 Orang	279 Orang	22.204.000,00						279 Orang	34.452.354,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang		50 Orang	50 Orang	15.075.000,00						51 Orang	15.300.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4259 Orang		4258 Orang	4259 Orang	11.700.000,00						4259 Orang	19.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.700.000,00						12 Dokumen	7.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	309.756.800,00						12 Dokumen	160.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.850.000,00						12 Dokumen	20.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00						12 Dokumen	4.575.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	607.200,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	292.490.000,00						1 Dokumen	143.357.328,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang		279 Orang	279 Orang	22.204.000,00						279 Orang	34.452.354,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang		50 Orang	50 Orang	15.075.000,00						51 Orang	15.300.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4259 Orang		4258 Orang	4259 Orang	11.700.000,00						4259 Orang	19.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.700.000,00						12 Dokumen	7.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	309.756.800,00						12 Dokumen	160.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.850.000,00						12 Dokumen	20.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00						12 Dokumen	4.575.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	607.200,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	292.490.000,00						1 Dokumen	143.357.328,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang		279 Orang	279 Orang	22.204.000,00						279 Orang	34.452.354,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang		50 Orang	50 Orang	15.075.000,00						51 Orang	15.300.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4259 Orang		4258 Orang	4259 Orang	11.700.000,00						4259 Orang	19.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.700.000,00						12 Dokumen	7.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	309.756.800,00						12 Dokumen	160.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.850.000,00						12 Dokumen	20.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00						12 Dokumen	4.575.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	607.200,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	292.490.000,00						1 Dokumen	143.357.328,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang		279 Orang	279 Orang	22.204.000,00						279 Orang	34.452.354,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang		50 Orang	50 Orang	15.075.000,00						51 Orang	15.300.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4259 Orang		4258 Orang	4259 Orang	11.700.000,00						4259 Orang	19.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.700.000,00						12 Dokumen	7.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	309.756.800,00						12 Dokumen	160.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.850.000,00						12 Dokumen	20.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00						12 Dokumen	4.575.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	607.200,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	292.490.000,00						1 Dokumen	143.357.328,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang		279 Orang	279 Orang	22.204.000,00						279 Orang	34.452.354,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang		50 Orang	50 Orang	15.075.000,00						51 Orang	15.300.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4259 Orang		4258 Orang	4259 Orang	11.700.000,00						4259 Orang	19.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.700.000,00						12 Dokumen	7.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	309.756.800,00						12 Dokumen	160.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.850.000,00						12 Dokumen	20.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00						12 Dokumen	4.575.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	607.200,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	292.490.000,00						1 Dokumen	143.357.328,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang		279 Orang	279 Orang	22.204.000,00						279 Orang	34.452.354,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang		50 Orang	50 Orang	15.075.000,00						51 Orang	15.300.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4259 Orang		4258 Orang	4259 Orang	11.700.000,00						4259 Orang	19.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.700.000,00						12 Dokumen	7.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	309.756.800,00						12 Dokumen	160.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.850.000,00						12 Dokumen	20.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00						12 Dokumen	4.575.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	607.200,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	292.490.000,00						1 Dokumen	143.357.328,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang		279 Orang	279 Orang	22.204.000,00						279 Orang	34.452.354,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang		50 Orang	50 Orang	15.075.000,00						51 Orang	15.300.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4259 Orang		4258 Orang	4259 Orang	11.700.000,00						4259 Orang	19.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.700.000,00						12 Dokumen	7.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	309.756.800,00						12 Dokumen	160.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.850.000,00						12 Dokumen	20.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00						12 Dokumen	4.575.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	607.200,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	292.490.000,00						1 Dokumen	143.357.328,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang		279 Orang	279 Orang	22.204.000,00						279 Orang	34.452.354,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang		50 Orang	50 Orang	15.075.000,00						51 Orang	15.300.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4259 Orang		4258 Orang	4259 Orang	11.700.000,00						4259 Orang	19.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.700.000,00						12 Dokumen	7.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	309.756.800,00						12 Dokumen	160.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.850.000,00						12 Dokumen	20.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00						12 Dokumen	4.575.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	607.200,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	292.490.000,00						1 Dokumen	143.357.328,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang		279 Orang	279 Orang	22.204.000,00						279 Orang	34.452.354,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang		50 Orang	50 Orang	15.075.000,00						51 Orang	15.300.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4259 Orang		4258 Orang	4259 Orang	11.700.000,00						4259 Orang	19.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.700.000,00						12 Dokumen	7.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	309.756.800,00						12 Dokumen	160.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.850.000,00						12 Dokumen	20.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00						12 Dokumen	4.575.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	607.200,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	292.490.000,00						1 Dokumen	143.357.328,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang		279 Orang	279 Orang	22.204.000,00						279 Orang	34.452.354,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang		50 Orang	50 Orang	15.075.000,00						51 Orang	15.300.000,00	
		Terselenggaranya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4259 Orang		4258 Orang	4259 Orang	11.700.000,00						4259 Orang	19.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.700.000,00						12 Dokumen	7.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	309.756.800,00						12 Dokumen	160.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.850.000,00						12 Dokumen	20.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00						12 Dokumen	4.575.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	607.200,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	292.490.000,00						1 Dokumen	143.357.328,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang		279 Orang	279 Orang	22.204.000,00						279 Orang	34.452.354,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang		50 Orang	50 Orang	15.075.000,00						51 Orang	15.300.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						22.204.000,00							34.452.354,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	279 Orang		279 Orang	301 Orang	22.204.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Bodag || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		279 Orang	34.452.354,00	PUSKESMAS BODAG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						11.700.000,00							19.800.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4259 Orang		4258 Orang	2559 Orang	11.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Bodag || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4259 Orang	19.800.000,00	PUSKESMAS BODAG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						309.756.800,00							160.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	309.756.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Bodag || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	160.550.000,00	PUSKESMAS BODAG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						2.850.000,00							20.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.850.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Bodag || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	20.100.000,00	PUSKESMAS BODAG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						19.200.000,00							4.575.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	19.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Bodag || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	4.575.000,00	PUSKESMAS BODAG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						292.490.000,00							143.357.328,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	292.490.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Bodag || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	143.357.328,00	PUSKESMAS BODAG
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						15.075.000,00							15.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	51 Orang		50 Orang	230 Orang	15.075.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Bodag || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		51 Orang	15.300.000,00	PUSKESMAS BODAG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						607.200,00							675.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	607.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Bodag || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	675.000,00	PUSKESMAS BODAG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						8.700.000,00							7.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Bodag || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	7.800.000,00	PUSKESMAS BODAG
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	19.033.000,00						-	48.575.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	35.492.000,00						-	90.580.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	9.804.000,00						-	3.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	19.033.000,00						-	48.575.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	35.492.000,00						-	90.580.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	9.804.000,00						-	3.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	19.033.000,00						-	48.575.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	35.492.000,00						-	90.580.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	9.804.000,00						-	3.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	19.033.000,00						-	48.575.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	35.492.000,00						-	90.580.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	9.804.000,00						-	3.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	19.033.000,00						-	48.575.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	35.492.000,00						-	90.580.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	9.804.000,00						-	3.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	19.033.000,00						-	48.575.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	35.492.000,00						-	90.580.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	9.804.000,00						-	3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	19.033.000,00						-	48.575.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	35.492.000,00						-	90.580.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	9.804.000,00						-	3.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	19.033.000,00						-	48.575.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	35.492.000,00						-	90.580.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	9.804.000,00						-	3.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	19.033.000,00						-	48.575.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	35.492.000,00						-	90.580.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	9.804.000,00						-	3.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	19.033.000,00						-	48.575.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	35.492.000,00						-	90.580.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	9.804.000,00						-	3.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	19.033.000,00						-	48.575.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	35.492.000,00						-	90.580.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	9.804.000,00						-	3.000.000,00	
		Terselenggaranya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						746.912.000,00					-		548.764.682,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	19.033.000,00						-	48.575.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	35.492.000,00						-	90.580.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	9.804.000,00						-	3.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						9.804.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	24922 Orang	9.804.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Bodag || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	3.000.000,00	PUSKESMAS BODAG
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						19.033.000,00							48.575.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	19.033.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Bodag || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	48.575.000,00	PUSKESMAS BODAG
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						35.492.000,00							90.580.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	35.492.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Bodag || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	90.580.000,00	PUSKESMAS BODAG
59.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**22.584.000,00**							**7.616.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Bodag						***22.584.000,00***							***7.616.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	80 Persentase		72 Persentase	74 Persentase	22.584.000,00						76 Persentase	7.616.000,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		19 %	21 %	22.584.000,00						25 %	7.616.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						22.584.000,00					-		7.616.000,00	
		Terselenggaranya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						22.584.000,00					-		7.616.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	39 Dokumen		39 Dokumen	39 Dokumen	22.584.000,00						39 Dokumen	7.616.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						22.584.000,00							7.616.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	39 Dokumen		39 Dokumen	39 Dokumen	22.584.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Bodag || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		39 Dokumen	7.616.000,00	PUSKESMAS BODAG
		PUSKESMAS POGALAN						**3.450.365.000,00**							**3.256.907.444,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.450.365.000,00**							**3.256.907.444,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.450.365.000,00**							**3.256.907.444,00**	
60.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.630.000.000,00**							**2.600.000.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Pogalan						***2.630.000.000,00***							***2.600.000.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.630.000.000,00						100 %	2.600.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.630.000.000,00					-		2.600.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						2.630.000.000,00					-		2.600.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.630.000.000,00						1 Unit Kerja	2.600.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.630.000.000,00							2.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.630.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	2.600.000.000,00	PUSKESMAS POGALAN
61.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**811.999.000,00**							**648.541.444,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Pogalan						***811.999.000,00***							***604.038.852,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	90 Persentase		78 Persentase	80 Persentase	811.999.000,00						85 Persentase	604.038.852,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		55 %	70 %	811.999.000,00						80 %	604.038.852,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	74 %		45 %	54 %	811.999.000,00						60 %	604.038.852,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	66 %		50 %	50 %	811.999.000,00						50 %	604.038.852,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	811.999.000,00						100 %	604.038.852,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	85 %		65 %	70 %	811.999.000,00						75 %	604.038.852,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	811.999.000,00						100 %	604.038.852,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	90.5 %		87.8 %	87.8 %	811.999.000,00						90.5 %	604.038.852,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	811.999.000,00						11 %	604.038.852,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	811.999.000,00						100 %	604.038.852,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	811.999.000,00						100 %	604.038.852,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	811.999.000,00						100 %	604.038.852,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	811.999.000,00						100 %	604.038.852,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	811.999.000,00						100 %	604.038.852,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	811.999.000,00						100 %	604.038.852,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	811.999.000,00						100 %	604.038.852,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	811.999.000,00						100 %	604.038.852,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	811.999.000,00						100 %	604.038.852,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	811.999.000,00						100 %	604.038.852,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	811.999.000,00						100 %	604.038.852,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	811.999.000,00						100 %	604.038.852,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	811.999.000,00						0.67 %	604.038.852,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	9.00 %		9.10 %	9.05 %	811.999.000,00						9.04 %	604.038.852,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	95.75 %		95.71 %	95.72 %	811.999.000,00						95.73 %	604.038.852,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4109 Orang		4109 Orang	4149 Orang	33.000.000,00						4189 Orang	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.400.000,00						12 Dokumen	20.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00						12 Dokumen	9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	187.800.000,00						12 Dokumen	187.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00						12 Dokumen	6.600.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.660.868,00						12 Dokumen	45.660.868,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.700.000,00						12 Dokumen	23.700.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.512.000,00						12 Dokumen	1.512.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	174.536.260,00						12 Dokumen	174.536.260,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		370 Orang	372 Orang	30.027.132,00						374 Orang	30.027.132,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	317 Orang		308 Orang	310 Orang	3.600.000,00						312 Orang	3.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang		86 Orang	87 Orang	5.400.000,00						88 Orang	5.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4109 Orang		4109 Orang	4149 Orang	33.000.000,00						4189 Orang	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.400.000,00						12 Dokumen	20.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00						12 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	187.800.000,00						12 Dokumen	187.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00						12 Dokumen	6.600.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.660.868,00						12 Dokumen	45.660.868,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.700.000,00						12 Dokumen	23.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.512.000,00						12 Dokumen	1.512.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	174.536.260,00						12 Dokumen	174.536.260,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		370 Orang	372 Orang	30.027.132,00						374 Orang	30.027.132,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	317 Orang		308 Orang	310 Orang	3.600.000,00						312 Orang	3.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang		86 Orang	87 Orang	5.400.000,00						88 Orang	5.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4109 Orang		4109 Orang	4149 Orang	33.000.000,00						4189 Orang	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.400.000,00						12 Dokumen	20.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00						12 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	187.800.000,00						12 Dokumen	187.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00						12 Dokumen	6.600.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.660.868,00						12 Dokumen	45.660.868,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.700.000,00						12 Dokumen	23.700.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.512.000,00						12 Dokumen	1.512.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	174.536.260,00						12 Dokumen	174.536.260,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		370 Orang	372 Orang	30.027.132,00						374 Orang	30.027.132,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	317 Orang		308 Orang	310 Orang	3.600.000,00						312 Orang	3.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang		86 Orang	87 Orang	5.400.000,00						88 Orang	5.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4109 Orang		4109 Orang	4149 Orang	33.000.000,00						4189 Orang	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.400.000,00						12 Dokumen	20.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00						12 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	187.800.000,00						12 Dokumen	187.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00						12 Dokumen	6.600.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.660.868,00						12 Dokumen	45.660.868,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.700.000,00						12 Dokumen	23.700.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.512.000,00						12 Dokumen	1.512.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	174.536.260,00						12 Dokumen	174.536.260,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		370 Orang	372 Orang	30.027.132,00						374 Orang	30.027.132,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	317 Orang		308 Orang	310 Orang	3.600.000,00						312 Orang	3.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang		86 Orang	87 Orang	5.400.000,00						88 Orang	5.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4109 Orang		4109 Orang	4149 Orang	33.000.000,00						4189 Orang	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.400.000,00						12 Dokumen	20.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00						12 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	187.800.000,00						12 Dokumen	187.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00						12 Dokumen	6.600.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.660.868,00						12 Dokumen	45.660.868,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.700.000,00						12 Dokumen	23.700.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.512.000,00						12 Dokumen	1.512.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	174.536.260,00						12 Dokumen	174.536.260,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		370 Orang	372 Orang	30.027.132,00						374 Orang	30.027.132,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	317 Orang		308 Orang	310 Orang	3.600.000,00						312 Orang	3.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang		86 Orang	87 Orang	5.400.000,00						88 Orang	5.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4109 Orang		4109 Orang	4149 Orang	33.000.000,00						4189 Orang	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.400.000,00						12 Dokumen	20.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00						12 Dokumen	9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	187.800.000,00						12 Dokumen	187.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00						12 Dokumen	6.600.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.660.868,00						12 Dokumen	45.660.868,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.700.000,00						12 Dokumen	23.700.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.512.000,00						12 Dokumen	1.512.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	174.536.260,00						12 Dokumen	174.536.260,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		370 Orang	372 Orang	30.027.132,00						374 Orang	30.027.132,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	317 Orang		308 Orang	310 Orang	3.600.000,00						312 Orang	3.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang		86 Orang	87 Orang	5.400.000,00						88 Orang	5.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4109 Orang		4109 Orang	4149 Orang	33.000.000,00						4189 Orang	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.400.000,00						12 Dokumen	20.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00						12 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	187.800.000,00						12 Dokumen	187.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00						12 Dokumen	6.600.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.660.868,00						12 Dokumen	45.660.868,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.700.000,00						12 Dokumen	23.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.512.000,00						12 Dokumen	1.512.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	174.536.260,00						12 Dokumen	174.536.260,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		370 Orang	372 Orang	30.027.132,00						374 Orang	30.027.132,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	317 Orang		308 Orang	310 Orang	3.600.000,00						312 Orang	3.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang		86 Orang	87 Orang	5.400.000,00						88 Orang	5.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4109 Orang		4109 Orang	4149 Orang	33.000.000,00						4189 Orang	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.400.000,00						12 Dokumen	20.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00						12 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	187.800.000,00						12 Dokumen	187.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00						12 Dokumen	6.600.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.660.868,00						12 Dokumen	45.660.868,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.700.000,00						12 Dokumen	23.700.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.512.000,00						12 Dokumen	1.512.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	174.536.260,00						12 Dokumen	174.536.260,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		370 Orang	372 Orang	30.027.132,00						374 Orang	30.027.132,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	317 Orang		308 Orang	310 Orang	3.600.000,00						312 Orang	3.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang		86 Orang	87 Orang	5.400.000,00						88 Orang	5.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4109 Orang		4109 Orang	4149 Orang	33.000.000,00						4189 Orang	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.400.000,00						12 Dokumen	20.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00						12 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	187.800.000,00						12 Dokumen	187.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00						12 Dokumen	6.600.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.660.868,00						12 Dokumen	45.660.868,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.700.000,00						12 Dokumen	23.700.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.512.000,00						12 Dokumen	1.512.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	174.536.260,00						12 Dokumen	174.536.260,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		370 Orang	372 Orang	30.027.132,00						374 Orang	30.027.132,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	317 Orang		308 Orang	310 Orang	3.600.000,00						312 Orang	3.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang		86 Orang	87 Orang	5.400.000,00						88 Orang	5.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4109 Orang		4109 Orang	4149 Orang	33.000.000,00						4189 Orang	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.400.000,00						12 Dokumen	20.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00						12 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	187.800.000,00						12 Dokumen	187.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00						12 Dokumen	6.600.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.660.868,00						12 Dokumen	45.660.868,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.700.000,00						12 Dokumen	23.700.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.512.000,00						12 Dokumen	1.512.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	174.536.260,00						12 Dokumen	174.536.260,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		370 Orang	372 Orang	30.027.132,00						374 Orang	30.027.132,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	317 Orang		308 Orang	310 Orang	3.600.000,00						312 Orang	3.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang		86 Orang	87 Orang	5.400.000,00						88 Orang	5.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4109 Orang		4109 Orang	4149 Orang	33.000.000,00						4189 Orang	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.400.000,00						12 Dokumen	20.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00						12 Dokumen	9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	187.800.000,00						12 Dokumen	187.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00						12 Dokumen	6.600.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.660.868,00						12 Dokumen	45.660.868,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.700.000,00						12 Dokumen	23.700.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.512.000,00						12 Dokumen	1.512.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	174.536.260,00						12 Dokumen	174.536.260,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		370 Orang	372 Orang	30.027.132,00						374 Orang	30.027.132,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	317 Orang		308 Orang	310 Orang	3.600.000,00						312 Orang	3.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang		86 Orang	87 Orang	5.400.000,00						88 Orang	5.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4109 Orang		4109 Orang	4149 Orang	33.000.000,00						4189 Orang	33.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.400.000,00						12 Dokumen	20.400.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00						12 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	187.800.000,00						12 Dokumen	187.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00						12 Dokumen	6.600.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.660.868,00						12 Dokumen	45.660.868,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.700.000,00						12 Dokumen	23.700.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.512.000,00						12 Dokumen	1.512.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	174.536.260,00						12 Dokumen	174.536.260,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		370 Orang	372 Orang	30.027.132,00						374 Orang	30.027.132,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	317 Orang		308 Orang	310 Orang	3.600.000,00						312 Orang	3.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang		86 Orang	87 Orang	5.400.000,00						88 Orang	5.400.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						30.027.132,00							30.027.132,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	378 Orang		370 Orang	371 Orang	30.027.132,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		374 Orang	30.027.132,00	PUSKESMAS POGALAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						33.000.000,00							33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4109 Orang		4109 Orang	4302 Orang	33.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4189 Orang	33.000.000,00	PUSKESMAS POGALAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						5.400.000,00							5.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	90 Orang		86 Orang	66 Orang	5.400.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		88 Orang	5.400.000,00	PUSKESMAS POGALAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.600.000,00							3.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	317 Orang		308 Orang	263 Orang	3.600.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		312 Orang	3.600.000,00	PUSKESMAS POGALAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						187.800.000,00							187.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	187.800.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	187.800.000,00	PUSKESMAS POGALAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						6.600.000,00							6.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.600.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	6.600.000,00	PUSKESMAS POGALAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						23.700.000,00							23.700.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.700.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	23.700.000,00	PUSKESMAS POGALAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						174.536.260,00							174.536.260,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	174.536.260,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	174.536.260,00	PUSKESMAS POGALAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						45.660.868,00							45.660.868,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.660.868,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	45.660.868,00	PUSKESMAS POGALAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.512.000,00							1.512.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.512.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	1.512.000,00	PUSKESMAS POGALAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	9.000.000,00	PUSKESMAS POGALAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						20.400.000,00							20.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.400.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	20.400.000,00	PUSKESMAS POGALAN
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	44.502.592,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	207.960.148,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.800.000,00						-	1.800.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	16.500.000,00						-	16.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	44.502.592,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	207.960.148,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.800.000,00						-	1.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	16.500.000,00						-	16.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	44.502.592,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	207.960.148,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.800.000,00						-	1.800.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	16.500.000,00						-	16.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	44.502.592,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	207.960.148,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.800.000,00						-	1.800.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	16.500.000,00						-	16.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	44.502.592,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	207.960.148,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.800.000,00						-	1.800.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	16.500.000,00						-	16.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	44.502.592,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	207.960.148,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.800.000,00						-	1.800.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	16.500.000,00						-	16.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	44.502.592,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	207.960.148,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.800.000,00						-	1.800.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	16.500.000,00						-	16.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	44.502.592,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	207.960.148,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.800.000,00						-	1.800.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	16.500.000,00						-	16.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	44.502.592,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	207.960.148,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.800.000,00						-	1.800.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	16.500.000,00						-	16.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	44.502.592,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	207.960.148,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.800.000,00						-	1.800.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	16.500.000,00						-	16.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	44.502.592,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	207.960.148,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.800.000,00						-	1.800.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	16.500.000,00						-	16.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						811.999.000,00					-		648.541.444,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	44.502.592,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	207.960.148,00						-	44.502.592,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	1.800.000,00						-	1.800.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	16.500.000,00						-	16.500.000,00	
	1.02.02.2.02.0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						16.500.000,00							16.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	12 Laporan	16.500.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	16.500.000,00	PUSKESMAS POGALAN
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						1.800.000,00							1.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	3434 Orang	1.800.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	1.800.000,00	PUSKESMAS POGALAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						44.502.592,00							44.502.592,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	44.502.592,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	44.502.592,00	PUSKESMAS POGALAN
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						207.960.148,00							44.502.592,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	207.960.148,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	44.502.592,00	PUSKESMAS POGALAN
62.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**8.366.000,00**							**8.366.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Pogalan						***8.366.000,00***							***8.366.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	64 Persentase		56 Persentase	58 Persentase	8.366.000,00						60 Persentase	8.366.000,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		9 %	14 %	8.366.000,00						19 %	8.366.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						8.366.000,00					-		8.366.000,00	
		Tercapainya masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan						8.366.000,00					-		8.366.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	70 Dokumen	8.366.000,00						12 Dokumen	8.366.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						8.366.000,00							8.366.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.366.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	8.366.000,00	PUSKESMAS POGALAN
		PUSKESMAS NGULANKULON						**2.128.785.500,00**							**2.118.785.500,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.128.785.500,00**							**2.118.785.500,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.128.785.500,00**							**2.118.785.500,00**	
63.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.610.000.000,00**							**1.600.000.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Ngulankulon						***1.610.000.000,00***							***1.600.000.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	1.610.000.000,00						100 %	1.600.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.610.000.000,00					-		1.600.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						1.610.000.000,00					-		1.600.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.610.000.000,00						1 Unit Kerja	1.600.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.610.000.000,00							1.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.610.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pogalan || Desa Ngulangkulon || 1	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	1.600.000.000,00	PUSKESMAS NGULANKULON
64.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**431.397.000,00**							**431.397.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Ngulankulon						***431.397.000,00***							***431.397.000,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	90 Persentase		78 Persentase	80 Persentase	431.397.000,00						84 Persentase	431.397.000,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		60 %	70 %	431.397.000,00						80 %	431.397.000,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	87 %		58 %	67 %	431.397.000,00						73 %	431.397.000,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	50 %		25 %	25 %	431.397.000,00						50 %	431.397.000,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	431.397.000,00						100 %	431.397.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	80 %		60 %	65 %	431.397.000,00						70 %	431.397.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	431.397.000,00						100 %	431.397.000,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	90.1 %		89.7 %	90.1 %	431.397.000,00						90.1 %	431.397.000,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	431.397.000,00						11 %	431.397.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	431.397.000,00						100 %	431.397.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	431.397.000,00						100 %	431.397.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	431.397.000,00						100 %	431.397.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	431.397.000,00						100 %	431.397.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	431.397.000,00						100 %	431.397.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	431.397.000,00						100 %	431.397.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	431.397.000,00						100 %	431.397.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	431.397.000,00						100 %	431.397.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	431.397.000,00						100 %	431.397.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	431.397.000,00						100 %	431.397.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	431.397.000,00						100 %	431.397.000,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	431.397.000,00						100 %	431.397.000,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	431.397.000,00						0.67 %	431.397.000,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	8.24 %		8.28 %	8.27 %	431.397.000,00						8.26 %	431.397.000,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	93 %		92.24 %	92.25 %	431.397.000,00						92.26 %	431.397.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1299 Orang		1298 Orang	1299 Orang	8.400.000,00						1299 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00						12 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	193.798.000,00						12 Dokumen	193.798.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.550.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	141.809.000,00						16 Dokumen	141.809.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang		165 Orang	165 Orang	9.992.000,00						165 Orang	9.992.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 Orang		253 Orang	253 Orang	3.750.000,00						253 Orang	3.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang		40 Orang	40 Orang	12.000.000,00						40 Orang	12.000.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1299 Orang		1298 Orang	1299 Orang	8.400.000,00						1299 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00						12 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	193.798.000,00						12 Dokumen	193.798.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.550.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	141.809.000,00						16 Dokumen	141.809.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang		165 Orang	165 Orang	9.992.000,00						165 Orang	9.992.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 Orang		253 Orang	253 Orang	3.750.000,00						253 Orang	3.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang		40 Orang	40 Orang	12.000.000,00						40 Orang	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1299 Orang		1298 Orang	1299 Orang	8.400.000,00						1299 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00						12 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	193.798.000,00						12 Dokumen	193.798.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.550.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	141.809.000,00						16 Dokumen	141.809.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang		165 Orang	165 Orang	9.992.000,00						165 Orang	9.992.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 Orang		253 Orang	253 Orang	3.750.000,00						253 Orang	3.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang		40 Orang	40 Orang	12.000.000,00						40 Orang	12.000.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1299 Orang		1298 Orang	1299 Orang	8.400.000,00						1299 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00						12 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	193.798.000,00						12 Dokumen	193.798.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.550.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	141.809.000,00						16 Dokumen	141.809.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang		165 Orang	165 Orang	9.992.000,00						165 Orang	9.992.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 Orang		253 Orang	253 Orang	3.750.000,00						253 Orang	3.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang		40 Orang	40 Orang	12.000.000,00						40 Orang	12.000.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1299 Orang		1298 Orang	1299 Orang	8.400.000,00						1299 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00						12 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	193.798.000,00						12 Dokumen	193.798.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.550.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	141.809.000,00						16 Dokumen	141.809.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang		165 Orang	165 Orang	9.992.000,00						165 Orang	9.992.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 Orang		253 Orang	253 Orang	3.750.000,00						253 Orang	3.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang		40 Orang	40 Orang	12.000.000,00						40 Orang	12.000.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1299 Orang		1298 Orang	1299 Orang	8.400.000,00						1299 Orang	8.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00						12 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	193.798.000,00						12 Dokumen	193.798.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.550.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	141.809.000,00						16 Dokumen	141.809.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang		165 Orang	165 Orang	9.992.000,00						165 Orang	9.992.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 Orang		253 Orang	253 Orang	3.750.000,00						253 Orang	3.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang		40 Orang	40 Orang	12.000.000,00						40 Orang	12.000.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1299 Orang		1298 Orang	1299 Orang	8.400.000,00						1299 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00						12 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	193.798.000,00						12 Dokumen	193.798.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.550.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	141.809.000,00						16 Dokumen	141.809.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang		165 Orang	165 Orang	9.992.000,00						165 Orang	9.992.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 Orang		253 Orang	253 Orang	3.750.000,00						253 Orang	3.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang		40 Orang	40 Orang	12.000.000,00						40 Orang	12.000.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1299 Orang		1298 Orang	1299 Orang	8.400.000,00						1299 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00						12 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	193.798.000,00						12 Dokumen	193.798.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.550.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	141.809.000,00						16 Dokumen	141.809.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang		165 Orang	165 Orang	9.992.000,00						165 Orang	9.992.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 Orang		253 Orang	253 Orang	3.750.000,00						253 Orang	3.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang		40 Orang	40 Orang	12.000.000,00						40 Orang	12.000.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1299 Orang		1298 Orang	1299 Orang	8.400.000,00						1299 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00						12 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	193.798.000,00						12 Dokumen	193.798.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.550.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	141.809.000,00						16 Dokumen	141.809.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang		165 Orang	165 Orang	9.992.000,00						165 Orang	9.992.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 Orang		253 Orang	253 Orang	3.750.000,00						253 Orang	3.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang		40 Orang	40 Orang	12.000.000,00						40 Orang	12.000.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1299 Orang		1298 Orang	1299 Orang	8.400.000,00						1299 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00						12 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	193.798.000,00						12 Dokumen	193.798.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.550.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	141.809.000,00						16 Dokumen	141.809.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang		165 Orang	165 Orang	9.992.000,00						165 Orang	9.992.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 Orang		253 Orang	253 Orang	3.750.000,00						253 Orang	3.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang		40 Orang	40 Orang	12.000.000,00						40 Orang	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1299 Orang		1298 Orang	1299 Orang	8.400.000,00						1299 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00						12 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	193.798.000,00						12 Dokumen	193.798.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.550.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	141.809.000,00						16 Dokumen	141.809.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang		165 Orang	165 Orang	9.992.000,00						165 Orang	9.992.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 Orang		253 Orang	253 Orang	3.750.000,00						253 Orang	3.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang		40 Orang	40 Orang	12.000.000,00						40 Orang	12.000.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1299 Orang		1298 Orang	1299 Orang	8.400.000,00						1299 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00						12 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	193.798.000,00						12 Dokumen	193.798.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.550.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	141.809.000,00						16 Dokumen	141.809.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang		165 Orang	165 Orang	9.992.000,00						165 Orang	9.992.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 Orang		253 Orang	253 Orang	3.750.000,00						253 Orang	3.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang		40 Orang	40 Orang	12.000.000,00						40 Orang	12.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						9.992.000,00							9.992.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	165 Orang		165 Orang	170 Orang	9.992.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pogalan || Desa Ngulangkulon || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		165 Orang	9.992.000,00	PUSKESMAS NGULANKULON
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						8.400.000,00							8.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1299 Orang		1298 Orang	1222 Orang	8.400.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pogalan || Desa Ngulangkulon || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1299 Orang	8.400.000,00	PUSKESMAS NGULANKULON
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	40 Orang		40 Orang	41 Orang	12.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pogalan || Desa Ngulangkulon || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		40 Orang	12.000.000,00	PUSKESMAS NGULANKULON
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						3.750.000,00							3.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	254 Orang		253 Orang	143 Orang	3.750.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pogalan || Desa Ngulangkulon || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		253 Orang	3.750.000,00	PUSKESMAS NGULANKULON
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						193.798.000,00							193.798.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	193.798.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pogalan || Desa Ngulangkulon || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	193.798.000,00	PUSKESMAS NGULANKULON
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						14.550.000,00							14.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.550.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pogalan || Desa Ngulangkulon || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	14.550.000,00	PUSKESMAS NGULANKULON
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						141.809.000,00							141.809.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	141.809.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pogalan || Desa Ngulangkulon || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		16 Dokumen	141.809.000,00	PUSKESMAS NGULANKULON
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						300.000,00							300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pogalan || Desa Ngulangkulon || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	300.000,00	PUSKESMAS NGULANKULON
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						7.500.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pogalan || Desa Ngulangkulon || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	7.500.000,00	PUSKESMAS NGULANKULON
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.100.000,00						-	2.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	25.350.000,00						-	25.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.848.000,00						-	11.848.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.100.000,00						-	2.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	25.350.000,00						-	25.350.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.848.000,00						-	11.848.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.100.000,00						-	2.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	25.350.000,00						-	25.350.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.848.000,00						-	11.848.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.100.000,00						-	2.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	25.350.000,00						-	25.350.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.848.000,00						-	11.848.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.100.000,00						-	2.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	25.350.000,00						-	25.350.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.848.000,00						-	11.848.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.100.000,00						-	2.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	25.350.000,00						-	25.350.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.848.000,00						-	11.848.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.100.000,00						-	2.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	25.350.000,00						-	25.350.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.848.000,00						-	11.848.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.100.000,00						-	2.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	25.350.000,00						-	25.350.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.848.000,00						-	11.848.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.100.000,00						-	2.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	25.350.000,00						-	25.350.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.848.000,00						-	11.848.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.100.000,00						-	2.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	25.350.000,00						-	25.350.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.848.000,00						-	11.848.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.100.000,00						-	2.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	25.350.000,00						-	25.350.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.848.000,00						-	11.848.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						431.397.000,00					-		431.397.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.100.000,00						-	2.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	25.350.000,00						-	25.350.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.848.000,00						-	11.848.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						11.848.000,00							11.848.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	2791 Orang	11.848.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pogalan || Desa Ngulangkulon || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	11.848.000,00	PUSKESMAS NGULANKULON
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						2.100.000,00							2.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	2.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pogalan || Desa Ngulangkulon || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	2.100.000,00	PUSKESMAS NGULANKULON
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						25.350.000,00							25.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	25.350.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pogalan || Desa Ngulangkulon || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	25.350.000,00	PUSKESMAS NGULANKULON
65.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**87.388.500,00**							**87.388.500,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Ngulankulon						***87.388.500,00***							***87.388.500,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	54 Persentase		46 Persentase	48 Persentase	87.388.500,00						50 Persentase	87.388.500,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		10 %	13 %	87.388.500,00						19 %	87.388.500,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						87.388.500,00					-		87.388.500,00	
		Tercapainya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						87.388.500,00					-		87.388.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	87.388.500,00						12 Dokumen	87.388.500,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						87.388.500,00							87.388.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	87.388.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pogalan || Desa Ngulangkulon || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	87.388.500,00	PUSKESMAS NGULANKULON
		PUSKESMAS PULE						**6.418.637.600,00**							**6.445.202.956,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.418.637.600,00**							**6.445.202.956,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**6.418.637.600,00**							**6.445.202.956,00**	
66.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.530.000.000,00**							**5.530.000.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Pule						***5.530.000.000,00***							***5.530.000.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	5.530.000.000,00						100 %	5.530.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						5.530.000.000,00					-		5.530.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						5.530.000.000,00					-		5.530.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	5.530.000.000,00						1 Unit Kerja	5.530.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						5.530.000.000,00							5.530.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	5.530.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	5.530.000.000,00	PUSKESMAS PULE
67.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**818.395.600,00**							**906.349.969,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Pule						***818.395.600,00***							***906.349.969,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	94 Persentase		84 Persentase	86 Persentase	818.395.600,00						88 Persentase	906.349.969,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		70 %	80 %	818.395.600,00						85 %	906.349.969,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	60 %		31 %	40 %	818.395.600,00						46 %	906.349.969,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	40 %		30 %	30 %	818.395.600,00						30 %	906.349.969,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	818.395.600,00						100 %	906.349.969,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	90 %		70 %	75 %	818.395.600,00						80 %	906.349.969,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	818.395.600,00						100 %	906.349.969,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	91.7 %		91.7 %	91.7 %	818.395.600,00						91.7 %	906.349.969,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	818.395.600,00						11 %	906.349.969,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	818.395.600,00						100 %	906.349.969,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	818.395.600,00						100 %	906.349.969,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	818.395.600,00						100 %	906.349.969,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	818.395.600,00						100 %	906.349.969,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	818.395.600,00						100 %	906.349.969,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	818.395.600,00						100 %	906.349.969,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	818.395.600,00						100 %	906.349.969,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	818.395.600,00						100 %	906.349.969,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	818.395.600,00						100 %	906.349.969,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	818.395.600,00						100 %	906.349.969,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	818.395.600,00						100 %	906.349.969,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	818.395.600,00						100 %	906.349.969,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	818.395.600,00						0.67 %	906.349.969,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	7.84 %		7.88 %	7.87 %	818.395.600,00						7.86 %	906.349.969,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90.25 %		90.12 %	90.13 %	818.395.600,00						90.20 %	906.349.969,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5377 Orang		5373 Orang	5374 Orang	18.600.000,00						5375 Orang	18.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.300.000,00						12 Dokumen	17.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.210.000,00						12 Dokumen	419.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	11.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.800.000,00						12 Dokumen	13.125.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	450.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	139.785.000,00						1 Dokumen	210.085.633,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	667 Orang		663 Orang	664 Orang	29.736.000,00						665 Orang	56.099.736,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	367 Orang		363 Orang	364 Orang	14.250.000,00						365 Orang	7.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	223 Orang		219 Orang	220 Orang	900.000,00						221 Orang	4.500.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5377 Orang		5373 Orang	5374 Orang	18.600.000,00						5375 Orang	18.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.300.000,00						12 Dokumen	17.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.210.000,00						12 Dokumen	419.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	11.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.800.000,00						12 Dokumen	13.125.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	450.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	139.785.000,00						1 Dokumen	210.085.633,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	667 Orang		663 Orang	664 Orang	29.736.000,00						665 Orang	56.099.736,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	367 Orang		363 Orang	364 Orang	14.250.000,00						365 Orang	7.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	223 Orang		219 Orang	220 Orang	900.000,00						221 Orang	4.500.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5377 Orang		5373 Orang	5374 Orang	18.600.000,00						5375 Orang	18.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.300.000,00						12 Dokumen	17.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.210.000,00						12 Dokumen	419.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	11.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.800.000,00						12 Dokumen	13.125.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	450.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	139.785.000,00						1 Dokumen	210.085.633,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	667 Orang		663 Orang	664 Orang	29.736.000,00						665 Orang	56.099.736,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	367 Orang		363 Orang	364 Orang	14.250.000,00						365 Orang	7.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	223 Orang		219 Orang	220 Orang	900.000,00						221 Orang	4.500.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5377 Orang		5373 Orang	5374 Orang	18.600.000,00						5375 Orang	18.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.300.000,00						12 Dokumen	17.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.210.000,00						12 Dokumen	419.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	11.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.800.000,00						12 Dokumen	13.125.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	450.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	139.785.000,00						1 Dokumen	210.085.633,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	667 Orang		663 Orang	664 Orang	29.736.000,00						665 Orang	56.099.736,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	367 Orang		363 Orang	364 Orang	14.250.000,00						365 Orang	7.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	223 Orang		219 Orang	220 Orang	900.000,00						221 Orang	4.500.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan kepada warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5377 Orang		5373 Orang	5374 Orang	18.600.000,00						5375 Orang	18.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.300.000,00						12 Dokumen	17.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.210.000,00						12 Dokumen	419.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	11.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.800.000,00						12 Dokumen	13.125.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	450.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	139.785.000,00						1 Dokumen	210.085.633,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	667 Orang		663 Orang	664 Orang	29.736.000,00						665 Orang	56.099.736,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	367 Orang		363 Orang	364 Orang	14.250.000,00						365 Orang	7.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	223 Orang		219 Orang	220 Orang	900.000,00						221 Orang	4.500.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5377 Orang		5373 Orang	5374 Orang	18.600.000,00						5375 Orang	18.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.300.000,00						12 Dokumen	17.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.210.000,00						12 Dokumen	419.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	11.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.800.000,00						12 Dokumen	13.125.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	450.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	139.785.000,00						1 Dokumen	210.085.633,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	667 Orang		663 Orang	664 Orang	29.736.000,00						665 Orang	56.099.736,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	367 Orang		363 Orang	364 Orang	14.250.000,00						365 Orang	7.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	223 Orang		219 Orang	220 Orang	900.000,00						221 Orang	4.500.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						818.395.600,00					-		906.349.969,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5377 Orang		5373 Orang	5374 Orang	18.600.000,00						5375 Orang	18.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.300.000,00						12 Dokumen	17.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.210.000,00						12 Dokumen	419.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	11.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.800.000,00						12 Dokumen	13.125.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	450.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	139.785.000,00						1 Dokumen	210.085.633,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	667 Orang		663 Orang	664 Orang	29.736.000,00						665 Orang	56.099.736,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	367 Orang		363 Orang	364 Orang	14.250.000,00						365 Orang	7.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	223 Orang		219 Orang	220 Orang	900.000,00						221 Orang	4.500.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5377 Orang		5373 Orang	5374 Orang	18.600.000,00						5375 Orang	18.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.300.000,00						12 Dokumen	17.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.210.000,00						12 Dokumen	419.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	11.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.800.000,00						12 Dokumen	13.125.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	450.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	139.785.000,00						1 Dokumen	210.085.633,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	667 Orang		663 Orang	664 Orang	29.736.000,00						665 Orang	56.099.736,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	367 Orang		363 Orang	364 Orang	14.250.000,00						365 Orang	7.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	223 Orang		219 Orang	220 Orang	900.000,00						221 Orang	4.500.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5377 Orang		5373 Orang	5374 Orang	18.600.000,00						5375 Orang	18.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.300.000,00						12 Dokumen	17.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.210.000,00						12 Dokumen	419.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	11.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.800.000,00						12 Dokumen	13.125.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	450.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	139.785.000,00						1 Dokumen	210.085.633,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	667 Orang		663 Orang	664 Orang	29.736.000,00						665 Orang	56.099.736,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	367 Orang		363 Orang	364 Orang	14.250.000,00						365 Orang	7.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	223 Orang		219 Orang	220 Orang	900.000,00						221 Orang	4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5377 Orang		5373 Orang	5374 Orang	18.600.000,00						5375 Orang	18.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.300.000,00						12 Dokumen	17.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.210.000,00						12 Dokumen	419.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	11.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.800.000,00						12 Dokumen	13.125.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	450.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	139.785.000,00						1 Dokumen	210.085.633,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	667 Orang		663 Orang	664 Orang	29.736.000,00						665 Orang	56.099.736,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	367 Orang		363 Orang	364 Orang	14.250.000,00						365 Orang	7.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	223 Orang		219 Orang	220 Orang	900.000,00						221 Orang	4.500.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5377 Orang		5373 Orang	5374 Orang	18.600.000,00						5375 Orang	18.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.300.000,00						12 Dokumen	17.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.210.000,00						12 Dokumen	419.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	11.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.800.000,00						12 Dokumen	13.125.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	450.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	139.785.000,00						1 Dokumen	210.085.633,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	667 Orang		663 Orang	664 Orang	29.736.000,00						665 Orang	56.099.736,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	367 Orang		363 Orang	364 Orang	14.250.000,00						365 Orang	7.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	223 Orang		219 Orang	220 Orang	900.000,00						221 Orang	4.500.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5377 Orang		5373 Orang	5374 Orang	18.600.000,00						5375 Orang	18.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.300.000,00						12 Dokumen	17.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.210.000,00						12 Dokumen	419.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00						12 Dokumen	11.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.800.000,00						12 Dokumen	13.125.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	450.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	139.785.000,00						1 Dokumen	210.085.633,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	667 Orang		663 Orang	664 Orang	29.736.000,00						665 Orang	56.099.736,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	367 Orang		363 Orang	364 Orang	14.250.000,00						365 Orang	7.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	223 Orang		219 Orang	220 Orang	900.000,00						221 Orang	4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						29.736.000,00							56.099.736,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	667 Orang		663 Orang	491 Orang	29.736.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		665 Orang	56.099.736,00	PUSKESMAS PULE
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						18.600.000,00							18.600.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5377 Orang		5373 Orang	6272 Orang	18.600.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		5375 Orang	18.600.000,00	PUSKESMAS PULE
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						900.000,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	223 Orang		219 Orang	109 Orang	900.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		221 Orang	4.500.000,00	PUSKESMAS PULE
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						14.250.000,00							7.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	367 Orang		363 Orang	456 Orang	14.250.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		365 Orang	7.800.000,00	PUSKESMAS PULE
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						442.210.000,00							419.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	442.210.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	419.600.000,00	PUSKESMAS PULE
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						13.200.000,00							11.250.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.200.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	11.250.000,00	PUSKESMAS PULE
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						34.800.000,00							13.125.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.800.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	13.125.000,00	PUSKESMAS PULE
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						139.785.000,00							210.085.633,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	139.785.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	210.085.633,00	PUSKESMAS PULE
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						300.000,00							450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	450.000,00	PUSKESMAS PULE
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						33.300.000,00							17.550.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	33.300.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	17.550.000,00	PUSKESMAS PULE
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	37.800.000,00						-	30.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	50.550.000,00						-	114.075.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.964.600,00						-	2.964.600,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	37.800.000,00						-	30.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	50.550.000,00						-	114.075.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.964.600,00						-	2.964.600,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	37.800.000,00						-	30.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	50.550.000,00						-	114.075.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.964.600,00						-	2.964.600,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	37.800.000,00						-	30.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	50.550.000,00						-	114.075.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.964.600,00						-	2.964.600,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan kepada warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	37.800.000,00						-	30.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	50.550.000,00						-	114.075.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.964.600,00						-	2.964.600,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	37.800.000,00						-	30.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	50.550.000,00						-	114.075.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.964.600,00						-	2.964.600,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	37.800.000,00						-	30.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	50.550.000,00						-	114.075.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.964.600,00						-	2.964.600,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	37.800.000,00						-	30.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	50.550.000,00						-	114.075.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.964.600,00						-	2.964.600,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	37.800.000,00						-	30.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	50.550.000,00						-	114.075.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.964.600,00						-	2.964.600,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	37.800.000,00						-	30.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	50.550.000,00						-	114.075.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.964.600,00						-	2.964.600,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	37.800.000,00						-	30.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	50.550.000,00						-	114.075.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.964.600,00						-	2.964.600,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						818.395.600,00					-		906.349.969,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	37.800.000,00						-	30.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	50.550.000,00						-	114.075.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.964.600,00						-	2.964.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						2.964.600,00							2.964.600,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	5575 Orang	2.964.600,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	2.964.600,00	PUSKESMAS PULE
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						37.800.000,00							30.250.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	144 Laporan	37.800.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	30.250.000,00	PUSKESMAS PULE
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						50.550.000,00							114.075.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	144 Laporan	50.550.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	114.075.000,00	PUSKESMAS PULE
68.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**70.242.000,00**							**8.852.987,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Pule						***70.242.000,00***							***8.852.987,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	86 Persentase		78 Persentase	80 Persentase	70.242.000,00						82 Persentase	8.852.987,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		8 %	13 %	70.242.000,00						19 %	8.852.987,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						70.242.000,00					-		8.852.987,00	
		Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan						70.242.000,00					-		8.852.987,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.242.000,00						1 Dokumen	8.852.987,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						70.242.000,00							8.852.987,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	70.242.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	8.852.987,00	PUSKESMAS PULE
		PUSKESMAS TRENGGALEK						**3.130.724.950,00**							**3.130.724.950,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.130.724.950,00**							**3.130.724.950,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.130.724.950,00**							**3.130.724.950,00**	
69.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.177.056.950,00**							**2.177.056.950,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Trenggalek						***2.177.056.950,00***							***2.177.056.950,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.177.056.950,00						100 %	2.177.056.950,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.177.056.950,00					-		2.177.056.950,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						2.177.056.950,00					-		2.177.056.950,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.177.056.950,00						1 Unit Kerja	2.177.056.950,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.177.056.950,00							2.177.056.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.177.056.950,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	2.177.056.950,00	PUSKESMAS TRENGGALEK
70.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**897.488.000,00**							**897.488.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Trenggalek						***883.688.000,00***							***883.688.000,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	883.688.000,00						100 Persentase	883.688.000,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	95 %		90 %	90 %	883.688.000,00						90 %	883.688.000,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	92 %		63 %	72 %	883.688.000,00						78 %	883.688.000,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	83 %		66 %	66 %	883.688.000,00						66 %	883.688.000,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	883.688.000,00						100 %	883.688.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	80 %		60.50 %	65 %	883.688.000,00						70 %	883.688.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	883.688.000,00						100 %	883.688.000,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	90.5 %		90.5 %	90.5 %	883.688.000,00						90.5 %	883.688.000,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	883.688.000,00						11 %	883.688.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	883.688.000,00						100 %	883.688.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	883.688.000,00						100 %	883.688.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	883.688.000,00						100 %	883.688.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	883.688.000,00						100 %	883.688.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	883.688.000,00						100 %	883.688.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	883.688.000,00						100 %	883.688.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	883.688.000,00						100 %	883.688.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	883.688.000,00						100 %	883.688.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	883.688.000,00						100 %	883.688.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	883.688.000,00						100 %	883.688.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	883.688.000,00						100 %	883.688.000,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	883.688.000,00						100 %	883.688.000,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	883.688.000,00						0.67 %	883.688.000,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	8.64 %		8.68 %	8.67 %	883.688.000,00						8.66 %	883.688.000,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	98.6 %		98.1 %	98.2 %	883.688.000,00						98.4 %	883.688.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7075 Orang		7075 Orang	7075 Orang	41.100.000,00						7075 Orang	41.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.900.000,00						12 Dokumen	12.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	259.924.000,00						12 Dokumen	259.924.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.800.000,00						12 Dokumen	13.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	22.350.000,00						120 Dokumen	22.350.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	314.832.000,00						12 Dokumen	314.832.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313 Orang		311 Orang	311 Orang	19.132.000,00						311 Orang	19.132.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	260 Orang		260 Orang	260 Orang	13.800.000,00						260 Orang	13.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang		45 Orang	45 Orang	14.400.000,00						45 Orang	14.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7075 Orang		7075 Orang	7075 Orang	41.100.000,00						7075 Orang	41.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.900.000,00						12 Dokumen	12.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	259.924.000,00						12 Dokumen	259.924.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.800.000,00						12 Dokumen	13.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	22.350.000,00						120 Dokumen	22.350.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	314.832.000,00						12 Dokumen	314.832.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313 Orang		311 Orang	311 Orang	19.132.000,00						311 Orang	19.132.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	260 Orang		260 Orang	260 Orang	13.800.000,00						260 Orang	13.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang		45 Orang	45 Orang	14.400.000,00						45 Orang	14.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7075 Orang		7075 Orang	7075 Orang	41.100.000,00						7075 Orang	41.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.900.000,00						12 Dokumen	12.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	259.924.000,00						12 Dokumen	259.924.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.800.000,00						12 Dokumen	13.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	22.350.000,00						120 Dokumen	22.350.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	314.832.000,00						12 Dokumen	314.832.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313 Orang		311 Orang	311 Orang	19.132.000,00						311 Orang	19.132.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	260 Orang		260 Orang	260 Orang	13.800.000,00						260 Orang	13.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang		45 Orang	45 Orang	14.400.000,00						45 Orang	14.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7075 Orang		7075 Orang	7075 Orang	41.100.000,00						7075 Orang	41.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.900.000,00						12 Dokumen	12.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	259.924.000,00						12 Dokumen	259.924.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.800.000,00						12 Dokumen	13.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	22.350.000,00						120 Dokumen	22.350.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	314.832.000,00						12 Dokumen	314.832.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313 Orang		311 Orang	311 Orang	19.132.000,00						311 Orang	19.132.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	260 Orang		260 Orang	260 Orang	13.800.000,00						260 Orang	13.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang		45 Orang	45 Orang	14.400.000,00						45 Orang	14.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7075 Orang		7075 Orang	7075 Orang	41.100.000,00						7075 Orang	41.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.900.000,00						12 Dokumen	12.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	259.924.000,00						12 Dokumen	259.924.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.800.000,00						12 Dokumen	13.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	22.350.000,00						120 Dokumen	22.350.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	314.832.000,00						12 Dokumen	314.832.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313 Orang		311 Orang	311 Orang	19.132.000,00						311 Orang	19.132.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	260 Orang		260 Orang	260 Orang	13.800.000,00						260 Orang	13.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang		45 Orang	45 Orang	14.400.000,00						45 Orang	14.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7075 Orang		7075 Orang	7075 Orang	41.100.000,00						7075 Orang	41.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.900.000,00						12 Dokumen	12.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	259.924.000,00						12 Dokumen	259.924.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.800.000,00						12 Dokumen	13.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	22.350.000,00						120 Dokumen	22.350.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	314.832.000,00						12 Dokumen	314.832.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313 Orang		311 Orang	311 Orang	19.132.000,00						311 Orang	19.132.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	260 Orang		260 Orang	260 Orang	13.800.000,00						260 Orang	13.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang		45 Orang	45 Orang	14.400.000,00						45 Orang	14.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7075 Orang		7075 Orang	7075 Orang	41.100.000,00						7075 Orang	41.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.900.000,00						12 Dokumen	12.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	259.924.000,00						12 Dokumen	259.924.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.800.000,00						12 Dokumen	13.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	22.350.000,00						120 Dokumen	22.350.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	314.832.000,00						12 Dokumen	314.832.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313 Orang		311 Orang	311 Orang	19.132.000,00						311 Orang	19.132.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	260 Orang		260 Orang	260 Orang	13.800.000,00						260 Orang	13.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang		45 Orang	45 Orang	14.400.000,00						45 Orang	14.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7075 Orang		7075 Orang	7075 Orang	41.100.000,00						7075 Orang	41.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.900.000,00						12 Dokumen	12.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	259.924.000,00						12 Dokumen	259.924.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.800.000,00						12 Dokumen	13.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	22.350.000,00						120 Dokumen	22.350.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	314.832.000,00						12 Dokumen	314.832.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313 Orang		311 Orang	311 Orang	19.132.000,00						311 Orang	19.132.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	260 Orang		260 Orang	260 Orang	13.800.000,00						260 Orang	13.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang		45 Orang	45 Orang	14.400.000,00						45 Orang	14.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7075 Orang		7075 Orang	7075 Orang	41.100.000,00						7075 Orang	41.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.900.000,00						12 Dokumen	12.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	259.924.000,00						12 Dokumen	259.924.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.800.000,00						12 Dokumen	13.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	22.350.000,00						120 Dokumen	22.350.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	314.832.000,00						12 Dokumen	314.832.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313 Orang		311 Orang	311 Orang	19.132.000,00						311 Orang	19.132.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	260 Orang		260 Orang	260 Orang	13.800.000,00						260 Orang	13.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang		45 Orang	45 Orang	14.400.000,00						45 Orang	14.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7075 Orang		7075 Orang	7075 Orang	41.100.000,00						7075 Orang	41.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.900.000,00						12 Dokumen	12.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	259.924.000,00						12 Dokumen	259.924.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.800.000,00						12 Dokumen	13.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	22.350.000,00						120 Dokumen	22.350.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	314.832.000,00						12 Dokumen	314.832.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313 Orang		311 Orang	311 Orang	19.132.000,00						311 Orang	19.132.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	260 Orang		260 Orang	260 Orang	13.800.000,00						260 Orang	13.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang		45 Orang	45 Orang	14.400.000,00						45 Orang	14.400.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7075 Orang		7075 Orang	7075 Orang	41.100.000,00						7075 Orang	41.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.900.000,00						12 Dokumen	12.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	259.924.000,00						12 Dokumen	259.924.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.800.000,00						12 Dokumen	13.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	22.350.000,00						120 Dokumen	22.350.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	314.832.000,00						12 Dokumen	314.832.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313 Orang		311 Orang	311 Orang	19.132.000,00						311 Orang	19.132.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	260 Orang		260 Orang	260 Orang	13.800.000,00						260 Orang	13.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang		45 Orang	45 Orang	14.400.000,00						45 Orang	14.400.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7075 Orang		7075 Orang	7075 Orang	41.100.000,00						7075 Orang	41.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.900.000,00						12 Dokumen	12.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	259.924.000,00						12 Dokumen	259.924.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.800.000,00						12 Dokumen	13.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	22.350.000,00						120 Dokumen	22.350.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00						12 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	314.832.000,00						12 Dokumen	314.832.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313 Orang		311 Orang	311 Orang	19.132.000,00						311 Orang	19.132.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	260 Orang		260 Orang	260 Orang	13.800.000,00						260 Orang	13.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang		45 Orang	45 Orang	14.400.000,00						45 Orang	14.400.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						19.132.000,00							19.132.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	313 Orang		311 Orang	337 Orang	19.132.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		311 Orang	19.132.000,00	PUSKESMAS TRENGGALEK
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						41.100.000,00							41.100.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	7075 Orang		7075 Orang	6510 Orang	41.100.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		7075 Orang	41.100.000,00	PUSKESMAS TRENGGALEK
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						14.400.000,00							14.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	45 Orang		45 Orang	71 Orang	14.400.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		45 Orang	14.400.000,00	PUSKESMAS TRENGGALEK
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						13.800.000,00							13.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	260 Orang		260 Orang	307 Orang	13.800.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		260 Orang	13.800.000,00	PUSKESMAS TRENGGALEK
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						259.924.000,00							259.924.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	259.924.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	259.924.000,00	PUSKESMAS TRENGGALEK
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						13.800.000,00							13.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.800.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	13.800.000,00	PUSKESMAS TRENGGALEK
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						22.350.000,00							22.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	120 Dokumen		120 Dokumen	12 Dokumen	22.350.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		120 Dokumen	22.350.000,00	PUSKESMAS TRENGGALEK
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						314.832.000,00							314.832.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	314.832.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	314.832.000,00	PUSKESMAS TRENGGALEK
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						300.000,00							300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	300.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	300.000,00	PUSKESMAS TRENGGALEK
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						12.900.000,00							12.900.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.900.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	12.900.000,00	PUSKESMAS TRENGGALEK
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	121.650.000,00						-	121.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	63.300.000,00						-	63.300.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	121.650.000,00						-	121.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	63.300.000,00						-	63.300.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	121.650.000,00						-	121.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	63.300.000,00						-	63.300.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	121.650.000,00						-	121.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	63.300.000,00						-	63.300.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	121.650.000,00						-	121.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	63.300.000,00						-	63.300.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	121.650.000,00						-	121.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	63.300.000,00						-	63.300.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	121.650.000,00						-	121.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	63.300.000,00						-	63.300.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	121.650.000,00						-	121.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	63.300.000,00						-	63.300.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	121.650.000,00						-	121.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	63.300.000,00						-	63.300.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	121.650.000,00						-	121.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	63.300.000,00						-	63.300.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	121.650.000,00						-	121.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	63.300.000,00						-	63.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						897.488.000,00					-		897.488.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	121.650.000,00						-	121.650.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	63.300.000,00						-	63.300.000,00	
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						63.300.000,00							63.300.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	4849 Orang	63.300.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	63.300.000,00	PUSKESMAS TRENGGALEK
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						121.650.000,00							121.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	121.650.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	121.650.000,00	PUSKESMAS TRENGGALEK
71.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**56.180.000,00**							**56.180.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Trenggalek						***56.180.000,00***							***56.180.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	46 Persentase		38 Persentase	40 Persentase	56.180.000,00						42 Persentase	56.180.000,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		9 %	14 %	56.180.000,00						17 %	56.180.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						56.180.000,00					-		56.180.000,00	
		Tercapainya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						56.180.000,00					-		56.180.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	41 Dokumen		34 Dokumen	36 Dokumen	56.180.000,00						38 Dokumen	56.180.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						56.180.000,00							56.180.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	41 Dokumen		34 Dokumen	36 Dokumen	56.180.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		38 Dokumen	56.180.000,00	PUSKESMAS TRENGGALEK
		PUSKESMAS TUGU						**3.909.448.000,00**							**3.909.448.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.909.448.000,00**							**3.909.448.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.909.448.000,00**							**3.909.448.000,00**	
72.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.940.000.000,00**							**2.940.000.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Tugu						***2.940.000.000,00***							***2.940.000.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.940.000.000,00						100 %	2.940.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.940.000.000,00					-		2.940.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						2.940.000.000,00					-		2.940.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.940.000.000,00						1 Unit Kerja	2.940.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.940.000.000,00							2.940.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.940.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	2.940.000.000,00	PUSKESMAS TUGU
73.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**893.333.500,00**							**893.333.500,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Tugu						***893.333.500,00***							***893.333.500,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	97 Persentase		90 Persentase	92 Persentase	893.333.500,00						94 Persentase	893.333.500,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		55 %	70 %	893.333.500,00						80 %	893.333.500,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	67 %		38 %	47 %	893.333.500,00						53 %	893.333.500,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	62 %		37 %	50 %	893.333.500,00						50 %	893.333.500,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	893.333.500,00						100 %	893.333.500,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	85 %		70 %	72 %	893.333.500,00						75 %	893.333.500,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	893.333.500,00						100 %	893.333.500,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	93.2 %		93.2 %	93.2 %	893.333.500,00						93.2 %	893.333.500,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	893.333.500,00						11 %	893.333.500,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	893.333.500,00						100 %	893.333.500,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	893.333.500,00						100 %	893.333.500,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	893.333.500,00						100 %	893.333.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	893.333.500,00						100 %	893.333.500,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	893.333.500,00						100 %	893.333.500,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	893.333.500,00						100 %	893.333.500,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	893.333.500,00						100 %	893.333.500,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	893.333.500,00						100 %	893.333.500,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	893.333.500,00						100 %	893.333.500,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	893.333.500,00						100 %	893.333.500,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	893.333.500,00						100 %	893.333.500,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	893.333.500,00						100 %	893.333.500,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	893.333.500,00						0.67 %	893.333.500,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	8.54 %		8.58 %	8.57 %	893.333.500,00						8.56 %	893.333.500,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	98.6 %		98.1 %	98.2 %	893.333.500,00						98.4 %	893.333.500,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1103 Orang		1103 Orang	1103 Orang	28.500.000,00						1103 Orang	28.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00						12 Dokumen	21.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	317.559.500,00						12 Dokumen	317.559.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.550.000,00						12 Dokumen	5.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.650.000,00						12 Dokumen	25.650.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.950.000,00						12 Dokumen	1.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	300.769.000,00						16 Dokumen	300.769.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	252 Orang		250 Orang	250 Orang	47.412.000,00						250 Orang	47.412.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		305 Orang	305 Orang	5.250.000,00						305 Orang	5.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang		77 Orang	77 Orang	15.750.000,00						77 Orang	15.750.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1103 Orang		1103 Orang	1103 Orang	28.500.000,00						1103 Orang	28.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00						12 Dokumen	21.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	317.559.500,00						12 Dokumen	317.559.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.550.000,00						12 Dokumen	5.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.650.000,00						12 Dokumen	25.650.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.950.000,00						12 Dokumen	1.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	300.769.000,00						16 Dokumen	300.769.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	252 Orang		250 Orang	250 Orang	47.412.000,00						250 Orang	47.412.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		305 Orang	305 Orang	5.250.000,00						305 Orang	5.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang		77 Orang	77 Orang	15.750.000,00						77 Orang	15.750.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1103 Orang		1103 Orang	1103 Orang	28.500.000,00						1103 Orang	28.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00						12 Dokumen	21.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	317.559.500,00						12 Dokumen	317.559.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.550.000,00						12 Dokumen	5.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.650.000,00						12 Dokumen	25.650.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.950.000,00						12 Dokumen	1.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	300.769.000,00						16 Dokumen	300.769.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	252 Orang		250 Orang	250 Orang	47.412.000,00						250 Orang	47.412.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		305 Orang	305 Orang	5.250.000,00						305 Orang	5.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang		77 Orang	77 Orang	15.750.000,00						77 Orang	15.750.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1103 Orang		1103 Orang	1103 Orang	28.500.000,00						1103 Orang	28.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00						12 Dokumen	21.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	317.559.500,00						12 Dokumen	317.559.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.550.000,00						12 Dokumen	5.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.650.000,00						12 Dokumen	25.650.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.950.000,00						12 Dokumen	1.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	300.769.000,00						16 Dokumen	300.769.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	252 Orang		250 Orang	250 Orang	47.412.000,00						250 Orang	47.412.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		305 Orang	305 Orang	5.250.000,00						305 Orang	5.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang		77 Orang	77 Orang	15.750.000,00						77 Orang	15.750.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1103 Orang		1103 Orang	1103 Orang	28.500.000,00						1103 Orang	28.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00						12 Dokumen	21.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	317.559.500,00						12 Dokumen	317.559.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.550.000,00						12 Dokumen	5.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.650.000,00						12 Dokumen	25.650.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.950.000,00						12 Dokumen	1.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	300.769.000,00						16 Dokumen	300.769.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	252 Orang		250 Orang	250 Orang	47.412.000,00						250 Orang	47.412.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		305 Orang	305 Orang	5.250.000,00						305 Orang	5.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang		77 Orang	77 Orang	15.750.000,00						77 Orang	15.750.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1103 Orang		1103 Orang	1103 Orang	28.500.000,00						1103 Orang	28.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00						12 Dokumen	21.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	317.559.500,00						12 Dokumen	317.559.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.550.000,00						12 Dokumen	5.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.650.000,00						12 Dokumen	25.650.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.950.000,00						12 Dokumen	1.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	300.769.000,00						16 Dokumen	300.769.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	252 Orang		250 Orang	250 Orang	47.412.000,00						250 Orang	47.412.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		305 Orang	305 Orang	5.250.000,00						305 Orang	5.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang		77 Orang	77 Orang	15.750.000,00						77 Orang	15.750.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1103 Orang		1103 Orang	1103 Orang	28.500.000,00						1103 Orang	28.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00						12 Dokumen	21.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	317.559.500,00						12 Dokumen	317.559.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.550.000,00						12 Dokumen	5.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.650.000,00						12 Dokumen	25.650.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.950.000,00						12 Dokumen	1.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	300.769.000,00						16 Dokumen	300.769.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	252 Orang		250 Orang	250 Orang	47.412.000,00						250 Orang	47.412.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		305 Orang	305 Orang	5.250.000,00						305 Orang	5.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang		77 Orang	77 Orang	15.750.000,00						77 Orang	15.750.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1103 Orang		1103 Orang	1103 Orang	28.500.000,00						1103 Orang	28.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00						12 Dokumen	21.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	317.559.500,00						12 Dokumen	317.559.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.550.000,00						12 Dokumen	5.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.650.000,00						12 Dokumen	25.650.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.950.000,00						12 Dokumen	1.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	300.769.000,00						16 Dokumen	300.769.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	252 Orang		250 Orang	250 Orang	47.412.000,00						250 Orang	47.412.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		305 Orang	305 Orang	5.250.000,00						305 Orang	5.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang		77 Orang	77 Orang	15.750.000,00						77 Orang	15.750.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1103 Orang		1103 Orang	1103 Orang	28.500.000,00						1103 Orang	28.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00						12 Dokumen	21.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	317.559.500,00						12 Dokumen	317.559.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.550.000,00						12 Dokumen	5.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.650.000,00						12 Dokumen	25.650.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.950.000,00						12 Dokumen	1.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	300.769.000,00						16 Dokumen	300.769.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	252 Orang		250 Orang	250 Orang	47.412.000,00						250 Orang	47.412.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		305 Orang	305 Orang	5.250.000,00						305 Orang	5.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang		77 Orang	77 Orang	15.750.000,00						77 Orang	15.750.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1103 Orang		1103 Orang	1103 Orang	28.500.000,00						1103 Orang	28.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00						12 Dokumen	21.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	317.559.500,00						12 Dokumen	317.559.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.550.000,00						12 Dokumen	5.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.650.000,00						12 Dokumen	25.650.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.950.000,00						12 Dokumen	1.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	300.769.000,00						16 Dokumen	300.769.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	252 Orang		250 Orang	250 Orang	47.412.000,00						250 Orang	47.412.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		305 Orang	305 Orang	5.250.000,00						305 Orang	5.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang		77 Orang	77 Orang	15.750.000,00						77 Orang	15.750.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1103 Orang		1103 Orang	1103 Orang	28.500.000,00						1103 Orang	28.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00						12 Dokumen	21.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	317.559.500,00						12 Dokumen	317.559.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.550.000,00						12 Dokumen	5.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.650.000,00						12 Dokumen	25.650.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.950.000,00						12 Dokumen	1.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	300.769.000,00						16 Dokumen	300.769.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	252 Orang		250 Orang	250 Orang	47.412.000,00						250 Orang	47.412.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		305 Orang	305 Orang	5.250.000,00						305 Orang	5.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang		77 Orang	77 Orang	15.750.000,00						77 Orang	15.750.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1103 Orang		1103 Orang	1103 Orang	28.500.000,00						1103 Orang	28.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00						12 Dokumen	21.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	317.559.500,00						12 Dokumen	317.559.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.550.000,00						12 Dokumen	5.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.650.000,00						12 Dokumen	25.650.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.950.000,00						12 Dokumen	1.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	300.769.000,00						16 Dokumen	300.769.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	252 Orang		250 Orang	250 Orang	47.412.000,00						250 Orang	47.412.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		305 Orang	305 Orang	5.250.000,00						305 Orang	5.250.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang		77 Orang	77 Orang	15.750.000,00						77 Orang	15.750.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						47.412.000,00							47.412.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	252 Orang		250 Orang	303 Orang	47.412.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		250 Orang	47.412.000,00	PUSKESMAS TUGU
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						28.500.000,00							28.500.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1103 Orang		1103 Orang	3357 Orang	28.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1103 Orang	28.500.000,00	PUSKESMAS TUGU
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						15.750.000,00							15.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	77 Orang		77 Orang	58 Orang	15.750.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		77 Orang	15.750.000,00	PUSKESMAS TUGU
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						5.250.000,00							5.250.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	305 Orang		305 Orang	241 Orang	5.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		305 Orang	5.250.000,00	PUSKESMAS TUGU
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						317.559.500,00							317.559.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	317.559.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	317.559.500,00	PUSKESMAS TUGU
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						5.550.000,00							5.550.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.550.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	5.550.000,00	PUSKESMAS TUGU
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						25.650.000,00							25.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.650.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	25.650.000,00	PUSKESMAS TUGU
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						300.769.000,00							300.769.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	300.769.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		16 Dokumen	300.769.000,00	PUSKESMAS TUGU
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.950.000,00							1.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	1.950.000,00	PUSKESMAS TUGU
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						21.600.000,00							21.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	21.600.000,00	PUSKESMAS TUGU
		Tercapainya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	98.100.000,00						-	98.100.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.243.000,00						-	25.243.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	98.100.000,00						-	98.100.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.243.000,00						-	25.243.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	98.100.000,00						-	98.100.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.243.000,00						-	25.243.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	98.100.000,00						-	98.100.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.243.000,00						-	25.243.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	98.100.000,00						-	98.100.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.243.000,00						-	25.243.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	98.100.000,00						-	98.100.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.243.000,00						-	25.243.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	98.100.000,00						-	98.100.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.243.000,00						-	25.243.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	98.100.000,00						-	98.100.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.243.000,00						-	25.243.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	98.100.000,00						-	98.100.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.243.000,00						-	25.243.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	98.100.000,00						-	98.100.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.243.000,00						-	25.243.000,00	
		Tercapainya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	98.100.000,00						-	98.100.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.243.000,00						-	25.243.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						893.333.500,00					-		893.333.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	98.100.000,00						-	98.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	25.243.000,00						-	25.243.000,00	
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						25.243.000,00							25.243.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	3350 Orang	25.243.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	25.243.000,00	PUSKESMAS TUGU
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						98.100.000,00							98.100.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	98.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	98.100.000,00	PUSKESMAS TUGU
74.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**76.114.500,00**							**76.114.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Tugu						***54.199.500,00***							***54.199.500,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	58 Persentase		50 Persentase	52 Persentase	54.199.500,00						54 Persentase	54.199.500,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		10 %	14 %	54.199.500,00						19 %	54.199.500,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						54.199.500,00					-		54.199.500,00	
		Tercapainya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						54.199.500,00					-		54.199.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	54.199.500,00						12 Dokumen	54.199.500,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						54.199.500,00							54.199.500,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	54.199.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	54.199.500,00	PUSKESMAS TUGU
			-	-		-	-	21.915.000,00						-	21.915.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						21.915.000,00					-		21.915.000,00	
		-						21.915.000,00					-		21.915.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	-	21.915.000,00						-	21.915.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat						21.915.000,00							21.915.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	-		-	12 Dokumen	21.915.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	21.915.000,00	PUSKESMAS TUGU
		PUSKESMAS WATULIMO						**3.756.510.500,00**							**3.455.542.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.756.510.500,00**							**3.455.542.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.756.510.500,00**							**3.455.542.000,00**	
75.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.900.000.000,00**							**2.800.000.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Watulimo						***2.900.000.000,00***							***2.800.000.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.900.000.000,00						100 %	2.800.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.900.000.000,00					-		2.800.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						2.900.000.000,00					-		2.800.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.900.000.000,00						1 Unit Kerja	2.800.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.900.000.000,00							2.800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.900.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	2.800.000.000,00	PUSKESMAS WATULIMO
76.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**827.613.000,00**							**647.926.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Watulimo						***827.613.000,00***							***647.926.000,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	96 Persentase		89 Persentase	90 Persentase	827.613.000,00						94 Persentase	647.926.000,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		40 %	65 %	827.613.000,00						70 %	647.926.000,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	54 %		25 %	34 %	827.613.000,00						40 %	647.926.000,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	80 %		60 %	60 %	827.613.000,00						80 %	647.926.000,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	827.613.000,00						100 %	647.926.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	80 %		60 %	65 %	827.613.000,00						70 %	647.926.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	827.613.000,00						100 %	647.926.000,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	93.4 %		92.7 %	93.4 %	827.613.000,00						93.4 %	647.926.000,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	827.613.000,00						11 %	647.926.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	827.613.000,00						100 %	647.926.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	827.613.000,00						100 %	647.926.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	827.613.000,00						100 %	647.926.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	827.613.000,00						100 %	647.926.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	827.613.000,00						100 %	647.926.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	827.613.000,00						100 %	647.926.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	827.613.000,00						100 %	647.926.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	827.613.000,00						100 %	647.926.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	827.613.000,00						100 %	647.926.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	827.613.000,00						100 %	647.926.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	827.613.000,00						100 %	647.926.000,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	827.613.000,00						100 %	647.926.000,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	827.613.000,00						0.67 %	647.926.000,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	7.04 %		7.08 %	7.07 %	827.613.000,00						7.06 %	647.926.000,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	98.4 %		98.2 %	98.25 %	827.613.000,00						98.3 %	647.926.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5233 Orang		5233 Orang	5233 Orang	13.950.000,00						5233 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	22.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	362.293.000,00						12 Dokumen	266.987.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.450.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.500.000,00						12 Dokumen	8.100.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	296.755.000,00						16 Dokumen	142.144.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang		503 Orang	503 Orang	28.320.000,00						503 Orang	69.280.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 Orang		369 Orang	369 Orang	9.000.000,00						369 Orang	8.775.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang		84 Orang	84 Orang	18.900.000,00						85 Orang	18.900.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5233 Orang		5233 Orang	5233 Orang	13.950.000,00						5233 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	22.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	362.293.000,00						12 Dokumen	266.987.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.450.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.500.000,00						12 Dokumen	8.100.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	296.755.000,00						16 Dokumen	142.144.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang		503 Orang	503 Orang	28.320.000,00						503 Orang	69.280.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 Orang		369 Orang	369 Orang	9.000.000,00						369 Orang	8.775.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang		84 Orang	84 Orang	18.900.000,00						85 Orang	18.900.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5233 Orang		5233 Orang	5233 Orang	13.950.000,00						5233 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	22.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	362.293.000,00						12 Dokumen	266.987.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.450.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.500.000,00						12 Dokumen	8.100.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	296.755.000,00						16 Dokumen	142.144.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang		503 Orang	503 Orang	28.320.000,00						503 Orang	69.280.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 Orang		369 Orang	369 Orang	9.000.000,00						369 Orang	8.775.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang		84 Orang	84 Orang	18.900.000,00						85 Orang	18.900.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5233 Orang		5233 Orang	5233 Orang	13.950.000,00						5233 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	22.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	362.293.000,00						12 Dokumen	266.987.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.450.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.500.000,00						12 Dokumen	8.100.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	296.755.000,00						16 Dokumen	142.144.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang		503 Orang	503 Orang	28.320.000,00						503 Orang	69.280.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 Orang		369 Orang	369 Orang	9.000.000,00						369 Orang	8.775.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang		84 Orang	84 Orang	18.900.000,00						85 Orang	18.900.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5233 Orang		5233 Orang	5233 Orang	13.950.000,00						5233 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	22.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	362.293.000,00						12 Dokumen	266.987.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.450.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.500.000,00						12 Dokumen	8.100.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	296.755.000,00						16 Dokumen	142.144.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang		503 Orang	503 Orang	28.320.000,00						503 Orang	69.280.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 Orang		369 Orang	369 Orang	9.000.000,00						369 Orang	8.775.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang		84 Orang	84 Orang	18.900.000,00						85 Orang	18.900.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5233 Orang		5233 Orang	5233 Orang	13.950.000,00						5233 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	22.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	362.293.000,00						12 Dokumen	266.987.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.450.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.500.000,00						12 Dokumen	8.100.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	296.755.000,00						16 Dokumen	142.144.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang		503 Orang	503 Orang	28.320.000,00						503 Orang	69.280.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 Orang		369 Orang	369 Orang	9.000.000,00						369 Orang	8.775.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang		84 Orang	84 Orang	18.900.000,00						85 Orang	18.900.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5233 Orang		5233 Orang	5233 Orang	13.950.000,00						5233 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	22.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	362.293.000,00						12 Dokumen	266.987.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.450.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.500.000,00						12 Dokumen	8.100.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	296.755.000,00						16 Dokumen	142.144.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang		503 Orang	503 Orang	28.320.000,00						503 Orang	69.280.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 Orang		369 Orang	369 Orang	9.000.000,00						369 Orang	8.775.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang		84 Orang	84 Orang	18.900.000,00						85 Orang	18.900.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5233 Orang		5233 Orang	5233 Orang	13.950.000,00						5233 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	22.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	362.293.000,00						12 Dokumen	266.987.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.450.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.500.000,00						12 Dokumen	8.100.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	296.755.000,00						16 Dokumen	142.144.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang		503 Orang	503 Orang	28.320.000,00						503 Orang	69.280.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 Orang		369 Orang	369 Orang	9.000.000,00						369 Orang	8.775.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang		84 Orang	84 Orang	18.900.000,00						85 Orang	18.900.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5233 Orang		5233 Orang	5233 Orang	13.950.000,00						5233 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	22.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	362.293.000,00						12 Dokumen	266.987.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.450.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.500.000,00						12 Dokumen	8.100.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	296.755.000,00						16 Dokumen	142.144.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang		503 Orang	503 Orang	28.320.000,00						503 Orang	69.280.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 Orang		369 Orang	369 Orang	9.000.000,00						369 Orang	8.775.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang		84 Orang	84 Orang	18.900.000,00						85 Orang	18.900.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5233 Orang		5233 Orang	5233 Orang	13.950.000,00						5233 Orang	11.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	22.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	362.293.000,00						12 Dokumen	266.987.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.450.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.500.000,00						12 Dokumen	8.100.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	296.755.000,00						16 Dokumen	142.144.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang		503 Orang	503 Orang	28.320.000,00						503 Orang	69.280.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 Orang		369 Orang	369 Orang	9.000.000,00						369 Orang	8.775.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang		84 Orang	84 Orang	18.900.000,00						85 Orang	18.900.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5233 Orang		5233 Orang	5233 Orang	13.950.000,00						5233 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	22.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	362.293.000,00						12 Dokumen	266.987.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.450.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.500.000,00						12 Dokumen	8.100.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	296.755.000,00						16 Dokumen	142.144.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang		503 Orang	503 Orang	28.320.000,00						503 Orang	69.280.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 Orang		369 Orang	369 Orang	9.000.000,00						369 Orang	8.775.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang		84 Orang	84 Orang	18.900.000,00						85 Orang	18.900.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5233 Orang		5233 Orang	5233 Orang	13.950.000,00						5233 Orang	11.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	22.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	362.293.000,00						12 Dokumen	266.987.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.450.000,00						12 Dokumen	14.550.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.500.000,00						12 Dokumen	8.100.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00						12 Dokumen	675.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	296.755.000,00						16 Dokumen	142.144.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang		503 Orang	503 Orang	28.320.000,00						503 Orang	69.280.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 Orang		369 Orang	369 Orang	9.000.000,00						369 Orang	8.775.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang		84 Orang	84 Orang	18.900.000,00						85 Orang	18.900.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						28.320.000,00							69.280.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	505 Orang		503 Orang	441 Orang	28.320.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		503 Orang	69.280.000,00	PUSKESMAS WATULIMO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						13.950.000,00							11.400.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5233 Orang		5233 Orang	4743 Orang	13.950.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		5233 Orang	11.400.000,00	PUSKESMAS WATULIMO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						18.900.000,00							18.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	85 Orang		84 Orang	78 Orang	18.900.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		85 Orang	18.900.000,00	PUSKESMAS WATULIMO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						9.000.000,00							8.775.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	369 Orang		369 Orang	311 Orang	9.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		369 Orang	8.775.000,00	PUSKESMAS WATULIMO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						362.293.000,00							266.987.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	362.293.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	266.987.000,00	PUSKESMAS WATULIMO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						3.450.000,00							14.550.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.450.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	14.550.000,00	PUSKESMAS WATULIMO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						25.500.000,00							8.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.500.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	8.100.000,00	PUSKESMAS WATULIMO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						296.755.000,00							142.144.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	296.755.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		16 Dokumen	142.144.000,00	PUSKESMAS WATULIMO
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						1.050.000,00							675.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.050.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	675.000,00	PUSKESMAS WATULIMO
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						10.500.000,00							22.950.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	22.950.000,00	PUSKESMAS WATULIMO
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	12.300.000,00						-	17.364.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	34.050.000,00						-	65.301.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.545.000,00						-	1.500.000,00	
		Tercapainya pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	12.300.000,00						-	17.364.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	34.050.000,00						-	65.301.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.545.000,00						-	1.500.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	12.300.000,00						-	17.364.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	34.050.000,00						-	65.301.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.545.000,00						-	1.500.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	12.300.000,00						-	17.364.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	34.050.000,00						-	65.301.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.545.000,00						-	1.500.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	12.300.000,00						-	17.364.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	34.050.000,00						-	65.301.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.545.000,00						-	1.500.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	12.300.000,00						-	17.364.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	34.050.000,00						-	65.301.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.545.000,00						-	1.500.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	12.300.000,00						-	17.364.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	34.050.000,00						-	65.301.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.545.000,00						-	1.500.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	12.300.000,00						-	17.364.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	34.050.000,00						-	65.301.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.545.000,00						-	1.500.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	12.300.000,00						-	17.364.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	34.050.000,00						-	65.301.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.545.000,00						-	1.500.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	12.300.000,00						-	17.364.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	34.050.000,00						-	65.301.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.545.000,00						-	1.500.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	12.300.000,00						-	17.364.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	34.050.000,00						-	65.301.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.545.000,00						-	1.500.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						827.613.000,00					-		647.926.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	12.300.000,00						-	17.364.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	34.050.000,00						-	65.301.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	11.545.000,00						-	1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						11.545.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	78 Orang	11.545.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	1.500.000,00	PUSKESMAS WATULIMO
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						12.300.000,00							17.364.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	12.300.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	17.364.000,00	PUSKESMAS WATULIMO
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						34.050.000,00							65.301.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	34.050.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	65.301.000,00	PUSKESMAS WATULIMO
77.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**28.897.500,00**							**7.616.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Watulimo						***28.897.500,00***							***7.616.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	88 Persentase		80 Persentase	82 Persentase	28.897.500,00						84 Persentase	7.616.000,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		9 %	13 %	28.897.500,00						19 %	7.616.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						28.897.500,00					-		7.616.000,00	
		Tercapainya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						28.897.500,00					-		7.616.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	28.897.500,00						12 Dokumen	7.616.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						28.897.500,00							7.616.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	28.897.500,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	7.616.000,00	PUSKESMAS WATULIMO
		PUSKESMAS SLAWE						**3.635.295.000,00**							**3.580.505.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.635.295.000,00**							**3.580.505.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.635.295.000,00**							**3.580.505.000,00**	
78.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.900.000.000,00**							**2.900.000.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Puskesmas Slawe						***2.900.000.000,00***							***2.900.000.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.900.000.000,00						100 %	2.900.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.900.000.000,00					-		2.900.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD						2.900.000.000,00					-		2.900.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.900.000.000,00						1 Unit Kerja	2.900.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.900.000.000,00							2.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.900.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Slawe || 1	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	2.900.000.000,00	PUSKESMAS SLAWE
79.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**696.192.500,00**							**672.889.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas Slawe						***696.192.500,00***							***672.889.000,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	88 Persentase		75 Persentase	78 Persentase	696.192.500,00						80 Persentase	672.889.000,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		45 %	65 %	696.192.500,00						75 %	672.889.000,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	66 %		37 %	46 %	696.192.500,00						52 %	672.889.000,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	57 %		43 %	43 %	696.192.500,00						43 %	672.889.000,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	696.192.500,00						100 %	672.889.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	85 %		70.80 %	71 %	696.192.500,00						75 %	672.889.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	696.192.500,00						100 %	672.889.000,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	92.1 %		90.1 %	90.1 %	696.192.500,00						92.1 %	672.889.000,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		11.7 %	11.4 %	696.192.500,00						11 %	672.889.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	696.192.500,00						100 %	672.889.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	696.192.500,00						100 %	672.889.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	696.192.500,00						100 %	672.889.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	696.192.500,00						100 %	672.889.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	696.192.500,00						100 %	672.889.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	696.192.500,00						100 %	672.889.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	696.192.500,00						100 %	672.889.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	696.192.500,00						100 %	672.889.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	696.192.500,00						100 %	672.889.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	696.192.500,00						100 %	672.889.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	696.192.500,00						100 %	672.889.000,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	696.192.500,00						100 %	672.889.000,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	696.192.500,00						0.67 %	672.889.000,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	6.04 %		6.08 %	6.07 %	696.192.500,00						6.06 %	672.889.000,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	90 %		88 %	88.5 %	696.192.500,00						89 %	672.889.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3235 Orang		3235 Orang	3235 Orang	10.200.000,00						3235 Orang	10.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.950.000,00						12 Dokumen	12.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	240.710.500,00						12 Dokumen	231.637.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	7.950.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	225.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	283.964.000,00						16 Dokumen	143.516.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296 Orang		294 Orang	294 Orang	19.824.000,00						294 Orang	63.661.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	329 Orang		329 Orang	329 Orang	12.150.000,00						329 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang		58 Orang	58 Orang	9.000.000,00						60 Orang	25.200.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3235 Orang		3235 Orang	3235 Orang	10.200.000,00						3235 Orang	10.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.950.000,00						12 Dokumen	12.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	240.710.500,00						12 Dokumen	231.637.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	7.950.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	225.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	283.964.000,00						16 Dokumen	143.516.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296 Orang		294 Orang	294 Orang	19.824.000,00						294 Orang	63.661.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	329 Orang		329 Orang	329 Orang	12.150.000,00						329 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang		58 Orang	58 Orang	9.000.000,00						60 Orang	25.200.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3235 Orang		3235 Orang	3235 Orang	10.200.000,00						3235 Orang	10.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.950.000,00						12 Dokumen	12.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	240.710.500,00						12 Dokumen	231.637.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	7.950.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	225.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	283.964.000,00						16 Dokumen	143.516.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296 Orang		294 Orang	294 Orang	19.824.000,00						294 Orang	63.661.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	329 Orang		329 Orang	329 Orang	12.150.000,00						329 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang		58 Orang	58 Orang	9.000.000,00						60 Orang	25.200.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3235 Orang		3235 Orang	3235 Orang	10.200.000,00						3235 Orang	10.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.950.000,00						12 Dokumen	12.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	240.710.500,00						12 Dokumen	231.637.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	7.950.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	225.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	283.964.000,00						16 Dokumen	143.516.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296 Orang		294 Orang	294 Orang	19.824.000,00						294 Orang	63.661.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	329 Orang		329 Orang	329 Orang	12.150.000,00						329 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang		58 Orang	58 Orang	9.000.000,00						60 Orang	25.200.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3235 Orang		3235 Orang	3235 Orang	10.200.000,00						3235 Orang	10.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.950.000,00						12 Dokumen	12.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	240.710.500,00						12 Dokumen	231.637.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	7.950.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	225.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	283.964.000,00						16 Dokumen	143.516.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296 Orang		294 Orang	294 Orang	19.824.000,00						294 Orang	63.661.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	329 Orang		329 Orang	329 Orang	12.150.000,00						329 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang		58 Orang	58 Orang	9.000.000,00						60 Orang	25.200.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3235 Orang		3235 Orang	3235 Orang	10.200.000,00						3235 Orang	10.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.950.000,00						12 Dokumen	12.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	240.710.500,00						12 Dokumen	231.637.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	7.950.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	225.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	283.964.000,00						16 Dokumen	143.516.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296 Orang		294 Orang	294 Orang	19.824.000,00						294 Orang	63.661.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	329 Orang		329 Orang	329 Orang	12.150.000,00						329 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang		58 Orang	58 Orang	9.000.000,00						60 Orang	25.200.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3235 Orang		3235 Orang	3235 Orang	10.200.000,00						3235 Orang	10.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.950.000,00						12 Dokumen	12.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	240.710.500,00						12 Dokumen	231.637.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	7.950.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	225.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	283.964.000,00						16 Dokumen	143.516.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296 Orang		294 Orang	294 Orang	19.824.000,00						294 Orang	63.661.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	329 Orang		329 Orang	329 Orang	12.150.000,00						329 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang		58 Orang	58 Orang	9.000.000,00						60 Orang	25.200.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3235 Orang		3235 Orang	3235 Orang	10.200.000,00						3235 Orang	10.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.950.000,00						12 Dokumen	12.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	240.710.500,00						12 Dokumen	231.637.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	7.950.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	225.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	283.964.000,00						16 Dokumen	143.516.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296 Orang		294 Orang	294 Orang	19.824.000,00						294 Orang	63.661.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	329 Orang		329 Orang	329 Orang	12.150.000,00						329 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang		58 Orang	58 Orang	9.000.000,00						60 Orang	25.200.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3235 Orang		3235 Orang	3235 Orang	10.200.000,00						3235 Orang	10.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.950.000,00						12 Dokumen	12.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	240.710.500,00						12 Dokumen	231.637.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	7.950.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	225.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	283.964.000,00						16 Dokumen	143.516.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296 Orang		294 Orang	294 Orang	19.824.000,00						294 Orang	63.661.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	329 Orang		329 Orang	329 Orang	12.150.000,00						329 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang		58 Orang	58 Orang	9.000.000,00						60 Orang	25.200.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3235 Orang		3235 Orang	3235 Orang	10.200.000,00						3235 Orang	10.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.950.000,00						12 Dokumen	12.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	240.710.500,00						12 Dokumen	231.637.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	7.950.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	225.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	283.964.000,00						16 Dokumen	143.516.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296 Orang		294 Orang	294 Orang	19.824.000,00						294 Orang	63.661.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	329 Orang		329 Orang	329 Orang	12.150.000,00						329 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang		58 Orang	58 Orang	9.000.000,00						60 Orang	25.200.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3235 Orang		3235 Orang	3235 Orang	10.200.000,00						3235 Orang	10.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.950.000,00						12 Dokumen	12.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	240.710.500,00						12 Dokumen	231.637.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	7.950.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	225.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	283.964.000,00						16 Dokumen	143.516.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296 Orang		294 Orang	294 Orang	19.824.000,00						294 Orang	63.661.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	329 Orang		329 Orang	329 Orang	12.150.000,00						329 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang		58 Orang	58 Orang	9.000.000,00						60 Orang	25.200.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3235 Orang		3235 Orang	3235 Orang	10.200.000,00						3235 Orang	10.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.950.000,00						12 Dokumen	12.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	240.710.500,00						12 Dokumen	231.637.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00						12 Dokumen	9.450.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00						12 Dokumen	7.950.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00						12 Dokumen	225.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	283.964.000,00						16 Dokumen	143.516.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296 Orang		294 Orang	294 Orang	19.824.000,00						294 Orang	63.661.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	329 Orang		329 Orang	329 Orang	12.150.000,00						329 Orang	8.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang		58 Orang	58 Orang	9.000.000,00						60 Orang	25.200.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						19.824.000,00							63.661.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	296 Orang		294 Orang	330 Orang	19.824.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		294 Orang	63.661.000,00	PUSKESMAS SLAWE
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						10.200.000,00							10.200.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3235 Orang		3235 Orang	2801 Orang	10.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Slawe || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3235 Orang	10.200.000,00	PUSKESMAS SLAWE
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						9.000.000,00							25.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	60 Orang		58 Orang	61 Orang	9.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Slawe || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		60 Orang	25.200.000,00	PUSKESMAS SLAWE
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						12.150.000,00							8.400.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	329 Orang		329 Orang	238 Orang	12.150.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Slawe || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		329 Orang	8.400.000,00	PUSKESMAS SLAWE
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						240.710.500,00							231.637.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	240.710.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Slawe || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	231.637.000,00	PUSKESMAS SLAWE
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						9.600.000,00							9.450.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	9.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Slawe || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	9.450.000,00	PUSKESMAS SLAWE
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						10.500.000,00							7.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Slawe || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	7.950.000,00	PUSKESMAS SLAWE
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						283.964.000,00							143.516.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	283.964.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Slawe || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		16 Dokumen	143.516.000,00	PUSKESMAS SLAWE
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						150.000,00							225.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	150.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Slawe || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	225.000,00	PUSKESMAS SLAWE
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						13.950.000,00							12.300.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	13.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Slawe || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	12.300.000,00	PUSKESMAS SLAWE
		Tercapainya warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	13.350.000,00						-	23.181.792,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	70.500.000,00						-	122.168.208,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.294.000,00						-	15.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan balita sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	13.350.000,00						-	23.181.792,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	70.500.000,00						-	122.168.208,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.294.000,00						-	15.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	13.350.000,00						-	23.181.792,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	70.500.000,00						-	122.168.208,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.294.000,00						-	15.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	13.350.000,00						-	23.181.792,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	70.500.000,00						-	122.168.208,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.294.000,00						-	15.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	13.350.000,00						-	23.181.792,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	70.500.000,00						-	122.168.208,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.294.000,00						-	15.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	13.350.000,00						-	23.181.792,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	70.500.000,00						-	122.168.208,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.294.000,00						-	15.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	13.350.000,00						-	23.181.792,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	70.500.000,00						-	122.168.208,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.294.000,00						-	15.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	13.350.000,00						-	23.181.792,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	70.500.000,00						-	122.168.208,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.294.000,00						-	15.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	13.350.000,00						-	23.181.792,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	70.500.000,00						-	122.168.208,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.294.000,00						-	15.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	13.350.000,00						-	23.181.792,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	70.500.000,00						-	122.168.208,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.294.000,00						-	15.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	13.350.000,00						-	23.181.792,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	70.500.000,00						-	122.168.208,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.294.000,00						-	15.000.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar						696.192.500,00					-		672.889.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	13.350.000,00						-	23.181.792,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	70.500.000,00						-	122.168.208,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	2.294.000,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						2.294.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	61 Orang	2.294.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Slawe || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	15.000.000,00	PUSKESMAS SLAWE
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						13.350.000,00							23.181.792,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	13.350.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Slawe || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	23.181.792,00	PUSKESMAS SLAWE
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						70.500.000,00							122.168.208,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	70.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Slawe || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	122.168.208,00	PUSKESMAS SLAWE
80.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**39.102.500,00**							**7.616.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Puskesmas Slawe						***39.102.500,00***							***7.616.000,00***	
			999.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	90 Persentase		82 Persentase	84 Persentase	39.102.500,00						86 Persentase	7.616.000,00	
			999.Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	33 %		8 %	12 %	39.102.500,00						18 %	7.616.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						39.102.500,00					-		7.616.000,00	
		Tercapainya Masyarakat Bidang Kesehatan yang diberdayakan						39.102.500,00					-		7.616.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	39.102.500,00						12 Dokumen	7.616.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						39.102.500,00							7.616.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	39.102.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Slawe || 1	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	7.616.000,00	PUSKESMAS SLAWE
		UPT INSTALASI FARMASI						**170.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**170.000.000,00**							**350.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**170.000.000,00**							**350.000.000,00**	
81.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**36.878.040.400,00**							**56.619.429.879,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***170.000.000,00***							***350.000.000,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	95 Persentase		85 Persentase	90 Persentase	170.000.000,00						93 Persentase	350.000.000,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		60 %	70 %	170.000.000,00						80 %	350.000.000,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	75 %		46 %	55 %	170.000.000,00						61 %	350.000.000,00	
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	80 %		47 %	54 %	170.000.000,00						61 %	350.000.000,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	350.000.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	85 %		65 %	70 %	170.000.000,00						75 %	350.000.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	92 %		89 %	90 %	170.000.000,00						90.5 %	350.000.000,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		12 %	12 %	170.000.000,00						11 %	350.000.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	170.000.000,00						100 %	350.000.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	170.000.000,00						100 %	350.000.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	170.000.000,00						100 %	350.000.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	350.000.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	350.000.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	350.000.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	350.000.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	350.000.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	350.000.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	350.000.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	350.000.000,00	
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	350.000.000,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	170.000.000,00						0.67 %	350.000.000,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	10.40 %		10.80 %	10.70 %	170.000.000,00						10.60 %	350.000.000,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	94.60 %		94.20 %	94.30 %	170.000.000,00						94.40 %	350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						31.092.805.000,00					Masyarakat		41.012.990.205,00	
		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						31.092.805.000,00					Masyarakat		41.012.990.205,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.820.000.000,00						3 Dokumen	1.773.857.000,00	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						170.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Dokumen	350.000.000,00	UPT INSTALASI FARMASI
		UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH						**1.500.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.500.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.500.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
82.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**36.878.040.400,00**							**56.619.429.879,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.500.000.000,00***							***1.000.000.000,00***	
			999.Cakupan imunisasi bayi lengkap	95 Persentase		85 Persentase	90 Persentase	1.500.000.000,00						93 Persentase	1.000.000.000,00	
			999.Cakupan penemuan kasus TB	90 %		60 %	70 %	1.500.000.000,00						80 %	1.000.000.000,00	
			999.Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	75 %		46 %	55 %	1.500.000.000,00						61 %	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	80 %		47 %	54 %	1.500.000.000,00						61 %	1.000.000.000,00	
			999.Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	100 %		100 %	100 %	1.500.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	85 %		65 %	70 %	1.500.000.000,00						75 %	1.000.000.000,00	
			999.Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	100 %		100 %	100 %	1.500.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
			999.Persentase lanjut usia yang mandiri	92 %		89 %	90 %	1.500.000.000,00						90.5 %	1.000.000.000,00	
			999.Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	10 %		12 %	12 %	1.500.000.000,00						11 %	1.000.000.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		84 %	100 %	1.500.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100 %		75 %	100 %	1.500.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100 %		70 %	100 %	1.500.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.500.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.500.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia	100 %		100 %	100 %	1.500.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.500.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.500.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.500.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.500.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
			999.Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.500.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.500.000.000,00						100 %	1.000.000.000,00	
			999.Prevalensi Depresi pada usia >=15 tahun	0.65 %		0.69 %	0.68 %	1.500.000.000,00						0.67 %	1.000.000.000,00	
			999.Prevalensi Obesitas > 18 tahun	10.40 %		10.80 %	10.70 %	1.500.000.000,00						10.60 %	1.000.000.000,00	
			999.Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	94.60 %		94.20 %	94.30 %	1.500.000.000,00						94.40 %	1.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						31.092.805.000,00					Masyarakat		41.012.990.205,00	
		Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						31.092.805.000,00					Masyarakat		41.012.990.205,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.820.000.000,00						3 Dokumen	1.773.857.000,00	
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						1.500.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Dokumen	1.000.000.000,00	UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO						**203.056.029.539,00**							**208.971.078.687,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**203.056.029.539,00**							**208.971.078.687,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**203.056.029.539,00**							**208.971.078.687,00**	
83.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**199.023.729.539,00**							**206.724.424.287,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah RSUD dr. Soedomo						***199.023.729.539,00***							***206.724.424.287,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		80 %	85 %	199.023.729.539,00						90 %	206.724.424.287,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	199.023.729.539,00						100 %	206.724.424.287,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98 %		98 %	98 %	199.023.729.539,00						98 %	206.724.424.287,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						49.061.608.339,00					-		53.104.092.368,00	
		Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan						49.061.608.339,00					-		53.104.092.368,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	884 Orang/bulan		817 Orang/bulan	833 Orang/bulan	49.061.608.339,00						850 Orang/bulan	53.104.092.368,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						49.061.608.339,00							53.104.092.368,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	884 Orang/bulan		817 Orang/bulan	833 Orang/bulan	49.061.608.339,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		850 Orang/bulan	53.104.092.368,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						149.962.121.200,00					-		153.620.331.919,00	
		Meningkatnya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD dr. Soedomo						149.962.121.200,00					-		153.620.331.919,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	149.962.121.200,00						1 Unit Kerja	153.620.331.919,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						149.962.121.200,00							153.620.331.919,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	149.962.121.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	153.620.331.919,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
84.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**3.850.000.000,00**							**1.658.293.200,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat RSUD dr. Soedomo						***3.850.000.000,00***							***1.658.293.200,00***	
			999.Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	3.850.000.000,00						100 %	1.658.293.200,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						3.850.000.000,00					-		1.658.293.200,00	
		Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP						3.850.000.000,00					-		1.658.293.200,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		2 Unit	10 Unit	500.000.000,00						15 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.350.000.000,00						1 Unit	658.293.200,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						500.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	25 Unit		2 Unit	10 Unit	500.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		15 Unit	1.000.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						3.350.000.000,00							658.293.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.350.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Unit	658.293.200,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO
85.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**182.300.000,00**							**588.361.200,00**	
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan RSUD dr. Soedomo						***182.300.000,00***							***588.361.200,00***	
			999.Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	60 Persentase		60 Persentase	60 Persentase	182.300.000,00						60 Persentase	588.361.200,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						182.300.000,00					-		588.361.200,00	
		Terlaksananya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan						182.300.000,00					-		588.361.200,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	20 Orang		20 Orang	20 Orang	182.300.000,00						20 Orang	588.361.200,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						182.300.000,00							588.361.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	20 Orang		20 Orang	20 Orang	182.300.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		20 Orang	588.361.200,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL						**22.874.155.775,00**							**26.669.116.419,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.874.155.775,00**							**26.669.116.419,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**22.874.155.775,00**							**26.669.116.419,00**	
86.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**17.306.155.775,00**							**20.999.736.819,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah RSUD Panggul						***17.306.155.775,00***							***20.999.736.819,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	17.306.155.775,00						100 %	20.999.736.819,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	17.306.155.775,00						100 %	20.999.736.819,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %		100 %	100 %	17.306.155.775,00						100 %	20.999.736.819,00	
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.306.155.775,00					-		7.999.068.838,00	
		Terselesaikannya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai target.						7.306.155.775,00					-		7.999.068.838,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan		87 Orang/bulan	125 Orang/bulan	7.306.155.775,00						157 Orang/bulan	7.999.068.838,00	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.306.155.775,00							7.999.068.838,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/bulan		87 Orang/bulan	125 Orang/bulan	7.306.155.775,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Wonocoyo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		157 Orang/bulan	7.999.068.838,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						10.000.000.000,00					-		13.000.667.981,00	
		Meningkatnya Pelayanan BLUD RSUD Panggul						10.000.000.000,00					-		13.000.667.981,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	10.000.000.000,00						1 Unit Kerja	13.000.667.981,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						10.000.000.000,00							13.000.667.981,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	10.000.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Wonocoyo || 1	Pendapatan dari BLUD	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit Kerja	13.000.667.981,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL
87.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**5.292.992.440,00**							**5.473.259.200,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat RSUD Panggul						***5.292.992.440,00***							***5.473.259.200,00***	
			999.Persentase Pelayanan dan Penunjang Pelayanan yang dilaksanakan	99 %		93 %	98 %	5.292.992.440,00						99 %	5.473.259.200,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						2.901.242.440,00					-		3.957.759.200,00	
		Terselenggara penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP.						2.901.242.440,00					-		3.957.759.200,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit		14 Unit	5 Unit	1.874.992.440,00						5 Unit	1.157.759.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket		0 Paket	3 Paket	826.250.000,00						3 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	2.500.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						1.874.992.440,00							1.157.759.200,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	5 Unit		14 Unit	5 Unit	1.874.992.440,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Wonocoyo || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		5 Unit	1.157.759.200,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						200.000.000,00							2.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit		0 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Wonocoyo || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Unit	2.500.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						826.250.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3 Paket		0 Paket	3 Paket	826.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Wonocoyo || 1	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Paket	300.000.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2.391.750.000,00					-		1.515.500.000,00	
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD kepada Masyarakat						2.391.750.000,00					-		1.515.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.391.750.000,00						1 Dokumen	1.515.500.000,00	
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit						2.391.750.000,00							1.515.500.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.391.750.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Wonocoyo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	1.515.500.000,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL
88.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**275.007.560,00**							**196.120.400,00**	
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan RSUD Panggul						***275.007.560,00***							***196.120.400,00***	
			999.Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	97 Persentase		95 Persentase	97 Persentase	275.007.560,00						97 Persentase	196.120.400,00	
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						275.007.560,00					-		196.120.400,00	
		Tercapainya Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Kompetensi						275.007.560,00					-		196.120.400,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	5 Orang		21 Orang	10 Orang	275.007.560,00						10 Orang	196.120.400,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						275.007.560,00							196.120.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	5 Orang		21 Orang	10 Orang	275.007.560,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Panggul || Desa Wonocoyo || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		10 Orang	196.120.400,00	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANGGUL
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						**124.644.379.362,00**							**1.581.450.679.078.636,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**121.573.156.487,39**							**91.424.840.323,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**121.573.156.487,39**							**91.424.840.323,00**	
89.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**18.990.413.770,00**							**16.329.554.900,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***18.910.413.770,00***							***16.279.554.900,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	18.910.413.770,00						100 %	16.279.554.900,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	18.910.413.770,00						100 %	16.279.554.900,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99.75 %		99.71 %	99.72 %	18.910.413.770,00						99.73 %	16.279.554.900,00	
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						45.000.000,00					Aparatur SIpil negara		50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						45.000.000,00					Aparatur SIpil negara		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00						6 Dokumen	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	20.000.000,00						6 Laporan	25.000.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Laporan	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.808.234.410,00					Aparatur SIpil negara		12.613.600.921,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.808.234.410,00					Aparatur SIpil negara		12.613.600.921,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	130.080.000,00						12 Dokumen	47.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		98 Orang/bulan	100 Orang/bulan	15.678.154.410,00						100 Orang/bulan	12.566.200.921,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						15.678.154.410,00							12.566.200.921,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		98 Orang/bulan	100 Orang/bulan	15.678.154.410,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		100 Orang/bulan	12.566.200.921,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						130.080.000,00							47.400.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	130.080.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	47.400.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						19.200.000,00					Pemerintah kabupaten Trenggalek		31.440.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						19.200.000,00					Pemerintah kabupaten Trenggalek		31.440.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	19.200.000,00						2 Laporan	31.440.000,00	
	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						19.200.000,00							31.440.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	19.200.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	31.440.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						15.000.000,00					Aparatur SIpil negara		20.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						15.000.000,00					Aparatur SIpil negara		20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00						4 Dokumen	20.000.000,00	
	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						390.000.000,00					Aparatur SIpil negara		469.492.179,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						390.000.000,00					Aparatur SIpil negara		469.492.179,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		5 Paket	2 Paket	350.000.000,00						2 Paket	414.492.179,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20.000.000,00						2 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	15.000.000,00	
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Paket	15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						350.000.000,00							414.492.179,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		5 Paket	5 Paket	350.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	414.492.179,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.323.187.072,01					Pemerintah kabupaten Trenggalek		101.440.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.323.187.072,01					Pemerintah kabupaten Trenggalek		101.440.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		21 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	640.000.000,00						2 Unit	66.440.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	3 Unit	663.187.072,01						3 Unit	25.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						640.000.000,00							66.440.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	640.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	66.440.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						20.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		21 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	10.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						663.187.072,01							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	3 Unit	663.187.072,01	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Unit	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.074.317.677,00					Pemerintah kabupaten Trenggalek		2.668.581.800,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.074.317.677,00					Pemerintah kabupaten Trenggalek		2.668.581.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	217.854.047,00						12 Laporan	211.908.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	856.463.630,00						5 Laporan	2.456.673.200,00	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						217.854.047,00							211.908.600,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	217.854.047,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	211.908.600,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						856.463.630,00							2.456.673.200,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	856.463.630,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Laporan	2.456.673.200,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						315.474.610,99					Pemerintah kabupaten Trenggalek		375.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						315.474.610,99					Pemerintah kabupaten Trenggalek		375.000.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	120.000.000,00						5 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00						1 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		12 Unit	10 Unit	145.474.610,99						10 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						145.474.610,99							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		12 Unit	10 Unit	145.474.610,99	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Unit	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						120.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	120.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Unit	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
90.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**4.731.222.872,40**							**3.150.000.000,00**	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi						***4.731.222.872,40***							***2.650.000.000,00***	
			999.Persentase Kondisi Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	59.67 %		58.55 %	58.83 %	4.731.222.872,40						59.11 %	2.650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Pembangunan/ Pemeliharaan/Perkuatan Tebing Kali/Sungai dan Bangunan Lainnya Sebagai Pengendali Banjir	35.77 %		34.73 %	34.99 %	4.731.222.872,40						35.25 %	2.650.000.000,00	
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.672.115.167,40					Masyarakat		1.150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						1.672.115.167,40					Masyarakat		1.150.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	81.685.244,40						1 Lembaga	50.000.000,00	
			Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.035 KM		0.035 KM	0.035 KM	665.429.923,00						0.035 KM	400.000.000,00	
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.1 KM		0.1 KM	0.1 KM	50.000.000,00						0.1 KM	100.000.000,00	
			Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0.1 KM		0.1 KM	0.1 KM	875.000.000,00						0.1 KM	600.000.000,00	
	1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota						81.685.244,40							50.000.000,00	
		Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	81.685.244,40	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Lembaga	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	0.1 KM		0.1 KM	0,05 KM	50.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		0.1 KM	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing						665.429.923,00							400.000.000,00	
		Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	0.035 KM		0.035 KM	0,1 KM	665.429.923,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		0.035 KM	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai						875.000.000,00							600.000.000,00	
		Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	0.1 KM		0.1 KM	0,28 KM	875.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		0.1 KM	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.059.107.705,00					Masyarakat		2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.059.107.705,00					Masyarakat		2.000.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5 KM		0.5 KM	0.5 KM	600.000.000,00						0.5 KM	1.000.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.25 KM		0.25 KM	0.25 KM	1.349.107.705,00						0.25 KM	500.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.2 KM		0.2 KM	0.2 KM	1.110.000.000,00						0.2 KM	500.000.000,00	
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						1.110.000.000,00							500.000.000,00	
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.2 KM		0.2 KM	0,5 KM	1.110.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		0.2 KM	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						1.349.107.705,00							500.000.000,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.25 KM		0.25 KM	0,5 KM	1.349.107.705,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		0.25 KM	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						600.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.5 KM		0.5 KM	0,25 KM	600.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		0.5 KM	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
91.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**3.196.222.872,00**							**2.755.773.300,00**	
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung						***2.796.222.872,00***							***2.455.773.300,00***	
			999.Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	80 %		60 %	65 %	2.796.222.872,00						70 %	2.455.773.300,00	
			999.Persentase jumlah SLF yang diterbitkan	80 %		40 %	50 %	2.796.222.872,00						60 %	2.455.773.300,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						3.196.222.872,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		2.755.773.300,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						3.196.222.872,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		2.755.773.300,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	125.773.300,00	
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00						2 Dokumen	300.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung						100.000.000,00							125.773.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Dokumen	125.773.300,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		2 Dokumen	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Terlaksananya Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						3.196.222.872,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		2.755.773.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	2.396.222.872,00						-	2.000.000.000,00	
			Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan	-		-	-	100.000.000,00						-	30.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0031	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	4 Bangunan Gedung	300.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						2.396.222.872,00							2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung yang dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan dan/atau dibongkar untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	-		-	2 Bangunan Gedung	2.396.222.872,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0035	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung						100.000.000,00							30.000.000,00	
		Penyelenggara Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan	-		-	30 Orang	100.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
92.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**300.000.000,00**							**109.691.500,00**	
		Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata						***100.000.000,00***							***84.691.500,00***	
			999.Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	80 %		40 %	50 %	100.000.000,00						60 %	84.691.500,00	
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		109.691.500,00	
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungannya						300.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		109.691.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 Kawasan		1 Kawasan	1 Kawasan	100.000.000,00						1 Kawasan	59.691.500,00	
			Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	100.000.000,00						15 Orang	25.000.000,00	
	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							59.691.500,00	
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 Kawasan		1 Kawasan	1 Kawasan	100.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Kawasan	59.691.500,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.09.2.01.0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan						100.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	15 Orang		15 Orang	15 Orang	100.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		15 Orang	25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
93.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**93.130.296.972,99**							**68.176.820.623,00**	
		Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman						***93.130.296.972,99***							***61.176.820.623,00***	
			999.Persentase jalan mantab	77.00 %		73.00 %	74.00 %	93.130.296.972,99						75.00 %	61.176.820.623,00	
			999.Persentase jembatan berfungsi baik	99.40 %		98.19 %	98.49 %	93.130.296.972,99						98.79 %	61.176.820.623,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						93.130.296.972,99					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		68.176.820.623,00	
		Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten						93.130.296.972,99					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		68.176.820.623,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen		2 Dokumen	5 Dokumen	265.429.926,00						5 Dokumen	500.000.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	859.96 KM		429.5 KM	859.96 KM	300.000.000,00						859.96 KM	400.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	13 KM		7 KM	13 KM	30.610.000.000,00						13 KM	25.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	6 KM		2 KM	6 KM	12.505.720.140,00						6 KM	2.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 KM		1.5 KM	2 KM	26.125.000.000,00						2 KM	5.000.000.000,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	12 KM		15 KM	12 KM	20.800.039.199,00						12 KM	28.276.820.623,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	15 Meter		6 Meter	15 Meter	1.000.000.000,00						15 Meter	5.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	10 Meter		4 Meter	10 Meter	1.524.107.707,99						10 Meter	2.000.000.000,00	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						265.429.926,00							500.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	5 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	265.429.926,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		5 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						300.000.000,00							400.000.000,00	
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	859.96 KM		429.5 KM	860.34 KM	300.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		859.96 KM	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						12.505.720.140,00							2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	6 KM		2 KM	5 KM	12.505.720.140,00	Kab. Trenggalek	Pinjaman Daerah dari LKBB Dana Alokasi Umum (DAU) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		6 KM	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan						26.125.000.000,00							5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 KM		1.5 KM	4 KM	26.125.000.000,00	Kab. Trenggalek	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		2 KM	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						30.610.000.000,00							25.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	13 KM		7 KM	20 KM	30.610.000.000,00	Kab. Trenggalek	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		13 KM	25.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan						1.524.107.707,99							2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	10 Meter		4 Meter	17 Meter	1.524.107.707,99	Kab. Trenggalek	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		10 Meter	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan						20.800.039.199,00							28.276.820.623,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	12 KM		15 KM	7 KM	20.800.039.199,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		12 KM	28.276.820.623,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan						1.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	15 Meter		6 Meter	5 Meter	1.000.000.000,00	Kab. Trenggalek	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		15 Meter	5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
94.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**250.000.000,00**							**250.000.000,00**	
		Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi						***160.000.000,00***							***160.000.000,00***	
			999.Persentase fasilitasi penyelenggaraan jasa konstruksi	100 %		20 %	40 %	160.000.000,00						60 %	160.000.000,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						140.000.000,00					Masyarakat		140.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi						140.000.000,00					Masyarakat		140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang		50 Orang	30 Orang	90.000.000,00						30 Orang	90.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	30 Orang		50 Orang	30 Orang	50.000.000,00						30 Orang	50.000.000,00	
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						90.000.000,00							90.000.000,00	
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	30 Orang		50 Orang	25 Orang	90.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		30 Orang	90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	30 Orang		50 Orang	25 Orang	50.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		30 Orang	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00					Masyarakat		20.000.000,00	
		Terselenggarannya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi						20.000.000,00					Masyarakat		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						90.000.000,00					Masyarakat		90.000.000,00	
		Terselenggarannya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi						90.000.000,00					Masyarakat		90.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	50 Lembaga		50 Lembaga	50 Lembaga	90.000.000,00						50 Lembaga	90.000.000,00	
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						90.000.000,00							90.000.000,00	
		Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	50 Lembaga		50 Lembaga	50 Lembaga	90.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		50 Lembaga	90.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
95.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**975.000.000,00**							**653.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang						***725.000.000,00***							***603.000.000,00***	
			999.Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR	96.2 %		95.4 %	95.6 %	725.000.000,00						95.8 %	603.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						450.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		388.000.000,00	
		Terselanggarannya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota						450.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		388.000.000,00	
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	325.000.000,00						1 Dokumen	325.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						25.000.000,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Dokumen	13.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota						325.000.000,00							325.000.000,00	
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	325.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Dokumen	325.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang						100.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						275.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota						275.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		170.000.000,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota						150.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Dokumen	70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota						125.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		45.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		45.000.000,00	
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	3 Layanan		3 Layanan	3 Layanan	150.000.000,00						3 Layanan	45.000.000,00	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						150.000.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	3 Layanan		3 Layanan	50 Layanan	150.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		3 Layanan	45.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		50.000.000,00	
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	50.000.000,00	
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK						100.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		2 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.071.222.874,61**							**1.581.359.254.238.313,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**3.071.222.874,61**							**1.581.359.254.238.313,00**	
96.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**						**489.537.628,00**							**731.082.900,00**	
		Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan						***489.537.628,00***							***731.082.900,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	85.00 %		64.29 %	70.00 %	489.537.628,00						75.00 %	731.082.900,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						489.537.628,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		731.082.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota						489.537.628,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		731.082.900,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	289.537.628,00						1 Berita Acara	400.000.000,00	
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	331.082.900,00	
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						289.537.628,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	289.537.628,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Berita Acara	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00							331.082.900,00	
		Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Dokumen	331.082.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
97.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**981.685.246,61**							**1.581.357.330.015.813,00**	
		Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan						***981.685.246,61***							***1.581.357.330.015.813,00***	
			999.Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100 %		100 %	100 %	981.685.246,61						100 %	1.581.357.330.015.813,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						981.685.246,61					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		1.581.357.330.015.813,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						981.685.246,61					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		1.581.357.330.015.813,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	981.685.246,61						1 Dokumen	1.581.357.330.015.813,00	
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						981.685.246,61							1.581.357.330.015.813,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	981.685.246,61	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Dokumen	1.581.357.330.015.813,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
98.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**						**600.000.000,00**							**429.250.700,00**	
		Meningkatnya pengelolaan tanah kosong						***200.000.000,00***							***429.250.700,00***	
			999.Persentase Luas Tanah Kosong, Tanah Timbul, Tanah Negara dan Tanah Aset Pemerintah yang bersertifikat hak	85.00 %		50.00 %	66.67 %	200.000.000,00						75.00 %	429.250.700,00	
	2.10.08.2.01	Penyelesaian Masalah Tanah Kosong						200.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		48.425.000,00	
		Terselenggarannya Penyelesaian Masalah Tanah Kosong						200.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		48.425.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	48.425.000,00	
	2.10.08.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00							48.425.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Laporan	48.425.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.08.2.02	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong						400.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		380.825.700,00	
		Terselenggaranya Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong						400.000.000,00					Masyarakat dan Pemerintah Daerah		380.825.700,00	
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	230.825.700,00	
			Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
	2.10.08.2.02.0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong						200.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Laporan	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong						200.000.000,00							230.825.700,00	
		Terlaksanannya Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		2 Dokumen	230.825.700,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
99.	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**						**1.000.000.000,00**							**763.888.900,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah						***1.000.000.000,00***							***763.888.900,00***	
			999.Persentase Pengurusan Penggunaan Kawasan Hutan untuk PSN dan PSD	100 %		55.88 %	55.88 %	1.000.000.000,00						85.54 %	763.888.900,00	
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah						1.000.000.000,00					Masyarakat		763.888.900,00	
		Terlaksananya Penerbitan Izin Membuka Tanah						1.000.000.000,00					Masyarakat		763.888.900,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00						2 Dokumen	763.888.900,00	
	2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah						1.000.000.000,00							763.888.900,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		2 Dokumen	763.888.900,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN						**47.774.681.638,00**							**67.110.878.478,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**37.701.503.173,00**							**62.435.900.013,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**7.572.720.000,00**							**10.207.482.700,00**	
100.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**2.976.890.000,00**							**1.768.313.500,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum						***2.975.890.000,00***							***959.656.750,00***	
			999.Persentase Rumah Tangga yang Mendapatan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan	87.75 %		86.80 %	87.04 %	2.975.890.000,00						87.27 %	959.656.750,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota						2.976.890.000,00					Masyarakat		1.768.313.500,00	
		Terwujudnya rumah tangga yang mendapatan akses air minum						2.976.890.000,00					Masyarakat		1.768.313.500,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Orang		30 Orang	10 Orang	1.000.000,00						10 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10 SR		13 SR	10 SR	875.000.000,00						10 SR	808.656.750,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik		2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	1.999.890.000,00						2 Liter/Detik	808.656.750,00	
	1.03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						1.000.000,00							50.000.000,00	
		Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Orang		30 Orang	30 Orang	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		10 Orang	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						1.999.890.000,00							808.656.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	2 Liter/Detik		2 Liter/Detik	2 Liter/Detik	1.999.890.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		2 Liter/Detik	808.656.750,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						875.000.000,00							808.656.750,00	
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	10 SR		13 SR	30 SR	875.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		10 SR	808.656.750,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		Terwujudnya rumah tangga yang mendapatan akses air minum						2.976.890.000,00					Masyarakat		1.768.313.500,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	-		-	1 Liter/Detik	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
101.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**326.600.000,00**							**6.793.629.200,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan limbah						***326.600.000,00***							***6.793.629.200,00***	
			999.Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak	85.83 %		85.03 %	85.23 %	326.600.000,00						85.43 %	6.793.629.200,00	
			999.Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	12.22 (%)		8.83 (%)	9.68 (%)	326.600.000,00						10.53 (%)	6.793.629.200,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota						326.600.000,00					Masyarakat		6.793.629.200,00	
		Terwujudnya rumah tangga yang pengolahan air limbah domestiknya ditingkatkan dari dasar menjadi layak						326.600.000,00					Masyarakat		6.793.629.200,00	
			Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	-	126.600.000,00						-	6.496.500.000,00	
			Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	147.129.200,00	
	1.03.05.2.01.0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja						50.000.000,00							147.129.200,00	
		Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	-		-	30 Unit	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	147.129.200,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.05.2.01.0048	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-		-	10 Orang	150.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	150.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						126.600.000,00							6.496.500.000,00	
		Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	8 Rumah Tangga	126.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	6.496.500.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
102.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**4.269.230.000,00**							**1.645.540.000,00**	
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan						***4.269.230.000,00***							***1.645.540.000,00***	
			999.Persentase luas genangan perkotaan yang tertangani	100 %		36.90 %	51.90 %	4.269.230.000,00						66.90 %	1.645.540.000,00	
			999.Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	8.01 %		6.41 %	6.81 %	4.269.230.000,00						7.21 %	1.645.540.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota						4.269.230.000,00					Masyarakat		1.645.540.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota						4.269.230.000,00					Masyarakat		1.645.540.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3 Sistem Drainase Perkotaan		3 Sistem Drainase Perkotaan	3 Sistem Drainase Perkotaan	4.019.230.000,00						3 Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00	
			Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2000 M		4000 M	2000 M	100.000.000,00						2000 M	1.100.000.000,00	
			Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	200 Meter		200 Meter	200 Meter	150.000.000,00						200 Meter	145.540.000,00	
	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan						100.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	2000 M		4000 M	50 M	100.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		2000 M	1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.03.06.2.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan						150.000.000,00							145.540.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	200 Meter		200 Meter	50 Meter	150.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		200 Meter	145.540.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						4.019.230.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	3 Sistem Drainase Perkotaan		3 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	4.019.230.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pinjaman Daerah dari LKBB Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		3 Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**30.128.783.173,00**							**52.228.417.313,00**	
103.	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**28.539.183.173,00**							**30.276.323.313,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***28.488.183.173,00***							***30.251.323.313,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	28.488.183.173,00						100 %	30.251.323.313,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	28.488.183.173,00						100 %	30.251.323.313,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %		98.50 %	98.50 %	28.488.183.173,00						98.75 %	30.251.323.313,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						52.500.000,00					Aparatur Dinas Perkimhub		85.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaporan PD dan reformasi birokrasi						52.500.000,00					Aparatur Dinas Perkimhub		85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00						12 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	12.500.000,00						24 Laporan	25.000.000,00	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	12.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		24 Laporan	25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.994.524.767,00					Aparatur Dinas Perkimhub		12.675.763.013,00	
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah						11.994.524.767,00					Aparatur Dinas Perkimhub		12.675.763.013,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	225.000.000,00						12 Dokumen	282.700.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/bulan		130 Orang/bulan	130 Orang/bulan	11.769.524.767,00						130 Orang/bulan	12.393.063.013,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.769.524.767,00							12.393.063.013,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	130 Orang/bulan		130 Orang/bulan	145 Orang/bulan	11.769.524.767,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		130 Orang/bulan	12.393.063.013,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						225.000.000,00							282.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	225.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	282.700.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						16.720.000,00					Aparatur Dinas Perkimhub		25.000.000,00	
		Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah						16.720.000,00					Aparatur Dinas Perkimhub		25.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	16.720.000,00						2 Orang	25.000.000,00	
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						16.720.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	16.720.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Orang	25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						344.473.254,00					Aparatur Dinas Perkimhub		515.000.000,00	
		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah						344.473.254,00					Aparatur Dinas Perkimhub		515.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7 Paket		5 Paket	7 Paket	51.000.000,00						7 Paket	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		4 Paket	5 Paket	239.304.254,00						5 Paket	376.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	10.000.000,00						5 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	44.169.000,00						6 Paket	59.000.000,00	
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Paket	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						44.169.000,00							59.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	12 Paket	44.169.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	59.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						239.304.254,00							376.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		4 Paket	4 Paket	239.304.254,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Paket	376.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						51.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7 Paket		5 Paket	5 Paket	51.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		7 Paket	70.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						64.000.000,00					Aparatur Dinas Perkimhub		123.000.000,00	
		Terlaksananya pengadaan barang milik daerah						64.000.000,00					Aparatur Dinas Perkimhub		123.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	12.000.000,00						5 Unit	24.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		7 Unit	4 Unit	51.000.000,00						4 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000,00						1 Unit	49.000.000,00	
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						12.000.000,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	4 Unit	12.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Unit	24.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						51.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		7 Unit	9 Unit	51.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Unit	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.000.000,00							49.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	49.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.514.836.152,00					Aparatur Dinas Perkimhub		16.431.431.300,00	
		Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						15.514.836.152,00					Aparatur Dinas Perkimhub		16.431.431.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.271.616.152,00						12 Laporan	16.188.211.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	235.220.000,00						12 Laporan	235.220.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00						12 Laporan	8.000.000,00	
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	8.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.271.616.152,00							16.188.211.300,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.271.616.152,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	16.188.211.300,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						235.220.000,00							235.220.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	235.220.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	235.220.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						552.129.000,00					BMD Dinas Perkimhub		421.129.000,00	
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah						552.129.000,00					BMD Dinas Perkimhub		421.129.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	124.463.000,00						5 Unit	88.463.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	366.286.000,00						40 Unit	291.286.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	61.380.000,00						30 Unit	41.380.000,00	
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						366.286.000,00							291.286.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	366.286.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		40 Unit	291.286.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						61.380.000,00							41.380.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	61.380.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		30 Unit	41.380.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						124.463.000,00							88.463.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	9 Unit	124.463.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Unit	88.463.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
104.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**277.000.000,00**							**672.428.600,00**	
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah						***276.000.000,00***							***671.428.600,00***	
			999.Persentase Warga Negara Korban Bencana/Relokasi Program Kabupaten yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 %		100 %	100 %	276.000.000,00						100 %	671.428.600,00	
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						57.000.000,00					Masyarakat Korban Bencana		562.000.000,00	
		Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan/atau relokasi program kabupaten/kota						57.000.000,00					Masyarakat Korban Bencana		562.000.000,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	25 Unit Rumah		25 Unit Rumah	25 Unit Rumah	55.000.000,00						25 Unit Rumah	560.000.000,00	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						55.000.000,00							560.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	25 Unit Rumah		25 Unit Rumah	5 Unit Rumah	55.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		25 Unit Rumah	560.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus						220.000.000,00					Masyarakat		110.428.600,00	
		Tewujudnya pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus						220.000.000,00					Masyarakat		110.428.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	220.000.000,00						1 Laporan	110.428.600,00	
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun						220.000.000,00							110.428.600,00	
		Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	220.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Laporan	110.428.600,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan/atau relokasi program kabupaten/kota						57.000.000,00					Masyarakat Korban Bencana		562.000.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	-		-	-	1.000.000,00						-	1.000.000,00	
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						1.000.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	-		-	1 Unit Rumah	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	-		-	1 Unit Rumah	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
105.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**26.000.000,00**							**48.476.400,00**	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman						***26.000.000,00***							***48.476.400,00***	
			999.Persentase Luasan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani	100 %		20 %	40 %	26.000.000,00						60 %	48.476.400,00	
		Terwujudnya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha						26.000.000,00					Masyarakat		48.476.400,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	2 Unit Rumah		2 Unit Rumah	2 Unit Rumah	25.000.000,00						2 Unit Rumah	38.476.400,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						25.000.000,00							38.476.400,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	2 Unit Rumah		2 Unit Rumah	1 Unit Rumah	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		2 Unit Rumah	38.476.400,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						26.000.000,00					Masyarakat		48.476.400,00	
		Terwujudnya peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha						26.000.000,00					Masyarakat		48.476.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		-	-	1.000.000,00						-	10.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						1.000.000,00							10.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-		-	1 Unit	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
106.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**440.000.000,00**							**1.101.000.000,00**	
		Meningkatnya penanganan pengurangan kawasan kumuh						***440.000.000,00***							***1.101.000.000,00***	
			999.Persentase Perbaikan RTLH	96.76 %		88.34 %	90.47 %	440.000.000,00						92.61 %	1.101.000.000,00	
			999.Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	76.62 %		69.95 %	71.64 %	440.000.000,00						73.33 %	1.101.000.000,00	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						440.000.000,00					Masyarakat		1.101.000.000,00	
		Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota						440.000.000,00					Masyarakat		1.101.000.000,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	55 Unit		55 Unit	55 Unit	110.000.000,00						55 Unit	1.100.000.000,00	
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						110.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	55 Unit		55 Unit	5 Unit	110.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		55 Unit	1.100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota						440.000.000,00					Masyarakat		1.101.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-		-	-	330.000.000,00						-	1.000.000,00	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						330.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	-		-	1 Unit Rumah	330.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
107.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**846.600.000,00**							**20.130.189.000,00**	
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman						***846.600.000,00***							***20.130.189.000,00***	
			999.Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	75 %		65 %	67 %	846.600.000,00						70 %	20.130.189.000,00	
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						846.600.000,00					Masyarakat		20.130.189.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan perumahan yang memperoleh fasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)						846.600.000,00					Masyarakat		20.130.189.000,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	150 Lokasi		157 Lokasi	150 Lokasi	406.600.000,00						150 Lokasi	20.129.189.000,00	
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						406.600.000,00							20.129.189.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	150 Lokasi		157 Lokasi	7 Lokasi	406.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		150 Lokasi	20.129.189.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		Terlaksananya pengelolaan perumahan yang memperoleh fasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)						846.600.000,00					Masyarakat		20.130.189.000,00	
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	-		-	-	440.000.000,00						-	1.000.000,00	
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						440.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	-		-	2 Lokasi	440.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	1.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.073.178.465,00**							**4.674.978.465,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**10.073.178.465,00**							**4.674.978.465,00**	
108.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**10.184.703.465,00**							**4.786.503.465,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat						***10.063.178.465,00***							***4.664.978.465,00***	
			999.Cakupan layanan angkutan darat	46.88 %		44.51 %	45.10 %	10.063.178.465,00						45.70 %	4.664.978.465,00	
			999.Integrasi Antar Moda	100.00 %		33.33 %	33.33 %	10.063.178.465,00						66.67 %	4.664.978.465,00	
			999.Persentase fasilitas prasarana angkutan darat layak fungsi	62.86 %		42.86 %	45.71 %	10.063.178.465,00						51.43 %	4.664.978.465,00	
			999.Persentase kebutuhan prasarana perlengkapan jalan yang tersedia	29.01 %		25.41 %	26.10 %	10.063.178.465,00						27.03 %	4.664.978.465,00	
			999.Persentase peningkatan pengguna angkutan umum	79.90 %		22.37 %	35.15 %	10.063.178.465,00						49.00 %	4.664.978.465,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Tingkat kepatuhan operator dan awak angkutan sesuai SOP	87.00 %		79.00 %	81.00 %	10.063.178.465,00						83.00 %	4.664.978.465,00	
			999.Tingkat Kinerja Ruas Jalan	0.348 Rasio		0.356 Rasio	0.354 Rasio	10.063.178.465,00						0.352 Rasio	4.664.978.465,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						6.517.200.000,00					Masyarakat		1.119.000.000,00	
		Terwujudnya penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota						6.517.200.000,00					Masyarakat		1.119.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	85 Unit		130 Unit	78 Unit	6.517.200.000,00						80 Unit	1.119.000.000,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						6.517.200.000,00							1.119.000.000,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	85 Unit		130 Unit	150 Unit	6.517.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pinjaman Daerah dari LKBB Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		80 Unit	1.119.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir						1.330.978.465,00					Masyarakat		1.330.978.465,00	
		Terlaksananya pengawasan dan penyelenggaraan perparkiran						1.330.978.465,00					Masyarakat		1.330.978.465,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.330.978.465,00						12 Laporan	1.330.978.465,00	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						1.330.978.465,00							1.330.978.465,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.330.978.465,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		12 Laporan	1.330.978.465,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Masyarakat		100.000.000,00	
		Terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas						100.000.000,00					Masyarakat		100.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		12 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						10.000.000,00					Pengemudi		10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya peningkatan kualitas manajemen keselamatan transportasi darat						10.000.000,00					Pengemudi		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		12 Laporan	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						2.050.000.000,00					Masyarakat		2.050.000.000,00	
		Terwujudnya penyediaan angkutan umum, angkutan pemadu moda, angkutan mobility hub, angkutan pelajar, disabilitas dan kelompok rentan lainnya						2.050.000.000,00					Masyarakat		2.050.000.000,00	
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	158 Unit		150 Unit	152 Unit	2.050.000.000,00						154 Unit	2.050.000.000,00	
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						2.050.000.000,00							2.050.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	158 Unit		150 Unit	185 Unit	2.050.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		154 Unit	2.050.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C						55.000.000,00					Masyarakat Pengguna Terminal		55.000.000,00	
		Terwujudnya pengembangan dan rehabilitasi prasarana angkutan (terminal tipe-C, halte, transportation hub)						55.000.000,00					Masyarakat Pengguna Terminal		55.000.000,00	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-		-	-	55.000.000,00						-	55.000.000,00	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						55.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	-		-	5 Unit	55.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	55.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
109.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**10.000.000,00**							**10.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut						***10.000.000,00***							***10.000.000,00***	
			999.Persentase kegiatan promosi dan penjajakan kerja sama pengoperasian pelabuhan	100 %		100 %	100 %	10.000.000,00						100 %	10.000.000,00	
	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal						10.000.000,00					Masyarakat		10.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan manajemen keselamatan pengembangan/ pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal						10.000.000,00					Masyarakat		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10.000.000,00						12 Dokumen	10.000.000,00	
	2.15.03.2.12.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		12 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
		UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR						**121.525.000,00**							**121.525.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**121.525.000,00**							**121.525.000,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**121.525.000,00**							**121.525.000,00**	
110.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**10.184.703.465,00**							**4.786.503.465,00**	
			-	-		-	-	121.525.000,00						-	121.525.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						121.525.000,00					Masyarakat		121.525.000,00	
		-						121.525.000,00					Masyarakat		121.525.000,00	
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	-	31.275.000,00						-	31.275.000,00	
			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-		-	-	2.000.000,00						-	2.000.000,00	
			JumlahLaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	-	2.250.000,00						-	2.250.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-		-	-	86.000.000,00						-	86.000.000,00	
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						31.275.000,00							31.275.000,00	
		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	1200 Dokumen	31.275.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Rejowinangun || 1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	31.275.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						2.250.000,00							2.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-		-	1 Laporan	2.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Karangsoko || 1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	2.250.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Karangsoko || 1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	2.000.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						86.000.000,00							86.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	-		-	16 Unit	86.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Karangsoko || 1	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	86.000.000,00	UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN						**11.369.056.273,00**							**12.165.527.238,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.369.056.273,00**							**12.165.527.238,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**11.369.056.273,00**							**12.165.527.238,00**	
111.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.461.099.385,00**							**9.262.275.650,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran						***8.331.099.385,00***							***9.139.775.650,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	8.331.099.385,00						100 %	9.139.775.650,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	8.331.099.385,00						100 %	9.139.775.650,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	87 %		86.60 %	86.70 %	8.331.099.385,00						86.80 %	9.139.775.650,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00					Aparatur SatpolPPK		11.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.000.000,00					Aparatur SatpolPPK		11.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	1.000.000,00						16 Dokumen	11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		16 Dokumen	11.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.025.216.711,00					Aparatur SatpolPPK		8.775.451.449,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.025.216.711,00					Aparatur SatpolPPK		8.775.451.449,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.680.000,00						12 Dokumen	55.680.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan		104 Orang/bulan	104 Orang/bulan	7.989.536.711,00						104 Orang/bulan	8.719.771.449,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.989.536.711,00							8.719.771.449,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104 Orang/bulan		104 Orang/bulan	102 Orang/bulan	7.989.536.711,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		104 Orang/bulan	8.719.771.449,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						35.680.000,00							55.680.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	35.680.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	55.680.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10.800.000,00					Aparatur SatpolPPK		12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						10.800.000,00					Aparatur SatpolPPK		12.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.800.000,00						12 Laporan	12.500.000,00	
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.800.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.800.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	12.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.863.000,00					Aparatur SatpolPPK		26.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.863.000,00					Aparatur SatpolPPK		26.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	3.863.000,00						1 Orang	26.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						3.863.000,00							26.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	3.863.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Orang	26.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						64.219.674,00					Aparatur SatpolPPK		93.363.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerahkan						64.219.674,00					Aparatur SatpolPPK		93.363.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	11.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.424.974,00						4 Paket	12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	24.294.700,00						4 Paket	33.863.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.000.000,00						12 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00						2 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.500.000,00						4 Paket	10.500.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.500.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	10.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.424.974,00							12.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.424.974,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	12.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Paket	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						24.294.700,00							33.863.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	24.294.700,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	33.863.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							11.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	11.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00					Aparatur SatpolPPK		24.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10.000.000,00					Aparatur SatpolPPK		24.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	24.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	24.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						136.000.000,00					Aparatur SatpolPPK		109.961.201,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						136.000.000,00					Aparatur SatpolPPK		109.961.201,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00						12 Laporan	31.961.201,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	72.000.000,00						13 Laporan	72.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00						4 Laporan	6.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60.000.000,00							31.961.201,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	31.961.201,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	6.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						72.000.000,00							72.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	12 Laporan	72.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		13 Laporan	72.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						210.000.000,00					Aparatur SatpolPPK		210.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						210.000.000,00					Aparatur SatpolPPK		210.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	100.000.000,00						13 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	16 Unit	10.000.000,00						16 Unit	10.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	100.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		13 Unit	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	6 Unit	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		16 Unit	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
112.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**1.300.000.000,00**							**1.301.000.000,00**	
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada						***650.000.000,00***							***650.000.000,00***	
			999.Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	80.00 %		60.00 %	65.00 %	650.000.000,00						70.00 %	650.000.000,00	
		Terlaksananya penegakan perda dan perkada						650.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	96 Laporan		96 Laporan	96 Laporan	75.000.000,00						96 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00						6 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	150.000.000,00						100 Laporan	150.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Laporan	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		100 Laporan	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						75.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	96 Laporan		96 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		96 Laporan	75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						25.000.000,00					Aparatur SatpolPPK		25.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						25.000.000,00					Aparatur SatpolPPK		25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00						2 Laporan	25.000.000,00	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	2 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan terhadap masyarakat						***625.000.000,00***							***626.000.000,00***	
			999.Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	625.000.000,00						100 Persentase	626.000.000,00	
			999.Persentase penyelenggaraan Trantibum yang dilaksanakan oleh Satpol PP	100 %		100 %	100 %	625.000.000,00						100 %	626.000.000,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						625.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		626.000.000,00	
		Terlaksananya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum						625.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		626.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	60.500.000,00						2 Dokumen	61.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	85.000.000,00						4 Dokumen	85.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00						2 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	70.000.000,00						12 laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00						1 Laporan	500.000,00	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Dokumen	4.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						85.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Dokumen	85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						60.500.000,00							61.500.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	60.500.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Dokumen	61.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						70.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	70.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 laporan	70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah						500.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Laporan	500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
		Terlaksananya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum						625.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		626.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-		-	-	92.350.000,00						-	92.350.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-		-	-	107.650.000,00						-	107.650.000,00	
	1.05.02.2.01.0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						107.650.000,00							107.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	-		-	3 Dokumen	107.650.000,00	Kab. Trenggalek	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		-	107.650.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	4 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Trenggalek	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		-	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja						92.350.000,00							92.350.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	-		-	25 Orang	92.350.000,00	Kab. Trenggalek	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		-	92.350.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						650.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		650.000.000,00	
		Terlaksananya penegakan perda dan perkada						650.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		650.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	-		-	-	400.000.000,00						-	400.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)						400.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	-		-	10 unit	400.000.000,00	Kab. Trenggalek	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		-	400.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
113.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**1.607.956.888,00**							**1.602.251.588,00**	
		Meningkatnya layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						***1.582.956.888,00***							***1.587.251.588,00***	
			999.Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %		100 %	100 %	1.582.956.888,00						100 %	1.587.251.588,00	
			999.Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	60.51 %		47.77 %	50.96 %	1.582.956.888,00						54.14 %	1.587.251.588,00	
			999.Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %		100 %	100 %	1.582.956.888,00						100 %	1.587.251.588,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.577.956.888,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		1.577.956.888,00	
		Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran						1.577.956.888,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		1.577.956.888,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.360.000.000,00						1 Unit	1.360.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Dokumen	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						1.360.000.000,00							1.360.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.360.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	1.360.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						15.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		9.294.700,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						15.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		9.294.700,00	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa/Kelurahan		5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	5.000.000,00						5 Desa/Kelurahan	5.000.000,00	
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	10.000.000,00						1000 Orang	4.294.700,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						10.000.000,00							4.294.700,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1000 Orang	4.294.700,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	5 Desa/Kelurahan		5 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Desa/Kelurahan	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						5.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia						5.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00						12 Laporan	5.000.000,00	
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
		Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran						1.577.956.888,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		1.577.956.888,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-		-	-	107.956.888,00						-	107.956.888,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)						107.956.888,00							107.956.888,00	
		Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	-		-	1 Dokumen	107.956.888,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		-	107.956.888,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						10.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		10.000.000,00	
		Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						10.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	1.05.04.2.02.0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		-	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**5.055.231.433,00**							**4.434.080.400,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.055.231.433,00**							**4.434.080.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**5.055.231.433,00**							**4.434.080.400,00**	
114.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.718.184.661,00**							**4.237.480.400,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah penanggulangan bencana						***4.718.184.661,00***							***4.237.480.400,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	4.718.184.661,00						100 %	4.237.480.400,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	4.718.184.661,00						100 %	4.237.480.400,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	96 %		96 %	96 %	4.718.184.661,00						96 %	4.237.480.400,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						400.000,00					ASN Lingkup BPBD		800.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						400.000,00					ASN Lingkup BPBD		800.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	400.000,00						12 Dokumen	800.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						400.000,00							800.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	400.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	800.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.486.890.589,00					ASN Lingkup BPBD		3.909.340.644,00	
		Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.486.890.589,00					ASN Lingkup BPBD		3.909.340.644,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	52.530.000,00						12 Dokumen	39.440.744,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan		49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	4.434.360.589,00						49 Orang/bulan	3.869.899.900,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.434.360.589,00							3.869.899.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan		49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	4.434.360.589,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		49 Orang/bulan	3.869.899.900,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						52.530.000,00							39.440.744,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	52.530.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	39.440.744,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						8.797.500,00					ASN Lingkup BPBD		16.020.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						8.797.500,00					ASN Lingkup BPBD		16.020.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.797.500,00						4 Laporan	16.020.000,00	
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						8.797.500,00							16.020.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.797.500,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	16.020.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						940.000,00					ASN Lingkup BPBD		3.544.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						940.000,00					ASN Lingkup BPBD		3.544.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	940.000,00						2 Orang	3.544.000,00	
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						940.000,00							3.544.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	940.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Orang	3.544.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						52.186.682,00					ASN Lingkup BPBD		64.734.846,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						52.186.682,00					ASN Lingkup BPBD		64.734.846,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	23.269.580,00						12 Laporan	26.750.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		4 Paket	5 Paket	18.517.868,00						5 Paket	27.398.469,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	3 Paket	2.000.000,00						3 Paket	2.999.776,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		3 Paket	4 Paket	8.399.234,00						4 Paket	7.586.601,00	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.399.234,00							7.586.601,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		3 Paket	4 Paket	8.399.234,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	7.586.601,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00							2.999.776,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	3 Paket	2.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Paket	2.999.776,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						18.517.868,00							27.398.469,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		4 Paket	5 Paket	18.517.868,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Paket	27.398.469,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						23.269.580,00							26.750.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	23.269.580,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	26.750.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5.887.010,00					ASN Lingkup BPBD		6.691.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5.887.010,00					ASN Lingkup BPBD		6.691.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		7 Unit	1 Unit	5.887.010,00						1 Unit	6.691.000,00	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.887.010,00							6.691.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		7 Unit	1 Unit	5.887.010,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	6.691.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						63.565.400,00					ASN Lingkup BPBD		65.066.400,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						63.565.400,00					ASN Lingkup BPBD		65.066.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.565.400,00						12 Laporan	65.066.400,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						63.565.400,00							65.066.400,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.565.400,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	65.066.400,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99.517.480,00					ASN Lingkup BPBD		171.283.510,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						99.517.480,00					ASN Lingkup BPBD		171.283.510,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	14.000.000,00						1 Unit	18.749.490,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.000.000,00						1 Unit	20.850.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	78.407.480,00						10 Unit	126.184.020,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	4.110.000,00						5 Unit	5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						78.407.480,00							126.184.020,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	78.407.480,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Unit	126.184.020,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						14.000.000,00							18.749.490,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	14.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	18.749.490,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.110.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	4.110.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Unit	5.500.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						3.000.000,00							20.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	20.850.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
115.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**337.046.772,00**							**196.600.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan dan penanganan pada pra, saat dan pasca bencana						***286.546.772,00***							***190.600.000,00***	
			999.% desa tangguh bencana	49.68 %		39.49 %	42.04 %	286.546.772,00						44.59 %	190.600.000,00	
			999.Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100 Persentase		Persentase	25 Persentase	286.546.772,00						50 Persentase	190.600.000,00	
			999.Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 %		100 %	100 %	286.546.772,00						100 %	190.600.000,00	
			999.Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %		100 %	100 %	286.546.772,00						100 %	190.600.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						10.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		5.000.000,00	
		Terselenggaranya kegiatan pelayanan informasi rawan bencana						10.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		5.000.000,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	700 Orang		700 Orang	700 Orang	10.500.000,00						700 Orang	5.000.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						10.500.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	700 Orang		700 Orang	700 Orang	10.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		700 Orang	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Terselenggaranya kegiatan pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						82.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		56.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.500.000,00						1 Dokumen	13.000.000,00	
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan		12 laporan	12 laporan	1.500.000,00						12 laporan	5.000.000,00	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	250 Orang		0 Orang	250 Orang	10.000.000,00						250 Orang	18.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						10.000.000,00							18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	250 Orang		0 Orang	250 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		250 Orang	18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota						50.500.000,00							13.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Dokumen	13.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						1.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 laporan		12 laporan	12 laporan	1.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 laporan	5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						172.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		71.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						172.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		71.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	128.500.000,00						2 Dokumen	31.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang		50 Orang	50 Orang	44.000.000,00						50 Orang	40.000.000,00	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						128.500.000,00							31.000.000,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	128.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Dokumen	31.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						44.000.000,00							40.000.000,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang		50 Orang	40 Orang	44.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		50 Orang	40.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		Terselenggaranya Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						71.546.772,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		64.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	15.546.772,00						4 Dokumen	62.000.000,00	
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						15.546.772,00							62.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	15.546.772,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Dokumen	62.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						82.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		56.600.000,00	
		Terselenggaranya kegiatan pelayanan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						82.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		56.600.000,00	
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	-	500.000,00						-	600.000,00	
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota						500.000,00							600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	1 Kegiatan	500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		-	600.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	-		-	4 Kawasan	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		-	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						71.546.772,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		64.000.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						71.546.772,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		64.000.000,00	
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-		-	-	50.500.000,00						-	1.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	-	5.500.000,00						-	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota						50.500.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	-		-	2 Orang	50.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		-	1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						5.500.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	-		-	1 Kegiatan	5.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		-	1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						**12.437.458.463,00**							**15.392.626.600,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.802.458.463,00**							**14.626.150.200,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**11.802.458.463,00**							**14.626.150.200,00**	
116.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.800.531.563,00**							**5.841.971.800,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***5.689.531.563,00***							***5.696.971.800,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	5.689.531.563,00						100 %	5.696.971.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	5.689.531.563,00						100 %	5.696.971.800,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	94.97 %		95.97 %	95.72 %	5.689.531.563,00						95.47 %	5.696.971.800,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						26.000.000,00					ASN lingkup Dinsos PPPA		35.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						26.000.000,00					ASN lingkup Dinsos PPPA		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000,00						10 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	1.000.000,00						27 Laporan	5.000.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Dokumen	30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		27 Laporan	5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.091.134.531,00					ASN lingkup Dinsos PPPA		5.080.035.000,00	
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.091.134.531,00					ASN lingkup Dinsos PPPA		5.080.035.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	43.680.000,00						36 Dokumen	28.080.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan		46 Laporan	38 Laporan	1.000.000,00						38 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		56 Orang/bulan	55 Orang/bulan	5.046.454.531,00						55 Orang/bulan	5.046.955.000,00	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.046.454.531,00							5.046.955.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/bulan		56 Orang/bulan	55 Orang/bulan	5.046.454.531,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		55 Orang/bulan	5.046.955.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						43.680.000,00							28.080.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	43.680.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Dokumen	28.080.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan		46 Laporan	38 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		38 Laporan	5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						9.000.000,00					ASN lingkup Dinsos PPPA		16.020.000,00	
		Terpenuhinya nilai aset dalam kondisi baik						9.000.000,00					ASN lingkup Dinsos PPPA		16.020.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	9.000.000,00						18 Laporan	16.020.000,00	
	1.06.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						9.000.000,00							16.020.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		18 Laporan	16.020.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.000.000,00					ASN lingkup Dinsos PPPA		13.000.000,00	
		terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5.000.000,00					ASN lingkup Dinsos PPPA		13.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		1 Orang	2 Orang	5.000.000,00						2 Orang	13.000.000,00	
	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						5.000.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		1 Orang	1 Orang	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Orang	13.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						241.397.032,00					ASN lingkup Dinsos PPPA		227.500.000,00	
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah						241.397.032,00					ASN lingkup Dinsos PPPA		227.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00						10 Laporan	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan		125 Laporan	125 Laporan	80.000.000,00						125 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.800.000,00						12 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	50.000.000,00						6 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	50.000.000,00						12 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	7.397.032,00						6 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	43.200.000,00						6 Paket	50.000.000,00	
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.397.032,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	7.397.032,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						43.200.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	43.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.800.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Paket	5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Paket	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Laporan	2.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						80.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan		125 Laporan	125 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		125 Laporan	60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5.000.000,00					ASN lingkup Dinsos PPPA		5.000.000,00	
		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah						5.000.000,00					ASN lingkup Dinsos PPPA		5.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5.000.000,00						2 Unit	5.000.000,00	
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.000.000,00					ASN lingkup Dinsos PPPA		280.416.800,00	
		Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						193.000.000,00					ASN lingkup Dinsos PPPA		280.416.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	120.000.000,00						48 Laporan	120.416.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49 Laporan		49 Laporan	49 Laporan	69.000.000,00						49 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						120.000.000,00							120.416.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	120.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		48 Laporan	120.416.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						69.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	49 Laporan		49 Laporan	49 Laporan	69.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		49 Laporan	150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						230.000.000,00					ASN lingkup Dinsos PPPA		185.000.000,00	
		Terpenuhinya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						230.000.000,00					ASN lingkup Dinsos PPPA		185.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	140.000.000,00						10 Unit	145.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	40.000.000,00						50 Unit	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	20.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						140.000.000,00							145.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	140.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Unit	145.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	40.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		50 Unit	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	3 Unit	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
117.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**150.000.000,00**							**281.871.100,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial						***137.500.000,00***							***276.871.100,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten/Kota pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	100 %		100 %	100 %	137.500.000,00						100 %	276.871.100,00	
			999.Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	36.95 %		28.44 %	28.79 %	137.500.000,00						36.24 %	276.871.100,00	
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						2.500.000,00					Masyarakat Trenggalek		5.000.000,00	
		Terpenuhinya Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						2.500.000,00					Masyarakat Trenggalek		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	2.500.000,00						10 Dokumen	5.000.000,00	
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Dokumen		10 Dokumen	5 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		10 Dokumen	5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						147.500.000,00					Masyarakat Trenggalek		276.871.100,00	
		Terpenuhinya pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial						147.500.000,00					Masyarakat Trenggalek		276.871.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Keluarga		20 Keluarga	80 Keluarga	10.000.000,00						80 Keluarga	39.871.100,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Lembaga		17 Lembaga	26 Lembaga	30.000.000,00						26 Lembaga	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang		100 Orang	100 Orang	45.000.000,00						100 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	94 Orang		94 Orang	94 Orang	50.000.000,00						94 Orang	177.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		5 Orang	5 Orang	2.500.000,00						5 Orang	5.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						10.000.000,00							39.871.100,00	
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Keluarga		20 Keluarga	20 Keluarga	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		80 Keluarga	39.871.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						30.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Lembaga		17 Lembaga	35 Lembaga	30.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		26 Lembaga	25.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial						45.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	100 Orang		100 Orang	100 Orang	45.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		100 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						2.500.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		5 Orang	5 Orang	2.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		5 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000,00							177.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	94 Orang		94 Orang	94 Orang	50.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		94 Orang	177.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Terpenuhinya pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial						147.500.000,00					Masyarakat Trenggalek		276.871.100,00	
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	-		-	20 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
118.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**						**1.600.000,00**							**1.860.000,00**	
		Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan						***1.600.000,00***							***1.860.000,00***	
			999.Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	100 %		100 %	100 %	1.600.000,00						100 %	1.860.000,00	
	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						1.600.000,00					Masyarakat Trenggalek		1.860.000,00	
		Terpenuhinya fasilitasi pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan						1.600.000,00					Masyarakat Trenggalek		1.860.000,00	
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		12 Orang	5 Orang	1.600.000,00						5 Orang	1.860.000,00	
	1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						1.600.000,00							1.860.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		12 Orang	5 Orang	1.600.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Orang	1.860.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
119.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**2.759.826.900,00**							**2.889.790.800,00**	
		Meningkatnya rehabilitasi sosial						***2.725.906.900,00***							***2.806.790.800,00***	
			999.Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	2.725.906.900,00						100 %	2.806.790.800,00	
			999.Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	2.725.906.900,00						100 %	2.806.790.800,00	
			999.Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	2.725.906.900,00						100 %	2.806.790.800,00	
			999.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV / AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	94.86 %		92.7 %	93.24 %	2.725.906.900,00						93.78 %	2.806.790.800,00	
			999.Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	2.725.906.900,00						100 %	2.806.790.800,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						2.190.468.000,00					Masyarakat Trenggalek		2.139.790.800,00	
		Terpenuhinya Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						2.190.468.000,00					Masyarakat Trenggalek		2.139.790.800,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		30 Orang	25 Orang	10.000.000,00						25 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		70 Orang	25 Orang	10.000.000,00						25 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang		8 Orang	8 Orang	18.468.000,00						8 Orang	47.790.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		55 Orang	25 Orang	16.000.000,00						25 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Orang		140 Orang	140 Orang	252.000.000,00						140 Orang	252.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		35 Orang	25 Orang	10.000.000,00						25 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	15.000.000,00						20 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang		600 Orang	600 Orang	1.375.000.000,00						600 Orang	1.375.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		100 Orang	50 Orang	10.000.000,00						50 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		25 Orang	10 Orang	4.000.000,00						10 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang		200 Orang	80 Orang	465.000.000,00						80 Orang	390.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang		20 Orang	80 Orang	5.000.000,00						80 Orang	10.000.000,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						1.375.000.000,00							1.375.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang		600 Orang	600 Orang	1.375.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		600 Orang	1.375.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		100 Orang	50 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		50 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						18.468.000,00							47.790.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang		8 Orang	3 Orang	18.468.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		8 Orang	47.790.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						15.000.000,00							10.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	15.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		20 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						465.000.000,00							390.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang		200 Orang	80 Orang	465.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		80 Orang	390.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	80 Orang		20 Orang	80 Orang	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		80 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		70 Orang	25 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		25 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						16.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		55 Orang	25 Orang	16.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		25 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						252.000.000,00							252.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	140 Orang		140 Orang	140 Orang	252.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		140 Orang	252.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		35 Orang	25 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		25 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		30 Orang	25 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		25 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota						4.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		25 Orang	10 Orang	4.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		10 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						569.358.900,00					Masyarakat Trenggalek		750.000.000,00	
		Terpenuhinya rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial						569.358.900,00					Masyarakat Trenggalek		750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3 Dokumen		6 Dokumen	3 Dokumen	2.460.000,00						3 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	255.000.000,00						1000 Orang	275.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		10 Orang	20 Orang	960.000,00						20 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		25 Orang	30 Orang	1.250.000,00						30 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		25 Orang	25 Orang	1.600.000,00						25 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang		75 Orang	75 Orang	250.000.000,00						75 Orang	375.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	960.000,00						20 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	960.000,00						20 Orang	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	918.900,00						20 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang		65 Orang	65 Orang	2.000.000,00						65 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		20 Orang	40 Orang	2.000.000,00						40 Orang	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		25 Orang	50 Orang	8.750.000,00						50 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		20 Orang	50 Orang	42.500.000,00						50 Orang	43.000.000,00	
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						1.600.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		25 Orang	25 Orang	1.600.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		25 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan						250.000.000,00							375.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang		75 Orang	50 Orang	250.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		75 Orang	375.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	65 Orang		65 Orang	65 Orang	2.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		65 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang						2.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		20 Orang	40 Orang	2.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		40 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti						918.900,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	918.900,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		20 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						8.750.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		25 Orang	50 Orang	8.750.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		50 Orang	30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA						42.500.000,00							43.000.000,00	
		Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		20 Orang	50 Orang	42.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		50 Orang	43.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak						960.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		10 Orang	20 Orang	960.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		20 Orang	1.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						1.250.000,00							1.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		25 Orang	30 Orang	1.250.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		30 Orang	1.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						960.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	960.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		20 Orang	1.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						960.000,00							1.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang	960.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		20 Orang	1.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan						255.000.000,00							275.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	255.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1000 Orang	275.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						2.460.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	3 Dokumen		6 Dokumen	3 Dokumen	2.460.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Dokumen	3.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
120.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**2.570.000.000,00**							**5.050.838.700,00**	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial						***2.570.000.000,00***							***5.050.838.700,00***	
			999.Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	5.98 %		5.73 %	5.79 %	2.570.000.000,00						5.86 %	5.050.838.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	88.18 %		87.78 %	87.89 %	2.570.000.000,00						88.00 %	5.050.838.700,00	
			999.Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	99.58 %		99.55 %	99.55 %	2.570.000.000,00						99.56 %	5.050.838.700,00	
			999.Persentase Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	84.87 %		84.75 %	84.78 %	2.570.000.000,00						84.81 %	5.050.838.700,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						2.570.000.000,00					Masyarakat Trenggalek		5.050.838.700,00	
		Terpenuhinya laporan hasil Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						2.570.000.000,00					Masyarakat Trenggalek		5.050.838.700,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	4500 Orang		15000 Orang	4500 Orang	230.000.000,00						4500 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	170 Orang		170 Orang	170 Orang	10.000.000,00						170 Orang	10.838.700,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	75300 Orang		85850 Orang	75300 Orang	2.300.000.000,00						75300 Orang	4.800.000.000,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	151947 Usulan		127593 Usulan	151947 Usulan	30.000.000,00						151947 Usulan	40.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						230.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	4500 Orang		15000 Orang	4500 Orang	230.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4500 Orang	200.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						10.000.000,00							10.838.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	170 Orang		170 Orang	170 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		170 Orang	10.838.700,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						2.300.000.000,00							4.800.000.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	75300 Orang		85850 Orang	71544 Orang	2.300.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		75300 Orang	4.800.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	151947 Usulan		127593 Usulan	151947 Usulan	30.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		151947 Usulan	40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
121.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**470.500.000,00**							**509.817.800,00**	
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana						***460.500.000,00***							***509.817.800,00***	
			999.Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %		100 %	100 %	460.500.000,00						100 %	509.817.800,00	
			999.Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100 %		100 %	100 %	460.500.000,00						100 %	509.817.800,00	
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						190.000.000,00					Masyarakat Trenggalek		231.317.800,00	
		Terpenuhinya Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						190.000.000,00					Masyarakat Trenggalek		231.317.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	765 Orang		500 Orang	765 Orang	5.000.000,00						765 Orang	8.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang		50 Orang	75 Orang	10.000.000,00						75 Orang	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		25 Orang	25 Orang	5.000.000,00						25 Orang	1.817.800,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	765 Orang		1000 Orang	765 Orang	165.000.000,00						765 Orang	205.000.000,00	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	5.000.000,00						100 Orang	1.500.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						165.000.000,00							205.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	765 Orang		1000 Orang	765 Orang	165.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		765 Orang	205.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang						10.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang		50 Orang	50 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		75 Orang	15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						5.000.000,00							1.817.800,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		25 Orang	25 Orang	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		25 Orang	1.817.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						5.000.000,00							8.000.000,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	765 Orang		500 Orang	765 Orang	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		765 Orang	8.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						5.000.000,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		100 Orang	1.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						280.500.000,00					Masyarakat Trenggalek		278.500.000,00	
		Terpenuhinya pemberdayaan bagi masyarakat untuk Kesiapsiagaan Bencana						280.500.000,00					Masyarakat Trenggalek		278.500.000,00	
			Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	4.500.000,00						2 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung		4 Kampung	4 Kampung	16.000.000,00						4 Kampung	13.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang		90 Orang	70 Orang	260.000.000,00						70 Orang	260.000.000,00	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						16.000.000,00							13.500.000,00	
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung		4 Kampung	4 Kampung	16.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		4 Kampung	13.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						260.000.000,00							260.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang		90 Orang	70 Orang	260.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		70 Orang	260.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	1.06.06.2.02.0009	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)						4.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		2 Dokumen	5.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
122.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**50.000.000,00**							**50.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan						***50.000.000,00***							***50.000.000,00***	
			999.Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00						100 %	50.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Taman Makam Pahlawan		50.000.000,00	
		Terpenuhinya pengelolaan Taman Makam Pahlawan						50.000.000,00					Taman Makam Pahlawan		50.000.000,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam		1 Makam	1 Makam	50.000.000,00						1 Makam	50.000.000,00	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam		1 Makam	1 Makam	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Karangsoko || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Makam	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**635.000.000,00**							**766.476.400,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**635.000.000,00**							**766.476.400,00**	
123.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**64.500.000,00**							**90.000.800,00**	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan						***59.500.000,00***							***90.000.800,00***	
			999.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	7.20 %		7.16 %	7.17 %	59.500.000,00						7.18 %	90.000.800,00	
			999.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	73.27 %		71.27 %	71.77 %	59.500.000,00						72.27 %	90.000.800,00	
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						10.000.000,00					Masyarakat Trenggalek		30.000.800,00	
		Terpenuhinya dokumen pelembagaan pengarusutamaan gender						10.000.000,00					Masyarakat Trenggalek		30.000.800,00	
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	10.000.800,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						5.000.000,00							10.000.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Laporan	10.000.800,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Terpenuhinya dokumen pelembagaan pengarusutamaan gender						10.000.000,00					Masyarakat Trenggalek		30.000.800,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	5 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						54.500.000,00					Masyarakat Trenggalek		60.000.000,00	
		Terpenuhinya Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						54.500.000,00					Masyarakat Trenggalek		60.000.000,00	
			Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	54.500.000,00						-	60.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						54.500.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	85 Orang	54.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	60.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
124.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**178.905.550,00**							**206.942.200,00**	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan						***178.905.550,00***							***126.942.200,00***	
			999.Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %		100 %	100 %	178.905.550,00						100 %	126.942.200,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						62.315.685,00					Masyarakat Trenggalek		43.969.228,00	
		Terpenuhinya laporan pencegahan kekerasan terhadap perempuan						62.315.685,00					Masyarakat Trenggalek		43.969.228,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	-	62.315.685,00						-	43.969.228,00	
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						62.315.685,00							43.969.228,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	5 Kegiatan	62.315.685,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	43.969.228,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						97.069.865,00					Masyarakat Trenggalek		112.637.309,00	
		Terpenuhinya laporan penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan						97.069.865,00					Masyarakat Trenggalek		112.637.309,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	-		-	-	5.122.500,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-		-	-	14.607.183,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-		-	-	14.607.182,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	21.361.000,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	-	26.678.000,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	-	9.144.000,00						-	17.637.309,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-		-	-	5.550.000,00						-	15.000.000,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						21.361.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	20 Orang	21.361.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0011	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						14.607.183,00							20.000.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-		-	20 Orang	14.607.183,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0012	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						26.678.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	20 Orang	26.678.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0013	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						5.122.500,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	-		-	20 Orang	5.122.500,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						9.144.000,00							17.637.309,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	20 Orang	9.144.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	17.637.309,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0016	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						14.607.182,00							15.000.000,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-		-	20 Orang	14.607.182,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0017	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						5.550.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-		-	20 Orang	5.550.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	15.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						19.520.000,00					Masyarakat Trenggalek		50.335.663,00	
		Terpenuhinya Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan						19.520.000,00					Masyarakat Trenggalek		50.335.663,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	5.000.000,00						-	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	14.520.000,00						-	30.335.663,00	
	2.08.03.2.03.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						14.520.000,00							30.335.663,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	20 Orang	14.520.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	30.335.663,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	8 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
125.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**70.000.000,00**							**36.500.000,00**	
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak						***65.000.000,00***							***26.500.000,00***	
			999.Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	100 %		100 %	100 %	65.000.000,00						100 %	26.500.000,00	
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						70.000.000,00					Masyarakat Trenggalek		36.500.000,00	
		Terwujudnyakeluarga yang mengalami peningkatan kualitas dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak						70.000.000,00					Masyarakat Trenggalek		36.500.000,00	
			Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kebijakan		2 Kebijakan	1 Kebijakan	5.000.000,00						1 Kebijakan	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang		41 Orang	41 Orang	60.000.000,00						41 Orang	16.500.000,00	
			proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	4 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00						4 Dokumen	10.000.000,00	
	2.08.04.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kebijakan		2 Kebijakan	1 Kebijakan	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Kebijakan	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.						60.000.000,00							16.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	41 Orang		41 Orang	200 Orang	60.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		41 Orang	16.500.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	4 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Dokumen	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
126.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**35.000.000,00**							**76.263.100,00**	
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif						***25.000.000,00***							***56.263.100,00***	
			999.Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	905 poin		810 poin	825 poin	25.000.000,00						850 poin	56.263.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Nilai Kabupaten Layak Anak (KLA)	-		-	825 poin	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						25.000.000,00					Masyarakat Trenggalek		56.263.100,00	
		Terpenuhinya laporan hasil pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha						25.000.000,00					Masyarakat Trenggalek		56.263.100,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	25.000.000,00						-	56.263.100,00	
	2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						25.000.000,00							56.263.100,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	5 Lembaga	25.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	56.263.100,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						10.000.000,00					Masyarakat Trenggalek		20.000.000,00	
		-						10.000.000,00					Masyarakat Trenggalek		20.000.000,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	50 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
127.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**286.594.450,00**							**356.770.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran , perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak						***281.594.450,00***							***156.770.300,00***	
			999.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %		100 %	100 %	281.594.450,00						100 %	156.770.300,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						82.184.315,00					Masyarakat Trenggalek		60.000.000,00	
		Terpenuhinya laporan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para pihak						82.184.315,00					Masyarakat Trenggalek		60.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	-	52.184.315,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	30.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.08.07.2.01.0012	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						30.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-		-	4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	10.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						52.184.315,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	2 Kegiatan	52.184.315,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						139.570.135,00					Masyarakat Trenggalek		230.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya laporan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus						139.570.135,00					Masyarakat Trenggalek		230.000.000,00	
			Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	14.607.182,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	9.183.302,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	14.607.183,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	9.927.693,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	16.014.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	4.514.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	28.910.000,00						-	30.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	41.806.775,00						-	30.000.000,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						9.927.693,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	30 Orang	9.927.693,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.07.2.02.0017	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						16.014.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	80 Orang	16.014.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0018	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						14.607.182,00							20.000.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	80 Orang	14.607.182,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0019	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						14.607.183,00							30.000.000,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	80 Orang	14.607.183,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0020	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						9.183.302,00							30.000.000,00	
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	80 Orang	9.183.302,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0021	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						41.806.775,00							30.000.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	80 Orang	41.806.775,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.07.2.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						4.514.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	80 Orang	4.514.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0023	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						28.910.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	80 Orang	28.910.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						64.840.000,00					Masyarakat Trenggalek		66.770.300,00	
		Terpenuhinya laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus						64.840.000,00					Masyarakat Trenggalek		66.770.300,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	5.000.000,00						-	6.770.300,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	5.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	54.840.000,00						-	40.000.000,00	
	2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	8 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						54.840.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	80 Orang	54.840.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0017	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						5.000.000,00							6.770.300,00	
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	6.770.300,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PERTANIAN DAN PANGAN						**22.867.414.565,00**							**30.064.255.732,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**442.345.500,00**							**416.074.700,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**442.345.500,00**							**416.074.700,00**	
128.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**						**163.316.000,00**							**205.045.200,00**	
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan						***163.316.000,00***							***205.045.200,00***	
			999.Persentase infrastruktur dan sarana pendukung kemandirian pangan yang diadakan dan dimanfaatkan dengan baik	100 %		100 %	100 %	163.316.000,00						100 %	205.045.200,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						163.316.000,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		205.045.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan						163.316.000,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		205.045.200,00	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2 Unit		2 Unit	2 Unit	160.816.000,00						2 Unit	202.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00						1 Laporan	3.045.200,00	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						160.816.000,00							202.000.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	2 Unit		2 Unit	1 Unit	160.816.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Unit	202.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik						2.500.000,00							3.045.200,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Laporan	3.045.200,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
129.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**190.300.800,00**							**112.300.800,00**	
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat						***190.300.800,00***							***112.300.800,00***	
			999.Persentase Jumlah Cadangan Pangan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	190.300.800,00						100 Persentase	112.300.800,00	
			999.Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	89.35 poin		88.75 poin	88.90 poin	190.300.800,00						89.05 poin	112.300.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						78.791.595,00					Kelompok Tani, KWT, Masyarakat		55.791.595,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah						78.791.595,00					Kelompok Tani, KWT, Masyarakat		55.791.595,00	
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	37.882.629,00						1 Laporan	24.882.629,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.908.966,00						1 Dokumen	5.908.966,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga		50 Keluarga	50 Keluarga	25.000.000,00						50 Keluarga	25.000.000,00	
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga		50 Keluarga	50 Keluarga	25.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		50 Keluarga	25.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota						37.882.629,00							24.882.629,00	
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	37.882.629,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Laporan	24.882.629,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						15.908.966,00							5.908.966,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.908.966,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	5.908.966,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						13.000.000,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		13.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan						13.000.000,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		13.000.000,00	
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Ton		0 Ton	1 Ton	13.000.000,00						1 Ton	13.000.000,00	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						13.000.000,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Ton		0 Ton	1 Ton	13.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Ton	13.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						98.509.205,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		43.509.205,00	
		Tercapainya Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi						98.509.205,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		43.509.205,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	93.375.523,00						1 Laporan	38.375.523,00	
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.133.682,00						1 Dokumen	5.133.682,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						5.133.682,00							5.133.682,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.133.682,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	5.133.682,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						93.375.523,00							38.375.523,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	93.375.523,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Laporan	38.375.523,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
130.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**43.975.500,00**							**53.975.500,00**	
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan						***43.975.500,00***							***53.975.500,00***	
			999.Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	0.64 %		1.27 %	1.27 %	43.975.500,00						1.27 %	53.975.500,00	
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						40.000.000,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		50.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						40.000.000,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		50.000.000,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						40.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						3.975.500,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		3.975.500,00	
		Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan						3.975.500,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		3.975.500,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.975.500,00						1 Laporan	3.975.500,00	
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						3.975.500,00							3.975.500,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.975.500,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Laporan	3.975.500,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
131.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**44.753.200,00**							**44.753.200,00**	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan						***44.753.200,00***							***44.753.200,00***	
			999.Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	86.67 Persentase		86.67 Persentase	86.67 Persentase	44.753.200,00						86.67 Persentase	44.753.200,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						44.753.200,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		44.753.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah						44.753.200,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		44.753.200,00	
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.891.050,00						1 Dokumen	1.891.050,00	
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.130.000,00						12 Dokumen	14.130.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	3.395.250,00						5 Dokumen	3.395.250,00	
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.336.900,00						1 Dokumen	25.336.900,00	
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						14.130.000,00							14.130.000,00	
		Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	14.130.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	14.130.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan						3.395.250,00							3.395.250,00	
		Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	3.395.250,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		5 Dokumen	3.395.250,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						25.336.900,00							25.336.900,00	
		Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.336.900,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	25.336.900,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						1.891.050,00							1.891.050,00	
		Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.891.050,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	1.891.050,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**22.425.069.065,00**							**29.648.181.032,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**22.425.069.065,00**							**29.648.181.032,00**	
132.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.000.273.755,00**							**25.171.972.755,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pertanian						***10.978.379.702,00***							***25.150.078.702,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	10.978.379.702,00						100 %	25.150.078.702,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	10.978.379.702,00						100 %	25.150.078.702,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	54 %		54 %	54 %	10.978.379.702,00						54 %	25.150.078.702,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						164.400.000,00					OPD Pengampu		198.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						164.400.000,00					OPD Pengampu		198.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	17.000.000,00						8 Dokumen	17.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	147.400.000,00						10 Laporan	181.000.000,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						17.000.000,00							17.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	17.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		8 Dokumen	17.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						147.400.000,00							181.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	147.400.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Laporan	181.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.131.505.761,00					OPD Pengampu		24.535.091.400,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.131.505.761,00					OPD Pengampu		24.535.091.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.644.098,00						1 Dokumen	52.414.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250 Orang/bulan		259 Orang/bulan	250 Orang/bulan	10.065.861.663,00						250 Orang/bulan	24.482.677.400,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.065.861.663,00							24.482.677.400,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250 Orang/bulan		259 Orang/bulan	128 Orang/bulan	10.065.861.663,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		250 Orang/bulan	24.482.677.400,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						65.644.098,00							52.414.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.644.098,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Dokumen	52.414.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						256.607.561,00					OPD Pengampu		66.044.909,00	
		Terlaksananya Administrasi Kantor Perangkat Daerah						256.607.561,00					OPD Pengampu		66.044.909,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	256.607.561,00						12 Paket	66.044.909,00	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						248.583.721,00							58.021.069,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	248.583.721,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Paket	58.021.069,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						230.890.220,00					OPD Pengampu		230.890.220,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						230.890.220,00					OPD Pengampu		230.890.220,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	230.890.220,00						12 Laporan	230.890.220,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						230.890.220,00							230.890.220,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	230.890.220,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	230.890.220,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						216.870.213,00					OPD Pengampu		141.946.226,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						216.870.213,00					OPD Pengampu		141.946.226,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		5 Unit	5 Unit	54.000.000,00						5 Unit	57.720.663,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	6 Unit	33.870.213,00						6 Unit	36.401.632,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	129.000.000,00						2 Unit	47.823.931,00	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						54.000.000,00							57.720.663,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		5 Unit	5 Unit	54.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Unit	57.720.663,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							22.531.419,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Unit	22.531.419,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						129.000.000,00							47.823.931,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	129.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	47.823.931,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
133.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**3.081.182.623,00**							**1.466.027.300,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian						***1.720.380.000,00***							***1.163.944.330,00***	
			999.Peningkatan Produksi Hortikultura (Alpukat)	3452.37 Ton		3424.89 Ton	3431.74 Ton	1.720.380.000,00						3438.60 Ton	1.163.944.330,00	
			999.Peningkatan Produksi Hortikultura (Bawang Merah)	480.45 Ton		476.62 Ton	477.57 Ton	1.720.380.000,00						478.53 Ton	1.163.944.330,00	
			999.Peningkatan Produksi Hortikultura (Cabai)	809.45 Ton		803 Ton	804.61 Ton	1.720.380.000,00						806.22 Ton	1.163.944.330,00	
			999.Peningkatan Produksi Hortikultura (Durian)	11988.40 Ton		11892.97 Ton	11916.75 Ton	1.720.380.000,00						11940.59 Ton	1.163.944.330,00	
			999.Peningkatan Produksi Hortikultura (Jahe)	1440.59 Ton		1429.12 Ton	1431.98 Ton	1.720.380.000,00						1434.84 Ton	1.163.944.330,00	
			999.Peningkatan Produksi Hortikultura (Manggis)	2977.13 Ton		2953.44 Ton	2959.34 Ton	1.720.380.000,00						2965.26 Ton	1.163.944.330,00	
			999.Peningkatan Produksi Perkebunan (Cengkeh)	311.93 Ton		309.45 Ton	310.07 Ton	1.720.380.000,00						310.69 Ton	1.163.944.330,00	
			999.Peningkatan Produksi Perkebunan (Kakao)	1096.32 Ton		1074.67 Ton	1080.04 Ton	1.720.380.000,00						1085.44 Ton	1.163.944.330,00	
			999.Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa)	8505.94 Ton		8438.23 Ton	8455.11 Ton	1.720.380.000,00						8472.02 Ton	1.163.944.330,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Peningkatan Produksi Perkebunan (Kopi)	628.64 Ton		618.06 Ton	619.30 Ton	1.720.380.000,00						622.40 Ton	1.163.944.330,00	
			999.Peningkatan Produksi Perkebunan (Nilam)	1366.54 Ton		1262.47 Ton	1287.72 Ton	1.720.380.000,00						1313.48 Ton	1.163.944.330,00	
			999.Peningkatan Produksi Perkebunan (Tembakau)	188.14 Ton		180.80 Ton	182.61 Ton	1.720.380.000,00						184.43 Ton	1.163.944.330,00	
			999.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Jagung)	125223.77 Ton		117983.86 Ton	119753.62 Ton	1.720.380.000,00						121549.92 Ton	1.163.944.330,00	
			999.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Kedelai)	1783.68 Ton		1714.08 Ton	1731.22 Ton	1.720.380.000,00						1748.53 Ton	1.163.944.330,00	
			999.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi)	152758.19 Ton		141124.95 Ton	143947.45 Ton	1.720.380.000,00						146826.40 Ton	1.163.944.330,00	
			999.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ubi Kayu)	198485.92 Ton		183370.31 Ton	187037.72 Ton	1.720.380.000,00						190778.47 Ton	1.163.944.330,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						2.914.465.558,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		1.227.300.650,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						2.914.465.558,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		1.227.300.650,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	84.000.000,00						1 Laporan	227.549.082,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.830.465.558,00						1 Laporan	999.751.568,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						1.636.380.000,00							936.395.248,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.636.380.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Laporan	936.395.248,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						84.000.000,00							227.549.082,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	84.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Laporan	227.549.082,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
134.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**9.012.258.063,00**							**3.145.106.700,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian						***9.012.258.063,00***							***2.645.106.700,00***	
			999.Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	12785 Ha		12785 Ha	12785 Ha	9.012.258.063,00						12785 Ha	2.645.106.700,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian						38.925.262,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Prasarana Pertanian						38.925.262,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		500.000.000,00	
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	12785 Ha		12785 Ha	12785 Ha	38.925.262,00						12785 Ha	500.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian						38.925.262,00							500.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	12785 Ha		12785 Ha	66 Ha	38.925.262,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12785 Ha	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						8.973.332.801,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		2.645.106.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian						8.973.332.801,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		2.645.106.700,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	21 Unit		40 Unit	17 Unit	3.534.757.701,00						21 Unit	2.145.106.700,00	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit		19 Unit	7 Unit	5.438.575.100,00						7 Unit	500.000.000,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						3.534.757.701,00							2.145.106.700,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	21 Unit		40 Unit	20 Unit	3.534.757.701,00	Kab. Trenggalek	DAK Fisik-Bidang Pangan Pertania n-Pertanian-Tema tik Kawasan Produksi Pangan Nasional PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		21 Unit	2.145.106.700,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						5.438.575.100,00							500.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit		19 Unit	18 Unit	5.438.575.100,00	Kab. Trenggalek	Pinjaman Daerah dari LKBB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memanta pkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengemban gan Ekonomi Kreatif dan Kewirausah aan Berbasis Komunitas		7 Unit	500.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
135.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**129.051.300,00**							**149.051.300,00**	
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian						***129.051.300,00***							***149.051.300,00***	
			999.Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100 %		100 %	100 %	129.051.300,00						100 %	149.051.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	100 %		100 %	100 %	129.051.300,00						100 %	149.051.300,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						129.051.300,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		149.051.300,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian						129.051.300,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		149.051.300,00	
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1000 Ha		1000 Ha	1000 Ha	37.245.004,00						1000 Ha	37.245.004,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	60 Ha		60 Ha	60 Ha	91.806.296,00						60 Ha	111.806.296,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						91.806.296,00							111.806.296,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	60 Ha		60 Ha	60 Ha	91.806.296,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		60 Ha	111.806.296,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						37.245.004,00							37.245.004,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1000 Ha		1000 Ha	200 Ha	37.245.004,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1000 Ha	37.245.004,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
136.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**585.000.000,00**							**40.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian						***575.000.000,00***							***40.000.000,00***	
			999.Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	4.46 Persentase		1.91 Persentase	2.55 Persentase	575.000.000,00						3.18 Persentase	40.000.000,00	
			999.Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	575.000.000,00						100 Persentase	40.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian						585.000.000,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan Pertanian						585.000.000,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		40.000.000,00	
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	-		-	-	565.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	10.000.000,00						-	40.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						565.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	-		-	1 Dokumen	565.000.000,00	Kab. Trenggalek	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	14 Unit	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	0,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						10.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	40.000.000,00	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
		UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN						**1.382.696.676,00**							**323.977.023,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.382.696.676,00**							**323.977.023,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1.382.696.676,00**							**323.977.023,00**	
137.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.000.273.755,00**							**25.171.972.755,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pertanian						***21.894.053,00***							***21.894.053,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	21.894.053,00						100 %	21.894.053,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	21.894.053,00						100 %	21.894.053,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	54 %		54 %	54 %	21.894.053,00						54 %	21.894.053,00	
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						256.607.561,00					OPD Pengampu		66.044.909,00	
		Terlaksananya Administrasi Kantor Perangkat Daerah						256.607.561,00					OPD Pengampu		66.044.909,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	256.607.561,00						12 Paket	66.044.909,00	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.023.840,00							8.023.840,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	6 Paket	8.023.840,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Paket	8.023.840,00	UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						216.870.213,00					OPD Pengampu		141.946.226,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						216.870.213,00					OPD Pengampu		141.946.226,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	6 Unit	33.870.213,00						6 Unit	36.401.632,00	
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						13.870.213,00							13.870.213,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	5 Unit	13.870.213,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Unit	13.870.213,00	UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN
138.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**3.081.182.623,00**							**1.466.027.300,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian						***1.194.085.558,00***							***63.356.320,00***	
			999.Peningkatan Produksi Hortikultura (Alpukat)	3452.37 Ton		3424.89 Ton	3431.74 Ton	1.194.085.558,00						3438.60 Ton	63.356.320,00	
			999.Peningkatan Produksi Hortikultura (Bawang Merah)	480.45 Ton		476.62 Ton	477.57 Ton	1.194.085.558,00						478.53 Ton	63.356.320,00	
			999.Peningkatan Produksi Hortikultura (Cabai)	809.45 Ton		803 Ton	804.61 Ton	1.194.085.558,00						806.22 Ton	63.356.320,00	
			999.Peningkatan Produksi Hortikultura (Durian)	11988.40 Ton		11892.97 Ton	11916.75 Ton	1.194.085.558,00						11940.59 Ton	63.356.320,00	
			999.Peningkatan Produksi Hortikultura (Jahe)	1440.59 Ton		1429.12 Ton	1431.98 Ton	1.194.085.558,00						1434.84 Ton	63.356.320,00	
			999.Peningkatan Produksi Hortikultura (Manggis)	2977.13 Ton		2953.44 Ton	2959.34 Ton	1.194.085.558,00						2965.26 Ton	63.356.320,00	
			999.Peningkatan Produksi Perkebunan (Cengkeh)	311.93 Ton		309.45 Ton	310.07 Ton	1.194.085.558,00						310.69 Ton	63.356.320,00	
			999.Peningkatan Produksi Perkebunan (Kakao)	1096.32 Ton		1074.67 Ton	1080.04 Ton	1.194.085.558,00						1085.44 Ton	63.356.320,00	
			999.Peningkatan Produksi Perkebunan (Kelapa)	8505.94 Ton		8438.23 Ton	8455.11 Ton	1.194.085.558,00						8472.02 Ton	63.356.320,00	
			999.Peningkatan Produksi Perkebunan (Kopi)	628.64 Ton		618.06 Ton	619.30 Ton	1.194.085.558,00						622.40 Ton	63.356.320,00	
			999.Peningkatan Produksi Perkebunan (Nilam)	1366.54 Ton		1262.47 Ton	1287.72 Ton	1.194.085.558,00						1313.48 Ton	63.356.320,00	
			999.Peningkatan Produksi Perkebunan (Tembakau)	188.14 Ton		180.80 Ton	182.61 Ton	1.194.085.558,00						184.43 Ton	63.356.320,00	
			999.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Jagung)	125223.77 Ton		117983.86 Ton	119753.62 Ton	1.194.085.558,00						121549.92 Ton	63.356.320,00	
			999.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Kedelai)	1783.68 Ton		1714.08 Ton	1731.22 Ton	1.194.085.558,00						1748.53 Ton	63.356.320,00	
			999.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Padi)	152758.19 Ton		141124.95 Ton	143947.45 Ton	1.194.085.558,00						146826.40 Ton	63.356.320,00	
			999.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Ubi Kayu)	198485.92 Ton		183370.31 Ton	187037.72 Ton	1.194.085.558,00						190778.47 Ton	63.356.320,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						2.914.465.558,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		1.227.300.650,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						2.914.465.558,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		1.227.300.650,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.830.465.558,00						1 Laporan	999.751.568,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						1.194.085.558,00							63.356.320,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.194.085.558,00	Kab. Trenggalek	Pinjaman Daerah dari LKBB Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Laporan	63.356.320,00	UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN
			-	-		-	-	166.717.065,00						-	238.726.650,00	
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						166.717.065,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		238.726.650,00	
		-						166.717.065,00					Kelompok Tani, KWT, Gapoktan, Masyarakat		238.726.650,00	
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	-		-	-	166.717.065,00						-	238.726.650,00	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil						166.717.065,00							238.726.650,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	-		-	1 Laporan	166.717.065,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	238.726.650,00	UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP						**20.288.138.963,00**							**15.969.054.411,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.065.805.000,00**							**2.249.428.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**2.065.805.000,00**							**2.249.428.000,00**	
139.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**2.065.805.000,00**							**2.249.428.000,00**	
		Meningkatnya layanan persampahan Kabupaten						***2.065.805.000,00***							***2.249.428.000,00***	
			999.Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST	34.16 %		31.51 %	32.17 %	2.065.805.000,00						32.83 %	2.249.428.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						2.065.805.000,00					Masyarakat dan pelaku usaha penghasil sampah di wilayah kabupaten/kota		2.249.428.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						2.065.805.000,00					Masyarakat dan pelaku usaha penghasil sampah di wilayah kabupaten/kota		2.249.428.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	505.000.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	19 Unit		1 Unit	28 Unit	180.805.000,00						19 Unit	2.247.428.000,00	
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan						505.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	505.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Dokumen	2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	1.03.04.2.01.0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						180.805.000,00							2.247.428.000,00	
		Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	19 Unit		1 Unit	1 Unit	180.805.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		19 Unit	2.247.428.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota						2.065.805.000,00					Masyarakat dan pelaku usaha penghasil sampah di wilayah kabupaten/kota		2.249.428.000,00	
			Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	-		-	-	1.380.000.000,00						-	0,00	
	1.03.04.2.01.0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS						1.380.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	-		-	1 Unit	1.380.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**18.222.333.963,00**							**13.719.626.411,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**18.222.333.963,00**							**13.719.626.411,00**	
140.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.869.063.334,00**							**9.163.995.211,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***13.814.063.334,00***							***9.118.995.211,00***	
			1.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	13.814.063.334,00						100 %	9.118.995.211,00	
			2.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	13.814.063.334,00						100 %	9.118.995.211,00	
			3.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %		100 %	100 %	13.814.063.334,00						100 %	9.118.995.211,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.000.000,00					Perangkat daerah dan aparatur dalam mendukung perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja." "ASN dan unit		24.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.000.000,00					Perangkat daerah dan aparatur dalam mendukung perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja." "ASN dan unit		24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	16.680.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan		20 Laporan	22 Laporan	7.000.000,00						22 Laporan	7.320.000,00	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.000.000,00							16.680.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	16.680.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7.000.000,00							7.320.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		22 Laporan	7.320.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.095.394.307,00					ASN dan unit kerja yang melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah		8.555.426.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						13.095.394.307,00					ASN dan unit kerja yang melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah		8.555.426.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	110.000.000,00						40 Dokumen	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 Orang/bulan		228 Orang/bulan	228 Orang/bulan	12.985.394.307,00						228 Orang/bulan	8.455.426.000,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.985.394.307,00							8.455.426.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 Orang/bulan		228 Orang/bulan	209 Orang/bulan	12.985.394.307,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		228 Orang/bulan	8.455.426.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						110.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	110.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		40 Dokumen	100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						9.000.000,00					Perangkat daerah terkait penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah		18.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						9.000.000,00					Perangkat daerah terkait penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah		18.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00						4 Laporan	18.000.000,00	
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						9.000.000,00							18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						6.000.000,00					Perangkat daerah terkait penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah		5.040.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						6.000.000,00					Perangkat daerah terkait penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah		5.040.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	6.000.000,00						14 Dokumen	5.040.000,00	
	2.11.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						6.000.000,00							5.040.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	6.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		14 Dokumen	5.040.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						37.500.000,00					ASN dan unit kerja yang melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah		10.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						37.500.000,00					ASN dan unit kerja yang melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah		10.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		65 Orang	2 Orang	37.500.000,00						2 Orang	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						37.500.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		65 Orang	2 Orang	37.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Orang	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						101.344.211,00					Perangkat daerah dan pegawai yang memerlukan dukungan pelayanan administrasi perkantoran		81.344.211,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						101.344.211,00					Perangkat daerah dan pegawai yang memerlukan dukungan pelayanan administrasi perkantoran		81.344.211,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		3 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00						5 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	30.000.000,00						3 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.999.422,00						1 Paket	4.999.422,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	31.344.789,00						3 Paket	31.344.789,00	
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.999.422,00							4.999.422,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.999.422,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Paket	4.999.422,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						31.344.789,00							31.344.789,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	31.344.789,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Paket	31.344.789,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Paket	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Paket	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		3 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						40.000.000,00					Perangkat daerah dan ASN pengguna barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		38.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						40.000.000,00					Perangkat daerah dan ASN pengguna barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		38.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		3 Unit	10 Unit	40.000.000,00						10 Unit	38.000.000,00	
	2.11.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.000.000,00							38.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		3 Unit	4 Unit	40.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Unit	38.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						334.958.400,00					Perangkat daerah dan ASN dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah		207.115.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						334.958.400,00					Perangkat daerah dan ASN dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah		207.115.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	198.458.400,00						12 Laporan	107.115.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	111.500.000,00						12 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	10.000.000,00	
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						198.458.400,00							107.115.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	198.458.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	107.115.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Laporan	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						111.500.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	111.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	80.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						222.866.416,00					Perangkat daerah dan ASN pengguna barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		225.070.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						222.866.416,00					Perangkat daerah dan ASN pengguna barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan		225.070.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	16.601.489,00						1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit		50 Unit	50 Unit	163.764.927,00						50 Unit	180.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	5.000.000,00						20 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	30.000.000,00						10 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.500.000,00						1 Unit	15.070.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						163.764.927,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit		50 Unit	50 Unit	163.764.927,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		50 Unit	180.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		20 Unit	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Unit	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						16.601.489,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	16.601.489,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						7.500.000,00							15.070.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Buluagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	15.070.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
141.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**75.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP						***75.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	75.000.000,00						100 %	0,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota						75.000.000,00					Perangkat daerah, masyarakat, dan pelaku usaha yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		0,00	
		Tersusunnya dokumen RPPLH Kabupaten/Kota						75.000.000,00					Perangkat daerah, masyarakat, dan pelaku usaha yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		0,00	
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						0 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota						75.000.000,00							0,00	
		RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		0 Dokumen	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
142.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**596.500.000,00**							**265.500.000,00**	
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						***596.500.000,00***							***170.500.000,00***	
			999.Persentase Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100.00 %		32.80 %	49.60 %	596.500.000,00						66.40 %	170.500.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						596.500.000,00					Masyarakat dan pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		265.500.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						596.500.000,00					Masyarakat dan pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		265.500.000,00	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	41 Lokasi		0 Lokasi	41 Lokasi	105.000.000,00						41 Lokasi	20.000.000,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	55.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	36.000.000,00						1 Laporan	45.000.000,00	
			Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	3 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	135.500.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
	2.11.03.2.01.0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	2 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		2 Laporan	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						105.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	41 Lokasi		0 Lokasi	47 Lokasi	105.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		41 Lokasi	20.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan						135.500.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	3 Laporan		0 Laporan	3 Laporan	135.500.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		2 Laporan	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota						36.000.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	36.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Laporan	45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						50.000.000,00							55.500.000,00	
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Dokumen	55.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota						25.000.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Laporan	45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Terlaksananya Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						596.500.000,00					Masyarakat dan pelaku usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		265.500.000,00	
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	-		-	-	205.000.000,00						-	0,00	
	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK						205.000.000,00							0,00	
		Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	-		-	1 Dokumen	205.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
143.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**1.390.000.000,00**							**2.826.796.700,00**	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati						***1.390.000.000,00***							***2.826.796.700,00***	
			999.Persentase RTH	3.29 %		3.20 %	3.22 %	1.390.000.000,00						3.25 %	2.826.796.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						1.390.000.000,00					Masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelestarian keanekaragaman hayati daerah		2.826.796.700,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						1.390.000.000,00					Masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pelestarian keanekaragaman hayati daerah		2.826.796.700,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	14.10 Ha		14.10 Ha	14.10 Ha	1.390.000.000,00						14.10 Ha	2.826.796.700,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						1.390.000.000,00							2.826.796.700,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	14.10 Ha		14.10 Ha	14,10 Ha	1.390.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		14.10 Ha	2.826.796.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
144.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**7.000.000,00**							**6.162.800,00**	
		Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)						***7.000.000,00***							***6.162.800,00***	
			999.Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100 %		100 %	100 %	7.000.000,00						100 %	6.162.800,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3						7.000.000,00					Pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3 di wilayah kabupaten/kota		6.162.800,00	
		Tersusunnya dokumen Persetujuan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3						7.000.000,00					Pelaku usaha dan kegiatan penghasil limbah B3 di wilayah kabupaten/kota		6.162.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00						3 Dokumen	6.162.800,00	
	2.11.05.2.01.0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)						7.000.000,00							6.162.800,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		3 Dokumen	6.162.800,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
145.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**47.000.000,00**							**50.531.400,00**	
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan						***47.000.000,00***							***50.531.400,00***	
			999.Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Taat terhadap persetujuan Lingkungan	56 %		49 %	50 %	47.000.000,00						52 %	50.531.400,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						47.000.000,00					Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah daerah		50.531.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten						47.000.000,00					Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah daerah		50.531.400,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	24 Badan Usaha		24 Badan Usaha	24 Badan Usaha	36.500.000,00						24 Badan Usaha	26.482.100,00	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	10.500.000,00						24 Dokumen	24.049.300,00	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						10.500.000,00							24.049.300,00	
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	10.500.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		24 Dokumen	24.049.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						36.500.000,00							26.482.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	24 Badan Usaha		24 Badan Usaha	24 Badan Usaha	36.500.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		24 Badan Usaha	26.482.100,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
146.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**61.000.000,00**							**30.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup						***61.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			999.Persentase Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan kepada masyarakat	90.72 %		49.68 %	60.63 %	61.000.000,00						70.66 %	30.000.000,00	
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						61.000.000,00					Lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup		30.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan						61.000.000,00					Lembaga kemasyarakatan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup		30.000.000,00	
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	13 Lembaga		13 Lembaga	13 Lembaga	61.000.000,00						13 Lembaga	30.000.000,00	
	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat						61.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	13 Lembaga		13 Lembaga	13 Lembaga	61.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		13 Lembaga	30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
147.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**126.000.000,00**							**119.301.300,00**	
		Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						***126.000.000,00***							***119.301.300,00***	
			999.Persentase Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	36.71 %		23.48 %	26.79 %	126.000.000,00						30.10 %	119.301.300,00	
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						126.000.000,00					Masyarakat, lembaga, dan pelaku usaha yang berprestasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		119.301.300,00	
		Terlaksananya kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten						126.000.000,00					Masyarakat, lembaga, dan pelaku usaha yang berprestasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		119.301.300,00	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	30 Entitas		30 Entitas	30 Entitas	126.000.000,00						30 Entitas	119.301.300,00	
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						126.000.000,00							119.301.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	30 Entitas		30 Entitas	30 Entitas	126.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		30 Entitas	119.301.300,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
148.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**6.500.000,00**							**7.523.700,00**	
		Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup						***6.500.000,00***							***7.523.700,00***	
			999.Persentase Penanganan Pengaduan lingkungan hidup	100 %		100 %	100 %	6.500.000,00						100 %	7.523.700,00	
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota						6.500.000,00					Masyarakat dan pelaku usaha yang terkait dengan pengaduan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		7.523.700,00	
		Terlaksananya kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH yang Terlayani						6.500.000,00					Masyarakat dan pelaku usaha yang terkait dengan pengaduan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		7.523.700,00	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	4 Pengaduan		4 Pengaduan	4 Pengaduan	6.500.000,00						4 Pengaduan	7.523.700,00	
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota						6.500.000,00							7.523.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	4 Pengaduan		4 Pengaduan	4 Pengaduan	6.500.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		4 Pengaduan	7.523.700,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
149.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**2.044.270.629,00**							**1.249.815.300,00**	
		Meningkatnya tata kelola persampahan						***2.039.270.629,00***							***1.244.815.300,00***	
			999.Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	44.30 poin		42.30 poin	42.80 poin	2.039.270.629,00						43.30 poin	1.244.815.300,00	
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah						2.044.270.629,00					Masyarakat dan pelaku usaha penghasil sampah di wilayah kabupaten/kota		1.249.815.300,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah						2.044.270.629,00					Masyarakat dan pelaku usaha penghasil sampah di wilayah kabupaten/kota		1.249.815.300,00	
			Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok		2 Kelompok	5 Kelompok	100.000.000,00						5 Kelompok	13.424.506,00	
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	38.434 Ton		35.514 Ton	36.244 Ton	376.740.900,00						36.974 Ton	97.025.460,00	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	38.434 Ton		35.514 Ton	36.244 Ton	927.393.129,00						36.974 Ton	759.394.350,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit		1 Unit	3 Unit	197.136.600,00						3 Unit	76.070.584,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	4 Unit		13 Unit	4 Unit	433.000.000,00						4 Unit	293.900.400,00	
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah	23.87 Persentase		22.07 Persentase	22.52 Persentase	5.000.000,00						22.97 Persentase	5.000.000,00	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						100.000.000,00							13.424.506,00	
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok		2 Kelompok	3 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		5 Kelompok	13.424.506,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						197.136.600,00							76.070.584,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit		1 Unit	2 Unit	197.136.600,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		3 Unit	76.070.584,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan						927.393.129,00							759.394.350,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	38.434 Ton		35.514 Ton	36,244 Ton	927.393.129,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		36.974 Ton	759.394.350,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah						433.000.000,00							293.900.400,00	
		Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	4 Unit		13 Unit	3 Unit	433.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		4 Unit	293.900.400,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	23.87 Persentase		22.07 Persentase	22,52 Persentase	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		22.97 Persentase	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pajak Air Tanah	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1 Laporan	5.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						376.740.900,00							97.025.460,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	38.434 Ton		35.514 Ton	36,244 Ton	376.740.900,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		36.974 Ton	97.025.460,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**9.173.616.192,00**							**8.614.194.255,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.173.616.192,00**							**8.614.194.255,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**9.173.616.192,00**							**8.614.194.255,00**	
150.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.003.534.392,00**							**8.439.112.455,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***9.003.534.392,00***							***8.439.112.455,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	9.003.534.392,00						100 %	8.439.112.455,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	9.003.534.392,00						100 %	8.439.112.455,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97 %		95 %	95.5 %	9.003.534.392,00						96 %	8.439.112.455,00	
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.474.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		6.474.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.474.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		6.474.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	3.259.000,00						15 Dokumen	3.259.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	3.215.000,00						38 Laporan	3.215.000,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.259.000,00							3.259.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	3.259.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Dokumen	3.259.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.215.000,00							3.215.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	3.215.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		38 Laporan	3.215.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.827.748.771,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		6.763.326.834,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.827.748.771,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		6.763.326.834,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	54.884.000,00						36 Dokumen	70.360.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	367 Dokumen		367 Dokumen	367 Dokumen	1.020.000,00						367 Dokumen	1.020.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	6.771.844.771,00						70 Orang/bulan	6.691.946.834,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.771.844.771,00							6.691.946.834,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		70 Orang/bulan	70 Orang/bulan	6.771.844.771,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		70 Orang/bulan	6.691.946.834,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						54.884.000,00							70.360.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	54.884.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Dokumen	70.360.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.020.000,00							1.020.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	367 Dokumen		367 Dokumen	367 Dokumen	1.020.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		367 Dokumen	1.020.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.989.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.989.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.989.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.989.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37 Dokumen		37 Dokumen	37 Dokumen	1.989.000,00						37 Dokumen	1.989.000,00	
	2.12.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.989.000,00							1.989.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37 Dokumen		37 Dokumen	37 Dokumen	1.989.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		37 Dokumen	1.989.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						761.446.660,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		503.793.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						761.446.660,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		503.793.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00						12 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	74.542.000,00						36 Laporan	74.542.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	14.000.000,00						4 Paket	14.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	47.000.000,00						12 Paket	47.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	45.604.000,00						12 Paket	45.604.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	13.489.000,00						4 Paket	13.489.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket		14 Paket	14 Paket	560.811.660,00						14 Paket	303.158.000,00	
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						13.489.000,00							13.489.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	13.489.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	13.489.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						560.811.660,00							303.158.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket		14 Paket	14 Paket	560.811.660,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		14 Paket	303.158.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						14.000.000,00							14.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	14.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	14.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						45.604.000,00							45.604.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	45.604.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Paket	45.604.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						47.000.000,00							47.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	47.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Paket	47.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						74.542.000,00							74.542.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	74.542.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	74.542.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	6.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						742.346.340,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		500.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						742.346.340,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		500.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	30 Unit	742.346.340,00						30 Unit	500.000.000,00	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						742.346.340,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	30 Unit	742.346.340,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		30 Unit	500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						436.317.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		436.317.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						436.317.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		436.317.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	284.667.000,00						48 Laporan	284.667.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	146.700.000,00						12 Laporan	146.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.950.000,00						12 Laporan	4.950.000,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.950.000,00							4.950.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.950.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	4.950.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						284.667.000,00							284.667.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	284.667.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		48 Laporan	284.667.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						146.700.000,00							146.700.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	146.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	146.700.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						227.212.621,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		227.212.621,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						227.212.621,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		227.212.621,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	65 Unit		3 Unit	65 Unit	45.000.000,00						65 Unit	45.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	122.312.621,00						37 Unit	122.312.621,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit		64 Unit	64 Unit	25.660.000,00						64 Unit	25.660.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	34.240.000,00						5 Unit	34.240.000,00	
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						122.312.621,00							122.312.621,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	122.312.621,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		37 Unit	122.312.621,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.660.000,00							25.660.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	64 Unit		64 Unit	64 Unit	25.660.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		64 Unit	25.660.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						45.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	65 Unit		3 Unit	65 Unit	45.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		65 Unit	45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						34.240.000,00							34.240.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	34.240.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Unit	34.240.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
151.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**64.060.000,00**							**64.060.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk						***64.060.000,00***							***64.060.000,00***	
			999.Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	9 %		5 %	6 %	64.060.000,00						7 %	64.060.000,00	
			999.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	100 %		100 %	100 %	64.060.000,00						100 %	64.060.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						22.060.000,00					Masyarakat		22.060.000,00	
		Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk						22.060.000,00					Masyarakat		22.060.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	37 Laporan		37 Laporan	37 Laporan	22.060.000,00						37 Laporan	22.060.000,00	
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						22.060.000,00							22.060.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	37 Laporan		37 Laporan	37 Laporan	22.060.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		37 Laporan	22.060.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						42.000.000,00					Masyarakat		42.000.000,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan pendaftaran penduduk						42.000.000,00					Masyarakat		42.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	145000 Dokumen		105000 Dokumen	127000 Dokumen	28.250.000,00						133000 Dokumen	28.250.000,00	
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk						28.250.000,00							28.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	145000 Dokumen		105000 Dokumen	127000 Dokumen	28.250.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		133000 Dokumen	28.250.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Terlaksananya penyelenggaraan pendaftaran penduduk						42.000.000,00					Masyarakat		42.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	-	3.750.000,00						-	3.750.000,00	
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk						3.750.000,00							3.750.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	1 Laporan	3.750.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		-	3.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	-		-	5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		-	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
152.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**55.000.000,00**							**60.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil						***55.000.000,00***							***60.000.000,00***	
			999.Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %		99.60 %	99.70 %	55.000.000,00						99.80 %	60.000.000,00	
			999.Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %		100 %	100 %	55.000.000,00						100 %	60.000.000,00	
			999.Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %		100 %	100 %	55.000.000,00						100 %	60.000.000,00	
			999.Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %		100 %	100 %	55.000.000,00						100 %	60.000.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						10.000.000,00					Masyarakat		10.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil						10.000.000,00					Masyarakat		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	11000 Dokumen		17240 Dokumen	11000 Dokumen	10.000.000,00						11000 Dokumen	10.000.000,00	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	11000 Dokumen		17240 Dokumen	11000 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		11000 Dokumen	10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						45.000.000,00					Masyarakat		50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						45.000.000,00					Masyarakat		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00						12 Laporan	45.000.000,00	
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil						40.000.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	45.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						45.000.000,00					Masyarakat		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota						5.000.000,00								5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	-		-	3 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		-	5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
153.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**42.997.800,00**							**42.997.800,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan						***42.997.800,00***							***42.997.800,00***	
			999.Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	100 %		100 %	100 %	42.997.800,00						100 %	42.997.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						11.449.000,00					OPD/Lembaga Pengguna		11.449.000,00	
		Terwujudnya Pemanfaatan Data Kependudukan						11.449.000,00					OPD/Lembaga Pengguna		11.449.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	11.449.000,00						5 Dokumen	11.449.000,00	
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan						11.449.000,00							11.449.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	11.449.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Dokumen	11.449.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						14.447.600,00					OPD/Lembaga Pengguna		14.447.600,00	
		Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						14.447.600,00					OPD/Lembaga Pengguna		14.447.600,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	300 Dokumen		274 Dokumen	300 Dokumen	14.447.600,00						300 Dokumen	14.447.600,00	
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						14.447.600,00							14.447.600,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	300 Dokumen		274 Dokumen	300 Dokumen	14.447.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		300 Dokumen	14.447.600,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						17.101.200,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		17.101.200,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						17.101.200,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		17.101.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	17.101.200,00						36 Laporan	17.101.200,00	
	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						17.101.200,00							17.101.200,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	17.101.200,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	17.101.200,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
154.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**8.024.000,00**							**8.024.000,00**	
		Meningkatnya kualitas profil kependudukan						***8.024.000,00***							***8.024.000,00***	
			999.Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 %		100 %	100 %	8.024.000,00						100 %	8.024.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan						8.024.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		8.024.000,00	
		Tersedianya Data Kependudukan berdasarkan karakteristik data skala Kabupaten dalam 1 tahun						8.024.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		8.024.000,00	
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	408 Dokumen		408 Dokumen	408 Dokumen	1.490.000,00						408 Dokumen	1.490.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.534.000,00						2 Dokumen	6.534.000,00	
		Tersedianya Profil Kependudukan						8.024.000,00					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		8.024.000,00	
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	408 Dokumen		408 Dokumen	408 Dokumen	1.490.000,00						408 Dokumen	1.490.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.534.000,00						2 Dokumen	6.534.000,00	
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota						1.490.000,00							1.490.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	408 Dokumen		408 Dokumen	408 Dokumen	1.490.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		408 Dokumen	1.490.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						6.534.000,00							6.534.000,00	
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	6.534.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Dokumen	6.534.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						**8.841.706.745,00**							**9.545.383.400,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**8.841.706.745,00**							**9.545.383.400,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**8.841.706.745,00**							**9.545.383.400,00**	
155.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.141.764.546,00**							**5.456.513.500,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***5.136.764.546,00***							***5.256.513.500,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	5.136.764.546,00						100 %	5.256.513.500,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	5.136.764.546,00						100 %	5.256.513.500,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	91 %		90.25 %	90.40 %	5.136.764.546,00						90.60 %	5.256.513.500,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						47.000.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		66.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja/Keuangan Perangkat Daerah						47.000.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		66.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen		38 Dokumen	38 Dokumen	37.000.000,00						38 Dokumen	56.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45 Laporan		40 Laporan	45 Laporan	10.000.000,00						45 Laporan	10.000.000,00	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						37.000.000,00							56.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40 Dokumen		38 Dokumen	38 Dokumen	37.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		38 Dokumen	56.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45 Laporan		40 Laporan	30 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		45 Laporan	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.761.754.946,00					ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		4.937.013.500,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan perangkat Daerah						4.761.754.946,00					ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		4.937.013.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen		38 Dokumen	38 Dokumen	66.720.000,00						38 Dokumen	62.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	260 Dokumen		230 Dokumen	240 Dokumen	5.000.000,00						245 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	5.000.000,00						38 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan		43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	4.685.034.946,00						43 Orang/bulan	4.845.013.500,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.685.034.946,00							4.845.013.500,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan		43 Orang/bulan	41 Orang/bulan	4.685.034.946,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		43 Orang/bulan	4.845.013.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						66.720.000,00							62.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen		38 Dokumen	38 Dokumen	66.720.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		38 Dokumen	62.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	260 Dokumen		230 Dokumen	260 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		245 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		38 Laporan	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						14.400.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		20.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah						14.400.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	14.400.000,00						15 Laporan	20.000.000,00	
	2.13.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						14.400.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	14.400.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Laporan	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7.700.000,00					ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		48.500.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7.700.000,00					ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		48.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.700.000,00						12 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang		5 Orang	6 Orang	3.000.000,00						6 Orang	38.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						4.700.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						3.000.000,00							38.500.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang		5 Orang	2 Orang	3.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Orang	38.500.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						133.899.600,00					ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		143.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						133.899.600,00					ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		143.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00						12 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00						12 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	30.499.600,00						3 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	23.000.000,00						4 Paket	38.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	23.600.000,00						4 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.600.000,00						2 Paket	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	8.400.000,00						3 Paket	10.000.000,00	
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.600.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.400.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	8.400.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Paket	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.499.600,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	30.499.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Paket	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						23.600.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	6 Paket	23.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	10.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						23.000.000,00							38.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	23.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	38.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.800.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.800.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						38.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						19.500.000,00					ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		25.000.000,00	
		Tersediaanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						19.500.000,00					ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		25.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	19.500.000,00						2 Unit	25.000.000,00	
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	19.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						112.750.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah						112.750.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	45.250.000,00						36 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	62.000.000,00						12 Laporan	62.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.500.000,00						12 Laporan	13.000.000,00	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						45.250.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	45.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	45.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.500.000,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						62.000.000,00							62.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	62.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	62.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						44.760.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		97.000.000,00	
		Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah						44.760.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		97.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit		32 Unit	32 Unit	28.760.000,00						32 Unit	47.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	24 Unit		26 Unit	24 Unit	3.500.000,00						26 Unit	7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit		12 Unit	30 Unit	4.500.000,00						24 Unit	13.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	2 Unit	8.000.000,00						1 Unit	30.000.000,00	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						28.760.000,00							47.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit		32 Unit	31 Unit	28.760.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		32 Unit	47.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						3.500.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	24 Unit		26 Unit	15 Unit	3.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		26 Unit	7.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.500.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit		12 Unit	12 Unit	4.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		24 Unit	13.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						8.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	2 Unit	8.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
156.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**						**123.900.000,00**							**79.320.000,00**	
		Meningkatnya kualitas penataan desa						***83.900.000,00***							***54.320.000,00***	
			1.Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	83.900.000,00						100 Persentase	54.320.000,00	
			999.Persentase Pengesahan Batas Desa	60.53 %		30.92 %	40.79 %	83.900.000,00						47.37 %	54.320.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						123.900.000,00					Desa se Kabupaten Trenggalek		79.320.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa						123.900.000,00					Desa se Kabupaten Trenggalek		79.320.000,00	
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	10 Desa		5 Desa	6 Desa	40.000.000,00						6 Desa	25.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	152 Desa		152 Desa	152 Desa	43.900.000,00						152 Desa	29.320.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	30 Unit		30 Unit	30 Unit	40.000.000,00						30 Unit	25.000.000,00	
	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa						43.900.000,00							29.320.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	152 Desa		152 Desa	152 Desa	43.900.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		152 Desa	29.320.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa						40.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	10 Desa		5 Desa	6 Desa	40.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		6 Desa	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa						40.000.000,00							25.000.000,00	
		Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	30 Unit		30 Unit	30 Unit	40.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		30 Unit	25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
157.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**40.000.000,00**							**50.000.000,00**	
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa						***20.000.000,00***							***50.000.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100 %		100 %	100 %	20.000.000,00						100 %	50.000.000,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						40.000.000,00					Desa se Kabupaten Trenggalek		50.000.000,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						40.000.000,00					Desa se Kabupaten Trenggalek		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00						6 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00						5 Dokumen	35.000.000,00	
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	6 Dokumen		6 Dokumen	10 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		6 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota						20.000.000,00							35.000.000,00	
		Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		5 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
158.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**3.031.641.799,00**							**3.374.344.500,00**	
		Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan desa						***3.031.641.799,00***							***3.374.344.500,00***	
			999.Persentase Administrasi Desa yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu	100 %		100 %	100 %	3.031.641.799,00						100 %	3.374.344.500,00	
			999.Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100 %		100 %	100 %	3.031.641.799,00						100 %	3.374.344.500,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						3.031.641.799,00					Desa se Kabupaten Trenggalek		3.374.344.500,00	
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						3.031.641.799,00					Desa se Kabupaten Trenggalek		3.374.344.500,00	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	912 Orang		608 Orang	912 Orang	125.500.000,00						1064 Orang	140.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	6 Desa		6 Desa	2 Desa	15.000.000,00						6 Desa	115.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00						4 Dokumen	105.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	47 Dokumen		18 Dokumen	24 Dokumen	86.500.000,00						36 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	2.613.641.799,00						36 Dokumen	2.874.344.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	9 Laporan		128 Laporan	128 Laporan	121.000.000,00						15 Laporan	50.000.000,00	
	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						2.613.641.799,00							2.874.344.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	2.613.641.799,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		36 Dokumen	2.874.344.500,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						125.500.000,00							140.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	912 Orang		608 Orang	432 Orang	125.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1064 Orang	140.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						86.500.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	47 Dokumen		18 Dokumen	24 Dokumen	86.500.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		36 Dokumen	90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						121.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	9 Laporan		128 Laporan	128 Laporan	121.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		15 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa						15.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	6 Desa		6 Desa	10 Desa	15.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		6 Desa	115.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						70.000.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Dokumen	105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
159.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**504.400.400,00**							**585.205.400,00**	
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan						***504.400.400,00***							***585.205.400,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	91.78 %		50.66 %	67.76 %	504.400.400,00						84.98 %	585.205.400,00	
			999.Persentase warga miskin usia produktif yang menjadi pelaku usaha baru	11.36 %		9.74 %	10.06 %	504.400.400,00						10.69 %	585.205.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						504.400.400,00					Kelompok Masyarakat dan LKD		585.205.400,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						504.400.400,00					Kelompok Masyarakat dan LKD		585.205.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	154.400.400,00						4 Dokumen	110.205.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	250.000.000,00						6 Dokumen	320.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	35.000.000,00						3 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	65.000.000,00						3 Lembaga	65.000.000,00	
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						65.000.000,00							65.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	65.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Lembaga	65.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						154.400.400,00							110.205.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	154.400.400,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Dokumen	110.205.400,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						35.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	35.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Laporan	90.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						250.000.000,00							320.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	6 Dokumen		6 Dokumen	8 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		6 Dokumen	320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						**10.618.716.646,00**							**11.109.472.310,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.618.716.646,00**							**11.109.472.310,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**10.424.750.951,00**							**10.921.787.310,00**	
160.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.192.925.442,00**							**6.339.855.800,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***6.096.925.442,00***							***6.239.855.800,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	6.096.925.442,00						100 %	6.239.855.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	6.096.925.442,00						100 %	6.239.855.800,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98.79 %		98.79 %	98.79 %	6.096.925.442,00						98.79 %	6.239.855.800,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.841.400,00					ASN Dinas Kominfo		15.841.400,00	
		tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun						15.841.400,00					ASN Dinas Kominfo		15.841.400,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	3.000.000,00						10 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	12.841.400,00						17 Laporan	12.841.400,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Dokumen	3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						12.841.400,00							12.841.400,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	12.841.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		17 Laporan	12.841.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.763.346.685,00					ASN Dinas Kominfo		5.863.814.400,00	
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah yang diselesaikan						5.763.346.685,00					ASN Dinas Kominfo		5.863.814.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	97.000.000,00						12 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen		150 Dokumen	150 Dokumen	2.000.000,00						150 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00						12 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan		56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	5.662.346.685,00						56 Orang/bulan	5.769.814.400,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.662.346.685,00							5.769.814.400,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan		56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	5.662.346.685,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		56 Orang/bulan	5.769.814.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						97.000.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	97.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	90.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	150 Dokumen		150 Dokumen	150 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		150 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						30.000.000,00					ASN Dinas Kominfo		30.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan						30.000.000,00					ASN Dinas Kominfo		30.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang		56 Orang	56 Orang	30.000.000,00						56 Orang	30.000.000,00	
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	56 Orang		56 Orang	56 Orang	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		56 Orang	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						179.000.000,00					ASN Dinas Kominfo		182.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan						179.000.000,00					ASN Dinas Kominfo		182.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00						12 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00						4 Laporan	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan		55 Laporan	55 Laporan	72.000.000,00						55 Laporan	63.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	10.000.000,00						12 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	30.000.000,00						4 Paket	41.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	30.000.000,00						6 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00						4 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	28.000.000,00						6 Paket	28.000.000,00	
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						28.000.000,00							28.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	28.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	28.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Paket	10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						30.000.000,00							41.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	41.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						72.000.000,00							63.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan		55 Laporan	55 Laporan	72.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		55 Laporan	63.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	2.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						28.000.000,00					ASN Dinas Kominfo		30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan						28.000.000,00					ASN Dinas Kominfo		30.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	28.000.000,00						1 Unit	30.000.000,00	
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						28.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	28.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						106.776.050,00					ASN Dinas Kominfo		131.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan						106.776.050,00					ASN Dinas Kominfo		131.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	102.776.050,00						12 Laporan	127.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00						12 Laporan	4.000.000,00	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						102.776.050,00							127.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	102.776.050,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	127.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						69.961.307,00					ASN Dinas Kominfo		87.000.000,00	
		Terlaksananya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara						69.961.307,00					ASN Dinas Kominfo		87.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		4 Unit	26 Unit	23.000.000,00						26 Unit	34.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	9 Unit		9 Unit	9 Unit	3.000.000,00						9 Unit	3.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	20.000.000,00						4 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	23.961.307,00						2 Unit	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						23.000.000,00							34.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		4 Unit	4 Unit	23.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		26 Unit	34.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	9 Unit		9 Unit	9 Unit	3.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		9 Unit	3.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Unit	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						23.961.307,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	23.961.307,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	30.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
161.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**1.527.085.510,00**							**1.543.892.010,00**	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah						***1.527.085.510,00***							***1.543.892.010,00***	
			999.Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	90 %		90 %	90 %	1.527.085.510,00						90 %	1.543.892.010,00	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.527.085.510,00					ASN dan masyarakat		1.543.892.010,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						1.527.085.510,00					ASN dan masyarakat		1.543.892.010,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	-	32.000.000,00						-	32.000.000,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	1.181.085.510,00						-	1.181.085.510,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	-	40.000.000,00						-	47.289.200,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	-	24.000.000,00						-	25.988.700,00	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	50.000.000,00						-	57.528.600,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						32.000.000,00							32.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-		-	50 Laporan	32.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	32.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						50.000.000,00							57.528.600,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	100 %	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	57.528.600,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						1.181.085.510,00							1.181.085.510,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	482900 Orang	1.181.085.510,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	1.181.085.510,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik						24.000.000,00							25.988.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	5 Dokumen	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	25.988.700,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0031	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						40.000.000,00							47.289.200,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	7 Komunitas	40.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	47.289.200,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0032	Penyusunan Konten						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	10 Konten	200.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	200.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
162.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**2.704.739.999,00**							**3.038.039.500,00**	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika						***2.704.739.999,00***							***3.038.039.500,00***	
			999.Nilai Aspek Teknologi SPBE	3.2 Nilai		2.4 Nilai	2.6 Nilai	2.704.739.999,00						2.8 Nilai	3.038.039.500,00	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						485.600.000,00					OPD dan masyarakat		40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						485.600.000,00					OPD dan masyarakat		40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	485.600.000,00						12 Dokumen	40.000.000,00	
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa						485.600.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	485.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		12 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						2.219.139.999,00					ASN dan masyarakat		2.998.039.500,00	
		Terselenggaranya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						2.219.139.999,00					ASN dan masyarakat		2.998.039.500,00	
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00						12 Laporan	118.321.000,00	
	2.16.03.2.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						200.000.000,00							118.321.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		12 Laporan	118.321.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Terselenggaranya Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota						2.219.139.999,00					ASN dan masyarakat		2.998.039.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	381.400.000,00						-	132.511.370,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	1.637.739.999,00						-	2.747.207.130,00	
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						381.400.000,00							132.511.370,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	4 Layanan	381.400.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	132.511.370,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						1.637.739.999,00							2.747.207.130,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	76 Titik	1.637.739.999,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		-	2.747.207.130,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**107.965.695,00**							**135.363.000,00**	
163.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**107.965.695,00**							**135.363.000,00**	
		Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)						***107.965.695,00***							***135.363.000,00***	
			999.Cakupan penyelenggaraan statistik sektoral secara digital	94 %		92 %	92.5 %	107.965.695,00						93 %	135.363.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						107.965.695,00					ASN dan masyarakat		135.363.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Data Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun						107.965.695,00					ASN dan masyarakat		135.363.000,00	
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	60 Orang		60 Orang	60 Orang	63.965.695,00						60 Orang	87.210.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %		100 %	100 %	44.000.000,00						100 %	48.153.000,00	
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral						44.000.000,00							48.153.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %		100 %	100 %	44.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		100 %	48.153.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						63.965.695,00							87.210.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	60 Orang		60 Orang	60 Orang	63.965.695,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		60 Orang	87.210.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**86.000.000,00**							**52.322.000,00**	
164.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**86.000.000,00**							**52.322.000,00**	
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah						***86.000.000,00***							***52.322.000,00***	
			999.Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	47.06 %		42.7 %	43.79 %	86.000.000,00						44.88 %	52.322.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						86.000.000,00					ASN dan masyarakat		52.322.000,00	
		Terlaksananya Penyelanggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kab/Kota						86.000.000,00					ASN dan masyarakat		52.322.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	86.000.000,00						-	52.322.000,00	
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						86.000.000,00							52.322.000,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	12 Laporan	86.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		-	52.322.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN						**12.752.817.322,00**							**13.498.156.200,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.408.449.198,00**							**11.572.959.500,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**10.408.449.198,00**							**11.572.959.500,00**	
165.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**9.763.690.406,00**							**10.735.187.100,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***9.753.690.406,00***							***10.700.187.100,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	9.753.690.406,00						100 %	10.700.187.100,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	9.753.690.406,00						100 %	10.700.187.100,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98.33 %		98.33 %	98.33 %	9.753.690.406,00						98.33 %	10.700.187.100,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.000.000,00					Karyawan/ Karyawati Diskomidag		7.986.105,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						6.000.000,00					Karyawan/ Karyawati Diskomidag		7.986.105,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.000.000,00						6 Dokumen	3.986.105,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	3.000.000,00						30 Laporan	4.000.000,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00							3.986.105,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Dokumen	3.986.105,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	3.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		30 Laporan	4.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.905.000.046,00					Karyawan/ Karyawati Diskomidag		9.821.753.370,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.905.000.046,00					Karyawan/ Karyawati Diskomidag		9.821.753.370,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	84.527.970,00						4 Dokumen	84.527.970,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan		77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	8.820.472.076,00						77 Orang/bulan	9.737.225.400,00	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.820.472.076,00							9.737.225.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan		77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	8.820.472.076,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		77 Orang/bulan	9.737.225.400,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						84.527.970,00							84.527.970,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	84.527.970,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Dokumen	84.527.970,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7.000.000,00					Karyawan/ Karyawati Diskomidag		18.580.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						7.000.000,00					Karyawan/ Karyawati Diskomidag		18.580.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	7.000.000,00						50 Orang	18.580.000,00	
	2.17.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						7.000.000,00							18.580.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	7.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		50 Orang	18.580.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						132.912.100,00					Karyawan/ Karyawati Diskomidag		139.670.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						132.912.100,00					Karyawan/ Karyawati Diskomidag		139.670.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00						4 Laporan	78.250.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.430.000,00						1 Paket	2.430.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	28.932.100,00						1 Paket	28.940.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.050.000,00						1 Paket	5.050.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.500.000,00						1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Paket	5.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						17.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Paket	20.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.430.000,00							2.430.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.430.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Paket	2.430.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.050.000,00							5.050.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.050.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Paket	5.050.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						28.932.100,00							28.940.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	28.932.100,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Paket	28.940.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						70.000.000,00							78.250.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	78.250.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						47.000.000,00					Karyawan/ Karyawati Diskomidag		85.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						47.000.000,00					Karyawan/ Karyawati Diskomidag		85.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.000.000,00						1 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	35.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	1 Unit	30.000.000,00						1 Unit	35.000.000,00	
	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	35.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						7.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	15.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	35.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						396.986.215,00					Karyawan/ Karyawati Diskomidag		399.987.775,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						396.986.215,00					Karyawan/ Karyawati Diskomidag		399.987.775,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	366.693.440,00						4 Laporan	366.695.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	18.942.775,00						4 Laporan	21.942.775,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	11.350.000,00						4 Laporan	11.350.000,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						366.693.440,00							366.695.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	366.693.440,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	366.695.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						11.350.000,00							11.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	11.350.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	11.350.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						18.942.775,00							21.942.775,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	18.942.775,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	21.942.775,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						268.792.045,00					Karyawan/ Karyawati Diskomidag		262.209.850,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						268.792.045,00					Karyawan/ Karyawati Diskomidag		262.209.850,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46 Unit		46 Unit	46 Unit	195.716.050,00						46 Unit	142.262.150,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.500.000,00						1 Unit	5.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	45.075.995,00						2 Unit	89.447.700,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	22.500.000,00						1 Unit	25.000.000,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						195.716.050,00							142.262.150,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	46 Unit		46 Unit	46 Unit	195.716.050,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		46 Unit	142.262.150,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						5.500.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	5.500.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						45.075.995,00							89.447.700,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	45.075.995,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	89.447.700,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						22.500.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	22.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	25.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
166.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**						**1.906.800,00**							**1.906.800,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam						***1.906.800,00***							***1.906.800,00***	
			999.Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	0.46 Persentase		0.35 Persentase	0.38 Persentase	1.906.800,00						0.41 Persentase	1.906.800,00	
	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.906.800,00					koperasi se Kab. Trenggalek		1.906.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.906.800,00					koperasi se Kab. Trenggalek		1.906.800,00	
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha		1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1.906.800,00						1 Unit Usaha	1.906.800,00	
	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						1.906.800,00							1.906.800,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit Usaha		1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	1.906.800,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Unit Usaha	1.906.800,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
167.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**23.900.000,00**							**31.757.500,00**	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi						***23.900.000,00***							***31.757.500,00***	
			999.Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	35.61 %		33.14 %	33.76 %	23.900.000,00						34.38 %	31.757.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						23.900.000,00					koperasi se Kab. Trenggalek		31.757.500,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						23.900.000,00					koperasi se Kab. Trenggalek		31.757.500,00	
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	50 Unit Usaha		30 Unit Usaha	35 Unit Usaha	20.000.000,00						40 Unit Usaha	27.793.000,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	200 Unit Usaha		200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	3.900.000,00						200 Unit Usaha	3.964.500,00	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						20.000.000,00							27.793.000,00	
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	50 Unit Usaha		30 Unit Usaha	35 Unit Usaha	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		40 Unit Usaha	27.793.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						3.900.000,00							3.964.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	200 Unit Usaha		200 Unit Usaha	200 Unit Usaha	3.900.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		200 Unit Usaha	3.964.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
168.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						**7.816.000,00**							**7.816.000,00**	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi						***7.816.000,00***							***7.816.000,00***	
			999.Persentase Koperasi Aktif	5.61 %		3.44 %	3.97 %	7.816.000,00						4.51 %	7.816.000,00	
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						7.816.000,00					koperasi se Kab. Trenggalek		7.816.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						7.816.000,00					koperasi se Kab. Trenggalek		7.816.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	37 Unit Usaha		25 Unit Usaha	28 Unit Usaha	7.816.000,00						31 Unit Usaha	7.816.000,00	
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan						7.816.000,00							7.816.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	37 Unit Usaha		25 Unit Usaha	28 Unit Usaha	7.816.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		31 Unit Usaha	7.816.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
169.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**35.000.000,00**							**32.077.700,00**	
		Meningkatnya kulaitas SDM perkoperasian						***35.000.000,00***							***32.077.700,00***	
			999.Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	4.39 %		10.31 %	4.32 %	35.000.000,00						4.34 %	32.077.700,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						35.000.000,00					koperasi se Kab. Trenggalek		32.077.700,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						35.000.000,00					koperasi se Kab. Trenggalek		32.077.700,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	25 Orang		25 Orang	25 Orang	35.000.000,00						25 Orang	32.077.700,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						35.000.000,00							32.077.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	25 Orang		25 Orang	25 Orang	35.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		25 Orang	32.077.700,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
170.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**120.700.000,00**							**258.700.000,00**	
		Meningkatnya produktivitas koperasi						***110.700.000,00***							***258.700.000,00***	
			999.Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	18.6 %		16.84 %	17.27 %	110.700.000,00						17.71 %	258.700.000,00	
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						120.700.000,00					koperasi se Kab. Trenggalek		258.700.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						120.700.000,00					koperasi se Kab. Trenggalek		258.700.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	37 Unit Usaha		40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	10.000.000,00						40 Unit Usaha	175.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1 Unit Usaha		1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	75.700.000,00						1 Unit Usaha	25.000.000,00	
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha		0 Unit Usaha	5 Unit Usaha	25.000.000,00						5 Unit Usaha	53.000.000,00	
			Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	3 Kelompok Masyarakat		0 Kelompok Masyarakat	3 Kelompok Masyarakat	10.000.000,00						3 Kelompok Masyarakat	5.700.000,00	
	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi						10.000.000,00							5.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	3 Kelompok Masyarakat		0 Kelompok Masyarakat	3 Kelompok Masyarakat	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Kelompok Masyarakat	5.700.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01.0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00							175.000.000,00	
		Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	37 Unit Usaha		40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		40 Unit Usaha	175.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						75.700.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1 Unit Usaha		1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	75.700.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Unit Usaha	25.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						25.000.000,00							53.000.000,00	
		Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha		0 Unit Usaha	5 Unit Usaha	25.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		5 Unit Usaha	53.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
171.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**237.435.992,00**							**327.042.500,00**	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri						***237.435.992,00***							***327.042.500,00***	
			999.Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	0.21 %		0.21 %	0.21 %	237.435.992,00						0.21 %	327.042.500,00	
			999.Pertumbuhan Wirausaha	60 Pelaku Usaha		60 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	237.435.992,00						60 Pelaku Usaha	327.042.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						237.435.992,00					Usaha Mikro		327.042.500,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						237.435.992,00					Usaha Mikro		327.042.500,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	-	2.754.841,00						-	12.754.769,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	115.000.000,00						-	174.606.580,00	
			Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum	-		-	-	5.200.000,00						-	15.200.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-		-	-	4.481.151,00						-	14.481.151,00	
			Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0016	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM						2.754.841,00							12.754.769,00	
		Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	1 Lembaga	2.754.841,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	12.754.769,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.07.2.01.0017	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum						5.200.000,00							15.200.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum	Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum	-		-	10 Orang	5.200.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	15.200.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						115.000.000,00							174.606.580,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	30 Orang	115.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	174.606.580,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0021	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha						4.481.151,00							14.481.151,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaku Usaha dalam Pembentukan Badan Hukum Berusaha	Jumlah Pelaku Usaha yang terfasilitasi Pembentukan Badan Hukum Berusaha	-		-	2 Orang	4.481.151,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	14.481.151,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	1 Kegiatan	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	10.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0027	Pembinaan dan Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Produk						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi UMKM dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi dalam mengakses Sertifikasi dan Standardisasi Produk	-		-	18 Unit Usaha	100.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	100.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
172.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**218.000.000,00**							**178.471.900,00**	
		Meningkatnya daya saing UMKM						***218.000.000,00***							***178.471.900,00***	
			999.Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	0.78 Persentase		0.70 Persentase	0.72 Persentase	218.000.000,00						0.74 Persentase	178.471.900,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						218.000.000,00					Usaha Mikro		178.471.900,00	
		Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						218.000.000,00					Usaha Mikro		178.471.900,00	
			Jumlah Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	-		-	-	34.000.000,00						-	43.209.000,00	
			Jumlah Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	-		-	-	184.000.000,00						-	135.262.900,00	
	2.17.08.2.01.0010	Penyusunan Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan						34.000.000,00							43.209.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Kebijakan Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	-		-	1 Dokumen	34.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	43.209.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	2.17.08.2.01.0025	Penyusunan Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan						184.000.000,00							135.262.900,00	
		Tersusunnya Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	Jumlah Konsep dan Kebijakan Pengembangan UMKM berbasis Inovasi dan Keberlanjutan	-		-	1 Dokumen	184.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	135.262.900,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.344.368.124,00**							**1.925.196.700,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**2.344.368.124,00**							**1.925.196.700,00**	
173.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**2.420.000,00**							**3.420.000,00**	
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha						***2.420.000,00***							***3.420.000,00***	
			999.Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	7.32 Persentase		7.32 Persentase	7.32 Persentase	2.420.000,00						7.32 Persentase	3.420.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan						2.420.000,00					Perusahaan		3.420.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan						2.420.000,00					Perusahaan		3.420.000,00	
			Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	12 laporan		12 laporan	12 laporan	2.420.000,00						12 laporan	3.420.000,00	
	3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik						2.420.000,00							3.420.000,00	
		Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	12 laporan		12 laporan	12 laporan	2.420.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 laporan	3.420.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
174.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**1.707.137.738,00**							**1.360.093.500,00**	
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi						***1.707.137.738,00***							***1.360.093.500,00***	
			999.Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	4.35 Persentase		4.35 Persentase	4.35 Persentase	1.707.137.738,00						4.35 Persentase	1.360.093.500,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						1.704.637.738,00					Sarana Distribusi Perdagangan		1.335.093.500,00	
		Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						1.704.637.738,00					Sarana Distribusi Perdagangan		1.335.093.500,00	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	23 Unit		23 Unit	23 Unit	1.000.000.000,00						23 Unit	1.023.943.500,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	704.637.738,00						1 Unit	311.150.000,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						704.637.738,00							311.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	704.637.738,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Unit	311.150.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						1.000.000.000,00							1.023.943.500,00	
		Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	23 Unit		23 Unit	23 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		23 Unit	1.023.943.500,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						2.500.000,00					Pelaku Usaha		25.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						2.500.000,00					Pelaku Usaha		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						2.500.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen		1 Dokumen	25 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
175.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**460.047.186,00**							**417.547.100,00**	
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting						***460.047.186,00***							***417.547.100,00***	
			999.Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	11.54 Persentase		11.74 Persentase	11.69 Persentase	460.047.186,00						11.64 Persentase	417.547.100,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						456.500.000,00					Pelaku Usaha		413.797.100,00	
		Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						456.500.000,00					Pelaku Usaha		413.797.100,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	450.000.000,00						2 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365 Laporan		365 Laporan	365 Laporan	6.500.000,00						365 Laporan	13.797.100,00	
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						6.500.000,00							13.797.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	365 Laporan		365 Laporan	365 Laporan	6.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		365 Laporan	13.797.100,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						450.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	450.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Laporan	400.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						3.547.186,00					Pelaku Usaha		3.750.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						3.547.186,00					Pelaku Usaha		3.750.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	3.547.186,00						72 Laporan	3.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi						3.547.186,00							3.750.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	3.547.186,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		72 Laporan	3.750.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
176.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**37.800.000,00**							**23.172.900,00**	
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor						***37.800.000,00***							***23.172.900,00***	
			999.Nilai Ekspor Barang (Milyar Rupiah)	147.50		140.50	141.50	37.800.000,00						143	23.172.900,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						37.800.000,00					Pelaku Usaha		23.172.900,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						37.800.000,00					Pelaku Usaha		23.172.900,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha		8 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	35.000.000,00						5 Pelaku Usaha	22.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha		12 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2.800.000,00						2 Pelaku Usaha	1.172.900,00	
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional						2.800.000,00							1.172.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha		12 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	2.800.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Pelaku Usaha	1.172.900,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						35.000.000,00							22.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha		8 Pelaku Usaha	5 Pelaku Usaha	35.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		5 Pelaku Usaha	22.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
177.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**136.963.200,00**							**120.963.200,00**	
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk						***136.963.200,00***							***120.963.200,00***	
			999.Persentase Pelaku Usaha Teredukasi Metrologi Legal	77.33 %		73.94 %	74.71 %	136.963.200,00						75.48 %	120.963.200,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						136.963.200,00					Pelaku Usaha		120.963.200,00	
		Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						136.963.200,00					Pelaku Usaha		120.963.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	7000 Unit		6500 Unit	6600 Unit	125.063.600,00						6700 Unit	109.063.600,00	
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1500 Orang		1500 Orang	1500 Orang	11.899.600,00						1500 Orang	11.899.600,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						125.063.600,00							109.063.600,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	7000 Unit		6500 Unit	6600 Unit	125.063.600,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		6700 Unit	109.063.600,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal						11.899.600,00							11.899.600,00	
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1500 Orang		1500 Orang	1500 Orang	11.899.600,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pembangunan Infrastruktur Publik yang Partisipatif mendukung Kota Atraktif dan Berkelanjutan		1500 Orang	11.899.600,00	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**4.747.829.579,00**							**4.758.265.600,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.747.829.579,00**							**4.758.265.600,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**4.747.829.579,00**							**4.758.265.600,00**	
178.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.435.829.579,00**							**4.384.634.100,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***4.418.829.579,00***							***4.374.634.100,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	4.418.829.579,00						100 %	4.374.634.100,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	4.418.829.579,00						100 %	4.374.634.100,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95 %		96,26 %	92 %	4.418.829.579,00						93 %	4.374.634.100,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00					Dokumen Perencanaan dan Pelaporan dan ASN Dinas PMPTSP		2.366.881,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00					Dokumen Perencanaan dan Pelaporan dan ASN Dinas PMPTSP		2.366.881,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	3.000.000,00						14 Dokumen	1.156.881,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	2.000.000,00						46 Laporan	1.210.000,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3.000.000,00							1.156.881,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		14 Dokumen	1.156.881,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.000.000,00							1.210.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		46 Laporan	1.210.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.058.178.159,00					ASN Dinas PMPTSP		4.088.867.219,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.058.178.159,00					ASN Dinas PMPTSP		4.088.867.219,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	31.980.000,00						12 Dokumen	17.589.219,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.026.198.159,00						37 Orang/bulan	4.071.278.000,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.026.198.159,00							4.071.278.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.026.198.159,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		37 Orang/bulan	4.071.278.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						31.980.000,00							17.589.219,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	31.980.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	17.589.219,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						94.337.387,00					ASN Dinas PMPTSP		85.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						94.337.387,00					ASN Dinas PMPTSP		85.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.337.387,00						12 Laporan	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	30.000.000,00						12 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.000.000,00						12 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.000.000,00						4 Paket	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	15.000.000,00						12 Paket	18.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	2.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Paket	18.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	7.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Paket	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						30.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Paket	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						36.337.387,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.337.387,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	35.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						171.400.000,00					ASN Dinas PMPTSP		145.400.000,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						171.400.000,00					ASN Dinas PMPTSP		145.400.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.200.000,00						12 Laporan	121.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	43.200.000,00						12 Laporan	19.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00						12 Laporan	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						121.200.000,00							121.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	121.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						43.200.000,00							19.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	43.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	19.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						106.914.033,00					Sarana dan Prasarana Kantor dan ASN Dinas PMPTSP		63.000.000,00	
		Terlaksananya pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						106.914.033,00					Sarana dan Prasarana Kantor dan ASN Dinas PMPTSP		63.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	86.914.033,00						22 Unit	57.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	10.000.000,00						4 Unit	5.000.000,00	
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						86.914.033,00							57.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	86.914.033,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		22 Unit	57.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Unit	5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	1.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
179.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**113.000.000,00**							**27.384.800,00**	
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi						***113.000.000,00***							***27.384.800,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase masyarakat dan / atau investor yang memperoleh insentif dan / atau kemudahan investasi	90 %		82 %	84 %	113.000.000,00						86 %	27.384.800,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000,00					Masyarakat / Investor		7.621.828,00	
		Terlaksananya kegiatan pemberian fasilitasi insentif, kemudahan, dan kemitraan penanaman modal						15.000.000,00					Masyarakat / Investor		7.621.828,00	
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00						2 Dokumen	7.621.828,00	
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						15.000.000,00							7.621.828,00	
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Dokumen	7.621.828,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota						98.000.000,00					Masyarakat / Investor		19.762.972,00	
		Terlaksananya penyusunan peta/katalog potensi investasi						98.000.000,00					Masyarakat / Investor		19.762.972,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	16.000.000,00						-	9.762.972,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	82.000.000,00						-	10.000.000,00	
	2.18.02.2.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						82.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	82.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						16.000.000,00							9.762.972,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	16.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	9.762.972,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
180.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**50.000.000,00**							**175.451.600,00**	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal						***50.000.000,00***							***175.451.600,00***	
			999.Persentase Investor di Sektor Unggulan Daerah	60 %		40 %	45 %	50.000.000,00						50 %	175.451.600,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Masyarakat / Investor		175.451.600,00	
		Terlaksananya kegiatan even /media promosi potensi/proyek investasi						50.000.000,00					Masyarakat / Investor		175.451.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00						7 Dokumen	175.451.600,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							175.451.600,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		7 Dokumen	175.451.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
181.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**60.000.000,00**							**66.831.500,00**	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko						***60.000.000,00***							***66.831.500,00***	
			999.Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 %		100 %	100 %	60.000.000,00						100 %	66.831.500,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						60.000.000,00					Masyarakat / Pelaku Usaha		66.831.500,00	
		Terlaksananya layanan mobile/jemput bola dan MPP						60.000.000,00					Masyarakat / Pelaku Usaha		66.831.500,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	555 Pelaku Usaha		525 Pelaku Usaha	535 Pelaku Usaha	12.500.000,00						545 Pelaku Usaha	15.379.765,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	555 Pelaku Usaha		525 Pelaku Usaha	535 Pelaku Usaha	28.000.000,00						545 Pelaku Usaha	25.479.235,00	
		Tersedianya layanan konsultasi dan penanganan pengaduan						60.000.000,00					Masyarakat / Pelaku Usaha		66.831.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	555 Pelaku Usaha		525 Pelaku Usaha	535 Pelaku Usaha	12.500.000,00						545 Pelaku Usaha	15.379.765,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	555 Pelaku Usaha		525 Pelaku Usaha	535 Pelaku Usaha	28.000.000,00						545 Pelaku Usaha	25.479.235,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						28.000.000,00							25.479.235,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	555 Pelaku Usaha		525 Pelaku Usaha	535 Pelaku Usaha	28.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		545 Pelaku Usaha	25.479.235,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						12.500.000,00							15.379.765,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	555 Pelaku Usaha		525 Pelaku Usaha	535 Pelaku Usaha	12.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		545 Pelaku Usaha	15.379.765,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Terlaksananya layanan mobile/jemput bola dan MPP						60.000.000,00					Masyarakat / Pelaku Usaha		66.831.500,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	-	19.500.000,00						-	25.972.500,00	
		Tersedianya layanan konsultasi dan penanganan pengaduan						60.000.000,00					Masyarakat / Pelaku Usaha		66.831.500,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	-	19.500.000,00						-	25.972.500,00	
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						19.500.000,00							25.972.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	175 Kegiatan Usaha	19.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	25.972.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
182.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**86.000.000,00**							**85.219.100,00**	
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal						***86.000.000,00***							***85.219.100,00***	
			999.Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100 %		100 %	100 %	86.000.000,00						100 %	85.219.100,00	
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						86.000.000,00					Masyarakat / Pelaku Usaha		85.219.100,00	
		Terlaksananya pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan, pengawasan dan fasilitasi permasalahan						86.000.000,00					Masyarakat / Pelaku Usaha		85.219.100,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	55 Kegiatan Usaha		45 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	19.000.000,00						50 Kegiatan Usaha	24.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	160 Pelaku Usaha		160 Pelaku Usaha	160 Pelaku Usaha	54.000.000,00						160 Pelaku Usaha	46.519.100,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						54.000.000,00							46.519.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	160 Pelaku Usaha		160 Pelaku Usaha	160 Pelaku Usaha	54.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		160 Pelaku Usaha	46.519.100,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						19.000.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	55 Kegiatan Usaha		45 Kegiatan Usaha	50 Kegiatan Usaha	19.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		50 Kegiatan Usaha	24.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Terlaksananya pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan, pengawasan dan fasilitasi permasalahan						86.000.000,00					Masyarakat / Pelaku Usaha		85.219.100,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	13.000.000,00						-	14.700.000,00	
	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya						13.000.000,00							14.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	4 Kegiatan Usaha	13.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	14.700.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
183.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**3.000.000,00**							**18.744.500,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal						***3.000.000,00***							***18.744.500,00***	
			999.Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100 %		100 %	100 %	3.000.000,00						100 %	18.744.500,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						3.000.000,00					Masyarakat / Pelaku Usaha		18.744.500,00	
		Terlaksananya pengelolaan data dan informasi penanaman modal						3.000.000,00					Masyarakat / Pelaku Usaha		18.744.500,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00						4 Dokumen	18.744.500,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						3.000.000,00							18.744.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Dokumen	18.744.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA						**10.650.469.048,00**							**6.679.010.780,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.650.469.048,00**							**6.679.010.780,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**10.650.469.048,00**							**6.679.010.780,00**	
184.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**4.407.312.009,00**							**3.708.503.900,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***4.377.312.009,00***							***3.538.503.900,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	4.377.312.009,00						100 %	3.538.503.900,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	4.377.312.009,00						100 %	3.538.503.900,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	86.17 %		81.67 %	81.67 %	4.377.312.009,00						85.17 %	3.538.503.900,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.000.000,00					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Realisasi Kinerja urusan Penunjang Sesuai Ketentuan						25.000.000,00					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	10.000.000,00						11 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	15.000.000,00						27 Laporan	25.000.000,00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen		11 Dokumen	9 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		11 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan		27 Laporan	30 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		27 Laporan	25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.781.306.863,00					Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi		3.342.585.200,00	
		Terlaksananya Layanan Administrasi Keuangan penunjang urusan Sesuai Ketentuan						3.781.306.863,00					Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi		3.342.585.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen		75 Dokumen	75 Dokumen	70.000.000,00						75 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan		36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3.711.306.863,00						36 Orang/bulan	3.317.585.200,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.711.306.863,00							3.317.585.200,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/bulan		36 Orang/bulan	35 Orang/bulan	3.711.306.863,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Orang/bulan	3.317.585.200,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						70.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen		75 Dokumen	28 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		75 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						190.000.000,00					Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi		60.000.000,00	
		Terlaksananya Layanan Administrasi Umum penunjang urusan Sesuai Ketentuan						190.000.000,00					Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi		60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	55.000.000,00						4 Paket	10.000.000,00	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						55.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	55.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						135.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	135.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						60.000.000,00					Persentase nilai aset dalam kondisi baik		60.000.000,00	
		Tersedianya BMD penunjang urusan Sesuai Standar						60.000.000,00					Persentase nilai aset dalam kondisi baik		60.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	20.000.000,00						5 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	40.000.000,00						5 Unit	40.000.000,00	
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Unit	20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	40.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Unit	40.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						291.005.146,00					Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi		95.918.700,00	
		Terlaksananya Layanan Jasa penunjang urusan Sesuai Ketentuan						291.005.146,00					Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi		95.918.700,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	121.005.146,00						72 Laporan	75.918.700,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						121.005.146,00							75.918.700,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan		72 Laporan	24 Laporan	121.005.146,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		72 Laporan	75.918.700,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						170.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	170.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	20.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						60.000.000,00					Persentase nilai aset dalam kondisi baik		100.000.000,00	
		Terlaksananya Layanan pemelihaan BMD penunjang urusan Pendidikan Sesuai Standar						60.000.000,00					Persentase nilai aset dalam kondisi baik		100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	20.000.000,00						15 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	10.000.000,00						25 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	30.000.000,00						4 Unit	50.000.000,00	
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	4 Unit	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Unit	25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		25 Unit	25.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Unit	50.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
185.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**112.157.039,00**							**37.500.000,00**	
		Meningkatnya daya saing kepemudaan						***112.157.039,00***							***37.500.000,00***	
			999.Rasio Wirausaha Pemuda	3.82 Persentase		2.22 Persentase	2.62 Persentase	112.157.039,00						3.02 Persentase	37.500.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						107.000.000,00					Rasio Wirausaha Pemuda		25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan, Pengembangan Pemuda, dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten sesuai Ketentuan						107.000.000,00					Rasio Wirausaha Pemuda		25.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	-	75.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	32.000.000,00						-	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota						32.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	40 Orang	32.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Kampak || Desa Bendoagung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	15.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0023	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota						75.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	2 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	10.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						5.157.039,00					Rasio Wirausaha Pemuda		12.500.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten Sesuai Ketentuan						5.157.039,00					Rasio Wirausaha Pemuda		12.500.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	-	5.157.039,00						-	12.500.000,00	
	2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						5.157.039,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	15 Organisasi	5.157.039,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	12.500.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
186.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**6.026.000.000,00**							**2.415.003.750,00**	
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga						***6.026.000.000,00***							***2.415.003.750,00***	
			999.Persentase atlet yang masuk Pelatda dan Pelatnas	0.7 %		0.3 %	0.4 %	6.026.000.000,00						0.5 %	2.415.003.750,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						2.246.000.000,00					Persentase atlet yang masuk Pelatda dan Pelatnas		400.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Sesuai Ketentuan						2.246.000.000,00					Persentase atlet yang masuk Pelatda dan Pelatnas		400.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	-	2.246.000.000,00						-	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota						2.246.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	3 Unit	2.246.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	400.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						580.000.000,00					Persentase atlet yang masuk Pelatda dan Pelatnas		321.352.150,00	
		Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten Sesuai Ketentuan						580.000.000,00					Persentase atlet yang masuk Pelatda dan Pelatnas		321.352.150,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	280.000.000,00						-	221.352.150,00	
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	300.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga						300.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, temasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	75 Orang	300.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	100.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota						280.000.000,00							221.352.150,00	
		Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	4 Kegiatan	280.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	221.352.150,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						3.150.000.000,00					Persentase atlet yang masuk Pelatda dan Pelatnas		1.561.365.400,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Sesuai Ketentuan						3.150.000.000,00					Persentase atlet yang masuk Pelatda dan Pelatnas		1.561.365.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	3.150.000.000,00						-	1.561.365.400,00	
	2.19.03.2.04.0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait						3.150.000.000,00							1.561.365.400,00	
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-		-	2 Kerja Sama	3.150.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	1.561.365.400,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						50.000.000,00					Persentase atlet yang masuk Pelatda dan Pelatnas		132.286.200,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Sesuai Ketentuan						50.000.000,00					Persentase atlet yang masuk Pelatda dan Pelatnas		132.286.200,00	
			Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota, termasuk disabilitas	-		-	-	50.000.000,00						-	132.286.200,00	
	2.19.03.2.05.0013	Pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota						50.000.000,00							132.286.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota, termasuk disabilitas	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Masyarakat di tingkat kabupaten/kota, termasuk disabilitas	-		-	1 Lembaga	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	132.286.200,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
187.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**105.000.000,00**							**518.003.130,00**	
		Meningkatnya kualitas kepramukaan						***105.000.000,00***							***518.003.130,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	56 Persentase		53 Persentase	54.5 Persentase	105.000.000,00						55.1 Persentase	518.003.130,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						105.000.000,00					Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan		518.003.130,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Sesuai Ketentuan						105.000.000,00					Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan		518.003.130,00	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00						1 Organisasi	475.000.000,00	
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah						100.000.000,00							475.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1 Organisasi		1 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Organisasi	475.000.000,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Sesuai Ketentuan						105.000.000,00					Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan		518.003.130,00	
			Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	5.000.000,00						-	43.003.130,00	
	2.19.04.2.01.0015	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah						5.000.000,00							43.003.130,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	100 Orang	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	43.003.130,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN						**24.580.224.787,00**							**13.151.634.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**602.000.000,00**							**643.856.800,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**602.000.000,00**							**643.856.800,00**	
188.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**294.000.000,00**							**292.457.800,00**	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan						***294.000.000,00***							***292.457.800,00***	
			999.Persentase budaya yang dikembangkan	43.38 %		31.11 %	27.11 %	294.000.000,00						32.54 %	292.457.800,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						294.000.000,00					Pengelola kebudayaan lingkup Kabupaten Trenggalek		292.457.800,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kebudayaan						294.000.000,00					Pengelola kebudayaan lingkup Kabupaten Trenggalek		292.457.800,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	29 Objek		27 Objek	27 Objek	276.000.000,00						27 Objek	263.457.800,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	30 Orang		25 Orang	30 Orang	18.000.000,00						30 Orang	29.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						276.000.000,00							263.457.800,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	29 Objek		27 Objek	15 Objek	276.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		27 Objek	263.457.800,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						18.000.000,00							29.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	30 Orang		25 Orang	20 Orang	18.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		30 Orang	29.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
189.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**180.000.000,00**							**267.236.000,00**	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional						***180.000.000,00***							***267.236.000,00***	
			999.Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	83.33 %		25.36 %	36.23 %	180.000.000,00						39.86 %	267.236.000,00	
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						180.000.000,00					Kelompok kesenian tradisional		267.236.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kesenian						180.000.000,00					Kelompok kesenian tradisional		267.236.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga		30 Lembaga	50 Lembaga	160.000.000,00						50 Lembaga	232.236.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang		30 Orang	30 Orang	20.000.000,00						30 Orang	35.000.000,00	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						20.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	30 Orang		30 Orang	20 Orang	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		30 Orang	35.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						160.000.000,00							232.236.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	50 Lembaga		30 Lembaga	30 Lembaga	160.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		50 Lembaga	232.236.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
190.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**128.000.000,00**							**84.163.000,00**	
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan						***128.000.000,00***							***84.163.000,00***	
			999.Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	32.07 %		18.48 %	21.20 %	128.000.000,00						23.91 %	84.163.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya						118.000.000,00					Cagar budaya yang berada di Kabupaten Trenggalek		84.163.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	210 Objek		184 Objek	200 Objek	115.000.000,00						205 Objek	84.163.000,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						115.000.000,00							84.163.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	210 Objek		184 Objek	250 Objek	115.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		205 Objek	84.163.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						10.000.000,00					Cagar budaya yang berada di Kabupaten Trenggalek		0,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya						10.000.000,00					Cagar budaya yang berada di Kabupaten Trenggalek		0,00	
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	-		-	1 Objek	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						118.000.000,00					Cagar budaya yang berada di Kabupaten Trenggalek		84.163.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya						118.000.000,00					Cagar budaya yang berada di Kabupaten Trenggalek		84.163.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-		-	-	3.000.000,00						-	0,00	
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	-		-	15 Objek	3.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**23.978.224.787,00**							**12.507.777.500,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**23.978.224.787,00**							**12.507.777.500,00**	
191.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.485.724.787,00**							**11.782.044.200,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***11.485.724.787,00***							***11.752.044.200,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	11.485.724.787,00						100 %	11.752.044.200,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	11.485.724.787,00						100 %	11.752.044.200,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	94 %		93.25 %	93.50 %	11.485.724.787,00						93.75 %	11.752.044.200,00	
	3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00					Dokumen Perencanaan yang disusun		15.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00					Dokumen Perencanaan yang disusun		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	6.500.000,00						18 Dokumen	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32 Laporan		32 Laporan	32 Laporan	3.500.000,00						32 Laporan	5.000.000,00	
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.500.000,00							10.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	6.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		18 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32 Laporan		32 Laporan	36 Laporan	3.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		32 Laporan	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.257.813.905,00					Terpenuhinya gaji ASN		9.214.044.200,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.257.813.905,00					Terpenuhinya gaji ASN		9.214.044.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	102.000.000,00						28 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan		118 Orang/bulan	115 Orang/bulan	9.155.813.905,00						115 Orang/bulan	9.114.044.200,00	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.155.813.905,00							9.114.044.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	115 Orang/bulan		118 Orang/bulan	119 Orang/bulan	9.155.813.905,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		115 Orang/bulan	9.114.044.200,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						102.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	102.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		28 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						192.910.882,00					Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		10.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						192.910.882,00					Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	45.000.000,00						12 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	22.000.000,00						4 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	75.910.882,00						4 Paket	0,00	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						75.910.882,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	16 Paket	75.910.882,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						22.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	12 Paket	22.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						45.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	45.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Paket	5.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6.000.000,00					Terpenuhinya kebutuhan barang perangkat daerah		10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6.000.000,00					Terpenuhinya kebutuhan barang perangkat daerah		10.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	30 Unit	6.000.000,00						30 Unit	10.000.000,00	
	3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		30 Unit	1 Unit	6.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		30 Unit	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.910.000.000,00					Terpenuhunya kebutuhan jasa pada Perangkat Daerah		2.478.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.910.000.000,00					Terpenuhunya kebutuhan jasa pada Perangkat Daerah		2.478.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	295.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.615.000.000,00						12 Laporan	2.478.000.000,00	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						295.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	295.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.615.000.000,00							2.478.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.615.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	2.478.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						109.000.000,00					Gedung dan Sarana dan Prasarana Kantor yang di pelihara		55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						109.000.000,00					Gedung dan Sarana dan Prasarana Kantor yang di pelihara		55.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	25.000.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	39.000.000,00						30 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit		10 Unit	12 Unit	8.500.000,00						14 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		30 Unit	35 Unit	26.500.000,00						40 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.000.000,00						10 Unit	25.000.000,00	
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						39.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		30 Unit	20 Unit	39.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		30 Unit	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						8.500.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit		10 Unit	10 Unit	8.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		14 Unit	10.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit		30 Unit	30 Unit	26.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		40 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	3 Unit	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	3 Unit	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Unit	25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
192.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**12.092.500.000,00**							**400.000.000,00**	
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata						***12.092.500.000,00***							***200.000.000,00***	
			999.Persentase daya tarik destinasi dan usaha pariwisata yang terkelola	100 %		18.9 %	19.9 %	12.092.500.000,00						20.5 %	200.000.000,00	
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						70.000.000,00					Daya Tarik yang ada di destinasi wisata Kabupaten Trenggalek		200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dayatarik Wisata						70.000.000,00					Daya Tarik yang ada di destinasi wisata Kabupaten Trenggalek		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00						4 Laporan	200.000.000,00	
	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						70.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	70.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Laporan	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						11.972.500.000,00					Destinasi Pariwisata Kabupaten Trenggalek		200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						11.972.500.000,00					Destinasi Pariwisata Kabupaten Trenggalek		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00						4 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 Unit		5 Unit	6 Unit	11.927.500.000,00						6 Unit	0,00	
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						11.927.500.000,00							0,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	6 Unit		5 Unit	10 Unit	11.927.500.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Pinjaman Daerah dari LKBB Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		6 Unit	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						45.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Laporan	200.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00					Usaha Pariwisata yang ada di Kabupaten Trenggalek		0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata						50.000.000,00					Usaha Pariwisata yang ada di Kabupaten Trenggalek		0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	40 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
193.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**200.000.000,00**							**130.733.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata						***200.000.000,00***							***130.733.300,00***	
			999.Persentase pangsa pasar pariwisata Kabupaten Trenggalek	1.92 %		1.61 %	1.62 %	200.000.000,00						1.72 %	130.733.300,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						200.000.000,00					Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		130.733.300,00	
		Terlaksananya Pemasaran Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata						200.000.000,00					Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		130.733.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen		6 Dokumen	5 Dokumen	105.000.000,00						5 Dokumen	30.733.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	84 Promosi		84 Promosi	84 Promosi	50.000.000,00						84 Promosi	0,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						4 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	15.000.000,00						2 Kegiatan	60.000.000,00	
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						105.000.000,00							30.733.300,00	
		Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen		6 Dokumen	3 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		5 Dokumen	30.733.300,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						30.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	5 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Dokumen	40.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						15.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Kegiatan	60.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						50.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	84 Promosi		84 Promosi	36 Promosi	50.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		84 Promosi	0,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
194.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**140.500.000,00**							**110.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif						***140.500.000,00***							***110.000.000,00***	
			999.Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	100 Persentase		50 Persentase	66.7 Persentase	140.500.000,00						83.3 Persentase	110.000.000,00	
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota						23.000.000,00					Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Trenggalek		35.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekpresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif						23.000.000,00					Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Trenggalek		35.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	23.000.000,00						1 Unit	35.000.000,00	
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif						23.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	23.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Unit	35.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						117.500.000,00					Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Trenggalek		75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						117.500.000,00					Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Trenggalek		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	67.500.000,00						2 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00						1 Kegiatan	20.000.000,00	
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran						67.500.000,00							55.000.000,00	
		Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	67.500.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Dokumen	55.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual						50.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Kegiatan	20.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
195.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**59.500.000,00**							**85.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif						***59.500.000,00***							***60.000.000,00***	
			999.Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	100 Persentase		32.61 Persentase	49.22 Persentase	59.500.000,00						66.30 Persentase	60.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						25.000.000,00					Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		35.000.000,00	
		Terlaksannya peningkatan kapasitas SDM Parekraf tingkat dasar						25.000.000,00					Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		35.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	40 Orang		25 Orang	30 Orang	25.000.000,00						35 Orang	35.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata						25.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	40 Orang		25 Orang	20 Orang	25.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		35 Orang	35.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						34.500.000,00					Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Trenggalek		50.000.000,00	
		Terlaksanaanya peningklatan kapasitas SDM Parekraf						34.500.000,00					Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Trenggalek		50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang		25 Orang	35 Orang	25.500.000,00						35 Orang	25.000.000,00	
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						25.500.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	40 Orang		25 Orang	20 Orang	25.500.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		35 Orang	25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		Terlaksanaanya peningklatan kapasitas SDM Parekraf						34.500.000,00					Pelaku Ekonomi Kreatif di Kabupaten Trenggalek		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	-		-	-	9.000.000,00						-	25.000.000,00	
	3.26.05.2.02.0008	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha						9.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksanya Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	-		-	4 Laporan	9.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	25.000.000,00	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN						**4.558.286.651,00**							**4.706.289.918,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**4.558.286.651,00**							**4.706.289.918,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**868.500.001,00**							**771.472.700,00**	
196.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**738.300.001,00**							**728.472.700,00**	
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan						***718.200.001,00***							***728.072.700,00***	
			999.Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	76.00 Nilai		75.20 Nilai	75.40 Nilai	718.200.001,00						75.60 Nilai	728.072.700,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						433.800.001,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		437.043.620,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						433.800.001,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		437.043.620,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	250 Eksemplar		250 Eksemplar	250 Eksemplar	100.000,00						250 Eksemplar	157.079.703,00	
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Eksemplar		1 Eksemplar	1 Eksemplar	122.000.000,00						1 Eksemplar	100.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	250.100.000,00						1 Perpustakaan	100.000,00	
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	9 Layanan		9 Layanan	9 Layanan	11.400.001,00						9 Layanan	174.577.448,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan		5 Perpustakaan	5 Perpustakaan	20.100.000,00						5 Perpustakaan	104.986.469,00	
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	20.100.000,00						1 Perpustakaan	100.000,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	10.000.000,00						1 Perpustakaan	100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						20.100.000,00							104.986.469,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan		5 Perpustakaan	2 Perpustakaan	20.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		5 Perpustakaan	104.986.469,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Perpustakaan	100.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota						11.400.001,00							174.577.448,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	9 Layanan		9 Layanan	9 Layanan	11.400.001,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		9 Layanan	174.577.448,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						20.100.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	20.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Perpustakaan	100.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan						100.000,00							157.079.703,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	250 Eksemplar		250 Eksemplar	250 Eksemplar	100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		250 Eksemplar	157.079.703,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota						122.000.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Eksemplar		1 Eksemplar	1 Eksemplar	122.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Eksemplar	100.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						250.100.000,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	250.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Perpustakaan	100.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						304.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		291.429.080,00	
		Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						304.500.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		291.429.080,00	
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	3 Perpustakaan		3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	6.500.000,00						3 Perpustakaan	174.677.448,00	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus		1 Lokus	1 Lokus	127.000.000,00						1 Lokus	116.651.632,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	1 Orang		1 Orang	1 Orang	171.000.000,00						1 Orang	100.000,00	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						6.500.000,00							174.677.448,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	3 Perpustakaan		3 Perpustakaan	2 Perpustakaan	6.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Perpustakaan	174.677.448,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						171.000.000,00							100.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	1 Orang		1 Orang	1 Orang	171.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Orang	100.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						127.000.000,00							116.651.632,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus		1 Lokus	1 Lokus	127.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Lokus	116.651.632,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
197.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**130.200.000,00**							**43.000.000,00**	
		Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno						***130.200.000,00***							***43.000.000,00***	
			999.Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	100 %		100 %	100 %	130.200.000,00						100 %	43.000.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						130.200.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		43.000.000,00	
		Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						130.200.000,00					Masyarakat Kabupaten Trenggalek		43.000.000,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Orang		1 Orang	1 Orang	40.100.000,00						1 Orang	100.000,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar		1 Eksemplar	1 Eksemplar	90.100.000,00						1 Eksemplar	42.900.000,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						40.100.000,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	1 Orang		1 Orang	50 Orang	40.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Orang	100.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						90.100.000,00							42.900.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	1 Eksemplar		1 Eksemplar	8 Eksemplar	90.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Eksemplar	42.900.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**3.689.786.650,00**							**3.934.817.218,00**	
198.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.636.786.650,00**							**3.838.302.878,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***3.626.486.650,00***							***3.788.402.878,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	3.626.486.650,00						100 %	3.788.402.878,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	3.626.486.650,00						100 %	3.788.402.878,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	90 %		90 %	90 %	3.626.486.650,00						90 %	3.788.402.878,00	
	2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.938.171,00					ASN pada lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek		10.000.000,00	
		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.938.171,00					ASN pada lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek		10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	438.171,00						16 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37 Laporan		37 Laporan	37 Laporan	2.500.000,00						37 Laporan	5.000.000,00	
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						438.171,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	438.171,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		16 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.500.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37 Laporan		37 Laporan	25 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		37 Laporan	5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.428.251.037,00					ASN pada lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek		3.570.482.500,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.428.251.037,00					ASN pada lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek		3.570.482.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.250.000,00						12 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	453 Dokumen		453 Dokumen	453 Dokumen	100.000,00						453 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37 Laporan		37 Laporan	37 Laporan	100.000,00						37 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.387.801.037,00						37 Orang/bulan	3.540.482.500,00	
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.387.801.037,00							3.540.482.500,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	3.387.801.037,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		37 Orang/bulan	3.540.482.500,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						40.250.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						100.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	453 Dokumen		453 Dokumen	453 Dokumen	100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		453 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						100.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	37 Laporan		37 Laporan	37 Laporan	100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		37 Laporan	5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000,00					ASN pada lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek		5.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000,00					ASN pada lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	53 Dokumen		53 Dokumen	53 Dokumen	100.000,00						53 Dokumen	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						100.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	53 Dokumen		53 Dokumen	53 Dokumen	100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		53 Dokumen	5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.145.000,00					ASN pada lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek		60.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						44.145.000,00					ASN pada lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek		60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.620.000,00						12 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	22.025.000,00						4 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.000.000,00						4 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00						4 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.500.000,00						4 Paket	5.000.000,00	
	2.24.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						22.025.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	22.025.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	15.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12.620.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.620.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	30.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5.100.000,00					ASN pada lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek		19.800.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						5.100.000,00					ASN pada lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek		19.800.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00						1 Unit	9.900.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000,00						1 Unit	9.900.000,00	
	2.24.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							9.900.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	9.900.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000,00							9.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	9.900.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115.163.842,00					ASN pada lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek		160.000.000,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						115.163.842,00					ASN pada lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek		160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	115.163.842,00						12 Laporan	160.000.000,00	
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						115.163.842,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	115.163.842,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	160.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.088.600,00					ASN pada lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek		13.020.378,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41.088.600,00					ASN pada lingkup Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Trenggalek		13.020.378,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	31.088.600,00						22 Unit	6.020.378,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.000.000,00						10 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5.000.000,00						2 Unit	2.000.000,00	
	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						31.088.600,00							6.020.378,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	31.088.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		22 Unit	6.020.378,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Unit	5.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	2.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
199.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**46.178.700,00**							**84.920.800,00**	
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis						***46.178.700,00***							***84.920.800,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Tingkat Ketersediaan Arsip	71 Persentase		63 Persentase	65 Persentase	46.178.700,00						67 Persentase	84.920.800,00	
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						6.942.700,00					Arsip dinamis Pemerintah Kabupaten Trenggalek		20.980.200,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						6.942.700,00					Arsip dinamis Pemerintah Kabupaten Trenggalek		20.980.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	6.942.700,00						40 Laporan	20.980.200,00	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						6.942.700,00							20.980.200,00	
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	6.942.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		40 Laporan	20.980.200,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						29.998.865,00					Arsip Statis Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek		38.284.360,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota						29.998.865,00					Arsip Statis Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek		38.284.360,00	
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	960 Arsip		960 Arsip	960 Arsip	29.998.865,00						960 Arsip	38.284.360,00	
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis						29.998.865,00							38.284.360,00	
		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	960 Arsip		960 Arsip	250 Arsip	29.998.865,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		960 Arsip	38.284.360,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						9.237.135,00					Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek		25.656.240,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota						9.237.135,00					Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek		25.656.240,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.737.135,00						2 Laporan	25.556.240,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna		1 Pengguna	1 Pengguna	500.000,00						1 Pengguna	100.000,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						500.000,00							100.000,00	
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1 Pengguna		1 Pengguna	50 Pengguna	500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Pengguna	100.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota						8.737.135,00							25.556.240,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.737.135,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Laporan	25.556.240,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
200.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						**5.821.300,00**							**9.593.540,00**	
		Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK						***3.821.300,00***							***6.362.360,00***	
			999.Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	90.00 %		86.00 %	87.00 %	3.821.300,00						88.00 %	6.362.360,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						1.821.300,00					Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek		3.131.180,00	
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						1.821.300,00					Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek		3.131.180,00	
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	100 Berkas		100 Berkas	100 Berkas	1.821.300,00						100 Berkas	3.131.180,00	
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						1.821.300,00							3.131.180,00	
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	100 Berkas		100 Berkas	200 Berkas	1.821.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		100 Berkas	3.131.180,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota						2.000.000,00					Arsip Statis Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek		3.231.180,00	
		Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota						2.000.000,00					Arsip Statis Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek		3.231.180,00	
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	150 Arsip		150 Arsip	150 Arsip	2.000.000,00						150 Arsip	3.231.180,00	
	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						2.000.000,00							3.231.180,00	
		Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	150 Arsip		150 Arsip	150 Arsip	2.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		150 Arsip	3.231.180,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang						2.000.000,00					Arsip Statis Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek		3.231.180,00	
		Terlaksananya Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang						2.000.000,00					Arsip Statis Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek		3.231.180,00	
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	3 Arsip		3 Arsip	3 Arsip	2.000.000,00						3 Arsip	3.231.180,00	
	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)						2.000.000,00							3.231.180,00	
		Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	3 Arsip		3 Arsip	3 Arsip	2.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Arsip	3.231.180,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
201.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**						**1.000.000,00**							**2.000.000,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup						***1.000.000,00***							***2.000.000,00***	
			999.Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	100 %		100 %	100 %	1.000.000,00						100 %	2.000.000,00	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota						1.000.000,00					Arsip Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek		2.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota						1.000.000,00					Arsip Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek		2.000.000,00	
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP		5 SOP	5 SOP	1.000.000,00						5 SOP	2.000.000,00	
	2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup						1.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlasksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	5 SOP		5 SOP	1 SOP	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		5 SOP	2.000.000,00	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
		DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN						**15.887.366.054,00**							**16.357.664.800,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**15.887.366.054,00**							**16.357.664.800,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**1.195.407.021,00**							**1.118.509.400,00**	
202.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**434.800.000,00**							**479.671.700,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap						***334.800.000,00***							***224.000.000,00***	
			999.Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	24261.49 Ton		22858.80 Ton	23201.68 Ton	334.800.000,00						23549.7 Ton	224.000.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						45.800.000,00					Masyarakat Perikanan Tangkap		29.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						45.800.000,00					Masyarakat Perikanan Tangkap		29.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	5 Unit		5 Unit	5 Unit	5.000.000,00						5 Unit	4.000.000,00	
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	20 Unit		20 Unit	20 Unit	35.800.000,00						20 Unit	20.000.000,00	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						5.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	5 Unit		5 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		5 Unit	4.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						35.800.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	20 Unit		20 Unit	20 Unit	35.800.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		20 Unit	20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						294.000.000,00					Masyarakat Perikanan Tangkap		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						294.000.000,00					Masyarakat Perikanan Tangkap		200.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3 Kelompok		3 Kelompok	3 Kelompok	15.000.000,00						3 Kelompok	15.000.000,00	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang		30 Orang	30 Orang	235.000.000,00						30 Orang	170.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	1 Unit		1 Unit	1 Unit	34.000.000,00						1 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	20 Unit Usaha		20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	10.000.000,00						20 Unit Usaha	10.000.000,00	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						235.000.000,00							170.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 Orang		30 Orang	70 Orang	235.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		30 Orang	170.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	3 Kelompok		3 Kelompok	3 Kelompok	15.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Kelompok	15.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	20 Unit Usaha		20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		20 Unit Usaha	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil						34.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	1 Unit		1 Unit	1 Unit	34.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Unit	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
203.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**520.000.000,00**							**531.014.400,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan budidava						***495.000.000,00***							***506.014.400,00***	
			999.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	5509.04 Ton		5091.46 Ton	5191.29 Ton	495.000.000,00						5295.12 Ton	506.014.400,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						36.000.000,00					Pembudidaya Ikan		165.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						36.000.000,00					Pembudidaya Ikan		165.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3 Kelompok		3 Kelompok	3 Kelompok	5.000.000,00						3 Kelompok	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	9 Kelompok		9 Kelompok	9 Kelompok	5.000.000,00						9 Kelompok	5.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok		10 Kelompok	10 Kelompok	21.000.000,00						10 Kelompok	140.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	80 Kelompok		80 Kelompok	80 Kelompok	5.000.000,00						80 Kelompok	10.000.000,00	
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	9 Kelompok		9 Kelompok	9 Kelompok	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		9 Kelompok	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	3 Kelompok		3 Kelompok	3 Kelompok	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Kelompok	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha						5.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	80 Kelompok		80 Kelompok	80 Kelompok	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		80 Kelompok	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						21.000.000,00							140.000.000,00	
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok		10 Kelompok	10 Kelompok	21.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		10 Kelompok	140.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						484.000.000,00					Pembudidaya Ikan		366.014.400,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						484.000.000,00					Pembudidaya Ikan		366.014.400,00	
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00						1 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	60 Unit		60 Unit	60 Unit	5.000.000,00						60 Unit	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5.000.000,00						3 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit		10 Unit	10 Unit	404.000.000,00						10 Unit	236.014.400,00	
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						65.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	65.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit		3 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Unit	50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						404.000.000,00							236.014.400,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit		10 Unit	6 Unit	404.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		10 Unit	236.014.400,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	60 Unit		60 Unit	60 Unit	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		60 Unit	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
204.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**125.000.000,00**							**79.502.800,00**	
		Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati						***125.000.000,00***							***79.502.800,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Luasan Kawasan Konservasi	108.5 Ha		82.5 Ha	89 Ha	125.000.000,00						95.5 Ha	79.502.800,00	
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						125.000.000,00					Masyarakat Perikanan Tangkap		79.502.800,00	
		Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						125.000.000,00					Masyarakat Perikanan Tangkap		79.502.800,00	
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	2 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	5.000.000,00						2 Pelaku Usaha	5.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	2 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	81.000.000,00						2 Pelaku Usaha	36.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	2 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	39.000.000,00						2 Pelaku Usaha	38.502.800,00	
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						81.000.000,00							36.000.000,00	
		Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	2 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	81.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Pelaku Usaha	36.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	2 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Pelaku Usaha	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						39.000.000,00							38.502.800,00	
		Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	2 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	39.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Pelaku Usaha	38.502.800,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
205.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**210.607.021,00**							**278.992.200,00**	
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat						***210.607.021,00***							***278.992.200,00***	
			999.Angka Konsumsi Ikan	44 Kg/KAP/TH		42 Kg/KAP/TH	42.5 Kg/KAP/TH	210.607.021,00						43 Kg/KAP/TH	278.992.200,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						5.000.000,00					Pengolah Produk Perikanan		5.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						5.000.000,00					Pengolah Produk Perikanan		5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						115.700.000,00					Pengolah Produk Perikanan		130.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil						115.700.000,00					Pengolah Produk Perikanan		130.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	60 Unit Usaha		60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	115.700.000,00						60 Unit Usaha	130.000.000,00	
	3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko						115.700.000,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	60 Unit Usaha		60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	115.700.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		60 Unit Usaha	130.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						89.907.021,00					Pemasar Produk Perikanan		143.992.200,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						89.907.021,00					Pemasar Produk Perikanan		143.992.200,00	
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	55 Pelaku Usaha		55 Pelaku Usaha	55 Pelaku Usaha	37.907.021,00						55 Pelaku Usaha	103.992.200,00	
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32563 Ton		31920 Ton	32079 Ton	52.000.000,00						32240 Ton	40.000.000,00	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						52.000.000,00							40.000.000,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	32563 Ton		31920 Ton	32,079 Ton	52.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		32240 Ton	40.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						37.907.021,00							103.992.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	55 Pelaku Usaha		55 Pelaku Usaha	55 Pelaku Usaha	37.907.021,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		55 Pelaku Usaha	103.992.200,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**14.691.959.033,00**							**15.239.155.400,00**	
206.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.105.198.454,00**							**13.902.376.100,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah bidang peternakan dan perikanan						***12.077.698.454,00***							***13.732.376.100,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	12.077.698.454,00						100 %	13.732.376.100,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	12.077.698.454,00						100 %	13.732.376.100,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95 %		95 %	95 %	12.077.698.454,00						95 %	13.732.376.100,00	
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00					Dokumen Perencanaan dan Pelaporan dan Reformasi Birokrasi		20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00					Dokumen Perencanaan dan Pelaporan dan Reformasi Birokrasi		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.500.000,00						6 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	2.500.000,00						30 Laporan	10.000.000,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.500.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Dokumen	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.500.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	2.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		30 Laporan	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.577.181.959,00					Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan		13.181.658.700,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.577.181.959,00					Aparatur Dinas Peternakan dan Perikanan		13.181.658.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42 Dokumen		42 Dokumen	42 Dokumen	65.000.000,00						42 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	11.512.181.959,00						37 Orang/bulan	13.081.658.700,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.512.181.959,00							13.081.658.700,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan		37 Orang/bulan	156 Orang/bulan	11.512.181.959,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		37 Orang/bulan	13.081.658.700,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						65.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42 Dokumen		42 Dokumen	42 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		42 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						117.500.000,00					Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan		270.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						117.500.000,00					Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan		270.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	70.000.000,00						150 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	10.000.000,00						24 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	17.500.000,00						12 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00						4 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00						4 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00						4 Paket	20.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		24 Paket	20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	60.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						17.500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	17.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Paket	50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						70.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	70.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		150 Laporan	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						202.128.087,00					Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan		200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						202.128.087,00					Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	202.128.087,00						12 Laporan	200.000.000,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						202.128.087,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	202.128.087,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	200.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						203.388.408,00					Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan		230.717.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						203.388.408,00					Sarana dan Prasarana Dinas Perikanan		230.717.400,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	185.888.408,00						11 Unit	210.717.400,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	7.500.000,00						20 Unit	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						185.888.408,00							210.717.400,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	185.888.408,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		11 Unit	210.717.400,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.500.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	7.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		20 Unit	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
207.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**975.736.279,00**							**1.372.591.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana peternakan						***685.736.279,00***							***1.075.091.000,00***	
			999.Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Daging)	1986.51 Ton		1896.51 Ton	1926.51 Ton	685.736.279,00						1956.51 Ton	1.075.091.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Susu)	3856.41 Ton		3796.41 Ton	3816.41 Ton	685.736.279,00						3836.41 Ton	1.075.091.000,00	
			999.Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (Telur)	18952.35 Ton		18802.35 Ton	18852.35 Ton	685.736.279,00						18902.35 Ton	1.075.091.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						106.000.000,00					Peternak Hewan		100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						106.000.000,00					Peternak Hewan		100.000.000,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	106.000.000,00						4 Laporan	100.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						106.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	106.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Laporan	100.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						15.091.000,00					Peternak Hewan		15.091.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota						15.091.000,00					Peternak Hewan		15.091.000,00	
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.500.000,00						4 Laporan	7.500.000,00	
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.591.000,00						4 Laporan	7.591.000,00	
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil						7.591.000,00							7.591.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.591.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Laporan	7.591.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak						7.500.000,00							7.500.000,00	
		Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	7.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Laporan	7.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer						10.000.000,00					Peternak Hewan		10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer						10.000.000,00					Peternak Hewan		10.000.000,00	
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	10.000.000,00	
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Laporan	10.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						42.667.600,00					Peternak Hewan		57.500.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota						42.667.600,00					Peternak Hewan		57.500.000,00	
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	32.667.600,00						4 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	7.500.000,00	
	3.27.02.2.05.0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak						10.000.000,00							7.500.000,00	
		Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Laporan	7.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak						32.667.600,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	32.667.600,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Laporan	50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						521.977.679,00					Peternak Hewan		900.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain						521.977.679,00					Peternak Hewan		900.000.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	300 Ekor		300 Ekor	300 Ekor	521.977.679,00						300 Ekor	900.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						521.977.679,00							900.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	300 Ekor		300 Ekor	300 Ekor	521.977.679,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		300 Ekor	900.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
208.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**1.630.000.000,00**							**104.091.500,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana peternakan						***1.630.000.000,00***							***104.091.500,00***	
			999.Persentase prasarana yang digunakan dan berfungsi dengan baik (meliputi semua non japrod yang di kelola dinas peternakan)	100 %		100 %	100 %	1.630.000.000,00						100 %	104.091.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian						1.620.000.000,00					Peternak Hewan		102.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian						1.620.000.000,00					Peternak Hewan		102.000.000,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	120.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00						1 Unit	52.000.000,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						120.000.000,00							50.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	120.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Unit	50.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						1.500.000.000,00							52.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.500.000.000,00	Kab. Trenggalek	DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pangan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Unit	52.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota						10.000.000,00					Peternak Hewan		2.091.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota						10.000.000,00					Peternak Hewan		2.091.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	2.091.500,00	
	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak						10.000.000,00							2.091.500,00	
		Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Laporan	2.091.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
209.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**361.024.300,00**							**165.096.800,00**	
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner						***261.024.300,00***							***150.096.800,00***	
			999.Jumlah Unit Usaha pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV	3 Unit		3 Unit	3 Unit	261.024.300,00						3 Unit	150.096.800,00	
			999.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100 %		100 %	100 %	261.024.300,00						100 %	150.096.800,00	
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						45.000.000,00					Peternak Hewan		35.000.000,00	
		Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota						45.000.000,00					Peternak Hewan		35.000.000,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00						4 Laporan	35.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						45.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Laporan	35.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						4.927.500,00					Peternak Hewan		4.927.500,00	
		Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota						4.927.500,00					Peternak Hewan		4.927.500,00	
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan		12 laporan	12 laporan	4.927.500,00						12 laporan	4.927.500,00	
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)						4.927.500,00							4.927.500,00	
		Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 laporan		12 laporan	12 laporan	4.927.500,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 laporan	4.927.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						105.000.000,00					Peternak Hewan		19.072.500,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						105.000.000,00					Peternak Hewan		19.072.500,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00						4 Laporan	4.072.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium						5.000.000,00							4.072.500,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Laporan	4.072.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						26.096.800,00					Masyarakat Veteriner		26.096.800,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						26.096.800,00					Masyarakat Veteriner		26.096.800,00	
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	200 Orang		200 Orang	200 Orang	20.000.000,00						200 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00						4 Laporan	4.000.000,00	
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.096.800,00						4 Dokumen	2.096.800,00	
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Laporan	4.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner						2.096.800,00							2.096.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.096.800,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Dokumen	2.096.800,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	200 Orang		200 Orang	200 Orang	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		200 Orang	20.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan						180.000.000,00					Peternak Hewan		80.000.000,00	
		Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan						180.000.000,00					Peternak Hewan		80.000.000,00	
			Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	14 Unit		14 Unit	14 Unit	180.000.000,00						14 Unit	80.000.000,00	
	3.27.04.2.05.0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha						180.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	14 Unit		14 Unit	14 Unit	180.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		14 Unit	80.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
		UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN						**95.000.000,00**							**250.671.700,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**95.000.000,00**							**250.671.700,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**95.000.000,00**							**250.671.700,00**	
210.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**434.800.000,00**							**479.671.700,00**	
			-	-		-	-	95.000.000,00						-	250.671.700,00	
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						95.000.000,00					Masyarakat Perikanan Tangkap		250.671.700,00	
		-						95.000.000,00					Masyarakat Perikanan Tangkap		250.671.700,00	
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-		-	-	95.000.000,00						-	250.671.700,00	
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						95.000.000,00							250.671.700,00	
		Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	-		-	360 Layanan	95.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	250.671.700,00	UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN
		UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN						**280.000.000,00**							**290.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**280.000.000,00**							**290.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**280.000.000,00**							**290.000.000,00**	
211.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**975.736.279,00**							**1.372.591.000,00**	
			-	-		-	-	280.000.000,00						-	290.000.000,00	
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						280.000.000,00					UPT Pusbitnak		290.000.000,00	
		-						280.000.000,00					UPT Pusbitnak		290.000.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-		-	-	280.000.000,00						-	290.000.000,00	
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						280.000.000,00							290.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	-		-	4 Dokumen	280.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pogalan || Desa Ngadirenggo || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	290.000.000,00	UPT PUSAT PEMBIBITAN TERNAK DAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
		UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN						**100.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**100.000.000,00**							**15.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**100.000.000,00**							**15.000.000,00**	
212.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**361.024.300,00**							**165.096.800,00**	
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner						***100.000.000,00***							***15.000.000,00***	
			999.Jumlah Unit Usaha pangan Asal Hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV	3 Unit		3 Unit	3 Unit	100.000.000,00						3 Unit	15.000.000,00	
			999.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100 %		100 %	100 %	100.000.000,00						100 %	15.000.000,00	
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						105.000.000,00					Peternak Hewan		19.072.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota						105.000.000,00					Peternak Hewan		19.072.500,00	
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-		-	-	100.000.000,00						-	15.000.000,00	
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						100.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-		-	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	15.000.000,00	UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA						**7.971.043.475,00**							**7.671.043.475,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**7.459.843.475,00**							**7.209.843.475,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**7.459.843.475,00**							**7.209.843.475,00**	
213.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.192.343.475,00**							**5.192.343.475,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***5.187.343.475,00***							***5.187.343.475,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	5.187.343.475,00						100 %	5.187.343.475,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	5.187.343.475,00						100 %	5.187.343.475,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98 %		98 %	98 %	5.187.343.475,00						98 %	5.187.343.475,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.800.000,00					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		1.800.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.800.000,00					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		1.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	1.800.000,00						15 Dokumen	1.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.800.000,00							1.800.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	10 Dokumen	1.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Dokumen	1.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.774.132.951,00					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		4.774.132.951,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.774.132.951,00					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		4.774.132.951,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	55.000.000,00						30 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan		47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	4.719.132.951,00						47 Orang/bulan	4.719.132.951,00	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.719.132.951,00							4.719.132.951,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/bulan		47 Orang/bulan	47 Orang/bulan	4.719.132.951,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		47 Orang/bulan	4.719.132.951,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						55.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen		30 Dokumen	13 Dokumen	55.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		30 Dokumen	55.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						141.000.000,00					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		141.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						141.000.000,00					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		141.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	5.000.000,00						5 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	50.000.000,00						40 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.000.000,00						10 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	35.000.000,00						10 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	30.000.000,00						6 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	5.000.000,00						3 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	6.000.000,00						3 Paket	6.000.000,00	
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Paket	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.000.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	6.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Paket	6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	4 Paket	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Paket	10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	5 Paket	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	7 Paket	35.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Paket	35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan		5 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Laporan	5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	25 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		40 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						12.000.000,00					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		12.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.000.000,00					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		12.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	12.000.000,00						3 Unit	12.000.000,00	
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	1 Unit	12.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Unit	12.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						148.244.225,00					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		148.244.225,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						148.244.225,00					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		148.244.225,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	130.244.225,00						12 Laporan	130.244.225,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	18.000.000,00						3 Laporan	18.000.000,00	
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						130.244.225,00							130.244.225,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	130.244.225,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	130.244.225,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						18.000.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	18.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Laporan	18.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115.166.299,00					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		115.166.299,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						115.166.299,00					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		115.166.299,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00						1 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	65.000.000,00						21 Unit	65.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	30.166.299,00						30 Unit	30.166.299,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						65.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	65.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		21 Unit	65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.166.299,00							30.166.299,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	25 Unit	30.166.299,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		30 Unit	30.166.299,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
214.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**595.000.000,00**							**595.000.000,00**	
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja						***595.000.000,00***							***595.000.000,00***	
			999.Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi pada tahun n	0.155 %		0.069 %	0.091 %	595.000.000,00						0.112 %	595.000.000,00	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi						595.000.000,00					Pencari Kerja		595.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi						595.000.000,00					Pencari Kerja		595.000.000,00	
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	41 Lembaga		41 Lembaga	41 Lembaga	20.000.000,00						41 Lembaga	20.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	41 Lembaga		41 Lembaga	41 Lembaga	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		41 Lembaga	20.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi						595.000.000,00					Pencari Kerja		595.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-	575.000.000,00						-	575.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						575.000.000,00							575.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	100 Orang	575.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	575.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
215.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**425.000.000,00**							**175.000.000,00**	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja						***425.000.000,00***							***125.000.000,00***	
			999.Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	45.25 Persentase		45 Persentase	45.10 Persentase	425.000.000,00						45.15 Persentase	125.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota						125.000.000,00					Pencari Kerja		125.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Daerah						125.000.000,00					Pencari Kerja		125.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang		20 Orang	20 Orang	50.000.000,00						20 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	40 Orang		40 Orang	40 Orang	75.000.000,00						40 Orang	75.000.000,00	
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja						75.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	40 Orang		40 Orang	40 Orang	75.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		40 Orang	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang		20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		20 Orang	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00					CPMI		50.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah						300.000.000,00					CPMI		50.000.000,00	
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	6 Orang		0 Orang	0 Orang	300.000.000,00						0 Orang	50.000.000,00	
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						300.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	6 Orang		0 Orang	250 Orang	300.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		0 Orang	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
216.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**1.247.500.000,00**							**1.247.500.000,00**	
		Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi						***1.207.500.000,00***							***1.207.500.000,00***	
			999.Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	1000		1000	1000	1.207.500.000,00						1000	1.207.500.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00					Perusahaan		40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan						40.000.000,00					Perusahaan		40.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00						4 Laporan	40.000.000,00	
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						40.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Laporan	40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						1.207.500.000,00					Perusahaan		1.207.500.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan						1.207.500.000,00					Perusahaan		1.207.500.000,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	30.000.000,00						1 Lembaga	30.000.000,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	1 Perkara		1 Perkara	1 Perkara	40.000.000,00						1 Perkara	40.000.000,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10000 Orang		10000 Orang	10000 Orang	1.137.500.000,00						10000 Orang	1.137.500.000,00	
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	1 Perkara		1 Perkara	1 Perkara	40.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Perkara	40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Lembaga	30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						1.137.500.000,00							1.137.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10000 Orang		10000 Orang	10000 Orang	1.137.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		10000 Orang	1.137.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**511.200.000,00**							**461.200.000,00**	
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**396.200.000,00**							**346.200.000,00**	
217.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**250.000.000,00**							**200.000.000,00**	
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri						***175.000.000,00***							***125.000.000,00***	
			999.Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	17.10 Persentase		16.76 Persentase	16.90 Persentase	175.000.000,00						16.90 Persentase	125.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						250.000.000,00					Industri Kecil dan Menengah (IKM)		200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri						250.000.000,00					Industri Kecil dan Menengah (IKM)		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						100.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
218.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**80.000.000,00**							**80.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian						***80.000.000,00***							***80.000.000,00***	
			999.Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	0.5 Persentase		0.5 Persentase	0.5 Persentase	80.000.000,00						0.5 Persentase	80.000.000,00	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						80.000.000,00					Industri Kecil dan Menengah (IKM)		80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)						80.000.000,00					Industri Kecil dan Menengah (IKM)		80.000.000,00	
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00						1 Dokumen	80.000.000,00	
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	80.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
219.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**66.200.000,00**							**66.200.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri						***66.200.000,00***							***66.200.000,00***	
			999.Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	20 Persentase		40 Persentase	60 Persentase	66.200.000,00						80 Persentase	66.200.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						66.200.000,00					Industri Kecil dan Menengah (IKM)		66.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI						66.200.000,00					Industri Kecil dan Menengah (IKM)		66.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	66.200.000,00						1 Dokumen	66.200.000,00	
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						66.200.000,00							66.200.000,00	
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	66.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	66.200.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**115.000.000,00**							**115.000.000,00**	
220.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**115.000.000,00**							**115.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi						***65.000.000,00***							***65.000.000,00***	
			999.Persentase transmigran yang tidak meninggalkan daerah penempatan	100 %		100 %	100 %	65.000.000,00						100 %	65.000.000,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						115.000.000,00					Masyarakat		115.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk						115.000.000,00					Masyarakat		115.000.000,00	
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	0 Kepala Keluarga		50 Kepala Keluarga	0 Kepala Keluarga	15.000.000,00						0 Kepala Keluarga	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	2 Kepala Keluarga		2 Kepala Keluarga	2 Kepala Keluarga	50.000.000,00						2 Kepala Keluarga	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	2 Kepala Keluarga		2 Kepala Keluarga	2 Kepala Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Kepala Keluarga	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	0 Kepala Keluarga		50 Kepala Keluarga	25 Kepala Keluarga	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Desa Ngares || 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		0 Kepala Keluarga	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		SEKRETARIAT DAERAH						**32.445.397.547,00**							**30.515.945.100,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**32.445.397.547,00**							**30.515.945.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**32.445.397.547,00**							**30.515.945.100,00**	
221.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**28.316.097.547,00**							**25.913.544.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***28.138.097.547,00***							***25.452.544.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	28.138.097.547,00						100 %	25.452.544.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	28.138.097.547,00						100 %	25.452.544.000,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	65 %		61 %	62 %	28.138.097.547,00						63 %	25.452.544.000,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					Instansi Pemerintahan		130.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					Instansi Pemerintahan		130.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	25.000.000,00						13 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53 Laporan		53 Laporan	53 Laporan	25.000.000,00						53 Laporan	65.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen		13 Dokumen	13 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		13 Dokumen	65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						25.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53 Laporan		53 Laporan	53 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		53 Laporan	65.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.176.437.139,00					Instansi Pemerintahan		18.296.621.255,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.176.437.139,00					Instansi Pemerintahan		18.296.621.255,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47 Dokumen		47 Dokumen	47 Dokumen	135.200.000,00						47 Dokumen	170.174.780,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1300 Dokumen		1300 Dokumen	1300 Dokumen	60.000.000,00						1300 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33 Laporan		33 Laporan	33 Laporan	225.000,00						33 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/bulan		119 Orang/bulan	119 Orang/bulan	20.981.012.139,00						119 Orang/bulan	18.080.446.475,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						20.981.012.139,00							18.080.446.475,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	119 Orang/bulan		119 Orang/bulan	174 Orang/bulan	20.981.012.139,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		119 Orang/bulan	18.080.446.475,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						135.200.000,00							170.174.780,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47 Dokumen		47 Dokumen	47 Dokumen	135.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		47 Dokumen	170.174.780,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						60.000.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1300 Dokumen		1300 Dokumen	1300 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1300 Dokumen	45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						225.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	33 Laporan		33 Laporan	33 Laporan	225.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		33 Laporan	1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.000.000,00					Instansi Pemerintahan		1.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						1.000.000,00					Instansi Pemerintahan		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00						12 Laporan	1.000.000,00	
	4.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	1.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						135.800.000,00					Instansi Pemerintahan		110.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						135.800.000,00					Instansi Pemerintahan		110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00						12 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00						12 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	97.800.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	4 Orang	5.000.000,00						4 Orang	40.000.000,00	
	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						97.800.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	97.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Paket	20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						18.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	18.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	20.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						5.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	4 Orang	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Orang	40.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						477.425.000,00					Instansi Pemerintahan		605.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						477.425.000,00					Instansi Pemerintahan		605.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		8 Laporan	12 Laporan	240.000.000,00						12 Laporan	280.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	2.425.000,00						12 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	15.000.000,00						4 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	55.000.000,00						4 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	35.000.000,00						4 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	70.000.000,00						4 Paket	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	60.000.000,00						4 Paket	125.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						35.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	35.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	35.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						70.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	70.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						60.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	60.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	125.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						55.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	55.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	50.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						240.000.000,00							280.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		8 Laporan	12 Laporan	240.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	280.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.425.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	2.425.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	15.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						143.960.170,00					Instansi Pemerintahan		195.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						143.960.170,00					Instansi Pemerintahan		195.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit		25 Unit	25 Unit	18.000.000,00						25 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	77.960.170,00						7 Unit	80.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	48.000.000,00						7 Unit	85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						18.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Unit		25 Unit	25 Unit	18.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		25 Unit	30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						77.960.170,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	77.960.170,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		7 Unit	80.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						48.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	48.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		7 Unit	85.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.548.800.000,00					Instansi Pemerintahan		2.301.147.507,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.548.800.000,00					Instansi Pemerintahan		2.301.147.507,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	688.800.000,00						48 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.700.000.000,00						12 Laporan	1.401.147.507,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	160.000.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						688.800.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	688.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		48 Laporan	700.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						160.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	160.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.700.000.000,00							1.401.147.507,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.700.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	1.401.147.507,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						461.000.000,00					Instansi Pemerintahan		467.100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						461.000.000,00					Instansi Pemerintahan		467.100.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	10.000.000,00						3 Unit	7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	9 Unit	200.000.000,00						9 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	55.000.000,00						4 Unit	55.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit		34 Unit	34 Unit	140.000.000,00						34 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	20.000.000,00						10 Unit	10.100.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	36.000.000,00						10 Unit	45.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						140.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	34 Unit		34 Unit	34 Unit	140.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		34 Unit	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						55.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	55.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Unit	55.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						20.000.000,00							10.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Unit	10.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						36.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	36.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Unit	45.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						10.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Unit	7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	9 Unit	200.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		9 Unit	200.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.436.675.238,00					Instansi Pemerintahan		1.461.675.238,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.436.675.238,00					Instansi Pemerintahan		1.461.675.238,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Orang/Bulan		3 Orang/Bulan	3 Orang/Bulan	600.000.000,00						3 Orang/Bulan	600.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	809.675.238,00						2 Orang/Bulan	809.675.238,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang		4 Orang	4 Orang	5.000.000,00						4 Orang	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	22.000.000,00						8 Paket	43.000.000,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						809.675.238,00							809.675.238,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	809.675.238,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Orang/Bulan	809.675.238,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						22.000.000,00							43.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	22.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		8 Paket	43.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						5.000.000,00							9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang		4 Orang	4 Orang	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Orang	9.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						600.000.000,00							600.000.000,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3 Orang/Bulan		3 Orang/Bulan	3 Orang/Bulan	600.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Orang/Bulan	600.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						1.470.000.000,00					Instansi Pemerintahan		1.740.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						1.470.000.000,00					Instansi Pemerintahan		1.740.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	1.000.000.000,00						9 Paket	1.100.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	470.000.000,00						7 Paket	640.000.000,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						1.000.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	1.000.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		9 Paket	1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						470.000.000,00							640.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	470.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		7 Paket	640.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi						159.000.000,00					Instansi Pemerintahan		270.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Organisasi						159.000.000,00					Instansi Pemerintahan		270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	38.500.000,00						4 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	50.000.000,00						18 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10 Laporan		7 Laporan	3 Laporan	70.500.000,00						3 Laporan	110.000.000,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						38.500.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	38.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Dokumen	70.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						70.500.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10 Laporan		7 Laporan	3 Laporan	70.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Laporan	110.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						50.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		18 Dokumen	90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						256.000.000,00					Instansi Pemerintahan		336.000.000,00	
		Terlaksanannya Protokol dan Komunikasi Pimpinan						256.000.000,00					Instansi Pemerintahan		336.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	145.000.000,00						12 Laporan	214.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00						12 Laporan	46.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	71.000.000,00						12 Laporan	76.000.000,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						145.000.000,00							214.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	145.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	214.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						40.000.000,00							46.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	46.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						71.000.000,00							76.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	71.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	76.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
222.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**3.217.800.000,00**							**3.194.101.100,00**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat						***2.736.800.000,00***							***2.510.101.100,00***	
			999.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	2.736.800.000,00						100 Persentase	2.510.101.100,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						2.736.800.000,00					Masyarakat		2.510.101.100,00	
		Terlaksananya Kebijakan Kesejahrteraan Rakyat						2.736.800.000,00					Masyarakat		2.510.101.100,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.350.000.000,00						12 Dokumen	900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	486.800.000,00						9 Dokumen	240.101.100,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	900.000.000,00						12 Dokumen	1.370.000.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						1.350.000.000,00							900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.350.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	900.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						900.000.000,00							1.370.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	900.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	1.370.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						486.800.000,00							240.101.100,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	9 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	486.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		9 Dokumen	240.101.100,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah						***248.000.000,00***							***344.000.000,00***	
			999.Efektivitas Kerja Sama Daerah	93 Persentase		91 Persentase	91.50 Persentase	248.000.000,00						92 Persentase	344.000.000,00	
			999.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	3.66 Nilai		3.62 Nilai	3.63 Nilai	248.000.000,00						3.64 Nilai	344.000.000,00	
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan						228.000.000,00					Instansi Pemerintahan		310.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan						228.000.000,00					Instansi Pemerintahan		310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	157.000.000,00						3 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	19.000.000,00						2 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	52.000.000,00						3 Dokumen	100.000.000,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						19.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	19.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Dokumen	90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						52.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	52.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Dokumen	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						157.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	157.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Dokumen	120.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						20.000.000,00					Instansi Pemerintahan dan Stakeholder (Lembaga Pendidikan, Lembaga Hukum, Masyarakat dan Praktisi)		34.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi kerja sama daerah						20.000.000,00					Instansi Pemerintahan dan Stakeholder (Lembaga Pendidikan, Lembaga Hukum, Masyarakat dan Praktisi)		34.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	14.000.000,00						15 Dokumen	27.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00						1 Laporan	7.000.000,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						14.000.000,00							27.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	14.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		15 Dokumen	27.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						6.000.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Laporan	7.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas produk hukum yang difasilitasi						***233.000.000,00***							***340.000.000,00***	
			999.Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	96 %		93 %	94 %	233.000.000,00						95 %	340.000.000,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						233.000.000,00					Instansi Pemerintahan dan Masyarakat		340.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						233.000.000,00					Instansi Pemerintahan dan Masyarakat		340.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	29 Kasus		29 Kasus	29 Kasus	120.000.000,00						29 Kasus	150.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	600 Dokumen		600 Dokumen	600 Dokumen	64.000.000,00						600 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	49.000.000,00						4 Dokumen	90.000.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						64.000.000,00							100.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	600 Dokumen		600 Dokumen	600 Dokumen	64.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		600 Dokumen	100.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						120.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	29 Kasus		29 Kasus	29 Kasus	120.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		29 Kasus	150.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						49.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	49.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Dokumen	90.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
223.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**911.500.000,00**							**1.408.300.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan administrasi pembangunan						***86.000.000,00***							***318.500.000,00***	
			999.Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100 %		100 %	100 %	86.000.000,00						100 %	318.500.000,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						86.000.000,00					Instansi Pemerintahan		318.500.000,00	
		Terlaksananya adminstrasi pembangunan						86.000.000,00					Instansi Pemerintahan		318.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00						2 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	27.000.000,00						40 Laporan	78.500.000,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						9.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Dokumen	30.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						27.000.000,00							78.500.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	27.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		40 Laporan	78.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						50.000.000,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Laporan	210.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan						***674.500.000,00***							***824.300.000,00***	
			999.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	100 %		100 %	100 %	674.500.000,00						100 %	824.300.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						332.000.000,00					Instansi Pemerintahan dan Masyarakat		446.300.000,00	
		Terlaksananya kebijakan perekonomian						332.000.000,00					Instansi Pemerintahan dan Masyarakat		446.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	95.000.000,00						4 Dokumen	126.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00						1 Dokumen	24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	225.000.000,00						4 Laporan	296.000.000,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						95.000.000,00							126.300.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	95.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Dokumen	126.300.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						225.000.000,00							296.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	225.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		4 Laporan	296.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						12.000.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Dokumen	24.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam						342.500.000,00					Instansi Pemerintahan dan Masyarakat		378.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam						342.500.000,00					Instansi Pemerintahan dan Masyarakat		378.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	4.500.000,00						8 Dokumen	16.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	2.000.000,00						8 Dokumen	19.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	336.000.000,00						12 Dokumen	342.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						336.000.000,00							342.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	336.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	342.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						2.000.000,00							19.200.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		8 Dokumen	19.200.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						4.500.000,00							16.800.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	4.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		8 Dokumen	16.800.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa						***151.000.000,00***							***265.500.000,00***	
			999.Tingkat Kematangan UKPBJ	Strategis Level		Pro Aktif Level	Pro Aktif Level	151.000.000,00						Pro Aktif Level	265.500.000,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						151.000.000,00					Instansi Pemerintahan dan Penyedia Barang/Jasa		265.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa						151.000.000,00					Instansi Pemerintahan dan Penyedia Barang/Jasa		265.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00						12 Dokumen	66.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	87.000.000,00						12 Dokumen	122.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	80 Orang		80 Orang	80 Orang	34.000.000,00						80 Orang	77.000.000,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						87.000.000,00							122.000.000,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	87.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	122.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						30.000.000,00							66.500.000,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Dokumen	66.500.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						34.000.000,00							77.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	80 Orang		80 Orang	80 Orang	34.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		80 Orang	77.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						**45.967.719.623,00**							**55.255.965.882,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**45.967.719.623,00**							**55.255.965.882,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**45.967.719.623,00**							**55.255.965.882,00**	
224.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**31.004.737.677,00**							**30.563.711.100,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***30.954.737.677,00***							***30.518.711.100,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	30.954.737.677,00						100 %	30.518.711.100,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	30.954.737.677,00						100 %	30.518.711.100,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98.85 %		98.84 %	98.85 %	30.954.737.677,00						98.85 %	30.518.711.100,00	
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						60.000.000,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		55.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						60.000.000,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	30.000.000,00						15 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85 Laporan		85 Laporan	85 Laporan	30.000.000,00						85 Laporan	25.000.000,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Dokumen	30.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85 Laporan		85 Laporan	85 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		85 Laporan	25.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.722.542.002,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		4.425.826.300,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.722.542.002,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		4.425.826.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	784 Dokumen		784 Dokumen	784 Dokumen	176.840.000,00						784 Dokumen	61.660.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan		44 Orang/bulan	44 Orang/bulan	4.545.702.002,00						44 Orang/bulan	4.364.166.300,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.545.702.002,00							4.364.166.300,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/bulan		44 Orang/bulan	41 Orang/bulan	4.545.702.002,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		44 Orang/bulan	4.364.166.300,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						176.840.000,00							61.660.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	784 Dokumen		784 Dokumen	784 Dokumen	176.840.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		784 Dokumen	61.660.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						35.366.000,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		42.665.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						35.366.000,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		42.665.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.366.000,00						12 Laporan	42.665.000,00	
	4.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						35.366.000,00							42.665.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.366.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	42.665.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						180.616.237,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		130.200.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						180.616.237,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		130.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	43 Dokumen		43 Dokumen	43 Dokumen	15.213.937,00						43 Dokumen	10.200.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang		44 Orang	44 Orang	165.402.300,00						44 Orang	120.000.000,00	
	4.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						15.213.937,00							10.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	43 Dokumen		43 Dokumen	42 Dokumen	15.213.937,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		43 Dokumen	10.200.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						165.402.300,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang		44 Orang	41 Orang	165.402.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		44 Orang	120.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						248.997.394,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		239.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						248.997.394,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		239.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.143.630,00						12 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.912.676,00						12 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.362.000,00						12 Laporan	46.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	70.775.000,00						3 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	29.200.000,00						4 Paket	33.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	13.526.062,00						3 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	15.078.026,00						3 Paket	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						13.526.062,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	13.526.062,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Paket	15.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.078.026,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	15.078.026,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Paket	15.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						29.200.000,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	29.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	33.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						70.775.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	70.775.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Paket	60.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						35.912.676,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.912.676,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	30.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60.362.000,00							46.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.362.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	46.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						24.143.630,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.143.630,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	40.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						70.000.000,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		119.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						70.000.000,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		119.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	20.000.000,00						10 Unit	44.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit		13 Unit	13 Unit	50.000.000,00						13 Unit	75.000.000,00	
	4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						20.000.000,00							44.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Unit	44.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit		13 Unit	5 Unit	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		13 Unit	75.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.151.727.485,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		1.002.235.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.151.727.485,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		1.002.235.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	232.203.885,00						12 Laporan	232.235.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	919.523.600,00						36 Laporan	770.000.000,00	
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						232.203.885,00							232.235.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	48 Laporan	232.203.885,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	232.235.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						919.523.600,00							770.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	919.523.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	770.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.731.456,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		263.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						412.731.456,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		263.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit		28 Unit	28 Unit	57.000.000,00						28 Unit	57.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	58.500.000,00						4 Unit	33.500.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	20.000.000,00						30 Unit	16.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit		44 Unit	44 Unit	49.827.456,00						44 Unit	56.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	227.404.000,00						4 Unit	100.000.000,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						58.500.000,00							33.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	58.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Unit	33.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						57.000.000,00							57.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit		28 Unit	28 Unit	57.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		28 Unit	57.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						20.000.000,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	10 Unit	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		30 Unit	16.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						49.827.456,00							56.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit		44 Unit	27 Unit	49.827.456,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		44 Unit	56.500.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						227.404.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	227.404.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Unit	100.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						23.849.271.149,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		23.843.371.100,00	
		Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						23.849.271.149,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		23.843.371.100,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan		45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	23.618.485.049,00						45 Orang/Bulan	23.618.485.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	44.000.000,00						45 Orang	45.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	186.786.100,00						1 Paket	179.886.100,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						23.618.485.049,00							23.618.485.000,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan		45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	23.618.485.049,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		45 Orang/Bulan	23.618.485.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						186.786.100,00							179.886.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	186.786.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Paket	179.886.100,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						44.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	44.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		45 Orang	45.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD						273.485.954,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		443.413.700,00	
		Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD						273.485.954,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		443.413.700,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	78.710.700,00						12 Laporan	175.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	194.775.254,00						3 Paket	268.413.700,00	
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						78.710.700,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	78.710.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	175.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						194.775.254,00							268.413.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	4 Paket	194.775.254,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Paket	268.413.700,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
225.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**14.962.981.946,00**							**24.692.254.782,00**	
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan						***4.437.050.496,00***							***10.862.425.913,00***	
			999.Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %		100 %	100 %	4.437.050.496,00						100 %	10.862.425.913,00	
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						1.440.384.800,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		6.605.038.170,00	
		Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran						1.440.384.800,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		6.605.038.170,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	479.348.296,00						1 Dokumen	1.955.554.003,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	524.493.437,00						2 Dokumen	3.925.711.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	436.543.067,00						1 Dokumen	723.773.167,00	
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						524.493.437,00							3.925.711.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	524.493.437,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Dokumen	3.925.711.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						479.348.296,00							1.955.554.003,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	479.348.296,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Dokumen	1.955.554.003,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						436.543.067,00							723.773.167,00	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	436.543.067,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Dokumen	723.773.167,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						290.815.077,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		1.020.182.677,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						290.815.077,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		1.020.182.677,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	67.213.600,00						12 Laporan	205.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	223.601.477,00						1 Dokumen	815.182.677,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						67.213.600,00							205.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan		12 Laporan	48 Laporan	67.213.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	205.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						223.601.477,00							815.182.677,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	223.601.477,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Dokumen	815.182.677,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						2.027.000.619,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		2.573.355.066,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD						2.027.000.619,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		2.573.355.066,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.417.713.600,00						12 Dokumen	1.812.801.612,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	32.653.965,00						12 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	423.390.000,00						12 Dokumen	550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.689.600,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang		6 Orang	6 Orang	150.553.454,00						6 Orang	150.553.454,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						1.417.713.600,00							1.812.801.612,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.417.713.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	1.812.801.612,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						150.553.454,00							150.553.454,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	6 Orang		6 Orang	6 Orang	150.553.454,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Orang	150.553.454,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						32.653.965,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	32.653.965,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	50.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						2.689.600,00							10.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.689.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Dokumen	10.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						423.390.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	423.390.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	550.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						678.850.000,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		663.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						678.850.000,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		663.850.000,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	573.850.000,00						12 Dokumen	573.850.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	105.000.000,00						6 Laporan	90.000.000,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						105.000.000,00							90.000.000,00	
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	105.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Laporan	90.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						573.850.000,00							573.850.000,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	573.850.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	573.850.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan						***10.525.931.450,00***							***13.829.828.869,00***	
			999.Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	10.525.931.450,00						100 Persentase	13.829.828.869,00	
			999.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	80.00 Persentase		67.50 Persentase	70.00 Persentase	10.525.931.450,00						72.50 Persentase	13.829.828.869,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						2.266.240.599,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		3.369.828.869,00	
		Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						2.266.240.599,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		3.369.828.869,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	646.360.881,00						3 Dokumen	939.372.881,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	830.395.200,00						2 Dokumen	1.400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	729.484.518,00						5 Dokumen	445.712.018,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00						1 Dokumen	584.743.970,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						830.395.200,00							1.400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	830.395.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Dokumen	1.400.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						646.360.881,00							939.372.881,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	646.360.881,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Dokumen	939.372.881,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						60.000.000,00							584.743.970,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Dokumen	584.743.970,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik						729.484.518,00							445.712.018,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	729.484.518,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Dokumen	445.712.018,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						413.248.915,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		525.000.000,00	
		Tersedianya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						413.248.915,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		525.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	413.248.915,00						1 Laporan	525.000.000,00	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						413.248.915,00							525.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	413.248.915,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Laporan	525.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD						7.846.441.936,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		9.935.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD						7.846.441.936,00					Sektretariat DPRD Kabupaten Trenggalek		9.935.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.163.169.800,00						12 Dokumen	1.930.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.580.757.900,00						12 Dokumen	3.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.100.264.236,00						12 Dokumen	5.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.250.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						5.100.264.236,00							5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.100.264.236,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	5.000.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						2.250.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Laporan	5.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						1.163.169.800,00							1.930.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.163.169.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	1.930.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						1.580.757.900,00							3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.580.757.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	3.000.000.000,00	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH						**9.040.487.165,00**							**9.574.294.700,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**9.040.487.165,00**							**9.574.294.700,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**8.553.416.165,00**							**8.921.732.000,00**	
226.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.113.016.063,00**							**7.086.654.700,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***7.113.016.063,00***							***7.086.654.700,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	7.113.016.063,00						100 %	7.086.654.700,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	7.113.016.063,00						100 %	7.086.654.700,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	91.62 %		91.58 %	91.59 %	7.113.016.063,00						91.60 %	7.086.654.700,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						538.165,00					Pegawai Bapperida		6.839.710,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						538.165,00					Pegawai Bapperida		6.839.710,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	288.165,00						15 Dokumen	3.335.218,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89 Laporan		89 Laporan	89 Laporan	250.000,00						89 Laporan	3.504.492,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						288.165,00							3.335.218,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	288.165,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Dokumen	3.335.218,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						250.000,00							3.504.492,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89 Laporan		89 Laporan	89 Laporan	250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		89 Laporan	3.504.492,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.428.796.436,00					Pegawai Bapperida		6.282.698.664,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.428.796.436,00					Pegawai Bapperida		6.282.698.664,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	114.802.192,00						34 Dokumen	108.485.964,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	6.313.994.244,00						63 Orang/bulan	6.174.212.700,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.313.994.244,00							6.174.212.700,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	6.313.994.244,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		63 Orang/bulan	6.174.212.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						114.802.192,00							108.485.964,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34 Dokumen		34 Dokumen	34 Dokumen	114.802.192,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		34 Dokumen	108.485.964,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						12.500.000,00					Pegawai Bapperida		13.565.250,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						12.500.000,00					Pegawai Bapperida		13.565.250,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.500.000,00						12 Laporan	13.565.250,00	
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						12.500.000,00							13.565.250,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	13.565.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					Pegawai Bapperida		11.600.001,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10.000.000,00					Pegawai Bapperida		11.600.001,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	10.000.000,00						10 Orang	11.600.001,00	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10.000.000,00							11.600.001,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	2 Orang	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Orang	11.600.001,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.248.508,00					Pegawai Bapperida		219.493.438,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.248.508,00					Pegawai Bapperida		219.493.438,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.672.700,00						12 Dokumen	7.521.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.119.000,00						4 Laporan	3.467.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	182.684.000,00						4 Laporan	133.334.662,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	15.000.000,00						20 Paket	11.084.980,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	29.008.100,00						4 Paket	47.835.400,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	5.600.000,00						10 Paket	8.712.896,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	6.045.508,00						6 Paket	2.498.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	5.119.200,00						6 Paket	5.039.500,00	
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.045.508,00							2.498.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	6.045.508,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	2.498.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.119.200,00							5.039.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	5.119.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	5.039.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							11.084.980,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	10 Paket	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		20 Paket	11.084.980,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.600.000,00							8.712.896,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	5.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Paket	8.712.896,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						29.008.100,00							47.835.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	29.008.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	47.835.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.119.000,00							3.467.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.119.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	3.467.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						182.684.000,00							133.334.662,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	182.684.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	133.334.662,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						6.672.700,00							7.521.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.672.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	7.521.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						27.548.494,00					Pegawai Bapperida		51.064.474,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						27.548.494,00					Pegawai Bapperida		51.064.474,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	27.548.494,00						6 Unit	51.064.474,00	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						27.548.494,00							51.064.474,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	3 Unit	27.548.494,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Unit	51.064.474,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						194.284.360,00					Pegawai Bapperida		310.390.356,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						194.284.360,00					Pegawai Bapperida		310.390.356,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	107.207.400,00						60 Laporan	152.614.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	78.086.960,00						13 Laporan	148.500.711,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.990.000,00						4 Laporan	9.275.245,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						107.207.400,00							152.614.400,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	107.207.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		60 Laporan	152.614.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.990.000,00							9.275.245,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.990.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	9.275.245,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						78.086.960,00							148.500.711,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	78.086.960,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		13 Laporan	148.500.711,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						186.100.100,00					Pegawai Bapperida		191.002.807,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						186.100.100,00					Pegawai Bapperida		191.002.807,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit		52 Unit	52 Unit	121.255.600,00						52 Unit	121.011.825,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit		39 Unit	39 Unit	48.131.460,00						39 Unit	19.188.482,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	16.713.040,00						1 Unit	50.802.500,00	
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						121.255.600,00							121.011.825,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit		52 Unit	46 Unit	121.255.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		52 Unit	121.011.825,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						48.131.460,00							19.188.482,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit		39 Unit	40 Unit	48.131.460,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		39 Unit	19.188.482,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						16.713.040,00							50.802.500,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	16.713.040,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	50.802.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
227.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**587.645.396,00**							**817.459.200,00**	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah						***587.645.396,00***							***817.459.200,00***	
			999.Persentase Keselarasan RPJMD dan Renstra Perangkat daerah	100 %		100 %	100 %	587.645.396,00						100 %	817.459.200,00	
			999.Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD	100 %		100 %	100 %	587.645.396,00						100 %	817.459.200,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						516.148.396,00					Pemerintah Kabupaten Trenggalek		632.459.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						516.148.396,00					Pemerintah Kabupaten Trenggalek		632.459.200,00	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	20.000.000,00						1 Berita Acara	25.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00						1 Berita Acara	60.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	70.000.000,00						1 Berita Acara	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	361.148.396,00						1 Dokumen	427.459.200,00	
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	779 Usulan		779 Usulan	779 Usulan	15.000.000,00						779 Usulan	20.000.000,00	
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						50.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Berita Acara	60.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	20.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Berita Acara	25.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						70.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	70.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Berita Acara	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	779 Usulan		779 Usulan	665 Usulan	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		779 Usulan	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						361.148.396,00							427.459.200,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	361.148.396,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Dokumen	427.459.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						71.497.000,00					Pemerintah Kabupaten Trenggalek		185.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						71.497.000,00					Pemerintah Kabupaten Trenggalek		185.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	71.497.000,00						12 Laporan	185.000.000,00	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						71.497.000,00							185.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 Laporan		12 Laporan	11 Laporan	71.497.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	185.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
228.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**852.754.706,00**							**1.017.618.100,00**	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan						***387.132.406,00***							***339.206.034,00***	
			999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	387.132.406,00						100 Persentase	339.206.034,00	
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						387.132.406,00					Pemerintah Kabupaten Trenggalek		339.206.034,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						387.132.406,00					Pemerintah Kabupaten Trenggalek		339.206.034,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	293.132.406,00						3 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	14.000.000,00						4 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00						2 Laporan	49.206.034,00	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						293.132.406,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		3 Dokumen	5 Dokumen	293.132.406,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						14.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	14.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						80.000.000,00							49.206.034,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	49.206.034,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia						***250.238.500,00***							***339.206.033,00***	
			999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	250.238.500,00						100 Persentase	339.206.033,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						250.238.500,00					Pemerintah Kabupaten Trenggalek		339.206.033,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						250.238.500,00					Pemerintah Kabupaten Trenggalek		339.206.033,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	89.079.800,00						2 Dokumen	175.332.034,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	29 Laporan		29 Laporan	29 Laporan	124.154.700,00						29 Laporan	118.341.500,00	
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	37.004.000,00						4 Laporan	45.532.499,00	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						89.079.800,00							175.332.034,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	89.079.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Dokumen	175.332.034,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						37.004.000,00							45.532.499,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	37.004.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	45.532.499,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						124.154.700,00							118.341.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	29 Laporan		29 Laporan	25 Laporan	124.154.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		29 Laporan	118.341.500,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA						***215.383.800,00***							***339.206.033,00***	
			999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	215.383.800,00						100 Persentase	339.206.033,00	
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						215.383.800,00					Pemerintah Kabupaten Trenggalek		339.206.033,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						215.383.800,00					Pemerintah Kabupaten Trenggalek		339.206.033,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	79.201.900,00						3 Dokumen	174.926.365,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	37.922.000,00						4 Laporan	41.273.092,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	98.259.900,00						2 Laporan	123.006.576,00	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						79.201.900,00							174.926.365,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	79.201.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Dokumen	174.926.365,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						37.922.000,00							41.273.092,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	37.922.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	41.273.092,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						98.259.900,00							123.006.576,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	98.259.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	123.006.576,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**487.071.000,00**							**652.562.700,00**	
229.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**487.071.000,00**							**652.562.700,00**	
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah						***487.071.000,00***							***652.562.700,00***	
			999.Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	487.071.000,00						100 Persentase	652.562.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						232.071.000,00					Pemerintah Kabupaten Trenggalek		300.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						232.071.000,00					Pemerintah Kabupaten Trenggalek		300.000.000,00	
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	3 Naskah		3 Naskah	3 Naskah	232.071.000,00						3 Naskah	300.000.000,00	
	5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset						232.071.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	3 Naskah		3 Naskah	3 Naskah	232.071.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Naskah	300.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi						255.000.000,00					Pemerintah Kabupaten Trenggalek		352.562.700,00	
		Terlaksananya Invensi dan Inovasi						255.000.000,00					Pemerintah Kabupaten Trenggalek		352.562.700,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	255.000.000,00						4 Laporan	352.562.700,00	
	5.05.03.2.02.0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah						255.000.000,00							352.562.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	255.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	352.562.700,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						**209.657.884.834,00**							**315.071.315.540,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**209.657.884.834,00**							**315.071.315.540,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**209.657.884.834,00**							**315.071.315.540,00**	
230.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**16.331.696.389,00**							**14.398.083.840,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***16.331.696.389,00***							***14.372.083.840,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	16.331.696.389,00						100 %	14.372.083.840,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	16.331.696.389,00						100 %	14.372.083.840,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	90 %		90 %	90 %	16.331.696.389,00						90 %	14.372.083.840,00	
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.129.868,00					Karyawan BPKPD		37.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						19.129.868,00					Karyawan BPKPD		37.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	13.281.000,00						10 Dokumen	26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	5.848.868,00						28 Laporan	11.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						13.281.000,00							26.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	13.281.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Dokumen	26.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						5.848.868,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28 Laporan		28 Laporan	28 Laporan	5.848.868,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		28 Laporan	11.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.329.487.582,00					Karyawan BPKPD		13.272.668.318,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.329.487.582,00					Karyawan BPKPD		13.272.668.318,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	492.796.000,00						32 Dokumen	510.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	502 Dokumen		502 Dokumen	502 Dokumen	2.694.155,00						502 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.038.000,00						19 Laporan	5.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan		80 Orang/bulan	76 Orang/bulan	14.830.959.427,00						76 Orang/bulan	12.752.568.318,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14.830.959.427,00							12.752.568.318,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan		80 Orang/bulan	79 Orang/bulan	14.830.959.427,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		76 Orang/bulan	12.752.568.318,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						492.796.000,00							510.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	492.796.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		32 Dokumen	510.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						2.694.155,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	502 Dokumen		502 Dokumen	502 Dokumen	2.694.155,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		502 Dokumen	4.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						3.038.000,00							5.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.038.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		19 Laporan	5.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						36.123.000,00					BPKPD		53.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						36.123.000,00					BPKPD		53.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	36.123.000,00						18 Laporan	53.000.000,00	
	5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						36.123.000,00							53.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	36.123.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		18 Laporan	53.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.853.000,00					Karyawan BPKPD		54.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.853.000,00					Karyawan BPKPD		54.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	50.853.000,00						5 Orang	54.000.000,00	
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.853.000,00							54.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	50.853.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Orang	54.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						316.375.500,00					Karyawan BPKPD		383.812.083,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						316.375.500,00					Karyawan BPKPD		383.812.083,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.700.000,00						12 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	39.990.000,00						12 Laporan	47.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.942.000,00						1 Paket	26.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	133.091.000,00						2 Paket	181.812.083,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	22.772.500,00						2 Paket	39.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.600.000,00						1 Paket	12.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	89.280.000,00						1 Paket	76.000.000,00	
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.600.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Paket	12.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						89.280.000,00							76.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	89.280.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Paket	76.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						19.942.000,00							26.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	19.942.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Paket	26.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						22.772.500,00							39.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	22.772.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	39.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						133.091.000,00							181.812.083,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	133.091.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	181.812.083,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						39.990.000,00							47.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	39.990.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	47.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.700.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.700.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	2.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						352.451.439,00					BPKPD		340.603.439,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						352.451.439,00					BPKPD		340.603.439,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.603.439,00						12 Laporan	300.603.439,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	51.848.000,00						12 Laporan	40.000.000,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						300.603.439,00							300.603.439,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.603.439,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	300.603.439,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						51.848.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	51.848.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						227.276.000,00					BPKPD		257.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						227.276.000,00					BPKPD		257.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	62.999.000,00						4 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	97.926.000,00						30 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	4.250.000,00						5 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	62.101.000,00						30 Unit	72.000.000,00	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						97.926.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	97.926.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		30 Unit	120.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						4.250.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	4.250.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Unit	5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						62.101.000,00							72.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	62.101.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		30 Unit	72.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						62.999.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	62.999.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Unit	60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
231.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**190.110.930.686,00**							**296.888.032.500,00**	
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan						***98.508.000,00***							***210.000.000,00***	
			999.Persentase laporan keuangan tepat waktu	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	98.508.000,00						100 Persentase	210.000.000,00	
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						123.508.000,00					Semua OPD		210.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						123.508.000,00					Semua OPD		210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00						2 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	63 Laporan		63 Laporan	63 Laporan	12.000.000,00						63 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	30.000.000,00						48 Laporan	43.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	47 Orang		47 Orang	47 Orang	26.508.000,00						47 Orang	47.000.000,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00						2 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						30.000.000,00							43.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	48 Laporan		48 Laporan	19 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		48 Laporan	43.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						12.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	63 Laporan		63 Laporan	63 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		63 Laporan	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						25.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Dokumen	45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Dokumen	5.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						25.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Dokumen	50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						26.508.000,00							47.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	47 Orang		47 Orang	70 Orang	26.508.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		47 Orang	47.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Meningkatnya tata kelola anggaran						***848.184.199,93***							***265.000.000,00***	
			999.Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	35 %		30 %	32 %	848.184.199,93						33 %	265.000.000,00	
			999.Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	35 %		46 %	43 %	848.184.199,93						40 %	265.000.000,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						753.110.199,93					Semua OPD		145.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						753.110.199,93					Semua OPD		145.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	15.240.000,00						2 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	679.823.199,93						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen		80 Dokumen	40 Dokumen	6.960.000,00						40 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	41.004.000,00						2 Dokumen	85.000.000,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen		80 Dokumen	40 Dokumen	10.083.000,00						40 Dokumen	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						15.240.000,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	15.240.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						10.083.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen		80 Dokumen	80 Dokumen	10.083.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		40 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD						6.960.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen		80 Dokumen	80 Dokumen	6.960.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		40 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						41.004.000,00							85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	41.004.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Dokumen	85.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						679.823.199,93							10.000.000,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	679.823.199,93	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						95.074.000,00					Semua OPD		150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan						95.074.000,00					Semua OPD		150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang		90 Orang	90 Orang	95.074.000,00						90 Orang	150.000.000,00	
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						95.074.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang		90 Orang	90 Orang	95.074.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		90 Orang	150.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Meningkatnya tata kelola perbendaharaan						***189.139.238.486,07***							***296.383.032.500,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Penurunan SILPA	3.70 Persentase		40 Persentase	65.93 Persentase	189.139.238.486,07						3.91 Persentase	296.383.032.500,00	
			999.Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	96.49 Persentase		96.45 Persentase	96.46 Persentase	189.139.238.486,07						96.47 Persentase	296.383.032.500,00	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						100.000.000,00					Semua OPD		107.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						100.000.000,00					Semua OPD		107.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12580 Dokumen		12580 Dokumen	12580 Dokumen	57.612.000,00						12580 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	180 Dokumen		180 Dokumen	180 Dokumen	9.952.000,00						180 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	160 Dokumen		160 Dokumen	160 Dokumen	19.981.000,00						160 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang		80 Orang	80 Orang	12.455.000,00						80 Orang	12.500.000,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						57.612.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12580 Dokumen		12580 Dokumen	12580 Dokumen	57.612.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12580 Dokumen	65.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						9.952.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	180 Dokumen		180 Dokumen	180 Dokumen	9.952.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		180 Dokumen	10.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						19.981.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	160 Dokumen		160 Dokumen	160 Dokumen	19.981.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		160 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						12.455.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	80 Orang		80 Orang	80 Orang	12.455.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		80 Orang	12.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						189.039.238.486,07					Semua Desa		296.275.532.500,00	
		Tersusunnya Dokumen / Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						189.039.238.486,07					Semua Desa		296.275.532.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.800.000.000,00						1 Laporan	6.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	161.700.158.000,00						4 Laporan	268.289.879.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.069.581.245,02						4 Laporan	15.274.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.469.499.241,05						2 Laporan	6.711.153.000,00	
	5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						3.800.000.000,00							6.000.000.000,00	
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.800.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Laporan	6.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						161.700.158.000,00							268.289.879.500,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	161.700.158.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Desa Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	268.289.879.500,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						8.469.499.241,05							6.711.153.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.469.499.241,05	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	6.711.153.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						15.069.581.245,02							15.274.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	15.069.581.245,02	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	15.274.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
232.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**884.869.000,00**							**1.109.644.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola aset daerah						***884.869.000,00***							***1.109.644.000,00***	
			999.Indeks Pengelolaan Aset	79 Indeks		59 Indeks	64 Indeks	884.869.000,00						69 Indeks	1.109.644.000,00	
			999.Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	4.4 %		3.6 %	3.8 %	884.869.000,00						4 %	1.109.644.000,00	
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						884.869.000,00					Semua OPD		1.109.644.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah						884.869.000,00					Semua OPD		1.109.644.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1250 Laporan		1250 Laporan	1250 Laporan	353.194.000,00						1250 Laporan	387.150.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	400 Laporan		400 Laporan	400 Laporan	57.147.000,00						400 Laporan	79.330.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	280 Laporan		280 Laporan	280 Laporan	474.528.000,00						280 Laporan	643.164.000,00	
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						474.528.000,00							643.164.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	280 Laporan		280 Laporan	280 Laporan	474.528.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		280 Laporan	643.164.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						353.194.000,00							387.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1250 Laporan		1250 Laporan	1250 Laporan	353.194.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1250 Laporan	387.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						57.147.000,00							79.330.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	400 Laporan		400 Laporan	400 Laporan	57.147.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		400 Laporan	79.330.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
233.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**2.330.388.759,00**							**2.675.555.200,00**	
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan						***2.330.388.759,00***							***2.675.555.200,00***	
			999.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	810.816.759,00						100 Persentase	1.295.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.330.388.759,00					Semua Masyarakat		2.675.555.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	600 Dokumen		600 Dokumen	600 Dokumen	701.557.759,00						600 Dokumen	1.132.518.387,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	109.259.000,00						12 Laporan	162.481.613,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.330.388.759,00					Semua Masyarakat		2.675.555.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	600 Dokumen		600 Dokumen	600 Dokumen	701.557.759,00						600 Dokumen	1.132.518.387,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	109.259.000,00						12 Laporan	162.481.613,00	
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						701.557.759,00							1.132.518.387,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	600 Dokumen		600 Dokumen	4800 Dokumen	701.557.759,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		600 Dokumen	1.132.518.387,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						109.259.000,00							162.481.613,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	109.259.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	162.481.613,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital						***2.330.388.759,00***							***2.675.555.200,00***	
			999.Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	838.502.000,00						100 Persentase	865.000.000,00	
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.330.388.759,00					Semua Masyarakat		2.675.555.200,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.330.388.759,00					Semua Masyarakat		2.675.555.200,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	523000 Dokumen		523000 Dokumen	523000 Dokumen	780.000.000,00						523000 Dokumen	800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	58.502.000,00						12 Laporan	65.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.330.388.759,00					Semua Masyarakat		2.675.555.200,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	523000 Dokumen		523000 Dokumen	523000 Dokumen	780.000.000,00						523000 Dokumen	800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	58.502.000,00						12 Laporan	65.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						58.502.000,00							65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	36 Laporan	58.502.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	65.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						780.000.000,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	523000 Dokumen		523000 Dokumen	550000 Dokumen	780.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		523000 Dokumen	800.000.000,00	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***2.330.388.759,00***							***2.675.555.200,00***	
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	27.94 %		21.29 %	22.73 %	681.070.000,00						24.31 %	515.555.200,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.330.388.759,00					Semua Masyarakat		2.675.555.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	98.570.000,00						12 Laporan	258.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	582.500.000,00						12 Laporan	257.555.200,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Daerah						2.330.388.759,00					Semua Masyarakat		2.675.555.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	98.570.000,00						12 Laporan	258.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	582.500.000,00						12 Laporan	257.555.200,00	
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						582.500.000,00							257.555.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	582.500.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	257.555.200,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						98.570.000,00							258.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	98.570.000,00	Kab. Trenggalek	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	258.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**7.124.007.721,00**							**8.385.468.400,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**7.124.007.721,00**							**8.385.468.400,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**6.741.830.221,00**							**7.678.019.700,00**	
234.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.248.980.021,00**							**6.318.601.800,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***6.245.480.021,00***							***6.274.801.800,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	6.245.480.021,00						100 %	6.274.801.800,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	6.245.480.021,00						100 %	6.274.801.800,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	94 %		92 %	92.5 %	6.245.480.021,00						93 %	6.274.801.800,00	
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.700.000,00					ASN BKPSDM Kab. Trenggalek		4.700.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						4.700.000,00					ASN BKPSDM Kab. Trenggalek		4.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	1.200.000,00						14 Dokumen	1.200.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63 Laporan		63 Laporan	63 Laporan	3.500.000,00						63 Laporan	3.500.000,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.200.000,00							1.200.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		14 Dokumen	1.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.500.000,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	63 Laporan		63 Laporan	63 Laporan	3.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		63 Laporan	3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.898.568.561,00					ASN BKPSDM Kab. Trenggalek		5.953.572.300,00	
		Terselesaikannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.898.568.561,00					ASN BKPSDM Kab. Trenggalek		5.953.572.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	101 Dokumen		101 Dokumen	101 Dokumen	54.191.000,00						101 Dokumen	30.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	531 Dokumen		531 Dokumen	531 Dokumen	57.400,00						531 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5.844.320.161,00						50 Orang/bulan	5.923.072.300,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.844.320.161,00							5.923.072.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	5.844.320.161,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		50 Orang/bulan	5.923.072.300,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						54.191.000,00							30.200.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	101 Dokumen		101 Dokumen	101 Dokumen	54.191.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		101 Dokumen	30.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						57.400,00							300.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	531 Dokumen		531 Dokumen	531 Dokumen	57.400,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		531 Dokumen	300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.200.000,00					ASN BKPSDM Kab. Trenggalek		11.000.000,00	
		Terselesaikannya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						4.200.000,00					ASN BKPSDM Kab. Trenggalek		11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	4.200.000,00						100 Laporan	11.000.000,00	
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						4.200.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	4.200.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		100 Laporan	11.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						91.000,00					ASN BKPSDM Kab. Trenggalek		300.000,00	
		Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						91.000,00					ASN BKPSDM Kab. Trenggalek		300.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150 Dokumen		150 Dokumen	150 Dokumen	91.000,00						150 Dokumen	300.000,00	
	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						91.000,00							300.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	150 Dokumen		150 Dokumen	150 Dokumen	91.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		150 Dokumen	300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						156.290.100,00					ASN BKPSDM Kab. Trenggalek		163.029.500,00	
		Terselesaikannya Administrasi Umum Perangkat Daerah						156.290.100,00					ASN BKPSDM Kab. Trenggalek		163.029.500,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	558 Dokumen		558 Dokumen	558 Dokumen	2.500.000,00						558 Dokumen	4.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		85 Laporan	85 Laporan	100.000.000,00						85 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	35 Paket	10.000.000,00						35 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	25.000.000,00						25 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	3.500.000,00						17 Paket	3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.029.500,00						12 Paket	2.029.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 Paket		85 Paket	85 Paket	13.260.600,00						85 Paket	13.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.029.500,00							2.029.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.029.500,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Paket	2.029.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.260.600,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 Paket		85 Paket	85 Paket	13.260.600,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		85 Paket	13.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	35 Paket	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		35 Paket	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.500.000,00							3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	3.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		17 Paket	3.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						2.500.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	558 Dokumen		558 Dokumen	558 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		558 Dokumen	4.500.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						25.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	25.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		25 Paket	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		85 Laporan	85 Laporan	100.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		85 Laporan	100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.828.904,00					ASN BKPSDM Kab. Trenggalek		140.000.000,00	
		Terselesaikannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						141.828.904,00					ASN BKPSDM Kab. Trenggalek		140.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.828.904,00						12 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						121.828.904,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.828.904,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	120.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	20.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						43.301.456,00					ASN BKPSDM Kab. Trenggalek		46.000.000,00	
		Terpeliharanya BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						43.301.456,00					ASN BKPSDM Kab. Trenggalek		46.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	14.081.000,00						3 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	17.126.713,00						14 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	500.000,00						8 Unit	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	11.593.743,00						40 Unit	30.000.000,00	
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						17.126.713,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	17.126.713,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		14 Unit	5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						500.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		8 Unit	1.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						11.593.743,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		40 Unit	40 Unit	11.593.743,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		40 Unit	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						14.081.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	14.081.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Unit	10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
235.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**492.850.200,00**							**1.359.417.900,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian						***84.978.200,00***							***67.970.895,00***	
			999.Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	84.978.200,00						100 Persentase	67.970.895,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						84.978.200,00					ASN Kabupaten Trenggalek		339.854.475,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						84.978.200,00					ASN Kabupaten Trenggalek		339.854.475,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	360 Dokumen		360 Dokumen	360 Dokumen	5.000.000,00						360 Dokumen	67.970.895,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	8110 Dokumen		8110 Dokumen	8110 Dokumen	3.200.000,00						8110 Dokumen	67.970.895,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	380 Dokumen		380 Dokumen	380 Dokumen	59.500.000,00						380 Dokumen	67.970.895,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.465.000,00						3 Dokumen	67.970.895,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	951 Dokumen		951 Dokumen	951 Dokumen	15.813.200,00						951 Dokumen	67.970.895,00	
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN						1.465.000,00							67.970.895,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.465.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Dokumen	67.970.895,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						15.813.200,00							67.970.895,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	951 Dokumen		951 Dokumen	951 Dokumen	15.813.200,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		951 Dokumen	67.970.895,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan AdministrasiPemberhentian						5.000.000,00							67.970.895,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	360 Dokumen		360 Dokumen	360 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		360 Dokumen	67.970.895,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						59.500.000,00							67.970.895,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	380 Dokumen		380 Dokumen	380 Dokumen	59.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		380 Dokumen	67.970.895,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						3.200.000,00							67.970.895,00	
		Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	8110 Dokumen		8110 Dokumen	8110 Dokumen	3.200.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		8110 Dokumen	67.970.895,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN						***19.210.000,00***							***113.284.825,00***	
			999.Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	7 Persentase		3 Persentase	4 Persentase	19.210.000,00						5 Persentase	113.284.825,00	
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						19.210.000,00					ASN Kabupaten Trenggalek		339.854.475,00	
		Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						19.210.000,00					ASN Kabupaten Trenggalek		339.854.475,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5133 Orang		5133 Orang	5133 Orang	3.910.000,00						5133 Orang	113.284.825,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	43344 Laporan		43344 Laporan	43344 Laporan	4.381.000,00						43344 Laporan	113.284.825,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.919.000,00						3 Dokumen	113.284.825,00	
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						10.919.000,00							113.284.825,00	
		Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.919.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Dokumen	113.284.825,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						4.381.000,00							113.284.825,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	43344 Laporan		43344 Laporan	43344 Laporan	4.381.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		43344 Laporan	113.284.825,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						3.910.000,00							113.284.825,00	
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5133 Orang		5133 Orang	5133 Orang	3.910.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5133 Orang	113.284.825,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN						***201.912.000,00***							***113.284.825,00***	
			999. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	84.00 %		80.00 %	81.00 %	201.912.000,00						82.00 %	113.284.825,00	
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN						201.912.000,00					ASN Kabupaten Trenggalek		339.854.475,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN						201.912.000,00					ASN Kabupaten Trenggalek		339.854.475,00	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400 Orang		400 Orang	400 Orang	3.252.900,00						400 Orang	113.284.825,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	200 Orang		200 Orang	200 Orang	384.100,00						200 Orang	113.284.825,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	2320 Orang		2320 Orang	2320 Orang	198.275.000,00						2320 Orang	113.284.825,00	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						198.275.000,00							113.284.825,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	2320 Orang		2320 Orang	2320 Orang	198.275.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2320 Orang	113.284.825,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						384.100,00							113.284.825,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	200 Orang		200 Orang	200 Orang	384.100,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		200 Orang	113.284.825,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						3.252.900,00							113.284.825,00	
		Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400 Orang		400 Orang	400 Orang	3.252.900,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		400 Orang	113.284.825,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN						***186.750.000,00***							***113.284.825,00***	
			999.Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	90 %		80 %	82 %	186.750.000,00						85 %	113.284.825,00	
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN						186.750.000,00					ASN Kabupaten Trenggalek		339.854.475,00	
		Terselenggaranya Mutasi dan Promosi ASN						186.750.000,00					ASN Kabupaten Trenggalek		339.854.475,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1160 Dokumen		1160 Dokumen	1160 Dokumen	1.695.000,00						1160 Dokumen	113.284.825,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	179.140.000,00						100 Dokumen	113.284.825,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	160 Dokumen		1600 Dokumen	160 Dokumen	5.915.000,00						160 Dokumen	113.284.825,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						1.695.000,00							113.284.825,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1160 Dokumen		1160 Dokumen	1160 Dokumen	1.695.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1160 Dokumen	113.284.825,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						5.915.000,00							113.284.825,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	160 Dokumen		1600 Dokumen	160 Dokumen	5.915.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		160 Dokumen	113.284.825,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						179.140.000,00							113.284.825,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	179.140.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		100 Dokumen	113.284.825,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**382.177.500,00**							**707.448.700,00**	
236.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**382.177.500,00**							**707.448.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi ASN						***381.157.500,00***							***375.832.123,00***	
			999.Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi	70 Persentase		50 Persentase	55 Persentase	381.157.500,00						60 Persentase	375.832.123,00	
			999.Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	65 %		45 %	50 %	381.157.500,00						55 %	375.832.123,00	
			999.Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	85 %		65 %	70 %	381.157.500,00						75 %	375.832.123,00	
			999.Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan	90 Persentase		50 Persentase	60 Persentase	381.157.500,00						70 Persentase	375.832.123,00	
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						78.227.500,00					ASN Kabupaten Trenggalek		265.293.261,00	
		Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis ASN						78.227.500,00					ASN Kabupaten Trenggalek		265.293.261,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5000 Orang		5000 Orang	5000 Orang	76.080.000,00						5000 Orang	110.538.859,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	200 Dokumen		200 Dokumen	200 Dokumen	1.020.000,00						200 Dokumen	110.538.859,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	42 Dokumen		42 Dokumen	42 Dokumen	1.127.500,00						42 Dokumen	44.215.543,00	
	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						1.127.500,00							44.215.543,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	42 Dokumen		42 Dokumen	42 Dokumen	1.127.500,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		42 Dokumen	44.215.543,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						76.080.000,00							110.538.859,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	5000 Orang		5000 Orang	5000 Orang	76.080.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5000 Orang	110.538.859,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						1.020.000,00							110.538.859,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	200 Dokumen		200 Dokumen	200 Dokumen	1.020.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		200 Dokumen	110.538.859,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						303.950.000,00					ASN Kabupaten Trenggalek		442.155.439,00	
		Terselenggaranya Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						303.950.000,00					ASN Kabupaten Trenggalek		442.155.439,00	
			Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	22.080.000,00						50 Orang	176.862.175,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	200 Dokumen		200 Dokumen	200 Dokumen	850.000,00						200 Dokumen	44.215.546,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	42 Dokumen		42 Dokumen	42 Dokumen	1.020.000,00						42 Dokumen	44.215.543,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	280.000.000,00						4 Laporan	176.862.175,00	
	5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional						1.020.000,00							44.215.543,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	42 Dokumen		42 Dokumen	42 Dokumen	1.020.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		42 Dokumen	44.215.543,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota						22.080.000,00							176.862.175,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	22.080.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		50 Orang	176.862.175,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						280.000.000,00							176.862.175,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	280.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	176.862.175,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan						850.000,00							44.215.546,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	200 Dokumen		200 Dokumen	200 Dokumen	850.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		200 Dokumen	44.215.546,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT						**11.753.305.309,00**							**10.938.407.400,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**11.753.305.309,00**							**10.938.407.400,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**11.753.305.309,00**							**10.938.407.400,00**	
237.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.550.589.178,00**							**8.748.813.000,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***10.509.589.178,00***							***8.477.313.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	10.509.589.178,00						100 %	8.477.313.000,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	10.509.589.178,00						100 %	8.477.313.000,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95 %		93.25 %	93.5 %	10.509.589.178,00						94 %	8.477.313.000,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						55.906.175,00					Internal Inspektorat		83.832.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						55.906.175,00					Internal Inspektorat		83.832.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	36.906.175,00						10 Dokumen	23.832.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	19.000.000,00						27 Laporan	60.000.000,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						36.906.175,00							23.832.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	36.906.175,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Dokumen	23.832.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						19.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	19.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		27 Laporan	60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.286.352.221,00					Internal Inspektorat		7.047.279.700,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.286.352.221,00					Internal Inspektorat		7.047.279.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	63.365.500,00						32 Dokumen	74.777.500,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan		77 Orang/bulan	77 Orang/bulan	9.222.986.721,00						77 Orang/bulan	6.972.502.200,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.222.986.721,00							6.972.502.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang/bulan		77 Orang/bulan	72 Orang/bulan	9.222.986.721,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		77 Orang/bulan	6.972.502.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						63.365.500,00							74.777.500,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	63.365.500,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		32 Dokumen	74.777.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						8.250.000,00					Internal Inspektorat		1.500.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						8.250.000,00					Internal Inspektorat		1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	8.250.000,00						35 Laporan	1.500.000,00	
	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						8.250.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	35 Laporan		35 Laporan	35 Laporan	8.250.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		35 Laporan	1.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						535.190.882,00					Internal Inspektorat		664.701.300,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						535.190.882,00					Internal Inspektorat		664.701.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang		77 Orang	77 Orang	535.190.882,00						77 Orang	664.701.300,00	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						535.190.882,00							664.701.300,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang		77 Orang	77 Orang	535.190.882,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		77 Orang	664.701.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						326.000.000,00					Internal Inspektorat		355.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						326.000.000,00					Internal Inspektorat		355.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	120.000.000,00						5 Laporan	130.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	111.000.000,00						12 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	40.000.000,00						8 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	40.000.000,00						6 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	15.000.000,00						6 Paket	25.000.000,00	
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	15.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	25.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						40.000.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	40.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	40.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		8 Paket	40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						120.000.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan		5 Laporan	2 Laporan	120.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Laporan	130.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						111.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	111.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.000.000,00					Internal Inspektorat		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.000.000,00					Internal Inspektorat		200.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		4 Unit	4 Unit	8.000.000,00						5 Unit	200.000.000,00	
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		4 Unit	1 Unit	8.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Unit	200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						199.095.600,00					Internal Inspektorat		171.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						199.095.600,00					Internal Inspektorat		171.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	67.095.600,00						36 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00						12 Laporan	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00						4 Laporan	1.500.000,00	
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	1.500.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						67.095.600,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	67.095.600,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						130.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131.794.300,00					Internal Inspektorat		225.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131.794.300,00					Internal Inspektorat		225.000.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000,00						1 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		36 Unit	37 Unit	113.060.900,00						40 Unit	130.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	6.420.000,00						30 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.313.400,00						10 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000,00						1 Unit	30.000.000,00	
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						113.060.900,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		36 Unit	37 Unit	113.060.900,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		40 Unit	130.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						6.420.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	6.420.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		30 Unit	10.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.313.400,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.313.400,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Unit	40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						1.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	15.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	30.000.000,00	INSPEKTORAT
238.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**602.000.000,00**							**1.062.354.400,00**	
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan						***472.000.000,00***							***712.354.400,00***	
			999.Persentase Rekomendasi Pengawasan APIP yang Selesai Ditindaklanjuti	93.0 %		92.6 %	92.7 %	472.000.000,00						92.8 %	712.354.400,00	
			999.Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	92.97 Persentase		92.77 Persentase	92.82 Persentase	472.000.000,00						92.87 Persentase	712.354.400,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						470.000.000,00					Obyek Pemeriksaan (Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, BUMD)		830.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal						470.000.000,00					Obyek Pemeriksaan (Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, BUMD)		830.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00						4 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	0 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	10.000.000,00						0 Kesepakatan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	70.000.000,00						50 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	110 Laporan		110 Laporan	110 Laporan	90.000.000,00						110 Laporan	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	110 Laporan		110 Laporan	110 Laporan	130.000.000,00						110 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	50.000.000,00						50 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	70.000.000,00						50 Laporan	110.000.000,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						130.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	110 Laporan		110 Laporan	110 Laporan	130.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		110 Laporan	200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						90.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	110 Laporan		110 Laporan	110 Laporan	90.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		110 Laporan	150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						70.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	70.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		50 Laporan	110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						50.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	50.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		50 Laporan	120.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						70.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	70.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		50 Laporan	150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	0 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		0 Kesepakatan	0,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Dokumen	100.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						132.000.000,00					Obyek Pemeriksaan (Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, BUMD)		232.354.400,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						132.000.000,00					Obyek Pemeriksaan (Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, BUMD)		232.354.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	122.000.000,00						20 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	32.354.400,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						10.000.000,00							32.354.400,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	32.354.400,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						122.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	122.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		20 Laporan	200.000.000,00	INSPEKTORAT
239.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**600.716.131,00**							**1.127.240.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi						***600.716.131,00***							***1.127.240.000,00***	
			999.Indeks Manajemen Risiko	2.840 Skor		2.800 Skor	2.810 Skor	600.716.131,00						2.820 Skor	1.127.240.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3.06 Skor		3.02 Skor	3.03 Skor	600.716.131,00						3.04 Skor	1.127.240.000,00	
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						69.000.000,00					Internal Inspektorat		35.000.000,00	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						69.000.000,00					Internal Inspektorat		35.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	7 Rekomendasi		7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	69.000.000,00						7 Rekomendasi	35.000.000,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						69.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	7 Rekomendasi		7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	69.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		7 Rekomendasi	35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi						531.716.131,00					Obyek Pendampingan (Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, BUMD, Masyarakat/Publik)		1.092.240.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi						531.716.131,00					Obyek Pendampingan (Perangkat Daerah, Desa/Kelurahan, BUMD, Masyarakat/Publik)		1.092.240.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	182.000.000,00						2 Kegiatan	422.240.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40 perangkat daerah		40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	33.000.000,00						40 perangkat daerah	30.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 perangkat daerah		40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	20.000.000,00						40 perangkat daerah	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 perangkat daerah		40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	296.716.131,00						40 perangkat daerah	590.000.000,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						296.716.131,00							590.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40 perangkat daerah		40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	296.716.131,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		40 perangkat daerah	590.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	40 perangkat daerah		40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		40 perangkat daerah	50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						182.000.000,00							422.240.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	182.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Kegiatan	422.240.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						33.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40 perangkat daerah		40 perangkat daerah	40 perangkat daerah	33.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		40 perangkat daerah	30.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN TRENGGALEK						**6.521.995.339,00**							**6.521.995.339,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**6.521.995.339,00**							**6.521.995.339,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**6.521.995.339,00**							**6.521.995.339,00**	
240.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.715.125.946,00**							**6.720.737.446,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Trenggalek						***6.255.974.539,00***							***6.255.974.539,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	6.255.974.539,00						100 %	6.255.974.539,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	6.255.974.539,00						100 %	6.255.974.539,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97.84 %		97.84 %	97.84 %	6.255.974.539,00						97.84 %	6.255.974.539,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.500.000,00					Aparatur Kecamatan		12.500.000,00	
		Tersusunnya DokumenPerencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.500.000,00					Aparatur Kecamatan		12.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	5.000.000,00						15 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	7.500.000,00						46 Laporan	7.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7.500.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	7.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		46 Laporan	7.500.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.250.410.781,00					Aparatur Kecamatan		6.250.410.781,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.250.410.781,00					Aparatur Kecamatan		6.250.410.781,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	217.360.000,00						36 Dokumen	217.360.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	447 Dokumen		447 Dokumen	447 Dokumen	2.000.000,00						447 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	2.000.000,00						38 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan		49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	6.029.050.781,00						49 Orang/bulan	6.029.050.781,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.029.050.781,00							6.029.050.781,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan		49 Orang/bulan	44 Orang/bulan	6.029.050.781,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		49 Orang/bulan	6.029.050.781,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						84.160.000,00							84.160.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	84.160.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Dokumen	84.160.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	447 Dokumen		447 Dokumen	227 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		447 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	2.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		38 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.000.000,00					Aparatur Kecamatan		2.000.000,00	
		Terlaksananya administrasi Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.000.000,00					Aparatur Kecamatan		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	2.000.000,00						27 Laporan	2.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	2.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		27 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						12.000.000,00					Aparatur Kecamatan		12.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						12.000.000,00					Aparatur Kecamatan		12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	2.000.000,00						50 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang		45 Orang	45 Orang	10.000.000,00						45 Orang	10.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		50 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang		45 Orang	39 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		45 Orang	10.000.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						134.549.500,00					Aparatur Kecamatan		134.549.500,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						134.549.500,00					Aparatur Kecamatan		134.549.500,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00						1 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	21.777.800,00						6 Laporan	21.777.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.000.000,00						10 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	79.048.200,00						6 Paket	79.048.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	15.500.000,00						10 Paket	15.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7.223.500,00						2 Paket	7.223.500,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.847.000,00							1.847.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.847.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	1.847.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Paket	5.000.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	6.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	30.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	30.000.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						11.827.800,00							11.827.800,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	11.827.800,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Laporan	11.827.800,00	KECAMATAN TRENGGALEK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.000.000,00					Aparatur Kecamatan		20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20.000.000,00					Aparatur Kecamatan		20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	20.000.000,00						5 Unit	20.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	4 Unit	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						194.837.000,00					Aparatur Kecamatan		194.837.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Perangkat Daerah						194.837.000,00					Aparatur Kecamatan		194.837.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	68.837.000,00						36 Laporan	68.837.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						23.930.000,00							23.930.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	23.930.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	23.930.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.828.665,00					Aparatur Kecamatan		94.440.165,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.828.665,00					Aparatur Kecamatan		94.440.165,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	47.380.865,00						1 Unit	52.992.365,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	8.000.000,00						12 Unit	8.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.500.000,00						2 Unit	1.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	29.447.800,00						12 Unit	29.447.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.500.000,00						1 Unit	2.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	8.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Unit	8.000.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.500.000,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	1.500.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.270.800,00							6.270.800,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	6.270.800,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Unit	6.270.800,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.388.158,00							5.388.158,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.388.158,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	5.388.158,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	2.500.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
241.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**158.665.000,00**							**158.665.000,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Trenggalek						***158.665.000,00***							***158.665.000,00***	
			999.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	158.665.000,00						100 %	158.665.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						27.665.000,00					Masyarakat Kecamatan		27.665.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						27.665.000,00					Masyarakat Kecamatan		27.665.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	27.665.000,00						2 Laporan	27.665.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						27.665.000,00							27.665.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	27.665.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	27.665.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						21.000.000,00					Masyarakat Kecamatan		21.000.000,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan						21.000.000,00					Masyarakat Kecamatan		21.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00						12 Laporan	21.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						21.000.000,00							21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	21.000.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						110.000.000,00					Masyarakat Kecamatan		110.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						110.000.000,00					Masyarakat Kecamatan		110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00						12 Laporan	110.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						110.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	110.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	110.000.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
242.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.399.827.162,00**							**1.399.827.162,00**	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Trenggalek						***20.216.000,00***							***20.216.000,00***	
			999.Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	20.216.000,00						100 %	20.216.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						20.216.000,00					Masyarakat Desa di Kecamatan Trenggalek		20.216.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						20.216.000,00					Masyarakat Desa di Kecamatan Trenggalek		20.216.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.216.000,00						1 Laporan	20.216.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						20.216.000,00							20.216.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.216.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Laporan	20.216.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
243.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**180.208.460,00**							**180.208.460,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Trenggalek						***33.164.800,00***							***33.164.800,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	33.164.800,00						100 %	33.164.800,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						180.208.460,00					Masyarakat Kecamatan		180.208.460,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						180.208.460,00					Masyarakat Kecamatan		180.208.460,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	167.703.660,00						12 Laporan	167.703.660,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.504.800,00						2 Laporan	12.504.800,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.660.000,00							20.660.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.660.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	20.660.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						12.504.800,00							12.504.800,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.504.800,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	12.504.800,00	KECAMATAN TRENGGALEK
244.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**42.975.000,00**							**42.975.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Trenggalek						***42.975.000,00***							***42.975.000,00***	
			999.Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %		100 %	100 %	42.975.000,00						100 %	42.975.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						42.975.000,00					Aparatur Desa di Kecamatan Trenggalek		42.975.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						42.975.000,00					Aparatur Desa di Kecamatan Trenggalek		42.975.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.475.000,00						12 Dokumen	21.475.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.500.000,00						12 Dokumen	21.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						21.475.000,00							21.475.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.475.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	21.475.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						21.500.000,00							21.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	21.500.000,00	KECAMATAN TRENGGALEK
		KELURAHAN SURODAKAN						**396.324.207,00**							**401.935.707,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**396.324.207,00**							**401.935.707,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**396.324.207,00**							**401.935.707,00**	
245.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.715.125.946,00**							**6.720.737.446,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Trenggalek						***90.714.500,00***							***96.326.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	90.714.500,00						100 %	96.326.000,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	90.714.500,00						100 %	96.326.000,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97.84 %		97.84 %	97.84 %	90.714.500,00						97.84 %	96.326.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.250.410.781,00					Aparatur Kelurahan		6.250.410.781,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.250.410.781,00					Aparatur Kelurahan		6.250.410.781,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	217.360.000,00						36 Dokumen	217.360.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						26.640.000,00							26.640.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	12 Dokumen	26.640.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Dokumen	26.640.000,00	KELURAHAN SURODAKAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						134.549.500,00					Aparatur Kelurahan		134.549.500,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						134.549.500,00					Aparatur Kelurahan		134.549.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	21.777.800,00						6 Laporan	21.777.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.000.000,00						10 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	79.048.200,00						6 Paket	79.048.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	15.500.000,00						10 Paket	15.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7.223.500,00						2 Paket	7.223.500,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						779.000,00							779.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	779.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	779.000,00	KELURAHAN SURODAKAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	5 Paket	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Paket	1.000.000,00	KELURAHAN SURODAKAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	8 Paket	1.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Paket	1.500.000,00	KELURAHAN SURODAKAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						9.500.000,00							9.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	4 Paket	9.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	9.500.000,00	KELURAHAN SURODAKAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Laporan	2.000.000,00	KELURAHAN SURODAKAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						194.837.000,00					Aparatur Kelurahan		194.837.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Perangkat Daerah						194.837.000,00					Aparatur Kelurahan		194.837.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	68.837.000,00						36 Laporan	68.837.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	126.000.000,00						12 Laporan	126.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	9.000.000,00	KELURAHAN SURODAKAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	30.000.000,00	KELURAHAN SURODAKAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.828.665,00					Aparatur Kecamatan		94.440.165,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.828.665,00					Aparatur Kecamatan		94.440.165,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	47.380.865,00						1 Unit	52.992.365,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	29.447.800,00						12 Unit	29.447.800,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	2 Unit	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Unit	5.000.000,00	KELURAHAN SURODAKAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.295.500,00							10.907.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.295.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	10.907.000,00	KELURAHAN SURODAKAN
246.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.399.827.162,00**							**1.399.827.162,00**	
			-	-		-	-	277.829.707,00						-	277.829.707,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.379.611.162,00					Masyarakat Kelurahan Surodakan		1.379.611.162,00	
		-						1.379.611.162,00					Masyarakat Kelurahan Surodakan		1.379.611.162,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	831.983.307,00						-	831.983.307,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	522.627.855,00						-	522.627.855,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	5.000.000,00	KELURAHAN SURODAKAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						107.240.607,00							107.240.607,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	2 Unit	107.240.607,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	107.240.607,00	KELURAHAN SURODAKAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						165.589.100,00							165.589.100,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	5 Pokmas / Ormas	165.589.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	165.589.100,00	KELURAHAN SURODAKAN
247.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**180.208.460,00**							**180.208.460,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Trenggalek						***27.780.000,00***							***27.780.000,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	27.780.000,00						100 %	27.780.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						180.208.460,00					Masyarakat Kelurahan Surodakan		180.208.460,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						180.208.460,00					Masyarakat Kelurahan Surodakan		180.208.460,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	167.703.660,00						12 Laporan	167.703.660,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						27.780.000,00							27.780.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	27.780.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Surodakan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	27.780.000,00	KELURAHAN SURODAKAN
		KELURAHAN SUMBERGEDONG						**413.236.200,00**							**413.236.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**413.236.200,00**							**413.236.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**413.236.200,00**							**413.236.200,00**	
248.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.715.125.946,00**							**6.720.737.446,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Trenggalek						***90.244.500,00***							***90.244.500,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	90.244.500,00						100 %	90.244.500,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	90.244.500,00						100 %	90.244.500,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97.84 %		97.84 %	97.84 %	90.244.500,00						97.84 %	90.244.500,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.250.410.781,00					Aparatur Kelurahan		6.250.410.781,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.250.410.781,00					Aparatur Kelurahan		6.250.410.781,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	217.360.000,00						36 Dokumen	217.360.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						26.640.000,00							26.640.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	12 Dokumen	26.640.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Dokumen	26.640.000,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						134.549.500,00					Aparatur Kelurahan		134.549.500,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						134.549.500,00					Aparatur Kelurahan		134.549.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	21.777.800,00						6 Laporan	21.777.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.000.000,00						10 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	79.048.200,00						6 Paket	79.048.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	15.500.000,00						10 Paket	15.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7.223.500,00						2 Paket	7.223.500,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.697.500,00							1.697.500,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.697.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	1.697.500,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.000.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	5 Paket	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Paket	1.000.000,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	8 Paket	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Paket	1.000.000,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						9.500.000,00							9.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	4 Paket	9.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	9.500.000,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Laporan	2.500.000,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						194.837.000,00					Aparatur Kelurahan		194.837.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Perangkat Daerah						194.837.000,00					Aparatur Kelurahan		194.837.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	68.837.000,00						36 Laporan	68.837.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	126.000.000,00						12 Laporan	126.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	9.000.000,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						36.000.000,00							36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	36.000.000,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.828.665,00					Aparatur Kelurahan		94.440.165,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.828.665,00					Aparatur Kelurahan		94.440.165,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	47.380.865,00						1 Unit	52.992.365,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	29.447.800,00						12 Unit	29.447.800,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.907.000,00							3.907.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	2 Unit	3.907.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Unit	3.907.000,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	9.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	9.000.000,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG
249.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.399.827.162,00**							**1.399.827.162,00**	
			-	-		-	-	285.211.700,00						-	285.211.700,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.379.611.162,00					Masyarakat Kelurahan Sumbergedong		1.379.611.162,00	
		-						1.379.611.162,00					Masyarakat Kelurahan Sumbergedong		1.379.611.162,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	831.983.307,00						-	831.983.307,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	522.627.855,00						-	522.627.855,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	5.000.000,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						108.563.200,00							108.563.200,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	2 Unit	108.563.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	108.563.200,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						171.648.500,00							171.648.500,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	5 Pokmas / Ormas	171.648.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	171.648.500,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG
250.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**180.208.460,00**							**180.208.460,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Trenggalek						***27.780.000,00***							***27.780.000,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	27.780.000,00						100 %	27.780.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						180.208.460,00					Masyarakat Kelurahan Sumbergedong		180.208.460,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						180.208.460,00					Masyarakat Kelurahan Sumbergedong		180.208.460,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	167.703.660,00						12 Laporan	167.703.660,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						27.780.000,00							27.780.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	27.780.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Sumbergedong || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	27.780.000,00	KELURAHAN SUMBERGEDONG
		KELURAHAN NGANTRU						**368.517.207,00**							**368.517.207,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**368.517.207,00**							**368.517.207,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**368.517.207,00**							**368.517.207,00**	
251.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.715.125.946,00**							**6.720.737.446,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Trenggalek						***60.737.207,00***							***60.737.207,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	60.737.207,00						100 %	60.737.207,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	60.737.207,00						100 %	60.737.207,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97.84 %		97.84 %	97.84 %	60.737.207,00						97.84 %	60.737.207,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.250.410.781,00					Aparatur Kelurahan		6.250.410.781,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.250.410.781,00					Aparatur Kelurahan		6.250.410.781,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	217.360.000,00						36 Dokumen	217.360.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						26.640.000,00							26.640.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	12 Dokumen	26.640.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Dokumen	26.640.000,00	KELURAHAN NGANTRU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						134.549.500,00					Aparatur Kelurahan		134.549.500,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						134.549.500,00					Aparatur Kelurahan		134.549.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	21.777.800,00						6 Laporan	21.777.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.000.000,00						10 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	79.048.200,00						6 Paket	79.048.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	15.500.000,00						10 Paket	15.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7.223.500,00						2 Paket	7.223.500,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						800.000,00							800.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	800.000,00	KELURAHAN NGANTRU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.000.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	5 Paket	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Paket	1.000.000,00	KELURAHAN NGANTRU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	8 Paket	2.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN NGANTRU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						7.010.000,00							7.010.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	4 Paket	7.010.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	7.010.000,00	KELURAHAN NGANTRU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.180.000,00							1.180.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.180.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Laporan	1.180.000,00	KELURAHAN NGANTRU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						194.837.000,00					Aparatur Kelurahan		194.837.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Perangkat Daerah						194.837.000,00					Aparatur Kelurahan		194.837.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	68.837.000,00						36 Laporan	68.837.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	8.000.000,00	KELURAHAN NGANTRU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.828.665,00					Aparatur Kelurahan		94.440.165,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.828.665,00					Aparatur Kelurahan		94.440.165,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	47.380.865,00						1 Unit	52.992.365,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	29.447.800,00						12 Unit	29.447.800,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.270.000,00							4.270.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	3 Unit	4.270.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Unit	4.270.000,00	KELURAHAN NGANTRU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						9.837.207,00							9.837.207,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	9.837.207,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	9.837.207,00	KELURAHAN NGANTRU
252.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.399.827.162,00**							**1.399.827.162,00**	
			-	-		-	-	280.000.000,00						-	280.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.379.611.162,00					Masyarakat Kelurahan Ngantru		1.379.611.162,00	
		-						1.379.611.162,00					Masyarakat Kelurahan Ngantru		1.379.611.162,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	831.983.307,00						-	831.983.307,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	522.627.855,00						-	522.627.855,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	5.000.000,00	KELURAHAN NGANTRU
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	2 Unit	100.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	100.000.000,00	KELURAHAN NGANTRU
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						175.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	5 Pokmas / Ormas	175.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	175.000.000,00	KELURAHAN NGANTRU
253.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**180.208.460,00**							**180.208.460,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Trenggalek						***27.780.000,00***							***27.780.000,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	27.780.000,00						100 %	27.780.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						180.208.460,00					Masyarakat Kelurahan Ngantru		180.208.460,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						180.208.460,00					Masyarakat Kelurahan Ngantru		180.208.460,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	167.703.660,00						12 Laporan	167.703.660,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						27.780.000,00							27.780.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	27.780.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Ngantru || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	27.780.000,00	KELURAHAN NGANTRU
		KELURAHAN TAMANAN						**398.465.207,00**							**398.465.207,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**398.465.207,00**							**398.465.207,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**398.465.207,00**							**398.465.207,00**	
254.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.715.125.946,00**							**6.720.737.446,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Trenggalek						***98.467.000,00***							***98.467.000,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	98.467.000,00						100 %	98.467.000,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	98.467.000,00						100 %	98.467.000,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97.84 %		97.84 %	97.84 %	98.467.000,00						97.84 %	98.467.000,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.250.410.781,00					Aparatur Kelurahan		6.250.410.781,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.250.410.781,00					Aparatur Kelurahan		6.250.410.781,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	217.360.000,00						36 Dokumen	217.360.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						26.640.000,00							26.640.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	12 Dokumen	26.640.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Dokumen	26.640.000,00	KELURAHAN TAMANAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						134.549.500,00					Aparatur Kelurahan		134.549.500,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						134.549.500,00					Aparatur Kelurahan		134.549.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	21.777.800,00						6 Laporan	21.777.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.000.000,00						10 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	79.048.200,00						6 Paket	79.048.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	15.500.000,00						10 Paket	15.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7.223.500,00						2 Paket	7.223.500,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						920.000,00							920.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	920.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	920.000,00	KELURAHAN TAMANAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.000.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	5 Paket	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Paket	1.000.000,00	KELURAHAN TAMANAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	8 Paket	2.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Paket	2.000.000,00	KELURAHAN TAMANAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						11.000.000,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	4 Paket	11.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	11.000.000,00	KELURAHAN TAMANAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Laporan	2.000.000,00	KELURAHAN TAMANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						194.837.000,00					Aparatur Kelurahan		194.837.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Perangkat Daerah						194.837.000,00					Aparatur Kelurahan		194.837.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	68.837.000,00						36 Laporan	68.837.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	126.000.000,00						12 Laporan	126.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.907.000,00							9.907.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	48 Laporan	9.907.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	9.907.000,00	KELURAHAN TAMANAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						36.000.000,00							36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	36.000.000,00	KELURAHAN TAMANAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.828.665,00					Aparatur Kelurahan		94.440.165,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.828.665,00					Aparatur Kelurahan		94.440.165,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	47.380.865,00						1 Unit	52.992.365,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	29.447.800,00						12 Unit	29.447.800,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	4 Unit	3.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Unit	3.000.000,00	KELURAHAN TAMANAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						8.000.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	8.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	8.000.000,00	KELURAHAN TAMANAN
255.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.399.827.162,00**							**1.399.827.162,00**	
			-	-		-	-	270.218.207,00						-	270.218.207,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.379.611.162,00					Masyarakat Kelurahan Tamanan		1.379.611.162,00	
		-						1.379.611.162,00					Masyarakat Kelurahan Tamanan		1.379.611.162,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	831.983.307,00						-	831.983.307,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	522.627.855,00						-	522.627.855,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	5.000.000,00	KELURAHAN TAMANAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	2 Unit	100.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	100.000.000,00	KELURAHAN TAMANAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						165.218.207,00							165.218.207,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	5 Pokmas / Ormas	165.218.207,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	165.218.207,00	KELURAHAN TAMANAN
256.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**180.208.460,00**							**180.208.460,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Trenggalek						***27.780.000,00***							***27.780.000,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	27.780.000,00						100 %	27.780.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						180.208.460,00					Masyarakat Kelurahan Tamanan		180.208.460,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						180.208.460,00					Masyarakat Kelurahan Tamanan		180.208.460,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	167.703.660,00						12 Laporan	167.703.660,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						27.780.000,00							27.780.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	27.780.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Tamanan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	27.780.000,00	KELURAHAN TAMANAN
		KELURAHAN KELUTAN						**398.263.408,00**							**398.263.408,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**398.263.408,00**							**398.263.408,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**398.263.408,00**							**398.263.408,00**	
257.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.715.125.946,00**							**6.720.737.446,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Trenggalek						***95.988.200,00***							***95.988.200,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	95.988.200,00						100 %	95.988.200,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	95.988.200,00						100 %	95.988.200,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97.84 %		97.84 %	97.84 %	95.988.200,00						97.84 %	95.988.200,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.250.410.781,00					Aparatur Kelurahan Kelutan		6.250.410.781,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.250.410.781,00					Aparatur Kelurahan Kelutan		6.250.410.781,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	217.360.000,00						36 Dokumen	217.360.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						26.640.000,00							26.640.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	12 Dokumen	26.640.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Kelutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Dokumen	26.640.000,00	KELURAHAN KELUTAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						134.549.500,00					Aparatur Kelurahan		134.549.500,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						134.549.500,00					Aparatur Kelurahan		134.549.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	21.777.800,00						6 Laporan	21.777.800,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	10.000.000,00						10 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	79.048.200,00						6 Paket	79.048.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	15.500.000,00						10 Paket	15.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7.223.500,00						2 Paket	7.223.500,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.180.000,00							1.180.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.180.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Kelutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	1.180.000,00	KELURAHAN KELUTAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.000.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	5 Paket	1.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Kelutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Paket	1.000.000,00	KELURAHAN KELUTAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	8 Paket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Kelutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Paket	3.000.000,00	KELURAHAN KELUTAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						12.038.200,00							12.038.200,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	4 Paket	12.038.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Kelutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Paket	12.038.200,00	KELURAHAN KELUTAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.270.000,00							2.270.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	2.270.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Kelutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Laporan	2.270.000,00	KELURAHAN KELUTAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						194.837.000,00					Aparatur Kelurahan		194.837.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Perangkat Daerah						194.837.000,00					Aparatur Kelurahan		194.837.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	68.837.000,00						36 Laporan	68.837.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	126.000.000,00						12 Laporan	126.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						9.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	48 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Kelutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	9.000.000,00	KELURAHAN KELUTAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						24.000.000,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Kelutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	24.000.000,00	KELURAHAN KELUTAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.828.665,00					Aparatur Kelurahan		94.440.165,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						88.828.665,00					Aparatur Kelurahan		94.440.165,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	47.380.865,00						1 Unit	52.992.365,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	29.447.800,00						12 Unit	29.447.800,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.000.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	2 Unit	7.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Kelutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Unit	7.000.000,00	KELURAHAN KELUTAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						9.860.000,00							9.860.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	9.860.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Kelutan || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	9.860.000,00	KELURAHAN KELUTAN
258.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.399.827.162,00**							**1.399.827.162,00**	
			-	-		-	-	266.351.548,00						-	266.351.548,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						1.379.611.162,00					Masyarakat Kelurahan Kelutan		1.379.611.162,00	
		-						1.379.611.162,00					Masyarakat Kelurahan Kelutan		1.379.611.162,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	-	831.983.307,00						-	831.983.307,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	-	522.627.855,00						-	522.627.855,00	
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan						5.000.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	-		-	5 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Kelutan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	5.000.000,00	KELURAHAN KELUTAN
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan						106.824.048,00							106.824.048,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-		-	2 Unit	106.824.048,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Kelutan || 0	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	106.824.048,00	KELURAHAN KELUTAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						154.527.500,00							154.527.500,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-		-	5 Pokmas / Ormas	154.527.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Kelutan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	154.527.500,00	KELURAHAN KELUTAN
259.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**180.208.460,00**							**180.208.460,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Trenggalek						***35.923.660,00***							***35.923.660,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	35.923.660,00						100 %	35.923.660,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						180.208.460,00					Masyarakat Kelurahan Kelutan		180.208.460,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						180.208.460,00					Masyarakat Kelurahan Kelutan		180.208.460,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	167.703.660,00						12 Laporan	167.703.660,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						35.923.660,00							35.923.660,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.923.660,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Trenggalek || Kelurahan Kelutan || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	35.923.660,00	KELURAHAN KELUTAN
		KECAMATAN PANGGUL						**2.669.089.213,00**							**2.669.953.400,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.669.089.213,00**							**2.669.953.400,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.669.089.213,00**							**2.669.953.400,00**	
260.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.629.911.213,00**							**2.588.263.400,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Panggul						***2.629.761.213,00***							***2.581.763.400,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.629.761.213,00						100 %	2.581.763.400,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.629.761.213,00						100 %	2.581.763.400,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98.14 %		98.14 %	98.14 %	2.629.761.213,00						98.14 %	2.581.763.400,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						300.000,00					Aparatur Kecamatan		3.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						300.000,00					Aparatur Kecamatan		3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	150.000,00						15 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	150.000,00						84 Laporan	1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						150.000,00							1.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	150.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						150.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	84 Laporan		84 Laporan	81 Laporan	150.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		84 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.525.674.259,00					Aparatur Kecamatan		2.455.685.900,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.525.674.259,00					Aparatur Kecamatan		2.455.685.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Dokumen		37 Dokumen	37 Dokumen	33.861.000,00						37 Dokumen	42.073.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	2.491.813.259,00						30 Orang/bulan	2.413.612.900,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.491.813.259,00							2.413.612.900,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		30 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.491.813.259,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		30 Orang/bulan	2.413.612.900,00	KECAMATAN PANGGUL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						33.861.000,00							42.073.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Dokumen		37 Dokumen	36 Dokumen	33.861.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		37 Dokumen	42.073.000,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						17.801.954,00					Aparatur Kecamatan, Aparatur Pemerintahan Desa, Tamu dan Instansi Vertikal Lainnya		33.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						17.801.954,00					Aparatur Kecamatan, Aparatur Pemerintahan Desa, Tamu dan Instansi Vertikal Lainnya		33.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	885.000,00						12 Laporan	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.140.000,00						12 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.609.000,00						4 Paket	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.092.000,00						4 Paket	8.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.721.954,00						4 Paket	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.088.000,00						4 Paket	1.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.266.000,00						4 Paket	2.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.088.000,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.088.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	1.500.000,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.266.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.266.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	2.000.000,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.609.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.609.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	2.500.000,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.721.954,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.721.954,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	2.000.000,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.092.000,00							8.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	6.092.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	8.500.000,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						885.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	885.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	1.500.000,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.140.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.140.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6.850.000,00					Sarama dan Prasarana serta Aparatur Kecamatan		13.500.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						6.850.000,00					Sarama dan Prasarana serta Aparatur Kecamatan		13.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	6.850.000,00						4 Unit	13.500.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.850.000,00							13.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	3 Unit	6.850.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Unit	13.500.000,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.360.000,00					Sarana dan Prasarana serta Aparatur Kecamatan		45.877.500,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						42.360.000,00					Sarana dan Prasarana serta Aparatur Kecamatan		45.877.500,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	42.360.000,00						24 Laporan	45.877.500,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						42.360.000,00							45.877.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	42.360.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		24 Laporan	45.877.500,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.925.000,00					Sarana dan Prasarana Kecamatan		37.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.925.000,00					Sarana dan Prasarana Kecamatan		37.200.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	31.010.000,00						10 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	2.110.000,00						8 Unit	1.700.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	3.805.000,00						4 Unit	5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						31.010.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	31.010.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Unit	30.000.000,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.110.000,00							1.700.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	5 Unit	2.110.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		8 Unit	1.700.000,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.805.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	3.805.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Unit	5.500.000,00	KECAMATAN PANGGUL
261.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**26.708.000,00**							**62.770.000,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Panggul						***26.708.000,00***							***62.770.000,00***	
			999.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	26.708.000,00						100 %	62.770.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						11.185.000,00					Aparatur Kecamatan, Aparatur Pemerintahan Desa, Instansi Vertikal Lainnya dan Masyarakat		16.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						11.185.000,00					Aparatur Kecamatan, Aparatur Pemerintahan Desa, Instansi Vertikal Lainnya dan Masyarakat		16.500.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	11.185.000,00						2 Laporan	16.500.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						11.185.000,00							16.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	11.185.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	16.500.000,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1.761.000,00					Aparatur Kecamatan dan Masyarakat		3.270.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						1.761.000,00					Aparatur Kecamatan dan Masyarakat		3.270.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.761.000,00						12 Laporan	3.270.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.761.000,00							3.270.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.761.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	3.270.000,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						13.762.000,00					Aparatur Kecamatan, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat		43.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						13.762.000,00					Aparatur Kecamatan, Organisasi Kemasyarakatan dan Masyarakat		43.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.762.000,00						12 Laporan	43.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						13.762.000,00							43.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.762.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	43.000.000,00	KECAMATAN PANGGUL
262.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.125.000,00**							**5.190.000,00**	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Panggul						***3.125.000,00***							***5.190.000,00***	
			999.Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	3.125.000,00						100 %	5.190.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3.125.000,00					Aparatur Kecamatan, Pelaku UMKM dan Masyarakat		5.190.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3.125.000,00					Aparatur Kecamatan, Pelaku UMKM dan Masyarakat		5.190.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.125.000,00						1 Laporan	5.190.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.125.000,00							5.190.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.125.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Laporan	5.190.000,00	KECAMATAN PANGGUL
263.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**6.955.000,00**							**9.910.000,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Panggul						***6.955.000,00***							***9.910.000,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	6.955.000,00						100 %	9.910.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.955.000,00					Aparatur Kecamatan, TNI, POLRI, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		9.910.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						6.955.000,00					Aparatur Kecamatan, TNI, POLRI, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		9.910.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.895.000,00						12 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.060.000,00						2 Laporan	4.910.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						4.895.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.895.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						2.060.000,00							4.910.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.060.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	4.910.000,00	KECAMATAN PANGGUL
264.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**2.390.000,00**							**3.820.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Panggul						***1.195.000,00***							***1.910.000,00***	
			999.Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %		100 %	100 %	1.195.000,00						100 %	1.910.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						2.390.000,00					Aparatur Kecamatan dan Aparatur Pemerintahan Desa		3.820.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						2.390.000,00					Aparatur Kecamatan dan Aparatur Pemerintahan Desa		3.820.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.195.000,00						12 Dokumen	1.910.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.195.000,00						12 Dokumen	1.910.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1.195.000,00							1.910.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.195.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	1.910.000,00	KECAMATAN PANGGUL
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.195.000,00							1.910.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.195.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	1.910.000,00	KECAMATAN PANGGUL
		KECAMATAN SURUH						**2.127.651.445,00**							**2.220.564.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.127.651.445,00**							**2.220.564.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.127.651.445,00**							**2.220.564.500,00**	
265.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.092.939.845,00**							**2.149.086.200,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Suruh						***2.092.939.845,00***							***2.149.086.200,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.092.939.845,00						100 %	2.149.086.200,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.092.939.845,00						100 %	2.149.086.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	96.06 %		96.06 %	96.06 %	2.092.939.845,00						96.06 %	2.149.086.200,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						323.000,00					Aparatur Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		482.599,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						323.000,00					Aparatur Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		482.599,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	187.000,00						15 Dokumen	293.509,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	136.000,00						46 Laporan	189.090,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						187.000,00							293.509,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	187.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Dokumen	293.509,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						136.000,00							189.090,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	136.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		46 Laporan	189.090,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.021.413.157,00					Aparatur Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		2.057.377.025,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.021.413.157,00					Aparatur Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		2.057.377.025,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Dokumen		52 Dokumen	52 Dokumen	41.024.000,00						52 Dokumen	44.544.025,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.980.389.157,00						14 Orang/bulan	2.012.833.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.980.389.157,00							2.012.833.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.980.389.157,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		14 Orang/bulan	2.012.833.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						41.024.000,00							44.544.025,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Dokumen		52 Dokumen	52 Dokumen	41.024.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		52 Dokumen	44.544.025,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						25.401.088,00					Aparatur Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		36.956.576,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						25.401.088,00					Aparatur Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		36.956.576,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.216.670,00						12 Laporan	15.144.299,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.744.400,00						4 Paket	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.767.700,00						4 Paket	14.847.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.707.241,00						4 Paket	1.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	996.077,00						4 Paket	996.077,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.969.000,00						4 Paket	2.969.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						996.077,00							996.077,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	996.077,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	996.077,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.969.000,00							2.969.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	1.969.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	2.969.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.744.400,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.744.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	2.000.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.707.241,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	1.707.241,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	1.000.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.767.700,00							14.847.200,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.767.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	14.847.200,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						12.216.670,00							15.144.299,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.216.670,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	15.144.299,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17.297.700,00					Aparatur Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		17.220.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17.297.700,00					Aparatur Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		17.220.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	17.297.700,00						36 Laporan	17.220.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						17.297.700,00							17.220.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	17.297.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	17.220.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						28.504.900,00					Aparatur Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		37.050.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						28.504.900,00					Aparatur Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		37.050.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	27.164.900,00						11 Unit	36.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	1.340.000,00						4 Unit	1.050.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						27.164.900,00							36.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	27.164.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		11 Unit	36.000.000,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.340.000,00							1.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	1.340.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Unit	1.050.000,00	KECAMATAN SURUH
266.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**23.895.800,00**							**62.590.300,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Suruh						***23.895.800,00***							***62.590.300,00***	
			999.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	23.895.800,00						100 %	62.590.300,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.772.400,00					Pemerintah Desa Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		27.399.065,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.772.400,00					Pemerintah Desa Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		27.399.065,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.772.400,00						2 Laporan	27.399.065,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						10.772.400,00							27.399.065,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.772.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	27.399.065,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1.287.500,00					Pemerintah Desa Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		1.267.939,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan						1.287.500,00					Pemerintah Desa Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		1.267.939,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.287.500,00						12 Laporan	1.267.939,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.287.500,00							1.267.939,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.287.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	1.267.939,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.835.900,00					Masyarakat Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		33.923.296,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.835.900,00					Masyarakat Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		33.923.296,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.835.900,00						12 Laporan	33.923.296,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						11.835.900,00							33.923.296,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.835.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	33.923.296,00	KECAMATAN SURUH
267.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.177.300,00**							**1.193.100,00**	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Suruh						***3.177.300,00***							***1.193.100,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	3.177.300,00						100 %	1.193.100,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3.177.300,00					Masyarakat Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		1.193.100,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3.177.300,00					Masyarakat Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		1.193.100,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.177.300,00						1 Laporan	1.193.100,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.177.300,00							1.193.100,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.177.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Laporan	1.193.100,00	KECAMATAN SURUH
268.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**5.321.000,00**							**5.356.300,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Suruh						***5.321.000,00***							***5.356.300,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	5.321.000,00						100 %	5.356.300,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						5.321.000,00					Masyarakat Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		5.356.300,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						5.321.000,00					Masyarakat Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		5.356.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.136.500,00						12 Laporan	4.163.150,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.184.500,00						1 Laporan	1.193.150,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						4.136.500,00							4.163.150,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.136.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	4.163.150,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.184.500,00							1.193.150,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.184.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Laporan	1.193.150,00	KECAMATAN SURUH
269.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**2.317.500,00**							**2.338.600,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Suruh						***2.317.500,00***							***2.338.600,00***	
			999.Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %		100 %	100 %	2.317.500,00						100 %	2.338.600,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						2.317.500,00					Pemerintah Desa Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		2.338.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						2.317.500,00					Pemerintah Desa Kecamatan Suruh Kab. Trenggalek		2.338.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.133.000,00						12 Dokumen	1.145.600,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.184.500,00						12 Dokumen	1.193.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						1.133.000,00							1.145.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.133.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	1.145.600,00	KECAMATAN SURUH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.184.500,00							1.193.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.184.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Suruh || Desa Suruh || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	1.193.000,00	KECAMATAN SURUH
		KECAMATAN DURENAN						**2.181.080.260,00**							**2.395.030.700,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.181.080.260,00**							**2.395.030.700,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.181.080.260,00**							**2.395.030.700,00**	
270.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.142.059.860,00**							**2.313.830.400,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Durenan						***2.141.617.860,00***							***2.313.830.400,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.141.617.860,00						100 %	2.313.830.400,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.141.617.860,00						100 %	2.313.830.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	96.85 %		96.85 %	96.85 %	2.141.617.860,00						96.85 %	2.313.830.400,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						884.000,00					Aparatur Kecamatan Durenan		3.085.400,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						884.000,00					Aparatur Kecamatan Durenan		3.085.400,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	442.000,00						15 Dokumen	2.685.400,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	442.000,00						46 Laporan	400.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						442.000,00							2.685.400,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	442.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Durenan || Desa Kendalrejo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Dokumen	2.685.400,00	KECAMATAN DURENAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						442.000,00							400.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	442.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Durenan || Desa Kendalrejo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		46 Laporan	400.000,00	KECAMATAN DURENAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.057.654.000,00					Aparatur Kecamatan Durenan		2.207.949.700,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.057.654.000,00					Aparatur Kecamatan Durenan		2.207.949.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	50.840.000,00						36 Dokumen	57.827.500,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan		15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.006.814.000,00						15 Orang/bulan	2.150.122.200,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.006.814.000,00							2.150.122.200,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan		15 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.006.814.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Orang/bulan	2.150.122.200,00	KECAMATAN DURENAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						50.840.000,00							57.827.500,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	50.840.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Durenan || Desa Kendalrejo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Dokumen	57.827.500,00	KECAMATAN DURENAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						32.854.460,00					Aparatur Kecamatan Durenan		37.585.300,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						32.854.460,00					Aparatur Kecamatan Durenan		37.585.300,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.982.000,00						12 Laporan	19.680.900,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.139.500,00						2 Paket	1.571.800,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7.627.300,00						2 Paket	7.627.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.525.260,00						2 Paket	6.417.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.460.400,00						2 Paket	1.167.200,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.120.000,00						2 Paket	1.120.300,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.460.400,00							1.167.200,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.460.400,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	1.167.200,00	KECAMATAN DURENAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.120.000,00							1.120.300,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.120.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	1.120.300,00	KECAMATAN DURENAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.139.500,00							1.571.800,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.139.500,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	1.571.800,00	KECAMATAN DURENAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.525.260,00							6.417.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.525.260,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	6.417.500,00	KECAMATAN DURENAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						7.627.300,00							7.627.600,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7.627.300,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	7.627.600,00	KECAMATAN DURENAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15.982.000,00							19.680.900,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.982.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	19.680.900,00	KECAMATAN DURENAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22.070.500,00					Aparatur Kecamatan Durenan		24.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						22.070.500,00					Aparatur Kecamatan Durenan		24.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	21.750.500,00						48 Laporan	23.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	320.000,00						2 Laporan	1.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.750.500,00							23.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	21.750.500,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		48 Laporan	23.000.000,00	KECAMATAN DURENAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						320.000,00							1.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	320.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	1.600.000,00	KECAMATAN DURENAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						28.596.900,00					Aparatur Kecamatan Durenan		40.610.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						28.596.900,00					Aparatur Kecamatan Durenan		40.610.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	23.236.900,00						10 Unit	32.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	5.360.000,00						12 Unit	8.610.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						23.236.900,00							32.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	23.236.900,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Unit	32.000.000,00	KECAMATAN DURENAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.360.000,00							8.610.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	5.360.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Unit	8.610.000,00	KECAMATAN DURENAN
271.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**22.879.500,00**							**60.472.800,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Durenan						***22.879.500,00***							***60.472.800,00***	
			999.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	22.879.500,00						100 %	60.472.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						9.700.700,00					Aparatur Kecamatan Durenan, Desa, BPD, Intansi Terkait dan Masyarakat Kecamatan Durenan		23.735.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						9.700.700,00					Aparatur Kecamatan Durenan, Desa, BPD, Intansi Terkait dan Masyarakat Kecamatan Durenan		23.735.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	9.700.700,00						2 Laporan	23.735.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						9.700.700,00							23.735.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	9.700.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Durenan || Desa Kendalrejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	23.735.000,00	KECAMATAN DURENAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1.478.400,00					Aparatur Kecamatan Durenan, Perangkat Desa, dan Masyarakat Kecamatan Durenan		1.479.600,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan						1.478.400,00					Aparatur Kecamatan Durenan, Perangkat Desa, dan Masyarakat Kecamatan Durenan		1.479.600,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.478.400,00						12 Laporan	1.479.600,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.478.400,00							1.479.600,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.478.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Durenan || Desa Kendalrejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	1.479.600,00	KECAMATAN DURENAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.700.400,00					Aparatur Kecamatan Durenan, PKK. Karang Taruna. Karang Werda, Kelompok Seni Budaya dan Olahraga, Intansi Terkait dan Masyarakat Kecamatan Durenan		35.258.200,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.700.400,00					Aparatur Kecamatan Durenan, PKK. Karang Taruna. Karang Werda, Kelompok Seni Budaya dan Olahraga, Intansi Terkait dan Masyarakat Kecamatan Durenan		35.258.200,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.700.400,00						12 Laporan	35.258.200,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						11.700.400,00							35.258.200,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.700.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Durenan || Desa Kendalrejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	35.258.200,00	KECAMATAN DURENAN
272.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.668.000,00**							**8.181.100,00**	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Durenan						***3.668.000,00***							***8.181.100,00***	
			999.Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	3.668.000,00						100 %	8.181.100,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3.668.000,00					Aparatur Kecamatan Durenan dan Masyarakat Kecamatan Durenan		8.181.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3.668.000,00					Aparatur Kecamatan Durenan dan Masyarakat Kecamatan Durenan		8.181.100,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.668.000,00						2 Laporan	8.181.100,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.668.000,00							8.181.100,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.668.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Durenan || Desa Kendalrejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Laporan	8.181.100,00	KECAMATAN DURENAN
273.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**6.043.000,00**							**6.072.100,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Durenan						***6.043.000,00***							***6.072.100,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	6.043.000,00						100 %	6.072.100,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						6.043.000,00					Aparatur Kecamatan Durenan, TNI, POLRI dan Masyarakat Kecamatan Durenan		6.072.100,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						6.043.000,00					Aparatur Kecamatan Durenan, TNI, POLRI dan Masyarakat Kecamatan Durenan		6.072.100,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.910.000,00						12 Laporan	4.919.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.133.000,00						2 Laporan	1.153.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						4.910.000,00							4.919.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.910.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Durenan || Desa Kendalrejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	4.919.000,00	KECAMATAN DURENAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.133.000,00							1.153.100,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.133.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Durenan || Desa Kendalrejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	1.153.100,00	KECAMATAN DURENAN
274.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**6.429.900,00**							**6.474.300,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Durenan						***6.429.900,00***							***6.474.300,00***	
			999.Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %		100 %	100 %	6.429.900,00						100 %	6.474.300,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						6.429.900,00					Aparatur Kecamatan Durenan, Perangkat Desa, BPD dan Masyarakat Kecamatan Durenan		6.474.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						6.429.900,00					Aparatur Kecamatan Durenan, Perangkat Desa, BPD dan Masyarakat Kecamatan Durenan		6.474.300,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.979.400,00						12 Dokumen	3.014.100,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.450.500,00						12 Dokumen	3.460.200,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						2.979.400,00							3.014.100,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.979.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Durenan || Desa Kendalrejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	3.014.100,00	KECAMATAN DURENAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						3.450.500,00							3.460.200,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.450.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Durenan || Desa Kendalrejo || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	3.460.200,00	KECAMATAN DURENAN
		KECAMATAN POGALAN						**1.924.389.391,00**							**2.313.885.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.924.389.391,00**							**2.313.885.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.924.389.391,00**							**2.313.885.600,00**	
275.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.898.505.591,00**							**2.263.518.600,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Pogalan						***1.888.505.591,00***							***2.239.218.600,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	1.888.505.591,00						100 %	2.239.218.600,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.888.505.591,00						100 %	2.239.218.600,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	97.04 %		97.04 %	97.04 %	1.888.505.591,00						97.04 %	2.239.218.600,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						258.000,00					Aparatur Kecamatan Pogalan		600.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						258.000,00					Aparatur Kecamatan Pogalan		600.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	108.000,00						15 Dokumen	300.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55 Laporan		55 Laporan	55 Laporan	150.000,00						55 Laporan	300.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						108.000,00							300.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	108.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Dokumen	300.000,00	KECAMATAN POGALAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						150.000,00							300.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55 Laporan		55 Laporan	55 Laporan	150.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		55 Laporan	300.000,00	KECAMATAN POGALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.796.361.265,00					Aparatur Kecamatan Pogalan		2.130.864.700,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.796.361.265,00					Aparatur Kecamatan Pogalan		2.130.864.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	32.100.000,00						30 Dokumen	44.310.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan		15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.764.261.265,00						15 Orang/bulan	2.086.554.700,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.764.261.265,00							2.086.554.700,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan		15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.764.261.265,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Orang/bulan	2.086.554.700,00	KECAMATAN POGALAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						32.100.000,00							44.310.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30 Dokumen		30 Dokumen	20 Dokumen	32.100.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		30 Dokumen	44.310.000,00	KECAMATAN POGALAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						51.115.926,00					Aparatur Kecamatan Pogalan		77.503.900,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						51.115.926,00					Aparatur Kecamatan Pogalan		77.503.900,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00						12 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00						4 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	17.000.000,00						8 Paket	22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.615.926,00						4 Paket	7.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.500.000,00						4 Paket	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	10.000.000,00						8 Paket	15.503.900,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.500.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	3.000.000,00	KECAMATAN POGALAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							15.503.900,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		8 Paket	15.503.900,00	KECAMATAN POGALAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN POGALAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.615.926,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.615.926,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	7.000.000,00	KECAMATAN POGALAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						17.000.000,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	17.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		8 Paket	22.000.000,00	KECAMATAN POGALAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						13.000.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	24.000.000,00	KECAMATAN POGALAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.250.000,00					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.250.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.250.000,00					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		7.250.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.250.000,00						1 Unit	7.250.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.250.000,00							7.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.250.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	7.250.000,00	KECAMATAN POGALAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						33.820.400,00					jasa penunjang urusan pemerintah daerah		31.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						33.820.400,00					jasa penunjang urusan pemerintah daerah		31.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	23.720.400,00						48 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		10 Laporan	12 Laporan	10.100.000,00						12 Laporan	7.100.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						23.720.400,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	23.720.400,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		48 Laporan	24.000.000,00	KECAMATAN POGALAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						10.100.000,00							7.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		10 Laporan	12 Laporan	10.100.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	7.100.000,00	KECAMATAN POGALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14.700.000,00					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16.200.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						14.700.000,00					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		16.200.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		12 Unit	20 Unit	10.000.000,00						20 Unit	9.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	12 Unit	3.100.000,00						17 Unit	5.100.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.600.000,00						1 Unit	2.100.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		12 Unit	12 Unit	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		20 Unit	9.000.000,00	KECAMATAN POGALAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.100.000,00							5.100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	12 Unit	3.100.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		17 Unit	5.100.000,00	KECAMATAN POGALAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.600.000,00							2.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.600.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	2.100.000,00	KECAMATAN POGALAN
276.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**9.552.574,00**							**22.668.500,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Pogalan						***9.552.574,00***							***22.668.500,00***	
			999.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	9.552.574,00						100 %	22.668.500,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						6.000.000,00					Aparatur Kecamatan, Aparatur Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan		15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						6.000.000,00					Aparatur Kecamatan, Aparatur Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00						2 Laporan	15.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						6.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	15.000.000,00	KECAMATAN POGALAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1.552.574,00					Aparatur Kecamatan, Aparatur Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan		2.668.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1.552.574,00					Aparatur Kecamatan, Aparatur Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Perempuan, Anak dan Kelompok Rentan		2.668.500,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.552.574,00						12 Laporan	2.668.500,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.552.574,00							2.668.500,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.552.574,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	2.668.500,00	KECAMATAN POGALAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.000.000,00					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Forum Anak, Karang Taruna, Pemuda, Kelompok Seni, Pelaku Usaha Mikro		5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						2.000.000,00					Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Forum Anak, Karang Taruna, Pemuda, Kelompok Seni, Pelaku Usaha Mikro		5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00						12 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN POGALAN
277.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.541.726,00**							**1.409.000,00**	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pogalan						***1.541.726,00***							***1.409.000,00***	
			999.Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	1.541.726,00						100 %	1.409.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.541.726,00					Lembaga Kemasyarakatan Desa		1.409.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.541.726,00					Lembaga Kemasyarakatan Desa		1.409.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.541.726,00						1 Laporan	1.409.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.541.726,00							1.409.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.541.726,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Laporan	1.409.000,00	KECAMATAN POGALAN
278.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**8.938.500,00**							**20.438.500,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Pogalan						***8.938.500,00***							***20.438.500,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	8.938.500,00						100 %	20.438.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						8.938.500,00					Forkopimcam, Tokoh Masyarakat		20.438.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						8.938.500,00					Forkopimcam, Tokoh Masyarakat		20.438.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00						12 Laporan	17.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.438.500,00						1 Laporan	3.438.500,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						7.500.000,00							17.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	17.000.000,00	KECAMATAN POGALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.438.500,00							3.438.500,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.438.500,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Laporan	3.438.500,00	KECAMATAN POGALAN
279.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.851.000,00**							**5.851.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Pogalan						***5.851.000,00***							***5.851.000,00***	
			999.Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %		100 %	100 %	5.851.000,00						100 %	5.851.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.851.000,00					Aparatur Pemerintahan Desa		5.851.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.851.000,00					Aparatur Pemerintahan Desa		5.851.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.851.000,00						12 Dokumen	2.851.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						2.851.000,00							2.851.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.851.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	2.851.000,00	KECAMATAN POGALAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN POGALAN
		KECAMATAN WATULIMO						**2.565.604.438,00**							**2.427.905.100,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.565.604.438,00**							**2.427.905.100,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.565.604.438,00**							**2.427.905.100,00**	
280.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.500.027.238,00**							**2.354.945.100,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Watulimo						***2.500.027.238,00***							***2.348.345.100,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.500.027.238,00						100 %	2.348.345.100,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.500.027.238,00						100 %	2.348.345.100,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98.88 %		98.88 %	98.88 %	2.500.027.238,00						98.88 %	2.348.345.100,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.038.800,00					Aparatur Kecamatan		8.900.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.038.800,00					Aparatur Kecamatan		8.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	5.929.000,00						15 Dokumen	6.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	2.109.800,00						46 Laporan	2.300.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.929.000,00							6.600.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	5.929.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Dokumen	6.600.000,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.109.800,00							2.300.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	2.109.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		46 Laporan	2.300.000,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.347.074.212,00					Aparatur Kecamatan		2.186.195.100,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.347.074.212,00					Aparatur Kecamatan		2.186.195.100,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	32.792.199,00						12 Dokumen	36.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.314.282.013,00						17 Orang/bulan	2.150.195.100,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.314.282.013,00							2.150.195.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan		17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.314.282.013,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		17 Orang/bulan	2.150.195.100,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						32.792.199,00							36.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	32.792.199,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	36.000.000,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						75.075.526,00					Aparatur Kecamatan		83.200.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						75.075.526,00					Aparatur Kecamatan		83.200.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.909.100,00						12 Laporan	6.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.618.000,00						12 Laporan	23.200.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	17.037.300,00						4 Paket	18.700.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	22.299.200,00						4 Paket	24.600.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.016.626,00						4 Paket	5.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.004.700,00						4 Paket	2.200.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.190.600,00						4 Paket	2.400.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.004.700,00							2.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.004.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	2.200.000,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.190.600,00							2.400.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.190.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	2.400.000,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.037.300,00							18.700.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	17.037.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	18.700.000,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.016.626,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.016.626,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	5.500.000,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						22.299.200,00							24.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	22.299.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	24.600.000,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.909.100,00							6.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.909.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	6.600.000,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.618.000,00							23.200.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.618.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	23.200.000,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						13.480.000,00					Aparatur Kecamatan		14.800.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						13.480.000,00					Aparatur Kecamatan		14.800.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	13.480.000,00						3 Unit	14.800.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						13.480.000,00							14.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	13.480.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Unit	14.800.000,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.460.200,00					Aparatur Kecamatan		44.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						40.460.200,00					Aparatur Kecamatan		44.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	36.780.200,00						36 Laporan	40.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	3.680.000,00						2 Laporan	4.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.780.200,00							40.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	36.780.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	40.300.000,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.680.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	3.680.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.898.500,00					Aparatur Kecamatan		17.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.898.500,00					Aparatur Kecamatan		17.550.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	1 Unit	222.300,00						1 Unit	250.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		18 Unit	22 Unit	7.390.000,00						22 Unit	8.200.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		6 Unit	2 Unit	8.286.200,00						2 Unit	9.100.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						7.390.000,00							8.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		18 Unit	22 Unit	7.390.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		22 Unit	8.200.000,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.286.200,00							9.100.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		6 Unit	2 Unit	8.286.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	9.100.000,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						222.300,00							250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	1 Unit	222.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	250.000,00	KECAMATAN WATULIMO
281.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**31.771.200,00**							**35.900.000,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Watulimo						***31.771.200,00***							***35.900.000,00***	
			999.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	31.771.200,00						100 %	35.900.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						20.069.600,00					Aparatur Kecamatan, Desa dan Masyarakat		22.400.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						20.069.600,00					Aparatur Kecamatan, Desa dan Masyarakat		22.400.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.069.600,00						2 Laporan	22.400.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						20.069.600,00							22.400.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.069.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	22.400.000,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.701.600,00					Aparatur Kecamatan dan Masyarakat		13.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						11.701.600,00					Aparatur Kecamatan dan Masyarakat		13.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.701.600,00						12 Laporan	13.500.000,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						11.701.600,00							13.500.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.701.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	13.500.000,00	KECAMATAN WATULIMO
282.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**8.180.000,00**							**9.000.000,00**	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Watulimo						***8.180.000,00***							***9.000.000,00***	
			999.Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	8.180.000,00						100 %	9.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						8.180.000,00					Aparatur Kecamatan, Desa dan Masyarakat		9.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						8.180.000,00					Aparatur Kecamatan, Desa dan Masyarakat		9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	8.180.000,00						3 Laporan	9.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						8.180.000,00							9.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	8.180.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN WATULIMO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
283.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**20.182.000,00**							**22.100.000,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Watulimo						***20.182.000,00***							***22.100.000,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	20.182.000,00						100 %	22.100.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						20.182.000,00					Aparatur Kecamatan dan Masyarakat		22.100.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						20.182.000,00					Aparatur Kecamatan dan Masyarakat		22.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	17.710.000,00						12 Laporan	19.400.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan		6 Laporan	4 Laporan	2.472.000,00						4 Laporan	2.700.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						17.710.000,00							19.400.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	17.710.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	19.400.000,00	KECAMATAN WATULIMO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						2.472.000,00							2.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan		6 Laporan	4 Laporan	2.472.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	2.700.000,00	KECAMATAN WATULIMO
284.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.444.000,00**							**5.960.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Watulimo						***5.444.000,00***							***5.960.000,00***	
			999.Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %		100 %	100 %	5.444.000,00						100 %	5.960.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.444.000,00					Aparatur Kecamatan dan Desa		5.960.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.444.000,00					Aparatur Kecamatan dan Desa		5.960.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.208.000,00						12 Dokumen	4.600.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.236.000,00						12 Dokumen	1.360.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						4.208.000,00							4.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.208.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	4.600.000,00	KECAMATAN WATULIMO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.236.000,00							1.360.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.236.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Watulimo || Desa Prigi || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	1.360.000,00	KECAMATAN WATULIMO
		KECAMATAN TUGU						**2.262.903.779,00**							**2.409.018.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.262.903.779,00**							**2.409.018.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.262.903.779,00**							**2.409.018.600,00**	
285.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.227.330.779,00**							**2.337.208.500,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Tugu						***2.227.330.779,00***							***2.337.208.500,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.227.330.779,00						100 %	2.337.208.500,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.227.330.779,00						100 %	2.337.208.500,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98.27 %		98.27 %	98.27 %	2.227.330.779,00						98.27 %	2.337.208.500,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.532.200,00					Aparatur Kecamatan Tugu		1.424.235,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.532.200,00					Aparatur Kecamatan Tugu		1.424.235,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	1.246.000,00						15 Dokumen	1.155.600,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	286.200,00						46 Laporan	268.635,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.246.000,00							1.155.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	1.246.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Dokumen	1.155.600,00	KECAMATAN TUGU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						286.200,00							268.635,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	47 Laporan	286.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		46 Laporan	268.635,00	KECAMATAN TUGU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.115.777.991,00					Aparatur Kecamatan Tugu		2.206.759.070,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.115.777.991,00					Aparatur Kecamatan Tugu		2.206.759.070,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen		38 Dokumen	38 Dokumen	48.926.000,00						38 Dokumen	45.491.170,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan		15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.066.851.991,00						15 Orang/bulan	2.161.267.900,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.066.851.991,00							2.161.267.900,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan		15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.066.851.991,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Orang/bulan	2.161.267.900,00	KECAMATAN TUGU
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						48.926.000,00							45.491.170,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen		38 Dokumen	40 Dokumen	48.926.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		38 Dokumen	45.491.170,00	KECAMATAN TUGU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						42.303.188,00					Aparatur Kecamatan Tugu		61.062.793,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						42.303.188,00					Aparatur Kecamatan Tugu		61.062.793,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.946.500,00						12 Laporan	24.690.684,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.419.800,00						4 Paket	4.437.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	12.258.100,00						4 Paket	18.164.486,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	2.377.588,00						3 Paket	3.762.223,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.367.600,00						2 Paket	2.996.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	4.933.600,00						3 Paket	7.012.400,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.367.600,00							2.996.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.367.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	2.996.000,00	KECAMATAN TUGU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.933.600,00							7.012.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	4.933.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Paket	7.012.400,00	KECAMATAN TUGU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.419.800,00							4.437.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.419.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	4.437.000,00	KECAMATAN TUGU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.377.588,00							3.762.223,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	2.377.588,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Paket	3.762.223,00	KECAMATAN TUGU
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						12.258.100,00							18.164.486,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	12.258.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	18.164.486,00	KECAMATAN TUGU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						15.946.500,00							24.690.684,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.946.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	24.690.684,00	KECAMATAN TUGU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.937.100,00					Aparatur Kecamatan Tugu		33.259.192,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						36.937.100,00					Aparatur Kecamatan Tugu		33.259.192,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	41 Laporan		41 Laporan	41 Laporan	36.937.100,00						41 Laporan	33.259.192,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.937.100,00							33.259.192,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	41 Laporan		41 Laporan	48 Laporan	36.937.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		41 Laporan	33.259.192,00	KECAMATAN TUGU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.780.300,00					Aparatur Kecamatan Tugu		34.703.210,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30.780.300,00					Aparatur Kecamatan Tugu		34.703.210,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	25.910.300,00						12 Unit	28.303.210,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	18 Unit	4.870.000,00						18 Unit	6.400.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25.910.300,00							28.303.210,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	25.910.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Unit	28.303.210,00	KECAMATAN TUGU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.870.000,00							6.400.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		18 Unit	12 Unit	4.870.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		18 Unit	6.400.000,00	KECAMATAN TUGU
286.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**20.691.000,00**							**52.525.200,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Tugu						***20.691.000,00***							***52.525.200,00***	
			999.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	20.691.000,00						100 %	52.525.200,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						13.146.000,00					Aparatur Kecamatan Tugu, Desa, BPD, Intansi Terkait dan Masyarakat Kecamatan Tugu		24.949.925,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						13.146.000,00					Aparatur Kecamatan Tugu, Desa, BPD, Intansi Terkait dan Masyarakat Kecamatan Tugu		24.949.925,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	13.146.000,00						2 Laporan	24.949.925,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						13.146.000,00							24.949.925,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	13.146.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	24.949.925,00	KECAMATAN TUGU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1.800.000,00					Aparatur Kecamatan Tugu, Perangkat Desa, dan Masyarakat Kecamatan Tugu		2.147.715,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						1.800.000,00					Aparatur Kecamatan Tugu, Perangkat Desa, dan Masyarakat Kecamatan Tugu		2.147.715,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00						12 Laporan	2.147.715,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.800.000,00							2.147.715,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	2.147.715,00	KECAMATAN TUGU
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.745.000,00					Aparatur Kecamatan Tugu, PKK, Karak Taruna, Karang Werda, Kelompok Seni Budaya dan Olahraga, Intansi Terkait dan Masyarakat Kecamatan Tugu		25.427.560,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						5.745.000,00					Aparatur Kecamatan Tugu, PKK, Karak Taruna, Karang Werda, Kelompok Seni Budaya dan Olahraga, Intansi Terkait dan Masyarakat Kecamatan Tugu		25.427.560,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.745.000,00						12 Laporan	25.427.560,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						5.745.000,00							25.427.560,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.745.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	25.427.560,00	KECAMATAN TUGU
287.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.560.000,00**							**5.190.000,00**	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Tugu						***2.560.000,00***							***5.190.000,00***	
			999.Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	2.560.000,00						100 %	5.190.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2.560.000,00					Aparatur Kecamatan Tugu dan Masyarakat Kecamatan Tugu		5.190.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2.560.000,00					Aparatur Kecamatan Tugu dan Masyarakat Kecamatan Tugu		5.190.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.560.000,00						1 Laporan	5.190.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.560.000,00							5.190.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.560.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Laporan	5.190.000,00	KECAMATAN TUGU
288.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**5.017.000,00**							**6.113.200,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Tugu						***5.017.000,00***							***6.113.200,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	5.017.000,00						100 %	6.113.200,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						5.017.000,00					Aparatur Kecamatan Tugu, TNI, POLRI dan Masyarakat Kecamatan Tugu		6.113.200,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						5.017.000,00					Aparatur Kecamatan Tugu, TNI, POLRI dan Masyarakat Kecamatan Tugu		6.113.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.937.000,00						12 Laporan	4.342.715,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.080.000,00						6 Laporan	1.770.485,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						3.937.000,00							4.342.715,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.937.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	4.342.715,00	KECAMATAN TUGU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.080.000,00							1.770.485,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.080.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Laporan	1.770.485,00	KECAMATAN TUGU
289.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**7.305.000,00**							**7.981.700,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Tugu						***7.305.000,00***							***7.981.700,00***	
			999.Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %		100 %	100 %	7.305.000,00						100 %	7.981.700,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						7.305.000,00					Aparatur Kecamatan Tugu, Perangkat Desa, BPD dan Masyarakat Kecamatan Tugu		7.981.700,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						7.305.000,00					Aparatur Kecamatan Tugu, Perangkat Desa, BPD dan Masyarakat Kecamatan Tugu		7.981.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.425.000,00						12 Dokumen	2.786.350,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.880.000,00						12 Dokumen	5.195.350,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						4.425.000,00							2.786.350,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.425.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	2.786.350,00	KECAMATAN TUGU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						2.880.000,00							5.195.350,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.880.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Tugu || Desa Gondang || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	5.195.350,00	KECAMATAN TUGU
		KECAMATAN DONGKO						**2.405.294.215,00**							**2.260.348.800,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.405.294.215,00**							**2.260.348.800,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.405.294.215,00**							**2.260.348.800,00**	
290.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.349.889.934,00**							**2.172.047.900,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Dongko						***2.342.889.934,00***							***2.161.047.900,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.342.889.934,00						100 %	2.161.047.900,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.342.889.934,00						100 %	2.161.047.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99.11 %		99.11 %	99.11 %	2.342.889.934,00						99.11 %	2.161.047.900,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00					Aparatur Kecamatan		8.116.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.000.000,00					Aparatur Kecamatan		8.116.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	2.500.000,00						15 Dokumen	5.991.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	500.000,00						46 Laporan	2.125.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.500.000,00							5.991.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	14 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Dokumen	5.991.000,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						500.000,00							2.125.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		46 Laporan	2.125.000,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.259.850.613,00					Aparatur Kecamatan		2.040.031.900,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.259.850.613,00					Aparatur Kecamatan		2.040.031.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	57.810.000,00						36 Dokumen	73.030.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen		360 Dokumen	360 Dokumen	500.000,00						360 Dokumen	1.100.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	500.000,00						38 Laporan	2.300.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.201.040.613,00						19 Orang/bulan	1.963.601.900,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.201.040.613,00							1.963.601.900,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.201.040.613,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		19 Orang/bulan	1.963.601.900,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						57.810.000,00							73.030.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	57.810.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Dokumen	73.030.000,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						500.000,00							1.100.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	360 Dokumen		360 Dokumen	230 Dokumen	500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		360 Dokumen	1.100.000,00	KECAMATAN DONGKO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						500.000,00							2.300.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		38 Laporan	2.300.000,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						500.000,00					Aparatur Kecamatan		1.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						500.000,00					Aparatur Kecamatan		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	500.000,00						27 Laporan	1.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						500.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		27 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Aparatur Kecamatan		1.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						500.000,00					Aparatur Kecamatan		1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	500.000,00						50 Dokumen	1.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						500.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		50 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						28.589.365,00					Aparatur Kecamatan		61.900.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						28.589.365,00					Aparatur Kecamatan		61.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00						12 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.500.000,00						2 Paket	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.000.000,00						4 Paket	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.889.000,00						4 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.500.000,00						2 Paket	2.400.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	8.200.365,00						4 Paket	22.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.500.000,00							2.400.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	1.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	2.400.000,00	KECAMATAN DONGKO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.200.365,00							22.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	8.200.365,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	22.000.000,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	2.500.000,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.889.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	3.889.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	6.000.000,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	2.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	3.000.000,00	KECAMATAN DONGKO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						500.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.400.000,00					Aparatur Kecamatan		6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3.400.000,00					Aparatur Kecamatan		6.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	3.400.000,00						2 Unit	6.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.400.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	3.400.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.049.956,00					Aparatur Kecamatan		19.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.049.956,00					Aparatur Kecamatan		19.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	19.049.956,00						24 Laporan	19.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						19.049.956,00							19.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	19.049.956,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		24 Laporan	19.000.000,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35.000.000,00					Aparatur Kecamatan serta Sarana dan Prasarana Kecamatan		35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35.000.000,00					Aparatur Kecamatan serta Sarana dan Prasarana Kecamatan		35.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	30.000.000,00						8 Unit	27.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	8 Unit	3.000.000,00						8 Unit	3.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.000.000,00						2 Unit	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						30.000.000,00							27.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	7 Unit	30.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		8 Unit	27.000.000,00	KECAMATAN DONGKO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		8 Unit	6 Unit	3.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		8 Unit	3.000.000,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	1 Unit	2.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN DONGKO
291.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**28.597.000,00**							**53.185.100,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Dongko						***28.597.000,00***							***53.185.100,00***	
			999.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	28.597.000,00						100 %	53.185.100,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.380.000,00					Aparatur Desa dan Masyarakat		18.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.380.000,00					Aparatur Desa dan Masyarakat		18.500.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.380.000,00						2 Laporan	18.500.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						10.380.000,00							18.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.380.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	18.500.000,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						18.217.000,00					Aparatur Desa dan Masyarakat		34.685.100,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						18.217.000,00					Aparatur Desa dan Masyarakat		34.685.100,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.217.000,00						12 Laporan	34.685.100,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						18.217.000,00							34.685.100,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	18.217.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	34.685.100,00	KECAMATAN DONGKO
292.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**5.000.000,00**							**3.314.300,00**	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Dongko						***5.000.000,00***							***3.314.300,00***	
			999.Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	5.000.000,00						100 %	3.314.300,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						5.000.000,00					Aparatur Desa dan Masyarakat		3.314.300,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						5.000.000,00					Aparatur Desa dan Masyarakat		3.314.300,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00						2 Laporan	3.314.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						5.000.000,00							3.314.300,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Laporan	3.314.300,00	KECAMATAN DONGKO
293.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**13.996.500,00**							**24.291.700,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Dongko						***13.996.500,00***							***24.291.700,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	13.996.500,00						100 %	24.291.700,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						13.996.500,00					Aparatur Kecamatan, Aparatur Pemerintahan Desa, Instansi Vertikal Lainnya dan Masyarakat Dongko		24.291.700,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						13.996.500,00					Aparatur Kecamatan, Aparatur Pemerintahan Desa, Instansi Vertikal Lainnya dan Masyarakat Dongko		24.291.700,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.996.500,00						12 Laporan	19.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00						3 Laporan	5.291.700,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						8.996.500,00							19.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.996.500,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	19.000.000,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						5.000.000,00							5.291.700,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Laporan	5.291.700,00	KECAMATAN DONGKO
294.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**7.810.781,00**							**7.509.800,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Dongko						***7.810.781,00***							***3.754.900,00***	
			999.Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %		100 %	100 %	7.810.781,00						100 %	3.754.900,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						7.810.781,00					Aparatur Desa dan Masyarakat		7.509.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						7.810.781,00					Aparatur Desa dan Masyarakat		7.509.800,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00						12 Dokumen	3.754.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.060.781,00						12 Dokumen	3.754.900,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						3.750.000,00							3.754.900,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.750.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	3.754.900,00	KECAMATAN DONGKO
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						4.060.781,00							3.754.900,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.060.781,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	3.754.900,00	KECAMATAN DONGKO
		KECAMATAN KAMPAK						**2.365.441.158,00**							**2.304.984.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.365.441.158,00**							**2.304.984.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.365.441.158,00**							**2.304.984.000,00**	
295.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.346.140.858,00**							**2.230.070.600,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Kampak						***2.324.790.858,00***							***2.205.870.600,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.324.790.858,00						100 %	2.205.870.600,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.324.790.858,00						100 %	2.205.870.600,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98.17 %		98.17 %	98.17 %	2.324.790.858,00						98.17 %	2.205.870.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00					ASN Kecamatan Kampak		4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.000.000,00					ASN Kecamatan Kampak		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	1.000.000,00						18 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	1.000.000,00						46 Laporan	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		18 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	1.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		46 Laporan	2.000.000,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.241.539.140,00					ASN Kecamatan Kampak		2.167.252.551,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.241.539.140,00					ASN Kecamatan Kampak		2.167.252.551,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen		38 Dokumen	38 Dokumen	2.400.000,00						38 Dokumen	53.003.751,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.239.139.140,00						19 Orang/bulan	2.114.248.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.239.139.140,00							2.114.248.800,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.239.139.140,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		19 Orang/bulan	2.114.248.800,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						2.400.000,00							53.003.751,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen		38 Dokumen	38 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		38 Dokumen	53.003.751,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						40.850.000,00					ASN Kecamatan Kampak		21.100.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						40.850.000,00					ASN Kecamatan Kampak		21.100.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100.000,00						4 Paket	100.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	600.000,00						4 Paket	300.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100.000,00						4 Paket	100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	50.000,00						4 Paket	100.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00						4 Paket	500.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						50.000,00							100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	50.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	100.000,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	500.000,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000,00							100.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	100.000,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						100.000,00							100.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	100.000,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						600.000,00							300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	600.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	300.000,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						16.840.000,00					ASN Kecamatan Kampak		618.049,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						16.840.000,00					ASN Kecamatan Kampak		618.049,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	16.840.000,00						1 Unit	618.049,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.840.000,00							618.049,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	16.840.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	618.049,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17.502.440,00					ASN Kecamatan Kampak		14.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Perangkat Daerah						17.502.440,00					ASN Kecamatan Kampak		14.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	17.402.440,00						36 Laporan	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000,00						12 Laporan	2.100.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						17.402.440,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	17.402.440,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	12.000.000,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000,00							2.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	2.100.000,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27.409.278,00					ASN Kecamatan Kampak		23.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27.409.278,00					ASN Kecamatan Kampak		23.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	27.259.278,00						12 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000,00						2 Unit	1.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	50.000,00						4 Unit	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000,00						2 Unit	1.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						27.259.278,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	27.259.278,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						50.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	1.000.000,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	50.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Unit	1.000.000,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	1.000.000,00	KECAMATAN KAMPAK
296.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**12.300.300,00**							**59.750.400,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Kampak						***12.300.300,00***							***59.750.400,00***	
			999.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	12.300.300,00						100 %	59.750.400,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kampak		22.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kampak		22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	22.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						10.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	22.000.000,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kampak		1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan						1.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kampak		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00						12 Laporan	1.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.300.300,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kampak		36.750.400,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						1.300.300,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kampak		36.750.400,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.300.300,00						12 Laporan	36.750.400,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						1.300.300,00							36.750.400,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.300.300,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	36.750.400,00	KECAMATAN KAMPAK
297.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**1.000.000,00**							**2.039.200,00**	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kampak						***1.000.000,00***							***2.039.200,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	1.000.000,00						100 %	2.039.200,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kampak		2.039.200,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						1.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kampak		2.039.200,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00						2 Laporan	2.039.200,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							2.039.200,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Laporan	2.039.200,00	KECAMATAN KAMPAK
298.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**2.000.000,00**							**6.431.800,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Kampak						***1.000.000,00***							***6.431.800,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	1.000.000,00						100 %	6.431.800,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						2.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kampak		6.431.800,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						2.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kampak		6.431.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00						12 Laporan	2.431.800,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.000.000,00						2 Laporan	4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						1.000.000,00							2.431.800,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	2.431.800,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	4.000.000,00	KECAMATAN KAMPAK
299.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**4.000.000,00**							**6.692.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Kampak						***4.000.000,00***							***6.692.000,00***	
			999.Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %		100 %	100 %	4.000.000,00						100 %	6.692.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						4.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kampak		6.692.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan						4.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kampak		6.692.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,00						12 Dokumen	5.397.476,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00						12 Dokumen	1.294.524,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						2.500.000,00							5.397.476,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	5.397.476,00	KECAMATAN KAMPAK
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						1.500.000,00							1.294.524,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	1.294.524,00	KECAMATAN KAMPAK
		KECAMATAN MUNJUNGAN						**1.984.561.802,00**							**2.168.601.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.984.561.802,00**							**2.168.601.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.984.561.802,00**							**2.168.601.600,00**	
300.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.917.486.952,00**							**2.067.796.700,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Munjungan						***1.917.486.952,00***							***2.067.796.700,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	1.917.486.952,00						100 %	2.067.796.700,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.917.486.952,00						100 %	2.067.796.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	93.92 %		93.92 %	93.92 %	1.917.486.952,00						93.92 %	2.067.796.700,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.159.000,00					Aparatur Kecamatan Munjungan		2.458.800,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.159.000,00					Aparatur Kecamatan Munjungan		2.458.800,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	752.000,00						15 Dokumen	1.368.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	407.000,00						46 Laporan	1.090.800,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						752.000,00							1.368.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	752.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Dokumen	1.368.000,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						407.000,00							1.090.800,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	407.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		46 Laporan	1.090.800,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.843.363.602,00					Aparatur Kecamatan Munjungan		1.960.533.500,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.843.363.602,00					Aparatur Kecamatan Munjungan		1.960.533.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		26 Dokumen	36 Dokumen	38.170.000,00						36 Dokumen	46.285.200,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan		16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.805.193.602,00						16 Orang/bulan	1.914.248.300,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.805.193.602,00							1.914.248.300,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan		16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.805.193.602,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		16 Orang/bulan	1.914.248.300,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						38.170.000,00							46.285.200,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		26 Dokumen	48 Dokumen	38.170.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Dokumen	46.285.200,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						33.922.050,00					Aparatur Kecamatan Munjungan		53.565.800,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						33.922.050,00					Aparatur Kecamatan Munjungan		53.565.800,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.362.800,00						12 Laporan	6.628.400,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.494.000,00						12 Laporan	18.441.900,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.327.600,00						4 Paket	4.995.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.013.400,00						4 Paket	3.499.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.000.000,00						4 Paket	3.869.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.658.850,00						4 Paket	4.111.200,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		4 Paket	4 Paket	8.065.400,00						4 Paket	12.021.100,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.658.850,00							4.111.200,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	2.658.850,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	4.111.200,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.065.400,00							12.021.100,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		4 Paket	2 Paket	8.065.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	12.021.100,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.327.600,00							4.995.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	3.327.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	4.995.000,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							3.869.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	3.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	3.869.000,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						3.013.400,00							3.499.200,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	3.013.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	3.499.200,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.362.800,00							6.628.400,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.362.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	6.628.400,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						11.494.000,00							18.441.900,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.494.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	18.441.900,00	KECAMATAN MUNJUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18.723.900,00					Aparatur Kecamatan Munjungan		19.939.600,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18.723.900,00					Aparatur Kecamatan Munjungan		19.939.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	17.123.900,00						36 Laporan	17.123.900,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.600.000,00						2 Laporan	2.815.700,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						17.123.900,00							17.123.900,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	17.123.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	17.123.900,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.600.000,00							2.815.700,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	1.600.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	2.815.700,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.318.400,00					Aparatur Kecamatan Munjungan		31.299.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.318.400,00					Aparatur Kecamatan Munjungan		31.299.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.040.000,00						1 Unit	9.915.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	14.298.400,00						12 Unit	17.102.700,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	6 Unit	3.980.000,00						6 Unit	4.280.700,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						14.298.400,00							17.102.700,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	14.298.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Unit	17.102.700,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.980.000,00							4.280.700,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit	6 Unit	3.980.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Unit	4.280.700,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2.040.000,00							9.915.600,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.040.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	9.915.600,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
301.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**46.596.050,00**							**78.514.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Munjungan						***46.596.050,00***							***78.514.300,00***	
			999.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	46.596.050,00						100 %	78.514.300,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						15.100.000,00					Aparatur Kecamatan Munjungan, Perangkat Desa BPD, Dinas Instansi Terkait, Masyarakat Kec. Munjungan		22.855.900,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						15.100.000,00					Aparatur Kecamatan Munjungan, Perangkat Desa BPD, Dinas Instansi Terkait, Masyarakat Kec. Munjungan		22.855.900,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	15.100.000,00						2 Laporan	22.855.900,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						15.100.000,00							22.855.900,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	15.100.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	22.855.900,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						6.351.400,00					Aparatur Kecamatan Munjungan, Perangkat Desa dan Masyarakat kecamatan Munjungan		7.426.500,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan						6.351.400,00					Aparatur Kecamatan Munjungan, Perangkat Desa dan Masyarakat kecamatan Munjungan		7.426.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.351.400,00						12 Laporan	7.426.500,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						6.351.400,00							7.426.500,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.351.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	7.426.500,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						25.144.650,00					Aparatur Kecamatan Munjungan, PKK, kelompok Pemuda, seni, budaya dan Olahraga, Karangwerdha, karangtaruna, perempuan , anak dan kelompok rentan		48.231.900,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						25.144.650,00					Aparatur Kecamatan Munjungan, PKK, kelompok Pemuda, seni, budaya dan Olahraga, Karangwerdha, karangtaruna, perempuan , anak dan kelompok rentan		48.231.900,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.144.650,00						12 Laporan	48.231.900,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						25.144.650,00							48.231.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.144.650,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	48.231.900,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
302.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.579.500,00**							**3.154.500,00**	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Munjungan						***2.579.500,00***							***3.154.500,00***	
			999.Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	2.579.500,00						100 %	3.154.500,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2.579.500,00					Aparatur Kecamatan dan pelaku usaha		3.154.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2.579.500,00					Aparatur Kecamatan dan pelaku usaha		3.154.500,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.579.500,00						1 Laporan	3.154.500,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.579.500,00							3.154.500,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.579.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1 Laporan	3.154.500,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
303.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**9.722.900,00**							**10.884.500,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Munjungan						***9.722.900,00***							***10.884.500,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	9.722.900,00						100 %	10.884.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						9.722.900,00					Aparatur Kecamatan Munjungan, TNI, POLRI dan Masyarakat Kecamatan Munjungan		10.884.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						9.722.900,00					Aparatur Kecamatan Munjungan, TNI, POLRI dan Masyarakat Kecamatan Munjungan		10.884.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.342.900,00						12 Laporan	8.498.200,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.380.000,00						4 Laporan	2.386.300,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						7.342.900,00							8.498.200,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.342.900,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	8.498.200,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						2.380.000,00							2.386.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.380.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	2.386.300,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
304.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**8.176.400,00**							**8.251.600,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Munjungan						***8.176.400,00***							***8.251.600,00***	
			999.Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %		100 %	100 %	8.176.400,00						100 %	8.251.600,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						8.176.400,00					Aparatur Kecamatan Munjungan, Perangkat Desa BPD dan Masyarakat Kecamatan Munjungan		8.251.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						8.176.400,00					Aparatur Kecamatan Munjungan, Perangkat Desa BPD dan Masyarakat Kecamatan Munjungan		8.251.600,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.108.400,00						12 Dokumen	4.183.600,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.068.000,00						12 Dokumen	4.068.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						4.108.400,00							4.183.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.108.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	4.183.600,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						4.068.000,00							4.068.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.068.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Munjungan || Desa Munjungan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	4.068.000,00	KECAMATAN MUNJUNGAN
		KECAMATAN PULE						**1.809.115.856,00**							**1.809.115.856,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.809.115.856,00**							**1.809.115.856,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.809.115.856,00**							**1.809.115.856,00**	
305.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.744.980.943,00**							**1.744.980.943,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Pule						***1.743.980.943,00***							***1.743.980.943,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	1.743.980.943,00						100 %	1.743.980.943,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.743.980.943,00						100 %	1.743.980.943,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	95 %		94 %	95 %	1.743.980.943,00						95 %	1.743.980.943,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						400.000,00					Kecamatan Pule		400.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						400.000,00					Kecamatan Pule		400.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	200.000,00						15 Dokumen	200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	200.000,00						46 Laporan	200.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						200.000,00							200.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Dokumen	200.000,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						200.000,00							200.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		46 Laporan	200.000,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.635.996.263,00					Kecamatan Pule		1.635.996.263,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.635.996.263,00					Kecamatan Pule		1.635.996.263,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	52.000.000,00						12 Dokumen	52.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	225 Dokumen		225 Dokumen	225 Dokumen	200.000,00						225 Dokumen	200.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	200.000,00						38 Laporan	200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.583.596.263,00						14 Orang/bulan	1.583.596.263,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.583.596.263,00							1.583.596.263,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan		14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	1.583.596.263,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		14 Orang/bulan	1.583.596.263,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						52.000.000,00							52.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	52.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	52.000.000,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						200.000,00							200.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	225 Dokumen		225 Dokumen	225 Dokumen	200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		225 Dokumen	200.000,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						200.000,00							200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		38 Laporan	200.000,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						200.000,00					Kecamatan Pule		200.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						200.000,00					Kecamatan Pule		200.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	200.000,00						27 Laporan	200.000,00	
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						200.000,00							200.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		27 Laporan	200.000,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						200.000,00					Kecamatan Pule		200.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						200.000,00					Kecamatan Pule		200.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	200.000,00						12 Dokumen	200.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						200.000,00							200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	200.000,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						30.192.400,00					Kecamatan Pule		30.192.400,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						30.192.400,00					Kecamatan Pule		30.192.400,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	499.200,00						12 Dokumen	499.200,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.102.400,00						12 Laporan	3.102.400,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.842.700,00						12 Laporan	9.842.700,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.247.800,00						4 Paket	3.247.800,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.499.200,00						12 Paket	3.499.200,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.869.000,00						4 Paket	3.869.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.111.000,00						4 Paket	2.111.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.021.100,00						4 Paket	4.021.100,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.111.000,00							2.111.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2.111.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	2.111.000,00	KECAMATAN PULE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.021.100,00							4.021.100,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.021.100,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	4.021.100,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.247.800,00							3.247.800,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.247.800,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	3.247.800,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.869.000,00							3.869.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.869.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	3.869.000,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						3.499.200,00							3.499.200,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.499.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Paket	3.499.200,00	KECAMATAN PULE

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.102.400,00							3.102.400,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.102.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	3.102.400,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						9.842.700,00							9.842.700,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	9.842.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	9.842.700,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						499.200,00							499.200,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	499.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	499.200,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						15.000.000,00					Kecamatan Pule		15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						15.000.000,00					Kecamatan Pule		15.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00						1 Unit	15.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17.906.850,00					Kecamatan Pule		17.906.850,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17.906.850,00					Kecamatan Pule		17.906.850,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	15.091.150,00						24 Laporan	15.091.150,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		0 Laporan	13 Laporan	1.200.000,00						13 Laporan	1.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.615.700,00						2 Laporan	1.615.700,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						15.091.150,00							15.091.150,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	15.091.150,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		24 Laporan	15.091.150,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.615.700,00							1.615.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.615.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	1.615.700,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.200.000,00							1.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan		0 Laporan	13 Laporan	1.200.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		13 Laporan	1.200.000,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45.085.430,00					Kecamatan Pule		45.085.430,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						45.085.430,00					Kecamatan Pule		45.085.430,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	40.102.700,00						14 Unit	40.102.700,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.280.700,00						2 Unit	2.280.700,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.702.030,00						1 Unit	2.702.030,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						40.102.700,00							40.102.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	40.102.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		14 Unit	40.102.700,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.280.700,00							2.280.700,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.280.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	2.280.700,00	KECAMATAN PULE
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.702.030,00							2.702.030,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.702.030,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	2.702.030,00	KECAMATAN PULE
306.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**36.522.513,00**							**36.522.513,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Pule						***36.522.513,00***							***36.522.513,00***	
			999.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	36.522.513,00						100 %	36.522.513,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						8.929.087,00					Kecamatan Pule		8.929.087,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						8.929.087,00					Kecamatan Pule		8.929.087,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.929.087,00						2 Laporan	8.929.087,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						8.929.087,00							8.929.087,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.929.087,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	8.929.087,00	KECAMATAN PULE
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						3.374.000,00					Kecamatan Pule		3.374.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan						3.374.000,00					Kecamatan Pule		3.374.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.374.000,00						12 Laporan	3.374.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.374.000,00							3.374.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.374.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	3.374.000,00	KECAMATAN PULE
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						24.219.426,00					Kecamatan Pule		24.219.426,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						24.219.426,00					Kecamatan Pule		24.219.426,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.219.426,00						12 Laporan	24.219.426,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						24.219.426,00							24.219.426,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.219.426,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	24.219.426,00	KECAMATAN PULE
307.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**7.556.700,00**							**7.556.700,00**	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Pule						***7.556.700,00***							***7.556.700,00***	
			999.Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	7.556.700,00						100 %	7.556.700,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						4.556.700,00					Kecamatan Pule		4.556.700,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa						4.556.700,00					Kecamatan Pule		4.556.700,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	4.556.700,00						2 Laporan	4.556.700,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						4.556.700,00							4.556.700,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	4.556.700,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Laporan	4.556.700,00	KECAMATAN PULE
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						3.000.000,00					Kecamatan Pule		3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						3.000.000,00					Kecamatan Pule		3.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	45 Keluarga		45 Keluarga	45 Keluarga	3.000.000,00						45 Keluarga	3.000.000,00	
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	45 Keluarga		45 Keluarga	45 Keluarga	3.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		45 Keluarga	3.000.000,00	KECAMATAN PULE
308.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**9.546.200,00**							**9.546.200,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Pule						***9.546.200,00***							***9.546.200,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	9.546.200,00						100 %	9.546.200,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						9.546.200,00					Kecamatan Pule		9.546.200,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						9.546.200,00					Kecamatan Pule		9.546.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.546.200,00						12 Laporan	6.546.200,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00						4 Laporan	3.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						6.546.200,00							6.546.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.546.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	6.546.200,00	KECAMATAN PULE
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN PULE
309.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**10.509.500,00**							**10.509.500,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Pule						***10.509.500,00***							***10.509.500,00***	
			999.Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %		100 %	100 %	10.509.500,00						100 %	10.509.500,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						10.509.500,00					Kecamatan Pule		10.509.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						10.509.500,00					Kecamatan Pule		10.509.500,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.509.500,00						12 Dokumen	5.509.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00						12 Dokumen	5.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						5.509.500,00							5.509.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.509.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	5.509.500,00	KECAMATAN PULE
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Pule || Desa Pule || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN PULE
		KECAMATAN GANDUSARI						**1.933.274.767,00**							**2.071.517.600,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**1.933.274.767,00**							**2.071.517.600,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**1.933.274.767,00**							**2.071.517.600,00**	
310.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**1.897.815.412,00**							**1.999.763.900,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Gandusari						***1.897.815.412,00***							***1.999.763.900,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	1.897.815.412,00						100 %	1.999.763.900,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.897.815.412,00						100 %	1.999.763.900,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98.45 %		98.45 %	98.45 %	1.897.815.412,00						98.45 %	1.999.763.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						651.400,00					Aparatur Kecamatan Gandusari		5.785.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						651.400,00					Aparatur Kecamatan Gandusari		5.785.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	327.250,00						18 Dokumen	3.706.300,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	324.150,00						46 Laporan	2.078.700,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						327.250,00							3.706.300,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	327.250,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		18 Dokumen	3.706.300,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						324.150,00							2.078.700,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	324.150,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		46 Laporan	2.078.700,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.838.792.412,00					Aparatur Kecamatan Gandusari		1.912.107.700,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.838.792.412,00					Aparatur Kecamatan Gandusari		1.912.107.700,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen		38 Dokumen	38 Dokumen	41.711.477,00						38 Dokumen	43.470.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan		15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.797.080.935,00						15 Orang/bulan	1.868.637.700,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1.797.080.935,00							1.868.637.700,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan		15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	1.797.080.935,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Orang/bulan	1.868.637.700,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						41.711.477,00							43.470.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen		38 Dokumen	38 Dokumen	41.711.477,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		38 Dokumen	43.470.000,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						16.792.000,00					Aparatur Kecamatan Gandusari		23.433.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						16.792.000,00					Aparatur Kecamatan Gandusari		23.433.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.864.000,00						12 Laporan	3.125.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.127.000,00						2 Paket	3.781.700,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	8.091.500,00						2 Paket	8.631.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.439.800,00						2 Paket	2.697.300,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	761.700,00						2 Paket	2.291.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.508.000,00						2 Paket	2.906.100,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						761.700,00							2.291.400,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	761.700,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	2.291.400,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.508.000,00							2.906.100,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.508.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	2.906.100,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.127.000,00							3.781.700,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	1.127.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	3.781.700,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.439.800,00							2.697.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.439.800,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	2.697.300,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						8.091.500,00							8.631.500,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	8.091.500,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	8.631.500,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						2.864.000,00							3.125.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.864.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	3.125.000,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						628.000,00					Aparatur Kecamatan Gandusari		14.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						628.000,00					Aparatur Kecamatan Gandusari		14.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	628.000,00						1 Unit	14.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						628.000,00							14.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	628.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	14.000.000,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17.783.900,00					Aparatur Kecamatan Gandusari		20.785.100,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						17.783.900,00					Aparatur Kecamatan Gandusari		20.785.100,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	17.783.900,00						36 Laporan	20.785.100,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						17.783.900,00							20.785.100,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	24 Laporan	17.783.900,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	20.785.100,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23.167.700,00					Aparatur Kecamatan Gandusari		23.653.100,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23.167.700,00					Aparatur Kecamatan Gandusari		23.653.100,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	18.367.700,00						11 Unit	17.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	4.300.000,00						10 Unit	3.909.100,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	500.000,00						2 Unit	2.744.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						18.367.700,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	18.367.700,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		11 Unit	17.000.000,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.300.000,00							3.909.100,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	4.300.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Unit	3.909.100,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						500.000,00							2.744.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	2.744.000,00	KECAMATAN GANDUSARI
311.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**22.400.000,00**							**57.302.700,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Gandusari						***11.900.000,00***							***57.302.700,00***	
			999.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	11.900.000,00						100 %	57.302.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.500.000,00					Aparatur Kecamatan Gandusari, Desa, BPD, Instansi Terkait dan Masyarakat Kecamatan Gandusari		25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.500.000,00					Aparatur Kecamatan Gandusari, Desa, BPD, Instansi Terkait dan Masyarakat Kecamatan Gandusari		25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.500.000,00						2 Laporan	25.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						10.500.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						1.400.000,00					Aparatur Kecamatan Gandusari, Perangkat Desa, dan Masyarakat Kecamatan Gandusari		2.025.800,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan						1.400.000,00					Aparatur Kecamatan Gandusari, Perangkat Desa, dan Masyarakat Kecamatan Gandusari		2.025.800,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.400.000,00						12 Laporan	2.025.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						1.400.000,00							2.025.800,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.400.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	2.025.800,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10.500.000,00					Aparatur Kecamatan Gandusari, PKK, Karang Taruna, Karang Werda, Kelompok Seni Budaya dan Olahraga, Instansi Terkait dan Masyarakat Kecamatan Gandusari		30.276.900,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						10.500.000,00					Aparatur Kecamatan Gandusari, PKK, Karang Taruna, Karang Werda, Kelompok Seni Budaya dan Olahraga, Instansi Terkait dan Masyarakat Kecamatan Gandusari		30.276.900,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.500.000,00						12 Laporan	30.276.900,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						10.500.000,00							30.276.900,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	30.276.900,00	KECAMATAN GANDUSARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
312.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**3.000.000,00**							**3.000.000,00**	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Gandusari						***3.000.000,00***							***3.000.000,00***	
			999.Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	3.000.000,00						100 %	3.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3.000.000,00					Aparatur Kecamatan Gandusari dan Masyarakat Kecamatan Gandusari		3.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						3.000.000,00					Aparatur Kecamatan Gandusari dan Masyarakat Kecamatan Gandusari		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00						2 Laporan	3.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN GANDUSARI
313.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**5.000.000,00**							**7.590.300,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Gandusari						***2.500.000,00***							***7.590.300,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	2.500.000,00						100 %	7.590.300,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						5.000.000,00					Aparatur Kecamatan Gandusari,TNI, POLRI, dan Masyarakat Kecamatan Gandusari		7.590.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						5.000.000,00					Aparatur Kecamatan Gandusari,TNI, POLRI, dan Masyarakat Kecamatan Gandusari		7.590.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00						12 Laporan	2.590.300,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00						2 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2.500.000,00							2.590.300,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	2.590.300,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN GANDUSARI
314.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**5.059.355,00**							**3.860.700,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Gandusari						***5.059.355,00***							***3.860.700,00***	
			999.Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %		100 %	100 %	5.059.355,00						100 %	3.860.700,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5.059.355,00					Aparatur Kecamatan Gandusari, Perangkat Desa, BPD, dan Masyarakat Kecamatan Gandusari		3.860.700,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan						5.059.355,00					Aparatur Kecamatan Gandusari, Perangkat Desa, BPD, dan Masyarakat Kecamatan Gandusari		3.860.700,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00						2 Dokumen	1.930.300,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.059.355,00						12 Dokumen	1.930.400,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						3.000.000,00							1.930.300,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Dokumen	1.930.300,00	KECAMATAN GANDUSARI
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						2.059.355,00							1.930.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.059.355,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	1.930.400,00	KECAMATAN GANDUSARI
		KECAMATAN BENDUNGAN						**2.200.014.709,00**							**2.305.478.200,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.200.014.709,00**							**2.305.478.200,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.200.014.709,00**							**2.305.478.200,00**	
315.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.165.114.709,00**							**2.204.513.900,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Bendungan						***2.159.114.709,00***							***2.204.513.900,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.159.114.709,00						100 %	2.204.513.900,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.159.114.709,00						100 %	2.204.513.900,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98.26 %		98.26 %	98.26 %	2.159.114.709,00						98.26 %	2.204.513.900,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.500.000,00					Aparatur Asn kecamatan		7.962.749,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8.500.000,00					Aparatur Asn kecamatan		7.962.749,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	6.000.000,00						18 Dokumen	4.294.749,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	2.500.000,00						46 Laporan	3.668.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6.000.000,00							4.294.749,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		18 Dokumen	4.294.749,00	KECAMATAN BENDUNGAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						2.500.000,00							3.668.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	2.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		46 Laporan	3.668.000,00	KECAMATAN BENDUNGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.076.444.499,00					Aparatur Asn kecamatan		2.081.093.070,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.076.444.499,00					Aparatur Asn kecamatan		2.081.093.070,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen		38 Dokumen	38 Dokumen	44.880.000,00						38 Dokumen	44.806.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	323 Dokumen		123 Dokumen	323 Dokumen	200.000,00						323 Dokumen	934.370,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan		15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.031.364.499,00						15 Orang/bulan	2.035.352.700,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.031.364.499,00							2.035.352.700,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan		15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.031.364.499,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Orang/bulan	2.035.352.700,00	KECAMATAN BENDUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						44.880.000,00							44.806.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	38 Dokumen		38 Dokumen	38 Dokumen	44.880.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		38 Dokumen	44.806.000,00	KECAMATAN BENDUNGAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						200.000,00							934.370,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	323 Dokumen		123 Dokumen	323 Dokumen	200.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		323 Dokumen	934.370,00	KECAMATAN BENDUNGAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						600.000,00					Aparatur Asn kecamatan		400.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						600.000,00					Aparatur Asn kecamatan		400.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	52 Dokumen		52 Dokumen	52 Dokumen	600.000,00						52 Dokumen	400.000,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						600.000,00							400.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	52 Dokumen		52 Dokumen	52 Dokumen	600.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		52 Dokumen	400.000,00	KECAMATAN BENDUNGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						25.200.000,00					Aparatur Asn kecamatan		34.277.569,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						25.200.000,00					Aparatur Asn kecamatan		34.277.569,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.200.000,00						12 Laporan	5.880.804,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	20.000.000,00						3 Paket	28.396.765,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							28.396.765,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		3 Paket	28.396.765,00	KECAMATAN BENDUNGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						5.200.000,00							5.880.804,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	5.200.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	5.880.804,00	KECAMATAN BENDUNGAN
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.849.210,00					Aparatur Asn kecamatan		17.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.849.210,00					Aparatur Asn kecamatan		17.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	7.849.210,00						2 Unit	17.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.849.210,00							17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	7.849.210,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	17.000.000,00	KECAMATAN BENDUNGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.521.000,00					Aparatur Asn kecamatan		18.650.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						20.521.000,00					Aparatur Asn kecamatan		18.650.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	20.521.000,00						36 Laporan	18.650.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						20.521.000,00							18.650.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	20.521.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	18.650.000,00	KECAMATAN BENDUNGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.000.000,00					Aparatur Asn kecamatan		45.130.512,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						26.000.000,00					Aparatur Asn kecamatan		45.130.512,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	17.000.000,00						10 Unit	20.033.637,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	6.000.000,00						5 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.000.000,00						1 Unit	15.096.875,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						17.000.000,00							20.033.637,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	17.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Unit	20.033.637,00	KECAMATAN BENDUNGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	6.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN BENDUNGAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.000.000,00							15.096.875,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	15.096.875,00	KECAMATAN BENDUNGAN
316.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**23.400.000,00**							**72.373.300,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Bendungan						***23.400.000,00***							***72.373.300,00***	
			999.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	23.400.000,00						100 %	72.373.300,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.000.000,00					Masyarakat		25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						10.000.000,00					Masyarakat		25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	25.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Bendungan || Desa Dompyong || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN BENDUNGAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						500.000,00					Masyarakat		7.237.910,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						500.000,00					Masyarakat		7.237.910,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00						12 Laporan	7.237.910,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						500.000,00							7.237.910,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Bendungan || Desa Dompyong || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	7.237.910,00	KECAMATAN BENDUNGAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						12.900.000,00					Masyarakat		40.135.390,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						12.900.000,00					Masyarakat		40.135.390,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.900.000,00						12 Laporan	40.135.390,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						12.900.000,00							40.135.390,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	12.900.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	40.135.390,00	KECAMATAN BENDUNGAN
317.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.000.000,00**							**5.588.000,00**	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Bendungan						***2.000.000,00***							***5.588.000,00***	
			999.Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	2.000.000,00						100 %	5.588.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2.000.000,00					Masyarakat		5.588.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2.000.000,00					Masyarakat		5.588.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00						12 Laporan	5.588.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.000.000,00							5.588.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		12 Laporan	5.588.000,00	KECAMATAN BENDUNGAN
318.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**3.500.000,00**							**12.207.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Bendungan						***3.500.000,00***							***12.207.400,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	3.500.000,00						100 %	12.207.400,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						3.500.000,00					Masyarakat		12.207.400,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						3.500.000,00					Masyarakat		12.207.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00						12 Laporan	4.436.915,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.500.000,00						6 Laporan	7.770.485,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						2.000.000,00							4.436.915,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	4.436.915,00	KECAMATAN BENDUNGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.500.000,00							7.770.485,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.500.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		6 Laporan	7.770.485,00	KECAMATAN BENDUNGAN
319.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**6.000.000,00**							**10.795.600,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Bendungan						***6.000.000,00***							***10.795.600,00***	
			999.Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %		100 %	100 %	6.000.000,00						100 %	10.795.600,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						6.000.000,00					Masyarakat		10.795.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						6.000.000,00					Masyarakat		10.795.600,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00						12 Dokumen	4.786.350,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00						12 Dokumen	6.009.250,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						4.000.000,00							4.786.350,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	4.786.350,00	KECAMATAN BENDUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						2.000.000,00							6.009.250,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	6.009.250,00	KECAMATAN BENDUNGAN
		KECAMATAN KARANGAN						**2.612.909.278,00**							**2.739.792.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**2.612.909.278,00**							**2.739.792.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**2.612.909.278,00**							**2.739.792.500,00**	
320.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**2.571.592.378,00**							**2.663.016.500,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah Kecamatan Karangan						***2.570.810.378,00***							***2.663.016.500,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	2.570.810.378,00						100 %	2.663.016.500,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	2.570.810.378,00						100 %	2.663.016.500,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	98 %		98 %	98 %	2.570.810.378,00						98 %	2.663.016.500,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.564.000,00					ASN Kecamatan Karangan		1.318.180,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.564.000,00					ASN Kecamatan Karangan		1.318.180,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	782.000,00						15 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	782.000,00						46 Laporan	318.180,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						782.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	782.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		15 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN KARANGAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						782.000,00							318.180,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan		46 Laporan	46 Laporan	782.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		46 Laporan	318.180,00	KECAMATAN KARANGAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.476.693.098,00					ASN Kecamatan Karangan		2.552.066.360,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2.476.693.098,00					ASN Kecamatan Karangan		2.552.066.360,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	43.058.750,00						36 Dokumen	52.066.360,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan		23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.433.634.348,00						23 Orang/bulan	2.500.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2.433.634.348,00							2.500.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan		23 Orang/bulan	23 Orang/bulan	2.433.634.348,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		23 Orang/bulan	2.500.000.000,00	KECAMATAN KARANGAN
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						43.058.750,00							52.066.360,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	43.058.750,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Dokumen	52.066.360,00	KECAMATAN KARANGAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.772.790,00					ASN Kecamatan Karangan		44.097.793,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						39.772.790,00					ASN Kecamatan Karangan		44.097.793,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.669.000,00						12 Laporan	8.718.446,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.549.000,00						2 Paket	3.836.700,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	14.886.600,00						2 Paket	14.724.300,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.906.990,00						4 Paket	3.176.147,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.921.000,00						2 Paket	9.684.200,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.840.200,00						2 Paket	3.958.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.921.000,00							9.684.200,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.921.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	9.684.200,00	KECAMATAN KARANGAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.840.200,00							3.958.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.840.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	3.958.000,00	KECAMATAN KARANGAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.549.000,00							3.836.700,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	3.549.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	3.836.700,00	KECAMATAN KARANGAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.906.990,00							3.176.147,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.906.990,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	3.176.147,00	KECAMATAN KARANGAN
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						14.886.600,00							14.724.300,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	14.886.600,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Paket	14.724.300,00	KECAMATAN KARANGAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						6.669.000,00							8.718.446,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.669.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	8.718.446,00	KECAMATAN KARANGAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						21.720.390,00					ASN Kecamatan Karangan		38.298.260,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						21.720.390,00					ASN Kecamatan Karangan		38.298.260,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	21.720.390,00						24 Laporan	38.298.260,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						21.720.390,00							38.298.260,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	21.720.390,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		24 Laporan	38.298.260,00	KECAMATAN KARANGAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						31.842.100,00					ASN Kecamatan Karangan		27.235.907,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						31.842.100,00					ASN Kecamatan Karangan		27.235.907,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	20.730.300,00						12 Unit	17.235.907,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit		46 Unit	46 Unit	7.150.400,00						46 Unit	6.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	3.961.400,00						2 Unit	4.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						20.730.300,00							17.235.907,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	20.730.300,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Unit	17.235.907,00	KECAMATAN KARANGAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.150.400,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit		46 Unit	2 Unit	7.150.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		46 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN KARANGAN
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3.961.400,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	3.961.400,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	4.000.000,00	KECAMATAN KARANGAN
321.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**20.348.200,00**							**30.897.600,00**	
		Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Masyarakat Kecamatan Karangan						***20.348.200,00***							***30.897.600,00***	
			999.Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	20.348.200,00						100 %	30.897.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan						12.060.000,00					Aparatur Kecamatan Karangan, Desa, BPD, Intansi Terkait dan Masyarakat Kecamatan Karangan		19.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						12.060.000,00					Aparatur Kecamatan Karangan, Desa, BPD, Intansi Terkait dan Masyarakat Kecamatan Karangan		19.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.060.000,00						2 Laporan	19.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						12.060.000,00							19.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.060.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	19.000.000,00	KECAMATAN KARANGAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						834.200,00					Aparatur Kecamatan Karangan, Perangkat Desa dan Masyarakat Kecamatan Karangan		1.000.000,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan						834.200,00					Aparatur Kecamatan Karangan, Perangkat Desa dan Masyarakat Kecamatan Karangan		1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	834.200,00						12 Laporan	1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						834.200,00							1.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	834.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	1.000.000,00	KECAMATAN KARANGAN
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.454.000,00					Aparatur Kecamatan Karangan, PKK, Karang Taruna, Karang Werda, Kelompok Seni Budaya dan Olahraga, Intansi Terkait dan Masyarakat Kecamatan Karangan		10.897.600,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						7.454.000,00					Aparatur Kecamatan Karangan, PKK, Karang Taruna, Karang Werda, Kelompok Seni Budaya dan Olahraga, Intansi Terkait dan Masyarakat Kecamatan Karangan		10.897.600,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.454.000,00						12 Laporan	10.897.600,00	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						7.454.000,00							10.897.600,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.454.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	10.897.600,00	KECAMATAN KARANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
322.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**2.218.200,00**							**1.772.700,00**	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat Kecamatan Karangan						***2.218.200,00***							***1.772.700,00***	
			999.Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	2.218.200,00						100 %	1.772.700,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2.218.200,00					Organisasi Perempuan dan UMKM Kecamatan Karangan		1.772.700,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						2.218.200,00					Organisasi Perempuan dan UMKM Kecamatan Karangan		1.772.700,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.218.200,00						2 Laporan	1.772.700,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						2.218.200,00							1.772.700,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.218.200,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Laporan	1.772.700,00	KECAMATAN KARANGAN
323.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**7.395.500,00**							**33.056.500,00**	
		Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Karangan						***7.395.500,00***							***33.056.500,00***	
			999.Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	7.395.500,00						100 %	33.056.500,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						7.395.500,00					Aparatur Kecamatan Karangan, TNI, POLRI dan Masyarakat Kecamatan Karangan		33.056.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						7.395.500,00					Aparatur Kecamatan Karangan, TNI, POLRI dan Masyarakat Kecamatan Karangan		33.056.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.491.500,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.904.000,00						2 Laporan	13.056.500,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						5.491.500,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.491.500,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	20.000.000,00	KECAMATAN KARANGAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						1.904.000,00							13.056.500,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.904.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Laporan	13.056.500,00	KECAMATAN KARANGAN
324.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**11.355.000,00**							**11.049.200,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kecamatan Karangan						***11.355.000,00***							***11.049.200,00***	
			999.Persentase Dokumen/ Laporan Perencanaan, Penganggaran dan pelaporan Desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %		100 %	100 %	11.355.000,00						100 %	11.049.200,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						11.355.000,00					Pemerintah Desa		11.049.200,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						11.355.000,00					Pemerintah Desa		11.049.200,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.784.000,00						12 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.571.000,00						12 Dokumen	5.049.200,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa						3.784.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.784.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN KARANGAN
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						7.571.000,00							5.049.200,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.571.000,00	Provinsi Jawa Timur || Kab. Trenggalek || Kecamatan Karangan || Desa Karangan || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	5.049.200,00	KECAMATAN KARANGAN
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**8.482.263.306,00**							**7.825.440.500,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**8.482.263.306,00**							**7.825.440.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**8.482.263.306,00**							**7.825.440.500,00**	
325.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**3.483.076.486,00**							**3.845.914.300,00**	
		Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah						***3.454.576.486,00***							***3.774.414.300,00***	
			999.Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	3.454.576.486,00						100 %	3.774.414.300,00	
			999.Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	3.454.576.486,00						100 %	3.774.414.300,00	
			999.Persentase nilai aset dalam kondisi baik	96 %		96 %	96 %	3.454.576.486,00						96 %	3.774.414.300,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.500.000,00					ASN		6.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.500.000,00					ASN		6.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	16 Dokumen	4.000.000,00						16 Dokumen	3.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53 Laporan		53 Laporan	53 Laporan	3.500.000,00						53 Laporan	3.000.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.000.000,00							3.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen		16 Dokumen	15 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		16 Dokumen	3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3.500.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	53 Laporan		53 Laporan	57 Laporan	3.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		53 Laporan	3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.251.296.010,00					ASN		3.594.778.300,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3.251.296.010,00					ASN		3.594.778.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Dokumen		37 Dokumen	37 Dokumen	63.580.000,00						37 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen		250 Dokumen	250 Dokumen	1.000.000,00						250 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.000.000,00						36 Laporan	1.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3.185.716.010,00						30 Orang/bulan	3.547.778.300,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3.185.716.010,00							3.547.778.300,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan		30 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3.185.716.010,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		30 Orang/bulan	3.547.778.300,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						63.580.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	37 Dokumen		37 Dokumen	40 Dokumen	63.580.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		37 Dokumen	45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	250 Dokumen		250 Dokumen	250 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		250 Dokumen	1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	1.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		36 Laporan	1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						9.000.000,00					ASN		15.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						9.000.000,00					ASN		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	9.000.000,00						27 Laporan	15.000.000,00	
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						9.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	9.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		27 Laporan	15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.500.000,00					ASN		5.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						3.500.000,00					ASN		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	54 Dokumen		54 Dokumen	54 Dokumen	1.000.000,00						54 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	2.500.000,00						1 Orang	2.000.000,00	
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						1.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	54 Dokumen		54 Dokumen	54 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		54 Dokumen	3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						2.500.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	2.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Orang	2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						73.280.476,00					ASN		61.636.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						73.280.476,00					ASN		61.636.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	2.000.000,00						12 Dokumen	1.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00						12 Laporan	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.000.000,00						4 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00						4 Paket	9.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.780.476,00						4 Paket	6.136.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00						4 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.500.000,00						4 Paket	3.500.000,00	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.500.000,00							3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	3.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.780.476,00							6.136.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	4.780.476,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	6.136.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						20.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	20.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		4 Paket	9.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		0 Dokumen	350 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Dokumen	1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.000.000,00					ASN		26.000.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						8.000.000,00					ASN		26.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	5.000.000,00						1 Unit	11.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		3 Unit	5 Unit	3.000.000,00						5 Unit	15.000.000,00	
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5.000.000,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		3 Unit	7 Unit	3.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		5 Unit	15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73.500.000,00					ASN		52.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						73.500.000,00					ASN		52.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	51.500.000,00						48 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00						12 Laporan	22.000.000,00	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						51.500.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	51.500.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		48 Laporan	30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						22.000.000,00							22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	22.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		12 Laporan	22.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						57.000.000,00					ASN		85.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						57.000.000,00					ASN		85.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00						1 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit		19 Unit	19 Unit	40.000.000,00						19 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		5 Unit	10 Unit	1.000.000,00						10 Unit	1.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	7.000.000,00						25 Unit	10.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	4.000.000,00						2 Unit	4.000.000,00	
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						40.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit		19 Unit	17 Unit	40.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		19 Unit	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						1.000.000,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		5 Unit	10 Unit	1.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		10 Unit	1.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit		25 Unit	25 Unit	7.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		25 Unit	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		1 Unit	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	4.000.000,00	Kab. Trenggalek	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Ekologi dan Data		2 Unit	4.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
326.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**646.300.000,00**							**786.463.400,00**	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan						***646.300.000,00***							***786.463.400,00***	
			999.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100 %		100 %	100 %	646.300.000,00						100 %	786.463.400,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						646.300.000,00					Pelajar, Masyarakat Umum, ASN, Toga dan Tomas		786.463.400,00	
		Terlaksananya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa						646.300.000,00					Pelajar, Masyarakat Umum, ASN, Toga dan Tomas		786.463.400,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	40 Keluarga		40 Keluarga	40 Keluarga	4.000.000,00						40 Keluarga	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	100.000.000,00						1000 Orang	111.463.400,00	
			Jumlah Paskibraka	74 Orang		74 Orang	74 Orang	535.000.000,00						74 Orang	650.000.000,00	
			Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	72 Orang		72 Orang	72 Orang	7.300.000,00						72 Orang	15.000.000,00	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						100.000.000,00							111.463.400,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	100.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		1000 Orang	111.463.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara						4.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	40 Keluarga		40 Keluarga	20 Keluarga	4.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		40 Keluarga	10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka						535.000.000,00							650.000.000,00	
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	74 Orang		74 Orang	74 Orang	535.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		74 Orang	650.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila						7.300.000,00							15.000.000,00	
		Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	72 Orang		72 Orang	72 Orang	7.300.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		72 Orang	15.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
327.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**2.246.684.050,00**							**1.650.000.000,00**	
		Meningkatnya etika dan budaya politik						***2.246.684.050,00***							***1.650.000.000,00***	
			999.Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	24 %		21 %	22 %	2.246.684.050,00						22 %	1.650.000.000,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						2.246.684.050,00					Parpol, Masyarakat Umum, Pemilih Pemula, Toga dan Tomas		1.650.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan politik dan etika budaya politik						2.246.684.050,00					Parpol, Masyarakat Umum, Pemilih Pemula, Toga dan Tomas		1.650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	433126 Orang		433126 Orang	433126 Orang	2.211.684.050,00					433126 Orang	1.600.000.000,00	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						2.211.684.050,00							1.600.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	433126 Orang		433126 Orang	150 Orang	2.211.684.050,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		433126 Orang	1.600.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Terlaksananya Pendidikan politik dan etika budaya politik						2.246.684.050,00					Parpol, Masyarakat Umum, Pemilih Pemula, Toga dan Tomas		1.650.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	-	35.000.000,00						-	50.000.000,00	
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						35.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	-		-	125 Orang	35.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
328.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**176.785.000,00**							**65.000.000,00**	
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan						***176.785.000,00***							***65.000.000,00***	
			999.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	44 Persentase		40 Persentase	41 Persentase	176.785.000,00						42 Persentase	65.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						176.785.000,00					Ormas yang aktif		65.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas						176.785.000,00					Ormas yang aktif		65.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang		100 Orang	50 Orang	166.785.000,00						50 Orang	45.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						166.785.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	50 Orang		100 Orang	50 Orang	166.785.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		50 Orang	45.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas						176.785.000,00					Ormas yang aktif		65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	-	10.000.000,00						-	20.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	-		-	15 Orang	10.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		-	20.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
329.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**373.000.000,00**							**327.346.400,00**	
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat						***373.000.000,00***							***327.346.400,00***	
			999.Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100 %		100 %	100 %	373.000.000,00						100 %	327.346.400,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						373.000.000,00					Toga, Pelajar dan ASN		327.346.400,00	
		Terlaksananya Peran Serta Masyarakat dalam Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang disusun						373.000.000,00					Toga, Pelajar dan ASN		327.346.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan		0 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00						3 Laporan	4.910.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	265 Orang		265 Orang	265 Orang	370.000.000,00						265 Orang	322.436.400,00	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						370.000.000,00							322.436.400,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	265 Orang		265 Orang	265 Orang	370.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		265 Orang	322.436.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						3.000.000,00							4.910.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan		0 Laporan	3 Laporan	3.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		3 Laporan	4.910.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
330.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**1.556.417.770,00**							**1.150.716.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan						***1.556.417.770,00***							***1.150.716.400,00***	
			999.Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100 %		100 %	100 %	1.556.417.770,00						100 %	1.150.716.400,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						1.556.417.770,00					Toga,Tomas, Perguruan Pencak Silat, Anggota Intel TNI , POLRI, Kejaksaan dan BIN		1.150.716.400,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Pelaporan Situasi Ipoleksosbud dan Deteksi Dini						1.556.417.770,00					Toga,Tomas, Perguruan Pencak Silat, Anggota Intel TNI , POLRI, Kejaksaan dan BIN		1.150.716.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.700.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	181 Orang		181 Orang	181 Orang	1.330.717.770,00						181 Orang	950.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	233 Orang		233 Orang	233 Orang	125.000.000,00						233 Orang	100.716.400,00	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						125.000.000,00							100.716.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	233 Orang		233 Orang	256 Orang	125.000.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		233 Orang	100.716.400,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						1.330.717.770,00							950.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	181 Orang		181 Orang	278 Orang	1.330.717.770,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		181 Orang	950.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						100.700.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.700.000,00	Kab. Trenggalek	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan Berbasis Komunitas		2 Dokumen	100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H							**1.794.172.445.366,00**							**1.583.283.219.598.012,00**	

LAMPIRAN V

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (DURKP) KECAMATAN TAHUN 2027

RKPD

KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2027

DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KECAMATAN MENURUT PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2027

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1	2657657	#KEREN Bantuan sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Lele) (Stunting)	Anak stunting di Desa Sukokidul masih tergolong tinggi, tambahan makanan bantuan dari APBDes masih terbatas sehingga membutuhkan sumber Gizi lain sekaligus sebagai tambahan pendapatan keluarga dengan demikian masyarakat yang mempunyai anggota stunting bisa memenuhi kebutuhan gizi anakknya sehingga bisa lepas dari status stunting.	Seluruh wilayah sukokidul, Kab. Trenggalek	Pule	Sukokidul	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
2	2657917	#KEREN Penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Desa/Kelurahan	Pemahaman masyarakat terhadap pengarusutamaan gender di desa sukokidul masih tergolong rendah.	Seluruh wilayah desa sukokidul, Kab. Trenggalek	Pule	Sukokidul	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3	2669044	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan Antar Kabupaten yang berada di (plumpit) RT 56 RW 12 Rusak Berat dan sangat memerlukan Peningkatan jalan sehingga akses ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat bisa berjalan dengan lancar. Panjang jalan 2000 m x 4 meter	RT 56 RW 12 Dusun Gembes, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
4	2669061	#MPP Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Kondisi saluran irigasi saat ini sudah banyak yang rusak, perlu adanya Kegiatan Rehabilitasi Jalur Irigasi tersebut. Dengan Ukuran Panjang 455 M X Lebar atas. 0,70 x Lebar bawah 0,50 m X Tinggi 0,90 M. Saat musim kemarau pengairan irigasi ini tidak sampai ke lokasi sawah yang ada di paling selatan jalur irigasi ini dikarenakan air meresap kedalam tanah, sehingga petani mengalami gagal panen bahkan ada yang tidak di tanami padi maupun polowijo.	RT 45 RW 11 Dusun Gembes Desa Masaran, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5	2670842	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Akses Jalan Menuju lembaga Pendidikan SMAN 1 Munjungan, Akses Kesehatan, Ekonomi saat ini sudah mengalami kerusakan yang parah perlu adanya peningkatan jalan kembali. Panjang Jalan 700 m x 4 M	RT 07 RW 02 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6	2671121	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan penghubung antar Kecamatan Munjungan-Dongko di Desa Besuki-Salam Wates merupakan akses utama Munjungan-Dongko dan merupakan jalan alternatif, kondisi jalan yang rusak parah dapat membahayakan pengguna jalan.	Besuki (Munjungan)-Salam Wates (Dongko), Kab. Trenggalek	Munjungan	Besuki	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	2671395	#MPP Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Puskesmas pembantu yang ada sudah mengalami banyak kerusakan di struktur bangun dn struktur atap sehingga memerlukan rehabilitasi	Puskesmas pembantu Desa Sukorame RT. 022 RW. 011, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorame	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
8	2671699	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan utama antara Desa Sukokidul - Nglinggis sepanjang 3000m kondisinya saat ini rusak berat banyak lobang dan kerikil bersarakan sehingga membahayakan pengguna jalan.	Sepanjang jalan Sukokidul - Nglinggis, Kab. Trenggalek	Pule	Sukokidul	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
9	2671971	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan antar desa antara Desa Sukokidul - Jombok sepanjang 1500m kondisi saat ini rusak berat, banyak lobang dan kerikil bersarakan sehingga membahayakan pengguna jalan.	RT 11 sampai dengan RT 12 Dusun Krajan (Sepanjang Jalan Sukokidul - Jombok), Kab. Trenggalek	Pule	Sukokidul	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10	2672391	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi Ruas Jalan Pogalan - Ngulanwetan mengalami Rusak Berat yang mengakibatkan tersendatnya Transportasi masyarakat	Ruas Jalan Pogalan - Ngulanwetan Berada di RT 02 RW 01 Desa Ngulanwetan, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngulanwetan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
11	2672799	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Pada saat hujan deras air menggenang di jalan raya karena tidak adanya drainase	Jl.Mastrip Dusun Dawuhan RT.007 RW.002 Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek (8°00'47.0"S 111°44'16.0"E), Kab. Trenggalek	Trenggalek	Dawuhan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
12	2672889	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Kondisi jalan yang mengalami kerusakan / berlubang dan merupakan Ruas Jalan Kertosono - Banteng No. Ruas 005 membutuhkan perbaikan aspal jalan dengan volume p: 350m x l: 5m.	Dusun Salam RT. 002, RW. 001, Kab. Trenggalek	Panggul	Sawahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
13	2673353	#MPP Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Pompa air dan kabel pompa air untuk KPSPAM Banyu Suko Desa Sukokidul saat ini sudah lemah dan rapuh (sudah sering di lakukan perbaikan) sehingga untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat memerlukan tenaga listrik yang besar sehingga kurang efisien. Oleh karenanya KPSPAM membutuhkan bantuan pengadaan Pompa Air beserta Kabel Listriknya.	Dusun Genting, Kab. Trenggalek	Pule	Sukokidul	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
14	2674176	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan Usaha Tani di RT 019 Dusun Jompong saat ini masih berupa jalan tanah, jika musim hujan menjadi licin dan becek sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Tentunya ini sangat mengganggu jalanya pertanian di Desa Sukokidul.	RT 019 Dusun Jompong, Kab. Trenggalek	Pule	Sukokidul	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
15	2675070	#KEREN Pendampingan, Advokasi dan Edukasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Upaya terstruktur untuk mewujudkan desa yang aman, adil gender, dan memberikan ruang lebih bagi perempuan serta perlindungan maksimal bagi anak mohon bantuan pendampingan, advokasi dan edukasi desa ramah perempuan dan peduli anak (Musrena Keren)	Desa Sawahan, Kab. Trenggalek	Panggul	Sawahan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	2675832	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan Usaha Tani (Jalan Menuju Sawah) sepanjang 125m di RT 016 Dusun Krajan saat ini masih berupa jalan tanah, jika musim hujan menjadi licin dan becek sehingga tidak bisa dilalui kendaraan. Tentunya ini sangat mengganggu jalanya roda pertanian di Desa Sukokidul.	RT 016 RW 006 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Pule	Sukokidul	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
17	2676127	#MPP Restorasi Arsip	Di Desa Ngadisuko Arsip Letter C dalam keadaan rusak akibat di makan usia,sehingga perlu direstorasi	RT 13 RW 05 Dusun Telan, Kab. Trenggalek	Durenan	Ngadisuko	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
18	2676214	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tembok Penahan Tebing di jalan Kabupaten yang berada di RT 021 Dusun Jompong (Ruas Jalan Sukokidul - Nglingis) saat ini mengalami longsor, sangat membahakan pengguna jalan juga rumah di atasnya.	RT 021 RW 008 Dusun Jompong, Kab. Trenggalek	Pule	Sukokidul	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
19	2676261	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Seiring dengan di bangunnya gedung baru BUMDes, maka perlu ditingkatkan kapasitas pengurus BUMDes untuk meningkatkan pengelolaan administrasi dan manajemen menjadi lebih baik	RT 13 RW 05 Dsn Telan, Kab. Trenggalek	Durenan	Ngadisuko	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
20	2676825	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan Daerah (Kser - Ngadimulyo) merupakan jalur utama bagi warga Desa Ngerdani yang mendukung perekonomian dan akses pendidikan yang saat ini kondisinya rusak berat sehingga sangat menghambat akases trasportasi warga masyarakat terutama pada musim penghujan untuk itu sangat dibutuhkan pebaikan jalan tersebut (Rabat Beton Penuh) sepanjang 5000 meter dengan harapan untuk kelancaran akases perekoniman masyarakat	RT 014 Dusun Krajan - RT 028 Dusun Sobo, Kab. Trenggalek	Dongko	Ngerdani	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21	2678073	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Ruas Jalan Kabupaten Dukuh-Slawe dengan panjang 1500 m dan lebar 4 m saat ini dalam kondisi rusak berat. Terdapat banyak titik jalan yang rusak dan berlubang sehingga menghambat arus transportasi dan membahayakan pengguna jalan yang melewati jalur tersebut. Jalur tersebut merupakan jalur perekonomian dan akses pendidikan utama masyarakat Desa Dukuh serta Dusun Ngrancah Desa Sawahan. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan jalan kondisi rusak berat dengan panjang 1500 m dan lebar 4 m.	Ruas Jalan Kabupaten Dukuh-Slawe yang meliputi wilayah RT.004 RW.001 Dusun Ponggok sampai dengan RT.010 RW.003 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
22	2679166	#KEREN Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Kurangnya alat bantu kursi roda untuk masyarakat disabilitas	1. Nama : Rohadi, RT : 38, RW : 10, NIK : 3503130107990004, DTSEN : 2, Alat bantu kursi roda 1 buah, Kab. Trenggalek	Durenan	Malasan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
23	2679214	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Sering terjadi karena jalan berlubang yang menimbulkan kecelakaan	Dusun Lotekol RT 33 - RT 40 No Ruas. 35.03.306 Nama Ruas Jalan Tekol - Malasan, Kab. Trenggalek	Durenan	Malasan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
24	2679339	#MPP Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Kurang lancarnya air di sawah yang disebabkan saluran	Dusun Compok RT 13 RW 04, Kab. Trenggalek	Durenan	Malasan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
25	2682744	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Banyak jalan berlobang sehingga sering terjadi kecelakaan diwaktu musim penghujan	Dusun Durenan Rt 004/005/006 Rw 003, Kab. Trenggalek	Durenan	Durenan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
26	2682787	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Banyak Jalan - jalan dengan kondisi berlubang ,mengingat jalan tersebut jalur Utama roda Perekonomian terutama diwaktu pasar Hewan Buka	Dusun Payaman Rt 008 Rw 004, Kab. Trenggalek	Durenan	Durenan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
27	2682880	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalur utama antar kabupaten untuk sara ,prasarana transportasi	simpang 4 Dusun Tugu Bancang Desa Durenan - Suwaluh (Batas tulungagung), Kab. Trenggalek , Kab. Trenggalek	Durenan	Durenan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
28	2682897	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Gorong-gorong)	Kondisi rusak berat dan berlubang	Dusun payaman Rt 008 Rw 004 Desa Durenan , Kab. Trenggalek	Durenan	Durenan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
29	2682945	#MPP Pengadaan Mesin Pemilah Sampah	Belum Punya Fasilitas Mesin Pemilah sampah seningga di TPU menimbulkan bau yang tidak sedap	BUMDES Desa Durenan , Kab. Trenggalek	Durenan	Durenan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
30	2682968	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	jalan Masih belum tersentuh pembangunan sama sekali sehingga jalan tidak bisa dilewati di waktu musim penghujan	Dusun Durenan Rt 06 Rw 003 dan Dusun Payaman Rt 008 Rw 004, Kab. Trenggalek	Durenan	Durenan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
31	2683005	#MPP Restorasi Arsip	kondisi sekarang sangat tidak Layak	Pemerintah Desa Durenan, Kab. Trenggalek	Durenan	Durenan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
32	2683819	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan poros desa Duren adalah fasilitas penting bagi masyarakat yang sangat berpengaruh pada kegiatan dan aktivitas di bidang pendidikan, perdagangan, pekerjaan, dan jalan penghubung antar desa.Jalan poros desa duren mengalami kerusakan yang sangat parah, banyaknya lubang sangat berpengaruh bagi keselamatan masyarakat, pada musim hujan jalan berlubang menjadi genangan air yang dapat membuat pengguna jalan jatuh atau terpeleset karena jalan berlubang dan koral bekas aspal lama.	Jalan poros desa Duren RT.01 RW.01 sampai RT.07 RW.03 Dusun Gajah dan RT.15 RW.05 sampai RT.15 RW.06 sampai RT.16 RW.06 , Kab. Trenggalek	Tugu	Duren	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
33	2683825	#MPP Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah PAUD/ Sederajat	Bangunan TK Dharma Wanita 1 Duren sudah mengalami kerusakan, untuk menjaga keselamatan guru dan peserta didik maka diperlukan adanya rehabilitasi gedung TK	TK Dharma Wanita 1 Duren RT.05 RW.02 Dusun Gajah, Kab. Trenggalek	Tugu	Duren	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
34	2685644	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Ruas jalan Ngembel - Jajar merupakan jalan utama masyarakat Desa Ngembel untuk menunjang perekonomian, mengakses fasilitas pendidikan serta kesehatan dasar. Namun, saat ini sepanjang 3.100 m dengan lebar 4,5 m jalan dalam kondisi rusak berat, dengan medan curam dan berkelok, sehingga sangat berbahaya bagi pengendara. Karenanya, sangat dibutuhkan peningkatan pada ruas jalan ini. Ruas jalan ini termasuk jalan Kabupaten dengan Nomor Ruas 35.3.174 dengan Nama Ruas Jajar-Ngembel.	Desa Ngembel Kecamatan Watulimo - Desa Jajar Kecamatan Gandusari, Kab. Trenggalek	Watulimo	Ngembel	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
35	2686266	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Adanya kerusakan berat di ruas jalan simpang 4 pakis - gador (SK JALAN th 2025 NO RUAS 35.03.315) yang merupakan jalur utama antar desa. Jalan ini diketahui dulunya adalah aspal bagus. Namun karena kondisi jalan tersebut merupakan jalur utama kendaraan bermuatan berat sehari-hari, jalan ini cepat rusak. diketahui karena belum pernah mendapat perbaikan, diketahui dari pihak warga melakukan pengurugan tanah dengan tahan pilihan dengan harapan jalan tersebut dapat dilewati.	RT 12 Rw 04 Desa Pakis kecamatan durenan kabupaten trenggalek, Kab. Trenggalek	Durenan	Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
36	2686448	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Masih terdapatnya Ruas jalan (JALAN TH 2025 NO ruas jalan) 35.03.313 di areal persawahan di ruas jalan Kabupaten desa pakis yang saat ini tergerus air hujan dan tidak mempunyai bahu jalan karena tidak adanya tembok penahan jalan. Hal ini mengakibatkan menyempitnya jalan karena bahu jalan yang ambrol terkena areal persawahan. apabila musim panen tiba, areal tersebut lalu lintas utama pendidikan dan perekonomian antar desa.	RT 07 RW 03 DESA PAKIS KEC DURENAN, Kab. Trenggalek	Durenan	Pakis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
37	2686651	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Gorong-gorong)	Gorong-gorong saluran drainase kondisi rusak, berada di bawah jalan kabupaten penghubung ke antar Desa, akses ke Sekolah fasilitas umun	DUSUN RANDU RT 9 RW 4 DESA KENDALREJO , Kab. Trenggalek	Durenan	Kendalrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
38	2686767	#MPP Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Belum terdapat penerangan jalan umum yang sesuai standar, jalan rawan kecelakaan dan kriminalitas jalan penghubung antar desa, kecamatan pogalan-durenan dan merupakan jalan alternatif ke wilayah kecamatan dan kabupaten lainnya	Dusun Randu RT 14 RW 6 Desa Kendalrejo , Kab. Trenggalek	Durenan	Kendalrejo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
39	2686800	#MPP Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Rusaknya kondisi jaringan irigasi areal persawahan yang terdapat di daerah PERTANIAN DESA PAKIS rt 05 Rw 02 Desa pakis , areal persawahan ini merupakan jalan pembuangan air hujan.	- JITUT rt 05 rw 02 desa pakis kecamatan durenan - PANJANG 70 METER LEBAR 1,3 METER, Kab. Trenggalek	Durenan	Pakis	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
40	2686805	#MPP Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Di Dusun Tawing terdapat Dam Kedung Sobrah yang airnya dimanfaatkan untuk mengairi area sawah Tawing. Akan tetapi akibat banyaknya kerusakan saluran, air tidak mencapai sasaran sehingga panen kurang maksimal bahkan gagal panen. Untuk itu besar harapan kami agar saluran tersebut dapat direhabilitasi, sehingga bisa meningkatkan ekonomi petani masyarakat.	RT 28 RW 08 Dusun Tawing, Kab. Trenggalek	Durenan	Ngadisuko	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
41	2686853	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi jalan di wilayah tersebut saat ini mengalami rusak karena banyak yang berlubang. Hal ini menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi terganggu, baik dalam hal mobilitas sehari-hari, distribusi hasil pertanian, maupun akses menuju fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan layanan kesehatan. Kerusakan jalan juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas serta mempercepat kerusakan kendaraan warga. Sehingga diperlukan pembangunan jalan aspal , dengan panjang kurang lebih 1km.	RT.13-RT.22 Dusun Dempok, Kab. Trenggalek	Durenan	Karanganom	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
42	2686870	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Badan Jalan Semakin Sempit Karena Tergerus Air	RT 02-RT 03 Desa Sumberejo, Kab. Trenggalek	Durenan	Sumberejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
43	2687018	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan yang menuju area persawahan di Dusun Tawing masih berupa tanah, sehingga ketika musim hujan tiba jalan menjadi licin. Akibatnya untuk mengangkut hasil panen kesulitan. Untuk itu besar harapan kami agar dibangun sehingga mempermudah transportasinya.	RT 21 RW 07 Dsn Tawing, Kab. Trenggalek	Durenan	Ngadisuko	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
44	2687099	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan penghubung antar Desa Sumbergayam dengan Desa Pakis yang sangat penting untuk operasional sehari-hari banyak di lalui anak sekolah dan lingkungan sekolahan jalan berlubang dan retak	Dusun Karangrejo RT 09 RW 05 Desa Sumbergayam, Kab. Trenggalek	Durenan	Sumbergayam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
45	2687135	#MPP Pembinaan dan Pengembangan Usaha	perlunya pembinaan peningkatan kapasitas pengurus bumdes. utamanya karena BUMDes Desa Pakis sedang dalam Pembangunan Unit dan agar sejalan dengan Inpres ketahanan Pangan	desa pakis kecamatan durenan, Kab. Trenggalek	Durenan	Pakis	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
46	2687235	#KEREN Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	di butuhkannya alat bantu mobilitas bagi disabilitas fisik untuk menunjang aksesibilitas sehari hariDi Dusun Pandean dan Dusun Talok	Rt 02 Rw,, 01 Rt 09 Rw 02, Kab. Trenggalek	Durenan	Pandean	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
47	2687420	#MPP Pembinaan dan Pengembangan Usaha	diperlukan pembinaan untuk pengambangan usaha BUMDesa	Dusun Randu RT 8 RW 4, Kab. Trenggalek	Durenan	Kendalrejo	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
48	2687725	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Adanya kerusakan berat di ruas jalan Baruharjo - Gador (SK JALAN th 2025 No. RUAS 35.3.318) yang merupakan merupakan jalan penghubung antar kabupaten Trenggalek – Tulungagung dengan kondisi rusak berat, berlobang, dan bila musim hujan banyak genangan air dengan cekungan yang dalam dan lebar	RT 002 DAN RT 003 DUSUN BARUKLINTING DESA BARUHARJO , Kab. Trenggalek	Durenan	Baruharjo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
49	2687845	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	JALAN RAYA PONOROGO PANGGUL YANG MELEWATI WILAYAH DUSUN KRAJAN RT. 08 RW. 03 DALAM KONDISI RUSAK BERAT SEHINGGA PERLU SEGERA DILAKSANAKAN PEMBANGUNAN/PENINGKATAN	DUSUN KRAJAN RT. 08 RW. 03, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
50	2687858	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Kondisi struktur tanah pada sisi jalan RT.001 Desa Joho,Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek cukup labil dan memilikli kontur tebing yang curam. Saat intensitas hujan tinggi, sering terjadi penggerusan tanah (erosi) yang mengakibatkan bahu jalan ambles. Hal ini sangat membahayakan pengguna jalan dan berpotensi memutus akses mobilisasi warga jika tidak segera ditangani dengan pembangunan tembok penahan jalan (TPJ).	RT.001 RW. 001 Desa Joho,Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Joho	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
51	2687930	#KEREN Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Kurangnya kepercayaan diri pengurus untuk mengembangkan Usaha Bumdes karena banyaknya persaingan usaha di desa	RT 002 RW 001 Desa Semarum Durenan Trenggalek, Kab. Trenggalek	Durenan	Semarum	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
52	2687945	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Kondisi jalan rabat Kabupaten ruas Mlinjon Picis yang sudah berlubang - lubang	RT 44 - RT 35 Dsn Miri , Kab. Trenggalek	Suruh	Mlinjon	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
53	2688056	#MPP Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian (Traktor Roda Dua, Cultivator, Alat Pengolah Pupuk Organik, Hand Traktor Capung)	Jumlah traktor yang ada belum mencukupi kebutuhan masyarakat pada saat mengolah sawah, dimana secara umum masyarakat ketika mengolah sawah dilakukan secara bersamaan dikarenakan hampir seluruh sawah di sukokidul merupakan sawah tadah hujan.	Sukokidul, Kab. Trenggalek	Pule	Sukokidul	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
54	2688275	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	jalan pada desa Pandean kecamatan Durenan sangat rusak parah, banyak lubang dijalan sepanjang 500m yang sangat membahayakan masyarakat yang melewati jalan tersebut, apalagi saat cuaca hujan lebat. Jalan tersebut juga merupakan jalan ekonomi masyarakat	Rt 13 sampai dengan Rt 15 Dsn Talok Desa pandean, Kab. Trenggalek	Durenan	Pandean	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
55	2688551	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tebing di sepanjang jalan raya Ponorogo-Panggul yang melewati wilayah rt. 30 rw. 12 dusun karangrejo desa sidomulyo dalam kondisi rusak karena longsor, dan cukup membahayakan mobilitas transportasi utamanya kendaraan yang bermuatan berat, sehingga perlu untuk dibangun TPJ/TPT	Dusun Karangrejo RT. 30 RW. 12, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
56	2688595	#MPP Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Saluran sebelah timur terminal merupakan saluran yang penting untuk pengairan sawah Dusun Krajan yang saat ini dalam keadaan rusak, sehingga air tidak sampai diujung. Hal ini mengakibatkan hasil panen padi kurang maksimal. Untuk itu mohon direhabilitasi untuk menunjang kelancaran air, sehingga panen bisa maksimal. Hal ini tentunya meningkatkan ekonomi petani setempat.	RT 02 RW 01 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Durenan	Ngadisuko	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
57	2688679	#MPP Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	jaringan irigasi di dsn Talok Rt 14 mengalami kerusakan sehingga berdampak pada penurunan hasil panen petani	Rt 14 Rw 03 Dsn Talok Desa Pandean, Kab. Trenggalek	Durenan	Pandean	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
58	2688781	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tebing di sepanjang jalan raya Ponorogo-Panggul yang melewati wilayah rt. 13 rw. 05 dusun donosari desa sidomulyo dalam kondisi ambles karena longsor, kondisi tersebut membuat sebagian jalan tersebut tidak bisa dilewati kendaraan ringan ataupun berat, sehingga perlu dibangun TPJ/TPT	Dusun Donosari RT. 13 RW. 05, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
59	2688872	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Di Dusun Krajan terdapat jalan yang merupakan akses menuju sekolah SDN 1 Ngadisuko yang saat ini dalam keadaan rusak/berlubang. Hal ini menyebabkan sering terjadinya pengendara yang jatuh. Utuk itu mohon untuk keamanan dan kenyamanan pemakai jalan agar dilakukan pemeliharaan jalan.	RT 07 RW O4 Dsn Krajan - RT 28 RW 08 DusunTawing, Kab. Trenggalek	Durenan	Ngadisuko	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
60	2689091	#MPP Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP/Sederajat	SMPN 3 Munjungan saat ini memiliki area terbuka yang cukup luas, namun kondisinya masih berupa urukan terbuka dan sebagian berupa paving kondisi rusak parah. Hal ini menimbulkan kendala signifikan, Pada saat musim hujan kondisinya becek dan berlumpur sedangan musim panas meterial debu terbawa angin sehingga menyebabkan Kegiatan belajar tidak nyaman. Oleh karena itu, diperlukan pengerasan area menggunakan paving block sebagai solusi jangka panjang untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih.	RT 09 RW 02 Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Bendoroto	DINAS PENDIDIKAN
61	2689186	#MPP Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD/Sederajat	SPS Mardhi Utomo belum memiliki pagar yang memadai, sehingga anak-anak peserta didik sangat rentan terhadap bahaya kecelakaan lalu lintas dan gangguan keamanan lainnya. Keterbatasan biaya telah menjadi kendala bagi kami untuk membangun pagar sekolah yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Dengan terwujudnya pembangunan pagar SPS Mardhi Utomo, diharapkan anak-anak dapat belajar dengan aman dan nyaman.	RT 14 RW 03 Desa Bendoroto, Kab. Trenggalek	Munjungan	Bendoroto	DINAS PENDIDIKAN
62	2689279	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Masih kurangnya kapasitas Pengurus BUMDesa dalam mengurus BUMDesa	Desa Sumbergayam RT 01/RW01, Kab. Trenggalek	Durenan	Sumbergayam	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
63	2689478	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Badan Jalan Semakin Sempit Karena Tergerus Air	RT 06 RW 02 Desa Sumberejo, Kab. Trenggalek	Durenan	Sumberejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
64	2689510	#MPP Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Kondisi jaringan irigasi tersier di wilayah tersebut saat ini belum berfungsi secara optimal,Ketidakstabilan pasokan air berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian, keterlambatan masa tanam, serta meningkatnya risiko gagal panen. Oleh karena itu, pembangunan Jaringan Irigasi Tersier Usaha Tani (JITUT) sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan dan pemerataan air irigasi, meningkatkan intensitas dan hasil pertanian, dengan panjang 150M dan Lebar 180 CM.	Dusun Nglengkong, RT.01-RT.05 /RW.01, Kab. Trenggalek	Durenan	Karanganom	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
65	2689656	#MPP Pembangunan/ Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Desa belum memiliki Ruang Terbuka Hijau, diharapakan dengan adanya bangunan RTH banyak memberikan manfaat untuk masyarakat utamanya dapat digunakan untuk olahraga, taman baca, taman bermain, serta dapat meningkatkan ekonomi para pelaku UMKM.	RT 02 RW 01 Desa Bendoroto, Kab. Trenggalek	Munjungan	Bendoroto	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
66	2689911	#KEREN Bantuan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD/Sederajat	Belum maksimanya APE yang berada di Lembaga PAUD, TK, RA sehingga masih adanya tindakan royoan (berebut) bagi siswa-siswi pada lembaga tersebut. oleh karena itu sangat diperlukan bantuan berupa alat praktek dan peraga bagi Pendidikan PAUD,TK,RA	Desa Masaran, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN
67	2690661	#KEREN Bantuan Pengadaan Mebel PAUD/Sederajat	SPS Mardhi Utomo belum memiliki meja dan kursi untuk siswa. Kondisi pembelajaran yang dilakukan sepenuhnya di atas lantai (lesehan) mengakibatkan proses stimulasi perkembangan anak tidak berjalan optimal dan rendahnya fokus belajar dan kurangnya kedisiplinan siswa. Berdasarkan kondisi tersebut kami mengajukan bantuan pengadaan 20 set mebel yang saat ini menjadi kebutuhan paling prioritas dan mendesak bagi SPS Mardhi Utomo.	RT 14 RW 03 Desa Bendoroto, Kab. Trenggalek	Munjungan	Bendoroto	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
68	2690929	#KEREN Advokasi dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Pengasuhan Positif bagi Keluarga	Pencegahan Perkawinan Anak dan Pengasuhan Postif Bagi Keluarga	Desa Bendoroto, Kab. Trenggalek	Munjungan	Bendoroto	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
69	2690955	#KEREN Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Masih kurangnya pengetahuan tentang pengembangan BUMDesa di Desa Sumbergayam	Desa Sumbergayam RT 01/RW01, Kab. Trenggalek	Durenan	Sumbergayam	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
70	2691354	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Di sebagian ruas Jalan Daerah (Keser - Ngadimulyo) setelah terjadi intensitas hujan yang tinggi terjadi penggerusan badan jalan sehingga membahayakan pengguna jalan, untuk itu diperlukan pembangunan Tembok Penahan Jalan (TPJ) dibeberapa titik sepanjang jalan tersebut	Dusun Krajan dan Dusun Sobo, Kab. Trenggalek	Dongko	Ngerdani	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
71	2691537	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan Semarum rusak berat apalagi saat hujan jalan berlubang dan tergenang air	Rt 001 dan RT 002 Desa Semarum Kecamatan Durenan, Kab. Trenggalek	Durenan	Semarum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
72	2692208	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan beraspal sepanjang 2,5 km pada desa ngadirejo kecamatan pogalan kondisinya rusak berat, berlubang yang sangat membahayakan pengguna jalan, apalagi saat musim hujan. Jalan tersebut merupakan jalan yang terhubung dengan kecamatan Gandusari	Barat jembatan besar dusun gambang ngadirejo sampai dengan perbatasan desa ngadirejo-desa sukorame (sesuai SK, Ngadirejo-Karanganyar), Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
73	2692223	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Ruas jalan Kabupaten Besuki-Salamwates (Jalan penghubung antar Kecamatan Dongko -Kecamatan Munjungan) tepatnya di Dsn. Belang Ds. Salamwates Kondisi saat ini jalan rusak berat dengan volume Panjang 2500 m lebar 4 m	Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
74	2692279	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan usaha tani di Blok katir Rt.25 Rw.02 Desa Bangun , Jalan belum di paving kalau musim hujan jalan licin dan menghambat pendistribusian kebutuhan para petani .	Blok sawah katir Rt.25 Rw.02 Desa Bangun, Kab. Trenggalek	Munjungan	Bangun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
75	2692600	#MPP Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	JITUT diwilayah persawahan blok Katir Rt.25 Rw.02 Desa Bangun sebagian masih tanah sehingga bila terjadi hujan deras ban banjir sering terkikis dan menyumbat sehingga mennganggu pengairan di persawahan tersebut	Blok sawah katir Rt.25 Rw.02 Desa Bangun , Kab. Trenggalek	Munjungan	Bangun	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
76	2692871	#MPP Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	Saluran irigasi DUNGSAPI sepanjang 2.376 M kondisi saat masih tanah sehingga aliran air dari sumber mata air tidak sampai ke lokasi persawahan	RT 27, RT 42, RT 43, RT 08 Desa Salamwates, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
77	2692928	#MPP Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	Saluran irigasi NGRAMBANG sepanjang 3165 M kondisi saat masih tanah sehingga aliran air dari sumber mata air tidak sampai ke lokasi persawahan	RT 29 RT 27, RT 43, RT 42 Desa Salamwates, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
78	2693884	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Masih Banyaknya Pengurus BUMDesa Yang Memeerlukan Peningkatan Kapasitas/Kemampuan	Desa Sumberejo, Kab. Trenggalek	Durenan	Sumberejo	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
79	2695791	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan ini sebagian sudah di bangun, harapan kami selaku Pemdes Winong dapat melanjutkan sisa jalan yang belum yang belum terbangun sehingga dapat memaksimalkan akases mobilisasi pertanian khusunya masyarakat Desa Winong. P= 250 m, L= 4m	RT 07 RW 03 DUSUN BENGGLE DESA WINONG KEC. TUGU, Kab. Trenggalek	Tugu	Winong	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
80	2698469	#MPP Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian (Traktor Roda Dua, Cultivator, Alat Pengolah Pupuk Organik, Hand Traktor Capung)	Areal pertanian luas tetapi alat untuk mengelola lahan masih kurang. Untuk meningkatkan produktifitas lahan maka kelompok tani Sendang Mulyo III perlu adanya bantuan alat mesin pertanian berupa Cultivator sebanyak 2 Unit	Dusun Ngrancah RT 016 RW 006 Desa Sawahan, Kab. Trenggalek	Watulimo	Sawahan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
81	2698664	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Kondisi Tembok Penahan Tebing rusak dan sebagian belum ada, sedangkan daerah tersebut rawan longsor. Dikwatirkan jalan sebagai akses utama masyarakat dalam upaya pemenuhan ekonomi dan merupakan jalan menuju desa wisata terkena longsor. Oleh karena itu perlu adanya pembangunan tembok penahan tebing (TPT) dengan Volume 200 x 1,5 Meter.	Dusun Singgahan RT 012 RW 004, Kab. Trenggalek	Watulimo	Sawahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
82	2699207	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	belum adanya kegiatan untuk peningkatan kapasitas kepengurusan BUMDes	Ds. Karanganyar Kec.Gandusari Kab.Trenggalek, Kab. Trenggalek	Gandusari	Karanganyar	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
83	2699386	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	sering terjadinya luapan air hujan sehingga mempercepat kerusakan struktur jalan	RT.17 RW.07 Dusun Mojokidul , Kab. Trenggalek	Tugu	Jambu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
84	2699521	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	banyaknya akses jalan yang rusak sehingga terkendalanya akses ekonomi warga	RT.17 s/d RT.20 Dusun Mojokidul , Kab. Trenggalek	Tugu	Jambu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
85	2699555	#MPP Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian (Traktor Roda Dua, Cultivator, Alat Pengolah Pupuk Organik, Hand Traktor Capung)	Pengolahan lahan secara manual memakan waktu lama, sehingga petani sering melewatkan momentum curah hujan yang optimal	RT.22 RW.08 Dusun Mojokidul, Kab. Trenggalek	Tugu	Jambu	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
86	2699713	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Belum tersedia bangunan drainase yang memadai, sedangkan daerah tersebut rawan longsor. Sehingga saat musim hujan, air turun ke jalan dan mengalir ke pemukiman warga dan dikwatirkan ada bencana banjir maupun longsor. Jalan tersebut sebagai akses utama masyarakat dalam upaya pemenuhan ekonomi dan merupakan jalan menuju desa wisata durensari. Oleh karena itu perlu adanya Pembangunan Drainase dengan Volume Panjang 200 M dan Tinggi 1 M	Dusun Singgahan RT 012 RW 004, Kab. Trenggalek	Watulimo	Sawahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
87	2700065	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	TPJ ambrol Tergerus Aliran air	rt 02 rw 01 desa semarum kecamatan durenan, Kab. Trenggalek	Durenan	Semarum	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
88	2700078	#MPP Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian (Traktor Roda Dua, Cultivator, Alat Pengolah Pupuk Organik, Hand Traktor Capung)	Kurangnya cultivator roda dua untuk bajak sawah	Kelompok tani Sekar arum Rt 01 rw 01, Kab. Trenggalek	Durenan	Semarum	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
89	2700083	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Kurangnya pemahamn terhadap laporan bumdes	Rt 02 Rw 02 Desa Semarum, Kab. Trenggalek	Durenan	Semarum	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
90	2702438	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Peningkatan kapasitas pengelola dan lembaga BUM Desa Untuk memperkuat perekonomian desa melalui ekonomi produktif dalam rangka mempertegas legalisasi status Desa Mandiri.	Desa Salamwates, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
91	2702886	#MPP Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian (Traktor Roda Dua, Cultivator, Alat Pengolah Pupuk Organik, Hand Traktor Capung)	Masyarakat memiliki banyak bahan organik dari kotoran peternakan Sapi, Kambing, Ayam yang belum di manfaatkan dan di olah secara benar sangat di perlukan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Pengolah Pupuk Organik	RT 24 Dusun Jajar dan RT 08 Dusun Krajan Desa Salamwates, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
92	2703258	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	masih terdapat keterbatasan pemahaman pengurus BUMDesa terkait tata kelola kelembagaan. Oleh karena itu di perlukan kegiatan peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa agar pengelolaan usaha desa berjalan optimal dan berkelanjutan	RT 01 RW 01 Dsn . Pandean Desa Pandean, Kab. Trenggalek	Durenan	Pandean	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
93	2703467	#MPP Fasilitasi Pelaksanaan Upacara Adat	Pelaksanaan Upacara Adat BARITAN merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan suro (dalam bulan jawa) masih kurangnya sarana prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan upacara adat tersebut	Desa Salamwates, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
94	2703829	#MPP Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Irigasi sawah ingas kurang lebih 250M mengalami rusak berat.tepatnya di Lokasi Persawahan yang Dikunjungi Bapak Presiden Tahun 2021.Saluran ini Masih termasuk Saluran Tanah.	Sawah Ingas DI Prambon Lokasi Dusun Kedungsangkal Rt 006 Rw 003, Kab. Trenggalek	Karangan	Buluagung	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
95	2704911	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Pada musim Penghujan Jalan Tergenag	Dusun Turi, Kab. Trenggalek	Pule	Kembangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
96	2705301	#KEREN Pelatihan produk olahan potensi lokal maupun ketrampilan bagi pengusaha pemula secara individu/perorangan	Desa Besuki memiliki potensi lokal yang melimpah seperti hasil pertanian, namun potensi ini belum dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya kemampuan dan pengetahuan warga desa dalam mengolah produk lokal	Desa Besuki, Kab. Trenggalek	Munjungan	Besuki	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
97	2705436	#MPP Bantuan bibit ternak kambing PE	Di Desa Ngerdani mayoritas wanganya petani dan peternak dan sangat melimpah bahan pakan dan kurangnya jumlah kambing sehingga membutuhkan tambahan pengadaan bibit untuk menunjang perekonomian warga.maka kami mengajukan 100 bibit kambing.	RT 17 RW 003 Dusun Sobo Desa Ngerdani , Kab. Trenggalek	Dongko	Ngerdani	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
98	2705569	#MPP Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Pembinaan usaha BUMDesa sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan pendapatan asli Desa	BUMDesa Ngadirejo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirejo	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
99	2706016	#KEREN Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Warga RT 09 Dusun Krajan RT 25 Dusun Jajar dan RT 18, RT 20 Dusun Sobo mengalami penyakit kronis mengalami kesulitan untuk jalan diperlukan alat bantu kursi roda atau sejenisnya	RT 09, Dusun Krajan RT 18, RT 20, Dusun Sobo RT 25 Dusun Jajar Desa Salamwates, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
100	2706175	#MPP Bantuan Tanaman Perkebunan Tahunan (Kakao, Kopi, Kelapa dan Pala)	luasnya lahan pertanian di desa ngerdani dan belum maksimalnya hasil pertanian maka dari itu dibutuhkan bimbingan dan bibit tanaman pertanian antara lain bibit kakao kopi kelapa dan pala.	RT 16 RW 03 Dusun Sobo Desa Ngerdani, Kab. Trenggalek	Dongko	Ngerdani	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
101	2706450	#KEREN Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Masih banyaknya masyarakat desa durenan dengan status disabilitas dengan status warga miskin	Masrakat Desa Durenan , Kab. Trenggalek, Durenan, Durenan , Kab. Trenggalek	Durenan	Durenan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
102	2707346	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Jalan Bergelombang Sering Terjadi Kecelakaan	Dusun Krajan (Gajah Jurusan Desa Puyung), Kab. Trenggalek	Pule	Kembangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
103	2712455	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	BUMDesa belum berjalan efektif dan efisien karena keterbatasan kapasitas pengurus dalam mengelola BUMDesa. Oleh karena itu kami mengusulkan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pengurus dalam mengelola BUMDesa sehingga dapat meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.	Desa Sawahan, Kab. Trenggalek	Watulimo	Sawahan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
104	2715520	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Area makam merupakan pegunungan yang mepet dengan jalan kabupaten, dan tanahnya mulai turun / longsor.	-8°5'20,754"S 111°48'43,944"E No Ruas. 35.3.322 kamulan-Sumberejo. Dusun Widoyoko Rt 20 rw 03 Desa Kamulan (TPT Makam Gunung Cilik), Kab. Trenggalek	Durenan	Kamulan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
105	2715841	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kerusakan Jalan area Pemakaman Umum dan merupakan penghubung antara desa kamulan menuju Desa Gador dan Desa Sumberejo.	-8°5'19,32"S 111°48'43,848"E No Ruas. 35.3.322 kamulan-Sumberejo. Dusun Widoyoko Rt 20 rw 03 Desa Kamulan (Kamulan-Sumberejo)makam Gunung Cilik, Kab. Trenggalek	Durenan	Kamulan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
106	2715916	#MPP Fasilitasi Pelaksanaan Upacara Adat	Kegiatan Kirab pusaka Hari Jadi Kabupaten Trenggalek yang dilakukan tiap tanggal 30-31 Agustus di Desa Kamulan yang masih minim anggaran operasionalnya.	KANTOR DESA KAMULAN, Kab. Trenggalek	Durenan	Kamulan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
107	2716083	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan mengalami rusak berat di beberapa titik. jalan merupakan akses vital ekonomi Desa karena merupakan jalan utama menuju Pasar Kamulan.	-8°5'44,778"S 111°49'14,826"E No Ruas 35.3.320 Pasar Kamulan-Guyang Gajah. Dusun Guyang gajah RT:9,8,11,12 RW:02 Desa Kamulan Kec.Durenan Kab.Trenggalek, , Kab. Trenggalek	Durenan	Kamulan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
108	2719245	#MPP Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian (Traktor Roda Dua, Cultivator, Alat Pengolah Pupuk Organik, Hand Traktor Capung)	Untuk memodernisasi di sektor pertanian agar lebih produktif maka kelompok tani sri lestari perlu mengajuakan bantuanalat pertanian berupa mesin traktor roda dua.	Rt 18 Rw 05 Dusun Duren, Kab. Trenggalek	Gandusari	Wonorejo	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
109	2719287	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Untuk meningkatkan kemampuan pengurus BUMDes agar lebih profesional dalam mengelola potensi desa maka perlu adanya Peningkatan Kapasitas BUMDes.	Rt 06 Rw 02 Dusun Setri, Kab. Trenggalek	Gandusari	Wonorejo	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
110	2720625	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Pengurus BUMDES ASTA MUDA Desa Karanganom masih menghadapi keterbatasan pengetahuan dan keterampilan, oleh karena itu perlunya peningkatan kapasitas pengurus BUMDES .	RT.09 / RW.02, Kab. Trenggalek	Durenan	Karanganom	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
111	2721172	#MPP Bimbingan Teknis Manajemen/Pengelolaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna)	Masih minimnya pemahaman kelembagaan dan tata kelola fungsi RT/RW	RT 007 RW 002 Dusun Baruklinting, Kab. Trenggalek	Durenan	Baruharjo	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
112	2721479	#KEREN Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDes masih belum optimal akibat keterbatasan kapasitas pengurus dalam perencanaan usaha, manajemen operasional, pemasaran, serta pengelolaan keuangan , Maka dari itu diperlukannya pembinaan usa BUMDES di Desa Karanganom.	RT.09 / RW.02, Kab. Trenggalek	Durenan	Karanganom	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
113	2721640	#MPP Bantuan bibit ternak kambing PE	Penopang ekonomi masyarakat Desa Pakel mayoritas Petani dan Peternak Kambing, ternak Kambing yang ada di Desa Pakel kurang berkembang karena tidak ada bibit unggul. Potensi dalam bidang peternakan di Pakel sangat baik, potensi pakan sangat melimpah, kelompok ternak juga banyak dan berjalan dengan baik, kelompok ternak juga sudah berbadan hukum. Bibit Kambing unggul sebanyak 32 Ekor Rp. 105.600.000,-	RT 03 RW 01 Dsn Glatik Desa Pakel , Kab. Trenggalek	Watulimo	Pakel	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
114	2722059	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Masih minimnya pemahaman pengurus Bumdes pada tata kelola administrasi dan manajemen Bumdes	RT 007 RW 002 Dusun Baruklinting Desa Baruharjo, Kab. Trenggalek	Durenan	Baruharjo	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
115	2723255	#MPP Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Untuk meningkatkan hasil pertanian masyarakat mohon bantuan pembangunan saluran irigasi sawah dengan volume = p: 100m x t: 0,60m.	Dusun Krajan RT. 007, RW. 002, Kab. Trenggalek	Panggul	Ngrambingan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
116	2723723	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Akses menuju jalur pariwisata Guo Lowo, akses menuju jalur Pendidikan SD Negeri Watulimo 2, akses menuju jalur Pasar Sebo dan selain itu juga untuk akses jalur untuk memperlancar lajunya perekonomian masyarakat Desa Watulimo.	DESA WATULIMO RUAS JALAN PELEM-GUO LOWO, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watulimo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
117	2723898	#MPP Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Sehubungan dengan keselamatan pengguna jalan dengan sering terjadinya kecelakaan maka mohon bantuan penerangan jalan sejumlah 10 titik wilayah desa kami	DESA NGULUNGKULON, Kab. Trenggalek	Munjungan	Ngulungkulon	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
118	2724438	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Pada bagian drainase jalan sepanjang 500 M di beberapa titik sudah mengalami kerusakan sehingga pada musim hujan air meluber ke jalan dan dikawatirkan akan merusak kekuatan jalan	Ruas jalan Slawe-Dukuh Dusun Tumbal RT 07 RW 02, Kab. Trenggalek	Watulimo	Slawe	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
119	2724646	#MPP Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Keadaan perekonomian masyarakat Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, penerangan jalan umum juga berfungsi untuk memperlancar akses menuju pusat pelayanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi karena jembatan ini sebagai fasilitas sarana dan prasarana penunjang perekonomian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.	Dusun Krajan RT 21 RW 04 Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Prambon	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
120	2725364	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	kondisi jalan rusak dan berlubang sepanjang 250 m lebar 4 m sehingga menghambat transportasi pengguna jalan	RT 08 RW 04 Dusun Nglaban Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Gading	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
121	2725385	#MPP Penambahan ruang puskesmas	Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan menyediakan fasilitas yang memadai di Puskesmas Bodag mohon bantuan penambahan ruang puskesmas.	Jl.Panglima Sudirman, Dusun Krajan, RT. 004, RW. 001, Kab. Trenggalek	Panggul	Bodag	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
122	2725571	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	kondisi badan jalan longsor sepanjang 30 m tinggi 10 m sehingga mengakibatkan penyempitan jalan dan membahayakan pengguna jalan apalagi dekat dengan wilayah sekolah dasar dan pustu maupun tk desa gading	RT 02 RW 01 Dusun Krajan Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Gading	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
123	2726111	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi jalan yang rusak menuju kabupaten sepanjang 700 m lebar 4 m yang dapat membahayakan pengguna jalan apalagi ketika musim hujan	RT 04 dan RT 05 Dusun Krajan Desa Gading Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Gading	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
124	2726438	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Saat Musim Hujan air meluber kemana-mana yang dapat merusak jalan yang ada maka perlu dibangunnya drainase jalan dengan volume 500 m x 0,5 m	RT 02 Dan RT 08 Desa Gading , Kab. Trenggalek	Tugu	Gading	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
125	2727061	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Untuk menstabilkan tanah di lereng atau area curam agar tidak longsor, sehingga menjaga keamanan dan kelancaran transportasi dengan mencegah amblasnya jalan akibat beban tanah dari air hujan mohon bantuan pembangunan Tembok Penahan Jalan dan Cor Beton di Ruas Jalan Banteng - Prapatan di No. Ruas 006 dengan volume = p: 70m x t: 30m.	Dusun Petung RT.013, RW.004 Jurang Gandul, Kab. Trenggalek	Panggul	Manggis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
126	2727323	#MPP Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Kondisi jalan yang sangat gelap ketika malam di area pemukiman warga dan sering dilintasi maka diperlukan bantuan penerangan jalan berupa solar cell terpasang dengan volume 7 titik	RT 04 dan RT 05 Dusun Krajan Desa Gading, Kab. Trenggalek	Tugu	Gading	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
127	2728010	#MPP Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sulitnya mendapatkan air bersih dimusim kemarau, maka perlu peningkatan sistem penyediaan air bersih jaringan perpipaan	RT 04 dan RT 06 Desa Gading, Kab. Trenggalek	Tugu	Gading	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
128	2728026	#MPP Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa melalui Bumdesa mohon bantuan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Bumdesa.	Desa Manggis, Kab. Trenggalek	Panggul	Manggis	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
129	2728272	#MPP Bantuan Tanaman Perkebunan Tahunan (Kakao, Kopi, Kelapa dan Pala)	perlunya bantuan bibit kelapa untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Bantuan bibit kelapa yang diperlukan sejumlah 1000 batang	Desa Gading, Kab. Trenggalek	Tugu	Gading	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
130	2728408	#KEREN Advokasi dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Pengasuhan Positif bagi Keluarga	Untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan terhadap dampak negatif perkawinan dini serta memberdayakan mereka agar anak terpenuhi hak-haknya sehingga bisa tumbuh kembang optimal dan mengurangi risiko stunting mohon bantuan Advokasi dan Edukasi pencegahan perkawinan anak dan pengasuhan positif bagi keluarga (Musrena Keren)	Desa Manggis, Kab. Trenggalek	Panggul	Manggis	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
131	2728516	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan Kabupaten Penghubung Desa Senden dan Desa Ngembel keadaanya rusak parah dengan volume panjang 500 m dan lebar 4 m yang merupakan akses fital di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat	Ruas Jalan Kampak - Watulimo RT. 26 RW. 12 Dusun Balang Desa Senden, Kab. Trenggalek	Kampak	Senden	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
132	2729149	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi jalan yang sudah rusak dan membutuhkan pembangunan jalan yang merupakan Ruas Jalan Karangtengah - Balai Desa Terbis dengan No. Ruas Jalan 016 mohon bantuan pengaspalan jalan dengan volume = p: 850m x l: 3,5m.	Dusun Karangtengah RT. 008, RW. 003, Kab. Trenggalek	Panggul	Karangtengah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
133	2729266	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	JUT yang ada wilayah Poktan SIDODADI IV keadaannya sangat memprihatinkan sehingga menambah biaya produksi petani, untuk itu diperlukan Pengadaan JUT dengan volume panjang 300 m dan lebar 2 m	RT. 20 RW. 09 Dusun Balang Desa Senden, Kab. Trenggalek	Kampak	Senden	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
134	2729353	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Kondisi tebing jalan yang longsor sampai menggerus jalan di Ruas Jalan Karangtengah - Depok di No. Ruas 002 mohon bantuan pembangunan Tembok Penahan Jalan dengan volume = p: 50m x t: 7m.	Dusun Nginjen RT. 028, RW. 010, Kab. Trenggalek	Panggul	Karangtengah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
135	2729778	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Jalan beraspal kondisinya berlubang-lubang sehingga membahayakan pengguna.	Dari perbatasan Ngadirejo Kedunglurang sampai dengan perbatasan ngepeh tulungagung, sesuai SK Kedunglurah - Ngadirejo (Batas Tulungagung), Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
136	2730080	#MPP Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	JITUT yang ada di wilayah Poktan Margo Rahayu III kondisinya sangat memprihatinkan sehingga potensi gagal panen sangat besar karena kekeringan. Panjang Saluran 200 m lebar 1 m dan tinggi 0.50 m	RT. 23 RW. 11 Dusun Balang Desa Senden, Kab. Trenggalek	Kampak	Senden	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
137	2730982	#KEREN Pemberian Paket GEMARIKAN untuk anak stunting dan berisiko stunting.	Masih minimnya pemahaman masyarakat Baruharjo tentang manfaat ikan sebagai sumber protein yang murah, sehat, enak dan bergizi	RT 007 RW 002 Dusun Baruklinting, Kab. Trenggalek	Durenan	Baruharjo	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
138	2731787	#KEREN Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	Untuk pencegahan atau mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	RT 007 RW 002 Dusun Baruklinting, Kab. Trenggalek	Durenan	Baruharjo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
139	2732073	#KEREN Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Masih minimnya pemahaman pengurus Bumdes terhadap pengembangan usaha	RT 007 RW 002 Dusun Baruklinting, Kab. Trenggalek	Durenan	Baruharjo	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
140	2734171	#MPP Restorasi Arsip	Letter C Banyak yang mulai rusak dan sulit dibaca karena termakan usia.	Kantor Desa Kamulan Rt 23 Rw 04 Desa Kamulan, Kab. Trenggalek	Durenan	Kamulan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
141	2738795	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Pemeliharaan pengaspalan ruas Jalan Suren Masaran s/d perbatasn Kabupaten ponorogo;Km 5, Volume 2000 m x 4 m, kondisi rusak dan merupak jalan penghubung antara kabupaten Pobnorogo dan Kabupaten Trenggalek	Rt.08 Dusun Masaran wetan s/d Rt.12 Dusun Jumok Desa Masaran, Kab. Trenggalek , Kab. Trenggalek	Bendungan	Masaran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
142	2738865	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Pembangunan Ruas jalan Masaran- Ponorogo Km 0 s/d 3,5, volume 3500 m X 4 m, kondisi jalan rusak dan berlubang, jalan merupakan Jalan Lingkar Desa Masaran ruas kabupaten dari titik Km 4 Suren lor - Masaran	Rt 03 Dsn.Masaran Wetan s/d Rt.11 Dsn Jumok Desa Masaran, Kab. Trenggalek , Kab. Trenggalek	Bendungan	Masaran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
143	2738909	#KEREN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	bantuan rehabilitasi Pustu Desa Masaran, Volume 12x6 Meter Kondisi gedung pustu mulai tua, tulangan atap sebagian lapuk, sehingga perlu adanya rehabilitasi, apabila dilakukan rehabilitasi maka kenyamanan masyarakat dalam berobat akan terlaksana	Rt 08, Kab. Trenggalek , Kab. Trenggalek	Bendungan	Masaran	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
144	2739270	#KEREN Bimtek/Pembinaan/pelatihan Kelompok dan Organisasi Seni	bantuan bimbingan teknis/ kepada pecinta seni	desa masaran, Kab. Trenggalek	Bendungan	Masaran	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
145	2739714	#MPP Bantuan bibit ternak kambing lokal	Desa Sukorejo membutuhkan bantuan ternak kambing terutama sebagai upaya strategis untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, dan memanfaatkan potensi lokal secara berkelanjutan. Kambing adalah pilihan tepat karena mudah dirawat, berkembang biak dengan cepat, dan memiliki nilai ekonomis tinggi. sedangkan untuk Kotoran kambing sangat berguna sebagai pupuk organik yang dapat meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen pertanian warga.	RT. 47 RW. 22 Dusun Nglayur Desa Sukorejo Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
146	2741670	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	PENINGKATAN RUAS JALAN TUMPAKAREN - SMPN 2 BENDUNGAN DENGAN VOLUME P: 250 METER L: 3 METER, YANG MERUPAKAN JALAN UTAMA MENUJU SEKOLAH SMP 2 BENDUNGAN DAN JALUR EKONOMI MASYARAKAT YANG SAAT INI KONDISINYA RUSAK PARAH DAN MEMBAHAYAKAN ANAK-ANAK SEKOLAH SERTA PENGGGUNA JALAN LAINYA.	RT. 06 RW. 02 DUSUN BENDUNGAN , Kab. Trenggalek	Bendungan	Dompyong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
147	2741720	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Peningkatan ruas jalan Tumpakaren - SMPN 2 Bendungan dengan volume P:1.000 Meter L: 3 Meter yang merupakan jalur ekonomi masyarakat sebagai sentra susu sapi perah yang saat ini kondisinya rusak sangat parah sehingga menghambat mobilitas ekonomi masyarakat dan membahayakan penguna jalan.	RT. 16 RW. 04 Dusun Tumpakaren, Kab. Trenggalek	Bendungan	Dompyong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
148	2746057	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Akses menuju jalur Pendidikan SMP Negeri Watulimo 2, akses menuju jalur Desa Ngembel dan Desa Jajar Kec. Gandusari dan selain itu juga untuk akses jalur untuk memperlancar lajunya perekonomian masyarakat Desa Watulimo.	DESA WATULIMO RUAS JALAN WATULIMO-NGEMBEL/NGEMBEL-WATULIMO, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watulimo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
149	2747948	#KEREN Advokasi dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Pengasuhan Positif bagi Keluarga	Perlu adanya sosialisasi terkait pola asuh anak terhadap orang tua terkait tentang parenting, guna untuk mengurangi tingkat perkawinan anak di bawah umur dan tumbuh kembang anak sehingga bisa mencegah / menurunkan tingkat stunting yang ada di desa watulimo	RT 06 RW 02 DUSUN KRAJAN KANTOR DESA WATULIMO, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watulimo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
150	2748062	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Dikarenakan jalan desa wonorejo banyak yang rusak dan berlubang maka perlu adanya pemeliharaan berkala.	Ruas jalan Wonorejo - Senden, Kab. Trenggalek	Gandusari	Wonorejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
151	2755460	#MPP Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Kondisi jalan yang membutuhkan penerangan di saat malam hari dan belum ada penerangan jalan maka mohon bantuan Penerangan Jalan Umum (PJU).	Dusun Sanggar - Dusun Kebonduren, Kab. Trenggalek	Panggul	Besuki	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
152	2755471	#MPP Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Kondisi jalan yang membutuhkan penerangan di saat malam hari dan belum ada penerangan jalan maka mohon bantuan Penerangan Jalan Umum (PJU).	Dusun Bungur, Kab. Trenggalek	Panggul	Besuki	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
153	2755966	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi jalan yang rusak den membutuhkan peningkatan jalan yang ada di Ruas Jalan Karangtengah - Klepu di No. Ruas 015 mohon bantuan Pengaspalan Jalan dengan volume = 1000m.	Dusun Krajan RT. 006 - RT. 008, Kab. Trenggalek	Panggul	Terbis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
154	2755991	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Gorong-gorong)	Untuk mengalirkan air di bawah badan jalan, mencegah banjir, mengurangi erosi, dan memastikan kelancaran lalu lintas dengan menjaga struktur jalan tetap stabil mohon bantuan pembangunan gorong - gorong di Ruas Jalan Karangtengah - Klepu No. ruas 015 dengan volume = 750m.	Dusun Krajan RT. 006 - RT. 008, Kab. Trenggalek	Panggul	Terbis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
155	2756058	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Untuk mengelola usaha desa secara profesional, meningkatkan pemahaman bisnis, mengoptimalkan potensi desa mohon bantuan Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdesa.	Desa Terbis, Kab. Trenggalek	Panggul	Terbis	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
156	2756801	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan yang menghubung Desa Pringapus Kecamatan Dongko dengan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh kondisi jalan aspal menglupas dan bebantuan terlihat saat kondisi hujan licin dan air tergenang di ruas jalan tersebut. Jalan ini menjadi jalan utama akses perekonomian antar Desa tersebut dan akses pendidikan siswa-siswi SDN 2 Pringapus. Jalan Kabupaten Memiliki Volume Panjang : 1.200m x 4 m.	RT.39 - 37 RW.08 Dusun Picis , Kab. Trenggalek	Dongko	Pringapus	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
157	2758211	#MPP Pembangunan MCK / SPALD	Belum terbangunnya MCK Umum di lapangan Gandusari	Dusun Karangrejo RT 30 RW. 10, Kab. Trenggalek	Gandusari	Gandusari	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
158	2758282	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Pengurus BUMDes masih Baru re organisasi sangat perlu bimbingan	Desa Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Gandusari	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
159	2761537	#KEREN Pemberian Paket GEMARIKAN untuk anak stunting dan berisiko stunting.	masih banyaknya anak-anak yang mengalami stunting di Desa Sumbergayam	RT 001/RW 001 Desa Sumbergayam , Kab. Trenggalek	Durenan	Sumbergayam	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
160	2762009	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan Kabupaten yang menghubungkan kecamatan Gandusari, Kampak watulimo dalam Kondisi rusak Berat	Dusun Ngimer Desa Sugihan, Kab. Trenggalek	Kampak	Sugihan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
161	2762372	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Kondisi struktur tanah pada sisi jalan RT.002 RW.001 Dusun Krajan Desa Joho,Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek cukup labil . Saat intensitas hujan tinggi, sering terjadi penggerusan tanah (erosi) yang mengakibatkan bahu jalan ambles. Hal ini sangat membahayakan pengguna jalan dan berpotensi memutus akses mobilisasi warga jika tidak segera ditangani dengan pembangunan tembok penahan jalan (TPJ).	RT.002 RW.001 Desa Joho,Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Joho	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
162	2762674	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Drainase rusak dan kurang memadai, sehingga air menggenang di jalan dan membahayakan pengguna Jalan	Rt 21 sampai dengan Rt 23 Dusun Ngimer, Kab. Trenggalek	Kampak	Sugihan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
163	2763335	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Untuk menstabilkan tanah di lereng atau area curam agar tidak longsor, sehingga menjaga keamanan dan kelancaran transportasi dengan mencegah amblasnya jalan akibat beban tanah dari air hujan mohon bantuan pembangunan Tembok Penahan Jalan dan Cor Beton di Ruas Jalan Siki - Banteng di No. Ruas 053 dengan volume = p: 25m x t: 10m.	Dusun Pagerwatu RT. 023, RW. 006, Kab. Trenggalek	Panggul	Manggis	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
164	2763568	#MPP Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Jaringan irigasi yang juga merupakan Drainase rusak parah dan sebagian tidak fungsi ketika hujan air menggenang di jalan raya gandusari watulimo dan menyebabkan kerusakan jalan dan mengganggu lalu lintas	Dusun Ngimer, Kab. Trenggalek	Kampak	Sugihan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
165	2764197	#MPP Fasilitasi Pelaksanaan festival seni budaya	Demi melestarikan Seni Budaya Bangsa, Desa Nglinggis mempunyai dan mengembangkan Kesenian Jaranan yaitu " Turonggo Kresno Wijoyo " yang sampai saat ini masih eksis dan konsisten. Perlunya dukungan Sarana Prasarana demi kemajuan Kesenian Budaya tersebut.	DUSUN KRAJAN RT 02 RW 01, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglinggis	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
166	2765167	#MPP Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Ruas Jalan tersebut berada di Dusun Pacar RT 04, 05, dan 06 RW 02 Desa Nglinggis. Jalan tersebut juga sebagai jalan yang menghubungkan atar Desa Nglinggis Kecamatan Tugu dan Desa Sukokidul Kecamatan Pule.	DUSUN PACAR RT 04 RW 02, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglinggis	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
167	2765680	#KEREN Bimtek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Kurangnya SDM Bagi Perangkat Desa terkait Teknologi dan Informasi	Desa Ngetal, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngetal	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
168	2765925	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan Perbatasan Dusun Duwet Ngetal - Dusun Blengok Wonocoyo rusak parah dan membahayakan bagi pengguna jalan	RT. 11 RW. 04 Dusun Duwet - Desa Wonocoyo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngetal	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
169	2766196	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi saat ini akses menuju lahan tersebut masih berupa jalan tanah yang rusak parah dan sulit dilalui pada musim penghujan. Kondisi ini menyebabkan kendaraan pengangkut hasil panen maupun sarana produksi (pupuk dan bibit) tidak dapat masuk ke area lahan.	RT.20 RW. 04 Dusun Ndilem, Kab. Trenggalek	Pule	Tanggaran	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
170	2766253	#KEREN Pemberian Paket GEMARIKAN untuk anak stunting dan berisiko stunting.	Anak yang terindikasi stunting cenderung memiliki masalah pada pertumbuhan, cara berfikir dan proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena kurang asupan gizi yang menyebabkan perkembangan otak jadi terhambat, maka dari itu desa ingin membantu anak-anak yang terindikasi stunting supaya gizinya terpenuhi	Desa Ngetal, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngetal	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
171	2766922	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi Jalan Masih Tanah saat musim hujan para petani kesulitan saat akan pergi ke perkebunan,jalan tersebut memiliki panjang 300 Meter dan Lebar 2,5 M	RT 37 RW 07 Dusun Crabak Desa Sumberbening, Kab. Trenggalek	Dongko	Sumberbening	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
172	2767167	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Perlunya Peningkatan Jalan Usaha Tani	DUSUN JUMOK RT 010 RW 004 DESA TUMPUK KECAMATAN TUGU JALAN PAVING 400m x 2,5m, Kab. Trenggalek	Tugu	Tumpuk	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
173	2767342	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Air Meluap Ke Badan Jalan Saat Musim Hujan	DUSUN KRAJAN RT 004 RW 002 DESA TUMPUK KECAMATAN TUGU SALURAN DRAINASE JALUR KABUPATEN PANJANG 199m, Kab. Trenggalek	Tugu	Tumpuk	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
174	2767980	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Untuk menjaga kemantapan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan dengan cara mencegah kerusakan meluas, mengembalikan kondisi jalan sesuai standar, memperpanjang umur pakai jalan, serta memperlancar transportasi mohon bantuan Pemeliharaan Jalan di Ruas Jalan Lingkar Banjar No. Ruas 011 dengan volume = 30m.	Dusun Nambak RT. 019, RW. 003, Kab. Trenggalek	Panggul	Banjar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
175	2768233	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Untuk mengalirkan kelebihan air hujan dan air tanah agar tidak menggenang di permukaan jalan serta mencegah kerusakan struktur jalan mohon bantuan Pembangunan Drainase Jalan di Ruas Jalan Lingkar Banjar No. Ruas 011 dengan volume = 500m.	Dusun Nambak RT. 022 - RT. 024, RW. 003, Kab. Trenggalek	Panggul	Banjar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
176	2768375	#KEREN Pendampingan, Advokasi dan Edukasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Diharapkan dengan adanya program ini semua unsur yang ada di desa lebih bisa memahami tentang pentingnya pendampingan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Desa Slawe, Kab. Trenggalek	Watulimo	Slawe	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
177	2769056	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan yang belum memadahi yaitu pada bagian tengan masih berupa pasangan batu sehingga menggangu kenyamanan penguna jalan dan masyarakat dengan volume P=300 M x L=3 M	Dusun Waru RT 04 RW 03, Kab. Trenggalek	Watulimo	Slawe	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
178	2769412	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Untuk meningkatkan kemampuan manajerial, pengelolaan keuangan, dan strategi bisnis agar BUMDes mampu menggerakkan ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) mohon bantuan Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdesa.	Desa Banjar, Kab. Trenggalek	Panggul	Banjar	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
179	2769782	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi Jalan yang saat ini Rusak berat/Parah yang terletak di jalan Kabupaten Trenggalek tepatnya pada Ruas jalan Siki-Banteng dengan panjang kurang lebih 5 km. dan sangat menghambat berkembangnya perekonomian masyarakat.	Desa Siki Ruas Jalan Siki-Bantheng (Dsn.Nguluh-Dsn.Senuli), Kab. Trenggalek	Dongko	Siki	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
180	2770041	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Drainase dilingkungan RT 05 s.d RT 06 Desa Tasikmadu tidak berfungsi dengan baik sehingga ketika intensitas hujan bertambah muncul genangan air bahkan sampai banjir kepemumikan warga. Oleh karena itu, drainase tersebut harus diperbaiki sepanjang 240 Meter, Lembar 0,70m, dan tinggi 0,70 m.	Dusun Ketawang RT 05 Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Watulimo	Tasikmadu	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
181	2770182	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	jalan ruas dusun bonpal sampai pingit lor jalan saat ini banyak lubang	Dusun Bopal RT 10 sampai Dusun Pingit Lor RT 15, Kab. Trenggalek	Durenan	Gador	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
182	2770192	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Terdapat beberapa titik lokasi longsor TPJ dan TPT yang ada di Ruas Jalan Kabupaten Trenggalek yang berada di RT.01 Dsusn Krajan yang kondisinya membahayakan Pengguna jalan,dan juga dapat menimbulkan jalan amblas.	Desa Siki, Kab. Trenggalek	Dongko	Siki	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
183	2770224	#KEREN Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Terbatasnya usaha BUMDesa sehingga diharapkan dengan adanya pembinaan ini bisa memacu para pengurus untuk lebih berinovasi dalam mengembangkan badan usahanya	Desa Slawe, Kab. Trenggalek	Watulimo	Slawe	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
184	2770457	#MPP Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Pada Malam hari Jalan PU gelap sering Trejadi Kecelakaan	Dusun Turi RT.01-02, Kab. Trenggalek	Pule	Kembangan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
185	2770500	#MPP Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	Saluran irigasi masih berupa tanah dan setiap tahun sering jebol.	Dsn Ceme Rt 26 Rw 12 Desa Ngadirenggo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirenggo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
186	2770504	#KEREN Advokasi dan Edukasi Sekolah dan Masjid Ramah Anak	Seringnya terjadi Bulliying terhadap anak	Desa Karanganyar, Kab. Trenggalek	Pule	Karanganyar	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
187	2770840	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Perlu adanya rehabilitasi jalan ruas kabupaten yang ada di Desa Pandean dan merupakan jalan antar Desa Cakul dan Desa Pandean juga merupakan jalan antar Kecamatan yang pada saat ini mengalami rusak sedang sampai berat	Dusun Jogadi RT.012, RT.013 dan RT.014, Kab. Trenggalek	Dongko	Pandean	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
188	2771116	#KEREN Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Destinasi Wisata meliputi pengelolaan daya tarik destinasi wisata, penguatan SDM dan kelembagaan, pendampingan pengembangan desa wisata.	Usulan Pelatihan /Bimtek Pengelolaan daya tarik destinasi Wisata,penguatan kelembagaan,pendampingan, penguatan SDM pengembangan Desa wisata, pelatihan ini sangat di butuhkan agar desa wisata bisa lebih maju.	Desa Botoputih, Kab. Trenggalek	Bendungan	Botoputih	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
189	2771199	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Perlu adanya saluran drainase yang terletak di Desa Pandean disepanjang ruas jalan kabupaten Talun Pandean	Dusun Talun sampai ke Dusun Bonsari Desa Pandean, Kab. Trenggalek	Dongko	Pandean	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
190	2771336	#KEREN Pendampingan, Advokasi dan Edukasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Perempuan dan Anak masa kini sudah semakin Modern mengikuti Arus Globalisasi, Pengaruh medsos dan pergaulan menjadi sinyal bahaya bagi generasi kedepan. melalui Advokasi dan Pendampingan Desa berkomitmen untuk menjadi Desa Ramah perempuan dan Anak	RT.21 DS. SENGON, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sengon	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
191	2771462	#MPP Rehabilitasi atau Renovasi Bangunan Gedung Pemerintah	Untuk memperbaiki kerusakan, meningkatkan kualitas fasilitas, dan mengoptimalkan fungsi pelayanan publik serta menciptakan ruang kerja yang aman, nyaman, dan layak bagi aparatur maupun warga yang berkunjung karena kondisi bangunan yang sudah lama mohon bantuan Renovasi Kantor Kecamatan Panggul	Jalan Raya Panggul No. 11 Kantor Kecamatan Panggul, Kab. Trenggalek	Panggul	Wonocoyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
192	2771661	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	jalan daerah penghubung kecamatan Dongko menuju Desa Salamwates yang melewati Desa Petung banyak yang tebing jalannya perlu tembok penahan jalan (TPJ) terutama yang berada di RT 19 RW 02 Dsn Banar, maka memohon kepada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang untuk menindak lanjuti usulan kami tersebut.	RT 19 RW 04 Dsn Banar. , Kab. Trenggalek	Dongko	Petung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
193	2771770	#KEREN Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Warga masyarakat Desa Ngadirejo penyandang cacat dan disabilitas masuk desil 1-5 sangat membutuhkan alat bantu namun kesulitan untuk membeli karena tergolong warga midkin	Warga Desa Ngadirejo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirejo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
194	2772275	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Perlu adanya rehabilitasi sedang sampai berat ruas jalan kabupaten yang ada di Desa Pandean dan merupakan jalan poros antar kecamatan dan jalan antar desa sepanjang Dusun Talun ke Desa Sobo Munjungan	Dusun Talun sampai Dusun Bonsari, Kab. Trenggalek	Dongko	Pandean	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
195	2772560	#MPP Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD/Sederajat	Bangunan TK Paud Kamar Mandinya kurang memadai, dan ruang parkir sebagian belum di paving.	Dusun Krajan RT 20 RW 05, Desa Ngulankulon, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngulangkulon	DINAS PENDIDIKAN
196	2772648	#MPP Restorasi Arsip	Sudah rusak berat	Dusun Gador RT 01 RW 01, Kab. Trenggalek	Durenan	Gador	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
197	2772799	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi jalan dimaksud saat ini mengalami kerusakan/ ambles yang cukup parah sehingga menghambat dan membahayakan aktivitas masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun sosial.	Ruas jalan Kepuh – Kepuh Jadam di Dusun Mloko, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Prambon	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
198	2772896	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Gorong-gorong)	Jalan Putus Trasportasi Menggunakan Darurat	Dusun Krajan RT.10 Jalan Jurusan Puyung, Kab. Trenggalek	Pule	Kembangan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
199	2773140	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi jalan yang rusak dan untuk menyambung pembangunan jalan tahun lalu agar dapat menyambung total jalan antar desa tangkil ke depok mohon bantuan Pengaspalan Jalan di Ruas Jalan Depok - Tangkil No. Ruas 003 dengan volume = p: 2.500m x l: 3m.	Dusun Galih RT. 021, RW. 007, Kab. Trenggalek	Panggul	Tangkil	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
200	2773204	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan merupakan sarana vital dalam menunjang aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Jalan Dusun Sooko Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek saat ini mengalami kerusakan cukup parah sehingga menghambat mobilitas warga, khususnya saat musim hujan. Dasar Permohonan yaitu Kondisi jalan rusak dan berlubang, tingginya aktivitas masyarakat pada jalur tersebut, sebagai akses utama perekonomian, pertanian, dan pendidikan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan.	Jalan Dusun Sooko Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Prambon	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
201	2773236	#MPP Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Kurangnya penerangan jalan sehingga apabila malam hari menjadi gelap dan mengganggu pengguna jalan	Dusun Ponggok, Kab. Trenggalek	Tugu	Ngepeh	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
202	2773419	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Untuk menstabilkan tanah di lereng atau area labil agar tidak longsor, sehingga memperkuat struktur jalan, mencegah amblas, dan menjaga keamanan serta kelancaran transportasi dengan menahan tekanan tanah mohon bantuan Tembok Penahan Jalan di Ruas Jalan Depok - Tangkil No. Ruas 003 dengan volume = p: 50m x t: 3,5m.	Dusun Galih RT. 021, RW. 007, Kab. Trenggalek	Panggul	Tangkil	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
203	2773620	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	ketika musim hujan air meluap kejalan	RT. 08 RW. 04 Dusun Sumber Desa Ngulanwetan, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngulanwetan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
204	2773647	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan Aspal mengalami rusak berat yang merupakan jalan penghubung antar Desa Kamulan, Desa Pakis, Desa Gador	Dusun Krangnongko, Rt:04 Rw:01 Desa Kamulan, Kab. Trenggalek	Durenan	Kamulan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
205	2773698	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan rusak sepanjang 400 meter, berada di jalan ruas Kabupaten tepatnya di ruas SENGON-PRAMBON DI RT.21 yang merupakan Jalan Utama warga Desa Sengon menuju Desa Lain , Usulan pembangunan Jalan : 400 X 3 X 0,20 m.	RT.21-DS.SENGON, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sengon	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
206	2773819	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Gorong-gorong)	Untuk mengalirkan air hujan secara efektif di bawah jalan, mencegah genangan air dan banjir, serta menjaga stabilitas struktur jalan agar tidak cepat rusak atau amblas mohon bantuan Gorong - Gorong di Ruas Jalan Banteng - Prapatan No. Ruas 006 dengan volume = p: 40m x t: 6m.	Dusun Selur RT. 015 - RT. 006, Kab. Trenggalek	Panggul	Tangkil	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
207	2774461	#MPP Pengaman Pengguna Jalan (Guardrail, SafetyMirror/Cermin Tikungan dan Deliniator/Patok Jalan)	banyaknya titik rawan kecelakaan yang terdapat di Desa Pakis saat jam sekolah. Utamanya di perempatan dan tikungan tajam. Desa pakis merupakan poros utama jalan pendidikan antar desa (durenan - semarum - sumbergayam-kamulan-gador-sumberejo-baruharjo) . (permntaan 12 titik cermin cembung, lokasi terlampir)	perempatan rt 02 (2bh), perempatan rt 13 (2bh), pertigaan MI pakis (1 bh), pertigaan rt 17 (1bh), pertigaan rt 01 (1bh), pertigaan rt 02 (1bh), pertigaan rt 04 (1bh), pertigaan rt 05 (1bh), rt 11 (1bh), rt 01 (1bh)Desa Pakis Kecamatan Durenan , , Kab. Trenggalek	Durenan	Pakis	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
208	2775177	#MPP Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian (Traktor Roda Dua, Cultivator, Alat Pengolah Pupuk Organik, Hand Traktor Capung)	Sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat Desa Ngembel, dan masalah yang sering ditemui adalah sulitnya mendapatkan pupuk. Melalui kelompok tani, dilakukan inovasi pengolahan pupuk organik, namun inovasi ini masih membutuhkan alat penunjang, termasuk mesin penggiling dan pencacah untuk produksi pupuk organik yang lebih optimal.	Desa Ngembel, Kab. Trenggalek	Watulimo	Ngembel	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
209	2776325	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Pengaspalan jalan Dompyong Krapyak dengan volume panjang 1.500 m lebar 3 m, kondisi jalan rusak berat.	Dusun Krapyak, Kab. Trenggalek	Bendungan	Botoputih	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
210	2776351	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi dan tuntutan pengelolaan usaha yang semakin kompetitif, peningkatan kapasitas BUMDes menjadi kebutuhan yang mendesak. Kapasitas yang dimaksud tidak hanya mencakup kemampuan pengelola dalam aspek administrasi dan keuangan, tetapi juga mencakup perencanaan bisnis, inovasi produk, pemasaran, penguatan jejaring usaha, serta pemahaman regulasi yang berlaku. Tanpa peningkatan kapasitas yang memadai, potensi desa yang besar berisiko tidak terkelola optimal.	RT 01 RW 01 DUSUN KRAJAN DESA WINONG, Kab. Trenggalek	Tugu	Winong	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
211	2776799	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	pada musim penghujan air meluber ke pemukiman dan jalan sehingga perlu adanya Drainase yang memadai	Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Tugu	Ngepeh	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
212	2777055	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Untuk mengelola BUMDes secara profesional, meningkatkan perekonomian desa, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan kemandirian desa melalui pemahaman manajemen, administrasi keuangan, pengembangan usaha, serta pemanfaatan potensi desa secara optimal mohon bantuan Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdesa.	Desa Tangkil, Kab. Trenggalek	Panggul	Tangkil	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
213	2777617	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi jalan yang rusak dan membutuhkan perbaikan mohon bantuan Pengaspalan Jalan di Ruas Jalan Sukorejo - Pantai Joketro No. Ruas 010 dengan volume = 100m.	Dusun Sukorejo RT. 036, RW. 007, Kab. Trenggalek	Panggul	Nglebeng	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
214	2778094	#MPP Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Untuk menggerakkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi lokal mohon bantuan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Bumdesa.	Bumdes Makmur, Kab. Trenggalek	Panggul	Nglebeng	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
215	2779604	#KEREN Advokasi dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Pengasuhan Positif bagi Keluarga	Sebagian dari Masyarakat Kami ada yang belum menyadari betapa pentingnya menikah di usia matang. alasan adat budaya atau tradisi dan malu kalau mempunyai bujang lapuk / perawan tua sering dijadikan alasan pernikahan dini. mohon dinas / instansi terkait ikut memberikan penyuluhan terhadap masyarakat kami	Dusun Krajan, Dusun Ponggok dan Dusun Sendang Desa Puyung, Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
216	2779906	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Gorong-gorong)	Di pinggir jalan raya yang berdampingan dengan lapangan Desa, belum terbangun parit / drainase sehingga kalau turun hujan air meluber kemana-mana yang mana hal tersebut memicu kekhawatiran kami akan menimbulkan tanh longsor di sekitarnya mengingat kita berada di daerah pegunungan. Lokasi lapangan saat ini juga sudah dibangun gedung KDMP Merah Putih. sehingga volume air kalau turun hujan senamikn bertambah.	RT 11 RW 06 Dusun Ponggok Desa Puyung Kecamatan Pule, Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
217	2780240	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan Manggahan Ngepring menuju Desa Sidomulyo saat ini kondisinya rusak parah terlebih saat musim hujan ini banyak tebing yang longsor	Dusun Sendang Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
218	2780313	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan Manggahan Pahit menuju Desa Kembangan saat ini kondisinya rusak parah, Kerusakan terparah berada di kawasan pahit menuju jalan raya.	Dusun Krajan, Dusun Ponggok dan Dusun Sendang, Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
219	2780577	#MPP Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Desa Kami berada di perbukitan dan sering terjadi tebing longsor	Desa Puyung, Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
220	2780683	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tebing jalan poros manggahan pahit berpotensi longsor dan sebagian belum memiliki bangunan TPJ / TPT dan 2 titik tebing yang belum memiliki TPJ termasuk titik rawan	RT 23 dan RT 17 Dusun Sendang Desa Puyung, Kab. Trenggalek Lokasi Tebing yang satunya berada di kawasan SD Negeri 2 puyung, Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
221	2780760	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi tanah yang rawan longsor ketika terjadi hujan deras mohon bantuan pembangunan tembok penahan jalan dengan volume = p: 50m x t: 2m.	Dusun Ngajaran RT. 031, RW. 006, Kab. Trenggalek	Panggul	Ngrambingan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
222	2781735	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Untuk mempermudah akses petani ke lahan pertanian untuk memperlancar mobilitas alat pertanian, mendistribusikan sarana produksi dan mengangkut hasil panen mohon bantuan Pembangunan Jalan Usaha Tani dengan volume = p: 200m x l: 2,4m.	Dusun Sambeng RT. 026 - RT. 027, RW. 004, Kab. Trenggalek	Panggul	Banjar	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
223	2781780	#MPP Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Untuk memperlancar distribusi air hingga ke lahan pertanian secara efisien, meningkatkan produktivitas dan perluasan areal tanam, serta mengurangi risiko gagal panen dengan memastikan ketersediaan air yang cukup mohon bantuan Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani dengan volume = p: 110m x t: 0,6m.	Dusun Pagersari RT. 014, RW. 002, Kab. Trenggalek	Panggul	Banjar	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
224	2781896	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan poros Desa Puyung menuju Desa Selur Kb. Ponorogo ini kondisinya rusak parah saat ini kondisi jalan masih makadam	RT 13 RW 07 Dusun Ponggok Desa Puyung, Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
225	2781918	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Dijalan raya depan SMPN 3 Pule belum terbangun drainasi permanen sehingga apabila turun hujan air meluber ke mana mana	RT 08 RW 04 Dusun Krajan Desa Puyung, Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
226	2782048	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tebing Jalan Raya masih tanah dan berpotensi gugur/ longsor dapatnya dibangunkan TPT Permanen	RT 13 RW 07 Dusun Ponggok Desa Puyung, Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
227	2788520	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi Jalan yang sudah rusak dan membutuhkan perbaikan mohon bantuan Pengaspalan Jalan di Ruas Jalan Panggul - Slorok No. Ruas 013.	Dusun Panggul RT. 012, RW. 003, Kab. Trenggalek	Panggul	Panggul	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
228	2790209	#MPP Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	irigasi masih tanah panjang 1000 meter lebar 1,5 meter tinggi 1 meter	DUSUN NGLEMBU RT 24/08 DESA BENDOREJO KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
229	2791188	#MPP Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	Untuk mencukupi kebutuhan air pada petani perlu adanya peningkatan jaringan irigasi yang masih berupa tanah menjadi jaringan irigasi beton/cor	RT.15,08,11, Kab. Trenggalek	Kampak	Timahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
230	2791902	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan penghubung antar desa antara Desa Sukorejo dan Desa Tumpuk Kecamatan Tugu,sering terjadi kecelakaan karena kondisi jalan rusak berat dan licin ketika musim penghujan (rabat beton dengan volume P=1000M L=4M dan T=25 CM)	Dusun Gendong Desa Sukorejo Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Sukorejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
231	2792275	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	air meluap ke jalan sehingga jalan menjadi licin ketika musim penghujan membutuhkan saluran pembuangan air (P=300M L=0,6M T=0,7M)	RT 12/RW 04 Dusun Krajan , Kab. Trenggalek	Tugu	Sukorejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
232	2792670	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan sudah mengalami kerusakan dan beberapa bagian tengan jalan masih berupa pasangan batu sehingga sangat menggagu pengguna jalan/masyarakat apalagi jalan merupakan jalur lintas RT menuju pasar Sebo dengan volume P = 250 M x L=3 M	Jalur Lintas RT 03-RT 08 Dusun Waru Desa Slawe, Kab. Trenggalek	Watulimo	Slawe	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
233	2792757	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan Karanggandu menuju Damas mengalami Rusak Berat, Banyak Jalan berlobang, banyak terjadi kecelakaan panjang 2000 m lebar 4 m	RT 22 dan RT 26 DUSUN GANDU DESA KARANGGANDU, Kab. Trenggalek	Watulimo	Karanggandu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
234	2792887	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Badan jalan terkikis karena abrasi sehingga membuat jalan menjadi sempit sehingga membahayakan pengguna jalan. Panjang TPJ 80 M	Desa Nglebo, Kab. Trenggalek	Suruh	Nglebo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
235	2793012	#MPP Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sumber Mata Air Duren Gunting yang dikelola KPSPAM Tirto Kencono Desa Watuagung masih belum sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat. karena kurangnya Pipanisasi dan sambungan SR ke rumah warga. Sehingga dimusim kemarau masih banyak yang kekurangan air. maka perlu bantuan Pipa HDPE ukuran 63 mm Sepanjang 4000 meter dan water mater SR ke rumah warga sebanyak 95 KK	Dusun Suwur, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watuagung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
236	2793100	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Badan Jalan yang longsor sehingga membutuhkan pengaman badan jalan dengan volume panjang 20 m tinggi 10 m	RT 05 RW 02 Dusun Krajan Desa Gading, Kab. Trenggalek	Tugu	Gading	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
237	2793235	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Jalan sering tergenang ketika hujan, pengendara motor kesulitan melintasi jalan panjang 50 m	RT 19 RW 09 Dusun Gandu Desa Karanggandu, Kab. Trenggalek	Watulimo	Karanggandu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
238	2793315	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Gorong-gorong)	Gorong Gorong Jalan depan SDN 2 Karanggandu amblas sehingga jalan tidak dapat dilalui, Panjang 4 M	RT 19 RW 06 Dusun Gandu Desa Karanggandu, Kab. Trenggalek	Watulimo	Karanggandu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
239	2793539	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan penghubung antar Kabupaten Trenggalek & Ponorogo serta akses utama warga Rt 12 dan 11 sudah lama rusak parah	Rt 12 Rw 04 Dusun Tompe Desa Tegaren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Tegaren	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
240	2793559	#KEREN Pendampingan, Advokasi dan Edukasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	dikarenakan banyaknya orang tua yang bekerja ke luar negeri maka kami harap adanya sosialisasi terkait parenting atau cara pola asuh terhadap anak di karenakan banyak anak masuk pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba	Desa Karanggandu, Kab. Trenggalek	Watulimo	Karanggandu	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
241	2793907	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	tebing sudah longsor dan dampaknya jalan utama warga rt 11 dan 12 serta akses jalan antar kabupaten trenggalek dan ponorogo akan terputus	Rt 11 Rw 04 Dusun Tompe Desa Tegaren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Tegaren	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
242	2794238	#MPP Rehabilitasi atau Renovasi Bangunan Gedung Pemerintah	Kondisi Bangunan Kantor Kecamatan Suruh rusak	RT.01 /01 Desa/Kecamatan Suruh Trenggalek, Kab. Trenggalek	Suruh	Suruh	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
243	2795128	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Bangunan Pelengkap Jalan pada ruas jalan Senden-Pakel sangat memprihatinkan, tepatnya di RT 09 RW 02 Dsn Glatik Desa Pakel. Ruas Jalan penghubung antara Kecamatan Kampak dan Watulimo ini nyaris tidak bisa dilalui dikarenakan pada sisi atas dan bawah jalan mengalami longsor. Adapun bangunan pelengkap jalan yang dibutuhkan adalah : 1. TPJ dengan Volume P. 50 M T. 4 M. dan TPT. Panjang 35 M T. 5 M. Kami berharap adanya atensi pada ruas jalan tersebut agar jalan bisa berfungsi secara maksimal	RT 09 RW 02 Dsn Glatik Desa Pakel Kecamatan Watulimo, Kab. Trenggalek	Watulimo	Pakel	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
244	2795283	#MPP Pengadaan Mesin Press Sampah Hidrolik	Untuk Pres sampah sangat dibutuhkan KPP Pengelola sampah,Agar sampah yang terpilah dapat tertata rapi dan mudah di Simpan,Untuk itu kami mengajukan Mesin Press Pengolah sampah	Dusun Crabak, Kab. Trenggalek	Dongko	Sumberbening	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
245	2795623	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Ruas jalan Jombok-Kasrepan, tepatnya mulai perbatasan desa jombok (batas gamping) sampai dengan simpang lima kasrepan sepanjang 6000 M saat ini kondisinya rusak dan beberapa bagian amblas sehingga membahayakan pengguna jalan. Saat musim penghujan banyak genangan air dan longsor. Jalan ini merupakan akses utama masyarakat Kecamatan Pule menuju Trenggalek	Desa Jombok, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
246	2796023	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Ruas jalan Jombok - Sukokidul sepanjang 4700 M saat ini kondisinya rusak berat dan beberapa bagian amblas sehingga membahayakan pengguna jalan. Saat musim penghujan banyak genangan air dan jalan menjadi licin. Jalur ini merupakan akses menuju sekolah, pasar, koperasi desa merah putih dan wilayah antar desa sehingga sangat dibutuhkan peningkatan.	Dusun Bakalan, Dusun Jombok, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
247	2796436	#MPP Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Usaha Bumdes masih sebatas simpan pinjam dan perdagangan sembako, untuk meningkatkan pendapatan maka perlu ada pembinaan khusus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Tempat Usaha Dsn. Gambang Rt.25 Rw.08 Desa Ngadirejo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirejo	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
248	2796526	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Ruas jalan Jombok-Kasrepan, tepatnya mulai desa gamping (jogorogo/perbatasan desa jombok) sampai dengan simpang lima kasrepan sepanjang 6.000 M saat ini belum memiliki sistem drainase yang memadai, sehingga ketika musim penghujan air menggenang di jalan, membahayakan pengguna jalan dan dapat mengakibatkan bencana lain seperti tanah longsor.	Desa Jombok, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
249	2797129	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	kondisi jalan yang masih berupa tanah dan ketika musim hujan sangat becek maka perlu pengerasan atau rabat jalan dengan volume panjang 250 m lebar 2,7 m	RT 05 RW 02 Dusun Krajan Desa Gading, Kab. Trenggalek	Tugu	Gading	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
250	2797172	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Ruas jalan Jombok-Kasrepan, tepatnya mulai perbatasan desa jombok (batas gamping) sampai dengan simpang lima kasrepan sepanjang 6000 M saat ini dibeberapa titik terjadi longsor dan retak sehingga mengikis badan jalan maupun menutupi badan jalan sehingga membutuhkan bangunan pelengkap jalan (TPT/TPJ)	Desa Jombok, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
251	2797447	#MPP Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Ruas jalan Jombok-Kasrepan, tepatnya mulai Balai Desa Jombok sampai dengan simpang lima kasrepan sepanjang 1000 M saat ini belum memiliki alat penerangan jalan yang standar.	Desa Jombok, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
252	2797913	#MPP Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Ruas jalan Jombok-Kasrepan, tepatnya mulai perbatasan Desa Jombok sampai dengan Balai Desa Jombok saat ini belum memiliki alat penerangan jalan yang memadai, sehingga membahayakan pengguna jalan pada malam hari.	Desa Jombok, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
253	2798115	#KEREN Pemberian Paket GEMARIKAN untuk anak stunting dan berisiko stunting.	Kurangnya pemahaman orang tua balita tentang gizi seimbang terutama konsumsi protein hewani merupakan penyebab utama kasus stunting di desa Karangrejo. Penanganan stunting melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) adalah intervensi gizi spesifik yang mendorong konsumsi ikan kaya protein hewani, omega-3, dan DHA untuk pertumbuhan optimal anak. Melalui Gemarikan, kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang meningkat, sehingga angka konsumsi ikan naik dan memutus rantai stunting	Desa Karangrejo, Kab. Trenggalek	Kampak	Karangrejo	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
254	2798256	#KEREN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Gedung Retak,Atap ambles dan Plavon banyak yang rusak	Dusun Talun Rt 001 Rw 001 Komplek Balai Desa Buluagung, Kab. Trenggalek	Karangan	Buluagung	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
255	2798347	#MPP Bantuan bibit ternak kambing PE	Desa Tegaren memiliki sumber pakan hijau yang luas, namun kesejahteraan warga masih rendah karena hanya mengandalkan pertanian musiman dan Peternak masih memelihara kambing lokal secara tradisional. Pertumbuhannya lambat dan nilai jualnya rendah, sementara warga tidak memiliki modal untuk membeli bibit Kambing PE yang unggul.	Desa Tegaren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Tegaren	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
256	2798495	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	kondisi saat ini Jalan rusak berat, aspal lama mengelupas habis, banyak cekungan, saat hujan konsisi jalan sangat licin sehingga membahayakan pengguna jalan serta rawan kecelakaan. jalan tersebut juga salah satu jalan terdekat yang menghubungkan antara Desa Bogoran, Desa Karangrejo dan Desa Ngadimulyo	RT.01 s/d 04 RW,01 Dusun Tanjung, Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
257	2798785	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Di wilayah Dusun Nglengkong, RT. 02 belum tersedia drainase. Akibatnya, saat terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan sering menimbulkan genangan maupun banjir di lingkungan permukiman dan sepanjang jalan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan drainase sebagai upaya untuk mengendalikan aliran air hujan, mencegah banjir dan genangan, menjaga kualitas lingkungan, serta menunjang kenyamanan dan kesehatan masyarakat. Dengan panjang = 100 M.	Dusun Nglengkong, RT.02 RW.01, Kab. Trenggalek	Durenan	Karanganom	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
258	2798939	#KEREN Bantuan Alat Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan Ekonomi	kurangnya alat bantu untuk pembuatan kerajinan bambu untuk mengembangkan UMKM warga	Desa Tegaren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Tegaren	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
259	2799087	#MPP Pelatihan wirausaha pemula bagi pemuda	Saat ini banyak SDM dari pemuda gen Z tetapi masih membutuhkan ruang untuk dapat meningkatkan potensi yang dimiliki.	RT 15/04 Dusun kademangan, Kab. Trenggalek	Kampak	Bendoagung	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
260	2799373	#KEREN Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Destinasi Wisata meliputi pengelolaan daya tarik destinasi wisata, penguatan SDM dan kelembagaan, pendampingan pengembangan desa wisata.	Terbatasnya SDM Pengelola Wisata Desa,untuk itu kami mengajukan pelatihan bagi pengelola wisata	Desa Sumberbening, Kab. Trenggalek	Dongko	Sumberbening	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
261	2799559	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Karena belum ada saluran air saat musim hujan sering terjadi luapan air di sepanjang jalan,untuk itu kami mengajukan saluran sepanjang 300 Meter	RT 30 RW 06 DUSUN MLOKO, Kab. Trenggalek	Dongko	Sumberbening	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
262	2799832	#MPP Restorasi Arsip	Letter C adalah dokumen yang sangat penting di Desa, di Desa Pakel Letter C perlu adanya tindakan restorasi untuk menjaga keberadaanya. Adapun kegiatan yang kami ajukan adalah Restorasi Letter C Desa sebanyak 2 Buku (1.000 Lembar)	Kantor Desa Pakel RT 11 RW 02 Dsn Glatik Desa Pakel, Kab. Trenggalek	Watulimo	Pakel	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
263	2800718	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan yang sudah rusak dan membutuhkan perbaikan jalan mohon bantuan Paket Pekerjaan Perkerasan Jalan Lingkungan dengan volume = p: 547m x l: 3,5m.	Dusun Karang RT. 028, Kab. Trenggalek	Panggul	Wonocoyo	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
264	2800964	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi jalan yang rusak berat dan belum pernah ada perbaikan mohon bantuan Pengaspalan Jalan di Ruas Jalan Nglebeng - Bendogolor No. Ruas 009 dengan volume = p: 477m x l: 4m.	DUSUN BENDOGOLOR RT. 034, RW. 010 , Kab. Trenggalek	Panggul	Wonocoyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
265	2801199	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Masih banyak terdapat pengurus bumdes yang kurang memiliki kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan usaha-usaha bumdes.	Desa Jombok, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
266	2801886	#MPP Pengadaan Mesin Pemilah Sampah	Untuk meningkatkan efesiensi pengelolaan limbah, dan mengurangi volume sampah ke TPA, menurunkan biaya operasional dan mengurangi resiko kesehatan.	RT 10 RW 03 DUSUN KRAJAN BUMDes DEWA MAKMUR, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watulimo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
267	2801935	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan ini tepatnya RT/RW 12/04 Dsn Ampalgading Desa Srabah merupkan jalan penghubung dgn Ds Depok, Thn 2025 Ds Depok mengalami musibah bencana Longsor yang Ke 2 mengaibatkan Korban Jiwa dan Jalan ini merupakan salah satu akses utama Masuknnya Bantuan baik dari Medis,Tim Evakuasi serta alternatif pendidikan ,ekonomi dan Kesehatan. Dengan Pertimbanagan Kondisi yang ada maka perlu Pembangunan Rabat Jalan agar mempermudah akses Mobiltas Masyarakat pengguna jalan tersebut dengan volume 600 m x 3 m	RT 12 RW 04 Dusun Ampal Gading Desa Srabah , Kab. Trenggalek	Bendungan	Srabah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
268	2802122	#KEREN Bantuan sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Lele) (Stunting)	Tambahnya angka stunting di desa kami dan kurangnya pendanaan untuk anak stunting maka dari itu kami mengajukan sarana dan prasarana budidaya ikan air tawar (ikan lele) (STUNTING)	Dusun krajan dan Dusun Sobo, Kab. Trenggalek	Dongko	Ngerdani	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
269	2802494	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Jalan ini merupakan Akses Jalan Utama Srabah yang mana apabila hujan turun aliran air mengenang dipermukaan jalan sehingga beresiko merusak struktur jalan (retak,ambles) serta beresiko mengakibatkan kecelakan karena jalan licin sehingga perlu adanya Bangunan Pelengkap jala (Drainase Jalan) dengan Volume 200 m.	RT 02 RW 01 Dusun Srabah Desa Srabah, Kab. Trenggalek	Bendungan	Srabah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
270	2802699	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Perlunya adanya pembinaan pengurus BUMDesa Ngulanwetan Sejahtera karena merupakan pengurus baru	Desa Ngulanwetan, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngulanwetan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
271	2802922	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Perlu adanya pembangunan Jalan Usaha Tani yang berlokasi di Dusun Bonsari RT.031 RW.012 Desa Pandean	DUSUN BONSARI RT.031 RW.012, Kab. Trenggalek	Dongko	Pandean	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
272	2802981	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Kondisi Jalan Kabupaten di wilayah Karangturi s/d desa munjungan jalan banyak berlubang	Desa Karangturi s/d Desa Munjungan Dusun Bungur, Kab. Trenggalek	Munjungan	Karangturi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
273	2803166	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	PENINGKATAN JALAN DI RUAS JALAN BUYUT DUSUN PAKEL PENGHUBUNG DUA DESA ANTARA DESA DOMPYONG DAN BOTOPUTIH DENGAN VOLUME P: 3.000 METER L: 3 METER DAN TPJ (TEMBOK PENAHAN JALAN) 2 TITIK DENGAN VOLUME P: 25 METER T: 5 METER YANG MERUPAKAN JALUR EKONOMI MASYARAKAT SENTRA PERTANIAN DAN SUSU SAPI PERAH. SAAT KONDISI JALAN RUSAK PARAH DAN TEBING JALAN LONGSOR SEHINGGA BADAN JALAN MENGGANTUNG DAN MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN.	RT. 27 RW. 08 - RT. 20 RW.06 DUSUN PAKEL , Kab. Trenggalek	Bendungan	Dompyong	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
274	2803341	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	BUMDEsa Sengon sudah mempunyai usaha pertokoan dan simpan pinjam, namun perlu pelatihan dan Peningkatan kapasitas Pengurus agar Bumdes menjadi berkembang dan maju.	RT.21-DS.SENGON, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sengon	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
275	2803446	#KEREN Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Destinasi Wisata meliputi pengelolaan daya tarik destinasi wisata, penguatan SDM dan kelembagaan, pendampingan pengembangan desa wisata.	Perlu adanya peningkatan Kapasitas Kelembagaan pengelolaan Destinasi Wisata meliputi pengelolaan daya tarik destinasi wisata, penguatan SDM dan Kelembagaan, serta pendampingan pengembangan desa wisata yang ada di Desa Pandean	Dusun Krajan RT.016 RW.006 , Kab. Trenggalek	Dongko	Pandean	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
276	2803725	#KEREN Advokasi dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Pengasuhan Positif bagi Keluarga	Perlu adanya Advokasi dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak dan pengasuhan Positif bagi Keluarga untuk mengurangi tingkat perkawinan anak usia dini dimana banyak terjadi dan mungkin juga menjadi salah satu faktor tingginya perceraian.	Desa Pandean, Kab. Trenggalek	Dongko	Pandean	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
277	2803766	#KEREN Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Perlu adanya Pembinaan dan Pengembangan Usaha BUMDesa Desa Pandean	Desa Pandean, Kab. Trenggalek	Dongko	Pandean	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
278	2803844	#KEREN Advokasi dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Pengasuhan Positif bagi Keluarga	Perkawinan anak masih terjadi akibat rendahnya pemahaman keluarga tentang dampaknya dan kesiapan berkeluarga. Kurangnya pengetahuan pengasuhan positif menyebabkan pola asuh belum ramah anak. Diperlukan edukasi terpadu bagi keluarga untuk mencegah perkawinan anak dan mendorong pengasuhan yang mendukung tumbuh kembang anak.	Desa Ngembel, Kab. Trenggalek	Watulimo	Ngembel	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
279	2803994	#MPP Restorasi Arsip	Arsip dan data Desa sebagian besar masih berupa buku catatan yang usianya sudah lama (misalnya BUKU LETER C dll), pengamanan Data dan informasinya sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan penyajian Data desa di tahun2 berikutnya.	RT.21-DS.SENGON, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sengon	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
280	2804028	#MPP Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Perlu adanya Bantuan pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) yang terletak di Dusun Bonsari RT.026 RW.010	DUSUN BONSARI RT.026 RW.010, Kab. Trenggalek	Dongko	Pandean	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
281	2804107	#KEREN Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	Saat ini warga masih masih swadaya untuk mendapatkan air untuk kebutuhan sehari hari sehingga penggunaan sangat terbatas dan berakibat pada sanitasi keluarga yang kurang maksimal	RT. 25 RW. 12 Dusun Balang, Kab. Trenggalek	Kampak	Senden	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
282	2804235	#KEREN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Puskesmas Pembantu yang ada di Desa Senden Kondisinya sangat memprihatinkan dan membahayakan pengguna fasilitas kesehatan tersebut	RT.23 RW. 11 Dusun Balang Desa Senden, Kab. Trenggalek	Kampak	Senden	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
283	2804255	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi jalan masih berupa tanah sehingga saat musim hujan jalan licin sulit dilalui dan menghambat kegiatan para petani	RT 012 RW 003 Dusun Jethak Desa Baruharjo, Kab. Trenggalek	Durenan	Baruharjo	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
284	2804339	#KEREN Advokasi dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Pengasuhan Positif bagi Keluarga	Kurangnya Pemahaman Tentang Bahaya Perkawinan di usia dini bagi para remaja khususnya	Desa Senden, Kab. Trenggalek	Kampak	Senden	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
285	2804486	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Perlunya peningkatan dan pengembangan kapasitas pengurus baru BUMDesa Tahun 2025 karena reorganisasi dari pengurus lama.	Balai Desa Jatiprahu RT.28 RW.05 Dusun Ngegong Desa Jatiprahu, Kab. Trenggalek	Karangan	Jatiprahu	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
286	2804628	#KEREN Pemberian Paket GEMARIKAN untuk anak stunting dan berisiko stunting.	Terdapat bayi yang terindikasi mengalami stunting berdasarkan data dari posyandu desa, sehingga perlunya peningkatan kualitas gizi untuk bayi tersebut	Balai Desa Jatiprahu RT.28 RW.05 Dusun Ngegong Desa Jatiprahu Kecamatan Karangan, Kab. Trenggalek	Karangan	Jatiprahu	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
287	2804854	#MPP Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian (Traktor Roda Dua, Cultivator, Alat Pengolah Pupuk Organik, Hand Traktor Capung)	Berkurangnya pemakaian pupuk kandang di karenakan masih berupa butiran dan susah di serap tanaman,untuk itu perlu Alat Pengolah Pupuk Organik (APPO)	RT. 26 RW. 12 Dusun Balang Desa Senden, Kab. Trenggalek	Kampak	Senden	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
288	2805026	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi jalan Persawahan dan perkebunan di wilayah kami saat ini masih belum memadai khusunya di RT 66 RW 14 Dusun Premban Desa Dongko kecamatan Dongko kabupaten Trenggalek, saat ini berupa tanah bebatuan licin saat musim hujan. Kondisi tersebut menyulitkan petani dalam mengangkut hasil panen dan sarana pertanian, serta membatasi akses kendaraan roda dua maupun roda empat menuju area persawahan dan perkebunan. Volume: P : 400m x L : 2,5 m.	RT. 66 RW 14 Dusun Premban Desa Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
289	2805065	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kurang memadainya jalan dilingkungan perumahan masyarakat Desa Kedunglurah Sehingga di musim penghujan jalan menjadi becek dan licin Dokumen Pendukung Foto Terlampir di Proposal, diakarenan templet upload foto tidak bisa di simpan	RT 13 Dusun Brongkah Wetan Desa Kedunglurah, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
290	2805543	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Kurangnya Pemahaman terkait administrasi laporan keuangan semesteran Meningkatkan dan menggali potensi pengurus Bumdes	Dusun Blaring RT 05 RW 02 Desa Panggungsari, Kab. Trenggalek	Durenan	Panggungsari	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
291	2805856	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Rusaknya Drainase di sepanjang ruas jalan Kabupaten, sehingga di musim penghujan banyak genangan air, jalan Kedunglurah - Gembleb dan Kedunglurah Semarum	Desa Kedunglurah, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
292	2806331	#MPP Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	1. Saluran pembuangan/irigasi yang masih berupa tanah menyebabkan sering terjadinya pengikisan tanah oleh aliran air 2. Adanya penyempitan saluran pembuang yang disebabkan ambrolnya tanah 3. Pada saat hujan juga masih sering terjadi banjir karena volume air naik hingga permukaan jalan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan infrastruktur jalan	DUSUN KRAJAN RT 2 RW 1, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumber	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
293	2810685	#MPP Pembangunan/ Peningkatan Ruang Terbuka Hijau	Desa Masaran belum memiliki Ruang terbuka Hijau, saat ini adanya berupa lapangan desa yang masih seadanya. kedepannya untuk dibuat bangunan RTH yang bisa menjadi tempat berkumpulnya masyarakat, tempat bermain dan lain sebagainya. lokasi RTH berada di RT 24 RW 05 Dusun Galih Desa Masaran	RT 24 RW 05 DUSUN GALIH DESA MASARAN, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
294	2811249	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Kondisi drainase saat ini masih berupa galiah tanah, yang mengakibatkan kalau dimusim hujan air meluber ke jalan	RT. 018 RW. 008 Dusun Sumbermadu Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Pucanganak	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
295	2811316	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan saat ini masih berupa tanah liat, kalau musim hujan jalan tersebut menjadi licin yang bisa membahayakan bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4	RT. 001 RW. 001 Dusun Pakel Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Pucanganak	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
296	2811340	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan saat ini masih berupa tanah liat, kalau musim hujan jalan tersebut menjadi licin yang bisa membahayakan bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4	RT. 017 RW. 007 DUsun Sumbermadu Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Pucanganak	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
297	2811396	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan saat ini masih berupa tanah makadam, kalau musim hujan jalan tersebut menjadi licin yang bisa membahayakan bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4	RT. 018 RW. 008 Dusun Sumbermadu Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Pucanganak	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
298	2811649	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan saat ini masih berupa tanah liat, kalau musim hujan jalan tersebut menjadi licin yang bisa membahayakan bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4	RT. 020 RW. 008 Dusun Sumbermadu Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Pucanganak	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
299	2811688	#MPP Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	Kondisi saluran irigasi saat ini masih berupa tanah, kalau musin hujan air tidak bisa mengalir dengan ancar dan bisa meluber ke sawah	RT. 016 RW. 007 Dusun Sumbermadu Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Pucanganak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
300	2812137	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Pembangunan Drainase lingkungan Volume 300 M, drainase yang ada masih berupa tanah, tidak berfungsi secara maksimal, air tumpah kejalan	RT 027 RW 010 DUSUN BANARAN DESA DEPOK KEC. Bendungan , Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
301	2812174	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ruas Dawuhan- Tumpakdolo volume 20 x 7 M badan jalan menyempit akibat longsor, akses jalan menuju pendidikan, pasar desa dan jaln poros	RT 014 RW 006 DUSUN KEBONAGUNG DESA DEPOK KEC. Bendungan , Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
302	2812335	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Pembangunan jalan paving volume 500 x 2, 5 m lokasi RT 14- RT 16 Rw 06 karena jalan masih berupa jalan tanah ketika musim hujan becek tidak bisa dilewati	RT 014 RW 006 DUSUN KEBONAGUNG DESA DEPOK KEC. Bendungan , Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
303	2812459	#MPP Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Pengadaan penerangan jalan umum (PJU) solar Cell ruas Dawuhan- Tumpakdolo sejumlah 20 titik	RT 012 RW 005 DUSUN KEBONAGUNG DESA DEPOK KEC. Bendungan , Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
304	2812549	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Pembangunan jalan paving volume 500 x 2 m lokasi RT 07 RW 03 karena jalan masih berupa jalan tanah ketika musim hujan becek tidak bisa dilewati	RT 007 RW 003 DUSUN SOKO DESA DEPOK KEC. Bendungan , Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
305	2813024	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Wilayah Dsn Krajan RT 8 RW 2 merupakan salah satu wilayah pemukiman yang memiliki akses jalan poros yang cukup vital bagi aktivitas masyarakat. Tebing di sepanjang sisi jalan mengalami penurunan kualitas struktur tanah sehingga berpotensi mengalami longsor atau amblesan, terutama pada saat musim hujan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan TPJ di RT.008 RW.002 Dusun Krajan dengan P= 60 m dan T= 3,5 m yang diharapkan mampu menjaga stabilitas badan jalan.	RT.008 RW.002 Dusun Krajan Desa Dukuh, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
306	2813032	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan penuh Lubang dan rusak berat	Ruas Jalan Buluagung ke Desa Ngentrong.(Terusan jalan Rabat beton Tahun 2025), Kab. Trenggalek	Karangan	Buluagung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
307	2813100	#MPP Pembangunan MCK / SPALD	Masalah utama kurangnya infrastruktur dasar, serta rendahnya kesadaran akan pengelolaan air limbah yang higienis	RT 10 RW 03 DUSUN KRAJAN (WKS), Kab. Trenggalek	Watulimo	Watulimo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
308	2813267	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Belum adanya Saluran air yang memadai	Dusun Kedungsangkal Rt 12 Rw 04 dan Rt 10/ 12 Rw 04 Desa Buluagung, Kab. Trenggalek	Karangan	Buluagung	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
309	2813339	#MPP Pembangunan Jalan Produksi (Jalan Paving Menuju Lokasi Peternakan untuk Roda 4)	Kondisi jalan saat ini masih berupa tanah, kalau waktu musim hujan banyak air yang menggenang di jalan tersebut menjadi licin yang bisa membahayakan kendaraan roda 4	RT. 011 RW. 005 Dusun Klampisan Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Pucanganak	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
310	2813368	#KEREN Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Pengurus Bumdes belum sepenuhnya Kompeten dalam administrasi dan pengembangan usaha	Dusun Talun Rt 001 Rw 001 Komplek Balai Desa Buluagung, Kab. Trenggalek	Karangan	Buluagung	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
311	2813564	#MPP Bantuan Pengadaan Irigasi Air Tanah Tenaga Surya (IAT GAYA)	Dikarenakan lahan sawah yang ada di desa kami kekurangan air yang mengakibatkan panen hanya bisa dua kali dan untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani maka perlu adanya bantuan pompa air agar hasil pertanian yang ada di desa kami bisa panen menjadi tiga kali	RT. 12 RW. 05 dan RT. 015 RW. 006 Dusun Klampisan Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kab, Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Pucanganak	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
312	2813600	#MPP Pembinaan dan Pengembangan Usaha	BUMDesa masih menghadapi berbagai kendala seperti manajemen usaha yang belum optimal,serta minimnya inovasi dan pengembangan unit usaha. Oleh karena itu diperlukan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha BUMDesa	RT 01 RW 01 Dusun Pandean Desa Pandean Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Durenan	Pandean	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
313	2814187	#KEREN Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	Perlunya penyediaan air minum dan sanitasi yang aman di wilayah RT.015 dan RT.016 Dusun Ketro melalui pembangunan bak penampung, pengembangan pipanisasi sepanjang 2.500 m dan 50 SR. Di wilayah tersebut sebenarnya mempunyai sumber mata air namun tidak terdistribusi dengan baik. Dengan pembangunan tersebut diharapkan nantinya dapat menghasilkan air minum yang berkualitas dan aman dikonsumsi masyarakat sekitar. Hal itu juga sebagai upaya dalam pencegahan stunting bagi anak-anak.	RT.015 dan RT.016 RW.004 Dusun Ketro Desa Dukuh, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
314	2814200	#KEREN Pemberian Paket GEMARIKAN untuk anak stunting dan berisiko stunting.	Masih terdapat Balita yang Stunting	Posyandu Desa Kedunglurah, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
315	2814229	#KEREN Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	terdapat penyandang disabilitas yang belum mempunyai alat bantu mobilitasi	Desa Kedunglurah, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
316	2814251	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Akses menuju jalur pendidikkan,j alur ke pasar sebo dan akses memperlancar lajunya perekonomian masyarakat Desa Watulimo rusak.	Ruas Jalan Gemaharjo - Sedayugunung (Batas Tulungagung), Kab. Trenggalek	Watulimo	Watulimo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
317	2815254	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan usaha tani masih berupa tanah dan ketika musim penghujan selalu becek dan sulit dilalui.	Dsn Gondangrejo, Ngadirenggo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirenggo	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
318	2815266	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Jalan poros kabupaten ruas Ngadirenggo (Jembatan Wadi Lor) - Kelutan kondisinya kondisinya parah (banyak berlubang) dan perlu di hotmix mengingat jalan tersebut akses penghubung 2 Desa dan 2 Kecamatan.	Dsn Wadi Lor, Ngadirenggo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirenggo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
319	2815325	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Kondisi drainase rusak berat karena hampir setiap tahun terjadi banjir, perlu adanya perbaikan.	Dsn Ngrayung, Ngadirenggo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirenggo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
320	2815349	#MPP Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Rambu Kebencanaan dan/atau Early Warning System)	Letak Geografis Dasa Ngadirenggo terdapat Aliran sungai Ngasinan dimana hampir setiap di musim penghujan terjadi banjir karena meluapnya sungai tersebut dan Desa Ngadirenggo juga termasuk salah satu Desa Zona Merah Kawasan banjir oleh karena itu mohon bantuan Perahu Karet.	Desa Ngadirenggo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirenggo	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
321	2815374	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan usaha tani masih berupa tanah dan ketika musim penghujan selalu becek dan sulit dilalui.	Dsn Wadi Lor, Ngadirenggo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirenggo	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
322	2816448	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	jalan berlubang dan tidak membuat nyaman berkendaran masyarakat. jalan antar Desa Kayen dan Desa Jati (kartikaruh)	Rt 01 Rw 01 Dusun Kayen, Kab. Trenggalek	Karangan	Kayen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
323	2816563	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tembok Penahan ambrol dan mengkhawatirkan masyarakat, lokasi di jalan raya kartikaruh kayen	rt 01 rw 01 dusun kayen, Kab. Trenggalek	Karangan	Kayen	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
324	2816574	#KEREN Bantuan sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Lele) (Stunting)	Untuk mengurangi dan mencegah anak stunting maka perluuntuk diberikan lauk yang bergizi seperti ikan lele maka perlu diberikan bantuan bibit lele yang bertujuan bisa meningkatkan kebutuhan gizi	Desa Timahan, Kab. Trenggalek	Kampak	Timahan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
325	2816657	#MPP Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Rambu Kebencanaan dan/atau Early Warning System)	Daerah kami berada di kawasan perbukitan, yang mana hampir setiap musim penghujan datang terjadi tanah longsor.	Desa Puyung, Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
326	2816747	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Kanan kiri jembatan Koni Ruas Jalan Kembangan Puyung belum dibangun TPT, Kondisi saat ini tebing terkikis dan berpotensi menggerus badan Jalan / Jembatan	RT 11 RW 06 Dusun Ponggok Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
327	2816852	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Akses Jalan Dusun Gunung Kembar yang menghubungkan Dusun Domerto saat ini sangat penting sekali adanya pembangunan TPJ tepatnya di Bendungan Silokondo, di saat musim penghujan akan terjadi banjir yang arusnya sangat deras jalan rawan putus, akhirnya akan menghambat perekonomian masyarakat, anak sekolah dan Pemakaman Umum.	RT. 08 RW.02 Dusun Tawing Krajan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Tawing	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
328	2817016	#MPP Bantuan Pelatihan Menjahit	Sebagai penunjang penghasilan rumah tangga untuk Masyarakat Desa Nglinggis perlu adanya pelatihan menjahit bagi Ibu-ibu Rumah Tangga. Dengan adanya Program Strategis Nasional berupa Bendungan Tugu yang ada di Nglinggis, mengakibatkan lahan pertanian menjadi berkurang. Maka dari itu Masyarakat Desa Nglinggis melalui Pemerintah Desa harus siap dan mampu mencari inovasi sumber penghasilan dari serkor yang lain guna untuk memperbaiki taraf hidup yang lebih baik.	DUSUN KRAJAN RT 001 RW 001, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglinggis	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
329	2817112	#MPP Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD/Sederajat	Pembuatan tempat parkir karena belum memiliki Ukuran 21 M	SDN II Tamanan Jln. Menur No. 8 Tamanan (8.0609166666666 66S 111.69330666666 669E 344oN), Kab. Trenggalek	Trenggalek	Tamanan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
330	2818419	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Saluran ini merupakan saluran pembuangan dari area lingkungan dan juga area pertanian, pada saat ini volume saluran kecil dan rusak, sehingga aliran air terganggu dan menyebabkan genangan.	Rt.08 Dusun Krandon, Kab. Trenggalek	Karangan	Kerjo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
331	2818501	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan masih tanah Panjang 250 meter lebar 3 meter	RT 41 dusun Kranding, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
332	2818838	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Gorong-gorong)	Dikarenakan terletak diperempatan Trafikligh (lampu Merah) Desa Kerjo dan saluran saat ini sudah tidak bisa dialiri air maka pada musim penghujan air tergenang dijalan dan sangat mengganggu arus lalulintas.	Dusun Krandon, Kab. Trenggalek	Karangan	Kerjo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
333	2819082	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan masih tanah panjang jalan 250 meter lebar 3 meter	RT 40/Rw 17 Dusun Kranding, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
334	2819106	#KEREN Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	masih ada 460 kk yang kebutuhan air bersihnya belum tercukupi, terutama pada musim kemarau, sedangkan jaringan pipanisasi dan sambungan rumah belum bisa mengcover langsung ke rumah-rumah warga yang masih membutuhkan.	Dusun Sambeng RT.14 s/d 23 RW.03 s/d 05, Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
335	2819427	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Jalan Rusak berlobang panjang 100 meter lebar 6 meter	RT 26/RW 11 Dusun Nglembu Panjang 100 meter lebar 6 meter, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
336	2820443	#MPP Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD/Sederajat	Halaman SD Negeri 2 Parakan Trenggalek kondisinya masih berupa tanah sehingga halaman menjadi becek (pada saat musim penghujan) dan berdebu (pada saat musim kemarau). Kondisi ini sangat menggagu proses kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Sehingga memerlukan pavingisasi agar kenyaman kegiatan belajar mengajar (terutama yang berada di luar ruangan) dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak membahayakan peserta didik	Dusun Krajan RT.10/RW.04, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Parakan	DINAS PENDIDIKAN
337	2820559	#MPP Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Bangunan gedung PUSTU yang ada sudah tua dan kerangka atapnya mulai lauk, diperlukan Rehabilitasi gedung PUSTU	RT. 10 RW.02 Dusun Tanjung, Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
338	2820589	#MPP Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Trafficlight, Flashinglight dan Pelican Crossing)	Kondisi Jalan yang ramai dan padat lalu lintas serta untuk menyeberang para pejalan kaki dan sering terjadi kecelakaan di jalan mohon bantuan Pengadaan Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas berupa Flashinglight.	Dusun Wonocoyo Utara RT. 002, RW. 001 Depan MTsN 5 Trenggalek, Kab. Trenggalek	Panggul	Wonocoyo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
339	2820686	#MPP Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Trafficlight, Flashinglight dan Pelican Crossing)	Kondisi Jalan yang ramai dan padat lalu lintas serta untuk menyeberang para pejalan kaki dan sering terjadi kecelakaan di jalan mohon bantuan Pengadaan Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas berupa Flashinglight.	Dusun Bakalan RT. 002, RW. 001 Depan SMK Islam Panggul, Kab. Trenggalek	Panggul	Panggul	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
340	2820690	#MPP Bantuan bibit ternak kambing PE	Kami kelompok ternak sono makmur berlokasi di Desa Timahan menyadari besarnya potensi pengembangan peternakan kambing diwilayah kami karena ketersediaan pakan hijauan yang melimpah namun upaya optimalisasi terhambat oleh beberapa kendala utama keterbatasan modal anggota kelompok mayoritas memiliki keterbatasan dana untuk membeli bibit kambing jantan dan betina unggul	Desa Timahan, Kab. Trenggalek	Kampak	Timahan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
341	2821635	#MPP Bantuan Tanaman Perkebunan Tahunan (Kakao, Kopi, Kelapa dan Pala)	Untuk para petani di Desa kami sangat membutuhkan bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Tahunan seperti Pala dengan bibit unggul	Desa Sumberbening, Kab. Trenggalek	Dongko	Sumberbening	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
342	2821722	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Ruas Jalan raya (bendorejo- Rejowinangun) rusak dibeberapa titik diperkirakan 1000 m2	wilayah RT 17,18,19 Dusun Nglembu, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
343	2822156	#MPP Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/Sederajat	SDN 1 Ngerdani saat ini belum memiliki ruang kelas yang layak.sehingga aktifitas belajar dan mengajar belum bisa maksimal. maka dari itu kami mengajukan rehabilitas ruang kelas sesuai layaknya. untuk menunjang kwalitas pembelajaran.	RT 01 RW 001 Dusun Krajan , Kab. Trenggalek	Dongko	Ngerdani	DINAS PENDIDIKAN
344	2823331	#MPP Pengadaan Mesin Pemilah Sampah	Belum ada Mesin Pemilah Sampah yang dikelola Bank Sampah di BUMDes Lestari Gandusari	Desa Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Gandusari	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
345	2823385	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tanah sebelah jembatan mulai terkikis jika dibiarkan akang membuat jembatan rusak dan akses utama warga Rt11 dan warga Rt 12 serta penghubung antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo akan Terputus total DIRUAS JALAN KABUPATEN YANG TERTERA DI SK Bupati Nomor 188.45/500/406.001.3/202 DENGAN JARAK (2,700) NGGAREN – TEMPURAN (BATAS PONOROGO)	Rt 11 Rw 04 Desa Tegaren Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	Tugu	Tegaren	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
346	2823630	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Drainase yang ada di jalan PUD Desa Senden kondisinya sangat memprihatinkan ,ketika musim hujan tiba air masuk ke jalan PUD sehingga merusak aspal yang sudah ada.	Desa Senden, Kab. Trenggalek	Kampak	Senden	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
347	2823749	#MPP Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Sering terjadinya kecelakaan karena jalan licin serta engganya beraktivitas atau membuka usaha (warung/toko) di malam hari, yang memperlambat perputaran ekonomi lokal.	RT 22 sampai RT 23 Dusun Mojokidul Desa Jambu, Kab. Trenggalek	Tugu	Jambu	-
348	2823761	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi jalan saat ini rusak berat sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat kelancaran transportasi. Kerusakan tersebut juga berdampak pada aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan jalan untuk memperbaiki aksesibilitas, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan. Panjang jalan 2 km lebar 3 meter	Desa Watuagung , Kab. Trenggalek	Dongko	Watuagung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
349	2824050	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan Lingkungan di RT. 09 Desa Senden Kondisinya rusak sehingga perlu peningkatan jalan dengan volume panjan 150 m lebar 2.50 m	RT. 09 RW. 05 Dusun Tenggar Desa Senden, Kab. Trenggalek	Kampak	Senden	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
350	2824509	#KEREN Pemberian Paket GEMARIKAN untuk anak stunting dan berisiko stunting.	Masih banyaknya anak-anak yang kekuraangan asupan gizi di kelurahan kelutan	Sekelurahan Kelutan Kurang lebih sebanyak 12 balita Memerlukan dana sekitar Rp20.000.000, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Kelutan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
351	2824831	#KEREN Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Banyaknya warga di Desa Ngerdani yang terkena strok yang tidak bisa berjalan dan kurangnya biaya untuk membeli kursi roda.maka dari itu kami mengajukan pengadaan kursi roda.	Dusun Krajan dan Sobo Desa Ngerdani, Kab. Trenggalek	Dongko	Ngerdani	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
352	2824902	#MPP Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Jaringan irigasi yang berada di belakang SDN 1 Sumber rusak/ambrol sangat parah. Bila tidak segera diperbaiki bisa merusak bangunan kelas SDN 1 Sumber dan juga dapat membahayakan pelajar SDN 1 Sumber	BELAKANG SDN 1 SUMBER, DUSUN KRAJAN RT 3 RW 1 , Kab. Trenggalek	Karangan	Sumber	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
353	2825421	#KEREN Bantuan Alat Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan Ekonomi	Di desa ngrandu kebanyakan warganya memiliki usaha pembuatan reyeng akan tetapi mereka belum memiliki alat irat reyeng yang modern sehingga dengan adanya bantuan irat reyeng diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar pembuatan reyeng, dengan pengajuan alat irat reyeng di RT 17 RW 04 Dusun Depok.	RT 17 RW 04 Dusun Depok, Kab. Trenggalek	Suruh	Ngrandu	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
354	2825638	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Perlu adanya peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa meliputi pengelolaan Administrasi, Managemen BUMDesa secara profesional, Transparan dan akuntabel.	Desa Pandean, Kab. Trenggalek	Dongko	Pandean	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
355	2825757	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Kondisi drainase di wilayah masyarakat saat ini belum berfungsi secara optimal. Saluran drainase yang ada sebagian mengalami kerusakan, pendangkalan, dan penyempitan akibat sedimentasi, sampah, serta usia bangunan yang sudah tua. Selain itu, terdapat beberapa titik yang belum memiliki saluran drainase memadai sehingga aliran air hujan tidak tertampung dan mengalir secara tidak teratur.	RT. 10 s/d RT. 12 Dusun Jatiroto , Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sambirejo	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
356	2825767	#MPP Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Pengurus BUMDES masih baru sehingga membutuhkan pembinaan dan pengembangan usaha	Bumdes desa Nglongsor RT.10 RW.03, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglongsor	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
357	2825892	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Kondisi drainase di wilayah masyarakat saat ini belum berfungsi secara optimal. Saluran drainase yang ada sebagian mengalami kerusakan, pendangkalan, dan penyempitan akibat sedimentasi, sampah, serta usia bangunan yang sudah tua. Selain itu, terdapat beberapa titik yang belum memiliki saluran drainase memadai sehingga aliran air hujan tidak tertampung dan mengalir secara tidak teratur.	RT. 01 s/d RT. 02 Dsn Kawedusan, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sambirejo	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
358	2826025	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Kondisi drainase di wilayah masyarakat saat ini belum berfungsi secara optimal. Saluran drainase yang ada sebagian mengalami kerusakan, pendangkalan, dan penyempitan akibat sedimentasi, sampah, serta usia bangunan yang sudah tua. Selain itu, terdapat beberapa titik yang belum memiliki saluran drainase memadai sehingga aliran air hujan tidak tertampung dan mengalir secara tidak teratur.	RT. 13 RW. 5 Dusun Jatirejo, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sambirejo	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
359	2826026	#MPP Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Perlu adanya Pembinaan dan Pengembangan Usaha BUMDesa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Desa Pandean, Kab. Trenggalek	Dongko	Pandean	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
360	2826178	#KEREN Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang disabilitas masih menghadapi keterbatasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari akibat kurangnya akses terhadap alat mobilitas yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Banyak penyandang disabilitas yang masih menggunakan alat bantu yang sudah tidak layak pakai, tidak sesuai dengan kondisi fisik, atau bahkan belum memiliki alat mobilitas sama sekali, seperti kursi roda, tongkat penyangga, atau alat bantu jalan lainnya.	Desa Sambirejo, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sambirejo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
361	2826211	#MPP Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	Saluran Irigasi masih sebagian belum permanen (Tanah)	RT 10 RW 03 Dusun Jati , Kab. Trenggalek	Karangan	Jati	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
362	2826304	#KEREN Bantuan sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Lele) (Stunting)	Kelompok budidaya ikan RT 10 Desa Salamwates telah memulai usaha budidaya ikan lele pada tahun lalu karena keterbatasan modal di tahun ini belum bisa melanjutkan usahanaya	RT 10 RW 04 Dusun Krajan Desa Salamwates, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
363	2827185	#KEREN Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Atap pustu bocor, kayu usuk banyak yang keropos, gendeng melorot, Plafon banyak yang jebol, ada ruangan perawatan tidak bisa digunakan karena jendelanya rusak dan Jebol, dan Plester tembok rusak, petugas tidak nyaman dan was-was ketika bertugas pelayanan terutama pada musim hujan	Dusun Nayu RT 10 RW 02 Desa Karangturi Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Karangturi	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
364	2827572	#KEREN Bantuan sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Lele) (Stunting)	Adanya balita sesuai penimbangan kekurangan berat badan dan tinggi kurang	Se Kelurahan Kelutan sebnayak 12 orang menjadi 2 kelompok @ 6 orang memerlukan dana sekitar Rp20.000.000 , Kab. Trenggalek	Trenggalek	Kelutan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
365	2827648	#MPP Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	di beberapa titik Tepi ruas jalan Provinsi dan Jalan Desa kondisi peneranganya Belum ada sehingga kondisi pada malam hari gelap gulita sehingga perlu bantuan lampu penerangan jalan umum (PJU) Solar cell dari Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan perhubungan kabupaten Trenggalek sebanyak 8 Unit.	Dusun krajan dan dusun Banar, Kab. Trenggalek	Dongko	Petung	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
366	2827700	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan menuju kawasan pertanian dengan panjang 250 m x 2,5 m sangat sulit dilalui terutama pada musim penghujan.	RT. 13 RW. 06 Dusun Sumber Desa Ngulanwetan, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngulanwetan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
367	2828184	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Untuk mencegah kerusakan struktur jalan, menghindari genangan air, meningkatkan keamanan lalu lintas, serta menjaga lingkungan dengan cara mengumpulkan dan mengalirkan air hujan atau air permukaan secepat mungkin ke tempat pembuangan yang aman mohon bantuan Pembangunan Drainase Jalan di Ruas Jalan Kertosono - Banteng No. Ruas 005 dengan volume = 500m.	Dusun Krajan RT. 005 - RT. 006, RW. 002, Kab. Trenggalek	Panggul	Bodag	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
368	2828195	#MPP Pelatihan wirausaha pemula bagi pemuda	Di Desa Senden banyak pemuda pemudi yang belum mendapatkan pekerjaan dan ingin berwirausaha sejak dini	Desa Senden, Kab. Trenggalek	Kampak	Senden	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
369	2828564	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan lingkungan di RT 08 RW 02 Dsn Krajan sepanjang 200 m dan jalan lingkungan di RT 18 RW 04 Dsn Banar sepanjang 300 m kondisinya masih tanah dan sulit di lalui warga ketika musim penghujan . maka butuh bantuan paving sepanjang 500 m utnuk 2 titik lokasi tersebut.	RT 08 RW 02 Dsn Krajan RT 18 RW 04 Dsn Banar, Kab. Trenggalek	Dongko	Petung	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
370	2829099	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Perlu pembangunan drainase karena ketika musim penhujan air menggenang di Jalan.	Jalan Sumberingin Jatiprahu RT.12 RW.04 Dusun Nglongah, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumberingin	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
371	2829274	#KEREN Advokasi dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Pengasuhan Positif bagi Keluarga	Untuk meningkatkan kesadaran, mengubah perilaku agar tidak terjadi pernikahan di bawah usia 19 tahun, menurunkan stunting, kemiskinan, dan melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal mohon bantuan Advokasi dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak (Musrena Keren)	Desa Bodag, Kab. Trenggalek	Panggul	Bodag	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
372	2829730	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi jalan saat ini masih berupa tanah, kalau pas waktu musim hujan jalan tersebut licin dan banyak genangan air, yang mengakibatkan terhambatnya transportasi hasil pertanian	RT. 001 RW. 001 Dusun Pakel Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Pucanganak	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
373	2830000	#MPP Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Dusun Kedungwaru masih memiliki beberapa ruas jalan yang minim penerangan sehingga pada malam hari kondisi jalan menjadi gelap dan kurang aman. Hal ini menyulitkan aktivitas warga, baik pejalan kaki maupun pengendara, serta meningkatkan risiko kecelakaan dan gangguan keamanan. Pemasangan lampu PJU sangat dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendukung kegiatan sosial dan ekonomi warga pada malam hari demi kenyamanan bersama.	DUSUN KEDUNGWARU RT 26 - 27, Kab. Trenggalek	Karangan	Kedungsigit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
374	2830147	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan Poros Penghubung Desa Ngentrong dan Prambon rusak Berat kerikil keluar semua dan becek ketika hujan sehingga menghambat roda perekonomian masyarakat desa Ngentrong sampai perbatasan desa Prambon	Rt.04 Desa Ngentrong sampai perbatasan desa Prambon, Kab. Trenggalek	Karangan	Ngentrong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
375	2830418	#KEREN Pemberian Paket GEMARIKAN untuk anak stunting dan berisiko stunting.	Desa kami saat ini menjadi lokus stunting dikarenakan jumlah kasus stunting yang tinggi, keluarga risiko stunting, dan cakupan layanan yang perlu ditingkatkan, sebagai upaya pemerintah untuk memfokuskan sumber daya dan program gizi guna mengatasi masalah gizi buruk pada anak	RT. 010 RW. 004 Dusun Krajan Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Pucanganak	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
376	2830625	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Saluran drainase di depan Kantor Desa Kedungsigit saat ini belum berfungsi secara optimal sehingga sering terjadi genangan air, terutama saat musim hujan. Kondisi ini mengganggu aktivitas pelayanan pemerintahan desa, akses masyarakat, serta dapat merusak badan jalan di sekitar kantor desa. Oleh karena itu, pembangunan drainase sangat diperlukan untuk memperlancar aliran air, mencegah genangan, menjaga kebersihan lingkungan, serta mendukung kenyamanan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.	DUSUN SIGIT RT 8 RW 2, Kab. Trenggalek	Karangan	Kedungsigit	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
377	2830633	#KEREN Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Untuk meningkatkan PAD salah satunya dengan mengembangkan BUMDes yang ada di desa dengan cara pembinaan dan pemberdayaan dalam pengelolaan BUMDes sehingga dengan pengelolaan BUMDes yang baik dapat menjadikan kemandirian anggaran desa kedepannya.	RT. 010 RW. 004 Dusun Krajan Desa Pucanganak Kecamatan Tugu Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Pucanganak	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
378	2830915	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan Usaha Tani Banyunget - Dusun Bungur Desa Munjungan perlu adanya peningkatan jalan (Paving), mengingat kondisi jalan yang masih tanah, tentu saja menyulitkan petani saat musim hujan	RT 030 RW 008 Dusun Bungur Desa Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Munjungan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
379	2830916	#MPP Advokasi dan Edukasi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kurangnya Pengetahuan tentang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama bagi pelaku ekonomi di masyarakat	Desa Senden, Kab. Trenggalek	Kampak	Senden	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
380	2831132	#KEREN Pembangunan SPALD Setempat	SPALD bermasalah dalam sistem pembuangannya sehingga menyebabkan bau di sekitar lokasi KOMUNAL	rt 14 rw 06, Kab. Trenggalek	Karangan	Sukowetan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
381	2831174	#MPP Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah PAUD/ Sederajat	Ruang kelas mengalami rusak sedang dan membutuhkan rehabilitasi 2(dua) ruang kelas (Jendela Rusak, Pintu Rusak, Cat sudah lusuh)	Dusun Krajan RT. 20 RW. 05, Desa Ngulankulon, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngulangkulon	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
382	2831794	#KEREN Bantuan Pengadaan Mebel PAUD/Sederajat	Belum tersedianya loker penyimpanan yang memadai dan dilengkapi kunci bagi siswa PAUD, sehingga barang pribadi siswa masih disimpan secara bercampur, kurang tertata, dan berpotensi tertukar atau hilang, yang berdampak pada kurang optimalnya kerapian dan kenyamanan lingkungan belajar.	RT 22 RW 07 Dusun Gladag Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Pakel	DINAS PENDIDIKAN
383	2832461	#MPP Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD/Sederajat	Halaman sekolah masih berupa Tanah, ketika musim panas debu bertebaran masuk ruang kelas dan menggagu kesehatan anak, pada musim hujan menjadi becek dan licin mengganggu aktifitas anak ketika pembelajaran di luar ruangan kelas	Dusun Krajan RT 05 RW 01 Ds. Karangturi Kecamatan Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Karangturi	DINAS PENDIDIKAN
384	2833236	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Dengan berjalannya Ketahanan Pangan di Desa saait ini dikelola oleh Pengurus Bumdes maka dengan ini kami berharap untuk peningkatan kapasita pengurus dengan harapan akan menjadi modal besar dan kelancaran dalam usaha peningkatan Keatahan Pangan di Desa	DUSUN KRAJAN, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Rejowinangun	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
385	2833574	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Kelurahan dan Perumahan Formal	Pembuatan Paving sebab kalau hujan airnya tergenang karena tempatnya yang rendah, sedangkan yang lain sudah di paving semuanya Ukuran 2 M x 50 M dan 2,5 M x 75 M dengan Rincian Anggaran Rp. 215.000.000,-	RT. 011 RW. 005 Titik Koordinat : 8'03'20.8"S 111041'33.4"E dan 8'03'20.8"S 111041'33.4"E, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Tamanan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
386	2833832	#MPP Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Rambu Kebencanaan dan/atau Early Warning System)	Desa Rejowinangun merukan daerah rawan bencana yaitu Banjir dan masih sangat kurang untuk kesiapsiagaan terhadap bencana maka dengan ini kami mohon bantuan guna perlatan perlindungan diri dan petunjuk arah untuk evakuasi	DUSUN KRAJAN, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Rejowinangun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
387	2834556	#KEREN Advokasi dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Pengasuhan Positif bagi Keluarga	Untuk meningkatkan kesadaran, mengubah perilaku agar tidak terjadi pernikahan di bawah usia 19 tahun, menurunkan stunting, kemiskinan, dan melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal mohon bantuan Advokasi dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak (Musrena Keren)	Desa Panggul, Kab. Trenggalek	Panggul	Panggul	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
388	2836516	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Di setiap musim penghujan di Ruas 35.3.136 jalan poros Watuagung Ngembel airnya selalu mengalir di jalan yang mengakibatkan Jalan tersebut cepat rusak. maka diperlukan saluran pematus jalan sepanjang 1000 meter agar air bisa mengalir pada jalurnya dan jalan Poros tidak cepat rusak	Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watuagung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
389	2837819	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Banyak titik jalan di Desa Sobo yang belum memiliki drainase yang baik sehingga jalan tergerus dengan air ketika hujan. berhubungan tersebut mengajukan pembangunan drainase.	Dusun Ngondo dan Dusun Tenggar Desa Sobo Kecamatan Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Sobo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
390	2838094	#MPP Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Dengan adanya program ketahanan paangan yang dikelola Bumdes Mekar Jaya Desa Srabah, maka perlu pembinaan dan pengembangan usaha yang sejalan dengan program tersebut agar bisa meningkatkan jumlah Pendapan Asli Desa . Sehingga kedepan dalam perkembangannya dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas khususnya Masyarakat Desa Srabah.	Dusun Srabah, Kab. Trenggalek	Bendungan	Srabah	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
391	2838130	#MPP Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Jalan di Desa Sobo banyak yang belum memiliki penerangan yang memadai sehingga banyak masyarakat yang takut untuk melewati jalan tersebut. berkaitan hal tersebut diajukan bantuan penerangan jalan umum yang terletak di Desa	Dusun Ngondo, Dusun Tenggar dan Dusun Ngledok Desa Sobo Kecamatan Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Sobo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
392	2838241	#MPP Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/Sederajat	Gedung Ruang Kelas yang kondisinya memprihatinkan ,Agar bisa di rehab supaya kegiatan belajar-mengajar lebih nyaman.	SDN 3 Siki Dusun Nguluh Desa Siki Kecamatan Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Siki	DINAS PENDIDIKAN
393	2838464	#MPP Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/Sederajat	Kondisi ruang kelas yang masih belum memadai yang mengakibatkan proses belajar-mengajar kurang nyaman.	SDN 4 Siki Dsn. Ngandong Desa Siki Kecamatan Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Siki	DINAS PENDIDIKAN
394	2838533	#MPP Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SD/Sederajat	Kondisi bangunan sudah banyak mengalami kerusakan karna sudah termasuk bangunan tua dan saat ini memerlukan rehabilitasi.	SDN 4 Siki Dsn.Ngandong Desa Siki Kecamatan Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Siki	DINAS PENDIDIKAN
395	2838645	#KEREN Pemberian Paket GEMARIKAN untuk anak stunting dan berisiko stunting.	Bantuan gemarikan untuk anak stunting sangat diperlukan karena untuk Penambahan gizi anak-anak stunting di desa sukerejo dan juga untuk memberantas masalah stunting desa sukorejo	Desa Sukorejo, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
396	2838686	#MPP Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/Sederajat	Bangunan Ruang Kelas yang telah banyak mengalami kerusakan dan sangat memerlukan rehabilitasi.	SDN 5 SIKI Dusun jagul Desa SIki Kecamatan Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Siki	DINAS PENDIDIKAN
397	2838771	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	BANYAK JALAN KABUPATEN YANG RUSAK DAN MENYEBABKAN GANGGUAN KENYAMANAN DAN KEAMANAN SAAT BERKENDARA SEHINGGA MENGGANGGU ARUS PEREKONOMIAN MASYARAKAT	JAJAR, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
398	2838995	#MPP Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	Jaringan irigasi masih berupa tanah, panjang 500 meter, lebar 1 meter	Sawah belakang Ruko Gendingan Dusun Gendingan, Desa Prigi, Kab. Trenggalek	Watulimo	Prigi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
399	2839160	#MPP Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Kondisi existing rusak ringan dan kurang dalam dan kurang lebar sehingga ketika musim hujan tidak mampu menampung air. Panjang 200 meter, lebar 1 meter.	Sawah Gendingan, Dusun Gendingan, Desa Prigi (Sumur Bor ke arah Selatan), Kab. Trenggalek	Watulimo	Prigi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
400	2839252	#MPP Bantuan bibit ternak kambing PE	Kurangnya Bibit kambing PE untuk meningkatkan kualitas peternak kambing PE di Desa Siki yang berdampak peningkatan perekonomian	Desa Siki Kecamatan Dongko kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Siki	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
401	2839334	#MPP Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	Meningkatkan aliran air dari saluran irigasi ke lahan petani dan agar hasil panen meningkat	SALAM UTARA, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
402	2839373	#MPP Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Jaringan irigasi yang belum memadai/belum adanya bangunan permanen	RT.07 RW.02 Dsn Krajan Desa Siki (Area sawah Bungur), Kab. Trenggalek	Dongko	Siki	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
403	2839419	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan Poros Sumberingin Mlinjon yang melewati Desa Sukowetan aspalnya mulai rusak sehingga akses jalan menjadi terganggu	Desa Sukowetan, Kab. Trenggalek	Karangan	Sukowetan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
404	2839487	#KEREN Pendampingan, Advokasi dan Edukasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	adanya Kasus kekerasan masih terjadi dan menjadi fokus utama untuk diminimalkan, termasuk perdagangan orang. Tingginya angka pernikahan dini di beberapa daerah memicu permasalahan pekerja anak. Stunting: Masalah gizi pada anak tetap menjadi perhatian serius. Pemberdayaan Ekonomi Perempuan: Peningkatan kewirausahaan perempuan yang berperspektif gender masih perlu didorong. Pengasuhan Anak: Peran ibu dan keluarga dalam pengasuh	Dusun Kojur Rt.20 Rw.06 Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Watulimo, Kab. Trenggalek	Watulimo	Gemaharjo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
405	2839549	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Saat hujan sering terjadi genangan air, sehingga perlu dibangun drainase	rt 16 rw 07, Kab. Trenggalek	Karangan	Sukowetan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
406	2839606	#MPP Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Memperbaiki Jaringan irigasi agar aliran air menjadi lancar dan memudahkan perawatan	REJOSARI RT.8 DESA SALAMREJO, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
407	2839607	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan masih berupa tanah sehingga mempersulit untuk mengangkut hasil pertanian	rt 15 rw 07 , Kab. Trenggalek	Karangan	Sukowetan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
408	2839687	#MPP Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	TERBANGUNNYA JARINGAN IRIGASI YANG BAIK UNTUK MELANCARKAN AIR KE LAHAN PERTANIAN SEHINGGA MENINGKATKAN HASIL PANEN PETANI	SALAM UTARA, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
409	2839692	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	TPJ sekarang kondisinya rusak, jika dibiarkan akan memutus akses jalan yang ada	rt 26 rw 12, Kab. Trenggalek	Karangan	Sukowetan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
410	2839697	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Untuk mengembangkan Usaha Milik Desa Gemah Ripah (BUMDesa GemahRipah) melalui usulan ini untuk diadakan Peningkatan Kapasitas Pengurus Bumdes dan Anggota	Dusun Kojur Rt.20 Rw.06 Desa Gemaharjo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Watulimo, Kab. Trenggalek	Watulimo	Gemaharjo	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
411	2839952	#MPP Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	banyaknya tanah yang memenuhi jarigan irigasi mengakibatkan pendangkalan sehingga air sulit mengalir	desa sukowetan, Kab. Trenggalek	Karangan	Sukowetan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
412	2840822	#MPP Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Jaringan irigasi masih berupa tanah	RT 02 DUSUN MELIS, Kab. Trenggalek	Gandusari	Melis	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
413	2841109	#MPP Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	ALIRAN AIR IRIGASI SERING TERSUMBAT SEHINGGA MENYEBABKAN HASIL PANEN KURANG MAKSIMAL DAN BERTAMBAHNYA BIAYA OPERASIONAL PETANI	DUSUN REJOSARI DESA SALAMREJO, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
414	2841236	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Drainase masih berupa tanah, sehingga aliran air tidak lancar dan meyebabkan abrasi pada badan jalan dan membuat badan jalan meyempit: Volume = Panjang 300 M, Tinggi 40 Cm dan Lebar 30 CM	RT 13 RW 3 Dusun Salam Desa Nlebo Kecamatan Suruh, Kab. Trenggalek	Suruh	Nglebo	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
415	2841250	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Kondisi pemukiman warga yang selalu tergenag air saat musim hujan karena tidak adanya saluran drainase yang berfungsi mengalirkan kelebihan air hujan dari jalan.	RT 23 RW 06 Dusun Cetok, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
416	2841300	#MPP Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jaringan Perpipaan dari sumber mata air yang ada di Dusun Salam sudah mengalami banyak kerusakan. Sehingga meyebabkan penyediaan air minum sering kekurangan akibat bayak kebocoran pada Jaringan Perpipaan. Jaringan air Minum ini digunakan untuk 65 Rumah Tangga. Adapun Panjang jaringan Perpipaan yaitu 1.560 m. Panjang Perbaikan Perpiaan adalah 1.050 M	Dusun Salam dan Dusun Mojo, Kab. Trenggalek	Suruh	Nglebo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
417	2841342	#KEREN Pembinaan dan Pengembangan Usaha	Pengurus Bumdes memerlukan Pembinaan, P{endampingan dan peningkatan pengetahuan dalam rangka untuk Pengembangan Uaaha BUMDes	Desa Nglebo, Kab. Trenggalek	Suruh	Nglebo	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
418	2841345	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	BADAN JALAN MUDAH BERGELOMBANG KARENA TPJ MIRING YANG MENGAKIBATKAN JALAN MEKAR	PUNJUNG, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
419	2841355	#MPP Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	MENGGENANGNYA SAWAH AKIBAT AIR TIDAK BISA MENGALIR LANCAR DIKARENAKAN BELUM ADA SALURAN IRIGASI TERBANGUN	PUNJUNG, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
420	2841395	#MPP Pengaman Pengguna Jalan (Guardrail, SafetyMirror/Cermin Tikungan dan Deliniator/Patok Jalan)	Di beberapa titik ruas Jalan Desa Nglebo terdapat Tikungan Tajam dam Pertigaan yang pandangannya terhalang tebing. Ini menyebabkan pengguna jalan dari arah berlawanan tak terlihat dan membahayakan pengguna jalan. Volume 5 Unit	Desa Nglebo, Kab. Trenggalek	Suruh	Nglebo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
421	2841522	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Pembangunan DRAINASE di ruas Jalan Poros Desa Surenlor menuju Desa Masaran. kondisi DRAINASE rusak dan masih berupa tanah,panjang DRAINASE sekitar 200 meter, apabila musim penghujan tidak mampu menampung air hujan dan membuat jalan menjadi cepat rusak serta licin.	Rt 05 Rw 02 Desa Surenlor, Kab. Trenggalek	Bendungan	Surenlor	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
422	2841557	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Pembangunan TPJ di ruas Jalan Poros Desa Surenlor menuju Desa Masaran. kondisi TPJ rusak dan sebagian masih berupa tanah,panjang TPJ sekitar 300 meter Tinggi 2 -3 meter, apabila musim penghujan sangat rawan longsor dan membuat jalan menjadi cepat rusak dan licin.	Rt 08 Rw 03 Desa Surenlor, Kab. Trenggalek	Bendungan	Surenlor	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
423	2841982	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan merupakan akses jalan untuk peningkatan perekonomian masyarakat, karena merupakan jalan poros yang menghubungkan antar Dusun, dengan Desa Sambirejo dan Kelurahan Kelutan. Berada di Ruas Jalan Kabupaten sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 100.3.3.2/348/406.001.3/2025 Nomor Ruas : 353252 Nama Ruas Jalan : Dadaptulis-Karanggayam Volume : P = 1.250 M L = 4 M	Jalan Kawak (Dusun Sukobanteng RT.12, 13, 14, 15, 17, 18) Jalan Gayam (Dusun Karanggayam RT.10 dan RT.11, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Karangsoko	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
424	2842662	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan banyak lubang sehingga mengganggu pengguna jalan, karena merupakan jalan poros desa yang menghubungkan antar dusun (wilayah). Jalan ini Berada di Ruas Jalan Sesuai dengan SK Bupati Nomor : 100.3.3.2/348/406.001.3/2025 No Urt : 252 Nomor Ruas : 353253 Nama Ruas Karangsoko I Wolume : Panjang 400 M Lebar 4 M REncana Anggaran Biaya = Rp 215.000.000,00	Dusun Sukorejo RT.05 RW.01, Karanggayam RT.07, 09 RW.02 (Sebelah Timur SPBU), Kab. Trenggalek	Trenggalek	Karangsoko	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
425	2843029	#MPP Rehabilitasi atau Renovasi Bangunan Gedung Pemerintah	Rehabilitasi atau Renovasi Bangunan Gedung Pemerintah Ukuran 30 x 25 meter, dengan perkiraan anggaran Rp. 2.500.000.000,-	Koordinat: -8.054475, 111.704587 Alamat: Jalan Veteran No. 59, Dusun Krajan, RT. 004 RW. 002, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek (Kantor Kelurahan Ngantru), Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
426	2843098	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan banyak lubang dan sangat mengganggu pengguna jalan, karena merupakan jalan poros desa untuk memperlancar roda perekonomian masyarakat. Jalan ini Berada di Ruas Jalan Kabupaten Sesuai dengan SK Bupati Nomor : 100.3.3.2/348/406.001.3/2025 No Urt : 253 Nomor Ruas : 353254 Nama Ruas "Gang Minak Sopal" Kegiatan Pembangunan yang diajukan Paving Jalan Wolume : Panjang 900 M Lebar 4 M Rencana Anggaran Biaya = Rp 800.000.000,00	Dusun Jarakan RT.20, 21, 22, 23 RW.05, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Karangsoko	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
427	2843507	#KEREN Pendampingan, Advokasi dan Edukasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	Masih banyak pola asuh yang salah terhadap pola anak, sehongga berdampak pada anak yang bisa berdampak pada stunting. maka dari itu kami berharap adanya edukasi parenting terhadap orang tua sehingga bisa merubah terkait pola asuh anak	Desa Prigi, Kab. Trenggalek	Watulimo	Prigi	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
428	2843998	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Adanyan genangan air pada titik tersebut di pertigaan gendingan dan pertigaan selatan stadion karena titik itu jalannya rendah dan darinase kurang lancar	Rt.09, Rt.10 dan Rt.07 Kelurahan kelutan volume 5x75 m2 merlukan dana Rp100.000.000, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Kelutan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
429	2845861	#KEREN Advokasi dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Pengasuhan Positif bagi Keluarga	Tingkat perkawinan anak dan kenakalan anak di Desa Tasikmadu cukup tinggi karena berbagai faktor yang mempengaruhi. Baik dari internal (latar belakang keluarga, pendidikan) dan eksternal atau pergaulan bebas dilingkungan. Hal tersebut dapat dicegah dan diatasi dengan memperbaiki pola asuh/parenting yang baik. Melalui advokasi dan edukasi pencegahan perkawinan anak dan pengasuhan positif bagi kelaurga, orangtua menjadi lebih paham tentang pengasuhan yang tepat untuk anak.	Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Watulimo	Tasikmadu	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
430	2846091	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Adanya genangan air di tepi jalan yang tidak bisa masuk ke saluran sungai, di jalan kabupaten ruas kelutan sambirejo	Rt. 05 dan Rt.06 kelurahan kelutan volume 40x60x700 M memerlukan dana Rp 500.000.000, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Kelutan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
431	2846294	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Lahan pertanian yang terletak di RT.17 RW.06 Desa Dermosari membutuhkan jalan usaha tani untuk menunjang aktifitas pertanian masyarakat.	RT.17 RW.06 Dusun Dermosari, Kab. Trenggalek	Tugu	Dermosari	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
432	2846326	#KEREN Bantuan Pengadaan Mebel PAUD/Sederajat	Belum tersedianya meja dan kursi siswa	Paud Al Mujahidin Rt.04 Rw 02 Desa Bangun, Kab. Trenggalek	Munjungan	Bangun	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
433	2846738	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Usulan Pembangunan Jalan Panjang 800M L 3,5M RT.19 RW.04 Dusun Sambeng, kondisi saat ini Jalan rusak berat, aspal lama mengelupas habis, banyak cekungan, saat hujan konsisi jalan sangat licin sehingga menyebabkan rawan kecelakaan	RT.19 RW.04 DUSUN SAMBENG, Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
434	2846908	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Terdapat kerusakan pada ruas jalan kabupaten di Kelurahan Ngantru, tepatnya di RT. 010 RW. 003 sepanjang ±500 meter. Kondisi perkerasan jalan yang retak dan mengelupas mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan, sehingga diperlukan penanganan berupa perbaikan dan pengaspalan ulang dengan estimasi anggaran sebesar Rp100.000.000,-	Lokasi : Jalan Basuki Rahmad Gang Sinawang RT. 010 RW. 003 (-8.051078, 111.706136), Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
435	2846977	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Kondisi drainase Ruas Jalan Bendungan-Trenggalek Tepatnya di RT 18 dusun Pule Desa Sumurup,saat hujan tiba air meluber di jalan karena tidak adanya darainase yang memadai, dibutuhkan drainase dengan volume Panjang 300m lebar 1m	RT 18 Dusun Kacangan Desa Sumurup, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
436	2847132	#MPP Rehabilitasi atau Renovasi Bangunan Gedung Pemerintah	Bangunan sudah lama dan perlu di sesuaikan dengan potensi ancaman bencana banjir yan selalu datang setiap tahun dan air bencan banjir yang selalu masuk didalam gedung	Rt.12 Kelurahan Kelutan volume 10x20m memerlukan dana Rp500.000.000, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Kelutan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
437	2847168	#MPP Pembinaan bagi komunitas olahraga	Untuk Meningkatkan Kemampuan bagi komunitas Olahraga Bola Volly maka dibutuhkan pembinaan di dusun gempolan	Dusun Gempolan Desa Gamping, Kab. Trenggalek	Suruh	Gamping	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
438	2847214	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Gorong-gorong)	Kondisi eksisting gorong-gorong mampet, kemungkinan karena ambrol atau amblas	RT 08 RW 04 Dusun Suwaru. Titik koordinat : -8.108852681563919, 111.74682155325068, Kab. Trenggalek	Gandusari	Krandegan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
439	2847255	#KEREN Pembinaan dan Pengembangan Usaha	BUMDesa yang ada usahanya masih simpan pinjam dan baru merintis usaha pertokoan, agar bisa meningkatkan PADes maka perlu pembinaan khusus tentang pengembangan usaha supaya BUMDesa bisa berkembang usahanya	Kantor dan tempat usaha (toko) di Dsn. Gambang Rt.25 Rw.08 Desa Ngadirejo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirejo	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
440	2847756	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Usulan pembangunan drainase RT.14 s/d 23 DUSUN SAMBENG. saat musim hujan air meluber ke jalan, karena belum tersedianya drainase yang layak sehingga menyebabkan jalan cepat rusak.	DUSUN SAMBENG, Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
441	2848293	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi eksisting aspal jalan rusak berat	Jalan Kranding - Sukorame RT 10 RW 05 Dusun Suwaru, Kab. Trenggalek	Gandusari	Krandegan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
442	2848858	#MPP Pengembangan Literasi Digital Masyarakat	Pengembangan literasi digital masyarakat terkait bijak bermedia sosial karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait penggunaan medsos yang bijak	RT 012 RW 005 DUSUN KEBONAGUNG DESA DEPOK KEC. Bendungan , Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
443	2848864	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Terdapat kerusakan drainase pada ruas jalan kabupaten di Kelurahan Ngantru, tepatnya di RT 19, RT 20, dan RT 21 dengan total panjang keseluruhan ±1.000 meter, yang menyebabkan aliran air tidak lancar dan sering menimbulkan genangan saat hujan. Kondisi ini berdampak pada kerusakan badan jalan serta mengganggu aktivitas dan keselamatan masyarakat, sehingga diperlukan penanganan dan prioritas perbaikan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan estimasi anggaran sebesar Rp250.000.000,-	Lokasi Kegiatan : - RT. 019 RW. 006 (-8.049854, 111.703744) - RT. 020 RW. 007 (-8.046933, 111.704341) - RT. 021 RW. 007 (-8.045386, 111.703729), Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
444	2848900	#MPP Pembangunan Jalan Produksi (Jalan Paving Menuju Lokasi Peternakan untuk Roda 4)	Akses menuju lokasi peternakan di RT.002 masih sulit/rusak sehingga menghambat dan sulit dilalui kendaraan roda 4	RT.002 DESA JOHO, KECAMATAN PULE, KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Pule	Joho	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
445	2849183	#MPP Bimbingan Teknis Manajemen/Pengelolaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna)	Bimtek management kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa karena masih kurangnya kapasitas lembaga kemasyarakatan	RT 012 RW 005 DUSUN KEBONAGUNG DESA DEPOK KEC. Bendungan , Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
446	2849209	#KEREN Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	Pada tahun 2025 mendapatkan SPAM dan Untuk tindak lanjut pemasangan jaringan saluran rumah dibutuhkan oleh masyarakat dusun soko desa Ngentrong	Desa Ngentrong, Kab. Trenggalek	Karangan	Ngentrong	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
447	2849438	#MPP Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian (Traktor Roda Dua, Cultivator, Alat Pengolah Pupuk Organik, Hand Traktor Capung)	Masyarakat desa puru pada umumnya mata pencahariannya yaitu pertanian , namun untuk menunjang proses pengolahan tanahnya terhalang oleh alat, alat yang dibutuhkjan yaitu mesin Hand Tractor, maka dengan adanya usulan tersebut maka akan mempermudah masyarakat dalam bercocok tanam dengan volume 2 unit.	RT 20 RW 04 Dsn.Ponggok-Gebang Ds.Puru, Kab. Trenggalek	Suruh	Puru	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
448	2849961	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Kondisi Drainase Sekitaran Balai desa Tepatnya Di Rt 01 kondisinya rusak parah karena merupakan area rawan bencana sehingga apabila tidak segera diperbaikai dikawatirkan akan mengakibatkan Lonsor, oleh karena itu diperlukan pembagunan saluran drainase dengan Volume P 500 L 1m	RT 01 RW 01 DESA SUMURUP KECAMATAN BENDUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
449	2850139	#MPP Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	Berdasarkan kondisi eksisting di lapangan, saluran irigasi yang ada masih berupa saluran tanah, mengalami pendangkalan, kebocoran, serta rawan longsor. Pada musim hujan sering terjadi limpasan dan erosi, sedangkan pada musim kemarau debit air tidak optimal sampai ke lahan pertanian di bagian hilir. Kondisi ini berdampak langsung pada menurunnya produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.	RT 47 Dusun Sooko Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Prambon	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
450	2850800	#KEREN Pendampingan, Advokasi dan Edukasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak	belum adanya pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan di desa ngrayung.	Desa Ngrayung, Kab. Trenggalek	Gandusari	Ngrayung	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
451	2850892	#KEREN Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan	belum adanya pelatihan dan penyuluhan Pemberdayaan Perempuan di desa ngrayung.	Desa Ngrayung, Kab. Trenggalek	Gandusari	Ngrayung	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
452	2851122	#MPP Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Kurangnya penerangan jalan umum di rt 10 dan rt 01	Rt 10 Rw 04 dan Rt 01 Rw 01 Desa Tegaren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Tegaren	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
453	2851184	#MPP Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	IRIGASI MASIH TANAH volume Panjang 250 m lebar 1.2 m	JALAN JATI - MLINJON RT.23-12, Kab. Trenggalek	Karangan	Jati	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
454	2851270	#MPP Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Usulan pengadaan penerangan jalan umum (PJU) Sepanjang ruas jalan Dusun sambeng, mengingat sarana prasarana belum memadai (ting pju sebagian besar dari bambu) guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan di lingkungan.	DUSUN SAMBENG, Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
455	2851356	#KEREN Advokasi dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Pengasuhan Positif bagi Keluarga	Perluadanya bimbingan untuk mencegah dan mengurangi tingkat perkawinan dini, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga pada masyarakat desa sumber khusunya bagi remaja saat ini.	DUSUN KRAJAN RT 3 RW 1 , Kab. Trenggalek	Karangan	Sumber	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
456	2851450	#MPP Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan (jaringan irigasi yang masih berupa tanah)	IRIGASI MASIH TANAH VOLUME P= 250 M LEBAR 1.2 M	RT 25 RW 07 DUSUN JABUNG, Kab. Trenggalek	Karangan	Jati	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
457	2851455	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan menuju usaha tani tersebut mengalami kerusakan apalagi jika musim penghujan tiba jalan sangat licin dan becek sulit untuk dilewati, sehingga dengan pengajuan JUT dengan volume 500 m tersebut diharapkan dapat memberikan kelancaran pada warga untuk menuju lahan pertanian.	RT 16 RW 04 Dusun Depok, Kab. Trenggalek	Suruh	Ngrandu	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
458	2851468	#KEREN Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	Mengurangi kekeresaan pada anak di masyarakat desa sumber, dan cara mendidik anak yang baik	RT 3 RW 1, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumber	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
459	2851499	#MPP Pelatihan produk olahan potensi lokal maupun ketrampilan bagi pengusaha pemula secara individu/perorangan	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk olahan makanan dan pemasaran bagi produk makanannya	Dusun Gembleb RT.026 RW.009 Desa Gembleb, Kab. Trenggalek	Pogalan	Gembleb	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
460	2851601	#MPP Bimbingan Teknis Manajemen/Pengelolaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna)	Perlunya bimtek pengelolaan kelembagaan karang taruna Desa Gembleb agar Karang Taruna Desa Gembleb bisa lebih maju ke depannya	Dusun Gembleb RT.026 RW.009 Desa Gembleb, Kab. Trenggalek	Pogalan	Gembleb	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
461	2852468	#MPP Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Saluran irigasi rusak sehingga pengairan petani tidak maksimal	kelompok tani makmur Rt.09 kelurahan kelutan volume 1x1x1000m memerlukan dana sekitar Rp 500.000.000, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Kelutan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
462	2852638	#MPP Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	di Ruas jalan kabupten (Ngadimulyo-Besuki) jalan menanjak dan menikung extrim yang mana pada malam hari penerangan sangat minim sehingga jarak pandang pengguna jalan terbatas. Pengadaan Alat Penerangan Jalan PJU Solar cell 50 titik Mulai Jembatan Kedung Gamping Desa Ngadimulyo (ruas jalan kabupaten)	Desa Ngadimulyo, Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
463	2852701	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Wilayah RT.005 RW.002 Sangat rawan banjir sehingga perlu dibangun Drainase agar air tidak meluap ke rumah warga	Dusun Kayujaran RT.005 RW.002 Desa Gembleb, Masuk Ruas Jalan Bendorejo - Gembleb sesuai dengan SK Ruas Jalan Kabupaten Trenggalek Nomor 285, Kab. Trenggalek	Pogalan	Gembleb	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
464	2853148	#MPP Bimbingan Teknis Manajemen/Pengelolaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna)	Perlunya bimtek pengelolaan kelembagaan PKK Desa Gembleb	Dusun Gembleb RT.026 RW.009 Desa Gembleb, Kab. Trenggalek	Pogalan	Gembleb	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
465	2853158	#MPP Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Rambu Kebencanaan dan/atau Early Warning System)	Tinggina potensi ancaman banjir di sebagian besar wilayah kelurahan kelutan sehingga mememrlukan kesiapan peratalatan untuk penyelamatan/pengungsian ketempat yang lebih aman seperti jaket pelampung, tali, ukuran besar dan panjang, lampu darurat dll	Rt.01, Rt.02, Rt.09, Rt.10, Rt.11, Rt.12 , Rt .13 dan Rt.14 kelurahan kelutan sebanyak masing 100 buah memerlukan dana sekitar Rp50.000.000 https://drive.google.com/file/d/1Af1yi5GCDHJsKsSGsSh9h3JoGbezMg1E/view?usp=drive_link, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Kelutan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
466	2853213	#MPP Bimtek Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Perlunya Bimbingan/Edukasi Digital Bagi Karang Taruna Desa Gembleb	Dusun Gembleb Rt.026 RW.009 Desa Gembleb, Kab. Trenggalek	Pogalan	Gembleb	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
467	2853814	#KEREN Bantuan bibit ternak kambing lokal	Kelompok Tani “SIDO RUKUN” Desa Sidomulyo Bermaksud meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian Masyarakat yang masih hidup dibawah garis kemiskinan serta mendukung program pemerintah yaitu Swasembada pangan. selaras dengan tujuan tersebut, perlu untuk direalisasikan Bantuan bibit ternak kambing lokal	Dusun Ngepring RT. 25 RW. 10, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
468	2854168	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Usulan Perbaikan Jalan Di Rt 28 yang menghubungkan Kecamatan Dongko dan Kampak Panjang:850M Lebar:3,5M, jalan yang ada sudah rusak parah sehingga banyak orang jatuh dari sepeda motor, mengingat juga banyak anak sekolah yang melewati jalan tersebut.	Dusun Suwaru, Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
469	2854588	#MPP Bantuan bibit ternak kambing PE	Kelompok tani SUKA MAJU Desa Sidomulyo mendukung program pemerintah yaitu swasembada pangan utamanya pada bidang pangan hewani, serta untukmeningkatkan produktifitas pertanian dan peternakan melalui bibit kambing PE. sehingga perlu direalisasikan Bantuan tersebut agar bermanfaat bagi peternak pada khususnya dan Masyarakat pada umumnya.	Dusun Ngepring RT. 27 RW. 11, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
470	2855061	#MPP Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Keterbatasan pemahaman mekanisme kerjasama dengan pihak ketiga menjadikan potensi hasil beras desa belum terserap secara maksimal dan belum membrikan nilai tambah yang optimal bagi petani maupun perekonomian desa.	RT. 06 / RW.01 Dusun Nglengkong, Kab. Trenggalek	Durenan	Karanganom	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
471	2855243	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan usaha tani yang masih dalam kondisi makadam/bebatuan yang sangat sulit untuk dilalui dengan panjang 200 meter lebar 2,5 meter dengan perkiraan biaya sekitar Rp. 100.000.000,-	RT. 07 RW. 04 Dusun Mojo Desa Sumberdadi Kec./Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumberdadi	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
472	2855448	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Usulan Pembangunan jalan Panjang 3750 m, Lebar 4 m. RT 40 s/d RT 44 dusun Buluroto(Jalan kab. Ngadimulyo-Buluroto), kondisi saat Jalan rusak berat, aspal mengelupas habis , banyak cekungan, saat hujan kondisi jalan sangat licin sehingga rawan kecelakaan	Dusun Buluroto, Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
473	2855576	#KEREN Bantuan Pengadaan Mebel Sekolah SD/Sederajat	Kondisi meja dan kursi murid / siswa banyak yang rusak	SD N 1 Karanganyar, Kab. Trenggalek	Pule	Karanganyar	DINAS PENDIDIKAN
474	2855634	#KEREN Bantuan Pengadaan Mebel Sekolah SD/Sederajat	1. Meja dan kursi yang tersedia sekarang kurang,dengan bertambahnya siswa 2. Banyak meja kursi yang sudah rusak	SDN 3 Karanganyar, Kab. Trenggalek	Pule	Karanganyar	DINAS PENDIDIKAN
475	2855636	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan Ruas Kabupaten Ngares-Sumberdadi Dengan Kondisi Rusak Berat yang sangat sulit untuk dilalui dengan volume panjang 1.500 meter lebar 3 meter dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan sekitar Rp. 900.000.000,-	RT. 11, RT. 12 dan RT. 13 RW. 06 Dusun Mojo Desa Sumberdadi Kec./Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumberdadi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
476	2855707	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Ruas Jalan Pakel - Sebo tepatnya di RT 01, 02, 03 Desa Pakel Kecamatan Watulimo (Tamanan-Pakel-Baruklinting) kondisi rusak berat sehingga perlu penangganan segera. adapun panjang jalan yang kami ajukan perbaikan P. 1.000 M L. 5 M dengan jenis pekerjaan Aspal Hotmik.	RT. 01, 02, 03 Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Watulimo	Pakel	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
477	2855787	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tembok Penahan Jalan Ruas Kabupaten Ngares-Sumberdadi Amblas sehingga badan jalan terkikis dengan volume panjang 20 meter tinggi 2,5 meter dengan perkiraan biaya sekitar Rp. 50.000.000,-	RT. 11 RW. 06 Dusun Mojo Desa Sumberdadi Kec./Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumberdadi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
478	2855956	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan Lingkungan dalam kondisi tanah belum ada pengerasan yang sangat sulit untuk dilalui dengan volume panjang 250 meter lebar 2,5 meter dengan perkiraan biaya sekitar Rp. 120.000.000,-	RT. 07 RW. 04 Dusun Mojo Desa Sumberdadi Kec./Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumberdadi	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
479	2856152	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan Lingkungan dalam kondisi rusak yang sulit untuk dilalui dengan volume panjang 150 meter lebar 2,5 meter dengan perkiraan biaya sekitar Rp. 70.000.000,-	RT. 03 RW. 02 Dusun Krajan Desa Sumberdadi Kec./Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumberdadi	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
480	2856356	#MPP Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Jalan Ruas Kabupaten yang belum ada penerangan jalannya dengan kebutuhan sekitar 35 titik dengan biaya yang diperlukan Rp. 100.000.000,-	RT. 09, RT. 10, RT. 12 dan RT. 13 Dusun Mojo Desa Sumberdadi Kec./Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumberdadi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
481	2856686	#KEREN Pendampingan Penyelenggaraan dan Penyediaan Sarana Prasarana Perpustakaan	Untuk meningkatkan minat baca, literasi, dan kualitas hidup masyarakat melalui akses informasi yang mudah dan gratis dan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memperkaya koleksi, mendukung pendidikan, serta memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat bagi warga desa, dikarenakan masih kurangnya buku bacaan dan sarana prasarana maka perpustakan pustoko kaweruh mengajukan permohonan bantuan buku bacaan dan sarana kelengkapannya biaya yang diperlukan sekitar Rp. 42.000.000,-	RT. 07 RW. 04 Dusun Mojo Desa Sumberdadi Kec./Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumberdadi	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
482	2856907	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Pada beberapa ruas jalan Di desa watuagung terdapat tebing dan kontur tanah labil yang rawan longsor, terutama saat musim hujan. Hingga kini belum tersedia tembok penahan jalan dan tembok penahan tebing yang memadai, sehingga sering terjadi kerusakan badan jalan dan gangguan akses transportasi. Kondisi ini membahayakan keselamatan pengguna jalan, menghambat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik, serta meningkatkan biaya pemeliharaan jalan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan tembok penahan	LOKASI RT 18 RW 04 DESA WATUAGUNG, Kab. Trenggalek	Dongko	Watuagung	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
483	2857158	#MPP Pengaman Pengguna Jalan (Guardrail, SafetyMirror/Cermin Tikungan dan Deliniator/Patok Jalan)	disepanjang jalan Kabupaten yang melewati wilayah Desa Sidomulyo, banyak tikungan-tikungan tajam tanpa rambu-rambu yang seringkali mengakibatkan kecelakaan, oleh karenanya sangat perlu pengadaan pengaman pengguna jalan dalam hal ini SAFETY MIRROR	Sepanjang Jalan Kabupaten Yang melewati wilayah Desa Sidomulyo, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
484	2857511	#KEREN Bimtek/Pembinaan/pelatihan Kelompok dan Organisasi Seni	Perlunya pembimbing	RT 35 Dusun Kranding Bendorejo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
485	2858037	#KEREN Pelatihan wirausaha pemula bagi pemuda	Pelatihan wirausaha pemula bagi pemuda , kurangnya keterampilan yang dimiliki oelh pemuda	RT 012 RW 005 DUSUN KEBONAGUNG DESA DEPOK KEC. Bendungan , Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
486	2859169	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	pembangunan Tembok Penahan Jalan Rrt 19 rw 07 Volume 25 x 2,5 , karena badan jalan sempit	RT 019 RW 007 DESA DEPOK KEC. Bendungan Kab. Trenggalek , Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
487	2860606	#MPP Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP/Sederajat	Siswa SMPN 4 Pule saat ini berjumlah 139 anak, sementara ruang kelas hanya ada 3 tentunya ini sangat tidak efektif dalam proses belajar mengajar. Harapannya ada bantuan penambahan ruang kelas baru untuk SMPN 4 Pule.	RT 014 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Pule	Sukokidul	DINAS PENDIDIKAN
488	2860957	#MPP Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Pengadaan penerangan jalan umum (PJU) solar Cell ruas Dawuhan- Tumpakdolo sejumlah 20 titik	RT 012 RW 005 DUSUN KEBONAGUNG DESA DEPOK KEC. Bendungan Kab. Trenggalek , Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
489	2861416	#MPP Bimbingan Teknis Manajemen/Pengelolaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna)	Karang Taruna yang ada di Desa Sukokidul saat ini belum berjalan dengan maksimal dikarenakan seringnya pergantian pengurus. Pengurus yang baru belum begitu paham akan Tupoksi dan cara pengelolaan lembaga yang bagus, oleh karenanya mohon bimbingan teknis kepada karang taruna terkait pengembangan kelembagaan karang taruna.	Desa Sukokidul, Kab. Trenggalek	Pule	Sukokidul	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
490	2861534	#MPP Pemberian Bantuan Alat Mesin Pertanian (Traktor Roda Dua, Cultivator, Alat Pengolah Pupuk Organik, Hand Traktor Capung)	kurangnya peralatan	kelompok tani ngudi makmur Desa Bendorejo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
491	2862051	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Pembangunan Tembok Penahan Jalan Ruas Dawuhan- Tumpakdolo volume 20 x 7 M badan jalan menyempit akibat longsor, akses jalan menuju pendidikan, pasar desa dan jaln poros	RT 014 RW 006 DESA DUSUN KEBONAGUNG DEPOK KEC. Bendungan Kab. Trenggalek , Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
492	2862187	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Jalan rusak dan menghambat akses petani untuk itu kami mengajikan Paving jalan sepanjang 500 meter dan lebar 3 M	RT 40 RW 07 Dusun Crabak, Kab. Trenggalek	Dongko	Sumberbening	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
493	2862526	#MPP Pembangunan Jalan Produksi (Jalan Paving Menuju Lokasi Peternakan untuk Roda 4)	Kondisi jalan saat ini masih berupa tanah, sehingga jika musim hujan tiba jalan menjadi becek dan berlumpur. Volume 150 m x 2,7 m	RT.06 RW.01 Dusun Kempong, Kab. Trenggalek	Munjungan	Ngulungwetan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
494	2863832	#KEREN Pendampingan Penyelenggaraan dan Penyediaan Sarana Prasarana Perpustakaan	Untuk membangkitkan semangat literasi masyarakat desa perlu adanya perpustakaan yang memadai	RT 08 RW 04 Dusun Suwaru, Kab. Trenggalek	Gandusari	Krandegan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
495	2863966	#MPP Pendampingan Penyelenggaraan dan Penyediaan Sarana Prasarana Perpustakaan	Untuk membangkitkan semangat literasi masyarakat perlu adanya perpustakaan desa dengan fasilitas yang memadai	RT 08 RW04 Dusun Suwaru, Kab. Trenggalek	Gandusari	Krandegan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
496	2866410	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kurang memadainya akses jalan menuju rumah warga, sehingga saat musim hujan jalan menjadi becek dan licin Dokumen Pendukung Foto Lokasi berada di Templet Proposal, diakrenan templet upload foto tidak bisa disimpan	RT 17 Dusun Brongkah Kulon Desa Kedunglurah, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
497	2867080	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan utama antara Rt11 Rw 04 dan Rt 12 Rw 04 sudah lama mengalami rusak berat karena curah hujan yang tinggi dan jalan ini menghubungkan antara Kabupaten Trenggalek dengan Kabupaten Ponorogo serta akses menuju wisata Banyulumut, JALAN KABUPATEN YANG TERTERA DI SK Bupati Nomor 188.45/500/406.001.3/2025 DENGAN JARAK (2,700) NGGAREN – TEMPURAN (BATAS PONOROGO)	RT 12 RW 04 DUSUN TOMPE DESA TEGAREN KECAMATAN TUGU, Kab. Trenggalek	Tugu	Tegaren	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
498	2867711	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kurang memadainya akses menuju ke lokasi pertanian apalagi di musim penghujan jala sulit diakses dan juga merupaka jalan alternatif penghubung antar Desa Kedunglurah dan Kendalrejo Dokumen Pendukung Foto Lokasi berada di Templet Proposal, diakrenan templet upload foto tidak bisa disimpan	RT 32 Dusun Tanggung Desa Kedunglurah, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
499	2867722	#MPP Pembangunan sistem Drainase Perkotaan dan peningkatan saluran drainase perkotaan (pada Kelurahan)	Saluran drainase tertutup sehingga tidak berfungsi	Jl.H.O.S Cokroaminoto II (Grojogan) RT.13 RW.04 Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek ., Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
500	2867744	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kurang memadainya akses jalan menuju rumah warga, sehingga saat musim hujan tiba jalan menjadi becek dan licin Dokumen Pendukung Foto Lokasi berada di Templet Proposal, diakrenan templet upload foto tidak bisa disimpan	RT 1 Dusun Brongkah Kulon Desa Kedunglurah, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
501	2867782	#MPP Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Kurang memadainya jaringan irigasi ke lahan pertanian	RT 10 - 31 Desa Kedunglurah, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
502	2868004	#MPP Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah PAUD/ Sederajat	Ruang kelas di Paud/TK Dharma Wanita Sukokidul masih berupa bangunan belum permanen yang terbuat dari Kalsiboard sehingga sangat jauh dari aman dan nyaman.	RT 010 Dusun Krajan , Kab. Trenggalek	Pule	Sukokidul	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
503	2868047	#MPP Pembangunan sistem Drainase Perkotaan dan peningkatan saluran drainase perkotaan (pada Kelurahan)	Saluran air tidak berfungsi mengakibatkan genangan (Banjir)	Jl. Sutan Syahrir Gang Gebyar RT.014 RW.05 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab. Trenggalek., Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
504	2868318	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	saluran tidak berfungsi	Jl. Kimangun Sarkoro Gg Udan Rilis No.2 Kelurahan Sumbergedong RT. 04 RW.02 Kec/Kab. Trenggalek., Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
505	2869771	#KEREN Bantuan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD/Sederajat	Kelompok Bermain Mutiara Bunda belum mempunyai Laptop dan LCD Proyektor untuk menunjang administrasi dan pembelajaran dengan biaya yang diperlukan sekitar Rp. 20.000.000,-	RT. 02 RW. 01 Dusun Krajan Desa Sumberdadi Kec./Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumberdadi	DINAS PENDIDIKAN
506	2870042	#KEREN Bantuan bibit ternak kambing lokal	Sebagian masyarakat Desa Wonokerto memiliki potensi dan minat dalam usaha peternakan kambing lokal, namun terkendala keterbatasan modal, khususnya ketersediaan bibit kambing yang berkualitas. Kondisi tersebut menghambat pengembangan usaha peternakan serta peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga diperlukan dukungan berupa bantuan bibit kambing lokal guna mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan warga desa.	Dsn Jirak RT.08 RW.03 Ds. Wonokerto, Kab. Trenggalek	Suruh	Wonokerto	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
507	2870272	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Tembok Penahan Jalan Ruas Kabupaten Ngares-Sumberdadi Mengalami Longsor dan dapat mengakibatkan badan jalan longsor dengan volume panjang 200 meter tinggi 5 meter dengan perkiraan biaya yang dibutuhkan sekitar Rp. 300.000.000,-	RT. 06 RW. 03 Dusun Krajan Desa Sumberdadi Kec./Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumberdadi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
508	2870851	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Perlu adanya Tembok Penahan Jalan untuk mengamankan akses jalan yang terdapat di pemukiman padat penduduk yang terletak di wilayah Rt 08 Rw 03 Desa Nglinggis. Di samping itu lingkungan tersebut adalah masyarakat yang terdampak langsung dengan adanya Program Strategis Nasional yaitu Bendungan Tugu.	Dusun Pacar Rt 008 Rw 003, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglinggis	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
509	2870950	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Pada ruas Jalan Wonokerto-Jombok Dsn Krajan RT.03 RW.01 Des Wonokerto, terdapat tebing jalan yang labil dan berpotensi longsor akibat curah hujan tinggi, sehingga mengancam keselamatan pengguna jalan dan memerlukan pembangunan Tembok Penahan Jalan. (TPJ)	Jl. Lingga, Dusun Krajan RT.03 RW .01 Desa Wonokerto (Ruas Jalan Wonokerto-Jombok), Kab. Trenggalek	Suruh	Wonokerto	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
510	2871068	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Sebagai Akses jalan Masyarakat Desa Nglinggis dalam segala bidang, Sosial, Ekonomi, Pendidikan dan Pertanian. Wilayah tersebut juga berada di Kawasan Bendungan Tugu yang terletak di Rt 08 Rw 03 Dusun Pacar Desa Nglinggis.	Dusun Pacar Rt 008 Rw 003, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglinggis	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
511	2871071	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Pada ruas Jalan Wonokerto-Jombok di Dusun Krajan RT.03 RW.01 Ds. Wonokerto belum tersedia drainase atau parit yang memadai sehingga aliran air hujan langsung menggerus badan dan tebing jalan, mengakibatkan kondisi tanah labil dan berpotensi longsor, sehingga diperlukan pembangunan drainase sebagai pelengkap dan pengaman jalan.	Jl. Lingga Dsn Krajan Rt.03 Rw 01 Ds. Wonokerto, Kab. Trenggalek	Suruh	Wonokerto	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
512	2871670	#MPP Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Dam parit untuk pengairan petani mengalami kerusakan berat	Rt 11 Rw 04 Desa Tegaren Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	Tugu	Tegaren	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
513	2871791	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	1. Banyak Lubang sehingga sulit dilaui kendaraan 2. Merupakan Jalur Poros (Jalan PU) 3. Satu satunya Jalur untuk kegiatan Masyarakat	Jl.Raya Karanganyar Tumpuk Km.01 (RT 015 / RW 003), Kab. Trenggalek	Pule	Karanganyar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
514	2871915	#MPP Bimtek/Pembinaan/pelatihan Kelompok dan Organisasi Seni	Kelompok Jaranan belum memiliki kapasitas manajemen, teknik pertunjukan, dan tata kelola keuangan yang memadai sehingga kualitas pementasan dan keberlanjutan kelompok belum optimal.	DUSUN SIGIT RT 8 RW 2, Kab. Trenggalek	Karangan	Kedungsigit	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
515	2872057	#KEREN Advokasi dan Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak dan Pengasuhan Positif bagi Keluarga	Terjadinya pernikahan di bawah umur, karena kehamilan yang tidak diinginkan karena "kawasan "Taman mandiri yang lama tidak aktif" dengan jumlah peserta 40 peserta dengan rincian Uang transport peserta, nara sumber, makan dan minuman serta kaos, tas untuk peserta dengan Rincian Anggaran Rp. 30.000.000,-	Peserta dari Kelurahan Tamanan dan dilaksanakan dui Kelurahan Tamanan Lat Lat -8 056911oS, 111.703296oE, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Tamanan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
516	2872502	#MPP Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Pembanguan dan pengadaan Dinas penerangan jalan umum (PJU) dikarenakan jalan gelap ketika malam hari dan membahayakan pengguna jalan	RT.02 RW.01 Kelurahan Surodakan Jl. Abdul Muis koordinat : -8.047701, 111.715321, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
517	2872696	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Keberadaan BUMDesa Arta Mekar telah memberikan kontribusi positif bagi desa, baik dari sisi pelayanan ekonomi kepada masyarakat maupun dalam mendukung peningkatan pendapatan desa. Peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa menjadi hal yang sangat penting agar BUMDesa dapat berkembang lebih maju, profesional, dan mandiri.	RT 05 RW 02 Desa Ngembel, Kab. Trenggalek	Watulimo	Ngembel	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
518	2873113	#MPP Bantuan bibit ternak kambing lokal	Untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu, melalui pemberdayaan usaha produktif serta mendorong ketahanan pangan di tingkat desa maka Kelompok Ternak Pathuk Farm mengajukan permohonan bantuan bibit ternak kambing yang akan diberikan kepada anggota kelompok ternak dengan jumlah yang dibutuhkan 20 ekor perkiraan biaya sekitar Rp. 40.000.000,-	RT. 07 RW. 04 Dusun Mojo Desa Sumberdadi Kec./Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumberdadi	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
519	2873623	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Sebagai akses jalan Masyarakat Desa Nglinggis yang saat ini belum terbangun Jalan yang layak , mengingat lokasi tersebut sangat padat penduduk. lokasi tersebut terletak di wilayah Rt 04 Rw 02 Desa Nglinggis.	Dusun Pacar Rt 004 Rw 002, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglinggis	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
520	2874095	#MPP Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Trafficlight, Flashinglight dan Pelican Crossing)	jalan raya gandusari kampak merupakan jalan umum yang sangat ramai padat kendaraan motor yang lalu lalang, sedangkan diperempatan kartini dan perempatan klinik romo wijoyo desa sukorejo sangat memerlukan lampu trafick light guna mengurangi angka kecelekaan.	Perempatan Kartini dan Perempatan Romo Wijoyo Desa Sukorejo, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
521	2874310	#KEREN Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Masih banyak penyandang Disabilitas yang membutuhkan alat bantu mobilitas (Kursi roda) untuk meningkatkan kemandirian dan mempermudah aksesibilitas penyandang disabilitas dalam beraktivitas sehari-hari.	RT 16 RW 04 Dusun Pinggirsari, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
522	2874334	#MPP Pengembangan Literasi Digital Masyarakat	meningkatkan kecakapan digital (digital skills), etika, keamanan, dan budaya digital masyarakat, serta mendukung program pemerintah dalam percepatan transformasi digital	Plataran wisata Lembah Kepuh Desa Sukorejo, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
523	2874767	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Dusun Krajan tidak memiliki drainase yang memadai sehingga air hujan sering melebar ke pemukiman warga dan menyebabkan kesulitan untuk warga sekitar	Dusun Krajan Desa Besuki, Kab. Trenggalek	Munjungan	Besuki	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
524	2874801	#MPP Pembinaan bagi komunitas olahraga	Kurangnya pembinaan bagi atlit-atlit muda yang berada di Desa gondang, sehingga diperlukaannya pembinaan agar pemuda atau pun atlit Desa Gondang bisa menjadi lebih baik	Desa Gondang, Kab. Trenggalek	Tugu	Gondang	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
525	2874939	#MPP Pembangunan sistem Drainase lingkungan dan peningkatan saluran drainase lingkungan dalam kewenangan Desa	Dusun Kebon tidak memiliki drainase yang memadai, sehingga saat musim hujan air sering meluber ke pemukiman warga, menyebabkan genangan air di rumah-rumah warga dan jalan sekitar	Dusun Kebon Desa Besuki, Kab. Trenggalek	Munjungan	Besuki	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
526	2875157	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Perlunya bronjong penahan tebing, untuk pengaman jalan , karena sangat membahayan mayarakat yang melewati jalan tersebut, apalagi pada saat cuaca hujab lebat.	Rt 12 Rw 04, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sukosari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
527	2875301	#MPP Bantuan Pembangunan Ruang kelas Baru PAUD/Sederajat	Saat ini PAUD Desa Sumberbening masih menumpang di Kantor Desa Sumberbening untuk itu kami mengajukan Ruang Kelas Baru untuk PAUD	Desa Sumberbening, Kab. Trenggalek	Dongko	Sumberbening	DINAS PENDIDIKAN
528	2875511	#MPP Pembangunan sistem Drainase Perkotaan dan peningkatan saluran drainase perkotaan (pada Kelurahan)	UNTUK MELANCARKAN AIR HUJAN KARENA TERJADI GENAGAN AIR DI LINGKUNGAN DAN MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN, VOLUME PANJANG 76.00 M' ANGGARAN Rp. 200.000.000,-	RT.06 RW.02 KEL. SURODAKAN KEC. TRENGGALEK KOORDINAT - 8.047145, 111.711075, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
529	2875983	#MPP Pembangunan Jalan Produksi (Jalan Paving Menuju Lokasi Peternakan untuk Roda 4)	Kondisi jalan yang ada saat ini sebagian makadam dan sebagian rabat kanan kiri dengan kondisi yang sudah rusak, sehingga ketika musim hujan jalan licin sehingga membuat pengguna jalan kurang nyaman. Volume : 250 m x 3 m	Dusun Tengahan RT.09 RW.02, Kab. Trenggalek	Munjungan	Ngulungwetan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
530	2876284	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Pembangunan Tembok Penahan Tebing Ruas Dawuhan- Tumpakdolo volume 25 x x 6 M badan jalan menyempit akibat longsor, akses jalan menuju pendidikan, pasar desa dan jaln poros	RT 014 RW 006 DESA DUSUN KEBONAGUNG DEPOK KEC. Bendungan , Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
531	2876363	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Jalan milik kabupaten yang berada di desa Sukosari banyak lubang sepanjang 1 km yang sangat membahayakan masyarakat yang melewati jalan tersebut, apalagi musim penghujan. Jalan tersebut juga merupakan akses ekonomi masyarakat.	RT 02,04,06,07,08,10, 11 dan 12, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sukosari	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
532	2876386	#MPP Pembangunan MCK / SPALD	Desa Surenlor merupakan Desa ODF tetapi masih banyak warga yang belum mempunyai jamban/MCK permanen. Volume 50 MCK Individu.(USULAN MUSRENA KEREN)	RT 01 - RT 20 Desa Surenlor, Kab. Trenggalek	Bendungan	Surenlor	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
533	2876548	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Pembangunan Tembok Tebing Jalan Ruas Dawuhan-Tumpakdolo volume 50 x 3 M badan jalan menyempit akibat longsor, akses jalan menuju pendidikan, pasar desa dan jaln poros	RT 006 RW 002 DESA DUSUN SOKO DEPOK KEC. Bendungan , Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
534	2876669	#MPP Pembangunan sistem Drainase Perkotaan dan peningkatan saluran drainase perkotaan (pada Kelurahan)	DRAINASE RUSAK DAN KURANG LANCAR MENYEBABKAN JALAN TERGENANG DENGAN PANJANG 200.00 M' Rp.300.000.000,-	JL. POROS A YANI RT.07 RW.02 KEL. SURODAKAN KEC. TRENGGALEK -8.045924, 111.709682, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
535	2876947	#MPP Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1. Belum tersedianya Bak Penampungan Air dan Pipanisasi Air Bersih. 2. Ketika musim kemarau tiba, Masyarakat disekitar wilayah tersebut kesulitan akan kebutuhan Air bersih	Dusun Kempong, Kab. Trenggalek	Munjungan	Ngulungwetan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
536	2877047	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi jalan kabupaten yang melintasi Desa Winong saat ini berada dalam keadaan rusak berat dan memprihatinkan. Kerusakan terlihat hampir di sepanjang ruas jalan, ditandai dengan permukaan aspal yang mengelupas, berlubang cukup dalam, serta genangan air yang kerap muncul saat musim hujan. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan. jalan ini termasuk ruas jalan milik Kabupaten dengan panjang 4,1 KM dengan nama jalan Winong-Banaran	RT 04 RW 02 DUSUN KRAJAN DESA WINONG, Kab. Trenggalek	Tugu	Winong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
537	2877260	#MPP Pembangunan sistem Drainase Perkotaan dan peningkatan saluran drainase perkotaan (pada Kelurahan)	DIMENSI DRAINASE KECIL DAN RUSAK PARAH TIDAK BISA MENAMPUNG AIR HUJAN PERKIRAAN PANJANG 90.00 M' Rp. 150.000.000,-	Gg. CEMPAKA RT.07 RW.02 KEL. SURODAKAN KEC.TRENGGALEK KOORDINAT -8.045228, 111.710138, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
538	2877283	#MPP Bantuan Pengadaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Kondisi eksisting saluran rusak berat sehingga alairan air tidak lancar. Panjang saluran 200m, tinggi 0,7 m, lebar rongga atas 0,65 m	RT 04 RW 02 Dusun Krandegan. titik koordinat -8.104754289530689, 111.74698407318981, Kab. Trenggalek	Gandusari	Krandegan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
539	2877834	#MPP Pembangunan Jalan Produksi (Jalan Paving Menuju Lokasi Peternakan untuk Roda 4)	Permukaan jalan banyak ditumbuhi lumut. Jalan menjadi sangat licin, terutama pada musim penghujan Kendaraan roda dua maupun roda empat sulit melintas Kondisi tersebut membahayakan keselamatan pengguna jalan. Volume : 500 m x 3 m	Dusun Tengahan RT.11-12 RW.02, Kab. Trenggalek	Munjungan	Ngulungwetan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
540	2877890	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	1. Badan Jalan tinggal separo karena tanah longsor 2. Dibawahnya ada rumah warga	RT 007 / RW 002 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Pule	Karanganyar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
541	2877891	#KEREN Pengembangan Literasi Digital Masyarakat	Pelatihan bermedia sosial sangat penting untuk warga, karena medsos sekarang bukan cuma tempat hiburan, tapi juga ruang publik yang berpengaruh besar. Pelatihan bermedia sosial penting agar warga bijak, aman, dan bertanggung jawab saat menggunakan medsos, mampu menyaring informasi, terhindar dari hoaks dan penipuan, serta dapat memanfaatkan medsos secara positif bagi diri sendiri dan lingkungan. Anggaran Rp. 10.000.000,- dengan 50 orang peserta pelatihan.	Jl.Diponegoro No 69 Telp.(0355) 792427 Trenggalek 66315 , Kab. Trenggalek, Trenggalek, Sumbergedong, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
542	2877902	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	BELUM ADA SALURAN AIR	RT 21 - RT 22 DUSUN PONGGOK, Kab. Trenggalek	Karangan	Jati	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
543	2878134	#KEREN Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Atas nama SUPIYAH sakit strok membutuhkan alat bantuan kursi roda, selama ini memakai kursi roda yanh sudah tidak layak pakai	Dsn. Bendo Rt.13 Rw.o6 Desa Ngadirejo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirejo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
544	2878408	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	JALAN RUSAK MILIK KABUPATEN	RT 22 DUSUN PONGGOK, Kab. Trenggalek	Karangan	Jati	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
545	2879268	#MPP Bimbingan Teknis Manajemen/Pengelolaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna)	karang taruna sebagai lembaga yang mewadahi kalangan muda mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan desa, untuk itu perlu peningkatan kapasitas dalam memngelola organisasi	Desa Mlinjon, Kab. Trenggalek	Suruh	Mlinjon	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
546	2879517	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Masih terdapat Jalan Akses daerah pemukiman penduduk sangat tidak layak, untuk memudahkan akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian maka perlu dibangun Perkerasan Jalan Lingkungan. Tepatnya di RT. 19 RW. 05 Dusun Klangsur Desa Dongko dengan Volume P : 500 m x L : 3 m.	RT. 19 RW. 05 Dusun Klangsur Desa Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
547	2879616	#MPP Pembangunan Jalan Produksi (Jalan Paving Menuju Lokasi Peternakan untuk Roda 4)	Permukaan jalan banyak ditumbuhi lumut. Jalan menjadi sangat licin, terutama pada musim penghujan Kendaraan roda dua maupun roda empat sulit melintas Kondisi tersebut membahayakan keselamatan pengguna jalan. Volume : 150 m x 2,7 m	Dusun Tengahan RT.07 RW.02, Kab. Trenggalek	Munjungan	Ngulungwetan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
548	2880137	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Akses Jalan menuju Area Pertanian dan Persawahan masih sangat tidak layak , untuk memudahkan hasil panen dan mobilisasi petani maka perlu dibangun Jalan Usaha Tani (JUT). Tepatnya di RT. 35 RW. 08 Dusun Karangtengah Desa Dongko dengan Volume P : 300 m x L : 2,5 m.	RT. 35 RW. 08 Dusun Karangtengah Desa Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
549	2880198	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Masih terdapat Jalan Akses daerah pemukiman penduduk sangat tidak layak, untuk memudahkan akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian maka perlu dibangun Perkerasan Jalan Lingkungan. Tepatnya di RT. 40 - 41 RW. 09 Dusun Kasihan Desa Dongko dengan Volume P : 500 m x L : 3 m.	RT. 40 - 41 RW. 09 Dusun Kasihan Desa Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
550	2880224	#KEREN Pelatihan Pemasaran secara Online bagi wirausaha Baru/pemula secara individu/Perorangan	Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola pemasaran dan perilaku konsumen secara signifikan. Saat ini, pemasaran secara online melalui media sosial dan platform digital menjadi salah satu faktor utama dalam meningkatkan daya saing usaha. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh wirausaha baru atau pemula secara perorangan di Desa Winong.	Rt 01 Rw 01 Kantor Desa Winong, Kab. Trenggalek	Tugu	Winong	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
551	2880415	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Masih terdapat Jalan Akses daerah pemukiman penduduk sangat tidak layak, untuk memudahkan akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian maka perlu dibangun Perkerasan Jalan Lingkungan. Tepatnya di RT. 54 RW. 12 Dusun Jajar Desa Dongko dengan Volume P : 500 m x L : 3 m.	RT. 54 RW. 12 Dusun Jajar Desa Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
552	2880571	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Masih terdapat Jalan Akses daerah pemukiman penduduk sangat tidak layak, untuk memudahkan akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian maka perlu dibangun Perkerasan Jalan Lingkungan. Tepatnya di RT. 03 RW. 01 Dusun Krajan Desa Dongko dengan Volume P : 500 m x L : 3 m.	RT. 03 RW. 01 Dusun Krajan Desa Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
553	2880624	#MPP Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD/Sederajat	1.SDN 2 KELUTAN perlunya akses jalan pavingisasi menuju ke kelas karena kalau hujan becek dan licin dan perbaikan tempat parkir sepedah	1. SDN 2 KELUTAN Rt.07 kelurahan kelutan volume 115 m2, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Kelutan	DINAS PENDIDIKAN
554	2880684	#MPP Bantuan Bibit Tanaman Hortikultura (Cabai, Bawang Merah, Jahe, Durian, Manggis dan Alpukat)	untuk mengembangkan , membudidayakan kelompok Tani dan memanfaatkan lahan pertanian serta meningkatkan kualitas hidup Petani maka Komoditas yang sangat Potensi adalah Bawang Merah. maka dari itu kami kelompok Tani Sumber Rejeki Desa Dongko sangat berharap bantuan bisa ter realisasi	Kelompok Tani Sumber Rejeki RT. 69 RW 03 Dusun Blimbing Desa Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
555	2880713	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	JALAN MASIH TANAH	Dusun bendo RT 16, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
556	2880748	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi saat ini akses menuju lahan tersebut masih berupa jalan pas batu yang rusak parah dan sulit dilalui pada musim penghujan. Kondisi ini menyebabkan kendaraan pengangkut hasil panen maupun sarana produksi (pupuk dan bibit) tidak dapat masuk ke area lahan.	RT.17 RW.04 Dusun Ndilem, Kab. Trenggalek	Pule	Tanggaran	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
557	2881313	#MPP Bantuan Pembangunan Ruang kelas Baru PAUD/Sederajat	terbatasnya ruang menajar untu menampung siswa	RT.09 RW.01 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Pule	Tanggaran	DINAS PENDIDIKAN
558	2881794	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Tembok Penahan Tebing, Tembok Penahan Jalan)	Terdapat tebing bahu jalan masih tanah dengan kondisi labil dan berpotendi longsor dimusim penghujan yang dapat mengakibatkan jalan ambles/longsor	RT.13 RW. 01 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Pule	Tanggaran	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
559	2882048	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Usulan Jalan Menuju Rumah Jaiman Rt 36 Dusun Suwaru,Jalan masih tanah sehingga musim hujan licin	RT. 36/08 Dusun Suwaru, Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
560	2882130	#KEREN Pelatihan Pemasaran secara Online bagi wirausaha Baru/pemula secara individu/Perorangan	Warga desa sudah ada yang menekuni usaha rumahan namun sebagian besar belum memahami Pemasaran secara Online. Pelatihan Pemasaran Online sangat dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.	RT.21-DS.SENGON, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sengon	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
561	2882166	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Peningkatan Ruas Jalan Dompyong - Pagerwojo (Batas Tulungagung) dengan volume P: 50 meter L: 5 meter yang merupakan jalur antar kabupaten yang digunakan sebagai jalur utama mobilitas warga dan juga jalur perintis bus damri yang saat ini kondisinya rusak parah akibat badan jalan longsor. Kondisi tersebut sangat membahayakan pengguna jalan dan rawan kecelakaan terutama kendaraan dengan beban berat.	Dusun Tumpakaren RT. 12 RW. 04 Lingkungan Sirihan, Kab. Trenggalek	Bendungan	Dompyong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
562	2882187	#MPP Pembangunan sistem Drainase Perkotaan dan peningkatan saluran drainase perkotaan (pada Kelurahan)	drainase tidak berfungsi meyebabkan banjir di daerah perkotaan	jln Gatot Subroto Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
563	2882355	#MPP Bimtek/Pembinaan/pelatihan Kelompok dan Organisasi Seni	Kurangnya pengembangan seni untuk meningkatkan kapasitas kedepannya	Rt 01 Rw 01 Dusun Krajan Desa Tegaren Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	Tugu	Tegaren	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
564	2883070	#MPP Bantuan Pengadaan Mebel PAUD/Sederajat	Kurangnya Prasarana mebeler (meja/kursi) sebagai penunjang proses pembelajaran	RT.33 Rw.03 Dusun Ngremang, Kab. Trenggalek	Pule	Tanggaran	DINAS PENDIDIKAN
565	2883226	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Gorong-gorong)	Setiap Musim Hujan di Jalan Watuagung Ngembel yang tepatnya Di Dusun Suwur selalu terjadi banjir yang melintasi jalan tersebut yang mengakibatkan pengendara tidak bisa melintasi dan membuat jalan tersebut rusak. maka diperlukan Buis Beton Ukura 100 cm x 100 cm dengan panjang melintang jalan 20 meter.	Dusun Suwur, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watuagung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
566	2884091	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi Jalan Kabupaten sesuai SK Bupati yang berada di Ruas Jalan (Bulu - Bangunsari) Nomor Urut : 51, Nomor Ruas : 35.3.051, Panjang : 8.400 km Sangat Tidak Layak khusunya di RT. 49-50-51-54-55 RW. 11-12 Dusun Jajar Desa Dongko, dengan Volume : P : 1.000 m x L : 5 m	RT. 49-50-51-54-55 RW. 11-12 Dusun Jajar Desa Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
567	2884217	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi Jalan Kabupaten sesuai SK Bupati yang berada di Ruas Jalan (Dongko - Siki) Nomor Urut : 52, Nomor Ruas : 35.3.052, Panjang : 5.790 km Sangat Tidak Layak khusunya di RT. 39-38 RW. 10 Dusun Kasihan - RT. 63 RW. 14 Dsn Premban Desa Dongko (dua Dusun), dengan Volume : P : 1.130 m x L : 5 m	RT. 39-38 RW. 10 Dusun Kasihan - RT. 63 RW. 14 Dsn Premban Desa Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
568	2884247	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Kondisi Jalan Kabupaten sesuai SK Bupati yang berada di Ruas Jalan (Dongko - Salamwates) Nomor Urut : 58, Nomor Ruas : 35.3.058, Panjang : 3.740 km Sangat Tidak Layak khusunya di RT. 14-13-12-11 RW. 03 Dusun Blimbing Desa Dongko, dengan Volume : P : 1.000 m x L : 5 m	RT. 14-13-12-11 RW. 03 Dusun Blimbing Desa Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
569	2884349	#KEREN Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah	Pada musim hujan, air hujan yang melimpah sebagian besar terbuang percuma karena tidak adanya fasilitas penampungan yang memadai. Sebaliknya, pada musim kemarau masyarakat mengalami kekurangan air, sehingga harus mengambil air dari sumber yang jauh. Berdasarkan kondisi tersebut, (Pembangunan Bak Penampung Air) menjadi sangat diperlukan. Volume : Panjang: 4 – 6 meter, Lebar: 3 – 5 meter, Tinggi: 2,5 – 3 meter (Kapasitas kurang lebih 40.000 - 90.000 liter). dan pengembangan perpipipaan : 102 KPM	RT. 28 RW. 07 Dusun Karangtengah Desa Dongko , Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
570	2884817	#KEREN Penambahan ruang puskesmas	Dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Dongko Kabupaten Trenggalek, diperlukan sarana prasarana yang memadai, dengan kondisi tersebut Puskemas Dongko memerlukan Penambahan Ruang : 1. Gudang Farmasi, 2. Gudang Umum, 3. Tempat Parkir Karyawan Puskesmas Dongko, 4. Penambahan Ruangan Rawat Jalan. Untuk Rincian Kebutuhan ada di Proposal teruplod.	Puskesmas Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
571	2885071	#MPP Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD/Sederajat	Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. Namun, kondisi sekolah SDN 4 Dongko saat ini belum dilengkapi dengan pagar pembatas yang memadai, sehingga area sekolah terbuka dan mudah diakses oleh pihak luar, Hal ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap proses belajar mengajar, serta meningkatnya kemungkinan terjadinya kecelakaan atau tindakan yang membahayakan keselamatan siswa Oleh karena itu perlunya Pagar Sekolah	SDN 4 Dongko Desa Dongko Kecamatan Dongko , Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PENDIDIKAN
572	2885691	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Apabila musim hujan air dari curah hujan dan perumahan mengalir ke jalan, sehingga jalan menjadi tergenang air apalagi jalan yang berlubang, selalu berisi air	Pinggir Jalan Aspal di wilayah Rt.33,35,37,Berada di ruas jalan sesuai SK Bupati Nomor 188.45/500/406.001.3/2025 Nomor Urut 293 Ngadirejo - Karanganyar, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
573	2886458	#MPP Pengaman Pengguna Jalan (Guardrail, SafetyMirror/Cermin Tikungan dan Deliniator/Patok Jalan)	Ada pertigaan dan tikungan jalan yang sangat tajam sehingga ketika berada pada tikungan kendaraan dr lawan arah tidak kelihatan, untuk keamanan pengguna jalan di perlukan safety mirror	Pertigaan Balai Desa Salamrejo RT 09 RW 03 Salamrejo dan Tikungan Ngingas RT 13 RW 05 Salamrejo, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
574	2887003	#MPP Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Diperlukan Pengadaan Tiang lampu dan penataan jaringan PJU agar jalan lebih terang dan aman pada ruas Jalan kabupaten Kelutan-banger di RT 13 sampai RT 12	RT 13 dan RT 12 RW 05 Dusun Salam Selatan Desa Salamrejo, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
575	2888204	#MPP Bantuan Pembangunan Ruang kelas Baru PAUD/Sederajat	Kondisi gedung yang digunakan oleh PAUD Mutiara Insani saat ini memiliki keterbatasan ruang, sehingga kurang optimal dalam menunjang kegiatan belajar mengajar, bermain, dan pengembangan kreativitas anak. Selain itu, aspek keselamatan, kenyamanan, serta standar bangunan pendidikan anak usia dini perlu ditingkatkan agar sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Oleh karena itu, diajukan pembangunan ruang kelas baru PAUD Mutiara Insani dengan ukuran panjang 12 m, lebar 9 m, dan tinggi 4 m.	RT.017 RW.005 Dusun Kajar Desa Dukuh Kecamatan Watulimo, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS PENDIDIKAN
576	2888229	#MPP Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	posisi jalan menikung dan kalau malam hari gelap karena terlalu rimbun dengan pepohonan	Rt 3 dan Rt 4 Dusun Wates , Kab. Trenggalek	Kampak	Sugihan	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
577	2888618	#MPP Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/Sederajat	Seiring dengan bertambahnya usia bangunan dan tingginya intensitas pemakaian, kondisi fisik gedung SD Negeri 2 Dukuh saat ini mengalami kerusakan berat yang berpotensi membahayakan keselamatan peserta didik, tenaga pendidik, dan seluruh warga sekolah. Kondisi ini juga berdampak pada menurunnya kenyamanan dan efektivitas proses pembelajaran. Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan rehabilitasi berat 2 (dua) ruang kelas SD Negeri 2 Dukuh dengan volume panjang 12 m lebar 6 m tinggi 4 m	RT.022 RW.006 Dusun Kajar Desa Dukuh, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS PENDIDIKAN
578	2889052	#MPP Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Trafficlight, Flashinglight dan Pelican Crossing)	Jalan di pertigaan Jajar memerlukan flashinglight, agar pengguna jalan lebih berhati-hati di pertigaan tersebut	RT 19 RW 07 Dusun Jajar Desa Salamrejo, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
579	2889117	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan utama antara Desa Sukokidul - Nglinggis sepanjang 3000m kondisinya saat ini rusak berat banyak lobang dan kerikil bersarakan sehingga membahayakan pengguna jalan	Desa Sukokidul, Kab. Trenggalek	Pule	Sukokidul	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
580	2889156	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan antar desa antara Desa Sukokidul - Jombok sepanjang 1500m kondisi saat ini rusak berat, banyak lobang dan kerikil bersarakan sehingga membahayakan pengguna jalan.	Desa Sukokidul, Kab. Trenggalek	Pule	Sukokidul	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
581	2889417	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Kondisi eksisting JUT masih berupa tanah. Panjang 250 m lebar 2,5 m	RT 09 RW 04 Dusun Suwaru, Kab. Trenggalek	Gandusari	Krandegan	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
582	2889571	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Kelutan-banger di Dusun Salam Selatan Desa Salamrejo retak-retak, bergelombang dan rusak ringan, hal ini mengganggu kenyamanan pengguna jalan, sehingga perlu dilakukan pemeliharaan jalan, agar tidak semakin parah dan tidak membahayakan pengguna jalan	Dusun Salam Selatan Desa Salamrejo, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
583	2890201	#MPP Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	dam parit untuk pengairan sawah petani mengalami kerusakan berat maka perlu adanya perbaikan untuk menunjang pengairan sawah petani	Rt 11 Rw 04 Desa Tegaren Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	Tugu	Tegaren	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
584	2890415	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	JALAN MASIH TANAH	Dusun tenggong RT 27, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
585	2890472	#KEREN Bantuan Pengadaan Mebel PAUD/Sederajat	kondisi mebelair di TK dharma wanita 2 jombok sebagian besar sudah mengalami kerusakan karena faktor usia penggunaan sehingga kurang layak untuk mendukung kegiatan belajar mengajar	RT 7 RW 2 DESA JOMBOK KECAMATAN PULE, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS PENDIDIKAN
586	2890525	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan Cor Beton rusak parah	Dusun Tenggong RT 32, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
587	2890566	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	BUMDesa WAHYU MUKTI RAHARJO di desa kami baru melaksakan reorganisasi kepengurusan, pengurus baru sangat membutuhkan Bimbingan dan Pembinaan dalam ketertiban dan Pengembangan Usaha BUMDesa	RT.10 RW.02 Dusun Tanjung, Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
588	2890771	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Seiring dengan program ketahanan pangan yang bersumber dari Dana Desa melalui BUMDesa perlu adanya Pengelolaan Administrasi dan Manajemen BUMDesa secara profesional, Transparan dan akuntabel	RT 09 RW 04 Dusun Suwaru, Kab. Trenggalek	Gandusari	Krandegan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
589	2890922	#MPP Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	penerangan jalan umum di jalan Bendungan - Sooko (perbatasan Ponorogo) sangat minim, kondisi jalan menanjak tajam berkelok kelok dan gelap pada malam hari. Kondisi PJU yang sudah terpasang masih kurang dan belum standar sehingga sangat membahayakan pengguna jalan. membutuhkan 11 titik PJU untuk keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.	RT.04 RW 01 Dusun Bendungan , Kab. Trenggalek	Bendungan	Dompyong	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
590	2890982	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	jalan masih tanah	Dusun Nglembu RT 24, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
591	2891062	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Drainase Jalan)	Kondisi Drainase rusak dan tidak memadai, sehingga saat musim hujan menyebabkan banjir karena air mengalir kejalan dan masuk ke pemukiman warga. Selain itu juga membayakan pengguna jalan karena jalan tersebut merupakan jalan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu kami mengusulkan bantuan Pembangunan Drainase dengan volume Pangang 50 M x Lebar 1 M x Tinggi 1 M.	Dusun Singgahan RT 10 RW 04, Kab. Trenggalek	Watulimo	Sawahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
592	2891329	#KEREN Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Di Desa Dukuh masih terdapat warga penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan mobilitas akibat kondisi fisik, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebagai upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas, diperlukan kursi roda multiguna 12, kursi roda biasa 2, Tongkat kaki tiga 11, alat bantu dengar 4. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan.	DESA DUKUH, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
593	2891682	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pengadaan jalan paving usaha Tani volume 686 x 2,5 M karena jalannya sulit, jalan masih tanah dan makadam sehingga menghambat akses menuju lahan pertanian	RT 023 RW 009 DUSUN BANARAN DESA DEPOK KEC. Bendungan , Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
594	2891760	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan JUT Rt 015 Rw 06 Dusun Tawing, kondisi jalan berupa Rabat yang sudah rusak dan berlubang dengan panjang 300 meter Lebar 2,5 Meter. Apabila jalan ini terbangun akan memperlancar transportasi warga ke lahan pertanian sehingga dapat meningkatkan ekonomi warga.Jalan tersebut berada diwilayah Kelompok Tani "TAWING SUBUR".	RT 15 RW 06 Dusun Tawing Desa Surenlor, Kab. Trenggalek	Bendungan	Surenlor	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
595	2891773	#MPP Fasilitasi Pelaksanaan festival seni budaya	Fasilitasi pelaksanaan festival seni budaya,berkurangngnya semangat masyarkat dalam pelestarian seni budaya	RT 012 RW 005 DUSUN KEBONAGUNG DESA DEPOK KEC. Bendungan Kab. Trenggalek , Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
596	2891846	#MPP Bantuan Pengadaan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan JUT Rt 09 Rw 04 Dusun Suren , kondisi jalan Makadam dan Tanah dengan panjang 200 meter Lebar 2,5 Meter. Apabila jalan ini terbangun akan memperlancar transportasi warga ke lahan pertanian sehingga dapat meningkatkan ekonomi warga.Jalan tersebut berada diwilayah Kelompok Tani "TANI SUBUR".	Rt 09 Rw 04 Dusun Suren Desa Surenlor, Kab. Trenggalek	Bendungan	Surenlor	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
597	2891900	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Jalan di RT 39-40 Desa Jombok saat ini kondisinya rusak berat dan beberapa bagian amblas sehingga membahayakan pengguna jalan. Saat musim penghujan banyak genangan air dan jalan menjadi licin. Jalur ini merupakan akses menuju sektor pendidikan, ekonomi dan jalan utama masyarakat dari dua dusun yaitu Dusun Jombok dan Dusun Bakalan sehingga sangat dibutuhkan peningkatan.	RT 39-40 DESA JOMBOK KECAMATAN PULE, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
598	2892228	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan Linkar RT.05 Dusun KRAJAN sampai dengan RT 14 Dusun GUGUR dalam Kondisi Rusak berat dan memungkinkan terjadinya Kecelakaan bagi pengguna Jalan sehingga perlu dubangun dengan Hotmik	RT 05 Krajan-RT 14 Dusun Gugur, Kab. Trenggalek	Pule	Pule	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
599	2892277	#KEREN Pendampingan Penyelenggaraan dan Penyediaan Sarana Prasarana Perpustakaan	Desa Munjungan salah satu diantara desa di Kabupaten Trenggalek yang memiliki Perpustakaan Desa. sudah sering mengikuti lomba Perpustaakan dll. namun dari kondisi dan lokasi yang kurang representatif, menjadi salah satu faktor yang menjadikan daya tarik berkunjung menjadi berkurang. olehkarenanya, penyediaan sarana prasarana terutama pembangunan Perpustakaan di lokasi yang lebih representasi menjadi sebuah keniscayaan yang harus segera di tindaklanjuti.	RT 006 RW 001 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Munjungan	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
600	2892368	#MPP Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah PAUD/ Sederajat	Dengan ini kami mengajukan permohonan rehabilitasi ruang kelas di TK Dharma wanita 5 Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek yang mengalami kerusakan bangunan dan tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan. Ruang kelas ini digunakan oleh 25 siswa dan 3 guru, namun kondisi ruang kelas saat ini tidak layak untuk proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kami mohon bantuan untuk merehabilitasi ruang kelas ini agar dapat memenuhi standar yang diharapkan dan meningkatkan kualitas pendidikan	RT. 008 RW. 004 Dusun Plapar Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Cakul	DINAS PENDIDIKAN
601	2892407	#MPP Peningkatan Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Berat)	Jalan PU dari Desa pule Sampai dengan Pertigaan SMA Negeri 1 pule pada saat ini dalam kondisi Rusak sehingga bisa membahayakan Pemakai Jalan maka dari itu perlu pembangunan jalan Aspal	Jalan PU dari Desa Pule sampai dengan Pertigaan SMAN 1 Pule, Kab. Trenggalek	Pule	Pule	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
602	2892416	#MPP Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa	Dengan adanya Re-Organisasi Kepengurusan BUMDesa Desa Surenlor pada tahun ini maka peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDesa sangat diperlukan.	Desa Surenlor, Kab. Trenggalek	Bendungan	Surenlor	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
603	2892540	#KEREN Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Destinasi Wisata meliputi pengelolaan daya tarik destinasi wisata, penguatan SDM dan kelembagaan, pendampingan pengembangan desa wisata.	Pengelola belum memiliki kemampuan dalam manajemen dan tata kelola wisata, sedangkan dunia pariwisata terus berkembang, termasuk pemanfaatan teknologi digital, medsos, dan konsep wisata berkelanjutan, sehingga pengelola wisata perlu dibekali ilmu agar tidak tertinggal.	Dusun Kempong RT.06 RW.01 Desa Ngulungwetan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Ngulungwetan	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
604	2892542	#MPP Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD/Sederajat	SDN 3 Mlinjon memerlukan TPB / Plesengan untuk pengamanan sekolah karena dekat degan tebing	SDN 3 Mlinjon di RT 35 Dusun Miri Desa Mlinjon, Kab. Trenggalek	Suruh	Mlinjon	DINAS PENDIDIKAN
605	2892863	#MPP Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan skala lingkungan pada Desa melalui BK Khusus Desa	Kondisi jalan lingkungan sangat rusak, jalan berlubang sepanjang 300 Meter membahayakan masyarakat dan wisatawan yang melewati jalan tersebut. Selain mengganggu kegiatan Masyarakat dalam Upaya pemenuhan ekonomi, Jalan tersebut juga merupakan akses utama menuju destinasi Desa Wisata Durensari Sawahan yaitu Hutan Durian terluas se-Asia Tenggara. Oleh karena itu kami mengusulkan bantuan Perkerasan Jalan Lingkungan (Pavingisasi) di Dusun Tenggong RT 14 RW 05 Desa Sawahan.	Dusun Tenggong RT 14 RW 05 Desa Sawahan, Kab. Trenggalek	Watulimo	Sawahan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
606	2892906	#MPP Bangunan Pelengkap Jalan (Gorong-gorong)	gorong-gorong jalan salamrejo-kedungsigit (dari plat beton) pada bahu jalan sebelah barat Jebol dan berlubang, sehingga perlu untuk di perbaiki (untuk kemanan oleh masyarakat lubang itu di tutup kayu besar)	RT 11 RW 04 Dusun Salam Selatan Desa Salamrejo, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
607	2893100	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	Jalan Kabupaten Ruas Salamrejo-Sumber bergelombang dan beberapa tempat berlubang sehingga sangat membahakan pengguna jalan dan memerlukan pemeliharaan dan perbaikan	RW 07 sampai RW 08 Dusun Jajar Desa Salamrejo, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
608	2893120	#KEREN Bantuan sarana Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar (Ikan Lele) (Stunting)	Desa Surenlor merupakan salah satu desa dengan angka stunting yang tinggi di Kecamatan Bendungan, maka pemenuhan gizi sangat diperlukan	Desa Surenlor, Kab. Trenggalek	Bendungan	Surenlor	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
609	2893273	#MPP Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Ruas Jalan Ngares-Bendungan Km 15, lokasi sepanjang jalan Jalur Kecamatan Bendungan, dengan 4 titik lokasi lampu, PJU ini digunakan untuk kenyamanan pengguna jalan saat malam hari karena jalur melalui wilayah hutan, rawan longsor	RT 01 - RT 14 Dusun Jerukgulung s/d Bangsalan, Kab. Trenggalek , Kab. Trenggalek	Bendungan	Surenlor	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
610	2893329	#MPP Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Solar Cell Terpasang.	Pengadaan Penerangan Jalan Umum pada Ruas Jalan Surenlor-Masaran Km 0 s/d Km 4 , lokasi sepanjang jalan Jalur Surenlor-Masaran, dengan 4 titik Lampu PJU ini dapat meningkatan kenyamanan pengguna jalan saat malam hari karena jalur melalui wilayah hutan, rawan longsor dan rawan tindak kejahatan.	Rt 03 s/d Rt 08 Desa Surenlor, Kab. Trenggalek , Kab. Trenggalek	Bendungan	Surenlor	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
611	2893407	#MPP Penataan /Standarisasi Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang sudah terpasang IDPEL/meter listrik.	Dengan keterbatasan biaya dari masyarakat maka PJU yang ada di Desa Surenlor kurang Praktis dalam penataannya.	Rt 01 s/d Rt 20 Desa Surenlor, Kab. Trenggalek , Kab. Trenggalek	Bendungan	Surenlor	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
612	2893591	#MPP Pemeliharaan Berkala Jalan (Jalan dengan Kondisi Rusak Ringan)	jalan pada desa Pandean kecamatan Durenan sangat rusak parah, banyak lubang dijalan sepanjang 500m yang sangat membahayakan masyarakat yang melewati jalan tersebut, apalagi saat cuaca hujan lebat. Jalan tersebut juga merupakan jalan ekonomi masyarakat	Dsn. Pandean Rt, 13, 14, 15 Rw. 03 Ds. Pandean Kec. Durenan Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Durenan	Pandean	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
613	2893980	#MPP Bantuan bibit ternak kambing PE	Perlunya bantuan bibit ternak kambing PE untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Bantuan yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yaitu 20 ekor bibit ternak kambing PE.	Dusun Ngrancah RT 016 RW 006 Desa Sawahan, Kab. Trenggalek	Watulimo	Sawahan	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN VI

DAFTAR USULAN ASPIRASI MASYARAKAT / LEMBAGA KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2027

RKPD

KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2027

DAFTAR USULAN ASPIRASI MASYARAKAT/LEMBAGA KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2027

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1	3245581	DPC PKB KABUPATEN TRENGGALEK	#HB Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD ini untuk menunjang kegiatan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Trenggalek Tahun 2027	Jalan Veteran No. 29 RT 003 RW 001, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2	3251786	BNN Kabupaten Trenggalek	#HB Hibah kepada Lembaga	Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam program P4GN di Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan Kabupaten Trenggalek Bersih Narkoba (Bersinar)	JL. I GUSTI NGURAH RAI NO.5 , Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3	3254542	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	#HB Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Perlunya Bantuan Keuangan (Hibah) Kepada Partai Politik untuk Menunjang Kegiatan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat	Jalan Veteran No. 60, RT. 04 RW. 02, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4	3255984	KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA TRENGGALEK	#HB Hibah kepada KWARCAB Kabupaten Trenggalek	Tahun 2026, Kwarcab Trenggalek hanya mendapatkan Rp. 100.000.000 untuk hibah yang hanya bisa digunakan untuk operasional bukan untuk kegiatan, sehingga harapan besar pada Tahun 2027 bisa kembali seperti tahun tahun sebelumnya, mengingat kegiatan kami tentang Pembinaan Karakter untuk kaum muda sangatlah banyak seperti Raimuna Cabang, Kemah Budaya Bahasa Jawa, Perkemahan WIrakarya (bedah rumah), Geladian Pemimpin Regu dan masih banyak hal lainnya.	Jalan Robert Wolter Moenginsidi Nomor 02 Surondakan Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
5	3266050	DPC PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TRENGGALEK	#HB Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD ini untuk menunjang kegiatan Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kabupaten Trenggalek Tahun anggaran 2027.	Jl. Ki Mangun Sarkoro 104 Sumbergedong, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumbergedong	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
6	3266186	KOMITE OLAHRAGA REKREASI MASYARAKAT INDONESIA (KORMI) KABUPATEN TRENGGALEK	#HB Hibah kepada KORMI Kabupaten Trenggalek	Permasalahan Pembinaan Olahraga Masyarakat diantaranya : 1.Program yang Tidak Berkelanjutan 2.Program Belum Merata 3.Kurangnya Kesadaran dan Motivasi: Rendahnya 4.Sinergi Pihak Terkait Kurang Optimal 5.Cabang Organisasi Olahraga Masyarakat (COOM) Masih Terbatas 6.Terbatasnya Anggaran dan Dana	Jl. Basuki Rahmat No. 24 , Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
7	3266478	PDI PERJUANGAN	#HB Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Perlu dukungan untuk meningkatkan efektivitas fungsi organisasi dalam melaksanakan pendidikan politik dan pelayanan administrasi	Jl. Mayjend Sungkono No.31 Kel. Tamanan Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Tamanan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	3267283	KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA	#HB Hibah kepada KONI Kabupaten Trenggalek	KONI Kabupaten Trenggalek pada Tahun 2027 sangat membutuhkan dana hibah yang cukup besar baik itu untuk kebutuhan operasional, pembinaan atlet, reward atlet dan secara khusus Tahun 2027 merupakan pelaksanaan PORPROV X 2027 di Surabaya yang tentu saja sangat membutuhkan dukungan dana yang maksimal.	Komplek Stadion Minak Sopal Kelutan Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Kelutan	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
9	3267633	PSAA TARBIYATUS SOLIHIN	#HB Bantuan Sosial Permakanan anak dalam panti asuhan	Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan permakanan anak di PSAA TARBIYATUS SOLIHIN	RT.46 RW.11, Dsn. Gembes, Desa Masaran Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	3267649	PANTI ASUHAN ASYAFIIYAH	#HB Bantuan Sosial Permakanan anak dalam panti asuhan	Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan permakanan anak di PANTI ASUHAN ASYAFIIYAH	Dusun Duwet RT. 007 RW. 003, Ngetal, Pogalan, Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngetal	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
11	3267656	PANTI ASUHAN JABAL NOOR	#HB Bantuan Sosial Permakanan anak dalam panti asuhan	Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan permakanan anak di PANTI ASUHAN JABAL NOOR	RT.09 RW.03 Dusun Nduwet, Ngetal, Pogalan, Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngetal	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
12	3267675	PANTI ASUHAN SUBULUS SALAM	#HB Bantuan Sosial Permakanan anak dalam panti asuhan	Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan permakanan anak di Panti Asuhan Subulus Salam, Melis Gandusari	Dusun Gebang RT.17 RW.08, Desa Melis, Gandusari Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Gandusari	Melis	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13	3267717	PSAA NURUL HIKMAH	#HB Bantuan Sosial Permakanan anak dalam panti asuhan	Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan permakanan anak di PSAA NURUL HIKMAH	RT 06 RW 02 Desa Rejowinangun, kEC./Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Rejowinangun	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
14	3267831	PANTI ASUHAN AD-DU''AFA	#HB Bantuan Sosial Permakanan anak dalam panti asuhan	Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan permakanan anak di PANTI ASUHAN AD-DU'AFA	Jl.P.Hidayatullah, Desa Jombok, Pule, Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
15	3267880	LKSA DARUSSALAM	#HB Bantuan Sosial Permakanan anak dalam panti asuhan	Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan permakanan anak di LKSA DARUSSALAM	Dusun Cangkring RT.30 RW.08, Desa Sumberingin, Karangan, Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumberingin	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	3267915	LKSA PA AL-ANWAR	#HB Bantuan Sosial Permakanan anak dalam panti asuhan	Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan permakanan anak di LKSA PA AL-ANWAR	RT.26 RW.12, Desa Ngadirenggo, Pogalan, Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirenggo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17	3270482	PANTI ASUHAN YATIM PIATU AL-MUHAJIRIN	#HB Bantuan Sosial Permakanan anak dalam panti asuhan	Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan permakanan anak di PANTI ASUHAN YATIM PIATU AL-MUHAJIRIN	RT. 02 RW. 01 Dsn. Krajan, Desa Ngulanwetan, Pogalan, Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngulanwetan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
18	3270651	LKSA TAHFIDZIL QUR'AN ASSYAFI'IYYAH	#HB Bantuan Sosial Permakanan anak dalam panti asuhan	Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan permakanan anak di LKSA TAHFIDZIL QUR'AN ASSYAFI'IYYAH	Jl.Menara Ngetal RT.06 RW.02 Dusun Nduwet, Ngetal, Pogalan, Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngetal	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
19	3271006	PANTI ASUHAN DISABILITAS HARAPAN MULYA	#HB Bantuan Sosial Permakanan anak dalam panti asuhan	Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan permakanan anak di PANTI ASUHAN DISABILITAS HARAPAN MULYA	RT 23 RW 11 JALAN WARUNG ASEM NO. 23 PANGGUNGSARI KEC. DURENAN, Kab. Trenggalek	Durenan	Panggungsari	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
20	3271106	PANTI ASUHAN AL-MURSYID	#HB Bantuan Sosial Permakanan anak dalam panti asuhan	Keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan permakanan anak di Panti Asuhan Al-Mursyid	RT.10 RW.04, Desa Ngetal, Pogalan, Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngetal	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
21	3274751	BAKAT	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	RT 37 RW 06 DSN KARANGGONGSO, Kab. Trenggalek	Watulimo	Tasikmadu	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
22	3274779	SUPANAH	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN KRAJAN RT 16 RW 06, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watuagung	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
23	3274851	TUMI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	RT 37 RW 08 DSN SUMBER, Kab. Trenggalek	Watulimo	Prigi	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
24	3274860	RIYADLOTUL UQUL	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madin riyadlotul uqul mengalami keterbatasan dana oprasional untuk memenuhi kebutuhan mengajar dan pemeliharaan fasilitas dasar, sehingga mengganggu kelancaran proses pembelajaran.	RT 19 RW 05 DSN GABAHAN, Kab. Trenggalek	Munjungan	Tawing	DINAS PENDIDIKAN
25	3274905	WAGINO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN KETOK RT 09 RW 05, Kab. Trenggalek	Watulimo	Margomulyo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
26	3275050	DJALMIN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	RT 07 RW 01 DSN TAWANG , Kab. Trenggalek	Watulimo	Tasikmadu	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
27	3275054	Polres Trenggalek	#HB Hibah Pengamanan untuk Harkamtibmas	Dalam meminimalkan berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta memaksimalkan peluang dan kekuatan yang dimiliki, Polres Trenggalek akan menggelar berbagai giat pengamanan di seluruh wilayah hukum Polres Trenggalek serta pelibatan seluruh unsur potensi masyarakat untuk turut serta menciptakan situasi yang kondusif, baik, dan aman pada tahun 2027 adalah kunci utama penyelenggaraan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Trenggalek.	Jalan Brigjen Soetran 6 Trenggalek 66311, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
28	3275074	DAMAN	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 12 RW 04, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sambirejo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
29	3275099	WASIDI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN GENDINGAN RT 01 RW 01, Kab. Trenggalek	Watulimo	Prigi	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
30	3275240	AGUS SETYONO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Warga Diisabilitas butuh tambahan penghasilan untuk hidup	RT.20 RW.08 Dusun Jengkol Pucanganak Tugu, Kab. Trenggalek	Tugu	Pucanganak	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
31	3275338	ALIP	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 08 RW 03, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sambirejo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
32	3275431	KATIMUN	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 05 RW 02, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sambirejo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
33	3275769	DANANG SETIAJI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN. GANDU RT 05/02 Desa/Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Gandusari	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
34	3275857	SUJINO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN. KARANGREJO RT 32/10 Desa/Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Gandusari	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
35	3275982	SUMINI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN. PUNDENSARI RT 47/14 Desa/Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Gandusari	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
36	3276182	DARUL MUTTAQIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Karena Sangat minimnya anggaran yg ada di lembaga sehingga tidak mencukupi apabila di gunakan untuk seluruh kegiatan operasional yg ada di madrasah mulai dari Honor tenaga pendidik, Honor tenaga Kependidikan Biaya operasional madrasah Belanja ATK Juga kebutuhan biaya perawatan madrasah yg lain dalam setiap tahun nya yang menelan biaya besar. Sehingga dalam hal ini peran pemerintah terkait pembiayaan kegiatan pembelajaran yang ada di lembaga madrasah diniyah sangatlah di perlukan.	Dusun Krajan Rt 018 Rw 001, Kab. Trenggalek	Karangan	Jatiprahu	DINAS PENDIDIKAN
37	3276254	SULBI ROHMAD SIDIK	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN. KRAJAN KULON RT 08/03 Desa Widoro, Kab. Trenggalek	Gandusari	Widoro	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
38	3276437	MUHAMMAD ICHWAN BAHRUDIN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Dusun Krandegan, RT 17/08 Desa Krandegan Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Krandegan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
39	3276492	MDT Al Atiq	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih kurangnya pendukung pembelajaran di Madin Al atiq,mulai dari oprasional santri,sarana prasarana pendukung lainnya dan khususnya Insentif para Guru-Guru ala kadarnya.dan semua masih sangat membutuhkan anggaran dari Pemerintah baik Pusat,Provinsi maupun Daerah tingkat 2.	RT 01 RW 04 Dusun Ketah Desa Pakel Kecamatan Watulimo, Kab. Trenggalek	Watulimo	Pakel	DINAS PENDIDIKAN
40	3276714	RIZKY AULIA ROHMAN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Dsn, Krandegan, RT 09/04, Desa Krandegan Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Krandegan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
41	3276895	AGUS BAHA''UDDIN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN. POJOK RT 28/06 Desa Sukorame Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorame	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
42	3277715	HASAN MUNAHIR	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Karena Sangat minimnya anggaran yg ada di lembaga sehingga tidak mampu/tidak mencukupi apabila di gunakan untuk seluruh kegiatan operasional yg ada di madrasah mulai dari Honor tenaga pendidik Honor tenaga Kependidikan, Biaya operasional madrasah, Belanja ATK, belanja barang dan jasa, Juga kebutuhan biaya perawatan madrasah yg lain dalam setiap tahun nya yang menelan biaya besar. Sehingga dalam hal ini peran pemerintah terkait pembiayaan kegiatan pembelajaran di madrasah sangat di butuhkan.	RT 08 RW 02 DESA JATI KARANGAN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Karangan	Jati	DINAS PENDIDIKAN
43	3277811	AHMAD ABDUL GAFFAR	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN. POJOK RT 12/06 Desa Sukorame Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorame	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
44	3277865	IMAM GHAZALI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN. KARANG TENGAH RT 27/13 Desa Sukorame, Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorame	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
45	3277916	FELICIA NADA FAJRIA	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kebutuhan mendesak Hidup bagi DIsabilitas	RT. 24 RW. 12 Dsn Karang Tengah Sukorame, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorame	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
46	3278271	DPC PARTAI HANURA	#HB Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Untuk keperluan kepentingan dan kegiatan partai Hanura	Jl Kanjeng Jimat No 5 Surodakan, Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
47	3278517	NURUL HIDAYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga madin Nurul Hidayah Duren Tugu punya keinginan kuat untuk menjadikan generasi bangsa yang memiliki jiwa santun dengan akhlak yang mulia dengan cara terus mendidik generasi dengan pemahaman ilmu agama Islam. namun keterbatasan sarana prasarana serta dukungan operasional Siswa menjadi gendala utama kami, oleh karena itu kami mengajukan dana hibah dari pemerintah kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses pendidikan ilmu yang lebih baik bagi siswa kami.	RT 003 RW 001 DUSUN GAJAH DESA DUREN KECAMATAN TUGU, Kab. Trenggalek	Tugu	Duren	DINAS PENDIDIKAN
48	3279030	TARNI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	RT 24/07 Dusun Sampang Ds. WONOREJO, Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Wonorejo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
49	3279056	BWI Perwakilan Kab. Trenggalek	#HB Hibah kepada Lembaga/Organisasi terkait Kesejahteraan Sosial yang bermanfaat untuk daerah	Wakaf sebagai salah satu filantropi islam m emiliki cakupan penerima manfaat yang lebih luas dari zakat.BWI sebagai lembaga resmi yang bertugas menjaga serta melestarikan aset wakaf untuk menertibkan data aset wakaf di wilayah Kabupaten Trenngalek,BWI juga berkomitmen mewujudkan penguatan ekonomi berbasis wakaf produktif dan wakaf uang.	JL.I .Gusti Ngurah Rai Surodakan, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	SEKRETARIAT DAERAH

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
50	3279137	KURDI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN DAWUHAN RT 01/ RW 01, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Dawuhan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
51	3279156	SUMARYANI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN DAWUHAN RT 01/ RW 01, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Dawuhan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
52	3279175	ANIS SUGIARTI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kebutuhan Hidup dasar bagi warga disabilitas	DSN. DUREN RT 15/05 DESA WONOREJO, KEC. GANDUSARI, Kab. Trenggalek	Gandusari	Wonorejo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
53	3279188	PRIHATIN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	RT 04/RW 01, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Parakan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
54	3279196	WASITO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN SENTUL RT 03/RW 01, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sukosari	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
55	3279230	SUPARNO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	RT.03 RW.02 DSN KRAJAN, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumberdadi	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
56	3279287	MAMIK SULIONO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	RT 03 RW 01 Dsn. Sentul , Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sukosari	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
57	3279310	Nurul Badi'	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga madin kami masih membutuhkan bantuan biaya operasional untuk kelangsungan pembelajaran. Utamanya untuk membiayai 57 Santri dan 3 Orang Ustadz. Atas perhatiannya kami sampaikan Terima kasih.	Dusun Payaman Rt 009/Rw 004, Kab. Trenggalek	Durenan	Durenan	DINAS PENDIDIKAN
58	3279433	PD Pemuda Muhammadiyah Trenggalek	#HB Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	Untuk mewujudkan pemuda islamidi wilayah kabupaten trenggalek siap menghadapi tantangan masa depan demi terwujudnya kader persyarikatan, kader umat, dan kader bangsa dalam rangka membumikan peran pemuda muhammadiyah menuju trenggalek berkemakmuran dan memiliki nilai daya saing.	JL. KH Agus Salim No. 11, Kelurahan Sumbergedong, Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumbergedong	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
59	3279719	ATTAUFIQIYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Saat ini, Madrasah Diniyah Attaufiqiyah mengalami kendala utama berupa terbatasnya sarana operasional yang layak dan minimnya dana untuk kesejahteraan tenaga pendidik. Hal ini menghambat upaya lembaga dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan pelayanan pendidikan keagamaan untuk santri. Oleh karena itu, bantuan hibah ini sangat diperlukan guna mendukung biaya operasional rutin, pengadaan alat tulis, kitab, serta honorarium ustadz/ustadzah agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan optimal.	RT 015 RW 003 DUSUN TANGGUNG, Kab. Trenggalek	Panggul	Ngrambingan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
60	3280425	Sabilul Muttaqin	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Tantangan utama saat ini adalah keterbatasan dana operasional Madrasah Diniyah dalam menyediakan fasilitas dan program edukasi yang mampu menarik minat generasi belia di lingkungan sekitar. Padahal, pengenalan dan pemahaman ilmu agama dari dasar sangat krusial untuk diberikan sejak usia dini sebagai fondasi karakter dan moral anak di tengah pesatnya tantangan zaman. Oleh karena itu, Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) MADIN sangat mendesak untuk direalisasikan.	Dusun Jeruk RT 16 RW 03, Kab. Trenggalek	Karangan	Kedungsigit	DINAS PENDIDIKAN
61	3280541	MIFTAHUL ADZKIYAA'	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Karena Sangat minimnya anggaran yang ada di lembaga kami, sehingga tidak mampu/tidak mencukupi apabila digunakan untuk seluruh kegiatan operasional yang ada di madrasah mulai dari : - Honor tenaga pendidik dan kependidikan - Biaya operasional madrasah. - Belanja ATK, - belanja barang dan jasa. Oleh karenanya, dalam hal ini diperlukan peran pemerintah terkait pembiayaan kegiatan pembelajaran yang ada di madrasah diniyah yang kami kelola.	Rt 014 Rw 005 Dusun Dermosari, Kab. Trenggalek	Tugu	Dermosari	DINAS PENDIDIKAN
62	3280544	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	#HB Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Perlunya bantuan keuangan partai politik untuk menunjang pendidikan politik dan operasional sekretariat	Jl. WR. Supratman 53 RT 009 RW 003, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumbergedong	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
63	3280618	ROUDLOTUT THOLIBIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah Roudlotut Tholibin Sindon di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	DUSUN SINDON RT 21 RW 07, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirejo	DINAS PENDIDIKAN
64	3280650	TK PGRI 1 Sumurup	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Ada Salah satu pendidik yang belum serdik,dan dari lembaga sendiri dak ada dana	Jln.Bendungan - Trenggalek KM 15 RT 01 RW 01 Dusun Pojok, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS PENDIDIKAN
65	3280965	DARISSULAIMANIYYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat dibutuhkannya bantuan biaya operasional untuk membiayai kegiatan belajar mengajar dan keperluan 227 santri dan 16 guru	Jalan Kedung Banteng RT 11 RW 02, Kab. Trenggalek	Durenan	Kamulan	DINAS PENDIDIKAN
66	3281026	SUPARTI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Dsn Kranding RT 40 RW 17 , Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
67	3281027	BEKTI SUBROTO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN KARANG RT 32 RW 09, Kab. Trenggalek	Panggul	Wonocoyo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
68	3281028	MINARSIH	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN WONOCOYO UTARA RT 10 RW 04, Kab. Trenggalek	Panggul	Wonocoyo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
69	3281031	BUDI HARJO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN WONOCOYO UTARA RT 02 RW 01 , Kab. Trenggalek	Panggul	Wonocoyo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
70	3281039	TK. Dharma Wanita 1 Sumberdadi	#HB Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah PAUD/ Sederajat	Kondisi bangunan sudah rusak berat	RT.002 RW.001 Desa Sumberdadi, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumberdadi	DINAS PENDIDIKAN
71	3281040	NANANG ADI SETIAWAN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kebutuhan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN WONOCOYO SELATAN RT 19 RW 06 DESA WONOCOYO PANGGUL, Kab. Trenggalek	Panggul	Wonocoyo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
72	3281041	DEKOPINDA TRENGGALEK	#HB Hibah Uang kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Trenggalek	Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kab. Trenggalek memiliki keterbatasan dalam menyediakan fasilitasi dan biaya operasional untuk pelayanan, pembinaan dan pelatihan secara kontinyu kepada koperasi-koperasi anggotanya sehingga memerlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek.	Jl. Dewi Sartika No.2 , Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN
73	3281042	ISNGATUN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN BENDOGOLOR RT 36 RW 10, Kab. Trenggalek	Panggul	Wonocoyo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
74	3281045	SAMINI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan Lansia diluar penerima bantuan lainnya (Masuk dalam DTSEN desil 1 s.d. 5)	DUSUN BENDOGOLOR RT 34 RW 10 DESA WONOCOYO PANGGUL, Kab. Trenggalek	Panggul	Wonocoyo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
75	3281048	SLAMET	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN KARANG RT. 25 RW. 07, Kab. Trenggalek	Panggul	Wonocoyo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
76	3281049	PRINATIN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN PAYAMAN RT 7 RW 4 DESA/KEC. DURENAN, Kab. Trenggalek	Durenan	Durenan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
77	3281050	SITI JUWARIYAH	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN KARANG RT 28 RW. 08, Kab. Trenggalek	Panggul	Wonocoyo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
78	3281052	MARNI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN PINGIT KULON RT 18 RW.5 DESA GADOR DURENAN, Kab. Trenggalek	Durenan	Gador	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
79	3281055	AWIN MUTIARA	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN SENDANG KAMULYAN RT 25 RW 4 DESA KAMULAN DURENAN, Kab. Trenggalek	Durenan	Kamulan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
80	3281059	BADRIATUN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN KARANGNONGKO RT 3 RW 1 DESA KAMULAN DURENAN, Kab. Trenggalek	Durenan	Kamulan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
81	3281063	MARGONO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN SENDANG KAMULYAN RT 24 RW 4 KAMULAN DURENAN, Kab. Trenggalek	Durenan	Kamulan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
82	3281064	MUSLIMAH	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN KARANGNONGKO RT 1 RW 1 KAMULAN DURENAN, Kab. Trenggalek	Durenan	Kamulan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
83	3281066	SENEN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN KRAJAN RT 05 RW 03 SALAMWATES DONGKO, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
84	3281068	BINTI SHOLIKAH	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN. GEJAGAN RT 041 RW 004 PRINGAPUS DONGKO, Kab. Trenggalek	Dongko	Pringapus	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
85	3281069	ADIFTA RAFLI YANUAR	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN KRAJAN RT 18 RW 07 PANDEAN DONGKO, Kab. Trenggalek	Dongko	Pandean	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
86	3281070	NADIF RAMADIKA	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN SOBO RT 19 RW 06 SALAMWATES DONGKO, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
87	3281088	darussalam	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah Darussalam di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	Dsn. Krajan RT 02 RW 01 Ds. Ngulanwetan, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngulanwetan	DINAS PENDIDIKAN
88	3281323	Nurul hidayah	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Sebagai upaya untuk peningkatan mutu pendidikan di kalangan madrasah, dengan adanya bantuan operasional madin	Rt 10 rw 03 tumpak pelang, Kab. Trenggalek	Karangan	Kayen	DINAS PENDIDIKAN
89	3281418	WARAS	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 15 RW 05, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
90	3281455	UMI KALSUM	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 19 RW 05, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
91	3281489	WIJI	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 01 RW 01, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
92	3281529	SITI AISAH	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 06 RW 02, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sambirejo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
93	3281551	SAIDI	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 02 RW 01, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sambirejo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
94	3281593	KATIYEM	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 01 RW 01, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sambirejo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
95	3281604	BUSKAMAL BOER	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 03 RW 02, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sambirejo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
96	3281638	KOIMAN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN PLAPAR 46/23 Cakul Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Cakul	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
97	3281685	SUGENG RIANTO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN KARANGSONO RT 14 RW 06 SUGIHAN KAMPAK, Kab. Trenggalek	Kampak	Sugihan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
98	3281817	FKUB	#HB Hibah kepada Lembaga	Peningkatan Kapasitas Pengurus FKUB Dalam Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Trenggalek	Jl. HOS Cokroaminoto No.1, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur., Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
99	3281827	SDIT MUTIARA UMMAT	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	dana yang dihimpun dari masyarakat dan atau wali murid tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran honorarium guru	RT. 24 RW.07, Kab. Trenggalek	Durenan	Ngadisuko	DINAS PENDIDIKAN
100	3281877	SLAMET	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN NGIMER RT 20 RW.09 SUGIHAN KAMPAK, Kab. Trenggalek	Kampak	Sugihan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
101	3281923	HANIN HANANIA HARI EDI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kebutuhan Hidup bagi Penyandang Disabilitas	DUSUN SAMBENG RT 12 RW 02 NGADIMULYO KAMPAK, Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
102	3281961	AL ARIFIYYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	usulan BOP MADIN AL ALRIFIYYAH	RT 19 RW 04 KERJO KEC. KARANGAN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Karangan	Kerjo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
103	3281964	MARWOTO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN BALANG RT 27 RW 13 SENDEN KAMPAK, Kab. Trenggalek	Kampak	Senden	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
104	3282043	YAHMI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	TANJUNG RT 12 RW 02 NGADIMULYO KAMPAK, Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
105	3282075	JAIKO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN SENTUL RT 40 RW 12 KARANGREJO KAMPAK, Kab. Trenggalek	Kampak	Karangrejo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
106	3282128	ROHMAD TAUFIK	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	RT 05/ 02 Bendoagung KAMPAK, Kab. Trenggalek	Kampak	Bendoagung	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
107	3282430	MDT AL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih Sangat dibutuhkan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Ula dan Guru Swasta (BPP DGS)	Rt 02 Rw 01 Dusun Melis Desa Melis, Kab. Trenggalek	Gandusari	Melis	DINAS PENDIDIKAN
108	3282489	MDT AL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat diperlukanya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPP DGS)	Rt 02 Rw 01 Dusun Melis Desa Melis, Kab. Trenggalek	Gandusari	Melis	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
109	3283139	KODIM 0806/TRENGGALEK	#HB Hibah Pengamanan untuk Harkamtibmas	Menambah dukungan moril bagi Anggota Kodim 0806/Trenggalek dalam melaksanakan pengamanan wilayah dan pam pilkades serentak, serta mempererat solidaritas dan soliditas antara apkam dan apintel Kodim 0806 dengan semua instansi Pemerintah Kab Trenggalek agar tercipta kerukunan, kenyamanan dan keamanan di wilayah Kab Trenggalek	Jl. Raya Trenggalek-Ponorogo Km 3 , Kab. Trenggalek	Karangan	Buluagung	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
110	3283544	DARUSSALAM BULUAGUNG	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	PENGAJUAN PROPOSAL BOP MADIN	RT 010 RW 004 DUSUN KEDUNGSANGKAL DESA BULUAGUNG, Kab. Trenggalek	Karangan	Buluagung	DINAS PENDIDIKAN
111	3284388	National Paralympic Comitte of Indonesia (NPCI) Kabupaten Trenggalek	#HB Hibah kepada NPCI Kabupaten Trenggalek	Minimnya dukungan pengembangan atlet disabilitas	Dusun Blaring Rt. 05 Rw. 02 No. 19 Desa Panggungsari, Kab. Trenggalek	Durenan	Panggungsari	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
112	3284638	MI MUHAMMADIYAH PUCANGANAK	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Guru madrasah kami sebagian belum sertifikasi	Jl Raya Trenggalek Ponorogo KM.15 RT 04 RW 02 Pucanganak Tugu Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Pucanganak	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
113	3284830	Nurul Hikmah	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Keterbatasan biaya operasional menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan mendasar dan pokok penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Diniyah kami, di mana sebagian besar santri berasal dari kalangan yatim piatu dan duafa yang tidak dipungut biaya, sehingga madrasah mengalami kesulitan dalam memberikan layanan pendidikan bermutu serta meningkatkan kesejahteraan ustadz/guru melalui honorarium yang layak. Bantuan ini sangat diperlukan demi menjamin keberlangsungan pendidikan di lembaga kami.	Rt. 06 Rw. 02 Rejowinangun Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Rejowinangun	DINAS PENDIDIKAN
114	3284978	TARBIYATUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Permohonan pembiayaan oprasional Madin Tarbiyatul Ulum Permohonan pembiayaan oprasional Madin Tarbiyatul Ulum. Pada mading Tarbiyatul Ulum terselenggarakan pendidikan Diniyah bukan hanya mengkaji Alquran tetapi juga kitab-kitab kuning di mana ustaz dan ustadzahnya adalah sukarelawan oleh karena itu kami mohon kepada bapak agar memberikan bantuan agar pendidikan Diniyah bisa berjalan dengan baik. Atas perhatian dan terealisasinya bantuan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya	RT.015 RW.004 Desa Nglebeng Kec. Panggul Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Panggul	Nglebeng	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
115	3285000	MADIN DARUL FALAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madin Darul Falah didirikan untuk melengkapi pendidikan agama Islam khususnya bagi siswa SD/sederajat dimana jam pelajaran serta materi agama Islam di sekolah umum sangat terbatas. Madin Darul Falah saat ini memiliki 57 orang santri serta 9 orang guru. Untuk operasional kegiatan pembelajaran tentunya diperlukan biaya. Oleh karena itu, untuk meringankan beban biaya bagi para orang tua/wali santri serta memberikan kesejahteraan bagi guru madin, dengan ini kami mengajukan BOP Madin Tahun 2027	RT 03 RW 01 Dusun Melis, Kab. Trenggalek	Gandusari	Melis	DINAS PENDIDIKAN
116	3285103	JIDDUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	USULAN BOP MADIN JIDDUL ULUM	RT 16 RW 05 DUSUN NGLONGAH, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumberingin	DINAS PENDIDIKAN
117	3285157	EKO BUDI RAHARDJO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN JATI RT 16 RW 4 DESA JATI KARANGAN, Kab. Trenggalek	Karangan	Jati	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
118	3285216	RUDI PURWANTO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN NGLONGAH Sumberingin Karangan, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumberingin	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
119	3285358	MI SAWAHAN I	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Dengan hormat. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Program Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Sawahan I, Ds. Sawahan, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, dengan ini kami mohon berkenan Bapak Bupati untuk memberikan dana Bantuan Insentif/Tambahan Penghasilan/Jasa Kerja Guru Swasta tahun 2027. Adapun dana yang kami usulkan sebesar Rp.21.600.000,- (Dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), yang akan kami gunakan untuk membiayai 6 (enam) Guru MI Sawahan I. Demikian, terima kasih.	Dusun Ngrancah, RT. 016 RW. 006, Kab. Trenggalek	Watulimo	Sawahan	DINAS PENDIDIKAN
120	3285411	PP POLRI	#HB Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	UNTUK KEGIATAN SOSIAL BAGI KELUARGA ANGGOTA PP POLRI	JL. BRIGJEND SUTRAN NO. 6, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
121	3285430	DARUL FALAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih dibutuhkannya Bantuan Operasional kepada Madrasah Diniyah Swasta dalam rangka memperkuat kecerdasan Batiniyah sebagai wujud mendorong pendidikan Nasional yang berakhlak mulia menuju Indonesia Emas.	RT 015 RW 003 Dusun Telasih Desa Parakan, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Parakan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
122	3285472	BAIT AT TAQWA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah Bait At Taqwa di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	RT 27 RW 10 Dsn Kedunglurah, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	DINAS PENDIDIKAN
123	3285492	NAUFAL BRILLIAN ARDHARESTA	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN KRANDON RT 9 RW 2 Kerjo Karangan, Kab. Trenggalek	Karangan	Kerjo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
124	3285566	MUI Kab. Trenggalek	#HB Hibah kepada Lembaga/Organisasi terkait Kesejahteraan Sosial yang bermanfaat untuk daerah	MUI sebagai khodimul ummah dan shodiqul hukumah memiliki peran strategis dalam mengaktualisasikan program-program pemerintah terhadap masyarakat. MUI menjadi penghubung antara umat dan umaro' dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilia religius. Untuk mewujudkan masyarakat yang baik, MUI berperan dalam berbagai sektor termasuk penguatan ekonomi dan penguatan keluarga. Untuk menguatkan peran dan kinerja, tentunya membutuhkan dukungan Pemerintah Daerah berupa dana operasional MUI	Jalan I Gusti Ngurah Rai, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	SEKRETARIAT DAERAH

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
125	3285681	DASRI	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 14 RW 04, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
126	3285710	MESIYAH	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 25 RW 06, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
127	3285910	SALAFIYAH ASSAFI`IYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah SALAFIYAH ASSYAFI`IYAH di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	RT 07, RW 03, DSN DUWET, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngetal	DINAS PENDIDIKAN
128	3285922	DARUNNAJAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Program BPPDGS dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek sangat dibutuhkan untuk membantu meringankan beban biaya operasional, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik (ustadz/ustadzah), serta menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar yang layak dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, Madin Darunnajah mengajukan permohonan bantuan BPPDGS untuk Tahun Anggaran 2027 guna menunjang kelancaran program pendidikan di lembaga kami.	RT 018 RW 007 Dusun Krajan Desa Parakan, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Parakan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
129	3286073	RUDI SUMARSONO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN BURET, RT 16, RW 06, Kab. Trenggalek	Karangan	Buluagung	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
130	3286108	TARBIYATUN NASYIIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Permohonan pembiayaan oprasional Madin TARBIYATUN NASYIIN. Mengingat pengetahuan keagamaan juga tidak kalah penting untuk masa depan anak bangsa.	RT.005 RW.001 DSN. KRAJAN DS. NGRAMBINGAN, Kab. Trenggalek	Panggul	Ngrambingan	DINAS PENDIDIKAN
131	3286187	MDT Ula HIDAYATUT THOLAB	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Untuk mendukung operasional pendidikan madin dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk santri madrasah diniyah Hidayatut Tholab	Rt.08 Rw.04 Dusun wates, Desa Sugihan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Kampak	Sugihan	DINAS PENDIDIKAN
132	3286298	YAYASAN THORIQUL HUDA KERJO	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat dibutuhkannya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	Jl. Kerjo - Tumpuk RT.010 RW.002 Dusun Krandon, Kab. Trenggalek	Karangan	Kerjo	DINAS PENDIDIKAN
133	3286321	LASMINI	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 04 RW 01, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
134	3286324	Palang Merah Indonesia Kabupaten Trenggalek	#HB Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang Dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (Kepada PMI Kab. Trenggalek)	PROFESIONALISME PELAYANAN KESEHATAN DAN SOSIAL PMI PERLU TERUS MENINGKATAN KOMPETENSI SDM MELALUI BIMTEK/PELATIHAN DAN PEMBARUAN SARPRAS PENUNJANG PELAYANAN YANKESOS KEPADA MASYARAKAT	RT.03 RW.01 DUSUN NDARANG, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Tamanan	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
135	3286329	DHC 45 Trenggalek	#HB Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	DHC 45 Kabupaten Trenggalek terakhir mendapatkan Hibah tahun 2024, dan perlu kegiatan tentang penanaman Nilai-nilai kejuangan. Adapun rencana Kegiatan untuk 2027 adalah Napak Tilas Rute Gerilya Jendral Sudirma, Kemah Penanaman Nilai-nilai Kebangsaan untuk SMA/SMK/MA dan rapat rutin pleno pengurus.	Jl. KH. Agus Salim No.05 Kelurahan Sumbergedong Kec/Kab Trenggalek Telp. 081353791303 Kode Pos 66316, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumbergedong	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
136	3286346	ROUDLOTUT THOLIBIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat dibutuhkanya Bantuan Penyelenggara'an Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	Dusun Sigit RT. 009 Rw. 002 Desa Kedungsigit Kec. Karangan Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Karangan	Kedungsigit	DINAS PENDIDIKAN
137	3286361	Polres Trenggalek	#HB Hibah Uang kepada Instansi Vertikal	Belum memadainya bangunan Mako Polsubsektor Trenggalek Kota dikarenakan kondisi rusak akibat usia bangunan yang sudah lama	Jalan Brigjen Soetran 6 Trenggalek 66311, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
138	3286378	Polres Trenggalek	#HB Hibah Uang kepada Instansi Vertikal	Belum memiliki fasilitas Mako Satpolairud Polres Trenggalek untuk kegiatan operasional	Jalan Brigjen Soetran 6 Trenggalek 66311, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
139	3286562	TARBIYATUS SIBYAN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Saat ini, Madrasah Diniyah Tarbiyatus sibyan mengalami kendala utama berupa terbatasnya sarana operasional yang layak dan minimnya dana untuk kesejahteraan tenaga pendidik. Hal ini menghambat upaya lembaga dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan pelayanan pendidikan keagamaan untuk santri. Oleh karena itu, bantuan hibah ini sangat diperlukan guna mendukung biaya operasional rutin, pengadaan alat tulis, kitab, serta honorarium ustadz/ustadzah agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan optimal	Rt. 20 Rw. 04 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Panggul	Ngrambingan	DINAS PENDIDIKAN
140	3286566	AL-ATIQ	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	kurangnya sarpras madin	RT.12 RW.03 DESA DUKUH, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS PENDIDIKAN
141	3286596	ANIK DIANA	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kebutuhan Hidup Dasar bagi warga disabilitas a.n. Anik Diana Munjungan	RT. 41 RW. 09 Desa Munjungan, Kec.Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Munjungan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
142	3286615	Riska Jusri Maryanti	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	RT. 34 RW. 08 Desa Tawing Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Tawing	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
143	3286646	BANGUN IMAN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Kurangnya sarana & prasarana yang layak dipakai sehingga kegiatan KBM jadi terhambat, dan juga untuk operasional madrasah, honorarium guru dll.	RT 005 RW 001 DUSUN KRAJAN, Kab. Trenggalek	Panggul	Tangkil	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
144	3286654	RONI KRISTIANTO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	RT.07 RW.02 Dusun Guwo Desa Ngrandu Suruh, Kab. Trenggalek	Suruh	Ngrandu	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
145	3286671	SUKESI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	RT.30 RW.11 Dusun Gading DESA/KEC. SURUH, Kab. Trenggalek	Suruh	Suruh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
146	3286690	TUMINEM	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	RT.16 RW.05 Dusun Jajar, Puru, sURUH, Kab. Trenggalek	Suruh	Puru	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
147	3286705	Roudlotun Najjah	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah sangat membutuhkan Bantuan Operasional Pendidikan, hal ini dikarenakan lembaga Madrasah Diniyah sangat minim sekali ketersediaan dana. Fasilitas/Sarara prasarana juga sangat kurang. Selain itu guru/ustadz juga perlu diperhatikan, hal ini karena status pengabdian guru Madin yang tidak jelas, dan sulitnya mendapat akses bantuan. Madrasah kami yang berada di wilayah desa sangat membutuhkan adanya bantuan dana demi berjalannya pendidikan agama di Madrasah Diniyah.	RT.19 RW.03 Dusun Kojur, Kab. Trenggalek	Watulimo	Gemaharjo	DINAS PENDIDIKAN
148	3286732	SUMINI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kebutuhan Hidup dasar bagi warga Lansia sebatang kara sangat mendesak	RT 16 RW 04 Dsn Soho Desa Mlinjon Suruh, Kab. Trenggalek	Suruh	Mlinjon	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
149	3286822	MUKINAH	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kebutuhan Dasar Hidup bagi Disabilitas	Dsn Ketawang RT 01 RW 01 Ds Tasikmadu, Kab. Trenggalek	Watulimo	Tasikmadu	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
150	3286840	Darussalam	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madin Darussalam ini masih membutuhkan bantuan dari kabupaten	Dusun Cangkring alamat : RT 30 RW 08 Desa Sumberingin kec. Karangan kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumberingin	DINAS PENDIDIKAN
151	3287085	MDT ROUDLOTUL ATHFAL	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah Roudlotul Athfal di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.	RT. 006, RW. 002, Dsn. Duwet, Ds. Ngetal, Kec. Pogalan, Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngetal	DINAS PENDIDIKAN
152	3287135	AMAR	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Dsn Brongkah RT 05 RW 02 Kedunglurah, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
153	3287150	KARYADJI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Dsn Brongkah RT 07 RW 02 Kedunglurah, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
154	3287173	BAGUS SETIAWAN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Dusun Krajan, RT 04/ RW. 02 Pakel Pule, Kab. Trenggalek	Pule	Pakel	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
155	3287180	METHA FIFIANA	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Dusun Ponggok, RT. 11 RW. 06 Puyung Pule, Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
156	3287192	KATIYEM	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Dusun Krajan, RT.01 RW.01 Pakel, Pule, Kab. Trenggalek	Pule	Pakel	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
157	3287208	HARNO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN SENDANG RT 18/ RW 9 PUYUNG PULE, Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
158	3287246	KB Cemara	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan bantuan insentif / tambahan pernghasilan/ jasa kerja guru PAUD non PNS pada satuan PAUD Swasta	Dusun Nglengkong RT 022 RW 008 Desa Dermosari, Kab. Trenggalek	Tugu	Dermosari	DINAS PENDIDIKAN
159	3287258	FATKHURROHMAN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih di butuhkannya bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan guru swasta	Dusun Jumog RT 009 RW 004 , Kab. Trenggalek	Tugu	Tumpuk	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
160	3287288	As-Syafi'iyyah	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madin As-Syafi'iyyah memiliki 71 santri dengan 5 guru. Honor pendidik masih terbatas dan belum sebanding dengan beban tugas. Operasional madrasah sepenuhnya bergantung pada dana BOP Madin karena tidak ada iuran santri. Sarana prasarana pembelajaran seperti kitab, papan tulis, alat tulis, administrasi, serta meja belajar santri banyak yang rusak dan belum memadai. Oleh karena itu, BOP Madin sangat dibutuhkan untuk mendukung operasional dan meningkatkan kualitas pendidikan.	RT. 09 RW. 03 Dsn. Nglaban, Kab. Trenggalek	Gandusari	Karanganyar	DINAS PENDIDIKAN
161	3287312	KB AISYIYAH TUMPUK	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan bantuan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS	RT. 10 RW. 04 TUMPUK TUGU TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Tugu	Tumpuk	DINAS PENDIDIKAN
162	3287513	TK PERTIWI DOMPYONG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Ada salah satu pendidik/guru di lembaga kami yang belum serdik dan lembaga tidak bisa memberi honor.	Jln. Bendungan-Trenggalek km 23. RT 001/RW 001, Dusun Bendungan, Kab. Trenggalek	Bendungan	Dompyong	DINAS PENDIDIKAN
163	3287557	KB MUTIARA KASIH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada satuan PAUD Swasta	RT 19 RW 05 Dusun Etan Kali Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglongsor	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
164	3287620	Tarminah Baiturridwan	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah Tarminah Baiturridwan Di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama islam, Namun keterbatasan sarana dn prasarana menjadi kendala utama. oleh karena itu kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman,berilmu dan berakhlak mulia	Rt. 40 Rw. 17 Dusun Kranding, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	DINAS PENDIDIKAN
165	3287715	KB AISYIYAH TUMPUK	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan Bantuan Insentif/Tambahan Penghasilan/Jasa kerja Guru PAUD Non PNS	RT. 10 RW. 04 TUMPUK TUGU TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Tugu	Tumpuk	DINAS PENDIDIKAN
166	3287782	SPS PERMATA KASIH BUNDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Tujuan mengajukan bantuan insentif guru PAUD Swasta agar lebih sejahtera karena pendapatan kami di lembaga diperoleh dari iuran orang tua (SPP) dan dari honor bantuan operasional pendidikan PAUD	RT 23 RW 03 Desa Karanganyar, Kab. Trenggalek	Pule	Karanganyar	DINAS PENDIDIKAN
167	3287829	SPS NAWA KARTIKA 1	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuaan Hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta pada SPS Nawa Kartika 1 Tahun Anggaran 2027	RT.12 RW.03 Dusun Gondang Kidul , Kab. Trenggalek	Tugu	Gondang	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
168	3287921	MADIN AL MUTTAQIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat dibutuhkannya bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan guru swasta	RT 25 RW 09 Dsn Punjung, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PENDIDIKAN
169	3287925	AL MUNAWIR	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Sangat membutuhkan bantuan untuk pembayaran honor ustad/ustadzah dan operasional (ATK, Alat Kebersihan, Cetak Soal & penggandaan dan Buku Pendukung Pembelajaran)	RT. 30 RW.07 DSN. KEBON DS. GONDANG, Kab. Trenggalek	Tugu	Gondang	DINAS PENDIDIKAN
170	3287928	AR ROHMAN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah Ar Rohman masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama pada aspek pendanaan operasional. Sumber pembiayaan utama selama ini berasal dari swadaya wali santri dan dukungan masyarakat sekitar yang jumlahnya sangat terbatas Kondisi tersebut belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan operasional rutin seperti honorarium, pengadaan bahan pembelajaran, serta pemeliharaan sarana dan prasarana madrasah. Dengan Adanya bantuan hibah ini semoga dapat meningkatkan kesejahteraan.	RT. 30 RW.06 DUSUN. NGAJARAN DESA. NGRAMBINGAN, Kab. Trenggalek	Panggul	Ngrambingan	DINAS PENDIDIKAN
171	3287997	IBNU MASUDI	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Dininiyah Takmiliyah Awaliyah IBNU MASUDI saat ini mengalami keterbatasan dana untuk operasional kegiatan lembaga, seperti honorarium Ustadz Ustadzah, kebutuhan ATK, alat kebersihan, sarpras, sehingga perlu adanya peran serta pemerintah berupa BOSDA MADIN agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar.	RT.17 RW.03 DSN. NGADI, Kab. Trenggalek	Munjungan	Ngulungkulon	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
172	3288082	ROUDLOTU THOLIBIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) ROUDLOTU THOLIBIN saat ini mengalami keterbatasan dana operasional untuk membiayai kegiatan belajar mengajar rutin, termasuk honorarium guru ustadz/ustadzah yang masih jauh dari layak, serta kebutuhan ATK dan kebersihan. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya motivasi pengajar dan kualitas proses belajar mengajar. Bantuan BOP diharapkan dapat menunjang keberlangsungan pendidikan agama bagi 108 santri	RT.17 RW.04 Dusun Singgihan Ds. Masaran Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN
173	3288103	Darussalam	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	(Masih sangat dibutuhkannya bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan guru swasta)	Dsn. Tamanan RT. 018 RW. 008 Ds. Sukowetan, Kab. Trenggalek	Karangan	Sukowetan	DINAS PENDIDIKAN
174	3288112	MIFTAHUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah Takmiliyah Miftahul Ulum saat ini mengalami keterbatasan dana operasional untuk membiayai kegiatan belajar mengajar rutin, termasuk honorarium guru ustadz/ustadzah yang masih jauh dari layak, serta kebutuhan ATK dan kebersihan. Hal ini mengakibatkan kurang optimalnya motivasi pengajar dan kualitas proses belajar mengajar. Bantuan BOP Madin sangat diharapkan dapat menunjang keberlangsungan pendidikan agama bagi 127 santri dan 16 guru yang ada di lembaga kami.	DUSUN KARANGTUWO RT 14 RW 03, Kab. Trenggalek	Munjungan	Munjungan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
175	3288120	QOMARUL HIDAYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Karena kurangnya anggaran yg ada di lembaga sehingga belum mampu untuk mencukupi seluruh kegiatan operasional yg ada di madrasah mulai dari : - Honor tenaga pendidik - Honor tenaga *Kependidikan, - Biaya operasional madrasah. - Belanja ATK, - belanja barang dan jasa. - dan biaya perawatan madrasah yg lain Sehingga dalam hal ini peran pemerintah terkait pembiayaan kegiatan pembelajaran yang ada di lembaga madrasah diniyah sangatlah di perlukan untuk menjaga keberlangsungan KBM	RT.07, RW.02, DSN. CORAH MULYO, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglongsor	DINAS PENDIDIKAN
176	3288136	MIFTAHUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah diniyah Miftahul Huda mempunyai keterbatasan dukungan anggaran operasional untuk menunjang standar pelayanan pendidikan keagamaan nonformal, keterbatasan yang disebut mencangkup honorarium tenaga pendidikan, pengadaan bahan ajar ,ATK dan lainnya, serta pemeliharaan sarana prasarana, kondisi demikian bisa menjadi penyebab turunnya mutu pendidikan dan keberlangsungan kegiatan keagamaan santri.	RT 27 RW 07 Dusun Bungur, Kab. Trenggalek	Munjungan	Munjungan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
177	3288169	MIFTAHUL'ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah [Miftahul'ulum] di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	RT. 08 RW. 04, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirenggo	DINAS PENDIDIKAN
178	3288202	MDT ULA-WUSTHA TARBIYATUS SHOLIHIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah menghadapi keterbatasan dukungan anggaran operasional dalam menunjang Standar Pelayanan Minimal pendidikan keagamaan nonformal. Keterbatasan tersebut mencakup pembiayaan honorarium tenaga pendidik, pengadaan bahan ajar dan perlengkapan pembelajaran, serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Kondisi ini berpotensi menurunkan mutu layanan pendidikan, efektivitas proses belajar mengajar, serta keberlangsungan kegiatan pembinaan keagamaan bagi santri	RT. 46 RW. 11 Dsn. Gembes Ds. Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
179	3288223	QOMARUL HIDAYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah Qomarul Hidayah Desa Tawing Kec. Munjungan di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	Dusun Gunung Kembar RT. 48 RW. 10, Kab. Trenggalek	Munjungan	Tawing	DINAS PENDIDIKAN
180	3288232	Hidayatul Mubtadiin	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	keterbatasan pendanaan sarana prasarana untuk santri dan ustadz/ustadzah	RT.13 RW.05 Dsn. Gentungan Ds Craken, Kab. Trenggalek	Munjungan	Craken	DINAS PENDIDIKAN
181	3288235	MI MA'ARIF PLUS NASYITHAN-NAHL	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	"Sebagai guru Non-ASN dan belum bersertifikasi, pendapatan saat ini masih jauh di bawah standar kebutuhan pokok. Bantuan ini sangat dibutuhkan untuk menunjang biaya hidup layak agar kami dapat terus fokus mengabdi tanpa terbebani kesulitan ekonomi yang mendesak."	JL DONGKO-KAMPAK KM.6 RT 44 RW 01 DUSUN KRAJAN DESA PRINGAPUS KECAMATAN DONGKO KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Dongko	Pringapus	DINAS PENDIDIKAN
182	3288238	AL MUQORROBIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	butuh biaya operasional	Dusun Pakel RT 21/06 DS.Dompyong Kec.Bendungan Kab.Trenggalek, Kab. Trenggalek	Bendungan	Dompyong	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
183	3288244	ROUDLOTUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Dalam rangka mencerdaskan anak bangsa melalui lembaga keagamaan(Madin) mendidik, membimbing, mengarahkan, agar menjadi anak yang berakhlak dan berbudi luhur. Semua itu akan berjalan seiring adanya DANA yang cukup. Maka dari itu perlu adanya peran serta dari pemerintah yang berupa BOS, agar kegiatan yang kami laksanakan berjalan lebih baik.	RT 16 RW 03 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Ngulungwetan	DINAS PENDIDIKAN
184	3288260	AL MUBAROK	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat dibutuhkan bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta	RT 21 RW 08 DUSUN JAJAR DESA SALAMREJO KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PENDIDIKAN
185	3288263	AR RAHMAN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Permohonan Bantuan Program BPPDGS Tahun Anggaran 2027	Dusun Krajan RT. 002 RW. 001 Desa Timahan Kecamatan Kampak, Kab. Trenggalek	Kampak	Timahan	DINAS PENDIDIKAN
186	3288269	BUSTANUL KHULUQ	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat dibutuhkan bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta	RT 16 RW 06 DUSUN SALAM UTARA DESA SALAMREJO KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
187	3288275	MADIN SUBULUS SALAM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Seiring bertambahnya jumlah santri, Kebutuhan Operasional seperti honor tenaga pengajar, pengadaan sarana prasarana pembelajaran semakin meningkat, sementara pendanaan masih terbatas, sehingga diperlukan bantuan program BPPDGS TA 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah Subulus Salam	RT. 17 RW. 08 Gebang, Kab. Trenggalek	Gandusari	Melis	DINAS PENDIDIKAN
188	3288302	BUMI HIDAYAH AT TAQWA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah BUMI HIDAYAH AT TAQWA di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	RT 027 RW 010 DUSUN KEDUNGLURAH, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	DINAS PENDIDIKAN
189	3288307	Ashufiah	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Meringankan beban lembaga karena semakin banyaknya kebutuhan operasional madrasah diniyah	RT. 11 RW. 02 DUSUN PAGERSARI, Kab. Trenggalek	Panggul	Banjar	DINAS PENDIDIKAN
190	3288333	MDT ULA AR-ROHIIM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Pendidikan non formal yang dikelola oleh masyarakat yang tidak mempunyai sumber dana yang jelas sehingga masih sangat membutuhkan bantuan biaya untuk sarana pembelajaran dan operasional madrasah	RT 025 RW 009 DUSUN BARUPETAK , Kab. Trenggalek	Bendungan	Botoputih	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
191	3288337	HIDAYATUS SYAFI'IYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Keterbatasan dukungan BOP Madin berdampak langsung pada kualitas pembelajaran serta penyediaan sarana pendukung dalam KBM di MDT HIDAYATUS SYAFI'IYAH, Dalam jangka panjang hal ini berpotensi melemahkan fungsi Madin sebagai basis pembentukan karakter dan moral generasi muda.	RT 34 RW 08 DUSUN KAJANG DESA MASARAN KECAMATAN MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN
192	3288366	BAITUL QUR'AN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Membutuhkan Dana Untuk Operasional Madrasah untuk mengatasi berbagai permasalahan operasional rutin, guna meningkatkan kualiatas pendidikan dan meringankan beban biaya, terutama saat terjadi situasi darurat, karena tidak adanya iuran wajib bulanan/ Syahriyah/ SPP	Rt.32/ Rw.05 Dusun Kayuputih , Kab. Trenggalek	Munjungan	Besuki	DINAS PENDIDIKAN
193	3288397	NASYRUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Ketergantungan Madin pada Sumber Dana Swadaya	RT. 43 RW. 10 DUSUN NGALIRAN, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
194	3288398	BAITURROHMAN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Karena Sangat minimnya anggaran yg ada di lembaga sehingga tidak mencukupi bila di gunakan untuk seluruh kegiatan operasional yg ada di madrasah mulai dari : - Honor tenaga pendidik - Honor tenaga Kependidikan, - Insentif Pengelola - Biaya operasional madrasah. - Belanja ATK, - belanja barang dan jasa. - Juga kebutuhan biaya perawatan madrasah yg lain dalam setiap tahun nya yang menelan biaya besar. Sehingga peran pemerintah terkait pembiaya'an kegiatan pembelajaran sangat diperlukan	Dusun Cangkring RT 31 RW 08, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumberingin	DINAS PENDIDIKAN
195	3288409	MI MUHAMMADIYAH WATUAGUNG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Pengajuan Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Tahun 2027	DUSUN KRECEK RT 36 RW 10 DESA WATUAGUNG KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watuagung	DINAS PENDIDIKAN
196	3288426	MDT AL MUSTHOFA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Untuk operasional madrasah diniah Al Musthofa membutuhkan biaya untuk kebutuhan 60 santri dan 4 ustadh, oleh karenanya mohon bantuan dana melalui BPPDGS sebesar Rp. 25.200.000,- agar proses belajar mengajar berjalan dengan lancar	DSN. NGLANCOR RT.25 RW.08 DESA/KECAMATAN GANDUSARI KAB. TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Gandusari	Gandusari	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
197	3288431	MI MUHAMMADIYAH WATUAGUNG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	PENGAJUAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH DAN GURU SWASTA (BPPDGS) TAHUN 2027	RT. 036 RW. 010 DUSUN KRECEK DESA WATUAGUNG KEC. WATULIMO KAB. TRENGGALEK, PROVINSI JAWA TIMUR , Kab. Trenggalek	Watulimo	Watuagung	DINAS PENDIDIKAN
198	3288434	ROUDLOTUL QURAN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Seiring bertambahnya jumlah santri, kebutuhan operasional seperti honor tenaga pengajar, pengadaan sarana pembelajaran dan pemeliharaan fasilitas semakin meningkat, sementara pendanaan yang tersedia masih terbatas sehingga diperlukan bantuan Program BPPDGS TA 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar dan mengajar di Madin Roudlotul Quran	Dusun Karangsono RT. 02 RW. 01 , Kab. Trenggalek	Kampak	Sugihan	DINAS PENDIDIKAN
199	3288456	hidayatul mubtadiien	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiien di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	RT 05 RW 02, Desa Ngulankulon, Pogalan, Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngulangkulon	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
200	3288468	JAERAH	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kebutuhan Hidup Dasar bagi Lanjut Usia	RT 15 RW 04 DESA DOMPYONG BENDUNGAN, Kab. Trenggalek	Bendungan	Dompyong	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
201	3288473	SENEN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN. PLAPAR RT 009 RW 005 DESA CAKUL DONGKO, Kab. Trenggalek	Dongko	Cakul	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
202	3288475	ROUDLOTUL AULAD	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah Takmiliyah Roudlotul Aulad di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kwalitas pendidikan agama Islam, namun keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. oOleh karena itu kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia.	RT 16 RW 07 Dusun Wadi Kidul, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirenggo	DINAS PENDIDIKAN
203	3288481	SUSI LESTARI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN BURET, RT 15, RW 05, DESA BULUAGUNG KARANGAN, Kab. Trenggalek	Karangan	Buluagung	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
204	3288484	RUDI SUMARSONO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN BURET, RT 16, RW 06, DESA BULUAGUNG, Kab. Trenggalek	Karangan	Buluagung	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
205	3288488	ILHAM KARUNIAWAN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DSN TALUN RT 4 RW 2 DESA BULUAGUNG, Kab. Trenggalek	Karangan	Buluagung	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
206	3288519	ROUDLOTUT TULLAB	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madin Roudlotut Tullab saat ini kekurangan sarana prasarana yang memadai seperti Kitab/buku,dan ruang kantor yang rusak ringan	RT.29 RW.06 DUSUN GALIH DS.MASARAN KEC.MUNJUNGAN KAB.TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN
207	3288520	AL HIDAYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat di butuhkannya bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta di trenggalek	RT/R W 05/01 dusun jampi desa ngentrong kec.karangan, Kab. Trenggalek	Karangan	Ngentrong	DINAS PENDIDIKAN
208	3288532	AL - QOMAR	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah AL QOMAR di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	RT 07 RW 03 Dusun Kayujaran, Kab. Trenggalek	Pogalan	Gembleb	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
209	3288604	NURUL HIDAYAH	#HB Bantuan Operasional Pendidikan Swasta jenjang Satuan Pendidikan Non Formal/ Keseteraan	kami meilih bantuan operasional pendidikan yaitu untuk membiayai semua kegiatan di madin Nurul Hidayah Pucanganak. Latar belakang santri kami mayoritas dari warga menengah ke bawah. Sehingga dengan adanya bantuan operasional lembaga bisa untuk meringankan biaya pembelajaran di Madin Nurul Hidayah. Selain itu dana bantuan operasional juga untuk memberikan honor ustad dan ustadah sebagai tanda terima kasih pihak madrasah atas pengabdian yang dilakukan.	Dusun Klampisan RT 014 Rw 006 Desa Pucanganak, Kab. Trenggalek	Tugu	Pucanganak	DINAS PENDIDIKAN
210	3288694	Darussalam	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	(Masih sangat dibutuhkannya bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan guru swasta)	Dsn. Tamanan RT. 018 RW. 008 Ds. Sukowetan, Kab. Trenggalek	Karangan	Sukowetan	DINAS PENDIDIKAN
211	3289008	MDT AL FALAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih dibutuhkanya bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta (BPP DGS)	RT 40 RW 13 Dusun Pundensari Desa Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Gandusari	DINAS PENDIDIKAN
212	3289059	NURUL BURHAN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Keterbatasan perolehan dana BOP Madin berpengaruh pada kuwalitas kegiatan belajar mengajar di MDT NURUL BURHAN dalam jangka panjang juga berpengaruh pada fungsi melemahnya MDT sebagai sarana untuk membentuk karakter, kepribadian dan keterampilan santri	RT 17 RW 04 Dusun Karangtuwo, Kab. Trenggalek	Munjungan	Munjungan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
213	3289122	PKBM DARUSSALAM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Operasional pendidikan di PKBM kami terkendala regulasi BOSP Pusat yang hanya menyasar warga belajar usia di bawah 25 tahun. Faktanya, 96 dari 190 peserta didik kami (50%) berusia di atas 24 tahun, sehingga tidak tercover pendanaan pusat. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan anggaran, terutama pada program pelatihan keterampilan yang krusial bagi kemandirian warga belajar dewasa. Dukungan APBD Kabupaten sangat dibutuhkan demi menjamin keberlangsungan layanan pendidikan kesetaraan yang inklusif.	RT. 01 RW. 01 Dsn. Krajan Ds/Kec. Dongko Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PENDIDIKAN
214	3289197	DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN TRENGGALEK	#HB Hibah Kepala Dewan Pendidikan Kabupaten Trenggalek	Untuk menggerakkan roda kelembagaan Dewan Pendidikan dalam kerangka menjalankan peran dan fungsinya untuk ikut menyukseskan peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Trenggalek	JL. KH. Ahmad Dahlan No.24 , Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS PENDIDIKAN
215	3289222	PPAD	#HB Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	Untuk mendukung kegiatan PPAD Tahun 2027	Jl. Pangeran Diponegoro No.66 Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumbergedong	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
216	3289272	HIDAYATUL MUBTADI'IEN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga masih membutuhkan dana operasional untuk kebutuhan belanja pegawai (honor guru), kebutuhan belanja barang habis pakai, kegiatan belajar dan pemeliharaan ringan.	Dusun Duwet RT.10 RW.4, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngetal	DINAS PENDIDIKAN
217	3289359	Darul Muttaqin	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga Madin Darul Muttaqin masih membutuhkan bantuan untuk operasional lembaga serta pembiayaan untuk 33 santri dan 2 ustadz	RT 03 RW 01 Dusun Kedungmaron Desa Mlinjon, Kab. Trenggalek	Suruh	Mlinjon	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
218	3289536	MDT Miftahul Huda	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah TAkmiliyah (MDT) Miftahul Huda Karangturi saat ini mengalami keterbatasan dana operasional untuk biaya kegiatan belajar mengajar termasuk honorarium ustad/ustadzah yang masih jauh dari kata layak, serta kebutuhan lain seperti ATK, Alat kebersihan dan lain-lain, hal ini mengakibatkan kurang optimalnya motivasi kegiatan pembelajaran	Rt 17 Rw 04 Dusun Kebonsari, Kab. Trenggalek	Munjungan	Karangturi	DINAS PENDIDIKAN
219	3289659	BAITURROHMAN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Sampai saat ini lembaga kami masig membutuhkan bantuan operasional untuk kelangsungan proses belajar mengajar	RT 05 RW 02 DESA MLINJON, Kab. Trenggalek	Suruh	Mlinjon	DINAS PENDIDIKAN
220	3289833	THORIQOTUSSA'ADAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Seiring bertambahnya jumlah santri, kebutuhan operasional seperti honor tenaga pengajar, pengadaan sarana pembelajaran, dan pemeliharaan fasilitas semakin meningkat. Sementara pendanaan yang tersedia masih terbatas, sehingga diperlukan Bantuan Program BPPDGS TA 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di Madrasah THORIQOTUSSA'ADAH.	RT. 11 RW. 02 Dusn Tanjung, Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	DINAS PENDIDIKAN
221	3289863	MI WAJIB BELAJAR NGARES	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Untuk honorarium guru madrasah non PNS dan non Sertifikasi	JL. SUPRIYADI RT 19 RW 05, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngares	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
222	3289918	MIFTAHUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat dibutuhkannya bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta	Rt. 013 Rw. 004 Dusun Nglongah, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumberingin	DINAS PENDIDIKAN
223	3289980	MI MOJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Belum optimalnya tingkat kesejahteraan guru non-ASN pada satuan pendidikan swasta jenjang pendidikan Dasar (SD/MI/SMP/MTS) akibatnya adanya ketimpangan antara penghasilan yang diterima dengan standar biaya hidup minimum, yang bepotensi menurunkan motivasi kerja dalam pelayanan pendidikan	RT 18 RW 07 Dusun Mojokidul, Kab. Trenggalek	Tugu	Jambu	DINAS PENDIDIKAN
224	3290141	KB BABUSSALAM	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	usulan bantuan hibah/bansos untuk lembaga KB Babussalam Desa Pandean kec. durenan tahun 2027 untuk 8 guru dengan pengajuan 48.000.000,00 (8 orang guru X 500.000X 12 bulan) terimakasih atas perhatianya.	RT 06 RW 02 Desa Pandean , Kab. Trenggalek	Durenan	Pandean	DINAS PENDIDIKAN
225	3290293	MADRASAH DINIYAH AL MUNAWAROH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Perlunya untuk Meningkatkan operasional & sarana prasarana madrasah diniyah, mensejahterakan guru/ustadz dan meningkatkan kualitas pembelajaran di lembaga pendidikan agama islam kami	RT. 59 RW. 27 DSN. SANAN DESA SUKOREJO KEC. GANDUSARI KAB. TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
226	3290471	DARUNNAJAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN) Merupakan belanja hibah uang untuk Operasional Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan mendasar dan pokok bagi Madin Darunnajah. Guna Mendukung Kelancaran Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta (BPPDGS). Pada Madrasah Diniyyah "Darunnajah" .Dengan ini kami mohon berkenan bapak untuk memberikan Dana Bantuan Program Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Dan Guru Swasta. Tahun Anggaran 2027.	RT. 07 RW.02 Dusun Kebonagung, Kab. Trenggalek	Panggul	Panggul	DINAS PENDIDIKAN
227	3290492	KB AL MUNAWWAROH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk meningkatkan kwalitas dan proffesionalisme pendidik dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan anak usia dini pada lembaga KB Al Munawwaroh Nglongsor Tugu	Rt.01 Rw.01 Dusun Corah Mulyo Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglongsor	DINAS PENDIDIKAN
228	3290608	KB CAHAYA INSAN	#HB Bantuan Pembangunan Pembangunan Ruang Kelas Baru	Kekurangan ruang kelas di karenakan jumlah Rombel 4 rombel, sedangkan ruang kelas hanya memiliki 2 ruang kelas	RT 04 RW 01 DESA SUMBER-KARANGAN-TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumber	DINAS PENDIDIKAN
229	3290683	AR RIDWAN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Untuk biaya operasional Madin, seperti: belanja pegawai (honor ustadz/guru madin), belanja barang habis pakai dan kegiatan peningkatan pembelajaran	Jl. Soekarno-Hatta RT.14 RW.05, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Kelutan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
230	3290737	SPS TSAMROTUL HIDAYAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	PAUD merupakan fondasi pembentukan karakter dan kesiapan anak ke jenjang pendidikan dasar. Kualitas layanan PAUD sangat ditentukan oleh kualitas pendidik sesuai tahapan usianya. Keberlanjutan mutu layanan pendidikan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan pendidik. Di PAUD kami terdapat 2 (dua) orang Guru PAUD Non ASN yang aktif melaksanakan tugas pembelajaran dan administrasi.	RT 05 RW 02 Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Gandusari	Karanganyar	DINAS PENDIDIKAN
231	3290744	KB PERINTIS	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan bantuan hibah uang insentif /tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD non PNS pada satuan PAUD Swasta	Jl Raya Karangan - Tugu No 40 RT 02 RW 01 Ds.Karangan Kec.Karangan Kab.Trenggalek, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS PENDIDIKAN
232	3290837	Partai Golongan Karya Kabupaten Trenggalek	#HB Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Untuk menunjang Pendidikan Politik dan Operasional Sekretariat Partai	JL. Brigjend Soetran No. 02 Kel. Ngantru, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
233	3290852	DARUL MUSTAQIM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	karena sangat minimnya anggaran yang ada di lembaga sehingga tidak mampu/tidak mencukupi apabila digunakan untuk seluruh kegiatan oprasional yang ada di Madrasah mulai dari Honor Tenaga Kependidikan, Biaya Oprasional madrasah, Belanja ATK, belanja barang dan jasa. Juga kebutuhan biaya perawatan madrasah yang lain dalam setiap tahunnya yang menelan biaya besar. Sehingga dalam hal ini peran pemerintah terkait pembiayaan kegiatan pembelajaran di madrasah sangat di butuhkan.	DSN SOKO RT 14 RW 06, Kab. Trenggalek	Karangan	Sukowetan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
234	3290879	partai amanat nasional	#HB Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	Kurangnya anggaran untuk mensukseskan pendidikan politik di kabupaten trenggalek	Jl. Jaksa Agung Suprapto No.02, Kelurahan Surodakan, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
235	3290984	MI MUHAMMADIYAH WATUAGUNG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	PROPOSAL PENGAJUAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH DAN GURU SWASTA (BPPDGS) TAHUN 2027	RT. 036 RW. 010 DUSUN KRECEK DESA WATUAGUNG KEC. WATULIMO KAB. TRENGGALEK, JAWA TIMUR , Kab. Trenggalek	Watulimo	Watuagung	DINAS PENDIDIKAN
236	3291067	SPS ULUL ALBAB	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	karena keterbatasan gaji / honor yang diterima para pendidik PAUD non formal sehingga membutuhkan tambahan pendapatan untuk kesejahteraan	RT 10 RW 04 DUSUN KRAJAN, Kab. Trenggalek	Durenan	Ngadisuko	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
237	3291071	TK DHARMA WANITA KRANDEGAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pendidikan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utama dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.	RT 09 RW 04 Dusun Suwaru Desa Krandegan , Kab. Trenggalek	Gandusari	Krandegan	DINAS PENDIDIKAN
238	3291111	Hidayatul Mubtadi-ien	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat dibutuhkannya bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta	Dusun Krandon RT 12 RW 02 Desa Kerjo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Karangan	Kerjo	DINAS PENDIDIKAN
239	3291226	PKBM DARUL FALAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	siswa yang berumur diatas 24 tahun belum tercover pada BOP Kesetaraan pusat sehingga kami ajukan bantuan kepada daerah	RT 03 RW 01 Dusun Melis, Kab. Trenggalek	Gandusari	Melis	DINAS PENDIDIKAN
240	3291299	MIFTAHUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Ajuan ulang. terkait Pembenahan catatan. Mengenai Rasio Usulan Proposal sudah sesuai antara Jumlah Santri dengan Ustadz yakni, @ 15 santri / 1 Ustadz	RT 42 RW 09 Dsn. Gunungkembar, Kab. Trenggalek	Munjungan	Tawing	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
241	3291319	AL HIKMAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat dibutuhkannya bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan Guru swasta	Dusun rejosari RT 09 RW 03 , Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PENDIDIKAN
242	3291339	DARUN NAJAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Seiring bertambahnya jumlah santri, kebutuhan operasional seperti honor tenaga pengajar, pengadaan sarana pembelajaran dan pemeliharaan fasilitas semakin meningkat. Sementara pendanaan yang tersedia masih terbatas, sehingga diperlukan bantuan program BPPDGS Tahun Anggaran 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di Madrasah DARUN NAJAH	DUSUN TENGGAR RT. 016 RW. 008 DESA SENDEN KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Kampak	Senden	DINAS PENDIDIKAN
243	3291359	Nurul Mubtadiin	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Nama akun pengajuan seharusnya Hidayatul Mubtadiin, saya telah membuat akun baru tetapi tidak kunjung di approval, terpaksa saya mengajukan di akun ini karena waktu yang sangat mendesak, mohon kerja samanya. (Keterbatasan dana operasional untuk membiayai kegiatan belajar mengajar rutin, Seperti honorarium Ustad ustadzah yang masih jauh dari layak, kemudian dana pemeliharaan sarana prasarana sangat di butuhkan mengingat bangunan yang sudah sangat tua sehingga memperlukan biaya untuk perbaikan)	RT 23 RW 04 DUSUN KEBON DESA BESUKI KECAMATAN MUNJUNGAN, Kab. Trenggalek	Munjungan	Besuki	DINAS PENDIDIKAN
244	3291382	Tarbiyatul Mualimin Wal Mu'alimat	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madin kami masih membutuhkan bantuan penyelenggara'an pendidikan Diniyah meliputi Honorarium Pendidik dan Tim Pengelola BPPDGS, Belanja Modal, ATK, Pengadaan dan Fotokopi Administrasi, Biaya Evaluasi, Publikasi dan Buku Administrasi	RT 009 RW 002 DUSUN GONDANG KIDUL, Kab. Trenggalek	Tugu	Gondang	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
245	3291404	MI GAMPING	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Di lembaga kami masih ada 2 (dua) orang guru yang belum bersertifikasi sehingga masih membutuhkan bantuan insentif dari pemerintah	Dusun Karangturi RT 28 RW 03, Kab. Trenggalek	Suruh	Gamping	DINAS PENDIDIKAN
246	3291413	Kuliyatul Mu'alimin Wal Mu'alimat Al Islamiyah	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Dipergunakan biaya operasional Madrasah Diniyah seperti pembelian bahan ATK, buku santri ULA dan Wustho , Alat kebersihan dan Insentif guru Madin	JL. KI MANGUN SARKORO NO 17B SURODAKAN Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PENDIDIKAN
247	3291463	TK DHARMA WANITA 3 KARANGSUKO	#HB Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah PAUD/ Sederajat	Kondisi Ruang kelas yang tidak memungkinkan untuk proses kegiatan pembelajaran serta membutuhkan rehabilitasi atau peningkatan kontruksi bangunan yang lebih layak . ruang kelas yang rusak mengakibatkan khawatiran wali murid jika putra putrinya melaksanakan kegiatan pembelajaran di ruang kelas TK. Apalagi ketika musim hujan dan ketimpa pohon tumbang yang mengakibatkan kondisi semakin mengkhawatirkan. Dengan demikian pembelajaran di ahlikan ke Ruang Kelas SDN 2 Karangsuko sampai saat ini.	JL.PAHLAWAN NO 68 TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Karangsoko	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
248	3291473	MI MUHAMMADIYAH SLAWE	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Belum mendapat tunjangan profesi guru dan Gaji belum layak.	Dusun Tumbal RT.005 RW.002 , Kab. Trenggalek	Watulimo	Slawe	DINAS PENDIDIKAN
249	3291477	KB AL FALAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan bantuan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja guru PAUD Non PNS pada satuan Paud swasta KB Alfalah Tahun Anggaran 2027	RT 20 RW 04 DESA NGADIMULYO , Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	DINAS PENDIDIKAN
250	3291497	Miftahul Huda	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah kami masih membutuhkan bantuan dana operasional	RT. 24 RW. 03 DUSUN KARANGTURI DESA GAMPING, Kab. Trenggalek	Suruh	Gamping	DINAS PENDIDIKAN
251	3291520	AL-HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat dibutuhkannya bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan guru swasta	Dusun Cethok, Rt. 19, Rw 05, Desa Karangan, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
252	3291613	SUNAN KALIJOGO	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Kurangnya dukungan dana operasional untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Sunan Kalijogo agar dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dan Keterbatasan anggaran lembaga dalam memberikan insentif pada ustadz ustazah di Madin Sunan Kalijogo demi meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Dusun Gebyog	Dusun Gebyog RT. 35 RW. 10, Kab. Trenggalek	Munjungan	Munjungan	DINAS PENDIDIKAN
253	3291666	PEPABRI	#HB Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan	Untuk memantapkan organisasi dalam melaksanakan kegiatan secara rutin maupun keadaan tertentu	Jl. KH. Agus Salim No. 5 RT.014 RW. 005 Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumbergedong	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
254	3291672	KB NUURUL FIKRI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Demi menunjang lahirnya generasi-generasi bangsa yang berkualitas, tentu kesejahteraan para pendidiknya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga akan menjadi penyemangat dalam berjuang .	RT 29 RW 14 DUSUN TUGU, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PENDIDIKAN
255	3291679	Baiturrohman	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat di butuhkan nya bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyyah dan guru swasta	DUSUN KEDUNGWARU RT 25 RW 05 DESA KEDUNGSIGIT KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Karangan	Kedungsigit	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
256	3291693	AL MUKHLISUN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Pembelian atau pengadaan kitab ,Kegiatan dalam rangka penerimaan santri baru,Kegiatan pembelajaran dan proses belajar mengajar,Penggandaan bahan pembelajaran, surat, soal untuk ujian, berkas madrasah atau administrasi, ATK, Kegiatan operasional dan manajemen pengelolaan BPPDGS, dan Bantuan untuk ustadz : 12 bln x Rp. 300.000 x 5 orang	RT 014 RW 003 DUSUN WIDOYOKO DESA KAMULAN, Kab. Trenggalek	Durenan	Kamulan	DINAS PENDIDIKAN
257	3291698	TK DHARMA WANITA 3 SUMBERBENING	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Paud Swasta sejumlah 1 orang selama 12 bulan dengan nominal Rp. 500.000 perbulan	RT 12 RW 03 Dusun Pelem Desa Sumberbening Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur, Kab. Trenggalek	Dongko	Sumberbening	DINAS PENDIDIKAN
258	3291702	KB TUNAS MUDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD swasta sejumlah 2 orang x 12 bulan x 500.000 = 12.000.000	RT 021 RW 005 Dusun Mloko Desa Sumberbening, Kab. Trenggalek	Dongko	Sumberbening	DINAS PENDIDIKAN
259	3291704	MDT ROUDLOTUT THOLABAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Guna mendukung kelancaran pelaksanaan program bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta (BPPDGS) pada madrasah diniyah ROUDLOTUT THOLABAH Tahun 2027	Dusun Pakel RT 38 RW 07 , Kab. Trenggalek	Tugu	Prambon	DINAS PENDIDIKAN
260	3291713	KB NUURUL FIKRI	#HB Bantuan Pengadaan Mebel PAUD/Sederajat	Meja dan Kursi siswa kurang layak dan jumlahnya kurang Belum memiliki rak buku dan rak mainan serta meja kursi guru	RT. 21 RW. 01 Dusun Margo Ds. Margomulyo Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek	Watulimo	Margomulyo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
261	3291720	NURUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih di butuhkan nya bantuan penyelenggara'an pendidikan Diniyah dan guru swasta	RT 15 RW 04 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglongsor	DINAS PENDIDIKAN
262	3291729	MI Prigi II	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Untuk meningkatkan profesionalitas kerja dan kesejahteraan Guru swasta non sertifikasi	Dusun Gendingan RT 17 RW 04 Desa Prigi, Kab. Trenggalek	Watulimo	Prigi	DINAS PENDIDIKAN
263	3291738	Darul Falah	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Permohonan Bantuan Program BPPDGS Tahun Anggaran 2027	Dusun Gambar RT 17 RW 10, Kab. Trenggalek	Kampak	Bogoran	DINAS PENDIDIKAN
264	3291743	TK PERTIWI DONGKO	#HB Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah PAUD/ Sederajat	MEMBUTUHKAN REHAB BAGUNAN, RUANG KELAS DLL....	RT 02 RW 01 DUSUN KRAJAN DESA DONGKO , Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PENDIDIKAN
265	3291760	MI Margomulyo	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Karena guru yang kami usulkan belum mendapatkan sertifikasi guru dan penghasilan sangat belum layak dengan gaji per bulan Rp.400.000	Rt.09/05 Ds.Margomulyo , Kab. Trenggalek	Watulimo	Margomulyo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
266	3291762	TK DHARMA WANITA 3 NGADISUKO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan hibah/bansos untuk lembaga TK Dharma Wanita 3 Ngadisuko untuk 1 Guru	RT 034 RW 010, Dusun Tawing, Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Durenan	Ngadisuko	DINAS PENDIDIKAN
267	3291803	TK DHARMA WANITA 4 GANDUSARI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pendidikan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utama dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.	Rt 49 Rw 15 Dusun Gumelar, Desa Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Gandusari	DINAS PENDIDIKAN
268	3291842	MIS GUPPI GEMAHARJO I	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Sebagian besar guru swasta masih menerima honorarium di bawah standar kebutuhan hidup layak, bahkan bergantung pada kemampuan keuangan madrasah/sekolah yang terbatas.	Jln. Raya Thukul Pantai Prigi RT. 002 RW. 001, Kab. Trenggalek	Watulimo	Gemaharjo	DINAS PENDIDIKAN
269	3291926	TK DHARMA WANITA PERSATUAN KELUTAN	#HB Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD/Sederajat	Permasalahannya yaitu toilet tidak berfungsi dengan baik sehingga anak-anak merasa tidak nyaman saat menggunakan toilet dan sering kebanjiran karena struktur fondasi toilet kurang tinggi	JL. Soekarno Hatta GG. Duku RT. 01 RW. 01 , Kab. Trenggalek	Trenggalek	Kelutan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
270	3291982	TK DHARMA WANITA 2 SALAMREJO	#HB Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD/Sederajat	MEMBUTUHKAN BANGUNAN TOILET / MCK	RT.09 RW.03 DUSUN REJOSARI DESA SALAMREJO, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PENDIDIKAN
271	3292014	TK Dharma Wanita 2 Sengon	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Ada salah satu guru/pendidik di lembaga kami yang belum sertif dan lembaga tidak bisa memberi honor	Jl. Supriadi Gg. Tegalrejo Rt. 04 Rw. 02 Dusun Beji, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sengon	DINAS PENDIDIKAN
272	3292025	DARUL ISTIQOMAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Kurangnya dukungan dana operasional untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Darul Istiqomah agar dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan dan Keterbatasan anggaran lembaga dalam memberikan insentif pada ustadz ustazah di Madin Darul Istiqomah demi meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan	Dusun Kalibening RT. 28 RW. 05, Kab. Trenggalek	Munjungan	Karangturi	DINAS PENDIDIKAN
273	3292119	BAITUL ILMI	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Kapasitas SDM pengelola dalam proses SIPD yang terbatas baik di tingkat OPD maupun pengelolahan Madin, masih terdapat keterbatasan pemahaman teknis terkait mekanisme perencanaan dan penganggaran berbasis SIPD. Hal ini berdampak pada lemahnya kualitas usulan, kelengkapan dokumen, serta konsistensi input data.	RT. 35 RW. 08 Dusun Kajang , Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
274	3292135	AL- IBTIKARY	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat di butuhkan nya bantuan penyelenggara'an pendidikan Diniyah dan guru swasta. Karena Sangat minimnya anggaran yg ada di lembaga sehingga tidak mampu/tidak mencukupi apabila di gunakan untuk seluruh kegiatan operasional yg ada di madrasah mulai dari : - Honor tenaga pendidik - Honor tenaga *Kependidikan, - Insentip Pengelola - Biaya operasional madrasah. - Belanja ATK, - belanja barang dan jasa. - Juga kebutuhan biaya perawatan madrasah yg lain dalam setiap tahunnya.	RT.002 RW.001 DUSUN KARANGAN, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS PENDIDIKAN
275	3292170	BUDIANTO	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	RT. 008, RW. 003, DUSUN POJOK, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
276	3292175	MDT TARBIYATUL ATFAL	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Pendidikan keagamaan merupakan pilar utama dalam pembentukan karakter dan moral bangsa. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Tarbiyatul Atfal selama ini telah mengambil peran strategis dalam memberikan fondasi spiritual, etika, dan ilmu agama kepada generasi muda di tingkat dasar. Namun, dalam perjalanannya, upaya mencetak generasi yang berakhlakul karimah ini dihadapkan pada tantangan realitas ekonomi dan operasional.	RT 07 RW 02 DUSUN KRAJAN, Kab. Trenggalek	Munjungan	Besuki	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
277	3292193	TK DHARMA WANITA 3 SUKOREJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pendidikan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utama dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.	RT 30 RW 14 DS. SUKOREJO KEC. GANDUSARI, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PENDIDIKAN
278	3292201	MI WATUAGUNG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Sebagian besar guru honorer masih menerima honorarium yang relatif rendah dan belum memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat beban kerja yang mereka emban tidak jauh berbeda dengan guru berstatus ASN. Guru honorer tetap melaksanakan tugas pembelajaran, menyusun perangkat ajar, melakukan penilaian, membimbing siswa. Akan tetapi, penghasilan yang diterima seringkali tidak sebanding dengan tanggung jawab tersebut.	RT 25 RW 08 Dusun Suwur, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watuagung	DINAS PENDIDIKAN
279	3292229	TK DHARMA WANITA 1 WONOANTI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan bantuan hibah uang insentif / tambahan penghasilan / Guru Paud Non Pns Pada Satuan Paud Swasta	RT.01 RW.01 Desa Wonoanti Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Gandusari	Wonoanti	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
280	3292235	TK DHARMA WANITA KRANDEGAN	#HB Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah PAUD/ Sederajat	Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini, TK Dharma Wanita Krandegan mengupayakan fasilitas ruang kelas demi kenyamanan pembelajaran.	RT 09 RW 04 Dusun Suwaru Desa Krandegan Kecamatan Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Krandegan	DINAS PENDIDIKAN
281	3292238	BUNSARI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	RT 010, RW 003, DUSUN POJOK, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
282	3292250	HIDAYATUT THOLLAB	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Pendidikan keagamaan merupakan pilar utama dalam pembentukan karakter dan moral bangsa. Madrasah Diniyah (Madin) Hidayatutthollab selama ini telah mengambil peran strategis dalam memberikan fondasi spiritual, etika, dan ilmu agama kepada generasi muda di tingkat dasar. Namun, dalam perjalanannya, upaya mencetak generasi yang berakhlakul karimah ini dihadapkan pada tantangan realitas ekonomi dan operasional.	RT 33 RW 03 DUSUN PONGGOK, Kab. Trenggalek	Munjungan	Besuki	DINAS PENDIDIKAN
283	3292285	KB AL AZHAR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah bantuan Insentif / tambahan penghasilan / jasa kerja guru PAUD Swasta sejumlah 2 orang X 12 bulan X Rp.500.000,- = Rp 12.000.000,-	rt 013 rw 002 dusun krajan desa ngerdani kecamatan dongko kabupaten trenggalek provinsi jawa timur, Kab. Trenggalek	Dongko	Ngerdani	DINAS PENDIDIKAN
284	3292291	DESY RATNASARI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	RT 008, RW 03, DUSUN POJOK, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
285	3292340	DINA DWI LESTARI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	JL. A. YANI GG. ANGGREK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
286	3292360	BAITUNNAJAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat dibutuhkannya bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan guru swasta	Dusun Tamtu RT 25 RW 11, Kab. Trenggalek	Karangan	Sukowetan	DINAS PENDIDIKAN
287	3292382	TK DHARMA WANITA 1 SUKORAME	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pendidikan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utama dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.	RT 22 RW 11 Dusun Karangtengah, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorame	DINAS PENDIDIKAN
288	3292385	AL MANNAR	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga kami masih membutuhkan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	RT 005 RW 002 Dusun Krajan Desa Tegaren, Kab. Trenggalek	Tugu	Tegaren	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
289	3292401	TK DHARMA WANITA 1 KARANGANYAR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pendidikan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utama dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.	RT.06 RW.02 DUSUN JEDUNG DESA KARANGANYAR, Kab. Trenggalek	Gandusari	Karanganyar	DINAS PENDIDIKAN
290	3292504	MI GUPPI AL MUSLIMUN GEMAHARJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	pengajuan digunakan untuk menambah kebutuhan sebagian guru yang masih menerima hononarium di bawah standar kebutuhan hidup layak	Dusun Kojur RT 08 RW 02 Ds. Gemaharjo Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek	Watulimo	Gemaharjo	DINAS PENDIDIKAN
291	3292517	TK YAA BUNAYYA TRENGGALEK	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Banyak guru PAUD yang honornya sangat kecil dengan masa kerja yang sudah lama sedangkan tugasnya lebih berat yaitu menumbuhkan karakter anak usia dini. maka sangat dibutuhkan bantaun Honor tersebut..	Jl. dr. Soetomo Gg. Yaa Bunayya RT. 03 RW. 01 Tamanan Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Tamanan	DINAS PENDIDIKAN
292	3292533	GUMBREG	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
293	3292611	HENDRI EKA	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
294	3292618	KB LESTARI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah Bantuan Insentif / tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Swasta sejumlah 3 orang x 12 bulan x 500.000 = 18.000.000	RT 14 RW 03 Dusun Blimbing , Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PENDIDIKAN
295	3292649	TK PERTIWI DONGKO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan bantuan hibah uang insentif/tambahan penghasilan/guru PAUD non PNS pada satuan paud swasta	RT 02 RW 01 Dusun Krajan Desa Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PENDIDIKAN
296	3292664	ISTATIK	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
297	3292690	TK DHARMA WANITA 2 SIKI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	usulan bantuan tambahan penghasilan /jasa guru PAUD NON PNS pada TK Dharma Wanita 2 Sikii atas Nama WARSITI dan HIDAYATI sebesar RP 12.000.000 untuk 12 bulan	RT 26 RW 06 Dsn Kojan Desa Siki, Kab. Trenggalek	Dongko	Siki	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
298	3292712	JAMI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DSN. POJOK, RT. 008, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
299	3292763	JAMINI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	RT. 010, RW. 003, DUSUN POJOK, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
300	3292766	KB YAA BUNAYYA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Gaji Guru paud utamanya paud non formal masih sangat kecil, padahal beban mengajar sangat besar. untuk itu kami sangat mengharapkan bantuan insentif guru paud untuk meningkatkan kesejahteraan guru PAUD.	Jl. dr. Soetomo Gg Yaa Bunayya RT 03 RW 01 Tamanan Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Tamanan	DINAS PENDIDIKAN
301	3292774	KB MIJI RAHAYU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Demi Kemaslahatan guru PAUD Non PNS	RT 11 RW 05 DUSUN POJOK DESA NGRAYUNG, Kab. Trenggalek	Gandusari	Ngrayung	DINAS PENDIDIKAN
302	3292776	SUMIATI	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 06 RW 02, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
303	3292820	JANURI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	RT. 009, RW. 003, DSN. POJOK, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
304	3292864	JEMINEM	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
305	3292944	KATINI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 008, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
306	3293000	AL MUNAWWAROH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih dibutuhkannya bantuan penyelenggara'an pendidikan Diniyah dan guru swasta	RT 01 RW 01 CORAH MULYO, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglongsor	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
307	3293023	Hidayatul Falah	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Karena sangat minimnya anggaran yang ada di lembaga kami sehingga tidak mencukupi apabila digunakan untuk seluruh kegiatan operasional yang ada di madrasah mulai dari : 1. Honor tenaga pendidik 2. Honor tenaga Kependidikan 3. Biaya operasional madrasah. 4. Belanja ATK, 5. Belanja barang dan jasa. Sehingga dalam hal ini, peran pemerintah terkait pembiayaan kegiatan pembelajaran yang ada di lembaga Madrasah Diniyah sangatlah diperlukan untuk menjaga konsistensi keberlangsungan pembelajaran.	RT. 004 RW. 002 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Tugu	Jambu	DINAS PENDIDIKAN
308	3293040	TK DHARMA WANITA 4 PRINGAPUS	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Kesejahteraan Guru kurang	Dusun Gejagan RT 016 RW 004 Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Pringapus	DINAS PENDIDIKAN
309	3293041	KOMPINATIN	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	RT. 010, RW. 003, DUSUN POJOK, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
310	3293097	NURUL HIDAYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	belum adanya prasarana gedung yang memadahi	RT.04 RW.01 DSN. NGEMBEL DS. NGEMBEL, Kab. Trenggalek	Watulimo	Ngembel	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
311	3293146	LAMIJEM	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
312	3293159	TK DHARMA WANITA NGLONGSOR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk meningkatkan kwalitas dan proffesionalisme pendidik dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan anak usia dini pada lembaga TK Dharma Wanita Nglongsor Tugu	Dusun Krajan RT.14 RW.04 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglongsor	DINAS PENDIDIKAN
313	3293177	THORIQUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga madin kami masih membutuhkan bantuan biaya operasional untuk membiayai 66 santri dan 4 Orang Ustadz. Demikian atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.	Dusun Pingit Kulon Rt 021/Rw 005, Kab. Trenggalek	Durenan	Gador	DINAS PENDIDIKAN
314	3293193	YAHMI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	Dusun Pojok RT.08 RW.03, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
315	3293196	DARUL ISTIQOMAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga kami membutuhkan anggaran operasional meliputi: - Belanja ATK - Belanja barang pembelajaran /KBM - Alat peraga dan media pembelajaran - Sarana ruang kelas - Honor Guru Madasah Oleh karenanya kami memohon dengan sangat kepada pemerintah daerah agar merealisasikan permohonan kami dalam rangka mendukung kelancaran KBM di Madin Darul Istiqomah,Jambu,Tugu	RT 007 RW 003 Dusun KARANGPLOSO, Kab. Trenggalek	Tugu	Jambu	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
316	3293316	OKI CANDRA SAPUTRA	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	RT 09 RW 03 Desa Sumurup, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
317	3293341	TK DHARMA WANITA MELIS	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pendidikan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utama dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.	RT 14 RW 07 Dusun Jugang Desa Melis Kecamatan Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Melis	DINAS PENDIDIKAN
318	3293361	PURYANTO	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	RT 09 RW 03 Desa Sumurup, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
319	3293368	AL HIDAYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	KURANGNYA SARANA DAN PRASARANA	DUSUN GARES RT022 RW004 DESA TASIKMADU KEC. WATULIMO KAB. TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Watulimo	Tasikmadu	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
320	3293374	Assalafudin	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga kami masih sangat membutuhkan bantuan operasional dari pemerintah kabupaten guna menunjang kegiatan belajar mengajar yang efektif dan maksimal.	Dusun Jumok, RT. 009, RW. 004, Kab. Trenggalek	Tugu	Tumpuk	DINAS PENDIDIKAN
321	3293375	AHMAD YANI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	RT 09 RW 03 Desa Sumurup, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
322	3293391	SUNARLIN	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	RT 09 RW 03 Desa Sumurup, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
323	3293400	BAITUL MUSLIM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih di butuhkan nya bantuan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan guru swasta	Dusun Gebang RT 018 RW 007 Desa Duren, Kab. Trenggalek	Tugu	Duren	DINAS PENDIDIKAN
324	3293417	ULFA SEPTIANA	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	RT 09 RW 03 Desa Sumurup, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
325	3293432	SARIJEM	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	RT 09 RW 03 Desa Sumurup, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
326	3293434	MISINI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
327	3293444	NITA WAHYUNI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	RT 09 RW 03 Desa Sumurup, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
328	3293451	KB AL HASANAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan Bantuan Hibah Uang Insentif / Tambahan Penghasilan / Jasa Kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta pada KB Al Hasanah tahun Anggaran 2027	RT 14 RW 03 Dsn, Setono Desa Gondang, Kab. Trenggalek	Tugu	Gondang	DINAS PENDIDIKAN
329	3293463	KADIMAN	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	RT 08 RW 03 Desa Sumurup, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
330	3293472	WAKIJEM	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	RT 09 RW 03 Desa Sumurup, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
331	3293474	MUJI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 008, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
332	3293484	TK DHARMA WANITA 1 SUMBERBENING	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah bantuan insentif/ tambahan penghasilan/ jasa kerja Guru PAUD swasta sejumlah 1 orang x 12 bulan x 500.000 = 6.000.000	RT 028 RW 006 Dusun Mloko, Desa Sumberbening, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Sumberbening	DINAS PENDIDIKAN
333	3293494	MI THORIQUL HUDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	untuk penambahan kesejahteraan guru madrasah	DSN. KRANDON RT 12/02 , Kab. Trenggalek	Karangan	Kerjo	DINAS PENDIDIKAN
334	3293506	NURWAHYUNI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
335	3293515	TK DHARMA WANITA 4 SUKOREJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pendidikan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utama dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.	Dusun Nglayur RT 41 RW 20 Desa Sukorejo, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PENDIDIKAN
336	3293544	DJANI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	RT 10 RW 03 DESA SUMURUP, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
337	3293549	ORNIA	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
338	3293554	PINI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 008, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
339	3293571	SUGIATUN	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 008, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
340	3293595	SUIRNAWATI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
341	3293612	SUMARMI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
342	3293618	TK DHARMA WANITA 2 PRAMBON	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini pada lembaga TK Dharma Wanita 2 Prambon Kec. Tugu mohon berkenan kepada Bapak untuk memberikan Dana Hibah uang insentif / tambahan penghasilan / jasa guru PAUD Non PNS pada satuan PAUD Swasta yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2027. Adapun dana yang kami usulkan untuk keperluan pendidik dengan nominal Rp 6.000.000,00.	RT 31 RW 06 Dusun Pakel, Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek. , Kab. Trenggalek	Tugu	Prambon	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
343	3293629	LPTQ KABUPATEN TRENGGALEK	#HB Hibah kepada Lembaga/Organisasi terkait Kesejahteraan Masyarakat yang bermanfaat untuk daerah	LPTQ memiliki tugas dan fungsi antara lain menyelenggarakan MTQ, pembinaan tilawatil qur'an baik qiroah, tahfidz, khot, MSQ maupun CCQ. Selain itu, LPTQ juga memiliki fungsi mendorong peningkatan pemahaman alqur'an serta penghayatan dan pengamalan al qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaan tugas fungsinya, LPTQ membutuhkan dukungan dari Pemerintah Daerah termasuk dalam permasalahan pembiayaan.	Jl. A. Yani No 1 Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	SEKRETARIAT DAERAH
344	3293636	SPS AL QOYYUM	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan hibah insentif untuk lembaga SPS Al Qoyyum untuk 3 guru	RT 13 RW 04, Kab. Trenggalek	Durenan	Pakis	DINAS PENDIDIKAN
345	3293637	TK DHARMA WANITA 1 SUKOREJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pendidikan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utama dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.	RT 005 RW 003 DUSUN DAWUHAN PULE DESA SUKOREJO, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
346	3293652	SUMARTI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
347	3293653	TPAIT PERMATA UMMAT	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	HONOR GURU TPAIT PERMATA UMMAT RATA RATA MASIK DIBAWAH UMK TRENGALEK, SEHINGGA MEMERLUKAN TAMBAHAN INSENTIF	Jl. P. Hidayatullah Gg Sedap Malam No. 10 Kelurahan Surodakan, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PENDIDIKAN
348	3293656	AL AMIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat di butuhkannya bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyyah dan guru swasta	RT 002 RW 001 DUSUN NGLONGAH DESA SUMBERINGIN KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumberingin	DINAS PENDIDIKAN
349	3293662	SUNARTI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
350	3293664	TK DHARMA WANITA 3 SUKORAME	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pendidikan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utama dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.	RT.010 Rw.005 Dusun Pojok Desa Sukorame, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorame	DINAS PENDIDIKAN
351	3293667	SUWANTO	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 008, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
352	3293670	TK DHARMA WANITA 2 DUREN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk meningkatkan kwalitas dan profesionalisme pendidik dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan anak usia dini pada lembaga TK Dharma Wanita 2 Duren Duren Tugu	Dusun Gebang Rt.18 Rw.07 Desa Duren Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Duren	DINAS PENDIDIKAN
353	3293671	TITIK NUR HIDAYATI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003 , Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
354	3293681	TRI OKTAVIANA SARI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003 , Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
355	3293682	TUMI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
356	3293691	TUMINI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
357	3293701	TUNIK ANJAR MUSLIKAH	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003 , Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
358	3293715	WARSITO	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
359	3293717	MI ROUDLATUSY SYARIEF	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	RT 18 RW 01, Kab. Trenggalek	Karangan	Jatiprahu	DINAS PENDIDIKAN
360	3293722	WIJI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
361	3293728	WINARTI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
362	3293772	KB SUBULUS SALAM	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru di lembaga kami yang masih belum bisa mendapatkan hak yang sama dengan guru di lembaga formal, sehingga hanya mendapatkan gaji dari SPP anak - anak. Dikarenakan nominal yang diperoleh masih jauh dari kata layak, maka kami mengajukan insentif tambahan dari dana yang bersumber dari APBD II.	RT 17 RW 08 Dusun Gebang , Kab. Trenggalek	Gandusari	Melis	DINAS PENDIDIKAN
363	3293779	TK DHARMA WANITA 2 DEPOK	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif atas nama Indah Fitriani yang diajukan, sebesar Rp 500.000 per bulan untuk jangka waktu 12 bulan.	RT. 20 RW 08 DUSUN WARAKAN, Kab. Trenggalek	Panggul	Depok	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
364	3293789	RIYADLOTUT THOLIBIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih membutuhkan dana bantuan dari PBBDGS untuk kegiatan pembelajaran di Madin kami	JL. RAYA PANTAI PRIGI DUSUN KETAWANG RT.09 RW.02, Kab. Trenggalek	Watulimo	Tasikmadu	DINAS PENDIDIKAN
365	3293826	AL MUNAJAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Al Hamdulillah	Rt 016 Rw 004 Desa Nglongsor Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglongsor	DINAS PENDIDIKAN
366	3293861	MI Gemaharjo II	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Guru Madrasah Swasta kami memiliki honor sebulan yang cukup rendah, hal ini disebabkan karena belum mendapatkannya tunjangan sertifikasi guru. Melihat perjuangan mereka yang rela berangkat pagi sampai dengan hampir sore hari dengan pakaian rapi agar dapat mencerdaskan anak bangsa kami merasa cukup memprihatinkan. Oleh sebab itu kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan bantuan.	RT.12 RW.03 Dusun Kojur, Kab. Trenggalek	Watulimo	Gemaharjo	DINAS PENDIDIKAN
367	3293879	ASY SYAFAAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah ASY SYAFAAH di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	RT 007 RW 003 DSN.KRAJAN, Kab. Trenggalek	Gandusari	Widoro	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
368	3293914	PKBM SUBULUS SALAM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Adanya beberapa siswa di lembaga kami dengan usia 24 tahun ke atas yang tidak tercover dana BOSP, sehingga kami mengajukan operasional siswa tersebut ke pemerintah daerah Kabupaten Trenggalek	RT 17 RW 08 Dusun Gebang, Kab. Trenggalek	Gandusari	Melis	DINAS PENDIDIKAN
369	3293926	NURUL ILHAM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat di butuhkannya bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyyah dan guru swasta	DUSUN KRANDON RT.23 RW.03 DESA KERJO KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Karangan	Kerjo	DINAS PENDIDIKAN
370	3293966	MDT NURUL IHSAN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula Nurul Ihsan memiliki permasalahan yaitu kurangnya fasilitas yang mendukung berjalannya kegiatan belajar mengajar, sehingga ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung kurang maksimal dan kurangnya biaya honor untuk tenaga pendidik di Madrasah diniyah. Oleh karena itu, bantuan operasinal sangat dibutuhkan untuk menunjang kelancaran kegiatan belajar mengajar.	RT 06 RW 03, DUSUN KRANDEGAN, DESA KRANDEGAN, KECAMATAN GANDUSARI, KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Gandusari	Krandegan	DINAS PENDIDIKAN
371	3293980	KB MIFTAHUL ULUM	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	karena minimnya honorarium bagi pendidik PAUD kami mengajukan permohonan tambahan insentif dari daerah	RT 14 RW 04 Dusun Dempok , Kab. Trenggalek	Durenan	Baruharjo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
372	3294009	MI Sawahan II	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru (khususnya guru swasta) yang belum sebanding dengan beban kerja dan biaya hidup saat ini	RT. 07/RW. 03 Dusun Singgahan, Kab. Trenggalek	Watulimo	Sawahan	DINAS PENDIDIKAN
373	3294027	KB TUNAS BANGSA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	dana APBD kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2027. Adapun usulan untuk keperluan pendidik dengan Nomuinal Rp 12.000.000,00	rt 01 rw 01 dusun Corah Mulyo Desa Nglongsor, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglongsor	DINAS PENDIDIKAN
374	3294040	TK DHARMA WANITA TANGKIL	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif atas nama Izatul Marfuah yang diajukan, sebesar Rp. 500.000 per bulan untuk jangka waktu 12 bulan.	RT 09 RW 03 DUSUN BELANGAN, Kab. Trenggalek	Panggul	Tangkil	DINAS PENDIDIKAN
375	3294052	DARUL MUTTAQIN SUKOWETAN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat di butuhkan nya bantuan penyelenggara'an pendidikan Diniyah dan guru swasta	DSN. TAMANAN RT. 15 RW. 07 DS. SUKOWETAN, Kab. Trenggalek	Karangan	Sukowetan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
376	3294054	ULUMUDDIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah memiliki peran penting dalam membentuk karakter, akhlak, dan pemahaman keagamaan generasi muda. Akan tetapi sebagian besar Madrasah Diniyah menghadapi keterbatasan dana operasional, sarana prasarana, dan kesejahteraan tenaga pendidik. Untuk itu bantuan hibah dari pemerintah sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar dan meningkatan kualitas pendidikan Madrasah Diniyah.	Dusun Singgihan RT.19 RW.04 Desa Masaran, Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek, Jawa Timur, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN
377	3294065	MI GUPPI TASIKMADU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Untuk menambah kesejahteraan guru GTY/Non ASN di lembaga kami. Terutama di lembaga swasta yang notabennya kesejahteraan di bawah standar UMR kabupaten	RT. 024 RW. 004 Dusun Gares, Kab. Trenggalek	Watulimo	Tasikmadu	DINAS PENDIDIKAN
378	3294071	KB MUTIARA UMMAT	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Honor / gaji guru di lembaga KB Mutiara Ummat masih sedikit dan sangat jauh di bawah UMR Trenggalek, sehingga kami mengajukan tambahan honor/gaji untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang ada	RT 24 RW 07 DUSUN TAWING, Kab. Trenggalek	Durenan	Ngadisuko	DINAS PENDIDIKAN
379	3294074	MADRASAH IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH SAWAHAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Untuk memotivasi kinerja guru bertambah semangat dalam mendidik murid	RT 005 Rw 002 Dusun Krajan Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Watulimo	Sawahan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
380	3294109	SD ISLAM BABUSSALAM	#HB Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru SD/Sederajat	SD Islam Babussalam salah satu Madrasah di ruang lingkup Dinas Pendidikan Desa Pandean Kec.Durenan Kab.Trenggalek juga merasakan betapa pentingnya keberadaan ruang kelas sebagai salah satu unsur penentu keberhasilan proses pembelajaran. Sekolah yang memiliki siswa 180 orang yang terbagi dalam 9 kelas (rombongan belajar) ini saat ini memiliki 7 ruang kelas, sehingga idealnya masih membutuhkan 2 ruang kelas.	JL Kota Baru No 03 RT 06 RW 02, Kab. Trenggalek	Durenan	Pandean	DINAS PENDIDIKAN
381	3294112	TK ISLAM TERPADU PERMATA UMMAT	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru atau tenaga kependidikan yang bersangkutan tidak mendapatkan tunjangan profesi, diharapkan mendapatkan insentif ini agar kesejahteraannya meningkat.	Jl. P. Hidayatullah Gg. Sedap Malam No. 10 RT. 17 RW. 05 Surodakan, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PENDIDIKAN
382	3294127	TK DHARMA WANITA 2 NGENTRONG	#HB Bantuan Pembangunan Ruang kelas Baru PAUD/Sederajat	Sekolah membutuhkan pembangunan ruangan baru karena hanya memiliki 1 ruangan kecil yang digunakan untuk 2 rombel untuk mengajar peserta didik,karena hanya 1 ruang kelas pembelajaran terkadang kurang kondusif dan kurang maksimal.	Desa Ngentrong RT 08 RW 02 Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Karangan	Ngentrong	DINAS PENDIDIKAN
383	3294177	KB CAHAYA INSAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru paud swasta terutama Kelompok Bermain tidak bisa mengajukan bersertifikasi	RT 04 RW 01 DESA SUMBER, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumber	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
384	3294210	TK Dharma Wanita 2 Wonoanti	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru adalah ujung tombak pendidikan. Saat ini, penghasilan guru non sertifikasi masih jauh dari memadai, sementara tanggung jawab mengajar sangat besar. Pemberian insentif diharapkan dapat meningkatkan motivasi, dedikasi, dan kesejahteraan mereka dalam mendidik siswa, sebagai bentuk apreasiasi atas dedikasi yang tinggi.	DS. WONOANTI KEC. GANDUSARI, Kab. Trenggalek	Gandusari	Wonoanti	DINAS PENDIDIKAN
385	3294220	SD ISLAM BABUSSALAM	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Guna mendukung kelancaran pelaksanaan Program Pendidikan Diniyah / Swasta pada SD Islam Babussalam Durenan, dengan ini kami mohon Bapak berkenan untuk memberikan dana Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta tahun 2027.	JL Kota Baru No 03 RT 06 RW 02, Kab. Trenggalek	Durenan	Pandean	DINAS PENDIDIKAN
386	3294243	MI GUPPI GEMAHARJO III	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan karena kurangnya honor yang diterima	RT 008 RW 005 Dusun Karangtuwo Desa Gemaharjo, Kab. Trenggalek	Watulimo	Gemaharjo	DINAS PENDIDIKAN
387	3294246	SAKIYEM	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 07 RW 02, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
388	3294257	WAINAH	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 10 RW 03, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
389	3294270	MINEM	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 19 RW 05, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
390	3294279	AMINATUL AZIZAH	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 20 RW 06, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
391	3294290	MUJINEM	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 21 RW 06, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
392	3294327	HIDAYATUL MUSTAFID	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madin Hidyatul Mustafid merupakan Madin yang masih aktif melakukan kegiatan pembelajaran Keagamaan guna membentuk Santri berkarakter dan berakhlaq. Namun Masih dibutuhkan Biaya untuk memaksimalkan pembelajaran seperti Insentif ustadz yang layak , Sarana Prasarana , Alat Pembelajaran Serta Bahan Adminitrasi yang memadai.	RT. 12 RW. 03 Dusun Singgihan Desa Masaran Kec. Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN
393	3294331	TK DHARMA WANITA SUMBERGAYAM	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan hibah bansos untuk lembaga TK Dharma Wanita Sumbergayam untuk 1 Orang	RT. 01 RW. 01 Dusun Jajar, Kab. Trenggalek	Durenan	Sumbergayam	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
394	3294338	NUR HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Perlunya bantuan dana BPPDGS untuk menunjang pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah Nur Huda	RT.14 RW.02 Dusun Pagersari, Kab. Trenggalek	Panggul	Banjar	DINAS PENDIDIKAN
395	3294349	KB HIDAYATUT THULLAB	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	rendahnya pendapatan (sering di bawah UMR, bahkan ratusan ribu per bulan), beban kerja sama dengan ASN namun honor minim, Permasalahan ini berdampak langsung pada motivasi, kinerja. sehingga meminta tambahan insentif	RT 22 RW 04 KAMULAN DURENAN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Durenan	Kamulan	DINAS PENDIDIKAN
396	3294381	ATTAQWA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah diniyah sebagai lembaga pendidikan keagamaan nonformal belum sepenuhnya terakomodasi dalam struktur perencanaan dan penganggaran daerah yang terintegrasi dalam SIPD. Kondisi ini menyebabkan pengusulan BOP Madin sering terkendala secara administratif meskipun keberadaan dan perannya nyata di tengah masyarakat	RT.52 RW.12 Dusun GEMBES , Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN
397	3294463	TK TUNAS BANGSA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Dana APBD Kabupaten Trengalek tahun 2027. adapun Dana yang kami usulkan untuk keperluan pendidik dengan Nominal Rp 6.000.000	RT 01 RW 01 Corah Mulyo, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglongsor	DINAS PENDIDIKAN
398	3294466	PKBM TUNAS BANGSA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	BOP Pusat hanya bisa untuk membiayai usia anak didk 24 tahun ke bawah sedangkan usia di atas 24 tahun ke atas lembaga mengajukan batuan BOP dari Kabupaten	Dusun Krajan RT 018 RW 005, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watuagung	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
399	3294507	KB Rohmatul Ummat	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	RT 12 RW 05 Ds.Ngepeh Kec.Tugu Kab.Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Ngepeh	DINAS PENDIDIKAN
400	3294529	KB Mutiara Bunda	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk menambah gaji guru yang sangat minim yang hanya digaji dari sekolahan apabila ada sisa kas.	Rt. 02 Rw. 01 Sumberdadi, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumberdadi	DINAS PENDIDIKAN
401	3294575	PKBM LAKSA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Warga Belajar belum semua bisa terdanai dari BSOP Pusat sebagian besar usia di luar sekolah sedangkan yang terdanai hanya yang usia sekolah	RT 23 RW 09 Desa Sidomulyo, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PENDIDIKAN
402	3294605	TK DHARMA WANITA 2 DONGKO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Latar belakang permohonan bantuan dana TK umumnya didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, Dana ini bertujuan memperluas layanan, menunjang proses pembelajaran yang kreatif, serta memenuhi standar pendidikan	RT 065 RW 014 DS. DONGKO KEC.DONGKO KAB.TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PENDIDIKAN
403	3294635	TK AL HIDAYAH 1 JOMBOK	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Ada Guru yang belum mendapatkan tunjangan Profesi	RT 36 RW 10 , Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
404	3294643	KB DHARMA WANITA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan Bantuan Hibah Uang Insentif/Tambahan Penghasilan/Jasa Kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	RT 12 RW 04 DESA TIMAHAN, Kab. Trenggalek	Kampak	Timahan	DINAS PENDIDIKAN
405	3294686	TK DHARMA WANITA 1 NGRAYUNG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini pada lembaga TK Dharma Wanita 1 Ngrayung Kecamatan Gandusari mohon berkenan kepada Bapak untuk memberikan Dana Hibah Uang Insentif/ Tambahan Penghasilan/Jasa Kerja Guru Paud Non Pns Pada Satuan Paud Swasta Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2027	RT 11 RW 05 DUSUN POJOK DESA NGRAYUNG , Kab. Trenggalek	Gandusari	Ngrayung	DINAS PENDIDIKAN
406	3294690	MI SENDEN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Dana yang di himpun dari masyarakat atau wali murid tidak mencukupi untuk memenuhi honorarium guru	Jl. Tenggar Rt.01 Rw.01 Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Kampak	Senden	DINAS PENDIDIKAN
407	3294729	TK PERTIWI 1 BENDOAGUNG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permasalahan yang dihadapi Satuan PAUD Swasta adalah keterbatasan anggaran untuk memberikan insentif tambahan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN. Kondisi ini berdampak pada kesejahteraan dan motivasi kerja. Oleh karena itu, diusulkan Bantuan Hibah Uang guna menunjang tambahan penghasilan/jasa kerja PTK Non ASN.	RT OO3 RW 001 Desa Bendoagung, Kab. Trenggalek	Kampak	Bendoagung	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
408	3294737	TK PERTIWI JOHO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan bantuan hibah uang insentif / tambahan penghasilan / Guru Paud Non PNS Pada Satuan Paud Swasta	RT 10 RW 03 Desa Joho Kecamatan Pule , Kab. Trenggalek	Pule	Joho	DINAS PENDIDIKAN
409	3294746	TK DHARMA WANITA 2 PAKEL	#HB Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah PAUD/ Sederajat	Ruang kelas sering terjadi kebocoran, kondisi rangka atap lapuk sehingga berbahaya bagi peserta didik apalagi pas dalam kondisi hujan kondisi lantai licin sehingga proses belajar mengajar terganggu	RT 15 RW 06 Ds. Pakel Kec. Pule, Kab. Trenggalek	Pule	Pakel	DINAS PENDIDIKAN
410	3294760	MADIN DARUL FALAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	kurangnya dana operasional untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.	RT. 28 RW. 14 Ds. Depok Kec. Panggul Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Panggul	Depok	DINAS PENDIDIKAN
411	3294846	Ibrohimi	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Belum tercukupinya biaya operasional di Madrasah Diniyah	Rt. 012 Rw. 003 Dusun Panggul, Kab. Trenggalek	Panggul	Panggul	DINAS PENDIDIKAN
412	3294851	BAITUL MUTTAQIEN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	MADIN BAITUL MUTTAQIEN Terletak di pesisir pantai, masih sangat kurang dana untuk kegiatan pembiayaan 60 santri dan 5 ustadz, bantuan dana sangat kami harapkan demi Kelancaran pembelajaran serta kesejahteran semuanya demi masadepan generasi bangsa Indonesia di pesisir pantai	RT 19 RW 06 DUSUN SUKOREJO, Kab. Trenggalek	Panggul	Nglebeng	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
413	3294852	TK DHARMA WANITA 2 PAKEL	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan bantuan hibah uang insentif / tambahan penghasilan / Guru Paud Non PNS Pada Satuan Paud Swasta	RT 15 RW 06 Desa Pakel Kecamatan Pule, Kab. Trenggalek	Pule	Pakel	DINAS PENDIDIKAN
414	3294863	SD Islam Az-zahro	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Permohonan Bantuan Hibah Uang kepada Satuan Pendidikan Dasar Swasta dibawah Dinas Pendidikan untuk memebrikan Insentif/tambahan/penghasilan/jasa kerja kepada Tenaga Pendidikan di SD Islam Az-Zahro untuk Tenaga Pendidik yang belum bersertifikasi. Adapun rencana peruntukannya untuk 2 orang tenaga pendidik yang belum sertifikasi di tahun sejak tahun 2025	RT 019 RW 05 Desa Bendoagung Kecamatan Kampak, Kab. Trenggalek	Kampak	Bendoagung	DINAS PENDIDIKAN
415	3294891	TK AL HIDAYAH 2 JOMBOK	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	BELUM SERTIFIKASI	RT 50 RW 14 DS. JOMBOK KEC. PULE, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS PENDIDIKAN
416	3294922	ANWARUL HAROMAIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga madin kami masih membutuhkan bantuan biaya operasional untuk kelangsungan pembelajaran.	RT 06 RW 02 DSN BARUKLINTING, Kab. Trenggalek	Durenan	Baruharjo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
417	3295068	TK AL HIDAYAH 4 JOMBOK	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru yang belum dapat tunjangan profesi	RT 56 RW 16 Ds. Jombok, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS PENDIDIKAN
418	3295241	MIFTAHUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Benoroto di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	RT/RW 02/01 Dsn Pagergunung, Kab. Trenggalek	Munjungan	Bendoroto	DINAS PENDIDIKAN
419	3295247	MESIYEM	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	Dsn. Pojok, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
420	3295498	KB AL AZHAAR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Mengusulkan insentif untuk Guru Paud , Karena Honor yang diterima di lembaga masih minim. Diharapkan dengan adanya tambahan insentif dari pemerintah daerah, dapat meningkatkan motivasi , kinerja dan kesejahteraan Guru Paud di lembaga kami.	RT 013 RW 007 , Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
421	3295576	TK DHARMA WANITA GADING	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk meningkatkan kwalitas dan profesionalisme pendidik dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan anak usia dini pada lembaga TK Dharma Wanita Gading	Rt 001 Rw 001 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Tugu	Gading	DINAS PENDIDIKAN
422	3295812	SALI	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 22 RW 06, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
423	3296040	TK DHARMA WANITA 2 MALASAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan hibah bansos untuk lembaga TK DHARMA WANITA 2 MALASAN untuk satu orang	RT 36 RW 09 Dusun Lotekol Desa Malasan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Durenan	Malasan	DINAS PENDIDIKAN
424	3296194	MI HASYIM ASY'ARI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru honorer/ swasta di sekolah kami yang belum memiliki sertifikasi , dimana honorarium yang diterima saat ini masih dibawah standar biaya hidup minimum daerah.	JL. KH Agus Salim Rt.09 Rw. 04 Desa Wonoanti Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Gandusari	Wonoanti	DINAS PENDIDIKAN
425	3296224	MI NGINGAS	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Ketidakpastian insentif menurunkan semangat mengajar, terutama bagi guru yang bergantung pada dana tersebut.	RT 013 RW 005 Desa Salamrejo, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
426	3296765	SPS Abdi Pertiwi	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Dengan adanyan bantuan Insentif/ tambahan penghasilan/ jasa kerja 4 orang Guru di SPS Abdi Pertiwi, diharapkan akan membantu kesejahteraan guru	RT 12 RW 04 Sukosari, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sukosari	DINAS PENDIDIKAN
427	3296999	MI Tarbiyatul Banin Walbanat Kedungsigit	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Insentifnya tidak pasti sehingga dapat menurunkan semangat para guru dalam proses pembelajaran	RT 10 RW 02 Desa Kedungsigit, Kab. Trenggalek	Karangan	Kedungsigit	DINAS PENDIDIKAN
428	3297081	TK DHARMA WANITA 1 SALAMWATES	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan bantuan hibah uang insentif/tambahan Penghasilan/Guru PAUD Non PNS Pada satuan paud swasta TK Dharma Wanita 1 Salamwates Atas Nama: SITI AMINAH Dan ARENTIN CATU SEPTIANINGRUM.	Rt 08 Rw 03 Dusun krajan Desa Salamwates , Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PENDIDIKAN
429	3297182	MDT ULA DARUS SALAM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Untuk keperluan kegiatan Operasional Pembelajaran Madin Darus Salam dan dewan Asatidz Madin Darus Salam Timahan, Kampak, Trenggalek	RT. 10 RW. 03 Banaran, Timahan, Kampak, Trenggalek, Kab. Trenggalek	Kampak	Timahan	DINAS PENDIDIKAN
430	3297485	KB NUURUL FIKRI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru belum mendapat gaji atau sertifikasi	RT. 21 RW. 01 Dusun Margo Ds. Margomulyo Kec. watulimo, Kab. Trenggalek	Watulimo	Margomulyo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
431	3297670	MIFTAHUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Karena keterbatasan lembaga yang tidak mempunyai keuangan untuk membayar pendidik dan mendukung opersional pendidikan madin dan meningkatkan kualitas pembelajaran santri madrasah diniyah ,maka kami mengusulkan bantuan program BPPDGS TA 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Desa Sugihan Kec. Kampak	RT 04 RW 02 Dusun Wates Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Kampak	Sugihan	DINAS PENDIDIKAN
432	3297752	TK Dharma Wanita 4 Prambon	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini pada lembaga TK Dharma Wanita 4 Prambon Kecamatan Tugu mohon berkenan kepada Bapak untuk memberikan Dana Hibah Uang Insentif/ tambahan penghasilan / jasa guru PAUD Non PNS pada satuan PAUD Swasta yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2027. Adapun dana yang kami usulkan untuk keperluan Pendidik dengan nominal Rp.6.000.000,-	RT. 056 RW. 012 Dusun Mloko Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Prambon	DINAS PENDIDIKAN
433	3297798	TK DHARMA WANITA 1 PURU	#HB Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah PAUD/ Sederajat	dinding kelas sebagian besar banyak yang rusak , bolong, atap / plafon sebagian ada yang rusak. Hal ini menyebabkan kelas terlihat tidak indah dan nyaman .	RT 18 RW 01 DUSUN KRAJAN BANARAN DESA PURU KECAMATAN SURUH TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Suruh	Puru	DINAS PENDIDIKAN
434	3297893	KB AR ROHMAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan Bantuan Hibah Uang Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja guru PAUD Non PNS Pada Satuan PAUD Swasta	Rt 24 Rw 09 Dusun Tugu Bancang, Kab. Trenggalek	Durenan	Durenan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
435	3298056	AL ANWAR	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga masih membutuhkan bantuan operasional, seperti untuk belanja pegawai (insentif guru madin), belanja barang, kegiatan pembelajaran dan biaya pemeliharan ringan.	RT. 26 RW. 12 Dusun Ceme, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirenggo	DINAS PENDIDIKAN
436	3298057	MI MIFTAHUL HUDA SUMBERINGIN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Insintifnya tidak pasti sehingga dapat menurunkan semangat para guru dalam proses pembelajaran.	RT. 08 RW. 02 Nglongah, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumberingin	DINAS PENDIDIKAN
437	3298114	KB Bina Balita	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	usulan hibah insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Paud Non PNS pada satuan PAUD Swasta KB Bina Balita	Rt 03 Rw 02 Dusun Krajan Desa Tangkil Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, Kab. Trenggalek	Panggul	Tangkil	DINAS PENDIDIKAN
438	3298130	KB ANUGERAH BUNDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Lembaga masih belum mampu untuk memenuhi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan maka kami mengajukan permohonan hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja guru PAUD Non PNS pada satuan PAUD Swasta KB Anugerah Bunda Tahun Anggaran 2027 untuk 3 orang guru/kepala sekolah.	RT. 23 RW. 07 DESA WONOCOYO, Kab. Trenggalek	Panggul	Wonocoyo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
439	3298160	KB AL-HIDAYAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	untuk honor pendidik	RT 020 RW 007 DUSUN GALIH DESA TANGKIL KECAMATAN PANGGUL, Kab. Trenggalek	Panggul	Tangkil	DINAS PENDIDIKAN
440	3298208	TK DHARMA WANITA 2 PRINGAPUS	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah bantuan insentif / tambahan penghasilan / jasa kerja Guru PAUD Swasta sejumlah 1 orang selama 12 bulan dengan nominal Rp. 500.000 perbulan	Dusun Dawung RT. 024 RW. 006 Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Pringapus	DINAS PENDIDIKAN
441	3298331	SPS ANANDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Insentif Guru PAUD	RT 14 RW 02 Dusun Gempolan , Kab. Trenggalek	Suruh	Gamping	DINAS PENDIDIKAN
442	3298416	TK DHARMA WANITA 2 BARUHARJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan hibah bansos lembaga TK Dharma Wanita 2 Baruharjo untuk satu orang.	RT 12 RW 03 DESA BARUHARJO, Kab. Trenggalek	Durenan	Baruharjo	DINAS PENDIDIKAN
443	3298476	TK DHARMA WANITA 3 SIKI	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Minimnya penghasilan guru PAUD TK DHARMA WANITA 3 SIKI, maka mengajukan usulan dana bantuan kinerja untuk Ana Hariyati sebesar 2.400.000 dalam kurun waktu 12 bulan.	RT 41 RW 09, DUSUN NGULUH, DESA SIKI., Kab. Trenggalek	Dongko	Siki	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
444	3298560	TK DHARMA WANITA 2 BARUHARJO	#HB Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah PAUD/ Sederajat	Usulan Bantuan Rehabilitasi Perbaikan Atap Gedung Ruang Kelas Dalam Kerusakan Berat Lembaga TK Dharma Wanita 2 Baruharjo.	RT 12 RW 03 DESA BARUHARJO, Kab. Trenggalek	Durenan	Baruharjo	DINAS PENDIDIKAN
445	3298617	TK DHARMA WANITA 2 PANDEAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena minimnya pendapatan guru di tk dharma wanita 2 Pandean, maka mengajukan usulan dana insentif atas nama Siti Choirin nisa, sebesar 6.000.000, untuk jangka waktu 12 bulan	RT 055 RW 020 DUSUN TALUN , Kab. Trenggalek	Dongko	Pandean	DINAS PENDIDIKAN
446	3298681	MI AL HUDA KARANGANYAR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru honorer/swasta di sekolah kami yang belum memiliki sertifikasi, dimana honorarium yang diterima saat ini masih di bawah standar biaya hidup minimum daerah	RT.15 RW.05 Dusun Soko Tengah, Desa Karanganyar, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Gandusari	Karanganyar	DINAS PENDIDIKAN
447	3298688	SPS AN NABILA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	bantuan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja 4 orang guru PAUD di SPS AN NABILA. Mohon usulan kami dikabulkan.	RT 12 RW 05 Tamanan, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Tamanan	DINAS PENDIDIKAN
448	3298750	KB HARAPAN UMAT	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	meningkatkan kesejahteraan guru	RT 13/RW 5 Desa Wonocoyo, Kab. Trenggalek	Panggul	Wonocoyo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
449	3298755	TK DHARMA WANITA 2 SALAMWATES	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja guru paud swasta sejumlah 2 orang selama 12 bulan dengan nominal Rp. 500.000 perbulan.	RT 15 RW 03 Dusun sobo desa salamwates kecamatan dongko kecamatan dongko , Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PENDIDIKAN
450	3298839	TK DHARMA WANITA MANGGIS	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif atas nama Yuliana yang di ajukan, sebesar Rp.500.000 Per bulan untuk jangka waktu 12 Bulan	RT. 006 RW. 002 DUSUN KRAJAN, Kab. Trenggalek	Panggul	Manggis	DINAS PENDIDIKAN
451	3298937	MADRASAH DINIYAH MIFTAHUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Permohonan Bantuan BPPDGS tahun anggaran 2027	Dusun Suwaru RT 033 RW 008 Desa Ngadimulyo, Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	DINAS PENDIDIKAN
452	3298964	RIFA RIYANDOKO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN SIDEM RT 056 / RW 016, DESA JOMBOK, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
453	3298985	MI ROUDLATUSY SYARIEF	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Masih banyak guru yang belum Sertifikasi di MI Roudlatusy Syarief Jatiprahu, sehingga kami membutuhkan bantuan dana dari Pemerintah untuk menunjang kesejahteraan guru.	RT. 18 RW. 01, Kab. Trenggalek	Karangan	Jatiprahu	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
454	3298997	RA AL HIKMAH GUMELAR	#HB Bantuan Pengadaan Mebel PAUD/Sederajat	meja dan kursi sudah sangat rusak, kurangnya rak buku, etalase dan almari di masing-masing kelas agar kelas semakin rapi aman dan nyaman dalam menyimpan hasil karya dan pelaksanaan pembelajaran	Dusun Gumelar RT. 051 RW. 016 Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Gandusari	DINAS PENDIDIKAN
455	3299028	AHMAD TURMUDI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN MLINJON RT 042 / RW 006, DESA MLINJON, KEC. SURUH, Kab. Trenggalek	Suruh	Mlinjon	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
456	3299056	TK DHARMA WANITA 1 NGEPEH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk meningkatkan kwalitas dan profesionalisme pendidik dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan anak usia dini pada lembaga TK Dharma Wanita 1 Ngepeh	RT 04 RW 02 DESA NGEPEH KECAMATAN TUGU, Kab. Trenggalek	Tugu	Ngepeh	DINAS PENDIDIKAN
457	3299074	GIGIH ARTA ARDHI WINATA	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DS SURUH RT 24 RW 09 DSN KRAJAN, Kab. Trenggalek	Suruh	Suruh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
458	3299127	NANDO ADI SAPUTRA	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DS MLINJON RT 053 RW 008 Miri Suruh, Kab. Trenggalek	Suruh	Mlinjon	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
459	3299186	JARI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	RT 41 RW 10 Dsn Ngaliran Masaran Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
460	3299203	KB AL HIDAYAH 2 KELUTAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	KB Al Hidayah 2 Kelutan memiliki 4 orang pendidik yang merupakan tenaga honorer, belum sertifikasi dan Non ASN dengan masa kerja 3 orang di atas 16 tahun dan 1 orang dibawah 10 tahun. Untuk itu, mohon berkenan untuk memberikan bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada KB Al Hidayah 2 Kelutan yang bersumber dari APBD 2 Tahun Anggaran 2027. Adapun dana yang kami usulkan untuk keperluan 4 orang pendidik dengan nominal Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah).	Jl. Sukarno Hatta Gg. Langsep No 16. RT 12. RW 05 Kelurahan Kelutan Kec/Kab. Trenggalek 66313, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Kelutan	DINAS PENDIDIKAN
461	3299224	Mukani	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	RT. 28 RW 04 Dsn Ngrampal Bangun Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Bangun	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
462	3299240	TK AISYIYAH 1 SURODAKAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Honor Guru masih rendah	Jalan Jaksa Agung Suprapto No 28 Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PENDIDIKAN
463	3299256	KB ABUNAYYA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan Pengajuan dana insentif 2 orang guru atas nama sella candra suci dan wartini yang di ajukan,sebesar Rp.500.000 Perbulan untuk jangka 12 bulan.	DUSUN Krajan Desa Depok RT.01 RW.01 KECAMATAN PANGGUL, Kab. Trenggalek	Panggul	Depok	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
464	3299267	SPS RSETU BUNDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Belum mendapatkan gaji	RT. 30 RW. 06 Dusun Prigi Ds. Prigi Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek	Watulimo	Prigi	DINAS PENDIDIKAN
465	3299280	TK DHARMA WANITA 1 PETUNG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan bantuan hibah uang insentif/tambahan penghasilan/Guru Paud Non PNS Pada Satuan Paud Swasta	RT 01 RW 01 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Dongko	Petung	DINAS PENDIDIKAN
466	3299318	KB Mutiara Bunda	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	hibah Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta 2 0rang pendidik x 12 bulan x 500.000= 12.000.000	RT 003 RW 001 Dusun Krajan Desa Petung Kecamatan Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Petung	DINAS PENDIDIKAN
467	3299337	KB AL HIDAYAH 2 KELUTAN	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	KB Al Hidayah 2 Kelutan memiliki 3 orang pendidik Non PNS dan belum sertifikasi dengan masa kerja di atas 16 tahun, dan sampai saat ini belum pernah mendapatkan Bantuan Honorarium Kinerja, sedangkan horor dari lembaga masih kurang memadai.	Jl. Sukarno Hatta Gg. Langsep No 16. RT 12. RW 05 Kelurahan Kelutan , Kab. Trenggalek	Trenggalek	Kelutan	DINAS PENDIDIKAN
468	3299407	TK DHARMA WANITA 1 GANDUSARI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru adalah ujung tombak pendidikan.Saat ini penghasilan guru non sertifikasi masih jauh dari memadai,sementara tanggung jawab mengajar sangat besar.Pemberian insentif diharapkan dapat meningkatkan motivasi,dedikasi,dan kesejahteraan mereka dalam mendidik siswa,sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi yang tinggi	RT 21 RW 07 DUSUN JATIREJO DESA GANDUSARI, Kab. Trenggalek	Gandusari	Gandusari	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
469	3299434	KB MUTIARA BUNDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Bantuan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja GURU PAUD NON PNS pada satuan PAUD Swasta KB Mutiara Bunda	Rt 16 Rw 06 Desa Besuki, Kab. Trenggalek	Panggul	Besuki	DINAS PENDIDIKAN
470	3299484	PKBM BHAKTI	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Bos dari pusat hanya menyasar anak usia sampai dengan 24 tahun padahal di PKBM banyak warga belajar yang sudah usia lebih dari 24 tahun, jadi tidak mendapat bos dari pusat, karena itu terjadi kesenjangan antara anggaran dan biaya oprasional" makanya mengajukan bosda untuk membantu kelancaran oprasional	Dusun Krajan RT.10 RW.01, Kab. Trenggalek	Suruh	Wonokerto	DINAS PENDIDIKAN
471	3299503	KB MUTIARA INSANI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja 5 guru PAUD di lembaga kami, mohon direalisasikan	RT.06 RW.02 Desa Sambirejo Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sambirejo	DINAS PENDIDIKAN
472	3299504	Madin sabilunnajah	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah [Sabilunnajah] di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	RT.14 RW.05 , Kab. Trenggalek	Pogalan	Gembleb	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
473	3299533	Hidayatul Mubtadiin	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	untuk kemaslahatan ustadz dan ustadzah serta untuk santri	Rt.14 Rw.05 Dusun Jatirejo Desa Sambirejo , Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sambirejo	DINAS PENDIDIKAN
474	3299639	KB PERMATA HATI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Lembaga masih belum mampu untuk memenuhi kesejahteraan pendidik dan ketenaga pendidikan maka kami mengajukan permohonan hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan /jasa kerja guru PAUD Non PNS pada satuan PAUD Swasta KB Permata Hati Tahun Anggaran 2027 untuk 3 orang guru/kepala sekolah.	RT 09 RW 03 DESA GAYAM KECAMATAN PANGGUL, Kab. Trenggalek	Panggul	Gayam	DINAS PENDIDIKAN
475	3299678	TK DHARMA WANITA 1 PRINGAPUS	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Paud Swasta sejumlah 3 orang selama 12 bulan dengan nominal Rp. 500.000 perbulan	Dusun Krajan Rt. 005 RT. 002 Desa Pringapus Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Pringapus	DINAS PENDIDIKAN
476	3299757	SPS Melati	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	perlunya peningkatan honor bagi guru	RT 11 RW 06 DUSUN KRAJAN DESA SAWAHAN, Kab. Trenggalek	Panggul	Sawahan	DINAS PENDIDIKAN
477	3299760	KB Tunas Mulia	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Demi menunjang lahirnya generasi-generasi bangsa yang berkualitas, tentu kesejahteraan para pendidiknya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga akan menjadi penyemangat dalam berjuang mencerdaskan anak-anak bangsa.	RT 09 RW 04 DESA NGRENCAK, Kab. Trenggalek	Panggul	Ngrencak	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
478	3299802	MI JAYAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	insentifnya tidak pasti sehingga dapat menurunkan semangat para guru dalam proses pembelajaran	Dusun Cetok RT 22 RW 06, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS PENDIDIKAN
479	3299815	KB Anak Sholeh	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja 3 orang guru PAUD di Lembaga KB Anak Sholeh. Dimohon usulan kami dikabulkan.	RT 11 RW 06 Sumberdadi, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumberdadi	DINAS PENDIDIKAN
480	3299915	TK DHARMA WANITA 2 KARANGTENGAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif atas nama AGUSTINSYA VARENA DAN MEI TRI WULANDARI ,sebesar Rp 500.000 perbulan untuk jangka waktu 12 bulan	RT. 21 RW. 06 DUSUN KRAJAN, Kab. Trenggalek	Panggul	Karangtengah	DINAS PENDIDIKAN
481	3299975	KB Bina Balita	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	keterbatasan dan minimnya honor sekolah PAUD swasta maka kami mengajukan proposal bantuan honorarium kinerja kepala/guru tk/PAUD Non ASN pada satuan paud swasta KB Bina Balita	Rt 03 Rw 02 Dusun Krajan Desa Tangkil Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Panggul	Tangkil	DINAS PENDIDIKAN
482	3300050	SPS Melati	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Peningkatan kesejahteraanguru berdasarkan masa kerj	RT 11/RW 6 Desa Sawahan Kec.Panggul, Kab. Trenggalek	Panggul	Sawahan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
483	3300058	TK DHARMA WANITA KARANGANOM	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan hibah insentif untuk lembaga TK Dharma Wanita Karanganom untuk 1 guru	RT. 09 RW. 02 Dusun Nglengkong, Kab. Trenggalek	Durenan	Karanganom	DINAS PENDIDIKAN
484	3300104	TK DHARMA WANITA 3 PRINGAPUS	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Kesejahteraan Guru Kurang	RT 39 RW 08 DSN.PICIS DS. PRINGAPUS KEC. DONGKO KAB.TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Dongko	Pringapus	DINAS PENDIDIKAN
485	3300124	BAITUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat dibutuhkan nya bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan guru swasta	Dusun Karangan RT 29 RW 07, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS PENDIDIKAN
486	3300132	SPS LESTARI SATU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD swasta sejumlah 2 orang x 12 bulan x 500.000 = 12.000.000	RT 051 RW 012 Dusun Jajar Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trrenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PENDIDIKAN
487	3300146	KB CERIA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Bantuan insentif / tambahan penghasilan/ jasa kerja guru PAUD dil Lembaga KB Ceria untuk 4 orang guru	RT.011 RW.002, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Karangsoko	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
488	3300148	AL FALAH KARANGAN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat di butuhkan nya bantuan penyelenggara'an pendidikan Diniyah dan guru swasta	RT.22/RW.06 Desa Karangan Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS PENDIDIKAN
489	3300217	MI MUHAMMADIYAH SALAMREJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Insentif untuk guru Non PNS tidak pasti sehingga dapat menurunkan semangat guru dalam proses pembelajaran	Rt. 007 Rw. 003 Dusun Rejosari, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PENDIDIKAN
490	3300248	TK DHARAMA WANITA 2 WONOREJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan upaya pendidikan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utama dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.	RT.011,RW.003,Dusun Kebon,Desa Wonorejo, Kab. Trenggalek	Gandusari	Wonorejo	DINAS PENDIDIKAN
491	3300253	SPS LESTARI SATU	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Hibah bantuan honorarium kinerja kepala/ guru PAUD swasta sejumlah 1 orang x 12 bulan x 200.000 = 2.400.000	RT 051 RW 012 Dusun Jajar Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trrenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
492	3300397	TK DHARMA WANITA 1 JAJAR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Gaji guru masih di bawah UMK	RT 14 RW 04 DUSUN KRAJAN , Kab. Trenggalek	Gandusari	Jajar	DINAS PENDIDIKAN
493	3300406	TK Idhata Dongko	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD swasta sejumlah 1 orang x 12 bulan x 500.000 = 6.000.000	RT.69 RW.04 DUSUN BLIMBING DESA DONGKO, KECAMATAN DONGKO, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PENDIDIKAN
494	3300448	KB FAJAR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan Insentif	RT. 11 RW. 03 Desa Bodag, Kab. Trenggalek	Panggul	Bodag	DINAS PENDIDIKAN
495	3300492	KB MUTIARA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan / jasa kerja guru PAUD swasta non ASN sejumlah 2 orang x 12 bulan x 500.000 = 12.000.000	RT 008 RW 002 Dusun Krajan Desa Dongko Kec Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PENDIDIKAN
496	3300493	MISDI	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 24 RW 06, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
497	3300545	KB MUTIARA	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Guru paud non formal sudah lama mengabdi di lembaga sebagai pendidik Anak Usia Dini tetapi hak dan kesejahteraannya belum layak dan belum sesuai standar, oleh karena itu kami mohon perhatian dan tambahan bantuan kinerja dari pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk guru PAUD Swasta non ASN di lembaga kami dengan masa kerja di atas 17 th dengan kualifikasai pendidikan S1 Paud, sejumlah 1 orang x 12 bulan x 200.000 = 2.400.000	RT 008 RW 002 Dusun Krajan Desa Dongko Kec Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PENDIDIKAN
498	3300555	AL HIDAYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat dibutuhkannya bantuan penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan guru swasta	RT. 03 RW. 01 Dusun Kayen, Kab. Trenggalek	Karangan	Kayen	DINAS PENDIDIKAN
499	3300589	KAMINAH	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 22 RW 06, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
500	3300590	KB RIDLO THOLIBATUL ULUM	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Masih sangat di butuhkannya bantuan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja kepada Pendidikan/Tenaga Kependidikan PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	RT 14 RW 05 DESA SAMBIREJO, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sambirejo	DINAS PENDIDIKAN
501	3300616	TUMINI	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 22 RW 06, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
502	3300639	KB DEWI SARTIKA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	lembaga masih belum mampu untuk memenuhi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan maka kami mengajukan permohonan hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja guru PAUD Non PNS pada satuan PAUD swasta pada KB Dewi Sartika tahun anggaran 2027 untuk 3 orang guru/kepala sekolah.	RT 10 RW 04 Dusun Norejo Desa Kertosono Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Panggul	Kertosono	DINAS PENDIDIKAN
503	3300646	SUBAKAT	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 15 RW 04, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
504	3300660	YAINAH	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 15 RW 04, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
505	3300662	KB DEWI SARTIKA	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Lembaga masih belum mampu untuk memenuhi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan maka kami mengajukan Permohonan bantuan dana hibah honorarium kinerja kepala/guru taman kanak-kanak/pendidikan anak usia dini non pegawai negeri sipil kabupaten trenggalek tahun anggaran 2027 untuk 3 orang pendidik dan tenaga kependidikan KB Dewi Sartika.	RT 10 RW 04 Dusun Norejo Desa Kertosono Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Panggul	Kertosono	DINAS PENDIDIKAN
506	3300684	SEMI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	RT 01 RW 01 Dsn. Kademangan Ds. Bendoagung Kec. Kampak Trenggalek, Kab. Trenggalek	Kampak	Bendoagung	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
507	3300717	SUMINTEN	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 01 RW 01, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
508	3300728	TK DHARMA WANITA 1 WATUAGUNG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini pada lembaga TK Dharma Wanita 1 Watuagung Kecamatan Dongko mohon berkenan kepada Bapak untuk memberikan Dana Hibah uang Insentif/tambahan penghasilan/jasa guru PAUD Non PNS pada satuan PAUD Swasta yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2027	RT 15 RW 03, Dusun Ngleban, Desa Watuagung, Kecamatan Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Watuagung	DINAS PENDIDIKAN
509	3300739	WAKINEM	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 01 RW 01, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
510	3300780	KB RUMAH BERMAIN LEBAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja 8 orang guru PAUD di KB RUMAH BERMAIN LEBAH. Mohon usulan kami untuk dikabulkan.	RT 03 RW 01 Ngantru, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	DINAS PENDIDIKAN
511	3300803	WAKIYEM	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan Lansia diluar Penerima Bantuan Lainnya (Masuk dalam DTSEN Desil 1 s.d. 5)	RT 20 RW 06 DESA MANGGIS KECAMATAN PANGGUL, Kab. Trenggalek	Panggul	Manggis	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
512	3300845	TARBIYATUS SHOLIHIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Di sejumlah daerah, penganggaran BOP Madin belum didukung secara kuat oleh regulasi daerah seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah. Akibatnya pengusulan dalam SIPD sering dianggap tidak memiliki landasan hukum yang memadai sehingga beresiko tidak diakomodasi dalam APBD.	RT. 040 RW. 009 DUSUN NGALIRAN, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN
513	3300870	KB RUMAH BERMAIN LEBAH	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan untuk guru yang belum sertifikasi dengan masa kerja di atas 17 tahun dengan nominal 2.400.000 (1 x 200.000 x 12 bulan).	RT 03 RW 01 Ngantru, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	DINAS PENDIDIKAN
514	3300893	TK Dharma Wanita 3 Salamwates	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan Bantuan Keuanga Khusus (BKK) Propinsi Jatim Honorarium Kinerja Kepala/Guru PAUD NON PNS sejumlah 1orang x 12 bulan x200.000= 2.400.000	RT 29 RW 09 Dsn.Belang Ds.Salamwates, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PENDIDIKAN
515	3300900	SULISTYOWATI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia diluar Penerima Bantuan lainnya (masuk data DTSEN 1 s.d. 5)	RT 24 RW 07 DESA BOGORAN KECAMATAN KAMPAK, Kab. Trenggalek	Kampak	Bogoran	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
516	3300932	SUTIDJEM	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia bukan penerima bantuan lainnya (masuk DTSEN 1 s.d. 5)	RT 27 RW 10 DESA BOGORAN KECAMATAN KAMPAK, Kab. Trenggalek	Kampak	Bogoran	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
517	3300935	KB Tunas Bangsa	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan Dana Hibah banntuan insentif/ tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Paud non PNS swasta pada lembaga KB Tunas Bangsa tahun anggaran 2027 untuk 3 orang pendidik.dengan nominal RP 18.000.000	RT.31 RW.10 Dusun Nglumpang, Kab. Trenggalek	Panggul	Nglebeng	DINAS PENDIDIKAN
518	3300955	WAGIMIN	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 03 RW 01, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
519	3300971	SUNYOTO	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 03 RW 01, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
520	3300992	SAMIJAH	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 03 RW 01, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
521	3301004	TK DHARMA WANITA 2 NGLEBENG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif atas nama Rina Kumala, sebesar Rp 500.000 perbulan untuk jangka waktu 12 bulan	RT 10 RW 03 DUSUN SLOROK, Kab. Trenggalek	Panggul	Nglebeng	DINAS PENDIDIKAN
522	3301011	MADIN BAITUL ARQOM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Permohonan bantuan BPPDGS TAHUN ANGGARAN TAHUN 2027	DUSUN NGIMER RT. 23/ RW. 10 DESA SUGIHAN, Kab. Trenggalek	Kampak	Sugihan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
523	3301017	KB ANNUR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif atas nama Winarti yang diajukan sebesar Rp 500.000 per bulan untuk jangka waktu 12 bulan	Rt.16 Rw.04 Dusun Nglebeng Desa Nglebeng, Kab. Trenggalek	Panggul	Nglebeng	DINAS PENDIDIKAN
524	3301022	PAIJAN	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 19 RW 05, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
525	3301033	TK DHARMA WANITA 2 PETUNG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan bantuan hibah uang insentif/ tambahan penghasilan/ guru paud non PNS pada satuan paud swasta	Rt 019 Rw 004 dusun Banar Desa petung , Kab. Trenggalek	Dongko	Petung	DINAS PENDIDIKAN
526	3301039	TK DHARMA WANITA 1 PRAMBON	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pendidik dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan anak usia dini pada lembaga TK Dharma Wanita 1 Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek.	RT 03 RW 01 DESA PRAMBON KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Tugu	Prambon	DINAS PENDIDIKAN
527	3301046	SURATINI	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 25 RW 07, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
528	3301060	IMROATUL LAYINAH	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 04 RW 01, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
529	3301072	TK DHARMA WANITA 4 SIKI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUS Swasta	Pengajuan Hibah Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUS Swasta	RT 034 RW 008 Dusun Jagul Desa Siki Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Siki	DINAS PENDIDIKAN
530	3301077	SAKRI	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 04 RW 01, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
531	3301094	DARMINTO	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 19 RW 05, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
532	3301124	MDT Ula Hidayatul Mubtadiin	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Salah satu permasalahan utama Madarsah Diniyah adalah keterbatasan jumlah dana yang diterima dibandingkan dengan kebutuhan riil operasional madrasah. Biaya operasional seperti honorarium ustadz/ustadzah, pengadaan kitab dan alat tulis, pemeliharaan sarana prasarana, serta kebutuhan administrasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara itu, besaran BOP MADIN yang diterima sering kali belum mampu menutup seluruh kebutuhan tersebut secara menyeluruh.	RT/RW 025/008 Desa Watuagung Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watuagung	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
533	3301126	TK DHARMA WANITA 2 NGERDANI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan /jasa kerja guru PAUD swasta sejumlah 2 orang x 12 bulan Rp.500.000 = Rp.12.000.000	RT.21 RW 03 Dusun Sobo Desa Ngerdani Kecamatan Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Ngerdani	DINAS PENDIDIKAN
534	3301137	KB HIMMATANA	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Belum semua guru mendapatkan bantuan honorarium kinerja	RT 16 RW 05 Ds SUMBERINGIN, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumberingin	DINAS PENDIDIKAN
535	3301144	Al Mujahidin	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Belum tercukupinya biaya operasional pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Al Mujahidin	RT.06 RW.03 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Panggul	Sawahan	DINAS PENDIDIKAN
536	3301165	TK DHARMA WANAITA 2 NGEPEH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk meningkatkan kwalitas dan proffesionalisme pendidik dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan anak usia dini pada lembaga TK Dharma Wanita 2 Ngepeh Tugu	RT. 15 RW. 06 DUSUN GERBO DESA NGEPEH KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Tugu	Ngepeh	DINAS PENDIDIKAN
537	3301168	KB MUTIARA INSANI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	KB Mutiara Insani merupakan salah satu lembaga yang masih berperan aktif dalam keikutsertaan mendidik dan membentuk karakter generasi yang Cerdas dan Berakhlaq. Namun Masih Sangat Minim dalam menghargai Jasa para pendidik, Apalagi Kurangnya Biaya yang dapat dialokasikan untuk memberikan imbalan kepada para pendidik.	RT. 12 RW. 03 DUSUN SINGGIHAN DESA MASARAN, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
538	3301191	SPS QUEEN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Sebagai wujud apresiasi atas dedikasi dalam mendidik anak usia dini serta untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan pendidik non-ASN, kami mengajukan permohonan dana hibah insentif guru PAUD SPS QUEEN guna menunjang keberlangsungan proses belajar mengajar yang berkualitas	RT 03 RW 02 Desa Krandegan, Kab. Trenggalek	Gandusari	Krandegan	DINAS PENDIDIKAN
539	3301207	TK PERTIWI KERTOSONO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif atas nama ELY RATNASARI, sebesar Rp 500.000 perbulan untuk jangka waktu 12 bulan	RT.09 RW.04 DUSUN NOREJO , Kab. Trenggalek	Panggul	Kertosono	DINAS PENDIDIKAN
540	3301238	TK Dharma Wanita 3 Salamwates	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	bantuan hibah uang insentif / tambahan penghasilan guru PAUD Non PNS Pada satuan PAUD Swasta sejumlah 2 orang x 12 bulan x 500.000 :12.000.000	RT 29 RW 09 Dsn.Belang Ds.Salamwates, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PENDIDIKAN
541	3301274	KB MARDI SIWI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan hibah insentif untuk Lembaga KB Mardi Siwi untuk 1 guru	Jl. Lapangan Durenan, No. 40 Dusun Durenan, RT. 06 RW. 03, Kab. Trenggalek	Durenan	Durenan	DINAS PENDIDIKAN
542	3301361	MDT TSAMROTUL HIDAYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Terbatasnya dukungan biaya operasional pendidikan di MDT TSAMROTUL HIDAYAH, sehingga pemenuhan sarana pembelajaran dan honorarium tenaga pendidik belum optimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang berkualitas.	RT.05 RW.02 DSN. JEDUNG DS. KARANGANYAR, Kab. Trenggalek	Gandusari	Karanganyar	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
543	3301453	TK DHARMA WANITA 2 WATUAGUNG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD swasta sejumlah 1 orang x 12 bulan x 500.00 = 6.000.000	RT 24 RW 04 DUSUN NGLEBAN DESA WATUAGUNG, Kab. Trenggalek	Dongko	Watuagung	DINAS PENDIDIKAN
544	3301468	TK DHARMA WANITA 1 WONOCOYO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif atas nama MEI SINTAWATI dan KHOLIFATUL MAIDAH yang di ajukan , sebesar RP 500.000 per bulan untuk jangka waktu 12 bulan	RT 27 RW 08 DUSUN KARANG DESA WONOCOYO, Kab. Trenggalek	Panggul	Wonocoyo	DINAS PENDIDIKAN
545	3301483	KB BUNGA ISLAM	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru di Lembaga kami yang masih belum bisa mendapatkan hak yang sama dengan guru di sekolah negri.	RT 44 RW 09, Kab. Trenggalek	Tugu	Prambon	DINAS PENDIDIKAN
546	3301502	TK Dharma Wanita 4 Pandean	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk Bantuan Pendidik	Rt 47 Rw 17 Dusun Talun, Kab. Trenggalek	Dongko	Pandean	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
547	3301518	ROUDLOTUT THOLIBIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah Takmiliyah Roudlotut Tholibin saat ini mengalami keterbatasan dana operasional untuk membiayai kegiatan belajar mengajar rutin,termasuk honor ustadz dan ustadzah yang masih jauh dari layak serta kebutuhan ATK dan juga alat kebersihan,sehingga dana operasional ini sangat kami butuhkan agar kegiatan belajar mengajar di Madrasah kami berjalan dengan lancar,mohon untuk nominal di tambah dan ketertiban pencairan	RT 15 RW 05 Dsn Gentungan Desa Craken Kec Munjungan Kab Trenggalek, Kab. Trenggalek	Munjungan	Craken	DINAS PENDIDIKAN
548	3301528	TK DHARMA WANITA TERBIS	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif atas nama Suwarti yang diajukan, sebesar Rp 500.000 per bulan untuk jangka waktu 12 bulan	Dusun Krajan RT 19 RW 09, Kab. Trenggalek	Panggul	Terbis	DINAS PENDIDIKAN
549	3301562	TK DHARMA WANITA 2 CAKUL	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan tambahan penghasilan/jasa guru PAUD non PNS pada TK DHARMA WANITA 2 CAKUL atas nama Yunita Fransiska Twincahyani sebesar Rp. 6.000.000 untuk 12 bulan	RT 33, RW 17 dusun Ngasinan, desa CAKUL, kec. Dongko, kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Cakul	DINAS PENDIDIKAN
550	3301618	KB PELANGI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan Pengajuan Dana insentif Dua Orang Atas Nama Siti Lestari Dan Kusnul Khotimah Yang Di Ajukan, Sebesar Rp. 500.000 Perbulan Dlam Jangka Waktu Dua belas Bulan.	RT.41 RW.11 Dsn.Bendogolor Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Panggul	Wonocoyo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
551	3301638	TK TRISULA PERWARI TRENGGALEK	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan hibah insentif untuk lembaga TK TRISULA PERWARI TRENGGALEK untuk 2 guru	Jl. Hayam Wuruk No.1 Rt.16 Rw.05 Ngantru, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	DINAS PENDIDIKAN
552	3301652	TK PERTIWI 2 BENDOAGUNG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Satuan PAUD Swasta saat ini menghadapi kendala keterbatasan dana dalam memberikan tambahan insentif bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN. Situasi tersebut berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan serta semangat kerja para PTK. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berupa Bantuan Hibah Uang untuk membantu menambah penghasilan atau jasa kerja bagi PTK Non ASN.	RT 31 RW 07, Kab. Trenggalek	Kampak	Bendoagung	DINAS PENDIDIKAN
553	3301660	KB BINTANG KEJORA	#HB Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah PAUD/ Sederajat	Kondisi bangunan rusak, asbes teras rusak karena angin ,kondisi pecah pecah sehingga kalau hujan air menggenang di lantai teras sehingga licin dan membahayakan peserta didik.Kondisi tembok di dalam ruangan juga berjamur sehingga perlu adanya pengecatan ulang agar suasana belaajar mengajar terasa aman dan nyaman.	RT.29 RW.11 DESA DEPOK KECAMATAN BENDUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	DINAS PENDIDIKAN
554	3301669	TK Dharma Wanita 3 Salamwates	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Kurangnya alat peraga edukatif dan APE Luar	RT 29 RW 09 Dsn.Belang DS.Salamwates, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
555	3301718	TK DHARMA WANITA 1 NGLEBENG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif atas nama INTAN SATRIA CAHYANI yang diajukan, sebesar Rp 500.000 perbulan untuk jangka waktu 12 bulan.	RT 016 RW 004 DUSUN NGLEBENG DESA NGLEBENG, Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Panggul	Nglebeng	DINAS PENDIDIKAN
556	3301737	SPS AZ-ZAHRO 1	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Seiring dengan meningkatnya tuntutan kualitas pendidikan dan pelayanan, dukungan pendanaan menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang keberhasilan program yang telah direncanakan. Bantuan insentif hibah diharapkan dapat menjadi stimulan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik/kependidikan, serta mendukung pelaksanaan program yang berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan.	RT 056 RW 026 Dusun Geneng Sanan, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PENDIDIKAN
557	3301740	TK AL HIDAYAH VII KELUTAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Di lembaga kami sangat membutuhkan hibah insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD untuk menambah kesejahteraan guru.	RT.08 RW.03, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Kelutan	DINAS PENDIDIKAN
558	3301743	KB BINTANG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan/ jasa kerja guru PAUD swasta sejumlah 2 orang x 12 bulan x 500.000 = 12.000.000	Rt 008 Rw 002 dusun krajan desa pringapus kecamatan Dongko,kabupaten Trenggalek., Kab. Trenggalek	Dongko	Pringapus	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
559	3301750	TK DHARMA WANITA NGLINGGIS	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk meningkatkan kwalitas dan profesionalisme pendidik dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan anak usia dini pada lembaga TK Dharma Wanita Nglinggis Tugu	Dusun Krajan RT 10 RW 03 Desa Nglinggis Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglinggis	DINAS PENDIDIKAN
560	3301836	KB AISYIYAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Gaji Guru Masih dibawah gaji UMK	JL. P. Hidayatullah No. 20 RT. 19. RW. 06 , Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PENDIDIKAN
561	3301847	TK DHARMA WANITA 3 MALASAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan hibah insentif untuk lembaga TK Dharma Wanita 3 Malasan untuk 1 guru	RT. 04 RW. 01 Dusun Malasan, Kab. Trenggalek	Durenan	Malasan	DINAS PENDIDIKAN
562	3301864	KB THORIQUL HUDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	UNTUK KESEJAHTERAAN PENDIDIK PAUD KARENA PENDIDIK PAUD SWASTA TIDAK BISA MENGIKUTI SERTIFIKASI	RT20 RW 04 DESA KERJO, Kab. Trenggalek	Karangan	Kerjo	DINAS PENDIDIKAN
563	3301865	TK DHARMA WANITA 1 BARANG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif atas nama KHUSNUL KHOTIMAH, sebesar Rp 500.000 perbulan untuk jangka waktu 12 bulan.	Rt. 01 Rw. 01 Dusun Barang, Kab. Trenggalek	Panggul	Barang	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
564	3301881	MIS MABDAUL ULUM	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Masih banyak guru yang belum sertifikasi di MI Mabdaul Ulum sehingga kami membutuhkan bantuan dana dari pemerintah untuk menunjang kesejahteraan guru.	RT. 28 RW.12 Dusun Gondangrejo , Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirenggo	DINAS PENDIDIKAN
565	3301905	TK AL HIDAYAH II KELUTAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Di lembaga kami sangat membutuhkan hibah insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD untuk menambah kesejahteraan guru	JL. Soekarno Hatta GG. Langsep No. 16 RT. 12 RW. 05, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Kelutan	DINAS PENDIDIKAN
566	3301937	TK DHARMA WANITA 2 NGRAYUNG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan upaya pendidikan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan utama dari pendidikan PAUD yaitu membentuk anak Indonesia lebih berkualitas,yaitu anak yang mudah tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa desawa.	RT 08 RW 04 DUSUN POJOK, Kab. Trenggalek	Gandusari	Ngrayung	DINAS PENDIDIKAN
567	3301962	NAILUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Pendidikan non formal yang masih membutuhkan biaya untuk sarana pembelajaran	RT 18 RW 06 SUMURUP, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
568	3301974	KB KASIH BUNDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	RT 06 RW 02 DESA MANGGIS KECAMATAN PANGGUL , Kab. Trenggalek	Panggul	Manggis	DINAS PENDIDIKAN
569	3301976	TK DHARMA WANITA 1 JAMBU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Mohon berkenan kepada bapak untuk memberikan dana hibah uang insentif / tambahan penghasilan / jasa guru PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Trenggalek Tahun anggaran 2027, adapun dan yang kami usulkan untuk keperluan pendidik dengan nominal Rp.6.000.000 dengan data Guru/ Ks PAUD sebagaimana terlampir.	RT.02 RW.01 DUSUN KRAJAN DESA JAMBU, Kab. Trenggalek	Tugu	Jambu	DINAS PENDIDIKAN
570	3301999	KB ARUM DALU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan honor insentif untuk pendidik paud	RT 16 RW 05 Ds. Manggis Kec. Panggul Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Panggul	Manggis	DINAS PENDIDIKAN
571	3302002	TK DHARMA WANITA 3 NGRAMBINGAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif atas nama Riya alfin fitria dan Rina duwi lestari yang diajukan,sebesar Rp. 500.000 per bulan untuk jangka waktu 12 bulan	RT. 13 RW. 03 Dusun. Krajan Desa Ngrambingan, Kab. Trenggalek	Panggul	Ngrambingan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
572	3302007	TK DHARMA WANITA 3 DONGKO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Kesejahteraan Guru Kurang	RT 26 RW 07 Dusun Karang tengah Desa Dongko Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PENDIDIKAN
573	3302010	KB LESTARI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Keterbatasan jumlah peserta didik dan sumber pembiayaan di Kelompok Bermain (KB) kami menyebabkan kemampuan lembaga dalam memberikan tambahan penghasilan/jasa kerja bagi Guru PAUD Non PNS masih sangat terbatas. Honor yang diterima belum sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab profesional yang dijalankan. Oleh karena itu, dukungan dana hibah insentif sangat dibutuhkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan guru serta menjaga kualitas layanan pendidikan anak usia dini.	RT OO8 RW 003 DUSUN SEMBON DESA BARANG, Kab. Trenggalek	Panggul	Barang	DINAS PENDIDIKAN
574	3302032	TK DHARMA WANITA 3 KARANGTENGAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif atas nama NANIK SETYARINI yang diajukan sebesar Rp 500.000 per bulan untuk jangka waktu 12 bulan	RT.37 RW 11 DUSUN NGINJEN, Kab. Trenggalek	Panggul	Karangtengah	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
575	3302040	Hidayatussifyan	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Seiring bertambahnya jumlah santri dan kebutuhan oprasional Madin seperti honor tenaga pengajar, pengadaan sarana pembelajaran dan pemeliharaan fasilitas yang semakin meningkat. Sementara pendanaan yang tersedia masih terbatas, sehingga diperlukan bantuan Program BPPDGS Tahun Anggaran 2027 guna mendukung kelancaran mutu kegiatan belajar mengajar dilembaga MDT Hidayatussifyan.	Rt 18 Rw 09 Dsn Nglangon, Kab. Trenggalek	Dongko	Cakul	DINAS PENDIDIKAN
576	3302041	TK DHARMA WANITA 4 CAKUL	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	tidak ada	RT 08 RW 04 Dusun Plapar, Kab. Trenggalek	Dongko	Cakul	DINAS PENDIDIKAN
577	3302048	KB SUNAN KALIJOGO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan hibah bansos untuk lembaga KB SUNAN KALIJOGO untuk 2 orang	RT 09 RW 04 Dusun Payaman Desa Durenan, Kab. Trenggalek	Durenan	Durenan	DINAS PENDIDIKAN
578	3302051	KB Dharma Wanita	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena gaji kurang, jadi kita meminta untuk adanya tambahan insentif guru paud	RT 08 RW 04 Dsn. Randu Desa Kendalrejo, Kab. Trenggalek	Durenan	Kendalrejo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
579	3302054	SPS DARMA BHAKTI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	sangat kurangnya kesejahteraan bagi pendidik PAUD	Rt 06 Rw 03 Dusun Krajan Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS PENDIDIKAN
580	3302058	KB AL HIDAYAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Lembaga kami masih sangat membutuhkan bantuan insentif guna mensejahterakan guru non ASN.	Dusun Kasihan, RT. 027, RW. 011, Kab. Trenggalek	Tugu	Ngepeh	DINAS PENDIDIKAN
581	3302060	KB HARAPAN BUNDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif atas nama Titik Wahyuni, Ria Nur Fadhilah, Pera yang diajukan, sebesar Rp 500.000 per bulan untuk jangka waktu 12 bulan	RT 23 RW 11 DUSUN DAYU DULUR, Kab. Trenggalek	Panggul	Terbis	DINAS PENDIDIKAN
582	3302061	SPS DARMA BHAKTI	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	guru yang bersangkutan sudah mengabdi lebih dari 19 tahun dan belum pernah mendapatkan tambahan honorarium kinerja	Rt 06 Rw 03 Dusun Krajan Desa Puyung Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS PENDIDIKAN
583	3302098	KB AR RAHMAD	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk tambahan penghasilan bagi guru paud yg belum pns	RT 09 RW 02 Dusun Kebonagung, Kab. Trenggalek	Panggul	Panggul	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
584	3302127	MADIN MIFTAHUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga MADIN Miftahul Ulum Desa Petung Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Masih memerlukan bantuan biaya operasional untuk pelaksanaan pendidikan keagamaan	RT 08 RW 02 Dusun Krajan Desa Petung Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur, Kab. Trenggalek	Dongko	Petung	DINAS PENDIDIKAN
585	3302130	KB MIFTAHUL HUDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah Bantuan Insentif/Tambahan Penghasilan /Jasa Kerja Guru PAUD Swasta Sejumlah 2 Orang x 12 Bulan 500.000 = 12.000.000	RT 020 RW 005 Dusun Kojan Desa Siki Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Siki	DINAS PENDIDIKAN
586	3302131	TK DHARMA WANITA 1 SIDOMULYO	#HB Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD/Sederajat	Perlu adanya pembangunan tembok penahan pembangunan di karenakan keretakan tanah yang berpotensi menjadi longsor pada area bangunan dan halaman sekolah.	RT 12 RW 05 DUSUN DONOSARI DESA SIDOMULYO , Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PENDIDIKAN
587	3302149	TK DHARMA WANITA 1 SIDOMULYO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan bantuan hibah uang insentif / tambahan penghasilan / Guru Paud Non Pns pada satuan Paud Swasta	RT 12 RW 05 DUSUN DONOSARI DESA SIDOMULYO, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
588	3302168	AL MU'MINUN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah AL MU'MINUN di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.	RT 24 RW 08 Dusun Gembleb, Kab. Trenggalek	Pogalan	Gembleb	DINAS PENDIDIKAN
589	3302181	TK DHARMA WANITA WINONG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	bersumber dari dana APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2027. Adapun dana yang kami usulkan untuk keperluan pendidik dengan nominal Rp. 6.000.000	RT 007 RW 003 Dusun Benggle Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Winong	DINAS PENDIDIKAN
590	3302182	TK DHARMA WANITA 1 BANJAR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif atas nama Fina Khoirul Ummah sebesar Rp 500.000 perbulan untuk jangka waktu 12 bulan	Rt. 06 Rw. 01 Dusun Pagerwatu, Kab. Trenggalek	Panggul	Banjar	DINAS PENDIDIKAN
591	3302196	KB PELANGI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Insentif Guru PAUD	RT 10 RW 03 DUSUN CRABAK DESA NGRANDU, Kab. Trenggalek	Suruh	Ngrandu	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
592	3302204	TK DHARMA WANITA 2 BODAG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan Pengajuan Dana Insentif atas Nama TRI MUKTI Yang duajukan Sebesar Rp. 500.000 per bulan untuk jangka waktu 12 bulan.	RT 011 RW 003 DUSUN PASUR , Kab. Trenggalek	Panggul	Bodag	DINAS PENDIDIKAN
593	3302210	TPA TUNAS BANGSA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Bantuan Hibah Insentif / Tambahan Penghasilan /Jasa guru PAUD di Lembaga TPA Tunas Bangsa untuk 3 orang guru	RT 04 RW 01 Surodakan, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PENDIDIKAN
594	3302221	MADIN DARUL ABROR	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madin darul abror berdiri sejak tahun 2008, ikut serta dalam mencerdaskan generasi muda penerus bangsa dari sisi keagamaan sampai saat ini. memiliki 75 santri, 5 ustadz/ustadzah waktu kbm mulai pukul 16.00 s.d 17.00. memohon dapatnya dukungan dari pemerintah untuk memberikan honor ustadz/ustadzah dan pengelolaan Madin serta operasional kbm. Mengingat terbatasnya anggaran yang dimiliki.	RT 23 RW 07 DUSUN SAMPANG, DESA WONOREJO, Kab. Trenggalek	Gandusari	Wonorejo	DINAS PENDIDIKAN
595	3302258	TK DHARMA WANITA 2 NGADISUKO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan hibah bansos untuk lembaga TK Dharma Wanita 2 Ngadisuko untuk 1 orang.	RT.01/RW.01 DESA NGADISUKO, Kab. Trenggalek	Durenan	Ngadisuko	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
596	3302270	TK DHARMA WANITA 2 MANGGIS	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan penganuan dana insentif atas nama Eka Uswatul Kasanah sebesar Rp.500.000 per bulan untuk jangka waktu 12 bulan	Dsn. Pagerwatu Rt 23 Rw 06, Kab. Trenggalek	Panggul	Manggis	DINAS PENDIDIKAN
597	3302281	TK AISYIYAH 2 SUMBERGEDONG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	untuk kesejahteraan guru	JLN. KH AHMAD DAHLAN NO.03 SUMBERGEDONG, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS PENDIDIKAN
598	3302314	KB NURUL HIDAYAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Sampai saat ini guru Kelompok Bermain Nurul Hidayah dari sekolah tidak mendapat honor karena tidak ada dana. Untuk itu kami ajukan insentif untuk guru Paud yang belum sertifikasi agar lebih meningkatkan etos kerjanya dan bisa lebih semangat lagi dalam mencerdaskan anak bangsa.	RT.14 RW.06 KLAMPISAN, Ds.Pucanganak, Kab. Trenggalek	Tugu	Pucanganak	DINAS PENDIDIKAN
599	3302355	KB NURFADHILAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru PAUD Swasta dituntut mengerjakan administrasi yang rumit demi insentif yang jumlahnya kecil dan pencairan seringkali dirapel 3-6 bulan sekali , bahkan sering terlambat di akhir tahun	RT 13 RW 05 Desa Sambirejo, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sambirejo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
600	3302359	MI KARANGGANDU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Rendahnya pendapatan bulanan guru honorer/swasta di lingkungan MI Karanggandu yang saat ini masih di bawah UMK/UMR, menyebabkan kesejahteraan guru rendah dan berdampak pada motivasi mengajar. Bantuan insentif ini sangat diperlukan untuk menunjang kehidupan layak guru agar dapat fokus dalam mendidik siswa.	RT/RW.008/003 Dusun Gading Desa Karanggandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Watulimo	Karanggandu	DINAS PENDIDIKAN
601	3302393	KB AZ-ZAHRO 2	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	minimnya honor dari BOSP. Untuk itu perlu tambahan hibah uang insentif untuk kesenjangan guru PAUD non formal.	RT 24 RW 11 Dusun Kacangan, Kab. Trenggalek	Gandusari	Ngrayung	DINAS PENDIDIKAN
602	3302438	KB DARUL ULUM	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	-Honor yang diterima guru paud tidak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dilaksanakan. -Untuk meningkatkan kualitas pendidik memerlukan pendidik yang berkualitas dan memiliki motivasi kerja yang tinggi sehingga memerlukan bantuan insentif hibah -Kami mengajukan permohonan insentif hibah untuk meningkatkan honor pendidik paud kami. Dengan bantuan ini kami berharap dapat meningkatkan motivasi dan kualitas guru sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi anak usia dini	RT.14 RW.06 Dusun Soko, Kab. Trenggalek	Karangan	Sukowetan	DINAS PENDIDIKAN
603	3302440	KB AZ-ZAHRO 2	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Minimnya honor dari BOSP. untuk itu pertlu tambahan hibah uang kinerja untuk kesenjangan guru PAUD non formal.	RT 24 RW 11 Dusun Kacangan, Kab. Trenggalek	Gandusari	Ngrayung	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
604	3302441	KB SUMMI	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Guru PAUD non formal sudah lama mengabdi di lembaga sebagai pendidik Anak Usia Dini tetapi hak dan kesejahteraan guru PAUD non formal belum layak dan belum sesuai dengan standar, oleh karena itu kami mohon perhatian dan tambahan bantuan kinerja dari pemerintah	RT 05 RW 01 DUSUN KRAJAN DESA KARANGTURI KEC. MUNJUNGAN KAB. TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Munjungan	Karangturi	DINAS PENDIDIKAN
605	3302449	KB AL HUDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Kesejahteraan Guru Pendidik PAUD Non PNS sangat rendah serta mereka tidak mendapatkan bantuan insentif, tambahan penghasilan, maupun jasa kerja yang layak. Padahal mereka sudah mengabdi hingga puluhan tahun. Oleh karena itu kami memohon kepada pemerintah daerah untuk memberikan tambahan anggaran insentif kepada pendidik PAUD agar kesejahteraannya dapat terpenuhi.	DUSUN GALIH RT. 27 RW. 06 , Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN
606	3302456	KB SUMMI	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Guru PAUD Non formal sudah lama mengabdi di lembaga sebagai pendidik anak usia dini, tetapi hak dan kesejahteraan guru PAUD Non formal belum layak dan belum sesuai dengan standar, Oleh karena itu kami mohon perhatian dan tambahan bantuan kinerja dari pemerintah	RT 05 RW 01 DUSUN KRAJAN DESA KARANGTURI KEC. MUNJUNGAN KAB. TRENGGALEK , Kab. Trenggalek	Munjungan	Karangturi	DINAS PENDIDIKAN
607	3302462	TK Dharma Wanita 1 Puyung	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru yang bersangkutan belum mendapatan tunjangan Profesi Guru	RT 23 RW 12 Ds. Puyung Kec. Pule Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS PENDIDIKAN
608	3302465	WARIJAH	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 13 RW 04, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
609	3302470	KB SUMMI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru PAUD non formal sudah lama mengabdi di lembaga sebagai pendidik Anak Usia Dini tetapi hak dan kesejahteraan guru PAUD non formal belum layak dan belum sesuai dengan standar, oleh karena itu kami mohon perhatian dan tambahan bantuan insentif dari pemerintah	RT 05 RW 01 DUSUN KRAJAN DESA KARANGTURI , Kab. Trenggalek	Munjungan	Karangturi	DINAS PENDIDIKAN
610	3302473	KASINEM	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 14 RW 04, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
611	3302484	KATINO	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 19 RW 05, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
612	3302494	Madin Tarbiyatul Athfal	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madin Tarbiyatul Athfal di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam.Namun keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama.Oleh karena itu kami mengajukan dana hibah dari pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa.Dengan dukungan ini kami bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.	RT 28 RW.12 Dukuh Gondangrejo , Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirenggo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
613	3302497	TK DHARMA WANITA 1 SUKOWETAN	#HB Bantuan Pengadaan Mebel PAUD/Sederajat	Belum terpenuhinya kebutuhan mebeler, khususnya meja kursi siswa , RAK APE/penyimpan barang, loker , lemari. Dari jumlah siswa keseluruhan 50 anak, meja kursi yang kami miliki hanya 12 stel, sebagian pinjam pakai punya SDN 1Sukowetan, dan selebihnya anak-anak menggunakan tikar. Kondisi mebeler yamg kami miliki maupun pinjam sudah banyak yang rusak .	RT 17 RW 08 DS. SUKOWETAN KEC. KARANGAN, Kab. Trenggalek	Karangan	Sukowetan	DINAS PENDIDIKAN
614	3302519	KB NURFADHILAH	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	PAUD Swasta tidak bisa mengandalkan bantuan ini untuk biaya operasional tetap (seperti honor guru). Jika tahun ini kinerja dianggap baik dan mendapatkan bantuan, belum tentu tahun depan dapat lagi. Hal ini membuat perencanaan jangka panjang sekolah menjadi tidak stabil.	RT 13 RW 05 Desa Sambirejo, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sambirejo	DINAS PENDIDIKAN
615	3302559	baitur rohman	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Seiring bertambahnya jumlah santri, kebutuhan operasional seperti honor tenaga pengajar, pengadaan sarana pembelajaran, dan pemeliharaan fasilitas semakin meningkat. Sementara pendanaan yang tersedia masih terbatas, sehingga diperlukan Bantuan Program BPPDGS TA 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di Madin Baitur Rohman.	RT.20 RW.09 DSN. MBALANG DS. SENDEN, Kab. Trenggalek	Kampak	Senden	DINAS PENDIDIKAN
616	3302583	KB MIFTAHUL MUSLIM	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk gaji guru karena PAUD Non formal tidak diakui sepenuhnya sebagai guru profesional dalam undang-undang, sehhingga menutup kesempatan untuk mengikuti program profesi guru (PPG) dan sertifikasi, sehingga kesejahteraannya jauh dari layak.	RT 35 RW 09, Kab. Trenggalek	Karangan	Jati	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
617	3302594	TK AL HIDAYAH 1 NGANTRU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Gaji guru sangat minim jauh dibawah UMR	JALAN BASUKI RAHMAD NO.28 RT 07 RW 02 KELURAHAN NGANTRU KECAMATAN TRENGGALEK KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	DINAS PENDIDIKAN
618	3302595	MDT ULA DARUL HIKMAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah DARUL HIKMAH di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	RT.19,RW.09 DUSUN NGLEMBU, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	DINAS PENDIDIKAN
619	3302606	TK DHARMA WANITA KEMBANGAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru PAUD Non PNS di TK Dharma Wanita Kembangan hanya mendapatkan penghasilan yang sangat minim , sehingga berdampak pada motivasi kerja dan juga kualitas layanan pendidkan yang diberikan kepada anak-anak di desa tersebut.	RT 01 RW 01 DS. KEMBANGAN KEC. PULE, Kab. Trenggalek	Pule	Kembangan	DINAS PENDIDIKAN
620	3302610	MIFTAHUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Belum tercukupinya biaya oprasional pada madrasah diniyah takmiliyah awwaliyah miftahul ulum	RT.34 RW.05 Dsn.Mendung, Kab. Trenggalek	Panggul	Banjar	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
621	3302623	At tauhid	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, Madrasah Diniyah At-Tauhid masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal pembiayaan operasional, sarana dan prasara, Swadaya masyarakat dan iuran santri belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan operasional madrasah secara optimal. Dengan adanya dukungan Program BPPDGS Tahun 2027, diharapkan Madrasah Diniyah At-Tauhid dapat terus berkembang, meningkatkan kualitas pembelajaran denga baik.	Rt 05 Rw 02 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Tugu	Jambu	DINAS PENDIDIKAN
622	3302625	MDT Ula NAILUL HIKMAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Untuk keperluan berjalannya operasional pembelajaran siswa Madin Nailul Hikmah dan para ustadz Madin Nailul Hikmah Bendoagung ,Kampak ,Trenggalek	RT.15 RW.04 DSN. KADEMANGAN DS. BENDOAGUNG KEC.KAMPAK, Kab. Trenggalek	Kampak	Bendoagung	DINAS PENDIDIKAN
623	3302657	KB PERMATA BUNDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif atas nama Angga Meilawati sebesar Rp 500.000 per bulan untuk jangka waktu 12 bulan	Rt.06/Rw.02 Dusun Bangunsari, Kab. Trenggalek	Panggul	Besuki	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
624	3302658	KB PUTRA HARAPAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Rendahnya Penghasilan Guru PAUD nonformal pada umumnya menerima honor yang sangat minim dan belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak. Bahkan sebagian besar masih jauh di bawah UMK/UMR setempat. Selain itu Beban Kerja Tidak Seimbang dengan Honor,Selain mengajar, guru juga menyusun administrasi pembelajaran, laporan perkembangan anak, kegiatan parenting, hingga persiapan akreditasi, namun tidak sebanding dengan honor yang diterima.	RT.08 RW.03 Dusun Ngadipuro Desa Craken Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Munjungan	Craken	DINAS PENDIDIKAN
625	3302674	TK PGRI 2 SUMURUP	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Ada salah satu guru/pendidik yang belun sertifikasi dan tidak dapat honor/insentif	Jln Bendungan km 12 rt 12 rw 04 Dsn winong, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS PENDIDIKAN
626	3302680	KB FAJAR INSANI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru di lembaga kami yang masih belum bisa mendapatkan hak dan kesejahteraan yang layak, Bantuan hibah insentif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan.	RT 02 RW 01 Dusun Dawuhan Pule Desa Sukorejo Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PENDIDIKAN
627	3302690	Tarbiyatut Tahdib	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Belum tercukupinya biaya operasinal pada Madin Tarbiyatut Tahdib	RT. 02 RW. 01 Dusun Wonogondo, Kab. Trenggalek	Panggul	Ngrencak	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
628	3302701	MDT ULA-WUSTHA AL AMIRIYYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Seiring bertambahnya jumlah santri, Kebutuhan Operasional seperti honor tenaga pengajar,pengadaan sarana pembelajaran,dan pemeliharaan fasilitas semakin meningkat. sementara pendanaan yang tersedia masih terbatas,sehingga diperlukan bantuan program BPPDGS Tahun Anggaran 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di Madin AL AMIRIYYAH	RT. 52 RW. 12 Dusun Senuli Desa Siki Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Siki	DINAS PENDIDIKAN
629	3302702	KB Al- Hidayah Prigi	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru (khususnya guru Paud/TK) yang belum sebanding dengan beban kerja dan biaya hidup saat ini	Jln. Raya Pantai Prigi RT 17 RW O4 Dusun Gendingan, Kab. Trenggalek	Watulimo	Prigi	DINAS PENDIDIKAN
630	3302704	MADIN ULA WUSTHA AL ATIQ	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Untuk keperluan kegiatan operasional pembelajaran siswa dan dewan ustadz Madin Ula Wustha Al Atiq Bendoagung ,Kampak , Trenggalek	RT.19 RW.05 DS. BENDOAGUNG KEC.KAMPAK, Kab. Trenggalek	Kampak	Bendoagung	DINAS PENDIDIKAN
631	3302719	AT THOHIRIYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah AT THOHIRIYAH di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	RT 01 RWW 01 DUSUN ALAS MALANG, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirejo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
632	3302753	SD ISLAM GIRI ARUM KUSUMA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Dana yang dihimpun dari wali murid tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran honorarium guru	Desa Semarum RT 009 RW 003 Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Durenan	Semarum	DINAS PENDIDIKAN
633	3302771	mdt nurul iman	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Seiring bertambahnya jumlah santri, kebutuhan operasional seperti honor tenaga pengajar,pengadaan sarana pembelajaran dan pemeliharaan fasilitas semakin meningkat sementara pendanaan yang tersedia terbatas sehingga diperlukan Program BPPDGS TA 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di MADRASAH NURUL IMAN	RT 32 RW 10 Dsn.belang Ds.Salamwates Kec.Dongko Kab.Trenggaelek, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PENDIDIKAN
634	3302784	KB PUTRA HARAPAN	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Kurangnya Kesejahteraan Pendidik PAUD Swasta yang sudah memiliki masa kerja cukup lama	RT.08 RW.03 Dusun Ngadipuro Desa Craken Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Munjungan	Craken	DINAS PENDIDIKAN
635	3302787	KB HANDAYANI	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Kurangnya kesejahteraan pendidik paud swasta	Rt 19 rw04 dusun kebon desa besuki kecamatan munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Besuki	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
636	3302795	MDT AL MIFTAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Adapun dana yang kami usulkan akan kami gunakan untuk membiayai Sejumlah 95 peserta didik ula dan 105 peserta didik wustho dan honor15 tenaga pendidik ula dan wustho dan untuk memfasilitasi sarana prasarana madin yang masih dalam keterbatasan	Rt 023 Rw 006 Dsn. Kebonsari Ds. Gondang Kec. Tugu Kab. Trenggalek , Kab. Trenggalek	Tugu	Gondang	DINAS PENDIDIKAN
637	3302797	Al Hikmah	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	kurangnya dana operasional madin untuk kegiatan belajar mengajar	RT. 014 RW. 007 DSN PEGAT DS. DEPOK KEC. PANGGUL, Kab. Trenggalek	Panggul	Depok	DINAS PENDIDIKAN
638	3302800	KB AL FALAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Lembaga Masih belum mampu Untuk Memenuhi kesejahteraan Pendidik	RT 15 RW 03 Desa Ngrambingan, Kab. Trenggalek	Panggul	Ngrambingan	DINAS PENDIDIKAN
639	3302804	BUSTANUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Saat ini Madrasah diniyah Bustanul Ulum mengalami kendala utama berupa terbatasnya sarana operasional yang layak dan minimnya dana untuk kesejahteraan tenaga pendidik. Hal ini menghambat upaya lembaga dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan pelayanan pendidikan keagamaan untuk santri. Oleh karena itu, bantuan hibah ini sangat diperlukan guna mendukung biaya operasional rutin, pengadaan alat tulis, kitab, serta honorarium ustadz/ustadzah agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan optimal.	Dusun Sambeng RT. 30 RW. 04, Kab. Trenggalek	Panggul	Banjar	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
640	3302871	SPS MARDI UTOMO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Rendahnya Penghasilan Guru PAUD nonformal pada umumnya menerima honor yang sangat minim dan belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak. Bahkan sebagian besar masih jauh di bawah UMK/UMR setempat	Dusun Podang Rt. 14 Rw. 03 Desa Bendoroto, Kab. Trenggalek	Munjungan	Bendoroto	DINAS PENDIDIKAN
641	3303002	TK DHARMA WANITA 1 JOMBOK	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Bantuan hibah uang yang diberikan kepada Satuan PAUD Swasta belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Non ASN	RT 028 RW 008 Desa Jombok, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS PENDIDIKAN
642	3303062	SPS TUNAS BANGSA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	gaji guru PAUD nonformal sangat jauh dari kata layak dan belum mendapatkan hak yang sama dengan PAUD formal	RT 14 RW 04 DUSUN KRAJAN DESA JAJAR, Kab. Trenggalek	Gandusari	Jajar	DINAS PENDIDIKAN
643	3303122	HIDAYATUL MUBTADI-IEN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga masih membutuhkan bantuan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional, seperti belanja pegawai (honor guru madin), belanja habis pakai, dan kegiatan belajar mengajar	Dusun Bandulan RT.12 RW.5, Kab. Trenggalek	Pogalan	Wonocoyo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
644	3303125	ROUDLOTUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah [Roudlotul Ulum] di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	Dusun Blengok RT.23 RW.10, Kab. Trenggalek	Pogalan	Wonocoyo	DINAS PENDIDIKAN
645	3303154	SPS AN NABILA	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan untuk guru yang belum sertifikasi dengan masa kerja di atas 17 tahun dengan nominal 4.800.000(2x 200.000x 12 bulan)	Jl.Mayjend Sungkono RT 12 RW 05 Kelurahan Tamanan Kec.Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Tamanan	DINAS PENDIDIKAN
646	3303171	KB Al Amin	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Lembaga masih belum mampu untuk memenuhi kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan maka kami mengajukan permohonan hibah bantuan insentif /tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada satuan PAUD swasta pada KB Al Amin Tahun Anggaran 2027 untuk 2 orang Guru/Kepala sekolah.	Rt.17 Rw.04 Desa Panggul kecamatan Panggul, Kab. Trenggalek	Panggul	Panggul	DINAS PENDIDIKAN
647	3303207	RENDI WICAKSONO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Dsn. Bendo, RT 12 RW 05 Desa Ngadirejo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirejo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
648	3303215	MUJIONO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	DUSUN SIDEM RT 052 / RW 015, DESA JOMBOK, KEC. PULE, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
649	3303217	WAKITO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Dsn Kayu Jaran RT 08 RW 03 Gembleb, Kab. Trenggalek	Pogalan	Gembleb	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
650	3303219	SARIJAH	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Dsn Kayu Jaran RT 07 RW 03 Gembleb, Kab. Trenggalek	Pogalan	Gembleb	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
651	3303220	PAERAN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Dsn Gembleb RT. 15 RW 05 Gembleb, Kab. Trenggalek	Pogalan	Gembleb	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
652	3303222	MUJIAT	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Dsn Gembleb RT. 24 RW 08 Gembleb POGALAN, Kab. Trenggalek	Pogalan	Gembleb	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
653	3303227	JAMIATUN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Dsn Gembleb RT. 20 RW 07 Gembleb, Kab. Trenggalek	Pogalan	Gembleb	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
654	3303230	SPS TUNAS BANGSA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Demi menunjang lahirnya generasi bangsa yang berkualitas, kesejahteraan guru perlu diperhatikan sebagai penyemangat dalam berjuang	rt 022 rw 009 dsn banyon ds widoro kecamatan gandusari kab trenggalek, Kab. Trenggalek	Gandusari	Widoro	DINAS PENDIDIKAN
655	3303234	KB HANDAYANI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Kurangnya kesejahteraan pendidik PAUD Swasta	Rt 19 rw o4 dusun kebon , Kab. Trenggalek	Munjungan	Besuki	DINAS PENDIDIKAN
656	3303267	Ridlotul Uqul	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih membutuhkan dana untuk oprasional siswa madin dan ustadz	desa Kedunglurah rt 15 rw 05, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	DINAS PENDIDIKAN
657	3303275	KB PLUS WAHIDIYAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	proposal permohonan bantuan hibah uang isentife KB PLUS WAHIDIYAH	RT 19 RW 06 DESA PAKIS KECAMATAN DURENAN KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Durenan	Pakis	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
658	3303313	KB PERMATA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pendidikan yang berkualitas tentunya tidak lepas dari Pendidik yang berkualitas pula. Tentu bukan hal yang mudah memperoleh amanah untuk mendidik para generasi bangsa ini agar mampu menjadi penerus – penerus bangsa yang berkualitas. Demi menunjang lahirnya generasi-generasi bangsa yang berkualitas, tentu kesejahteraan para pendidiknya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga akan menjadi penyemangat dalam berjuang	RT 23 RW 11 , Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	DINAS PENDIDIKAN
659	3303340	KB AISYIYAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk kesejahteraan guru PAUD, karena guru paud swasta tidak bisa mengikuti sertifikasi	RT 02 RW 01, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PENDIDIKAN
660	3303461	KB AISYIYAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Gaji guru masih dibawah UMK karena untuk meningkatkan kesejahteraan guru Paud Non Formal dan juga untuk tambahan biaya pendidikan jenjang S1 PAUD	JL. P.Hidayatullah RT. 19 RW. 06 Surodakan, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PENDIDIKAN
661	3303728	KATENI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia BELUM MENERIMA BANTUAN LAINNYA (MASUK DATA dtsen 1 S.D. 5)	RT 14 RT 04 DESA MLINJON KECAMATAN SURUH, Kab. Trenggalek	Suruh	Mlinjon	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
662	3303747	MDT DARUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Keterbatasan Sarana dan Prasarana (Fisik), Kesejahteraan Tenaga Pendidik (Guru/Ustadz), Kendala Operasional Pendidikan, dan Dampak Krisis Ekonomi dan Sosial	Jl. Pantai Pasir Putih Dusun Gares RT 16 RW 03 , Kab. Trenggalek	Watulimo	Tasikmadu	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
663	3303809	SARLI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Penyandang Disabilitas dan Lanju Usia belum menerima bantuan lainnya (Masuk DTSEN 1 s.d. 5)	RT 18 RW 09 DESA PUYUNG KECAMATAN PULE, Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
664	3303856	TK DHARMA WANITA 4 SALAMWATES	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan bantuan hibah uang insentif / tambahan penghasilan / Guru PAUD Non PNS Pada Satuan PAUD Swasta sejumlah 2 Orang x 12 Bulan X 500.000 = 12.000.000	RT 44 RW 12 Dusun Kori Desa Salamwates Kecamatan Dongko , Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PENDIDIKAN
665	3303883	SDIT PERMATA UMMAT	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Permohonan Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta Tahun 2027	Jl. P. Hidayatullah Gg. Sedap Malam No 10, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PENDIDIKAN
666	3304007	TK DHARMA WANITA 1 PANDEAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	karena minimnya honor dari sekolah yang diterima oleh guru,maka kami mengajukan hibah bantuan dana insentif untuk meningkatkan kesejahteraan guru.	RT 17 RW 06, Kab. Trenggalek	Dongko	Pandean	DINAS PENDIDIKAN
667	3304107	TK DHARMA WANITA 3 PETUNG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan insentif guru PAUD diajukan karena rendahnya honor yang diterima	Rt 009 Rw 002 Dusun Krajan Desa Petung Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	Dongko	Petung	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
668	3304219	KB AL MUNAJAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	RT 16 RW 04, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglongsor	DINAS PENDIDIKAN
669	3304294	SDIT PERMATA UMMAT	#HB Bantuan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/Sederajat	1. Keterbatasan sarana dan prasarana komputer di sekolah. Saat ini, jumlah perangkat komputer yang berfungsi dengan baik di sekolah sangat tidak sebanding dengan total jumlah peserta didik (ketersediaan komputer sekitar 20 unit dengan jumlah siswa 426 anak) sehingga menyebabkan pembelajaran tidak efektif dan jadwal praktir pembelajaran komputer menjadi padat. 2. Jumlah komputer yang tidak memadai menjadi hambatan sekolah dalam pelaksanaan TKA (Tes Kemampuan Akademik).	Jl. P. Hidayatullah Gg. Sedap Malam No 10, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PENDIDIKAN
670	3304330	KB ARGO WENING	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Kurangnya Kesejahteraan Pendidik PAUD Swasta	RT. 025 RW. 005 Dusun Kalibening, Kab. Trenggalek	Munjungan	Karangturi	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
671	3304464	ATTAUBAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga kami membutuhkan anggaran operasional untuk mendukung kelancaran dalam kegiatan pembelajaran di Madrasah Diniyah, sebab anggaran internal sangat minim dan tidak bisa mencukupi kebutuhan yang kami maksud yaitu 1. Honor guru 2. Pembelian dan Pengadaan buku administrasi 3. Pembiayaan Ujian Madrasah 4. Pengadaan dan Pembelian ATK 5. Pembiayaan Pengelolaan BOS Madin Oleh karena itu kami sangat memohon terealisasinya bantuan hibah dari pemerintah terkait.	Rt 001 Rw 001 Dusun Krajan , Kab. Trenggalek	Tugu	Gading	DINAS PENDIDIKAN
672	3304484	KB DARUL FALAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk meningkatkan semangat belajar dan mengajar dalam keberlangsungan proses pembelajaran	RT. 003 RW. 001 DSN. MELIS, Kab. Trenggalek	Gandusari	Melis	DINAS PENDIDIKAN
673	3304514	TK DHARMA WANITA 2 PUYUNG	#HB Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah PAUD/ Sederajat	Bangunan Rusak	Rt 13 Rw 07 Dusun PONGGOK , Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS PENDIDIKAN
674	3304542	KB AISYIYAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk kesejahteraan guru PAUD Swasta karena guru PAUD swasta tidak bisa mengikuti sertifikasi	RT 02 RW 01, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
675	3304546	MADIN HIDAYATUT THULLAB	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah HIDAYATUT THULLAB di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	RT 08 RW 03 DUSUN SAMBIROTO , Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sambirejo	DINAS PENDIDIKAN
676	3304561	MDT Ula IHYAUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Seiring bertambahnya jumlah santri kebutuhan operasional seperti honor tenaga pengajar pengadaan sarana pembelajaran dan pemeliharaan fasilitas semakin meningkat. Sementara pendanaan yang tersedia masih terbatas sehingga diperlukan Bantuan Program BPPDGS TA 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah IHYAUL ULUM	Dusun Klandri RT. 050 RW. 025 Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek Propinsi Jawa Timur, Kab. Trenggalek	Dongko	Cakul	DINAS PENDIDIKAN
677	3304782	TK DHARMA WANITA 2 SUMBERBENING	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Insentif mohon di cairkan setiap bulan karena guru membutuhkan kesejahteraan dari pemeritahan. kami para guru PAUD juga ikut mencerdaskan anak-anal bangsa. jadi, tolong diperhatiakan kesejahteraannya.	RT 034 RW 007 Dusun Crabak Desa Sumberbening Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Sumberbening	DINAS PENDIDIKAN
678	3304818	TK DHARMA WANITA 2 PUYUNG	#HB Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD/Sederajat	Jalan alternatif ke lembaga belum ada	Rt 13 Rw 07 Dusun Ponggok , Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
679	3304855	TK DHARMA WANITA 2 PUYUNG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan honor Guru	Rt 13 Rw 07 Dusun Ponggok , Kab. Trenggalek	Pule	Puyung	DINAS PENDIDIKAN
680	3304915	MUAKAT	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 25 RW 07, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
681	3304951	SUBANDI	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 03 RW 01, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
682	3305167	SD ISLAM AL BADAR TUGU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	masih sangat dibutuhkan bantuan penyelenggaraan pendidikan guru swasta	DUSUN KEBONSARI RT 26 RW 06 DESA GONDANG KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Tugu	Gondang	DINAS PENDIDIKAN
683	3305176	TK ISLAM TERPADU AL-AZHAR SUKOREJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru adalah ujung tombak pendidikan. Saat ini, penghasilan guru non sertifikasi masih jauh dari memadai, sementara tanggung jawab mengajar sangat besar. Pemberian insentif diharapkan dapat meningkatkan motivasi, dedikasi, dan kesejahteraan mereka dalam mendidik siswa, sebagai bentuk apreasiasi atas dedikasi yang tinggi.	RT 013 RW 007 DESA SUKOREJO, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
684	3305239	KB AL-IKHLAS	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	KB al ikhlas merupakan lembaga nonformal dibawah naungan yayasan pkk kabupaten	Rt 14 Rw 02 Dusun Pagersari, Kab. Trenggalek	Panggul	Banjar	DINAS PENDIDIKAN
685	3305260	TK DHARMA WANITA 5 PRAMBON	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini pada lembaga TK Dharma Wanita 5 Prambon Desa Prambon Kecamatan Tugu mohon berkenan kepada Bapak untuk memberikan Dana Hibah uang Insentif / tambahan penghasilan /jasa guru PAUD Non PNS pada satuan PAUD Swasta yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2027. Adapun dana yang kami usulkan untuk keperluan pendidik dengan nominal Rp. 12.000.000	RT 49 RW 10 DSN.SOOKO PRAMMBON TUGU TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Tugu	Prambon	DINAS PENDIDIKAN
686	3305298	MI AL HUDA REJOWINANGUN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	UNTUK TAMBAHAN APRESIASI GURU HONORER DIMADRASAH KAMI AGAR LEBIH LAYAK	JL. MASTRIP NO.09 RT 03 RW. 02 DESA REJOWINANGUN, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Rejowinangun	DINAS PENDIDIKAN
687	3305310	KB Pertiwi	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena tidak mendapatkan insentif dari sumber lain	RT 01 RW 01 DESA PULE KECAMATAN PULE KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Pule	Pule	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
688	3305377	SPS JABAL NOOR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Kurangnya kesejahteraan pendidik PAUD swasta	RT 01 RW 01 DUSUN KRAJAN DESA MUNJUNGAN KECAMATAN MUNJUNGAN, Kab. Trenggalek	Munjungan	Munjungan	DINAS PENDIDIKAN
689	3305421	AL FALAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Kurangnya Biaya Operasional dan sarana prasarana yang jauh dari kata memadahi Pada Madin Al Falah Serta Insentif Bagi Ustadz / Ustadzah sehingga kurangnya peningkatan mutu pendidikan, pada madin,	RT.05 RW.02 DUSUN KEBON DESA JAJAR KEC. GANDUSARI KAB. TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Gandusari	Jajar	DINAS PENDIDIKAN
690	3305522	TK DHARMA WANITA 1 SURENLOR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Ada salah satu pendidik / guru yang belum serdik sedangkan lembaga tidak bisa memberi honor	Jln. Bendungan-Trenggalek KM 20 RT.014 RW.006 Dusun Tawing, Kab. Trenggalek	Bendungan	Surenlor	DINAS PENDIDIKAN
691	3305552	KB PUTRA LINGGA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Insentif Guru PAUD	RT 15 RW 04 Dusun Mojo, Kab. Trenggalek	Suruh	Nglebo	DINAS PENDIDIKAN
692	3305639	SPS PERMATA HATI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	assallamuallaikum, dari usulan tersebut karena kami sebagai guru paud non formal membutuhkan kesejahteraan jadi kami usulkan untuk insentif guru pada tahun anggaran 2027 per @550.000 semoga di setujui.aamiin	rt 19 rw 06 dusun weru , Kab. Trenggalek	Pule	Joho	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
693	3305661	KB AISYIYAH 1 MELATI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja 2 Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta di KB Aisyiyah 1 Melati	Jalan Jaksa Agung Suprapto No 28 RT 20 RW 06 Surodakan, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PENDIDIKAN
694	3305663	TK BINA ANAPRASA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Bantuan Hibah Uang kepada Satuan PAUD Swasta yang diperuntukan untuk memberikan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja kepada Pendidikan/ Tenaga Kependidikan PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta sejumlah 1 orang di TK Bina Anaprasa. Mohon pengajuan ini disetujui. Terimakasih	JL. Kanjeng Jimat RT.26 RW.08, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PENDIDIKAN
695	3305699	Hadratul Uqul	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah Hadratul 'Uqul ,Seren Gembleb,Pogalan,Trenggalek di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman ,berilmu dan berakhlak mulia.	RT 33 RW 12,DESA GEMBLEB,KECAMATAN POGALAN,KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Pogalan	Gembleb	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
696	3305704	MI Ngadirejo	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Beberapa guru belum sertifikasi sehingga membutuhkan bantuan dana untuk meningkatkan kesejahteraan guru yang bersangkutan tersebut	Rt. 06 Rw.03 Dusun Alasmalang Desa Ngadirejo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirejo	DINAS PENDIDIKAN
697	3305746	AL FALAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih di butuhkannya bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah Dan guru swasta serta karena minimnya anggaran yg ada di lembaga sehingga tidak mampu/tidak mencukupi apabila di gunakan untuk seluruh kegiatan operasional yang ada di madrasah mulai dari 1. honor tenaga pendidik biaya operasional madrasah 3.belanja ATK	RT03 RW 01 Dusun Krajan , Kab. Trenggalek	Tugu	Tumpuk	DINAS PENDIDIKAN
698	3305761	TK DHARMA WANITA 1 TANGGARAN	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Di lembaga tk Dharma Wanita ada guru atas nama Risna mayasari belum menerima tunjangan tpp	RT 09 RW 01 DS. TANGGARAN KEC. PULE, Kab. Trenggalek	Pule	Tanggaran	DINAS PENDIDIKAN
699	3305789	KB ATMAJA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta sejumlah 2 guru	RT 04 RW 02 Dusun Tawang, Kab. Trenggalek	Suruh	Nglebo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
700	3305839	SD INTEGRAL LUQMAN AL HAKIM	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Saat ini, rata-rata gaji guru di sekolah kami masih berada di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Kondisi ini berdampak pada kesejahteraan guru, motivasi kerja, serta stabilitas tenaga pendidik. Beberapa guru terpaksa mencari pekerjaan tambahan di luar sekolah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga konsentrasi dan optimalisasi proses pembelajaran menjadi kurang maksimal.	Jl. Dr. Soetomo Gang Yaa Bunayya Lingkungan Darang RT 003 RW 001 Kelurahan Tamanan, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Tamanan	DINAS PENDIDIKAN
701	3306091	MDT NURUL HIDAYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Seiring bertambahnya jumlah santri, kebutuhan operasional seperti honor tenaga pengajar, pengadaan sarana pembelajaran, dan pemeliharaan fasilitas semakin meningkat. Sementara pendanaan yang tersedia masih terbatas sehingga diperlukan Bantuan Program BPPDGS TA 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di Madrasah NURUL HIDAYAH	RT 39 RW 11 DESA SALAMWATES , Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PENDIDIKAN
702	3306132	TK DHARMA WANITA 1 NGADIMULYO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permasalahan yang dihadapi satuan PAUD swasta adalah keterbatasan anggaran untuk memberikan tambahan insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN. Hal ini berdampak pada kesejahteraan dan semangat kerja mereka. Oleh karena itu, diusulkan adanya Bantuan Hibah Uang untuk membantu menambah penghasilan atau jasa kerja PTK Non ASN.	RT 09 RW 02 DESA NGADIMULYO, Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	DINAS PENDIDIKAN
703	3306140	BOIRAN	#HB Bantuan Sosial Alat Bantu Mobilitas bagi Penyandang Disabilitas	Penyandang Disabilitas	RT 02 RW 01, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
704	3306197	MDT FAR'U HIDAYATUL MUBTADIIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Seiring bertambahnya jumlah santri, kebutuhan operasional seperti honor tenaga pengajar, pengadaan sarana pembelajaran, dan pemeliharaan fasilitas semakin meningkat. Sementara pendanaan yang tersedia masih terbatas sehingga diperlukan Bantuan Program BPPDGS TA 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di Madrasah FAR'U HIDAYATUL MUBTADIIN	RT 41 RW 12 DESA SALAMWATES, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PENDIDIKAN
705	3306201	SPS AZ-ZAHRO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Swasta sejumlah 3 orang X 12 bulan X 500.000=18.000.000	RT 02 RW 01 Desa salamwates, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PENDIDIKAN
706	3306217	SPS KASIH IBU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan hibah bantuan insentif untuk guru paud non asn karena tidak menerima insentif dari sumber lain	Rt 59 Rw 28, Dsn Tirisan, Desa Pule, Kab. Trenggalek	Pule	Pule	DINAS PENDIDIKAN
707	3306222	MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH DARUSSALAM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Seiring bertambahnya jumlah santri dan kebutuhan operasional seperti honor tenaga pengajar, pengadaan sarana pembelajaran dan pemeliharaan fasilitas yang semakin meningkat. Sementara pendanaan yang tersedia masih terbatas, sehingga diperlukan bantuan Program BPPDGS Tahun Anggaran 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah Darussalam Desa Dongko Kec. Dongko.	RT. 01 RW. 01 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
708	3306252	MDT Ula MIFTAHUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Seiring bertambahnya jumlah santri dan kebutuhan operasional seperti honor tenaga pengajar, pengadaan sarana pembelajaran dan pemeliharaan fasilitas yang semakin meningkat. Sementara pendanaan yang tersedia masih terbatas, sehingga diperlukan bantuan Program BPPDGS Tahun Anggaran 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Desa Salamwates Kec. Dongko.	Rt 10 RW 04 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PENDIDIKAN
709	3306258	KB FAJAR HARAPAN BANGSA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru PAUD Swasta tidak mendapatkan tunjangan	RT 053 RW 026 Dusun Tirisan Desa Pule Kec. Pule Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Pule	DINAS PENDIDIKAN
710	3306263	KB MITRA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	INSENTIF PAUD	RT03 RW01 DUSUN KEDUNGMARON DESA MLINJON, Kab. Trenggalek	Suruh	Mlinjon	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
711	3306269	AL FALAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga kami membutuhkan anggaran operasional untuk Honor Guru Madin, belanja pembelian alat tulis kantor (ATK), buku inventaris kantor untuk pembelajaran, sarana prasarana, alat kebersihan serta kelengkapan untuk pelaporan sehingga mengakibatkan anggaran internal lembaga kami tidak mencukupi, oleh karena itu perlu peran dari pemerintah untuk mencukupi kekurangan tersebut supaya kegiatan belajar mengajar di lembaga kami dapat berjalan dengan lancar	Rt.09 Rw.05 Dusun Gendong Desa Sukorejo, Kab. Trenggalek	Tugu	Sukorejo	DINAS PENDIDIKAN
712	3306280	KB FAJAR HARAPAN BANGSA	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Guru PAUD Non ASN tidak mendapatkan Tunjangan	RT 053 RW 026 Dusun Tirisan Desa Pule Kec. Pule Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Pule	DINAS PENDIDIKAN
713	3306313	TK DHARMA WANITA 3 NGERDANI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Minimnya penghasilan guru PAUD TK DHARMA WANITA 3 NGERDANI maka mengajukan usulan dana bantuan insentif untuk SITI NURAINI dan TIKA BAYU CANDRA sebesar 12.000.000-, dalam kurun waktu 12 Bulan	RT 01 RW 01 Dusun Krajan , Kab. Trenggalek	Dongko	Ngerdani	DINAS PENDIDIKAN
714	3306321	KB TUNAS BANGSA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Kurangnya Kesejahteraan Pendidik PAUD Swasta	RT.41 RW.10, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
715	3306379	THORIQUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Permohonan pembiayaan operasional Madin Thoriqul Huda	Jln.RT.19 RW.03 Dusun Nambak Desa Banjar Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek Kode Pos 66364, Kab. Trenggalek	Panggul	Banjar	DINAS PENDIDIKAN
716	3306396	KB PESONA 2	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk kesejahteraan pendidik dan mendukung keberlangsungan operasional lembaga serta meningkatkan mutu pelayanan pendidikan kepada peserta didik.	Dusun Karangrejo Rt 37 Rw 16, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PENDIDIKAN
717	3306401	KB TUNAS MULYA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan Hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja guru PAUD non PNS pada satuan PAUD swasta pada KB Tunas Mulya tahun anggaran 2027	RT. 04 RW. 02 DUSUN KRAJAN DESA WINONG , Kab. Trenggalek	Tugu	Winong	DINAS PENDIDIKAN
718	3306458	DEMYANI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 09, RW. 03, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
719	3306535	MDT Ula MANBAUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Untuk keperluan berjalannya kegiatan operasional pembelajaran siswa dan dewan ustadz Madin Manbaul Huda Ngrayung ,Gandusari, Trenggalek.	RT.21 RW.10 DSN. KRAJAN DS. NGRAYUNG, Kab. Trenggalek	Gandusari	Ngrayung	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
720	3306565	TK MUKTI ASRI DUKUH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	GURU TERSEBUT BELUM MENDAPATKAN TUNJANGAN PROFESI GURU	RT. 02 RW. 01 DUSUN PONGGOK DESA DUKUH KECAMATAN WATULIMO, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS PENDIDIKAN
721	3306615	SPS CAHAYA INSANI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	PENINGKATAN KESEJAHTERAAN GURU PAUD SWASTA NON PNS	RT 16 RW 04, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS PENDIDIKAN
722	3306625	KB PERMATA BANGSA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan Bantuan Hibah Uang Insentif / Tambahan Penghasilan / Jasa Kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2027	Jl. Raya Trenggalek Ponorogo km-8 Desa Sukorejo, Kab. Trenggalek	Tugu	Sukorejo	DINAS PENDIDIKAN
723	3306684	MDT ULA DARUL MUTAQIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Seiring bertambahnya jumlah santri, Kebutuhan Operasional seperti honor tenaga pengajar,pengadaan sarana pembelajaran,dan pemeliharaan fasilitas semakin meningkat. sementara pendanaan yang tersedia masih terbatas,sehingga diperlukan bantuan program BPPDGS Tahun Anggaran 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di Madin Darul Mutaqin	Rt. 63 Rw. 14 Dusun Ngandong Desa Siki Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Siki	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
724	3306703	KB AL HIDAYAH IX GEMAHARJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Masih belum layaknya honor yang didapat	RT 02 RW 01 Dusun Karangtuwo , Kab. Trenggalek	Watulimo	Gemaharjo	DINAS PENDIDIKAN
725	3306736	KB AL HIDAYAH IX GEMAHARJO	#HB Bantuan Pengadaan Mebel PAUD/Sederajat	Kurangnya saran dan prasarana yang dilembaga sehingga kegiatan belajar mengajar kurang optimal dan maksimal	RT 02 RW 01 Dusun Karangtuwo, Kab. Trenggalek	Watulimo	Gemaharjo	DINAS PENDIDIKAN
726	3306824	TK DHARMA WANITA 2 SUMBEREJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan hibah insentif untuk TK DHARMA WANITA untuk 1 guru	RT 14 RW 03 DUSUN NGREJO DESA SUMBEREJO, Kab. Trenggalek	Durenan	Sumberejo	DINAS PENDIDIKAN
727	3306870	KB ALIEF KUSUMA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	#HB merupakan singkatan Hibah Bansos	RT 07 RW 03 DUSUN KRAJAN KULON, Kab. Trenggalek	Gandusari	Widoro	DINAS PENDIDIKAN
728	3306936	TK DHARMA WANITA 2 KAMULAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan hibah insentif untuk lembaga TK Dharma Wanita 2 Kamulan untuk 1 guru	RT. 07 RW. 02 Dusun Guyang Gajah Desa Kamulan, Kab. Trenggalek	Durenan	Kamulan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
729	3306971	MDT TARBIYATUL ATHFAL	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Seiring bertambahnya jumlah santri kebutuhan operasional seperti honor tenaga pendidik, pengadaan sarana pembelajaran dan pemeliharaan fasilitas semangkin me ingkat. Sementara pendanaan yang tersedia masih terbatas, sehingga diperlukan bantuan program BPPDGS T.A 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di Madrasah TARBIYATUL ATHFAL	Dusun Krajan Rt 008 Rw 002, Kab. Trenggalek	Dongko	Watuagung	DINAS PENDIDIKAN
730	3306983	TK DHARMA WANITA 3 CAKUL	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan/ jasa kerja Guru PAUD swasta sejumlah 1 orang x 12 bulan x 500.000 = 6.000.000	Dusun Nglangon RT 017 RW 009, Kab. Trenggalek	Dongko	Cakul	DINAS PENDIDIKAN
731	3307017	TK DHARMA WANITA 1 DONGKO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah bantuan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja guru PAUD swasta sejumlah 1 orang x 12 bulan Rp. 500.000 = Rp. 6000.000	RT 039 RW 009 Dusun Kasihan, Desa Dongko, Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
732	3307035	MDT Ula PUDJI HARDJO	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Permasalahan: Lembaga Kami masih membutuhkan bantuan anggaran untuk operasional kegiatan pembelajaran Madrasah yang meliputi: 1. Honor Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2. Belanja ATK 3. Belanja Barang dan Jasa Oleh karenanya, kiranya sangat diharapkan realisasi anggaran yang kami butuhkan dari pemerintah terkait guna mendukung kelancaran program dan kegiatan yang dilaksanakan di Madrasah Diniyah Pudji Hardjo Prambon	RT 12 RW 03 DUSUN KRAJAN, Kab. Trenggalek	Tugu	Prambon	DINAS PENDIDIKAN
733	3307080	SDIT AL-AZHAAR SUKOREJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Honor yayasan masih jauh dari UMR Kabupaten Trenggalek	RT 19 RW 09 , Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PENDIDIKAN
734	3307087	AGUS SUTRISNO	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
735	3307119	Madin Assofwan	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madin Assofwan merupakan madrasah diniyah yang berada di dusun krebet Desa Wonoanti RT 25/10. Sebagian masyarakat telah mempercayai madin tersebut sejak tahun 1996. Hal itu dibuktikan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Bahkan ada anak yang berada di luar desa tersebut untuk menimba ilmu di madin assofwan. Dengan hal tersebut untuk menunjang kegiatan belajar mengajar maupun yang lainnya, kami selaku kepala mengajukan bantuan operasional pendidikan untuk menunjang kegiatan tersebut.	RT.25 RW.10 DSN. KREBET DS. WONOANTI, Kab. Trenggalek	Gandusari	Wonoanti	DINAS PENDIDIKAN
736	3307122	KB DARUL FALAH	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Untuk meningkatkan kinerja kepala Sekolah	RT. 003 RW. 001 DSN. MELIS, Kab. Trenggalek	Gandusari	Melis	DINAS PENDIDIKAN
737	3307127	KB TUNAS HARAPAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	minimnya penghasilan pendidik PAUD Swasta	Dusun Karangrejo Rt 34 RW 14 Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PENDIDIKAN
738	3307220	KB TUNAS HARAPAN	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	upah / honor yang diterima masih dibawah rata-rata	Dusun Karangrejo Rt 34 RW 14 Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
739	3307270	KB OSAKA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena Kurangnya Kesejahteraan Pendidik PAUD Swasta	RT. 52 RW.12 Dsn. Gembes Ds. Masaran Kec. Munjungan Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN
740	3307292	Maryanto	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
741	3307403	SURATUN	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
742	3307411	TK WAHIDIYAH PLUS KELUTAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena kecilnya honor Guru PAUD di Kabupaten Trenggalek maka kami mengajukan dana insentif supaya bisa menambah kesejahteraan kami	Jl. Soekarno Hatta RT. 02 RW. 01 Kelutan Trenggalek, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur., Kab. Trenggalek	Trenggalek	Kelutan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
743	3307500	MAFATIKHUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah MAFAATIKHUL HUDA di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	RT 05 RW 03 DUSUNKRANDEGAN , Kab. Trenggalek	Gandusari	Krandegan	DINAS PENDIDIKAN
744	3307513	MUJIRAH	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
745	3307601	SUKAR	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
746	3307641	ALIM MUSTOFA	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
747	3307691	SUPRIHATIN	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
748	3307711	TRIONO	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
749	3307733	PAWITA	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
750	3307739	TK AL HIDAYAH 2 GEMAHARJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	KEDUA GURU TERSEBUT BELUM MENDAPATKAN TUNJANGAN PROFESI GURU	RT 12 RW 03 DUSUN KOJUR DESA GEMAHARJO, Kab. Trenggalek	Watulimo	Gemaharjo	DINAS PENDIDIKAN
751	3307765	MI WATULIMO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Tambahan penghasilan tenaga pendidik dan kependidikan belum memadai sehingga diperlukan bantuan insentif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan.	Jln. Raya Pantai Prigi Desa Watulimo RT 9 RW 3 Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watulimo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
752	3307816	KB PESONA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Mengklarifikasi insentifsebagai penghasilan jasa cenderung merendahkan peran penting guru pauddalam pembangunan dasar pendidikan anak anak .guru paud tidak hanya bertugas mengajar tetapi juga berperan sebagai pembimbing dan mendukung perkembangan fisik sosial,emosional dan kognotif anak .pengakuan yang kurang terhadap peran itu dapat mengurangirasa memiliki dan rasa prepesionalisme di kalangan guru paud.	dusun gugur rt 18 rw 10, Kab. Trenggalek	Pule	Pule	DINAS PENDIDIKAN
753	3307852	KB AL-HIKMAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan Dana insentif 3 orang Atas nama USWATUN HASANAH, NURUL ISTIQOMAH, MAHMUDAH yang di ajukan sebesar Rp. 500.000/bulan untuk jangka waktu 12 bulan	RT 14 RW 07 Dusun Pegat, Kab. Trenggalek	Panggul	Depok	DINAS PENDIDIKAN
754	3307859	MDT FAUZUT THOLIBIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	MDT Fauzut Tholibin salah satu Madrsah di Dusun Gumelar dDesa Gandusari, sangat memerlukan Bantuan Operasional Pendidikan, demi untukmenunjang Kegiatan Belajar Mengajar agar berjalan dengan lancar , aman dan sukses demi anak bangsa dan senantiasa mendapatkan Berkah Dunia Akhirot, Aamiiin	RT.50 RW 16 Dusun Gumelar, Kab. Trenggalek	Gandusari	Gandusari	DINAS PENDIDIKAN
755	3307860	SUKADI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
756	3307875	WAKIRAN	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
757	3307884	ROBY ISMANTO	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
758	3307893	TK DHARMA WANITA 2 SAWAHAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif atas nama NUR HALIMAH dan INTAN SISKA LESTARI yang diajukan sebesar Rp. 500.000,- per bulan untuk jangka waktu 12 bulan	RT 024 RW 012 DUSUN JATI, Kab. Trenggalek	Panggul	Sawahan	DINAS PENDIDIKAN
759	3307899	ISMINI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
760	3307917	SPS AZ ZAHRO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Kesejahteraan Guru Paud	RT 19 RW 05 DESA BENDOAGUNG, Kab. Trenggalek	Kampak	Bendoagung	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
761	3307919	SARLAN	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
762	3307936	TK DHARMA WANITA 2 GADOR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan hibah insentif untuk lembaga TK Dharma Wanita 2 Gador untuk satu guru	RT. 11 RW. 03 Dusun Pingit Desa Gador, Kab. Trenggalek	Durenan	Gador	DINAS PENDIDIKAN
763	3307948	IKA APRILIANA	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
764	3307954	TK DHARMA WANITA 2 GADOR	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Kurangnya kemampuan keuangan di Lembaga TK Dharma Wanita 2 Gador untuk memberikan honorarium yang layak kepada Guru TK Non ASN yang telah mengabdikan diri selama kurang lebih 20 tahun. Hal ini dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja Guru. Permohonan ini kami ajukan untuk 1 guru, dengan jumlah 2.400.000 (1 guru X 200.000 X 12 bulan). Besar harapan kami, untuk dapat disetujui.	RT. 11 RW. 03 Dusun Pingit Desa Gador, Kab. Trenggalek	Durenan	Gador	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
765	3307957	SMPIT PERMATA UMMAT TRENGGALEK	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Minimnya honor/penghasilan guru SMPIT Permata Ummat Trenggalek	JL. P. Hidayatullah Gang Sedap Malam No. 10 Surodakan , RT 17 RW 10 Surodakan Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PENDIDIKAN
766	3307958	SULMIATI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
767	3307969	TRIONO	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 008, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
768	3307978	SMPIT PERMATA UMMAT TRENGGALEK	#HB Bantuan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP/Sederajat	Banyaknya Komputer kami yang rusak sehingga kami kekurangan Komputer ketika pembelajaran. Padahal sekarang Tes Kemampuan Akademik menggunakan Komputer atau Laptop begitupun juga dengan Asesmen Nasional.	Jl. P. Hidayatullah Gg. Sedap Malam No 10/ Rt 17 RW 10 Surodakan Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PENDIDIKAN
769	3308000	SPS DARUL FALAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan pengajuan dana insentif 2 orang atas nama karti dan suprihatin yang diajukan sebesar RP.500.000 per bulan untuk jangka waktu 12 bulan	Rt.30 Rw.14 Desa Depok, Kab. Trenggalek	Panggul	Depok	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
770	3308071	SPS DARUL FALAH	#HB Bantuan Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/ SMP	Usulan pengajuan dana bantuan kinerja atas nama KARTI yang diajukan,sebesarRP.250.000 per bulan untuk jangka waktu 12 bulan	RT.30 RW.14 Desa Depok kecamatan Panggul, Kab. Trenggalek	Panggul	Depok	DINAS PENDIDIKAN
771	3308159	SPS TUNAS HARAPAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta di SPS Tunas Harapan	Rt 18 Rw 08 Dusun Sumber Madu, Kab. Trenggalek	Tugu	Pucanganak	DINAS PENDIDIKAN
772	3308229	AL FATAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah AL FATAH di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	Rt 06 Rw 03 Dusun Wonocoyo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Wonocoyo	DINAS PENDIDIKAN
773	3308231	SPS TERPADU AISYIYAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	insentif yang diberikan sebagai penghasilan jasa biasanya bersifat tidak tetap dan bergantung pada ketersediaan anggaran. jumlahnya juga seringkali tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dilakukan guru paud, yang meliputi tidak hanya mengajar tetapi juga merencanakan pembelajaran, berkomunikasi dengan orangtua murid, dan mengelola lingkungan belajar. kestabilan ekonomi yang tidak terjamin dapat mempengaruhi motivasi dan kualitas kerja guru	Rt 30 Rw 03 Desa Tanggaran Kecamatan Pule , Kab. Trenggalek	Pule	Tanggaran	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
774	3308336	SUMARMI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
775	3308377	KARIM	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN SRABAH, RT. 002, RW. 001, Kab. Trenggalek	Bendungan	Srabah	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
776	3308378	KB MARGO RUKUN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Kami mengajar di Paud non formal sudah lama tetapi kami belum mendapatkan kesejahteraan dan hak yg sama di banding dengan guru di paud formal, sedangkan beban dan tugas kami sama dengan guru Paud Formal ,honor yg dterima dari lmbaga masih jauh dari kata layak.	RT 03 RW 01 Dusun Krajan Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN
777	3308382	Madin Roudlotul 'ulum	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madin Roudlotul 'ulum merupakan Madrasah Diniyah yg berdomisili di Sukorame, Gandusari, Trenggalek.Masyarakat sekitar telah mempercayai bahwa Madin tersebut telah berdiri pada tahun 1955. Oleh kareana itu,kami selaku Kepala Madin mengajukan Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah guna untuk menunjang kegiatan Belajar Mengajar di Madin kami dan guru guru Madrasah Diniyah Roudlotul Ulum	Dusun Sukorame RT 06 RW 03 Desa Sukorame, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorame	DINAS PENDIDIKAN
778	3308393	MADIN AS-SALAM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga MADIN As-Salam yang beralamatkan di RT 21 RW 07 Dusun Jajar Desa Salamwates Kec. Dongko Kab. Trenggalek Masih memerlukan bantuan biaya operasional untuk membantu Pembiayaan Pendidikan kami	RT 21 RW 07 Dusun Jajar, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
779	3308422	MDT HIDAYATUS SALAFIYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Guna mendukung kelancaran pelaksanaan program BPPDGS tahun anggran 2027 pada madrasah diniyah Hidayatus salafiyah Desa Wonorejo Kec. Gandusari Kab Trengalek Kami selaku kepala sekolah mengajukan dana bantuan Program BPPDGS Kepada bapak, kami usulkan sebesar Rp. 38.880.000, untuk membiayai 96 peserta anak didik ula dan 6 tenaga orang pendidik Ula, demikian usulan kami buat atas perhatian serta terkabulkannya kami sampaikan terima kasih.	RT 03 RW 01 DSN SETRI DESA WONOREJO KECAMATAN GANDUSARI, Kab. Trenggalek	Gandusari	Wonorejo	DINAS PENDIDIKAN
780	3308432	TK DHARMA WANITA 1 BESUKI	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	*Usulan pengajuan dana insentif atas nama Siska Windy Triana yang diajukan, sebesar Rp 500.000 per bulan untuk jangka waktu 12 bulan*.	RT 011 RW 004 DUSUN SANGGAR DESA BESUKI KECAMATAN PANGGUL, Kab. Trenggalek	Panggul	Besuki	DINAS PENDIDIKAN
781	3308447	KB Mutiara Bunda	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Kurangnya kesejahteraan dalam pendidilkan pendidik PAUD Swasta	RT.13 RW.03 DUSUN KRAJAN DESA NGULUNGWETAN, Kab. Trenggalek	Munjungan	Ngulungwetan	DINAS PENDIDIKAN
782	3308465	TK DHARMA WANITA 1 NGRANDU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta untuk 1 orang guru	RT 10 RW 03 DUSUN CRABAK , Kab. Trenggalek	Suruh	Ngrandu	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
783	3308484	TK DHARMA WANITA 1 BESUKI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	*Usulan pengajuan dana insentif atas nama Siska Windy Triana yang diajukan, sebesar Rp 500.000 per bulan untuk jangka waktu 12 bulan*.	RT 011 RW 004 DUSUN SANGGAR DESA BESUKI KECAMATAN PANGGUL, Kab. Trenggalek	Panggul	Besuki	DINAS PENDIDIKAN
784	3308527	KB INSAN MULIA ABADI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pendidik PAUD Swasta ingin lebih sejahtera	RT 21 RW 02 Desa Tanggaran, Kab. Trenggalek	Pule	Tanggaran	DINAS PENDIDIKAN
785	3308538	KB NAWA KARTIKA 4	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	peningkatkan kesejahteraan guru	RT 13 RW 5 JATIPRAHU KARANGAN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Karangan	Jatiprahu	DINAS PENDIDIKAN
786	3308554	MADRASAH DINIYAH ULA PASULUKAN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	seiring dengan bertambahnya jumlah santri dan uztadz, dan kebutuhan operasionalnya seperti halnya honor uztadz, kebutuhan sarana dan prasarana, pemeliharaan fasilitas semakin meningkat. sementara pendapatan pendanaan yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga sangat diperlukan bantuan program BPDGS Tahun Ajaran 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di madrasah Pasulukan	RT 22 RW 11 Dusun Nglaran, Kab. Trenggalek	Dongko	Cakul	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
787	3308600	KB ABDI MULYA	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Masih banyaknya Kepala dan guru PAUD non ASN yang belum memperoleh penghasilan layak mesipin masakerja sudah 16 tahun lebih	Dusun Karangrejo RT 30 RW 12, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PENDIDIKAN
788	3308605	SPS MUTIARA INSANI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah Bantuan Intensif/tambahan penghasilan/jasa kerja guru paud non PNS pada satuan PAUD Swasta sejumlah 2 orang x 12 bulan x 500.000 = 12.000.000	RT 58 RW 13 Dusun Ngandong, Kab. Trenggalek	Dongko	Siki	DINAS PENDIDIKAN
789	3308622	KB ABDI MULYA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan Bantuan Insentif	RT 30 RW 12, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PENDIDIKAN
790	3308636	TK DHARMA WANITA 2 NGRANDU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan Bantuan Hibah Uang Insentif/tambahan penghasilan/jasa Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	RT 21 RW 05 DUSUN BABADAN, Kab. Trenggalek	Suruh	Ngrandu	DINAS PENDIDIKAN
791	3308652	KB NAWA KARTIKA 4	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	kesejahteraan guru swasta	RT 13 RW 5 JATIPRAHU KARANGAN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Karangan	Jatiprahu	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
792	3308666	MADIN NUR HIDAYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga MADIN NUR HIDAYAH yang beralamatkan di RT 09 RW 02 Dusun Krajan Desa Pringapus Kec. Dongko Kab. Trenggalek Masih memerlukan bantuan biaya operasional untuk pelaksanaan pendidikan keagamaan karena lembaga kami berada di wilayah pinggiran dengan rata rata mata pencaharian petani sehingga tidak ada iuran rutin sama sekali	RT 09 RW 02 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Dongko	Pringapus	DINAS PENDIDIKAN
793	3308707	MDT SALAFIYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga Kami, MADIN SALAFIYAH mengajukan bantuan dana untuk menjadikan generasi bangsa yang memiliki jiwa santun dengan akhlak yang mulia dengan cara terus mendidik generasi dengan pemahaman ilmu agama Islam. Namun keterbatasan sarana prasarana serta dukungan operasional santri menjadi kendala utama kami, oleh karena itu kami mengajukan dana hibah dari pemerintah kabupaten Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses pendidikan ilmu yang lebih baik bagi siswa kami.	Jl. Abu Bakar, RT 22 RW 11 Dsn. Dawuhan Pule, Sukorejo, Gandusari, Trenggalek, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PENDIDIKAN
794	3308726	SPS PERMATA HATI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Kesejahteraan guru non PNS	RT 13 RW 05 SALAMREJO, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
795	3308742	MADIN DARUL ULUUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga MADIN Darul Uluum yang beralamatkan di RT 42 RW 03 Dusun Gejagan Desa Pringapus Kec. Dongko Kab. Trenggalek Masih sangat membutuhkan bantuan dikarenakan yang terutama untuk membantu honor guru dan kegiatan madrasah lainnya	RT 42 RW 03 Dusun Gejagan, Kab. Trenggalek	Dongko	Pringapus	DINAS PENDIDIKAN
796	3308754	AZ ZAHRO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	guru berdedikasi, insentif dinanti-nanti, semoga honor guru diperhatikan. karna jauh dari kata layak.	RT 009 RW 003 , Kab. Trenggalek	Durenan	Semarum	DINAS PENDIDIKAN
797	3308794	SPS FAJAR BERSINAR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Insentif yang diberikan sebagai penghasilan jasa biasanya bersifat tidak tetap dan bergantung ketersediaanya pada anggarannya jumlahnya juga tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dilakukannya,guru paud tidak hanya mengajar tetapi juga membangun awal pondasi anak anak bangsa.	Jalan Desa Sukokidul Rt 05 Rw 02, Kab. Trenggalek	Pule	Sukokidul	DINAS PENDIDIKAN
798	3308816	PPT NU ASSALAM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga madrasah diniyah kami masih membutuhkan bantuan biaya operasional untuk kelangsungan pembelajaran, berupa belum ada kantor madrasah diniyah yang memadai masih belum adanya ATK yang cukup, dan selama ini pasa asatidz hanya mendapatkan bisyaroh 1 tahun 1x karena keterbatasan keuangan lembaga.	Jalan Raya Karangrejo Sumbergayam Durenan Trenggalek, Kab. Trenggalek	Durenan	Sumbergayam	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
799	3308821	SD ISLAM AL MANAR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	masih minimnya insentif dari yayasan, sehingga bantuan tambahan penghasilan ini sangat kami butuhkan untuk 2 guru tersebut	Jalan Raya Pasir Putih Dusun Gares, Kab. Trenggalek	Watulimo	Tasikmadu	DINAS PENDIDIKAN
800	3308844	KB - IT NUURUL FIKRI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	minimnya gaji guru PAUD , berharap dengan adanya bantuan hibah insentif bisa menambah penghasilan guru, sehingga bisa membantu mencukupi biaya hidup keluarga.	RT.34 RW.14 DESA BENDOREJO, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	DINAS PENDIDIKAN
801	3308850	TK DHARMA WANITA 3 DURENAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Usulan bantuan hibah bansos untuk lembaga TK Dharma Wanita 3 Durenan untuk 1 orang.	RT.17 RW.07 DESA DURENAN, Kab. Trenggalek	Durenan	Durenan	DINAS PENDIDIKAN
802	3308861	TK DHARMA WANITA 3 DURENAN	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Kurangnya kemampuan keuangan di Lembaga TK Dharma Wanita 3 Durenan untuk memberikan honorarium yang layak kepada Guru TK Non ASN yang telah mengabdikan diri selama kurang lebih 23 tahun.Hal ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan dan kinerja Guru. Permohonan ini kami ajukan untuk 1 guru, dengan jumlah 2.400.000 (1 guru X 200.000 X 12 bulan). Besar harapan kami, untuk dapat disetujui.	RT.17 RW.07 DESA DURENAN, Kab. Trenggalek	Durenan	Durenan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
803	3308871	TK PERTIWI PULE	#HB Bantuan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD/Sederajat	kondisi ruang kelas, ruang speelod dan ruang guru yang rusak sedang	Dusun Krajan RT 01 RW 01, Kab. Trenggalek	Pule	Pule	DINAS PENDIDIKAN
804	3308920	KB NAWA KARTIKA V	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Insentif yang diberikan biasanya bersifat tidak tetap dan bergantung pada ketersediaan anggaran. jumlahnya juga seringkali tidak sesuai dengan baban kerja yang harus dilakukan guru paud, yang meliputi tidak hanya mengajar, melainkan harus mengurus administrasi sekolah yang kadang berlebih dan pengeluarannya juga sering lebih dari anggaran.	Rt 50 Rw 14 Dusun Sidem, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS PENDIDIKAN
805	3308935	SPS TUNAS BANGSA	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	masih minimnya honor pendidik PAUD saat ini maka dipandang perlu adanya pengusulan bantuan honorarium	RT O2 RW 1 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PENDIDIKAN
806	3308952	KB NAWA KARTIKA V	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Insentif yang diberikan biasanya bersifat tidak tetap dan bergantung pada ketersediaan anggaran. jumlahnya juga seringkali tidak sesuai dengan baban kerja yang harus dilakukan guru paud, yang meliputi tidak hanya mengajar, melainkan harus mengurus administrasi sekolah yang kadang berlebih dan pengeluarannya juga sering lebih dari anggaran.	Rt 56 Rw 16 Dusun Sidem , Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
807	3308956	SPS TUNAS BANGSA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan Bantuan Insentif	RT 02 RW 1, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PENDIDIKAN
808	3309058	KB AL IKHLAS	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	MENGINGINKAN HONOR PAUD DI TINGKATKAN	RT 02 RW 01 DESA SUMBEREJO KECAMTAN DURENAN, Kab. Trenggalek	Durenan	Sumberejo	DINAS PENDIDIKAN
809	3309059	KB MARGO RUKUN	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Guru di lembaga kami sudah mengabdi lebih dari 20 tahun tetapi hak dan kesejahteraan guru Paud non formal khususnya masih jauh dari kata layak di banding dengan guru paud formal, oleh karena itu kami mengajukan permohonan Insentif Kinerja untuk guru -guru kami yang sudah lama mengabdi.	RT 03 RW 01 Dusun Krajan Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN
810	3309075	MDT Ula AL HIDAYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Seiring bertambahnya jumlah santri dan kebutuhan operasional seperti honor tenaga pengajar, pengadaan sarana pembelajaran dan pemeliharaan fasilitas yang semakin meningkat. Sementara pendanaan yang tersedia masih terbatas, sehingga diperlukan bantuan Program BPPDGS Tahun Anggaran 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di Lembaga MDT Ula Al Hidayah	Dsn. Krajan RT 09 RW 02 , Kab. Trenggalek	Dongko	Ngerdani	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
811	3309122	TK IDHATA 2 PULE	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan bantuan hibah uang insentif / tambahan penghasilan / Guru Paud Non PNS Pada Satuan Paud Swasta	RT 30 RW 16 Desa Pule, Kab. Trenggalek	Pule	Pule	DINAS PENDIDIKAN
812	3309130	SPS AL KAUTSAR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pendidik pada Lembaga PAUD SPS AL KAUTSAR khususnya, serta mengoptimalkan penyelenggaraan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI pada umumnya	RT 019 RW 007 DUSUN KEDUNGLURAH DESA KEDUNGLURAH KEC. POGALAN KAB. TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	DINAS PENDIDIKAN
813	3309150	MDT Ula Darul Huda	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Seiring bertambahnya jumlah santri, Kebutuhan Operasional seperti honor tenaga pengajar,pengadaan sarana pembelajaran,dan pemeliharaan fasilitas semakin meningkat. sementara pendanaan yang tersedia masih terbatas,sehingga diperlukan bantuan program BPPDGS Tahun Anggaran 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar di Madin Darul Huda	Dusun Bonsari RT.031 RW.012 Desa Pandean Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Pandean	DINAS PENDIDIKAN
814	3309188	SPS MUTIARA INSANI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru	Dusun Kajar RT.017/RW.005 Desa Dukuh Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
815	3309225	NURUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Karena sangat minimnya aggaran yang ada di lembaga sehingga tidak mampu/tidak mencukupi apabila di gunakan untuk seluruh kegiatan oprasional yang ada di madrasah mulai dari honor tenaga pendidik, honor fenaga kependidikan , biaya oprasionalmadrasah, belanja ATK, Belanja barang dan jasa juga kebutuhan biaya perawatan Madrasah yang lain dalam setiap tahunnya yang menelan biaya besar, sehingga dalam hal ini peran pemerintah terkait pembiayaan kegiatan pembelajaran di Madrasah sangt di butuhkan.	RT.44.RW.22.DSN.BANGUNSARI.DS.PULE, Kab. Trenggalek	Pule	Pule	DINAS PENDIDIKAN
816	3309242	TK DHARMA WANITA 3 PAKEL	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan bantuan hibah uang insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja guru satuan paud swasta	RT 10 RW 04 DS. PAKEL KEC. PULE, Kab. Trenggalek	Pule	Pakel	DINAS PENDIDIKAN
817	3309243	PAUD KB AL HIKMAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk membantu penghasilan jasa kerja guru PAUD non PNS/Sertifikasi	Rt 20 Rw 07 Désa Ngetal, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngetal	DINAS PENDIDIKAN
818	3309257	PAUD KB AL HIKMAH	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Membantu honor kinerja guru/kepala sekolah PAUD swasta yang belum PNs/sertifikasi dan mengabdi lebih dari 16 tahun	Rt 20 Rw 07 Desa Ngetal Kecamatan Pogalan, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngetal	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
819	3309262	SUPARMI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan Lansia belum menerima bantuan lainnya (Masuk Data DTSEN (masuk desil 1 s.d. 5)	RT 20 RW 06 DESA WONOREJO KECAMATAN GANDUSARI, Kab. Trenggalek	Gandusari	Wonorejo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
820	3309266	KB AZ ZAHRO II	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan Bantuan Hibah Uang Insentif/Tambahan Penghasilan/Jasa Kerja Guru PAUD NON PNS Pada Satuan PAUD Swasta	RT 04 RW 02 DUSUN KRAJAN DESA NGULANWETAN, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngulanwetan	DINAS PENDIDIKAN
821	3309278	TK DHARMA WANITA 2 TIMAHAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permasalahan yang dihadapi Satuan PAUD swasta adalah keterbatasan anggaran untuk memberikan insentif tambahan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN. Kondisi tersebut berdampak pada kesejahteraan dan motivasi kerja. Oleh karena itu, diusulkan Bantuan Hibah Insentif/Tambahan penghasilan/Jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta.	RT 20 RW 06 DESA TIMAHAN, Kab. Trenggalek	Kampak	Timahan	DINAS PENDIDIKAN
822	3309425	NASRUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Permohona Pengajuan Dana PROGAM BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA (BPPDGS) DI MADIN NASRUL ULUM TAHUN ANGGARAN 2027	RT. 18 RW. 06 Dusun Krajan Desa Karangrejo Kec. Kampak, Kab. Trenggalek	Kampak	Karangrejo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
823	3309509	SD ISLAM KUSUMA BANGSA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Gaji yang diterima guru swasta sering kali tidak seimbang dengan beban kerja yang mereka emban setiap hari. Seorang guru tidak hanya bertugas mengajar di kelas, tetapi juga harus menyiapkan perangkat pembelajaran, menyusun materi, menilai tugas dan ujian, membimbing siswa, serta mengikuti berbagai kegiatan dan administrasi sekolah. Tanggung jawab tersebut menuntut waktu, tenaga, dan profesionalisme yang tinggi. Namun, penghargaan yang diterima dalam bentuk gaji masih jauh dari layak	RT. 11 RW. 03 DUSUN KARANGTUWO, Kab. Trenggalek	Munjungan	Munjungan	DINAS PENDIDIKAN
824	3309525	SPS FAJAR INSANI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru paud non formal sudah lama mengabdi di lembaga sebagai pendidik anak usia dini, tetapi hak dan kesejahteraan guru paud non formal belum layak dan belum sesuai dengan standar , oleh karena itu kami mengajukan permohonan bantuan insentif guru untuk membantu meningkatkan kesejahteraan dan menjadi motivasi bagi guru paud non formal khusuSnya.	RT 10 RW 02 Dusun Kebon Desa Besuki Kec. Munjungan Kab. Trenggalek., Kab. Trenggalek	Munjungan	Besuki	DINAS PENDIDIKAN
825	3309772	SUYANTO	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
826	3309802	SPS HARAPAN INSANI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Guru	RT 11 RW 03 Desa Ngembel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Watulimo	Ngembel	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
827	3309812	KB SUKA MAJU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Belum mendapatkan Honor	RT 11 RW 02 Desa Pakel Kec Watulimo Kab Trenggalek, Kab. Trenggalek	Watulimo	Pakel	DINAS PENDIDIKAN
828	3309833	SPS BUDI MULIA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta untuk 2 orang guru	RT 10 RW 01 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Suruh	Wonokerto	DINAS PENDIDIKAN
829	3309835	SPS MARDI SIWI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja kepada pendidikan/ tenaga kependidikan PAUD non ASN pada satuan PAUD Swasta untuk 2 orang	RT 16 RW 06 Dusun Bendo Desa Bendorejo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	DINAS PENDIDIKAN
830	3309863	SPS MARDI SIWI	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Bantuan Hibah uang kepada satuan paud swasta untuk memberikan honorarium kinerja kepala/guru/PAUD Non ASN pada satuan PAUD Swasta yg blm bersertifikasu Pendidikan untuk 2 orang	RT 16 RW 06 Dusun Bendo Desa Bendorejo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
831	3309878	SPS HARAPAN BUNDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Penghasilan Guru PAUD yang belum memadai, jauh dari UMR dan belum sebanding dengan beban kerja guru PAUD sebagai pembangun pondasi dan karakter anak bangsa. Tambahan penghasilan atau insentif diharapkan mampu menunjang semangat dan kinerja kami meskipun masih tersaa jauh dari kata cukup. insentif/ tambahan penghasilan sedikit dapat menjadi angin segar bagi kami, penyemangat bagi kami untuk menambah penghasilan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.	RT 28 RW 05 DESA PRAMBON, Kab. Trenggalek	Tugu	Prambon	DINAS PENDIDIKAN
832	3309931	MIFTAHUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih dibutuhkanya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	RT. 04 RW 02 Dusun Krajan Desa Pakel Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Pakel	DINAS PENDIDIKAN
833	3309941	KB AZ ZAHRA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Di karenakan semua honor guru Non PNS di sekolah kami masih jaud di bawah UMR kota setempat. karena itu kami sangat mengharapkan bantuan insentif dapat di realisasi supaya para pendidik paud kami dapat merasakan kesejahteraan yang layak.	Jl. supriadi Gg. tegal rejo nomor 41 RT 03 RW 01 Ds. Ngares Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngares	DINAS PENDIDIKAN
834	3309958	MADIN AL MUTTAQIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga Madin Al Muttaqin masih memerlukan bantuan biaya operasional untuk pelaksanaan pendidikan keagamaan	RT.08 RW.02 DSN. KRAJAN , Kab. Trenggalek	Dongko	Ngerdani	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
835	3310017	TK DW SUMBER/Rinawati	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru TK DW Sumber atas nama Yayuk Mulyati belum bersertifikasi pendidik sehingga belum menerima TPP	RT 03 RW 01 DESA SUMBER-KARANGAN-TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumber	DINAS PENDIDIKAN
836	3310030	PKBM FASTABIQUL KHOIROT	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Bos dari pusat hanya menyasar pada anak usia sekolah, padahal di PKBM banyak warga belajar yang sudah bukan usia sekolah lagi, jadi mereka tidak mendapatkan bos dari pusat. Karena itu terjadi kesenjangan antara anggaran dan biaya operasional, maka dari itu mengajukan Dana HIBAH untuk membantu kelancaran Operasional.	RT 09 RW 02 Desa Gondang, Kab. Trenggalek	Tugu	Gondang	DINAS PENDIDIKAN
837	3310071	KB AZ-ZAHWA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	kemampuan lembaga terbatas dalan pemberian honorarium pendidik, untuk itu kami mengajukan permohonan Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	RT 23 RW 10 DUSUN NGIMER DESA SUGIHAN KAMPAK KAB.TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Kampak	Sugihan	DINAS PENDIDIKAN
838	3310094	TK DHARMA WANITA 4 MASARAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru dilembaga kami sudah lama mengabdi akan tetapi hak dan kesejahteraan belum terpenuhi	RT 06 RW 02 Dusun Krajan Desa Masaran , Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN
839	3310112	TK DHARMA WANITA 2 BESUKI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Kurangnya kesejahteraan pendidik PAUD swasta	RT 016 RW 003 Dusun Ponggok Desa Besuki Kec.Munjungan Kab.Trenggalek, Kab. Trenggalek	Munjungan	Besuki	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
840	3310123	TK DHARMA WANITA 6 MLINJON	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Insentif Guru	RT 07 RW 02 DUSUN SOHO, Kab. Trenggalek	Suruh	Mlinjon	DINAS PENDIDIKAN
841	3310125	TK DHARMA WANITA 1 WONOCOYO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan bantuan hibah uang kepada satuan PAUD Swasta yang diperuntukkan untuk memberikan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja kepada Pendidikan/Tenaga Kependidikan PAUD Non ASN pada satuan PAUD Swasta	RT 006 RW 003 Desa Wonocoyo, Kab. Trenggalek	Pogalan	Wonocoyo	DINAS PENDIDIKAN
842	3310138	KB AL MANAR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Minimnya bantuan insentif dari lembaga dan yayasan	Dsn. Gares RT/RW 16/03 Ds. Tasikmadu Watulimo, Kab. Trenggalek	Watulimo	Tasikmadu	DINAS PENDIDIKAN
843	3310163	TK DHARMA WANITA 6 MLINJON	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	KINERJA GURU	RT 07 RW 02 DUSUN SOHO, Kab. Trenggalek	Suruh	Suruh	DINAS PENDIDIKAN
844	3310204	TK DHARMA WANITA 1 CAKUL	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena minimnya pendapatan di tk dharama wanita 1 cakul, maka mengajukan usulan insentif atas nama, Tri Fatimah sebesar 6.000.000 untuk jangka waktu 12 bulan	RT 28 RW 14 Dusun Nglaran Desa Cakul Kecamatan Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Cakul	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
845	3310209	KB WIDODO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta untuk 3 orang guru	RT 03 RW 01, Kab. Trenggalek	Suruh	Suruh	DINAS PENDIDIKAN
846	3310220	TK AL HIDAYAH 2 SAWAHAN	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Masih kurangnya tingkat kesejahteraan guru(kususnya guru paud non asn non sertifikasi) Yang tidak sebanding dengan beban kerja dan biaya hidup saat ini	Dsn. Singgahan Rt. 007 Rw. 003 desa Sawahan , Kab. Trenggalek	Watulimo	Sawahan	DINAS PENDIDIKAN
847	3310247	KB DINAR NASYIAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	kurangnya kesejahteraan bagi guru paud	RT.001 RW.001 DESA GEMAHARJO, Kab. Trenggalek	Watulimo	Gemaharjo	DINAS PENDIDIKAN
848	3310267	KB MISBAHUL HUDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena kesejahteraan guru masih belum memadai dengan beban kerja yang dilakukan	Jln. Kalisukun Rt 24 Rw 12 Dusun Jatisari, Kab. Trenggalek	Pogalan	Pogalan	DINAS PENDIDIKAN
849	3310279	TK DHARMA WANITA 3 SIKI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Minimnya penghasilan guru PAUD DHARMA WANITA 3 SIKI, maka mengajukan usulan dana bantuan Insentif untuk Ana Hariyati sebesar 6.000.000, dalam kurun waktu 12 bulan.	RT 41 RW 09, DUSUN NGULUH, DESA SIKI., Kab. Trenggalek	Dongko	Siki	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
850	3310304	MISBAHUL HUDA (TPA)	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena kesejahteraan guru masih belum memadai dengan beban kerja yang dilakukan	Jln. Kalisukun, RT.24/RW. 12, Dusun Jatisari, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kab. Trenggalek	Pogalan	Pogalan	DINAS PENDIDIKAN
851	3310333	KB LENTERA HATI 2	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena guru di lembaga kami ,belum mendapatkan hak yang sama dengan teman-teman di paud formal .Gaji yang di terima dari lembaga jauh dari kata layak	RT 07 RW 03 DESA SURENLOR , Kab. Trenggalek	Bendungan	Surenlor	DINAS PENDIDIKAN
852	3310336	KB AISYIYAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena guru di lembaga kami belum mendapatkan hak yang sama dengan teman-teman di PAUD formal. Gaji yang diterima dari lembaga masih jauh kata layak.	Jln. Trenggalek Bendungan Km 13 RT 27 RW 09 Dusun Kacangan, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS PENDIDIKAN
853	3310376	KB KEJORA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena guru di lembaga kami belum mendapatkan hak yang sama dengan teman-teman di PAUD formal. Gaji yang diterima lembaga masih jauh dari kata layak.	Jalan Surenmas KM.14 RT. 003 RW. 001 Dusun Jerukgulung , Kab. Trenggalek	Bendungan	Surenlor	DINAS PENDIDIKAN
854	3310383	TK DHARMA WANITA 5 MUNJUNGAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru di lembaga kami sudah mengabdi lama tetapi hak dan kesejahteraan belum terpenuhi. Mohon nominal di tambah dan pencairan di tertibkan.	Rt 041 Rw 009 Dusun Gebyog Desa Munjungan Kecamatan Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Munjungan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
855	3310384	KB HIDAYATURROHMAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD N	DUSUN GANDU RT 017 R W 006 , Kab. Trenggalek	Watulimo	Karanggandu	DINAS PENDIDIKAN
856	3310389	SDI FAJAR INSANI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	1. Keterbatasan Dana Yayasan, yang banyak siswa menunggak sehingga yayasan kesulitan untuk membayar gaji, apalagi insentif tambahan. 2. Guru swasta dituntut profesional dan mengikuti kurikulum terbaru (seperti kurikulum merdeka)namun insetif yang diterima sering tidak sebanding dengan beban kerja, dan masih banyak guru yang belum mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG)	RT 02 RW 01 DUSUN DAWUHAN PULE DESA SUKOREJO, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PENDIDIKAN
857	3310394	TK ISLAM TERPADU NUURUL FIKRI MARGOMULYO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Keejahteraan guru PAUD masih kurang dari standar	RT. 21 RW. 01 Dusun Margo Ds. Margomulyo Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek	Watulimo	Margomulyo	DINAS PENDIDIKAN
858	3310396	SPS AL MUBTADIIN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Insentif : Karena guru di lembaga kami, belum mndapatkann hak yg sama dg teman2 d paud formal. Gaji yg dterima dr lmbaga masih jauh dr kata layak BKK Masih adanya guru di lembaga kami yg telah mngabdi lebih dr 20 th, dan blm mndapt hak yg sama dg lmbaga paud formal. Oleh karenanya, kami mengajukan bantuan untuk guru tsb.	RT 09 RW 04 DUSUN MASARAN DESA MASARAN, Kab. Trenggalek	Bendungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
859	3310453	KB KEMALA BHAYANGKARI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk kesejahteraan guru karena honor dari lembaga terlalu minim	KH HASYIM ASHARI NO 4, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PENDIDIKAN
860	3310462	TK DHARMA WANITA 1 PURU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Tk Dharma Wanita 1 Puru ada 2 rombel dan mempunyai 2 orang guru , 1 Sudah bersetifikat Pendidik yang 1 Belum , Kami mengajukan proposal untuk Bantuan Insentif/Tambahan Penghasilan.	RT 18 RW 01 DUSUN KRAJAN BANARAN DESA PURU, Kab. Trenggalek	Suruh	Puru	DINAS PENDIDIKAN
861	3310464	SPS AL-FAISHOL	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	SPS Al-Faishol berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Namun keterbatasan dana menjadi kendala utama. Maka dari itu demi mendukung lahirnya generasi bangsa yang berkualitas, kesejahteraan guru perlu diperhatikan sebagai penyemangat dalam berjuang	RT 12 RW 05 BANDULAN, Kab. Trenggalek	Pogalan	Wonocoyo	DINAS PENDIDIKAN
862	3310466	MISBAHUL HUDA (TPA)	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Karena kesejahteraan guru masih belum memadai dengan beban kerja yang dilakukan	Jln. Kalisukun, RT.24/RW. 12, Dusun Jatisari, Desa Pogalan, Kecamatan Pogalan, Kab. Trenggalek	Pogalan	Pogalan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
863	3310483	darussalam	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah Darussalam di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	Dsn. Krajan RT 02 RW 01 Ds. Ngulanwwtan, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngulanwetan	DINAS PENDIDIKAN
864	3310486	NURUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah Kami masih membutuhkan bantuan dana operasional	Dusun Mojo RT 15 RW 04, Kab. Trenggalek	Suruh	Nglebo	DINAS PENDIDIKAN
865	3310528	TK DHARMA WANITA 2 NGULUNGWETAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru di lembaga kami sudah mengabdi lama tetapi hak dan kesejahteraan belum terpenuhi	RT 001 RW 001 DUSUN KEMPONG DESA NGULUNGWETAN KECAMATAN MUNJUNGAN, Kab. Trenggalek	Munjungan	Ngulungwetan	DINAS PENDIDIKAN
866	3310542	KB SEKAR ARUM	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena guru di lembaga kami, belum mndapatkann hak yg sama dg teman2 d paud formal. Gaji yg dterima dr lmbaga masih belum layak	RT 24 RW 06 Dusun Gabahan Desa Tawing Kec Munjungan Kab Trenggalek, Kab. Trenggalek	Munjungan	Tawing	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
867	3310556	TK DHARMA WANITA 1 SUKOWETAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru tidak mendapat Honor dari sekolah karena terbatasnya dana lembaga , karena pemasukan uang lembaga sangat minim, uang lembaga digunakan untuk memenuhi operasional lembaga.	RT 17 RW 08 DS. SUKOWETAN KEC. KARANGAN, Kab. Trenggalek	Karangan	Sukowetan	DINAS PENDIDIKAN
868	3310561	TK AL HIDAYAH PRIGI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru (khususnya guru PAUD swasta) yang belum sebanding dengan beban kerja dan biaya hidup saat ini	Jalan Raya Pantai Prigi Rt. 17 Rw. 04 Dusun Gendingan , Kab. Trenggalek	Watulimo	Prigi	DINAS PENDIDIKAN
869	3310583	TK DHARMA WANITA 2 MUNJUNGAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru di lembaga kami sudah mengabdi lama tetapi hak dan kesejahteraan belum terpenuhi.	rt:26 rw:07 dusun bungur desa munjungan kecamatan munjungan kabupaten trenggalek, Kab. Trenggalek	Munjungan	Munjungan	DINAS PENDIDIKAN
870	3310588	TK MARDISIWI MARGOMULYO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena guru tersebut belum mendapatkan tunjangan profesi guru dan kurangnya kesejahteraan guru paud non asn yang tidak sebanding dengan biaya hidup dan beban hidup saat ini.	RT. 12 RW. 01 DUSUN MARGO , Kab. Trenggalek	Watulimo	Margomulyo	DINAS PENDIDIKAN
871	3310595	SDIT NUURUL FIKRI KAMPAK	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Peningkatan kesejahteraan 2 guru yang belum berserdik	RT/RW 10/03, DSN. KADEMANGAN, DS. BENDOAGUNG, KEC. KAMPAK, Kab. Trenggalek	Kampak	Bendoagung	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
872	3310603	KB AL AMIN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Rendahnya honorarium tenaga pendidik/guru PAUD saat ini tidak sebanding dengan beban kerja, mengakibatkan sulitnya mempertahankan tenaga pengajar yang kompeten.	RT.023 RW.005 Dusun Jarakan, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Karangsoko	DINAS PENDIDIKAN
873	3310618	TK Plus Wahidiyah Pogalan	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan proposal bantuan hibah uang kepada satuan PAUD swasta yang diperuntukkan untuk memberikan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja kepada pendidikan/tenaga kependidikan PAUD non ASN pada satuan paud swasta	DUSUN SUMBER RT 015 RW 006 DESA NGULANWETAN, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngulanwetan	DINAS PENDIDIKAN
874	3310634	TK DHARMA WANITA 2 NGULANWETAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan proposal bantuan hibah uang kepada satuan PAUD swasta yang di peruntukkan untuk memberikan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja kepada pendidikan/tenaga kependidikan PAUD non ASN pada satuan PAUD swasta	RT 21 RW O9 DS.NGULANWETAN, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngulanwetan	DINAS PENDIDIKAN
875	3310643	TK Dharma Wanita 4 Bendorejo	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan proposal bantuan hibah uang kepada satuan PAUD Swasta yang diperuntukkan untuk memberikan insentif/tambahan penghasilan/bantuan kerja kepada pendidikan / tenaga kependidikan PAUD NonASN pada satua PAUD Swata.	Dusun Tenggong RT 027 RW 012 Desa Bendorejo Kecamatan Pogalan, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	DINAS PENDIDIKAN
876	3310644	TK DHARMA WANITA 3 SURUH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Tk Dharma wanita 3 Suruh ada 2 rombel dan mempunyai 2 guru,1 sudah bersertifikasi Pendidik yang 1 belum.Kami mengajukan proposal untuk Bantuan Insentif/Tambahan Penghasilan.	RT 31 RW 11 DUSUN GADING DESA SURUH KECAMATAN SURUH KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Suruh	Suruh	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
877	3310645	TK DHARMA WANITA 1 NGULANWETAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan Proposal Bantuan Hibah Uang Kepada Satuan PAUD Swasta Yang di Peruntukkan untuk memberikan Insentif/Tambahan Penghasilan/ Jasa Kerja Kepada Pendidikan/Tenaga Kependidikan PAUD Non ASN Pada Satuan PAUD Swasta.	Dusun Krajan RT 03 RW 02 Desa Ngulanwetan , Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngulanwetan	DINAS PENDIDIKAN
878	3310648	TK IDHATA GEMBLEB	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Propasal bantuan hibah uang kepada satuan paud swasta yang diperuntukan untuk memberikan insentif/tambahan pengahsilan/jasa kerja kepada pendidikan/tenaga kependidikan PAUD non ASN pada satuan PAUD Swasta	RT 33 RW 12 DESA GEMBLEB, Kab. Trenggalek	Pogalan	Gembleb	DINAS PENDIDIKAN
879	3310655	TK PERMATA BUNDA WATUAGUNG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Masih kurang layaknya dan masih jauh dibawah UMR untuk pemberian honorarium pendidik di lembaga	Dusun Sambi RT 005 RW 002 , Kab. Trenggalek	Watulimo	Watuagung	DINAS PENDIDIKAN
880	3310657	TK DHARMA WANITA 3 KARANGAN	#HB Bantuan Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/ SMP	Guru TK Dharma Wanita 3 Karangan atas nama Musiyam berstatus Non PNS, memiliki kinerja baik dan juga masa kerja paling lama dilembaga kami tetapi belum sertifikasi, sehingga kami anggap layak untuk diajukan dan mendapatkan Bantuan Kinerja Guru Non PNS jenjang TK.	RT.31 RW.08, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS PENDIDIKAN
881	3310671	TK PERMATA BUNDA WATUAGUNG	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Sudah Lamanya Mengabdi dilembaga namun Honorarium masih jauh dibawah UMR dan masih belum bisa mendapatkan TPG	Dusun Sambi RT 005 RW 002 , Kab. Trenggalek	Watulimo	Watuagung	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
882	3310674	TK DHARMA WANITA 3 KARANGAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	-	RT.31 RW.08, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS PENDIDIKAN
883	3310680	SPS TAMAN SISWA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena guru di lembaga kami, belum mndapatkann hak yg sama dg teman2 d paud formal. Gaji yg dterima dr lmbaga masih jauh belum layak	RT 02 RW 01 Dusun Kaliatal Desa Besuki Kec Munjungan Kab Trenggalek, Kab. Trenggalek	Munjungan	Besuki	DINAS PENDIDIKAN
884	3310683	TK DHARMA WANITA 1 NGADIRENGGO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Proposal bantuan hibah uang kepada satuan paud swasta yang diperuntukkan untuk memberikan insentif/tambahan penghasilan /jasa kerja kepada pendidikan/tenaga kependidikan PAUD non ASN pada satuan PAUD swasta	RT 15 RW 06 Dusun. Wadi Kidul, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirenggo	DINAS PENDIDIKAN
885	3310691	KB AISYIYAH	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Masih adanya guru di lembaga kami yang telah mengabdi lebih dr 20 tahun, dan belum mendapat hak yang sama dengan lembaga paud formal. Oleh karenanya, kami mengajukan bantuan untuk guru tersebut	Jl. Trenggalek Bendungan KM 13 RT 27 RW 09 Dusun Kacangan, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS PENDIDIKAN
886	3310700	TK Dharma Wanita 1 Ngulankulon	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan Bantuan Hibah Uang kepada Satuan PAUD Swasta yang diperuntukkan untuk memberikan Insentif/Tambahan Penghasilan/Jasa Kerja kepada Pendidikan/Tenaga Kependidikan PAUD Non ASN satuan PAUD Swasta	Dusun Krajan RT. 20/RW. 05 Desa Ngulankulon, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngulangkulon	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
887	3310712	TK DHARMA WANITA 2 GEMBLEB	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan proposal bantuan hibah uang kepada satuan PAUD swasta yang diperuntukkan untuk memberikan insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja kepada pendidikan/tenaga kependidikan PAUD non ASN pada satuan PAUD swasta	RT 26 RW 09 Dusun Gembleb, Kab. Trenggalek	Pogalan	Gembleb	DINAS PENDIDIKAN
888	3310724	MI YAPENDAWA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Belum layaknya penghasilan guru swasta dan banyaknya pengajar yang belum memiliki sertifikat pendidik, sehingga membutuhkan bantuan insentif daerah untuk menunjang biaya operasional hidup dan kesejahteraan tenaga pendidik	RT13 RW07 Dawung Desa Bendorejo Kec Pogalan Kab Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	DINAS PENDIDIKAN
889	3310730	kb bumi rahayu	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Insentif : Karena guru di lembaga kami, belum mndapatkann hak yg sama dg teman2 d paud formal. Gaji yg dterima dr lmbaga masih jauh dr kata layak.	RT.21 RW.06 DUSUN PAKEL DESA DOMPYONG, Kab. Trenggalek	Bendungan	Dompyong	DINAS PENDIDIKAN
890	3310736	SPS AL HUDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena guru di lembaga kami, belum mendapatkan hak yang sama dengan teman-teman di PAUD Formal. Gaji yang diterima dari lembaga masih jauh dari kata layak.	Rt.26 Rw.08 Dusun Pule Ds.Sumurup , Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS PENDIDIKAN
891	3310748	TK DHARMA WANITA KEDUNGLURAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan proposal bantuan hibah uang kepada satuan paud swasta yang diperuntukkan untuk memberikan insentif / tambahan penghasilan / jasa kerja kepada pendidikan / tenaga kependidikan PAUD NON ASN pada satuan PAUD swasta	RT 26 RW 09 Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan Kabupatern Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
892	3310759	TK SUNU PINARDI MARGOMULYO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru tersebut belum mendapat tunjangan profesi guru	RT/RW. 001/002, DUSUN MARGO, Desa MARGOMULYO, Kec. WATULIMO, TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Watulimo	Margomulyo	DINAS PENDIDIKAN
893	3310762	TK DHARMA WANITA 3 TAWING	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru di lembaga kami sudah mengabdi lama tetapi hak dan kesejahteraan belum terpenuhi	RT. 042 RW.009 Dusun Gunung Kembar Desa Tawing, Kab. Trenggalek	Munjungan	Tawing	DINAS PENDIDIKAN
894	3310784	TK Dharma Wanita 3 Pogalan	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan Bantuan Hibah Uang kepada Satuan PAUD Swasta yang diperuntukkan untuk memberikan Insentif/Tambahan Penghasilan/Jasa Kerja kepada Pendidikan/Tenaga Kependidikan PAUD Non ASN satuan PAUD Swasta	RT. 02/RW. 01 Desa Pogalan, Kab. Trenggalek	Pogalan	Pogalan	DINAS PENDIDIKAN
895	3310837	TK DHARMA WANITA 1 KEDUNGSIGIT	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Perbaikan Proposal Insemtif 2027	RT 008 RW 002 DUSUN SIGIT DESA KEDUNGSIGIT KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR, Kab. Trenggalek	Karangan	Kedungsigit	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
896	3310839	KB KARTIKA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena guru di lembaga kami, belum mndapatkann hak yg sama dg teman2 d paud formal. Gaji yg dterima dr lmbaga masih jauh dr kata layak	RT.31 RW.09 DUSUN GARON DESA DOMPYONG, Kab. Trenggalek	Bendungan	Dompyong	DINAS PENDIDIKAN
897	3310967	KB AN NUUR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena guru di lembaga kami, belum mndapatkan hak yang sama dengan teman-teman di paud formal. Gaji yang diterima dari lmbaga masih jauh dari kata layak	RT 37 RW 11 Dusun Kacangan Desa Sumurup, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS PENDIDIKAN
898	3310973	TK DHARMA WANITA 2 BULUAGUNG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan Dana Insentif Tahun 2027	RT 16 RW 06 Dusun Buret Desa Buluagung Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Karangan	Buluagung	DINAS PENDIDIKAN
899	3310974	TK AISYIYAH WATUAGUNG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru tersebut belum mendapat tunjangan profesi guru.	RT 36 RW 10 Dusun Krecek Desa Watuagung Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watuagung	DINAS PENDIDIKAN
900	3310978	TK DHARMA WANITA 2 BULUAGUNG	#HB Bantuan Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/ SMP	Honor untuk Kesejahteraan Guru masih belum sesuai dengan masa kerja dan beban kerja di masa sekarang	RT 16 RW 06 Dusun Buret Desa Buluagung Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Karangan	Buluagung	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
901	3310981	KB ARUM DALU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena guru di lembaga kami,belum mendapatkan hak yang sama dengan teman teman di PAUD formal.Gaji yang diterima dari lembaga masih jauh dari kata layak.	RT 21 RW 07 DUSUN KRAPYAK DESA BOTOPUTIH, Kab. Trenggalek	Bendungan	Botoputih	DINAS PENDIDIKAN
902	3310983	KB THORIQUL MUTTAQIN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena guru dilembaga kami belum mendapatkan hak yang sama dengan teman-teman di paud formal. Gaji yang diterima dsri lembaga masih jauh dari kata layak.	Jalan Suren-Mas KM 15 ,RT 16 RW 06 Dusun Tawing, Kab. Trenggalek	Bendungan	Surenlor	DINAS PENDIDIKAN
903	3310987	TK PERTIWI MARGOMULYO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru tersebut belum mendapatkan tunjangan profesi guru	RT. 08 RT. 05 , Desa Margomulyo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Watulimo	Margomulyo	DINAS PENDIDIKAN
904	3310996	SPS MELATI WANGI I	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena guru di lembaga kami, belum mendapatkan hak yang sama dengan teman-teman di PAUD formal, gaji yang diterima dari lembaga masih jauh dari kata layak.	RT.004 RW.002 Dusun Jambe, Kab. Trenggalek	Bendungan	Botoputih	DINAS PENDIDIKAN
905	3311050	TK DHARMA WANITA 2 SALAMREJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pembaharuan Proposal Bantuan Insentif / Tambahan Penghasilan Jasa Guru PAUD	RT.09 RW.03 DS. SALAMREJO, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
906	3311059	KB AN NUUR	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Masih adanya guru di lembaga kami yg telah mengabdi lebih dari 16 tahun, dan belum mendapet hak yang sama dengan lembaga paud formal. Oleh karenanya, kami mengajukan bantuan untuk guru tersebut	RT 37 RW 11 Dusun Kacangan, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS PENDIDIKAN
907	3311091	TK DHARMA WANITA 3 KEDUNGSIGIT	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Bantuam Insentif / tambahan penghasilan / jasa kerja Guru PAUD	RT 25 RW 04 DS. KEDUNGSIGIT KEC. KARANGAN KAB. TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Karangan	Kedungsigit	DINAS PENDIDIKAN
908	3311097	KB AL HIDAYAH MARGOMULYO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Lembaga belum bisa memberikan honor sesuar UMK	Dusun Ketok RT 09 RW 05 Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Watulimo	Margomulyo	DINAS PENDIDIKAN
909	3311100	TK DHARMA WANITA 1 JATIPRAHU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pembaharuan Proposal Bantuan Insentif/Tambahan Penghasilan Jasa Guru PAUD	DUSUN NGEGONG RT 028 RW 005 DESA JATIPRAHU KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK , Kab. Trenggalek	Karangan	Jatiprahu	DINAS PENDIDIKAN
910	3311101	TK SRI MULYA DUKUH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan bantuan hibah uang insentif / tambahan penghasilan / Guru Paud Non Pns pada satuan Paud Swasta	RT.22 RW.06, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
911	3311103	SPS MELATI WANGI I	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Masih adanya guru di lembaga kami yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun, dan belum mendapat hak yang sama dengan lembaga PAUD formal. Oleh karenanya, kami mengajukan bantuan untuk guru tersebut.	RT.004 RW.002 Dusun Jambe, Kab. Trenggalek	Bendungan	Botoputih	DINAS PENDIDIKAN
912	3311117	TK DHARMA WANITA 1 JATIPRAHU	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Honor untuk kesejahteraan guru belum sesuai dengan beban kerja di masa sekarang	DUSUN NGEGONG RT 028 RW 005 DESA JATIPRAHU KECAMATAN KARANGAN KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Karangan	Jatiprahu	DINAS PENDIDIKAN
913	3311118	TK DHARMA WANITA 3 MASARAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru di lembaga kami sudah mengabdi lama tetapi hak dn kesejahteraan belum terpenuhi	RT. 052 RW. 012 Dusun Gembes, Kab. Trenggalek	Munjungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN
914	3311121	KB ARUM DALU	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Masih adanya guru dilembaga kami yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun dan belum mendapatkan hak yang sama dengan lembaga PAUD formal.Oleh karenanya,kami mengajukan bantuan untuk guru tersebut.	RT 21 RW 07 DUSUN KRAPYAK DESA BOTOPUTIH, Kab. Trenggalek	Bendungan	Botoputih	DINAS PENDIDIKAN
915	3311125	KB KARTIKA	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Masih adanya guru di lembaga kami yg telah mengabdi lebih dr 16 th, dan blm mndapt hak yg sama dg lmbaga paud formal. Oleh karenanya, kami mengajukan bantuan untuk guru tsb	RT.31 RW.09 DUSUN GARON DESA DOMPYONG, Kab. Trenggalek	Bendungan	Dompyong	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
916	3311129	KB THORIQUL MUTTAQIN	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Masih adanya guru di lembaga kami yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun dan belum mendapatkan hak yang sama dengan lembaga paud formal. Oleh karenanya,kami mengajukan bantuan untuk guru tersebut	Jalan Suren -Mas KM 15, Dusun Tawing, Kab. Trenggalek	Bendungan	Surenlor	DINAS PENDIDIKAN
917	3311130	KB MELATI WANGI II	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena guru di lembaga kami, belum mndapatkann hak yg sama dg teman2 d paud formal. Gaji yg dterima dr lmbaga masih jauh dr kata layak	RT 14 RW 05 BOTOPUTIH , Kab. Trenggalek	Bendungan	Botoputih	DINAS PENDIDIKAN
918	3311164	TK DHARMA WANITA KERJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permbaharuan Proposal Bantuan Insentif / Tambahan Penghasilan Jasa Guru PAUD	RT.03 RW. 01 DUSUN KRAJAN DESA KERJO, Kab. Trenggalek	Karangan	Kerjo	DINAS PENDIDIKAN
919	3311166	KB KEJORA	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Masih adanya guru di lembaga kami yang telah mengabdi lebih dari 19 tahun, dan belum mendapat hak yang sama dengan lembaga PAUD formal. Oleh karenanya, kami mengajukan bantuan untuk guru tersebut.	Jalan Surenmas KM 14. RT.003 RW.001 Dusun Jerukgulung, Kab. Trenggalek	Bendungan	Surenlor	DINAS PENDIDIKAN
920	3311181	TK Dharma Wanita 2 Jatiprahu	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Bantuan Insentif / tambahan penghasilan / jasa kerja Guru PAUD	DUSUN NGEGONG RT 014 RW 006 DESA JATIPRAHU, Kab. Trenggalek	Karangan	Jatiprahu	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
921	3311183	KB LENTERA HATI 1	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena guru di lembaga kami belum mendapatkan hak yang sama dengan teman-teman di PAUD formal. Gaji yang diterima dari lembaga masih jauh dari kata layak.	RT 07 RW 03 Dusun Jeruk, Kab. Trenggalek	Bendungan	Srabah	DINAS PENDIDIKAN
922	3311190	MADIN AL FALAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga MADIN Al Falah RT 09 RW 03 Dusun Krajan Desa Salamwates Kec. Dongko Kab. Trenggalek Masih memerlukan bantuan biaya operasional dikarenakan tidak punya sumber dana yang sifatnya rutin dan hanya iuran seikhlasnya dari wali santri	RT 09 RW 03 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PENDIDIKAN
923	3311193	SPS FIRDAUS	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Kepala sekolah dan guru PAUD non ASN di lembaga kami (SPS Firdaus) belum memperoleh penghasilan layak sesuai dengan beban kerja yang dilakukan meskipun masakerja sudah 18 tahun lebih	RT 17 RW 03 DUSUN WATES, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngulangkulon	DINAS PENDIDIKAN
924	3311199	SPS NURANI IBU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena guru di lembaga kami,belum mendapatkan hak yang sama dengan teman teman di paud formal.Gaji yang di terima dari lembaga masih jauh dari kata layak.	Rt 12 Rw 05 Dusun Kebonagung, Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	DINAS PENDIDIKAN
925	3311206	KB LENTERA HATI 1	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Masih adanya guru di lembaga kami yang telah mengabdi lebih dari 16 tahun dan belum mendapat hak yang sama dengan lembaga PAUD formal. Oleh karenanya kami mengajukan bantuan untuk guru tersebut	RT 07 RW 03 Dusun Jeruk, Kab. Trenggalek	Bendungan	Srabah	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
926	3311227	SPS FIRDAUS	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	masih kurangnya kesejahteraan kepala dan guru PAUD non ASN yang sesuai dengan beban kerjanya	RT 17 RW 03 DUSUN WATES, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngulangkulon	DINAS PENDIDIKAN
927	3311231	SPS SUMBER ILMU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Kurangnya kesejahteraan Pendidik PAUD	RT 033 RW 007 DUSUN DOMERTO DESA TAWING, Kab. Trenggalek	Munjungan	Tawing	DINAS PENDIDIKAN
928	3311256	TK DHARMA WANITA 2 BANGUN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru di lembaga kami sudah lama mengabdi, Tetapi hak dan kesejahteraan belum terpenuhi.	RT. 006 RW. 003 DUSUN JAJAR DESA BANGUN KEC. MUNJUNGAN, Kab. Trenggalek	Munjungan	Bangun	DINAS PENDIDIKAN
929	3311262	TK DHARMA WANITA 1 NGENTRONG	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pengajuan Proposal insentif tahun anggaran 2027 untuk dua (2) orang guru	Dusun Ngentrong RT 15 RW 03 Desa Ngentrong, Kab. Trenggalek	Karangan	Ngentrong	DINAS PENDIDIKAN
930	3311272	TK DHARMA WANITA 1 NGENTRONG	#HB Bantuan Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/ SMP	Honor untuk kesejahteraan guru masih belum sesui dengan beban kerja Di Masa Sekarang	Dusun Ngentrong RT 15 RW 03 Desa Ngentrong, Kab. Trenggalek	Karangan	Ngentrong	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
931	3311281	MDT Ula AL HIKAM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Untuk mendukung operasional dan peningkatan kualitas pembelajaran santri Madrasah Diniyah Al-Hikam	Rt. 43 RW. 13 Desa Karangrejo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Kampak	Karangrejo	DINAS PENDIDIKAN
932	3311323	KB JAUHARUL ULUM	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	PERMOHONAN BANTUAN INSENTIF	RT 14 RW 05 KEDUNGLURAH, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	DINAS PENDIDIKAN
933	3311364	KB JAUHARUL ULUM	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja dan Kesejahteraan Kepala/Guru KB Jauharul Ulum khususnya serta mengoptimalkan penyelenggaraan pendidik Anak Usia Dini.	RT 14 RW 05 Dusun Brongkah Desa KEDUNGLURAH, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	DINAS PENDIDIKAN
934	3311379	LILIS ATIK	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
935	3311387	JIMUN	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
936	3311395	ALDI SUPRIADIN	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 010, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
937	3311401	KB TUNAS HARAPAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena guru di lembaga kami, belum mendapatkan hak yang sama dengan teman2 yang ada di paud formal. Gaji yang diterima dari lembaga masih jauh dari kata layak	RT 03 RW 01 Dusun Masaran Wetan, Kab. Trenggalek	Bendungan	Masaran	DINAS PENDIDIKAN
938	3311405	LENI SUSANTI	#HB Bantuan Sosial bagi Warga Terdampak Pembangunan Bendungan Bagong	Warga terdampak pembangunan Bendungan Bagong memerlukan bantuan sosial untuk biaya kepindahan tempat tinggal baru	DUSUN POJOK, RT. 009, RW. 003, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sumurup	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
939	3311439	MADIN MMQ DARUSSALAM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Lembaga Madin MMQ Darussalam RT 02 RW 01 Dusun Krajan Desa Dongko Kec. Dongko Kab. Trenggalek Masih sangat memerlukan bantuan biaya operasional dikarenakan santrinya lumayan banyak sementara tenaga pendidik nya masih kurang. lembaga sangat membutuhkan untuk Honor Guru setiap bulan dan operasional lainnya	RT 02 RW 01 Dusun Krajan, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PENDIDIKAN
940	3311456	KB BUNGA MAWAR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru di lembaga kami, belum mendapatkan hak yang sama dengan teman pendidik di paud formal. Gaji yang diterima dari lembaga masih jauh dari kata layak	Dsn Beji Rt 4 Rw 2 Desa Sengon Kec Bendungan Kab Trenggalek, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sengon	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
941	3311458	TK DHARMA WANITA 1 KARANGAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Peningkatan kesejahteraan	RT 19 RW 05 DS. KARANGAN KEC. KARANGAN, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS PENDIDIKAN
942	3311507	KB BINTANG KEJORA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Karena guru d lembaga kami belum mendapatkan hak yang sama dengan teman teman di Paud formal. Gaji yang d terima dari lembaga masih jauh dari kata layak.	RT.29 RW.12 Desa Depok Kecamatan Bendungan, Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	DINAS PENDIDIKAN
943	3311535	MDT AL KHIDIR	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Belum tercukupi sarpras madin dan kebutuhan operasional madin serta kebutuhan guru madin.	DUSUN TIRTO RT 002 RW 001, Kab. Trenggalek	Watulimo	Karanggandu	DINAS PENDIDIKAN
944	3311541	TK DHARMA WANITA 1 KARANGAN	#HB Bantuan Kinerja Guru Non PNS Jenjang TK/SD/ SMP	Peningkatan kesejahteraan guru	RT 19 RW 05 DS. KARANGAN KEC. KARANGAN, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS PENDIDIKAN
945	3311555	KB AZ ZAHRO I	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan Bantuan hibah uang insentif /tambahan penghasilan/jasa kerja guru PAUD non PNS Pada Satuan PAUD Swasta	Dusun ngrayung RT.07 RW.03 Desa Ngadirenggo kecamatan pogalan kabupaten trenggalek, Kab. Trenggalek	Pogalan	Ngadirenggo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
946	3311567	SPS AL-ATIQ	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik paud	RT 13 RW 03 Dusun Krajan Desa Dukuh Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek	Watulimo	Dukuh	DINAS PENDIDIKAN
947	3311575	DARUSSALAM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih dibutuhkanya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	Dusun Jombok Rt. 026 Rw. 008 Desa Jombok Kecamatan Pule KODEPOS 66362, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS PENDIDIKAN
948	3311632	MAULA EQINTAR NABILA	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	Dusun Pandean RT 06 RW 02 Pandean Durenan, Kab. Trenggalek	Durenan	Pandean	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
949	3311635	HIDAYATUT THULLAB	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih dibutuhkanya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	RT/RW: 11/04 Dsn. Krajan Ds. Sukokidul Kec.Pule Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Sukokidul	DINAS PENDIDIKAN
950	3311671	TK Idhata 3 Pule	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan bantuan hibah uang insentif / tambahan penghasilan / Guru paud Non PNS Pada Satuan Paud Swasta	RT 45 RW 22 Dsn.Bangunsari Desa Pule, Kab. Trenggalek	Pule	Pule	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
951	3311675	SPS KUSUMA SAKTI	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan Honorarium Kinerja	RT 09 RW 04, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PENDIDIKAN
952	3311680	MARMI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	Dusun Masaran Wetan RT 004 RW.002, Kab. Trenggalek	Bendungan	Masaran	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
953	3311690	KB AR-RAHMAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk meningkatkan kesejahteraan Pendidiik	RT. 25 RW. 04 DS. Tasikmadu Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek	Watulimo	Tasikmadu	DINAS PENDIDIKAN
954	3311692	SPS KUSUMA SAKTI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan Insentif Guru/Kepala	RT 09 RW 04, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PENDIDIKAN
955	3311694	SUNYOTO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	Dusun Puthuk RT 019 RW 003 sengon, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sengon	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
956	3311700	AL FALAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih dibutuhkanya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	Rt 50 Rw. 14 Dusun Sidem Desa Jombok Kecamatan pule Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS PENDIDIKAN
957	3311704	KATIRAN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	Dusun Jeruk RT 013 RW 003 srabah, Kab. Trenggalek	Bendungan	Srabah	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
958	3311712	MARSUDI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	Dusun Tawing RT 002 RW 001 sengon, Kab. Trenggalek	Bendungan	Sengon	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
959	3311720	TK Dharma Wanita 2 Joho	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permohonan Bantuan Insentif Guru	RT 35 RW 10, Kab. Trenggalek	Pule	Joho	DINAS PENDIDIKAN
960	3311745	JAIKEM	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	Dusun Jeruk gulung RT 004 RW 002 Surenlor, Kab. Trenggalek	Bendungan	Surenlor	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
961	3311748	Asih	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	Dsn.Srabah 03/02 Bendungan, Kab. Trenggalek	Bendungan	Srabah	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
962	3311752	KATIMAN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kebutuhan hidup dasar bagi Lansia	Dusun Bendungan RT 002 RW 001 Dompyong, Kab. Trenggalek	Bendungan	Dompyong	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
963	3311758	KAMI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	DUSUN PLAPAR RT, 13 RW 07 Desa Cakul, Kab. Trenggalek	Dongko	Cakul	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
964	3311767	NURKOLIK	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	DUSUN SOBO RT 16 RW 03, Ngerdani, Kab. Trenggalek	Dongko	Ngerdani	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
965	3311771	WIDIYA ADI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	DUSUN SOBO RT 15 RW 03, Ngerdani, Kab. Trenggalek	Dongko	Ngerdani	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
966	3311773	GUMER	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	DSN. NGLANCOR RT 29/09 GANDUSARI, Kab. Trenggalek	Gandusari	Gandusari	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
967	3311795	BAHRUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih dibutuhkanya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	Rt. 09 Rw. 03 Dan. Genting Ds. Sukokidul Kec. Pule Kab. Trenggalek 66362, Kab. Trenggalek	Pule	Sukokidul	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
968	3311807	BAITUL 'ILMI	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madin Baitul Ilmi merupakan pusat pendidikan karakter bagi santri di lingkungan Dusun Ngajaran Desa ngrambingan. Namun, saat ini kami mengalami kendala operasional yang serius. Bantuan ini mendesak diperlukan agar kegiatan pembinaan umat tidak terhenti dan kualitas pendidikan keagamaan tetap terjaga sesuai standar. Madin Baitul Ilmi kesulitan untuk menyediakan buku pegangan santri, kitab-kitab dasar, dan modul pembelajaran.	RT. 29 RW. 06 Dusun Ngajaran, Kab. Trenggalek	Panggul	Ngrambingan	DINAS PENDIDIKAN
969	3311832	KB - IT NUURUL FIKRI	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Gaji guru yang sangat dibawah UMR membuat para pendidik kadang goyah dengan pekerjaannya sebagai GURU PAUD, mohon kami dibantu untuk honorarium kinerja guru terutama untuk guru yang sudah mengajar lebih dari 16 tahun.	RT.34 RW.14 DESA BENDOREJO, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	DINAS PENDIDIKAN
970	3311842	NURUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih Dibutuhkannya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	Rt/Rw 35/10 Dusun Ngrandu Desa Joho, Kab. Trenggalek	Pule	Joho	DINAS PENDIDIKAN
971	3311855	KB NAWA KARTIKA VII	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk kesejahteraan guru karena honor guru masih berasal dari SPP atau dari orang tua dan dari dana BOP	Dusun Bangunsari RT 39 RW 20 Desa Pule Kecamatan Pule, Kab. Trenggalek	Pule	Pule	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
972	3311862	KB AZ-ZAHRO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	karena guru dilembaga kami belum mendapatkan hak yang sama dengan teman-teman di PAUD formal, gaji yang di terima masih jauh dari kata layak, pengabdian mereka juga banyak yang lebih dari 18 tahun oleh karena itu kami mengajukan proposal ini,terimakasih.	RT.14 RW.04 DESA DOMPYONG KECAMATAN BENDUNGAN, Kab. Trenggalek	Bendungan	Dompyong	DINAS PENDIDIKAN
973	3311910	TRIMAH	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	RT 2 RW 1, Desa Sumber, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumber	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
974	3311914	MDT Ula DARUSSALAM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih Dibutuhkanya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	RT 008 / RW 002 Dusun Krajan Desa Karanganyar Kecamatan Pule, Kab. Trenggalek	Pule	Karanganyar	DINAS PENDIDIKAN
975	3311915	MARDI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	RT.06 RW.02 DSN KRAJAN, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumber	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
976	3311933	SPS TUNAS HARAPAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Dengan segala kerendahan hati kami menyadari dalam penyusunan proposal ini tidak lepas dari kekurangan maupun kesalahan.	Rt 1 Rw 1 Karang Tengah , Kab. Trenggalek	Pogalan	Wonocoyo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
977	3311949	SPS ANUGERAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Hibah Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta sejumlah 2 orang x 12 bulan x 500.000 =12.000.000	RT 03 RW 01 Dusun Krajan Desa Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PENDIDIKAN
978	3311953	SPS ANUGERAH	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Hibah Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta sejumlah 2 orang x 12 bulan x 200.000 = 4.800.000	RT 03 RW 01 Dusun Krajan Desa Dongko, Kab. Trenggalek	Dongko	Dongko	DINAS PENDIDIKAN
979	3311965	MDT Ula QOMARUL HIDAYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih dibutuhkannya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	Dusun Ponggok RT. 28 RW. 04, Kab. Trenggalek	Pule	Karanganyar	DINAS PENDIDIKAN
980	3312003	MIFTAHUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih dibutuhkanya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	RT 06 RW 03 Dsn Krajan Ds/Kec. Pule, Kab. Trenggalek	Pule	Pule	DINAS PENDIDIKAN
981	3312024	TK DW 4 MUNJUNGAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru di lembaga kami sudah mengabdi lama tetapi hak dan kesejahteraan belum terpenuhi.	RT. 008 RW. 002 Dusun Krajan Desa Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Munjungan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
982	3312072	MDT Ula DARUL MA'RIFAT	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih dibutuhkanya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	Rt. 34 Rw.14 Dsn. Karangrejo, Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PENDIDIKAN
983	3312078	SUNARTI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	RT.16 RW.04 DSN PINGGIRSARI KARANGAN, Kab. Trenggalek	Karangan	Karangan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
984	3312092	SPS HIDAYATUT THOLIBIN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Lembaga SPS Hidayatut Tholiin Masih Memerlukan Dana Hibah Bantuan iNSENTIF /tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non pns Pada Satuan PAUD Swasta Sejumlah 2 orang x 12 bulan x500.000 =12.000.000.Karena minimnya pendapatan dan kurangnya kesejahteraan guru paud di lembaga kamisehingga kami mohon bantuan hibah	Dsn Krajan RT 06 RW 01Desa Ngerdani, Kab. Trenggalek	Dongko	Ngerdani	DINAS PENDIDIKAN
985	3312150	WARITUN	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	Dusun Jambe RT 007 RW 002 Desa Botoputih Bendungan, Kab. Trenggalek	Bendungan	Botoputih	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
986	3312156	BETA RIGALITA	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	Dusun Slorok RT 06 RW 02 Nglebeng pANGGUL, Kab. Trenggalek	Panggul	Nglebeng	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
987	3312190	KB AZ-ZAITUN	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Permasalahan yang dihadapi satuan PAUD swasta adalah keterbatasan anggaran untuk memberikan tambahan insentif kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN. Hal ini berdampak pada kesejahteraan dan semangat kerja mereka. Oleh karena itu, diusulkan adanya Bantuan Hibah Uang untuk membantu menambah penghasilan atau jasa kerja PTK Non ASN.	Rt 40 Rw 10 Desa ngadimulyo, Kab. Trenggalek	Kampak	Ngadimulyo	DINAS PENDIDIKAN
988	3312193	TK Hidayatul Atfal Watulimo	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Masih rendahnya tingkat kesejahteraan guru dibawah UMR (kususnya guru paud swasta yang belum sebanding dengan beban kerja dan biaya hidup saat ini).	Dusun Krajan RT 09 RW 03, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watulimo	DINAS PENDIDIKAN
989	3312249	SPS KASIH IBU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Peningkatan kesejahteraan pendidik PAUD Swasta yang masih kurang dan belum mendapat honor yang layak	RT. 13 RW. 04 Desa Karanggandu Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek	Watulimo	Karanggandu	DINAS PENDIDIKAN
990	3312264	SITI ROISAH	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	Dsn Widoyoko RT 20/03 Kamulan , Kab. Trenggalek	Durenan	Kamulan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
991	3312268	SDIT NUURUL FIKRI SUKOREJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Dana yang dihimpundari masyarakat dan atau wali murid tidak mencukupiuntuk memenuhi pembayaran honorarium guru/karyawan.	RT 29 RW 14 Ds. Sukorejo Kec. GandusariKab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PENDIDIKAN
992	3312273	MARKINAH	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	Dusun Pandean RT 01 RW 01 DESA PANDEAN DURENAN, Kab. Trenggalek	Durenan	Pandean	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
993	3312278	BAITUL MUTTAQIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih dibutuhkanya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	Rt 016 Rw 006 Dusun Ponggok Desa Pakel, Kab. Trenggalek	Pule	Pakel	DINAS PENDIDIKAN
994	3312279	MARYATI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	Dusun Pandean RT 01 RW 01 PANDEAN DURENAN, Kab. Trenggalek	Durenan	Pandean	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
995	3312302	ALYA KHIKMAH MAHSUNAH	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	RT 16 RW RW 03 Desa Sobo Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Sobo	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
996	3312314	SUWITO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	RT 03 RW 01 Dsn. Sentul SUKOSARI, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sukosari	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
997	3312322	MADIN MIFTAHUL HIDAYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madin miftahul hidayah Masih memerlukan bantuan biaya operasional untuk pelaksanaan pendidikan keagamaan. Seiring bertambahnya jumlah santri,kebutuhan operasional seperti honor tenaga pengajar,pengadaan sarana pembelajaran,dan pemeliharaan fasilitas semakin meningkat.sementara pendanaan yang tersedia masih terbatas.sehingga diperlukan bantuan progam BPPDGS TA 2027 guna mendukung kelancaran dan peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar dimadrasah Diniyah Miftahul hidayah	Rt 17 rw 06 dusun sobo desa salamwates kecamatan dongko kabupaten trenggalek, Kab. Trenggalek	Dongko	Salamwates	DINAS PENDIDIKAN
998	3312336	MOHAMMAD NUR HAKIM	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	Dusun Slorok RT 11 RW 03 Nglebeng, Kab. Trenggalek	Panggul	Nglebeng	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
999	3312352	MI Miftahul Huda Jati	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	insentifnya tidak pasti sehingga dapat menurunkan semangat para guru dalam proses pembelajaran	RT 20 RW 06 Dusun Ponggok, Kab. Trenggalek	Karangan	Jati	DINAS PENDIDIKAN
1000	3312359	SALEKO	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	Dusun Bakalan RT 044 / RW 012, DESA JOMBOK, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1001	3312364	TK Dharma Wanita 2 Tawing	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru di lembaga kami sudah mengabdi lama tetapi hak dan kesejahteraan belum terpenuhi	RT 02 RW 01 Dusun Tawing Krajan Desa Tawing Kecamatan Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Tawing	DINAS PENDIDIKAN
1002	3312365	AINUN PUTRI NUR AZIZAH	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kebutuhan Hidup dasar bagi Disabilitas	DUSUN SIDEM RT 056 / RW 016, DESA JOMBOK, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1003	3312373	IGHO AKMAL HISYAM	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	RT.02 RW.01 Dusun Panjen sURUH, Kab. Trenggalek	Suruh	Suruh	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1004	3312377	NUROKHIM	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	RT 23 RW 06 Dusun Ngares, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngares	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1005	3312382	KRISNAWATI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Kebutuhan hidup dasar bagi Disabilitas	RT 01 RW 01 Dusun Telasih Desa Parakan, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Parakan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1006	3312390	IMAM IRWANI	#HB Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia	Disabilitas dan lansia di luar penerima bantuan lainnya (masuk dalam DTSEN 1 s.d. 5)	RT.15 RW.05 Kel. Ngantru Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1007	3312393	MAMBAUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih dibutuhkannya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Swasta	RT.12 RW.04 Dusun Krajan Desa Joho, Kab. Trenggalek	Pule	Joho	DINAS PENDIDIKAN
1008	3312410	KB TUNAS MUDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	kesejahteraan pendidik yang belum memadai sehingga perlu adanya peningkatan kesejahteraan pendidik dengan adanya bantuan tambahan penghasilan	RT 35 RW 10, Kab. Trenggalek	Pule	Joho	DINAS PENDIDIKAN
1009	3312414	MDT Darul Hikam	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Secara riil, Madin Farul Hikam masih memiliki keterbatasan fasilitas pembelajaran. Ruang belajar yang digunakan belum sepenuhnya representatif. Ketersediaan meja, kursi, papan tulis, bahan ajar seperti kitab, buku penunjang serta alat bantu pembelajaran masih terbatas, sehingga proses belajar mengajar belum dapat berjalan secara optimal. Selain itu tenaga pendidik, para ustadz dan ustadzah yang mengabdi di Madin Darul Hikam belum mendapatkan kesejahteraan yang memadai.	Dusun Nglayur RT.046 RW.022, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PENDIDIKAN
1010	3312423	Tarbiyatul Mubtadi-in	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah kesulitan membiayai kegiatan operasional harian, seperti administrasi, pembelian bahan ajar, dan pemeliharaan fasilitas, serta perlunya dana tambahan untuk operasional lembaga pendidikan agar pembelajaran tetap berjalan.	Dusun Karangrejo Rt 07/ Rw 04 Desa Sumbergayam Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Durenan	Sumbergayam	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1011	3312450	RIYADLOTUL UQUL	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih dibutuhkanya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	RT. 37 RW. 19 Dusun Bangunsari , Kab. Trenggalek	Pule	Pule	DINAS PENDIDIKAN
1012	3312451	KB MENTARI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	untuk kegiatan operasional lembaga masih belum mencukupi	RT 08 RW 03 Dusun Slorok Desa Nglebeng, Kab. Trenggalek	Panggul	Nglebeng	DINAS PENDIDIKAN
1013	3312463	MDT Ula AL ISLAMIYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	1. Masih Dibutuhkanya Bantuan Penyelenggaraan PendidikanDiniyah dan Guru Swasta 2. Operasional Madrasah Diniyah Al Islamiyah yang masih sangatterbatan	RT 025 / RW 003 Dusun Ponggok Ds.Karanganyar,Kec.Pule, Kab. Trenggalek	Pule	Karanganyar	DINAS PENDIDIKAN
1014	3314396	BAZNAS KABUPATEN TRENGGALEK	#HB Hibah kepada Lembaga/Organisasi terkait Kesejahteraan Sosial yang bermanfaat untuk daerah	BANZAS Kabupaten Trenggalek merupakan Lembaga pemerintah non structural Pemerintah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya melaskanakan tugas pengelolaan dana ZIS yang kemudian di salurkan dalam berbagai program dalam upaya membantu pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Konsekuensi atas pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah pembebanan biaya operasional BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada APBD, sesuai dengan klausul pada UU No. 23 tahun 2011 pasal 30 dan PP No. 14 tahun 2014 pasal 67	Jl. Pemuda Nomor 01 Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	SEKRETARIAT DAERAH

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1015	3324926	TK TUNAS BANGSA WATULIMO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Honorarium yang diberikan oleh lembaga masih jauh dari layak dibanding dengan pengabdian dan juga honorarium yang didapat masih jauh dari UMR kabupaten Trenggalek	Dusun Plapar RT 16 RW 06, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watulimo	DINAS PENDIDIKAN
1016	3324927	PKBM SUKA MAJU	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	Latar belakang pengajuan BOP Daerah untuk PKBM berfokus pada pemenuhan hak pendidikan warga, mengatasi putus sekolah, dan meningkatkan keterampilan masyarakat, terutama bagi mereka dengan keterbatasan ekonomi atau akses. Dana ini krusial untuk operasional, sarana prasarana, serta peningkatan kualitas pembelajaran nonformal khususnya di PKBM Suka Maju Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek.	RT.11 RW.02 Desa Pakel, Kab. Trenggalek	Watulimo	Pakel	DINAS PENDIDIKAN
1017	3324943	MADIN ROUDLOTUTHOLIBIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	kurangnya sarana prasarana, minimnya insentif guru madin, dan kurangnya pembiayaan dalam operasional madin.	RT 23 RW 08 Dusun Gandu, Kab. Trenggalek	Watulimo	Karanggandu	DINAS PENDIDIKAN
1018	3324952	KB TUNAS KASIH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Honor Guru KB Tunas Kasih masih rendah	JL. Dr. Soetomo Nomor 39 Ngantru Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1019	3324961	TK DHARMA WANITA 1 SURUH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Mengingat kondisi keuangan di lembaga TK DHARMA WANITA 1 SURUH yang tidak mencukupi dengan jumlah guru 2 orang yang masih berstatus GTY dengan ijasah masih SMA dan D2 sehingga masih memerlukan bantuan uang insentif dari pemerintah.	RT 15 RW 06 DESA SURUH, KECAMATAN SURUH, Kab. Trenggalek	Suruh	Suruh	DINAS PENDIDIKAN
1020	3324964	DARUSSALAM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Saat ini sarana belajar masih kurang layak dan terbatas, santri duduk lesehan, pengadaan meja, kursi , papan tulis, dan lemari buku sangat agar meningkatkan motivasi belajar santri dalam bidan agama Islam. Bantuan operasional yang meliputi insentif tenaga pendidik (guru ngaji) dan pembelian modul pembelajaran,Kitab dan ATK sangat kami harapkan dengan tujuan untuk mempertahankan eksistensi madrasah, dan memastikan keberlangsungan pendidikan agama	Dusun Mendung Desa Banjar, Kab. Trenggalek	Panggul	Banjar	DINAS PENDIDIKAN
1021	3324971	KB AISYIYAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	PERMOHONAN BANTUAN HIBAH UANG INSENTIF / TAMBAHAN PENGHASILAN / JASA KERJA GURU PAUD NON PNS PADA SATUAN PAUD SWASTA	RT 04 RW 02 Desa Pucanganak, Kab. Trenggalek	Tugu	Pucanganak	DINAS PENDIDIKAN
1022	3324982	TK KARTINI TASIKMADU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru tersebut belum mendapatakan tunjangan profesi guru	Jln. RAYA PANTAI PRIGI RT 01 RW 01 Ds. Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Watulimo	Tasikmadu	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1023	3325031	SPS AL KAUTSAR	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	-honor yang diterima guru paud tidak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dilaksanakan -untuk meningkatkan kualitas pendidik -guru paud swasta tidak bisa sertifikasi	RT 14 RW 04 DESA JATI KECAMATAN KARANGAN, Kab. Trenggalek	Karangan	Jati	DINAS PENDIDIKAN
1024	3325054	KB AL MUBAROK	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru paud hanya menerima honorarium yang sangat minim dan belum memenuhi standar kelayakan hidup. Penghasilan yang diterima seringkali hanya bersumber dari iuran peserta didik yang jumlahnya terbatas, sehingga belum mampu mencukupi kebutuhan dasar guru.	Dusun Mojo RT 07 RW 04 Desa Sumberdadi Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Sumberdadi	DINAS PENDIDIKAN
1025	3325061	TK PERTIWI PRIGI	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	guru belum sertifikasi dan belum mendapat gaji yang layak dari yayasan sehingga kesejahteraan guru masih kurang.	Rt 27 Rw 06 Desa Prigi Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek , Kab. Trenggalek	Watulimo	Prigi	DINAS PENDIDIKAN
1026	3325070	SPS NUANSA CERIA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Masih kurang layaknya Honorarium yang diberikan oleh lembaga dan masih jauh dari UMR kabupaten Trenggalek	Dusun Karangtuwo RT 22 RW 04, Kab. Trenggalek	Watulimo	Gemaharjo	DINAS PENDIDIKAN
1027	3325075	MI DARUSSALAM GUPPI MLINJON	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Insentif cairnya tidak pasti sehingga dapat menurunkan semangat guru dalam mengajar.	RT 27 RW 06 Dusun Pengkol, Kab. Trenggalek	Suruh	Mlinjon	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1028	3325081	BAITUL QODAR	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	rendahnya dana honor guru di Madin Baitul Qodar	RT 13, RW 05, Dsn. Gerbo, Kab. Trenggalek	Tugu	Ngepeh	DINAS PENDIDIKAN
1029	3325083	TK DHARMA WANITA KERJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pembaharuan Proposal Insentif	RT.03 RW.01 DESA KERJO, Kab. Trenggalek	Karangan	Kerjo	DINAS PENDIDIKAN
1030	3325107	MDT BAHRUL ULUM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah kami memiliki peran strategis dalam pembinaan moral dan keagamaan masyarakat, namun masih menghadapi keterbatasan dalam aspek sarana prasarana, pembiayaan operasional, serta peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, bantuan operasional ini sangat diperlukan sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah dalam memperkuat keberlangsungan dan kualitas pendidikan keagamaan di tingkat masyarakat.	Dsn. Krajan RT. 011 RW. 004, Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Durenan	Ngadisuko	DINAS PENDIDIKAN
1031	3325214	TPA AISYIYAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Honorarium dibawah UMK sehingga mengajukan usulan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja 4 Guru untuk peningkatan kualitas pendidik PAUD.	Jalan P Hidayatullah No 20 RT 18 RW 05 Surodakan, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Surodakan	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1032	3325248	TK DHARMA WANITA 5 PRAMBON	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini pada lembaga TK Dharma Wanita 5 Prambon Desa Prambon Kecamatan Tugu mohon berkenan kepada Bapak untuk memberikan Dana Hibah uang Insentif / tambahan penghasilan /jasa guru PAUD Non PNS pada satuan PAUD Swasta yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2027. Adapun dana yang kami usulkan untuk keperluan pendidik dengan nominal Rp. 12.000.000	RT 49 RW 10 DSN.SOOKO PRAMMBON TUGU TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Tugu	Prambon	DINAS PENDIDIKAN
1033	3325293	KB PERMATA BUNDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	kurangnya kesejahteraan pendidik PAUD swasta	RT 13 RW 03 Dusun Ponggok Desa Besuki kecamatan Munjungan kab Trenggalek, Kab. Trenggalek	Munjungan	Besuki	DINAS PENDIDIKAN
1034	3325298	KB AL HUDA	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Kemampuan lembaga terbatas dalam pemberian honorarium pendidik, untuk itu kami mengajukan permohonan Bantuan Insentif/Tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	RT 38 RW 11 Desa Karangrejo, Kab. Trenggalek	Kampak	Karangrejo	DINAS PENDIDIKAN
1035	3325357	KB RETNO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Masih adanya guru di lembaga kami yang telah mengabdi lebih dari 20 tahun dan belum mendapat hak yang sama dengan lembaga paud formal. Oleh karenanya kami mengajukan bantuan untuk guru tersebut.	DUSUN SOKO DESA DEPOK RT 03 RW 01, Kab. Trenggalek	Bendungan	Depok	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1036	3325361	KB HIMMATANA	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	hibah dana bantuan khusus keuangan (BKK)/honorariun kenerja kepala/guru TK/PAUD Non ASN pada lembaga kami masih 2 orang yang mendapatkan, mohon untuk diberikan bantuan hibah kepada seluruh guru yang berjumlah 4 orang	RT 16 RW 05 Ds SUMBERINGIN, Kab. Trenggalek	Karangan	Sumberingin	DINAS PENDIDIKAN
1037	3325369	KB AL HIKAM	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Honorarium Yang diterima dari lembaga masih kurang layak dan masih jauh dari UMR kabupaten Trenggalek	Dusun Blimbing RT 09 RW 03, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watulimo	DINAS PENDIDIKAN
1038	3325389	MDT AL MA'RIFAH DARUNNAJAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	1. Rendahnya insentif guru yang hanya bersumber dari iuran SPP santri yang minim, yang bahkan seringkali menunggak. 2. Kuantitas siswa/siswi yang selalu bertambah setiap tahun tidak sebanding dengan jumlah ruang kelas, sehingga satu ruangan digunakan untuk dua kelas sekaligus, yang mengganggu konsentrasi belajar. 3. Madrasah belum memiliki sarana mebeler (meja-kursi) yang layak bagi santri, sehingga KBM dilakukan lesehan, mengakibatkan rendahnya kenyamanan dan konsentrasi belajar.	RT 12 RW 05 KELUTAN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Kelutan	DINAS PENDIDIKAN
1039	3325402	TK PGRI Watuagung	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Guru tersebut belum mendapatkan tunjangan profesi guru	RT 031 RW 009 Desa Watuagung Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Watulimo	Watuagung	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1040	3325475	TK DHARMA WANITA 2 BENDOROTO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru di lembaga kami sudah mengabdi lama tetapi hak dan kesejahteraan belum terpenuhi	RT 14 RW 03 Dusun Podang Desa Bendoroto, Kab. Trenggalek	Munjungan	Bendoroto	DINAS PENDIDIKAN
1041	3325486	KB HARAPAN INSANI	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Penghasilan dan kesejahteraan di KB Harapan Insani masih rendah	RT 22 RW 07 DUSUN GLADAG DESA PAKEL, Kab. Trenggalek	Pule	Pakel	DINAS PENDIDIKAN
1042	3325504	THORIQUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih Sangat dibutuhkannya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	Jl. Kerjo - Tumpuk RT.010 RW.002 Dusun Krandon, Kab. Trenggalek	Karangan	Kerjo	DINAS PENDIDIKAN
1043	3325525	TK AL HIDAYAH 1 SAWAHAN	#HB Bantuan honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non ASN pada Satuan PAUD Swasta	Guru tersebut belum mendapatkan tunjangan profesi guru.	DSN. NGRANCAH RT.016 RW.006 DESA SAWAHAN, Kab. Trenggalek	Watulimo	Sawahan	DINAS PENDIDIKAN
1044	3325542	NURUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Belum tercukupinya biaya operasional Madin Nurul Huda Desa Gayam. Mengingat pentingnya biaya operasional bagi madin untuk pembelian seperti kitab dan lain - lain.	DUSUN KRAJAN RT 005 RW 002 DESA GAYAM KECAMATAN PANGGUL, Kab. Trenggalek	Panggul	Gayam	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1045	3325565	TK PERTIWI TASIKMADU	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Kesejahteraan dan gaji/honor guru TK non pns di TK Pertiwi Tasikmadu masih rendah	rt 22 rw 04 Dusun Gares, Kab. Trenggalek	Watulimo	Tasikmadu	DINAS PENDIDIKAN
1046	3325607	AL IMDAD	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah Al Imdad di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	RT/RW 23/01 Dsn Bangunsari, Kab. Trenggalek	Munjungan	Bangun	DINAS PENDIDIKAN
1047	3325619	TK DHARMAWITA 1 TIMAHAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Permasalahan yang dihadapi Satuan PAUD Swasta adalah keterbatasan anggaran untuk memberikan insentif tambahan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN. Kondisi ini berdampak pada kesejahteraan dan motivasi kerja. Oleh karena itu, diusulkan Bantuan Hibah Uang guna menunjang tambahan penghasilan/jasa kerja PTK Non ASN	RT 02 RW 01, Kab. Trenggalek	Kampak	Timahan	DINAS PENDIDIKAN
1048	3325631	TK DHARMA WANITA 2 SALAMREJO	#HB Bantuan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD/Sederajat	MEMBUTUHKAN BANTUAN TOILET / MCK	RT.09 RW.03 DESA SALAMREJO, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1049	3325651	TK DHARMA WANITA 2 SALAMREJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Pembaharuan Laporan Permohonan Bantuan Insentif / tambahan jasa Guru	RT.09 RW.03 DESA SALAMREJO, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PENDIDIKAN
1050	3325668	DARUSSALAM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	madrasah kurang dalam memberikan honor ustadz dan ustadzah (belanja pegawai) dan madrasah kurang dalam membiayai belanja barang (hal ini sudah di rinci di dalam RAB)	Rt 17 Rw 06 Dusun Brongkah , Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	DINAS PENDIDIKAN
1051	3325669	Darul Falah	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah masih kesulitan dalam memberi maisah guru dan juga kekurangan sarana prasarana seperti bangku ngaji,	RT 22 RW 05 DESA KARANGSOKO, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Karangsoko	DINAS PENDIDIKAN
1052	3325676	TK DHARMA WANITA 3 KARANGREJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	karena guru dilembaga kami belum mendapatkan hak yang layak	RT 49 RW 15 DESA KARANGREJO, Kab. Trenggalek	Kampak	Karangrejo	DINAS PENDIDIKAN
1053	3325681	TK DHARMA WANITA 5 MLINJON	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Penghasilan dan kesejahteraan guru di TK Dharma Wanita 5 Mlinjon masih rendah	DUSUN SELOREJO RT.30 RW.07 DESA MLINJON, Kab. Trenggalek	Suruh	Mlinjon	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1054	3325699	TK DHARMA WANITA 2 NGEPEH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pendidik dalam mendukung pelaksanaan program pendidikan anak usia dini pada lembaga TK Dharma Wanita 2 Ngepeh Tugu	DUSUN GERBO RT 15 RW 06 DESA NGEPEH KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Tugu	Ngepeh	DINAS PENDIDIKAN
1055	3325705	MIFTAKHUL HIDAYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih dibutuhkannya bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah dan guru swasta	RT 24 RW 10 Dusun Ngepring , Kab. Trenggalek	Pule	Sidomulyo	DINAS PENDIDIKAN
1056	3325726	MI ISLAMIYAH NGLINGGIS	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH DAN GURU SWASTA (BPPDGS)	RT. 05 RW. 02 Dsn. Pacar Desa Nglinggis Kec. Tugu Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Tugu	Nglinggis	DINAS PENDIDIKAN
1057	3325762	AL MUHAJIRIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih dibutuhkannya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	RT 13 RW 07 DUSUN GUGUR, Kab. Trenggalek	Pule	Pule	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1058	3325811	Riadlotul Uqul	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Madrasah Diniyah RIADLOTUL UQUL di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	rt 15 rw 05 desa kedunglurah, Kab. Trenggalek	Pogalan	Kedunglurah	DINAS PENDIDIKAN
1059	3325818	KB AL MUJAHIDIN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	kurangnya kesejahteraan pendidik PAUD swasta	RT 04 RW 02 Dusun Bangunsari Desa Bangun Kecamatan Munjungan, Kab. Trenggalek	Munjungan	Bangun	DINAS PENDIDIKAN
1060	3325869	HIDAYATUT THULLAB	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Kendala kurangnya pembiayaan Operasional Madin	RT 22 RW 04 DSN SENDANG KAMULYAN DS KAMULAN , Kab. Trenggalek	Durenan	Kamulan	DINAS PENDIDIKAN
1061	3325952	sps kartika	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	INSENTIF	RT 16 RW 03 DUSUN NGLEBAN, Kab. Trenggalek	Dongko	Watuagung	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1062	3325973	TK ISLAM TERPADU NUURUL FIKRI SUKOREJO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru adalah ujung tombak pendidikan. Saat ini, penghasilan guru non sertifikasi masih jauh dari memadai, sementara tanggung jawab mengajar sangat besar. Pemberian insentif diharapkan dapat meningkatkan motivasi, dedikasi, dan kesejahteraan mereka dalam mendidik siswa, sebagai bentuk apreasiasi atas dedikasi yang tinggi.	RT. 029 RW. 014 Desa Sukorejo Kec. Gandusari, Kab. Trenggalek	Gandusari	Sukorejo	DINAS PENDIDIKAN
1063	3325997	ROUDLOTUL MUBTADIIN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah Roudlotul Mubtadiin di Munjungan-Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia."	RT. 49 RW. 10 Dusun Gunung Kembar Desa Tawing., Kab. Trenggalek	Munjungan	Tawing	DINAS PENDIDIKAN
1064	3326012	AL HIDAYAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Kurangnya biaya Operasional dalam kegiatan belajar mengajar	RT 025 RW 005 Dusun Sonokulon Desa Ngrambingan Kecamatan Panggul, Kab. Trenggalek	Panggul	Ngrambingan	DINAS PENDIDIKAN
1065	3326016	TK Dharma Wanita Gemaharjo	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Guru yang bersangkutan belum memiliki tunjangan dengan masa kerja 3 tahun	Dusun Gemaharjo Rt.11 / Rw.03 Desa Gemaharjo , Kab. Trenggalek	Watulimo	Gemaharjo	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1066	3326027	TK DHARMA WANITA 2 SURUH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Penghasilan dan kesejahteraan guru TK Dharma Wanita 2 Suruh masih rendah	RT.16 RW.06 DESA SURUH KECAMATAN SURUH, Kab. Trenggalek	Suruh	Suruh	DINAS PENDIDIKAN
1067	3326040	MIFTAHUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	"Madrasah Diniyah Miftahul Huda Dsn. Domerto, Ds. Tawing, Kec. Munjungan di Trenggalek berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Namun, keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama. Oleh karena itu, kami mengajukan dana hibah dari Pemerintah Kab. Trenggalek untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan akses yang lebih baik bagi siswa. Dengan dukungan ini, kami dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan mencetak generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mul	RT. 33, RW. 07, Dsn. Domerto, Kab. Trenggalek	Munjungan	Tawing	DINAS PENDIDIKAN
1068	3326044	KBIT NUURUL FIKRI KAMPAK	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	karena pendidik dilembaga perlu diperhatikan kesejahteraannya pendapatan masih jauh dari UMR Trenggalek	RT 10 RW 03 Ds.Bendoagung, Kab. Trenggalek	Kampak	Bendoagung	DINAS PENDIDIKAN
1069	3326045	KB AL HIDAYAH 1	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Gaji guru sangat minim jauh dibawah UMR	Jalan Basuki Rahmad No. 28 Trenggalek, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Ngantru	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1070	3326073	KB AISIYAH	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	karena minimnya honorarium bagi pendindik PAUD kami mengajukan permohonan insentif tambahan dari daerah	JL. MIM KAMULAN RT. 06 RW. 02 DESA KAMULAN KEC. DURENAN KAB. TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Durenan	Kamulan	DINAS PENDIDIKAN
1071	3326074	SDIT NUURUL FIKRI POGALAN	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru Swasta jenjang Pendidikan Dasar SD/MI/SMP/MTs	Guru adalah ujung tombak pendidikan. Saat ini, penghasilan guru non sertifikasi masih jauh dari memadai, sementara tanggung jawab mengajar sangat besar. Pemberian insentif diharapkan dapat meningkatkan motivasi, dedikasi, dan kesejahteraan mereka dalam mendidik siswa, sebagai bentuk apreasiasi atas dedikasi yang tinggi.	RT 34 RW 14 Dusun Kranding Desa Bendorejo Kec. Pogalan Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pogalan	Bendorejo	DINAS PENDIDIKAN
1072	3326097	THORIQUL JANNAH	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Di Madrasah kami masih kurang dana buat membayar guru, beli ATK dan sarana lain seperti alat kebersihan masih kurang. untuk itu kami mengharapkan dana BOP Madin ini buat penunjang kebutuhan tersebut.	RT 23 RW 06 DUSUN PUCUNG DESA MUNJUNGAN KEC. MUNJUNGAN, Kab. Trenggalek	Munjungan	Munjungan	DINAS PENDIDIKAN
1073	3326132	MDT AL MUSLIMUN	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	pengajuan proposal bosda madin	RT 18 RW 09 Dusun Oro Oro Ombo Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pogalan	Pogalan	DINAS PENDIDIKAN
1074	3326166	SABILUL HUDA	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Keterbatasannya dana operasional untuk membiayai kegiatan belajar mengajar serta kurangnya sarana prasarana yang masih sangat kurang, dan juga kurangnya kesejahteraan ustadz dan ustadzahnya	RT O9 RW 05 DUSUN BANARAN, TERBIS, Kab. Trenggalek	Panggul	Terbis	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1075	3326193	Tarbiyatul Athfal	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	UNTUK PEMBIAYAAN MADIN	TRENGGALEK, Kab. Trenggalek	Watulimo	Prigi	DINAS PENDIDIKAN
1076	3326315	MADIN MIFTAHUL MUSLIM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Karena Sangat minimnya anggaran yg ada di lembaga sehingga tidak mampu/tidak mencukupi apabila di gunakan untuk seluruh kegiatan operasional yg ada di madrasah antara lain: Honor tenaga pendidik dan kependidikan, insentif pengelola, biaya operasional madrasah, dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini peran pemerintah terkait pembiayaan kegiatan pembelajaran yang ada di lembaga madrasah diniyah sangatlah di perlukan untuk menjaga konsistensi keberlangsungan pembelajaran atau pendidikan di madrasah.	RT 35 RW 09 DESA JATI, Kab. Trenggalek	Karangan	Jati	DINAS PENDIDIKAN
1077	3326351	DARUSSALAM	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih sangat dibutuhkan program bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyyah dan guru swasta BPPDGS bagi madrasah Diniyyah yang ada di Kab. Trenggalek	DUSUN SALAM SELATAN RT 13 RW 05, Kab. Trenggalek	Karangan	Salamrejo	DINAS PENDIDIKAN
1078	3326418	Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula Hidayatulloh	#HB Hibah Bantuan Operasional Pendidikan Madrasah Diniyah (BOP MADIN)	Masih dibutuhkannya Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta	Rt. 36 Rw. 10 Dsn. Bakalan Ds. Jombok Kec. Pule Kab. Trenggalek, Kab. Trenggalek	Pule	Jombok	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	PENGUSUL	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH
1079	3326428	SPS AZ ZAHRO	#HB Bantuan Insentif/tambahan penghasilan/jasa kerja Guru PAUD Non PNS pada Satuan PAUD Swasta	Honor Guru dibawah UMK ,Peningkatan kualitas pendidikan di Paud	RT 04 RW 01 DESA PARAKAN, Kab. Trenggalek	Trenggalek	Parakan	DINAS PENDIDIKAN

LAMPIRAN VII

DAFTAR USULAN KEGIATAN
MELALUI PEMBIAYAAN APBD PROV. JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2027

RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2027

DAFTAR USULAN KEGIATAN
MELALUI PEMBIAYAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2027

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
1	3356831	#BK BUAIAN Pendampingan Bumil Risti	*Usulan ditolak karena tidak masuk lokus hasil Laporan Tahun 2025 ada 2926 (29,35%) ibu Hamil Risiko Tinggi dan ibu hamil dengan komplikasi sebanyak 2059 (107,54%). Dari data dan fakta yang ada dapat disimpulkan bahwa 1. masih minimnya pengetahuan ibu dan keluarga dalam meningkatkan status kesehatannya selama kehamilan serta mencegah resiko yang lebih parah lagi 2. masih terjadinya komplikasi pada waktu kehamilan , persalinan dan nifas.	Dinas Kesehatan PPKB kabupaten Trenggalek untuk 22 Puskesmas, Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS KESEHATAN
2	3357082	#BP Pembinaan Eco Pesantren	Belum Optimalnya upaya pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pondok pesantren	Pondok Peantren "ANWARUL HAROMAIN" RT 06/02 Dsn Baruklinting Desa Baruharjo Kec. Durenan Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Durenan	Baruharjo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	3357154	#BK BUAIAN Pendampingan Bumil KEK dalam pencegahan stunting	*Usulan ditolak karena tidak masuk lokus Hasil Laporan dari SIGIZI Tahun 2025 ada 929 (13,32%) ibu Hamil KEK dan sejumlah 2075 (6,28%) balita Stunting.sedangkan Bayi BBLR yang berat badannya kurang dari 2500 gram sebanyak 382 bayi (6,07 %) anak. Dari data dan fakta yang ada disimpulkan : 1. masih minimnya pengetahuan ibu dalam penentuan status kesehatannya selama kehamilan 2. masih adanya resiko yang terjadi pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan PPKB Trenggalek untuk 22 Puskesmas, Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS KESEHATAN
4	3357189	#BP Pembinaan Eco Pesantren	Belum Optimalnya upaya pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pondok pesantren	Pondok Pesantren "AL KAUTSAR"RT 02 RW 01 Durenan, Durenan, Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Durenan	Durenan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
5	3357207	#BK Sajadah (Santri Jatim Sehat dan Berkah)	1. Masih adanya pondok pesantren yang belum bersedia didirikan poskestren. 2. Angka kesakitan (scabies, dbd, diare) selalu terjadi di lingkungan ponpes. 3. Kebiasaan merokok pada santri masih sangat sulit diatasi 4. Kebersihan perorangan santri masih rendah	Dinas Kesehatan PPKB untuk 3 pondok pesantren : Ponpes Darussalam (Ds. Baruharjo, Kec. Durenan), Ponpes Al Falah (Ds. Kedunglurah, Kec. Pogalan), Ponpes Darul Muttaqin (Ds. Karangan, Kec. Karangan), Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS KESEHATAN
6	3357216	#BP Pembinaan Eco Pesantren	Belum Optimalnya upaya pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pondok pesantren	Pondok Pesantren "DARISSULAIMANIYYAH" RT 11 RW 02 Kamulan, Durenan, Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Durenan	Kamulan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	3357258	#BP Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi sesuai Lampiran 2 PerMen PUPR 14/PRT/M/2015	Saluran Primer Tawing Hulu DI Widoro mengalami kerusakan.	Desa Widoro, Kecamatan Gandusari, Provinsi Jawa Timur	Gandusari	Widoro	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
8	3357295	#BP Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi sesuai Lampiran 2 PerMen PUPR 14/PRT/M/2015	Saluran Primer BTW 8 DI Widoro mengalami kerusakan	Desa Kedunglurah, Kecamatan Pogalan, Provinsi Jawa Timur	Pogalan	Kedunglurah	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
9	3357328	#BP Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi sesuai Lampiran 2 PerMen PUPR 14/PRT/M/2015	Saluran Primer hulu hilir BTW 9 DI Widoro mengalami kerusakan	Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan, Provinsi Jawa Timur	Pogalan	Kedunglurah	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
10	3357341	#BK - BPPDGS	1) Belum adanya belanja Operasional pada Madrasah Diniyah dalam melaksanakan pembelajaran; 2) Ustadz/Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula/Wustho dan Guru Swasta SD/MI/Salafiyah Ula/SMP/MTs/Salafiyah Wustho Swasta tidak menerima penghasilan dari pemerintah	Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, yang akan disalurkan kepada 256 Lembaga Madin (calon penerima terlampir) dan Guru Swasta di 53 Lembaga SD/MI, SMP/MTs (calon penerima terlampir) tersebar di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
11	3357358	#BK - Honorarium Kinerja Guru Non PNS Jenang TK/SD/SMP	Belum layaknya penghasilan pendidik (guru) pada jenjang PAUD (TK), SD, dan SMP yang masih aktif melaksanakan tugas pembelajaran	Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, yang akan disalurkan pada TK DHARMA BAKTI BENDOREJO, RT. 03 RW. 02 Bendorejo Kecamatan Pogalan, Provinsi Jawa Timur	Pogalan	Bendorejo	DINAS PENDIDIKAN
12	3357368	#BP Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi sesuai Lampiran 2 PerMen PUPR 14/PRT/M/2015	Saluran primertawing hulu hilir BTW 10 DI Widoro	Desa Kedunglurah Kecamatan Pogalan, Provinsi Jawa Timur	Pogalan	Kedunglurah	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
13	3357383	#BK - Honorarium Kinerja Kepala/Guru TK/PAUD Non PNS	Belum layaknya penghasilan pendidik (guru) pada jenjang Kepala/Guru TK/PAUD Non-ASN yang masih aktif melaksanakan tugas pembelajaran	Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek, yang akan disalurkan pada Satuan PAUD sejumlah 84 Lembaga tersebar di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS PENDIDIKAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
14	3357420	#BP Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi sesuai Lampiran 2 PerMen PUPR 14/PRT/M/2015	Saluran Primer Ngasinan Kanan BNG KI 1 Desa Malasan Kecamatan Durenan mengalami kerusakan	Desa Malasan Kecamatan Durenan, Provinsi Jawa Timur	Durenan	Malasan	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
15	3357440	#BK Program Jatim Puspa, Desa Berdaya, dan BUM Desa (BOP Kab/Kota)	- Masih kurangnya pengetahuan pengurus bumdesa tentang pengelolaan keuangan BUMDESA - Masih adanya Kepala keluarga perempuan/KPM PKH yang membutuhkan Bantuan untuk pengembangan usahanya	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jl Wahid Hasyim No. 5 Kelurahan Ngantru Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Ngantru	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16	3357467	#BK Tambahan Honorarium Aparatur Pemerintah Desa	Kurangnya kesejahteraan Aparatur Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Jl Wahid Hasyim No 5 Ngantru Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Ngantru	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
17	3357737	#BP Fasilitasi Promosi Dagang/Misi Dagang	Kurangnya pemasaran bagi produk UMKM	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KAB. TRENGGALEK, Provinsi Jawa Timur	Karangan	Buluagung	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
18	3357794	#BP Pengembangan Produk Ekspor	masih kurangnya pelaku ekspor langsung	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KAB. TRENGGALEK, Provinsi Jawa Timur	Karangan	Buluagung	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
19	3357813	#BP Sertifikasi Halal	1. IKM belum memiliki sertifikat halal dikarenakan produk frozen dan berbahan baku daging serta unggas. 2. Sertifikasi halal skema reguler membutuhkan biaya lebih mahal	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek. Jl. Supriyadi No. 2A Ngares Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Ngares	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
20	3357837	#BP - Peti Koin Bermantra - Fasilitasi Mesin Pasca Panen Kopi - Huller	Kelompok Tani Sumber Makmur memiliki potensi yang baik dalam pengembangan budidaya kopi, namun dengan keterbatasan alat pasca panen yang ada, mengakibatkan proses penanganan pasca panen kopi menjadi tidak maksimal karena masih menggunakan cara yang tradisional. Maka kelompok tani Sumber Makmur mengajukan permohonan bantuan alat pasca panen Huller untuk meningkatkan kualitas Greenbean kopi sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk dan cita rasa kopi.	RT 07 RW 04 Desa Pule Kec. Pule, Kab. Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Pule	Pule	DINAS PERKEBUNAN
21	3357855	#BP - Peti Koin Bermantra - Fasilitasi Mesin Pasca Panen Kopi - Pulper	Kelompok Tani Sumber Makmur memiliki potensi yang baik dalam pengembangan budidaya kopi, namun dengan keterbatasan alat pasca panen yang ada, mengakibatkan proses penanganan pasca panen kopi menjadi tidak maksimal karena masih menggunakan cara yang tradisional. Maka kelompok tani Sumber Makmur mengajukan permohonan bantuan alat pasca panen Pulper untuk meningkatkan kualitas Greenbean kopi sehingga dapat meningkatkan nilai jual produk dan cita rasa kopi.	RT 07 RW 04 Desa Pule Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Pule	Pule	DINAS PERKEBUNAN
22	3357873	#BP - Peti Koin Bermantra - Cultivator	Kendala yang dihadapi poktan Simbar Pethak Desa Botoputih Kecamatan Bendungan yaitu 1.Terbatasnya ketersediaan alat pengolah tanah 2.Dibutuhkan waktu yang lama dalam pengolahan tanah secara sederhana 3.Tingginya biaya tenaga olah lahan	rt 25 rw 009 Desa Botoputih Kecamatan Bendungan, Provinsi Jawa Timur	Bendungan	Botoputih	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
23	3357881	#BP - Fasilitasi Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Provinsi	Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga tenis lapangan khususnya bagi usia dini membutuhkan anggaran untuk mewujudkannya kegiatan tersesebut.	Jl. KH. Wachid Hasyim Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Ngantru	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
24	3357893	#BP - Fasilitasi Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Provinsi	kompetisi futsal sebagai sarana pembinaan dan pengembangan bakat olahraga futsal di kalangan pelajar serta meningkatkan prestasi olahraga futsal membutuhkan anggaran supaya terwujud kegiatannya	Lingk. Darang RT.06 RW.02 Kel. Tamanan, Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Tamanan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
25	3357902	#BP - Destana	Permohonan bantuan untuk pembentukan Desa Tangguh Bencana di Ds. Besuki, Kecamatan Panggul dan di Ds. Terbis, Kecamatan Panggul, karna belum melaksanakan pembentukan Desa Tangguh Bencana di wilayah tersebut	Jl.Raya Besuki-Panggul, kodepos66364, Provinsi Jawa Timur	Panggul	Besuki	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
26	3357903	#BP - Peti Koin Bermantra - Cultivator	Kelompok tani Rukun Jaya Desa Petung Kecamatan Dongko memiliki kendala dalam budidaya tanaman diantaranya 1.Mahalnya biaya tenaga kerja manusia 2.Pengolahan lahan sangat sederhana dan kurang efektif	RT 29 RW 06 Desa Petung Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek , Provinsi Jawa Timur	Dongko	Petung	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
27	3357931	#BP - Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Permohonan bantuan kegiatan karna belum dilaksanakan kegiatan pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana di SMAN 1 Pule dan di SMAN 1 Panggul	Kantor BPBD JL. Jalan Kanjeng Jimat , Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Rejowinangun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
28	3357936	#BP - Peti Koin Bermantra - Cultivator	Kelompok Tani Sambi Agung yang ada di Desa Watuagung Kecamatan watulimo Kabupaten Trenggalek mempunyai kendala dalam pengolahan lahan di karenakan beralihnya tenaga kerja yang mau mengolah lahan dan mahalnya biaya tenaga kerja. Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produk pertanian, tidak terlepas dari ketersediaan alat mesin pertanian maka kami mengajuan bantuan alsintan cultivator.	desa watuagung kecamatan watuimo kabupaten trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Watulimo	Watuagung	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
29	3357954	#BP - Sarana Produksi Pertanian Tanaman Hortikultura - Pra Panen - Benih Bawang Merah dan Sarana Budidaya (Pupuk Organik, Mulsa, Pupuk NPK dan Dolomit) untuk 1 ha	Kelompok tani Ngudi Tani Maju II memilikipotensi lahan yang cukup dan sesuai untuk pengembangan budidaya bawang merah.Namun, dalam pelaksanaannya petani masih mengalami keterbatasan dalampenyediaan benih bawang merah dan sarana budidaya. Oleh karena itu, gunameningkatkan produksi dan pendapatan petani, maka kelompok tani Ngudi Tani MajuII mengajukan permohonan bantuan benih bawang merah dan sarana budidaya (PupukOrganik, Mulsa, Pupuk NPK dan Dolomit)	RT.19 RW.07 Desa Salamrejo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Karangan	Salamrejo	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
30	3357956	#BP - EWS Bencana	Permohonan bantuan EWS Banjir di Ds. Pogalan, Kecamatan Pogalan dan EWS Jenis Bencana Tsunami ditempatkan di Desa Craken Kec. Munjungan , karna di wilayah tersebut merupakan daerah rawan bencana dan belum memiliki EWS sebagai peringatan dini bencana	Kantor BPBD, Jl. Kanjeng Jimat, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Rejowinangun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
31	3357967	#BS - bantuan sosial permakanan anak terlantar didalam panti swasta	Terhambatnya kemampuan lembaga dalam menyediakan pangan yang cukup secara kuantitas dan kualitas sehingga belum tercukupinya pemenuhan gizi seimbang	Dinas Sosial PPPA Kab. Trenggalek Jl. Brigjend Soetran No.11 (Alamat masing-masing penerima manfaaf terlampir pada proposal), Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS SOSIAL
32	3357975	#BS - bantuan sosial permakanan disabilitas terlantar didalam panti swasta	Panti asuhan sering mengalami kendala finansial dalam memenuhi kebutuhan gizi yang layak. Keterbatasan anggaran mengakibatkan kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan kurang memenuhi standar gizi	Dinas Sosial PPPA Kab. Trenggalek Jl. Brigjend Soetran No.11 (Alamat masing-masing penerima manfaaf terlampir pada proposal), Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS SOSIAL

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
33	3357976	#BP - Pemulihan Pasca Bencana	Permohonan bantuan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana BPBD Provinsi Jawa Timur untuk perbaikan tembok penahan jalan (TPJ) di Desa Suruh Kec. Suruh, Desa Dongko Kec. Dongko, dan Desa Karanggandu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek	Kantor BPBD, Jl. Kanjeng Jimat , Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Rejowinangun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
34	3357994	#BP - Petikoin Bermantra Bantuan Ternak Kambing	Masih terbatasnya modal, sarana dan prasarana dalam pembelian bibit ternak kambing sehingga bantuan bibit ternak sangat dibutuhkan demi keberlanjutan budidaya kambing yang dilaksanakan	RT.022 RW.008 Desa Jambu Kec. Tugu Kab. Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Tugu	Jambu	DINAS PETERNAKAN
35	3357995	#BS - Bantuan Sosial modal usaha KPM Jawara	Kepala keluarga Laki-laki kondisi ekonominya tidak mampu (miskin) dengan kondisi usaha terkendala modal, kurang peralatan produksi dan perluasan pemasaran	Dinas Sosial PPPA Kab. Trenggalek Jl. Brigjend Soetran No.11 (Alamat masing-masing penerima manfaaf terlampir pada proposal), Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS SOSIAL
36	3357998	#BP - Peralatan dan Logistik	Letak geografis Kelurahan Kelutan berada di wilayah aliran Sungai Ngasinan, di mana di setiap musim penghujan dalam intensitas tinggi selalu terdampak banjir karena luapan Sungai Ngasinan dan Kelurahan Kelutan juga termasuk salah satu daerah zona merah bencana banjir dan kebutuhan logistik untuk penanganan darurat seperti makanan siap saji, selimut, terpal, matras, perlengkapan dapur umum, serta perlengkapan dasar pengungsi	Kantor BPBD, Jl. Kanjeng Jimat, KabupatenTrenggalek, Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Rejowinangun	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
37	3358005	#BS - Bantuan Sosial modal usaha Putri Jawara	Kepala Keluarga perempuan rentan (miskin) yang menjadi tulang punggung atau membantu perekonomian keluarga	Dinas Sosial PPPA Kab. Trenggalek Jl.Brigjend Soetran No.11 (Alamat masing-masing penerima manfaat terlampir pada proposal), Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS SOSIAL
38	3358012	#BP Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Belum tersedianya Warning Light, guna meningkatkan keamanan dan keselamatan siswa dengan memperingatkan pengendara agar waspada, mengurangi kecepatan, serta mematuhi aturan lalu lintas di sekitar Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	Puskesmas Slawe Jalan Raya Pantai Prigi, RT.01/RW.01, Keping, Slawe, Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur	Watulimo	Slawe	DINAS PERHUBUNGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
39	3358016	#BP - Petikoin Bermantra Bantuan Ternak Kambing	Keterbatasan modal kelompok dalam penyediaan bibit kambing sehingga diperlukan bantuan bibit ternak kambing agar budidaya ternak kambing agar dapat dilakukan	RT.17 RW.03 Dusun Sobo Desa Ngerdani Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Dongko	Ngerdani	DINAS PETERNAKAN
40	3358025	#BS - Bantuan Sosial Disabilitas (ASPD)	Masih terdapat Penyandang disabilitas dalam kategori berat tidak dapat melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain, tidak mampu menghidupi diri sendiri dan mengalami kesulitan mengakses pelayanan publik dan berakibat tidak terpenuhinya hak hidup penyandang disabilitas.	Dinas Sosial PPPA Jl.Brigjend Soetran No.11 (Alamat masing-masing penerima manfaat terlampir pada proposal), Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS SOSIAL
41	3358035	#BS - Bantuan Sosial Lanjut Usia PKH Plus	Masih terdapat lansia yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan meskipun keluarga mereka sudah	Dinas Sosial PPPA Kab. Trenggalek Jl. Brigjend Soetran No.11 (Alamat masing-masing penerima manfaaf terlampir pada proposal), Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Sumbergedong	-
42	3358044	#BP Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Belum tersedianya Warning Light, guna meningkatkan keamanan dan keselamatan siswa dengan memperingatkan pengendara agar waspada, mengurangi kecepatan, serta mematuhi aturan lalu lintas di sekitar Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	SDN 1 Watulimo RT. 06 RW. 02 Dusun Krajan Desa Watulimo Kec. Watulimo, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur	Watulimo	Watulimo	DINAS PERHUBUNGAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
43	3358049	#BP PETI KOIN BERMANTRA BIDANG KEHUTANAN	Kendala dalam penyediaan pakan ternak yang cukup dan berkualitas, terutama pada musim kemarau ketika ketersediaan hijauan pakan menurun. Selama ini peternak masih mengandalkan pakan segar tanpa proses pengolahan atau pengawetan sehingga pakan mudah rusak, tidak dapat disimpan lama, serta limbah pertanian seperti jerami dan rumput belum dimanfaatkan secara optimal	Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Dawuhan	DINAS KEHUTANAN
44	3358059	#BP - Petikoin Bermantra Bantuan Ternak Itik	Masih rendahnya populasi itik petelur di Kabupaten Trenggalek serta keterbatasan kelompok dalam keadaan penyediaan bibit itik petelur. Sehingga dengan adanya bantuan bibit itik petelur diharapkan mampu menggerakkan perekonomian rakyat	RT.19 RW.05 Dusun Compok Desa Malasan Kec. Durenan Kab.Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Durenan	Malasan	DINAS PETERNAKAN
45	3358065	#BP Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Belum tersedianya Warning Light, guna meningkatkan keamanan dan keselamatan siswa dengan memperingatkan pengendara agar waspada, mengurangi kecepatan, serta mematuhi aturan lalu lintas di sekitar Zona Selamat Sekolah (ZoSS)	SDN 1 Sawahan RT. 04 RW. 02 Dusun Krajan Desa Sawahan Kec. Watulimo, Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur	Watulimo	Sawahan	DINAS PERHUBUNGAN
46	3358067	#BP PETI KOIN BERMANTRA BIDANG KEHUTANAN	Kendala dalam penyediaan pakan ternak yang cukup dan berkualitas, terutama pada musim kemarau ketika ketersediaan hijauan pakan menurun. Selama ini peternak masih mengandalkan pakan segar tanpa proses pengolahan atau pengawetan sehingga pakan mudah rusak, tidak dapat disimpan lama, serta limbah pertanian seperti jerami dan rumput belum dimanfaatkan secara optimal	Desa Sukokidul Kecamatan Pule, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Pule	Sukokidul	DINAS KEHUTANAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
47	3358074	#BP - Petikoin Bermantra Bantuan Ternak Domba Lokal	Keterbatasan modal kelompok dalam penyediaan bibit domba lokal khususny dalam peningkatan populasi domba pada Desa Rejowinangun. Diharapkan dengan adanya bantuan bibit domba ini mampu meningkatkan perekonomian masyarakat	RT.10 RW.03 Desa Rejowinangun Kec. Trenggalek Kab. Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Rejowinangun	DINAS PETERNAKAN
48	3358091	#BP Bantuan Ternak Sapi Perah	Keterbatasan modal peternak dalam penyediaan bibit sapi perah, sehingga sangat dibutuhkan bantuan bibit ternak sapi perah. Diharapkan dengan bantuan tersebut dapat meningkatkan populasi sapi perah dan mampu meningkatkan perekonomian peternak melalui produksi susunya.	RT.007 RW.002 Desa Dompyong Kec. Bendungan Kab. Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Bendungan	Dompyong	DINAS PETERNAKAN
49	3358099	#BP Bantuan Ternak Sapi Perah	Desa Tanggaran merupakan salah satu daerah penghasil susu di Kabupaten Trenggalek, akan tetapi produksi susu yag diperoleh masih rendah. Rendahnya produksi susu dikarenakan masih kurangnya populasi sapi perah di Desa Tanggaran. Oleh karena itu bantuan bibit sapi perah sangat diperlukan dalam membantu usaha budidaya sapi perah di Tanggaran	RT.24 RW.02 Dusun Ngledok Desa Tanggaran Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Pule	Tanggaran	DINAS PETERNAKAN
50	3358100	#BP - Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Terpadu dan Terintegrasi Kewenangan Provinsi 10 - 15 Ha	Desa Kendalrejo masuk SK Kumuh Kab.Trenggalek Tahun 2025, dengan luasan kawasan kumuh sebesar 11,49%. Salah indikator kumuh yang perlu segera ditangani adalah terkait saluran drainase lingkungan dan jalan lingkungan, karena pada saat musim hujan sering terjadi genangan dan bisa berpotensi menyebabkan kerusakan pada badan jalan. Untuk penanganan indikator kumuh yang lain sudah diintervensi melalui sumber pendanaan yang lain.	RT 01 RW 01, RT 06 RW 02, RT 07 RW 02, Provinsi Jawa Timur	Durenan	Kendalrejo	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
51	3358119	#BP - KLIK (Klinik Investasi Keliling)	kurangnya pemahaman tentang Perizinan Berusan berbasis Resiko dalam dalam rangka mengimplementasikan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan mereka, mengembangkan kemandirian dan memantapkan kebersamaan diantara mereka. IKM dan UKM yang merupakan usaha pada skala kecil, diperlukan adanya kebersamaan diantara mereka untuk mewujudkan kekuatan yang lebih besar baik pada modal, produksi sampai penguasaan pasar serta Laporan Kegiatan Usahanya (LKPM).	Kantor PPN Prigi, Provinsi Jawa Timur	Watulimo	Tasikmadu	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
52	3358121	#BP PETI KOIN BERMANTRA BIDANG KEHUTANAN	KTH memiliki potensi hasil budidaya empon-empon seperti jahe, kunyit, temulawak, dan kencur yang melimpah, namun pengolahannya masih dilakukan secara manual sehingga proses ekstraksi kurang efisien dan hasil produk belum optimal. Keterbatasan sarana, khususnya alat pengekstrak empon-empon, menyebabkan sebagian besar hasil panen masih dijual dalam bentuk bahan mentah dengan nilai ekonomi rendah	Desa Nglebo Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Suruh	Nglebo	DINAS KEHUTANAN
53	3358129	#BK Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Pansela	Anggaran Pengadaan Tanah JLS/Pansela sangat besar sehingga Pemkab Trenggalek kesulitan untuk melaksanakannya	Desa Tawing Kecamatan Munjungan, Provinsi Jawa Timur	Munjungan	Tawing	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
54	3358138	#BP PETI KOIN BERMANTRA BIDANG KEHUTANAN	Kendala dalam penyediaan pakan ternak yang cukup dan berkualitas, terutama pada musim kemarau ketika ketersediaan hijauan pakan menurun. Selama ini peternak masih mengandalkan pakan segar tanpa proses pengolahan atau pengawetan sehingga pakan mudah rusak, tidak dapat disimpan lama, serta limbah pertanian seperti jerami dan rumput belum dimanfaatkan secara optimal	Desa Pringapus Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Dongko	Pringapus	DINAS KEHUTANAN
55	3358145	#BP - Roadshow SALEHA (Sadar Legalitas Berusaha)	banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki perizinan yang menjadi kewenangan provinsi Jawa Timur	Pendapa Manggala Praja Nugraha, Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Ngantru	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
56	3358165	#BP Peti Koin Bermantra Bidang Perikanan Budidaya	Masih banyaknya keluarga miskin yang membutuhkan bantuan modal usaha budidaya ikan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi produktif.	Desa Tegaren Kecamatan Tugu, Provinsi Jawa Timur	Tugu	Tegaren	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
57	3358166	#BP PETI KOIN BERMANTRA BIDANG KEHUTANAN	Kendala dalam penyediaan pakan ternak yang cukup dan berkualitas, terutama pada musim kemarau ketika ketersediaan hijauan pakan menurun. Selama ini peternak masih mengandalkan pakan segar tanpa proses pengolahan atau pengawetan sehingga pakan mudah rusak, tidak dapat disimpan lama, serta limbah pertanian seperti jerami dan rumput belum dimanfaatkan secara optimal	Desa Masaran Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Bendungan	Masaran	DINAS KEHUTANAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
58	3358175	#BP Peti Koin Bermantra Bidang Perikanan Budidaya	Masih banyaknya keluarga miskin yang membutuhkan bantuan modal usaha budidaya ikan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi produktif.	Desa Salamrejo Kecamatan Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Karangan	Salamrejo	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
59	3358177	#BP Sambungan Listrik untuk Rumah Tangga Miskin	Masih banyak rumah tangga miskin yang belum berlistrik/belum terpasang meter listrik PT. PLN (Persero)	Ke. Durenan, Kec. Gandusari, Kec.Karangan, Kec.Munjungan, Kec.Panggul, Kec.Pogalan, Kec. Pule, Kec.Tugu, Kec Watulimo, Kec. Suruh, Provinsi Jawa Timur	Dongko	Ngerdani	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
60	3358186	#BP Pembangunan PLTS Atap Off Grid	Tingginya pembayaran biaya listrik pada pondok pesantren	Kec. Gandusari, Kec.Pule, Kec. Durenan, Kec.Panggul, Kec.Pogalan, Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Kelutan	DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
61	3358213	#BP Bimbingan Teknis dalam rangka Menumbuhkembangkan Kewirausahaan Poklahsar untuk Peningkatan Kesejahteraan	Terbatasnya sarana pengolahan ikan terutama untuk pengolahan ikan asap yang memenuhi standar pengolahan ikan yang baik	Desa Senden Kec. Kampak Kab. Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Kampak	Senden	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
62	3358218	#BK Penanganan Jalan dan Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jalan dalam kondisi rusak ringan dengan panjang 4.650 lebar 5 m. Jika musim hujan sering tergenang air sehingga diperlukan saluran drainase dan cross drain	Desa Sumberingin, Desa Jatiprahu, Desa Wonoanti, Provinsi Jawa Timur	Karangan	Jatiprahu	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
63	3358229	#BK Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota untuk Dukungan Sarana dan Prasarana Non Fisik	Masih banyaknya keluarga miskin yang membutuhkan bantuan modal usaha budidaya ikan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi produktif.	Desa Karangrejo Kec Kampak, Provinsi Jawa Timur	Kampak	Karangrejo	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
64	3358252	#BP - Fasilitasi Bibit Kopi Robusta kegiatan Rehabilitasi	1. Produksi dan Produktifitas hasil tanaman kopi mengalami penurunan (banyak tanaman kopi yang berusia tua dan tidak produktif) sehingga dibutuhkan rehabilitasi tanaman kopi 2. Meningkatnya jumlah hama dan penyakit pada tanaman kopi mengakibatkan tanaman mengalami penurunan kualitas 3. tidak tersedianya benih kopi yang unggul	Dusun Ngrejo RT 007 RW 002 Desa Ngulungkulon Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Munjungan	Ngulungkulon	DINAS PERKEBUNAN
65	3362570	#BK Penanganan Jalan dan Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jalan dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat dengan panjang 8.230 m lebar 4 m	Desa Gemaharjo Desa Slawe, Provinsi Jawa Timur	Watulimo	Pakel	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
66	3362582	#BK Penanganan Jalan dan Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jalan dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat panjang 5.000 m lebar 4 m	desa ngares , Provinsi Jawa Timur	Bendungan	Srabah	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
67	3362585	#BK Penanganan Jalan dan Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jalan dalam kondisi rusak ringan panjang 7.536 m Lebar 5 m	desa besuki, Provinsi Jawa Timur	Kampak	Ngadimulyo	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
68	3362594	#BK Penanganan Jalan dan Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jalan dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat panjang 7.040 m lebar 3,5 m	desa siki, Provinsi Jawa Timur	Dongko	Dongko	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
69	3362610	#BP Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi sesuai Lampiran 2 PerMen PUPR 14/PRT/M/2015	Saluran sekunder swaloh DI Widoro mengalami kerusakan	Desa Ngadisuko Kecamatan Durenan, Provinsi Jawa Timur	Durenan	Ngadisuko	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
70	3362624	#BP Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi sesuai Lampiran 2 PerMen PUPR 14/PRT/M/2015	Saluran Primer BTW 3 DI Widoro mengalami kerusakan	Desa Melis Kecamatan Gandusari, Provinsi Jawa Timur	Gandusari	Melis	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBERDAYA AIR
71	3362638	#BP Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Belum tersedianya cermin tikungan pada daerah rawan kecelakaan	Jl. Raya Durenan Prigi, Desa Sawahan Kec. Watulimo Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Watulimo	Sawahan	DINAS PERHUBUNGAN
72	3362648	#BP Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Daerah rawan kecelakaan sehingga memerlukan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail)	Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo Trenggalek, Provinsi Jawa Timur	Watulimo	Sawahan	DINAS PERHUBUNGAN
73	3363339	#BP Peti Koin Bermantra Bidang Perikanan Budidaya	Masih banyaknya keluarga miskin yang membutuhkan bantuan modal usaha budidaya ikan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan pemberdayaan usaha ekonomi produktif.	Desa Karangrejo Kec Kampak, Provinsi Jawa Timur	Kampak	Karangrejo	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	ID USULAN	USULAN	MASALAH	ALAMAT LOKASI	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	PERANGKAT DAERAH PROVINSI
74	3363480	#BS - Bantuan Sosial Lanjut Usia PKH Plus	Masih terdapat lansia yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan meskipun keluarga mereka sudah mendapatkan bansos PKH. Banyak dari mereka menghadapi kesulitan ekonomi, isolasi sosial, dan masalah kesehatan yang kompleks. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, program sosial, dan dukungan komunitas. Selain itu kondisi lansia membutuhkan perawatan yang ekstra untuk kehidupannya sehari-hari	Dinas Sosial PPPA Kab. Trenggalek Jl. Brigjend Soetran No.11 (Alamat masing-masing penerima manfaaf terlampir pada proposal), Provinsi Jawa Timur	Trenggalek	Sumbergedong	DINAS SOSIAL
75	3390970	#BP - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Lingkungan Permukiman	Desa Kendalrejo masuk SK Kumuh Kab.Trenggalek Tahun 2025, dengan luasan kawasan kumuh sebesar 11,49%. Salah indikator kumuh yang perlu segera ditangani adalah terkait saluran drainase lingkungan di RT 01 dan RT 06 , karena pada saat musim hujan sering terjadi genangan dan bisa berpotensi menyebabkan kerusakan pada badan jalan. Selain itu ada lokasi di luar kawasan kumuh yaitu di RT 07 yang perlu pembangunan jalan paving dan drainase lingkungan	RT 01 RW 01, RT 06 Rw 02 (Kawasan Kumuh) RT 07 RW 02 (Non Kumuh), Provinsi Jawa Timur	Durenan	Kendalrejo	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

LAMPIRAN VIII

RENCANA TARGET PEMENUHAN PELAYANAN DASAR PEMERINTAH KAB. TRENGGALEK TAHUN 2027

RKPD
KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2027

Rencana Target Pemenuhan Pelayanan Dasar Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2027

- **Urusan Pendidikan**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	*2*	*3*	*4*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
1	**Pendidikan Anak Usia Dini**		21.549	21.099	21.099			**4.003.275.135**		**APBD**	**DINAS PENDIDIKAN**
1	Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	81.4			86,01	86,01				
2	Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	85.47			85,28	85,28				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	**Pendidikan Dasar**		82378	81.928	81.928			**9.165.720.982**		**APBD**	**DINAS PENDIDIKAN**
	SD							**4.837.196.982**			**DINAS PENDIDIKAN**
1	Kemampuan literasi	*Nilai*	88.9			77,57	77,57				
2	Kemampuan numerasi	*Nilai*	86.37			69,25	69,25				
3	Indeks iklim keamanan	*Nilai*	77.78			80,48	80,48				
4	Indeks iklim kebhinekaan	*Nilai*	74.15			77,16	77,16				
5	Indeks iklim inklusivitas	*Nilai*	61.63			69,13	69,13				
	SMP							**4.328.524.000**		**APBD**	**DINAS PENDIDIKAN**
1	Kemampuan literasi	*Nilai*	89.06			80,02	80,02				
2	Kemampuan numerasi	*Nilai*	88.4			71,67	71,67				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
3	Indeks iklim keamanan	*Nilai*	70.73			75,23	75,23				
4	Indeks iklim kebhinekaan	*Nilai*	70.4			73,40	73,40				
5	Indeks iklim inklusivitas	*Nilai*	58.1			65,31	65,31				
3	**Pendidikan Kesetaraan**		1.681	**1.681**	**1.681**			**610.867.000**	-	**APBD**	**DINAS PENDIDIKAN**
1	Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) kesetaraan	%	14.71			19,32	19,32				

- **Urusan Kesehatan**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	*2*	*3*	*4*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
1	**Pelayanan kesehatan ibu hamil**		**6.039**	**9.923**	**9.923**			**3.329.175.600**		**APBD/APBN**	**Dinkes**
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	*Ampul*	**701**			**993**	**993**	**2.979.000**			
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	*Tablet*	**1.087.020**			**1.786.140**	**1.786.140**	**2.572.041.600**			
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	*Paket*	**6.039**			**9.923**	**9.923**	**34.730.500**			
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	*Paket*	**6.039**			**9.923**	**9.923**	**99.230.000**			
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	*Paket*	**6.039**			**9.923**	**9.923**	**49.615.000**			
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (15% dari sasaran)	*Paket*	**6.039**			**9.923**	**9.923**	**14.884.500**			
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	*Paket*	**6.039**			**9.923**	**9.923**	**-**			
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	*Paket*	**6.039**			**9.923**	**9.923**	**49.615.000**			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
9	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	*Buku*	**6.039**			**9.923**	**9.923**	**496.150.000**			
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	*Paket*	**22**			**22**	**22**	**-**			
11	Gel USG, untuk Puskesmas yang memiliki alat USG (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	*Botol*	**403**			**662**	**662**	**9.930.000**			
12	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	*Orang*	**154**			**154**	**154**	**-**			
13	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:1000 penduduk)	*Orang*	**507**			**507**	**507**	**-**			
14	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	*Orang*	**1.064**			**1.064**	**1.064**	**-**			
15	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	*Orang*	**214**			**214**	**214**	**-**			
16	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	*Orang*	**88**			**88**	**88**	**-**			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, tiga kali pada trimester ketiga)	*Orang*	**6039**			**9.923**	**9.923**	-			
2	**Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**	**Orang**	**6.438**	**9.88**	**9.88**			**508.820.000**		**APBD/APBN**	**Dinkes**
1	Formulir partograf	*Formulir*	**6.438**			**9.88**	**9.88**	**4.940.000**			
2	Kartu ibu (rekam medis)	*Paket*	**6.438**			**9.88**	**9.88**	**9.880.000**			
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	*Buku*	**6.438**			**9.88**	**9.88**	**494.000.000**			
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	*Paket*	**22**			**22**	**22**	-			
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	*Orang*	**154**			**154**	**154**	-			
6	Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	*Orang*	**507**			**507**	**507**	-			
7	Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	*Orang*	**1.064**			**1.064**	**1.064**	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
8	Tenaga kesehatan : Tenaga kefarmasian	*Orang*	**214**			**214**	**214**	**-**			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga gizi	*Orang*	**88**			**88**	**88**	**-**			
3	**Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**		**6.320**	**9.318**	**9.318**			**925.785.500**		**APBD/APBN**	**Dinkes**
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	*Vaksin*	**6.306**			**9.205**	**27.851**	**264.183.500**			
2	Vitamin K1 injeksi	*Ampul*	**6.320**			**932**	**4.659**	**111.840.000**			
3	Salep/tetes mata antibiotik (sesuai standar 12-59 bulan)	*Orang*	**6.320**			**9.318**	**932**	**69.885.000**			
4	Formulir bayi baru lahir	*Formulir*	**6.320**			**9.318**	**27.851**	**4.659.000**			
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)(sesuai standar 12-59 bulan)	*Formulir*	**6.320**			**9.318**	**27.851**	**9.318.000**			
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	*Buku*	**6.320**			**9.318**	**27.851**	**465.900.000**			
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	*Paket*	**22**			**22**	**1.161**	**-**			
8	Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	*Orang*	**155**			**155**	**1.053**	**-**			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
9	Tenaga kesehatan : Bidan	*Orang*	**507**			**507**	**1.323**	-			
10	Tenaga kesehatan : Perawat	*Orang*	**1.064**			**1.064**		-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	*Orang*	**214**			**214**		-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	*Orang*	**92**			**92**		-			
13	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	*Orang*	**88**			**88**		-			
14	Kader Kesehatan	*Orang*	**4.300**			**4.3**		-			
4	**Pelayanan Kesehatan Balita**		**34.965**	**47.638**	**47.638**			**3.895.596.000**		**APBD/APBN**	**Dinkes**
1	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	*Formulir*	**34.965**			**47.638**	**47.638**	**47.638.000**			
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	*Formulir*	**34.965**			**47.638**	**47.638**	**238.190.000**			
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	*Buku*	**34.965**			**47.638**	**47.638**	**2.381.900.000**			
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	*Kapsul*	**5.912**			**3.593**	**3.593**	**8.982.500**			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	*Kapsul*	**29.236**			**31.461**	**31.461**	**78.652.500**			
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	*Vaksin*	**6.211**			**9.205**	**9.205**	**115.062.500**			
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	*Vaksin*	**6.265**			**9.205**	**9.205**	**55.230.000**			
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	*Vaksin*	**6.538**			**9.205**	**9.205**	**322.175.000**			
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT - HB -Hib	*Vaksin*	**6.612**			**9.205**	**9.205**	**197.907.500**			
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak-Rubela	*Vaksin*	**6.754**			**9.205**	**9.205**	**195.606.250**			
11	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	*Vaksin*	**7.103**					-			
12	Vaksin imunisasi lanjutan : Campak Rubela	*Vaksin*	**7.106**			**9.723**	**9.723**	**206.613.750**			
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	*Unit*	**34.965**			**47.638**	**47.638**	**47.638.000**			
14	Peralatan Anafilaktik	*Paket*	**22**					-			
15	Formula terapi gizi buruk	*Paket*	**22**			**22**	**22**	-			
16	Tenaga medis : Dokter	*Orang*	**150**			**150**	**150**	-			
17	Tenaga kesehatan : Bidan	*Orang*	**507**			**507**	**507**	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
18	Tenaga kesehatan : Perawat	*Orang*	**1.064**			**1.064**	**1.064**	**-**			
19	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	*Orang*	**88**			**88**	**88**	**-**			
20	Guru PAUD	*Orang*	**1**			**1**	**1**	**-**			
21	Kader Kesehatan	*Orang*	**4.300**			**4.3**	**4.3**	**-**			
5	**Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar**		**84.454**	**85.366**	**85.366**			**2.023.460.500**		**APBD/APBN**	**Dinkes**
1	Form pencatatan/Buku raport kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	*Form/Buku*	**84.454**			**85.366**	**85.366**	**1.280.490.000**			
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	*Form/Buku*	**84.454**			**85.366**	**85.366**	**-**			
3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	*Dokumen*	**84.454**			**85.366**	**85.366**	**64.024.500**			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	*Formulir*	**22**			**22**	**22**	-			
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	*Formulir*	**22**			**22**	**22**	-			
6	Tablet tambah darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudang farmasi kabupaten/kota)	*Tablet*	**1**			**1**	**1**	-			
7	Alat pemeriksa Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb	*Alat*	**22**			**22**	**22**	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)										
8	Strib Hb Sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/sederajat)	*Strip*	**4.450**			**4.694**	**4.694**	**70.410.000**			
9	Media promosi kesehatan Media khusus remaja sehat)	*Paket*	**22**			**22**	**22**	**-**			
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	*Vaksin*	**34.469**			**28.304**	**28.304**	**608.536.000**			
11	Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	*Orang*	**187**			**187**	**187**	**-**			
12	Tenaga kesehatan : Bidan	*Orang*	**507**			**507**	**507**	**-**			
13	Tenaga kesehatan : Perawat	*Orang*	**1.064**			**1.064**	**1.064**	**-**			
14	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	*Orang*	**88**			**88**	**88**	**-**			
15	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	*Orang*	**214**			**214**	**214**	**-**			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
16	Tenaga Kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	*Orang*	**92**			**92**	**92**	**-**			
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	*Orang*	**1.440**			**1.44**	**1.44**	**-**			
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	*Orang*	**680**			**680**	**680**	**-**			
6	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif**		**465.589**	**465.589**	**465.589**			**3.255.749.000**		**APBD/APBN**	**Dinkes**
1	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	*Paket*	**22**			**22**	**22**	**-**			
2	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Alat ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	*Paket*	**88**			**88**	**88**	**220.000.000**			
3	Alat: Tensimeter	*Unit*	**44**			**44**	**44**	**55.000.000**			
4	Alat : Glukometer	*Unit*	**66**			**66**	**66**	**16.500.000**			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
5	Alat : Alat pemeriksa Hb	*Unit*	**22**			**22**	**22**	**770**			
6	Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	*Unit*	**465.589**			**465.589**	**465.589**	**2.327.945.000**			
7	Alat : KIT IVA Tes	*Unit*	**22**			**22**	**22**	**121.550.000**			
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	*Unit*	**22**			**22**	**22**	**3.300.000**			
9	Kit Opthalmologi komunitas	*Unit*	**22**			**22**	**22**	**7.700.000**			
10	Kuesioner PUMA	*Dokumen*	**465.589**			**465.589**	**465.589**	**465.589.000**			
11	Alat Pelayanan KB	*Unit*	**-**			**45**	**45**	**-**			
	a. Set pemasangan dan pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	*Unit*	**22**			**22**	**22**	**-**			
	b. Set pemasangan dan pencabutan Implan	*Unit*	**22**			**22**	**22**	**-**			
	c. Vasektomi set	*Unit*	**1**			**1**	**1**	**-**			
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	*Dokumen*	**465.589**			**465.589**	**465.589**	**-**			
13	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	*Ampul/Vial*	**12.465**			**12.465**	**12.465**	**37.395.000**			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
14	Tenaga medis : Dokter	*Orang*	**150**			**150**	**150**	**-**			
15	Tenaga kesehatan : Bidan	*Orang*	**507**			**507**	**507**	**-**			
16	Tenaga kesehatan : Perawat	*Orang*	**1064**			**1.064**	**1.064**	**-**			
17	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	*Orang*	**88**			**88**	**88**	**-**			
18	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	*Orang*	**92**			**92**	**92**	**-**			
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	*Orang*	**187**			**187**	**187**	**-**			
7	**Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut**		**139.705**	**139.705**	**139.705**			**2.381.575.000**		**APBD/APBN**	**Dinkes**
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	*Paket*	**110**			**110**	**110**	**275.000.000**			
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	*Paket*	**22**			**22**	**22**	**5.500.000**			
3	Alat pemeriksaan kolesterol	*Paket*	**22**			**22**	**22**	**5.500.000**			
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan	*Paket*	**139.705**			**139.705**	**139.705**	**2.095.575.000**			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	kolesterol, lancet, kapas alkohol										
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	*Paket*	**139.705**			**139.705**	**139.705**	-			
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	*Buku*	**139.705**			**139.705**	**139.705**	-			
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	*Paket*	**22**			**22**	**22**	-			
8	Tenaga medis : Dokter	*Orang*	**150**			**150**	**150**	-			
9	Tenaga kesehatan : Bidan	*Orang*	**507**			**507**	**507**	-			
10	Tenaga kesehatan : Perawat	*Orang*	**1.064**			**1.064**	**1.064**	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	*Orang*	**88**			**88**	**88**	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	*Orang*	**92**			**92**	**92**	-			
13	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	*Orang*	**187**			**187**	**187**	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
8	**Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi**		**42.371**	**42.371**	**42.371**			**218.169.500**		**APBD/APBN**	**Dinkes**
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	*Paket*	**22**			**22**	**22**	-			
2	Obat Hipertensi	*Paket*	**42.371**			**42.371**	**42.371**	**190.669.500**			
3	Tensimeter	*Unit*	**22**			**22**	**22**	**27.500.000**			
4	Formulir pencatatan dan pelaporan ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku)	*Dokumen*	**42.371**			**42.371**	**42.371**	-			
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	*Paket*	**22**			**22**	**22**	-			
6	Tenaga medis : Dokter	*Orang*	**150**			**150**	**150**	-			
7	Tenaga kesehatan : Bidan	*Orang*	**507**			**507**	**507**	-			
8	Tenaga kesehatan : Perawat	*Orang*	**1.064**			**1.064**	**1.064**	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	*Orang*	**88**			**88**	**88**	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
10	Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	*Orang*	**92**			**92**	**92**	**-**			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	*Orang*	**214**			**214**	**214**	**-**			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	*Orang*	**92**			**92**	**92**	**-**			
9	**Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**		**10.895**	**10.895**	**10.895**			**142.787.500**		**APBD/APBN**	**Dinkes**
1	Obat Diabetes Melitus (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	*Paket*	**10.895**			**10.895**	**10.895**	**81.712.500**			
2	Fotometer atau Glukometer	*Unit*	**22**			**22**	**22**	**6.600.000**			
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	*Unit*	**10.895**			**10.895**	**10.895**	**54.475.000**			
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi	*Formulir*	**10.895**			**10.895**	**10.895**	**-**			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)										
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	*Pedoman*	**66**			**66**	**66**	-			
6	Tenaga medis : Dokter	*Orang*	**150**			**150**	**150**	-			
7	Tenaga kesehatan : Bidan	*Orang*	**507**			**507**	**507**	-			
8	Tenaga kesehatan : Perawat	*Orang*	**1.064**			**1.064**	**1.064**	-			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	*Orang*	**214**			**214**	**214**	-			
10	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	*Orang*	**92**			**92**	**92**	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	*Orang*	**88**			**88**	**88**	-			
12	Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	*Orang*	**126**			**126**	**126**	-			
10	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**		**1.510**	**1.51**	**1.51**			**6.600.000**		**APBD/APBN**	**Dinkes**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) (minimal 1 per Puskesmas atau fasyankes baik dalam bentuk fisik atau elektronik)	*Buku*	**22**			**22**	**22**	**-**			
2	Penyediaan Psikofarmaka	*Paket*	**22**			**22**	**22**	**4.400.000**			
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	*Formulir*	**22**			**22**	**22**	**2.200.000**			
4	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	*Formulir*	**22**			**22**	**22**	**-**			
5	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	*Media*	**22**			**22**	**22**	**-**			
6	Tenaga medis : Dokter	*Orang*	**150**			**150**	**150**	**-**			
7	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	*Orang*	**30**			**30**	**30**	**-**			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
8	Tenaga profesional lainnya	*Orang*	**1**			**1**	**1**	**-**			
9	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa	*Orang*	**44**			**44**	**44**	**-**			
11	**Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**		**8.087**	**4.851**	**4.851**			**28.126.295**		**APBD/APBN**	**Dinkes**
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	*Paket*	**40**			**40**	**40**	**-**			
2	Reagen Zn TB	*Kit*	**26**			**26**	**26**	**293.15**			
3	Masker bedah dan Masker N95	*Paket*	**40**			**40**	**40**	**9.600.000**			
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	*Paket*	**40**			**40**	**40**	**1.888.000**			
5	Catridge tes cepat molekuler	*Test*	**5**			**5**	**5**	**645.145**			
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	*Dokumen*	**40**			**40**	**40**	**4.000.000**			
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	*Dokumen*	**40**			**40**	**40**	**-**			
8	Tuberkulin	*Vial*	**26**			**26**	**26**	**11.700.000**			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
9	Tenaga medis : Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	*Orang*	**157**			**157**	**157**	-			
10	Tenaga kesehatan : Perawat	*Orang*	**1.064**			**1.064**	**1.064**	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	*Orang*	**214**			**214**	**214**	-			
12	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	*Orang*	**92**			**92**	**92**	-			
13	Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	*Orang*	**126**			**126**	**126**	-			
14	Tenaga kesehatan : Radiografer	*Orang*	**11**			**11**	**11**	-			
15	Kader Kesehatan	*Orang*	**428**			**428**	**428**	-			
12	**Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)**		**6.993**	**7.23**	**7.23**			**115.880.000**		**APBD/APBN**	**Dinkes**
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	*Paket*	**22**			**22**	**22**	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	*Test*	**22**			**22**	**22**	**1.320.000**			
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	*Paket*	**6.993**			**11.456**	**11.456**	**114.560.000**			
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	*Paket*	**6.993**			**11.456**	**11.456**	**-**			
5	Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	*Orang*	**156**			**156**	**156**	**-**			
6	Tenaga kesehatan : Bidan	*Orang*	**507**			**507**	**507**	**-**			
7	Tenaga kesehatan : Perawat	*Orang*	**1.064**			**1.064**	**1.064**	**-**			
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	*Orang*	**126**			**126**	**126**	**-**			
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	*Orang*	**92**			**92**	**92**	**-**			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu : pendamping dan penjangkauan	*Orang*	**1**			**1**	**1**	**-**			

- **Urusan Pekerjaan Umum**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	*2*	*3*	*4*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
1	**Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari**	**Orang**	2,694	900	900			1.767.313.500		APBN, APBD, Bana Bagi Hasil Pajak Rokok	DINAS PKPHUB
Jaringan Perpipaaan											
1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi	*Rumah Tangga*	727			300	300				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)										
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	*Rumah Tangga*	727			300	300				
Bukan Jaringan Perpipaan											
1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	*Rumah Tangga*	-			0	0				
2	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak	*Rumah Tangga*	-			0	0				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.										
2	**Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik**	**Orang**	1,529	50`	50			1.000.000.000		APBD	DINAS PKPHUB
1	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	*Rumah Tangga*	525								
2	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	*Rumah Tangga*	525								

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
3	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	*Rumah Tangga*	-								
4	Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai	*Rumah Tangga*	525								

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar										

- **Urusan Perumahan**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	*Satuan*	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	*2*	*3*	*4*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
1	**Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**		2	2	2			**50.000.000,00**		APBD	DINAS PKPHUB
Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)											
1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	*Rumah*	2			0	0	50.000.000,00		APBD	DINAS

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	*Satuan*	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
											PKPHUB
2	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	*Rumah*	0			0	0	-			
3	Pemukiman kembali bagi korban bencana	*Rumah*	0			0	0	-			
4	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	*Rumah*	0			0	0	-			
Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form 4A1, 4B6, 4B7, 4C3)											
1	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	*jumlah kab/kota*	0								

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	*Satuan*	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		0		0			-			
	a) pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha; b) penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana										
Ada Relokasi Program Pemerintah											

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	*Satuan*	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan										
	a. Penilaian oleh tim penaksir (appraisal);	*Rumah*									
	b. Proses sosialisasi kepada masyarakat; dan	*Rumah*									
	c. Proses penggantian untung sesuai tahapan yang diatur dalam Rencana Aksi	*Rumah*									
2	Bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni	*Rumah*	0			0	0	-			
Tidak Ada Relokasi Program Pemerintah						0	0	-			
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	*jumlah kab/kota*	0			0	0	-			

- **Urusan Trantibumlinmas**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	*2*	*3*	*4*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
1	**Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)**	*orang*	15	15	15			500		APBD	SATPOL PPK
1	Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : gedung kantor, kendaraan operasional dan perlengkapan operasional pada tahun berjalan)	*unit*	27			3		-		APBD	SATPOL PPK
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan	*dokumen*	5			6		-		APBD	SATPOL PPK

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023 (SOP penegakan Perda/Perkada, deteksi dini/cegah dini, pembinaan/penyuluhan, pengamanan, pengawalan, patroli, penertiban, dan penanganan unjuk rasa kerusuhan massa)										
3	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan	*orang*	1			1				APBD	SATPOL PPK

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)										
4	Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material	*dokumen*	1			1		-		APBD	SATPOL PPK
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	*orang*	0			-	-	500		APBD	SATPOL PPK
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan	*orang*	0			-	-	-		APBD	SATPOL PPK

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat)										
2	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**		700	**700**	**700**			**10.000.000**		**APBD**	**BPBD**
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana							-			
	a. Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	*dokumen*	1			1	1				
	b. Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk kajian dan album peta	*dokumen*	1								

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana							10.000.000			
	1) . Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana										
	a. Tersedianya bahan paparan dan/atau Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet, pamflet dll sesuai jumlah peserta)	*eksemplar*	40			40	40				
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	*desa*	4			4	4				
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	2			2	2				
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	10			5	5				
	2) . Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia										

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	a. Tersedianya Media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	*media*	4			3	3				
	b. Tersedianya Materi media sosial dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	*buah*	9			3	3				
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	*unit*	6			5	5				
	d. Tersedianya Perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	3			3	3				
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media sosial dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	5			5	5				
	3) . Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik										

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	*buah*	0			-	-				
	b. Tersedianya Papan informasi publik (sesuai dengan kebutuhan)	*buah*	0			-	-				
	c. Tersedianya Tim Teknis (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	0			-	-				
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	0			-	-				
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	0			-	-				
3	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**		290	**250**	**250**			**106.066.800**		**APBD**	**BPBD**
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana							-			
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	*dokumen*	1			1	1				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	b. Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk di legalkan sebagai lampiran perkada	*dokumen*	1								
2	Pembuatan Rencana Kontijensi (RENKON)							13.000.000			
	a. Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi (sesuai dengan kebutuhan)	*dokumen*	1			1	1				
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setiap penyusunan RENKON)	*dokumen*	4			1	1				
	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	2			5	5				
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	11			5	5				
3	Pelatihan, Pencegahan dan Mitigasi							35.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	1) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur	*paket*	0			-	-				
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	*paket*	0			-	-				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	*buah*	0			-	-				
	d. Tersedianya Asesmen sertifikasi profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	*paket*	0			-	-				
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	0			-	-				
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	0			-	-				
	2) . Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara										
	a. Tersedianya Perlengkapan sarpras	*paket*	1			1	1				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)										
	b. Tersedianya Materi pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	*paket*	1			1	1				
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	*buah*	40			40	40				
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	2			2	2				
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	10			5	5				
4	Gladi Kesiapsiagaanterhadap Bencana							18.000.000			
	1) . Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)										
	a. Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	*dokumen*	1			1	1				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	*paket*	1			1	1				
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	10			5	5				
	2) . Gladi Lapang										
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	*dokumen*	1			1	1				
	b. Tersedianya Sarpras dan peralatan pendukung Gladi Lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	*paket*	1			1	1				
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	10			5	5				
5	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana							5.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	1) . Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun)	*hari*	360			365	365				
	b. Tersedianya Rapat koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	*pertemuan*	4			4	4				
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	*orang*	1			1	1				
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	1			1	1				
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	17			17	17				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	2) . Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana										
	a. Tersedianya Sarpras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	*unit*	32			5	5				
	b. Tersedianya Sarpras komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	*unit*	26			1	1				
	c. Tersedianya Sarpras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	*unit*	4			1	1				
	d. Tersedianya Sarpras istirahat petugas jaga Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	*unit*	4			4	4				
	3) . Penyediaan Layanan Pesan Singkat secara Broadcast										
	a. Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara	*paket*	1			1	1				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	broadcast (sesuai dengan kebutuhan)										
	b. Tersedianya Operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	*paket*	1			1	1				
	4) . Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat										
	a. Tersedianya Peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	*paket*	1			1	1				
	b. Tersedianya Alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	*paket*	1			1	1				
6	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan							17.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	Kesiapsiagaan terhadap Bencana										
	a. Tersedianya Peralatan keselamatan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	*paket*	14			49	49				
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	*paket*	50			50	50				
	c. Tersedianya Peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	*paket*	500			100	100				
	e. Tersedianya Peralatan penyelamatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	*unit*	11			5	5				
7	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota							18.066.800			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	*orang*				163	163				
8	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana							-			
	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	*dokumen*				-	-				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
4	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**		50	**50**	**50**			**77.000.000**		**APBD**	**BPBD**
1	Respon Cepat Darurat Bencana							31.000.000			
	a. Tersusunnya Laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	*dokumen*	12			12	12				
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	*dokumen*	2			2	2				
	c. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	*orang*	14			14	14				
2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana							3.000.000			
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas Posko	*paket*	1			1	1				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	Penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)										
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	*dokumen*	3			3	3				
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	*dokumen*	12			12	12				
	d. Tersusunnya Laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	*dokumen*	12			12	12				
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	*dokumen*	2			2	2				
3	Pencarian, Pertolongan dan Evaluaasi Korban Bencana							40.000.000			
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	*paket*	1			1	1				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	b. Tersedianya Sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	*unit*	5			5	5				
	c. Tersedianya Sarana dan prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	*unit*	1			1	1				
	d. Tersedianya Data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	*dokumen*	12			12	12				
	e. Tersusunnya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	*dokumen*	12			12	12				
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	14			14	14				
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi dan pembuatan jalur	*orang*	1			1	1				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)										
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	*orang*	14			13	13				
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota							3.000.000			
	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	*orang*				3	3				

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
5	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**		88					**164.294.700**			
1	Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	*layanan*	29			**50**		**144.294.700**		**APBD**	**DAMKAR**
2	Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	*dokumen*	2			**2**		**-**		**APBD**	**DAMKAR**
3	**3** . Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	*unit*	8			**1**		**10.000.000**		**APBD**	**DAMKAR**
4	Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	*orang*	2			**1**				**APBD**	**DAMKAR**
5	Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan	*layanan*	0			**2**	**-**	**10.000.000**		**APBD**	**DAMKAR**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran										
6	Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	*layanan*	0			**2**	**-**	**-**		**APBD**	**DAMKAR**

- **Urusan Sosial**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	*2*	*3*	*4*	*21*	*22*	*23*	*24*	*25*	*26*	*27*	*28*
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial**		188	**100**	**100**			**253.755.000**		**APBD**	**DINAS SOSIAL P3A**
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	77			100	100	4.000.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	83			50	50	126.000.000			
3	Penyediaan permakanan	Orang	67			100	100	-			
4	Penyediaan sandang	Orang	67			15	15	2.500.000			
5	Penyediaan alat bantu	Orang	15			8	8	10.880.000			
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	10			5	5	-			
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	60			60	60	97.500.000			
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	40			60	60	625			
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	35			5	5	1.250.000			
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	35			5	5	3.500.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	40			10	10	1.250.000			
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	35			10	10	5.000.000			
13	Layanan rujukan	Orang	35			10	10	1.250.000			
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial**	orang	515	**510**	**510**			**1.501.505.000**		**APBD**	**DINAS SOSIAL P3A**
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	515			10	10	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	15			5	5	-			
3	Penyediaan permakanan	Orang	515			500	500	1.375.000.000			
4	Penyediaan sandang	Orang	15			20	20	2.500.000			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	5			5	5	10.880.000			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	15			10	10	-			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
	untuk meningkatkan keberfungsian sosial										
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	10			10	10	97.500.000			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5			3	3	625			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5			0	0	1.250.000			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	3			8	8	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	15			8	8	1.250.000			
12	Layanan rujukan	Orang	5			5	5	5.000.000			
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial**	orang	63	**50**	**50**			**127.755.000**		**APBD**	**DINAS SOSIAL P3A**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	10			10	10	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	45			30	30	126.000.000			
3	Penyediaan permakanan	Orang	10			10	10	-			
4	Penyediaan sandang	Orang	10			10	10	2.500.000			
5	Penyediaan alat bantu	Orang	5			5	5	10.880.000			
6	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	5			5	5	-			
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	10			10	10	97.500.000			
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	5			5	5	625			
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	1			1	1	1.250.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5			5	5	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	7			5	5	1.250.000			
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	10			5	5	5.000.000			
13	Layanan rujukan	Orang	5			5	5	1.250.000			
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial**	orang	30	**20**	**20**			**126.505.000**		**APBD**	**DINAS SOSIAL P3A**
1	Layanan data dan pengaduan	Orang	30			20	20	4.000.000			
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5			5	5	-			
3	Penyediaan permakanan	Orang	25			20	20	-			
4	Penyediaan sandang	Orang	25			20	20	2.500.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	10			10	10	10.880.000			
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	25			20	20	-			
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	25			20	20	97.500.000			
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	1			1	1	625			
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	5			5	5	1.250.000			
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	20			20	20	3.500.000			
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	15			15	15	1.250.000			

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2025	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			
12	Layanan rujukan	Orang	5			5	5	5.000.000			
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota**	orang	4000	**765**	**765**			**231.317.500**		**APBD**	**DINAS SOSIAL P3A**
	Terjadi Bencana										
1	Penyediaan permakanan	Orang	4000			765	765	205.000.000			
2	Penyediaan sandang	Orang	75			75	75	15.000.000			
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	240			100	100	1.500.000			
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	100			25	25	1.817.500			
5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	4000			765	765	8.000.000			


Trenggalek